RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025



KECAMATAN WALENRANG TIMUR
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Walenrang Timur Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan RENJA ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Walenrang Timur dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Disamping berfungsi sebagai dokumen pedoman kerja, RENJA diharapkan dapat menjadi acuan visi, misi dan strategi seluruh Aparat Kecamatan Walenrang Timur dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera dalam nuansa religi.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Walenrang Timur Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih.

Walenrang Timur, Juni 2024

Camat Walenrang Timur

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN WALENRANG TIMUR
L U W U

NANANG IRAWAN,SH

Pangkat : Penata Tk. I

NIP.19760927 200312 1 005

DAFTAR ISI

Teks **Halaman**

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-10
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-12
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-22

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKATDAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Kecamatan Walenrang Timur. III-1
3.3 Program dan Kegiatan III-2

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
5.1 Catatan Penting …… V-1
5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan V-1
5.3 Rencana Tindak Lanjut…….. V-1

DAFTAR TABEL

Nomor tabel	Teks	Halaman
Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Walenrang Timur dan Pencapaian Renstra KecamatanWalenrang Timur Sampai dengan Tahun 2024	II- 4
Tabel II.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Walenrang Timur	II-11
Tabel II.4	Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	II-14
Tabel II.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	II-23
Tabel III.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	III-3
Tabel IV.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran dan dan Rencana Perhitungan Renja Kecamatan Walenrang Timur Tahun 2024	IV-3

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban Pemerintah adalah menciptakan regulasi pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan Undang-Undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut, dibutuhkan suatu Pemerintah yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh Bangsa dan Negara yaitu norma-norma yang terkandung didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai suatu Pemerintah yang bersih dan berwibawa dibutuhkan suatu Sistim Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabilitas, Transparan dan Taat Hukum. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yangselanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Walenrang Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

i. Renja Perangkat Daerahmerupakan dokumen yang secarasubstansial menguraikan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD).
ii. Renja merupakan dokumen dasar penyusunan program kegiatan

OPD/Perangkat Daerahkedalam KUA dan PPAS serta penyusunan dan perencanaan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun2025.

iii. Renja Perangkat Daerahjuga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah, pada tahun 2025 ini merupakan tahun pertamapelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis(Renstra).

Mendukung terwujudnya *good governance*,dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (PD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Lumajang membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, *dan* Evalusi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Lumajang menyusun Dokumen Renja 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerjamerupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah –Langkah yang Akan dating tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak Masyarakat dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Kecamatan Walenrang Timur menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan,penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.Oleh karena itu penyusunan rancangan RenjaPerangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan RenjaPerangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan renja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2025 yang memuat arah kebijakan Pemerintah dalam satutahun.

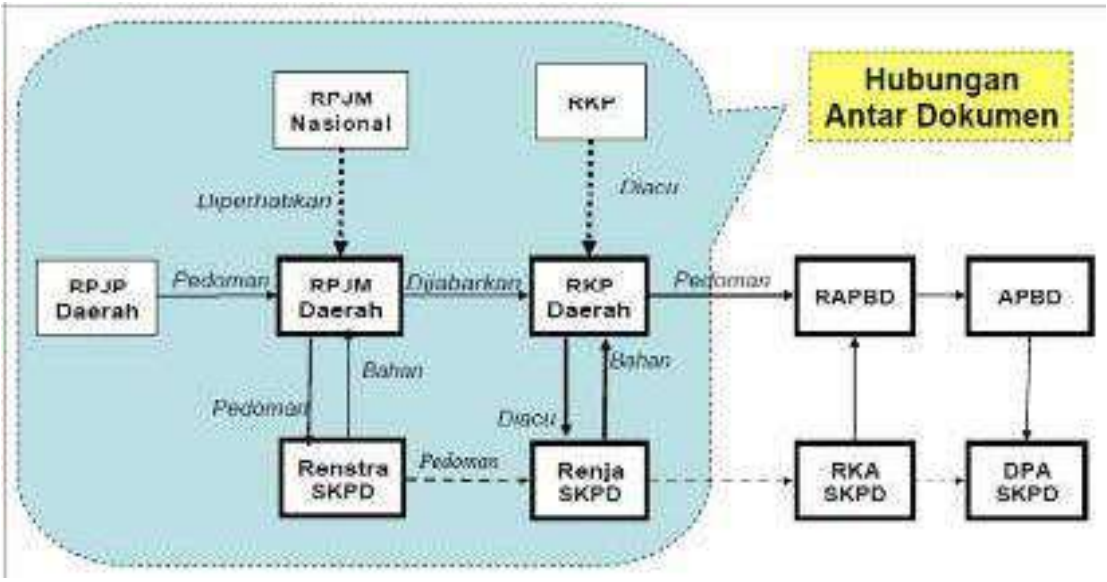
1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerahyang merupakan rencana pembangunan jangka waktu tiga tahun. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan

terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 1.2.

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahaun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerimaan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.Tahun 2023 Nomor 13)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);

1.3. Maksud danTujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Kecamatan Walenrang Timur Tahun 2025 adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan dan menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan pada tahun 2024.

.

1.3.2. Tujuan

Renja Kecamatan Walenrang Timur Tahun 2025 disusun dengan tujuan :

a. Sebagai dokumen penjabaran RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025.

b. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Walenrang Timur Tahun Anggaran 2025.

c. Sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Tujuan pembangunan kecamatan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum untuk satu tahun ke depan dan menetapka ntujuan yaitu Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.

1.4. SistematikaPenulisan

Renja Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BABI. PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

Walenrang Timur, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bagian Pendahuluan memuat informasi tentang :

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Walenrang Timur, Proses Penyusunan Renja Kecamatan Walenrang Timur, keterkaitan antara Renja Kecamatan Walenrang Timur dengan dokumen RKPD, Perubahan RENSTRA, Renja Propinsi/Kabupaten serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Walenrang Timur.

- **BABII. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bagian yaitu :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Perubahan Renstra Kecamatan Walenrang Timur.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan Walenrang Timur.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Walenrang Timur.

2.4 Rivew terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan Rencana Kerja perangkat Kecamatan Walenrang Timur. Bab ini terdiri dari beberapa sub bagian yaitu :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Walenrang Timur.

3.3 Program dan Kegiatan.

- **BABIV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

- **BAB V. PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian didalam pelaksanaan Renja dan rencana tindak lanjutnya.

BAB. II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN WALENRANG TIMUR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Walenrang Timur Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2024

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Walenrang Timur tahun lalu, dan realisasi Perubahan Renstra Kecamatan Walenrang Timur

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Walenrang Timur dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Walenrang Timur.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

     Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

     - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
     - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
     - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

     Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administras Keuangan Perangkat Daerah adalah :

     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
     - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
     - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah :

  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Administrasi Umum Perangkat Daerah.

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Bacaan da Peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Penyediaan Bahan Logistik
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
   Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraa Pemerintahan Dan Pelayanan Publik adalah :

   - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

     Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan adalah :
     - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :
  - Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

BAB. II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN WALENRANG TIMUR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Walenrang Timur Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2024

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Walenrang Timur tahun lalu, dan realisasi Perubahan Renstra Kecamatan Walenrang Timur

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Walenrang Timur dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Walenrang Timur.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

4. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administras Keuangan Perangkat Daerah adalah :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan da Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyediaan Bahan Logistik
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik adalah :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan adalah :

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :

- Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyaraka

7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

- Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program-program yang ditetapkan telah mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Perkiraan Realisasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun 2024, tertera pada table II.1.

TABEL II.1

PERKIRAAN REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

KECAMATAN WALENRANG TIMUR

NO.		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp..)	REALISASI ANGGARAN (Rp..)	REALISASI ANGGARAN (%)
1		2	3	4	5
01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**1.817.157.528**	**1,728,240,846**	**95,11%**
	01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2,060,000**	**2,060,000**	**100%**
		Penyusunan Dokomen Perencanaan Perangkat Daerah	850,000	850,000	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0.00	0%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	275,000	275.000	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0.00	0.00	0%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	275,000	275,000	100%

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	660.000	660.000	100%
	02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.586.805.217**	**1,498.736.776**	**81,85%**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.533.165.217	1.445.096.776	81,21%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.640,000	53.640.000	100%
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0.00	0,00	0%
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	0.00	0%
	03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6,000,000**	**6,000,000**	**100%**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,000,000	6,000,000	100%
	04	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**98.160.261**	**97.369.650**	**99,19%**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	2.363.900	2.360.000	99,83%
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	-	-	
		Penyediaan Bahan Logistik	2.237.050	2.230.750	99,99%
		Penyediaan Bahan /Material	23.714.611	22.951.500	96,78%

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.234.700	3.234.400	99,94%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	2.400,000	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.210.000	64.195.000	99,97%
	05	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**35.291.800**	**35.291.400**	**99,98%**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	6.000,000	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.891.800	2.891.400	99,97%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.400.000	26,400,000	100%
	06	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.507.750**	**20.450.520**	**99,72%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.507.750	20.450.520	99,72%
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	**-**
02		**PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**4.232.500**	**4.232.500**	**100%**
	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	4.232.500	4.232.500	100%

		dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait			
05		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**59.000.000**	**59.000.000**	100%
	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	59.000.000	59.000.000	100%
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	59.000.000	59.000.000	100%
06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**5,100,000**	**5,100,000**	**100%**
	01	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,100,000	5,100,000	100%
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	100%
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5,100,000	5,100,000	100%
		Jumlah	**1.817.157.528**	**1,728,240,846**	**95,11%**

Tabel II.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
Kecamatan Walenrang Timur dan Pencapaian Renstra Kecamatan Walenrang Timur sampai dengan Tahun 2024
Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu, Kecamatan Walenrang Timur

Perangkat Daerah : Kecamatan Walenrang Timur

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG TIMUR s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7						**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**									
7	**01**					**Administrasi Pemerintahan**									
7	**01**	**21**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100%**	**100%**	**100%**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG TIMUR s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**21**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100%**	**100%**	**100%**
7	01	21	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	8	0	0	0	0	2	2	25%
7	01	21	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	4	0	0	0	0	1	1	25%
7	01	21	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	4	0	0	0	0	1	1	25%
7	01	21	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	4	0	0	0	0	1	1	25%
7	01	21	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	4	0	0	0	0	1	1	25%
7	01	21	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Kinerja PD yang disusun	19	0	0	0	0	4	4	21,05%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG TIMUR s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**21**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	105	0	0	0	0	21	21	25%
7	01	21	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi	320	0	0	0	0	80	80	25%
7	**01**	**21**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	8	0	0	0	0	2	2	25%
7	**01**	**21**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pemenuhan administrasi perkantoran**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100%**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG TIMUR s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	21	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20	0	0	0	0	5	5	25%
7	01	21	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	4	0	0	0	0	1	1	25%
7	01	21	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan Material kantor yang disediakan	145	0	0	0	0	37	37	25,52%
7	01	21	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	863	0	0	0	0	166	166	19,24%
7	**01**	**21**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemenuhan administrasi perkantoran**	**100**	0	0	0	0	100	100	100%
7	01	21	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	1200	0	0	0	0	300	300	25%
7	01	21	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	48	**0**	**0**	**0**	**0**	12	**12**	**25%**
7	01	21	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	384	0	0	0	**0**	96	96	25%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG TIMUR s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**21**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	6	0	0	0	0	6	6	100%
7	01	21	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	3	0	0	0	0	3	3	100%
7	**01**	**21**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**Presentase Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100%**
7	**01**	**21**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100%**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG TIMUR s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	21	03	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	0	0	0	0	1	1	25%
7	**01**	**21**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Presentase pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	0	0	0	0	**100**	**100**	**100%**
7	**01**	**21**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan pelaksanaan koordinasi dalam rupaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	04	2.01	01	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	0	0	0	0	1	1	100%
7	01	21	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1800	0	0	0	0	1800	1800	100%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG TIMUR s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**21**	**06**			**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Presentase penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100**	0	0	0	0	**100**	**100**	**100%**
7	**01**	**21**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100**	0	0	0	0	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	06	2.01	03	Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8	0	0	0	0	8	8	100%
7	01	21	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	0	0	0	0	8	8	100%

BAB. II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN WALENRANG TIMUR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Walenrang Timur Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2023

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Walenrang Timur tahun lalu, dan realisasi Perubahan Renstra Kecamatan Walenrang Timur mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Walenrang Timur dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Walenrang Timur.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

8. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

  - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah :

  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Administrasi Umum Perangkat Daerah.

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik
  - Penyediaan Bahan Bacaan da Peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

9. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

   Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik adalah :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan adalah :

  - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

10. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :

  - Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

11. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

- Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

  - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja pada tahun 2023, tertera pada table II.1

Tabel II. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
Kecamatan Walenrang Timur dan Pencapaian Renstra Kecamatan Walenrang Timur sampai dengan Tahun 2023
Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu, Kecamatan Walenrang Timur

Perangkat Daerah : Kecamatan Walenrang Timur

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG TIMUR s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7						**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**									
7	**01**					**Administrasi Pemerintahan**									
7	**01**	**21**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**
7	**01**	**21**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**
7	01	21	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	8	2	2	2	100%	2	6	75%
7	01	21	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	4	1	1	1	100%	0	2	50%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG TIMUR s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	21	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	4	1	1	1	100%	0	2	50%
7	01	21	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	4	1	1	1	100%	0	2	50%
7	01	21	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	4	0	1	1	100%	0	2	50%
7	01	21	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	19	4	4	4	100%	4	12	63,16%
7	**01**	**21**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	1824	456	420	420	100%	396	1.272	69,74%
7	01	21	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1(satu) tahun	300	72	72	72	100%	48	192	64%
7	01	21	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4	0	1	1	100%	1	2	50%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG TIMUR s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	21	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	4	0	1	1	100	1	2	50%
7	**01**	**21**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	8	2	2	2	100%	2	6	75%
7	**01**	**21**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pemenuhan administrasi perkantoran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	5	5	5	100%	5	20	75%
7	01	21	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	35	7	7	7	100%	7	28	75%
7	01	21	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dalam 1 (Satu) Tahun	48	12	12	12	100%	12	36	75%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG TIMUR s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	21	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	48	12	12	12	100%	12	36	75%
7	01	21	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan Perkantoran dalam 1 (Satu) Tahun	48	12	12	12	100%	12	36	75%
7	01	21	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	863	166	120	107	89,17%	232	505	58,52%
7	**01**	**21**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyedia Jasa Surat Menyurat yang disediakan	5	1	1	1	100%	1	3	66,6%
7	01	21	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	48	12	12	12	100%	12	36	75%
7	01	21	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	25	5	5	4	100%	5	19	76%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG TIMUR s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**21**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	6	6	6	6	100	6	6	100%
7	**01**	**21**	**02**			**Proogram Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	**01**	**21**	**02**	**2.01**		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Ting kat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	03	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	1	100	100	1	1	100%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG TIMUR s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TIMUR TAHUN (n-2) 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**21**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100%**
7	**01**	**21**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rupaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100%**
7	01	21	04	2.01	01	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	1	0	0	0	0	1	100%
7	01	21	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1800	1800	0	0	0	0	1800	100%
7	**01**	**21**	**06**			**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100**	0	100	100	100	**100**	**100**	**100%**
7	**01**	**21**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100**	0	100	100	100	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	06	2.01	03	Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	8	8	8	8	100	8	8	100%
7	01	21	06	2.01	05	Fasiltasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	8	8	8	100	8	8	100%

Meskipun kegiatan-kegiatan yang ditetapkan telah mencapai target sesuai dengan yang direncanakan namun ada 3 (tiga) masalah pokok yang perlu ditingkatkan agar kinerja pelayanan Aparat Kecamatan dapat lebih dimaksimalkan serta pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Masalah tersebut adalah :

- Gedung kantor serta fasilitasnya (meja, computer, motor dinas dan kursi) tidak mencukupi.
- Dana untuk peningkatan mutu aparat (pelatihan) tidak mencukupi.
- Dana operasional untuk kegiatan penguluhan serta monitoring dan evaluasi yang masih sangat rendah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2014-2019) di Kecamatan Walenrang Timur belum disusun Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Walenrang Timur, sehingga belum ada Indikator yang akan kita gunakan sebagai dasar didalam Analisis Kinerja Pelayanan. Untuk memudahkan analisis kinerja pelayanan Tahun Anggaran 2014-2019, maka kita menggunakan Indikator Pelayanan pada Tahun Anggaran 2019-2024. Penilaian terhadap indikator didasarkan pada hasil wawancara terhadap masyarakat yang dilayani dan ketersediaan laporan-laporan berupa adminitasi keuangan, LPPD, dan Perubahan RENSTRA. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat Daerah Kecamatan Walenrang Timur, tertera pada tabel II.2.

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Walenrang Timur

Kabupaten Luwu

NO.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				CAPAIAN REALISASI %		PROYEKSI %		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13
1	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	Target Terpenuhi
2	Nilai SAKIP Kecamatan Walenrang Timur			B	B	B	B	B	B	B	BB	B (baik)
3	Nilai IKM atas Pelayanan Aparat Kecamatan			86%	87%	87%	88%	85%	87%	87%	88%	BB (sangat baik).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mencapai sinergitas didalam pelaksanaan pembangunan, maka ada 2 (dua) hal yang sangat menentukan yaitu musyawarah perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta konsistensi Pemerintah terhadap hasil keputusan bersama. Keputusan itu menjadi landasan didalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Desa.

Ada beberapa tantangan dan peluang yang kita hadapi didalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan yang nampak didalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Walenrang Timur adalah :

- Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan.
- Rendahnya kualitas SDM Aparatur dalam menghadapi perkembangan IPTEK yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat sehari hari.
- Kurangnya tingkat kesadaran dan Disiplin Pegawai untuk menunjang Kinerja Pemerintahan.
- Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sehingga Pemerintah Kecamatan tidak mendapat informasi yang akurat tentang kegiatan tersebut sehingga menyulitkan didalam proses pengawasan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Semakin berkurangnya semangat atau budaya gotong royong Masyarakat sehingga sangat menyulitkan didalam penyelesaian suatu permasalahan di Desa/Kelurahan.

Untuk menetralisir masalah tersebut terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Peluang- peluang tersebut adalah :

- Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, merupakan peluang dalam rangka peningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.
- Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang mengatur

tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

- Perkembangan teknologi informasi yang membuka peluang bagi masyarakat Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupannya.
- Prioritas Pembangunan Nasional yang mengutamakan pembangunan daerah pinggiran atau daerah pedesaan.

Diantara beberapa tantangan dan hambatan serta peluang, ada beberapa tantangan yang harus sesegera mungkin diantisipasi (isu yang strategis) agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan atau dapat berjalan dengan baik. Isu-isu tersebut adalah :

- Sumberdaya aparatur (kualitas dan kuantitas aparatur) masih rendah, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan tugas, pengawasan pembangunan dan penguasaan teknologi.
- Belum optimalnya peran serta masyarakat didalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Pemerintah serta pembangunan swadaya yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- Masih rendahnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang hukum.

Ketiga permasalahan ini sangat membutuhkan prioritas penyelesaian agar pelayanan kepada masyarakat serta kemampuan Aparat Kecamatan Walenrang Timur di dalam bidang perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dapat ditingkatkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil Analisis Kebutuhan pada Tahun 2024. Dengan ditetapkannya Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024 maka beberapa program yang ada dalam Rancangan Awal RKPD mengalami perubahan Nomenklatur. Rivew terhadap Rancangan Awal RKPD pada Tahun Anggaran 2024 tertera pada table II.3.

Tabel II.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kecamatan Walenrang Timur

No		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1		2	3	4		5	6	7	8		9	10
01		**Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Luwu**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**		**1.666.666.950**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**	**Kab. Luwu**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran.**		**1.672.834.950**	
	01	**Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**		**2.550.000**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Cakupan Ketersedian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat.**		**2.550.000**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun		800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun		800.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun		250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun		250.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		250.000	

No		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1		2	3	4		5	6	7	8		9	10
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		250.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		250.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun		250.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun		250.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)		750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah dokumen evaluasi Kinerja PD yang disusun		750.000	
	02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**Kab. Luwu**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**		**1.495.929.660**,	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**Kab. Luwu**	**Presentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu**		**1.495.929.660**,	**Anggaran kegiatan ini berkurang karena adanya pengurangan anggran beban belanja pada sub kegiatan.**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan		1.443.249.660	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan		1.443.249.660	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1(satu) tahun		52.680.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dalam 1 Tahun		52.680.000	Anggaran pada Sub kegiatan ini berkurang karena adanya pengurangan beban belanja

No		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1		2	3	4		5	6	7	8		9	10
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun		0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun		0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun		0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun		0	
	03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD**		**6.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD**		**6.000.000**	**Anggaran pada kegiatan ini bertambah karena adanya penambahan Beban Belanja**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah		6.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu	Laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah		6.000.000	Anggaran pada sub kegiatan ini bertambah karena adanya penambahan Beban Belanja
	04	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Cakupan pemenuhan administrasi perkantoran**		86.893.100	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Cakupan pemenuhan administrasi perkantoran**		**93.061.100**	**Anggaran pada kegiatan ini bertambah karena adanya penambahan Beban Belanja**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		2.521.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		2.521.600	

No		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1		2	3	4		5	6	7	8		9	10
		Penyediaan Bahan Logistik	Kab. Luwu	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan		2.777.350	Penyediaan Bahan Logistik	Kab. Luwu	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan		2.777.350	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Luwu	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dalam 1 (Satu) Tahun		4.475.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Luwu	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dalam 1 (Satu) Tahun		4.475.500	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun		2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan		2.400.000	
		Penyediaan Bahan/Material	Kab. Luwu	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan Perkantoran dalam 1 (Satu) Tahun		24.362.650	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Luwu	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan Perkantoran dalam 1 (Satu) Tahun		19.591.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan /diikuti		50.356.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan /diikuti		57.065.000	Anggaran pada Sub kegiatan ini bertambah karena adanya penambahan beban belanja
	05	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Luwu**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**		**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Luwu**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**		**0**	

No		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1		2	3	4		5	6	7	8		9	10
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan		0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan		0	
	06	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	**Kab. Luwu**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**		**37.800.140**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	**Kab. Luwu**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**		**37.800.140**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ka. Luwu	Jumlah Penyedia Jasa Surat Menyurat yang disediakan		6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ka. Luwu	Jumlah Penyedia Jasa Surat Menyurat yang disediakan		6.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik		3.000.140	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik		3.000.140	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		28.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		28.800.000	
	07	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah.**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**37.494.050**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah.**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**37.494.050**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan		37.494.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan		37.494.050	

No		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1		2	3	4		5	6	7	8		9	10
02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Luwu**	**Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**		**4.800.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Luwu**	**Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**		**4.800.000**	
	01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**		**4.800.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**		**4.800.000**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan di Kecamatan		4.800.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan di Kecamatan		4.800.000	
04		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Luwu**	**Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**		**0**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Luwu**	**Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**		**0**	
	01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Luwu**	**Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rupaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**		**0**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Luwu**	**Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rupaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**		**0**	

No		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1		2	3	4		5	6	7	8		9	10
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Luwu	Jumlah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang diberikan Insentif		0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Luwu	Jumlah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang diberikan Insentif		0	
05		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan**		**0**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan**		**0**	
	01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kab. Luwu**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah**		**0**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kab. Luwu**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah**		**0**	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Luwu	Jumlah Pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Luwu	Jumlah Pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0	
06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**		**8.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**		**8.000.000**	

No		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1		2	3	4		5	6	7	8		9	10
	01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Luwu**	**Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**		**8.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Luwu**	**Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**		**8.000.000**	
		Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Luwu	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		4.000.000	Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Luwu	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		4.000.000	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Luwu	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		4.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Luwu	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		4.000.000	
JUMLAH						**1.679.466.950**					**1.685.634.950**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penetapan program-program yang akan dilaksanakan didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang dihasilkan melalui kesepakatan di dalam Musrenbang tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Penetapan kegiatan ini didasarkan pada kebutuhan pokok masyarakat dengan mempertimbangkan isu – isu strategis didalam masyarakat. Usulan program dan kegiatan yang direncakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 tertera pada table II.4.

Tabel II.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kecamatan Walenrang Timur

Kecamatan : Walenrang Timur
Kabupaten : Luwu
Tahun : 2024

No.	Kegiatan	Lokasi Desa	Volume	Keterangan	
				Kesesuaian Dengan Prioritas Daerah Ke...	Status Usulan
1	2	3	4	5	6
LAMASI PANTAI					
1	Pengaspalan Jalan	Desa Lamasi Pantai	5 Km	1	0
2	Pembangunan Rabat Beton	Desa Lamasi Pantai	2 Km	2	0
3	Pembangunan Talud/Drainase	Desa Lamasi Pantai	4 Km	3	0
4	Pembukaan Jalan Baru	Desa Lamasi Pantai	3 Km	4	0
5	Pembangunan Jembatan Gantung	Desa Lamasi Pantai	1 Unit	5	0
6	Tanggul	Desa Lamasi Pantai	2 Km	6	0

TANETE					
1	**Dinas Kesehatan**				

	> Rehabilitasi/Renovasi Pustu	Dusun Fajar	1 Unit		0
2	**Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**				
	> Pembangunan / Rehabilitasi Jembatan Beton	Batas Desa Tanete dan Desa Pangalli	1 Unit		
	> Pembangunan / Rehabilitasi Jembatan Beton	Batas Dusun Fajar dan Dusun Tanete	1 Unit		
	> Pengaspalan Jalan	Desa Tanete yang menghubungkan Desa Barammamase tembusan ke jembatan miring	2000 M		0
	> Pemasangan Bronjong	Dusun Fajar Baru dan Dusun Lempe Rante	200 M		0
	> Pembangunan Drainase	Dusun Fajar,Dusun Bure, dusun Karya Bakti dan Dusun Tanete	2200 M		0
	> Pembangunan/Rehabilitasi Plat Duiker	Dusun Tanete, Dusun Karya bakti dan Dusun Bure	3 Unit		1
	> Normalisasi Sungai	Dusun Fajar dan Dusun Fajar Baru	4000 M		1
	> Pembangunan Rabat Beton	Desa Tanete	1000 M		1
	> Peningkatan/Pengkerikilan Jalan	Desa Tanete	2500 M		1
	> Peningkatan/Perkerasan Jalan	Dusun Bure dan Dusun Tanete dan dusun Fajar Baru	1000 M		0
3	**Dinas pertanian**				
	> Pembangunan Jaringan irigasi Tersier Persawahan	Dusun Tanete	1000 M		0

	> Pengadaan Alat/Mesin Hand Traktor	Desa Tanete	1 Unit		0
	> Pengadaan Alat/Mesin Combine	Desa Tanete	1 Unit		0
	> Pengadaan benih/Bibit tanaman Pangan	Desa Tanete	14 Kelompok Tani		0
	> Pengadaan Pembasmi Hama Pestisida	Desa Tanete	14 Kelompok Tani		
4	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman**				
	> Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Tanete	30 Unit		0
5	**Dinas Sosial**				
	> Bantuan Penyelesaian Study	Desa Tanete	5 Orang		1
	> Fasilitasi Bantuan Sembako/BPNT				1
6	**Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi**				
	> Pelatihan Menjahit	Desa Tanete			1
7	**Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**				
	> Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN.97 Bure Tanete	Dusun Lempe Rante	3 Unit		0
	> Pembangunan Pagar Sekolah SMPN. 1 Tanete	Dusun Fajar	400 M		0
8	**Dinas Kepemudaan Dan olahraga**				

	> Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Dusun Fajar	1 Unit		0
9	**Dinas Perhubungan**				
	> Pengadaan Lampu Jalan Kabupaten	Desa Tanete	30 Unit		0
10	**Dinas Perdagangan**				
	> Pembangunan Pasar Rakyat	Dusun Fajar	1 Unit		1
11	**Dinas Koperasi,UMKM Dan Perindustrian**				
	> Bantuan Keuangan Usaha Mikro,Kecil,Menengah (UMKM)	Desa Tanete			1

RANTAI DAMAI					
1	Pembangunan Rabat Beton	Dusun Taman	500 M		
2	Rabat Beton	Dusun Markap, Lempona, Taman	1000 M		
3	Pengaspalan Jalan	Desa Rantai Damai-Suka Damai	350 M		
4	Pengaspalan Jalan	Desa Rantai Damai-Kendekan	600 Meter		
5	Penimbunan Badan/Bahu Jalan	Dusun Pal, Lempona, Taman, Tana Lobo	800 Meter		
6	Pembangunan Plat Duiker	Desa Rantai Damai	2 Unit		
7	Pembangunan Talud	Batas Desa R.Damai-Pangalli	900 M		
8	Pembangunan Drainase	Dusun Taman, Markap, Lempona, Tana Lobo	800 M		
9	Pembangunan Sarana Air Bersih	Desa Rantai Damai	2 Unit		
10	Normalisasi Jalan Tani	Dusun Taman, Tana Lobo	2000 M		

11	Talud Jalan Tani	Dusun Taman, Tana Lobo	600 M		
12	Drainase Jalan Tani	Dusun Taman	700 M		
13	Pengerasan/Pengkrikilan Jalan Tani	Dusun Taman, Tana Lobo	1200 M		
14	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Desa Rantai Damai	500 M		
15	Pengadaan Hand Tracktor	Kelompom Tani Tana Lobo	2 Unit		
16	Pengadaan Combine	Desa Rantai Damai	1 Unit		
17	Pengadaan Mesin Penggiling Padi	Desa Rantai Damai	1 Unit		
18	Pengadaan Pembasmi Hama Pestisida	Desa Rantai Damai	15 Kelompok Tani		
19	Perbaikan Pintu Air Irigasi	Dusun Taman	BL 15		
20	Pelatihan Kelompok Tani	Desa Rantai Damai	15 Kelompok Tani		
21	Bantuan Pupuk Untuk Kelompok Tani	Desa Rantai Damai			
22	Pengadaan Benih Unggul Padi	Desa Rantai Damai	15 Kelompok Tani		
23	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Dusun Taman	1 Paket		
24					
25	1. Rehabilitasi Pustu 2. Pagar Pustu	Dusun Taman	1 Kamar Bersalin 2. 150 Meter		

26	Makanan Tambahan Gizi ibu hamil dan Balita	Desa Rantai Damai			
27	Pembagunan Jamban Sehat Masyarakat Miskin	Desa Rantai Damai	10 Unit		
28	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Rantai Damai	20 Unit		
29	Rehabilitasi Lapangan Volley dan Takrow	Dusun Taman	2 Unit		
30	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola/Futsal	Dusun Taman	1 unit		
31	Pembangunan Drainase 90 M	Dusun Taman	90 Meter		
32	Pembagunan Taman Bermain	Dusun Taman	1 Unit		
33	Pembangunan Joging Treak Lapangan	Dusun Taman	480 Meter		
34	Pengadaan Tiang dan lampu Jalan/Lampu Tenaga Surya	Desa Rantai Damai	20 Titik		
35	Pengadaan Bibit Ikan Lele dan Ikan Mas	Desa Rantai Damai	4000 Ekor		
36	Bak Sampah dan Pengahancur Sampah	Dusun Markap	1 Unit		
37	Kendaraan Pengangkut Sampah	Dusun Taman	1 Mobil		
38	Pengadaan Tempat sampah setiap Lorong/Dusun	Desa Rantai Damai	Unit		
39	Pengadaan Mobil Sampah	Desa Rantai Damai	1 Unit		
40	Pengadaan Sertifikat Prona (PTSL)	Desa Rantai Damai	500 Persil		
41	Renovasi Pasar Desa (Pembagunan Los-Los Pasar) Desa Rantai Damai	Dusun Markap	Los		

42	Renovasi Gedung Serba Guna Desa Rantai Damai	Dusun Taman	1 Unit		
43	Pengadaan Air Bersih	Desa Rantai Damai	500 KK		
44	Pengadaan Poskamling	Desa Rantai Damai	5 Unit		
45	Pelatihan dan Pengadaan Mesin Jahid	Desa Rantai Damai	10 Mesin Jahid		
46	Pelatihan (Tata Boga, Las, Listrik, Mengemudi, Bengkel Dll)	Desa Rantai Damai	40 Orang		

TABAH					
I	**PUPR (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)**				
1	Pengaspalan jalan	DESA TABAH	6 Km		DESA
2	Rabat Beton	DESA TABAH	8 Km		DESA
3	Penimbunan Lapangan	DESA TABAH	1 unit		DESA
4	Penahan dinding (buronjong)	DESA TABAH	200 m		DESA
5	jembatan Penghubung Jalan di Dusun Poringan,PadangLempang	DESA TABAH	3 Unit		DESA
6	Pengersan Jalan	DESA TABAH	5 km		DESA
7	Pembuatan Jalan Tani	DESA TABAH	5 Km		DESA
8	Saluran Irigasi	DESA TABAH	2 Km		DESA
9	Talud	DESA TABAH	2 Km		DESA
10	Drainase	DESA TABAH	2 Km		DESA
11	Normalisasi Sungai	DESA TABAH	1 Paket		DESA
II	**DINAS PERKIM (Dinas Perumahan dan Pemukiman)**				

1	Penerangan Lampu Jalan	DESA TABAH	200 Unit		DESA
2	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni	DESA TABAH	50 unit		DESA
III	**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**				
1	Pengadaan Gonder	DESA TABAH	1 unit		DESA
2	Pengadaan Combain	DESA TABAH	1 unit		DESA
3	pengadaan Hand Tractor	DESA TABAH	1 unit		DESA
4	Pengadaan Hewan Ternak (Sapi,Kambing,Ikan,Bebek,Ayam)	DESA TABAH	70 Paket		DESA
5	Pengadaan Bantuan Bibit,Pupuk,	DESA TABAH	1 Paket		DESA
IV	**DINAS KETENAGA KERJAAN**				
1	Pengadaan Mesin Las	DESA TABAH	1 Paket		DESA
2	Pengadaan Mesin Jahit	DESA TABAH	5 unit		DESA
3	Bantuan Pelatihan Menjahit,Las, Tata Rias, Komputer, Bengkel	DESA TABAH	1 Paket		DESA
4	Pengadaan Alat Mesin Pertukangan	DESA TABAH	1 Paket		DESA
V	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**				
1	Pembangunan Jamban SDN 99 Pongrakka	DESA TABAH	1 Paket		DESA
2	Pengadaan Sarana Bermain PAUD	DESA TABAH	1 Paket		DESA
VI	**DINAS SOSIAL**				
1	Bantuan Rumah ibadah	DESA TABAH	1 paket		DESA
2	Pembangun kantor Desa	DESA TABAH	1 paket		DESA

3	Pengadaan Mobil Dinas Dan Mobil Sampa	DESA TABAH	1 paket		DESA
4	Pembangunan Pagar Kantor Desa	DESA TABAH	1 paket		DESA
5	Pembangunan Poskamling	DESA TABAH	2 Unit		DESA
6	Pengadaan Motor Dinas	DESA TABAH	1 Unit		DESA
7	Gedung TPQ (Taman Pendidikan Alquraan)	DESA TABAH	1 Unit		DESA
8	Pemberian Bantuan Bagi MahaSiswa Yang Kurang Mampu	DESA TABAH	1 Paket		DESA
9	Bantuan Pembangunan Gedung posyandu	DESA TABAH	1 Unit		DESA

KENDEKAN					
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
	Pembangunan Tribun Lapangan	Dusun Tunas Baru, Kab. Luwu	1 unit		Validasi Mitra Bappeda
2	DINAS KESEHATAN				
	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (PUSTU)	Dusun Polo Padang, Kab. Luwu	1 unit		Validasi Mitra Bappeda
	Pengadaan Mobil Ambulance	Dusun Polo Padang, Kab. Luwu	1 unit		Validasi Mitra Bappeda
	Pembangunan Pagar Pustu	Dusun Pollopadang, Kab. Luwu	1 paket		Validasi Mitra Bappeda
3	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI				Validasi Mitra Bappeda

	Pelatihan Menjahit	Desa Kendekan, Kab. Luwu	1 kegiatan		Validasi Mitra Bappeda
	Pengadaan Mesin Jahit	Desa Kendekan, Kab. Luwu	50 unit		Validasi Mitra Bappeda
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Pekerjaan Galian/Penormalan Sungai	Desa Kendekan, Kab.Luwu			Validasi Mitra Bappeda
	Perbaikan Jaringan Irigasi	Desa Kendekan, Kab. Luwu			Validasi Mitra Bappeda
	Pengaspalan Jalan	Desa Kendekan, Kab. Luwu	10.000 m		Validasi Mitra Bappeda
	Peningkatan/Pengkrikilan Jalan	Desa Kendekan, Kab. Luwu	2600 m		Validasi Mitra Bappeda
	Rehabilitasi Kantor Instansi Pemerintah	Dusun Polo Padang, Kab. Luwu	1 unit		Validasi Mitra Bappeda
	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Beton	Dusun Balla dan Kalo Bani	15000 m		Validasi Mitra Bappeda
	Pembangunan Rabat Beton	Dusun Polo Padang, Kab. Luwu	5000 m		Validasi Mitra Bappeda
	Pembangunan Bronjong	Desa Kendekan, Kab. Luwu	8000 m		Validasi Mitra Bappeda
	Pembangunan Talud	Desa Kendekan, Kab. Luwu	8000 m		Validasi Mitra Bappeda
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Pembangunan Ruang Guru	SDN 445 POLLO PADANG,Kab Luwu	1 unit		Validasi Mitra Bappeda
	Pembangunan Ruang UKS	SDN 445 POLLO PADANG,Kab Luwu	1 unit		Validasi Mitra Bappeda
	Pembangunan Toilet (Jamban SD)	SDN 445 POLLO PADANG,Kab Luwu	1 unit		Validasi Mitra Bappeda
	Pembangunan Pagar Sekolah SD	SDN 445 POLLO PADANG,Kab Luwu	1 Paket		Validasi Mitra Bappeda
	Pembangunan Mushallah Sekolah SD	SDN 445 POLLO PADANG,Kab Luwu	1 unit		Validasi Mitra Bappeda

	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD	SDN 445 POLLO PADANG,Kab Luwu	1 unit		Validasi Mitra Bappeda
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas SMP/Sederajat	Dusun Polo Padang, SMPN SATAP POLOPADANG, Kab. Luwu	3 unit		Validasi Mitra Bappeda
	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SMP	Dusun Polo Padang SMPN SATAP POLOPADANG, Kab. Luwu	1 unit		Validasi Mitra Bappeda
	Pembangunan Ruang UKS	Dusun Polo Padang SMPN SATAP POLOPADANG, Kab. Luwu	1 unit		Validasi Mitra Bappeda
	Pembangunan Toilet (Jamban SMP)	Dusun Polo Padang SMPN SATAP POLOPADANG, Kab. Luwu	1 unit		Validasi Mitra Bappeda
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP	Dusun Polo Padang SMPN SATAP POLOPADANG, Kab. Luwu	1 unit		Validasi Mitra Bappeda
6	DINAS PERHUBUNGAN				
	Pengadaan Lampu Jalan Kabupaten	Desa Kendekan, Kab. Luwu	40 unit		Validasi Mitra Bappeda
7	DINAS PERTANIAN				
	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Persawahan	Desa Kendekan, Kab. Luwu	4000 m		Validasi Mitra Bappeda
	Pengadaan Pompa Air Persawahan	Desa Kendekan, Kab. Luwu	8 unit		Validasi Mitra Bappeda
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian	Desa Kendekan, Kab. Luwu	3000 m		Validasi Mitra Bappeda
	Pengadaan Benih Padi	Desa Kendekan, Kab. Luwu	1 paket		Validasi Mitra Bappeda
	Pengadaan Pupuk Tanaman	Desa Kendekan, Kab. Luwu	12 Klp		Validasi Mitra Bappeda

8	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Kendekan, Kab. Luwu	35 Unit		Validasi Mitra Bappeda
9	DINAS SOSIAL				
	Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu (BPJS)	Desa Kendekan, Kab. Luwu	200 Jiwa		Validasi Mitra Bappeda
	Pemberian bantuan Penyelesaian study bagi	Desa Kendekan, Kab.Luwu	30 Jiwa		Validasi Mitra Bappeda
	Mahasiswa Kurang mampu				

PANGALLI					
1	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
	1. Pengaspalan Jalan	Desa Pangalli	5000 Meter		
	2. Pelebaran Jalan	Dusun Bajo, Dusun Uraso	2000 Meter		
	3. Pekerjaan Galian/Penormalan Sungai	Desa Pangalli	5000 Meter		
	4. Perbaikan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Dusun Bajo, Dusun Uraso, Dusun Kampung Baru	1000 Meter		
	5. Peningkatan/Pengkrikilan Jalan	Desa Pangalli	1000 Meter		
	6. Pembangunan Rabat Beton	Desa Pangalli	1000 Meter		
	7. Peningkatan Drainase	Desa Pangalli	500 Meter		
	8. Pembangunan Plat Deucker	Desa Pangalli	3 Lokasi		
	9. Peningkatan Jaringan Irigasi	Desa Pangalli	500 Meter		

	10. Pemasangan Bronjong	Sungai Pangalli	1000 Meter		
	11. Rehabilitasi Gedung Kantor	Dusun Bajo	1 Unit		
	12. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder	Desa Pangalli	1000 Meter		
	13. Pembangunan Jaringan Irigasi	Desa Pangalli	1000 Meter		
	14. Pembangunan Drainase	Desa Pangalli	1000 Meter		
	15. Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Beton	Desa Pangalli	2 Lokasi		
2	**Dinas Pertanian**				
	1. Pengadaan Benih Padi	Desa Pangalli	1000 Kg		
	2. Pengadaan Pembasmi Hama Pestisida	Desa Pangalli	500 Liter		
	3. Pengadaan Benih Jagung	Desa Pangalli	500 Kg		
	4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Persawahan	Desa Pangalli	1000 Meter		
	5. Pengadaan Pupuk Tanaman	Desa Pangalli	1000 Kg		
	6. Pengadaan alat/mesin Combine	Desa Pangalli	2 Unit		
	7. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier Persawahan	Desa Pangalli	2000 Meter		
	8. Pengadaan alat/mesin Hand Traktor	Desa Pangalli	10 Unit		
	9. Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Pertanian	Desa Pangalli	1000 Meter		

	10. Pengadaan Benih Kakao	Desa Pangalli	1000 buah bibit		
	11. Pengadaan Benih Durian	Desa Pangalli	300 buah bibit		
	12. Pengadaan Bibit Ternak Sapi	Desa Pangalli	50 Ekor		
	13. Pengadaan Bibit Ternak Itik	Desa Pangalli	5000 Ekor		
	14. Pengadaan Bibit Ternak Ayam	Desa Pangalli	5000 Ekor		
	15. Pengadaan Pompa Air Persawahan	Desa Pangalli	2 Unit		
	16. Pengadaan Benih Kelengkeng	Desa Pangalli	500 buah bibit		
	17. Pengadaan Bibit Ternak Kambing	Desa Pangalli	50 Ekor		
	18. Pembangunan Jalan Tani	Dusun Bajo	700 Meter		
	19. Pembangunan Jalan Tani	Dusun Uraso	1300 Meter		
	20. Pembangunan Pintu Air	Dusun Bajo	1 Unit		
	21. Pembangunan Jalan Tani	Dusun Uraso	1400 Meter		
	22. Pengadaan Bibit Ternak Kambing	Desa Pangalli	70 Ekor		
3	**Dinas Kesehatan**	Desa Pangalli			
	1. Pengadaan Mobil Ambulance	Desa Pangalli	1 Unit		
	2. Pemasangan Paving Blok Poskesdes	Desa Pangalli	50 meter persegi		
	3. Pengadaan Alat Kesehatan	Desa Pangalli	2 Unit		

4	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	Desa Pangalli			
	1. Pembangunan MCK dan Air Bersih	Desa Pangalli	30 Unit		
	2. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Pangalli	30 Unit		
	3. Pembangunan Tangki septik skala individu	Desa Pangalli	30 Rumah Tangga		
	4. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)				
5	**Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**	Desa Pangalli			
	1. Pelatihan Las Listrik	Desa Pangalli	10 Orang		
	2. Pelatihan Menjahit	Desa Pangalli	20 Orang		
	3. Pelatihan Tata Rias	Desa Pangalli	10 Orang		
	4. Pelatihan Furniture/Meubel	Desa Pangalli	10 Orang		
	5. Pelatihan Komputer/Multimedia	Desa Pangalli	15 Orang		
	6. Pelatihan Alat Berat	Desa Pangalli	20 Orang		
	7. Pelatihan Otomotif Mobil & Motor	Desa Pangalli	20 Orang		
	8. Pengadaan Alat Mesin Pertukangan	Desa Pangalli	1 Unit		
	9 Pengadaan Alat Perbengkelan	Desa Pangalli	1 Unit		
6	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**				

	1. Pembangunan Toilet (Jamban) SD	MI 23 Tanete	2 Unit		
	2. Penataan/Penimbunan Halaman Sekolah SD	MI 23 Tanete	200 Meter Persegi		
	3. Rehabilitasi sedang/berat Toilet (jamban) SD	MI 23 Tanete	1 Unit		
	4. Pembangunan Toilet (jamban) PAUD	PAUD Resky Mandiri Pangalli	2 Unit		
	5. Pembangunan/Penambahan ruang kelas PAUD	PAUD Resky Mandiri Pangalli	1 Unit		
	6. Rehabilitasi sedang/berat Toilet (jamban) PAUD	PAUD Resky Mandiri Pangalli	1 Unit		
	7. Pembangunan Pagar PAUD	PAUD Resky Mandiri Pangalli	30 Meter		
	8. Rehabilitasi sedang/berat pagar sekolah SD	MI 23 Tanete	100 Meter		
	9. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	MI 23 Tanete	2 Unit		
	10. Pengadaan Mebeler PAUD	MI 23 Tanete	2 Unit		
	11. Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Desa Pangalli	1 Unit		
7	**Dinas Perikanan**				
	1. Pengadaan Alat Tangkap Perikanan (Jenis Jaring)	Desa Pangalli	10 Unit		
	2. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	Desa Pangalli	20 Unit		

	3. Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	Desa Pangalli	10000 Bibit		
	4. Pengadaan Bibit Ikan Lele	Desa Pangalli	10000 Bibit		
	5. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Tawar	Desa Pangalli	1 Unit		
8	**Dinas Sosial**				
	1. Bantuan Penyelesaian Study	Desa Pangalli	20 Orang		
	2. Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu (BPJS)	Desa Pangalli	200 Orang		
	3. Fasilitasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	Desa Pangalli	50 KK		
	4. Fasilitasi Bantuan Sembako/BPNT	Desa Pangalli	100 KK		
9	**Dinas Perhubungan**				
	1. Pengadaan Lampu Jalan Kabupaten	Desa Pangalli	40 Titik		
10	**Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian**				
	1. Bantuan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	Desa Pangalli	50 KK		
11	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**				
	1. Pembangunan Lapangan Futsal	Desa Pangalli	1 Unit		

SEBA SEBA					
1	Dinas Kesehatan				
	-Rehabilitas/Renovasi Pustu	Desa Seba-Seba	1 unit		
	-Pemasangan Paving Blok Pustu	Desa Seba-Seba	50 M2		
	-Pembangunan Pagar Pustu	Desa Seba-Seba	15 M		
	- Pengadaan Alkes	Desa Seba-Seba	1 Paket		
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	- Pengaspalan Jalan	Desa Seba-Seba	1,5 km		
	- Pembangunan drainase	Dusun Seba-Seba Barat, Desa Seba-Seba	800 M		
	- Pembangunan drainase	Dusun Wailempa, Desa Seba-Seba	400 M		
	- Pembangunan drainase	Dusun Singgasari, Desa Seba-Seba	400 M		
	- Pembangunan drainase	Dusun Campursari, Desa Seba-Seba	400 M		
	- Pembangunan Rabat Beton	jalan poros Seba-Seba - Kendekan	2 km		
	- Pemasangan Bronjong	Dusun Seba-Seba Barat, Desa Seba-Seba	50 M		
	- Pemasangan Bronjong	Dusun Wailempa, Desa Seba-Seba	100 M		
	- Pembentukan Jalan	Dusun Wailempa, Desa Seba-Seba	2 KM		
	- Pembentukan Jalan	Dusun Campursari, Desa Seba-Seba	600 M		

	- Pengkerikilan Jalan	Dusun Singgasari, Desa Seba-Seba	1,5 KM		
	- Pengkerikilan Jalan	Dusun Wailempa, Desa Seba-Seba	1,5 KM		
	- Pembangunan Talud	Desa Seba-Seba	2 KM		
	- Pembentukan Jalan	Dusun Seba-Seba Timur, Desa Seba-Seba	500 M		
3	Dinas Pertanian				
	- Pengadaan benih/bibit hortikultura dan perkebunan	Desa Seba-Seba	22 kelompok tani		
	- pengadaan bibit ternak Kambing	Desa Seba-Seba	10 ekor		
	- pengadaan bibit ternak Sapi	Desa Seba-Seba	5 ekor		
	- pengadaan bibit ternak ayam	Desa Seba-Seba	1.000 ekor		
	- Pengadaan alat/ mesin hendtraktor	Desa Seba-Seba	1 unit(UPJA)		
	- Pengadaan alat/ Mesin Combine	Desa Seba-Seba	1 unit (UPJA)		
	- Rehabilitasi jalan usaha tani pertanian sawah	Desa Seba-Seba	3 km		
	- pembangunan jaringan irigasi sekunder persawahan	Desa Seba-Seba	4 km		
	- Pembangunan jaringan irigasi tersier persawahan	Desa Seba-Seba	4 km		
	- Rehabilitasi Pintu Pembagian Air Persawahan		10 Unit		
	- Pembangunan long storage/bendungan mini persawahan	Dusun Singgasari, Desa Seba-Seba	1 unit		

4	Dinas perumahan dan kawasan pemukiman				
	- Pembanguan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Seba-Seba	50 Unit		
	- Pembanguan Drainase Pemukiman	Desa Seba-Seba	1 km		
5	Dinas Perikanan				
	- sarana Budidaya air payau (Udang, Badeng, Rumput Laut)	Dusun Seba-Seba Barat Desa Seba-Seba	3 Pokdakan		
	- sarana dan prasarana budidaya ikan Payau (udang/bandeng/Kepiting	Dusun Seba-Seba Timur Desa Seba-Seba	3 Pokdakan		
6	Dinas Sosial				
	- Pembinaan Karang Taruna dan pembentukan pusat kesejahteraan Sosial (Puskesos)	Desa Seba-Seba			
	- Pemberian Bantuan Penyelesaian studi bagi mahasiswa kurang mampu	Desa Seba-Seba	20 Mahasiswa		
	- Bantuan Pembangunan Usaha Ekonomi Pruduktif (UEP)	Desa Seba-Seba	11 KUBE		
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi				
	- Pelatihan Las Listrik	Desa Seba-Seba	1 kegiatan		
	- Pengadaan Mesin Jahit	Desa Seba-Seba	10 unit		
	- Pelatihan menjahit	Desa Seba-Seba	1 kegiatan		
	- Pelatihan Bangunan/meubel	Desa Seba-Seba	1 kegiatan		
	- Pengadaan alat mesin pertukangan	Desa Seba-Seba	10 unit		

8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	- pembangunan jamban SDN 347 Lamasi Pantai	Desa Seba-Seba	3 unit		
	- Pembangunan Pagar sekolah SDN 347 Lamasi Pantai	Desa Seba-Seba	200 Meter		
	- pembangunan jamban SDN 100 Singgasari	Desa Seba-Seba	3 unit		
	- Pengadaan Sarana bermain PAUD	Desa Seba-Seba	1 Paket		
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	- Rehabilitasi lapangan sepak bola	Desa Seba-Seba	1 paket		
	- Penimbunan lapangan sepak bola	Desa Seba-Seba	1 paket		
	- Pengadaan Tribun Lapangan	Desa Seba-Seba	1 Paket		
10	Dinas Perhubungan				
	- Pengadaan Lampu Jalan Kabupaten	Desa Seba-Seba	20 unit		
11	Dinas Lingkungan				
	- Kendaraan Pengangkut sampah	Desa Seba-Seba	2 Unit		
12	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian				
	- Bantuan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	Desa Seba-Seba	Bantuan Koperasi		

SUKADAMAI

1	Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder	Dsn. Gampas, Makmur, Masakke dan Jaya	1.000 M		
2	Pembangunan Drainase	DSN. LOTAB	1.000 M		
3	Pembangunan Drainase	DSN. GAMPAS	250 M		
4	Pembangunan Drainase	DSN. MAKMUR	1.600 M		
5	Pembangunan Drainase	DSN. MASAKKE	2.500 M		
6	Pembangunan Drainase	DSN. JAYA	1.500 M		
7	Pengaspalan Jalan	Dsn Segar, Gampas dan Makmur	3.500 M		
8	Pembangunan Rabat Beton	Dsn Lotab, Segar, Gampas dan Makmur	2.500 M		
9	Perkerasan Jalan	Semua dusun	4.000 M		
10	Perkerasan Jalan	Dsn Lotab, Segar	400 M		
11	Perkerasan Jalan	Dsn. Masakke, Jaya	4000 M		
12	Pembangunan Jalan Baru dan Saluran Pembuangan	Dsn Makmur, Masakke, Jaya	3.500 M		
13	Pembangunan Talud	Dsn Gampas, Makmur, dan Masakke	2.500 M		
14	Pembangunan Jembatan Sungan Lolin	Desa Suka Damai	2 Unit		
15	Pembangunan Plat Duiker	Semua Dusun (Kelompok Tani)	15 Unit		
16	Pembangunan Sarana Air Bersih	Dsn Makmur, Masakke, Jaya	3 Unit		
17	Pengerokan Sungai Lolin	Dsn. Masakke	2.000 M		
18	Pengerokan Saluran Pembuangan	Dsn. Makmur	1.000 M		
19	Pengadaan Tempat Tidur Bersalin	Pustu	1 Unit		

20	Pengadaan Tempat Tidur Bayi/Penghangat	Pustu	1 Unit		
21	Pembangunan Posyandu	Dsn. Masakke, Jaya	1 Unit		
22	Pembangunan Pintu Air/Sipon	Dsn . Segar	1 Unit		
23	Pembangunan Sanggar Tani	Desa Suka Damai	1 Unit		
24	Pengadaan Combine	Dusun Masakke	2 Unit		
25	Pengadaan Hand Tractor	Desa Suka Damai	7 Unit		
26	Pembuatan Pondasi/Pagar SDN Terbit 378 Rantai Damai	Dusun Segar	100 M		
27	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru TK/PAUD	Dusun Gampas	2 Unit		
28	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar	Dusun Segar	4 Unit		
29	Penataan Halaman SDN Terbit 378	Dusun Segar	1 Unit		
30	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Suka Damai	25 Unit		
31	Pelatihan Menjahit	Desa Suka Damai	1 Unit		
32	Pelatihan Las Listrik	Desa Suka Damai	1 Unit		
33	Pengadaan Bus Sekolah	Desa Suka Damai	1 Unit		
34	Pengadaan Lampu Jalan	Semua Dusun	15 Unit		
35	Pengadaan tiang listrik beton	Semua Dusun	30 Unit		

Usulan dan program yang diajukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan, tidak ada yang masuk dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Walenrang Timur, hal ini disebabkan karena keterbatasan Alokasi Dana di Kecamatan. Program dan kegiatan tersebut sebagian dilaksanakan melalui Dana Kelurahan dan pada umumnya ditujukan ke OPD yang ada di Kabupaten Luwu.

BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maka setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Pada tingkat Kabupaten perencanaan tersebut tertuang dalam bentuk Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PRPJP), Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RENSTRA dan RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD tersebut maupun yang dilakukan atas dukungan partisipasi masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan perencanaan yang diamanatkan ini maka sangat dibutuhkan tenaga atau aparat perencana yang handal serta proses perencanaan yang matang dan konsistensi yang baik didalam melaksanakan segala rencana yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang tercipta jika tujuan telah tercapai. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kecamatan Walenrang Timur secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dalam penetapan tujuan dan sasaran kita harus mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dalam suatu organisasi.

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Luwu, dalam menuntukan Tujuan dan Sasaran, Kecamatan Walenrang Timur merujuk pada visi Kabupaten Luwu yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yaitu ***"KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI".*** Untuk mewujudnya visi tersebut, misi Perubahan RPJMD yang diemban Kecamatan Walenrang Timur adalah misi pertama yaitu *"***Mewujudkan pemerintahan yang Profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel".**

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskanlah tujuan RENJA Kecamatan Walenrang Timur Tahun 2023 yaitu :

- Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
- Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah :

- Meningkatkan kualitas koordinasi, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
- Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2021 strategi, kebijakan dan demi terwujudnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat maka ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan dalan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024. Program – program tersebut adalah :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.

1.666.369.800,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pemberdayaan iri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Dari 23 (Dua Puluh Tiga) sub kegiatan yang tergabung dalam 9 (sembilan) kegiatan dan tergabung didalam 3 (tiga) program dibutuhkan dana pembangunan sebesar Rp. 1.679.466.950,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah). Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Walenrang Timur Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 tertera pada tabel III.1.

Tabel III.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN LUWU
KECAMATAN WALENRANG TIMUR

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	8	10
7	01	21				**KECAMATAN**								
7	01	21	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	**Kantor Camat**	**100 %**	**1.666.369.800**	**APBD**		**100 %**	1.681.607.750
7	01	21	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	**Kantor Camat**	**100 %**	**2.550.000**	APBD		**100 %**	**2.550.000**
7	01	21	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Dokumen Renstra dan Renja yang di Susun	Kantor Camat.	2 Dok	800.000	APBD		2 Dok	800.000
7	01	21	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Kantor Camat.	1 Dok	250.000	APBD		1 Dok	250.000
7	01	21	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Kantor Camat.	1 Dok	250.000	APBD		1 Dok	250.000
7	01	21	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kantor Camat.	1 Dok	250.000	APBD		1 Dok	250.000
7	01	21	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Kantor Camat.	1 Dok	250.000	APBD		1 Dok	250.000

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	8	10
7	01	21	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	Kantor Camat.	4 Dok	750.000	APBD		4 Dok	750.000
7	**01**	**21**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi dkeuangan secara tepat waktu**	**Kantor Camat**	**100 %**	**1.495.929.660**	APBD		**100 %**	**1.495.929.660**
7	01	21	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	Kantor Camat.	228 OB	1.443.249.600	APBD		456 OB	1.443.249.600
7	01	21	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dalam 1 Tahun	Kantor Camat	60 OB	52.680.000	APBD		80 Dok	52.800.000
7	01	21	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Kantor Camat	1 Lap	0	APBD		1 Lap	1.000.000
7	01	21	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	Kantor Camat	1 Lap	0	APBD		1 Lap	1.000.000
7	**01**	**21**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD**	**Kantor Camat**	**100 %**	**6,000.000**	**APBD**		**100 %**	**8.400.000**
7	01	21	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Camat	2 Lap	6.000.000	APBD		2 Laporan	8.400.000
7	**01**	**21**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi perkantoran**	Kantor Camat.	**100 %**	**93.795.950**	APBD		**100 %**	96.730.950
7	01	21	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kantor Camat.	**6 Jenis**	**2.521.600**	APBD		**100 %**	**2.521.600**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	8	10
7	01	21	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Bulan Penyediaan Bahana Logistik dalam 1 (Satu) Tahun	Kantor Camat.	12 Bulan	2.777.350	APBD		12 Bulan	2.777.350
7	01	21	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dalam 1 (Satu) Tahun	Kantor Camat.	12 Bulan	4.670.000	APBD		12 Bulan	4.670.000
7	01	21	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	Kantor Camat.	12 Bulan	2.400.000	APBD		12 Bulan	2.400.000
7	01	21	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan Perkantoran dalam 1 (Satu) Tahun	Kantor Camat.	12 Bulan	24.362.000	APBD		12 Bulan	24.362.000
7	01	21	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	Kantor Camat.	232 OK	57.065.000	APBD		232 OK	60.000.000
7	**01**	**21**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	Kantor Camat.	**100 %**	0	APBD		**100** %	0
7	01	21	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kantor Camat.	5 Unit	0	APBD		OB	0
7	**01**	**21**	**01**	**2.08**		**Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	Kantor Camat.	**100 %**	**30.600.140**	APBD		**100 %**	35.400,140
7	01	21	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyedia Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Kantor Camat.	12 OB	7.200.000	APBD		12 OB	8.400.000

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	8	10
7	01	21	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kantor Camat.	12 Bulan	3.000.140	APBD		12 Bulan	3.000.140
7	01	21	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kantor Camat.	72 OB	20.400.000	APBD		96 OB	24.000.000
7	**01**	**21**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Camat**	**6 Unit**	**37.494.050**	**APBD**		**7 unit**	**38.000.000**
7	01	21	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kantor Camat.	6 Unit	37.494.050	APBD		6 unit	38.000.000
7	**01**	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	Kantor Camat.	**100 %**	**4.800.000**	**APBD**		**100 %**	**5.000.000**
7	**01**	**21**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	Kantor Camat.	**100 %**	4.800.000	**APBD**		**100 %**	5.000.000
7	01	21	02	2.01	02	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Kecamatan	Kantor Camat.	1 Lap	4.800.000	APBD		1 Lap	5.000.000
7	**01**	**21**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**	Kantor Camat.	**100 %**	**0**	**APBD**		**100 %**	**0**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	8	10
7	**01**	**21**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rupaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	Kantor Camat.	**100 %**	**0**	**APBD**		**100 %**	**0**
7	01	21	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang diberikan Insentif	Kantor Camat.	1800 OB	0	APBD		1800 OB	0
7	**01**	**21**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan**	Kantor Camat.	**100 %**	**0**	**APBD**		**100 %**	**0**
7	**01**	**21**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah**	Kantor Camat.	**100 %**	**0**	**APBD**		**100 %**	**0**
7	01	21	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Camat.	1 Kali	0	APBD		1 Kali	0
7	**01**	**21**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Kantor Camat.	**100 %**	**8.000.000**	**APBD**		**100 %**	**8.000.000**
7	**01**	**21**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Kantor Camat.	**100 %**	**8.000.000**	**APBD**		**100 %**	**8.000.000**
7	01	21	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat.	8 Desa	4.000.000	APBD		8 desa	4.000.000

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	8	10
7	01	21	06	2.01	05	Fasilitasi Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Kantor Camat	8 Desa	4.000.000	APBD		8 Desa	4.000.000
JUMLAH TOTAL										**1.679.466.950**				**3.670.883.000**

BAB. IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan jumlah pendanaan untuk setiap kegiatan di Kecamatan Walenrang Timur pada Tahun Anggaran 2024, membutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.679.466.950,00,- (satu milyar enam ratus tujuh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah). Anggaran ini digunakan untuk membiayai 3 (tiga) Program Kerja yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Program kerja dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

   Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.591.691.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu rupiah).Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.550.000,-
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.495.929.660,-
   - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 6.000.000,-
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 86.893.100,00
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 37.800.140,00
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 37.494.050,00

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

   Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 4.800.000,-

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

   Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 8.000.000,-

Program,Kegiatan,Sub Kegiatan,Indikator Kinerja,Tujuan,Sasaran Dan rencana Perhitungan Renja Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu Tahun 2024 termuat dalam tabel seperti pada Lampiran II

Tabel : IV. 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran dan dan Rencana Perhitungan

Renja Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu Tahun 2024

KODE							INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Perhitungan 2023			Jumlah	Lokasi
								Volume	Satuan	Harga Satuan		
						KECAMATAN					**1.679.465.950**	**Kantor Camat Walenrang Timur**
7	01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100	%		1.666.665.950	Kantor Camat Walenrang Timur
7	01	01				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100	%		**2.550.000**	
7	01	03	01	2.01	01	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	4	Dokumen	0,00	800.000	Kantor Camat Walenrang Timur
						Makan Minum Rapat					**800.000**	
						Snack		20	Kotak	15.000,00	300.000	
						Nasi Kotak		20	Kotak	25.000,00	500.000	
7	01	03	01	2.01	02	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	2	Dokumen		250.000	Kantor Camat Walenrang Timur
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan Rapat Pertemuan)					**250.000**	
						Nasi Kotak		10	Kotak	25.000,00	250.000	
7	01	03	01	2.01	03	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	2	Dokumen		250.000	Kantor Camat Walenrang Timur
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan Rapat Pertemuan)					**250.000**	
						Nasi Kotak		10	Kotak	25.000,00	250.000	
7	01	03	01	2.01	04	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	2	Dokumen		250.000	Kantor Camat Walenrang Timur
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan Rapat Pertemuan)					**250.000**	
						Nasi Kotak		10	Kotak	25.000,00	250.000	
7	01	03	01	2.01	05	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	2	Dokumen		250.000	Kantor Camat Walenrang Timur
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan Rapat Pertemuan)					**250.000**	
						Nasi Kotak		10	Kotak	25.000,00	250.000	Kantor Camat Walenrang Timur
7	1	01	01	2.01	06	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	5	Dokumen		750.000	Kantor Camat Walenrang Timur
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan Rapat Pertemuan)					**750.000**	
						- Nasi Kotak		30	Kotak	25.000,00	750.000	

7	**01**	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	~~100~~	%		**1.495.929.660**	Kantor Camat Walenrang Timur	
7	01	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	23	Orang		1.443.249.660	Kantor Camat Walenrang Timur	
											1.230.624.572		
						Belanja Gaji Pokok ASN		1	Tahun	903.121.000,00	903.121.000		
						Belanja Tunjangan Keluarga		1	Tahun	88.322.000,00	88.322.000		
						Belanja Tunjangan Jabatan		1	Tahun	84.952.000,00	84.952.000		
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum		1	Tahun	26.046.000,00	26.046.000		
						Belanja Tunjangan Beras		1	Tahun	59.236.000,00	59.236.000		
						Belanja Tunjangan PPh /Tunjangan Khusus ASN		1	Tahun	637.000,00	637.000		
						Belanja Pembulatan Gaji		1	Tahun	12.000,00	12.000		
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		1	Tahun	54.985.000,00	54.985.000		
						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		1	Tahun	2.168.000,00	2.168.000		
						Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		1	Tahun	6.503.000,00	6.503.000		
						Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN		1	Tahun	4.642.572,00	4.642.572		
						Belanja Tambahan Penghasilan ASN					**212.263.000**		
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN		1	Tahun	212.263.000,00	212.263.000		
7	01	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Honor Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan		52.680.000	Kantor Camat Walenrang Timur	
						Honorarium Pengguna Anggaran		12	Bulan	1.450.000,00	17.400.000		
						Honorarium PPTK		12	Bulan	700.000,00	8.400.000		
						Honorarium PPK		12	Bulan	800.000,00	9.600.000		
						Honorarium Bendahara Pengeluaran		12	Bulan	700.000,00	8.400.000		
						Honorarium Staf Pengelolah		24	Bulan	370.000,00	8.880.000		
7	**01**	**03**	**01**	**2.03**		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah	100	%		6.000.000	Kantor Camat Walenrang Timur	
7	**01**	**03**	**01**	**2.03**	**06**	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**1**	**Laporan**		**6.000.000**	**Kantor Camat Walenrang Timur**	
						Honorarium Pengurus Barang		12	Bulan	500.000,00	6.000.000		

7	**01**	**03**	**01**	**2.06**	**01**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan**				**2.520.600**	**Kantor Camat Walenrang Timur**	
								35	Unit		2.520.600	1.632.600	
						Kabel Kabel Eterna NYAF (1x0,75 mm (100 Meter)		6	Roll	211.900,00	*1.271.400*		
						Lampu Kuning (Matsuka MSA 8 W)		*5*		*62.400,00*	*312.000*		
						Lampu 20 watt (Essential Tornado 20 W Philips)		*8*		*72.000,00*	*576.000*		
						Lighting Fitting		*6*		*36.400,00*	*218.400*		
						Stop Kontak (Tanpa Kabel & Saklar)1 arda 1 Lubang		*10*		*7.800,00*	*78.000*		
						Tespen RRC Model PH		*6*		*10.800,00*	*64.800*		
7	**01**	**03**	**01**	**2.06**	**04**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan**	**9**	**Jenis**		**2.777.350**	**Kantor Camat Walenrang Timur**	
						Belanja Natura dan Pakan Natura (Kopi Bubuk)		10	kg	26.450,00	264.500		
						Belanja Bahan dan Pangan (Air Mineral Karton 40 Gelas)		10	dos	17.250,00	172.500		
						Biskuit Gabin Asin		10	bungkus	15.600,00	156.000		
						Gula Pasir		12	kg	24.700,00	296.400		
						Air Galon		21	Galon	5.000,00	105.000		
						Tabung Gas		10	kali	25.000,00	250.000		
						Tissue		10	buah	15.795,00	157.950		
						Susu Kental Manis		10	kaleng	13.750,00	137.500		
						Teh Celup		10	dos	26.000,00	260.000		
						Teh Kotak		10	dos	97.750,00	977.500		
7	**01**	**03**	**01**	**2.06**	**05**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan**	**5**	**Jenis**		**4.475.500**	**Kantor Camat Walenrang Timur**	
						Baliho/Spanduk		60	meter	30.000,00	1.800.000		
						Bahan Penggandaan		4000	Lembar	300,00	1.200.000		
						Bahan Cetak dan Penggandaan (Jilid Antero Biasa)		15	eksemplar	32.500,00	487.500		
						Bahan Cetak dan Penggandaan (Jilid Antero Biasa)		21	eksemplar	39.000,00	819.000		
						Bahan Cetak dan Penggandaan (Jilib Biasa Tebal)		13	eksemplar	13.000,00	169.000		
7	**01**	**03**	**01**	**2.06**	**06**	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan**	**1**	**Jenis**		**2.400.000**	**Kantor Camat Walenrang Timur**	
						Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah		12	bulan	200.000,00	2.400.000		
7	**01**	**03**	**01**	**2.06**	**07**	**Penyediaan Bahan/Material**	**Jumlah jenis Material yang disediakan**	**3**	**Jenis**		**24.362.650**		
						Belanja ATK					**6.221.800**	Kantor Camat Walenrang Timur	
						Hekter Besar No 3		10	buah	39.000,00	390.000		
						Hekter Kecil		10	buah	13.000,00	130.000		
						Map Ordner		30	buah	42.900,00	1.287.000		
						Pensil		10	buah	910,00	9.100		
						Rautan Pensil		5	buah	4.550,00	22.750		
						Stip/Karet Penghapus Pensil		5	lusin	3.250,00	16.250		
						Ballpoint Balliner		12	lusin	182.000,00	2.184.000		
						Ballpoint Faster		8	lusin	42.900,00	343.200		
						Ballpoint Snowman		8	buah	26.000,00	208.000		
						Buku Folio Egret 100 lmbr		10	buah	18.200,00	182.000		
						Isi Hekter Besar No 3		10	dos	13.000,00	130.000		
						Isi Hekter Kecil No 10		30	Dos	2.600,00	78.000		
						Lakban Jilid 2		6	Buah	19.500,00	117.000		
						Tinta Stempel Stamping INK		7	botol	11.700,00	81.900		
						Lem Kertas Fox		6	botol	11.700,00	70.200		
						Map Biasa Plastik		58	pak	2.600,00	150.800		
						Map Snelhekter		30	buah	13.000,00	390.000		
						Penggaris Besi		8	buah	11.050,00	88.400		
						Perforator(Pelubang Kertas)		5	buah	22.100,00	110.500		
						Tip ex Botol (Kenko)		6	Buah	7.800,00	46.800		
						Box File		10	Buah	12.350,00	123.500		
						Gunting		6	buah	10.400,00	62.400		

						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK (Kertas dan Cover)					**7.110.200**		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK (Kertas dan Cover) NCR		9	rim	84.500,00	760.500		
						Belanja ATK (Amplop Putih Sedang)		10	dos	31.250,00	312.500		
						Belanja ATK Kertas HVS A4		27	rim	67.600,00	1.825.200		
						Belanja ATK Kertas HVS F4		60	rim	70.200,00	4.212.000		
						Belanja Bahan Komputer					**5.360.000**		
						Belanja Bahan Komputer (Catridge+Tinta)		6	buah	117.000,00	702.000		
						Tinta Printer Epson		10	buah	124.800,00	1.248.000		
						Tinta Printer Canon		10	Buah	341.000,00	3.410.000		
						Belanja Materai					**3.000.000**		
						Materai		300	Lmbr	10.000,00	3.000.000		
						Belanja alat bahan untuk Kegiatan kantor					**2.670.650**		
						Kapus barus		24	bks	6.000,00	144.000		
						Racun Rumput		5	Liter	60.000,00	300.000		
						Sunlight		21	Bks	5.000,00	105.000		
						Super Pel		13	Pcs	9.600,00	124.800		
						Pel Lantai		2	Buah	93.600,00	187.200		
						Sapu Lantai		5	Buah	55.000,00	275.000		
						Sendok Sampah		4	Buah	39.600,00	158.400		
						Kanebo		6	Buah	24.000,00	144.000		
						Portex		13	Buah	20.000,00	260.000		
						Sikat Wc		5	Buah	14.850,00	74.250		
						Tempat Sampah		8	Buah	44.000,00	352.000		
						Sapu Laba-laba		2	Buah	108.000,00	216.000		
						Ember		6	Buah	55.000,00	330.000		
7	01	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan perjalanan dinas luar	2	Jumlah		50.356.000	Kantor Camat Walenrang Timur	
						Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah					**11.856.000**		
						Biaya Penginapan Eselon III/Gol IV		6	OH	1.020.000,00	**6.120.000**		
						Biaya Penginapan Eselon IV/Gol III		3	OH	732.000,00	**2.196.000**		
						Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota (Gol IV)		3	OH	430.000,00	**1.290.000**		
						Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota (Gol III)		3	OH	400.000,00	**1.200.000**		
						Biaya Transportasi Darat		3	Orang/Kali	350.000,00	**1.050.000**		
						Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**38.500.000**		
						Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam					38.500.000		
						Uang harian perjalanan dinas dalam daerah PNS Eselon III / Golongan IV		140	OH	150.000,00	21.000.000		
						Uang harian perjalanan dinas dalam daerah PNS Eselon IV / Golongan III		140	OH	125.000,00	17.500.000		

7	**01**	**03**	**01**	**2.08**		**Belanja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	%		**37.800.140**	Kantor Camat Walenrang Timur	
7	**01**	**03**	**01**	**2.08**	**01**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	250	Surat		**6.000.000**	Kantor Camat Walenrang Timur	
						Honorarium Caraka		12	Bulan	500.000,00	6.000.000		
7	**01**	**03**	**01**	**2.08**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	Bulan		**3.000.140**	Kantor Camat Walenrang Timur	
						Belanja Tagihan Listrik 1300 VA		2860	kwh	1.049,00	3.000.140		
7	01	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan jasa administrasi keuangan yang disediakan	48	OB		28.800.000	Kantor Camat Walenrang Timur	
						Belanja Jasa dan Upah					**28.800.000**		
						- Petugas Kebersihan		12	OB	700.000,00	8.400.000		
						- Operator Komputer SIPD		24	OB	500.000,00	12.000.000		
						Belanja Jasa Tenaga Supir		12	Bulan	700.000,00	8.400.000		
7	**01**	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**		**37.494.050**	Kantor Camat Walenrang Timur	
7	01	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	6	Unit		37.494.050	Kantor Camat Walenrang Timur	
						Belanja BBM Kendaraan Dinas/Operasional		1500	Liter	7.650,00	11.475.000		
						Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional					**23.269.050**		
						Lahar Belakang Roda Kiri Kanan		4	Unit	442.050,00	1.768.200		
						Ban Luar Mobil Bridgestone		4	Unit	1.412.250,00	5.649.000		
						Kampas Komplit		4	Buah	3.607.800,00	14.431.200		
						Oli Seal Roda Depan		3	Buah	473.550,00	1.420.650		
						Beban Pajak Kendaraan Bermotor					2.750.000		
						Pajak Mobil		1	Tahun	1.500.000,00	1.500.000		
						Beban Pajak Kendaraan		5	Unit	250.000,00	1.250.000		
7	**01**	**03**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**100**	**%**		**4.800.000**	**Kantor Camat Walenrang Timur**	
7	01	03	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	%		4.800.000	Kantor Camat Walenrang Timur	
7	01	03	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1	Kegiatan		4.800.000	Kantor Camat Walenrang Timur	
							Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan				4.800.000		
						Kudapan (Snack) Rapat/Pertemuan Spesifikasi Kotak		120	Kotak	15.000,00	1.800.000		
						Makan Rapat/Pertemuan Spesifikasi Nasi Kotak	W	120	Kotak	25.000,00	3.000.000		
7	**01**	**03**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	100	**%**		8.000.000	**Kantor Camat Walenrang Timur**	
7	**01**	**03**	**06**	**2.01**		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	**%**		8.000.000	Kantor Camat Walenrang Timur	
7	**01**	**03**	**06**	**2.01**	**03**	Fasilitas Pengelolan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	100	Desa		4.000.000	Kantor Camat Walenrang Timur	
						Makan Rapat/Pertemuan							
						Nasi Kotak		100	Kotak	25.000,00	2.500.000		
						Snack		100	Kotak	15.000,00	1.500.000		
7	**01**	**03**	**06**	**2.01**	**05**	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam PelaksANAAN Tugas Kepala Desa Dan Prangkat Desa	8	Desa		4.000.000	Kantor Camat Walenrang Timur	
						Makan Rapat/Pertemuan Spesifikasi Nasi Kotak		100	Kotak	25.000,00	2.500.000		
						Kudapan (Snack) Rapat/Pertemuan Spesifikasi Kotak		100	Kotak	15.000,00	1.500.000		

BAB. V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan / Catatan Penting

Rencana Kerja Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Walenrang Timur Tahun 2019-2024 dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur didalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Renstra berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan sebagai pengendali kinerja tiap tahun melalui Renja-PD dan dipertanggungjawabkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Walenrang Timur.

Rencana Kerja Kecamatan Walenrang Timur Tahun 2024 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada triwulan akhir Tahun 2024. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Walenrang Timur.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindaklanjut program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Walenrang Timur pada tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 menetapkan 3 program dan 9 kegiatan serta 15 Sub Kegiatan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Walenrang Timur Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 merupakan

dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) Tahun kedepan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Walenrang Timur Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Walenrang Timur tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Demikian penyusunan dokumen Renja ini masih jauh dari kreterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Luwu untuk kesempurnaan Dokumen dan pelaksanaannya

Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Walenrang Timur Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu.

Tabah, Mei 2023

CAMAT WALENRANG TIMUR

NANANG IRAWAN,SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19760927 200312 1 005

2025

RENJA

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Copyright: wardexcelle

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Tahun Anggaran 2025 beserta Sumber Dana Indikatif, Indikator dan Evaluasi Kegiatan.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan Rencana Kerja ini

Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kabupaten Luwu serta tolak ukur dalam merealisasikan Rencana Kerja yang direncanakan. Selain itu juga dapat membuka informasi tentang Rencana Kerja Kegiatan Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan sekaligus menilai dan mengukur keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan pada setiap tahun anggaran.

Kepala Dinas Koperasi, UKM &
Perindustrian Kab. Luwu

RAHIMULLAH, S E, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip:19660710199303 1 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

PENDAHULUAN 4

BAB I 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 7

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II 10

GAMBARAN PELAYANAN 10

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi. 10

2.1.1. Kepala Dinas 15

2.1.2. Sekretaris 17

2.1.3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan 20

2.1.4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro 22

2.1.5. Perindustrian 24

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 43

BAB III 46

PERMASALAHAN & ISU - ISU STRATEGIS 46

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu. 46

3.2. Misi Kabupaten Luwu adalah 49

“LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DALAM NUANSA RELIGI” 55

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis 59

BAB IV 61

TUJUAN DAN SASARAN 61

4.1. Tujuan 61

4.2 Sasaran 62

BAB V 65

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, ... 65

5.1 Peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah 66

5.2 Peningkatan kapasitas kelembagaan internal Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 66

BAB VI 68

BAB. VII 97

BAB. VIII 99

PENUTUP 99

8.1. Kesimpulan 99

PENDAHULUAN

BAB I

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).

Berdasarkan Undang-undang Instruksi Meteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2023 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen rencana Pembangunan Menengah sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca Pemilu Kepala Daerah secara Nasional Tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra-PD digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis. Penyusunan Renstra-PD, SKPD harus melibatkan *stakeholder* sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berkoordinasi dengan Bapeda atau Bapekab. Selanjutnya, Renstra-PD ditetapkan melalui peraturan kepala SKPD. Dokumen Renstra-PD yang telah ditetapkan Kepala SKPD agar disampaikan ke Bapeda. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut : persiapan penyusunan Renstra-PD, penyusunan rancangan Renstra-PD, penyusunan rancangan akhir Renstra-PD dan Penetapan Renstra-PD.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, SKPD berkewajiban menyiapkan Renstra-PD yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi

pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026. Namun demikian, *dampak* dari merebaknya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sejak bulan Desember tahun 2019 dan di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 dan telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di bidang kesehatan, maupun aspek lainnya seperti perekonomian, kehidupan sosial hingga keuangan daerah, termasuk di Kabupaten Luwu. Sehingga, target pembangunan dan kerangka pendanaan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2026 perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini terlihat dari menurunnya perekonomian makro pada tahun 2020 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 1,30%, sangat jauh dari apa yang ditargetkan dalam RPJMD yaitu sebesar 7,30 persen. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,36 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yaitu 4,66 persen, kondisi tersebut lebih besar dari apa yang ditargetkan pada RPJMD Pokok yaitu sebesar 4,36 persen. Sedangkan pada sektor kesehatan, sejak dinyatakan sebagai pandemi di Indonesia, sampai dengan bulan Mei tahun 2021, tercatat sejumlah 1.086 orang terkonfirmasi positif dan sejumlah 90 orang meninggal dunia di Kabupaten Luwu. Sementara itu, pandemi mengakibatkan ditutupnya pusat-pusat aktivitas masyarakat sehingga berpengaruh kepada penurunan pertumbuhan Ekonomi Masyarakat yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian.

Selanjutnya, setelah RPJMD Kabupaten Luwu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, terdapat perubahan kebijakan nasional di bidang perencanaan dan penganggaran maupun kebijakan lain yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang memberikan arah terhadap penanganan dampak pandemi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang merupakan pedoman dalam perumusan kerangka pengelolaan keuangan daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang harus diaplikasikan dalam perencanaan dan penganggaran daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti denganKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang harus dipedomani dalam perumusan program pembangunan daerah; dan

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang diikuti dengan perubahan Renstra-PD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang harus diselaraskan dengan Renstra kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan periodenya masing-masing.

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas menyebabkan substansi RPJMD terkait dengan kebijakan pembangunan daerah hingga nomenklatur, indikator, target dan kerangka pendanaan programserta struktur pendapatan dan belanja daerah harus disesuaikan. Hal ini mengingat bahwa Peraturan Daerah kabupaten/kota lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan berbagai peraturan tersebut di atas.

Berdasarkan kedua alasan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2026 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026. Mengingat bahwa Renstra-PD disusun berdasarkan RPJMD, maka apabila dilakukan perubahan terhadap RPJMD, harus diiukti dengan perubahan Renstra-PD. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu melakukan perubahan Renstra-PD sesuai dengan amanat pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD menjadi pedoman perubahan Renstra-PD.Adapun tata cara penyusunan Perubahan Restra, dinyatakan dalam Pasal 359 bahwa tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah berlaku mutatis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu tahun 2025-2026 merupakan upaya Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian untuk bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat dalam melakukan perubahan guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu sesuai dengan VisiKabupaten Luwu tahun 2025-2026 yaitu‘ **Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi**’.Dalam kaitan itu, penyusunan Perubahan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul, disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 merupakan

serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra-PD perangkat daerah antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi*Covid-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Tahun 2025-2026 dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dalam kurun waktu tahun 2021-2024 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026. Adapun tujuannya adalah untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2025-2026 sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra-PD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten adalah untuk:

- Mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebagai institusi pemerintahan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024.
- Memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu
- Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.
- Menyusun instrumen evaluasi kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kab. Luwu, baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra-PD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu 2019 - 2024. disusun sebagai berikut :

- **Bab 1, Pendahuluan**

  Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan

Renstra-PD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan sistematika penulisan.

- **Bab 2, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

  Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur Organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra-PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra-PD SKPD.

- **Bab 3, Permasalah dan Isu-isu Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian**

  Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra-PD K/L, telaahan dan penentuan isu-isu strategis.

- **Bab 4, Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian**

  Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menegah yang direncanakan
  Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

- **Bab 5, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian**

  Strategi yaitu langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menegah yang direncanakan.
  Kebijakanan merupakan arah/tindakan yang dipedomasi SKPD dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra-PD .

- **Bab 6, Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

  Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
  Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

- **Bab 7, Indikator Kinerja Pelaksanaan Urusan**

  Memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

- **Bab 8, Penutup**

  Memuat Penjabaran Renstra-PD SKPD dalam bentuk Renja, Kepala SKPD sebagai penanggungjawab Kepala SKPD bersama Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian melakukan pemantauan dan evaluai atas pelaksanaan Renstra-PD , serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra-PD SKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas ; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian:

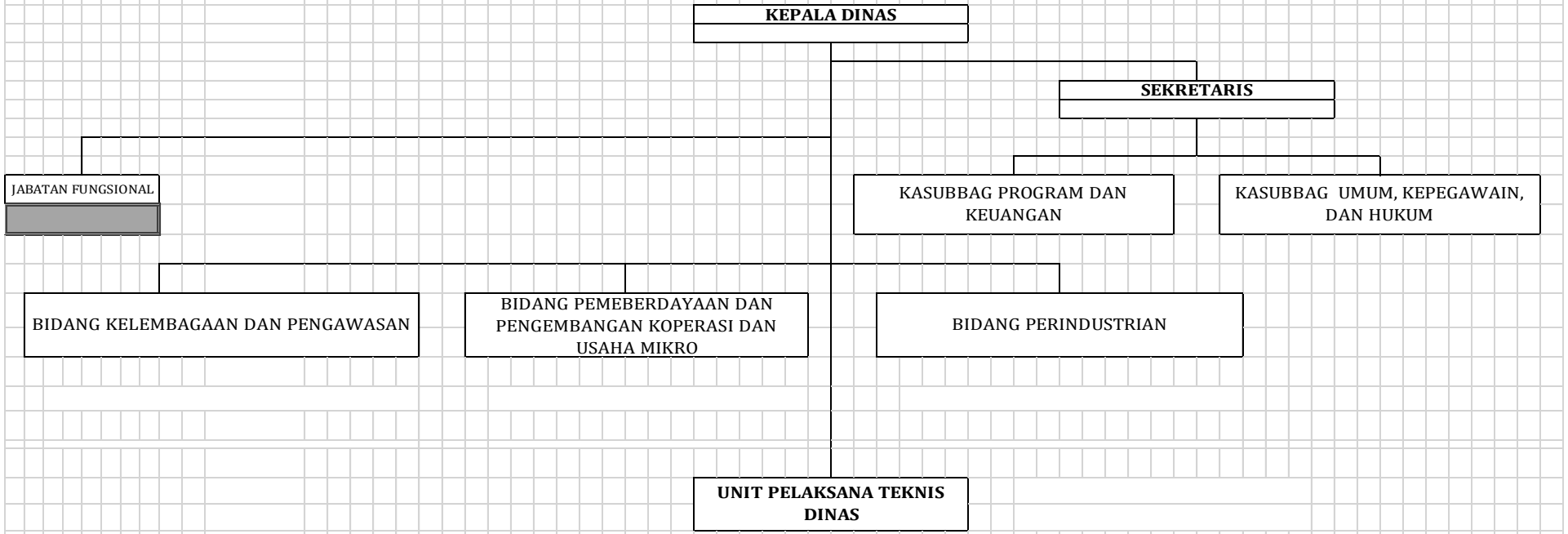
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang

Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugaspokok dan fungsinya didukung oleh 4 unit kerja Eselon III dan masing-masing Eselon IIIa di dukung oleh 3 unit eselon IV, eselon IIIb didukung oleh 3 unit eselon IV sebagaimana disajikan pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 27 TAHUN 2023
TANGGAL : 29-Mei-23

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU



BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

2.1.1. Kepala Dinas

(1). Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerinta.han daerah di bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan industri.

(2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian;

d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

(3). Uraian tugas Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Perumusan Penyusunan Program Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;

d. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. perumusan kebijakan teknis Dinas;

g. penyusunan rencana strategis Dinas;

h. penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

i. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas seluruh pejabat struktural, fungsional dan staf lingkup Dinas;

j. Penyelenggaraan evaluasi dan monitoring program/kegiatan Dinas;

k. Penetapan penerbitan izin usaha simpan pmjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

l. penetapan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

m. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

n. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

o. penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

p. pengoordinasian pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

q. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

r. pengoordinasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

s. pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;

t. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;

u. penetapan pelaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan;

v. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha perdagangan dan izin usaha kawasan industri yang lokasinya berada di kabupaten;

w. penyelenggaraan standar kompetensi SDM Industri dan aparatur pembina industri di kabupaten;

x. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;

y. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan

aa. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Sekretaris

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kesekertariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:
   a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
   b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
   c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
   d. pengoordinasian administrasi keuangan; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

A. Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. merumuskan penyusunan program kegiatan dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;

d. mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti kegiatan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, penggerakan dan pengendalian serta penetapan kebijakan di bidang umum dan Keuangan, Hukum dan Kepegawaianserta Perencanaan dan Pelaporan;

g. melaksanakan perencanaan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh satuan kerja dalam lingkup Dinas;

i. melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan umum dan keuangan;

J. melaksanakn pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan hukum dan kepegawaian;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum dan Keuangan, Hukum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan;

l. melaksanakan pengoordinasian, pembimbingan dan pengarahan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP,RENSTRA,RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;

n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretaris melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan penyusunan program kegiatan dibidang Koperasi UKM dan Perindustriansebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;

d. pengoreksian, memaraf dan penandatanganan naskah dinas;

e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. perencanaan, pengoordinasian, penggerakan dan pengendalian serta penetapan kebijakan di bidang umum dan Keuangan , Hukum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan.;

g. perencanaan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

h. pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan kerja dalam lingkup Dinas;

i. pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan umum dan keuangan ;

j. pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan hukum dan kepegawaian ;

k. pelaksanaanmonitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum dan Keuangan , Hukum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan.;

l. pengoordinasian, pembimbingan dan pengarahan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. penilaian prestasi kerja bawahannya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian.

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggrakan fungsi kesekertariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum. Sekretariat membawahi 2 Subbagian yaitu:

1. Sub Bagian Program dan Keuangan

   a) Kepala SubBagian Program dan Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

   b) Kepala SubBagian Program dan Keuangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

      a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

      b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

      c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

      d. penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

      e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

      f. penyusunan rencana program kegiatan;

      g. pelaksanaan program kegiatan serta menyusun rencana anggarandan pelaporan keuangan;

      h. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan penggembangan karier;

      i. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan/atasan.

2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian

   1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun, menginventarisir, menganalisa dan menyusun produk hokum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dinas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian dan hokum serta ketatalaksanaan.

   2. Uraian tugas KepalaSubbagian Umum, Kepegawaiandan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;;

b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Hukum, dan Kepegawaianuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tu gas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;pengoordinasian pelaksanaan Diklat Penjenjangan dengan instansi terkait;

g. melakukan pengoordinasian pengembangan SOM lingkup Dinas dengan instansi terkait;

h. melakukan kegiatan ketatalaksanaan di Sekretariat;

i. melakukan pengoordinasian pelaksanaan Diklat Penjenjangan dengan instansi terkait;

j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;

k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian

l. Umum, Kepegawaian, dan Hukum dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

(1). Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan dan merumuskan telmis operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Kelembagaan dan Pengawasan.

(2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan telmis Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;

b. pelaksanaan kebijakan telmis Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;

d. pelaksanaan administrasi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3). Uraian tugas Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. membantu menyusun konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;

g. melaksanakan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;

h. melaksanakan pengoordinasian dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;

i. melaksnakan pengoordinasian dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas

J. melaksanakan pengoorclinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;

k. melaksanakan pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

i. Melaksanakan pengordinasian pengawasan dan p;emeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupate/kota dalam satu daerahkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

m. melaksanakan pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah

keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

n. melaksanakan pengoordinasian penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

o. perencanaan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;

p. melaksanakan pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;

q. melaksanakan pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

r. menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan Pinjam/unit simpan pinjam

s. penyusunan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

t. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

u. melaksanakan pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;

v. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;

w. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;

x. melaksanakan pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

y. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan KoperasiUsaha KecilMenengah dan Perindustrian;

z. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

aa. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan

bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

(1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan dan merumuskan teknis operasionalpenyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikromelaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasidan Usaha Mikro;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasidan Usaha Mikro;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasidan Usaha Mikro;
d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
d. membantu menyusun konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
e. mengikuti kegiatan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melaksanakan pengoordinasian pemberdayaan koperasi;
g. perencanaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
h. melaksanakan pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalanbagi koperasi;
i. pembuatan konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
j. melaksanakan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
k. pengembangan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
l. pengembangan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
m. melaksanakan pengoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
n. melaksanakan pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
o. melaksanakan pengoordinasian pendidikan dan latihan bagi

perangkat organisasi koperasi;

p. melaksanakan pengoordinasian perlindungan koperasi;
q. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
r. melaksanakan pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
s. melaksanakan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
t. melaksnakan pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
u. melaksanakan pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
v. melaksanakan pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
w. melaksanakan pengoordinasian pengembangan kewirausahaan;
x. Melaksanakan koordinasi dan konsutasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian
y. y. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasidan Usaha Mikro dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan
aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya:

2.1.5. Perindustrian

(1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan fungsi Bidang Perindustrian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),KepalaBidang Perindustrian melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Perindustrian;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perindustrian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perindustrian;
d. pelaksanaan administrasi Bidang Perindustrian; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perindustrian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. membantu menyusun konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;

e. mengikuti kegiatan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan penyiapan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri di wilayah kabupaten/kota;

g. melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan pembangunan industri kabupaten/kota;

h. melaksanakan penyiapan penyebaran dan pembangunan industri kabupaten/kota;

i. melaksanakan penyiapan pembangunan sumber daya manusia industri wilayah kabupaten/kota;

j. melaksanakan penyiapan pembangunan pusat pendidikan dan pelati.han industri di wilayah pusat pertumbuhan industri;

k. melaksanakan penyiapan penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri di wilayah kabupaten/kota;

l. melaksanakan penyiapan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industry di wilayah kabupaten/kota;

m. melaksanakan penyiapan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota;

n. melaksanakan penyiapan pembiayaan yang kompetitif bagi industri di wilayah kabupaten/kota;

o. melaksanakan pembiayaan pengawasan standar produk industri di wilayah kabupaten/kota;

p. melaksanakan penyiapan penjaminan ketersediaan infrastruktur industri di wilayah kabupaten/kota;

q. melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem infonnasi industri;

r. melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah kabupaten/kota;

s. melaksanakan penyiapan penertiban izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah;

t. melaksanakan peniapan izin perluasan usaha industri kecil dan izin perluasan usaha industri menengah;

u. melaksanakan penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah kabupaten/kota;

v. melaksanakan penyiapan penanaman modal di bidang industri di wilayah kabupaten/kota;

w. melaksanakan penyiapan pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota;

x. melaksanakan penyiapan pengawasan dan pengendalian usaha industry dan usaha kawasan industri di wilayah kabupaten/kota;

y. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;

z. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan industri kabupaten/kota;

aa. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyebaran dan pembangunan industri serta penanaman modal di bidang industri di wlayah kabupaten/kota;

bb. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penertiban izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah kabupaten/kota;

cc. pelaksanaan penyiapan pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri di wilayah kabupaten/kota;

dd. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

ee. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan

ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

(1) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat membentuk kelompokjabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumberdaya Aparatur Sipil Negara pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu adalah sejumlah 51 orang, terdiri dari 21 Orang PNS, PPPK 5 Orang dan 35 Orang Tenaga Kontrak. Rincian ASN sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu
Menurut Golongan, Tahun 2021

Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
II/a	1	0	1
II/b	0	0	0
II/d	0	0	0
III/a	0	1	1
III/b	1	0	1
III/c	3	0	3
III/d	2	3	5
IV/a	0	1	1
IV/b	0	1	1
IV/c	1	0	1
PPPK/IX	0	5	5
Tenaga Kontrak	8	34	42
Jumlah	**16**	**40**	**62**

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2019

Untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia PNS terdiri dari 1 (Satu) orang Pejabat Eselon II, 1 (satu) orang Eselon IIIa, 2 (dua) orang Pejabat Eselon IIIb, 2 (Orang) orang Pejabat Eselon IV, PNS staf 4 Orang serta PPPK sebanyak 5 Orang

Selain ASN yang telah disebutkan diatas, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dalam melaksanakan fungsinya juga didukung oleh Tenaga Kontrak sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) orang terdiri dari laki-laki 8 (Delapan) orang dan

perempuan 34 (Tiga Puluh Empat) orang. Masing-masing mempunyai tugas sebagai Sopir 2 (dua) orang, Kebersihan 4 (satu) orang, Aspri 2 (dua) orang, Tenaga Administrasi 27 (Dua Puluh Tujuh) orang, Operator SIPD 3 (Tiga) orang , dan Operator Administrasi 4 (Empat) orang.

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, Sumberdaya Aparatur Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu 2023 memiliki tingkat pendidikan yang sudah cukup kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan, dimana pendidikan yang sudah ditamatkan mulai dari S2, S1, D3, SMA dan SMK. Komposisi tingkat pendidikan yang ditamatkan dibagi dalam dua kelompok yakni Tingkat Pendidikan PNS dan Tenaga Kontrak, Tingkat Pendidikan PNS dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2.
Komposisi PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2021.

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase (%)
	L	P		
SMA/Sederajat	3	1	4	20,00
S1	8	3	11	55,00
S2	4	2	5	25,00
Jumlah	**14**	**6**	**20**	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh Strata Satu berjumlah 11 orang (55,55%), menyusul Strata Dua berjumlah 5 orang (25,00%), dan Tingkat SMA berjumlah 4 orang (20,00%). Tingkat pendidikan ini sudah menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja yang dapat diandalkan, apalagi didukung oleh latar belakang belakang pendidikan yang arahnya sesuai dengan bidang perekonomian dan perindustrian, namun ditinjau dari keahliannya dibidang Perekonomian dan Perindustrian memang masih membutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang intensif.

Sedangkan tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu didominasi oleh pendidikan Strata Satu (S1) SMA, D3 dan STM. Komposisi Tenaga Kontrak yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3.
Komposisi Tenaga Kontrak Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2019.

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase (%)l
	L	P		
SMA/Sederajat	4		7	50,00
D2	0	1	1	2,38
D3	1	3	3	9,52
S1	0	15	14	38,10
Jumlah	**5**	**24**	**30**	**100**

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2023

Berdasarkan tabel komposisi diatas dapat dilihat bahwa dari 42 orang tenaga kontrak, 16 orang sudah berpendidikan Strata Satu (S1) atau 38,10%, 4 orang sudah berpendidikan Diploma tiga (D3) atau (9,52%), dan ada 21 orang berpendidikan SMA atau (50,00%) dan 1 orang berpendidikan D2 atau (2,387%) angka ini menunjukkan lebih dari separuh Tenaga Kontrak sudah mampu melaksanakan tugas-tugas kedinasan pada lingkup Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu harus memperhatikan keterisian jabatan struktural berdasarkan kebutuhan Struktur Organisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu. Beberapa Komposisi yang sangat mendukung pelaksanaan tugas tersebut diantaranya terisinya Jabatan Struktural berdasarkan Eselon dan berdasarkan Bidang Penugasan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4.

Komposisi PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu

Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural Tahun 2019

No.	Jabatan	Jumlah Eselon			Keterangan
		Kebutuhan	Terisi	Lowong	
1	2	3	4	5	6
1	Eselon II.	1	1	0	Memenuhi
2	Eselon III.	3	3	0	Memenuhi
3	Eselon IV.	2	2	0	Memenuhi
4	Analisis/ pranata	25	4	18	Belum Memenuhi
Jumlah		43	20	23	

Sumber : *Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2021*

Tabel 2.5.

Komposisi PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu

Berdasarkan Bidang Penugasan Tahun 2021

No.	Uraian	Kebutuhan (orang)	Komposisi			Keterangan
			Eselon III	Eselon IV	Analisis	
1	2		3	4	5	6
1	Sekretariat	8	1	2	1	Belum Memenuhi
2	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	10	1	2	1	Belum Memenuhi
3	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	10	1	2	5	Belum memenuhi
4	Bidang Perindustrian	10	1	1	3	Belum Memenuhi

5	UPTD Industi Pangan	4	0	2	0	Belum Memenuhi

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2021

Tabel 2.6.
Komposisi PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu
Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional,
Tahun 2019.

No.	Uraian	Jabatan	Diklat yang Telah Diikuti		Ket
			Jenis Diklat	Tahun	
1	2	3	4	5	6
1	Eselon II	Kepala Dinas	Diklatpim II	2018	
2	Eselon III.a	Sekretaris	Diklatpim III	2005	
3	Eselon III.b.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Diklatpim III	2018	
4	Eselon III.b.	Kepala Bidang Pemberdayan dan Pengembagan Koperasi dan Usaha Mikro	Diklatpim III	2019	
5	Eselon III.b.	Kepala Bidang Perindustrian	Diklatpim IV	2013	
7	Eselon IV.a.	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Diklatpim		Belum
8	Eselon IV.a.	Kasubag Program dan Keuangan	Diklatpim		Belum
9	Eselon IV.a	Kepala UPTD IKM Pangan			
10	Eselon IV.b	Kasubag Tata Usaha IKM Pangan			

Sumber : *Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2023*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pengisian jabatan Eselon II, Eselon, III.a, Eselon III.b dan Eselon IV.a sudah melalui jenjang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kepangkatannya. Meski terdapat satu jabatan pada Eselon IV.a yang belum melalui Diklatpim IV, tetapi akan dilakukan Diklatpim pada waktu dekat.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu secara efektif dan efisien, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu
Tahun 2019.

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			% Ketersediaan
	jumlah	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Ac split ½ PK	10	Unit	5	1	1	70
Ac split 1 PK	3	Unit				
Ac split 2 PK	1	Unit				
Brankas	2	Unit	1		1	100
Camcorder	2	Unit				
CCTV	10	Unit	1			
Computer dekstop	10	Unit	6	1	1	80
Computer laptop	8	Unit	2			
Dispenser	2	Unit	3			
Exhaust Fan	2	Unit	5			
Filling besi/metal	6	Unit	4	2		100
Gedung kantor	1	Unit	1			100
Gorden	1	Paket	49			
Karpet	1	Roll	1			100
Kamera saku	2	Unit				
Kendaraaan Roda 2	15	Unit	8		4	80
Kendaraan Roda 4	2	Unit	2			100
Keyboard	1	Unit				
Kipas Angin	8	Unit	6		1	87,5
Kursi kerja	22	Unit	6	4		45,45

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			% Ketersediaan
	jumlah	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Kursi rapat	40	Unit	38	1		97,5
Kursi tamu	10	Unit	5			50
Lemari Arsip kaca	6	Unit	3			50
Lemari Besi	4	Unit	1	2		75
Lemari Es	5	Unit	2			40
Lemari Kayu	5	Unit	5			100
Meja kerja	40	Unit	35	3	1	97,5
Meja rapat	3	Unit	3			100
Mesin absensi(Finger Print)	2	Unit	1		1	100
Mesin FAX	2	Unit	1			50
Mesin Fotocopy	1	Unit				
Mesin penghancur kertas	1	Unit				
Mesin Pengisap Debu	2	Unit				
Mesin pompa air	2	Unit	1			50
Mesin tik manual	5	Unit	1			25
Printer	7	Unit	4		2	85,71
Proyektor dan layar	2	Unit		1		50
Rak Piring	1	Unit				
Scanner	2	Unit				
Sofa	5	Unit				
Sound system	1	Unit				
Stabilizer/stavolt	2	Unit				
Telepon	1	Unit			1	
Televisi	5	Unit	3			60
UPS	1	Unit				
Warleses	3	Unit				
Rata-rata Ketersediaan Sarana dan Prasarana						72,5

Sarana dan Prasarana atau asset yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian berdasarkan tabel diatas terbagi dalam kondisi yang tidak begitu baik

artinya dapat difungsikan secara tapi tidak maksimal, asset yang kurang baik masih dapat difungsikan tapi sudah tidak maksimal sedangkan sarana dan prasarana yang rusak berat sudah tidak dapat difungsikan lagi. Ketersediaan sarana dan prasarana dari segi jumlah belum memenuhi kebutuhan dalam membantu kelancaran tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu adalah sebesar 70%, hal ini menunjukkan bahwa masih sangat perlu dilakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung optimalnya kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu, antara lain scanner, keyboard, AC.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

2.3.1. Kinerja Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu selama Tahun 2023 yang dilaksanakan setiap tahunnya adalah Monitoring evaluasi dan Pelaporan Perkoprasian (RAT Koperasi) kabupaten luwu, Pelatihan dan Pembinaan terhadap pelaku koperasi dan UKM, Revitalisasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemeriksaan dan Pengawasan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, Promosi Akses Pasar bagi produk UKM dan Koperasi, Pendataan UMKM dikabupaten Luwu, Pembangunan Kawasan Industri yang dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan 2019, Pelatihan/Magang bagi pelaku IKM, Pameran Produk IKM melalui Event Seperti Pameran Dekranasda. Untuk menggambarkan hasil kinerja tugas dan fungsi Pemerintahan yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut:

PELAKSANAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) TAHUN BUKU 2023

NO	KOPERASI	NOMOR		ALAMAT		TANGGAL RAT	NIK	SHU/KET.
		BADAN HUKUM / AHU	TANGGAL	DESA/KEL.	KECAMATAN			
1	KOPERASI PRODUSEN TANI NELAYANG SAWERIGADING	AHU-0005590.AH.01.29.TAHUN 2022	21 OKTOBER 2022	CILALLANG KECAMATAN KAMANRE KABUPATEN LUWU	KECAMATAN KAMANRE	03 JANUARI 2024	7317100080073	Rp 38.450.000
2	KPN JUJUR	4824/BH/VI/1988	14 JUNI 1988	JALAN SUNGAI PAREMANG KELURAHAN SABE	KECAMATAN BELOPA UTARA	20 JANUARI 2024	7317110020033	Rp. 74.342.000
3	KOPERASI KREDIT KESUMA LAMASI	572/BH/KOPERINDAG/II/2008	28 FEBRUARI 2008	DESA WIWITAN TIMUR	KECAMATAN LAMASI	31 JANUARI 2024	7317090110020	Rp 489.883.774
4	KSP PAYUNG KESRA LAMASI	AHU-008734.AH.01.26 TAHUN 2021	25 FEBRUARI 2021	DESA WIWITAN TIMUR	KECAMATAN LAMASI	17 JANUARI 2024	7317090110042	Rp 217.203.394
5	KSP BELOPA ABADI	651/BH/KOPERINDAG/IV/2012	30 APRIL 2012	JALAN TOPOKA	KECAMATAN BELOPA	13 JANUARI 2024	7317030090001	Rp 52.741.477
6	KSU AKTUAL UTAMA	55/BH/KDK.209/IV/1999	12 APRIL 1999	JL. PENDIDIKAN DESA LEMPOPACCI	KECAMATAN SULI	24 JANUARI 2024	7317030070001	Rp 121.357.124
7	KSP BINTANG PURNAMA BELOPA	007787/BH/M.KUMKM.2/III/2018	20 MARET 2018	JALAN MERDEKA NO. 17 KELURAHAN SENGA	KECAMATAN BELOPA	28 FEBRUARI 2024	7317110040001	Rp 45.374.784

11	KSP MANURUNG SEJAHTERA	586/BH/UMKM/XII/18/12.2008	18 DESEMBER 2008	JL. DG. PAWELLANG NO. 12 BELOPA	KECAMATAN BELOPA UTARA	25 MARET 2024	7317030080080	Rp 117.930.533
12	KSP SINAR ABADI BELOPA	AHU-0012044.AH.01.26.TAHUN 2021	07 SEPTEMBER 2021	KEL. SABE	BELOPA UTARA	3 MARET 2024	7317110060077	Rp 13.890.000
13	KSP CAHAYA USAHA MANDIRI	AHU-0008221.AH.01/26/2021	29 JANUARI 2021	KEL, PAMMANU	BELOPA UTARA	24 MARET 2024	7317110090002	Rp 12.750.000
14	KSP FIQAH MANDIRI BHR	AHU-0003960.AH.01.29.TAHUN 2023	21 SEPTEMBER 2023	JL. TRANS SULAWESI BELOPA UTARA, KEL. PAMMANU	BELOPA UTARA	08 FEBRUARI 2024	7317110060078	Rp 4.200.000
15	KOPWAN TUNAS MEKAR	640/BH/KOPERINDAG/IX/2011	27 SEPTEMBER 2011	JALAN TOPOKA SENGA(KEL. TANAMANAI)	KECAMATAN BELOPA	15 MARET 2024	7317110070002	Rp 5.847.500
16	KOPERASI PRODUSEN SUMBER BAHARI SEJAHTERA	AHU-0000662.AH.01.29.TAHUN 2023	13 FEBRUARI 2023	LINGKUNGAN PANNORI KELURAHAN BONEPUTE LAROMPONG	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN	14 MARET 2024	7317011020061	Rp 3.500.000

18	KOPERASI PEMASARAN NELAYAN SAMUDRA MARIO	531/BH/KOPERINDAG/IV/2006	07 APRIL 2006	JL. PELABUHAN ULO-ULO BELOPA	KECAMATAN BELOPA	27 JANUARI 2024	7317110020001	Rp 9.380.000
19	KPN RSUD BATARA GURU	534/BH/Koperindag/V/2006	24 MEI 2006	JL. TOMAKAKA DESA LEBANI	KEC. BELOPA UTARA	07 MARET 2024	7317110040003	Rp 155.148.930
20	KOPERASI PRODUSEN CAHAYA AL GAZALI TANI MANDIRI	AHU.0006662.AH.01.26.TAHUN 2020	20 NOVEMBER 2020	DESA SEPPONG	KEC. BELOPA UTARA	17 JANUARI 2024	7317110080079	TIDAK ADA DI LAPORAN RAT
21	KOPERASI NELAYAN MINA TUNA CIMPU	397/BH/KDK.209/IX/2000 AHU-0004387.AH.01.39.TAHUN 2024	10 AGUSTUS 2000 03 OKTOBER 2024	DESA CIMPU SELATAN	KEC. SULI	05 FEBRUARI 2024	7317020030017	Rp 75.000.000

Sumber:Laporan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang kelembagaan dan Pengawasan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat 21 koperasi yang melaporkan pelaksanaan RAT secara rutin kepada Dinas dari sejumlah 169 koperasi di Kabupaten Luwu.

Koperasi yang telah melakukan RAT rutin selama 3 tahun adalah syarat untuk mendapatkan NIK (Nomor Induk Koperasi) dari Kementrian Koperasi dan UKM, tahun 2023 terdapat 21 Koperasi di kabupaten Luwu yang mendapat NIK yang terdaftar di Online Data System. Suatu pencapaian yang sangat baik bagi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu karena sebelumnya Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian belum pernah memproses Koperasi untuk mendapatkan NIK. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa NIK adalah legalitas yang sah bagi koperasi. Berikut adalah daftar koperasi di Kabupaten Luwu yang mendapatkan NIK pada tahun 2023

Tabel 2.9

KOPERASI YANG TELAH MENDAPATKAN NIK

TAHUN 2023

No	NAMA KOPERASI	WILAYAH (KECAMATAN)
1.	KSU Angkasa	Kecamatan Bua
2.	KSU Bumi Sawerigading	Kecamatan Bupon
3.	KSP Manurung Sejahterah	Kecamatan Belopa Utara
4.	Koptan Sumber Harapan	Kecamatan Larompong Selatan
5.	Kopkar PT. Panply	Kecamatan Bua
6.	Koperasi Produser Karya Mario	Kecamatan Ponrang
7.	Kopnel Maju Bersama	Kecamatan Ponrang
8.	Kopnel Surya Bajoe	Kecamatan Belopa
9.	Kopwan Bina Sukses	Kecamatan Latimojong
10.	Kopwan Tunas Mekar	Kecamatan Suli
11.	KSP Bakti Mulia	Kecamatan Bajo
12.	KSU Aktual Utama	Kecamatan Suli
13.	Koptan Kakao Peduli	Kecamatan Larompon
14.	Kopnel Beringin	Kecamatan Suli
15.	KSP Belopa Abadi	Kecamatan Belopa
16	KPN Jujur	Kecamatan Belopa
17	KSU Amanah	Desa Tarramattekeng

Sumber : Laporan Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaporan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2023 Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian telah berhasil mengfasilitasi koperasi aktif untuk mendapatkan NIK dan berpeluang mendapatkan bantuan dari Kementrian Koperasi dan UKM.

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu dalam pengembangan UMKM setiap tahunnya melakukan Koordinasi dengan Dinas Terkait pada tingkat Provinsi dan Kementrian Koperasi dan UKM untuk memberikan Bantuan Usaha kepada UKM yang ada di Kabupaten Luwu. Bantuan Usaha Yang diberikan kepada UKM diambil melalui kegiatan Pendataan UMKM. Berikut Data UMKM dan persentase pertumbuhannya sejak tahun 2020-2025.

Tabel 2.10

Data UMKM Kabupaten Luwu

2020-2025

No.	Uraian	Capaian					Target
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Koperasi Koperasi Aktif	154	164	171	175	179	200
3.	Jumlah Usaha Mikro dan Menengah Aktif	21.647	22.732	23.632	23.685	24.232	
4.	Presentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	-	0.44	0.20	0.36	1.21	3.13
5.	Jumlah Pertumbuhan data industri	1969	2050	2150	2258		

Sumber : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupatan Luwu

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada setiap indikator kinerja. Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu sesuai dengan indicator yang terdapat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Daerah Kabupaten Luwu

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Capaian Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Pada Tahun Ke-	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Jumlah Koperasi Aktif				154	164	171	175	179	**200**
2.	Persentase Koperasi Aktif				29.99	40.00	30.71	44.10		
3.	Jumlah Usaha Mikro dan Menengah Aktif				21.647	22.732	23.632	23.685		
4.	Presentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif				90.10	90.50	86.0	86.5		
5.	Pertumbuhan Industri				-7,21	4,11	4.87	5.02	-7,21	

Berdasarkan hasil interpretasi atas capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu dapat dilihat bahwa capaian kinerja belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut antara lain:

1. Interpensi kepentingan politik dalam penyusunan target dan anggaran kegiatan tahunan.
2. Belum optimalnya Melaksanakan Program Kegiatan yang ditingkat perangkat daerah.
3. Adanya perubahan peraturan perundang undangan dibidang perencanaan maupun penganggaran

1.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu didukung dengan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi, baik berupa belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Rincian alokasi maupun realisasi belanja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu tahun 2023 – 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Tahun 2024-2025

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2023	1.907.283.873	1.851.954.840	97,09
2	2024	1.953.672.667	1.937.748.138	97,14

Sumber : CALK Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

2. Belanja Langsung

Target dan Realisasi Belanja Langsung
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Tahun 2024-2025

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2023	3.677.320.000	3.627.942.082	98,66
2	2024	29.044.625.000	28.837.682.962	99,29

Sumber : CALK Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

Dari data tersebut diatas, terlihat bahwa rata-rata realisasi anggaran belanja langsung Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu adalah sebesar 99 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu sudah membaik, dilihat dari peningkatan realisasi anggaran dalam 2 tahun terakhir. Pelaksanaan program dan kegiatan pada dasarnya telah berjalan dengan baik, namun demikian pemahaman tentang aturan dan petunjuk teknis permendagri nomor 13 tahun 2006 dan permendagri nomor 59 tahun 2008 yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan masih belum optimal. Hal ini menyebabkan keterlambatan pencairan dana dan juga keterlambatan pertanggung jawaban.

Permasalahan lainnya adalah Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem (e-planning), manjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda&Litbang sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencanayang telah ditetapkan.

Permasalahan lainnya pada asset, sarana dan prasarana di Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwuberkaitan dengan dengan Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) terutama yang dipergunakan oleh pejabat yang sudah tidak lagi bertugas di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan Urusan Perkoperasian UKM dan Perindustrian, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu:

Tantangan pengembangan pelayanan Kabupaten Luwu

1. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian adalah Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Perda Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam pelayanannya kurang optimal, karena struktur organisasi, tugas, fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah sebelumnya sudah pasti berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk sekarang.
2. Belum optimalnya sistem pengelolaan data/informasi yang dapat menghimpun seluruh produk Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian secara terintegrasi sehingga

informasi mengenai produk Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian masih sulit diakses oleh masyarakat.

3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian ;
4. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data Koperasi, UKM dan IKM yang tersusun secara sistematis dan akurat;
6. Peningkatan daya saing Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar untuk mendukung perekonomian di kabupaten Luwu;
7. Persaingan usaha yang makin ketat di era Globalisasi, Pasar Bebas dan kompetisi di tingkat nasional maupun internasional: AFTA dan MEA, sehingga dibutuhkan kreatifitas inovasi dan pengembangan produk

Sesuai dengan dinamika perekonomian yang sangat penting, dapat diidentifikasi peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Luwu sebagai berikut:

1. Bantuan modal dan peralatan kepada pelaku usaha;
2. Tersedianya Bahan baku yang memadai, mengingat potensi sumber daya alam yang banyak dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah;
3. Tersedianya Rancangan Induk Perindustrian Daerah (RIPID) sehingga perencanaan perindustrian bisa berkesinambungan selama 20 tahun;

Berdasarkan peluang dan permasalah pelayanan SKPD sebagaimana diuraikan diatas, maka optimalisasi kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu dimasa yang akan datang diarahkan untuk:

Tabel

Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Tahun 2025-2026

No	Jenis Pelayanan	Kelompok sasaran
1	Pembentukan Koperasi	- Masyarakat Biasa - Masyarakat profesi - Kelompok UKM /IKM
2	Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitas, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan	Seluruh perangkat daerah dilingkungan pemerintakabupaten Luwu
3	Penjaringan aspirasi dan partisipasi stakeholders pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah	Maysarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dsb

BAB III

PERMASALAHAN & ISU - ISU STRATEGIS

Sejalan dengan konteks pembangunan disuatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu melakukan orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Luwu tahun 2025-2026

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi UKM dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Permasalahan utama yang dihadapi bidang kelembagaan dan pengawasan secara ringkas ditampilkan pada Tabel..... Permasalahan tersebut berkaitan dengan organisasi, usaha, sumber daya manusia (SDM), system pendukung dan iklim usaha.

Aspek	Permasalahan
Organisasi	1) Bentuk kegiatan/aktivitas tidak dijalankan sesuai dengan kesadaran masing-masing anggota dan bagian-bagian di dalam organisasi koperasi tidak mampu bekerja secara normal. 2) Tidak harmonisnya komunikasi antara pegurus yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak terjadi hubungan yang baik dan lancar
Usaha	Tingkat persaingan usaha koperasi dengan jenis usaha lainnya salah satunya persaingan koperasi dengan usaha ritel, disebabkan koperasi kekurangan modal usaha dibandingkan dengan usaha ritel yang ada sekarang ini.
Sumber Daya Manusia	Rendahnya SDM Pengurus Koperasi sehigga pengelolaan tidak maksimal dilakukan
Sistem Pendukung dan Iklim Usaha	Pengurus tidak punya kemampuan bersaing di era global dengan sistem digital disebakan oleh sistem SDM rendah

2. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

Permasalahan utama yang dihadapi koperasi secara ringkas ditampilkan pada Tabel I.5. Permasalahan tersebut berkaitan dengan organisasi, usaha, sumber daya manusia (SDM), system pendukung dan iklim usaha.

Tabel 3.1 Permasalahan dalam Pengembangan Koperasi Indonesia

Aspek	Permasalahan
Organisasi	Terdapat jabatan pada bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang masih lowong. Mulai dari tingkat eselon III sampai tingkat eselon IV, belum lagi staf yang tidak ada untuk setiap jabatan tersebut. Yang ada hanya tenaga kontrak atau tenaga honorer. Oleh sebab itu pelaksanaan tupoksi pada bidang tersebut belum maksimal.
Usaha	1) Kurangnya bantuan modal usaha berupa dan dan alat. Sehubungan dengan jenis UMKM yang terdapat di Kabupaten Luwu adalah usaha Mikro yang nilai asetnya dibawah 50.000.000,00 2) Kurangnya Modal Koperasi

Sumber Daya Manusia	Rendahnya SDM Pengurus Koperasi dan Pelaku UMKM sehigga pengelolaan tidak maksimal dilakukan
Sistem Pendukung dan Iklim Usaha	1) Tidak terdapat data yang terupdate setiap semester. 2) Dana/ Anggaran Pembinaan/Pelatihan untuk UMKM yang aktif dan berkualitas

3. Bidang Perindustrian

Permasalahan utama yang dihadapi pada bidang perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Produk yang dihasilkan oleh Industri kecil Menengah sebagian besar masih belum dapat bersaing dipasaran baik kualitas maupun kuantitas;
2. Kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha industri yang masih perlu ditingkatkan;
3. Entrepreneur ; minimnya jiwa kewirausahaan para pelaku IKM yaitu orang yang mampu membawa perubahan baru dan ide-ide baru dalam bidang kewirausahaan;
4. Sentra-sentra produksi Industri Kecil Menengah belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama;
5. Sarana Perindustrian masih perlu di tambah.
6. Setiap desa mempunyai industri yang punya potensi dan menjadi andalan Kabupaten Luwu.

Visi Kabupaten Luwu yang hendak dicapai pada tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

“ KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN MANDIRI,

DALAM NUANSA RELIGI”.

3.2.1.1 Penjabaran dari Visi adalah sebagai berikut :

MAJU : Mengandung makna terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang di tandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh transformasi birokrasi secara bertahap.

SEJAHTERA : Mengandung makna suatu keadaan masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningktakan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.

MANDIRI : Mengandung makna dengan kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintahan daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan di dukung oleh kemampuan sumber daya manusia.

RELIGI : Mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

3.2. Misi Kabupaten Luwu adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional berwibawa amanah, transfaran dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan koperasi usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja

5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan mewujudkan masyarakat kabupaten Luwu yang religius
7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat pedesaan
8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.

3.2.2 Program Kerja

A. MISI PERTAMA

Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel

Program yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sistem reformasi birokrasi dan pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.
2. Membentuk Badan Pelayanan Terpadu dalam Pelayanan Satu Pintu atau Satu Atap (One Stop Service)
3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah mulai dari kabupaten, kecamatan sampai apaaratur desa dan kelurahan.
4. Membangun pemerintahan yang tertib hukum, tertib administrasi, tertib penyusunan perencanaan dan tertib pengelolaan keuangan.
5. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan (KK, KTP, Akta kelahiran) secara gratis.
6. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Permendagri No.69 Tahun 2012 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri.
7. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

B. MISI KEDUA

Meningkatkan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

1. Bidang Pendidikan :

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

a) Membangun sarana dan Prasarana pendidikan yang berkualitas, tersedia merata dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

b) Memberikan tunjangan pakasi kepada guru yang bertugas di daerah terpencil, atau daerah dengan jarak jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi,

c) Memberikan beasiswa kepada pelajar berprestasi mulai SD, SMP, SMA atau sederajat yang di prioritaskan pada siswa dari warga kurang mampu dengan indikator penilaian yang terukur dan konsisten.

d) Memberikan bantuan penyelesaian pendidikan kepada Mahasiswa (i) : S1 sebesar Rp. 2.500.000,- S2 sebesar Rp. 5.000.000,- dan S3 sebesar Rp. 7.500.000,-

e) Memberikan beasiswa kepada guru berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan di daerah.

f) Peningkatan pelayanan pendidikan dasar sesuai Permendiknas No. 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota.

2. Bidang Kesehatan

a) Membangun sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas, tersedia merata dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,

b) Memberikan tunjangan pakasi kepada bidan desa atau tenaga kesehatan di daerah terpencil, atau daerah dengan jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi.

c) Menyediakan Layanan Ambulance dan Mobil Jenazah gratis di setiap kecamatan.

d) Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai Keputusan Meteri Kesehatan No. 828/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

e) Peningkatan pelayanan minimal rumah sakit sesuai Keputusan Meteri Kesehatan No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

f) Peningkatan pelayanan disetiap PUSKESMAS sesuai Keputusan Meteri Kesehatan No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Kebijakan Pusat Kesehatan Masyarakat.

C. MISI KETIGA

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Program Prioritas yang Akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan.

2. Mewujudkan dan Pemerataan pembangunan Infrastruktur pada wilayah kecamatan dan desa.
3. Penyediaan kebutuhan air bersih yang cukup dan berkualitas bagi *Masyarakat, Industri* serta jenis usaha lainnya.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat yang dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten Luwu.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara yang dapat memudahkan mobilitas manusia maupun barang untuk keluar dan masuk daerah.
6. Pembangunan jalan baru dengan tujuan untuk pembukaan daerah terpencil dan tertinggal.
7. Penataan dan pembangunan infrastruktur rencana Ibu kota pemekaran Kabupaten Luwu Tengah.

D. MISI KEEMPAT

Pengembangan Ekonomi kerakyatan, melalui Pengmbangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Pengembangan Koperasi, UMKM, pedagang tradisional melalui fasilitas bantuan modal usaha.
2. Mendorong usaha ekonomi kreatif melalui pemberdayaan UMKM dan BUMDes.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakankesempatan kerja.
4. Meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja pada sektor swasta melalui peningkatan upah minimum kabupaten.
5. Memberikan Kemudahan izin usaha bagi masyarakat kurang mampu.

E. MISI KELIMA

Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah yang Tangguh Berbasis Agribisnis.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.

2. Memberikan bantuan bibit gratis (pertanian, peternakan dan Perikanan) kepada petani dan nelayan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah (Penyuluh) bidang pertanian, peternakan dan perikanan,
4. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.
5. Memberikan Bantuan modal usaha dan pendampingan kepada kegiatan pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan.
6. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pendampingan pemberdayaan.

F. MISI KEENAM

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dalam mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu yang Religi.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Peningkatan pemahaman, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai keagamaan.
2. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
3. Pembinaan kelembagaan kegamaan dengan koordinasi kegiatan keagamaan dengan seluruh stakeholder.
4. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama dengan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana keagamaan.
5. Memberikan Insentif kepaa Pegawai Syara', Pendeta, Guru Mengaji. Guru TPA dan guru sekolah minggu.
6. Pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal.

G. MISI KETUJUH

Optimalilsasi Otonomi Desa dan pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa.
2. Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan.

H. MISI KEDELAPAN

Menciptakan iklim Investasi dan usaha yang kondusif.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Menciptakan stabilitas iklim politik, sosial dan ekonomi.
2. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.
3. Memperbaiki kondisi/menyediakan infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan).
4. Pemebrian Insentif dan pemberian kemudahan penanaman Modal (investasi) di daerah mengacu pada Permendagri No. 64 Tahun 2012.

I. MISI KESEMBILAN

Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manuasia, untuk mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mendorong regulasi daerah yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan investasi.
2. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum dengan mengadakan program sertifikasi lahan gratis.
3. Memperkuat regulasi yang menjamin standar pelayanan minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik.
4. Meninjau kembali peraturandaerah yang berdampak pada tidak kondusifnya keuangan daerah, terjadinya ekonomi biaya tinggi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
5. Memberikan layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat kurang mampu.
6. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, ORMAS dan OKP dalam melakukan kampanye dan advokasi hak-hak hukum kepada masyarakat.

J. MISI KESEPULUH

Mewujudkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Serta Penanggulangan Bencana.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan perbatasan daerah dan kawasan rawan bencana.
2. Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta serta masyarakat.
3. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.
4. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan alam.
5. Mengoptimalkan drainase dan aliran sungai guna mengurangi resiko banjir.
6. Menerbitkan peraturan-peraturan yang menunjang upaya pengendalian lingkungan hidup.
7. Melakukan kerjasama dengan tenaga ahli yang berkompeten dibidang penanggulangan dan penanganan bencana.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Luwu yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019 –2024 yaitu :

“LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DALAM NUANSA RELIGI”

Visi

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Luwu	:	Adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya KabupatenLuwu dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasandengan batas-batas tertentu.
Maju	:	Mengandung makna terwujudnya kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh informasi birokrasi secara bertahap.
Sejahtera	:	Mengandung makna suatu keadaan masyarakat kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.
Mandiri	:	Mengandung makna dengan kemandirian pengelolaan daerahberupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yangdisukung oleh kemampuansumber daya manusia.
Religi	:	Mengandung makna suatu kondisi masyarakatKabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan

pengamalan agamanya dalam tataran kehidupan masyarakat.

MISI

Misi-misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkahyang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Hal- hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah :***Peradaban Manusia yang Maju, Masyarakat yang sejahtera,ekonomi yang mandiri dan kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang religi***. Keempat hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kabupaten Luwu.

Adapun Misi tersebut terdiri dari:

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa amanah transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja;
5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat kabupaten luwu yang religius;
7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan;
9. Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia untuk mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif;
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Renstra-PD merupakan pelaksanaan dari RPJMD. Oleh karena itu, rumusan kebijakan dalam Renstra-PD harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Sehubungan dengan itu Misi RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu adalah Misi 4 (Empat) yaitu Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja.

Permasalahan dan akar masalah terkait dengan perwujudan pemerintahan yang profesional, berwibawa amanah transparan dan akuntabel yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel

Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah

RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

Pengembangan ekonomi Kerakyatan melalui pengembangan Koperasi, Usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja

Permasalahan	Akar Masalah
Pengembangan ekonomi Kerakyatan melalui pengembangan Koperasi, Usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja	
UMKM belum berkembang dengan baik	Rendahnya daya serap tenaga kerja pada sector industri. Masih rendahnya akses UMKM terhadap akses permodalan dan layanan perbankan .

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra-PD Prov Sulsel

3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan

Maksud, tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari visi misi Pemerintah Republik Indonesia, Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, cita-cita dan acuan

pengelolaan Koperasi dan UKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM, visi misi Gubernur Sulawesi Selatan beserta program-program yang dijanjikannya selama 5 tahun kedepan.

Maksud dari pembinaan Koperasi dan UKM adalah mendorong pencapaian kemandirian Koperasi dan UKM yang mampu meningkatkan daya angkat dan daya dorong pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi wilayah, melalui fasilitasi kegiatan usaha yang berorientasi bisnis.

Adapun tujuan pembinaan adalah:

1. Teridentifikasi, terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan dan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang Koperasi dan UKM guna menjamin keberlangsungan proses bisnis secara profesional.
2. Meningkatnya kemampuan memasarkan produk yang telah memenuhi standar dengan dukungan sarana prasarana yang dimiliki guna meningkatkan derajat daya saing di bidang Koperasi dan UKM.
3. Meningkatnya kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengakses dan memperluas permodalan, serta kemitraan usaha.
4. Meningkatnya ketersediaan ruang-ruang usaha baik formal maupun informal untuk wirausaha yang sudah ada dan wirausaha baru bagi peningkatan skala usaha dan skala pasar.
5. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha,.

Dalam pembinaan Koperasi dan UKM, prioritas perhatian diberikan pada aspek yang terkait dengan kepentingan umum. Pemerintah sebagai organ pelayanan publik memiliki tanggung jawab dalam penyediaan segala aspek yang terkai dengan kepentingan umum. Pendeteksian atas berbagai faktor yang ikut memiliki kontribusi dalam mempengaruhi stabilitas kegiatan pelaku usaha dilakukan melalui pemantapan kelembagaan (strategi, struktur dan instumen) dengan mengutamakan kepentingan umum.

Melalui tujuan tersebut, dikembangkanlah sasaran-sasaran sebagai berikut :

Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM layak secara bisnis; Penyediaan Produk hasil usaha Koperasi dan UKM yang bernilai tinggi, daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standardisasi pasar; Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki akses seluas- luasnya terhadap pengembangan sumber daya (manusia, modal teknologi sesuai

potensi yang dimiliki);

Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki daya saing dalam perekonomian wilayah, nasional dan internasional;

Dukungan Sinkronisasi Tata Ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan;

Pembuatan sentra-sentra usaha baru sesuai daya dukung dan potensi wilayah disetiap kecamatan;

Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha, konsumen dan produk.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan serta sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah sekaligus sebagai kelengkapan dari seluruh tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan sangat menentukan pencapaian keberhasilan proses pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu kondisi merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Suatu kondisi menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(*outcome)* program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Perumusan tujuan dan sasaran menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra-PD. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan. Jawab

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Berau, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian merujuk pada visi Kabupaten Luwuyang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten LuwuTahun 2025-2026 yaitu ***"KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI".*** Untuk terwujudnya visi tersebut, misi RPJMD yang diemban Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian adalah misi keempat yaitu "**Mengembangkan**

Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja".

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan Jangka Menengah Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 adalah:

1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi, UMKM dan Industri.
2. Meningkatkan Kinerja Internal Aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rancangan perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

4.2 Sasaran

Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun kedepan. Adapun sasaran jangka menegah Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu ialah sebagai berikut ini:

1. Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing dan produktivitas Koperasi, UMKM dan Industri
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.

Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu, Tahun 2025-2026 Beserta Indikator dan Target

Visi RPJMD Tahun 2025-2026 : "Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi"

Misi IV : " Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja "

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Perekonomian Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	%	6,26	nn				7,85
		Meningkatnya Kemandirian, Daya Saing dan produktivitas Koperasi, UMKM dan Industri Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	%	44	46	47,25	48,5	50	50
			Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Aktif	%	30,00	30,35	30,75	30,95	40,58	40,58
			Pertumbuhan Industri	%	6,09	7,10	7,95	8,25	8,89	9,35
2.	Meningkatkan kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu	Kategori SAKIP Perangkat Daerah	CC	B	BB	BB	BB	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu, perlu secara terus menerus mengembangkan strategi dan kebijakan. Meningkatnya persaingan, tentangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu untuk mempersiapkan diri agar senantiasa mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak.

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koperasi UKM dan Perindustrian. Oleh karena itu, dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan daerah perlu adanya peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri sehingga pada akhirnya nanti tercapai suatu rumusan kebijakan yang relevan dan efisien dalam menggunakan setiap pendanaan pagu indikatif pembangunan.

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang merupakan penjabaran dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan kedalam program-program.

Strategi dan Kebijakan yang akan digunakan dalam menjalankan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

5.1 Peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan tata cara dalam pengelolaan pembangunan daerah untuk menghasilkan berbagai rumusan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah, dan perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh setiap unsur penyelenggara pembangunan daerah dan masyarakat dalam hal ini Kabupaten Luwu. Dalam implementasi pelaksanaan sistem tersebut, perlu adanya berbagai integrasi dan sinkronisasi antara satu dokumen dengan dokumen perencanaan lainnya sehingga dalam tindak lanjut program dan kegiatan terjadi keselarasan utamanya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Hal tersebut menjadikan peningkatan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah penting untuk dipahami dan dikondisikan bersama sebagai bagian dari optimalisasi pencapaian target pembangunan daerah. Selain itu, lebih penting lagi dalam meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan adalah merealisasikannya menjadi satu tatanan struktur organisasi yang utuh dan saling membantu, berkoordinasi, dan mendukung antar bidang urusan pembangunan (perangkat daerah) sehingga Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian selaku koordinator perencana pembangunan dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu.

Strategi peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah digunakan untuk mencapai sasaran “meningkatnya capaian sasaran RPJMD” dengan arah kebijakan :

- Mendorong dan koordinasi pengaktifan Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Peningkatan kualitas tatakelola koperasi
- Penguatan Wirausaha Muda melalui kerjasama organisasi pengusaha
- Peningkatan kualitas pengelolaan koperasi
- Akselelarasi pertumbuhan ekonomi dan terbukanya potensi lapangan kerja baru
- Pengembangan pengelolaan Koperasi berbasis inovasi
- Pemantapan pertumbuhan UKM terutama pada bidang produk unggulan daerah

5.2 Peningkatan kapasitas kelembagaan internal Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

Pengembangan kapasitas adalah proses dimana individu, organisasi, lembaga dan kemampuan masyarakat dikembangkan untuk melakukan fungsi, memecahkan

masalah dan mengatus pencapaian tujuan. Pengembangan kapasitas kelembagaan menekankan pada pemberdayaan individu dan organisasi serta menngharuskan pendekatan sistematis yang dipertimbangkan dalam merancang pengembangan kapasitas strategi dan program. Sementara itu, pengembangan kapasitas lembaga merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk menjadi organisasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Kapasitas lembaga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Kapasitas kelembagaan mencakup sumberdaya, pengetahuan, dan proses yang digunakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Ini terdiri atas fisik, infrastruktur, teknologi, sumberdaya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan manajemen serta jaringan dan hubungan dengan organisasi lain. Dengan adanya pengembangan kapasitas lembaga perencana diharapkan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian akan menjadi lebih baik dan mampu mengatasi permasalahan pembangunan daerah.

Strategi pengembangan kapasitas kelembagaan internal Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian digunakan untuk mencapai sasaran “meningkatnya capaian sasaran RPJMD” dengan arah kebijakan:

- Mendorong dan koordinasi pengaktifan Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Peningkatan kualitas tatakelola koperasi
- Penguatan Wirausaha Muda melalui kerjasama organisasi pengusaha
- Peningkatan kualitas pengelolaan koperasi
- Pengembangan pengelolaan Koperasi berbasis inovasi

Pemantapan pertumbuhan UKM terutama pada bidang produk unggulan daerah Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra-PD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian tahun 2025-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

Tahun 2025-2026

Visi RPJMD Tahun 2025-2026 : "Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi"			
Misi : " Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja "			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kemandirian, Daya Saing dan produktivitas Koperasi, UMKM dan Industri Kecil Menengah	Melaksanakan dan mengakselerasikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutanb dengan berfokus pada pengoptimalan sumber ekonomi unggulan daerah dan sector baru yang berkesesuaian dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah	Mendorong dan koordinasi pengaktifan koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			Peningkatan Kualitas tatakelola koperasi
			Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap tahapan dan tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Akselelarasi pertumbuhan ekonomi dan terbukanya potensi lapangan kerja baru
Meningkatkan tata kelola kelembagaan koperasi dan usaha koperasi secara berkelanjutan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Optimalisasi ketersediaan sumber daya perangkat daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai

kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2025-2026) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan. Rencana strategis beserta turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD teknokrat Kabupaten Luwu 2025-2026.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dalam kurun waktu Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program-program tersebut di atas merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur

sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi dimana semua muara program akan mencapai tujuan pembangunan daerah. Hubungan antara program dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.

Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab serta Lokasi

Renstra-PD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Unit kerja Penanggungjawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kinerja Internal Aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**Sekretariat**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**Sekretariat**	

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Sekretariat	Kab. Luwu
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Sekretariat	Kab. Luwu
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	Sekretariat	Kab. Luwu
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu**	Sekretariat	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	Sekretariat	Kab. Luwu
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Sekretariat	Kab. Luwu

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang disusun	Sekretariat	Kab. Luwu
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	Sekretariat	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Sekretariat	Luar Kab. Luwu
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase pemenuhan administrasi Umum**	Sekretariat	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Sekretariat	Kab. Luwu
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	Sekretariat	Kab. Luwu
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	Sekretariat	Kab. Luwu
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Sekretariat	Kab. Luwu
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Sekretariat	Kab. Luwu

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Sekretariat	Kab. Luwu, luar daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan**	Sekretariat	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	Sekretariat	Kab. Luwu
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	Sekretariat	Kab. Luwu
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Sekretariat	Kab. Luwu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	Sekretariat	Kab. Luwu
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan pemeliharaan/rehab dan terbayar pajaknya	Sekretariat	Kab. Luwu
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	Sekretariat	Kab. Luwu

Meningkatkan Perekonomian Daerahi	Meningkatnya Kemandirian, Daya Saing dan produktivitas Koperasi, UMKM dan Industri Kecil Menengah	**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Cakupan penyelenggaraan pengawasan**	**Bid. Kelembagaan dan Pengawasan**	
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten	**Cakupan penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten**	**Bid. Kelembagaan dan Pengawasan**	**Kab. Luwu**
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu
		PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase KSP/USP yang sehat**	**Bid. Kelembagaan dan Pengawasan**	**Kab. Luwu**

		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	**Cakupan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi**	**Bid. Kelembagaan dan Pengawasan**	**Kab. Luwu**
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten	Laporan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten	Jumlah KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten yang diberikan penghargaan	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu
		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase pengurus koperasi yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan**	**Bid. Kelembagaan dan Pengawasan**	**Kab. Luwu**
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten	**Cakupan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten**	**Bid. Kelembagaan dan Pengawasan**	**Kab. Luwu**
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan kompetensinya	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu

		PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase koperasi yang telah dilakukan pemberdayaan dan perlindungan**	**Bid. Kelembagaan dan Pengawasan**	Kab. Luwu
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten	**Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten**	**Bid. Kelembagaan dan Pengawasan**	**Kab. Luwu**
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten	Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu
		PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif**	**Bid. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro**	**Kab. Luwu**

		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro	Bid. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Luwu
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen data potensi dan pengembangan usaha mikro	Bid. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Luwu
		Pemberdayaan Kelembagaan, Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta Pelatihan dan meningkatnya Kualitas SDM Bagi Pelaku UMKM dan Jumlah Usaha Mikro Yang Mendapatkan Bantuan	Bid. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Luwu
		PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	Bid. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Luwu
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Bid. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro**	**Kab. Luwu**

		Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Bid. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Luwu
		PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Cakupan penyelenggaraan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten**	**Bidang Perindustrian**	Kab. Luwu
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	**Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun**	**Bidang Perindustrian**	**Kab. Luwu**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pameran Industri Yang dilaksanakan	Bidang Perindustrian	Kab. Luwu/ luar Kab. Luwu
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Bidang Perindustrian	Kab. Luwu

		PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN	**Cakupan penyelenggaraan penerbitan IUI Kecil dan IUI Menengah**	**Bidang Perindustrian**	**Kab. Luwu**
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	**Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan Perisinan Industri Lingkup IUI,IPUI,IUKI dan IPKI**	**Bidang Perindustrian**	**Kab. Luwu**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri	Bidang Perindustrian	Kab. Luwu

		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Cakupan penyelenggaraan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten**	**Bidang Perindustrian**	**Kab. Luwu**
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten	**Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi SINAS**	**Bidang Perindustrian**	**Kab. Luwu**
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data informasi industri kabupaten yang dipublikasikan	Bidang Perindustrian	Kab. Luwu

Tabel 6.2.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Renstra-PD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

Tahun 2025-2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Perangkat Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		2021		2022		2023		2024		Keterangan	
						Tolok Ukur	Satuan	K	APBD 2021	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	K	Rp	Sumber Dana	Kelompok Prioritas
(1)					*(2)*	*(6)*	*(9)*		*(7)*	*(8)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*			*(13)*	*(14)*
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3.577.429.705		4.333.862.924		4.817.272.722		4.853.884.148		
2	17				Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian				3.207.429.755		3.963.862.924		4.487.272.722		4.521.634.148		
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100,00	3.017.929.755	100,00	3.347.969.974	100,00	4.076.993.022	100,00	4.056.054.448		
2	*17*	*01*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu*	*%*	*100,00*	*6.355.400*	*100,00*	*9.998.300*	*100,00*	*10.998.300*	*100,00*	*10.998.300*		

2	1 7	0 1	2. 01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Dokumen	2,00	2.322.100	2,00	2.500.000	2,00	2.500.000	2,00	2.500.000	DAU	3
2	1 7	0 1	2. 01	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1,00	2.040.000	1,00	1.500.000	1,00	2.000.000	1,00	2.000.000	DAU	3
2	1 7	0 1	2. 01	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen			1,00	1.500.000	1,00	1.500.000	1,00	1.500.000	DAU	3
2	1 7	0 1	2. 01	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen			1,00	1.500.000	1,00	1.500.000	1,00	1.500.000	DAU	3
2	1 7	0 1	2. 01	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen			1,00	1.500.000	1,00	2.000.000	1,00	2.000.000	DAU	3
2	1 7	0 1	2. 01	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	Dokumen	4,00	1.993.300	2,00	1.498.300	2,00	1.498.300	2,00	1.498.300	DAU	3
2	***1 7***	***0 1***	***2. 02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu***	***%***	***100, 00***	***2.208.991. 875***	***100, 00***	***2.459.298. 214***	***100, 00***	***2.483.489. 612***	***100, 00***	***2.507.507. 738***		
2	1 7	0 1	2. 02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	OB	300	2.204.074. 675	300	2.321.279. 814	300	2.344.492. 612	300	2.367.937. 538	DAU	3
2	1 7	0 1	2. 02	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi	Dokumen	15		15	132.510.00 0	15	132.510.00 0	15	132.510.0 00	DAU	3
2	1 7	0 1	2. 02	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	1,00	2.759.600	1,00	3.001.600	1,00	3.497.200	1,00	4.000.200	DAU	3

2	1 7	0 1	2. 02	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	Lapora n	14,0 0	2.157.600	14,0 0	2.506.800	14,0 0	2.989.800	14,0 0	3.060.000	DAU	3
2	***1 7***	***0 1***	***2. 03***		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Cakupan penyelenggaraa n administrasi barang milik daerah pada SKPD***	***%***		***-***		***2.499.800***		***2.959.800***		***2.959.800***		
2	1 7	0 1	2. 03	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lapora n			1,00	2.499.800	1,00	2.959.800	1,00	2.959.800	DAU	3
2	***1 7***	***0 1***	***2. 05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase ASN dengan predikat kinerja baik***	***%***	***100, 00***	***15.000.00 0***	***100, 00***	***15.000.000***	***100, 00***	***15.000.000***	***100, 00***	***15.000.00 0***		
2	1 7	0 1	2. 05	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	1,00	15.000.00 0	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000	1,00	15.000.00 0	DAU	3
2	***1 7***	***0 1***	***2. 06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah***	***%***		***231.254.3 80***		***309.043.86 0***		***402.540.51 0***		***438.489.1 10***		
2	1 7	0 1	2. 06	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis			12,0 0	9.999.000	12,0 0	9.999.000	12,0 0	9.999.000	DAU	3
2	1 7	0 1	2. 06	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit					12,0 0	50.000.000	12,0 0	50.000.00 0	DAU	3
2	1 7	0 1	2. 06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	20,0 0	18.002.78 0	19,0 0	21.999.560	19,0 0	24.000.060	25,0 0	27.001.96 0	DAU	3

2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	8,00	7.439.900	8,00	10.005.000	8,00	10.005.000	8,00	10.005.000	DAU	1
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Jenis	3,00	30.000.000	3,00	35.400.000	3,00	40.800.000	3,00	40.800.000	DAU	3
2	17	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	Jenis	41,00	21.599.500	44,00	22.998.300	45,00	23.999.950	45,00	24.993.150	DAU	1
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakani	Jenis	10,00	22.990.000	10,00	24.090.000	10,00	25.090.000	10,00	25.690.000	DAU	3
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/ diikuti	OK	42,00	131.222.200	121,00	184.552.000	145,00	218.646.500	160,00	250.000.000	DAU	1
2	***17***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik***	***%***		***-***		***75.000.000***		***600.000.000***		***75.000.000***		
2	17	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan	unit										3
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit					1,00	500.000.000				3
2	17	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	jumlah alat besar yang diadakan	unit										3
2	17	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	unit										3

						yang diadakan												
2	1 7	0 1	2. 07	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	unit										DAU	3
2	1 7	0 1	2. 07	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	jenis			5,00	75.000.000	10,0 0	100.000.00 0	5,00	75.000.00 0	DAU	3
2	***1 7***	***0 1***	***2. 08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***		***488.507.0 00***		***386.490.80 0***		***441.488.80 0***		***629.000.0 00***		
2	1 7	0 1	2. 08	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	OB	200, 00	2.000.000	44,0 0	24.000.000	48,0 0	24.000.000	48,0 0	24.000.00 0	DAU	1
2	1 7	0 1	2. 08	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	bulan	12,0 0	39.600.00 0	12,0 0	45.000.000	12,0 0	50.000.000	12,0 0	55.000.00 0	DAU	1
2	1 7	0 1	2. 08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	OB	612, 00	446.907.0 00	637, 00	317.490.80 0	650, 00	367.488.80 0	650, 00	550.000.0 00	DAU	1
2	***1 7***	***0 1***	***2. 09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Cakupan penyelenggaraa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	%		***67.821.10 0***		***90.639.000***		***120.516.00 0***		***377.099.5 00***		
2	1 7	0 1	2. 09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,	Unit	8,00	63.636.10 0	8,00	75.644.000	8,00	100.566.00 0	8,00	107.734.5 00	DAU	1

						pajak dan perizinan											
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	unit/set	10,00	4.185.000	10,00	14.995.000	15,00	19.950.000	20,00	19.365.000	DAU	1
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	m2							250,00	250.000.000	DAU	1
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala**	**%**	**100,00**	**31.665.000**	**100,00**	**50.000.650**	**100,00**	**60.205.650**	**100,00**	**60.205.650**		
2	***17***	***03***	***2.01***		***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota***	***Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan***		***4,00***	***31.665.000***	***6,00***	***50.000.650***	***6,00***	***60.205.650***	***6,00***	***60.205.650***		
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten	laporan	4,00	31.665.000	4,00	35.000.650	4,00	40.205.650	4,00	40.205.650		

2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten	lapora n			2,00	15.000.000	2,00	20.000.000	2,00	20.000.000		
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase KSP/USP yang dilakukan penilaian kesehatan secara berkala**	**%**		**-**	**100,00**	**430.835.000**	**100,00**	**70.072.750**	**100,00**	**75.072.750**		
2	***17***	***04***	***2.01***		***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi***	***%***		***-***	***6,00***	***430.835.000***	***6,00***	***70.072.750***	***6,00***	***75.072.750***		
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten	lapora n			1,00	400.000.000	1,00	35.000.000	1,00	40.000.000		
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten yang diberikan penghargaan	KSP/U SP			5,00	30.835.000	5,00	35.072.750	5,00	35.072.750		

2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Koperasi yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan perkoperasian**	**%**		**-**		**50.000.000**		**54.988.000**		**54.988.000**		
2	***17***	***05***	***2.01***		***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Cakupan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten***			***-***		***50.000.000***		***54.988.000***		***54.988.000***		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan kompetensinya	Orang			40,00	50.000.000	40,00	54.988.000	40,00	54.988.000		
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Jumlah koperasi yang berkualitas**	**unit koperasi**		**38.335.000**		**-**		**-**		**-**		
2	***17***	***06***	***2.01***		***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten***			***38.335.000***		***-***		***-***		***-***		

2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	unit	5,00	38.335.000									
2	**17**	**08**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha**	**%**	**2,50**	**119.500.000**	**2,50**	**85.057.300**	**2,50**	**170.013.300**	**2,50**	**170.313.300**		
2	***17***	***08***	***2.01***		***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***	***Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro***			***119.500.000***		***85.057.300***		***170.013.300***		***170.313.300***		
2	17	08	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen data potensi dan pengembangan usaha mikro	dokumen	1,00	11.784.100	1,00	15.001.400	1,00	19.996.300	1,00	20.296.300		
2	17	08	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	pelaksanaan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pameran			1,00	-	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000		
2	17	08	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam kemudahan perizinan	UMKM						15.000.000		15.000.000		

2	17	08	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta Pelatihan dan meningkatnya Kualitas SDM Bagi Pelaku UMKM	orang	40,00	107.715.900	50,00	70.055.900	50,00	85.017.000	50,00	85.017.000		
2	**17**	**09**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil**	**%**		**-**	**1,00**	**-**	**1,00**	**55.000.000**	**1,00**	**105.000.000**		
2	***17***	***09***	***2.01***		***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil***	***Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil***			***-***		***-***		***55.000.000***		***105.000.000***		
2	17	09	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	unit usaha					10,00	55.000.000	10,00	105.000.000		
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**												
3	**31**				**Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian**				**369.999.950**		**370.000.000**		**330.000.000**		**332.250.000**		
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri**	**%**		**363.879.950**		**360.000.000**		**285.000.000**		**287.100.000**		

						Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	**%**										
3	***3 1***	***0 2***	***2. 01***		***Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota***	***Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun***	***doku men***		***363.879.9 50***		***360.000.00 0***		***285.000.00 0***		***287.100.0 00***		
3	3 1	0 2	2. 01	0 1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun	dokum en										
3	3 1	0 2	2. 01	0 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	kali										
3	3 1	0 2	2. 01	0 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	kali	2,00	200.000.0 00	2,00	290.000.00 0	2,00	200.000.00 0	2,00	202.000.0 00		
3	3 1	0 2	2. 01	0 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan Pembangunan sarana dan Prasarana Industri	Orang										
3	3 1	0 2	2. 01	0 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Orang		163.879.9 50	30,0 0	70.000.000	30,0 0	75.000.000	30,0 0	75.000.00 0		
3	3 1	0 2	2. 01	0 6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi	dokum en					1,00	10.000.000	1,00	10.100.00 0		

3	**3 1**	**0 3**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**	**%**		**6.120.000**		**10.000.000**		**15.000.000**		**15.150.000**		
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IPUI kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	**%**										
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IKUI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten	**%**										
3	***3 1***	***0 3***	***2. 01***		***Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)***				***6.120.000***		***10.000.000***		***15.000.000***		***15.150.000***		

3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi	kali											
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi	kali	72,00	6.120.000	40,00	10.000.000	50,00	15.000.000	50,00	15.150.000		
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**	**%**		**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**30.000.000**	**100,00**	**30.000.000**		
3	***31***	***04***	***2.01***		***Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi SINAS***			***-***		***-***		***30.000.000***		***30.000.000***		
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data informasi industri kabupaten yang dipublikasikan	dokumen					1,00	10.000.000	1,00	10.000.000		
3	31	04	2.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah data informasi industri kabupaten yang dipublikasikan	dokumen					1,00	10.000.000	1,00	10.000.000		
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan	laporan					1,00	10.000.000	1,00	10.000.000		

						Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas											

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah.

Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra-PD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu. Keselarasan ini terletak pada tujuan kelima yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja sehingga tujuan dan sasaran Renstra-PD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian akan sebanding dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu.

Adapun indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator dan Target Kinerja
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2026
Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Pertumbuhan Industri	6,28	6,28	6,44	6,6	6,77	6,94	6,93925
2.	Persentase Koperasi Aktif	44,10	45,50	46,50	47,50	49	50	47,7
3.	Persentase Usaha mikro dan kecil	30	35,88	36,77	37,69	38,63	39,90	37,77
4.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	50	100	100	100	100	100	100

Disamping indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD, peraturan perundangan juga mengharuskan setiap perangkat daerah mengakomodir indikator yang tercantum dalam peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah maupun indikator mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator dan target kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB. VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana strategis Perubahan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu 2019–2024 merupakan suatu acuan dan program dasar pemberdayaan koperasi, UKM dan Perindustrian yang mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.

Rencana Strategis (Renstra) mengandung tujuan, sasaran, kebijakan,program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu .

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu 2025-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh dinas, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 yaitu “**Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri, dalam Nuansa Religi**”.

RENCANA KERJA

TAHUN 2025



DINAS PERTANIAN KAB.LUWU

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah S.W.T atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini dapat kami selesaikan dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

RENJA Dinas Pertanian Kabupaten Luwu untuk Tahun Anggaran 2025 berpijak pada usulan masyarakat yang masuk melalui musrenbang, pokok-pokok pikiran anggota DPRD, maupun issu-issu strategis yang berkembang saat ini yang sangat mendesak untuk dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat.

Demikian RENJA ini dibuat, yang kami sadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan-kekurangan sehingga membutuhkan perbaikan-perbaikan yang bersifat konstruktif, demi untuk pembangunan pertanian di Kabupaten Luwu di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kami ucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RENJA ini, semoga Allah S.W.T senantiasa meridhoi kita semua.

Belopa, Juli 2024

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu,

Drh. JUMARDIN
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19740207 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang ……..... 1

1.2 Landasan Hukum …… 2

1.3 Maksud danTujuan …… . 4

1.4 Sistematika Penulisan …… 5

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Dinas Pertanian Kab. Luwu 9

III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH … 32

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ……..... 32

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian

Kabupaten Luwu ……..... 33

3.3 Program dan Kegiatan…… 35

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN KAB. LUWU 40

V. PENUTUP 58

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Pertanian Kab. Luwu Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 12

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu 18

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Luwu 23

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Luwu 29

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Pertanian Kabupaten Luwu 36

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kab. Luwu Tahun 2025 41

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu adalah Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Luwu sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan dan Rencana kerja Kementerian Pertanian Tahun 2025.

Penyusunan Rencana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan pertanian, sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum dalam RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam RPD dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian, peningkatan produksi non pertanian dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara konsisten sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi sesuai dengan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004. RPD Tahun 2025-2026 Kabupaten Luwu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja (Renja) PD.

Rencana Kerja (Renja) ini sepatutnya dijadikan acuan dan arahan bagi seluruh Jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sektor pertanian tahun 2025 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2025 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang HAsil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 148 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Luwu; dan
16. Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Maksud
   1. Merupakan penjabaran dari Rencana Pembagunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Luwu menjadi Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun 2025.
   2. Menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Luwu dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

b. Tujuan
   1. Untuk memberikan arah dan tuntunan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Pertanian untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.
   2. Memberikan penegasan tentang peranan penting sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi kerakyatan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertanian tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2025 meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, proses penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Luwu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak

terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian Rencana Kerja dan Pagu indikatif Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PERTANIAN KAB. LUWU TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Luwu

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu tahun anggaran 2023 yang lalu, tetap memprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan produksi komoditi pertanian strategis pada sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang ditunjang oleh pembangunan prasarana dan sarana pertanian dan peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Pertanian Lapangan.

Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

4. Penyediaan Bahan/Material
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

B. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

C. Penyediaan benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

1. Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

A. Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana pendukung pertanian lainnya

B. Pembangunan Prasarana Pertanian

1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana pertanian lainnya

IV. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

A. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

V. Program Penyuluhan Pertanian

A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah dan capaian Renstra perangkat daerah tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Luwu

OPD : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
							Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8,00		9		10		11	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	Urusan Pemerintahan lainnya																	
3,27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							43.258.139.385		42.061.615.543				38.175.014.554				
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100	78.043.000.986	95	29.877.361.340	100	17.994.159.942	100	17.767.432.750	100	99	100	19.749.948.405	100	67.268.213.195	100	16.817.053.299
3.27.01.2.01	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100	132.779.400	100	32.982.900	100	17.613.600	100	13.023.600	100	74	100	17.909.632	100	63.916.132	100	15.979.033
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	9	28.760.000	6	6.660.000	2	2.455.000	2	2.365.000	100	96	2	9.962.533	10	18.987.533	3	4.746.883
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	4	16.549.800	2	3.624.800	1	2.818.200	1	2.728.200	100	97			3	6.353.000	1	1.588.250
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	4	16.305.000	2	7.105.000	1	2.818.200	1	668.200	100	24	1	2.649.033	4	10.422.233	1	2.605.558
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	4	24.605.000	2	5.065.200	1	2.818.200	1	668.200	100	24	1	2.649.033	4	8.382.433	1	2.095.608
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	4	22.625.200	2	6.285.400	1	2.818.200	1	2.728.200	100	97	1	2.649.033	4	11.662.633	1	2.915.658
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Kinerja PD yang disusun (LAKIP)	4	23.934.400	2	4.242.500	1	3.885.800	1	3.865.800	100	99			3	8.108.300	1	2.027.075
3.27.01.2.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	16	66.654.955.143	8	28.302.267.733	8	17.218.155.952	7	17.058.283.002	87,50	99	4	19.024.648.791	4	64.385.199.526	100	16.096.299.882
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai kebutuhan	48	65.840.856.143	24	28.099.666.933	12	16.981.120.352	12	16.832.047.402	100	99	12	18.802.586.314	48	63.734.300.649	12	15.933.575.162
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Bulan penyediaan honorarium pengelola keuangan sesuai ketentuan	48	750.000.000	24	197.700.000	12	230.580.000	12	220.580.000	100	96	12	209.920.000	48	628.200.000	12	157.050.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4	11.506.800			-		-	-			-		-			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	72	52.592.200	7	4.900.800	18	6.455.600	18	5.655.600	100	88	18	12.142.477	43	22.698.877	11	5.674.719
3.27.01.2.03	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah secara tepat waktu	100	1.110.825.000	100	69.386.000	-	-	-				-	5.000.000	-	5.000.000		1.250.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	866	430.200.000			-	-					-	-	-	-		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	36	320.625.000	2	69.386.000	-		-	-			-	-	-	-		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	15	120.000.000		-	-	-		-			-	-	-	-		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	30	240.000.000			-	-					1	5.000.000	1	5.000.000	0,25	1.250.000

3.27.01.2.06	-	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraanaan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**100**	**2.312.300.700**	**100**	**629.853.243**	**100**	**308.455.080**	**100**	**297.935.002**	100	**97**	**100**	**329.426.419**	**100**	**1.252.317.864**	**100**	**313.079.466**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35	257.374.400	8	58.190.000	8	-	-	-			1	12.500.000	9	70.690.000	2,25	17.672.500
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik Kantor yang disediakan	15	77.422.000	4	12.575.750	1	1.000.000	1	1.000.000	100	**100**	1	4.360.400	6	17.936.150	1,50	4.484.038
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20	36.056.300	10	16.054.200	5	7.201.000	5	7.201.000	100	**100**	5	6.444.000	20	29.699.200	5,00	7.424.800
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	75	100.800.000	34	32.960.000	15	21.600.000	15	21.600.000	100	**100**	15	18.000.000	64	72.560.000	16,00	18.140.000
		Penyediaan Bahan Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan Kantor yang disediakan	64	135.614.000	32	67.410.300	3	35.183.080	3	35.183.080	100	**100**	16	33.630.519	51	136.223.899	12,75	34.055.975
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan	8	86.750.000	7	13.419.400	4	12.500.000	4	8.250.000	100	**66**		-	11	21.669.400	2,75	5.417.350
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar dan dalam Daerah	48	1.587.684.000	299	424.346.793	12	230.971.000	12	224.700.922	100	**97**	12	254.491.500	323	903.539.215	80,75	225.884.804
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan penyelenggaraan dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	30.600.000	1	4.896.800							-	-	-	-		
3.27.01.2.08	-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**1.808.417.581**	**100**	**642.200.980**	**100**	**251.610.000**	**100**	**229.938.600**	100	**91**	**100**	**213.799.363**	**100**	**1.074.088.943**	**100**	**268.522.236**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diregistrasi	6.800	99.555.000	2.929	11.850.000	1.700	-		-								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan biaya tagihan telepon, air dan Listrik	48	327.521.181	24	132.890.480	12	68.010.000	12	66.638.600	100	**98**	12	46.999.363	48	246.528.443	12,00	61.632.111
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	1.308	1.381.341.400	547	497.460.500	12	183.600.000	12	163.300.000	100	**89**	240	166.800.000	799	827.560.500	199,75	206.890.125
3.27.01.2.09	-	**Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam konsisi baik**	**100**	**4.904.545.000**			-	-					-	-	-	-		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	45	1.525.140.000			-	-					-	-	-	-		
		Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	24	66.325.000			-	-					-	-	-	-		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8	3.313.080.000			-	-					-	-	-	-		
3.27.01.2.09	-	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**100**	**1.119.178.162**	**100**	**200.670.484**	**100**	**198.325.310**	53	**168.252.546**	53	**85**	**100**	**159.164.200**	**100**	**487.690.730**	**100**	**121.922.683**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	581	632.022.940	114	160.273.984	89	91.798.150	89	62.432.546	100	**68**	89	104.269.200	292	326.975.730	73,00	81.743.933
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah luas aset tetap yang dipelihara	50	356.587.200			-	-					-	-	-	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	3.600	86.888.022	600	40.396.500	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	81	43.680.000			12	106.527.160	12	105.820.000	100	**99**	12	54.895.000	24	160.715.000	6,00	40.178.750
3.27.02	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**		**Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan**	**3**	**15.324.906.996**	**10**	**4.676.240.131**	**3**	**10.377.736.000**		**10.165.254.700**		**98**	**3,00**	**2.243.379.000**		**16.275.844.571**		**4.068.961.143**
			Peningkatan Produksi Komoditi Hortikultura	**3**															
			Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	**3**															
3.27.02.2.01	-	**Pengawasan penggunaan sarana pertanian**	**Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**4**	**4.188.100.600**	**2**	**3.823.089.300**	**1**	**9.922.921.000**	**1**	**9.772.939.200**	100	**98**	**1**	**362.834.500**		**13.246.108.000**	-	**3.311.527.000**
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan hasil Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	60	3.475.345.600	24	3.110.334.300	12	9.922.921.000	12	9.772.939.200	100	**98**	12	362.834.500	48	13.246.108.000	12,00	3.311.527.000
		Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian yang diadakan dan didampingi penggunaannya	3	712.755.000	23	712.755.000	23	-	-	-	-		23	-		-		

3.27.02.2.02	-	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota**	**Luas Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota**	**15**	**4.835.403.996**	**15**	**604.475.831**	**15**	**454.815.000**	**10**	**392.315.500**	67	**86**	**15**	**1.491.794.500**	**15**	**2.392.311.571**	**100**	**598.077.893**
		Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Luasan Areal Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	20	321.001.000	5	96.274.260		-		-						-		
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Luasan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	76	4.514.402.996	20	508.201.571	1	454.815.000	1	392.315.500	100	**86**	15	1.491.794.500	36	2.392.311.571	9,00	598.077.893
3.27.02.2.03	-	**Peningkatan Mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota**	**Jumlah jenis pengawasan mutu produk peternakan yang dilaksanakan**	**2**	**73.201.200**			-	-					-	-				
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Laporan pelaksanaan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	36.600.600			-	-					-	-				
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Laporan pelaksanaan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	1	36.600.600			-	-					-	-				
3.27.02.2.04	-	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**Jumlah Pengawasan Obat Hewan**	**12**	**36.600.600**			-	-					-	-				
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Laporan pelaksanaan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	3	36.600.600			-	-					-	-				
3.27.02.2.05	-	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah kabupaten**	**Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah kabupaten**	**12**	**36.600.600**			-	-					-	-				
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Laporan pelaksanaan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	3	36.600.600			-	-					-	-				
3.27.02.2.06	-	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Jumlah penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak**	**31.650**	**6.155.000.000**	**5**	**248.675.000**		-			#DIV/0!	**#DIV/0!**	-	**388.750.000**		**637.425.000**		**159.356.250**
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan	31.650	6.075.000.000	10	248.675.000							221	388.750.000	231	637.425.000	57,75	159.356.250
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang diadakan	3	80.000.000			-	-					-	-				
3.27.03	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**		**Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan**	**3**	**72.488.211.760**	**10**	**14.386.616.265**	**3**	**5.709.145.780**		**5.390.696.457**		**99**	**3,00**	**12.933.050.750**	**3,00**	**27.535.688.947**		**6.883.922.237**
			Peningkatan Produksi Komoditi Hortikultura	**3**				**3**						3		3			
			Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	**3**				**3**						3		3			
3.27.03.2.01	-	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase penyelenggaraan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**100**	**1.141.769.200**	**1**	**192.161.540**	**1**	**296.345.780**	**1**	**223.460.280**	100	**75**	**1**	**14.514.750**	**1**	**430.136.570**	**100**	**107.534.143**
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah dokumen yang disusun	1	150.000.000			-	-					-	-		-		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian	12	847.889.400	1	192.161.540	12	296.345.780	1	223.460.280	8	**75**	12	14.514.750	14	430.136.570	3,50	107.534.143
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Dokumen Actionplan yang disusun	1	143.879.800			-	-					-	-		-		

3.27.03.2.02	-	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun / Direhab**	**408**	**70.371.633.100**	**41**	**14.140.756.050**	**41**	**5.412.800.000**	**57**	**5.167.236.177**	139	**95**	**41**	**12.918.536.000**		**27.105.552.377**	-	**6.776.388.094**
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	122	24.113.930.800	32	5.756.343.350	14	605.000.000	14	594.418.400	100	**98**	20	3.422.442.300	66	9.773.204.050	16,50	2.443.301.013
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun	74	9.361.423.100	18	2.169.783.550	2	300.000.000	2	273.007.000	100	**91**	-	-				
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun	48	9.765.949.400	23	3.001.439.850	28	3.285.300.000	28	3.155.197.500	100	**96**	10	9.055.515.500	61	15.212.152.850	15,25	3.803.038.213
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun	64	7.763.030.000	4	483.550.000	-	-		-			-	-	-			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan *Long Storage*	Jumlah Long Storage yang dibangun	30	3.819.255.000			-	-					-	-	-			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun	67	2.434.520.000	9	375.781.300	2	94.500.000	2	93.900.000	100	**99**	-					
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun dan dipelihara	6	1.367.460.000			-	-					-	-	-			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhab, dibangun dan Dipelihara	22	6.177.000.000	3	1.724.954.000							-					
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Jenis Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun / dipelihara	19	5.569.064.800	5	628.904.000	4	1.128.000.000	4	1.050.713.277	100	**93**	2	440.578.200	11	2.120.195.477	2,75	530.048.869
3.27.03.2.03	-	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah kabupaten**	**Luas Cakupan penyelenggaraan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah kabupaten**	**5**	**974.809.460**	**2**	**53.698.675**	**5**	**-**	**-**	**-**			**5**	**-**		**-**		
		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Luas Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	5	974.809.460	2	53.698.675	2	-	-	-			2	-		-		
3.27.04	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**Peningkatan Populasi Ternak**	**3**	**1.303.122.054**	**0**	**73.613.700**	**3**	**35.330.000**		**32.162.636**	-	**91**	**3**	**14.681.040**	**3**	**97.917.276**	**100**	**24.479.319**
3.27.04.2.01	-	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten**	**Jumlah Bulan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten**	**48**	**504.633.654**	**12**	**51.073.600**	**12**	**35.330.000**	**12**	**32.162.636**	100	**91**	**12**	**14.681.040**	**12**	**97.917.276**	**100**	**24.479.319**
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan Hasil pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit	48	504.633.654	2	51.073.600	12	35.330.000	12	32.162.636	100	**91**	12	14.681.040	26	97.917.276	6,50	24.479.319
3.27.04.2.02	-	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten**	**Jumlah Bulan penyelenggaraan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten**	**36**	**223.357.200**			-	-					-	-		-		
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/kota	Laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten	12	223.357.200			-	-					-	-				
3.27.04.2.03	-	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten**	**Jenis penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten**	**3**	**212.574.000**		**22.540.100**		**-**						**-**				
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah permohonan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilayani	150	212.574.000	9	22.540.100												
3.27.04.2.04	-	**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah Bulan penyelenggaraan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner**	**36**	**362.557.200**			-	-					-	-				
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan hasil Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12	362.557.200			-	-					-	-				
3.27.05	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**		**Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**	**100**	**1.250.114.400**			-	**-**					-	**-**				
3.27.05.01	-	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten**	**Cakupan penyelenggaraan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten**	**36**	**1.250.114.400**			-	**-**					-	**-**				
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Laporan pelaksanaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	12	362.557.200			-	-					-	-				
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan Penanggulangan pasca bencana bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kesehatan Hewan	12	887.557.200			-	-					-	-				

3.27.06	**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**Jumlah usaha bidang pertanian yang diawasi Perizinannya**	**200**	**62.557.200**			-	-					-	-				
3.27.06.01	- **Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**Jumlah pengawasan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan/diawasi**	**200**	**62.557.200**			-	-					-	-				
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	3	62.557.200			-	-					-	-				
3.27.07	**Program Penyuluhan Pertanian**	**PDRB Sektor Petanian**	**53**	**22.356.089.410**	**53,21**	**10.337.239.890**	**53**	**9.141.767.663**		**8.706.069.000**	-	**95**	**53**	**3.233.955.359**	**53**	**21.997.864.249**	**100**	**5.499.466.062**
3.27.07.01	- **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian**	**100**	**22.356.089.410**	**100**	**10.337.239.890**	**100**	**9.141.767.663**	**100**	**8.706.069.000**	100	**95**	**100**	**3.233.955.359**	**100**	**21.997.864.249**	**100**	**5.499.466.062**
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	22	902.000.000	227	156.200.000	227	253.000.000	227	123.200.000	100	**49**						
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani yang dikembangkan	125	14.347.711.410	125	7.974.977.448	125	3.179.609.400	125	2.975.765.162	100	**94**	125	2.361.700.643	375	13.312.443.253	93,75	3.328.110.813
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang menerima dan difasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana Penyuluhan Pertanian	22	5.115.878.000	22	2.206.062.442	22	5.709.158.263	22	5.607.103.838	100	**98**	22	872.254.716	66	8.685.420.996	16,50	2.171.355.249
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk	60	190.500.000			-	-					-	-				
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten	Jumlah sekolah lapang yang diselenggarakan	180	1.800.000.000			-	-					-	-				

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 43,258,139,385** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 42,061,615,543** atau sebesar **97.23 %**.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Sejumlah kebijakan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka memadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal. Melihat kondisi tersebut di atas maka Dinas Pertanian Kabupaten Luwu berupaya untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan khususnya di bidang Pertanian.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	75,00	77,50	80,00	-	81,47	81,50	-	-
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	-	BB	B	-	-
2	Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis		Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya per hektar (ton)	5,10	5,13	5,15	-	5,49	5,59	-	-
			Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	52,91	53,17	53,44	-	52,49	52,54	-	-

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, terkait Pelayanan Kesehatan Hewan, dari target nilai IKP 77,5 diperoleh realisasi 81,47 dengan pencapaian sebesar 105,12%. Hal ini menunjukkan masyarakat cukup puas dengan pelayanan kesehatan hewan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Luwu pada tahun 2023. Hal ini akan terus ditingkatkan ditahun-tahun kedepan, utamanya terkait pelayanan langsung ke masyarakat.

II. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan indikator kinerja nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah. Dari target nilai SAKIP “BB”, berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP pada Dinas Pertanian Kab. Luwu untuk tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Luwu nomor : 700/134/Itda/KHS/III/2024 tanggal 06 Maret 2024, Dinas Pertanian memperoleh skor 76,05 (tujuh puluh enam koma nol lima) dengan kategori penilaian Sangat Baik (BB). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu sudah dilaksanakan dengan baik dan akuntabel. Pelaporan terkait akuntabilitas kinerja sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku Hal ini akan dipertahankan dan diupayakan untuk dapat ditingkatkan lagi kedepannya.

III. Sasaran strategis meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis, dengan target kinerja produktivitas padi atau bahan pangan lokal lainnya per hektar (ton), dari target 5,13 ton per hektar, diperoleh hasil sebesar 5,49 ton per hektar, atau mencapai sebesar 108,93 %, dan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dari target 53,17 % mencapai 52,49% dengan pencapaian 98,72%. Walaupun mengalami sedikit penurunan namun hal ini menunjukkan sektor pertanian mampu menjadi sektor andalan dalam menopang perekonomian daerah.

Berdasarkan indikator kinerja yang terasaji dalam tabel 2.2, menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan, realisasi yang diperoleh sudah berada di atas target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Kemampuan pencapaian produksi pertanian realistis dan dapat dicapai, oleh karena itu target kinerja yang diproyeksikan dapat lebih ditingkatkan lagi.
- Ada beberapa program yang dapat mendukung pencapaian target kinerja optimal yang didukung oleh ketersediaan anggara, baik melalui APBD maupun bantuan pemerintah provinsi dan pusat..

Kebijakan yang perlu diambil terkait perencanaan dan pengganggaran untuk dapat memaksimalkan realisasi capaian fisik dan keuangan program/kegiatan di tahun-tahun mendatang antara lain :

1. Penganggaran berbasis “money follows program” wajib diterapkan dalam system perencanaan pembangunan daerah, sehingga peaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah.
2. Target kinerja dapat diperbaiki dan lebih disempurnakan sehingga menjadi lebih realistis dan terukur.
3. Melakukan efisiensi anggaran dengan mengutamakan kegiatan yang mendukung capaian utama Dinas Pertanian Kabupaten Luwu

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Luwu

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian Kabupaten Luwu mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pertanian;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Luwu dihadapkan pada beberapa permasalahan utama, antara lain :

1. Ketersediaan infrastruktur sarana prasarana lahan dan air yang dirasakan belum memadai secara maksimal.
2. Pemanfaatan lahan pertanian yang belum optimal.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan benih unggul untuk usaha pertaniannya.
4. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
5. Belum maksimalnya penggunaan alat dan mesin pertanian.
6. Belum padunya kebijakan antar sektoral.
7. Ancaman penyakit menular ternak yang sesekali muncul.
8. SDM dan kelembagaan peternak belum berkembang dengan baik.
9. Sarana penunjang pengembangan perbibitan ternak yang masih sangat terbatas.
10. Kesadaran peternak untuk menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) masih sangat kurang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah serta dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu padi, palawija, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, petani, dan petugas.
3. Menciptakan program pembangunan pertanian dan peternakan yang aspiratif, inovatif, responsive, terpadu dan sustainable.
4. Membuka peluang sumber pendapatan lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5. Meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan mutu hasil pertanian dan peternakan.
6. Menghasilkan produk pertanian dan peternakan yang sehat dan ramah lingkungan dengan nilai jual yang tinggi.
7. Memanfaatkan potensi sumber daya lahan dan air pertanian dan peternakan secara optimal.
8. Menciptakan peluang yang lebih luas pengembangan agribisnis dan usaha tani.
9. Meningkatkan partisipasi dan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan hewan dan pemeliharaan ternak yang baik dan sehat.

Sedangkan sasaran dari tujuan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan distribusi pangan yang cukup, aman dan terjangkau.
2. Penerapan teknologi usaha tani, melalui penggunaan alsintan secara berkelompok.
3. Peningkatan produksi komoditas pertanian strategis.
4. Peningkatan prasarana dan sarana pertanian.
5. Peningkatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.
6. Peningkatan jumlah populasi ternak.
7. Meningkatkan kualitas dan kinerja Penyuluh Pertanian.

   Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Luwu

Dinas Pertanian Kab. Luwu.

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
NO	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG URUSAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	NO	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG URUSAN	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100,00 Persen**	**19.221.311.223**	**I**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100,00 Persen**	**19.221.311.223**	
A	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu***	100 ***Persen***	***19.183.320***	**A**	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu***	100 ***Persen***	***19.183.320***	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.255.780	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.255.780	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.525.100	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.525.100	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.641.160	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.641.160	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.897.220	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.897.220	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.897.220	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.897.220	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.966.840	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.966.840	

B	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun***	100	***Persen***	***18.438.867.567***	**B**	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun***	100	***Persen***	***18.438.867.567***	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Belopa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2208	OB	18.209.771.887	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Belopa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2208	OB	18.209.771.887	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	220.080.000	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	220.080.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	9.015.680	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	9.015.680	
C	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Persentase Penyelenggaranaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100**	***Persen***	***446.913.978***	**C**	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Persentase Penyelenggaranaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100**	***Persen***	***446.913.978***	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Belopa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	76.694.100	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Belopa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	76.694.100	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Belopa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	11.281.838	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Belopa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	11.281.838	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Belopa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	6.627.411	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Belopa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	6.627.411	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	18.000.000	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Belopa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	18.000.000	
5	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Belopa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30	Paket	39.999.638	5	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Belopa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30	Paket	39.999.638	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	-	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	Laporan	-	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	294.310.991	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	294.310.991	

D	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Presentase pemenuhan penujang urusan pemerintahan daerah***	100	***Persen***	***202.999.858***	**D**	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Presentase pemenuhan penujang urusan pemerintahan daerah***	100	***Persen***	***202.999.858***	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	49.999.858	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	49.999.858	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	153.000.000	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	153.000.000	
G	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Cakupan ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik***	65	*Persen*	***113.346.500***	**G**	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Cakupan ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik***	90	*Persen*	***113.346.500***	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Belopa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	174	Unit	107.856.500	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Belopa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	174	Unit	107.856.500	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kec. Belopa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	jenis	5.490.000	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kec. Belopa	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	13	jenis	5.490.000	
II	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Persentase peningkatan produksi peternakan** **Persentase peningkatan produksi perkebunan** **Persentase peningkatan produksi tanaman pangan** **Persentase peningkatan produksi hortikultura**	**11,80** **2,34** **2,50** **4,12**	**Persen** **Persen** **Persen** **Persen**	**11.467.205.465**	**II**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Persentase peningkatan produksi peternakan** **Persentase peningkatan produksi perkebunan** **Persentase peningkatan produksi tanaman pangan** **Persentase peningkatan produksi hortikultura**	**3,00**	**Persen**	**11.467.205.465**	
A	***Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian***		**Presentase ketersediaan sarana pertanian dalam kondisi baik**	91.07	Persen	***6.199.620.000***	**A**	***Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian***		**Presentase ketersediaan sarana pertanian dalam kondisi baik**			***6.199.620.000***	
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kec. Belopa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12	Laporan	6.199.620.000	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kec. Belopa	Laporan hasil Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12	Laporan	6.199.620.000	
B	***Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota***		**Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota**	24	Hektar	***4.077.655.465***	**B**	***Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota***		**Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota**	24	Hektar	***4.077.655.465***	
1	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kec. Ponrang	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12	Dokumen	4.077.655.465	1	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kec. Ponrang	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12	Dokumen	4.077.655.465	
C	***Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain***		**Jumlah Jenis benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan**	7	Jenis	***1.189.930.000***	**C**	***Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain***		**Jumlah Jenis benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan**	7	Jenis	***1.189.930.000***	
1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kec. Belopa	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	119	ekor	1.189.930.000	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kec. Belopa	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	119	ekor	1.189.930.000	

III	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Rasio Prasarana dalam Kondisi Baik**	**0,25**	**Persen**	**11.839.093.940**	**III**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura**	**3,00**	**Persen**	**11.839.093.940**	
A	***Pengembangan Prasarana Pertanian***		**Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian**	3	Jenis	***439.989.000***	**A**	***Pengembangan Prasarana Pertanian***		**Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian**	3	Jenis	***439.989.000***	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kec. Belopa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12	Laporan	439.989.000	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kec. Belopa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12	Laporan	439.989.000	
B	***Pembangunan Prasarana Pertanian***		**Jumlah Prasarana Pertanian Pertanian yang dibangun**	98	unit	***11.399.104.940***	**B**	***Pembangunan Prasarana Pertanian***		**Jumlah Prasarana Pertanian Pertanian yang dibangun**	98	unit	***11.399.104.940***	
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Luwu	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	35	unit	6.499.585.320	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Luwu	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	35	unit	6.499.585.320	
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Luwu	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20	Unit	3.999.877.220	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Luwu	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20	Unit	3.999.877.220	
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Luwu	Jumlah Pintu Air yang dibangun	10	unit	539.750.000	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Luwu	Jumlah Pintu Air yang dibangun	10	unit	539.750.000	
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	unit	359.892.400	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	unit	359.892.400	
IV	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**	**11**	**Persen**	**10.712.500**	**IV**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		**Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**100,00**	**Persen**	**10.712.500**	
A	***Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota***		Cakupan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	12	Bulan	***10.712.500***	**A**	***Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota***		Cakupan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	12	Bulan	***10.712.500***	
1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12	Laporan	10.712.500	1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12	laporan	10.712.500	

V	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian**	**100,00**	**Persen**	**938.458.480**	**VII**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian**	**100,00**	**Persen**	**938.458.480**	
A	***Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian***		Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian	227	desa/kelurahan	***938.458.480***	**A**	***Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian***		Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian	227	desa/kelurahan	***938.458.480***	
1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Luwu	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22	Unit	99.868.000	1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Luwu	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22	Unit	99.868.000	
2	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Luwu	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	22	Unit	838.590.480	2	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Luwu	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	22	Unit	838.590.480	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan pembangunan pertanian yang terangkum dalam Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini juga menampung usulan dari masyarakat atau para pemangku kepentingan yang disampaikan melalui mekanisme Musrenbang dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, pokok-pokok pikiran dan hasil reses anggota DPRD Kab. Luwu. Selain itu masyarakat juga menyampaikan aspirasi dan usulan kegiatan secara langsung ke Dinas Pertanian Kabupaten Luwu melalui Proposal kegiatan.

Usulan yang disampaikan oleh masyarakat relevan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Luwu termasuk prioritas program dan kegiatan yang direncanakan. Namun usulan dari masyarakat masih banyak yang kurang lengkap informasi mengenai volume/besaran, usulan biaya, sasaran lokasi sehingga memerlukan tahapan verifikasi langsung ke lapangan dalam bentuk kegiatan penetapan Calon Petani – Calon Lokasi (CP-CL).

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Luwu

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian Kab. Luwu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
I.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				
1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Luwu	Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Luwu	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian yang diadakan dan diawasi penggunaannya	514 unit	Aspirasi / Pokok pikiiran DPRD dan Usulan Masyarakat
2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Luas Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota		
	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Kab. Luwu	Luasan Pemanfaatan SDG Hewan / Tumbuhan	100 Ha	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD
3.	Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Luwu	Jumlah benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang dsediakan		
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Kab. Luwu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan	10.160 ekor	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
B.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**				
1.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Luwu	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Luwu	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	35 unit	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Luwu	Jumlah Pintu Air Yang Dibangun	10 unit	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Luwu	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun	20 unit	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun	2 unit	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD

Besarnya volume dan anggaran yang diusulkan baik oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan menjadi kendala dalam pemenuhannya. Hal ini menyebabkan usulan-usulan yang telah disampaikan, tidak semuanya dapat dipenuhi. Dalam mengakomodir usulan-usulan pemangku kepentingan tersebut hal-hal yang menjadi pertimbangan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1. Wilayah pengembangan komoditas.
2. Ketersediaan anggaran pembangunan
3. Pemerataan sebaran pembangunan
4. Kesiapan SDM dan infrastruktur
5. Konsepsi kebijakan teknis dan keberlanjutan program
6. Kelengkapan administrasi usulan yang disampaikan yang terkait pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan nantinya.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Strategi Pembangunan Pertanian Nasional yang digiatkan oleh pemerintah pusat meliputi :

1. Menjadikan basis produksi komoditas pangan, komoditas ekspor, penyedia bahan baku industri dan bio energi dengan pendekatan kawasan.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk pertanian.
3. Penyediaan prasarana dasar bidang pertanian.
4. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani.
5. Meningkatkan tatakelola kepemerintahan yang baik.

Sedangkan kebijakan pembangunan pertanian nasional adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian.
2. Kebijakan pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor serta komoditas penyedia bahan baku bio-energi.
3. Kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan.
4. Kebijakan pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) dan agro-industri di pedesaan, sebagai dasar / landasan pengembangan bio-industri berkelanjutan.
5. Kebijakan re-orientasi memproduksi dari satu jenis produk menjadi multi produk (produk utama, bioenergi, produk sampingan, produk dari limbah, zero waste dan lainnya).
6. Kebijakan pegembangan klaster/kawasan, yaitu pada kawasan tertentu yang mengungkit pencapaian target nasional.
7. Kebijakan system perbenihan/perbibitan, perlindungan petani, kelembagaan petani, inovasi dan diseminasi teknologi, penyuluhan, kebijakan system perkarantinaan pertanian.

8. Kebijakan mendukung program tematik : MP3EI, MP3KI, PUG, KSS, Ketenagakerjaan, percepatan daerah tertinggal, kawasan khusus dan wilayah perbatasan.
9. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penanganan pasca bencana alam.
10. Kebijakan subsidi : (1) subsidi pupuk tetap diperlukan dengan cara mengurangi pupuk tunggal, menaikkan subsidi pupuk majemuk, (2) pupuk organik tetap dikembangkan bukan dengan dukungan subsidi, tetapi dialihkan menjadi kegiatan pengembangan pupuk organik, (3) subsidi benih ditiadakan dan dialihkan menjadi kegiatan penguatan penangkar benih/bibit.
11. Kebijakan kredit : (1) kredit ketahanan pangan akan terus dilanjutkan untuk mendorong dan meningkatkan produksi dan produktivitas pangan guna mendukung ketahanan pangan, (2) untuk lebih menjamin teralokasinya kredit untuk pangan, maka plafon kredit dialokasikan menurut subsektor, (3) untuk memecahkan kelangkaan tenaga kerja dan menjamin pengelolaan pangan skala luas, maka kredit mekanisasi pertanian sangan diperlukan, (4) kegiatan sertifikasi tanah diperlukan, sehingga layak kredit.

Renja tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Luwu ini disusun berdasarkan strategi dan kebijakan pembangunan pertanian nasional, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2025 diharapkan tidak lepas dari program pembangunan pertanian nasional, sehingga ada sinergitas antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang maksimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.

Tujuan daripada Rencana Kerja pertanian di Kabupaten Luwu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjamin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Menyediakan dan Mengembangkan Sarana Pertanian
3. Menyediakan dan Mengembangkan Prasarana Pertanian
4. Melaksanakan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Melaksanakan Penyuluhan Pertanian

Adapun sasaran yang diinginkan dalam pembangunan pertanian adalah sebagai berikut.

1. Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
2. Tersedianya Sarana Pertanian.
3. Tersedianya Prasarana Pertanian.
4. Terlaksananya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Terlaksananya Penyuluhan Pertanian.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan direncanakan pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
   b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten / Kota
   c. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   a. Pengembangan Prasarana Pertanian
   b. Pembangunan Prasarana Pertanian.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota
5. Program Penyuluhan Pertanian
   a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian tahun 2025, disampaikan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2025. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pembangunan tahun 2025 Dinas Pertanian disajikan dalam Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pertanian Kabupaten Luwu

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
								TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
3					**SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN**								
3	**27**				**SEMUA BIDANG URUSAN**					**43.476.781.608**			**40.132.250.070**
3	**27**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**		**100**	**Persen**	**19.221.311.223**	**100**	**Persen**	**19.647.250.070**
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu		100	persen	19.183.320	100	persen	31.305.000
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	Dokumen	4.255.780	2	Dokumen	7.890.000
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	Dokumen	3.525.100	1	Dokumen	-
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	Dokumen	2.641.160	1	Dokumen	5.305.000
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	Dokumen	2.897.220	1	Dokumen	5.305.000
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	Dokumen	2.897.220	1	Dokumen	5.305.000
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	Dokumen	2.966.840	1	Dokumen	7.500.000
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun		8	Jenis	18.438.867.567	8	Jenis	18.912.495.070
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.208	OB	18.209.771.887	2.340	OB	18.652.789.870
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	Dokumen	220.080.000	12	Dokumen	251.880.000
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18	Laporan	9.015.680	18	Laporan	7.825.200

3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaranaan Administrasi umum Perangkat Daerah		100	Persen	446.913.978	100	Persen	382.950.000
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	Paket	76.694.100	1	Jenis	7.700.000
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5	Paket	11.281.838	1	Jenis	1.000.000
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3	Paket	6.627.411	5	Jenis	6.500.000
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12	Dokumen	18.000.000	15	Dokumen	18.000.000
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		30	Paket	39.999.638	16	Jenis	44.000.000
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12	Laporan	5.750.000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	Laporan	294.310.991	12	Laporan	300.000.000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan penujang urusan pemerintahan daerah				202.999.858			216.800.000
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Laporan	49.999.858	12	Bulan	50.000.000
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	Laporan	153.000.000	12	Laporan	166.800.000
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik		89	Unit	113.346.500	89	Unit	103.700.000
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		174	Unit	107.856.500	174	Unit	98.700.000
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		13	Unit	5.490.000	13	unit	5.000.000

3	**27**	**02**			**PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan produksi peternakan Persentase peningkatan produksi perkebunan Persentase peningkatan produksi tanaman pangan Persentase peningkatan produksi hortikultura**		**11,80 2,34 2,50 4,12**	**Persen Persen Persen Persen**	**11.467.205.465**	**9,21 10 11,89 10,76**	**Persen Persen Persen Persen**	**8.500.000.000**
3	27	02	2.01		Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian		12	Laporan	6.199.620.000	12	Laporan	5.000.000.000
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		12	Laporan	6.199.620.000	12	Laporan	5.000.000.000
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota		24	Hektar	4.077.655.465	24	Hektar	2.500.000.000
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		12	Dokumen	4.077.655.465	12	Dokumen	2.500.000.000
3	27	02	2:06		Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Jenis benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan		7	Jenis	1.189.930.000	7	Jenis	1.000.000.000
3	27	02	2:06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		119	ekor	1.189.930.000	10.550	ekor	1.000.000.000
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Rasio Prasarana dalam Kondisi Baik**		**0,25**	**Persen**	**11.839.093.940**	**3,00**	**Persen**	**10.800.000.000**
3	27	03	2:01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian		3	Jenis	439.989.000	3	Jenis	350.000.000
3	27	03	2:01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		12	Laporan	439.989.000	12	Laporan	350.000.000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Pertanian yang dibangun		98	unit	11.399.104.940	98	unit	10.450.000.000
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun		35	Unit	6.499.585.320	32	Unit	5.750.000.000
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Usaha Tani	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		-	Unit		5	Unit	300.000.000
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun		20	Unit	3.999.877.220	21	Unit	4.000.000.000
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun		10	Unit	539.750.000	6	Unit	200.000.000
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun		2	Unit	359.892.400	3	Unit	200.000.000

3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**		**11,00**	**Persen**	**10.712.500**	**5,00**	**Persen**	**35.000.000**
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten		12	Bulan	10.712.500	12	Laporan	35.000.000
3	27	04	2.01	01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		12	Laporan	10.712.500	12	Laporan	35.000.000
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian**		**100,00**	**Persen**	**938.458.480**	**100,00**	**Persen**	**1.150.000.000**
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian		227	desa/kelurahan	938.458.480	227	desa/kelurahan	1.150.000.000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		22	Unit	99.868.000	22	Unit	200.000.000
3	27	07	2,01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		22	Unit	838.590.480	22	Unit	950.000.000

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERTANIAN KAB. LUWU

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau merupakan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya manusia yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pertanian, Dinas Pertanian akan melaksanakan program yang disesuaikan dengan misi pembangunan daearah. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kab. Luwu Tahun 2025

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025			SUMBER DANA
								TARGET	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
3					**SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN**						
3	27				**SEMUA BIDANG URUSAN**					**43.476.781.608**	
3	27	01			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**		**19.221.311.223**	**DAU/SILPA/ PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK**
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	persen	100		**19.183.320**	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3		**4.255.780**	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	3	76.700	230.100	
					Tinta Printer Epson		Botol	6	54.280	325.680	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Porsi/kotak	60	30.000	1.800.000	
					Uang Lembur Gol. IV		OJ	20	35.000	700.000	
					Uang Lembur Gol. III		OJ	40	30.000	1.200.000	
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		**3.525.100**	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	3	76.700	230.100	
					Tinta Printer Epson		Botol	4	54.280	217.120	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Porsi/kotak	60	30.000	1.800.000	
					Ball point		OJ	2	38.940	77.880	
					Uang Lembur Gol. III		OJ	40	30.000	1.200.000	

3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		**2.641.160**	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	3	63.720	191.160	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Porsi/kotak	40	30.000	1.200.000	
					Uang Lembur Gol. IV		OJ	10	35.000	350.000	
					Uang Lembur Gol. III		OJ	30	30.000	900.000	
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1		**2.897.220**	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	3	76.700	230.100	
					Tinta Printer Epson		Botol	4	54.280	217.120	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Porsi/kotak	40	30.000	1.200.000	
					Uang Lembur Gol. IV		OJ	10	35.000	350.000	
					Uang Lembur Gol. III		OJ	30	30.000	900.000	
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1		**2.897.220**	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	3	76.700	230.100	
					Tinta Printer Epson		Botol	4	54.280	217.120	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Porsi/kotak	40	30.000	1.200.000	
					Uang Lembur Gol. IV		OJ	10	35.000	350.000	
					Uang Lembur Gol. III		OJ	30	30.000	900.000	

3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1		**2.966.840**	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	3	63.720	191.160	
					Tinta Printer Epson		Botol	6	54.280	325.680	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Porsi/kotak	40	30.000	1.200.000	
					Uang Lembur Gol. IV		OJ	10	35.000	350.000	
					Uang Lembur Gol. III		OJ	30	30.000	900.000	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	Jenis	4		**18.438.867.567**	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	2.208		**18.209.771.887**	
					Belanja Gaji Pokok PNS		Tahun	1	8.855.601.420	8.855.601.420	
					Belanja Gaji Pokok PPPK		Tahun	1	1.585.138.200	1.585.138.200	
					Belanja Tunjangan Keluarga ASN		Tahun	1	865.972.323	865.972.323	
					Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		Tahun	1	134.815.716	134.815.716	
					Belanja Tunjangan Jabatan PNS		Tahun	1	163.000.000	163.000.000	
					Belanja Tunjangan Fungsional PNS		Tahun	1	1.569.540.000	1.569.540.000	
					Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		Tahun	1	42.000.000	42.000.000	
					Belanja Tunjangan Beras PNS		Tahun	1	508.431.417	508.431.417	
					Belanja Tunjangan Beras PPPK		Tahun	1	103.995.120	103.995.120	
					Belanja Pembulatan Gaji PNS		Tahun	1	109.292	109.292	
					Belanja Pembulatan Gaji PPPTK		Tahun	1	26.722	26.722	
					Belanja iuran jaminan kesehatan PNS		Tahun	1	562.628.072	562.628.072	
					Belanja iuran jaminan kesehatan PPPTK		Tahun	1	72.611.411	72.611.411	
					Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS		Tahun	1	18.244.721	18.244.721	
					Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPTK		Tahun	1	3.804.345	3.804.345	
					Belanja iuran jaminan kematian PNS		Tahun	1	54.734.162	54.734.162	
					Belanja iuran jaminan kematian PPPTK		Tahun	1	10.699.245	10.699.245	
					Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		Tahun	1	30.657.323	30.657.323	
					Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		Tahun	1	3.627.762.398	3.627.762.398	

3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		**220.080.000**	
					Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran		12 OB	12	1.090.000	13.080.000	
					Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan		12 OB	12	340.000	4.080.000	
					Belanja Honorarium Bendahara Penngeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu / Staf Pengelola Keuangan		24 OB	36	640.000	23.040.000	
					Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		84 OB	72	1.010.000	72.720.000	
					Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD		12 OB	12	1.250.000	15.000.000	
					Belanja Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) PA/KPA		12 OB	12	2.590.000	31.080.000	
					Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Pagu 2,5 M s.d 5 M)		12 OB	12	2.210.000	26.520.000	
					Belanja Honorarium Pengurus Barang		12 OB	12	700.000	8.400.000	
					Belanja Honorarium User SIPD SKPD		12 OB	12	1.000.000	12.000.000	
					Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan		12 OB	12	680.000	8.160.000	
					Belanja Honorarium User Sirup		12 OB	12	500.000	6.000.000	
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	18		**9.015.680**	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Porsi/Kotak	150	30.000	4.500.000	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	5	63.720	318.600	
					Tinta Printer Epson Hitam		botol	5	54.280	271.400	
					Tinta Printer Epson Warna		botol	6	54.280	325.680	
					Uang Lembur Gol. III		OJ	90	30.000	2.700.000	
					Uang Lembur Gol. I		OJ	50	18.000	900.000	

3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaranaan Administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	100		**446.913.978**	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2		**76.694.100**	
					Laptop		unit	1	19.700.100	19.700.100	
					Printer		unit	20	2.849.700	56.994.000	
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		**11.281.838**	
					Air Mineral Kemasan Botol, 330 mL		botol	576	3.097	1.783.872	
					Air Mineral Kemasan Gelas 220 mL - 240 mL		Dos	120	66.658	7.998.960	
					Kopi Saset Uk. 20 Gram Isi: 10 Pcs		Pak	24	25.610	614.640	
					Teh Celup Isi: 20 - 25 Pcs		Kotak	12	9.168	110.016	
					Materai		Lembar	50	15.487	774.350	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3		**6.627.411**	
					Cetak Umbul-umbul/ Spanduk/ Baliho		meter	40	61.360	2.454.400	
					Foto kopi		lembar	8.047	413	3.323.411	
					Jilid Dokumen Sampai 100 Halaman		Exampler	40	21.240	849.600	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12		**18.000.000**	
					Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Media Lokal		Examplar	180	100.000	18.000.000	
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	30		**39.999.638**	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						
					Bolpoin Isi 12 Pcs, Gel		Lusin	20	38.940	778.800	
					Bolpoin Isi 12 Pcs, non Gel		Lusin	20	40.120	802.400	
					Spidol Besar Permanen		Buah	10	8.968	89.680	
					Tinta Stempel Uk. 50 Ml, Hitam		Botol	2	8.260	16.520	

					Penjepit Kertas No. 111, Isi 12 Pcs		Pack	10	6.372	63.720	
					Penjepit Kertas No. 200, Isi 12 Pcs		Pack	10	15.340	153.400	
					Penjepit Kertas No. 260, Isi 12 Pcs		Pack	20	22.656	453.120	
					Penjepit Kertas No. 300, Isi 6 Pcs		Pack	10	70.800	708.000	
					Klip Kertas No. 05, Isi 100 Pcs		Pack	24	8.260	198.240	
					Buku Folio Uk. 21 Cm x 31,5 Cm, Isi 200 Lembar		Buah	10	40.816	408.160	
					Ordner Karton Uk. F4 / Folio		Buah	30	22.892	686.760	
					Map Batik Uk. F4 / Folio, Bahan Karton Tebal No.30		Buah	50	18.762	938.100	
					Map Kertas Uk. F4 / Folio, Isi 50 Pcs		Pack	10	38.350	383.500	
					Map Kertas Uk. F4 / Folio, Isi 50 Pcs		Pack	10	38.350	383.500	
					Map Plastik Kancing Uk. F4 / Folio, Isi 12 Pcs		Pack	10	38.940	389.400	
					Lem kertas Uk. 500 Gram		Buah	7	29.500	206.500	
					Staples Kecil No. 10		Buah	7	20.060	140.420	
					Isi Staples Kecil No.10, Isi: 20 Box		Pack	5	36.580	182.900	
					Pelubang Kertas Uk. Besar		Buah	7	69.856	488.992	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Jenis			-	
					Kertas HVS A4 Uk. 75 Gsm		Rim	20	63.720	1.274.400	
					Kertas HVS F4 Uk. 75 Gsm		Rim	300	76.700	23.010.000	
					Kertas NCR Uk. F4, Warna Putih		Rim	5	81.420	407.100	
					Kertas NCR Uk. F4, Warna Pink		Rim	5	76.700	383.500	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		jenis			-	
					Tinta Printer Hitam Uk. 100 mL		Botol	30	54.280	1.628.400	
					Tinta Printer Warna Uk. 100 mL		Botol	30	54.280	1.628.400	
					Cartridge Printer Hitam		Unit	6	341.020	2.046.120	
					Cartridge Printer Warna		Buah	3	364.620	1.093.860	
					Flashdisk Kap. 16 GB		Buah	2	66.198	132.396	
					Flashdisk Kap. 64 GB		Unit	2	89.680	179.360	
					Mouse Nirkabel Silent Click		Buah	5	148.798	743.990	

3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		**294.310.991**	
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						
					BBM Pertamax Sulawesi Selatan		Liter	150	16.726	2.508.900	
					BBM Dexlite Sulawesi Selatan		Liter	151	18.461	2.787.611	
					Uang harian perjalanan dinas dalam negeri dalam kota lebih dari 8 jam		OH	200	170.000	34.000.000	
					Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam; Pejabat Eselon II		OH	20	75.000	1.500.000	
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa					-	
					Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Sulawesi Selatan		OH	40	430.000	17.200.000	
					Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota D.K.I. Jakarta		OH	30	530.000	15.900.000	
					Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Pejabat Eselon II		OH	27	150.000	4.050.000	
					BBM Pertamax Sulawesi Selatan		Liter	100	16.726	1.672.600	
					BBM Dexlite Sulawesi Selatan		Liter	80	18.461	1.476.880	
					Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ekonomi Jakarta - Makassar		OK	25	3.829.000	95.725.000	
					Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Makassar - Kab. Luwu		Kali	48	350.000	16.800.000	
					Transportasi Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten / Kota Sekitar (One Way) Jakarta - Kota Tangerang		OK	20	286.000	5.720.000	
					Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II D.K.I. Jakarta		OK	10	2.063.000	20.630.000	
					Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Sulawesi Selatan		OK	10	1.938.000	19.380.000	
					Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV D.K.I. Jakarta		OK	15	992.000	14.880.000	
					Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Sulawesi Selatan		OK	10	1.423.000	14.230.000	
					Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I D.K.I. Jakarta		OK	15	730.000	10.950.000	
					Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I Sulawesi Selatan		OK	20	745.000	14.900.000	

3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang diadakan	Jenis	1		-	
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Unit	-		-	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan penujang urusan pemerintahan daerah	Persen	100		**202.999.858**	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		**49.999.858**	
					Biaya Beban Listrik P2 Kap. di atas 200 kVA		Kwh	19.018	1.381	26.263.858	
					Jaringan Internet; Internet 90 Mbps		Tahun	1	18.000.000	18.000.000	
					Tarif Internet dan TV Kap. 30 Mbps		Bulan	12	478.000	5.736.000	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		**153.000.000**	
					Jasa Upah Kerja Staf Penunjang KegiatanPerkantoran		OB	93	1.000.000	93.000.000	
					Operator Komputer		OB	24	1.000.000	24.000.000	
					Jasa Tenaga Kebersihan; Perkantoran		OB	12	500.000	6.000.000	
					Staf Kantor Penjaga Malam		OB	12	1.500.000	18.000.000	
					Supir; Kepala Dinas		OB	8	1.500.000	12.000.000	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik	Persen	65		**113.346.500**	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	174		**107.856.500**	
					Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						
					BBM Pertamax; Sulawesi Selatan		Liter	1.000	16.726	16.726.000	
					BBM Dexlite; Sulawesi Selatan		Liter	500	18.461	9.230.500	
					Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan						
					Ban Luar Roda 4 Uk.185/70R14		Buah	4	745.000	2.980.000	
					Aki Mobil N 540		Unit	2	1.020.000	2.040.000	
					Kampas Rem Cakram; Roda 4		Unit	2	350.000	700.000	

					Saringan Bahan Bakar; R4 Bensin 23100-87603-00		Pcs	10	150.000	1.500.000	
					Ban Luar; R4 750R16		Pcs	4	1.850.000	7.400.000	
					Bearing Roda Depan Dalam; Roda 4		Pcs	4	250.000	1.000.000	
					Saringan Bahan Bakar; Roda 4 Solar		Pcs	10	400.000	4.000.000	
					Shockbreaker Depan; Roda 4		Unit	2	900.000	1.800.000	
					Pemeliharaan kendaraan Roda 2						
					Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua; Sulawesi Selatan		Unit	1	4.910.000	4.910.000	
					Pemeliharaan kendaraan Roda 4						
					Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat; Sulawesi Selatan		Tahun	1	36.770.000	36.770.000	
					Pajak Kendaraan Roda 2						
					Pajak STNK Roda 2/3 Kategori B		Unit	40	200.000	8.000.000	
					Pajak Kendaraan Roda 4						
					Pajak STNK Roda 4/Lebih Kategori I		Unit	6	1.800.000	10.800.000	
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	13		**5.490.000**	
					Pemeliharaan Sarana Kantor; AC Split		unit	9	610.000	5.490.000	

3	**27**	**02**			**PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan produksi peternakan**	**Persen**	**11,80**		**11.467.205.465**	**DAU / DID / RETRIBUSI JASA USAHA**
						Persentase peningkatan produksi perkebunan	**Persen**	**2,34**			
						persentase peningkatan produksi tanaman pangan	**Persen**	**2,50**			
						Persentase peningkatan produksi hortikultura	**Persen**	**4,12**			
3	27	02	2.01		Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Presentase ketersediaan sarana pertanian dalam kondisi baik	Persen	91.07		**6.199.620.000**	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	12		**6.199.620.000**	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian -Hand Traktor		unit	73	32.700.000	2.387.100.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian-Mesin Pemipil Jagung		unit	25	31.000.000	775.000.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian-Mesin Pompa Air		unit	20	26.000.000	520.000.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian-Combine Harvester		unit	2	468.000.000	936.000.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian-Power Threaser Mlultiguna (PTM)		unit	12	30.500.000	366.000.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian- Rice Milling Unit (RMU)		unit	2	384.000.000	768.000.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian -Mesin Perontok Cengkeh		unit	4	30.100.000	120.400.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian-Hand Sprayer		unit	376	870.000	327.120.000	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Hektar	24		**4.077.655.465**	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	12		**4.077.655.465**	
					Belanja Bahan-Bahan Kimia						
					Pupuk Organik, Spesifikasi : Cair			10	148.680	1.486.800	
					Pupuk Urea			500	15.487	7.743.500	
					Fungisida + ZPT, Spesifikasi : 250 EC, Uk. 80 Ml			30	86.730	2.601.900	
					Herbisida, Spesifikasi : Cair			130	109.651	14.254.630	

					Insektisida			30	76.198	2.285.940	
					Insektisida Hama Wereng, Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah			7	260.066	1.820.462	
					Insektisida Pembasmi Ulat dan Hama, Spesifikasi : Uk. 100 ML			10	46.462	464.620	
					Pupuk NPK, Spesifikasi : 15+15+15			500	24.780	12.390.000	
					Pupuk Organik, Spesifikasi : Cair			50	148.680	7.434.000	
					Upah Kerja Petugas IKB						
					Jasa Tenaga Administrasi Kantor,			26	1.000.000	26.000.000	
					Tanaman Pangan						
					Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Benih Padi Inbrida : Benih Pokok		Kg	10.000	14.650	146.500.000	
					Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Benih Jagung : Benih Pokok		Kg	988	125.000	123.500.000	
					Hortikultura						
					Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Bibit Durian Okulasi		Btg	12.000	67.000	804.000.000	
					Beban barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat : Bibit Alpukat		Btg	5.000	54.000	270.000.000	
					Beban barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat : Bibit Lengkeng ==> Rambutan		Btg	5.000	37.500	187.500.000	
					Beban barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat : Bibit Pisang Cavendish		Btg	20.000	21.000	420.000.000	
					Beban barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat : Benih Kangkung, Spesifikasi : Uk. 1 Kg		perbungkus	179	47.082	8.427.678	
					Beban barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat : enih Bayam Batik		perbungkus	85	60.711	5.160.435	
					Beban barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat : Bibit Cabei		perbungkus	1.300	123.900	161.070.000	
					Perkebunan						
					Beban barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat : Bibit Pala		Btg	12.163	18.500	225.015.500	
					Beban barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat : Bibit Kakao		Btg	100.000	16.500	1.650.000.000	
3	27	02	2:06		Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Jenis benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan	Jenis	7		**1.189.930.000**	
3	27	02	2:06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	ekor	119		**1.189.930.000**	
					bibit ternak sapi		ekor			-	
					Bibit Ternak Kambing (10 betina : 1 Jantan)		ekor	66	3.500.000	231.000.000	
					Bibit Ternak Ayam		ekor	10.094	95.000	958.930.000	

3	27	03			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Rasio Prasarana dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**0,25**		**11.839.093.940**	**DAU / DID**
3	27	03	2:01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jenis	3		**439.989.000**	
3	27	03	2:01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	12		**439.989.000**	
					Beban barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat : Bibit Sawit		Btg	26.666	16.500	439.989.000	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Pertanian yang dibangun	unit	98		**11.399.104.940**	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	35		**6.499.585.320**	
					Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Irigasi Air Tersier		m1	4.725	1.168.500	5.520.835.320	
					Perencanaan		Paket	1	165.000.000	165.000.000	
					Pengawasan		Paket	1	110.000.000	110.000.000	
					Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Irigasi Air Tanah Dangkal (DAU)		Unit	7	100.000.000	700.000.000	
					Perencanaan		Paket	1	2.250.000	2.250.000	
					Pengawasan		Paket	1	1.500.000	1.500.000	
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit			-	
					Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Embung		Unit			-	
					Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		Paket			-	
					Beban Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket			-	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	20		**3.999.877.220**	
					Pembangunan Jalan Usaha Tani		M2	21.045	180.916	3.807.377.220	
					Perencanaan		Paket	1	115.500.000	115.500.000	
					Pengawasan		Paket	1	77.000.000	77.000.000	
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit		Unit			-	
					Pembangunan DAM Parit		Unit			-	
					Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		Paket			-	
					Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket			-	

3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	10		**539.750.000**	
					Pembangunan Pintu Air		Unit	6	85.000.000	510.000.000	
					Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		Paket	1	15.750.000	15.750.000	
					Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket	1	14.000.000	14.000.000	
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang direhab dan disediakan sarana pendukungnya	Unit			-	
					Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya		Paket			-	
					Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		Paket				
					Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket			-	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2		**359.892.400**	
					Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Cetak Sawah		M3	2.856	125.400	358.142.400	
					Perencanaan		Paket	1	1.050.000	1.050.000	
					Pengawasan		Paket	1	700.000	700.000	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**	**Persen**	**11,00**		**10.712.500**	**PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK / DAK**
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	Bulan	12		**10.712.500**	
3	27	04	2.01	08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	12		**10.712.500**	
					Kertas HVS Folio		rim	5	76.700	383.500	
					Fotocopy / Penggandaan		lembar	3000	413	1.239.000	
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Orang/hari	50	170.000	8.500.000	
					id card		Pcs	100	5.900	590.000	

3	27	07			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian**	**Persen**	**100,00**		**938.458.480**	**DAU / HIBAH / PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK**
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian	desa/kelurahan	227		**938.458.480**	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	22		**99.868.000**	
					READSI						
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan		Kotak	50	30.000	1.500.000	
					Perjalanan Dinas Luar Daerah; Jawa Barat		Kali	51	430.000	21.930.000	
					Perjalanan Dinas Luar Daerah; Sulawesi Selatan		Kali	50	430.000	21.500.000	
					Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I		OK	10	745.000	7.450.000	
					Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bisnis		OK	8	5.936.000	47.488.000	
3	27	07	2,01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	22		**838.590.480**	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		528 Rim	528	76.700	40.497.600	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : tinta printer		88 btl	176	54.280	9.553.280	
					Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan		252 Org/Bln	216	700.000	151.200.000	
					Penyuluh THL Kabupaten		745 Org/Bln	290	2.100.000	609.000.000	
					Belanja Tagihan Listrik		1.300 VA	7.000	1.381	9.667.000	
					Perjalanan Dinas dalam daerah		100 ok	100	170.000	17.000.000	
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota; BBM Pertamax			100	16.726	1.672.600	

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

   Program pelayanan administrasi perkantoran untuk tahun 2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 19.221.311.223,- yang digunakan untuk membiayai belanja rutin dan pegawai yang bersifat administratif dan kebutuhan rutin kantor. Kegiatan yang masuk dalam program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota antara lain :

   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, digunakan untuk membiayai penyusunan dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja OPD.
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini menyangkut Penyediaan Gaji/Tunjangan ASN dan penyusunan Laporan Keuangan OPD.
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah, digunakan untuk penyediaan peralatan/perlengkaoan kantor, bahan logistik, cetak/penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan biaya perjalanan dinas OPD dalam rangka koordinasi dan konsultasi.
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, merupakan pembiayaan terkait penyediaan jasa surat-menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, merupakan pembiayaan terkait pemeliharaan dan rehabilitasi barang asset milik pemerintah.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

   Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian merupakan program pembiayaan terkait penyediaan sarana pendukung pertanian seperti alat dan mesin pertanian (ALSINTAN). Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini sebesar Rp. 11.467.205.465,-. Kegiatan yang akan dilaksanakan terkait program ini antara lain :

   - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, merupakan kegiatan penyediaan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian berupa alat dan mesin pertanian.

- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, merupakan kegiatan terkait pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terkait budidaya dan penyediaan bibit tanaman.
- Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain, merupakan kegiatan penyediaan bibit ternak (sapi, kambing dan itik) bagi kelompok tani.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian merupakan program penyediaan prasarana pertanian, baik sarana pengelolaan lahan, pengelolaan air dan prasarana pertanian lainnya. Total anggaran yang dibutuhkan untuk program ini sebesar Rp. 11.839.093.940,-. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini antara lain :

- Pengembangan Prasarana Pertanian, sumber anggarannya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.
- Pembangunan Prasarana Pertanian, merupakan kegiatan pembangunan prasarana seperti Jaringan Irigasi Usaha Tani, Embung, Jalan Usaha Tani, Pintu air, dan prasarana pertanian lainnya. sumber anggarannya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

   Program ini untuk mendukung kegiatan peningkatan produksi dan populasi ternak serta pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di Kabupaten Luwu. Untuk tahun 2025, program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp. 10.712.500,-. Kegiatan yang menyangkut program ini adalah :

   - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten, merupakan kegiatan penyediaan obat-obatan hewan/ternak serta jasa petugas medis veteriner.
   - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, merupakan kegiatan terkait pelayanan kesehatan hewan jasa medis veteriner bagi masyarakat.

5. Program Penyuluhan Pertanian

   Program ini merupakan program untuk mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani serta penyediaan dan pemanfaatan sarana penyuluhan pertanian. Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini sebesar Rp. 938.458.480,-. Kegiatan yang mendukung program ini antara lain :

   - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, menyangkut peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa, serta penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.

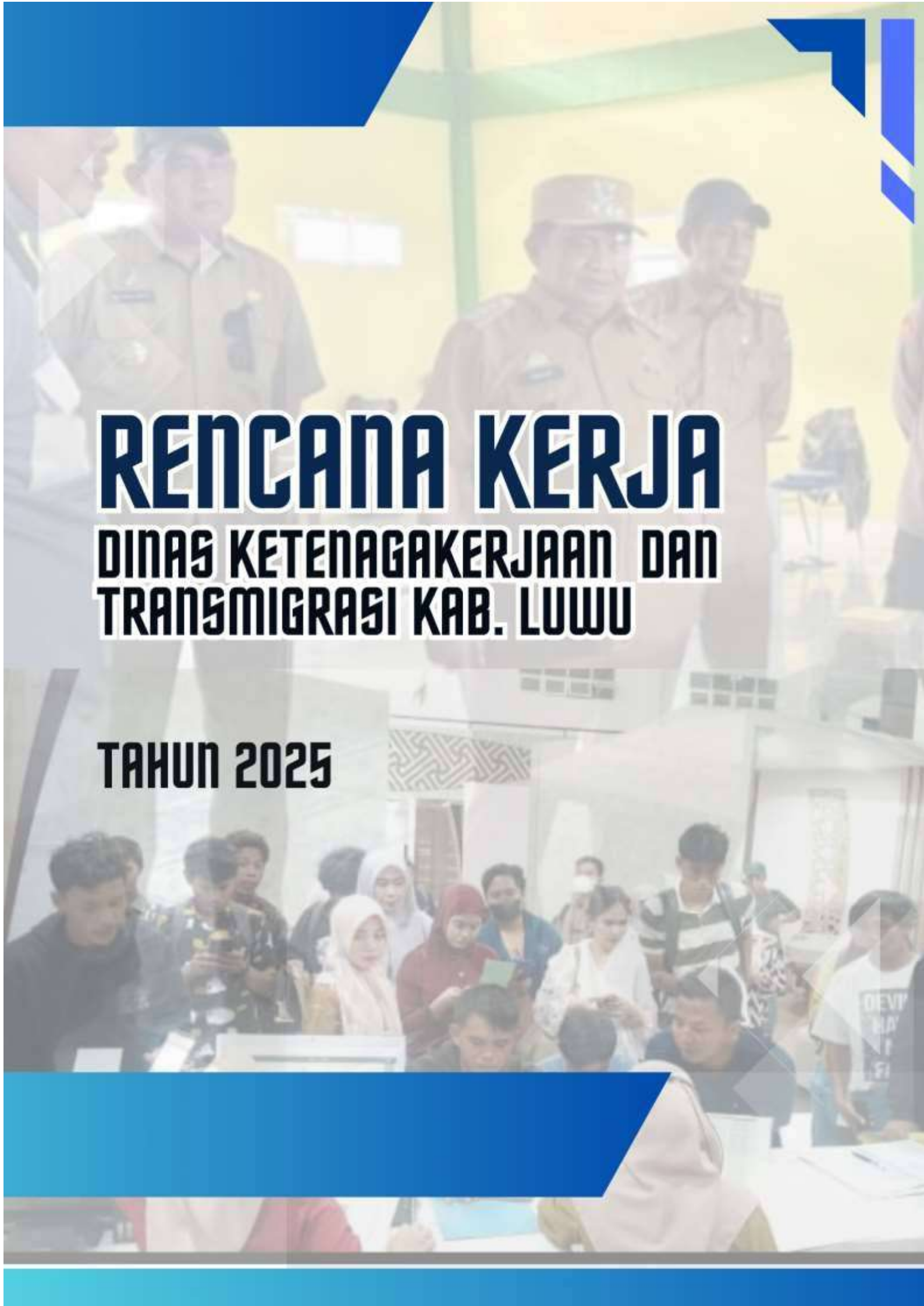
BAB V.
PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini kami buat, sebagai bahan pedoman atau acuan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025. Demi menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, setiap unit kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu akan melakukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja ini, sehingga pembangunan Pertanian dapat lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri di masa yang akan datang.

RENCANA KERJA

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KAB. LUWU

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehinggga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu dapat diselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka pemerintah Kabupaten Luwu melalui setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah di atur sesuai dengan Peraturan Bupati. Pada masa peralihan kepemimpinan kepala daerah ini, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu membuat Rencana Kerja (Renja) ini sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

Rencana Kerja pada hakikatnya memuat program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan disusunnya Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini, diharapkan pelaksanaan program/kegiatan dapat terlaksana secara efektif, efisien, akuntabel dengan hasil yang optimal dan tepat sasaran sesuai dengan yang di harapkan.

Belopa, 28 Juni 2024

KEPALA DINAS,

Drs. HASBULLAH BIN MUSH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19651231 199703 1 034

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian renstra Perangkat Daerah 5

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 27

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 28

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat 41

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 42

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 43

3.3 Program dan Kegiatan 45

BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2025 49

BAB V PENUTUP 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2025-2026, Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai perencanaan jangka pendek yang menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Penyajian dokumen Renja diatur dalam Pemendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja disusun sebagai dokumen tahunan perangkat daerah guna mendukung rencana pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan yang memuat kerangka pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan berorientasi untuk meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan. Rencana Kinerja ini akan merealisasikan program dalam kurun waktu 1 (satu) tahun guna mencapai kinerja yang optimal baik dari aspek pertanggungjawaban maupun dari aspek pelayanan masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026;
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 120 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor …… Tahun 2024 tentang RKPD Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu ini adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun mendatang. Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam menentukan kebijakan sekaligus sebagai pedoman dan acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi dengan ketersediaan dokumen Rencana Kerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025, terurai dalam beberapa Bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Berisi tentang Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap

rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan Mayarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Bab V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun berjalan (tahun 2023) dievaluasi dengan membandingkan hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target awal yang ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 juga dilakukan dengan menganalisis perkembangan capaian Renstra yang telah ditetapkan. Evaluasi Rencana Kerja ini ditinjau dari Program/Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2023 yang telah dilaksanakan.

Program/Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 terdiri atas 5 Program, 13 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, dengan 1 diantaranya Program Rutin dan 4 Program Teknis/prioritas. Program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 (tahun berjalan) ini sangat dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan, pelayanan, regulasi yang ada serta perubahan/perkembangan lingkungan dan sosial. Selain itu adanya program pengetasan kemisninan mendorong perangkat daerah untuk mengoptimalkan program yang mendukung agenda tersebut. Selain itu, program/kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab.Luwu diupayakan dapat mencapai tujuan dan yang telah ditetapkan.

Jika dicermati pelaksanaan Program/Kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab.Luwu pada tahun 2023 terhadap Rencana Strategis perangkat daerah, maka didapatkan gambaran bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan terealisasi dengan capaian kinerja adalah 92,77% dan realisasi keuangan 90,51%. Sedangkan capaian program/kegiatan/sub kegiatan terhadap Renstra adalah 68.67% Hal ini menunjukkan telah tercapaianya target pada beberapa program/kegiatan, terutama yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Pada tahun berjalan (tahun 2024), realisasi hingga Triwulan III telah mencapai realisasi keuangan 56,30% dengan Realisasi kinerja 59,63% (evaluasi Renja Triwulan III terlampir). Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan tahun 2024 (tahun berjalan) yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 (TC.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2024 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Luwu

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4	12
2					**Urusan**	**: Wajib tidak Berkaitan Pelayanan Dasar**										
2	**7**				**Bidang urusan**	**: Tenaga Kerja**										
					Perangkat Daerah	**: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**										
2	**7**	**1**			**Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**500**	**295**	**100**	**100**	**100**	**100**	**495**	**99**	
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Persen	500	298	298	100	98	100	498	100	
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Dokumen	12	8	2	2	100	2	12	100	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4	12
2	7	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100	
2	7	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100	
2	7	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100	
2	7	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100	
2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100	
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	60	20	20	100	20	100	100	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4	12
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	Orang	265	161	53	53	100	51	265	100	
2	7	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	jumlah dokumen yang diverifikasi	Dokumen	60	36	12	12	100	12	60	100	
2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	20	0	0	0	0	20	20	
2	7	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	5	3	0	0	0	0	3	60	
2	7	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	orang	3	1	0	0	0	0	1	33	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4	12
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaranaan Administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	500	277	100	97	97	100	474	95	
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	25	9	8	8	100	7	24	96	
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	20	8	0	0	0	0	8	40	
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	bulan	60	12	12	12	100	12	36	60	
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	16	11	3	3	100	3	17	106	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4	12
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Jenis	50	24	5	8	160	22	54	108	
2	7	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	Jenis	25	15	5	5	100	5	25	100	
2	7	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan jamuan makan dan minum yang disediakan	bulan	60	36	12	12	100	12	60	100	
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	kali	495	298	66	64	97	68	430	87	
						Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi SKPD	kali	60	36	12	12	100	10	58	97	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4	12
2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	100	0	0	0	0	0	0	0	
2	7	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit	3	0	0	0	0	0	0	0	
2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	Persen	100	60	20	20	100	20	100	100	
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	bulan	60	36	12	12	100	12	60	100	
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	Bulan	60	36	12	12	100	12	60	100	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4	12
2	7	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	75	13	14	14	100	14	41	55	
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	orang	165	96	23	23	100	21	140	85	
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai ketentuan/kebutuhan	Persen	100	28	20	20	100	20	68	68	
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	75	31	15	14	93	15	60	80	
2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	Unit	40	8	0	0	0	0	8	20	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4	12
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	M2	375	100	25	25	100	20	145	39	
2	**7**	**2**			**Perencanaan Tenaga Kerja**	**Cakupan penyelenggaraan perencanaan tenaga kerja**	**Persen**	**80**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**50**	
2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase ketersediaan dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persen	80	40	0	0	0	0	40	50	
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	1	1	0	0	0	0	1	100	
2	7	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	11	0	0	0	0	0	0	0	
2	**7**	**3**			**Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi**	**Persen**	**360**	**45,6**	**90**	**43,54**	**48**	**90**	**179,14**	**50**	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi	Persen	100	40	20	20	100	20	80	80	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4	12
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang diberikan pendidikan dan pelatihan dalam 1 (satu) tahun	Orang	160	64	16	16	100	16	96	60	
2	7	4	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Lembaga	3	0	0	0	0	0	0	0	
2	7	4	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pelatihan kerja Kab/Kota yang diadakan	Unit	30	9	1	1	100	0	10	33	
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Cakupan lembaga pelatihan kerja swasta yang aktif	Persen	90	30	30	30	100	30	90	100	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja Swasta yang dibina	Lembaga	11	6	4	4	100	4	14	127	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4	12
2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase tenaga kerja yang telah dilakukan pengukuran produktifitas tingkat daerah	Persen	80	10	10	10	100	0	20	25	
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah laporan pengukuran kompetensi dan produktivitas	dokumen	4	1	0	0	0	0	1	25	
2	**7**	**4**			**Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**Persen**	**26,94**	**10,2**	**7,07**	**1,45**	**21**	**6,07**	**17,72**	**66**	
2	7	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten	Persen	320	205	80	85	106	80	370	116	
2	7	4	2.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pelayanan bersertifikat ISO 9001-2015 disediakan	Pelayanan	1	0	0	0	0	0	0	0	
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah bulan pelayanan antar kerja	Bulan	60	36	12	12	100	12	60	100	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4	12
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang diberikan penyuluhan dan bimbingan	Orang	120	40	50	80	160	0	120	100	
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan	Orang	300	160	0	0	0	0	160	53	
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Cakupan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persen	75	0	0	0	0	0	0	0	
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah media informasi pasar kerja online	Media	2	0	0	0	0	0	0	0	
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0	0	
2	**7**	**5**			**Hubungan Industrial**	**persentase perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak**	**Persen**	**360**	**76,68**	**100**	**24,31**	**24**	**46,9**	**147,89**	**41**	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4	12
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	perusahaan	350	91	100	54	54	100	245	70	
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah dokumen informasi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	dokumen	4	2	1	1	100	1	4	100	
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	Persen	100	60	20	20	100	20	100	100	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4	12
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah rapat koordinasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	Kali	16	8	4	4	100	4	16	100	
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah kasus perselisihan yang difasilitasi penyelesaiannya	Kasus	3	1	0	0	0	0	1	33	
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah perusahaan yang diverifikasi dan rekapitulasi	perusahaan	10	1	0	0	0	0	1	10	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4	12
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Tenaga Kerja	Orang	45000	21873	12484	12484	100	12192	46549	103	
3	**32**	**2**			**Perencanaan Kawasan Transmigrasi**	**Luas cadangan tanah untuk kawasan transmigrasi yang disediakan**	**Ha**	**112**	**50**	**50**	**50**	**100**	**0**	**100**	**89**	
3	32	2	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Cakupan penyelenggaraan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kawasan	5	4	1	1	100	0	5	100	
3	32	2	2.01	4	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	dokumen	5	3	0	0	0	0	3	60	
3	**32**	**4**			**Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan**	**Ha**	**112**	**50**	**0**	**0**	**0**	**12**	**62**	**55**	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Ket
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4	12
3	32	4	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kawasan	5	1	1	1	100	1	3	60	
3	32	4	2.01	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	JumlahSDM yang dibina dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kawasan	50	0	0	0	0	50	50	100	

KEPALA DINAS,

Drs. HASBULLAH BIN MUSH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19651231 199703 1 034

Pada tabel di atas terlihat bahwa ada beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat 6 sub kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan selama beberapa tahun pada periode Renstra. Hal ini disebabkan kegiatan prioritas lebih diutamakan mengingat terbatasnya anggaran. Selain itu, nomenklatur kegiatan masih menimbulkan multi persepsi terkait implementasi kegiatan tersebut.
2. Ditinjau dari pencapaian target renstra, terdapat 7 sub kegiatan yang realisasinya di bawah 50%. Hal ini disebabkan beberapa sub kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara berkesinambungan dan mempertimbangkan kinerja utama perangkat daerah.

   Beberapa sub kegiatan yang belum terlaksana pada periode Renstra perlu mendapat dukungan anggaran dan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan Rencana Tenaga Kerja Mikro (perusahaan), Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja, penggunaan TKA (tenaga Kerja Asing) dan Rencana Kawasan Transmigrasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2023 diukur dalam 5 (lima) Indikator Kinerja Kunci dari 5 (lima) sasaran yang diuraikan pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI 2023	PROYEKSI 2024
			2023	2024		
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	72,02	78,80	76,07	78,80
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	63,44	73,00	72,53	73,00
3	Meningkatnya penempatan dan perluasan kerja di sektor formal dan informal	Persentase pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industry	73,81	74,15	50,46	75,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI 2023	PROYEKSI 2024
			2023	2024		
4	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Rasio lulusan pelatihan yang bekerja	34,56	35,12	22,92	35,12
5	Meningkatnya perekonomian satuan pemukiman di kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang dibina	1	1	1	1

Berdasarkan tabel di atas, terlihat beberapa kinerja telah memenuhi pencapaian atau melebihi target kinerja yang ditetapkan, namun beberapa lainnya pencapaiannya masih rendah atau belum mencapai target yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

   Pencapaian sasaran ini terukur dari penilaian internal Implementasi SAKIP oleh Inspektorat yang mencapai nilai 76,07% (BB) melebihi target yang diperkirakan (target : 72,02% atau B). Sasaran ini dicapai dalam 1 (satu) Program dengan 6 (enam) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut tercapai 100% dengan terlaksananya kegiatan rutin kesekretariatan.

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya Kesempatan Kerja**

   Pencapaian sasaran ini diukur dari persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang mencapai 72,53%, lebih tinggi dari yang ditargetkan. Sasaran ini terutama ini terlaksana dengan telah terlayaninya pencari kerja di Kabupaten Luwu sebanyak 3924 orang pada tahun 2023 dimana angka ini adalah sekitar 55% dari jumlah pengangguran di Kabupaten Luwu. Pencari kerja yang cukup tinggi ini masih memerlukan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi pula.

3. **Sasaran 3 : Meningkatnya kompetensi tenaga Kerja dan produktifitas tenaga Kerja**

   Pencapaian sasaran ini diukur dengan target Rasio lulusan pelatihan yang bekerja yang mencapai 22,92% dari 34,56% yang ditargetkan. Sasaran ini didorong oleh pelaksanaan Program Pelatihan

Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan. Pada tahun 2023 pelaksanaan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu dan UPTD Balai Latihan Kerja Kab. Luwu dengan sumber pendanaan dari APBD, pusat dan provinsi. Meskipun demikian, Sasaran ini belum mencapai target. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tuntutan dunia kerja untuk kompetensi tertentu lebih dibutuhkan dibandingkan pelatihan kompetensi yang tersedia. Salah satu diantaranya Pelatihan alat berat yang banyak dibutuhkan dengan terbukanya beberapa perusahaan industri besar di Kabupaten Luwu. Faktor lainnya yang juga menyebabkan hal tersebut adalah kemampuan membuka usaha atau lapangan berusaha secara mandiri masih rendah.

4. **Sasaran 4 : Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal**

Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator persentase pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri dengan capaian 50,46% lebih rendah dari target yang ditetapkan maupun capaian tahun sebelumnya (72,39% pada tahun 2022). Sasaran ini direalisasikan dalam Program Hubungan Industrial dengan 2 (dua) Kegiatan dan 4 (tiga) Sub Kegiatan. Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan ini terlaksana dengan terselenggaranya pendataan ketenagakerjaan pada sekitar 100 perusahaan. Dengan Kegiatan Pendataan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini dihasilkan 1 (satu) dokumen yang berisi data perusahaan yang telah memiliki kesepakatan dan telah ikut dalam program jamsostek. Selain itu, Pencapaian sasaran ini turut ditunjang dengan adanya kegiatan Jaminan Kecelakaan kerja dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Non ASN bagi instansi pemerintah (10.429 orang) dan Pekerja Rentan (1984 orang).

Sasaran 5 : Meningkatnya perekonomian satuan permukiman di kawasan transmigrasi

Sasaran ini diwujudkan dalam Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan

menatausahakan penyediaan pemukiman dengan legalitas sah (bersertifikat) bagi masyarakat transmigran. Selain itu, pada tahun 2024 ini, peningkatan kemandirian di kawasan transmigrasi juga dilakukan dengan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia/transmigran dalam memanfaatkan sumber daya dan lahan yang tersedia.

Secara jelas, Berikut tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu.

Tabel 2.3 (TC.30)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab.Luwu

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			proyeksi		catatan analisis
				Tahun 2020	*Tahun 2021*	*Tahun 2022*	*Tahun 2023*	*Tahun 2024*	*Tahun 2020*	*Tahun 2021*	*Tahun 2022*	*Tahun 2023*	*Tahun 2024*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	IKK													
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja (%)			37,04	25,00	45,45	46,67	48,89	37,04	41,67	56,52	46,67	48,89	Mengacu RKTD 2022-2026
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)		20	51,38	51,61	55,04	65,00	70,50	90	58,33	43,54	65,00	70,50	Sertifikar kompetensi menjadi ukuran kualitas tenaga kerja
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. Juta/pekerja)		20	104,71	107,75	109,01	110,32	111,04	104,71	109,27	113,52	110,32	111,04	Berdasarkan harga berlaku
4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten (%)		20	5,45	6,06	6,40	7,07	7,41	5,45	11,36	4,71	7,07	7,41	Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi kondisi ekonomi dan perkembangan /dinamika usaha
5	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		20	28,6	32,4	39,1	46,9	52,1	0	21,32	22,97	46,9	52,1	Tata kelola kerja layak berkaitan dengan penerapan aturan/kebijakan dan pengawasan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			proyeksi		catatan analisis
				Tahun 2020	*Tahun 2021*	*Tahun 2022*	*Tahun 2023*	*Tahun 2024*	*Tahun 2020*	*Tahun 2021*	*Tahun 2022*	*Tahun 2023*	*Tahun 2024*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
6	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kawasan Transmigrasi memerlukan RKT sebagai dasar legalitas kawasan
7	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya			1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	
8	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang dibina			1	0	0	0	0	1	0	*0*	0	0	
	SDGs													
9	Persentase tenaga kerja formal			25,96	26,09	26,53	27,12	27,25	25,96	25,65	29,17	27,12	27,25	
10	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian			79,43	79,85	79,62	79,21	79,06	79,43	75,85	n.a	79,21	79,06	
11	Upah rata-rata per jam pekerja			15,606	15,801	16,110	16,501	17.120	15,606	19,787	17.406	16,501	17.120	
12	Tingkat setengah pengangguran			48,15	48,05	47,80	47,48	47,16	48,15	32,32	47,83	47,48	47,16	
13	Persentase Usia Muda (15- 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)			11,16	11,01	10,64	10,28	9,76	11,16	11,57	9,92	10,28	9,76	
14	Proporsi tenaga kerja pada sektor manufaktur			8,54	8,83	9,12	9,38	9,72	8,54	10,50	14,92	9,38	9,72	
15	Proporsi peserta program SJSN ketenagakerjaan			76,51	78,35	80,05	80,55	81,28	76,51	77,05	71,93	80,55	81,28	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan ketenagakejaan yang masih terus terjadi tetap diupayakan pemecahannya antara lain adalah :

1 Jumlah angkatan kerja yang memiliki keahlian dan atau ketrampilan masih relatif kecil mengakibatkan rendahnya daya saing dalam pemenuhan kesempatan kerja dan berusaha.

2 Masih kurangnya tenaga instruktur professional pelatihan kerja yang kompeten di bidang keahliannya masing-masing sehingga diperlukan peningkatan profesionalisme tenaga instruktur melalui program upgrading yang dilakukan di dalam maupun diluar negeri.

3 Kompetensi tenaga fungsional pengantar kerja masih terbatas dalam memberikan pelayanan dan informasi kerja sehingga perlu menjadi perhatian.

4 Terbatasnya perkembangan usaha swasta di sektor industri menengah ke atas menyebabkan terbatasnya penyerapan tenaga yang di Kabupaten Luwu.

5 Meluasnya perusahaan-perusahaan besar yang baru di Kabupaten Luwu perlu dikendalikan dengan adanya peraturan/kebijakan ketenagakerjaan

6 Penggunaan tenaga kerja asing oleh perusahaan perlu pengawasan dan perhatian khusus yang diatur dengan regulasi tentang tenaga kerja asing.

7 Keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta dan Balai Latihan Kerja Komunitas belum sepenuhnya mampu memberikan pelatihan dengan berbagai jenis kejuruan dan keterampilan yang bisa mendukung kompetensi tenaga kerja.

8 Pemanfaatan lahan transmigrasi belum mendorong peningkatan pendapatan dan peningkatan perekonomian di kawasan transmigrasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan landasan awal perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah. RKPD memberikan arah dan acuan bagi perangkat daerah dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja). Rancangan awal tersebut berisikan program/kegiatan yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Rancangan awal tersebut perlu dibandingkan dengan analisis kebutuhan perangkat daerah untuk mendapatkan rumusan program/kegiatan yang tepat untuk mencapai tujuan.

Rancangan awal RKPD dan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025 mengacu pada RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 (Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024) dan Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2025-2026. Pada dokumen Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2025 ini, rumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun dipengaruhi oleh berbagai hal seperti; perubahan kebijakan, kondisi anggaran, tuntutan kebutuhan pelayanan atau kegiatan prioritas. Berikut Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.

Tabel 2.3 (TC.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Senga - Kab. Luwu**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**5.551.666.759**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Senga - Kab. Luwu**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**5.662.054.019**
1,1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Senga - Kab. Luwu	Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	100%	13.088.040	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Senga - Kab. Luwu	Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	100%	13.219.947
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	10.521.240	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	10.381.936
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	427.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	486.843

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	427.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	486.843
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	470.700	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	549.383
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	470.700	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	549.383
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Senga - Kab. Luwu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	770.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Senga - Kab. Luwu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	765.559

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Senga - Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	4.878.248.619	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Senga - Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	4.950.479.543
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	636 orang/ bulan	4.771.448.619	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	636 orang/bulan	4.839.599.543
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	106.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	110.880.000
1,3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Senga - Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan Administrasi Barang milik daerah	100%	6.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Senga - Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan Administrasi Barang milik daerah	100%	6.447.220
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.447.220
1,4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Senga - Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	15.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Senga - Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	15.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1.4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	15.000.000
1,5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Senga - Kab. Luwu	Persentase pemenuhan administrasi umum perkantoran	100%	290.607.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Senga - Kab. Luwu	Persentase pemenuhan administrasi umum perkantoran	100%	319.222.646
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.106.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.108.014
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	54.779.450
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.176.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.166.141
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.088.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	8.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	8.400.000
1.5.6	Penyediaan Bahan/Material	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	31.517.500	Penyediaan Bahan/Material	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	41.467.501
1.5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	10.654.400	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	10.881.540
1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	196.665.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	196.420.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Senga - Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaran penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100%	289.335.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaran penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100%	308.929.186
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.799.186
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	74.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	93.440.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.735.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.890.000
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	184.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	184.800.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Senga - Kab. Luwu	Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	58.887.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Senga - Kab. Luwu	Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	48.755.477
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	53.887.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	43.755.477

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1.7.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000
III	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Kab. Luwu**	**Tingkat produktivitivitas tenaga kerja Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi**	**71,12 % 81,68 %**	**2.018.416.500**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Kab. Luwu**	**Tingkat produktivitivitas tenaga kerja Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi**	**71,12 % 81,68 %**	**1.900.729.307**
3,1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Kab. Luwu	Persentase pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi	75%	2.000.000.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Kab. Luwu	Persentase pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi	75%	1.882.362.957
3.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kab. Luwu	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	200 orang	1.900.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kab. Luwu	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	200 orang	1.765.810.896
3.1.2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 unit	100.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 unit	116.552.061
3,2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Senga - Kab. Luwu	Cakupan lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	80%	18.416.500	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Senga - Kab. Luwu	Cakupan lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	80%	18.366.350

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
3.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	6 Lembaga	18.416.500	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Senga - Kab. Luwu	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	6 Lembaga	18.366.350
IV	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Kab. Luwu**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten**	**7,50%**	**77.133.000**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Kab. Luwu**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten**	**7,50%**	**77.140.458**
4,1	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Luwu	Cakupan penyelenggaraan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten	100%	57.133.000	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Luwu	Cakupan penyelenggaraan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten	100%	57.117.238
4.1.1	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Luwu	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 orang	34.633.000	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Luwu	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 orang	34.627.231
4.1.2	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Luwu	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40 orang	22.500.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Luwu	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40 orang	22.490.007

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
4,2	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan Pelindungan PMI di Daerah Kabupaten	60%	20.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan Pelindungan PMI di Daerah Kabupaten	100%	20.023.220
4.2.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Luwu	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	10 orang	20.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Luwu	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 orang	20.023.220
V	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Kab. Luwu**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ((PP /PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**100%**	**1.154.855.514**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Kab. Luwu**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ((PP /PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**100%**	**2.778.148.893**
5,1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	30%	37.500.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	30%	38.495.584

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
5.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Luwu	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	2 Perusahaan	10.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Luwu	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	2 Perusahaan	10.999.000
5.1.2	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Luwu	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Dokumen	27.500.000	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Luwu	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Dokumen	27.496.584
5,2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu	Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	100%	1.117.355.514	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu	Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	100%	2.739.653.309

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
5.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah perselisihan yang dicegah	2 perkara	17.355.514	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah perselisihan yang dicegah	2 perkara	17.353.557
5.2.2	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Luwu	Jumlah tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja	12484 orang	1.100.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Luwu	Jumlah tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja	12484 orang	2.722.299.752
VI	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Kab. Luwu**	**Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan Kawasan transmigrasi yang dikembangkan**	**12 Ha 1 Kawasan**	**25.000.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Kab. Luwu**	**Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan Kawasan transmigrasi yang dikembangkan**	**12 Ha 1 Kawasan**	**24.999.096,00**
6,1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kab.Luwu	Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan	1 Kawasan 12 Ha	25.000.000	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kab.Luwu	Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan	1 Kawasan 12 Ha	24.999.096

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab. Luwu	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	KK	25.000.000	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab. Luwu	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	KK	24.999.096,00
JUMLAH					**8.827.071.773**	**JUMLAH**				**10.443.071.773**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Mayarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat diawali dengan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan dimana dihadiri oleh masyarakat dan utusan perangkat daerah untuk mensosialisasikan program dan kegiatan perangkat daerah dan masyarakat akan mengusulkan kepada pemerintah kecamatan apabila program dan kegiatan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat yang kemungkinan akan menjadi usulan prioritas di tingkat kecamatan selanjutnya akan diadakan musyawarah tingkat kabupaten untuk membahas usulan-usulan prioritas dari masyarakat dengan bentuk koordinasi dalam bentuk forum organisasi Perangkat Daerah. Di bawah ini beberapa usulan masyarakat yang telah melalui koordinasi forum perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4 (TC.32)
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
A	*Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja*				
	1	*Pelatihan Kejuruan Bengkel Las*	- Ds. Bosso dan Bosso Timur Kec. Walenrang Utara - Ds. Ilan Batu, Kec. Walenrang Barat - Kel. Balo-balo, Kec. Belopa	2 Paket	16 orang per paket
	2	*Pelatihan Kejuruan Menjahit*	- Ds. Bosso, Bosso Timur, Pongko dan Marabuana Kec. Walenrang Utara - Ds. Ilan Batu, Kec. Walenrang Barat - Ds. Lengkong, Kec. Bua	4 Paket 1 Paket 1 Paket	16 orang per paket
	3	*Pelatihan Kejuruan Alat Berat*	- Ds. Ilan Batu, Kec. Walenrang Barat - Ds. Lengkong, Kec. Bua	1 Paket	16 orang per paket
	4	*Pelatihan Kejuruan Komputer*	- Ds. Ilan Batu, Kec. Walenrang Barat	1 Paket	16 orang per paket
	5	*Pelatihan Kejuruan Tata Boga*	- Ds. Salu Paremang	1 Paket	16 orang per paket

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

Arah kebijakan dan strategis di tingkat nasional oleh Kementerian Ketenagakerjaan diarahkan untuk mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara. Sebagai rumusan kebijakan nasional, ada 9 agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan yang disebut dengan “Nawa Kerja Ketenagakerjaan”, yaitu :

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif;
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.

Selaras dengan agenda prioritas tersebut, diarahkan untuk mendukung Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP tahun 2025 dengan Tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang dijabarkan dalam 8 (delapan) prioritas nasional, yakni :

1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Bidang ketenagakerjaan memiliki target prioritas yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari agenda pemulihan ekonomi nasional. Pelaksanaan agenda bidang ketenagakerjaan tentunya tidak terlepas dari dukungan lintas sektor untuk saling bersinergi mewujudkan tujuan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, maka Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu memiliki acuan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang ditetapkan. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu, dalam melaksanakan tujuannya mengacu pada tujuan strategis

yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam RPD Kabupaten Luwu yakni "Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat" dengan sasaran "Meningkatkan Kesempatan Kerja".

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditentukan sasaran yang dijadikan tolak ukur keberhasilan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Namunpun demikian sasaran ini dapat mengalami perubahan atau penyesuaian sesuai dengan kebijakan dan kondisi yang ada. Berikut tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Tujuan	Target 2025
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	67,51 (B)
		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	SAKIP	63,21
2	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Indeks Gini Ratio	0,315
		Meningkatkan kesempatan kerja	Persentase Pertumbuhan penduduk yang bekerja	7,01%

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
A. IKU			
1	SAKIP	Angka	63,21 (B)
2	Pertumbuhan penduduk yang bekerja	Persentase	7,01
B. IKK			
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persentase	90,32
2	Tingkat produktivitivitas tenaga kerja	Persentase	71,12
3	Persentase Besaran Pencarian Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persentase	6,87
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ((PP /PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
5	Persentase Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Persentase	40
C. TPB/SDGs			
1	Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Persentase	47,89
2	Upah rata-rata per jam pekerja	Rupiah	19.820
3	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase	2,12
4	Tingkat setengah pengangguran	Persentase	4,30
5	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Persentase	8,65

3.3 Program dan Kegiatan

Program rencana tindak jangka panjang, terdiri dari aktivitas yang mempunyai rantai nilai satu dengan lainnya. Sebagaimana tertera pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025–2026, maka ditetapkan Program Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini membutuhkan pendanaan sebesar Rp. 5.662.054.019,- terdiri atas Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini yang terdiri atas 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1) Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Penyediaan Bahan/Material
7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini membutuhkan pendanaan sebesar Rp. 1.900.729.307,- terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini membutuhkan pendanaan sebesar Rp. 77.140.458,- terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1) Pelayanan Antar Kerja
2) Perluasan Kesempatan Kerja

b. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten

Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

1) Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

4. Program Hubungan Industrial

Program ini membutuhkan pendanaan sebesar Rp. 2.778.148.893,- terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1(satu) Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
2) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja

5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program ini membutuhkan pendanaan Rp. 24.999.096,- terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian

Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

1) Penguatan Sumber Daya Manusia dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman.

Pada Tahun 2025, program yang akan dilaksanakan berjumlah 5 dengan 14 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Jumlah ini lebih banyak dari tahun berjalan sebagai upaya percepatan pencapaian kinerja perangkat daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang beberapa diantaranya adalah kegiatan prioritas yang terkait kinerja perangkat daerah yang mendukung program utama pemerintah daerah yakni pengetasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran di Kabupaten Luwu.

BAB IV
RENCANA KERJA TAHUN 2025

Rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab.Luwu tahun 2025 disusun sebagai acuan perangkat daerah terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2026 yang selanjutnya diimplementasikan pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu tahun 2025 - 2026, maka Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab.Luwu Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.1 (TC.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu

Kode Rekening					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target	Rp			Target	Rp
1					2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
2	**07**	**01**			**Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**persen**	**Kab. Luwu**	**100**	**5.662.054.019**	**APBD**		**100**	**5.825.202.900**
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	persen	Kab. Luwu	100	13.219.947	APBD		100	14.500.000
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kab. Luwu	2	10.381.936	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		2	11.500.000
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Kab. Luwu	1	486.843	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1	530.000
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Kab. Luwu	1	486.843	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1	530.000
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Kab. Luwu	1	549.383	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1	550.000

Kode Rekening					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target	Rp			Target	Rp
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Kab. Luwu	1	549.383	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1	550.000
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	Kab. Luwu	1	765.559	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1	840.000
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	persen	Kab. Luwu	100	4.950.479.543			100	4.966.631.000
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	Kab. Luwu	636	4.839.599.543	Dana Alokasi Umum /APBD		648	4.859.831.000
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Kab. Luwu	12	110.880.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		14	106.800.000
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan Administrasi Barang milik daerah	persen	Kab. Luwu	100	6.447.220				6.800.000
					Penatausahaan Barang Miliki Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kab. Luwu	2	6.447.220	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		2	6.800.000
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	persen	Kab. Luwu	100	15.000.000			100	23.000.000
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Kab. Luwu	3	15.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		6	23.000.000
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perkantoran	persen		100	319.222.646			100	347.071.900

Kode Rekening					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target	Rp			Target	Rp
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Luwu	2	3.108.014	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1	3.500.000
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Luwu	3	54.779.450	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		2	50.000.000
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Luwu	1	4.166.141	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1	5.000.000
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kab. Luwu	7	8.400.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		7	11.400.000
2	07	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Kab. Luwu	6	41.467.501	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		3	31.517.500
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Kab. Luwu	2	10.881.540	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		2	10.654.400
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kab. Luwu	12	196.420.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		2	235.000.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	persen	Kab. Luwu	100	308.929.186			100	302.200.000
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kab. Luwu	1	24.799.186	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1	26.400.000
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	Kab. Luwu	2	93.440.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		2	85.000.000
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kab. Luwu	1	5.890.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1	6.000.000

Kode Rekening					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target	Rp			Target	Rp
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kab. Luwu	2	184.800.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		2	184.800.000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam kondisi baik	persen	Kab. Luwu	100	48.755.477			100	165.000.000
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Kab. Luwu	15	43.755.477	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		15	65.000.000
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	Kab. Luwu	1	5.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1	100.000.000
2	**07**	**03**			**Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Tingkat produktivitivitas tenaga kerja** **Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi**	**Persen**	Kab. Luwu	**71,12** **81,68**	**1.900.729.307**			**71,89** **90,45**	**1.945.075.311**
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi	Persen	Kab. Luwu	75	1.882.362.957			80	1.890.075.311
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	Kab. Luwu/BLK	200	1.765.810.896	Dana Alokasi Umum /APBD		48	1.590.075.311
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	sarana kejuruan	Kab. Luwu/BLK	4	116.552.061	Dana Alokasi Umum /APBD		10	300.000.000
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Cakupan lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	Persen	Kab. Luwu	80	18.366.350			85	55.000.000

Kode Rekening					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target	Rp			Target	Rp
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	Kab. Luwu	6	18.366.350	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		6	55.000.000
2	**07**	**04**			**Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten**	**Persen**	Kab. Luwu	**7,50**	**77.140.458**			**7,50**	**185.000.000**
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten	Persen	Kab. Luwu	100	57.117.238			100	150.000.000
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	Kab. Luwu	100	34.627.231	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		120	50.000.000
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	Kab. Luwu	40	22.490.007	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		80	100.000.000
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pelindungan PMI di Daerah Kabupaten	Persen	Kab. Luwu	60	20.023.220			70	35.000.000
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	Kab. Luwu	10	20.023.220	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		10	35.000.000
2	**07**	**05**			**Hubungan Industrial**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ((PP /PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**persen**	Kab. Luwu	**100**	**2.778.148.893**			**100**	**1.347.000.000**

Kode Rekening					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target	Rp			Target	Rp
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	persen	Kab. Luwu	30	38.495.584			120	90.000.000
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	Kab. Luwu	2	10.999.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		10	32.000.000
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Dokumen	Kab. Luwu	1	27.496.584	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1	58.000.000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	persen	Kab. Luwu	100	2.739.653.309			100	1.257.000.000
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah perselisihan yang dicegah	Perkara	Kab. Luwu	2	17.353.557	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		3	57.000.000
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja	orang	Kab. Luwu	17484	2.722.299.752	Pajak Rokok/DBH	Peserta adlh Non ASN, Petugas Keagamaan dan Pekerja Rentan	12500	1.200.000.000

Kode Rekening					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target	Rp			Target	Rp
3	**32**	**04**			**Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan Kawasan transmigrasi yang dikembangkan**	**Ha Kawasan**		**12 1**	**24.999.096**			**12 1**	**85.000.000**
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan Ha		1 12	24.999.096			1 12	85.000.000
3	32	04	2.01	02	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	KK	Desa Bukit Harapan, Kec. Bua, Kab.Luwu	30	24.999.096	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		30	85.000.000
					TOTAL					**10.443.071.773**				**9.387.278.211**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu ini selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja dimasa mendatang, sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu ini berisi program/kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu. Hal penting dan harus diingat bahwa capaian target kinerja dan capaian penyerapan anggaran akan mengalami pergeseran pada saat pelaksanaannya. Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun akan datang.

Demikian Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu tahun 2025 ini disusun, kiranya dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Luwu Tahun 2025

Belopa, 28 Juni 2024

KEPALA DINAS,



Drs. HASBULLAH BIN MUSH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19651231 199703 1 034

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KAB. LUWU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI						**10.443.071.773,00**							**9.387.278.211,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.418.072.677,00**							**9.302.278.211,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**10.418.072.677,00**							**9.302.278.211,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**5.662.054.019,00**						**100 Persen**	**5.825.202.900,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah*	100 Persen			100 Persen	13.219.947,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	100 Persen	14.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			2 Dokumen Dokumen	10.381.936,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	3 Dokumen	11.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen Dokumen	486.843,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	1 Dokumen	530.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen Dokumen	486.843,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	1 Dokumen	530.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen Dokumen	549.383,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	1 Dokumen	550.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen Dokumen	549.383,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	1 Dokumen	550.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			5 Laporan Laporan	765.559,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	1 Laporan	840.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan*	100 Persen			100 Persen	4.950.479.543,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	100 Persen	4.966.631.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1296 Orang/bulan			53 Orang/Bulan Orang/bulan	4.839.599.543,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	648 Orang/bulan	4.859.831.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen			12 Dokumen Dokumen	110.880.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	14 Dokumen	106.800.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan penyelenggaraan Administrasi Barang milik daerah*	100 Persen			100 Persen	6.447.220,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	100 Persen	6.800.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan Laporan	6.447.220,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga Kab. Luwu, Bua, Karang-Karangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	1 Laporan	6.800.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan*	100 Persen			100 Persen	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Aparatur perangkat daerah	100 Persen	23.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 Orang			3 Orang Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Aparatur perangkat daerah	6 Orang	23.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perkantoran*	100 Persen			100 Persen	319.222.646,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	100 Persen	347.071.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket Paket	3.108.014,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga Kab. Luwu, Bua, Karang-Karangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	1 Paket	3.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			3 Paket Paket	54.779.450,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	2 Paket	50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			5 Paket Paket	4.166.141,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	1 Paket	5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen			7 dokumen Dokumen	8.400.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	7 Dokumen	11.400.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket			6 Paket Paket	41.467.501,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	3 Paket	31.517.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan			2 Laporan Laporan	10.881.540,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	2 Laporan	10.654.400,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			12 Laporan Laporan	196.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	2 Laporan	235.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyelenggaran penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa*	100 Persen			100 Persen	308.929.186,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	100 Persen	302.200.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1 Laporan Laporan	24.799.186,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	1 Laporan	26.400.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			12 Laporan Laporan	93.440.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga Kab. Luwu, Bua, Karang-Karangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	2 Laporan	85.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan			1 Laporan Laporan	5.890.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	1 Laporan	6.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan Laporan	184.800.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga Kab. Luwu, Bua, Karang-Karangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	1 Laporan	184.800.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam kondisi baik*	100 Persen			100 Persen	48.755.477,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	100 Persen	165.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit			15 Unit Unit	43.755.477,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait	15 Unit	65.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit Unit	5.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas terkait		100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Tingkat produktivitivitas tenaga kerja Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi***	**71,89 % 90,45 %**			**71,12 % 81,68 %**	**1.900.729.307,00**						**71,89 % 90,45 %**	**1.945.075.311,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi*	80 Persen			75 Persen	1.882.362.957,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Penguatan Daya Saing Daerah	Tenaga kerja/pencari kerja di wilayah kabupaten	80 Persen	1.890.075.311,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	96 Orang			200 Orang	1.765.810.896,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Penguatan Daya Saing Daerah	Tenaga kerja/pencari kerja di wilayah kabupaten	48 Orang	1.590.075.311,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				5 Unit Unit	116.552.061,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Penguatan Daya Saing Daerah	Tenaga kerja/pencari kerja di wilayah kabupaten		300.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Cakupan lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina*	85 Persen			80 Persen	18.366.350,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Penguatan Daya Saing Daerah	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Komunitas di wilayah kabupaten	85 Persen	55.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	12 Lembaga			6 Lembaga Lembaga	18.366.350,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Penguatan Daya Saing Daerah	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Komunitas di wilayah kabupaten	6 Lembaga	55.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan lua rnegeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten***	**7,50 %**			**7,50 %**	**77.140.458,00**						**7,50 %**	**185.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penyelenggaraan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten*	100 Persen			100 Persen	57.117.238,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Penguatan Daya Saing Daerah	Tenaga kerja/pencari kerja	100 Persen	150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	320 Orang			100 Orang Orang	34.627.231,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Penguatan Daya Saing Daerah	Tenaga kerja/pencari kerja	120 Orang	50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	140 Orang			40 Orang	22.490.007,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Penguatan Daya Saing Daerah	Tenaga kerja/pencari kerja	80 Orang	100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penyelenggaraan Pelindungan PMI di Daerah Kabupaten*	70 Persen			60 Persen	20.023.220,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Penguatan Daya Saing Daerah	Pekerja Migran dan Calon Pekerja Migran Indonesia	70 Persen	35.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang			10 Orang Orang	20.023.220,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Penguatan Daya Saing Daerah	Pekerja Migran dan Calon Pekerja Migran Indonesia	10 Orang	35.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ((PP /PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)***	**100 %**			**100 %**	**2.778.148.893,00**						**100 %**	**1.347.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama*	35 Persen			30 Persen	38.495.584,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Perusahaan di wilayah kabupaten	35 Persen	90.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan			2 Perusahaan Perusahaan	10.999.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Perusahaan di wilayah kabupaten	10 Perusahaan	32.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan			1 Laporan Laporan	27.496.584,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Perusahaan di wilayah kabupaten	1 Laporan	58.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja*	100 Persen			100 Persen	2.739.653.309,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Pekerja/Buruh dan Perusahaan di wilayah kabupaten	100 Persen	1.257.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 Perkara			2 Perkara Perkara	17.353.557,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Pekerja/Buruh dan Perusahaan di wilayah kabupaten	3 Perkara	57.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	25000 Orang			12484 Orang Orang	2.722.299.752,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH SAWIT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Pekerja/Buruh dan Perusahaan di wilayah kabupaten	12500 Orang	1.200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**24.999.096,00**							**85.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**24.999.096,00**							**85.000.000,00**	
1.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan*** ***Kawasan transmigrasi yang dikembangkan***	**24 Ha** **1 Kawasan**			**12 Ha** **1 Kawasan**	**24.999.096,00**						**12 Ha** **1 Kawasan**	**85.000.000,00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian* *Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan*	2 Kawasan 24 Ha			1 Kawasan 12 Ha	24.999.096,00			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Penguatan Daya Saing Daerah	Masyarakat transmigrasi di wilayah kabupaten	1 Kawasan 12 Ha	85.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0	60 Kepala Keluarga			0 0	24.999.096,00	Kab. Luwu, Bua, Bukit Harapan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah Penguatan Daya Saing Daerah	Masyarakat transmigrasi di wilayah kabupaten	30 Kepala Keluarga	85.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H							**10.443.071.773,00**							**9.387.278.211,00**	

Kementerian
Kependudukan
dan Pembangunan
Keluarga/BKKBN

RENCANA KERJA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN LUWU

TAHUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Tujuan Rencana Kerja ini memuat rencana program dan kegiatan tahunan sebagai pedoman acuan, tolak ukur kinerja, bahan analisa dan evaluasi serta pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Dengan pedoman ini diharapkan adanya peningkatan kinerja di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu dan menjadi gambaran dan arah yang jelas serta terukur dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat berbagai kekurangan sehingga kritik dan masukan demi lengkapnya Rencana Kerja ini kami harapkan.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan program kedepan dan semoga tujuan Keluarga Kecil, Bahagia, Sejahtera, dan Berkualitas segera dapat tercapai.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan petunjuk-Nya dan meridhoi segala usaha kita bersama, Amin.

Belopa, Nopember 2025

Kepala Dinas Dalduk dan KB
Kabupaten Luwu



Hj. ENRIKA, SE.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19770919 200212 2 005

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 17

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 34

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 34

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 34

3.3 Program dan Kegiatan 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 60

BAB V PENUTUP 70

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s.d tahun 2025	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kab. Luwu	19
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025	62

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 maka urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu. RPJMD tersebut bagi OPD akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra OPD. Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Luwu, dan RKPD ini akan dijadikan acuan bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja.

Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (Satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (Satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana sesuai Peraturan Bupati Luwu Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Dalam proses penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu dan mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun-

tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala menetapkan Renja untuk menjadi pedoman di lingkungan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategi perangkat daerah antara lain adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5080);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

i. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

j. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

p. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022;

t. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu 2019-2024;

u. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu;

v. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

w. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

x. Peraturan Bupati Luwu Nomor 114 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 adalah sebagai dasar/acuan dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan agar setiap kegiatan yang dilakukan itu terarah dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama dan mengacu kepada rencana strategi.

Adapun tujuan dari Rencana Kerja yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan dengan cara menganalisa Program/Kegiatan tersebut.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penyelarasan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

  Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

  - **Latar Belakang**

    Mengemukakan pengertian ringkas tentang rencana kerja perangkat daerah, proses penyusunan rencana kerja perangkat daerah, keterkaitan antara rencana kerja perangkat daerah dengan dokumen perangkat daerah dan rencana strategi perangkat daerah.

  - **Landasan Hukum**

    Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

  - **Maksud dan Tujuan**

    Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan rencana kerja perangkat daerah

  - **Sistematika Penulisan**

    Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rencana kerja perangkat daerah serta susunan garis besar dokumen.

- **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN**

  - **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

    Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategi perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun sebelumnya.

  - **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

    Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator

  - **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

    Menguraikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dampaknya terhadap pencapaian RPJMD dan terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

  - **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

    Asumsi rancangan awal RKPD yang mengacu pada program dan kegiatan tahun berjalan serta pagu indikatif dan target capaian.

  - **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

    Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun dari perangkat daerah.

- **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

  - **Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

  - **Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

    Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja rencana strategi perangkat daerah.

  - **Program dan Kegiatan**

    Berisikan penjelasan rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju.

- **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RERANGKAT DAERAH**

  Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran serta pendanaan indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025.

- **BAB V PENUTUP**

  Berisikan uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Luwu

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Porogam/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2025			Target Program dan Kegiatan Renja tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja tahun (n-2)	Realisasi Renja tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Wajib									
1	01			Bidang Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	01	01		Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	NA	NA	100%	90%	90%	100%		
1	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai 6000 yg tersedia jumlah materai 3000 yg tersedia			1000 lembar	1000 lembar	100%	1000 lembar	1038 lembar	132%
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan telepon, listrik , dan website			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	01	01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	jumlah perizinan kendaraan dinas/ operasional dan jasa sopir			61 unit	34 unit	24%	51 Unit	41 Unit	80,39%
1	01	01	04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jasa perbaikan dan peralatan kerja			37 unit	59 unit	74%			
1	01	01	05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik yang tersedia			14 Jenis	14 jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%
1	01	01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia			10 jenis	10 jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis	100%
1	01	01	07	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas keluar daerah			135 kali	130 kali	98%	60 kali	58 kali	96,66%
1	01	01	08	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah			67 kali	67 kali	100%	150 kali	134 kali	89,33%
1	01	01	09	Penatausahaan Keuangan, Administrasai Umum dan Kepegawaian, dan Aset	jumlah jenis penatausahaan yang dilaksanakan			100 dokumen	100 dokumen	100%			
1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	NA	NA	100%	100%	100%	100%		
1	01	02	01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan			3 unit	114 unit	100%	3 Unit	3 Unit	95%
1	01	02	02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara								
1	01	02	03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara			59 unit	8 unit	100%	41 Unit	41 Unit	100%
1	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian kerja	NA	NA	100%	100%	100%	100%		
1	01	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan			35 stel	35 stel	97%			
1	01	03	02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian khusus hari-hari tetentu yang diadakan			34 stel	34 stel	100%			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Porogam/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2025			Target Program dan Kegiatan Renja tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja tahun (n-2)	Realisasi Renja tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	04		Program Peningkiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	NA	100%	100%		100%		
1	01	04	01	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	jumlah laporan Lakip yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	
1	01	05		Program Keluarga Berencana	Terwujudnya peningkatan akseptor KB	NA	NA	100%	85%	100%	100%		
1	01	05	01	Pelayanan KB MKJP Oleh Tim Kelilingh (TKBK)	jumlah PUS yang dilayani oleh TKBK			1.380 PUS	1.990 PUS		960 PUS	960 PUS	
1	01	05	02	Pembangunan Pagar Gedung PLKB	jumlah pagar balai penyuluh yang dibangun			4 paket	4 paket	100%			
1	01	05	03	Pengadaan Sarana Pelayanan Klinik KB (Implant KIT)	jumlah implant kit yang diadakan			50 paket	50 paket	100%			
1	01	05	04	Pengadaan Sarana Pelayanan klinik KB (BKB KIT)	jumlah BKB kit yang diadakan			38 paket	38 paket	100%	3 Paket	3 Paket	
1	01	05	05	Distribusi Alkon Ke Faskes	jumah alat dan obat kontrasepsi yang didistribusikan ke faskes			104 paket	196 paket	100%	8 Paket	8 Paket	
1	01	05	06	Peningkatan Pelayanan KB di Kecamatan	jumlah jenis kegiatan yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan KB			12 keg	12 keg	100%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	
1	01	05	07	Pembinanan Progam KB Bagi Masyarakat Oleh Kader	jumlah pembinaan masyarakat oleh kader			48 kali	48 kali	100%			
1	01	05	08	Pembinaan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Terbina	jumlah pertemuan yang dilakukan oleh kelompok kegiatan di kampung KB			10 pertemuan	12 pertemuan	100%			
1	01	05	09	Pengadaan Sarana Penyuluh KB (KIE KIT)	jumlah KIE Kit yang diadakan			16 paket	16 paket	100%			
1	01	05	10	Pengadaan Smartphone (DAK)	jumlah Smartphone yang diadakan			7 unit	7 unit				
1	01	05	11	Lokal Karya Mini	jumlah peserta/pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat di kampung KB			7 pertemuan	6 pertemuan	100%			
1	01	05	12	Pertemuian Forum Masyarakat Tingkat Desa	jumlah peserta/pertemuan forum musyawarah di kampung KB			7 pertemuan	6 pertemuan	100%			
1	01	05	13	Pertemuan Kelompok Kerja	jumlah peserta/pertemuan kelompok kerja di kampung KB			7 pertemuan	24 pertemuan	100%	590 pertemuan	431 pertemuan	
1	01	05	14	Penyediaan Sarana Media KIE dan Manajemen Advokasi	jumlah bahan penunjang Media KIE yang diadakan dalam 1 tahun			380 lembar	6.689 lembar/paket	4%			
1	01	05	15	Sosialisasi Penggarapan Bagi Pengelolah Kampung KB Tingkat Kecamatan	jumlah peserta pengelola kampung KB yang dibina			150 peserta	150 peserta				
1	01	05	16	Pertemuan Penggerakan pelayan KB MKJP di Faskes Tingkat Kabupaten	jumlah peserta pertemuan (mitra kerja, bidan dan penyuluh) di faskes			160 peserta	160 peserta		960 peserta	683 peserta	
1	01	05	17	Pengadaan Tempat Penytimpanan Kit/Alat dan Obat Kontrasepsi	jumlah tempat penyimpanan kit/alokon yang diadakan			20 paket	26 paket	100%			
1	01	05	18	Pengadaan Sarana Pelayan an klinik KB (BKL KIT)	jumlah BKL kit yang diadakan			22 paket	22 paket	110%			
				Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK)	Jumlah Gudang Alokon yang direnovasi			1 Unit	1 Unit				
Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Porogam/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2025			Target Program dan Kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	

						Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target Renja tahun (n-2)	Realisasi Renja tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Renja tahun (n-1) 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pengadaan Kendaraan Distribusi Alokon (DAK)	Jumlah Mobil Distribusi Obat yang diadakan			1 unit	1 unit				
1	01	06		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Terwujudnya kesehatan reproduksi remaja	NA	NA	100%	100%	100%	100%		
1	01	06	01	Pelaksanaan KIE Kelompok Melalui Momen Strategis	jumlah peserta yang mengikuti Harganas tk. Provinsi dan Tk. Kabupaten			50 peserta	128 peserta	150%			
1	01	06	02	Pembinaan Saka kencana (HELO) Heking Lomba	jumlah peserta saka kencana yang mengikuti helo			450 peserta	450 peserta	100%			
1	01	06	03	Sosialisasi Pengaruh Bahaya Rokok terhadap Generasi Muda Berencana (Genre)	jumlah siswa/sekolah yang dikunjungi untuk sosialisasi			1.100 siswa	1.100 siswa	100%			
1	01	06	04	Pembinaan Kelompok UPPKS	jumlah kelompok UPPKS yang dibina			5 klp	5 klp	100%			
1	01	06	05	Pembinaan Kelompok BKL	jumlah kelompok BKL yang dibina			23 klp	23 klp	100%			
				Pembinaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelkon dan Dalap bagi Pengelola KB	Jumlah peserta pengelola KB pelkon dan dalap yang dibina			125 orang	125 orang	100%			
1	01	07		Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya pelayanan kontrasepsi	NA	NA	100%	100%	100%	100%		
1	01	07	01	Penyelenggaraan Menunggal TNI KB Kesehatan	jumlah akseptor KB/Pus yang dilayani			100 PUS	100 PUS	100%			
1	01	07	02	Penyelenggaraan Menunggal Bayangkara KB Kes	jumlah akseptor KB/Pus yang dilayani			100 PUS	100 PUS	100%			
1	01	07	03	Penyelenggaraan Menunggal Bhakti IBI KB Kes	jumlah akseptor KB/Pus yang dilayani			100 PUS	100 PUS	100%			
1	01	07	04	Penyelenggaraan Menunggal PKK KB Kes	jumlah akseptor KB/Pus yang dilayani			100 PUS	100 PUS	100%			
1	01	07	05	Pengadaan Sarana Penyuluhan KB (Komputer PC)	jumlah komputer PC yang diadakan			8 unit	8 unit	100%			
1	01	07	06	Pelatihan Pendampingan Program KB Bagi PPKBD	jumlah PPKBD yang mengikuti pelatihan			250 peserta	250 peserta	100%			
1	01	07	07	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi	jumlah PUS yang mengikuti sosialisasi			670 peserta	670 peserta	100%			
				Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (DAK)	Jumlah Mobil Unit Penerangan yang diadakan			1 unit	1 unit	100%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan	Jumlah sarana dan prasarana rumah data			220 unit					
				Pengadaan Media/ Alat Pengolah Data	Jumlah Media /Alat pengolah Data yang diadakan			220 unit					
				Orientasi Kader di Kampung KB Percontohan	Jumlah Kader yang mengikuti orientasi di kampung KB percontohan			90 orang					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Porogam/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2025			Target Program dan Kegiatan Renja tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja tahun (n-2)	Realisasi Renja tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

											(n-1)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	08		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya peran masyarakat dalam KB/KR mandiri	NA	NA	100%	100%	100%	100%		
1	01	08	01	Penguatan Institusi Kelembagaan Masyarakat Sektor KB	junlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapatkan jasa			2.101 orang	2.101 orang	100%	6.810 orang	5.735 orang	
1	01	08	02	Pemuktahiran Data Keluarga	jumlah data keluarga yang diinput dalam data base			84.000 KK	135.320 KK	100%			
1	01	08	03	Pembinaan Kelompok BKR	jumlah kelompok BKR yang dibina			18 klp	18 klp	100%			
1	01	08	04	Sosialisai Sekolah Siaga Kependudukan	jumlah sekolah yang membentuk SSK			150 peserta	150 peserta	100%			
1	01	08	05	Sosialisasi Pemuktahiran Data Keluarga	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi			272 peserta	272 peserta	100%			
1	01	08	06	Sinkronisasi Pencatatan dan Pelaporan Program KB	jumlah peserta sinkronisasipencatatan dan pelaporan program KB			70 peserta	70 peserta	100%			
1	01	08	07	Pelatihan Teknis Aplikasi Entry Data Keluarga Bagi pengelolah Data	jumlah Pengelola Data Keluarga yang mengikuti pelatihan teknis aplikasi entri data keluarga			70 peserta	70 peserta	100%			
1	01	08	08	Pembinaan Kelompok BKB	jumlah kelompok BKB yang dibina			20 kelompok	23 klp	115%			
1	01	08	09	Pengadaan Sarana Kerja PKB (DAK)	jumlah pakaian kerja lapangan PKB yang diadakan			227 paket	227 paket	100%			
1	01	08	10	Pengadaan Sarana Kerja PPKBD (DAK)	jumlah pakaian kerja lapangan PPKBD yang diadakan			227 paket	227 paket	100%			
1	01	09		Program Pengembangan Pusat Pelayanan linformasi dan Konseling KRR	Meningkatnya pelayanan informasi dan konseling KRR	NA	NA	100%	100%	100%	100%		
1	01	09	01	Sosialisasi Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja	jumlah peserta sosialaisasi			70 peserta	70 peserta				
1	01	10		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Kelurga	Meningkatnya kapasitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga	NA	NA	100%	100%	100%	100%		
1	01	10	01	Temu Kreativitas Kader	jumlah peserta pertemuan			200 peserta	200 peserta				

Belopa, 2025

Kepala Dinas

Hj. ENRIKA, SE.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640510 199203 1 010

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator kinerja secara umum menunjukkan bahwa capaian kinerja program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera telah cukup baik. Indikator kinerja ini merupakan target capaian pertahun yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi capaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing indikator kinerja tersebut :

1. **Laju Pertumbuhan Penduduk**

   Pada tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu yaitu 1,34% telah mencapai target tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa program keluarga berencana di Kabupaten Luwu telah berhasil dalam mengendalikan angka kelahiran.

2. **Total Fertility Rate (TFR)**

   Total Fertility Rate adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada masa reproduksinya. Pada tahub 2024 TRF sebesar 2,42 % meningkat disbanding pada tahun 2023 yakni 2,41 %.

3. **Dukungan Perangkat Daerah dalam Kebijakan Pengendalian Penduduk**

   Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu dalam Kebijakan Pengendalian Penduduk yaitu Mencegah pernikahan di usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia terlalu muda atau terlalu tua, menekan jumlah penduduk dan menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk, dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga berencana dengan mengendalikan kelahiran.

4. **Ratio Akseptor KB**

   Ratio akseptor KB sampai dengan tahun 2024 sebesar 73,39%. Berdasarkan data presentase ratio akseptor ada peningkatan akseptor baru MKJP dibanding pada tahun 2023 sebesar 60,47% dan drop out pada penggunaan kontrasepsi non MKJP meningkat di tahun 2024.

5. **Cakupan Peserta KB Aktif**

   Pada tahun 2024 cakupan peserta KB Aktif sebesar 66,07% memenuhi target karena meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 65,29%. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah PUS yang menjadi peserta KB.

6. **Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga**

   Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2024 masih dikisaran 2-3 Orang anak sampai dengan akhir tahun 2024 berdasarkan data jumlah anggota keluarga di BPS Kabupaten Luwu masih tercatat sebesar 5 Orang, artinya rata-rata keluarga memiliki 3 anak, sementara anjuran pemerintah adalah 1-2 anak lebih baik.

7. Jumlah Kampung KB

Jumlah Kampung KB sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk sebanyak 227 Kampung KB yang terdapat di seluruh 207 Desa dan 20 Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Luwu.

8. Persentase Kampung KB Berprestasi

Dari 277 Kampung KB hanya terdapat 1 Kampung KB berprestasi yang terletak di wilayah Kecamatan Suli dimana Kampung KB tersebut telah ditetapkan sebagai Kampung KB percontohan. Presentase Kampung KB berprestasi tahun 2024 adalah 0,044%,.

9. Persentase OPD yang berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Program kampung KB adalah merupakan program lintas sektoral sehingga diharapkan agar semua perangkat daerah dapat perperan aktif dalam pembangunan kampung KB karena tidak cukup hanya mengandalkan partisipasi masyarakat saja. Dari data yang ada sejak dibentuknya Kampung KB pada tahun 2020 sampai dengan 2024 dukungan perangkat daerah terhadap pembangunan di kampung KB sudah mulai menunjukkan tren positif. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sudah terjalin. Presentase lintas sektoral OPD dalam program Kampung KB adalah 62%.

10. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun

Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun, realisasi capaiannya di tahun 2024 adalah 0,35% menurun dibanding tahun 2023 sebesar 0,88%. Dengan capaian indikator kinerja 0,35% menunjukkan bahwa tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kabupaten Luwu tercapai sehingga pelaksanaan program PUP harus dipertahankan, terutama bagi tim pendamping keluarga yang sebagai pioner di masyarakat dalam melakukan pencegahan pernikahan usia dini. Ini terlihat dari jumlah PUS dibawah umur 20 tahun berkurang di tahun 2024 yakni berjumlah 165 Pasangan.

11. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet Need) tahun 2024 sebesar 9,26% ini presentase cakupannya menurun dari 14,85% di tahun 2023, ini menandakan bahwa masyarakat yang ingin ber-KB sudah semakin tepenuhi. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi yang tepat waktu untuk memenuhi permintaan masyarakat.

12. Persentase penggunaan MKJP

Target tahunan persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2024 yakni sebesar 24,94% ini cenderung menurun presentasenya dibanding tahun 2023 yang sebesar 26,48%, hal ini disebabkan perbandingan jumlah Akseptor KB yang menggunakan MKJP

dengan jumlah Akseptor KB yang ada meningkat signifikan dibanding tahun 2023.

13. **Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**

    Pada tahun 2024 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi realisasinya memenuhi target tahunan yaitu sebesar 136,24% dari target 100%.

14. **Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB**

    Persentase keluarga sasaran yang menjadi anggota BKB ber-KB pada tahun 2024 sebesar 50,64% sedangkan tahun 2023 lebih rendah realisasinya sebesar 37,88%. sehingga pembinaan untuk meningkatkan kapasitas kader BKB boleh dikatakan berhasil.

15. **Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB**

    Demikian halnya dengan jumlah anggota BKR ber-KB dimana pada tahun 2024 cakupannya sebesar 29,91% meningkat dibanding pada tahun 2023 sebesar 16,21%.

16. **Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB**

    Cakupan anggota BKL ber-KB 8,48% ditahun 2023 tetapi pada tahun 2024 menurun sebesar 7,19%. Upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam meningkatkan kualitas melalui peningkatan kapasitas kader BKL, maupun pembinaan yang dilakukan melalui bantuan operasional kegiatan disemua kelompok BKL di kampung KB perlu dioptimalkan lagi.

17. **Ratio Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Bangga Kencana setiap Desa/Kelurahan**

    Ratio Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Bangga Kencana setiap desa/kelurahan, realisasi capaian 100% dimana untuk 227 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Luwu telah ditunjuk 1 (Satu) orang IMP Bangga Kencana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan IMP Bangga Kencana adalah dengan membentuk Sub IMP Bangga Kencana guna membantu pendataan dan penginputan dilapangan.

18. **Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi Permintaan Masyarakat**

    Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sudah lebih 100% setiap tahun. Meskipun kebutuhan alkon telah terpenuhi di masyarakat, namun perlu tetap diperhatikan dan dipantau mekanisme penyalurannya, terutama di Puskesmas. Demikian pula dalam hal peningkatan ketertiban dalam pelaporannya. Dengan adanya aplikasi pencatatan dan pelaporan alat kontrasepsi secara online yang diterapkan BKKBN, maka persediaan alkon dapat terpantau.

    Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	0,92	1,37	1,35	1,35	1,34
2.	**Total Fertility Rate (TFR)**	2,86	2,86	3,11	2,41	2,42
3.	**Dukungan Perangkat Daerah (Dinas/Badan) dalam Kebijakan Pengendalian Penduduk**					
	Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB			33	33	33
	Jumlah perangkat daerah yang menyusundan memanfaatkan Rancangar Induk Pengendalian Penduduk			N/A	N/A	N/A
	Jumlah kebijakan daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk			0	0	0
	Jumlahsemuaperangkatdaerah			57	57	57
	Jumlahsektor yang menyepakatipemanfaatan data profil (parameter danproyeksipenduduk) untukperencanaandanpelaksanaan program Pembangunan			0	0	0
	JumlahKerjasamapenyelenggaraanpendidikanformal, non formaldanInformasi yang melakukanpendidikankependudukan			0	0	0
	Jumlah Kampung KB	59	59	167	227	227
	Persentase OPD yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	8,82	8,82	62%	62%	62%
	PersentasePerangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan induk pengendalian Penduduk			0	0	0
4.	**Rata-rata jumlah anak per keluarga**	3	3	3	3	3
5.	**Akseptor KB**					
	JumlahAkseptor KB	35.939	39.813	35.801	26.927	33.836
	JumlahPasanganUsiaSubur	50.893	50.473	41.074	44.527	46.100
	Ratio	70,61	78,87	87,16	60,47	73,39
6.	**PemakaianKontrasepsi/CPR bagiPerempuanMenikahUsia 15-49 Tahun**					
	JumlahPeserta KB Aktif	33.951	34.300	20.642	29.073	30.460
	JumlahPasanganUsiaSubur	50.893	50.473	41.074	44.527	46.100
	Angka(%)	66,71	67,95	50,25	65,29	66,07
7.	**Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun**					
	Jumlah pasangan usia subur dengan istri dibawah 20 tahun	1.043	447	391	391	165
	JumlahPasanganUsiaSubur	50.893	50.473	41.074	44.527	46.100
	Cakupan	1,19	2,06	1,08	0,88	0,35
8.	**PasanganUsiaSubur (PUS) yang Inginber-KB TidakTerpenuhi (Unmet Need)**					
	Jumlah PUS yang inginber-KB tetapitidakterlayani	6.486	6.267	13.786	6.616	4.272
	JumlahPasanganUsiaSubur	50.893	50.473	41.074	44.527	46.100
	Cakupan	12,74	12,41	33,56	14,85	9,26
9.	**PenggunaanKontrasepsiJangkaPanjang (MKJP)**					
	JumlahAkseptor KB yang menggunakan MKJP	9.237	9.448	10.949	7.132	8.441
	JumlahAkseptor KB	35.939	39.813	35.801	26.927	33.836
	Persentase	25,70	23,73	30,58	26,48	24,94
10.	**Tingkat KeberlangsunganPemakaianKontrasepsi**					
	JumlahPasanganUsiaSubur yang	50.893	50.473	41.074	44527	46.100

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	masihmenggunakankontrasepsi					
	JumlahAkspetor KB	35.939	39.813	35.801	26927	33.836
	Persentase	141	126	114	165	136,24
11.	**AnggotaBinaKeluargaBalita (BKB) ber-KB**					
	JumlahAnggotaKelompok BKB yang ber-KB	4.000	3.613	852	627	1.767
	JmlahAnggotaKelompok BKB	6.320	1.880	1.010	1.655	3.489
	Cakupan	63,29	1,92	84,35	37,88	50,64
12.	**AnggotaBinaKeluargaRemaja (BKR) ber-KB**					
	JumlahAnggotaKelompok BKR yang ber-KB	1.836	1.692	137	313	1.034
	JmlahAnggotaKelompok BKR	3.864	3.372	1.281	1.930	3.457
	Cakupan	47,52	50,17	10,69	16,21	29,91
13.	**AnggotaBinaKeluargaLansia (BKL) ber-KB**					
	JumlahAnggotaKelompok BKL yang ber-KB	1.371	1.145	50	83	156
	JmlahAnggotaKelompok BKL	3.275	2.812	724	978	2.167
	Cakupan (%)	41,86	40,71	6,90	8,48	7,19
14.	**PusatPelayananKeluarga Sejahtera (PPKS) di SetiapKecamatan**					
	Jumlah PPKS	2	2	2	2	3
	JumlahKecamatan	22	22	22	22	22
	Persentase	9,09	9,09	9,09	9,09	13,63
15.	**RemajaDalamPusatInformasidanKonselingRemaja/Mahasiswa**					
	Jumlah PIK R/M	34	37	31	31	30
	JumlahKecamatan	22	22	22	22	22
	Cakupan	154,55	168,18	140,9	140,9	136,36
16.	**PKB/PLKB yang didayagunakanPerangkat Daerah KB untukperencanaandanpelaksanaanpembangunandaerah di bidangpengendalianpenduduk**					
	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	35	41	51	54	90
	Jumlah PKB/PLKB	35	41	51	54	90
	Cakupan	100	100	100	100	100
17.	**PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri**					
	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	37		36	43	
	Jumlah anggota kelompok UPPKS	135		138	161	
	Cakupan	27,40		26,08	26,70	
18.	**Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Bangga Kencana setiap desa/kelurahan**					
	Jumlah IMP Bangga Kencana	227	227	227	227	227
	Jumlah Desa/Kelurahan	227	227	227	227	227
	Rasio	100	100	100	100	100
19.	**Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat**					
	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	70.965	72.877	65.284	57.988	67.895
	Perkiraan Permintaan Masyarakat	52.230	40.025	50.981	45.600	47.334
	Cakupan	135,87	182,07	128,05	127,16	143,44
20.	**Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan**					
	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	42	42	44	121	195
	Jumlah Faskes dan jejaring	96	96	96	121	195
	Persentase	43,75	43,75	45,83	100	100

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini publik yang harus segera dicari penyelesaiannya. Beberapa isu strategis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah :

a. Pembinaan dan pemberdayaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam program KKBPK lebih dimaksimalkan. IMP terdiri dari Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Bangga Kencana yang bertugas di tingkat desa dan Sub Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Bangga Kencana bertugas di tingkat dusun. Keberadaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana sebagai ujung tombak pelaksana Program KKBPK di lini lapangan sangat diperlukan. Oleh karena itu eksistensinya perlu diperkuat dengan memberikan fasilitas yang memadai, seperti pemberian honorarium, orientasi pencatatan dan pelaporan, peningkatan kapasitas, wawasan, serta peningkatan komitmen terhadap program KKBPK melalui Temu Kader.

b. Tenaga profesional PKB masih kurang dibanding dengan jumlah Desa/Kelurahan yang ada. Pelaksanaan Program KKBPK tidak dapat dilaksanakan secara optimal disebabkan karena kurangnya tenaga penyuluh di lini lapangan, meskipun sudah dibantu oleh PKB/PLKB sejumlah 90 Orang yang melayani 227 Desa/Kelurahan. Kewenangan penambahan personil tenaga fungsional PKB ada pada Kantor Wilayah BKKBN yang berkoordinasi dengan BKN/BKPSDM sehingga meskipun ada pengurangan jumlah PKB karena pensiun, OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak bisa serta merta melakukan penambahan personil.

c. Kelompok kegiatan masih minim karena kesadaran masyarakat untuk berkegiatan dimasyarakat belum optimal, terutama untuk keluarga yang baik suami maupun istrinya bekerja di luar rumah. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan kelompok Tribina dan UPPKS termasuk dalam hal metode pembinaannya, pada tahun 2025 ada kegiatan Satyagatra untuk pembinaan UPPKS. Semoga dengan adanya kegiatan Satyagatra bisa menambah UPPKS di Kabupaten Luwu.

d. Usia perkawinan pertama masih banyak di bawah 20 tahun, masih merupakan isu penting yang harus mendapatkan penanganan dari lintas sektor, namun untuk tahun 2024 kita dapat menekan jumlah PUS dibawah umur 20 tahun. Program-program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, semisal Genre (Generasi Berencana) dan PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) harus terus ditingkatkan KIE dan advokasinya melalui kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja.

e. Pencapaian MKJP masih relatif rendah, persentase penggunaan MKJP pada tahun 2024 yaitu sebesar 24,94%. Angka MKJP masih lebih rendah

dibandingkan dengan Non MKJP dimana untuk Non MKJP resiko DO (Drop Out) KB juga lebih tinggi. Untuk itu perlu dicari upaya untuk menarik PUS agar lebih memilih KB MKJP disamping terus melakukan KIE keunggulan-keunggulan KB MKJP dibandingkan KB Non MKJP.

f. Unmet Need sudah agak relatif rendah, persentase pada tahun 2024 yakni sebesar 9,26% lebih menurun dibanding tahun 2023 yakni sebesar 14,85%. Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah masih banyak wilayah yang sulit dijangkau sehingga pelayanan KB dan distribusi alat dan obat kontrasepsi tidak tepat waktu. Masih adanya kecenderungan bagi PUS untuk ber-KB non modern karena kekhawatiran akan efek samping, juga sebagai salah satu penyebab masih tingginya angka unmetneed di Kabupaten Luwu.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Asumsi Rancangan Awal RKPD mengacu pada program dan kegiatan pada tahun berjalan (2025) lengkap dengan pagu indikatif dan target capaiannya. Sedangkan berdasarkan analisis kebutuhan terdapat penyesuaian berkaitan dengan target maupun usulan anggaran. Penyesuaian ini juga terkait dengan perubahan dalam Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengikuti dengan uraian tugas masing-masing bidang dan seksi pengusul kegiatan. Review terhadap rancangan awal dapat dilihat pada tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Luwu

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Belopa**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1.055.920.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Belopa**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah**	**100%**	**586.592.930**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang sudah di susun**	**6**	**318.000**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang sudah di susun**	**6**	**318.000**	
			Foto Copy	800	240.000			Foto Copy	800	240.000	
			Jilid Biasa Tebal	6	78.000			Jilid Biasa Tebal	6	78.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Materai 3000	500	2.000.000			Materai 3000	534	1.602.000	Cetak amplop dianggar kan pada keg penatausa haan keu, admi nistrasi umum & kepeg. dan aset
			Jasa Caraka	12	8.400.000			Jasa Caraka	12	8.400.000	
			Cetak amplop	500	150.000						
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		**Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik**	**12**	**11.852.000**	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**		**Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik**	**12**	**9.718.440**	
			luran Telepon	12	1.200.000			luran Telepon	1	907.680	
			luran Listrik (Gudang Alokon)	1	812.000			luran Listrik (Gudang Alokon)	1	410.760	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		luran Website	12	8.400.000			luran Website	12	8.400.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		luran tv kabel	12	1.440.000						
			Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	**61**	**55.750.000**	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**		**Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan**	**61**	**46.000.000**	

			Jasa Sopir	24	30.000.000			Jasa Sopir	36	36.000.000	
			Pembayaran STNK	61	25.750.000			Pembayaran STNK	1	10.000.000	
			Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan	**37**	**13.100.000**	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**		**Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan**	**34**	**5.915.000**	
			Perbaikan Komputer PC dan CPU	6	2.400.000			Perbaikan Komputer PC dan CPU	5	625.000	
			Perbaikan Laptop	8	3.200.000			Perbaikan Laptop	8	1.000.000	
			Perbaikan Printer	8	2.400.000			Perbaikan Printer	9	1.170.000	
			Perbaikan AC	12	3.600.000			Perbaikan AC	12	3.120.000	
			Perbaikan Finger Print	1	500.000						
			Perbaikan Televisi	2	1.000.000						
			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	**7**	**2.000.000**						
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7	2.000.000						
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		**Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan**	**6**	**13.100.000**	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**		**Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan**	**6**	**9.000.000**	
			Belanja Surat Kabar/Majalah dan Advertorial	6	13.100.000			Belanja Surat Kabar/Majalah dan Advertorial	1	9.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan dalam setahun	1.140	46.800.000						dianggarkan pada keg. penatausahaankeu,admi nistrasi umum & kepeg. dan aset
			Makanan dan Minuman Rapat	900	36.000.000						
			Makanan dan Minuman Tamu	240	10.800.000						
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		**Jumlah perjalanan dinas keluar daerah**	**67**	**530.708.000**	**Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah**		**Jumlah perjalanan dinas keluar daerah**	**1**	**215.608.450**	
			Luar daerah luar daerah		530.708.000			perjalanan dinas keluar daerah	1	215.608.450	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	5	20.400.000						
			Dalam daerah		20.400.000						
	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan Aset		**Jumlah jenis penatausahaan yang dilaksanakan**		**346.060.000**	**Penatausahaan Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan Aset**		**Jumlah jenis penatausahaan yang dilaksanakan**	**50**	**285.453.040**	
			Pejabat Pengguna Anggaran	12	36.120.000			**Honor Pengelola Administrasi Keuangan**		**94.800.000**	
			Pejabat Pembuat Komitmen	48	91.680.000			Pejabat Pengguna Anggaran	12	31.080.000	
			Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	15.000.000			Pejabat Pembuat Komitmen	12	19.320.000	
			Bendahara Pengeluaran	12	13.080.000			Pejabat Pembuat Komitmen	12	14.520.000	
			Pembantu Bendahara Pengeluaran	12	9.720.000			Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	11.880.000	
			Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah	12	7.200.000			Bendahara Pengeluaran	12	10.320.000	
			Pejabat Pengadaan Barang dan	12	8.160.000			Pembantu Bendahara	12	7.680.000	

			Jasa					Pengeluaran			
			Alat Tulis Kantor	1	34.500.000			**Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah**		**10.800.000**	
			Operator Simda	12	18.000.000			Pengelola Barang Milik Daerah	12	7.200.000	
			Operator Komputer	84	58.800.000			Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah	12	3.600.000	
			Tenaga Administrasi (4 orang)	48	28.800.000			**Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa**		**8.160.000**	
			Cetak	1	10.000.000			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12	8.160.000	
			Penggandaan	1	15.000.000			**Belanja Barang dan Jasa**		**171.693.040**	
								Alat Tulis Kantor	1	35.553.040	
								Operator Simda	12	18.000.000	
								Operator Komputer	84	58.800.000	
								Tenaga Administrasi (4 orang)	48	28.800.000	
								Cetak	1	3.000.000	
								Penggandaan	1	5.050.000	
								Makanan dan Minuman Rapat	770	19.250.000	
								Makanan & Minuman Tamu	1	3.240.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Belopa**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik**	**100%**	**193.300.000**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Belopa**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik**	**100%**	**93.868.820**	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		**Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**10**	**74.500.000**	**Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**		**Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**5**	**39.800.000**	
			Pengadaan Laptop	2	30.000.000			Pengadaan Laptop	2	30.000.000	
			AC Unit	1	5.000.000			Printer	1	3.500.000	
			Dektop PC	1	25.000.000			Papan Pengumuman	1	1.300.000	
			Mesin tik manual	1	2.500.000			Scanner	1	5.000.000	
			Printer	1	3.500.000						
			Papan Pengumuman	1	500.000						
			Scanner	1	5.000.000						
			Kursi kerja	1	1.000.000						
			Meja kerja	1	2.000.000						
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		**Jumlah gedung kantor yang dipelihara**	**2**	**3.000.000**						
			jumlah gedung kantor yang terpelihara	2	3.000.000						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		**Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara**	**59**	**115.800.000**	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**		**Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara**	**10**	**54.068.820**	
			Bahan Bakar Minyak/Gas dan Peluma	14	16.800.000			Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4	1	4.799.770	
			Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4	4	40.000.000			Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2	1	40.266.700	
			Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4	4	4.000.000			Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1	9.002.350	
			Penggantian Suku Cadang	55							

			Kendaraan Dinas Roda 2		49.500.000							
			Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2	55	5.500.000							
3	**Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja**	**Belopa**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**100%**	**7.211.000**							
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun		**Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun**	**2**	**5.383.000**							
			Lembur PNS	10	3.450.000							Tidak dianggarkan karena sudah merupa kan tupoksi OPD
			Lembur Non PNS	6	1.365.000							
			Makan Minum Lembur PNS	10	382.000							
			Makan Minum Lembur Non PNS	6	186.000							
	Penyusunan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		**Jumlah laporan Lakip yang disusun**	**1**	**1.828.000**							
			Lembur PNS	5	920.000							Tidak dianggarkan karena sudah merupa kan tupoksi OPD
			Lembur Non PNS	1	208.000							
			Biaya Cetak dan Penggandaan	1	500.000							
			Alat Tulis Kantor	1	200.000							
No	**Rancangan Awal RKPD**					**Hasil Analisis Kebutuhan**						**Catatan Penting**
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
4	**Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Belopa**	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**100%**	**17.500.000**							
	Pengadaan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya		Jumlah Pakaian KORPRI yang diadakan	35	17.500.000							Tidak prioritas
5	**Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**	**Kab. Luwu**	**Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk**	**100%**	**5.203.211.750**	**Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**	**Kab. Luwu**		**100%**	**4.188.152.100**		
	Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader		**Jumlah pembinaan masyarakat oleh kader**	**48**	**1.362.000.000**	**Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader**		**Jumlah pembinaan masyarakat oleh kader**	**227**	**1.362.000.000**		
			Konsumsi	5.448	544.800.000			Konsumsi	13.620	544.800.000		
			Transportasi Kader	5.448	817.200.000			Transportasi Kader	13.620	817.200.000		
	Lokal Karya Mini		**Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat di kampung KB**	**5.544**	**396.000.000**	**Lokal Karya Mini**		**Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat di kampung KB**	**10**	**596.200.000**		
			Narasumber	264	184.800.000			Jasa Fasilitator	220	88.000.000		
			Makanan dan Minuman	2.640	105.600.000			Makanan dan Minuman	5.500	220.000.000		
			Transportasi Peserta	2.640	105.600.000			Kue Bosara	440	13.200.000		
								Transportasi Peserta	5.500	275.000.000		
	Pertemuan Forum Masyarakat Tingkat Desa		**Jumlah pertemuan forum musyawarah di kampung KB**	**2.640**	**356.400.000**	**Pertemuan Forum Masyarakat Tingkat Desa**		**Jumlah pertemuan forum musyawarah di kampung KB**	**10**	**596.200.000**		
			Narasumber	264	184.800.000			Jasa Fasilitator	220	88.000.000		
			Makanan dan Minuman	2.640	66.000.000			Makanan dan Minuman	5.500	220.000.000		
			Transportasi Peserta	2.640	105.600.000			Kue Bosara	440	13.200.000		
								Transportasi Peserta	5.500	275.000.000		

	Pertemuan Kelompok Kerja		**Jumlah pertemuan kelompok kerja di kampung KB**	**5.280**	**792.000.000**	**Pertemuan Kelompok Kerja**		**Jumlah pertemuan kelompok kerja di kampung KB**	**10**	**589.600.000**	
			Narasumber	528	369.600.000			Jasa Fasilitator	220	88.000.000	
			Makanan dan Minuman	5.280	211.200.000			Makanan dan Minuman	5.500	220.000.000	
			Transportasi Peserta	5.280	211.200.000			Kue Bosara	220	6.600.000	
								Transportasi Peserta	5.500	275.000.000	
	Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (DAK)		**Jumlah Mobil Unit Penerangan yang diadakan**	**1**	**851.860.000**	**Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (DAK)**		**Jumlah Mobil Unit Penerangan yang diadakan**	**1**	**854.620.000**	
			Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (DAK)	1	847.240.000			Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (DAK	1	850.000.000	
			Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Pokja ULP (Non Konstruksi)	3	2.760.000			Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Pokja ULP (Non Konstruksi)	3	2.760.000	
			Honorarium Tim Reviu Inspektorat (DAK)					Honorarium Tim Reviu Inspektorat (DAK)		-	
			Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa	3	1.860.000			Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa	3	1.860.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan		**Jumlah sarana dan prasarana rumah data kependudukan yang diadakan**	**220**	**38.910.000**	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan**		**Jumlah sarana dan prasarana rumah data kependudukan yang diadakan**	**230**	**38.506.500**	
			Pengadaan Komputer PC	1	25.000.000			Lefleat Rumah Dataku	225	2.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Printer	1	4.000.000			Papan Nama Ruma Data	1	2.996.500	
			Pengadaan Papan Nama Rumah Data Kependudukan	1	4.000.000			Pengadaan Rak Buku	1	2.000.000	
			Pengadaan Rak Buku	1	2.000.000			Display Data	1	1.000.000	
			Pengadaan Display Data	1	500.000			Pengadaan Komputer PC	1	25.000.000	
			Pengadaan Leaflet Rumah Dataku	215	2.150.000			Pengadaan Printer	1	4.000.000	
			Honorarium Tim Reviu Inspektorat					Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3	1.260.000	
			Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa	3	1.260.000						
	Pelaksanaan KIE Kelompok Melalui Momen Strategis		**Jumlah peserta yang mengikuti Harganas**	**80**	**214.360.000**						**Keterbatasan anggaran**
			Pengadaan Pakaian Olah Raga	80	32.000.000						
			Perjalanan Dinas Luar Daerah								
			Nasional dan Regional								
			- Eselon II	1	19.518.000						
			- Eselon III	4	58.852.000						
			- Golongan IV/Eselon IV	2	22.600.000						
			- Golongan III/Staf	1	9.830.000						
			perjalan dinas luar daerah								
			Makassar								
			- Eselon II	1	8.742.000						
			- Eselon III	4	22.368.000						
			- Golongan IV/Eselon IV	9	27.450.000						
			- Golongan III/Staf	5	13.000.000						
	Pembinaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan		**Jumlah peserta pengelola KB pelkon dan dalap yang dibina**	**125**	**14.500.000**	**Pembinaan Sistem Pencatatan dan**		**Jumlah peserta pengelola KB pelkon dan dalap yang dibina**	**125**	**10.618.600**	

	Pelkon dan Dalap bagi Pengelola KB					**Pelaporan Pelkon dan Dalap bagi Pengelola KB**						
			Nasi Kotak	125	3.125.000			Nasi Kotak	125	3.125.000		
			Snack	125	1.875.000			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	7.493.600		
			- Penggandaan	2.000	500.000							
			- Eselon III	5	5.500.000							
			- Golongan IV/Eselon IV	5	1.500.000							
			- Golongan III/Staf	5	2.000.000							
	Penguatan Institusi Kelembagaan Masyarakat Sektor KB		**Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang disediakan jasa**	**1.054**	**960.570.500**							**Akan dianggarkan melalui APBDes**
			Insentif PPKBD (20 org x 12 bln)	240	24.000.000							
			Insentif Sub PPKBD (1034 org x 12 bln)	12.408	930.600.000							
			Penggandaan	23.882	5.970.500							
	Pemuktahiran Data Keluarga		**Jumlah blangko yang disediakan dan jasa petugas updating data dan kader**	**84**	**87.927.250**	**Pemuktahiran Data Keluarga**		**Jumlah blangko yang disediakan dan jasa petugas updating data dan kader**		**49.257.000**		
			- Petugas Updating Basis Data Online	84.000	42.000.000			Petugas Updating Basis Data Online	84.000	42.000.000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Cetak Blangko R1/KS/13	6.650	3.657.500			Cetak Blangko	9.676	7.257.000	
			Cetak Blangko Rek Dus. R1/KS/13	2.070	1.138.500						
			Cetak Blangko Rek Dus. R1/kel.Pra-KS/13	3.105	1.707.750						
			Cetak Blangko Rek Des. R1/KS/13	456	250.800						
			Cetak Blangko Rek Des. Rl/kel.Pra-KS/13	684	376.200						
			Cetak Blangko Rek Kec. R1/KS/13	92	5.600						
			Cetak Blangko Rek Kec. R1/kel.Pra-KS/13	138	75.900						
			, Jasa Kader Pendata	227	34.050.000						
			Alat Tulis Kantor	84	4.620.000						
	Monitoring dan Evaluasi Pendataan Keluarga		**Jumlah monev pendataan keluarga yang dilaksanakan**	**2.563**	**19.880.000**	**Orientasi Kader di Kampung KB Percontohan**		**Jumlah Orientasi yang dilaksanan**	**3**	**9.390.000**	
			Nasi Kotak	272	6.800.000			Jasa Fasilitator	3	1.200.000	
			Snack	272	4.080.000			nasi kotak	90	2.250.000	
			- Penggandaan	2.000	500.000			snack	90	1.350.000	
			SPPD dalam Daerah	19	**8.500.000**			Kue Bosara	3	90.000	
	Pendistribusian Formulir Pendataan Keluarga		**Jumlah formulir pendataan keluarga yang didistribusikan**	**20**	**9.000.000**						
			SPPD dalam Daerah	19	8.500.000						
			ATK	1	500.000						
	Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi		**Jumlah monev pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi yang dilaksanakan**	**3.056**	**9.559.000**	**Pengadaan Media / Alat Pengolah Data**		**Jumlah Media / Alat Pengolah Data yang di Sediakan**	**9**	**81.760.000**	

			SPPD dalam Daerah	19	8.500.000			Laptop	5	72.500.000	
			ATK	1	300.000			Pengadaan Printer	4	8.000.000	
			Penggandaan	3.036	759.000			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3	1.260.000	
	Sosialisasi Pendataan Keluarga		**Jumlah peserta sosialisasi pendataan keluarga**	**2.843**	**48.745.000**						**Keterbatasan anggaran**
			- Alat Tuli Kantor	1	2.345.000						
			- Narasumber	5	5.600.000						
			- Moderator	1	700.000						
			- Spanduk	1	300.000						
			- Penggandaan	2.000	500.000						
			sewa penginapan	2	600.000						
			Nasi Kotak	280	7.000.000						
			Snack	280	4.200.000						
			-Transport Peserta	272	27.200.000						
			-Transport Pemateri	1	300.000						
	Sinkronisasi Pencatatan dan Pelaporan Program KB		**Jumlah peserta sinkronisasipencatatan dan pelaporan program KB**	**2.285**	**20.550.000**						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Alat Tuli Kantor	1	850.000						
			- Narasumber	4	4.400.000						
			- Moderator	2	1.000.000						
			- Anggota Tim	4	1.600.000						
			sewa penginapan	2	600.000						
			- Spanduk	1	300.000						
			- Penggandaan	2.000	500.000						
			Nasi Kotak	100	2.500.000						
			Snack	100	1.500.000						
			-Transport Peserta	70	7.000.000						
			-Transport Pemateri	1	300.000						
	Pelatihan Teknis Aplikasi Entry Data Keluarga bagi Pengelola Data		**Jumlah Pengelola Data Keluarga yang mengikuti pelatihan teknis aplikasi entri data keluarga**	**2.286**	**20.950.000**						**Keterbatasan anggaran**
			- Alat Tuli Kantor	1	850.000						
			- Narasumber	4	4.400.000						
			- Moderator	2	1.000.000						
			- Anggota Tim	5	2.000.000						
			sewa penginapan	2	600.000						
			- Spanduk	1	300.000						
			- Penggandaan	2.000	500.000						
			Nasi Kotak	100	2.500.000						
			Snack	100	1.500.000						
			-Transport Peserta	70	7.000.000						
			-Transport Pemateri	1	300.000						
6	**Program Keluarga Berencana**	**Kab. Luwu**	**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	**100%**	**3.195.005.000**	**Program Keluarga Berencana**	**Kab. Luwu**		**100%**	**1.168.297.350**	

	Pelayanan KB MKJP oleh Tim KB Keliling (TKBK)		**Jumlah PUS yang dilayani oleh TKBK**	**1.380**	**140.050.000**	**Pelayanan KB MKJP oleh Tim KB Keliling (TKBK)**		**Jumlah PUS yang dilayani oleh TKBK**	**450**	**66.574.400**	
			Alat Tulis Kantor	1	500.000			*Obat-obatan*	15	11.244.000	
			Obat-obatan (zat efek)	23	17.250.000			*Jasa Paramedis(2 org x 15 kali)*	30	12.000.000	
			Jasa upah kerja para medis	46	18.400.000			*Spanduk*	7	840.000	
			- Eselon III	19	20.900.000			***Nasi Kotak (60 dos x 15 kali)***	**900**	**22.500.000**	
			- Golongan IV/Eselon IV	19	5.700.000			***Perjalanan Dinas Dalam Daerah***		**19.990.400**	
			- Golongan III/Staf	38	15.200.000			*Zona I*		**13.570.400**	
			Spanduk	23	6.900.000			*- eselon II*	1	225.000	
			Nasi kotak	1.380	34.500.000			*- eselon III*	12	1.800.000	
			Snack	1.380	20.700.000			*- eselon IV*	36	4.500.000	
								- PNS	31	3.100.000	
								- Non PNS	24	1.920.000	
								- BBM (pertalite)	15	114.750	
								- BBM (solar)	371	1.910.650	
								Zona II		**6.420.000**	
								- eselon II	1	250.000	
								- eselon III	3	675.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								- eselon IV	9	1.800.000	
								- PNS	9	1.350.000	
								- Non PNS	6	600.000	
								- BBM (pertalite)	80	612.000	
								- BBM (solar)	220	1.133.000	
	Distribusi Alkon Ke Fasyankes		**Jumlah Alokon yang didistribusikan ke Faskes**	**104**	**23.400.000**	**Distribusi Alkon Ke Fasyankes**		**Jumlah Alokon yang didistribusikan ke Faskes**	**104**	**63.336.000**	
			Jasa Pengepakan	104	3.900.000			Jasa Pengepakan	182	6.115.200	
			BBM	1.040	10.140.000			BBM	4.186	32.650.800	
			Makanan dan Minuman (Prasmanan)	208	9.360.000			Makanan dan Minuman (Prasmanan)	546	24.570.000	
	Peningkatan Pelayanan KB di Kecamatan		**Jumlah jenis kegiatan yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan KB**	**7**	**1.535.424.000**						**Tidak termuat dalam Anggaran BOKB (DAK Non Fisik)**
			Alat Tulis Kantor	264	52.800.000						
			Listrik	264	79.200.000						
			Paket Internet	264	66.000.000						
			Narasumber Penyuluhan	264	184.800.000						
			Narasumber Rapat Teknis	264	84.800.000						
			Tenaga Keamanan Balai Penyuluh	264	158.400.000						
			Penggandaan	264	17.424.000						
			Makan minum Rapat Teknis	1.320	52.800.000						
			Makan minum Kegiatan	3.960	158.400.000						
			Makan minum Pengolahan Data	2.640	105.600.000						
			Pemeliharaan Balai	264	158.400.000						
			Transportasi Penyuluhan	3.960	158.400.000						
			Transportasi Pengolahan Data	2.640	105.600.000						
			Transportasi Rapat Teknis	1.320	52.800.000						

	Penyediaan Sarana Media KIE dan Manajemen Advokasi		**Jumlah bahan penunjang Media KIE yang diadakan dalam 1 tahun**	**380**	**522.200.000**	**Penyediaan Sarana Media KIE dan Manajemen Advokasi**		**Jumlah bahan penunjang Media KIE yang diadakan dalam 1 tahun**	**380**	**215.090.000**	
			Honor Tim Monev/pembinaan	198	99.000.000			Honor PPK	10	22.100.000	
			Honor PPK	12	30.000.000			Staf Pengelola Keuangan BOKB	30	17.100.000	
			Honor PPTK	12	8.400.000			Alat Tulis Kantor	1	3.215.450	
			Staf Administrasi	12	7.200.000			Bahan Penunjang Media KIE	1	111.100.200	
			Alat Tulis Kantor	264	26.400.000			Jasa Narasumber	20	14.000.000	
			Bahan Penunjang Media KIE	22	255.200.000			Makanan dan Minuman	300	12.000.000	
			Makanan dan Minuman	2.640	66.000.000			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	20.574.350	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	30.000.000			Makanan dan Minuman	300	15.000.000	
	Sosialisasi Penggarapan bagi Pengelola Kampung KB Tingkat Kecamatan		**Jumlah peserta pengelola kampung KB yang dibina**	**58**	**.671.000**						
			Alat Tulis Kantor	1	500.000						
			Narasumber	6	6.600.000						
			Moderator	2	1.400.000						
			Cetak Spanduk	1	300.000						
			Penggandaan Materi	116	261.000						
			Sewa Gedung	1	500.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sewa Penginapan	2	600.000						
			Nasi kotak	58	1.450.000						
			Snack	58	870.000						
			Bosara	3	90.000						
			Transport Narasumber	1	300.000						
			Transport Peserta	58	5.800.000						
	Pertemuan Penggerakan Pelayanan KB MKJP di Faskes Tingkat Kabupaten		**Jumlah peserta pertemuan (mitra kerja, bidan dan penyuluh) di faskes**	**317**	**18.960.000**						
			Alat Tulis Kantor	1	500.000						
			Narasumber	6	6.600.000						
			Moderator	2	1.400.000						
			Cetak Spanduk	1	300.000						
			Penggandaan Materi	120	270.000						
			Sewa Gedung	1	500.000						
			Sewa Penginapan	2	600.000						
			Nasi Kotak	60	1.500.000						
			Snack	60	900.000						
			Bosara	3	90.000						
			Transport Narasumber	1	300.000						
			Transport Peserta	60	6.000.000						
	Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK)		**Jumlah Gudang Alokon yang direnovasi**	**4**	**190.610.000**	**Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK)**		**Jumlah Gudang Alokon yang direnovasi**	**1**	**207.477.500**	
			Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK)	1	180.333.500			Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK)	1	189.350.000	
			Desain Perencanaan (DAK)		5.410.000			Desain Perencanaan (DAK)	1	5.680.500	
			Konsultan Pengawasan (DAK)		3.606.500			Konsultan Pengawasan (DAK)	1	3.787.000	

			Honorarium Tim Reviu Inspektorat (DAK)					Honorarium Tim Reviu Inspektorat (DAK)	1	7.400.000	
			Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa	3	1.260.000			Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa	3	1.260.000	
	Pengadaan Kendaraan Distribusi Alokon (DAK)		**Jumlah Mobil Distribusi Obat yang diadakan**	**1**	**581.860.000**	**Pengadaan Kendaraan Distribusi Alokon (DAK)**		**Jumlah Mobil Distribusi Obat yang diadakan**	**1**	**584.620.000**	
			Pengadaan Kendaraan Distribusi Alokon (DAK)	1	577.240.000			Pengadaan Kendaraan Distribusi Alokon (DAK)	1	580.000.000	
			Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Pokja ULP (Non Konstruksi)	3	2.760.000			Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Pokja ULP (Non Konstruksi)	3	2.760.000	
			Honorarium Tim Reviu Inspektorat (DAK)					Honorarium Tim Reviu Inspektorat (DAK)		-	
			Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa	3	1.860.000			Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa	3	1.860.000	
	Penyelenggaraan Manunggal TNI KB Kesehatan		**Jumlah akseptor KB/Pus yang dilayani**	**280**	**33.100.000**						
			Alat Tulis Kantor	1	500.000						
			Obat-obatan (zat efek)	4	3.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jasa upah kerja para medis	16	8.000.000						
			- Eselon II	4	4.800.000						
			- Eselon III	4	4.400.000						
			- Golongan IV/Eselon IV	4	2.800.000						
			- Golongan III/Staf	2	1.400.000						
			Cetak spanduk	4	1.200.000						
			Nasi Kotak	280	7.000.000						
	Penyelenggaraan Manunggal Bhayangkara KB Kesehatan		**Jumlah akseptor KB/Pus yang dilayani**	**280**	**33.100.000**						
			Alat Tulis Kantor	1	500.000						
			Obat-obatan (zat efek)	4	3.000.000						
			Jasa upah kerja para medis	16	8.000.000						
			- Eselon II	4	4.800.000						
			- Eselon III	4	4.400.000						
			- Golongan IV/Eselon IV	4	2.800.000						
			- Golongan III/Staf	2	1.400.000						
			Cetak spanduk	4	1.200.000						
			Nasi Kotak	280	7.000.000						
	Penyelenggaraan Manunggal Bakti IBI KB Kesehatan		**Jumlah akseptor KB/Pus yang dilayani**	**280**	**33.100.000**						
			Alat Tulis Kantor	1	500.000						
			Obat-obatan (zat efek)	4	3.000.000						
			Jasa upah kerja para medis	16	8.000.000						
			- Eselon II	4	4.800.000						
			- Eselon III	4	4.400.000						
			- Golongan IV/Eselon IV	4	2.800.000						
			- Golongan III/Staf	2	1.400.000						
			Cetak spanduk	4	1.200.000						
			Nasi Kotak	280	7.000.000						

	Penyelenggaraan Manunggal PKK KB Kes		**Jumlah akseptor KB/Pus yang dilayani**	**280**	**33.100.000**							
			Alat Tulis Kantor	1	500.000							
			Obat-obatan (zat efek)	4	3.000.000							
			Jasa upah kerja para medis	16	8.000.000							
			- Eselon II	4	4.800.000							
			- Eselon III	4	4.400.000							
			- Golongan IV/Eselon IV	4	2.800.000							
			- Golongan III/Staf	2	1.400.000							
			Cetak spanduk	4	1.200.000							
			Nasi Kotak	280	7.000.000							
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi KB Pria dan Kesehatan Reproduksi		**Jumlah peserta KB pria yang dibina**	**200**	**31.430.000**	**Sosialisasi Peningkatan Partisipasi KB Pria dan Kesehatan Reproduksi**		**Jumlah peserta KB pria yang dibina**	**200**	**31.199.450**	
			Narasumber	8	8.000.000			Narasumber	8	8.000.000	
			Nasi Kotak	200	5.000.000			Moderator	8	5.600.000	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Cetak spanduk	4	480.000	
			- Eselon II	4	4.800.000			Nasi Kotak	200	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Eselon III	4	4.400.000			Kue Bosara	8	240.000	
			- Golongan IV/Eselon IV	4	2.800.000			Perjalanan Dinas Dalam Daerah		**11.879.450**	
			- Golongan III/Staf	4	.800.000			*- eselon II*	8	1.800.000	
			Alat Tulis Kantor	1	500.000			*- eselon III*	8	1.200.000	
			Moderator	4	.800.000			*- eselon IV*	24	3.000.000	
			Cetak spanduk	1	300.000			*- PNS*	16	1.600.000	
			Kue Bosara	1	30.000			*- Non PNS*	16	1.280.000	
								- BBM	246	1.881.900	
								- BBM	217	1.117.550	
7	**Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera**	**Kab. Luwu**	**Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan**	**100%**	**952.999.500**	**Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera**	**Kab. Luwu**		**100%**	**763.788.800**	
	Pembinaan Ketahanan Keluarga Berbasis kelompok Tribina		**Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh kelompok kegiatan di kampung KB**	**132**	**448.800.000**	**Pembinaan Ketahanan Keluarga Berbasis kelompok Tribina**		**Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh kelompok kegiatan di kampung KB**	**10**	**609.400.000**	
			Narasumer	264	84.800.000			Jasa Fasilitator	220	88.000.000	
			Makanan dan Minuman	3.300	132.000.000			- nasi kotak	5.720	143.000.000	
			Transportasi Peserta	3.300	32.000.000			- snack	5.720	85.800.000	
								- Kue Bosara	220	6.600.000	
								Transportasi Peserta	5.720	286.000.000	
	Pembinaan Kelompok BKL		**Jumlah BKL yang dibina**	**20**	**123.100.000**	**Pembinaan Kelompok BKL**		**Jumlah BKL yang dibina**	**20**	**39.374.900**	
			perjalanan Dinas Dalam Daerah					Spanduk	1	120.000	
			- Eselon III	20	22.000.000			Penggandaan Format Laporan	180	900.000	
			- Golongan IV/Eselon IV	60	42.000.000			Nasi Kotak 30	600	15.000.000	
			- Golongan III/Staf	60	42.000.000			Snack	600	9.000.000	
			- ATK	1	900.000			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	14.354.900	
			Penggandaan Format Laporan	180	900.000						
			- Spanduk	1	300.000						

			- Nasi Kotak	600	15.000.000							
	Pembinaan Kelompok UPPKS		**Jumlah kelompok UPPKS yang dibina**	**20**	**123.100.000**							
			perjalanan Dinas Dalam Daerah									
			- Eselon III	20	22.000.000							
			- Golongan IV/Eselon IV	60	42.000.000							
			- Golongan III/Staf	60	42.000.000							
			- ATK	1	900.000							
			- Penggandaan Format Laporan	180	900.000							
			- Spanduk	1	300.000							
			- Nasi Kotak 30	600	15.000.000							
	Pembinaan Kelompok BKR		**Jumlah kelompok BKR yang dibina**	**751**	**.122.500**	**Pembinaan Kelompok BKR**		**Jumlah kelompok BKR yang dibina**	**20**	**38.323.500**		
			perjalanan Dinas Dalam Daerah					Spanduk	1	120.000		
			- Eselon III	20	7.447.500			Penggandaan Format Laporan	180	900.000		
			- Eselon IV	60	7.500.000			Nasi Kotak 30	600	15.000.000		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Staf	60	6.000.000			Snack	600	9.000.000	
			- ATK	1	900.000			Perjalanan Dinas dalam Daerah	1	13.303.500	
			- Penggandaan Format Laporan	9	975.000						
			- Spanduk	1	300.000						
			- Nasi Kotak 30	600	15.000.000						
	Pembinaan Kelompok BKB		**Jumlah kelompok BKB yang dibina**	**751**	**38.122.500**	**Pembinaan Kelompok BKB**		**Jumlah kelompok BKB yang dibina**	**20**	**38.909.900**	
			perjalanan Dinas Dalam Daerah					Spanduk	1	120.000	
			- Eselon III	20	7.447.500			Penggandaan Format Laporan	180	900.000	
			- Eselon IV	60	7.500.000			- nasi kotak	600	15.000.000	
			- Staf	60	6.000.000			- snack	600	9.000.000	
			- ATK	1	900.000			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	13.889.900	
			- Penggandaan Format Laporan	9	975.000						
			- Spanduk	1	300.000						
			- Nasi Kotak 30	600	15.000.000						
	Monitoring dan Evaluasi Kelompok PIK Remaja		**Jumlah monev kelompok PIK Remaja**	**141**	**49.404.500**						
			- Belanja alat tulis kantor	1	300.000						
			- Belanja perjalanan dines dalam daerah 19 kec								
			- Eselon III	19	9.194.500						
			- Eselon IV	57	10.800.000						
			- Staf	57	6.150.000						
			-Perjalan Dinas Luar Daerah								
			- Eselon III	1	4.030.000						
			- Eselon IV	3	11.340.000						
			- Staf	3	7.590.000						

	Sosialisasi Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja		**Jumlah peserta sosialisasi**	**549**	**37.770.000**	**Sosialisasi Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja**		**Jumlah peserta sosialisasi**	**120**	**37.780.500**	
			- ATK	**1**	950.000			- ATK	1	1.020.500	
			- Spanduk x2	2	600.000			- Pemateri Provinsi	8	9.600.000	
			- Pemateri dari Provinsi	8	9.600.000			- Pemateri Lokal	6	6.000.000	
			- pemateri lokal	4	4.000.000			- Moderator	4	2.800.000	
			- Moderator	4	2.800.000			- Spanduk	1	120.000	
			- Transport Pemateri	1	300.000			- Penggandaan Materi	480	120.000	
			- transport peserta	120	2.000.000			- Sewa Penginapan	3	900.000	
			- belanja penggandaan materi	120	840.000			- nasi kotak	120	3.000.000	
			- nasi kotak	140	3.500.000			- snack	120	1.800.000	
			- snack	140	2.100.000			- Bosara	4	120.000	
			- Kue Bosara	6	180.000			- Transport Pemateri	1	300.000	
			- Sewa Penginapan	3	900.000			- Transport Peserta	120	12.000.000	
	Bimbingan Teknis Program PIK-R		**Jumlah Kelompok PIK Remaja yang dibina**	**543**	**27.270.000**						
			- ATK	**1**	950.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- pemateri lokal	12	5.700.000						
			- Moderator	2	1.400.000						
			- transport peserta	120	12.000.000						
			- belanja penggandaan materi	120	840.000						
			- Spanduk x2	2	600.000						
			- nasi kotak 70 org per angkatan	140	3.500.000						
			- snack 70 org per angkatan	140	2.100.000						
			- Kue Bosara	6	180.000						
	Pelatihan Teknis Bina Keluarga Remaja (Kader BKR)		**Jumlah Kader BKR yang dibina**	**278**	**19.810.000**						
			- ATK	**1**	950.000						
			- Spanduk x2	1	300.000						
			- Pemateri dari Provinsi	4	4.800.000						
			- pemateri lokal	2	2.000.000						
			- Moderator	2	1.400.000						
			- Transport Pemateri	1	300.000						
			- transport peserta	60	6.000.000						
			- belanja penggandaan materi	60	240.000						
			- Spanduk	1	300.000						
			- nasi kotak 70 org per angkatan	70	1.750.000						
			- snack 70 org per angkatan	70	1.050.000						
			- Kue Bosara	4	120.000						
			- Sewa Penginapan	2	600.000						
	Pemilihan Duta Genre		**Jumlah Genre yang mengikuti pemilihan dan jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan**	**366**	**47.500.000**						
			- Honorariuim Provinsi 3 org	3	3.000.000						
			' - Pembawa Acara	1	400.000						
			- Transport	3	900.000						
			- Sewa Penginapan	6	1.800.000						
			- Piala Penghargaan	10	2.500.000						

			- Selempang	60	6.000.000							
			- Juara 1	2	.000.000							
			- Juara 2	2	750.000							
			- Juara 3	2	500.000							
			- Harapan 1	2	350.000							
			- Harapan 2	2	250.000							
			- ATK	1	1.000.000							
			- Spanduk	1	300.000							
			Sewa Gedung	1	500.000							
			- nasi kotak 80x 2 hari	130	3.250.000							
			- snack 80x 2hari	130	1.950.000							
			- Kue Bosara 4x 2 hari	3	90.000							
			-Perjalan Dinas Luar Daerah									
			- Eselon III	1	4.030.000							
			- Eselon IV	3	11.340.000							
			- Staf	3	7.590.000							

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat terkait dengan terbentuknya kelompok-kelompok kegiatan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa dan kelurahan dimana masing-masing kelompok tersebut mempunyai kader institusi KB (IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana) serta kader Poktan Tribina (BKB, BKR dan BKL), agar setiap kader tersebut diberikan insentif. Pemberian insentif ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja para kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

Dengan adanya kampung KB (Keluarga Berkualitas) di setiap Desa/Kelurahan, diharapkan pencegahan keluarga beresiko stunting dapat di berdayakan melalui sinergitas antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu dengan masyarakat serta OPD terkait.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu tidak terlepas dari kebijakan Pusat dan Daerah dengan harapan pelaksanaannya dapat bersinergi untuk pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Khusus telaahan untuk program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) nomor 55/HK-010/B5/2010 tanggal 29 Januari 2010. Standar Pelayanan Minimal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berisi ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yaitu Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE-KB dan KS), penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta penyediaan Informasi data mikro. Standar Pelayanan Minimal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bisa dijadikan dasar untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan di kabupaten/ kota, dan bisa juga dijadikan alat ukur oleh Pemerintah Daerah Kab. Luwu dalam penyelenggaraan Program Keluarga Berencana.

Berdasarkan Renstra BKKBN 2020-2024 target kinerja mengacu pada sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (output) dan indikator-indikator yang telah tertuang di dalam RPJMN 2020-2024. Kemudian pengembangan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Komponen dan Sub Komponen juga harus mempertimbangkan upaya perwujudan tujuan BKKBN untuk “Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Perwujudan Keluarga Berkualitas”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan adalah **“Mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia, Sejahtera dan Berkualitas“.**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata. Dari tujuan yang telah sebelumnya diutarakan maka sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Pemakaian MKJP

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu pada tahun 2025 yaitu sebanyak 4 (Empat) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan, dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan.

Lokasi program dan kegiatan selain dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga menyebar ke berbagai kecamatan, kelurahan/desa, dan beberapa kegiatan terfokus pada Kampung KB dan kelompok-kelompok kegiatan.

Rumusan Rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**10.921.099.349,00**							**14.208.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**10.921.099.349,00**							**14.208.000.000,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**10.921.099.349,00**							**14.208.000.000,00**	
1,	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah***	**17 Kegiatan**	**2.990.142.944,00**						**17 Kegiatan**	**3.880.000.000,00**	

	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah*	6 Kegiatan	12.998.523,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD	6 Kegiatan	16.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.999.746,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD		2.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.999.746,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD		2.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.999.746,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD		2.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.99 9.746,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD		2.50 0.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.99 9.746,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD		2.50 0.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.99 9.793,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD		3.50 0.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah*	5 Kegiatan	2.024.626.435,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD	5 Kegiatan	2.100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 Orang/bulan	2.024.626.435,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah	OPD		2.100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

									an Yang Optimal				
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah*	2 Kegiatan	60.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pembangunan Manusia	OPD	2 Kegiatan	70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	60.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pembangunan Manusia	OPD		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah*	8 Kegiatan	433.562.979,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD	8 Kegiatan	1.228.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2.862.068,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	57.241.800,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD		850.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.114.600,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD		12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.341.235,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD		23.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	12.700.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD		13.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material											

			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	39 Paket	28.072.200,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD		29.000	ıS GENDALIAN DUDUK KELUARGA ENCANA
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	37.350.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD		38.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	262.881.076,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD		260.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	299.631.777,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD	-	306.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	10.391.777,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah	OPD		11.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

									an Yang Optimal				
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.360.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240 Laporan	264.880.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang	OPD		270.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

									Optimal				
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Akuntabilitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah*	1 Kegiatan	159.323.230,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD	1 Kegiatan	160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	159.323.230,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	OPD		160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2,	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Total Fretility Rate (TFR)***	**2,90 %**	**654.809.639,00**						**2,90 %**	**680.000.000,00**	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Total Fretility Rate (TFR)*	2 Kegiatan	654.809.639,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat dan Stakeholder di Kelurahan/Desa	2 Kegiatan	680.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga											
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2 Laporan	259.885.368,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat dan Stakeholder di Kelurahan/Desa		260.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga											

			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	149.943.603,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pembangunan Manusia	Masyarakat dan Stakeholder di Kelurahan/Desa		170.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga											
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	3 Laporan	244.980.668,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat dan Stakeholder di Kelurahan/Desa		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3,	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)***	**51,20 % 32,09 %**	**8.901.926.132,00**						**32,14 %**	**11.388.000.000,00**	

	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)*	4 Kegiatan	1.977.422.470,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat dan Stakeholder di Kelurahan/Desa	5 Kegiatan	2.290.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana											
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Unit	379.200.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat dan Stakeholder di Kelurahan/Desa		590.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana											

			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	8 Laporan	1.448.197.270,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat dan Stakeholder di Kelurahan/Desa		1.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang											
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	150.025.200,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pembangunan Manusia	Masyarakat dan Stakeholder di Kelurahan/Desa		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)*	90 %	681.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang	Kader Institusi Masyarakat Pedesaaan (IMP)	90 %	800.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

									Optimal				
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)											
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	227 Orang	681.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kader Institusi Masyarakat Pedesaaan (IMP)		800.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)*	100 %	1.436.188.222,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Akseptor	100 %	798.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											

			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30 Laporan	36.863.222,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Akseptor		37.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	960 Orang	721.875.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Akseptor		723.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB											

			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	38 Unit	650.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Akseptor		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	27.450.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Akseptor		28.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)*	100 %	4.807.315.440,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah	Kampung KB	100 %	7.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

									an Yang Optimal				
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB											
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	3 Laporan	442.400.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kampung KB		2.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas											
			Jumlah DASHAT di Kampung KB	227 Unit	4.364.915.440,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pembangunan Manusia	Kampung KB		5.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

4,	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Persentase BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang aktif dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga***	**84 %**	**2.126.910.000,00**						**84 %**	**2.260.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang aktif dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga*	4 Kegiatan	2.126.910.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Kegiatan	2.260.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	300.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang	BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

									Optimal				
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	50.310.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata Pembangunan Manusia	BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	282 Kelompok	1.776.600.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		1.800.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H				**10.921.099.349,00**							**14.208.000.000,00**	

Dari tabel 3.3 ini kita bisa meliahat Pagu Anggaran 2025 sebesar Rp. 10.921.099.349,-, jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran 2024 jelas bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu mengalami pengurangan anggaran yang cukup banyak yakni sekitar 3 Milyar lebih, adapun anggaran tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 14.412.053.258,-.

Diharapkan untuk prakiraan maju tahun 2026 Pagu Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu bisa bertambah paling tidak sebesar Rp. 14.208.000.000,-, terutama dari sumber Dana Alokasi Umum bisa dimaksimalkan untuk memonitoring dan mengevaluasi serapan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan arah dan tujuan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dan Berkualitas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada beberapa program yaitu :

1. Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Program ini terdiri dari 6 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yaitu :

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA –SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA –SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA –SKPD
f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Umum Keuangan Daerah :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah :

a. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
c. Penyediaan Bahan Logistik kantor
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
f. Penyediaan Bahan Material
g. Fasilitasi kunjungan tamu
h. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

1.4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah :

a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

1.5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah :

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

2. Program Pengendalian Penduduk

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

2.1 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota :

a. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
b. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

3. Program Keluarga Berencana

Program ini terdiri dari 4 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan yaitu :

3.1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Binaan

a. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
b. Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK

3.2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

3.3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten

a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
c. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

3.4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

a. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
b. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yaitu :

4.1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
b. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. LUWU
TAHUN 2025

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun -1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				Rp. 489.528.014,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 489.528.014,00	Rp. 510.000.000,00
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 489.528.014,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 489.528.014,00	Rp. 510.000.000,00
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 259.994.268,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 259.994.268,00	Rp. 260.000.000,00
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 229.533.746,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 229.533.746,00	Rp. 250.000.000,00
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Rp. 4.855.885.556,00	Rp. 627.688.750,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.483.574.306,00	Rp. 6.388.000.000,00

2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				Rp. 1.906.985.280,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.906.985.280,00	Rp. 2.290.000.000,00
2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 440.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 440.000.000,00	Rp. 590.000.000,00
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.342.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.342.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00

25	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 124.985.280,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 124.985.280,00	Rp. 200.000.000,00
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				Rp. 1.816.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.816.000.000,00	Rp. 800.000.000,00
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.816.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.816.000.000,00	Rp. 800.000.000,00
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 828.500.276,00	Rp. 627.688.750,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.456.189.026,00	Rp. 798.000.000,00
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.300.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.300.000,00	Rp. 37.000.000,00
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 718.514.026,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 718.514.026,00	Rp. 723.000.000,00
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler-Pelayana n Kesehatan Dasar	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.036.250,00	Rp. 627.688.750,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 660.725.000,00	Rp. 10.000.000,00

2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.650.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 34.650.000,00	Rp. 28.000.000,00
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				Rp. 304.400.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 304.400.000,00	Rp. 2.500.000.000,00
2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 304.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 304.400.000,00	Rp. 2.500.000.000,00
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Rp. 2.083.432.394,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.083.432.394,00	Rp. 2.260.000.000,00
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Rp. 2.083.432.394,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.083.432.394,00	Rp. 2.260.000.000,00
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 130.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 130.000.000,00	Rp. 400.000.000,00

2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 73.032.394,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 73.032.394,00	Rp. 60.000.000,00
2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.880.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.880.400.000,00	Rp. 1.800.000.000,00
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 2.818.125.285,00	Rp. 46.439.350,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.864.564.635,00	Rp. 3.810.000.000,00
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 6.195.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.195.000,00	Rp. 16.000.000,00
2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.032.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.032.500,00	Rp. 2.500.000,00
2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.032.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.032.500,00	Rp. 2.500.000,00
2	14	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.032.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.032.500,00	Rp. 2.500.000,00
2	14	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.032.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.032.500,00	Rp. 2.500.000,00

2	14	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.032.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.032.500,00	Rp. 2.500.000,00
2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.032.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.032.500,00	Rp. 3.500.000,00
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 2.189.744.858,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.189.744.858,00	Rp. 2.100.000.000,00
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.189.744.858,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.189.744.858,00	Rp. 2.100.000.000,00
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 246.130.209,00	Rp. 46.439.350,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 292.569.559,00	Rp. 1.228.000.000,00
2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 933.808,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 933.808,00	Rp. 3.000.000,00
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 46.439.350,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 46.439.350,00	Rp. 850.000.000,00
2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.192.434,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.192.434,00	Rp. 12.000.000,00

2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.321.859,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.321.859,00	Rp. 23.000.000,00
2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.800.000,00	Rp. 13.000.000,00
2	14	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 23.446.643,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 23.446.643,00	Rp. 29.000.000,00
2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 38.900.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 38.900.000,00	Rp. 38.000.000,00
2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 161.535.465,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 161.535.465,00	Rp. 260.000.000,00
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 260.634.336,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 260.634.336,00	Rp. 306.000.000,00
2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.382.336,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.382.336,00	Rp. 11.000.000,00
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 18.842.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 18.842.000,00	Rp. 25.000.000,00

2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 231.410.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 231.410.000,00	Rp. 270.000.000,00
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 115.420.882,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 115.420.882,00	Rp. 160.000.000,00
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 115.420.882,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 115.420.882,00	Rp. 160.000.000,00
Jumlah								**10.246.971.249,00**	**674.128.100,00**			**10.921.099.349,00**	**12.968.000.000,00**

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan program dan kegiatan tidak lepas dari dukungan anggaran. Mengingat keterbatasan anggaran, dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan dalam pelaksanaannya, diantaranya dapat berupa pembatasan pagu anggaran berdasarkan prioritas capaian kinerja. Apabila terjadi penyesuaian anggaran yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran, akan diprioritaskan kegiatan utama yang mendukung secara langsung keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), yaitu kegiatan yang menopang tercapainya target perjanjian kinerja dan target indikator kinerja program/kegiatan.

Dengan disusunnya usulan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini, maka diharapkan program dan kegiatan dimasing-masing bidang dapat dilaksanakan sesuai prioritas dan seoptimal mungkin.

RENJA
RENCANA KERJA

2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan rencana kerja (RENJA) Tahun 2025 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah kepada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu 2025-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Tahun ke I Guna mewujudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu sebagai Lembaga Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang tertib, tepat, dan akurat berbasis sistem informasi kependudukan.

Kami menyadari bahwa penyusunan rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu masukan dan saran serta kritikan yang konstruktif sangat kami harapkan guna mewujudkan kualitas perencanaan yang baik.

Luwu, November 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU

Drs. ANDI DARMAWANGSA RAHIM
Pembina Tk. I
NIP. 19730120 199302 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Dafar Isi ii
Daftar Gambar dan Tabel iii
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capain Renstra Perangkat Daerah 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 19
2.3.1 Tingkat Kinerja pelayanan SKPD dan hal Kritis yang terkait dengan ... Pelayaan SKPD 19
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam ..... menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD 19
2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan SKPD ... 20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 21
2.5 Penelaahan Usulan Progarm dan Kegiatan Masyarakat 25
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 27
3.3 Program dan Kegiatan 29
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 50
Bab V Penutup 59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7
Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 8
Tabel 2.2.1 Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18
Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22
Tabel 3.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 28
Tabel 3.2.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 (Rancangan Akhir).....32
Tabel 4.1.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 (Rancangan Akhir) 51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu merupakan Instansi Pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk Penertiban Administrasi Kependudukan dan Kartu Keluarga, Penertiban Dokumen kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil, unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu terakhir dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor : 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu. Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strastegis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi

dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 (Naskah sesuai lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 1959)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang- Undang No. 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II disulawesi, (LNRI Tahun 1959 No. 74 Nomor 1822)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

8. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 Atas perubahan undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. *Peraturan Pemerintah Nomor* 12 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 1 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 No. 1)
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini Utuk memantapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (Good Government) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

a. Memberi arahan dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada masing - masing bagian/ bidang sesuai tupoksi Bidang;
b. Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan;
c. Sebagai informasi dan umpan balik antar bagian/ bidang yang terkait sehingga tercipta rencana dan program kerja yang sinergis untuk memperkecil terjadinya tumpang tindih kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistimatika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA OPD

Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam konteks menejemen organisasi, Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaaian kinerja, kemajuan dan kendala yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula cara membandingkan antara output dan input kegiatan, baik untuk rencana maupun realisasi dalam pencapaian kinerja di tahun sebelumnya.

Renja (Rencana Kerja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tahun 2023 telah terlaksana seluruhnya capaian per masing–masing indikator setiap kegiatan dengan baik. Secara keseluruhan capaian kinerja dan penyerapan anggaran (belanja tidak langsung dan belanja langsung) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 97,05%.

Berikut adalah tabel realisasi pelaksanaan renja dan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran 2023

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.092.900.293	4.004.025.546	97%
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.410.000	22.385.000	95%
	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.251.600	8.917.600	96%
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.133.724.598	3.075.652.343	98%
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.275.800	11.275.800	100%
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	387.458.850	383.938.500	99%
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.434.520	318.306.803	94%
	- Pengadaan Barang miilik daerah	55.740.000	55.150.000	98%
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.604.925	128.399.500	95%
2	- **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	483.028.700	461.777.250	95%
	- Pelayanan Pendaftaran Penduduk	440.914.700	420.597.050	95%
	- Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	42.114.000	41.180.200	97%
3	- **PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	106.822.400	105.909.800	99%
	- Pelayanan Pencatatan Sipil	61.680.400	61.666.100	99%
	- Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	45.142.000	44.243700	98%
4	- **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	244.041.600	234.430.715	96%
	- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan	200.108.400	200.097.515	99%
	- Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	43.933.200	34.333.200	78%
5	- **PROGRAM PENGELOLAAN PROPIL KEPENDUDUKAN**	7.353.900	6.096.400	82%
	- Penyusunan Propil Kependudukan	7.353.900	6.096.400	82%
		4.934.146.893	**4.812.239.711**	**97%**

Sumber : Hasil olah data Disdukcapil tahun 2023

Nilai anggaran dan belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.934.146.893,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.812.239.711,- atau 97%. dan nilai anggaran belanja yang tidak terserap sebesar Rp. 121.907.182 atau 3 %.

Adapun rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja per kegiatan pada tahun 2023 dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s.d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (n-1)	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
					Target renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**			3.840.964.316	3.767.210.524	98,08	4.092.900.293	4.004.025.546	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu***	24 Dokumen		20.267.000	19.330.000	95,38	23.410.000	22.385.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	4 Dokumen		13.924.800	13.580000	97,52	15.380.800	15.130.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	4 dokumen		1.233.400	1.095.000	88,78	1.315.400	755.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	4 dokumen		1.225.600	1.090.000	88,94	2.773.100	2.723.100	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	4 dokumen		1.225600	1.090.000	88,94	1.223.100	1.060.600	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	4 dokumen		1.075.600	940.000	87,39	1.135.600	1.135.600	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	4 dokumen		1.582.000	1.535.000	97,03	1.582.000	1.579.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu***			2.753.508.882	2.723.897.608	98,92	3.133.724.598	3.075.652.343	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	33 OB		2.651.663.282	2.623.247.608	98,93	3.013.162.198	2.957.886.943	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	5 Dokumen		98.115.200	98.100.000	99,98	112.515.200	112.390.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5 Laporan		989.200	110.000	11,12	3.636.000	3.061.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	5 Laporan		2.741.200	2.440.000	89,01	4.411.200	2.314.200	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD***			9.251.600	9.185.000	99,28	9.251.600	8.917.600	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil rekonsiliasi BMD	5 Laporan		697.400	646.000	92,63	697.400	447.400	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah			8.554.200	8.539.000	99,82	8.554.200	8.470.200	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							11.275.800	11.275.800	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 OB					11.275.800	11.275.800	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah***			559.355.100	554.343.688	99,10	387.458.850	383.938.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis		3.939.000	3.909.000	99,24	5.397.100	5.387.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Jenis		210.162.547	210.160.000	100	11.117.600	11.116.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	40 Jenis		12.594.250	12.592.250	99,98	21.236.250	21.151.200	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	15 Jenis		49.851.800	49.850.000	100	3.946.700	3.944.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1	75 Jenis		29.920.000	27.465.000	91,79	25.000.000	24.060.000	

		(satu) tahun								
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	50 Jenis		16.572.200	16.479.200	99,44	14.476.500	14.268.750	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	150 Kali		236.315.303	233.888.238	98,97	306.284.700	383.938.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik***						55.740.000	55.150.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan						55.740.000	55.150.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***			350.191.581	326.712.068	93,30	337.434.520	318.306.803	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	1 Laporan		9.750.800	9.724.000	99,73	150.800	150.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 Bulan		224.040.781	208.988.068	93,28	228.083.720	208.956.003	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	15 OB		116.400.000	108.000.000	92,78	109.200.000	109.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			148.390.153	133.742.160	90,13	134.604.925	128.399.500	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	25 Unit		100.182.922	85.701.160	85,54	97.765.925	91.927.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	9 Unit		3.887.000	3.749.000	96,45	20.534.000	20.353.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	1 Gedung		39.493.230	39.472.000	99,95	9.955.000	9.769.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharan/rehabilitasi	15 Unit		4.827.001	4.820.000	99,85	6.350.000	6.350.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Persentase perekaman KTP Elektronik**			845.402.248	784.992.410	92,85	3.078.606.943	461.777.250	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA								
		Persentase kepemilikan Kartu Keluarga								
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	***Cakupan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk***			752.725.000	692.324.450	91,98	440.914.700	420.597.050	

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah petugas pelayanan pendaftaran penduduk	25 OB		57.882.100	57.818.000	99,89	54.361.400	54.361.400	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah unit pelayanan pendaftaran penduduk	22		75.386.300	73.914.450	98,05	52.211.300	47.504.700	
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen yang diterbitkan	1 Laporan		358.056.600	318.992.000	89,09	239.642.000	229.530.950	
	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah petugas pengumpulan dan analisis data pendaftaran penduduk	25 OB		261.400.000	241.600.000	92,43	94.700.000	89.200.000	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				92.677.248	92.667.960	99,99	42.114.000	41.180.200	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		55 Kali		30.257.748	92.667.960	99,99	42.114.000	41.180.200	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase Kepemilikan akta perkawinan**			167.012.250	155.654.900	93,20	106.822.400	105.909.800	
		Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun								
	Pelayanan Pencatatan Sipil	***Jumlah dokumen penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristia kependudukan***			70.185.000	60.511.000	86,22	61.680.400	61.666.100	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah petugas pelayanan pencatatan sipil	8 OB		50.822.500	41.218.500	81,10	43.622.500	43.609.500	
	Pengumpulan, Analisis,				19.362.500	19.292.500	99,64	18.057.900	18.056.600	

	dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil									
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				96.827.250	95.143.900	98,26	45.142.000	44.243.700	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan penyelenggaraan koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	55 Kali		96.827.250	95.143.900	98,26	45.142.000	44.243.700	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			127.155.750	126.801.480	99,72	244.041.600	105.909.800	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							43.933.200	34.333.200	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan									
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan							43.933.200	34.333.200	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	***Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan***			127.155.750	126.801.480	99,72	200.108.400	200.097.515	

	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan	Laporan pelaksanaan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalamPenertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	55 Kali		127.155.750	126.801.480	99,72	79.410.000	79.400.415	
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan							120.698.400	12.697.100	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			7.303.900	6.260.000	85,70	7.353.900	6.096.400	
	Penyusunan Profil Kependudukan				7.303.900	6.260.000		7.353.900	6.096.400	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data kependudukan yang disediakan	5 Buku		5.576.000	4.875.000	87,43	5.601.000	4.368.500	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen profil kependudukan yang disusun	5 Buku		1.727.900	1.385.000	80,16	1.752.900	1.727.900	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu merupakan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Luwu yang menyelenggarakan pemerintahan urusan wajib non pelayanan dasar dalam Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan Program operasional dan kegiatan -kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait.

Bagian pokok dari upaya kependudukan dan pencatatan sipil ini adalah menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan tanggung jawab. Termasuk pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasiannya kedalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat/rakyat yang ada didalamnya dan keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan pembabngunan sistem layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu telah menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menitik beratkan kepada 6 (enam) indikator kinerja pelayanan yaitu, Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK), Cakupan Kepemilikan KTP eL, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 – 18 tahun, Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Penanganan Pelayanan Akta Perkawian dan Indeks kepuasan masyarakat. Agar sasaran strategis Disdukcapil dapat tercapai, maka diperlukan poin-poin yang menjadi indikator kinerja utama sebagai penilaian dalam menentukan ukuran keberhasilan suatu pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

Adapun capaian Indikator Kinerja pelayanan yang menjadi Indilator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Tahun sampai tahun 2023, serta proyeksi capaian kinerja pelayanan tahun 2023 dan 2024 dapat terlihat dalam table 2.2.1 sebagai berikut :

Keberhasilan program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Luwu yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas.

Tabel 2.2.1
Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk		Baik	89%	90%	91%	93%	94,70%	97,07%	91%	93%	
2.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga		Baik	75%	76%	80%	85%	55,18%	46,16%	80%	85%	
3.	Cakupan Penduduk yang memiliki KIA		Baik	25%	40%	50%	60%	11,89%	28,33%	50%	60%	
4.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun		Baik	85%	86%	89%	90%	76,67%	98,68%	89%	90%	
5.	Persentase kepemilikan akta perkawinan		Baik	70%	75%	80%	85%	43,05%	18,16%	80%	85%	
7.	Indeks kepuasan masyarakat		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Sebagai pusat pemerintahan propinsi, pusat perdagangan dan pelayanan jasa, Kabupaten Luwu menjadi tumpuan bagi penduduk untuk menggantungkan hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik.

Pendatang dari luar daerah pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan bertambahnya penduduk Kabupaten sekaligus menambah permasalahan sosial yang semakin komplek. Kedepan permasalahan ini perlu penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga menuntut adanya peran serta masyarakat.

Persoalan kependudukan sebagai salah satu dari persoalan yang memerlukan perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi. Karena itu pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap pertumbuhan penduduk. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Luwu perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan program operasional dan kegiatan-kegiatan.

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tahun 2023 cukup baik, capaian per 31 Desember 2023 mencapai target yang telah ditetapkan dimana kinerja pelayanan yang dilaksankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan target kinerja yang ditetapkan baik itu melalui Perjanjian Kinerja maupun melalui Indikator Kinerja Utama.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, adalah sarana prasarana yang belum memadai, belum maksimalnya pengembangan system informasi kependudukan terutama yang menyangkut peningkatan pelayanan, profesionalitas

aparat pelaksana dan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman aparat pelaksana dan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Masyarakat dalam mengurus dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih menggunakan pihak ketiga. Ketidaktahuannya masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pelayanan organisasi kependudukan. Sedangkan hambatan yang masih dijumpai adanya data yang tidak valid dengan Sistem Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu. Sistem SIAK Pemerintah Kabupaten masih bergantung kepada Sistem SIAK yang ada di Pusat salah satunya data perekaman KTP-el yaitu masyarakat sudah melaksanakan perekaman masih menunggu konfirmasi biometrik dari Pusat serta ketersediaan Blanko KTP-el pun menunggu pemberian dari Pemerintah Pusat, sehingga dapat membuat keterlambatan dan waktu pengerjaan yang cukup lama.

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Belum tersedianya gedung kantor yang *representative*, khususnya untuk pengelolaan kearsipan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1) Adanya dukungan perangkat keras dan lunak dari Pemerintah Pusat untuk program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online.

2) Dukungan Anggaran yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan.

Penetapan kebijakan dan program-program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada hakekatnya merupakan upaya berkelanjutan dari kebijakan dan program admnistrasi kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan dan program sesuai dengan amanat RPJM Kabupaten Luwu 2025-2026 dan RPJPD tahun ke I Kabupaten Luwu.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Konsep administrasi kependudukan mencakup pengertian dokumen kependudukan adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang penduduk dalam konteks perkembangan paradigma pembangunan, pendekatan, aspek kelembagaan beserta mekanismenya serta strategi dalam mewujudkannya.

Partisipasi bantuan infrastruktur wilayah dari Pemerintah yang lebih tinggi, Perguruan Tinggi, pihak swasta menjadi prioritas pendampingan masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayahnya.

Program- program yang mendukung konsep tersebut adalah program penataan administrasi kependudukan. Tabel yang menyajikan review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu **Lembar :**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Belopa	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	100%	3.971.112.395	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Belopa	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	100%	4.171.112.395	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu*	100%	14.009.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu*	100%	14.009.200	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Belopa	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu*	100%	4.030.957.687	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Belopa	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu*	100%	4.030.957.687	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Belopa	*Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD*	100%	9.589.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Belopa	*Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD*	100%	9.589.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Belopa		100%	37.253.820	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Belopa		100%	37.253.820	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Belopa	*Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah*	100%	183.041.082	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Belopa	*Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah*	100%	383.041.082	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Belopa	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik*	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Belopa	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik*	100%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belopa	*Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100%	268.643.080	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belopa	*Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100%	268.643.080	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belopa	*Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%	135.282.221	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belopa	*Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%	135.282.221	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Belopa	**Persentase perekaman KTP Elektronik**	100%	227.106.736	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Belopa	**Persentase perekaman KTP Elektronik**	100%	227.106.736	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Belopa	*Cakupan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk*	100%	199.569.836	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Belopa	*Cakupan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk*	100%	199.569.836	

	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Belopa		100%	27.836.900	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Belopa		100%	27.836.900	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Belopa	**Persentase Kepemilikan akta perkawinan**	100%	85.572.180	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Belopa	**Persentase Kepemilikan akta perkawinan**	100%	85.572.180	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Belopa	*Jumlah dokumen penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristia kependudukan*	100%	58.537.060	Pelayanan Pencatatan Sipil	Belopa	*Jumlah dokumen penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristia kependudukan*	100%	58.537.060	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Belopa		100%	27.035.120	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Belopa		100%	27.035.120	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Belopa	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	100%	220.717.590	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Belopa	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	100%	220.717.590	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Belopa		100%	51.722.780	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Belopa		100%	51.722.780	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Belopa	*Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi* ***kependudukan***	100%	168.994.810	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Belopa	*Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi* ***kependudukan***	100%	168.994.810	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Belopa	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	100%	7.675.074	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Belopa	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	100%	7.675.074	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Belopa		100%	7.675.074	Penyusunan Profil Kependudukan	Belopa		100%	7.675.074	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sejalan dengan keinginan masyarakat, bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan hanya sebagian dari usulan masyarakat namun secara keseluruhan sebenarnya program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menggambarkan keinginan dari masyarakat tersebut.

Berdasarkan berita Acara hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu di tingkat di Kabupaten Luwu, usulan masyarakat secara khusus yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada. Dengan demikian pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dapat diasumsikan tidak menemui kendala bagi masyarakat umum, namun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuat inovasi-inovasi dalam bidang pelayanan publik.



TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sinergi terhadap Rencana Kerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang terdapat pada rencana strategi yang mempunyai Visi **: *"Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas, Efektif dan Akurat yang Terintegritas dalam Bidang Administrasi Kependudukan",*** Misi :

1. Mengembangkan Kebijakan dan Sistem serta Menyelenggarakan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil untuk Menghimpun Data Kependudukan, Menerbitkan Identitas dan Mensyahkan Perubahan Status dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.
2. Mengembangkan dan Memadukan Kebijakan Pengelolaan Informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sehingga Mampu Menyediakan Data dan Informasi Kependudukan secara Legkap, Akurat dan Memenuhi Kepentingan Publik dan pembangunan.
3. Mengembangkan Pranata Hukum, Kelembagaan serta Peran serta Masyarakat yang Mendukung Proses Pendaftaran Penduduk, pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Kependudukan guna Memberikan Kepastian dan Perlindungan sesuai Hak-hak Penduduk.
4. Merumuskan Kebijakan Pengembangan Kependudukan yang Serasi, Selaras dan Seimbang antara Jumlah/Pertumbuhan, Kualitas serta Persebaran dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan.
5. Menyusun Perencanaan Kependudukan Sebagai Dasar Perencanaan dan Perumusan Pembangunan Nasional dan daerah yang Berorientasi pada Peningkatan Kesejahteraan Penduduk.

Implementasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 diuraikan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai urusan pemerintahan daerah, kewenangan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana pembangunan daerah. Urusan pemerintahan daerah dapat dikelompokkan atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar atas hak dan pelayanan dasar masyarakat, sedangkan urusan pilihan sebagai urusan yang secara nyata ada di daerah dan potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Penetapan kebijakan dan program-program kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu pada hakekatnya merupakan upaya berkelanjutan dari kebijakan dan program yang telah dilaksanakan sebelumnya, dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan dan program sesuai dengan amanat RPJM Kabupaten Luwu 2025-2026 Kebijakan pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan pada pengembangan pola kerjasama yang sinergis, berkelanjutan dan semakin memperluas basis dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu disesuaikan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah 2025-2026. Sebelum sampai kepada arah kebijakan terlebih dahulu ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi dari Dinas kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan :

1. Mewujudkan Pelalayann publik yang prima dan mengembangkan Sistem Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan peningkatan kualitas SDM
2. Meningkatkan kinerja perangkat Daerah

3.2.2. Sasaran :

Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu adalah merupakan gambaran dari pencapaian tujuan organisasi dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu dirumuskan penyusunan program dan kegiatan yang dirinci dan terukur dalam pencapaiannya. Bertitik tolak dari tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam rangka mengemban misi dari organisasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil yang tepat, akurat berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Tahun 2025-2026

VISI : LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DALAM NUANSA RELIGI			
MISI 1 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, BERWIBAWA AMANAH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebikan**
Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan mengembangkan Sistem Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui Peningkatan kualitas SDM.	Meningkatkan Kualitas PelayananAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tepat, akurat berbasis teknologi Informasi	• Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) • Jalin jejaring yang lebih efektif dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan • Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan Kemendagri oleh stakholder	1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bimtek dan pelatihan 2.Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola ke Desa/kelurahan, kecamatan dan sekolah 3.Peningkatan kualitas database dengan cara melakukan pembersihan data ganda (anomali) 4.Adanya peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat tentang pemanfaatan Data kependudukan dan Membuat MOU kerjasama dengan seluruh OPD dalam rangka pemanfaatan data
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana 2.Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai	1.Pengadaan Sarana Perkantoran Sesuai Kebutuhan 2.Pemeliharaan Sarana Perkantoran

3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2025

Adapun Program kerja dan langkah konkrit kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 terdiri dari 5 program dan 15 kegiatan serta 41 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
   - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegitan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD

c. Kegitan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
   - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegitan Administrasi kepegawaian perangkat daerah
   - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian

e. Kegitan Administrasi umum perangkat daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Kegitan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

g. Kegitan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Kegitan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pendaftaran Penduduk

a. Kegitan Pelayanan pendaftaran penduduk
- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk

b. Kegitan Penyelenggaraan pendaftaran penduduk
- Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

a. Kegitan Pelayanan pencatatan sipil
   - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
   - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil

b. Kegitan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
   - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Kegitan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
   - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

b. Kegitan Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
   - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

a. Kegitan Penyusunan profil kependudukan
   - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
   - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang lain

Tabel 3.3.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LUWU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5.880.326.515,00							76.201.411,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.880.326.515,00							76.201.411,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5.880.326.515,00							76.201.411,00	
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	-			100 %	4.420.720.984,00						-	0,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %			2 Dokumen	21.611.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Di Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu	100 %	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	14.809.250,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Di Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.616.650,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Di Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.594.150.00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.366.150.00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.366.850.00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1.605.950.00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %			33 Orang/Bulan	3.382.441.396,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu	100 %	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	3.224.406.896,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	152.796.252,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	2.276.750,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	2.982.500,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %			4 Laporan	8.889.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu	100 %	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	1.964.200,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	6.824.800,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kependudukan	100 %			1 Dokumen	24.795.535.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu	100 %	0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	24.795.535.00	Kab. Luwu. Belopa, Benga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 %			8 Paket	559.286.665.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu	100 %	0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	7.222.665.00	Kab. Luwu. Belopa, Benga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Perataan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	225.359.450,00	Kab. Luwu Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	19.899.700,00	Kab. Luwu Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	4.982.100,00	Kab. Luwu Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	24.900.000,00	Kab. Luwu Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				17 Paket	17.396.200,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.5009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	301.448.380,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100 %			6 unit	10.524.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu	100 %	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.5009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	10.524.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100 %			2 Laporan	317.975.026,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu	100 %	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	927.450,00	Kab. Luwu, Belopa, Sanga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	229.149.546,00	Kab. Luwu, Belopa, Sanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	88.800.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Sanga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100 %			29 unit	96.183.424,00			Memperkuat Stabilitas Polhukmkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu	100 %	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	71.183.424,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengk	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukmkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6.960.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengk	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukmkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.024.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengk	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukmkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	6.150.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Banga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Seluruh ASN dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase kepemilikan akta kelahiran***	**100 %**			**100 %**	**280.764.500,00**						**100 %**	**76.261.411,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	93 %			-	234.382.096,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu	93 %	76.261.411,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				4 Dokumen	84.584.100,00	Kab. Luwu, Belopa, Banga	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu		76.261.411,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	40.750.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Banga	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH, PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Akar Hasil Pelayanan Penotive Kependudukan				1 Laporan	23.985.016,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0000	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk														
			Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk				4 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten / kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	95 %			1 Laporan	46.372.892,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu	95 %	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	46.372.892,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah	0,51 Angka			0,51 Angka	186.787.625,00						0,51 Angka	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Diinglakkan	85 %			3 Layanan	60.830.505,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola pem erintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu	85 %	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Diinglakkan				3 Layanan	42.724.520,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola pem erintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil				1 Dokumen	18.111.985,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola pem erintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten / kota dalam penerbitan pelayanan Pencatatan Sipil	82 %			1 Laporan	48.871.120,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola pem erintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu	82 %	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil				1 Laporan	46.871.120,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Politukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	2.12.04	**PROGRAM PENDELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama**	**100 %**			**100 %**	**270.457.010,00**						**100 %**	**0,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan	10 OPD			1 Dokumen	61.722.769,00			Memperkuat Stabilitas Politukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu	10 OPD	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	61.722.769,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Politukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	10 OPD			1 Laporan	219.734.239,00			Memperkuat Stabilitas Politukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu	10 OPD	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	98.029.400,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0000	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				2 Dokumen	132.704.610,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase data kependudukan yang tersedia dalam profil kependudukan**	100 %			100 %	7.675.990,00						100 %	0,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan Kabupaten/Kota	95 %			2 Dokumen	7.675.990,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu	95 %	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	5.643.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Rekomendasi yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	2.082.908,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Mempercepat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	01 Peningkatan Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kabupaten Luwu		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JUMLAH								5.089.326.515,00							76.291.411,00	



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Sesuai dengan berbagai isu-isu penting yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, dalam menopang misi dari pemerintah daerah yaitu Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan menciptakan pemerataan pelayanan dengan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta aktualisasi kondisi pelayanan saat ini dikaitkan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dalam bidang administrasi kependuduan.

Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan periodesasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan adanya pendanaan program dan kegiatan diharapkan target capaian kinerja masing-masing bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 (Rancangan Akhir)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu
Tahun 2025

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
										5.229.308.220		**5.229.308.220**
2	**12**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100,00**	**%**	**4.688.236.640**	**100,00**	**4.688.236.640**
2	**12**	**1**	**1**	**2.01**		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu***		***%***	***19.961.750***		**19.961.750**
2	12	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2,00	Dokumen	14.009.200	2,00	14.009.200
							Kertas HVS Folio F4	*5*	*Rim*	*383.500*	*5*	*383.500*
							penggandaan	*900*	*Lembar*	*371.700*	*900*	*371.700*
							Jilid	*10*	*Eksamplar*	*354.000*	*10*	*354.000*
							Nasi Kotak	*30*	*kotak*	*900.000*	*30*	*900.000*
							Admin SIPD Perencanaan	*1*	*orang*	*12.000.000*	*1*	*12.000.000*
							Lembur					
2	12	01	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun		Dokumen	1.318.650		1.318.650
							Kertas HVS Folio F4	*5*		*383.500*	*5*	383.500

							penggandaan	*550*		*227.150*	*550*	227.150
							Jilid Antero Biasa	*20*		*708.000*	*20*	708.000
							Nasi Kotak	*10*			*10*	
2	12	01	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		Dokumen	994.150		994.150
							Kertas HVS Folio F4	*10*		*767.000*	*10*	767.000
							penggandaan	*550*		*227.150*	*550*	227.150
							Jilid Antero					
							Nasi Kotak	*20*			*20*	
							Lembur					
2	12	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun		Dokumen	1.098.150		1.098.150
							Kertas HVS Folio F4	*5*		*383.500*	*5*	383.500
							penggandaan	*550*		*227.150*	*550*	227.150
							Jilid Antero Biasa	*15*		*487500*	*15*	487.500
							Nasi Kotak	*10*			*10*	
2	12	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun		Dokumen	935.650		935.650
							Kertas HVS Folio F4	*5*		*383.500*	*5*	383.500
							penggandaan	*550*		*227.150*	*550*	227.150
							Jilid Antero Biasa	*10*		*325000*	*10*	325.000
							Nasi Kotak	*15*			*15*	
2	12	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	2,00	Dokumen	1.605.950	2,00	1.605.950
							Kertas HVS Folio F4	*10*		*767.000*	*10*	767.000
							penggandaan	*150*		*61.950*	*150*	61.950
							Jilid Antero Biasa	*5*		*177000*	*5*	177.000
							Nasi Kotak	*20*		*600000*	*20*	600.000
2	**12**	**1**	**1**	**2.02**		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu***		***%***	***4.030.957.687***		4.030.957.687

2	12	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	33	OB	3.023.705.293	33	**3.023.705.293**
							TPP			763.230.000		763.230.000
							Gajidan Tunjangan PPPK			112.296.894		112.296.894
2	12	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun		OB	127.236.250		127.236.250
							Bendahara	1	OB	9.240.000	1	9.240.000
							PPTK	2	OB	38.640.000	2	38.640.000
							PPTK	3	OB	18.000.000	3	18.000.000
							PPK	1	OB	10.560.000	1	10.560.000
							PPKD	1	OB	27.360.000	1	27.360.000
							Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa	1	OB	22.920.000	1	22.920.000
							Kertas HVS Folio F4	5	Rim	383.500	5	383.500
							Jilid Biasa Tebal	3	Eksamplar	70.800	3	70.800
							Foto Copy	150	Lembar	61.950	150	61.950
2	12	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1,00	Laporan	1.676.750	1,00	1.676.750
							Kertas HVS Folio F4	*10*	*Rim*	*767.000*	*10*	767.000
							penggandaan	*750*	*Lembar*	*309.750*	*750*	309.750
							Jilid Antero Karton	*6*	*Eksamplar*		*6*	
							Nasi Kotak	*20*	*kotak*	*600000*	*20*	600.000
							Lembur					
2	12	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	14	Laporan	2.812.500	14	2.812.500
							Kertas HVS Folio F4	*6*	*Rim*	*460.200*	*6*	460.200
							penggandaan	*1100*	*Lembar*	*454.300*	*1100*	454.300
							Jilid Antero Karton	*10*	*Eksamplar*	*354000*	*10*	354.000

							Jilid Biasa Tebal	*40*	*Eksamplar*	*944000*	*40*	944.000
							Nasi Kotak	*20*	*kotak*	*600000*	*20*	600.000
							Lembur					
2	**12**	**1**	**1**	**2.03**		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD***		***%***	***9.589.000***		9.589.000
2	12	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil rekonsiliasi BMD	2,00	Laporan	764.200	2,00	764.200
							Kertas HVS Folio F4	*6*	*Rim*	*460.200*	*6*	460.200
							penggandaan	*500*	*Lembar*	*206.500*	*500*	206.500
							Jilid Biasa Tebal	*5*	*Eksamplar*	*97500*	*5*	97.500
							Nasi Kotak	*10*	*kotak*		*10*	
2	12	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2,00	Laporan	8.824.800	2,00	8.824.800
							Honorarium Pengurus Barang	*1*	*OB*	*8.400.000*	*1*	8.400.000
							Kertas HVS Folio F4	*5*	*Rim*	*383.500*	*5*	383.500
							penggandaan	*100*	*Lembar*	*41.300*	*100*	41.300
							Jilid Biasa Tebal	*3*	*Eksamplar*		*3*	
2	**12**	**1**	**1**	**2.05**		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				***37.253.820***		37.253.820
2	12	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2,00	Dokumen	37.253.820	2,00	37.253.820
							Operator Komputer Adm. Kepeg.	*3*	*OB*	*36.000.000*	*3*	36.000.000
							Ballpoint	*2*	*Lusin*	*457.320*	*2*	457.320
							Ballpoint	*5*	*Lusin*	*200.600*	*5*	200.600
							Penjepit kertas	*3*	*pack*	*212.400*	*3*	212.400
							Kertas HVS F4 70 Gram	*5*	*Rim*	*383500*	*5*	383.500
2	**12**	**1**	**1**	**2.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah***		***%***	***183.041.082***		183.041.082

2	12	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	8,00	unit/buah/set	5.552.761	8,00	5.552.761
							Kabel Eterna NYA	*2*	*Roll*	*696.788*	*2*	696.788
							Kabel Eterna NYA	*1*	*Roll*	*610.827*	*1*	610.827
							Lampu Bohlam Clear 40 W	*25*	*buah*	*1.626.175*	*25*	1.626.175
							Lampu Bohlam Softone 75 W White	*10*	*Pcs*	*650.470*	*10*	650.470
							isolasi listrik	*5*	*buah*	*54.000*	*5*	54.000
							MCB	*4*	*buah*	*372.000*	*4*	372.000
							Lighting Fitting	*20*	*Buah*	*408.000*	*20*	408.000
							Steker	*10*	*Buah*	*314.820*	*10*	314.820
							MCB	*5*	*Buah*		*5*	
							Saklar	*10*	*Buah*		*10*	
							Terminal colokan	*23*	*Pcs*	*241.500*	*23*	241.500
							Stop Kontak Timer Analog HELES	*7*	*Buah*	*169.036*	*7*	169.036
							Stop Kontak Tampa Kabel & Saklar(Arde 5 Lubang)	*5*	*Buah*	*409.145*	*5*	409.145
2	12	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6,00	Unit	20.460.521	6,00	20.460.521
							Amplop 104 SD	*10*	*Dos*	*313.880*	*10*	313.880
							Amplop 90	*20*	*Dos*	*218.300*	*20*	218.300
							Materai	*50*	*Lembar*	*774.350*	*50*	774.350
							Tinta Printer Epson	*15*	*Buah*	*1.886.445*	*15*	1.886.445
							Ribbon	*3*	*Buah*	*11.371.950*	*3*	11.371.950
							Film	*2*	*Buah*	*3.751.000*	*2*	3.751.000
							Cleaning	*2*	*Buah*	*1.398.600*	*2*	1.398.600
							Mouse	*2*	*Buah*	*297.596*	*2*	297.596
							USB HUB	*7*	*Buah*		*7*	
							Flash Disk	*5*	*Buah*	*448.400*	*5*	448.400
2	12	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	11,00	bulan	13.724.850	11,00	13.724.850

							Air Mineral Kemasan	*85*	*Dos*	*1.751.000*	*85*	1.751.000
							Air Mineral Kemasan	*20*	*Dos*	*1.098.000*	*20*	1.098.000
							Galon	*50*	*galon*	*287.500*	*50*	287.500
							Buah Buahan	*101*	*kg*	*984.750*	*101*	984.750
							biskuit	*20*	*Kaleng*	*2.430.000*	*20*	2.430.000
							biskuit	*16*	*Kaleng*	*1.171.200*	*16*	1.171.200
							Gula Diet	*20*	*Bungkus*	*911.000*	*20*	911.000
							Gula pasir	*21*	*kg*	*384.300*	*21*	384.300
							kopi bubuk	*7*	*kg*	*245.700*	*7*	245.700
							kue-kue kering/basah	*200*	*biji*	*572.000*	*200*	572.000
							permen	*50*	*bungkus*	*657.500*	*50*	657.500
							minuman ringan	*18*	*Dos*	*1.584.900*	*18*	1.584.900
							Ultra Milk	*180*	*buah*	*1.647.000*	*180*	1.647.000
2	12	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	8,00	bulan	4.119.920	8,00	4.119.920
							Foto Copy	*7740*	*Lembar*	*3.196.620*	*7740*	3.196.620
							Jilid Antero Biasa	*5*	*Eksamplar*	*227.500*	*5*	227.500
							Jilid Antero Karton	*5*	*Eksamplar*	*390.000*	*5*	390.000
							Jilid Biasa Tebal	*6*	*Eksamplar*	*117.000*	*6*	117.000
							jilid spiral	*8*	*Eksamplar*	*188.800*	*8*	188.800
2	12	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	27,00	bulan	13.500.000	27,00	13.500.000
							Surat Kabar	*15*	*Media*	*7.500.000*	*15*	7.500.000
							infotorial	*2*	*kegiatan*	*6.000.000*	*2*	6.000.000
2	12	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun		OB	11.155.180		11.155.180
							Ballpoint	*2*	*Lusin*	*457.320*	*2*	457.320
							Box File	*10*	*buah*	*311.520*	*10*	311.520

							Buku folio ustri 100 Lembar	*20*	*buah*	*434.240*	*20*	434.240
							gunting	*12*	*Buah*	*143.016*	*12*	143.016
							staples	*12*	*Buah*	*552.240*	*12*	552.240
							hekter kecil	*22*	*buah*	*441.320*	*22*	441.320
							isi hekter kecil	*10*	*buah*	*365.800*	*10*	365.800
							isi hekter kecil	*2*	*pak*	*80.240*	*2*	80.240
							Kalkulator	*1*	*buah*		*1*	
							lakban jilid	*40*	*Buah*	*764.640*	*40*	764.640
							pensil	*5*	*buah*	*286.150*	*5*	286.150
							spidol snowman	*51*	*Buah*	*150.450*	*51*	150.450
							spidol snowman kecil	*13*	*Buah*	*116.584*	*13*	116.584
							Stempel ekspres	*5*	*Buah*	*325.000*	*5*	325.000
							Kertas HVS F4 70 Gram	*21*	*Rim*	*1.610.700*	*21*	1.610.700
							Kertas HVS A4	*10*	*Rim*	*826.000*	*10*	826.000
							Kertas NCR	*5*	*Rim*	*407.100*	*5*	407.100
							Kertas NCR	*5*	*Rim*	*383.500*	*5*	383.500
							Map Batik	*20*	*pak*	*375.240*	*20*	375.240
							Map Kertas	*5*	*pak*	*191.750*	*5*	191.750
							Map	*60*	*Pak*	*280.320*	*60*	280.320
							Map	*10*	*Buah*	*932.200*	*10*	932.200
							tissu	*50*	*Buah*	*960.200*	*50*	960.200
							sapu lantai	*10*	*Buah*	*376.650*	*10*	376.650
							sikat	*5*	*buah*	*383.000*	*5*	383.000
2	12	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	18,00	OK	114.527.850	18,00	114.527.850
							Pejalanan Dinas Biasa			*108.828.950*		108.828.950
							Dexlite	*150*	*Liter*	*2.769.150*	*150*	2.769.150
							Pertamax	*300*	*Liter*	*5.017.800*	*300*	5.017.800
							Jakarta			*57.178.000*		57.178.000

							Eselon II	*2*	*orang/kali*	*36.630.000*	*2*	36.630.000
							Eselon III	*1*	*orang/kali*	*10.667.000*	*1*	10.667.000
							Eselon IV	*1*	*orang/kali*	*9.881.000*	*1*	9.881.000
							Sulawesi Selatan			*43.864.000*		43.864.000
							Eselon II	*2*	*orang/kali*	*16.792.000*	*2*	16.792.000
							Eselon III	*2*	*orang/kali*	*9.672.000*	*2*	9.672.000
							Eselon IV	*3*	*orang/kali*	*10.440.000*	*3*	10.440.000
							Staf	*1*	*orang/kali*	*3.480.000*	*1*	3.480.000
							Non PNS	*1*	*orang/kali*	*3.480.000*	*1*	3.480.000
							Dalam Kota			*5.698.900*		5.698.900
							BBM	*150*	*Liter*	*2.508.900*	*150*	2.508.900
							Eselon II	*4*	*orang/kali*	*980.000*	*4*	980.000
							Eselon III	*3*	*orang/kali*	*510.000*	*3*	510.000
							Eselon IV	*4*	*orang/kali*	*680.000*	*4*	680.000
							Staf	*3*	*orang/kali*	510.000	*3*	510.000
							Non PNS	3	*orang/kali*	510.000	3	510.000
2	**12**	**1**	**1**	**2.07**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik***		***%***	***3.508.000***		3.508.000
2	12	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan		jenis	3.508.000		3.508.000
							Router	2	*unit*		2	
							AC Split	3	*unit*		3	
							tv	1	*unit*		1	
							Printer	1	*unit*	3.508.000	1	3.508.000
2	**12**	**1**	**1**	**2.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		***%***	***268.643.080***		268.643.080
2	12	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan		OB	927.480		927.480
							Ballpoint standard	15	*Lusin*	601.800	15	601.800
							Buku Folio Usti	15	*Buah*	325.680	15	325.680

							Tenaga Caraka		*OB*	0		-
2	12	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	5,00	bulan	202.915.600	5,00	202.915.600
							Listrik	44600	*kwh*	84.115.600	44600	84.115.600
							TV Kabel	3	*buah*		3	
							Internet Vpn Walmas	12	*bulan*		12	
							Internet Walmas	12	*bulan*		12	
							Internet	12	*bulan*	118.800.000	12	118.800.000
2	12	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		OB	64.800.000		64.800.000
							Aspri	1	*OB*		1	
							Operator SIPD	2	*OB*	36.000.000	2	36.000.000
							Sopir	1	*OB*	12.000.000	1	12.000.000
							Petugas kebersihan	2	*OB*	16.800.000	2	16.800.000
2	**12**	**1**	**1**	**2.09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		*%*	***135.282.221***		135.282.221
2	12	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	29,00	Unit	128.172.221	29,00	128.172.221
							Belanja Sewaa Kendaraan Dinas	1	*Unit*	102.000.000	1	102.000.000
							Pertamax	300	*Liter*	5.017.800	300	**5.017.800**
							Dexlite	361	*Liter*	6.664.421	361	6.664.421
							Aki	2	*buah*	2.040.000	2	2.040.000
							Aki Mobil	2	*buah*		2	
							Kampas rem belakang	3	*buah*	1.350.000	3	1.350.000
							Kampas rem depan	3	*buah*	1.050.000	3	1.050.000
							saringan solar	2	*buah*	800.000	2	800.000
							Saringan oli	3	*buah*	540.000	3	540.000
							Saringan bahan bakar	3	*buah*	450.000	3	450.000

							busi	8	*buah*	360.000	8	360.000
							karet master	10	*buah*	150.000	10	150.000
							Bearibg roda depan dalam	3	*buah*	750.000	3	750.000
							subreker belakang	2	*buah*	1.000.000	2	1.000.000
							subreker depan	2	*buah*	1.800.000	2	1.800.000
							pajak kendaraan roda 2	15	*unit*		15	
							pajak kendaraan roda 4	3	*unit*	4.200.000	3	4.200.000
2	12	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan		unit/set	3.450.000		3.450.000
							Sarana Kantor	5	unit/set	3.450.000	5	3.450.000
							Jasa Service komputer	10	unit/set		10	
							Jasa Service Printer	15	unit/set		15	
2	12	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	2.000,00	m2		2.000,00	
							Rehabilitasi Gedung Kantor	2	m2		2	
2	12	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	18,00	unit	3.660.000	18,00	3.660.000
							jasa servis AC	6	unit	3.660.000	6	3.660.000
							Isi peron	10	unit		10	
2	**12**	**01**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase perekaman KTP Elektronik**	**94,55**	**%**	**227.106.736**	**94,55**	**227.106.736**
							Pcrscntase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	**60,00**	**%**		**60,00**	
							Persentase kepemilikan akta kelahiran	**92,00**	**%**		**92,00**	
2	**12**	**1**	**2**	**2.01**		***Pelayanan Pendaftaran Penduduk***	***Cakupan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk***		***%***	***199.569.836***		199.569.836

2	12	01	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah petugas pelayanan pendaftaran penduduk		OB	84.584.100		84.584.100
							Ballpoint standard	*5*	*lusin*	*200.600*	*5*	200.600
							Hekter kecil	*10*	*buah*	*200.600*	*10*	200.600
							isi hekter kecil	*5*	*dos*	*182.900*	*5*	182.900
							jasa operator KTP-EL	*7*	*OB*	*84.000.000*	*7*	84.000.000
2	12	01	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah unit pelayanan pendaftaran penduduk	29	Unit	26.192.980	29	26.192.980
							Pulpen Tindis	*5*	*lusin*	*200.600*	*5*	200.600
							buku folio usti	*5*	*buah*	*108.560*	*5*	108.560
							hekter kecil	*12*	*buah*	*240.720*	*12*	240.720
							puplen balinner	*5*	*buah*	*1.143.300*	*5*	1.143.300
							isi hekter kecil	*5*	*dos*	*182.900*	*5*	182.900
							kertas HVS A4	*40*	*Rim*	*3.304.000*	*40*	3.304.000
							Penggandaan	*8000*	*Lembar*	*3.304.000*	*8000*	3.304.000
							Nasi Kotak	*25*	*Kotak*		*25*	
							Perjalanan Dinas Dalam Kota			*17.708.900*		17.708.900
							BBM	*150*	*Liter*	*2.508.900*	*150*	2.508.900
							Eselon II	*10*	*orang/kali*	*2.450.000*	*10*	2.450.000
							Eselon III	*15*	*orang/kali*	*2.550.000*	*15*	2.550.000
							Eselon IV	*20*	*orang/kali*	*3.400.000*	*20*	3.400.000
							Staf	*15*	*orang/kali*	*2.550.000*	*15*	2.550.000
							Non PNS	25	*orang/kali*	4.250.000	25	4.250.000
2	12	01	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen yang diterbitkan	7,00	jenis	12.779.756	7,00	12.779.756
							kertas HVS A4	*95*	*Rim*	*7.847.000*	*95*	7.847.000
							Penjepit kertas	*5*	*pak*	*354.000*	*5*	354.000
							Map snelhekter	*48*	*buah*	*224.256*	*48*	224.256
							Map Plastik Kancing	*12*	*pak*	*467.280*	*12*	467.280

							Pulpen	*6*	*lusin*	*1.371.960*	*6*	1.371.960
							Tinta Printer	*20*	*buah*	*2.515.260*	*20*	2.515.260
2	12	01	02	2.01	08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah petugas pengumpulan dan analisis data pendaftaran penduduk	34,00	OB	76.013.000	34,00	76.013.000
							Kertas HVS A4	*5*	*Rim*	*413.000*	*5*	413.000
							Staf Administrasi penerimaan dan verifikasi dokumen	*5*	*OB*	*42.000.000*	*5*	42.000.000
							Staf Administrasi registrasi dan penyerahan dokumen	*4*	*OB*	*33.600.000*	*4*	33.600.000
2	**12**	**1**	**2**	**2.03**		***Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk***			***kegiatan***	***27.536.900***		27.536.900
2	12	01	02	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		3,00	*kegiatan*	27.536.900	3,00	27.536.900
							BBM	*150*	*Liter*	*2.508.900*	*150*	2.508.900
							Eselon II	*1*	*orang/kali*	*8.396.000*	*1*	8.396.000
							Eselon III	*2*	*orang/kali*	*9.672.000*	*2*	9.672.000
							Eselon IV	*1*	*orang/kali*	*3.480.000*	*1*	3.480.000
							Staf	*1*	*orang/kali*	*3.480.000*	*1*	3.480.000
							Non PNS		*orang/kali*			
2	**12**	**01**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Rasio pasangan berakte nikah**	**0,30**	**Angka**	**85.572.180**	**0,30**	85.572.180
2	**12**	**1**	**3**	**2.01**		***Pelayanan Pencatatan Sipil***	***Jumlah dokumen penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristia kependudukan***		***dokumen***	***58.537.060***		58.537.060
2	12	01	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristia kependudukan		dokumen			
2	12	01	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah petugas pelayanan pencatatan sipil		OB	42.724.520		42.724.520
							Ballpoint	*10*	*pack*	*401.200*	*10*	401.200
							Hekter Kecil	*7*	*buah*	*140.420*	*7*	140.420

							Isi Hekter Kecil No 10	*5*	*pack*	*182.900*	*5*	182.900
							Staf Administrasi Pencatatan Sipil	*5*	*OB*	*42.000.000*	*5*	42.000.000
2	12	01	03	2.01	03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil				15.812.540		15.812.540
							Ballpoint	*15*	*pack*	*601.800*	*15*	601.800
							buku folio usti	*10*	*buah*	*217.120*	*10*	217.120
							Hekter kecil	*10*	*pak*	*200.600*	*10*	200.600
							isi hekter kecil	*5*	*pak*	*182.900*	*5*	182.900
							Paper Clips	*10*	*Dos*	*342.990*	*10*	342.990
							kertas HVS A4	*120*	*Rim*	*9.912.000*	*120*	9.912.000
							Penggandaan	*7500*	*Lembar*	*3.097.500*	*7500*	3.097.500
							Tinta printer epson	*10*	*buah*	*1.257.630*	*10*	1.257.630
2	**12**	**1**	**3**	**2.02**		***Penyelenggaraan Pencatatan Sipil***		***3,00***	***kegiatan***	***27.035.120***	***3,00***	27.035.120
2	12	01	03	2.02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan penyelenggaraan koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12,00	laporan	27.035.120	12,00	27.035.120
							BBM	*120*	*Liter*	*2.007.120*	*120*	2.007.120
							Eselon II	*1*	*orang/kali*	*8.396.000*	*1*	8.396.000
							Eselon III	*2*	*orang/kali*	*9.672.000*	*2*	9.672.000
							Eselon IV	*1*	*orang/kali*	*3.480.000*	*1*	3.480.000
							Staf	*1*	*orang/kali*	*3.480.000*	*1*	3.480.000
							Non PNS		*orang/kali*			
2	**12**	**01**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama**	**35,00**	**OPD**	**220.717.590**	**35,00**	**220.717.590**
2	**12**	**1**	**4**	**2.01**		***Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan***				51.722.780		51.722.780
2	12	01	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan				51.722.780		51.722.780

							Ballpoint	*20*	*pack*	*802.400*	*20*	802.400
							Hekter Kecil	*15*	*buah*	*300.900*	*15*	300.900
							Isi Hekter Kecil No 10	*6*	*pak*	*219.480*	*6*	219.480
							Staf Administrasi Pengarsipan dokumen	*6*	*OB*	*50.400.000*	*6*	50.400.000
2	**12**	**1**	**4**	**2.03**		***Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***	***Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan***		***Orang***	***168.994.810***		168.994.810
2	12	01	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan pelaksanaan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			36.372.600		36.372.600
							BBM	*100*	*Liter*	*1.672.600*	*100*	1.672.600
							Eselon II	*1*	*orang/kali*	*8.396.000*	*1*	8.396.000
							Eselon III	*4*	*orang/kali*	*19.344.000*	*4*	19.344.000
							Eselon IV	*1*	*orang/kali*	*3.480.000*	*1*	3.480.000
							Staf	*1*	*orang/kali*	*3.480.000*	*1*	3.480.000
							Non PNS		*orang/kali*			
2	12	01	04	2.03		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan				132.622.210		132.622.210
					08		*Kertas HVS A4*	*124*	*Rim*	*10.242.400*	*124*	10.242.400
							Ballpoint	*15*	*Lusin*	*601.800*	*15*	601.800
							Hekter Kecil	*15*	*pak*	*300.900*	*15*	300.900
							Isi Hekter Kecil No 10	*6*	*pak*	*219.480*	*6*	219.480
							Operator SIAK	*10*	*OB*	*120.000.000*	*10*	120.000.000
							Tinta printer epson	*10*	*buah*	*1.257.630*	*10*	1.257.630
2	**12**	**01**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase data kependudukan yang tersedia dalam profil kependudukan**	**100,00**	**%**	**7.675.074**	**100,00**	7.675.074
2	**12**	**1**	**5**	**2.01**		***Penyusunan Profil Kependudukan***				***7.675.074***		7.675.074
2	12	01	05	2.01		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data kependudukan yang disediakan		dokumen	4.699.133		4.699.133

					1		*HVS F4 70 Gram*	*5*	*Rim*	*383.500*	*5*	383.500
							Penggandaan	*4941*	*Lembar*	*2.040.633*	*4941*	2.040.633
							Jilid Antero Biasa	*50*	*Eksamplar*	*2.275.000*	*50*	2.275.000
2	12	01	05	2.01		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen profil kependudukan yang disusun		dokumen	2.975.941		2.975.941
					02		*HVS F4 70 Gram*	*5*	*Rim*	*383.500*	*5*	383.500
							Penggandaan	*2857*	*Lembar*	*1.179.941*	*2857*	1.179.941
							Jilid Antero Biasa	*25*	*Eksamplar*	*812.500*	*25*	812.500
							Nasi Kotak	*20*	*Kotak*	*600.000*	*20*	600.000



PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun dengan kebutuhan untuk pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil bagi para aparatur.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam berbangsa dan bernegara, baik dari aspek kepastian status hukum warganya, aspek perencanaan pembangunan yang dapat memproduksi data-data statistik sebagai bahan perencanaan, aspek keamanan Negara dalam hal pencegahan perdagangan manusia dan terorisme, maka program strategis nasional yang diantaranya sukses KTP elektronik (KTP el) yang telah terlaksana

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada Tahun Anggaran 2025 akan melaksanakan 5 program dan 15 Kegiatan, untuk mendukung pelaksanaan penerapan KTP-el di Kabupaten Luwu yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi. Setelah dilakukan evaluasi / pengukuran terhadap kinerja, baik kinerja kegiatan, program maupun kebijakan, diharapkan menjelang akhir Tahun Anggaran Tahun 2023 telah mencapai sasaran kinerja kegiatan sebagaimana yang direncanakan. Adapun keberhasilan terhadap capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

1. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM)/ Aparat petugas pelaksana pelayanan sesuai standar nasional;
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan, pendokumentasian akta catatan sipil serta tersedianya Data Base Kependudukan;
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang pelaksanaan tugas sehari - hari yang sangat mendukung terwujudnya harapan yang diinginkan bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Terwujudnya keseimbangan kebutuhan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, hal ini menyebabkan di dalam pelaksaaan setiap kegiatan akan selalu memperoleh respon yang positif dari masyarakat dalam pelaksanaan Data Base Kependudukan.

Selanjutnya di dalam pelaksanaan setiap kegiatan tidak semuanya akan selalu membuahkan hasil yang positif, akan tetapi sudah merupakan sesuatu yang wajar bilamana masih dijumpai adanya kegagalan/ ketidak berhasilan di dalam pelaksanaan program maupun kebijakan. Ketidak berhasilan ini tidak lain disebabkan beberapa permasalahan yang timbul antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya manfaat dokumen kependudukan dan pencatatan catatan sipil (berdasarkan hasil evaluasi terutama pada cakupan penerbitan akta kematian sangat rendah) sehingga secara berkelanjutan dan terus menerus perlunya dilaksanakan pembinaan dan pelayanan yang berorientasi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat diseluruh desa/kelurahan se-wilayah kerja Kabupaten Luwu melalui pelayanan pada masyarakat;
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman data ktp el bagi yang sudah memasuki usia wajib KTP-el.
3. Terbatasnya sumber daya manusia SDM Aparatur baik dibidang pelayanan maupun dibidang teknologi informasi
4. Keterbatasan sarana prasarana tempat pelayanan yang nyaman bagi masyarakat.
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan dokumen administrasi kependudukan terutama pada 22 kecamatan di wilayah Kabupaten Luwu.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu ini dapat mejadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Luwu, November 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU

Drs. ANDI DARMAWANGSA RAHIM
Pembina Tk. I
NIP. 19730120 199302 1 001

PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU

RENCANA KERJA (RENJA)

2025

INSPEKTORAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-nya, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 dapat selesai sesuai target waktu yang direncaanakan.

Renja merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tufoksi serta realisasi tahunan Renstra yang berisi rencana yang akan dilaksanakan dan target yang akan diraih tahun 2025. Renja disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan, Program-program dan Kegiatan Indikatif Inspektorat selama kurun waktu Satu Tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Tersusunnya Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, besar harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat .

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 masi terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan karna keterbatasan kami, akhirnya untuk melengkapi kekurangan Rencana Kerja (RENJA) ini, saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan dalam penyempurnaan Renja ini.

Belopa, Juli 2024

INSPEKTUR,

ACHMAD AWWABIN, S.STP,M.Si.,CGCAE.,
PKT. Pembina Utama Muda
NIP. 197801281996121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar belakang 1

1.2 Landasan Hukum 7

1.3 Maksud dan Tujuan 11

1.4 Sistematika Penulisan 12

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 14

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 & Capaian Renstra Perangkat Daerah 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat 29

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat 32

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025 35

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 40

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 40

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 41

3.3 Program dan Kegiatan 45

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 49

BAB V Penutup 68

4.1 Kaidah Pelaksanaan

4.2 Rencana Tindaklanjut

DAFTAR TABEL

Tabel I. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d 2023 (Tahun Berjalan) Kabupaten Luwu 19

Tabel 2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu 29

Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kebupaten Luwu 36

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu 43

Tabel 5. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 45

Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar
Keterkaitan Tujuan Renstra Inspektorat dengan RPD Tahun 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

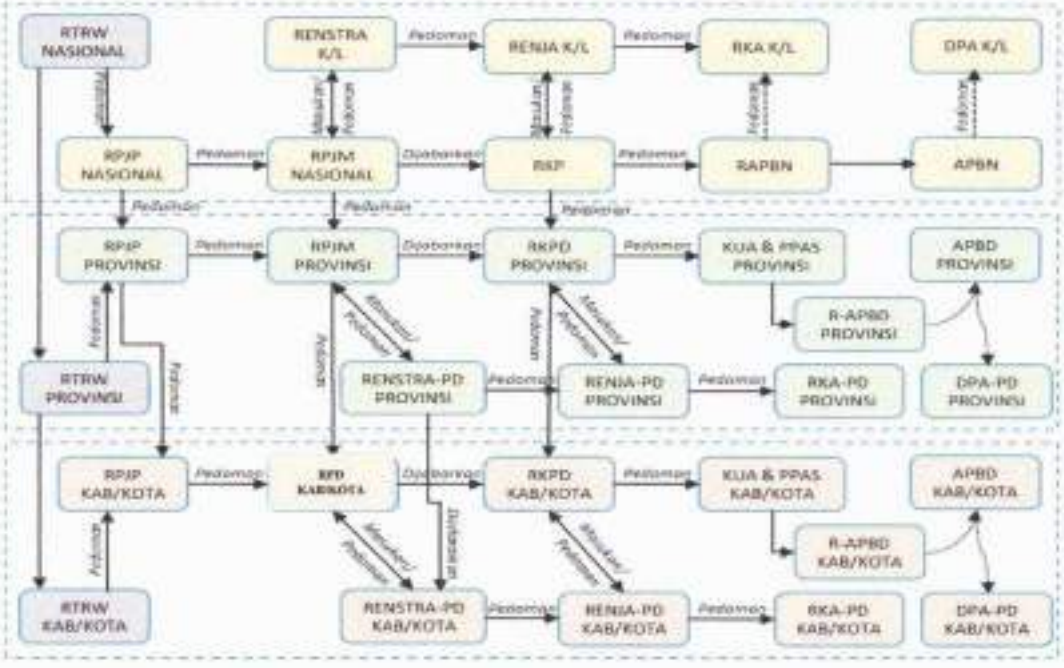
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi

masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Luwu dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Inspektorat Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan



Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Inspektorat, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Inspektorat , yang menyangkut aspek:

1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat;
2) Kondisi pelayanan Inspektorat;
3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat;
4) Data Pokok Pembangunan Inspektorat;
5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Inspektorat;
6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;dan
7) Informasi lain terkait pelayanan Inspektorat

b. Analisis gambaran pelayanan Inspektorat;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Inspektorat adalah:

1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Inspektorat.
2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Inspektorat untuk kondisi tahun 2025-2026;
4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023, dan perkiraan realisasi Triwulan I tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Inspektorat.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu berdasarkan renstra Inspektorat;

Review hasil evaluasi mencakup:

1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Inspektorat. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Inspektorat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Inspektorat:
3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Inspektorat;
4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Inspektorat sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat;
3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Developmnet Goals);
4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat;
6) Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Inspektorat.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran; Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat .

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Inspektorat. Namun dalam proses ini Inspektorat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Inspektorat:

Penyusunan dokumen rancangan Renja Inspektorat merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat :

Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Inspektorat dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Inspektorat dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Inspektorat yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 I-3 Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13)
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 1)
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 111);
36. Peraturan Bupati Luwu Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89).
38. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan

pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini, memuat program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 diuraikan secara singkat dalam masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

Bab I :Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II :Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III:Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV :Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat

Bab V :Penutup

4.1 Kaidah Pelaksanaan

4.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat sampai dengan tahun 2023 dan tahun berjalan yaitu Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024. Evaluasi terhadap capaian Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2023 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Inspektorat 2019-2024 telah dapat diketahui.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja (renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Inspektorat di-tujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Inspektorat, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator - indikator sebagai berikut :

a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam evaluasi pelaksanaan Target Kinerja capaian Program Renja Tahun 2025 disusun mengacu pada dokumen rencana strategis periode 2025-2026 yang nomenklatur program dan kegiatan Renja yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran program dan kegiatan prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11.156.156.041 telah terealisasi sebesar Rp. 11.001.241.939 atau 98.61%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan dilakukan melalui 7 (Tujuh) kegiatan dengan jumlah dana Rp. 7.342.044.041 dan realisasi anggaran Rp.7.213.924.142 atau 98.25%, meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 109.771.610 terealisasi sebesar Rp. 106.835.800 atau 97.33%. Pada tahun 2023 Sub. kegiatan yang dilaksanakan seperti Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dukumen DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 5.175.574.779 terealisasi sebesar Rp.5.118.998.797 atau 98.91%. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan/Semesteran SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah dengan anggaran Rp. 12.626.600 terealisasi sebesar Rp.12.600.000 atau 99,79. %. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 297.335.500 terealisasi sebesar Rp.292.685.500 atau 98.44%. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya, dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 859.454.750 terealisasi sebesar Rp.846.167.328 atau 98,45%. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/ Material, Fasilitasi kunjungan Tamu dan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 175.944.001 terealisasi sebesar Rp.162.930.000 atau 92.60%. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebel.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 351.532.000 terealisasi sebesar Rp.317.532.643 atau 90.33%. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik dan Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 359.804.801 terealisasi sebesar Rp.356.174.074 atau 98.99%. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya

pemeliharaan, pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan dilakukan melalui 2 (Dua) kegiatan prioritas dengan jumlah dana Rp. 3.358.502.450 dan realisasi anggaran Rp.3.341.545.113 atau 99.50%, meliputi :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan anggaran Rp. 2.021.327.500 terealisasi sebesar Rp. 2.007.490 atau 99.32%. Pada tahun 2023 Sub. kegiatan yang dilaksanakan seperti Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Desa, Kerjasama Pengawasan Internal dan Monitoring, Evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP.
b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan anggaran Rp. 1.337.174.950 terealisasi sebesar Rp.1. 334.054.500 atau 99,77%. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilakukan melalui 2 (Dua) kegiatan prioritas dengan jumlah dana Rp. 455.609.550 dan realisasi anggaran Rp. 445.772.684 atau 97,84 %, meliputi:

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan anggaran Rp. 26.492.400 terealisasi sebesar Rp. 25.883.000 atau 97.70 %. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan.
b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran Rp. 429.117.150 terealisasi sebesar Rp. 419.889.684 atau 97.85 %. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta

Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

.Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2023 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Pencapaian kinerja Tahun 2023 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2024 sudah dapat dikaitkan dengan pencapaian target tahunan dalam rencana Strategis Inspektorat Periode 2019-2024, dikarenakan Rencana Kerja Tahun 2024 masih dalam tahun berjalan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. **Program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah:**
   - ❖ Tidak terdapat Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

b. **Program/ kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran adalah :**
   - ❖ Program Penyelenggaraan Pengawasan dalam hal ini terdapat pada Kegiatan :
     - ➢ Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
     - ➢ Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

c. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA Inspektorat adalah** :
   Tidak terdapat kegiatan dalam program renstra yang masih belum terpenuhi.

Tabel T-C. 29.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah**	%	**100,00**	**31.361.616.573**	**100**	**7.342.044.041**	**100.00**	**7,213.924.142**	**100.00**	**98.25**	**Inspektorat**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	%	**100,00**	**276.974.780**	100	109.771.610	100.00	106.835.800	100.00	97.33	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Dokumen	9	119.311.350	2	47.955.050	2.00	46.158.200	100.00	96.25	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	4	44.988.810	1	12.067.310	1.00	11.774.000	100.00	97.57	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	4	28.471.830	1	11.453.750	1.00	11.237.000	100.00	98.11	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	4	28.928.530	1	11.138.950	1.00	10.894.000	100.00	97.80	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Dokumen	4	27.302.830	1	9.895.000	1.00	9.838.000	100.00	99.42	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	Dokumen	20	27.971.430	4	17.261.550	2.00	16.934.600	100.00	98.11	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daera	**Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara tepat waktu**	**%**	**100,00**	**22.500.028.508**	**100**	**5.175.574.779**	**100.00**	**5.118.998.797**	**100.00**	**98.91**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	OB	2.436	21.741.068.068	43	4.956.154.179	43.00	4.901.583.797	100.00	98.90	
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	445	701.270.000	12	203.990.000	12	202.335.000	100	99,19	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	4	30.335.640	1	7.117.800	1	6.930.000	100.00	97.36	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	Laporan	8	27.354.600	2	8.312.800	2.00	8.150.000	100.00	98.04	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada PD**	**%**	**100,00**	**50.905.266**	**100**	**12,626,600**	**100.00**	**12,600,000**	**100.00**	**99.79**	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	16	50.905.266	4	12,626,600	100.00	12.600.000	100.00	99.79	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**%**	**100,00**	**2.185.867.400**	**100**	**297.335.500**	**100.00**	**292.685.500**	**100.00**	**98.44**	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel/pasang	250	162.500.000	170	84.600.000	100.00	82.210.000	100.00	97.17	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	152	1.586.956.000	45	212.735.500	100.00	210.475.500	100.00	98.94	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran**	**%**	**100.00**	**2.114.198.825**	**100**	**859.454.750**	**100.00**	**846.167.328**	**100.00**	**98.45**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	415	43.551.400	11	20.131.200	11.00	19.531.000	100.00	97.02	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	38	189.175.625	36	271.373.800	36.00	259.660.000	100.00	95.68	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan	Jenis	2.072	109.037.400	16	44.074.0000	16.00	43.944.800	100.00	99.71	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistic kantor dalam 1 (satu) tahun	bulan	48	78,975,000	12	10.437.500	12.00	10.420.000	100.00	99.83	
		Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	bulan	48	55.463.000	12	7.424.050	12.00	7.400.000	100.00	99.68	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	Bulan	48	200.000.000	12	67.000.000	12.00	66.960.000	100.00	99.94	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	Bulan	48	216.564.900	12	36.421.250	12.00	36.382.000	100.00	99.89	
		Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	OK	6.348	221.660.000	100	40.929.750	100.00	40.904.000	100.00	99.94	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	OK	344	999.751.500	45	361.663.200	45.00	360.965.528	100.00	99.81	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	%	**85,09**	**1.136.347.441**	**100**	**175.944.001**	**64,15**	**162.930.000**	**100.00**	**92.60**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	2	90.000.000	1	30.767.000	1.00	30.180.000	97.87	98.09	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Beubeleur yang diadakan	Unit	37	197.460.000	7	145.177.001	7.00	132.750.000	100.00	91.44	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	%	**100,00**	**2.165.038.140**	**100**	**351.532.000**	**100.00**	**317.532.643**	**100.00**	**90.33**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	Bulan	48	770.788.140	12	109.932.000	12.00	92.532.643	100.00	84.17	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	OB	1416	1.394.250.000	23	241.600.000	23.00	225.000.000	100.00	93.13	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100,00**	**932.256.213**	**100**	**359.804.301**	**100.00**	**356.174.074**	**100.00**	**98.99**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Unit	168	624.436.625	20	137.685.400	20.00	134.207.574	100.00	97.47	
		Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	Unit/Set	212	82.530.000	33	14.500.000	33.00	14.450.000	100.00	99.66	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	M2	1.200	225.289.588	300	207.619.401	300.00	207.516.500	100.00	99.95	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**99.94**	**97.48**	
										Predikat kinerja			
2.	**Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Tindaklanjut Temuan Inspektorat Kabupaten	**%**	**90,00**	**12.351.683.200**	**90**	**3.358.502.450**	**85.00**	**3.341.545.113**	**94.44**	**99.50**	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintahan Daerah		Persentase Tindaklanjut Temuan BPK	%	**85,00**		**85**						
			Persentase Tindaklanjut Temuan BPKP	%	**90,00**		**90**						
			Persentase Tindaklanjut Temuan Inspektorat Provinsi	%	**90,00**		**90**						
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	**100,00**		**100**						
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal**	**Laporan**	**300**	**7.986.827.600**	**75**	**2.021.327.500**	**75.00**	**2.007.490.613**	**100.00**	**99.32**	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	LHP	122	3.274.655.600	42	642.656.000	42.00	641.090.423	100.00	99.75	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	LHP	76	605.700.000	15	207.143.800	15.00	204.792.000	100.00	98.86	
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan kinerja yang direviu	Laporan	20	602.000.000	11	134.233.400	11.00	131.600.000	100.00	98.04	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang direviu	Laporan	12	1.049.200.000	44	235.026.200	44.00	231.225.000	100.00	98.38	
		Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pemeriksaan keuangan desa	Laporan	72	1.358.752.800	18	687.604.250	18.00	684.781.000	100.00	99.59	
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil kerjasama pengawasan	Laporan	12	297.782.800	2	24.766.750	2.00	24.603.000	100.00	99.34	
		Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APFP yang sudah ditindaklanjuti	Temuan	80	798.736.400	20	89.857.100	20.00	89.399.100	100.00	99.49	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan tertentu**	**Laporan**	**228**	**4.364.855.600**	**57**	**1.337.174.950**	**57.00**	**1.334.054.500**	**100.00**	**99.77**	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah tertuntut yang melakukan pengembalian kerugian negara	Orang	80	1.493.607.400	20	257.953.100	20.00	257.788.500	100.00	99.94	
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	148	2.871.248.200	43	1.079.221.650	43.00	1.076.266.000	100.00	99.73	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**100.00**	**99.29**	
										Predikat kinerja			

RENCANA KERJA 2025

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Ketersediaan Kebijakan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pendampingan dan Asistensi	%	100,00	3.833.234.360	100	455.609.550	100.00	445.772.684	100.00	97.84	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis dibidang pengawasan yang dirumuskan	Kebijakan	8	153.357.000	2	26.492.400	2.00	25.883.000	100.00	97.70	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen Kebijakan teknis di bidang Pengawasan yang dirumuskan	Dokumen	24	78.557.000	1	26.492.400	1.00	25.883.000	100.00	97.70	
		Pendampingan dan Asistensi	Peraentase Objek Pembinaan yang dilakukan Pendampingan dan asistensi	%	20,00	3.679.877.360	20.00	429.117.150	20.00	419.889.684	100,00	97.85	
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Laporan	20	339.054.000	5	217.907.350	5.00	215.909.500	100.00	99.08	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Laporan	4	264.559.160	1	39.289.350	1.00	37.369.900	100.00	95.09	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan	PD	140	1.283.850.000	35	145.079.650	35.00	141.158.284	100.00	97.30	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Laporan	4	1.782.371.200	1	26.840.800	1.00	25.462.000	100.00	94.86	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00	97.08	
										Predikat kinerja			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM								11.156.156.041		11.001.241.939	98,61		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan baik dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan Dokumen RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu sesuai dengan Renstra tertuang dalam capaian Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel T-C. 30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu

No	Indikator	Target RENSTRA				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022 (n-3)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	
1	Predikat penilaian implementasi SAKIP Oleh Inspektorat Kabupaten	B	BB	BB	BB	B	BB	BB	
2	Persentase pemenuhan Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu	64,44	73,33	82,22		64,44	82,22	91,11	
3	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3		Level 2,71	Level 3	Level 3	Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Prov. Sulsel
4	Level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Luwu	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3	Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Prov. Sulsel
5	Rata-rata predikat penilaian implementasi SAKIP seluruh Perangkat Daerah	B	B	B		B	B	BB	
6	Implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	4	8	12		4	12	16	
7	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam rangka	2	4	7		2	7	9	

No	Indikator	Target RENSTRA				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022 (n-3)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	
	pembinaan dan pengawasan berbasis elektronik								
8	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah	100%	100%	100%		98,25%	100%	100%	
9	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kabupaten	90%	90%	90%		90%	90%	90%	
	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	85%	85%	85%		82,30%	85%	85%	
	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPKP	90%	90%	90%		90%	90%	90%	
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi	90%	90%	90%		90%	90%	90%	
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
10	Cakupan Ketersediaan Kebijakan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%		97,84%	100%	100%	

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, Yaitu :

a. Faktor Pendorong :

- Adanya dokumen Renstra Inspektorat Daerah yang disusun dengan baik dan selaras dengan pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD.
- Tingkat pendidikan sebagian besar PNS dilingkungan Inspektorat Daerah yang memenuhi syarat untuk ditingkatkan kompetensinya.

- Adanya standar baku mutu atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah.

Rumusan penjelasan program kerja tersebut di atas merupakan tanggung jawab Inspektorat Daerah

b. Faktor Penghambat :

- Kesadaran aparatur sebagai agen perubahan masih rendah sehingga cenderung pragmatis, kurang disiplin dan lambat dalam transformasi menuju aparatur yang profesional, inovatif dan rensponsif.
- Untuk membentuk kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah, dibutuhkan komitmen dan investasi yang berkelanjutan. Khusus untuk Inspektorat Daerah, anggaran yang disediakan selama ini belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sulit menjadi perangkat daerah yang dapat dijadikan contoh dalam kapasitas dan profesionalisme aparatur.
- Aparatur yang memiliki kompetensi masih kurang, khususnya dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini menyebabkan aparatur Inspektorat Daerah, khususnya P2UPD kurang mampu melihat hubungan antara output, benefit, hasil dan dampak dari suatu kegiatan terhadap sasaran dan tujuan pembangunan, sehingga rekomendasi yang disampaikan tidak menjadikan aparatur perangkat daerah yang diperiksa dan diawasi menjadi lebih baik dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi suatu kegiatan.
- Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah yang merupakan tugas pokok Inspektorat Daerah sulit ditingkatkan tanpa ketersediaan aparatur sesuai standar dan anggaran sesuai kebutuhan.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Kapasitas Kelembagaan Masih Lemah

Kapasitas kelembagaan dimaknai sebagai volume/kekuatan perangkat daerah dari aspek jumlah pegawai, jumlah anggaran, maupun ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran. Akar masalah yang terpenting dari permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Masih kurangnya aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan sesuai dengan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP).
b. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan.
c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang refresentatif.
d. Anggaran Inspektorat Daerah belum mencapai 0,75% dari total belanja daerah atau masih kurang dari 10 miliar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD.

2. Kapabilitas Kelembagaan Belum Optimal

Kapabilitas kelembagaan dimaknai sebagai kemampuan perangkat daerah menggerakkan organisasi dari aspek profesionalisme/kompetensi aparatur, kebijakan/sistem yang diterapkan, maupun ketersediaan sarana-prasarana pendukung pelaksanaan tugas, berupa aset berwujud maupun tidak berwujud. Akar masalah yang terpenting dari permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan berupa seperangkat sistem yang dapat digunakan untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan.
b. Masih kurangnya jatah diklat kompetensi khusus dari instansi pembina (BPKP untuk Auditor dan Kemendagri untuk P2UPD).
c. Masih ada instrumen/SOP pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum tersedia, misalnya petunjuk teknis dalam melakukan reviu rencana perangkat daerah

maupun implementasi SAKIP perangkat daerah.

d. Masih belum memadainya sarana mobilitas maupun pendukung pelaksanaan pengawasan lainnya, seperti kendaraan operasional dan peralatan ukur/uji tertentu.

3. Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Belum Efektif

Pengawasan yang efektif seharusnya memberikan perubahan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain meningkatnya tata kelola, kompetensi aparatur maupun paradigma terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang berorientasi kepada hasil yang dicapai. Namun pada kenyataannya, berbagai kondisi yang terkait dengan hal tersebut di atas, belum terlihat perubahan sebagaimana yang diharapkan, perangkat daerah cenderung enggan atau lambat bertransformasi menuju birokrasi yang profesional, akuntabel dan inovatif. Akar masalah yang terpenting dari permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi pembinaan pada tahap perencanaan belum dilakukan secara optimal. Hal ini menyebabkan rencana perangkat daerah belum selaras dengan rencana pembangunan daerah, belum menggambarkan potensi dan permasalahan yang ada, kurang terukur dan berkelanjutan dalam pencapaian target pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, proses yang belum optimal tersebut menyebabkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja belum dapat dilakukan secara optimal dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Selanjutnya, kondisi ini mempersulit pelaksanaan fungsi pengawasan mengingat arsitektur kinerja maupun tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak terlihat dalam dokumen dan kurang dimengerti oleh aparatur pengawas.

b. Inspektorat Daerah belum maksimal dalam memanfaatkan seluruh potensi untuk melakukan pengawasan. Kekurangan personil untuk melakukan fungsi pengawasan seharusnya dapat diminimalkan dengan melibatkan seluruh aparatur yang ada dalam pengawasan. Selama ini yang berperan dalam pengawasan adalah auditor dan P2UPD, sedangkan aparatur lainnya belum dilibatkan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu diberikan pelatihan

secukupnya agar seluruh aparatur yang ada dapat terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan.

c. Penerapan metode *Current Issue, Check and Balances* dan *Clearing House* masih kurang dan belum berkesinambungan. Disamping mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, beberapa strategi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dapat dilakukan, yaitu proaktif terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat (current issue), menguji kebenaran terhadap isu yang berkembang (check and balances), dan menjembatani persoalan yang dihadapi perangkat daerah dengan BPK/BPKP/Inspektorat Daerah Provinsi maupun masyarakat.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kualitas SDM yang ada melalui kerjasaman dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk fasilitasi pendidikan dan latihan bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk:
   a. Peningkatan Kapabilitas APIP.
   b. Peningkatan Maturitas SPIP.
   c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis
   d. Perumusan regulasi kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
   e. Meningkatkan system teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan pengawasan internal.
4. Merumuskan ratio kebutuhan SDM pemeriksa sesuai dengan kompetensi pendidikan dan daftar materi pengawasan (DMP)
5. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.
6. Mengusulakan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif .

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu tahun 2025 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2025 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2025 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Luwu.

Berikut ini adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025:

Tabel T-C. 3.1.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Luwu
Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kabupaten**		**92,3 %**	**3.804.860.000**	**92,3%**	**3.812.752.800**
		Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK		**92,3 %**		**92,3 %**	
		Persentase Tindak Lanjut Temuan BPKP		**92,3 %**		**92,3 %**	
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi		**93,3%**		**93,3 %**	
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti		**100 %**		**100 %**	
2.01	***Penyelenggaraan Pengawasan Internal***	***Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal***	**Belopa**	***75 Laporan***	***2.565.121.100***	***75 Laporan***	***2.565.121.100***
	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Belopa	30 LHP	733.355.400	30 LHP	733.355.400
	2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan pemerintah Daerah	Belopa	20 Laporan	256.493.800	20 Laporan	256.493.800
	3. Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja yang direviu	Belopa	5 Laporan	165.488.400	5 Laporan	165.488.400
	4. Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang direviu	Belopa	3 Laporan	395.001.200	3 Laporan	395.001.200
	5. *Pengawasan Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan*		*18 Laporan*	*834.988.200*	*18 Laporan*	*834.988.200*

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Keuangan Desa	Belopa				
	6. Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Kerjasama Pengawasan	Belopa	3 Laporan	38.945.700	3 Laporan	38.945.700
	7. Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APFP yang sudah ditindaklanjuti	Belopa	20 Temuan	140.848.400	20 Temuan	140.848.400
2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	***Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tertentu***	**Belopa**	***57 Laporan***	***1.239.738.900***	***57 Laporan***	***1.247.634.700***
	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah tertuntut yang melakukan pengembalian kerugian daerah	Belopa	20 Orang	299.001.850	20 Orang	373.401.850
	2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Belopa	37 Laporan	940.737.050	37 Laporan	874.232.850
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Tingkat Capaian Target Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Belopa**	**100 %**	**670.831.740**	**100 %**	**686.987.890**
03.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah KebijakanTeknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan**	**Belopa**	**2 Kebijakan**	***35.988.650***	**2 Kebijakan**	***35.988.650***
	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan	Belopa	6 Dokumen	35.988.650	6 Dokumen	35.988.650
03.02	***Pendampingan dan Asistensi***	**Persentase Objek Pembinaan yang dilakukan Pendampingan dan**	**Belopa**	**20 %**	***634.843.090***	**20 %**	***650.999.240***

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Asistensi					
	1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Belopa	5 Laporan	241.595.000	5 Laporan	135.902.300
	2. Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Belopa	1 Laporan	62.102.290	1 Laporan	66.137.090
	3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi yang dilaksanakan	Belopa	35 PD	279.884.600	35 PD	370.052.350
	4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Belopa	1 Laporan	51.261.200	1 Laporan	78.907.500

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2025 Inspektorat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan kepemerintahan, Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu tetap harus mengawal proses perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dan pada tahap musyawarah perencanaan pembangunan dengan agenda menyerap aspirasi Masyarakat, sekalipun tidak ada usulan ataupun permintaan sehingga penyusunan Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Luwu tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM serta organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Luwu belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders sehingga penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu tetap mengacu pada dokumen Rencana Strategis dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi :
   a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan, dan barang/asset terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
   b. Review Rencana Kerja Anggaran;
   c. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
   d. Review Laporan Kinerja Instanasi Pemerintah;
   e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
   f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
   g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian / Inspektorat Utama / Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
   h. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
   i. Pendampingan, asistensi, fasilitasi;
   j. Pengawasan atas Tugas Pembantuan; dan
   k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik, meliputi :

a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :

1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
3) Pembangunan zona integritas;
4) Pengendalian gratifikasi;
5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
6) Penanganan pengaduan masyarakat;
7) Penguatan Whistle Blowing System;
8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemeritah (APIP);
    a. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
    b. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
    a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
    b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
    c. Koordinasi program pengawasan;
    d. Tugas lain sesuai kebijakan kepala daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan effort dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian Tujuan ke ! Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa

mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut,seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Kerja Strategis Tahun 2025 – 2026. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut :

Tabel.3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu

Tujuan RPD	**: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**				
Sasaran ke-1 RPD	**: Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah**				
Sasaran ke-2 RPD	**: Meningkatkan Efektivitas dan Efesiensi Penyelenggaraan Pemerintahan**				
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran**	**Satuan**	**Target Kinerja pada Tahun**	
				2025	**2026**
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel,efektif dan efisien		- Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu	Nilai/Predikat	75,64 (BB)	76,41 (BB)
		- Hasil Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	75,50	76,41
		- Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3	3
		- Perangkat Daerah yang mengimplemen tasikan pembangun an zona integritas menuju WBK dan WBBM	OPD	2	2
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Kategori Memuaskan	Persentase	64,91 % (20 PD)	100,00 % (37 PD)
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan	Kapabilitas APIP	Level	3	3

Tujuan RPD	**: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**
Sasaran ke-1 RPD	**: Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah**
Sasaran ke-2 RPD	**: Meningkatkan Efektivitas dan Efesiensi Penyelenggaraan Pemerintahan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja pada Tahun	
				2025	2026
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Skor	2,83	2,93
		Predikat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Luwu	Opini	WTP	WTP
		Persentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	Persentase	80,31	80,36
		Capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Skor	2,97	3,00

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan menggunakan nomenklatur yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifkasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk mengetahui keterkaitan antar komponen rencana pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2025 menetapkan 3 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan dan 42 sub. kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan
Inspektorat Daerah Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyediaan Bahan/ Material
			Fasilitasi Kunjungan Tamu

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Mebel
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	***Penyelenggaraan Pengawasan Internal***	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
			Reviu Laporan Kinerja
			Reviu Laporan Keuangan
			Pengawasan Desa
			Kerjasama Pengawasan Internal
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

3.	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	***Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan***	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Luwu di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upayah mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Inspektorat Kabupaten Luwu dalam menjalankan program dan kegiatan Tahun 2025 anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak (PBHP). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program/kegiatan. Pagu indikatif Perangkat Daerah adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja (APBD) untuk merencanakan program/kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan RPD/Renstra/Renja Perangkat Daerah *(Top Down Planning)* yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratis Perangkat Daerah dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

Tabel. 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						12.526.074.131,00							11.843.348.111,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						12.526.074.131,00							11.843.348.111,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						12.526.074.131,00							11.843.348.111,00	
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %			100 %	9.059.780.136,00						100 %	7.614.962.911,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100 %			100 %	114.070.845,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memberantas dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	114.637.910,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	5 Dokumen			2 Dokumen	51.994.264,00	Kab. Luwu, Belop a, Tamp umia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Po rnyelupan	01.Peningk atan Tata Kelola pery elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunya Dokumen Perencanaa n, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	48.955.050,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	12.338.706,00	Kab. Luwu, Belop a, Tamp umia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Po rnyelupan	01.Peningk atan Tata Kelola pery elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunya Dokumen Perencanaa n, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.602.710,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	11.446.725,00	Kab. Luwu, Belopa , Tampu mia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Po rnyelupan	01.Peningk atan Tata Kelola pery elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunya Dokumen Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.453.750,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	11.137.759,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Raddia	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.138.950,00	INSPEKTORAT DAERAH
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	9.892.506,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Raddia	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.995.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			5 Laporan	17.260.885,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Raddia	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	18.261.550,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	100 %			100 %	6.527.619.764,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Dokumen Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100 %	5.306.053.874,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1152 Orang/bulan			65 Orang/bulan	6.230.545.830,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Raddia	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Dokumen Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	576 Orang/bulan	5.085.560.014,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34 Dokumen			12 Dokumen	280.650.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Raddia	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Dokumen Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	12 Dokumen	203.990.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			Jumlah Laporan *Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	2 Laporan			1 Laporan	8.739.408,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Dokumen Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Laporan	8.965.210,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan *Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	4 Laporan			2 Laporan	7.584.520,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Dokumen Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	2 Laporan	7.738.650,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan *Penyelenggaraan/Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD*	100 %			100 %	21.715.080,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Dokumen Administrasi BarangMilik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	12.833.206,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan			4 Laporan	21.715.080,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Dokumen Administrasi BarangMilik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	12.833.206,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Dengan Kinerja Baik	100 %			100 %	384.276.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusun ya Administr asi Kepegaw aian Perangk at Daerah	100 %	394.761.700,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	155 Paket			130 Paket	102.200.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusun ya Administr asi Kepegaw aian Perangk at Daerah	60 Paket	39.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusun ya Administr asi Kepegaw aian Perangk at Daerah	2 Dokumen	9.126.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95 Orang			36 Orang	282.076.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusun ya Administr asi Kepegaw aian Perangk at Daerah	46 Orang	232.735.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang			36 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Orang	113.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %			100 %	946.674.095			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	785.750.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	212 Paket			100 Paket	11.306.751,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunya Administrasi Umum Perangkat Daerah	106 Paket	11.502.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket			13 Paket	408.228.781,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Paket	158.379.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			Jumlah Paket Penataan Rumah Tangga yang Disediakan	1036 Paket			12 Paket	10.462.725,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Raida	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunya Administrasi Umum Perangkat Daerah	518 Paket	28.048.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket			12 Paket	20.768.400,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Raida	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	26.325.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket			12 Paket	14.289.769,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Raida	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Tersusunya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	14.290.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen			50 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Raida	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Tersusunya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	28 Paket			12 Paket	50.001.270,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampu nisa Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi/Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintah an Yang Optimal	Tersusunya Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket	57.127.600,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan			5 Laporan	50.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampu nisa Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi/Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintah an Yang Optimal	Tersusunya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	55.415.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan			88 Laporan	308.817.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampu nisa Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi/Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintah an Yang Optimal	Tersusunya Administrasi Umum Perangkat Daerah	46 Laporan	351.863.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik*	80,18 %			72,07 %	172.526.315,00			Memperkuat Reformasi/Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintah an Yang Optimal	Terlaksanaan ya Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80,18 %	293.816.513,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	119.991.000,00	Kab. Luwu Belopa , Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksanaanya Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit			16 Unit	27.650.000,00	Kab. Luwu, Belopa , Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksanaanya Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	32.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			4 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksanaanya Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Unit	201.561.513,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			9 Unit	24.885.315,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksanaanya Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	14.975.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksanaya Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Unit	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelengkapan ujasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			100 %	429.408.236,00			Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksanaya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	413.687.424,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	111.408.236,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH-DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksanaya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	104.087.424,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	318.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksanaya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	309.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			100 %	451.489.200,00			Memperkuat Reformasi/Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	292.522.784,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	94 Unit			47 Unit	141.512.300,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Raddo	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi/Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 Unit	157.107.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit			53 Unit	26.600.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Raddo	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi/Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53 Unit	24.385.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	260.376.800,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Raddo	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi/Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	111.030.284,00	INSPEKTORAT DAERAH

2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	94 % 94 % 94 % 94 % 100 %			100 % 92,3 % 93,3 %	2.878.419.485,88						94 % 94 % 94 % 94 % 100 %	3.562.030.346,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal	100 %			100 %	1.930.007.780,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan Internal	100 %	2.137.238.167,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	60 Laporan			30 Laporan	617.453.480,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Raida	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan Internal	30 Laporan	750.098.666,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan			20 Laporan	111.620.880,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Raida	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan Internal	20 Laporan	172.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja															

			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan			5 Laporan	102.485.880,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan Internal	5 Laporan	172.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan															
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6 Laporan			3 Laporan	207.030.880,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan Internal	3 Laporan	344.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa															
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	145 Laporan			18 Laporan	660.113.930,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan Internal	75 Laporan	406.888.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal															
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan			3 Kesepakatan	35.464.800,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Raddo	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan Internal	3 Kesepakatan	87.345.700,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP															

			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI danTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	40 Dokumen			20 Dokumen	195..837.000.00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan Internal	20 Dokumen	154.905.393,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan TujuanTertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Tertentu	100 %			100 %	848.411.715,00			Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan denganTujuan Tertentu	100 %	1.424.792.179,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	8 Laporan			8 Laporan	203.854.320,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan denganTujuan Tertentu	4 Laporan	373.401.850,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.3.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	74 Laporan			37 Laporan	744.557.395,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksananey a Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	37 Laporan	1.051.390.329,00	INSPEKTORAT DAERAH

3	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampinga ndan asistensi***	**100 %**			**100 %**	**589.874.500,00**						**100 %**	**667.246.854,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknisdi Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan YangDirumuskan*	100 %			100 %	63.635.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan InovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksana nya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasa ndan Fasilitasi Pengawasa n	100 %	48.139.250,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah *Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*	12 Rekomendasi			6 Rekomendasi	63.635.300,00	Kab. Luwu, Belopa, Tanipuniia Raida	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memo erkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan InovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksana nya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasa ndan Fasilitasi Pengawasa n	6 Rekomendasi	23.539.250,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah *Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yangDisusun*	12 Rekomendasi			6 Rekomendasi	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tanipuniia Raida		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan InovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksan anya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawas andan Fasilitasi Pengawas an	6 Rekomendasi	22.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Objek Pembinaan Yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	20 %			20 %	526.239.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	20 %	621.107.604,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	70 perangkat daerah			35 perangkat daerah	279.633.110,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	35 perangkat daerah	218.907.390,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerahyang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	70 perangkat daerah			35 perangkat daerah	59.351.179,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	35 perangkat daerah	40.288.350,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

			Jumlah Kegiatan *Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*	2 Kegiatan			1 Kegiatan	158.019.650,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	1 Kegiatan	333.142.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													
			Jumlah *Perangkat Daerahyang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*	70 perangkat daerah			35 perangkat daerah	29.233.261,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	35 perangkat daerah	26.788.104,00	INSPEKTORAT DAERAH
	JUMLAH							12.528.674.131,00						11.843.340.111,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Luwu sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD tahun anggaran 2025. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah sebagai pemilik fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa meningkatkan kwalitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi resiko pada perangkat daerah dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah yang memiliki resiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga singkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam menunjang tercapainya tujuan dan sasaran, serta target yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2025.

V.1. Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Rencana Kerja yang telah disusun oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dimaksudkan untuk memenuhi unsur-unsur diatas sehingga memenuhi kaidah aturan perundangan, prosedur perencanaan dan keinginan untuk

mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sehingga fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu sebagai elemen pengawasan Pemerintahan dapat dirasakan manfaat dan hasilnya.

V.2. Rencana Tindak Lanjut.

a. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan objek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan dan rekomendasi.
b. Melakukan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindaklanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan/audit kinerja dan pemeriksaan operasional serta manajemen resiko terhadap seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu.
c. Melakukan asistensi dan pembinaan terhadap 35 perangkat daerah.
d. Membuka layanan klinik konsultasi dan pemberian advisory
e. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan, Sarana dan Prasarana dalam rangka mendukung tugas-tugas di bidang pengawasan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang disesuaikan dengan RKPD Tahun 2025.

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah disusun dapat diimplementasikan dalam kegiatan pengawasan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 diharapkan dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan secara konsisten.

Belopa, [illegible] 2024
INSPEKTUR,

ACHMAD AWWABIN, S.STP,M.Si.,CGCAE.,
PKT. Pembina Utama Muda
NIP. 197801281996121002

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025



KECAMATAN SULI
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan hidayah-Nya, Sehingga Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suli tahun 2025 dapat tersusun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Kerja Kabupaten Luwu. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Suli masih memerlukan kesempurnaan di masa yang akan datang seiring dengan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis.

Suli, Juli 2024

Camat Suli

AGUSSALIM, S. Sos
Pkt : Penata Tk. I/ IV.d
Nip : 19710817 200701 1 032

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan SuliTahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Suli 19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Suli 23

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 26

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 32

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 32

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 33

3.3. Program dan Kegiatan 34

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 44

BAB V PENUTUP 53

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 Perkiraan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Suli 11
Tabel II.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kec. Suli Kab. Luwu s/d Tahun 2025 13
Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Suli Kabupaten Luwu . 22
Tabel II.4 Review Terhadap Rancangan Awal Kecamatan Suli Kab. Luwu Tahun 2025 27
Tabel II.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Luwu..... 30

Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.....36
Tabel III.2 Rumusan Rencana Program/ Kegiatan Kecamatan Suli Tahun 2025 dan Perkiraan Maju di Tahun 2026.....37

Tabel IV.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran dan Rencana Perhitungan Renja Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Tahun 2024.....48

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD..... 2

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

1.1. LATAR BELAKANG

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran RPJMD. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Suli untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Suli dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

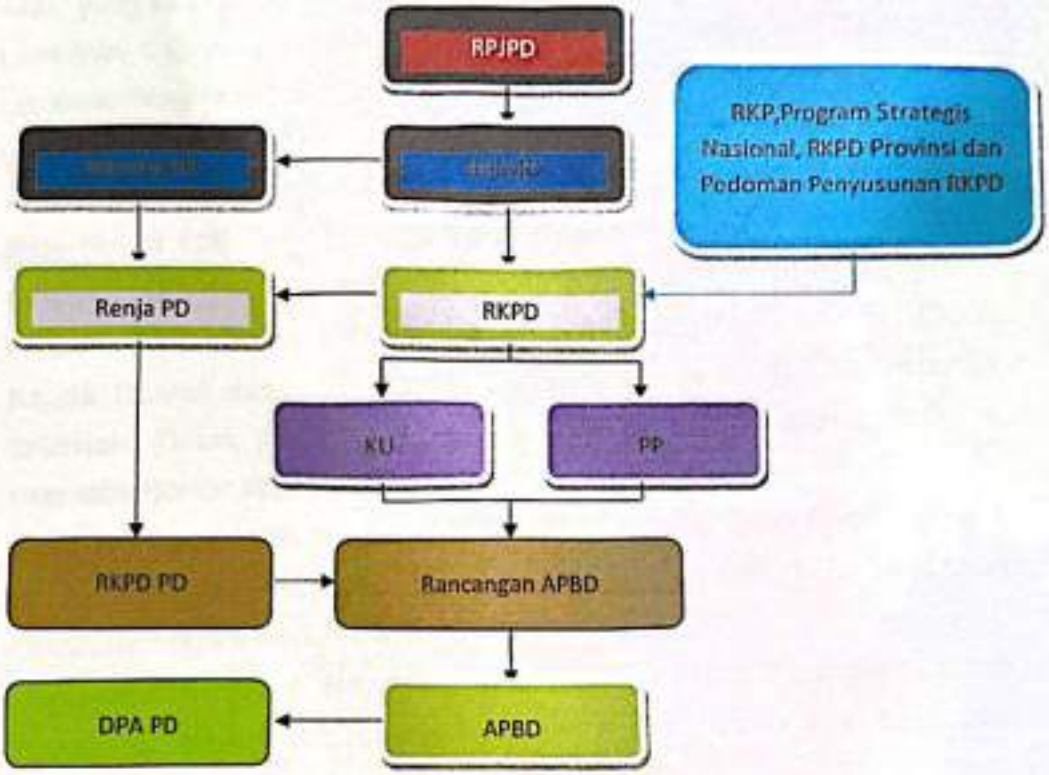
Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan yakni : (1). Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, (2). Penyusunan Rancangan Awal renja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan, (3). Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Kepala tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD, (4). Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Form Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukkan dalam rangka penajaman target kinerja

Dipindai dengan CamScanner

sasaran,program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran, (5). Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD dan (6). Verfikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD di tetapkan.

Gambar . 1.1

Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



Gambar 1.1 Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) Kecamatan Suli Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor, 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Dipindai dengan CamScanner

Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2025;
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 155 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Luwu;
21. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2025.
22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2025.

Dipindai dengan CamScanner

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Suli tahun 2025 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Luwu di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Suli Kabupaten Luwu tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan Kecamatan Suli dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Suli dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu;
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Suli tahun 2025;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) Kecamatan Suli Tahun 2025;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Suli Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Tahun 2025sebagai berikut :

A. BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan rancana Renja yang terdiri dari :

1.1 *Latar Belakang,* menjelaskan secara singkat tentang penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Suli Kabupeten Luwu Tahun 2025.

1.2 *Landasan Hukum,* menguraikan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dalam Negeri, Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

1.3 *Maksud dan Tujuan,* menjelaskan tentang pedoman dan acuan penyusunan Rancana Kerja Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Tahun 2025.

1.4 *Sistematika Penulisan,* adalah Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Suli, serta susunan garis besar isi dokumen

B. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

Dalam bab ini memuat tentang :

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah,* merupakan review dari hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan serta dikaitan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,* menjelaskan dan bagaimana menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja keberhasilan pelayanan Kecamatan Suli sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Suli.

2.3. *Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah,* menguraikan tentang :

1. *Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Suli.*
2. *Permasalahan dan hambatan,* yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Suli.
3. *Dampak,* terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian progam nasional/internasional, sepert NSPK, SPM dan SDGs.
4. *Tantangan dan peluang,* dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.
5. *Formulasi isu-isu penting,* berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dipindai dengan CamScanner

2.4. *Review terhadap Rancangan Awal RKPD,* menguraikan :

1. *Proses membandingkan,* antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. *Menjelaskan alasan,* proses membandingkan dilakukan.
3. *Menjelaskan temuan-temuan,* setelah proses-proses tersebut dan *catatan-catatan penting,* terhadap perbedaan.

2.5. *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,* menguriaikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Luwu yang berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provensi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Luwu.

C. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH.

3.1. *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,* menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkaitdengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. *Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,* menjelaskan apa yang akan dicapai dalam jangka 1(satu) tahun sampai dengan 5(lima) tahun yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Luwu didasarkan pada isu-isu dan analisis yang stratejik dengan hasil capaian yang nyata oleh instansi Pemerintahan.

3.3. *Program dan Kegiatan,* menjelaskan tentang :

1. *Faktor-faktor* yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. *Uraian garis besar* mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. *Penjelasan rumusan* program dan kgiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Dipindai dengan CamScanner

D. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

4.1. *Indikator kinerja*, menjelaskan kegiatan berdasarkan kelompok-kelompok indikator serta evaluasi terhadap rencana kerja sehingga dapat digambarkan pencapaian kegiatan-kegiatannya.

4.2. *Dana Indikatif, adalah* besaran biaya untuk membiayai rencana program dan kegatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

4.3. *Sumber Dana*, menjelaskan tentang sumber dana penggunaan anggaran program dan kegiatanKecamatan Suli Kabupaten Luwu Tahun 2025 yang akan digunakan.

E. BAB V PENUTUP.

Bab Ini Menjelaskan Tentang Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian Didalam Pelaksanaan Renja Dan Rencana Tindaklanjutnya.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SULI TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi,review terhadap rancangan awal RKPD.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Suli Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Suli Tahun 2024 terhadap capaian renstra Kecamatan Suli Tahun 2020-2025, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi sampai dengan tahun 2023 terhadap target tahun 2025dan target akhir Renstra tahun 2020- 2025. Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Suli Tahun 2020-2025 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra Kecamatan Suli.

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
   - PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan
   - PelaksanaanPenatausahaandanPengujian/ VerifikasiKeuangan SKPD
3. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
   - PengadaanPakaian Dinas besertaAtributKelengkapannya

Dipindai dengan CamScanner

5. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan/Material
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD

6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
   - Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

C. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**

Dipindai dengan CamScanner

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Program-program yang ditetapkan telah mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Realisasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun 2024, tertera pada table II.1.

TABEL II.1
PERKIRAAN REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SULI

NO.		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp..)	REALISASI ANGGARAN (Rp..)	REALISASI ANGGARAN (%)%
1		2	3	4	5
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**1.648.668.163**	**864.969.115**	**52.46 %**
	1	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0%**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0%
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.473.578.063**	**802.501.028**	**54,46%**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.431.218.063	788.381.028	55.08%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	42,360.000	14.120.000	33.33%
	3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.050.000**	**2.000.000**	**33.06%**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.050,000	2.000.000	33.06%
	4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0%**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	0	0	0%
	5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**58.243.001**	**18.505.400**	**31.77%**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.075.800	0	0%
		Penyediaan Bahan /Material	8.304.201	4.044.000	48.70 %
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,050.000	0	0%

Dipindai dengan CamScanner

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.813.000	14.461.400	39.28%
	6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**97,964.850**	**35.254.887**	**35.99%**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,050.000	2.500.000	20.75 %
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.714.850	7.754.887	41.44%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.200.000	25.000.000	37.20%
	7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**12.832.249**	**6.707.800**	**52.27%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.796.300	3.822.600	39.02%
		Pemeliaraan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	810.000	660.000	81.48%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.225.949	2.225.200	99.97 %
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**7.550.000**	**7.550.000**	**100%**
	1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**7.550.000**	**7.550.000**	**100%**
		Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.550.000	7.550.000	100%
3		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**58.990.000**	**0**	**0 %**
	1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**58.990.000**	**0**	**0%**
		Pelaksanaan Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan	58.990.000	0	0 %
4		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**363,399,771**	**145.877.157**	**40.14%**
	1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**363,399,771**	**145.877.157**	**40.14%**
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	**363,399,771**	**145.877.157**	**40.14%**
		Jumlah	**2.078.607.934**	**1.018.396.272**	**48.99 %**

Dipindai dengan CamScanner

Tabel II. 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Suli dan Pencapaian Renstra Kecamatan Suli s/d Tahun 2025
Kabupaten Luwu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (N-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah (n-2)2023	Realisasi Renja (n-2)2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
					Urusan Kewilayahan		5.871,110.935		1.901.566.052	1.671.420.137	97%	1.715.208.163	872.519.115	50.87 %
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		1,734,721,931	1.355.329.000	1.502.614.652	1.634.464.675	98.4 %	1.646.668.163	664.969.115	52.46 %
7	1	1	2.01		Perencanaan, Pengelolaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4,500,900	0	0	0	0%	0	0	0%
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	1,130,900	0	0	0	0%	0	0	0%
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD Yang Disusun	494.000	0	-	0	0%	0	0	0%
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	436.000	0	-	0	0%	0	0	0%
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD Yang Disusun	436.000	0	-	0	0%	0	0	0%

Dipindai dengan CamScanner

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (N-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah (n-2)2023	Realisasi Renja (n-2)2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	1	2.02		**Administrasi Keuangan**		**1,504,070,744**	**1,306,962,628**	**1.340.495.385**	**1.336.618.863**	**99.71%**	1.473.578.063	**802.601.028**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg diberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	1,464,163,744	1,170,722,628	1.298.255.385	1.294.378.863	99.70%	1.431.218.063	778.381.028	66.08%
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji / Verifikasi Keuangan SKPD	penatausahaan dan penguji/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	47,160,000	36.240.000	42.240.000	42.240.000	100%	42.360.000	14.120.000	33,33%
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1,076,000	0	0	0	0 %	0	0	0 %
7	1	1	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah**		**6,000,000**	**6,140,400**	**6.070.200**	**6.070.200**	**100%**	**6,050.000**	**2.000.000**	**33,06 %**
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6,000,000	6,140,400	6.070.200	6.070.200	100%	6,050.000	**2.000.000**	**33,06 %**
7	1	1	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**58,625,000**	**0**	0	0	0	0	-	0%
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Pelatihan Formal	42,125,000	0	0	0	0	0	-	0%
7	1	1	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat daerah**		**81,549,863**	**49,725,713**	**78.993.247**	**62.869.868**	**79.34%**	**58.243.001**	**18.806.400**	**31,77 %**

Dipindai dengan CamScanner

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (N-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah (n-2)2023	Realisasi Renja (n-2)2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	1	2.06	1	Penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangan / bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	384.000	0	133.400	0	0	0	0	0%
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8.900.000	0	3.300.000	3.300.000	100%	0	0	0 %
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan RumahTangga Kantor yang disediakan	192.000	0	0	0	0%	0	0	0%
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	3.185.350	0	0	0	0%	0	0	0 %
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	4.675.000	0	593.100	581.000	0%	1.075.000	0	0%
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	1.380.000	0	0	0	0&	0	0	0 %
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Jenis Material yang disediakan	16.885.300	17.288.540	20.211.547	15.306.600	97,6 %	8.304.201	4.044.000	48,70 %
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungantamu yang difasilitasi	5.000.000	6.020.000	14.470.200	11.190.200	73,33%	12.050.00	0	0 %

Dipindai dengan CamScanner

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (N-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah (n-2)2023	Realisasi Renja (n-2)2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	40.940.000	26,417,173	40.272.000	35.561.965	88.35%	36.613.000	14.461.400	39.28 %
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**		**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor Lainnya	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah**		**117.800.000**	**89.850.625**	**86.036.420**	**83.677.450**	96.74%	**97.964.550**	**35.254.937**	**35,96 %**
7	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yg diregistrasi	12.000.000	12,140,400	12,070,200	12,140,400	100 %	12,050,000	2,500,000	20.75 %
7	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Biaya Tagihan Air dan Listrik	24.000.000	15,340,125	17,599,220	14.407.250	82.02%	19.714.650	7.754.687	41,44 %
7	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Umum yang Disediakan	81.600.000	62.400.000	67.200.000	67.200.000	100%	67.200.000	25.000.000	32,50 %
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**22.456.857**	**2,818,740**	**9.632.600**	**5.430.200**	**56.46%**	**12.832.249**	**6.797.800**	**52,27 %**
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yg Disediakan	15.329.900	1,538,740	8.472.600	4.726.200	55.81 %	9.796.300	3.822.600	39.02 %
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	4.750.000	1.080.000	1.160.000	710.000	55.81%	810.000	660.000	81.48%

Dipindai dengan CamScanner

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (N-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah (N-2)2023	Realisasi Renja (N-2)2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Lainnya	dipelihara								
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	2.375.737	0	0	0	0	2.225.949	2.225.200	99.97 %
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10,140,400	6,075,000	8,140,400	8,140,000	100 %	7.550.000	7.550.000	100 %
7	1	2	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan		10,140,400	6,075,000	8,140,400	8,140,000	100%	7.550.000	7.550.000	100 %
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tingkat	Jumlah pelaksanaan koordinasi sinergi pemerintahan	10,140,400	6,075,000	8,140,400	8,140,000	100%	7.550.000	7.550.000	100 %
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		3,920,833,834	531,831,174	363.399.800	360.815.459	99.29 %	363,399,771	145.877.157	40.14 %
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		14,690,000	0	0	0	0	0	-	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan diwilayah kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	14.690.000	0	0	0	0%	0	-	0%
7	1	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		3,906,243,834	531,831,174	534,399,310	360.815.459	99.29%	363,399,771	145.877.157	40.14%

Dipindai dengan CamScanner

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (N-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah (n-2)2023	Realisasi Renja (n-2)2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	3	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilakukan pemberdayaan	2,138,640,102	383,640,974	383,399,800	360,816,459	99.29%	383,399,771	145,877,187	40.14%
7	1	3	2.02	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RENSTRA	148,264,200	0	0	0	0	0	0	0
7	1	3	4		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9,690,000	0	0	0	0	0	58,990,000	0	0
7	1	3	4		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9,690,000	0	0	0	0	0	58 990 000	0	0
7	1	3	2.22	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kelurahan yang dilakukan pemberdayaan	9,690,000	0	0	0	0	58 990 000	0	0

Dipindai dengan CamScanner

Meskipun kegiatan-kegiatan yang ditetapkan telah mencapai target sesuai dengan yang direncanakan namun ada 3 (tiga) masalah pokok yang perlu ditingkatkan agar kinerja pelayanan Aparat Kecamatan dapat lebih dimaksimalkan serta pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Masalah tersebut adalah :

- Gedung kantor serta fasilitasnya (Printer, computer, dan kursi) tidak mencukupi.
- Dana untuk peningkatan mutu aparat (pelatihan) tidak mencukupi.
- Dana operasional untuk kegiatan Rehabilitasi Kantor dan Suku Cadang Kendaraan yang masih sangat rendah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Suli

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Kinerja Pelayanan Kecamatan Suli adalah hasil dari program/ kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan sumber daya pembangunan yang ada di Kecamatan Suli.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2016 bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat. Menurut Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2016 bahwa Camat mempunyai tugas pokok memimpin Kecamatan dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan dan Perekonomian, pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Suli di Bidang Pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Umum Kabupaten Luwu. Serta memfasilitasi keperluan panitia pemilihan Kepala Desa dalam pendanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dipindai dengan CamScanner

b. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak dan retribusi lainnya yang ada di wilayah Kecamatan.
c. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa.
d. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pengordinasian penataan desa melalui penyusunan peraturan desa.
e. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi aset daerah atau kekayaan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Suli.
f. Memfasilitasi penyelesaian masalah sengketa tanah milik pemerintah dan daerah, namun karena tanah di Kecamatan Suli merupakan tanah adat maka penyelesaian sengketa tanah biasanya kembali diserahkan penyelesaiannya ke pemangku adat.

2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Suli di Bidang Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :

a. Memfasilitasi kerukunan hidup antar umat beragama.
b. Melaksanakan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundangan lainnya.
c. Menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah perseorangan atu kelompok
d. Memberikan rekomendasi izin keramaian dan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman.
e. Memberikan rekomendasi dan pengawasan operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan.
f. Berkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan kepolisian, tentara, pamong praja dan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama.

3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Suli diBidang Pembangunandan Perekonomian adalah sebagai berikut :

a. Melakukan penyelenggaraan lomba atau penilaian tingkat desa di Kecamatan.
b. Berkoordinasi penyelenggaraan pembangunan swadaya masyarakat.
c. Memfasilitasi kegiatan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Suli di Bidang Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

a. Memfasilitasi kegiatan UPTD yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
b. Pengelolaan administrasi kependudukan (KTP,Akte Kelahiran, Surat Nikah, dll)
c. Pengordinasian dan memfasilitasi program RASKIN, bedah rumah, pengurusan Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin.
d. Pengordinasian dan pengarahan BUMDesa lingkup Kecamatan.

5. Kinerja Pelayanan Kecamatan Suli di Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bidang pendidikan, generasi muda,olahraga, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.
b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi dan masalah sosial.

2.2.1Capaian Kinerja Pelayanan

Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Suli dalam tupoksi Pelayanan kepada Masyarakat sesuai tupoksi masing-masing bidang. Sedangkan Capaian Kinerja dalam hal pendanaan sesuai data yang terlampir.

Dipindai dengan CamScanner

TABEL II.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian %			Proyeksi %		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Nilai SAKIP			CC	Baik	B	B	BB	n.a	Baik	B	B	BB	
2.	Nilai IKM atas Layanan Kecamatan			n.a	Baik	Baik	Baik	Baik	n.a	Baik	Baik	Baik	Baik	
3.	Cakupan Penyelenggaraan atas Tupoksi Kecamatan			n.a	100%	100%	100%	100%	n.a	100%	100%	100%	100%	
4.	Target Partisipasi Masyarakat dalam Kegatan Perencanaan Pembangunan			n.a	100%	100%	100%	100%	n.a	100%	100%	100%	100%	
5.	Persentase Konflik Sengketa yang diselesaikan di Tingkat Kecamatan			n.a	100%	100%	100%	100%	n.a	100%	100%	100%	100%	

Dipindai dengan CamScanner

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Suli

Dalam kedudukan dan fungsinya Pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting. Keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat di tunjang oleh keberadaan Pemerintah Kecamatan.Untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Pelayanan Pemerintah Kecamatan atas kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang sering kali menghadapi permasalahan. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Suli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tugas dan Fungsi Pelayanan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan perekonomian, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Aparat pemerintahan Kecamatan Suli belum memiliki kemampuan IPTEK yang memadai untuk mengikuti perkembangan sistem Informasi pelaporan baik keuangan dan pelaporan bidang lainnya. Sehingga perlu adanya pelatihan dan bimbingan khusus.
b. Belum adanya administrasi data yang baik akibat pengumpulan data dari desa-desa masih sangat sulit. Belum adanya kesadaran dari para kepala desa untuk menyerakan data desanya secara rutin ke kecamatan .
c. Masih belum maksimalnya pengetahuan masyarakat sehingga masih sangat dibutuhkan penyuluhan baik dibidang pertanian, kesehatan dan berbagai bidang agar dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya keikutsertaannya dalam pembangunan.

Dampak permasalahan yang terkait tugas pokok dan fungsi Kecamatan Suli terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati Luwu adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

a. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia Kecamatan Suli baik aparat dan masyarakat dengan peningkatan kapasitas dan kemampuanya dalam IPTEK dan pengetahuan umum lainya yang berguna untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang stabil. Sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam masyarakat.
b. Mengadakan koordinasi yang baik dengan berbagai sektor yang ada dalam wilayah Kecamatan Suli dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya masyarakat dalam hal peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pemenuhan pendidikan dasar masyarakat, serta perbaikan perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, *meningkatkan kondisi yang kondusif serta menjaga keamanan dan* **ketentraman masyarakat.**
c. Meningkatkan kemandirian pengelolaan Kecamatan Suli dengan mengutamakan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam dan buatan dengan kemampuan masyarakat Kecamatan sendiri.
d. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat Kecamatan Suli dalam ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing di Kecamatan pasti ada tantangan dan peluang. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Suli dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapaaparat yang ada di Kecamatan Suli belum memiliki kemampuan IPTEK yang baik sehingga masih perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan.
2. Partisipasi masyarakat atas pelaksanaan pembangunan mulai menurun. Terutama terlihat dari partisipasinya bergotong royong. Karena sekarang jika melakukan kegiatan selalu ada nilai uangnya. Sehingga masyarakat selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bersikap mandiri.
3. Sarana dan Prasarana Kantor yang masih minim sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. Sedangkan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang murah, akuntabel, cepat dan tanpa komplain.

Dipindai dengan CamScanner

Peluang Pengembangan dalam pelaksanaan Pelayanan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan (Good Governance) atau Pemerintahan yang baik maka ada peluang bagi ASN tingkat Kecamatan Suli dalam peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dan juga pengembangan karier melalui pendidikan formal misalnya penambahan ilmu melalui sekolah formal yang lebih tinggi lagi tingkatannya.
2. Peluang untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menambah aksesibilitas Pelayanan Masyarakat yang lebih efektif dan efisien.
3. Mudahnya akses informasi melalui internet dan media sosial lainya sehingga dapat mempercepat pengembangan pembangunan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat secara umum. Serta mempercepat mendapatkan informasi terjadinya bencana alam dan upaya penanggulangannya.
4. Perlu adanya penambahan pengetahuan masyarakat dengan pengadaan buku-buku pengetahuan dan perpustakaan keliling sehingga menambah pengetahuan masyarakat dalam mengelola usahanya baik bercocok tanam ataupun usaha peternakan dan perkebunan lainnya.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Daerah dimasa yang akan datang.

Isu- Isu strategis di Kecamatan Suli adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat menginginkan pelayanan administrasi kependudukan yang dekat dengan masyarakat, murah, mudah dan cepat. Karena jika dilaksanakan di Kabupaten jauh, biaya transportasi mahal, sangat sulit bagi mereka yang tidak memiliki sarana transportasi karena harus naik ojek yang biayanya mahal dan waktu pembuatannya yang lama. Apalagi jika jaringan internet tidak baik di Kabupaten dari Pusat mereka harus kembali lagi lain waktu, ini akan menyita waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit sementara

Dipindai dengan CamScanner

sebenarnya untuk administrasi kependudukan sudah di gratiskan oleh pemerintah.

b. Adanya sarana wisata berupa air terjun dan panorama alam yang indah belum dikelola secara maksimal oleh masyarakat dan pemerintah. Sebenarnya jika ini dimanfaatkan secara maksimal akan dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat dan meningkatkan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan penebangan pohon di hutan. Mereka membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian, namun seringkali tidak memperhitungkan akibat-akibat yang bisa timbul akibat ulah mereka sendiri. Seringkali akibat ini sudah menjadi hilang kesuburannya bahkan seringkali ini menimbulkan tanah longsor, karena yang mereka gunakan adalah lahan yang rawan longsor.
d. Belum adanya rambu-rambu yang membantu masyarakat untuk tertib berlalu lintas di jalan dan sebagai pengaman berlalu lintas.
e. Belum adanya juga tanda-tanda batas desa yang akurat sehingga sering menjadi permasalahan antar desa dan antar kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil Analisis Kebutuhan di Kecamatan Suli pada Tahun 2025. Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2025 maka beberapa program yang ada dalam Rancangan Awal RKPD mengalami perubahan Nomenklatur. Adapun Rincian Review Rancangan Awal ini dapat dilihat dalam Tabel II. 5 seperti yang terlampir di bawah ini :

Dipindai dengan CamScanner

TABEL II. 4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Luwu

Kecamatan Suli

No		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Luwu**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**100%**	**1.842.838.874**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu**	**Kab. Luwu**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**100%**	**1.774.094.449**	**Pagu anggaran di Kecamatan kurangsehingga ada pengurangan anggaran tiap kegiatan**
1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100%	508.540	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100%	508.540	Pagu anggaran di Kecamatan kurang sehingga ada pengurangan anggaran tiap kegiatan
1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan sesuaistatutawaktu	100%	1.467.556.874	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100%	1.473.432.964	Pagu anggaran di Kecamatan kurang sehingga ada pengurangan anggaran tiap kegiatan
1	2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	6.020.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	6.020.000	Banyak perelatan kantor yang rusak dan harus diperbaiki
1	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Cakupan pemenuhan Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	11.680.000	Administrasi kepegawaianPerangkat Daerah	Kab. Luwu	Cakupan pemenuhan Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	11.680.000	Pagu anggaran di Kecamatan kurang sehingga ada pengurangan anggaran tiap kegiatan
1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	59.358.565	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	73.075.000	Pagu anggaran di Kecamatan kurang sehingga ada pengurangan anggaran tiap kegiatan
1	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	90.790.203	Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	98.694.915	Pagu anggaran di Kecamatan kurang sehingga ada pengurangan anggaran tiap kegiatan

Dipindai dengan CamScanner

1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	100%	6 482 692	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Luwu	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	100%	7.235.000	Pagu anggaran di Kecamatan kurang sehingga ada pengurangan anggaran tap kegatan
1	**2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**100%**	**7.660.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PelayanaPublik**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiata npemerintahan di tingkat kecamatan**	**100%**	**7.660.000**	**Pagu untuk Kegiatan tersebut belum tercukupi**
1	2.0 1	Koordinasi Sinerg Perencanaan dan Pelaksanaan Kegatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertigi Tekait	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	7.560.000	Koordinasi/ SinergPerencanaan dan Pelaksanaan Kegatan Pemerintahan dengan/Perangkat Daerah dan Instansi Vertigi Tekait	Kab Luwu	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	7.560.000	Pagu anggaran di Kecamatan kurang sehingga ada pengurang anggaran tap kegatan
1	**2.0 6**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan peuyanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan**	**100%**	**59.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Luwu**	**Cakupan Koordinasi Ketarestraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	59 000 000	**Pagu untuk Kegiatan tersebut belum tercukupi**
	2.0 2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Lainnya Penugasan Kepala Daerah	Kab. Luwu		100%	59 000 000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab Luwu	Cakupan Kegatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	59 000 000-	**Pagu untuk Kegiatan tersebut belum tercukupi**
1	**2**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Luwu**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 %**	**363,399,800**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kab Luwu**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakanKecamatandal emrangkaPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**363,399,800**	**Pagu untuk Kegiatan tersebut belum tercukupi**
1	2.0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Luwu	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Forum Musyawarah di Kelurahan	1 Kelurahan	363.399.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab Luwu	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Forum Musyawarah di Kelurahan	1 Kelurahan	363.399.800	**Pagu untuk Kegiatan tersebut belum tercukupi**

Dipindai dengan CamScanner

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses perencanaan di Kecamatan Suli yang di sampaikan oleh masyarakat dalam Forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan Suli dan Musrenbang Kabupaten Luwu. Adapun penyampaiannya ini disampaikan oleh masyarakat melalui Pemangku Kepentingan baik Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita serta para Kepala Desa dan Kepala Sekolah juga oleh Kepala Kantor yang ada di Wilayah Kecamatan Suli sesuai dengan kebutuhan yang amat mendesak di Kecamatan Suli.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel II.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Luwu

Kecamatan Suli

No	Kegiatan	Lokasi Desa	Volume	Keterangan	
				Kesesuaiande ngan Prioritas Daerah Ke	Status Usula n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENGASPALAN JALAN DALAM DESA	Desa Padang Lambe	3 KM	1	
2	Peningkatan/Perkerasan Jalan Tani	Dusun Lempopacci	1500 M	2	
3	Pembangunan JembatanGantung	Dusun Tirowali	1 Unit	3	
4	Pembangunan Rabat Beton	Ruas Jalan A. Tadde Lingk. Suli Kota-Lingk. Tangkalasi Kel. Suli, Kab. Luwu	2 Km	4	
5	Pengaspalan Jalan	Desa Kasiwiang	3 Km	5	
6	Pekerjaan Galian/Penormalan Sungai	Sepanjangsungaisuli Kelurahan Suli, Kab. Luwu	5 KM	6	
7	Peningkatan/Perkerasan Jalan	Dusun BuntuSiapa	300 M	7	
8	Pembangunan JembatanPenyebrangan	Dusun BuntuSiapa	1 Unit	8	
9	Pengaspalan Ruas No. 28 Jalan Cimpu - Muara Utara	Desa Cimpu Utara	200 M	9	
10	Pembangunan Jalan Tani	Desa Botta	1,5 Km	10	
11	RehabilitasiJembatan	Dusun Buntu Tanah	1 Unit	11	
12	Pembangunan Rabat Beton	Dusun Tirowali	1,5 Km	12	
13	Pembangunan Rabat Beton	Dusun Papakaju p- Buntu Makki	1,5 Km	13	
14	Pembangunan Rabat beton Jl. Lapangan Merdeka	Dsn . Murante	750 Meter	14	
15	Pembangunan Bronjong	Dusun Tondo Tangnga	200M	15	
16	Rehab Poskesdes	Dusun BuntuKunyi	1 Unit	16	
17	Pembangunan Pagar Pustu	Desa Kasiwiang	30 M	17	
18	Pembangunan Bronjong	Desa Malela	2 Km	18	
19	PengadaanLampujalan	Semua Dusun	50 Buah	19	
20	Bantuan Rumah Layak Huni	Semua Dusun	20 Buah	20	
21	Rehab Pustu	Dusun Cakkeawo	1 Unit	21	
22	Pembangunan Pintu Gerbang Desa	Dusun Salugalote	1 Unit	22	
23	Pembangunan SaluranIrigasiTersier	Dusun Siapa	500M	23	
24	Pembangunan Pagar SDN 365 papakaju	Desa papakaju	270 m	24	
25	Pembangunan pintupembagian air di persawahan	Lingk. Lempokasi Kel. Suli, Kab. Luwu	1 Unit	25	
26	PenimbunanLapanganSepak Bola	Dusun Lempopaci	1 Ls	26	
27	BantuanTernak Ayam dan Pakan	Desa Murante	1	27	

Dipindai dengan CamScanner

			KelompokPet ernak		
28	DRAINASE/TALUD JALAN	Dusun Pandoso	1 KM	28	
29	Pembangunan Poskesdes	Desa papakaju	500 M	29	
30	PengadaanSapiKelompok	Desa Tawondu	5 Klp	30	
31	Pengaspalan Jalan	Dusun Buntu Tanah	1 Km	31	
32	Jembatan Beton	3 Dusun	3 Buah	32	
33	Pembangunan Sanggar Tani & Tani Nelayan	Semua Dusun	4 Buah	33	
34	Pengaspalan Jalan	Desa Malola	2 Km	34	
35	Rehab Pustu	Desa Kasiwiang	1 Unit	35	
36	RehabilitasiPerbaikanDrainase	Dusun Tondo Tangnga	300 M	36	
37	Rehab Taman Kanak-kanak	Dusun BuntuKunyi	1 Unit	37	
38	Penambahan Kamar Pustu	Desa Kasiwiang	1 Unit	38	
39	Pembangunan SaluranPembuang	Dusun Malela	1 Km	39	
40	RehabilitasiPerbaikanDrainase	Dusun Lagoari	300 M	40	
41	Rehab Rumah	Semua Dusun	50 Buah	41	
42	Rabat Beton	Desa Botta	2 Km	42	
43	Pengkerikilan Jalan	Dusun Tawondu	2 Km	43	
44	Pembangunan Dam Parit	Dusun Siapa, Dusun Lempopacci, Dusun Karoang	4 Unit	44	
45	Penerangan Jalan	Desa papakaju	71 Buah	45	
46	RABAT BETON	Desa Padang Lambe	1 KM	46	
47	Pembangunan GerbangKewenanganKabupaten	Dsn, Murante	1 Unit	47	
48	Pembangunan JaringanIrigasiTersierPersawahan	Lingk. Lempokasi Kel. Suli, Kab. Luwu	500 m	48	
49	Peningkatan Jalan Tani (Talud)	Dsn. Larandu	3 Km	49	
50	TALUD/BRONJONG SUNGAI	Dusun Pandoso	500 M	50	
51	Pembangunan talud Jalan	Desa papakaju	350 m	51	
52	RehabilitasiPerbaikanDrainase	Dusun Siapa,	400 M	52	

Usulan dan program yang diajukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan, tidakada yang masukdalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Suli, hal ini disebabkan karena keterbatasan Alokasi Dana di Kecamatan. Program dan kegiatan tersebut Sebagian dilaksanakan melalui Dana Desa dan pada umumnya ditujukanke OPD yang ada di Kabupaten Luwu.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengandung penjelasan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan, sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Suli guna menunjang Pembangunan Kabupaten Luwu secara Keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan Iklim usaha;
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
9. Kebudayaan;
10. Kreativitas dan inovasi;
11. Politik, hukum dan keamanan dan ketertiban;
12. Perekonomian;
13. Kesejahteraan rakyat.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Luwu sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Kecamatan Suli sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Luwu memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan, Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagai pelaksana teknis

Dipindai dengan CamScanner

kewilayahan Pemerintahan Kecamatan, Kecamatan Suli memiliki ruang lingkup tugas : melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi- instansidi wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Suli di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Suli yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Suli telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan jangka waktu 1 (satu) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh daripencapaian hasil (outcome) program perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Suli sama dengan tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Suli hanya saja waktu yang akan dicapai oleh renja terbatas hanya untuk setahun sedangkan untuk renstra selama lima tahunan. Untuk persentase ketercapaian renja dihitung dalam persentase keberhasilan tercapainya program kegiatan dalam setahun sedangkan renstra dalam lima tahun kedepan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahankecamatan

Sedangkan **sasaran** yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kapasitas Dan Kapabilitas Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Suli selama lima tahun ke depan sejak tahun 2025 hingga 2026 tertuang dalam Renstra Kecamatan Suli Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

I. **Belanja Langsung** yang terdiri dari :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator Program atau kegiatan yaitu: Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu

Dengan rincian Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan PenyusunanDokumenPerubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan PenyusunanDokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan PenyusunanDokumenPerubahan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Indikator Program atau kegiatan yaitu : Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu

Dengan rincian Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan

3. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Indikator Program atau kegiatan yaitu : CakupanpenyelenggaraanAdministrasi Barang Milik Daerah pada SKPD.

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Dipindai dengan CamScanner

4. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   - Pendidikan dan PelatihanPegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. **AdministrasiUmum Perangkat Daerah**
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Penyediaan Bahan/ Material
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. **Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah**
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya

Dipindai dengan CamScanner

B. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Program/ Kegiatan yaitu : Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkatkecamatan.

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait.

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Indikator Program/ Kegiatan yaitu : Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.

Tabel III.1

Tujuan dan sasaran jangka menegah Kecamatan Suli Kabupaten Luwu , Tahun 2025-2026

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Baik dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	CC	Baik	B	BB	BB
		Indeks Kepuasaan Masyarakat dan Pelayanan Kecamatan	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Kecamatan	Cakupan Pelayanan Tugas Dan Fungsi Kecamatan.	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

Dipindai dengan CamScanner

Tabel III.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN LUWU
KECAMATAN SULI

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN SULI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN SULI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					KECAMATAN SULI								1.709.100.874,00					1.714.555.617,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.709.100.874,00					1.714.555.617,00
7	01				KECAMATAN								1.709.100.874,00					1.714.555.617,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.643.655.574,00					1.647.991.617,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0,00					508.542,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	261.770,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	JumlahLaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	- Kab. Luwu, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	261.770,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.467.557.008,00					1.467.558.874,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

Dipindai dengan CamScanner

							Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	16 Orang/ bulan	100 Persen	1.425.157.006,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang /bulan	1.425.198.874,00
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	42.360.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasikeuangan SKPD	12 Dokumen	42.360.000,00
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								6.020.600,00					6.020.300,00
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								6.022.950,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		JumlahLaporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.022.300,00
							Cakupan ketersediaan penunjang pelaksana an urusan pemerintahan daerah	JumlahLaporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	100 Persen						0,00
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0,00					0,00
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	0,00
							Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase ASN dengan Predikat Kinerja baik	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	20 Paket	100 Persen						0,00
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		JumlahPegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0,00
							Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN dengan Predikat Kinerja baik	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Orang	100 Persen						33.073.000,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								56.227.219,00					
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor													

Dipindai dengan CamScanner

							Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Paket	100 Persen	332.884,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0.00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahand aerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Paket	100 Persen	8.625461,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Paket	100 Persen	9.250.800,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.075.000,00
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0.00
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	5 Paket	100 Persen	8.902.413,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	5 Paket	10.000.000,00
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	10.042.126,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000,00

Dipindai dengan CamScanner

						daerah													
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	20 Laporan	100 Persen	28.389.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	40.000.000,00
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0,00					0,00
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disiakan	- Kab. Luwu, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Unit	3 Jenis	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							101.114.320,00					91.070.203,00
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.300.000,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	18.314.325,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.570.203,00
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	87.800.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	67.200.000,00

Dipindai dengan CamScanner

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							12.736.374,00					9.675.000,00
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	7 Unit	3 Jenis	11.611.074,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7.000.000,00
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	10 Unit	3 Jenis	730.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	765.000,00
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya												
							Cakupanketersediaanpenunjangpelaksanaanurusanpemerintahandaerah	Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjangurusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Unit	3 Jenis	395.300,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor ataubangunanLainnya												
							Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahandaerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor ataubangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Yang dipelihara	- Kab. Luwu, SemuaKecamatan, Semua Kel/ Desa - Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Unit	3 Jenis	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	0,00
	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							6.541.300,00					7.550.000,00
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							6.541.300,00					7.550.000,00
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												

Dipindai dengan CamScanner

							Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Layanan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupa npenyelengganaan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	1 Kali	6.541.300,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Layanan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	7.350.000,00
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								59.000.000					59.000.000
7	01	05	2.05			Penyelenggaraan Urusan Penyelengganaan Pemerintahan Umum Sesuai Penugatan Kepala Daerah								59.000.000					59.000.000
7	01	05	2.05	000	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
							Cakupan Penyelenggaraan , Pelayanan, Pemberdayaan dan Pembangunan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan	Persentase Terkoncam Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	- Kab. Luwu, Suli, Semua Kel/Desa	100 Persen	59.000.000,00	1 Kali	59.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan	1 Laporan	59.000.000,00
													TOTAL	1.709.196.874,00					1.714.555.617,00

Dipindai dengan CamScanner

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Luwu

Tahun2025

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000
KECAMATAN SULI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0001
KELURAHAN SULI

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			RencanaTahun2025						CatatanPenting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					KELURAHAN SULI								363.399.771,00					363.399.800,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								363.399.771,00					363.399.800,00
7	01				KECAMATAN								363.399.771,00					363.399.800,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								363.399.771,00					363.399.800,00
7	01	03	2.02		KegiatanPemberdayaan Kelurahan								363.399.771,00					363.399.800,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Cakupan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang di Fasilitasi dalam Pelaksanaan Forum Musyawarah di Kelurahan	- Kab. Luwu. Sul, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Kelurahan	363.399.771,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	363.399.800,00
												TOTAL	363.399.771,00					363.399.800,00

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Suli pada Tahun 2025 tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Suli Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- **Belanja Operasi** pada Kecamatan Suli sebesar Rp. **1.709.196.874** (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Enam Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan anggaran sebesar Rp. **0**,- (Nol Rupiah).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan anggaran sebesar Rp. **1.467.557.008**,- (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Rupiah).

Indikator Program atau kegiatan yaitu : Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu.

Dengan rincian Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. **1.425.197.006.**,- (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Rupiah).
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD sebesar **42.360.000**, - (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Dipindai dengan CamScanner

c. Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah sebesar Rp. **6.020.650** (Enam Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

Dengan Indikator Kinerja yaitu : Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah.

Dengan Rincian : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp. **6.020.650** (Enam Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. **56.227.219.00,-** (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Dengan Indikator Kinerja yaitu : Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor dandengan anggaran sebesar Rp. **322.884**,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. **3.715.000**,- (TigaJutaTujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. **1.550.000**, -(Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Penyediaan Bahan Material dengan anggaran sebesar Rp.**8.902.413** (Delapan Juta Sembilan Ratus Dua RibuEmpat Ratus Tiga Belas Rupiah)
- Fasilitas Kunjungan Tamu denganAnggaransebesar Rp. **6.445.885**, - (Enam Juta Empat Ratus EmpatPuluh Lima RibuDelapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp.**24.819.500,-** (Dua PuluhEmpat Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Dipindai dengan CamScanner

e. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. **101.114.325,-** (Seratus Satu Juta Seratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Indikator Program dan Kegiatan yaitu : Cakupan Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. **18.314.325,-** (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Rupiah Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- Penyedian Jasa Pelayanan Umum kantor dengan Anggaran sebesar Rp. **62.800.000,-** (Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

f. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah**

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. **12.736.374,-** (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Indikator Program/Kegiatan yaitu : Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. **11.611.074,-** (Sebelas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. **730.000,-** (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. **395.300**, - (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Dipindai dengan CamScanner

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. **6.541.300,-** (Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Indikator Program/ Kegiatan yaitu :Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :

Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait dengan Anggaran sebesar Rp. **6.541.300,-** (Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah).

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. **363.399.800** - (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Delapan Ratus Rupiah).

Indikator Program/ Kegiatan yaitu :Persentase Terlaksananya Cakupan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan Anggaran sebesar Rp. **363.399.800** - (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Delapan Ratus Rupiah).

Berikut Program dan Sub Kegiatan, Indikator, Tujuan, Sasaran dan rencana Perhitungan Renja Kecamatan Suli Kabupaten Luwu tahun 2025 pada Tabel IV.1 yaitu sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel : IV. 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran dan Rencana Perhitungan

Renja Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Tahun 2025

KODE						PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA PERHITUNGAN			JUMLAH	LOKASI	KET
								VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
7	1	21				KECAMATAN					2,060,547,771	Kantor Camat Suli	
7	1	21	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100	%		1,539,662,115	Kantor Camat Suli	
7	1	21	1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100	%		520,885	Kantor Camat Suli	
7	1	21	1	2. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	4	Dok		265,885	Kantor Camat Suli	
7	1	21	1	2. 01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1	Dok		0	Kantor Camat Suli	
7	1	21	1	2. 01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	Dok		0	Kantor Camat Suli	
7	1	21	1	2. 01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	Dok		0	Kantor Camat Suli	

Dipindai dengan CamScanner

7	1	2 1	1	2. 01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	Dok		0	Kantor Camat Suli
7	1	2 1	1	2. 01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan yang disusun	4	Laporan		235,000	Kantor Camat Suli
7	1	2 1	1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100	%		1,359,308,019	Kantor Camat Suli
7	1	2 1	1	2. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	16	OB		1,316,948,019	Kantor Camat Suli
7	1	2 1	1	2. 02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dalam 1 Tahun	12	Laporan		42,360,000	Kantor Camat Suli
7	1	2 1	1	2. 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100	%		6,070,885	Kantor Camat Suli
7	1	2 1	1	2. 03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan		6,070,885	Kantor Camat Suli
7	1	2 1	1	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan Administrasi Kepegawaian Daerah	100	%		12,540,000	Kantor Camat Suli
7	1	2 1	1	2. 05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan	20	Paket		12,540,000	Kantor Camat Suli

Dipindai dengan CamScanner

7	1	2 1	1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	%		45,817,198	Kantor Camat Suli	
7	1	2 1	1	2. 06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan / bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	3	Paket		384,400	Kantor Camat Suli	
7	1	2 1	1	2. 06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam 1 (Satu) Tahun	1	Paket		3,715,000	Kantor Camat Suli	
7	1	2 1	1	2. 06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barangcetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	2	Paket		1,550,000	Kantor Camat Suli	
7	1	2 1	1	2. 06	7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Material Kebutuhankantor yang disediakan Perkantoran dalam 1 (Satu) Tahun	5	paket		8,902,413	Kantor Camat Suli	
7	1	2 1	1	2. 06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12	Laporan		6,445,885	Kantor Camat Suli	
7	1	2 1	1	2. 06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan/ diikuti	20	Laporan		24,819,500	Kantor Camat Suli	
7	1	2 1	1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100	%		98,672,235	Kantor Camat Suli	

Dipindai dengan CamScanner

7	1	21	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diregistrasi	12	Laporan		12,070,885	Kantor Camat Suli	
7	1	21	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Biaya Tagihan Air dan Listrik	12	Laporan		19,401,350	Kantor Camat Suli	
7	1	21	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan		67,200,000	Kantor Camat Suli	
7	1	21	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		7,572,893	Kantor Camat Suli	
7	1	21	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	7	Unit		5,781,100	Kantor Camat Suli	
7	1	21	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	14	Unit		765,000	Kantor Camat Suli	
7	1	21	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Luas bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	1	Unit		1,026,793	Kantor Camat Suli	

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA KECAMATAN SULI | 2025

7	1	2 1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100	%		6,445,885	Kantor Camat Suli	
7	**1**	**2 1**	**2**	**2. 01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**100**	**%**		**6,445,885**	**Kantor Camat Suli**	
7	**1**	**2 1**	**2**	**2. 01**	**2**	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**Jumlah pelaksanaan koordinasi/ sinergi perencanaan**	**1**	**Kegiat an**		**6,445,885**	**Kantor Camat Suli**	
7	1	2 1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%		363,399,771	Kantor Camat Suli	
7	**1**	**2 1**	**3**	**2**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan**	**100**	**%**		**363,399,771**	**Kantor Camat Suli**	
7	**1**	**2 1**	**3**	**2. 01**	**0 1**	**Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Jumlah kelurahan yang dilakukan pemberdayaan**	**1**	**Kelura han**		**363,399,771**	**Kantor Camat Suli**	

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembuatan renja

Rencana Kerja Kecamatan Suli Tahun 2025 adalah Penjabaran dari Rencana Kerja Strategis Kecamatan Suli pada Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Kecamatan Suli Tahun 2025 ini memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Suli pada tahun 2025, dengan plafon anggaran yang telah ditetapkan, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pemerintah Kecamatan sekaligus Pelayan Masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja SKPD yang lain menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya di jabarkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah,dimana dalam pelaksanaannya yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2025 untuk masing-masing SKPD.

Penyusunan Renja Kecamatan Suli ini masih terdapat berbagai kekurangan. Untuk itu masih diperlukan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan dokumen anggaran yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 mendatang.

Suli, Juli 2024

CAMAT SULI,

AGUSSALIM, S. Sos
Pkt. Penata Tk. I
NIP. 19710817 200701 1 032

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025



KECAMATAN LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya,sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Latimojong Tahun 2025 dapat terselesaikan. Penyusunan RENJA ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Latimojong dengan RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

Disamping berfungsi sebagai dokumen pedoman kerja, RENJA diharapkan dapat menjadi acuan visi, misi dan strategi seluruh Aparat Kecamatan Latimojong dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera dalam nuansa religi.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan beserta target yang telah ditetapkan, dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Latimojong.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian RENJA ini, diucapkan terima kasih. Semoga RENJA Kecamatan Latimojong Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan Daerah di seluruh wilayah Kecamatan Latimojong.

Latimojong, 28 Juni 2024

Camat Latimojong

NUR AGAM, S.Ag

Pangkat : Pembina/IV.a

NIP. 196904242006041007

DAFTAR ISI

Teks **Halaman**

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-13
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-22

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Kecamatan Latimojong III-1
3.3. Program dan Kegiatan III-2

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

DAFTAR TABEL

Nomor tabel	Teks	Halaman
Tabel II.1	Perkiraan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 ..	II- 4
Tabel II.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Latimojong dan Pencapaian Renstra Kecamatan Latimojong Sampai dengan Tahun 2024	II - 7
Tabel II.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Latimojong	II - 14
Tabel II.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	II - 17
Tabel II.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	II - 23
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Pendek Kecamatan Latimojong Tahun 2025 sampai dengan 2026	III – 3
Tabel III.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	III – 4
Tabel IV.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran dan dan Rencana Perhitungan Renja Kecamatan Latimojong Tahun 2025	IV - 3

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban Pemerintah adalah menciptakan regulasi pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan Undang-Undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut, dibutuhkan suatu Pemerintah yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh Bangsa dan Negara yaitu norma-norma yang terkandung didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai suatu Pemerintah yang bersih dan berwibawa dibutuhkan suatu Sistim Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabilitas, Transparan dan Taat Hukum.

Pemerintahan di tingkat Kecamatan sebagai ujung tombak dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, menghadapi suatu tugas yang sangat kompleks, sehingga membutuhkan suatu langkah-langkah atau tindakan yang tepat yang diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan atau Rencana Kerja (RENJA) yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2025. Selain memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, RENJA adalah suatu dokumen yang sangat penting karena memuat beberapa hal sebagai berikut :

a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sesuai dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

b. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

c. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Latimojong disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor, 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 155 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Luwu;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 139 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu;
21. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2024;
22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud danTujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Kecamatan Latimojong tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Renja Kecamatan Latimojong Tahun 2025 disusun dengan tujuan :

a. Sebagai dokumen penjabaran RKPD Kabupaten Luwu tahun 2025.

b. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Latimojong Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Latimojong, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bagian Pendahuluan memuat informasi tentang :

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Latimojong, Proses

Penyusunan Renja Kecamatan Latimojong, keterkaitan antara Renja Kecamatan Latimojong dengan dokumen RKPD, Perubahan RENSTRA, Renja Propinsi/Kabupaten serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Latimojong.

- **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bagian yaitu :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Perubahan Renstra Kecamatan Latimojong.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan Latimojong.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Latimojong.

2.4 Rivew terhadap Rancangan Awal RKPD

- **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan Rencana Kerja perangkat Kecamatan Latimojong. Bab ini terdiri dari beberapa sub bagian yaitu :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Latimojong.

3.3 Program dan Kegiatan.

- **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

- **BAB V. PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian didalam pelkasanaan Renja dan rencana tindak lanjutnya..

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN LATIMOJONG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Latimojong Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2024

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Latimojong tahun lalu, dan realisasi Perubahan Renstra Kecamatan Latimojong mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Latimojong dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Latimojong.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

     Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

     - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
     - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

     Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

     Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Barang Milik

Daerah pada Perangkat Daerah adalah :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah :

  - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah :

  - Koordinasi/Sinergi Perencanaandan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

3. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah adalah :

  - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Program-program yang ditetapkan telah mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Realisasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun 2024, tertera pada table II.1.

TABEL II.1

PERKIRAAN REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024
KECAMATAN LATIMOJONG

NO.		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp..)	REALISASI ANGGARAN (Rp..)	REALISASI ANGGARAN (%)
1		2	3	4	5
01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**1,489,876,201**	**565,059,679**	**38%**
	01	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah**	**5,654,000**	**Rp1,187,000**	20,99%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp3,370,000	Rp595,000	17,66%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp571,000	Rp296,000	51,84%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp571,000	Rp0	0%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp571,000	Rp296,000	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp571,000	Rp0	51,84%
	02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp1,328,841,971**	**Rp618,952,157**	46,58%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1,272,893,471	Rp604,489,657	47,49%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp52,817,000	Rp14,117,500	26,73%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp1,536,000	Rp0	0%
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan//triwulan/semesteran SKPD	Rp1,595,000	Rp345,000	21,63%
	03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Rp6,040,000**	**Rp1,500,000**	24,83%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp6,040,000	Rp1,500,000	24,83%
	04	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp9,240,000**	**Rp0**	0%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp9,240,000	Rp0	0%
	05	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp64,480,334**	**Rp26,681,550**	41,38%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp2,695,900	Rp2,695,900	100%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp6,182,500	Rp3,700,000	59,85%

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,200,000	0	0%
		Penyediaan Bahan /Material	Rp9,744,934	Rp5,348,450	54,88%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp8,500,000	Rp0	0%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp36,157,000	Rp14,937,200	41,31%
	06	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp28,263,000**	**Rp14,263,000**	**50,47%**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp28,263,000	**Rp14,263,000**	**50,47%**
	07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp36,000,000**	**Rp9,000,000**	**25%**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp36,000,000	Rp9,000,000	25%
	08	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp11,159,167**	**Rp1,748,100**	**18,96%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp9,217,897	Rp1,748,100	18,96%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp1,050,000	Rp0	0%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp891,270	Rp0	0%
02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Rp8,215,000**	**Rp140,000**	**1,70%**
	01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Rp8,215,000**	**Rp140,000**	**1,70%**
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp8,215,000	Rp140,000	1,70%
03		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Rp59,000,000**	**Rp5,057,500**	**8,57%**
	01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Rp59,000,000**	**Rp5,057,500**	**8,57%**
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp59,000,000	Rp5,057,500	8,57%
		Jumlah	**Rp1,556,893,472**	**Rp678,529,307**	43,58%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja pada tahun 2024, tertera pada table II.2

Tabel II.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
Kecamatan Latimojong dan Pencapaian Renstra Kecamatan Latimojong sampai dengan Tahun 2024
Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu, Kecamatan Latimojong

Perangkat Daerah : Kecamatan Latimojong

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. LATIMOJONG s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. LATIMOJONG TAHUN 2023	REALISASI RENJA KEC. LATIMOJONG TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7						**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**									
7	**01**					**Administrasi Pemerintahan**									
7	**01**	**21**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**		
7	**01**	**21**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100%**	
7	01	21	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	10	6	2	2	100%	2	10	100%
7	01	21	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	5	3	1	1	100%	1	5	100%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. LATIMOJONG s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. LATIMOJONG TAHUN 2023	REALISASI RENJA KEC. LATIMOJONG TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	21	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	5	3	1	1	100%	1	5	100%
7	01	21	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	5	3	1	1	100%	1	5	100%
7	01	21	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	5	3	1	1	100%	1	5	100%
7	**01**	**21**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7	01	21	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	840	504	168	168	100%	168	156	98%
7	01	21	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1(satu) tahun	60	24	12	12	24%	12	60	100%
7	01	21	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5	3	1	1	100%	1	5	100%
7	**01**	**21**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pemenuhan administrasi perkantoran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. LATIMOJONG s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. LATIMOJONG TAHUN 2023	REALISASI RENJA KEC. LATIMOJONG TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	21	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	40	18	13	13	100%	8	39	97%
7	01	21	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	15	7	3	3	100%	3	13	86%
7	01	21	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan Perkantoran dalam 1 (Satu) Tahun	60	36	12	12	100%	12	60	100%
7	01	21	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan Perkantoran dalam 1 (Satu) Tahun	60	36	12	12	100%	12	60	100%
7	01	21	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Jamuan Tamu kantor yang disediakan Perkantoran dalam 1 (Satu) Tahun	20	1	3	3	100%	12	16	80%
7	01	21	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	109	33	36	20	55%	40	93	85%
7	01	21	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. LATIMOJONG s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. LATIMOJONG TAHUN 2023	REALISASI RENJA KEC. LATIMOJONG TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	21	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan dalam 1 Tahun	15	0	2	2	100%	9	10	66%
7	**01**	**21**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	36	12	12	100%	12	60	100%
7	**01**	**21**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	26	13	5	3	60%	6	22	84%
7	01	21	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	11	4	3	0	0%	4	7	64%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. LATIMOJONG s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. LATIMOJONG TAHUN 2023	REALISASI RENJA KEC. LATIMOJONG TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	21	01	2.09	07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	1	0	0	0%	0	1	33%
7	**01**	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan peemrintahan dan pelayanan publik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	**5**	**3**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**5**	**100%**
7	01	21	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. LATIMOJONG s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. LATIMOJONG TAHUN 2023	REALISASI RENJA KEC. LATIMOJONG TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	21	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**6**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**6**	**6**	**100%**

Meskipun kegiatan-kegiatan yang ditetapkan telah mencapai target sesuai dengan yang direncanakan namun ada 3 (tiga) masalah pokok yang perlu ditingkatkan agar kinerja pelayanan Aparat Kecamatan dapat lebih dimaksimalkan serta pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Masalah tersebut adalah :

- Gedung kantor serta fasilitasnya (meja, computer, motor dinas dan kursi) tidak mencukupi.
- Dana untuk peningkatan mutu aparat (pelatihan) tidak mencukupi.
- Dana operasional untuk kegiatan penyuluhan serta monitoring dan evaluasi yang masih sangat rendah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk memudahkan analisis kinerja pelayanan, maka kita menggunakan Indikator Pelayanan pada Tahun Anggaran 2019-2024. Penilaian terhadap indikator didasarkan pada hasil wawancara terhadap masyarakat yang dilayani dan ketersediaan laporan-laporan berupa adminitasi keuangan, LPPD, dan Perubahan RENSTRA. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat Daerah Kecamatan Latimojong, tertera pada tabel II.3.

Tabel II.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Latimojong

Kabupaten Luwu

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian %			Proyeksi %		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Nilai SAKIP			CC	Baik	B	B	BB	n.a	Baik	B	B	BB	
2.	Nilai IKM atas Layanan Kecamatan			n.a	Baik	Baik	Baik	Baik	n.a	Baik	Baik	Baik	Baik	
3.	Cakupan Penyelenggaraan atas Tupoksi Kecamatan			n.a	100%	100%	100%	100%	n.a	100%	100%	100%	100%	
4.	Target Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Perencanaan Pembangunan			n.a	100%	100%	100%	100%	n.a	100%	100%	100%	100%	
5.	Persentase Konflik Sengketa yang diselesaikan di Tingkat Kecamatan			n.a	100%	100%	100%	100%	n.a	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mencapai sinergitas didalam pelaksanaan pembangunan, maka ada 2 (dua) hal yang sangat menentukan yaitu musyawarah perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta konsistensi Pemerintah terhadap hasil keputusan bersama. Keputusan itu menjadi landasan didalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Desa.

Ada beberapa tantangan dan peluang yang kita hadapi didalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan yang nampak didalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Latimojong adalah :

- Kompetensi SDM Aparatur masih rendah sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat sehari hari.
- Kurangnya tingkat kesadaran dan Disiplin Pegawai untuk menunjang Kinerja Pemerintahan.
- Masih kurangnya Sarana dan prasarana untuk menunjang Kinerja Pemerintahan
- Semakin berkurangnya semangat atau budaya gotong royong Masyarakat sehingga sangat menyulitkan didalam penyelesaian suatu permasalahan di Desa/Kelurahan.

Untuk menetralisir masalah tersebut terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Peluang- peluang tersebut adalah :

- Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, merupakan peluang dalam rangka peningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.
- Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan

- Perkembangan teknologi informasi yang membuka peluang bagi masyarakat Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupannya.
- Prioritas Pembangunan Nasional yang mengutamakan pembangunan daerah pinggiran atau daerah pedesaan.

Diantara beberapa tantangan dan hambatan serta peluang, ada beberapa tantangan yang harus sesegera mungkin diantisipasi (isu yang strategis) agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan atau dapat berjalan dengan baik. Isu-isu tersebut adalah :

- Sumberdaya aparatur (kualitas dan kuantitas aparatur) masih rendah, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan tugas, pengawasan pembangunan dan penguasaan teknologi.
- Belum optimalnya peran serta masyarakat didalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Pemerintah serta pembangunan swadaya yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- Masih rendahnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang hukum.

Ketiga permasalahan ini sangat membutuhkan prioritas penyelesaian agar pelayanan kepada masyarakat serta kemampuan Aparat Kecamatan Latimojong di dalam bidang perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dapat ditingkatkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Latimojong

Review terhadap Rancangan Awal merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil Analisis Kebutuhan pada Tahun 2025. Dengan ditetapkannya RPD Kabupaten Luwu tahun 2025-2026 maka beberapa program yang ada dalam Rancangan Awal RKPD mengalami perubahan Nomenklatur. Reviem terhadap Rancangan Awal RKPD pada Tahun Anggaran 2025 tertera pada table II.4.

Tabel II.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kecamatan Latimojong

No		Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
01		**Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Luwu**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**1.528.009.972**	**Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Luwu**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**1.528.009.972**	
	01	**Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**7.191.880**	**Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**7.191.880**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	3.867.880	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	3.867.880	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	831.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	831.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	831.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	831.000	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	831.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	831.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	831.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	831.000	

No		Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**Kab. Luwu**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**1.332.781.071**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**Kab. Luwu**	**Presentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu**	**1.332.781.071**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	1.272.893.471	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	1.272.893.471	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1(satu) tahun	54.119.300	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dalam 1 Tahun	54.119.300	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	3.502.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	3.502.700	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan yang disusun	2.265.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan yang disusun	2.265.600	
	03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD**	**6.619.500**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD**	**6.619.500**	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6.619.500	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu	Laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6.619.500	

No		Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	04	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**74.989.599**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**74.989.599**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.732.783	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.732.783	.
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Luwu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6.454.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Luwu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6.454.600	.
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.200.000	
		Penyediaan Bahan/Material	Kab. Luwu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12.009.216	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Luwu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12.009.216	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.593.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.593.000	
	05	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Luwu**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**27.815.550**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Luwu**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**27.815.550**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27.815.550	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27.815.550	

No		Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	06	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	**Kab. Luwu**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**70.631.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	**Kab. Luwu**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**70.631.000**	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	61.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	61.200.000	
	07	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah.**	**Kab. Luwu**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara**	**8.832.372**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah.**	**Kab. Luwu**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara**	**8.832.372**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4.782.872	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4.782.872	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.840.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.840.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.209.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.209.500	

No		Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Luwu**	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	**8.783.500**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Luwu**	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	**8.783.500**	
	01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kab. Luwu**	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**8.783.500**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kab. Luwu**	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**8.783.500**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.783.500	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.783.500	
03		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Luwu**	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	**20.100.000**	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kab. Luwu**	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	**20.100.000**	
	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Luwu**	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	20.100.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Luwu**	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	20.100.000	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.100.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH				1.556.893.472				1.556.893.472	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penetapan program-program yang akan dilaksanakan didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang dihasilkan melalui kesepakatan di dalam Musrenbang tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Penetapan kegiatan ini didasarkan pada kebutuhan pokok masyarakat dengan mempertimbangkan isu – isu strategis didalam masyarakat. Usulan program dan kegiatan yang direncakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 tertera pada table II.5.

Tabel II.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kecamatan Latimojong

Usulan dan program yang diajukan oleh para Kepala Desa, tidak ada yang masuk dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Latimojong. Hal ini disebabkan karena keterbatasan Alokasi Dana di Kecamatan. Program dan kegiatan tersebut sebagian dilaksanakan melalui Dana Desa dan pada umumnya ditujukan ke OPD yang ada di Kabupaten Luwu.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maka setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Pada tingkat Kabupaten perencanaan tersebut tertuang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang tercipta jika tujuan telah tercapai. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kecamatan Latimojong secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dalam penetapan tujuan dan sasaran kita harus mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dalam suatu organisasi.

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Luwu, dalam menuntukan Tujuan dan Sasaran, Kecamatan Latimojong merujuk pada visi Kabupaten Luwu

yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yaitu ***"KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI".*** Untuk mewujudnya visi tersebut, misi Perubahan RPJMD yang diemban Kecamatan Latimojong adalah misi pertama yaitu *"***Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel".**

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskanlah tujuan RENJA Kecamatan Latimojong Tahun 2024 yaitu :

- Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah :

- Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
- Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Kecamatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2022 strategi, kebijakan dan demi terwujudnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat maka ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan dalan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024. Program – program tersebut adalah :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.456.428.200,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 17.940.000,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Dari 24 (dua puluh empat) sub kegiatan yang tergabung dalam 8 (delapan) kegiatan dan tergabung di dalam 2 (dua) program dibutuhkan dana pembangunan sebesar Rp. 1.474.368.200,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah). Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Latimojong Tahun 2024, tertera pada tabel III.1.

Tabel III.1
Tujuan dan sasaran jangka menegah Kecamatan Latimojong
Kabupaten Luwu , Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun	
			2025	2026
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Baik dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	BB	BB
		Indeks Kepuasaan Masyarakat dan Pelayanan Kecamatan	Sangat Baik	Sangat Baik
	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Kecamatan	Cakupan Pelayanan Tugas Dan Fungsi Kecamatan.	Sangat Baik	Sangat Baik

Tabel III.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LATIMOJONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						KECAMATAN LATIMOJONG				1.556.893.472,00							1.614.333.634,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.556.893.472,00							1.614.333.634,00	
	7	01				KECAMATAN				1.556.893.472,00							1.614.333.634,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.528.009.972,00						100 Persen	1.547.118.634,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100Persen	100 Persen	7.191.880,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat	100Persen	6.694.000,00	

												(Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas						
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.867.880,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat	2 Dokumen	3.370.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	831.000,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	831.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG

													Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas					
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	831.000,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	831.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	831.000,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	831.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	831.000,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	831.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG

													Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas					
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Dokumen Dokumen Administrasi Keuangan secara Tepat Waktu**	**100Persen**	**100 Persen**	**1.332.781.071,00**			**Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas**	**01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal**	**Satuan Kerja Perangkat Daerah**	**100Persen**	**1.332.403.671,00**	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.272.893.471,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah	14 Orang/bulan	1.272.893.471,00	KECAMATAN LATIMOJONG

													Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas					
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	54.119.300,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	52.817.500,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.502.700,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan,	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.502.700,00	KECAMATAN LATIMOJONG

													Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas					
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.265.600,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.190.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Penyelenggaaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100Persen**	**100 Persen**	**6.619.500,00**			**Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,**	**01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif**	**Satuan Kerja Perangkat Daerah**	**100Persen**	**6.040.000,00**	

												Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal**				
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	6.619.500,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	6.040.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG

	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN Predikat Kinerja Baik**	**100Persen**	**100 Persen**	**8.580.000,00**			**Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas**	**01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal**	**Satuan Kerja Perangkat Daerah**	**100Persen**	**10.800.000,00**	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	13 Paket	8.580.000,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah	14 Paket	10.800.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG

												dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas					
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran**	**100Persen**	**100 Persen**	**74.989.599,00**			**Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas**	**01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal**	**Satuan Kerja Perangkat Daerah**	**100Persen**	**79.860.066,00**	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2.732.783,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah	5 Paket	3.290.750,00	KECAMATAN LATIMOJONG

												Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas					
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	6.454.600,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah	5 Paket	6.454.600,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.200.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	12.009.216,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah	15 Paket	15.106.716,00	KECAMATAN LATIMOJONG

												Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas						
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	7.000.000,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah	6 Laporan	8.215.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	36 Laporan	45.593.000,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan,	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah	12 Laporan	45.593.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG

													Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas					
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**100Persen**	**100 Persen**	**27.815.550,00**			**Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas**	**01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal**	**Satuan Kerja Perangkat Daerah**	**100Persen**	**28.263.000,00**	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	27.815.550,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah	3 Unit	28.263.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran**	**100Persen**	**100 Persen**	**61.200.000,00**			**Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan**	**01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal**	**-**	**100Persen**	**36.000.000,00**	

													Penyandan Disabilitas					
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	61.200.000,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	12 Laporan	36.000.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara**	**5Jenis**	**5 Jenis**	**8.832.372,00**			**Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,**	**01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal**	**Satuan Kerja Perangkat Daerah**	**5Jenis**	**47.057.897,00**	

													Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas					
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	4.782.872,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah	5 Unit	9.217.897,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	4 Unit	2.840.000,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah	3 Unit	2.840.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1.209.500,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Satuan Kerja Perangkat Daerah	2 Unit	35.000.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG

												Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas					
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**8.783.500,00**						**100 %**	**8.215.000,00**	
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100Persen**	**100 %**	**8.783.500,00**			**Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas**	**01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal**	**Masyarakat**	**100Persen**	**8.215.000,00**	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	1 Laporan	8.783.500,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat	1 Laporan	8.215.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
3	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 %**	**100 %**	**20.100.000,00**						**100 %**	**59.000.000,00**	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum**	**100Persen**	**100 Persen**	**20.100.000,00**			**Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempua**	**01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal**	**Forkopimcam dan Masyarakat**	**100Persen**	**59.000.000,00**	

												n, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas					
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.100.000,00	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Forkopimcam dan Masyarakat	12 Dokumen	59.000.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	JUMLAH									**1.556.893.472,00**							**1.614.333.634,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan jumlah pendanaan untuk setiap kegiatan di Kecamatan Latimojong pada Tahun Anggaran 2025, membutuhkan anggaran sebesar Rp. 1,556,893,472- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Anggaran ini digunakan untuk membiayai 3 (Tiga) Program Kerja yang terdiri dari 10 (Sepuluh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Program kerja dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

   Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1,528,009,972- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 7.191.880,-
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.332.781.071,-
   - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 6.619.500,-
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 8.580.000,-
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 74.989.599,-
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 27.815.550,-
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 61.200.000,-
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 8.832.372,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.783.500,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

   - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 8.783.500,-

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 20.100.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah). Kegiatan tersebut adalah :

   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp. 20.100.000,-

Tabel : IV. 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran dan Rencana Perhitungan

Renja Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Tahun 2025

KODE						PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA PERHITUNGAN			JUMLAH	LOKASI	KET
								VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
7	01	21				KECAMATAN					1.556.893.472	Kantor Camat Latimojong	
7	**01**	**21**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**		**1.528.009.972**	**Kantor Camat Latimojong**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**100**	**%**		**7.191.880**	**Kantor Camat Latimojong**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.01**	**01**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun**	**2**	**Dok**		3.867.880	**Kantor Camat Latimojong**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.01**	**02**	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun**	**1**	**Dok**		831.000	**Kantor Camat Latimojong**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.01**	**03**	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun**	**1**	**Dok**		831.000	**Kantor Camat Latimojong**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.01**	**04**	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**	**Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun**	**1**	**Dok**		831.000	**Kantor Camat Latimojong**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.01**	**05**	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**	**Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun**	**1**	**Dok**		831.000	**Kantor Camat Latimojong**	

7	**01**	**21**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**100**	**%**		**1.332.781.071**	**Kantor Camat Latimojong**	
7	01	21	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	14	OB		1.272.893.471	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen		54.119.300	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	Laporan		3.502.700	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan		2.265.600	Kantor Camat Latimojong	
7	**01**	**21**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD**	**100**	**%**		**6.619.500**	**Kantor Camat Latimojong**	
7	01	21	01	2.03	06	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12	Dokumen		6.619.500	Kantor Camat Latimojong	
7	**01**	**21**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN Predikat Kinerja Baik**	**100**	**%**		**8.580.000**	**Kantor Camat Latimojong**	
7	01	21	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13	Paket		8.580.000	Kantor Camat Latimojong	
7	**01**	**21**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100**	**%**		**74.989.599**	**Kantor Camat Latimojong**	
7	01	21	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket		2.732.783	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket		6.454.600	Kantor Camat Latimojong	

7	01	21	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12	Dokumen		1.200.000	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan Perkantoran dalam 1 (Satu) Tahun	15	Paket		12.009.216	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan		7.000.000	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan		45.593.000	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	%		24.660.205	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1	Jenis		3.070.200	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	2	Unit		2.000.000	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2	Jenis		19.590.005	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100	%		70.631.000	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	Bulan		11.231.000	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	OB		59.400.000	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		39.607.365	Kantor Camat Latimojong	

7	01	21	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	3	Unit		14.965.900	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit		20.660.439	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	01	2.09	07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	Jenis		3.981.026	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100	%		17.940.000	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	%		17.940.000	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelasanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1	Kali		5.940.000	Kantor Camat Latimojong	
7	01	21	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	2	Kegiatan		12.000.000	Kantor Camat Latimojong	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Tahun 2025 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Rencana Kerja Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Luwu Tahun 2025. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Kantor Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Latimojong, 28 Juni 2024

Camat Latimojong

NUR AGAM, S.Ag

Pangkat : Pembina/IV.a

NIP. 196904242006041007

RENCANA KERJA
(RENJA)

KECAMATAN LAMASI
KABUPATENLUWU
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT serta atas segala limpahan Rahmat Taufik dan Inayahnya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Lamasi Tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai program kerja Kecamatan Lamasi dalam kurun waktu tahun 2025.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lamasi tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksiting Kecamatan Lamasi, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Lamasi tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Lamasi.

Akhir kata dengan telah tersusunnya Rencana Kerja tahun 2025 ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, amiin.

Lamasi, Juli 2024
CAMAT,

H. SUWARSO, S.Sos., M.Si.
Nip. 196812261992011001

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I. PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan I-5
1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN LAMASI TAHUN LALU II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lamasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Lamasi II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lamasi II-10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lamasi II-12
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-13
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-21

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah III-2
3.3. Program dan Kegiatan III-5

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1

BAB V. PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Hal

Table 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Lamasi dan Pencapaian Renstra Kecamatan Lamasi s/d Tahun 2023 Kabupaten Luwu II-5

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Tahun 2023 ..... II-11

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Luwu II-14

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kab. Luwu II-21

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, Tahun 2020-2024 ..... III-4

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Luwu III-8

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Lamasi Tahun 2024 ..... IV-6

BAB I

PENDAHULUAN

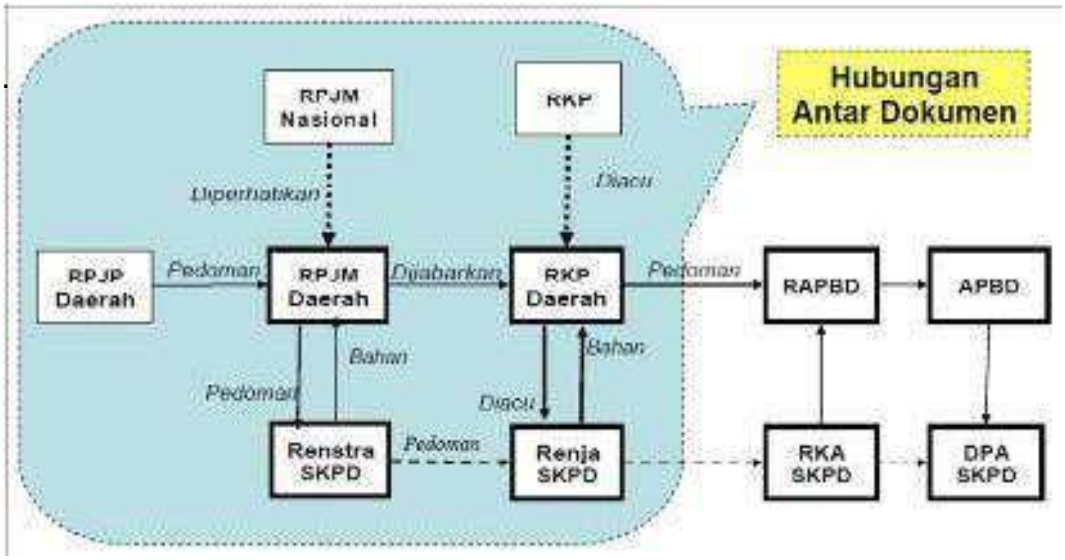
1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu : (1). Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, (2). Penyusunan Rancangan Awal renja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan, (3). Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Kepala tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD, (4). Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Form Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukkan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran,program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran, (5). Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD dan (6). Verfikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD di tetapkan.

Gambar 1.1

Tindaklanjut Renja dalam Penyusunan APBD



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana kerja kecamatan Lamasi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493, yang telah ditetapkan dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan regional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraqturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No 1 Tahun 2011 Tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2025;
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 155 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Luwu No 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Luwu;

21. Peraturan Daerah omor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2025;
22. Pertauran Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati Luwu Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah di Kecamatan Lamasi ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Lamasi adalah sebagai berikut:

1) Sebagai dokumen penjabaran RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025;
2) Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Lamasi Tahun Anggaran 2025.;
3) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
4) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Lamasi Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan RenjaPropinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Derah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Lamasi, Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Lamasi, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lamasi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Lamasi

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lamasi

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Jenis Indikator yang dikaji, disajikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lamasi

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program Nasional/Internasional, Tantangan dan peluang dalam meningkat pelayanan Perangkat Deerah dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yng direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan

penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebutdan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lamasi dan Program dan kegiatan.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lamasi

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LAMASI

Memuat tentang Rencana kerja Kecamatan Lamasi serta Pendanaan Program dan Kegiatan tahun 2024.

BAB V. PENUTUP

Berisi uraian catatan penting yang perlu medapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN LAMASI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lamasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Lamasi

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lamasi tahun lalu, dan realisasi Perubahan Renstra Kecamatan Lamasi mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Lamasi dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Lamasi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

      1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah :

1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3) Penyediaan Bahan Bacaan da Peraturan Perundang-undangan
4) Penyediaan Bahan/Material
5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik adalah :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah :

1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah :

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan adalah :

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan
3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :

1) Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
Kecamatan Lamasi dan Pencapaian Renstra Kecamatan Lamasi sampai dengan Tahun 2022
Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu

Perangkat Daerah : Kecamatan Lamasi

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. LAMASI s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. LAMASI TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA KEC. LAMASI TAHUN (n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7						**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**									
7	**01**					**Administrasi Pemerintahan**									
7	***01***	***21***	***01***			***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	***Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100%***	***100%***	***100%***
7	***01***	***21***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100%***	***100%***	***100%***
7	01	21	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	4	1	1	1	100	1	3	75%
7	01	21	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	4	1	1	1	100	1	3	75%
7	01	21	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	4	1	1	1	100	1	3	75%
7	01	21	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	4	1	1	1	100	1	3	75%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. LAMASI s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. LAMASI TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA KEC. LAMASI TAHUN (n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	***01***	***21***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase penyelesaian dokumen ademinstrasi keuangan secara tepat waktu***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100%***
7	01	21	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	72	24	24	24	100	24	48	75%
7	01	21	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1(satu) tahun	48	12	12	12	100	12	36	75%
7	***01***	***21***	***01***	***2.03***		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100%***
7	01	21	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	1	1	1	100	1	3	75%
7	***01***	***21***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan pemenuhan administrasi perkantoran***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100%***
7	01	21	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	20	5	5	5	100	5	15	75%
7	01	21	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	3	3	3	100	3	9	75%
7	01	21	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12	3	3	3	100	3	9	75%
7	01	21	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan Material kantor yang disediakan	64	16	16	16	100	16	48	75%
7	01	21	01	2.06	07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	16	4	4	4	100	0	8	50%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. LAMASI s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. LAMASI TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA KEC. LAMASI TAHUN (n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	21	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	350	0	0	0	100	80	80	22,85%
7	***01***	***21***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa***	***100***	***100***	***100***	***100***	*100*	*100*	*100*	*100%*
7	01	21	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	1200	300	300	300	100	300	900	75%
7	01	21	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	48	**12**	**12**	**12**	**100**	12	**36**	**75%**
7	01	21	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	48	12	12	12	**100**	12	36	75%
7	***01***	***21***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100%***
7	01	21	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20	5	5	5	100	5	15	75%
7	01	21	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	4	4	4	100	4	12	75%
7	***01***	***21***	***03***			***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	***Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100%***

RENCANA KERJA KECAMATAN LAMASI 2024

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. LAMASI s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. LAMASI TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA KEC. LAMASI TAHUN (n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	***01***	***21***	***03***	***2.02***		***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	***Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100%***
7	01	21	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	4	1	1	1	100	1	3	75%
7	01	21	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	4	1	1	0	100	0	2	50%
7	01	21	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat	3	0	1	1	100	1	2	66%
7	***01***	***21***	***04***			***Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	***Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum***	***100***	*100*	*100*	*100*	*100*	***100***	***100***	***100%***
7	***01***	***21***	***04***	***2.02***		***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***	***Persentase Pelaksanaan Koordinasi oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100%***
7	01	21	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48	12	12	12	100	12	36	75%

RENCANA KERJA KECAMATAN LAMASI 2024

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Tahun n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. LAMASI s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. LAMASI TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA KEC. LAMASI TAHUN (n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	***01***	***21***	***05***			***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan***	***100***	*100*	*100*	*100*	*100*	***100***	***100***	***100%***
7	***01***	***21***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100%***
7	01	21	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	48	12	12	12	100	12	36	75%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lamasi

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Lamasi, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Lamasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang beradadi Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Luwu;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lamasi Tahun 2022 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Lamasi yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lamasi dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Tahun 2024

NO.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				CAPAIAN REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Lamasi			Na	Na	100%	100%	80%	80%	90%	100%	Target Terpenuhi
2	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			Na	Na	B	B	Na	Na	B	B	B (baik)
3	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Aparat Kecamatan.			Na	Na	B	B	Na	Na	B	BB	BB (sangat baik).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lamasi

Permasalahan yang ada di kecamatan Lamasi dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi, motivasi lintas sektor di setiap tupoksi disebabkan:

a. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan desa sebagai penunjang pelayanan.
b. Belum Optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan.
c. Masih rendahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam administrasi pelayanan.

Pencapaian visi dan misi Kecamatan Lamasi sebagai penjabaran visi misi kabupaten Luwu akan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap pencapaian visi kabupaten dan visi nasional yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat, penyelenggaran fungsi pemerintahan secara optimal, dan perwujudan SDM aparatur yang handal.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

a. Mewujudkan ketersediaan data/informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan
b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan
c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang adaharus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil Analisis Kebutuhan di Kecamatan Lamasi pada Tahun 2025. Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2026 maka beberapa program yang ada dalam Rancangan Awal RKPD mengalami perubahan Nomenklatur. Adapun Rincian Riview Rancangan Awal ini dapat dilihat dalam Tabel 2.3 seperti yang terlampir di bawah ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Luwu

Kecamatan Lamasi

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP. 000)	PROGRAM KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP. 000)	
7 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**2.294.769.731**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**2.779.603.869**	
7 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**100%**	**7.909.350**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**100%**	**6.936.000**	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.959.350	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.387.200	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.237.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.387.200	

7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.237.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.387.200	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.237.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.387.200	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.237.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.387.200	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**100%**	**2.139.028.606**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**100%**	**2.550.966.369**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	2.071.972.231	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	2.489.203.869	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pegunjian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.056.375	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pegunjian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	61.762.500	

7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**14.256.270**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**8.684.500**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	14.256.270	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.684.500	
7	**01**	**01**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**-**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**6.524.545**	
7	01	01	02.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	6.524.545	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Presentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**42.275.228**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Presentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**64.564.727**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	2.268.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.169.335	
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	14.837.228	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	25.233.392	

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	25.170.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	36.162.000	
7	**01**	**01**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik**		**-**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**34.010.550**	
7	01	01	02.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	34.010.550	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa, Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**83.300.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa, Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**97.340.851**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	18.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	24.000.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	35.300.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	30.140.851	

7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	30.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	43.200.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**8.000.277**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**10.576.327**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	6.250.277	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	4.076.327	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	1.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit	6.500.000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan**		**-**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan**	**100%**	**8.750.000**	
7	**01**	**2**	**02.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**		**-**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**100%**	**8.750.000**	

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	8.750.000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100%**	**355.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100%**	**444.150.000**	
7	**01**	**03**	**02.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa**		**-**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Persentase Kelurahan yang dilakukan Pemberdayaan**	**100%**	**7.750.000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.750.000	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Persentase Kelurahan yang dilakukan Pemberdayaan**	**100%**	**355.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Persentase Kelurahan yang dilakukan Pemberdayaan**	**100%**	**436.400.000**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	178.400.000	

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	255.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	258.000.000	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**7.200.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**12.000.000**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**7.200.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**12.000.000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24 Laporan	7.200.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24 Laporan	12.000.000	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan urusan pemerintahan umu yang diselenggarakan kecamatan**	**100%**	**68.560.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan urusan pemerintahan umu yang diselenggarakan kecamatan**	**100%**	**36.250.000**	

7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**100%**	**68.560.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**100%**	**36.250.000**	
7	01	05	2.01	02	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	68.560.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	36.250.000	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**-**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Cakupan urusan pemerintahan umu yang diselenggarakan kecamatan**	**100%**	**8.250.000**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa**		**-**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa**	**100%**	**8.250.000**	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		-	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	8.250.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses perencanaan di Kecamatan Lamasi yang di sampaikan oleh masyarakat dalam Forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan Lamasi dan Musrenbang Kabupaten Luwu. Adapun penyampaiannya ini disampaikan oleh masyarakat melalui Pemangku Kepentingan baik Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita serta para Kepala Desa dan Kepala Sekolah juga oleh Kepala Kantor yang ada di Wilayah Kecamatan Lamasi sesuai dengan kebutuhan yang amat mendesak di Kecamatan Lamasi.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Luwu

Kecamatan Lamasi

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan

Usulan Program dan Kegiatan banyak yang masuk dari semua desa di Kecamatan Lamasi namun semua ditujukan ke SKPD yang ada di Kabupaten Luwu. Tidak ada yang masuk dalam Program dan Kegiatan di Kecamatan Lamasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan, sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Lamasi guna menunjang Pembangunan KabupatenLuwu secara Keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan Iklim usaha;
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
9. Kebudayaan;
10. Kreativitas dan inovasi;
11. Politik, hukum dan keamanan dan ketertiban;
12. Perekonomian;
13. Kesejahteraan rakyat.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Luwu sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Kecamatan Lamasi sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Luwu memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan, Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintahan Kecamatan, Kecamatan Lamasi memiliki ruang lingkup tugas : melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi-instansidi wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Lamasi didalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Lamasi yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Lamasi telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan

kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdayadanpotensidalamorganisasi. Dalam upaya tersebut,seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuandan sasarankelembagaan.

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Luwu, Kecamatan Lamasi merujuk pada visi Kabupaten Luwu yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024 adalah: **“LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DALAM NUANSA RELIGI”**. Untuk terwujudnya visi tersebut, misi RPJMD yang diemban Kecamatan Lamasi adalah misi pertama yaitu “**Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel”.**

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan Renja Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah:

“ Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ”

Salah satu tupoksi mendasar Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat

Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Lamasi :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Kecamatan.

Tabel Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lamasi
Kabupaten Luwu, Tahun 2020-2024

Visi RPJMD	Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi						
Misi Ke-1 RPJMD	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel						
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran**	**Target**				
			2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP OPD	CC	Baik	B	BB	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Kecamatan	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Lamasi selama Dua tahun ke depan sejak tahun 2025 hingga 2026 tertuang dalam Renstra Kecamatan Lamasi Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program atau Kegiatan yaitu : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyediaan Bahan/Material

2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pubik

Dengan Indikator Kinerja yaitu : Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan.

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

3. Program Pemberdayan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Dengan Indikator Kinerja yaitu : Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
   2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dengan Indikator Kinerja yaitu : Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dengan Indikator Kinerja yaitu : Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Dengan Indikator Kinerja yaitu : Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah : 4.1.13 KECAMATAN LAMASI

KODE	RENCANA TAHUN 2025						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP. 000)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP. 000)
7 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**100%**	**2.294.769.731**	**Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil**		**100%**	**2.352.138.974**
7 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**100%**	**7.909.350**	**Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil**		**100%**	**8.107.084**
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	1 Dokumen	2.959.350	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	3.033.334
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	1 Dokumen	1.237.500	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	1.268.438
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	1 Dokumen	1.237.500	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	1.268.438
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	1 Dokumen	1.237.500	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	1.268.438
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	1 Dokumen	1.237.500	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	1.268.438

7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**100%**	**2.139.028.606**	**Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil**		**100%**	**2.192.504.321**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	26 Orang/Bulan	2.071.972.231	Dana Alokasi Umum		26 Orang/Bulan	2.123.771.537
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pegunjian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	12 Dokumen	67.056.375	Pendapatan Bagi Hasil		12 Dokumen	68.732.784
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**100%**	**14.256.270**	**Pendapatan Bagi Hasil**		**100%**	**14.612.677**
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	2 Laporan	14.256.270	Pendapatan Bagi Hasil		2 Laporan	14.612.677
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**100%**	**42.275.228**	**Pendapatan Bagi Hasil**		**100%**	**43.332.109**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	1 Paket	2.268.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Paket	2.324.700
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	3 Paket	14.837.228	Pendapatan Bagi Hasil		3 Paket	15.208.159
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	62 Laporan	25.170.000	Pendapatan Bagi Hasil		62 Laporan	25.799.250
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa, Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**100%**	**83.300.000**	**Pendapatan Bagi Hasil**		**100%**	85.382.500
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	300 Laporan	18.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		300 Laporan	18.450.000

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	12 Laporan	35.300.000	Pendapatan Bagi Hasil		12 Laporan	36.182.500
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	12 Laporan	30.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		12 Laporan	30.750.000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**100%**	**8.000.277**	**Pendapatan Bagi Hasil**		**100%**	**8.200.284**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	5 Unit	6.250.277	Pendapatan Bagi Hasil		5 Unit	6.406.534
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	5 Unit	1.750.000	Pendapatan Bagi Hasil		15 Unit	1.793.750
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**100%**	**355.000.000**	**Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan**		**100%**	363.875.000
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kelurahan yang dilakukan Pemberdayaan**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**100%**	**355.000.000**	**Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan**		**100%**	363.875.000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		1 Lembaga Kemasyarakatan	102.500.000

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	1 Pokmas / Ormas	255.000.000	Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		1 Pokmas / Ormas	268.000.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**100%**	**7.200.000**	**Pendapatan Bagi Hasil**		**100%**	**12.000.000**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**100%**	**7.200.000**	**Pendapatan Bagi Hasil**		**100%**	**12.000.000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	24 Laporan	7.200.000	Pendapatan Bagi Hasil		24 Laporan	12.000.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan urusan pemerintahan umu yang diselenggarakan kecamatan**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**100%**	**68.560.000**	**Pendapatan Bagi Hasil**		**100%**	70.274.000
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi**	**100%**	**68.560.000**	**Pendapatan Bagi Hasil**		**100%**	**70.274.000**
7	01	05	2.01	02	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Luwu, Kec. Lamasi, Lamasi	12 Dokumen	68.560.000	Pendapatan Bagi Hasil		12 Dokumen	70.274.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Lamasi pada Tahun 2025 tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Lamasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut Jumlah Anggaran Keseluruhan Kecamatan Lamasi adalah sebesar **Rp 3.289.003.869,-** (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Program dan Kegiatan Kecamatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Anggaran **Rp 2.779.603.869,-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Anggaran sebesar **RP. 6.936.000,-** (Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan Sub Kegiatan sebagai berikut **:**

a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** deangan anggaran sebesar **Rp. 1.387.200,-** (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah);

b. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 1.387.200,-** (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah);

c. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 1.387.200,-** (Satu Juta

Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah);

d. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 1.387.200,-** (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah);

e. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 1.387.200,-** (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan Anggaran sebesar **Rp. 2.550.966.369,-** (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut :

   a. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan anggaran sebesar **Rp. 2.489.203.869,-** (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Delapan Enam Puluh Sembilan Rupiah).

   b. **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 61.762.500,-** (Enam Puluh Satu Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

3. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** dengan Anggaran sebesar **Rp. 8.684.500,-** (Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut :

   a. **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 8.684.500,-** (Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

4. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan Anggaran sebesar **Rp. 6.524.545,-** (Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut :

   a. **Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian** dengan anggaran sebesar **Rp. 6.524.545,-** (Enam Juta Lima

Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

5. **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan Anggaran sebesar **Rp 64.564.727,-** (Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   a. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp. 3.169.335,-** (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
   b. **Penyediaan Bahan/Material** dengan anggaran sebesar **Rp. 25.233.392,-** (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
   c. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 36.162.000** (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
6. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan anggaran **Rp. 34.010.550,-** (Tiga Puluh Empat Juta Sepuluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   a. **Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya** dengan anggaran sebesar **Rp. 34.010.550,-** (Tiga Puluh Empat Juta Sepuluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan anggaran **Rp. 97.340.851,-** (Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   b. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** dengan anggaran sebesar **Rp.24.000.000,-** (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
   c. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik** dengan anggaran sebesar **Rp. 30.140.851,-** (Tiga Puluh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima

Puluh Satu Rupiah);

d. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp. 43.200.000,-** (Empat Pulub Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

8. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan Anggaran sebesar **Rp 10.576.327,-** (Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut :

   a. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** dengan anggaran sebesar **Rp 4.076.327,-** (Empat Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)

   b. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dengan anggaran sebesar **Rp. 6.500.000,-** (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

B. Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Anggaran sebesar **Rp 8.750.000,-** (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Anggaran sebesar **Rp 8.750.000,-** (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut :

   a. **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Wilayah Kecamatan** dengan anggaran sebesar **Rp 8.750.000,-** (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

C. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan Anggaran sebesar **Rp 444.150.000** (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan kegiatan sebagai berikut :

1. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** dengan Anggaran sebesar **Rp 7.750.000** (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   a. **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan** dengan anggaran sebesar **Rp. 7.750.000** (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

b. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** dengan Anggaran sebesar **Rp 436.400.000** (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   a. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** dengan anggaran sebesar **Rp. 178.400.000,-** (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
   b. **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** dengan anggaran sebesar **Rp. 258.000.000,-** (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).

D. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan Anggaran sebesar **Rp 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah), dengan kegiatan sebagai berikut :

1. **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** dengan Anggaran sebesar **Rp 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   b. **Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara**

Republik Indonesia dengan anggaran sebesar **Rp 12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah)

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Anggaran sebesar **Rp 36.250.000,-** (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan kegiatan sebagai berikut :

1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** dengan Anggaran sebesar **Rp 36.250.000,-** (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   a. **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan** dengan anggaran sebesar **Rp 36.250.000,-** (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan Anggaran sebesar **Rp. 8.250.000** (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan kegiatan sebagai berikut :

1. **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan Anggaran sebesar **Rp. 8.250.000** (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dengan Anggaran sebesar **Rp. 8.250.000** (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN LAMASI
TAHUN 2025

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	SATUAN	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024				SUMBER DANA	LOKASI
				RINCIAN PERHITUNGAN					
				VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH		
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*		*8*
	KECAMATAN LAMASI						**2.852.603.869**		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**%**				**2.779.603.869**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Pedapatan Bagi Hasil Pajak**	**Kec. Lamasi**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**%**	**100**			**6.936.000**	**Pedapatan Bagi Hasil Pajak**	**Kec. Lamasi**
7.01.01.2.01.01	***Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun***	***Dokumen***	***1***			***1.387.200***	***Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat						750.000		
	- Makan Rapat/Pertemuan/Lembur (Nasi Kotak)		Orang / Kali		15	30.000	450.000		
	- Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan/Lembur (snack)		Orang / Kali		15	20.000	300.000		
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover						637.200		
	- Kertas HVS A4		Rim		10	63.720	637.200		
	- Kertas HVS F4		Rim		0	76.700	0		
	- Kertas NCR Folio Top		Rim		0	81.420	0		

7.01.01.2.01.02	***Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD***	***Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun***	***Dokumen***	***1***			***1.387.200***	***Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat						750.000		
	- Makan Rapat/Pertemuan/Lembur (Nasi Kotak)		Orang / Kali		15	30.000	450.000		
	- Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan/Lembur (snack)		Orang / Kali		15	20.000	300.000		
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover						637.200		
	- Kertas HVS A4		Rim		10	63.720	637.200		
	- Kertas HVS F4		Rim		0	76.700	0		
	- Kertas NCR Folio Top		Rim		0	81.420	0		
7.01.01.2.01.03	***Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD***	***Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun***	***Dokumen***	***1***			***1.387.200***	***Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat						750.000		
	- Makan Rapat/Pertemuan/Lembur (Nasi Kotak)		Orang / Kali		15	30.000	450.000		
	- Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan/Lembur (snack)		Orang / Kali		15	20.000	300.000		
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover						637.200		
	- Kertas HVS A4		Rim		10	63.720	637.200		
	- Kertas HVS F4		Rim		0	76.700	0		
	- Kertas NCR Folio Top		Rim		0	81.420	0		
7.01.01.2.01.04	***Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD***	***Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun***	***Dokumen***	***1***			***1.387.200***	***Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat						750.000		
	- Makan Rapat/Pertemuan/Lembur (Nasi Kotak)		Orang / Kali		15	30.000	450.000		
	- Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan/Lembur (snack)		Orang / Kali		15	20.000	300.000		
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover						637.200		
	- Kertas HVS A4		Rim		10	63.720	637.200		
	- Kertas HVS F4		Rim		0	76.700	0		
	- Kertas NCR Folio Top		Rim		0	81.420	0		

7.01.01.2.01.05	***Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD***	***Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun***	***Dokumen***	***1***			***1.387.200***	***Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat						750.000		
	- Makan Rapat/Pertemuan/Lembur (Nasi Kotak)		Orang / Kali		15	30.000	450.000		
	- Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan/Lembur (snack)		Orang / Kali		15	20.000	300.000		
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover						637.200		
	- Kertas HVS A4		Rim		10	63.720	637.200		
	- Kertas HVS F4		Rim		0	76.700	0		
	- Kertas NCR Folio Top		Rim		0	81.420	0		
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu**	**%**	**100**			**2.550.966.369**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Kec. Lamasi**
7.01.01.2.02.01	***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN***	***Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan***	***Orang***	***26***			***2.489.203.869***	***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***	
	- Belanja Gaji Pokok PNS		Thn		1	1.452.902.902	1.452.902.902		
	- Belanja Tunjangan Keluarga PNS		Thn		1	138.696.780	138.696.780		
	- Belanja Tunjangan Jabatan PNS		Thn		1	127.092.341	127.092.341		
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		Thn		1	30.830.750	30.830.750		
	- Belanja Tunjangan Beras PNS		Thn		1	74.058.503	74.058.503		
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		Thn		1	1.190.236	1.190.236		
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS		Thn		1	25.636	25.636		
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Thn		1	65.971.200	65.971.200		
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		Thn		1	3.377.861	3.377.861		
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		Thn		1	8.813.584	8.813.584		
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		Thn		1	586.244.076	586.244.076		

7.01.01.2.02.03	***Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD***	**Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan**	**Tahun**	**1**			***61.762.500***	***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***	
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						54.240.000		
	- Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		OB		12	1.450.000	17.400.000		
	- Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		OB		12	770.000	9.240.000	990.000	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		OB		12	1.010.000	12.120.000		
	- Bendahara Pengeluaran		OB		12	860.000	10.320.000		
	- Staf Pengelola Keuangan		OB		12	430.000	5.160.000		
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover						7.522.500		
	- Kertas HVS A4		Rim		15	63.720	955.800		
	- Kertas HVS F4		Rim		75	76.700	5.752.500		
	- Kertas NCR Folio Top/Bottom		Rim		10	81.420	814.200		
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**%**	**100**			**8.684.500**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Kec. Lamasi**
7.01.01.2.03.06	***Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD***	***laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah***	***Dokumen***	***2***			***8.684.500***	***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***	
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan						6.000.000		
	- Honorarium Pengurus Barang		OB		12	500.000	6.000.000		
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover						2.684.500		
	- Kertas HVS A4		Rim		0	63.720	0		
	- Kertas HVS F4		Rim		35	76.700	2.684.500		
	- Kertas NCR Folio Top		Rim		0	81.420	0		

7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**%**	**100**			**6.524.545**	**APBD**	**Kec. Lamasi**
7.01.01.2.05.03	***Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian***	***Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian***	***Dokumen***	***1***			***6.524.545***		
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat						2.500.000		
	- Makan Rapat/Pertemuan/Lembur (Nasi Kotak)		Orang / Kali		50	30.000	1.500.000		
	- Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan/Lembur (snack)		Orang / Kali		50	20.000	1.000.000		
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover						4.024.545		
	- Kertas HVS A4		Rim		5	63.720	318.600		
	- Kertas HVS F4		Rim		40	76.700	3.068.000		
	- Kertas NCR Folio Top		Rim		0	84.500	0		
	- Amplop Putih Besar		Pack		10	31.388	313.880		
	- Amplop Putih Kecil		Pack		10	10.915	109.150		
	- Amplop Coklat Besar		Pack		5	42.983	214.915		
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi perkantoran**					**64.564.727**	**Pedapatan Bagi Hasil Pajak**	**Kec. Lamasi**
7.01.01.2.06.01	***Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.***	***Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor yang tersedia***	***Jenis***	***1***			***3.169.335***	***Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						**3.169.335**		
	- Lampu LED (15 Watt)		Buah		35	65.047	2.276.645		
	- Baterai AAA Cas Isi Ulang (Isi 2 pcs)		Pack		5	29.115	145.575		
	- Baterai AA Cas Isi Ulang (Isi 4 pcs)		Pack		5	30.975	154.875		
	- Isolasi Listrik		Buah		0	10.800	0		
	- Multiplug (4 stop kontak)		Buah		4	148.060	592.240		

7.01.01.2.06.07	*Penyediaan Bahan/Material*	*Jumlah jenis ATK yang disediakan*	*Jenis*	*14*			*25.233.392*	*Pedapatan Bagi Hasil Pajak*	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						9.964.394		
	- Bolpoin Non Gel		Pack		**0**	40.120	0		
	- Bolpoin Gel		Pack		**15**	38.940	584.100		
	- Pensil 2B		Pack		**8**	57.230	457.840		
	- Spidol Besar (Papan Tulis)		Buah		15	10.314	154.710		
	- Tinta Stempel Warna		Botol		8	8.260	66.080		
	- Penjepit Kertas 155		Pack		20	8.850	177.000		
	- Penjepit Kertas 200		Pack		20	15.340	306.800		
	- Penjepit Kertas 260		Pack		20	22.656	453.120		
	- Pita koreksi		Buah		18	7.847	141.246		
	- Buku Folio 200 lembar		Buah		**15**	40.816	612.240		
	- Box / Kotak File (Plastik)		Buah		**15**	31.152	467.280		
	- Ordner Plastik		Buah		**25**	35.990	899.750		
	- Map Kertas		Pack		**5**	38.350	191.750		
	- Map Plastik Kancing		Pack		**5**	38.940	194.700		
	- Map Snelhekter Plastik		Buah		**25**	4.672	116.800		
	- Pisau Cutter Kecil		Buah		5	6.254	31.270		
	- Penggaris Besi 30 cm		Buah		**6**	9.145	54.870		
	- Lem Kertas 500 Gram		Buah		8	29.500	236.000		
	- Lem Stick 25 Gram		Buah		25	7.670	191.750		
	- Staples Kecil No. 10		Buah		6	20.060	120.360		
	- Isi Staples Kecil No. 10		Box		5	36.580	182.900		
	- Pelubang Kertas Sedang		Buah		5	36.580	182.900		
	- Gunting Besar		Buah		6	18.408	110.448		
	- Gunting Sedang		Buah		6	11.918	71.508		

	- Fotokopi		Lembar		2273	413	938.749		
	- Baliho		M2		25	61.360	1.534.000		
	- Paper Clip No. 5		Dos		0	39.000	0		
	- Pulpen (Balliner)		Lusin		4	228.660	914.640		
	- Spidol / Penanda Teks (Neon)		Buah		15	12.577	188.655		
	- Stempel Warna (Flash)		Buah		2	91.464	182.928		
	- Sticky Notes (Pembatas Kertas)		Buah		20	10.000	200.000		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						4.735.694		
	- Kertas HVS A4		Rim		0	63.720	0		
	- Kertas HVS F4		Rim		55	76.700	4.218.500		
	- Amplop Putih Besar		Pack		0	31.388	0		
	- Amplop Putih Kecil		Pack		0	10.915	0		
	- Amplop Coklat Besar		Pack		0	42.983	0		
	- Kertas Linen		Pak		3	106.908	320.724		
	- Kertas Photo Satin		Pak		5	39.294	196.470		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						6.615.414		
	- Flashdisk 16 GB		Buah		2	66.198	132.396		
	- Mouse Nirkabel Silent Click		Buah		3	148.798	446.394		
	- Tinta Printer (Hitam/Warna 70 ML 003-664)		Botol		48	125.763	6.036.624		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					3.917.890	3.917.890		
	- Sapu Plastik		Buah		10	33.453	334.530		
	- Sapu Lidi		Buah		10	15.487	154.870		
	- Sapu Karet (Untuk Wiper)		Buah		4	53.896	215.584		
	- Hand Sprayer Manual (1 Ltr)		Buah		5	34.692	173.460		

	- Sabun Mandi Gel		Botol		6	68.145	408.870		
	- Sabun Pembersih Lantai (5 Ltr)		Botol		5	47.080	235.400		
	- Sabun Pembersih Toilet (750 ml)		Botol		8	37.168	297.344		
	- Pengharum Ruangan Elektrik		Set		4	103.828	415.312		
	- Cairan Isi Ulang Pengharum Ruangan		Buah		4	53.215	212.860		
	- Tissue Muka		Pak		10	18.956	189.560		
	- Kemoceng		Buah		5	58.900	294.500		
	-Tempat Sampah		Unit		3	117.900	353.700		
	- Keset		Buah		3	108.500	325.500		
	- Sikat (Pembersih Kamar Mandi)		Buah		4	76.600	306.400		
7.01.01.2.06.09	***Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD***	***Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan Jumlah perjalanan dinas luar daerah***	***Kali***	***62***			***36.162.000***	***Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Perjalanan Dinas Luar Daerah						14.912.000		
	- Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV		OH		4	1.423.000	5.692.000		
	'- Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III		OH		4	745.000	2.980.000		
	- Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)		OH		8	350.000	2.800.000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota / Sulawesi Selatan		OH		8	430.000	3.440.000		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Perjalanan Dinas Dalam Daerah						21.250.000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam		OH		125	170.000	21.250.000		

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik**	**%**	**100**			**34.010.550**	**Pedapatan Bagi Hasil Pajak**	**Kec. Lamasi**
7.01.01.2.07.06	***Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya***	***Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan***	***Unit***	***4***			***34.010.550***	***Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer						34.010.550		
	- Laptop (Min. CPU Octacore, RAM 8 GB, Storage SSD 512 Gb, GPU Dedicated 4 GB)		Unit		1	19.700.100	19.700.100		
	- Laptop (Min. CPU Octacore, RAM 8 GB, Storage SSD 256 GB)		Unit		1	14.310.450	14.310.450		
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	**%**	**100**			**97.340.851**	**Pedapatan Bagi Hasil Pajak**	**Kec. Lamasi**
7.01.01.2.08.01	***Penyediaan Jasa Surat Menyurat***	***Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi***	***Surat***	***300***			***24.000.000***	***Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						24.000.000		
	- Jasa Tenaga Administrasi Kantor		OB		48	500.000	24.000.000		
7.01.01.2.08.02	***Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik.***	***Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik***	***Bulan***		***12***		***30.140.851***	***Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air						2.319.233		
	- Tagihan Air PDAM (Instansi Pemerintah, 0-10 m3)		M3		606,3354248	**3.825**	2.319.233		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik						16.121.618		
	- Biaya Beban Listrik P1 / Kap. 6.600 VA - 200 kVA		Kwh		9.006,490503	1.790	16.121.618		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan						11.700.000		
	- Internet Kantor Camat Lamasi (Tarif Internet dan TV / Kap. 50 Mbps)		Bulan		12	627.000	7.524.000		
	- Internet Rumah Jabatan Camat Lamasi (Tarif Internet / Kap. 50 Mbps)		Bulan		12	348.000	4.176.000		

7.01.01.2.08.04	***Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***	***Jumlah jasa pelayanan umum kantor***	***Bulan***		***12***		***43.200.000***	***Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						18.000.000		
	- Jasa Tenaga Administrasi Kantor		OB		36	500.000	18.000.000		
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer						16.800.000		
	- Jasa Tenaga Operator Komputer		OB		24	700.000	16.800.000		
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir						8.400.000		
	- Jasa Upah Kerja Staf Penunjang Kegiatan Perkantoran / Staf Sopir Kantor		OB		12	700.000	8.400.000		
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**%**	**100**			**10.576.327**	**Pedapatan Bagi Hasil Pajak**	**Kec. Lamasi**
7.01.01.2.09.02	***Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan***	***Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan***	***Unit***	***5***			***4.076.327***	***Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						2.050.000		
	- Pajak STNK Roda 2/3 (Kategori A)		Unit/Tahun		5	150.000	750.000		
	- Pajak STNK Roda 4/Lebih (Kategori D)		Unit/Tahun		1	1.300.000	1.300.000		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						2.026.327		
	- BBM Pertamax (Sulawesi Selatan)		OH		121,14833	16.726	2.026.327		
7.01.01.2.09.06	***Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya***	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	***Unit***	***15***			***6.500.000***	***Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin						3.660.000		
	- Pemeliharaan Sarana Kantor (AC Split)		Unit		6	610.000	3.660.000		
5.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						1.460.000		
	- Pemeliharaan Sarana Kantor (Personal Computer/ Notebook)		Kali/Unit		2	730.000	1.460.000		

5.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer						1.380.000		
	- Pemeliharaan Sarana Kantor (Printer)		Kali/Unit		2	690.000	1.380.000		
07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**%**				**8.750.000**	**APBD**	**Kec. Lamasi**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa**	**%**	**100**			**8.750.000**	**APBD**	
7.01.02.2.01.01	***Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait di Wilayah Kecamatan***	***Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan***	***Kali***	***1***			***8.750.000***		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						8.750.000		
	- Makan Rapat/Pertemuan/Lembur (Nasi Kotak)		Orang / Kali		175	30.000	5.250.000		
	- Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan/Lembur (snack)		Orang / Kali		175	20.000	3.500.000		
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**%**				**7.750.000**	**APBD**	**Kec. Lamasi**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa**	**%**	**100**			**7.750.000**	**APBD**	
7.01.03.2.01.03	***Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan***	***Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan***	***Kali***	***12***			***7.750.000***		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						7.750.000		
	- Makan Rapat/Pertemuan/Lembur (Nasi Kotak)		Orang / Kali		155	30.000	4.650.000		
	- Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan/Lembur (snack)		Orang / Kali		155	20.000	3.100.000		

07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**	**%**				**12.000.000**	**Pedapatan Bagi Hasil Pajak**	**Kec. Lamasi**
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**	**%**	**100**			**12.000.000**	**Pedapatan Bagi Hasil Pajak**	**Kec. Lamasi**
7.01.04.2.02.01	***Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia***	***Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia***	***Laporan***	***24***			***12.000.000***	***Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						12.000.000		
	- Jasa Tenaga Administrasi Kantor		OB		24	500.000	12.000.000		
07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan**	**%**				**36.250.000**	**Pedapatan Bagi Hasil Pajak**	**Kec. Lamasi**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah**	**%**	**100**			**36.250.000**	**Pedapatan Bagi Hasil Pajak**	
7.01.05.2.01.08	***Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan***	***Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan***	***Kali***	***12***			***36.250.000***	***Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						30.000.000		
	- Honorarium Forkopimcam (Camat/Kapolsek/Danramil)		Orang/Bulan		12	1.000.000	12.000.000		
	- Honorarium Forkopimcam (Camat/Kapolsek/Danramil)		Orang/Bulan		24	750.000	18.000.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						6.250.000		
	- Makan Rapat/Pertemuan/Lembur (Nasi Kotak)		Orang / Kali		125	30.000	3.750.000		
	- Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan/Lembur (snack)		Orang / Kali		125	20.000	2.500.000		
07.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**%**				**8.250.000**	**Pedapatan Bagi Hasil Pajak**	**Kec. Lamasi**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**%**	**100**			**8.250.000**	**Pedapatan Bagi Hasil Pajak**	
7.01.05.2.01.17	***Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***	***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Desa dan pendayagunaan Aset Desa***	***Laporan***	***10***			***8.250.000***	***Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						8.250.000		
	- Makan Rapat/Pertemuan/Lembur (Nasi Kotak)		Orang / Kali		165	30.000	4.950.000		
	- Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan/Lembur (snack)		Orang / Kali		165	20.000	3.300.000		

9	**KELURAHAN LAMASI**						**436.400.000**		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**%**				**436.400.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Pedapatan Bagi Hasil Pajak**	**Kelurahan Lamasi**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**%**	**100**			**436.400.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Pedapatan Bagi Hasil Pajak**	**Kelurahan Lamasi**
7.01.03.2.02.01	***Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan***	***Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan***	***Kelurahan***	***1***			***178.400.000***	***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						36.840.000		
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu		OB		12	640.000	7.680.000		
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA		OB		12	1.450.000	17.400.000		
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		OB		12	480.000	5.760.000		
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		OB		12	500.000	6.000.000		
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan						3.600.000		
	- Honorarium Pengurus Barang Pembantu		OB		12	300.000	3.600.000		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						13.433.917		
	- Bolpoin Non Gel		Pack		20	40.120	802.400		
	- Bolpoin Gel		Pack		10	38.940	389.400		

	- Pensil 2B		Pack		5	57.230	286.150		
	- Spidol Besar (Papan Tulis)		Buah		17	10.314	175.338		
	- Tinta Stempel Warna		Botol		8	8.260	66.080		
	- Penjepit Kertas 155		Pack		15	8.850	132.750		
	- Penjepit Kertas 200		Pack		35	15.340	536.900		
	- Penjepit Kertas 260		Pack		20	22.656	453.120		
	- Pita koreksi		Buah		10	7.847	78.470		
	- Buku Folio 200 lembar		Buah		15	40.816	612.240		
	- Box / Kotak File (Plastik)		Buah		15	31.152	467.280		
	- Ordner Plastik		Buah		25	35.990	899.750		
	- Map Kertas		Pack		10	38.350	383.500		
	- Map Plastik Kancing		Pack		10	38.940	389.400		
	- Map Snelhekter Plastik		Buah		50	4.672	233.600		
	- Pisau Cutter Kecil		Buah		5	6.254	31.270		
	- Penggaris Besi 30 cm		Buah		6	9.145	54.870		
	- Lem Kertas 500 Gram		Buah		5	29.500	147.500		
	- Lem Stick 25 Gram		Buah		30	7.670	230.100		
	- Staples Kecil No. 10		Buah		11	20.060	220.660		
	- Isi Staples Kecil No. 10		Pack		5	36.580	182.900		
	- Pelubang Kertas Sedang		Buah		6	36.580	219.480		
	- Gunting Besar		Buah		6	18.408	110.448		
	- Gunting Sedang		Buah		6	11.918	71.508		
	- Cetak Umbul-umbul/ Spanduk/ Baliho		m2		20	61.360	1.227.200		
	- Fotokopi		Lembar		8225	413	3.396.925		
	- Paper Clip No. 5		Dos		10	39.000	390.000		
	- Pulpen (Balliner)		Lusin		3	228.660	685.980		
	- Spidol / Penanda Teks (Neon)		Buah		10	12.577	125.770		

	- Stempel Warna (Flash)		Buah		2	91.464	182.928		
	- Sticky Notes (Pembatas Kertas)		Buah		25	10.000	250.000		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						14.253.878		
	- Kertas HVS A4		Rim		36	63.720	2.293.920		
	- Kertas HVS F4		Rim		115	76.700	8.820.500		
	- Kertas NCR Folio Top		Rim		25	81.420	2.035.500		
	- Amplop Putih Besar		Pack		20	31.388	627.760		
	- Amplop Putih Kecil		Pack		20	10.915	218.300		
	- Amplop Coklat Besar		Pack		6	42.983	257.898		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						9.981.118		
	- Tinta Printer Epson		Botol		72	125.763	9.054.936		
	- Flashdisk 16 GB		Buah		5	66.198	330.990		
	- Mouse Nirkabel Silent Click		Buah		4	148.798	595.192		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor						5.291.619		
	- Sapu Plastik		Buah		6	33.453	200.718		
	- Sapu Lidi		Buah		20	15.487	309.740		
	- Sapu Karet (Untuk Wiper)		Buah		4	53.896	215.584		
	- Hand Sprayer Manual (1 Ltr)		Buah		6	34.692	208.152		
	- Sabun Mandi Gel		Botol		10	68.145	681.450		
	- Sabun Pembersih Lantai (5 Ltr)		Botol		5	47.080	235.400		
	- Sabun Pembersih Toilet (750 ml)		Botol		20	37.168	743.360		
	- Pengharum Ruangan Elektrik		Set		5	103.828	519.140		
	- Cairan Isi Ulang Pengharum Ruangan		Buah		5	53.215	266.075		
	- Tissue Muka		Pak		25	18.956	473.900		
	- Kemoceng		Buah		6	58.900	353.400		

	-Tempat Sampah		Unit		2	117.900	235.800		
	- Keset		Buah		5	108.500	542.500		
	- Sikat (Pembersih Kamar Mandi)		Buah		4	76.600	306.400		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						28.000.000		
	- Makan Rapat/Pertemuan/Lembur (Nasi Kotak)		Orang / Kali		560	30.000	16.800.000		
	- Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan/Lembur (snack)		Orang / Kali		560	20.000	11.200.000		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						36.000.000		
	- Jasa Tenaga Administrasi Kantor		OB		72	500.000	36.000.000		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik						2.609.468		
	- Biaya Beban Listrik P1		Kwh		1.457,803352	1.790	2.609.468		
5.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						4.380.000		
	- Pemeliharaan Sarana Kantor (Personal Computer/ Notebook)		Unit/Tahun		6	730.000	4.380.000		
						125.000	0		
5.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer						2.760.000		
	- Pemeliharaan Sarana Kantor (Printer)		Unit/Tahun		4	690.000	2.760.000		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Perjalanan Dinas Dalam Daerah						21.250.000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam		OH		125	170.000	21.250.000		
7.01.03.2.02.03	***Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan***	***Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat***	***Kelurahan***	***1***			***258.000.000***	***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Pedapatan Bagi Hasil Pajak***	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan						85.200.000		
	- Imam Masjid		OB		72	250.000	18.000.000		
	- Bilal		OB		72	250.000	18.000.000		
	- Khatib		OB		72	250.000	18.000.000		

	- Guru Mengaji		OB		120	200.000	24.000.000		
	- Guru Sekolah Minggu		OB		36	200.000	7.200.000		
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan						28.800.000		
	- Jasa Upah Kader Posyandu		OB		192	150.000	28.800.000		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum						144.000.000		
	- Jasa Upah Ketua RW Kelurahan		OB		96	1.500.000	144.000.000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Lamasi Tahun 202 adalah Penjabaran dari Rencana Kerja Strategis Kecamatan Lamasi pada Tahun 2025 – 2026. Rencana Kerja Kecamatan Lamasi Tahun 2025 ini memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Lamasi pada tahun 2025, dengan plafon anggaran yang telah ditetapkan, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pemerintah Kecamatan sekaligus Pelayan Masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Lamasi dan Rencana Kerja SKPD yang lain menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya di jabarkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah,dimana dalam pelaksanaannya yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2025 untuk masing-masing SKPD.

Penyusunan Renja Kecamatan Lamasi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Untuk itu masih diperlukan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan dokumen anggaran yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 mendatang.

Lamasi, Juli 2024
Camat Lamasi,

H. SUWARSO, S.Sos., M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP : 19681226 199201 1 001

RENJA SKPD

(RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH)

BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK

TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK

KABUPATEN LUWU

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan Kehadirat ALLAH SWT yang mana Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu telah dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Tahun 2025 merupakan tahun Kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 2 (dua) tahun ke depan dari pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2025-2026. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja dan mengacu pada Renstra tahun 2025-2026 dan RKPD Kab. Luwu Tahun 2025. Kedepan diharapkan Rencana Kerja Tahun 2025 ini akan dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Kami juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu.

Akhirnya dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi yang terbaik dalam pembangunan Kabupaten Luwu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu akan terus berupaya lebih membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel. Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini akan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu.

Belopa, Juli 2024

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN LUWU

H. KAMAL, S.Pd, MM
PKTW: Pembina Tk.I
NIP :196512311991031100

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 13

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 14

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 16

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 27

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 27

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 30

3.3. Program dan Kegiatan 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 44

BAB V PENUTUP 84

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel T-C.29 10

Tabel T-C.30 14

Tabel T-C.31 17

Tabel T-C.33 33

Tabel 4.1 45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu. Rencana Kerja Tahun 2025 juga dirumuskan untuk mensinkron dalam rangka menunjang visi, misi Kepala Daerah pada Tahun 2025 dengan program dan kegiatan yang mengakomodir urusan pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah pada Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tentang Kerukunan Umat Beragama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembauran Kebangsaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 506);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026;

21. Peraturan Bupati Luwu Nomor 111 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi kepala daerah Tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi serta tercapai sasaran pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Luwu.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rencana Kerja, Landasan Hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Tahun 2025.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu

penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Tahun 2025.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang Program dan Kegiatan secara rinci.

BABA V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Tahun 2023 yang berorientasi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan meningkatkan penanganan kantrantibmas, pendidikan politik bagi parpol dan masyarakat, pembinaan ormas dan OKP serta peningkatan peran forum-forum di Kabupaten Luwu dengan target capain renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah 100%.

Pelaksanaan program pada Tahun 2023 berdasarkan target yang ingin dicapai, yaitu nol kasus Kantrantibmas dengan upaya melakukan deteksi dini yang terdiri dari unsur masyarakat dan pihak vertikal dengan hubungan koordinasi dan informasi melalui program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Pada Tahun 2018 telah berubah kebijakan pemerintah dengan perubahan nomenklatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di daerah.

Juga Nol kasus terhadap intoleransi perbedaan agama dan keyakinan di Kabupaten Luwu. Seiring dengan kemajemukan kepercayaan dan yang ada untuk menjaga keakraban dalam kehidupan sosial telah

dilakukan pembinaan kerukunan umat beragama dengan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama terkait permasalahan yang ada dengan wadah Forum Kerukunan Umat Beragama melaui Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.

Terdapat beberapa perkumpulan suku yang merupakan Mitra Masyarakat terkait pengembangan Nasionalisme dan juga mitra pemerintah Kabupaten Luwudalam pembangunan. Untuk memupuk rasa nasionalisme dari berbagai suku bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mewadahi keberadaan perkumpulan suku dengan bebagai suku bangsa melalui Forum Pembauran Kebangsaan dan Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan.

Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada Tahun 2018 dengan 82,81 persen dengan memberi pemahaman penting berpolitik kepada parpol dan masyarakat secara umum untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan menentukan arah demokrasi serta pendewasaan berpolitik. Pada Tahun 2023 dengan target yang ingin dicapai melalui program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dilaksanakan peningkatan kesadaran politik masyarakat kepada partai politik dan masyarakat.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 sudah berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada rencana kerja pada Tahun 2025 untuk lebih akurasi terhadap koordinasi dan

informasi upaya deteksi dini berbagai permasalahan serta menuju Pemilihan Umum, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan kepala daerah di Kabupaten Luwu perlu menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan program kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran yang diharapkan.

Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 yaitu berupa :

1. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait kebutuhan pagu anggaran tahun selanjutnya.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi lebih intens kepada pihak vertikal dan forum-forum yang ada untuk saling berbagi informasi terkait Penanganan Konflik Sosial.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023
KabupatenLuwu

OPD:BadanKesatuanBangsa danPolitik

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perubahan Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	12.254.564.717	2.791.965.660	3.017.067.805	2.652.298.593	87,91%	2.813.803.712	*8.258.067.965*	67,39%
8	01	01	20.1		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun*	*79.342.880*	*7.865.090*	26.452.790	*21.025.290*	*79,48%*	25.064.170	53.954.550	68,00%
8	01	01	20.2		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun*	*9.652.094.642*	*2.223.466.340*	2.306.322.940	*2.166.740.509*	*93,95%*	2.333.019.925	*6.723.226.774*	*69,66%*
8	01	01	20.3		*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun*	*6.960.910*	*1.309.700*	*2.342.500*	*2.342.500*	*100,00%*	*1.089.600*	*4.741.800*	*68,12%*
8	01	01	20.5		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun*	*120.248.800*	*10.000.000*	*34.966.250*	*1.966.250*	*5,62%*	-	*11.966.250*	*9,95%*
8	01	01	20.6		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah Jenis Penyelenggaranaan Administrasi umum Perangkat Daerah*	*1.137.471.475*	*270.275.330*	*266.956.675*	*178.994.510*	*67,05%*	*183.776.817*	*633.046.657*	*55,65%*
8	01	01	2.07		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan*	*107.000.000*	-	*42.000.000*	-	*00,00%*	*15.000.000*	*15.000.000*	*14,02%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perubahan Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8	*01*	*01*	*2.08*		*Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	*Presentase Unit Kerja perangkat daerah yang mendapat jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	*898.342.600*	*238.531.200*	*274.800.000*	*234.294.484*	*85,26%*	*211.885.000*	*684.710.684*	*76,22%*
8	01	01	2.09		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Barang MilikDaerah yang dipelihara*	*253.103.410*	*40.518.000*	*63.226.650*	*46.935.050*	*74,23%*	*43.968.200*	*131.421.250*	*51,92%*
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	446.567.859	22.814.450	121.291.059	664.704.380	548,02%	691.764.498	137.928.3328	308,86%
8	01	02	2.01		*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	*Jumlah Laporan Kegiatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	*446.567.859*	*22.814.450*	*121.291.059*	*664.704.380*	*548,02%*	*691.764.498*	*137.928.3328*	*308,86%*
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Hak-HakPolitik Masyarakat	5.070.128.585	1.119.962.727	1.308.669.404	1.271.374.954	97,15%	57.516.383.628	59.907.721.309	1181,58%
8	01	03	2.01		*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*	*Jumlah Laporan kegiatan bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilukada, serta pemantauan situasi politik*	*5.070.128.585*	*1.119.962.727*	1.308.669.404	1.271.374.954	97,15%	*57.516.383.628*	*59.907.721.309*	*1181,58%*
8	**01**	**04**			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas se Kabupaten Luwu	124.277.550	17.474.700	33.499.250	314.936.600	940,13%	7.068.250	339.479.550	273,16%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perubahan Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8	01	04	2.01		*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	*Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat*	*124.277.550*	*17.474.700*	*33.499.250*	*314.936.600*	*940,13%*	*7.068.250*	*339.479.550*	*273,16%*
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Menurunnya KasusPenyakit Masyarakat	212.839.810	24.246.250	58.998.290	12.605.400	21,37%	7.332.500	44.184.150	20,76%
8	01	05	2.01		*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*	*Jumlah Laporan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama*	*212.839.810*	*24.246.250*	*58.998.290*	*12.605.400*	*21,37%*	*7.332.500*	*44.184.150*	*20,76%*
8	**01**	**06**			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Luwu	1.481.162.390	90.437.500	483.921.790	846.805.872	174,99%	1.434.450.994	2.371.694.366	160,12%
8	01	06	2.01		*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik*	*1.481.162.390*	*90.437.500*	*483.921.790*	*846.805.872*	*174,99%*	*1.434.450.994*	*2.371.694.366*	*160,12%*

Belopa, Juli 2024

KEPALA BADAN,

H. KAMAL, S.Pd.MM

PKT : Pembina Tk.I

NIP : 196512311991031100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Kab. Luwu dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kab. Luwu Tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik bagi Parpol, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Aparatur yang telah memahami pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggungjawab. Hal ini mengandung pengertian bahwa Badan Kesbangpol Kab. Luwu sebagai lembaga teknis Pemerintah Kab. Luwu di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas untuk menyelenggarakan mediasi, fasilitasi, dan komunikasi bagi institusi masyarakat itu sendiri untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai betapa pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggungjawab.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat madani (civil society) di bidang pemahaman dan kemampuan di bidang komponen masyarakat dalam menjaga dan membangun ketahanan sosial, ketahanan budaya, sumber daya alam dan ekonomi di Kabupaten Luwu terutama di kalangan Ormas/LSM, Tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda di Kab. Luwu.
3. Terselenggaranya pengembangan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di Kab. Luwu. Badan Kesbangpol Kab. Luwu memiliki tugas untuk menanamkan nilai-nilai budaya luhur demi terciptanya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kab. Luwu dalam kondisi

heterogen (suku, agama, ras dan antar golongan), penanaman nilai-nilai tersebut akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan negara demi NKRI.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu

No.	Indikator	Target SPM	IKK	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1.	Verifikasi Dokumen Bantuan Keuangan Parpol			12 Partai	12 Partai	12 Partai	9 Partai	12 Partai	12 Partai	12 Partai	9 Partai	
2.	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang terdaftar/berlegalitas KEMENKUMHAM			120 Ormas/ LSM	130 Ormas/ LSM	150 Ormas/ LSM	150 Ormas/ LSM	92 Ormas/ LSM	95 Ormas/ LSM	120 Ormas/ LSM	130 Ormas/ LSM	
3.	Jumlah elemen masyarakat (parpol) yang mendapatkan pembinaan politik			12 Partai	12 Partai	12 Partai	12 Partai	12 Partai	12 Partai	12 Partai	12 Partai	
4.	Rasio Pertemuan / Rapat Forkopimda			4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	3 keg	4 keg	4 keg	
5.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk			0%	0%	05	05	0%	0,58%	0%	0%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kab. Luwu berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi, agama dan juga situasi pertahanan keamanan yang terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kabupaten Luwu dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesbangpol Kab. Luwu sebagai berikut :

1. Pendidikan politik masih rendah dapat dilihat dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada di Kab. Luwu.
2. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah, permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok atau golongan, krisis kepercayaan pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum dan terjadinya demonstrasi yang memprotes pemerintah.
3. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dikarenakan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat juga arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya dan ekonomi memunculkan akses-akses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional.
4. Meningkatnya Penyakit Masyarakat (Pengguna Narkoba) seiring dengan perkembangan wilayah perkotaan. Penyakit masyarakat yang marak ditemukan di Kabupaten Luwu adalah kasus pecandu narkoba. Praktek ini semakin meresahkan ketika pelajar dan remaja mulai terlibat di dalamnya. Perpindahan orang dan barang yang mulai mengalami peningkatan dari dan menuju Kab. Luwu, memunculkan berbagai dampak yang senantiasa harus diantisipasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) pada Tahun 2025 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu Tahun 2025 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Luwu.

Pada Tahun 2025 Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol Kab. Luwu terjadi perubahan nomenklatur OPD berdasarkan Permengari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan juga perubahan nomenklatur program berdasarkan permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan terus berkelanjutan pada Tahun 2025 agar lebih efektif untuk deteksi dini terkait permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Pada rencana kerja Tahun 2025 akan disinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Luwu sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja Tahun 2025.

Berikut ini adalah tabel review rancangan Renja Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu Tahun 2025.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**100%**	**3.113.143.916**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**100%**	**3.120.745.842**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**10 dokumen**	**66.250.000**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**10 dokumen**	***66.249.224***
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu, Belopa, Senga	6 dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu, Belopa, Senga	6 dokumen	49.999.956
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	4,999,721
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	2,999,932
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	749.772
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	7,499,843

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**4 jenis**	**2.483.716.222**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**4 jenis**	***2.456.064.386***
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu, Belopa, Senga	25 OB	2.228.716.222	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu, Belopa, Senga	25 OB	2.228.716.222
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 Dokumen	175.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 Dokumen	147.360.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 laporan	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 laporan	34,999,664
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	5 laporan	45.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	5 laporan	44.988.500
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**1 Jenis**	**2.500.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**1 Jenis**	**2.665.000**
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	4 laporan	2.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	4 laporan	2.665.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**3 jenis**	**84.700.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**3 jenis**	***101.329.864***
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	45 paket	29.700.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	45 paket	29.700.000
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Luwu, Belopa, Senga	240 dokumen	5.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Luwu, Belopa, Senga	240 dokumen	4,999,864
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 orang	66.630.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Administrasi Umum	**Jumlah Jenis Penyelenggaranaan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**7 jenis**	**163.450.000**	**Administrasi Umum**	**Jumlah Jenis Penyelenggaranaan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**7 jenis**	***162.187.005***
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Luwu	10 Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Luwu	10 Paket	3.754.855
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu	10 Paket	5.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu	10 Paket	4,996,405
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	5 paket	7.850.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	5 paket	7,850,845
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	36 dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	36 dokumen	3,600,000
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	40 paket	42.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	40 paket	41.999.840
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	170 laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	90 laporan	99,985,060
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**4 unit**	**24.927.694**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**4 unit**	**43,008,950**
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya I yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	4 unit	24.927.694	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya I yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	4 unit	43,008,950
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**100%**	**232.600.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**100%**	**228.996.000**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 laporan	7.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 laporan	6,996,000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 laporan	225.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 laporan	222,000,000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**24 unit**	**55.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**24 unit**	**60.245.413**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Luwu, Belopa, Senga	9 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Luwu, Belopa, Senga	9 unit	54,965,413
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Luwu, Belopa, Senga	15 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Luwu, Belopa, Senga	15 Unit	5,280,000
II	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**100%**	**1.289.892.210**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	**Kab. Luwu, Belopa, Senga**	**100%**	**1.289.931.078**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	***Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***Kab. Luwu,***	***321 orang***	***1.289.892.210***	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***Kab. Luwu,***	***200 orang***	***1.289.931.078***
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	500.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	500.000
2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	200 Orang	18.571.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	200 orang	18.570.718

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	50 Orang	20.821.210	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	50 Orang	20.860.860
4	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kab. Luwu, Belopa, Senga	71 Orang	1.250.000.000	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kab. Luwu, Belopa, Senga	71 orang	1,249,999,500
III	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Fungsinya sesuai Peraturan Perundang-Undangan**	**Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**1.215.500.000**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Fungsinya sesuai Peraturan Perundang-Undangan**	**Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**1.212.327.199**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	***Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Politik, Peningkatan Peran Parpol dan Pengembangan Etika Budaya Politik***	***Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan***	***5 kegiatan***	***1.215.500.000***	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik***	***Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Politik, Peningkatan Peran Parpol dan Pengembangan Etika Budaya Politik***	***Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan***	***5 kegiatan***	***1.212.327.199***
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Dokumen	500.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Dokumen	500.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
2	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Luwu, Belopa, Senga	75 orang	1.180.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Luwu, Belopa, Senga	75 orang	1,179,999,815
3	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	25.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 orang	21.838.160
4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	9.989.22
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister**	**Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**15.500.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister**	**Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**15.504.760**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	***Jumlah ormas yang memiliki legalitas hukum***	***Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan***	***150 Ormas***	***15.500.000***	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	***Jumlah ormas yang memiliki legalitas hukum***	***Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan***	***150 Ormas***	***15.504.760***

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Dokumen	500.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Dokumen	500.000
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 Dokumen	5,004,915
3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	9.999.845
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**130.500.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**126.035.602**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	***Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan***	***Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa***	***135 orang***	***130.500.000***	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	***Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan***	***Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa***	***135 orang***	***126.035.602***
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	500,000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	500.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	95.536.565
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang	20.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang	19.999.909
4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	9.999.128
VI	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah**	**Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**654.800.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah**	**Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**654.786.892**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	***Jumlah kebijakan teknis untuk kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik yang disusun***	***Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa***	***12 laporan***	***654.800.000***	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	***Jumlah kebijakan teknis untuk kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik yang disusun***	***Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa***	***12 laporan***	***654.786.892***
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Dokumen	500.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Dokumen	500.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 orang	44.300.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 orang	44,296,270
3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 laporan	9.990.676
4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 dokumen	600.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 dokumen	599,999,946

Belopa, Juli 2024

KEPALA BADAN,

H. KAMAL, S.Pd, MM
PKT : Pembina Tk.I
NIP : 19651231991031100

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rancangan rencana kerja Badan Kesbangpol Kab. Luwu didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Program dan kegiatan masyarakat tidak terdapat pada Badan Kesbangpol Kab. Luwu, sehingga usulan program dan kegiatan masyarakat baik yang diusulkan dari kelompok masyarakat, Ormas/LSM, perguruan tinggi serta OPD Kabupaten tidak bisa disajikan. Adapun untuk penelaahan program dan kegiatan masyarakat pada Badan Kesbangpol Kab. Luwu terdapat nihil.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga merujuk pada kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen, dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik dengan indikator kinerja berkaitan dengan urusan administrasi internal serta pendidikan kewarganegaraan.
2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang diserahkan pada pembangunan nilai wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa serta pendidikan kewarganegaraan.
3. Kewaspadaan Nasional yang diarahkan politik dan pemerintahan umum kepada manajemen konflik, penanganan dan penyelesaian konflik, dokumen laporan situasi kondisi politik se Indonesia serta penyusunan rumus kebijakan berkenaan dengan kewaspadaan nasional.
4. Ketahanan Nasional, Seni Budaya, Agama dan Kemsyarakatan dengan indikator diarahkan pada :

a. Fungsi, peran, koordinasi dan fasilitasi berkenaan dengan organisasi/ lembaga kemasyarakatan (seni, budaya, agama dan kemasyarakatan) dan forum publik, penanganan masalah sosial serta perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan-kebijakan berkenaan dengan ketahanan seni budaya, agama dan kemasyarakatan.
b. Ketahanan ekonomi dengan indikator kinerja diarahkan pada penyusunan rumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan ekonomi, fasilitasi, kerja sama, pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi serta laporan stabilitas ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat.

5. Politik dalam negeri yang diarahkan pada pemilihan umum, partisipasi dan komunikasi politik, lembaga perwakilan, laporan dan pemantauan perkembangan politik dalam negeri, pendidikan politik dalam negeri.

Merujuk pada kebijakan nasional pada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu mencoba untuk menerapkan beberapa kebijakan yang sekiranya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di Kabupaten Luwu sebagai berikut :

1. Kesekretariat, dengan indikator kinerja diarahkan sebagai penunjang penyelenggaraan administrasi badan serta pemenuhan sarana dan prasarana badan serta penyelenggara koordinasi badan/forum/ormas di Kabupaten Luwu.

2. Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dengan indikator kinerja diarahkan pada pembinaan, dan pengembangan ideologi negara dan bela negara serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa, kedua hal ini meliputi fasilitasi antara lain : FKUB, FPK, FKDM, dan sosialisasi ideologi negara dan bela negara serta wawasan dan pembauran kebangsaan bagi masyarakat, serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional maupun daerah berkenaan dengan ideologi negara dan bela negara serta wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan.
3. Kewaspadaan Daerah yang difokuskan kepada kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen serta penanganan konflik dan pengawasan orang asing yang meliputi manajemen konflik, penanganan dan penyelesaian konflik, dokumen laporan situasi kondisi politik di Kabupaten Luwu, pendataan dan pengawasan serta pemantauan orang asing, serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah berkaitan situasi dan kondisi ipoleksosbudhankam.
4. Ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan dengan indikator kinerja diarahkan pada ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi, serta ketahanan seni, budaya, agama kepercayaan dan organisasi kemasyarakatan meliputi penyelenggaraan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah-daerah berkaitan dengan ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan.
5. Politik Dalam Negeri dengan indikator kinerja diarahkan pada fasilitasi partai politik dan pemilihan umum serta fasilitasi kelembagaan dan pendidikan politik, pendidikan politik masyarakat serta penyusunan

rumusan kebijakan yang berhubungan dengan politik dalam negeri di Kabupaten Luwu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kab. Luwu Tahun 2025 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Kerja Strategis Tahun 2025-2026. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 pada Badan Kesbangpol Kab. Luwu sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.
2. Meningkatnya daya saing daerah.

b. Sasaran :

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Berdasarkan hal tersebut di atas serta mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka disusunlah 6 program yang membawahi 13 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan yaitu :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
    1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
    1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
    1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
    1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
    1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN LUWU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	14	15	16	17
						BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.419.331.373,00					6.592.157.145,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				6.419.331.373,00					6.592.157.145,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.419.331.373,00					6.592.157.145,00	
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100Persen	100 Persen	3.120.745.842,00				100Persen	3.221.988.234,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12Dokumen	6 Dokumen	66.249.224,00			pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	6Dokumen	68.237.500,00	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	6 Dokumen	49.999.956,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	6 Dokumen	51.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	4.999.721,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	1 Dokumen	5.150.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	2.999.932,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	1 Dokumen	3.090.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	749.772,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	1 Dokumen	772.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1 Laporan	7.499.843,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	1 Laporan	7.725.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	8Jenis	4 Jenis	2.456.064.386,00			pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	4Jenis	2.558.227.709,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	240 Orang/bulan	2.228.716.222,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	12 Orang/bulan	2.295.577.709,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	12 Dokumen	147.360.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	12 Dokumen	180.250.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1 Laporan	34.999.664,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	1 Laporan	36.050.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	12 Laporan	44.988.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	4 Laporan	46.350.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	2Jenis	1 Jenis	2.665.000,00			pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	1Jenis	2.575.000,00	
	8	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.665.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	2 Laporan	2.575.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	4Jenis	2 Jenis	101.329.864,00			pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	2Jenis	87.241.000,00	
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	45 Paket	29.700.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	50 Paket	30.591.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										

							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	494 Dokumen	240 Dokumen	4.999.864,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	247 Dokumen	5.150.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	2 Orang	66.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	2 Orang	51.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaranaan Administrasi umum Perangkat Daerah	12Jenis	6 Jenis	162.187.005,00			pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	6Jenis	168.353.500,00	
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	10 Paket	3.754.855,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	3 Paket	5.150.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	10 Paket	4.996.405,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	10 Paket	5.150.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	5 Paket	7.850.845,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	5 Paket	8.085.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	36 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	60 Dokumen	3.708.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material										
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	80 Paket	40 Paket	41.999.840,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	40 Paket	43.260.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	90 Laporan	99.985.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	150 Laporan	103.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	17Unit	8 Unit	43.008.950,00			pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	9Unit	25.675.525,00	
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	4 Unit	43.008.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	7 Unit	25.675.525,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	6Jenis	3 Jenis	228.996.000,00			pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	3Jenis	239.578.000,00	
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	6.996.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	12 Laporan	7.210.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	222.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	12 Laporan	232.368.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	28Unit	14 Unit	60.245.413,00			pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	14Unit	72.100.000,00	
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		9 Unit	54.965.413,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)		66.950.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15 Unit	5.280.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD daerah)	5 Unit	5.150.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	1.289.931.078,00				100 %	1.337.159.911,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	642Orang	73 Orang	1.289.931.078,00			Pelajar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Etnis	321Orang	1.337.159.911,00	
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										

							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	Pelajar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Etnis	1 Dokumen	5.150.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400 Orang	200 Orang	18.570.718,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Pelajar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Etnis	200 Orang	19.509.911,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	30 Orang	20.860.860,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Pelajar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Etnis	50 Orang	25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka										
							Jumlah Paskibraka	142 Orang	73 Orang	1.249.999.500,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pelajar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Etnis	71 Orang	1.287.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Fungsinya sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	1.212.327.199,00				100 %	1.221.565.000,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Politik, Peningkatan Peran Parpol dan Pengembangan Etika Budaya Politik	10Kegiatan	1 Kegiatan	1.212.327.199,00			Aparatur, Pengurus Partai Politik, Generasi Muda, dan Tokoh Masyarakat	5Kegiatan	1.221.565.000,00	
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										

							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	Aparatur, Pengurus Partai Politik, Generasi Muda, dan Tokoh Masyarakat	1 Dokumen	515.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	145 Orang	30 Orang	1.179.999.815,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA	Aparatur, Pengurus Partai Politik, Generasi Muda, dan Tokoh Masyarakat	75 Orang	1.185.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	265 Orang	50 Orang	21.838.160,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Aparatur, Pengurus Partai Politik, Generasi Muda, dan Tokoh Masyarakat	135 Orang	25.750.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Laporan	3 Laporan	9.989.224,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Aparatur, Pengurus Partai Politik, Generasi Muda, dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	10.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister	100 %	100 %	15.504.760,00				100 %	20.600.000,00	

	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang memiliki legalitas hukum	300ormas	50 ormas	15.504.760,00			Organisasi Masyarakat, LSM dan Yayasan	150ormas	20.600.000,00	
	8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	Organisasi Masyarakat, LSM dan Yayasan	1 Dokumen	5.150.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	24 Dokumen	12 Dokumen	5.004.915,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	Organisasi Masyarakat, LSM dan Yayasan	12 Dokumen	5.150.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6 Laporan	3 Laporan	9.999.845,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	Organisasi Masyarakat, LSM dan Yayasan	3 Laporan	10.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 %	100 %	126.035.602,00				100 %	134.400.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan	700Orang	350 Orang	126.035.602,00			Wilayah Kabupaten Luwu	350Orang	134.400.000,00	
	8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	1 dokumen Dokumen	500.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	Wilayah Kabupaten Luwu	1 Dokumen	500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	50 Orang	95.536.565,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Wilayah Kabupaten Luwu	200 Orang	103.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	50 Orang	19.999.909,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Wilayah Kabupaten Luwu	150 Orang	20.600.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Laporan	3 Laporan	9.999.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Wilayah Kabupaten Luwu	3 Laporan	10.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah	100 %	100 %	654.786.892,00				100 %	656.444.000,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kebijakan teknis untuk kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik yang disusun	24Laporan	12 Laporan	654.786.892,00			OPD/Instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Aparatur, Forkopimda dan Orang Asing	12Laporan	656.444.000,00	
	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	OPD/Instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Aparatur, Forkopimda dan Orang Asing	1 Dokumen	515.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									

							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	350 Orang	50 Orang	44.296.270,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PAJAK DAERAH	OPD/Instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Aparatur, Forkopimda dan Orang Asing	210 Orang	45.629.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Laporan	3 Laporan	9.990.676,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	OPD/Instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Aparatur, Forkopimda dan Orang Asing	3 Laporan	10.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	24 Dokumen	12 Dokumen	599.999.946,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	RETRIBUSI DAERAH - LRA, LAIN-LAIN PAD YANG SAH, PENDAPATAN BAGI HASIL	OPD/Instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Aparatur, Forkopimda dan Orang Asing	12 Dokumen	600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	J U M L A H									6.419.331.373,00					6.592.157.145,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perancanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari pogram dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa pendanaan, semua itu akan sia-sia.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
8.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**			**3.120.745.842,-**		**Belopa**
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah**	**10 dokumen**			**66.249.224,-**	Pajak Daerah	
8.01.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**			**49.999.956,-**	Pajak Daerah	
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan							
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.938.386,-		
	Penjepit Kertas Spesifikasi : No. 107, Isi 12 Pcs		Pack	5	4.130,-	20.650,-		
	Buku Agenda Spesifikasi : Uk. A5, Isi 100 Lembar		Buah	5	37.760,-	188.800,-		
	Bolpoin Spesifikasi : Isi 12 Pcs, Non Gel		Pack	2	40.120,-	80.240,-		
	Map Batik Spesifikasi : Uk. F4 / Folio, Bahan Kertas Tebal		Buah	20	18.762,-	375.240,-		
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	2512	413,-	1.037.456,-		
	Jilid Dokumen Spesifikasi : Sampai 200 Halaman		Buku	10	23.600,-	236.000,-		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					426.570,-		
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 75 Gsm		Rim	5	76.700,-	383.500,-		
	Kertas Cover Jilid		Pack	1	43.070,-	43.070,-		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.500.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	[-] Lembur							
	Nasi Kotak		Orang / Kali	100	30.000,-	3.000.000,-		
	[-] Makanan dan Minuman Rapat							
	Snack		Orang/kali	30	20.000,-	600.000,-		
	Nasi Kotak		Orang/kali	30	30.000,-	900.000,-		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					10.035.000,-		
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan I / Non ASN		Orang / Jam	154	18.000,-	2.750.000,-		
	uang lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan III/PPPK		Orang / Jam	200	30.000,-	6.000.000,-		
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan IV		Orang / Jam	100	35.000,-	3.500.000,-		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					30.863.000,-		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	32	430.000,-	13.760.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	4	1.423.000,-	5.692.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	6	745.000,-	1.341.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan PPPK/Non ASN (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		OH	6	350.000,-	5.600.000,-		
	Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi : Makassar - Kab. Luwu		Orang / Kali	16				
8.01.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Dokumen**	**1**		**4.999.721,-**		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.395.561,-		
	Bolpoin Spesifikasi : Isi 12 Pcs, Non Gel		Lusin	1	40.120,-	40.120,-		
	Map Snelhekter Plastik Spesifikasi : Uk. F4 / Folio		Buah	20	4.672,-	93.440,-		
	Penjepit Kertas		Pack	3	22.656,-	67.968,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	Spesifikasi : No. 260, Isi 12 Pcs							
	Map Plastik / Zipper Bag		Buah	10	13.275,-	132.750,-		
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	4991	413,-	2.061.283,-		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.395.561,-		
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : Uk. 80 Gsm		Rim	5	40.120,-	40.120,-		
	Map Snelhekter Plastik Spesifikasi : Uk. F4 / Folio		Buah	20	4.672,-	93.440,-		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.000.000,-		
	Snack		Orang/kali	40	20.000,-	800.000,-		
	Nasi Kotak		Orang/kali	40	30.000,-	1.200.000,-		
8.01.01.2.01.0003	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Dokumen**	**1**		**2.999.932,-**		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					999.932,-		
	Penjepit Kertas Spesifikasi : No. 300, Isi 6 Pcs		Pack	5	70.800,-	354.000,-		
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	1564	413,-	645.932,-		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.000.000,-		
	Snack		Orang/kali	40	20.000,-	800.000,-		
	Nasi Kotak		Orang/kali	40	30.000,-	1.200.000,-		
8.01.01.2.01.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**	**Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD**	**Dokumen**	**1**		**749.772,-**		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					749.772,-		
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	1244	413,-	513.772,-		
	Jilid Dokumen		Buku	10	23.600,-	236.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
8.01.01.2.01.0006	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Dokumen**	**1**		**7.499.843,-**		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					753.843,-		
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	1311	413,-	541.443,-		
	Jilid Dokumen		Buku	10	21.240,-	212.400,-		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.000.000,-		
	Snack		Orang/kali	40	20.000,-	800.000,-		
	Nasi Kotak		Orang/kali	40	30.000,-	1.200.000,-		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					4.746.000,-		
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan I / Non ASN		Orang / Jam	42	18.000,-	756.000,-		
	uang lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan III/PPPK		Orang / Jam	84	30.000,-	2.520.000,-		
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan IV		Orang / Jam	42	35.000,-	1.470.000,-		
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun**	**Jenis**	**4**		***2.456.064.386,-***		
8.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**Orang/ bulan**	**240 Orang/ bulan**		**2.228.716.222,-**		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		Tahun	1	1.170.592.45,-	1.170.592.457,-		
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK		Tahun	1	89.700.800,-	89.700.800,-		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		Tahun	1	99.195.835,-	99.195.835,-		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		Tahun	1	126.638.750,-	126.638.750,-		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		Tahun	1	46.494.000,-	60,480,000,-		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		Tahun	1	10.547.250,-	10.547.250,-		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		Tahun	1	59.822.064,-	59.822.064,-		
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK		Tahun	1	2.027.760,-	2.027.760,-		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		Tahun	1	2.826.199,-	2.826.199,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		Tahun	1	14.932,-	14.932,-		
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		Tahun	1	1.188,-	1.188,-		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Tahun	1	79.163.090,-	79.163.090,-		
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		Tahun	1	2.408.076,-	2.408.076,-		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		Tahun	1	2,464,000,-	2,464,000,-		
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		Tahun	1	184.536,-	184.536,-		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		Tahun	1	7.224.228,-	7.224.228,-		
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		Tahun	1	553.584,-	553.584,-		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		Tahun	1	663,130,000,-	663,130,000,-		
8.01.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**Dokumen**	**12**		**147.360.000,-**		
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					8.400.000**,-**		
	Honorarium Pengurus Barang Spesifikasi : Nilai ASet Diatas Rp. 1 Milyar s/d 100 Milyar		OB	12	700.000,-	8.400.000,-		
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					12.000.000,-		
	User SIPD Perencanaan		OB	12	1.000.000,-	12.000.000,-		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					96.720.000,-		
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar		OB	12	860.000,-	10.320.000,-		
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Milyar		OB	12	2.210.000,-	26.520.000,-		
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta		OB	12	1.410.000,-	16.920.000,-		
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Milyar		OB	12	990.000,-	11.880.000,-		
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Milyar		OB	12	2.590.000,-	31.080.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					46.080.000,-		
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Nilai pagu belanja di atas Rp5 miliar s.d Rp10 Miliar		OB	12	2.520.000,-	30.240.000,-		
8.01.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Laporan**	**1**		**34,999,664,-**		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					689.164,-		
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	1228	413,-	507.164,-		
	Jilid Antero Biasa Spesifikasi : 200-300 Lembar		Eksemplar	4	45.500,-	182.000,-		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.500.000,-		
	Nasi Kotak		Orang / Kali	50	30.000,-	1.500.000,-		
	Snack		Orang / Kali	50	20.000,-	1.000.000,-		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					8.030.000,-		
	Uang lembur Non PNS		Orang / Jam	179	18.000,-	1.080.000,-		
	Uang Lembur PNS Golongan III/PPPK		Orang / Jam	330	30.000,-	4.500.000,-		
	Uang Lembur PNS Golongan IV		Orang / Jam	60	35.000,-	2.450.000,-		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					23.780.500,-		
	[-] ESELON III							
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		OH	5	426.900,-	2.134.500,-		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar KotaSULAWESI SELATAN		OH	7	430.000,-	3.010.000,-		
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Makassar Kab. Luwu		Orang/Kali	4	350.000,-	1.400.000,-		
	[-] Eselon IV/Golongan III/Non ASN							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	22	430.000,-	9.460.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan PPPK/Non ASN (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		OH	16	223.500,-	3.576.000,-		
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Makassar Kab. Luwu		Orang/Kali	12	350.000,-	4.200.000,-		
8.01.01.2.02.0007	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**				**44.988.500,-**		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.000.000,-		
	Nasi Kotak		Orang / Kali	100	30.000,-	3.000.000,-		
	Snack		Orang / Kali	100	20.000,-	2.000.000,-		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					16.208.000,-		
	Uang lembur Non PNS		Orang / Jam	206	18.000,-	3.708.000,-		
	Uang Lembur PNS Golongan III/PPPK		Orang / Jam	300	30.000,-	9.000.000,-		
	Uang Lembur PNS Golongan IV		Orang / Jam	100	35.000,-	3.500.000,-		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					23.780.500,-		
	[-] ESELON III							
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		OH	5	426.900,-	2.134.500,-		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar KotaSULAWESI SELATAN		OH	7	430.000,-	3.010.000,-		
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Makassar Kab. Luwu		Orang/Kali	4	350.000,-	1.400.000,-		
	[-] Eselon IV/Golongan III/Non ASN							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	22	430.000,-	9.460.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat		OH	16	223.500,-	3.576.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	Eselon IV/Golongan III, II, I dan PPPK/Non ASN (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN							
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Makassar Kab. Luwu		Orang/Kali	12	350.000,-	4.200.000,-		
8.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun**	**Jenis**	**1**		**2.665.00,-**		
8.01.01.2.03.0005	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Laporan**	**4**		**2.665.000,-**		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.065.000,-		
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	5000	413,-	2.065.000,-		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					600.000,-		
	Nasi Kotak		Orang/Kali	20	30.000,-	600.000,-		
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun**	**Jenis**	**3**		**101.329.864,-**		
8.01.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**Paket**	**45**		**29.700.000,-**		
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)							
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (PDH)		Pasang	45	660.000,-	29.700.000,-		
8.01.01.2.05.0005	**Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**Dokumen**	**240**		**4.999.864,-**		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.176.864,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	Ordner Plastik Spesifikasi : Uk. F4 / Folio		Buah	20	35.990,-	719.800,-		
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	3528	413,-	1.457.064,-		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					2.823.000,-		
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan I / Non ASN		Orang /Jam	21	18.000,-	378.000,-		
	Uang lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan III/PPPK		Orang /Jam	57	30.000,-	1.710.000,-		
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan IV		Orang /Jam	21	35.000,-	735.000,-		
8.01.01.2.05.0009	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**					**66.630.000,-**		
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					66.630.000,-		
	Diklat Kepemimpinan Eselon III Spesifikasi : Diklatpim III (Administrator)		Orang / Kegiatan	2	22.200.000,-	44.400.000,-		
	Diklat Kepemimpinan Eselon IV Spesifikasi : Diklatpim IV (Pengawas)		Orang / Kegiatan	1	22.230.000,-	22.230.000,-		
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Penyelenggaranaan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**Jenis**	**6**		**162.187.005,-**		
8.01.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**Paket**	**10**		**3.754.855,-**		
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					372.500,-		
	Sabun Spesifikasi : Cuci Piring		Botol	25	14.900,-	372.500,-		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					3.382.355,-		
	[-] Alat Kebersihan							
	Sapu Ijuk		Buah	5	37.665,-	188.325,-		
	Sapu Otomotis		Buah	5	101.969,-	509.845,-		
	Tempat Sampah		Buah	5	117.900,-	589.500,-		
	Pengharum Ruangan Elektrik		Set	5	103.828,-	519.140,-		
	Serokan Sampah		Buah	5	118.000,-	590.000,-		
	Kemoceng		Buah	5	58.900,-	294.500,-		
	Sapu Lidi		Buah	5	15.487,-	77.435,-		
	Sapu Plafon / Sawang		Buah	2	58.500,-	117.000,-		
	Sikat		Buah	1	76.600,-	76.600,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	[-] Bahan Pembersih							
	Sabun Pembersih Lantai		Per Bungkus	10	23.417,-	234.170,-		
	Sabun Pembersih Toilet		Unit	5	37.168,-	185.840,-		
8.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**Paket**	**10**		**4.996.405,-**		
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					4.996.405,-		
	Air Mineral Spesifikasi : 48 x 220 ml		Dos	24	20.600,-	494.400,-		
	Air Mineral Spesifikasi : Botol, 330 mL, Isi 24 Pcs		Dos	12	54.825,-	657.900,-		
	Minuman teh Celup Spesifikasi : 25 x 1,85 gr		Buah	12	13.950,-	167.400,-		
	Kecap Spesifikasi : Uk. 550 - 700 mL		Per Bungkus	10	37.913,-	379.130,-		
	Kopi Bubuk Spesifikasi : 250 gr		Per Bungkus	10	33.500,-	335.000,-		
	Gula pasir Spesifikasi : 1 kg		Per Bungkus	20	18.300,-	366.000,-		
	Susu Kental Manis Spesifikasi : Uk. 370 - 495 mL		Kaleng	15	15.735,-	236.025,-		
	Minuman Susu Steril/UHT Spesifikasi : 1 liter		Buah	7	24.400,-	170.800,-		
	Biskuit Kaleng Spesifikasi : Assorted 1600 gr		Kaleng	12	121.500,-	1.458.000,-		
	Mie Instant Spesifikasi : 80 gr All Variant		Dos	5	146.350,-	731.750,-		
8.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**Paket**	**5**		**7.850.845,-**		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.850.845,-		
	Cetak Umbul-umbul/ Spanduk/ Baliho Spesifikasi : Bahan Kain		M^2	35	61.360,-	2.147.600,-		
	Stempel Express		Buah	6	65.000,-	390.000,-		
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	12865	413,-	5.313.245,-		
8.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**Dokumen**	**36**		**3.600.000,-**		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					3.600.000,-		
	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Media Lokal @ 3 x 12		Examplar	36	100.000,-	3.600.000,-		
8.01.01.2.06.0007	**Penyediaan Bahan/Material**	**Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan**	**Paket**	**40**		**41.999.840,-**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					11.963.492,-		
	Bolpoin Gel		Pack	20	38.940,-	778.800,-		
	Bolpoin Non Gel		Pack	10	40.120,-	401.200,-		
	Block Note Uk. A6, Isi 50 Lembar		buah	35	12.390,-	433.650,-		
	Pensil 2B		pack	3	57.230,-	171.690,-		
	Spidol Besar Permanen		buah	10	8.968,-	89.680,-		
	Tinta Stempel		botol	7	8.260,-	57.820,-		
	Penjepit Kertas No. 105, Isi 12 Pcs		pack	25	3.540,-	88.500,-		
	Penjepit Kertas No. 107, Isi 12 Pcs		Pack	12	4.130,-	49.560,-		
	Penjepit Kertas No. 111, Isi 12 Pcs		Pack	12	6.372,-	76.464,-		
	Penjepit Kertas No. 300, Isi 6 Pcs		Pack	15	70.800,-	1.062.000,-		
	Penjepit Kertas No. 200, Isi 12 Pcs		Pack	24	15.340,-	368.160,-		
	Klip Kertas No. 05, Isi 100 Pcs		Pack	10	8.260,-	82.600,-		
	Penghapus Pensil		Pack	2	43.424,-	86.848,-		
	Paper Clip Warna		dos	10	57.165,-	571.650,-		
	Buku Agenda A5 isi 100 L		buah	20	37.760,-	755.200,-		
	Buku Folio isi 100 L		buah	26	21.712,-	564.512,-		
	Buku Folio isi 200 L		buah	15	40.816,-	612.240,-		
	Buku Kwarto isi 100 L		buah	25	14.042,-	351.050,-		
	Buku Kwarto isi 200 L		buah	15	23.010,-	345.150,-		
	Box / Kotak File		buah	15	31.152,-	467.280,-		
	Gunting Besar		buah	20	18.408,-	368.160,-		
	Penggaris Besi 30 cm		buah	10	9.145,-	91.450,-		
	Staples Besar No. 1		buah	3	233.286,-	699.858,-		
	Staples Kecil No. 10		buah	20	20.060,-	401.200,-		
	Isi Staples Kecil No.10, Isi: 20 Box		Pack	5	36.580,-	182.900,-		
	Buku Ekspedisi 100 L		Pack	5	12.390,-	61.950,-		
	Pulpen Balliner		lusin	12	228.660,-	2.743.920,-		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					20.719.505,-		
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : Uk. 75 Gsm		rim	50	63.720,-	3.186.000,-		
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 75 Gsm		rim	200	76.700,-	15.340.000,-		
	Kertas NCR Spesifikasi : Uk. F4, Warna Putih		rim	4	81.420,-	325.680,-		
	Kertas NCR Spesifikasi : Uk. F4, Warna Pink		rim	4	76.700,-	306.800,-		
	Kertas NCR Spesifikasi : Uk. F4, Warna Biru		rim	4	81.420,-	325.680,-		
	Kertas NCR Spesifikasi : Uk. F4, Warna Kuning		rim	4	76.700,-	306.800,-		
	Amplop Coklat Kecil Spesifikasi : Uk. 14 X 27 Cm, Isi 100 Lembar		pack	12	21.122,-	253.464,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	Amplop Coklat Besar Spesifikasi : Uk. 24 X 35 Cm, Isi 100 Lembar		Pack	2	42.983,-	85.966,-		
	Amplop Putih Besar Spesifikasi : Uk. 229-230 X 110 Mm, Isi: 100 Lembar		Pack	10	31.388,-	313.880,-		
	Amplop Putih Kecil Spesifikasi : Uk. 70 X 110 Mm, Isi: 100 Lembar		Pack	5	10.915,-	54.575,-		
	Kertas Cover Jilid Spesifikasi : Uk. A4, Isi: 100 Lembar		Pack	1	79.060,-	79.060,-		
	Kertas Piagam / Sertifikat Spesifikasi : Uk. F4 / Folio, Isi 100 Lembar		Pack	2	70.800,-	141.600,-		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					9.316.843,-		
	Tinta Printer Spesifikasi : Hitam/ Warna 65 - 70 Ml 003 664		botol	25	125.763,-	3.144.075,-		
	Tinta Printer Spesifikasi : Hitam / Warna 140 Ml 774		botol	12	262.959,-	3.155.508,-		
	Flashdisk Spesifikasi : Kap. 64 GB		unit	7	89.680,-	627.760,-		
	Mouse Nirkabel Spesifikasi : Silent Click, Premium		unit	5	477.900,-	2.389.500,-		
8.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Laporan**	**150**		**99.985.060,-**		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.000.000,-		
	Snack		Orang / Kali	40	20.000,-	800.000,-		
	Nasi Kotak		Orang / Kali	40	30.000,-	1.200.000,-		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					66.075.760,-		
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI							
	[-] Eselon II							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Sulawesi Selatan		Org/Hari	20	430.000,-	8.600.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		Org/Hari	7	581.400,-	4.069.800,-		
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II		Org/Hari	10	150.000,-	1.500.000,-		
	BBM Pertamax		Liter	160	16.726,-	2.676.160,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan PPPK/Non ASN (30%)		Org/Hari	7	223.500,-	1.564.500,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	Spesifikasi : SULAWESI SELATAN							
	[-] Eselon III							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	10	430.000,-	14.640.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		OH	7	426.900,-	2.560.000,-		
	Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi : Makassar - Kab. Luwu		Orang/kali	6	350.000,-	12.600.000,-		
	[-] Eselon IV/Golongan III/Non ASN							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	21	430.000,-	13.250.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan PPPK/Non ASN (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		OH	14	223.500,-	50.130.000,-		
	Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi : Makassar - Kab. Luwu		Orang/kali	14	350.000,-	9.150.000,-		
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI							
	[-] Eselon II							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : D.K.I. Jakarta		OH	5	530.000,-	2.650.000,-		
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II		OH	5	150.000,-	750.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I. Jakarta		OH	2	2.063.000,-	4.126.000,-		
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ekonomi Spesifikasi : Jakarta - Makassar		Orang/PP	1	3.829.000,-	3.829.000,-		
	Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi : Makassar - Kab. Luwu		Org/kali	2	350.000,-	700.000,-		
	[-] Eselon III							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : D.K.I. Jakarta		OH	5	530.000,-	2.650.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I. Jakarta		OH	2	992.000,-	1.984.000,-		
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ekonomi Spesifikasi : Jakarta - Makassar		Orang/PP	1	3.829.000,-	3.829.000,-		
	Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi : Makassar - Kab. Luwu		Org/kali	2	350.000,-	700.000,-		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					31.909.300,-		
	[-] Eselon II							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : D.K.I. Jakarta		OH	24	170.000,-	4.080.000,-		
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II		OH	24	75.000,-	4.080.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I. Jakarta		Liter	215	16.726,-	3.596.090,-		
	[-] Eselon III							
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerahPNS Golongan I dan Golongan II/PPPK/ Non ASN		OH	24	170.000,-	1.800.000,-		
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerahPNS Golongan I dan Golongan II/PPPK/ Non ASN		Liter	215	16.726,-	3.596.090,-		
	[-] Eselon IV/Golongan III/Non ASN							
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerahPNS Golongan I dan Golongan II/PPPK/ Non ASN		OH	75	170.000,-	12.750.000,-		
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerahPNS Golongan I dan Golongan II/PPPK/ Non ASN		Liter	120	16.726,-	2.007.120,-		
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**Unit**	**5**		**43.008.950,-**		
8.01.01.2.07.0006	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**Unit**	**5**		**43.008.950,-**		
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					2.539.950,-		
	Vacuum Cleaner Handled Spesifikasi : Batteri 2,200 mAh, Daya Hisap 8500 Pa		Unit	1	2.539.950,-	2.539.950,-		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					33.453.0000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	Komputer / PC Spesifikasi : Min. CPU Octacore, RAM 8 GB, SSD 256 GB		Unit	2	16.726.500,-	33.453.0000,-		
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					7.016.000.-		
	Printer Spesifikasi : All in One (Print, Copy dan Scan) Wifi / Non Wifi		Unit	2	3.508.000,-	7.016.000,-		
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Jenis**	**2**		**228.996.000,-**		
8.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**Laporan**	**12**		**6.996.000,-**		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					6.996.000,-		
	Tarif Internet dan TV Spesifikasi : Kap. 30 Mbps		Bulan	12	478.000,-	5.736.000,-		
	Tarif Langgangan TV Spesifikasi : TV Digital		Bulan	18	70.000,-	1.260.000,-		
8.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**				**222.000.000,-**		
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					18.000.000,-		
	Jasa Pengelola Sistem Informasi @ 1 x 12		OB	12	1.500.000,-	18.000.000,-		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					126.000.000,-		
	Agendaris @ 5 x 12		OB	60	1.000.000,-	60.000.000,-		
	Arsiparis @ 1 x 12		OB	12	1.000.000,-	12.000.000,-		
	Aspri Kepala Badan @ 1 x 12		OB	12	1.000.000,-	12.000.000,-		
	Caraka @ 1 x 12		OB	12	1.000.000,-	12.000.000,-		
	Tenaga Administrasi @ 2 x 12		OB	24	1.000.000,-	24.000.000,-		
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					60.000.000,-		
	Tenaga Operator Komputer @ 5 x 12		OB	60	1.000.000,-	60.000.000,-		
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					18.000.000,-		
	Supir Spesifikasi : Kepala Dinas		OB	60	1.500.000,-	18.000.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Unit**	**17**		***60.245.413,-***		
8.01.01.2.09.0002	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**Unit**	**9**		**54.965.413,-**		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					22.493.413,-		
	[-] BBM Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II							
	BBM Pertamax		Liter	700	16.726,-	11.708.200,-		
	[-] BBM Kendaraan Dinas Jabatan Eselon III							
	BBM Pertamax		Liter	450	16.726,-	10.840.000,-		
	[-] Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua							
	Oli Mesin Sepeda Motor Spesifikasi : Uk. 0,8 - 1 Liter		Botol	10	75.716,-	757.160,-		
	[-] Pelumas Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)							
	Oli Mesin Mobil Spesifikasi : Uk. 1 Liter, Mesin Diesel/Bensin		Botol	15	85.491,-	1.282.365,-		
	Oli Gardan Mobil Spesifikasi : Uk. 1 Liter		Botol	2	86.730,-	173.460,-		
	Oli Power Steering Mobil Spesifikasi : Uk. 946 mL - 1 Liter		Liter	2	126.408,-	252.816,-		
	Oli Transmisi Mobil Spesifikasi : Uk. 1 Liter, Mesin Manual/Mati		Botol	5	111.510,-	557.550,-		
	Oli Rem Mobil Spesifikasi : Uk. 1 Liter		Botol	2	117.581,-	235.162.-		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					5.500.000,-		
	Pajak STNK Roda 2/3 Spesifikasi : Kategori C		Unit/Tahun	4	250.000,-	1.000.000,-		
	Pajak STNK Roda 2/3 Spesifikasi : Kategori H		Unit/Tahun	3	500.000,-	1.500.000,-		
	Pajak STNK Roda 4/Lebih Spesifikasi : Kategori F		Unit/Tahun	2	1.500.000,-	3.000.000,-		
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					22.062.000,-		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Spesifikasi : Sulawesi Selatan		Unit/Tahun	0.6	36.770.000,-	22.062.000,-		
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					4.910.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Spesifikasi : Sulawesi Selatan		Unit/Tahun	1	4.910.000,-	4.910.000,-		
8.01.01.2.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**Unit**	**8**		**5.150.000,-**		
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					2.440.000,-		
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split		Unit	4	610.000,-	2.440.000,-		
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					1.460.000,-		
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/ Notebook		Unit	2	730.000,-	1.460.000,-		
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					1.380.000,-		
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer		Unit	2	690.000,-	1.380.000,-		
8.01.04	**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	**Cakupan penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	**%**	**100**		**1.289.931.078,-**		
8.01.04.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***Orang***	***321***		***1.289.931.078,-***		
8.01.04.2.01.0001	**Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	**Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun**	**Dokumen**	**1**		**500.000,-**		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat							
	[#] Penyusunan Program Kerja					500.000,-		
	Snack		Org/kali	10	20.000,-	200.000,-		
	Nasi Kotak		Org/kali	10	30.000,-	500.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
8.01.02.2.01.0003	**Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	**Orang**	**200**		**18.570.718,-**		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					3.820.000,-		
	[#] Upacara Bela Negara							
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Orang / Bulan	1	1.910.000,-	1.910.000,-		
	[#] Upacara Hari Lahir Pancasila							
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Orang / Bulan	1	1.910.000,-	1.910.000,-		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.150.718,-		
	[#] Upacara Bela Negara							
	Cetak Umbul-umbul/ Spanduk/ Baliho Spesifikasi : Bahan Kain		M2	20	61.360,-	1.227.200,-		
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	841	413,-	347.333,-		
	[#] Upacara Hari Lahir Pancasila							
	Cetak Umbul-umbul/ Spanduk/ Baliho Spesifikasi : Bahan Kain		M2	20	61.360,-	1.227.200,-		
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	845	413,-	348.985,-		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.000.000,-		
	[#] Upacara Bela Negara							
	Snack		Orang / Kali	100	20.000,-	2.000.000,-		
	Nasi Kotak		Orang / Kali	100	30.000,-	3.000.000,-		
	[#] Upacara Hari Lahir Pancasila							
	Snack		Orang / Kali	100	20.000,-	2.000.000,-		
	Nasi Kotak		Orang / Kali	100	30.000,-	3.000.000,-		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					800.000,-		
	[#] Upacara Bela Negara							
	Honorarium Pembawa Acara		OK	1	400.000,-	400.000,-		
	[#] Upacara Hari Lahir Pancasila							
	Honorarium Pembawa Acara		OK	1	400.000,-	400.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					800.000,-		
	[#] Upacara Bela Negara							
	Honorarium Rohaniwan		OK	1	400.000,-	400.000,-		
	[#] Upacara Hari Lahir Pancasila							
	Honorarium Rohaniwan		OK	1	400.000,-	400.000,-		
8.01.02.2.01.0004	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	**Orang**	**50**		**20.860.860,-**		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.910.000,-		
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Orang/ Bulan	1	1.910.000,-	1.910.000,-		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.450.860,-		
	Bolpoin Spesifikasi : Isi 12 Pcs, Gel		Pack	5	38.940,-	194.700,-		
	Buku Agenda Spesifikasi : Uk. A5, Isi 100 Lembar		Buah	50	37.760,-	1.888.000,-		
	Cetak Umbul-umbul/ Spanduk/ Baliho Spesifikasi : Bahan Kain		M2	6	61.360,-	368.160,-		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.500.000,-		
	Snack		Orang/ kali	50	20.000,-	1.000.000,-		
	Nasi Kotak		Orang/ kali	50	30.000,-	1.500.000,-		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					9.000.000,-		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		Orang/ jam	2	1.000.000,-	2.000.000,-		
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah/yang diSetarakan		Orang/ jam	3	900.000,-	2.700.000,-		
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat/Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang diSetarakan		Orang/ jam	2	1.400.000,-	2.800.000,-		
	Honorarium Moderator		Orang/ kegiatan	1	700.000,-	700.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	Honorarium Pembawa Acara		Orang/ kegiatan	1	400.000,-	400.000,-		
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					400.000,-		
	Honorarium Rohaniwan		Orang/ kegiatan	1	400.000,-	400.000,-		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					5.000.000,-		
	Sewa Kendaraan Tingkat Kabupaten		Orang/Hari	50	100.000,-	5.000.000,-		
8.01.02.2.01.0008	**Pembentukan Paskibraka**	**Jumlah Paskibraka**	**Orang**	**73**		**1.249.999.500,-**		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.910.000,-		
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Orang/ Bulan	1	1.910.000,-	1.910.000,-		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.548.640,-		
	Cetak Umbul-umbul/ Spanduk/ Baliho Spesifikasi : Bahan Kain		M2	25	61.360,-	1.534.000,-		
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	1330	413,-	549.290,-		
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi : 100-200 Lembar		Eksemplar	4	19.500,-	78.000,-		
	Bolpoin Spesifikasi : Isi 12 Pcs, Non Gel		Pack	1	40.120,-	40.120,-		
	Pensil Spesifikasi : Isi 12 Pcs, 2B		Pack	1	57.230,-	57.230,-		
	Cetak Sertifikat		Lembar	86	15.000,-	1.290.000,-		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					. 1.276.052,-		
	Amplop Putih Besar		Dos	4	31.388,-	125.552,-		
	Kertas HVS F4		Rim	15	76.700,-	1.150.500,-		
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					5.312.000,-		
	Air Mineral Spesifikasi : 48 x 220 ml @15 x 16		Dos	240	20.600,-	4.944.000,-		
	Air Meneral Spesifikasi : Galon isi ulang biasa @ 4 x 16		Galon	64	5.750,-	368.000,-		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					240.040.000,-		
	[-] Makanan dan Minuman Acara Malam Pengukuhan							
	Snack		Orang/ kali	400	20.000,-	8.000.000,-		
	Nasi Kotak		Orang/ kali	400	30.000,-	12.000.000,-		
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Transparansi							
	Snack		Orang/ kali	100	20.000,-	2.000.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	[-] Makanan dan Minuman Panitia Seleksi Paskibaraka							
	Snack		Orang/ kali	108	20.000,-	2.160.000,-		
	Nasi Kotak		Orang/ kali	108	30.000,-	3.240.000,-		
	[-] Makanan dan Minuman Pelatihan Pasukan Paskibraka							
	Snack @ 89 x 1 x 16		Orang/ kali	1.424	20.000,-	1.000.000,-		
	Nasi Kotak @ 89 x 3 x 16		Orang/ kali	4.272	30.000,-	1.500.000,-		
	[-] Makanan dan Minuman Peserta Seleksi Calon Paskibraka							
	Snack		Orang/ kali	1200	20.000,-	24.000.000,-		
	Nasi Kotak		Orang/ kali	600	30.000,-	18.000.000,-		
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Panitia							
	Snack		Orang/ kali	280	20.000,-	5.600.000,-		
	Nasi Kotak		Orang/ kali	280	30.000,-	8.400.000,-		
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					65.360.000,-		
	[-] Pakaian Komandan Pelatih dan Danki Paskibraka Lengkap							
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		Set	2	1.720.000,-	3.440.000,-		
	[-] Pakaian Komandan Upacara Lengkap							
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		Set	1	1.720.000,-	1.720.000,-		
	[-] Pakaian Paskibaraka Lengkap							
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		Set	31	1.720.000,-	53.320.000,-		
	[-] Pakaian Pengapit Paskibraka Lengkap							
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		Set	4	1.720.000,-	6.880.000,-		
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					46.250.000,-		
	[-] Baju Panitia							
	Baju Olahraga/Panitia Spesifikasi : Kaos		Pcs	35	150.000,-	5.250.000,-		
	[-] Pakaian Komandan Pelatih dan Danki Paskibraka Lengkap							
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Training Set		Set	2	500.000,-	1.000.000,-		
	[-] Pakaian Olahraga Pelatih							
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Training Set		Set	3	500.000,-	1.500.000,-		
	[-] Pakaian Paskibaraka Lengkap							
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Training Set		Set	73	500.000,-	36.500.000,-		
	[-] Pakaian Pengapit Paskibraka Lengkap							

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Training Set		Set	4	500.000,-	2.000.000,-		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					26.000.000,-		
	Honorarium Moderator		Orang/ kegiatan	10	700.000,-	7.000.000,-		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		Orang/ jam	10	1.000.000,-	10.000.000,-		
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah/yang diSetarakan		Orang/ jam	10	900.000,-	9.000.000,-		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					131.000.000,-		
	Jasa Koordinator Pelatih Spesifikasi : Paskibraka		Orang/ kegiatan	1	5.000.000,-	5.000.000,-		
	Jasa Pengapit Spesifikasi : Paskibraka		Orang/ kegiatan	5	3.000.000,-	15.000.000,-		
	Jasa Tim Pelatih Spesifikasi : Paskibraka		Orang/ kegiatan	9	3.000.000,-	27.000.000,-		
	Jasa Tim Pendamping/DPPI Spesifikasi : Paskibraka		Orang/ kegiatan	4	500.000,-	2.000.000,-		
	Jasa TIM Seleksi Spesifikasi : Paskibraka		Orang/ kegiatan	18	500.000,-	9.000.000,-		
	Uang Saku Paskibraka Spesifikasi : Paskibraka		Orang/ kegiatan	73	1.000.000,-	73.000.000,-		
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					3.000.000,-		
	Peliputan Spesifikasi : infotorial		kegiatan	1	3.000.000,-	3.000.000,-		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					13.088.000,-		
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan I / Non ASN		Orang / Jam	366	18.000,-	6.588.000,-		
	Uang lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan III/PPPK		Orang / Jam	100	30.000,-	3.000.000,-		
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan IV		Orang / Jam	100	35.000,-	3.500.000,-		
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					30.000.000,-		
	Sewa gedung /tempat pertemuan Spesifikasi : Dalam Kabupaten		Per Hari	12	2.500.000,-	30.000.000,-		
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					160.000.000,-		
	Sewa Hotel Spesifikasi : Hotel Tamu @ 20 x 16		Orang / Kamar Hari	320	500.000,-	160.000.000,-		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					523.214.808,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	[#] Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRAKA)							
	[-] Eselon II							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Sulawesi Selatan		Org/Hari	4	430.000,-	1.720.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		Org/Hari	3	581.400,-	1.744.200,-		
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II		Org/Hari	4	150.000,-	600.000,-		
	BBM Pertamax		Liter	100	16.726,-	1.672.600,-		
	[-] Eselon III							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	10	430.000,-	4.300.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		OH	9	426.900,-	3.842.100,-		
	Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi : Makassar - Kab. Luwu		Orang/kali	6	350.000,-	2.100.000,-		
	[-] Eselon IV/Golongan III/Non ASN							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	11	430.000,-	4,730,000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan PPPK/Non ASN (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		OH	5	223.500,-	1.117.500,-		
	Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi : Makassar - Kab. Luwu		Orang/kali	4	350.000,-	1.400.000,-		
	[#] Study Tour Wawasan Kebangsaan (PASKIBRAKA)							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Bali @ 100 x 4		Org/Hari	400	480.000,-	192.000.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Bali		Org/Hari	2	2.433.000,-	4.866.000,-		
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ekonomi Spesifikasi : Denpasar - Makassar		Orang / PP	100	2.631.000,-	263.100.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II		Org/Hari	5	150.000,-	750.000,-		
	BBM Pertamax Spesifikasi : Sulawesi Selatan		Liter	108	16.726,-	1.806.408,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi : Bali		Org/Hari	4	1.685.000,-	6.740.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I Spesifikasi : Bali		Org/Hari	27	1.138.000,-	30.726.000,-		
8.01.03	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Fungsinya sesuai Peraturan Perundang-Undangan**	**%**	**100**		**1.212.327.199,-**		
8.01.03.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik***	***Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Politik, Peningkatan Peran Parpol dan Pengembangan Etika Budaya Politik***	***Kegiatan***	***5***		***1.212.327.199,-***		
8.01.03.2.01.0001	**Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	**Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun**	**Dokumen**	**1**		**500.000,-**		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat							
	[#] Penyusunan Program Kerja					500.000,-		
	Snack		Org/kali	10	20.000,-	200.000,-		
	Nasi Kotak		Org/kali	10	30.000,-	500.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
8.01.03.2.01.0003	**Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	**Orang**	**30**		**1.179.999.815,-**		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.910.000,-		
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Orang/ Bulan	1	1.910.000,-	1.910.000,-		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					469.911,-		
	Buku Agenda Spesifikasi : Uk. A5, Isi 100 Lembar		Buah	5	37.760,-	188.800,-		
	Pulpen Spesifikasi : Balliner		Lusin	1	228.660,-	228.660,-		
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	127	413,-	52.451.-		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.500.000,-		
	Snack		Orang/kali	30	20.000,-	600.000,-		
	Nasi Kotak		Orang/kali	30	30.000,-	900.000,-		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					5.500.000,-		
	Ketua		Orang/ bulan	1	1.000.000,-	1.000.000,-		
	Anggota		Orang/ bulan	6	750.000,-	4.500.000,-		
	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					1.170.619.904,-		
	Partai Amanat Nasional (PAN)		Kali	1	105.658.688,-	105.658.688,-		
	Partai Bulan Bintang (PBB)		Kali	1	36.332.704,-	36.332.704,-		
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)		Kali	1	80.340.928,-	80.340.928,-		
	Partai Demokrat		Kali	1	119.772.480,-	119.772.480,-		
	Partai Gerindra		Kali	1	85.037.888,-	85.037.888,-		
	Partai Golongan Karya (GOLKAR)		Kali	1	131.961.664,-	131.961.664,-		
	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)		Kali	1	51.082.304,-	51.082.304,-		
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		Kali	1	92.839.424,-	92.839.424,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		Kali	1	58.832.288,-	58.832.288,-		
	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)		Kali	1	79.212.512,-	79.212.512,-		
	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)		Kali	1	115.963.360,-	115.963.360,-		
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		Kali	1	213.585.664,-	213.585.664,-		
8.01.03.2.01.0004	**Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	**Orang**	**50**		**21.838.160,-**		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.970.000,-		
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Orang/ Bulan	1	1.970.000,-	1.970.000,-		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					368.160,-		
	Cetak Umbul-umbul/ Spanduk/ Baliho Spesifikasi : Bahan Kain		M2	6	61.360,-	368.160,-		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.500.000,-		
	Snack		Orang/kali	50	20.000,-	1.000.000,-		
	Nasi Kotak		Orang/kali	50	30.000,-	1.500.000,-		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					9.500.000,-		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		Orang / Jam	2	1.000.000,-	2.000.000,-		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah		Orang / Jam	2	1.400.000,-	2.800.000,-		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		Orang / Jam	4	900.000,-	900.000,-		
	Honorarium Moderator		Orang / Kegiatan	1	700.000,-	700.000,-		
	Honorarium Pembawa Acara		Orang / Kegiatan	1	400.000,-	400.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					5.000.000,-		
	Sewa Kendaraan Tingkat Kabupaten		Orang/Hari	50	100.000,-	5.000.000,-		
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					2.500.000,-		
	Sewa gedung /tempat pertemuan Spesifikasi : Dalam Kabupaten		Hari	1	2.500.000,-	2.500.000,-		
8.01.03.2.01.0005	**Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	**Laporan**	**3**		**9.989.224,-**		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					7.717.800,-		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Sulawesi Selatan		Orang / Hari	9	430.000,-	3.870.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		Orang / Hari	2	426.900,-	853.800,-		
	Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi : Makassar - Kab. Luwu		Orang / Kali	6	350.000,-	2.100.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan PPPK/Non ASN (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		Orang / Hari	4	223.500,-	894.000,-		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.271.424,-		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Sulawesi Selatan		Orang / Hari	11	170.000,-	1.870.000,-		
	BBM Pertamax Spesifikasi : Sulawesi Selatan		Liter	24	16.726,-	401.424,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
8.01.04.2.01	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister**	**%**	**100**		**15.504.760,-**		
8.01.04.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	***Jumlah ormas yang memiliki legalitas hukum***	***Ormas***	***150***		**15.504.760,-**		
8.01.04.2.01.0001	**Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**	**Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun**	**Dokumen**	**1**		**500.000,-**		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat							
	[#] Penyusunan Program Kerja					500.000,-		
	Snack		Org/kali	10	20.000,-	200.000,-		
	Nasi Kotak		Org/kali	10	30.000,-	500.000,-		
8.01.04.2.01.0002	**Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**	**Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun**	**Dokumen**	**12**		**5.004.915,-**		
	[#] Verifikasi dan Rekomendasi SKP (Surat Keterangan Penelitian)							
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					541.100,-		
	Pulpen Spesifikasi : Balliner		Lusin	2	228.660,-	457.320,-		
	Buku Agenda Spesifikasi : Uk. F4, Isi 200 Lembar		Buah	2	41.890,-	83.780,-		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.835.000,-		
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 75 Gsm		Rim	50	76.700,-	3.835.000,-		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					628.815,-		
	Tinta Printer Spesifikasi : Hitam/ Warna 65 - 70 Ml 003 - 664		Botol	5	125.763,-	628.815,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
8.01.04.2.01.0005	**Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**	**Laporan**	**3**		**14.933.250,-**		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.128.795,-		
	[#] Pelayanan dan Pendaftaran SKT							
	Pulpen Spesifikasi : Balliner		Lusin	1	228.660,-	228.660,-		
	Buku Agenda Spesifikasi : Uk. F4, Isi 200 Lembar		Buah	2	41.890,-	83.780,-		
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	1000	413,-	413.000,-		
	[#] Pendataan Ormas Terdaftar, Teregister, dan Tercatat							
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	835	413,-	344.855,-		
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi : 100-200 Lembar		Eksemplar	3	19.500,-	58.500,-		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					141.600,-		
	[#] Pelayanan dan Pendaftaran SKT							
	Kertas Piagam / Sertifikat Spesifikasi : Uk. F4 / Folio, Isi 100 Lembar		Pak	2	70.800,-	141.600,-		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.000.000,-		
	[#] Pendataan Ormas Terdaftar, Teregister, dan Tercatat							
	Snack @ 10 x 4		Org/kali	40	20.000,-	800.000,-		
	Nasi Kotak @ 10 x 4		Org/kali	40	30.000,-	1.200.000,-		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.729.450,-		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Sulawesi Selatan		Orang / Hari	30	170.000,-	5.100.000,-		
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II		Orang / Hari	5	75.000,-	375.000,-		
	BBM Pertamax Spesifikasi : Sulawesi Selatan		Liter	75	16.726,-	1.254.450,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
8.01.05	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	**Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**%**	**100**		**126.035.602,-**		
8.01.05.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	***Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan***	***Orang***	***150***		***126.035.602,-***		
8.01.05.2.01.0001	**Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**	**Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun**	**Dokumen**	**1**		**500.000,-**		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat							
	[#] Penyusunan Program Kerja					500.000,-		
	Snack		Org/kali	10	20.000,-	200.000,-		
	Nasi Kotak		Org/kali	10	30.000,-	500.000,-		
8.01.05.2.01.0003	**Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**	**Orang**	**100**		**95.536.565,-**		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.420.000,-		
	[#] Kampung Bebas Narkoba							
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Orang/ Bulan	1	1.210.000,-	1.210.000,-		
	[#] Pembuatan Perbup tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika							
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Orang/ Bulan	1	1.210.000,-	1.210.000,-		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.019.677,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	[#] Kampung Bebas Narkoba							
	Cetak Umbul-umbul/ Spanduk/ Baliho Spesifikasi : Bahan Kain		M2	8	61.360,-	490.880,-		
	Map Batik Spesifikasi : Uk. F4 / Folio, Bahan Kertas Biasa		Buah	100	10.620,-	1.062.000,-		
	Bolpoin Spesifikasi : Non Gel		Buah	100	2.596,-	259.600,-		
	Block Note Spesifikasi : Uk. A5, Isi 50 Lembar		Buah	100	6.418,-	641.800,-		
	[#] Pembuatan Perbup tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika							
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	1369	413,-	565.397,-		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					414.888,-		
	[#] Kampung Bebas Narkoba							
	Amplop Putih Besar Spesifikasi : Uk. 229-230 X 110 Mm, Isi: 100 Lembar		Pack	1	31.388,-	31.388,-		
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 75 Gsm		Rim	5	76.700,-	383.500,-		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.250.000,-		
	[#] Kampung Bebas Narkoba							
	Snack		Org/kali	125	20.000,-	2.500.000,-		
	Nasi Kotak		Org/kali	125	30.000,-	3.750.000,-		
	[#] Pembuatan Perbup tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika							
	Snack		Org/kali	20	20.000,-	400.000,-		
	Nasi Kotak		Org/kali	20	30.000,-	600.000,-		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					12.500.000,-		
	[#] Kampung Bebas Narkoba							
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah		Orang / Jam	4	1.400.000,-	5.600.000,-		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		Orang / Jam	4	1.000.000,-	4.000.000,-		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		Orang / Jam	2	900.000,-	1.800.000,-		
	Honorarium Moderator		Orang / Kegiatan	1	700.000,-	700.000,-		
	Honorarium Pembawa Acara		Orang / Kegiatan	1	400.000,-	400.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					12.500.000,-		
	[#] Kampung Bebas Narkoba							
	Honorarium Rohaniwan		Orang / Kegiatan	1	400.000,-	400.000,-		
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					5.000.000,-		
	[#] Pembuatan Perbup tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika							
	[-] Jasa Pembuat Naskah Akademik							
	Tenaga Ahli Berpendidikan S3 Spesifikasi : Memiliki Sertifikat Yang Relevan		Orang / Bulan	1	5.000.000,-	5.000.000,-		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					10.000.000,-		
	[#] Kampung Bebas Narkoba							
	Sewa Kendaraan Tingkat Kabupaten		Orang/Hari	100	100.000,-	10.000.000,-		
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					2.000.000,-		
	[#] Kampung Bebas Narkoba							
	Sewa Tenda Spesifikasi : Besi Tenda Trowongan		Set	4	500.000,-	2.000.000,-		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.000.000,-		
	[#] Pembuatan Perbup tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika							
	[-] Study Tiru							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Jawa Timur		Orang / Hari	35	410.000,-	14.350.000,-		
	Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi : Makassar - Kab. Luwu		Orang / Kali	14	350.000,-	4.900.000,-		
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II		Orang / Hari	5	150.000,-	750.000,-		
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ekonomi Spesifikasi : Surabaya - Makassar		Orang / PP	7	3.433.000,-	24.031.000,-		
	Taksi Spesifikasi : Jawa Timur		Orang / Kali	4	233.000,-	932.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Jawa Timur		Orang / Hari	1	2.007.000,-	2.007.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi : Jawa Timur		Orang / Hari	2	1.153.000,-	2.306.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I Spesifikasi : Jawa Timur		Orang / Hari	4	814.000,-	3.256.000,-		
8.01.05.2.01.0004	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**	**Orang**	**50**		**19.999.909,-**		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.210.000,-		
	[#] FGD Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)							
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Orang/ Bulan	1	1.210.000,-	1.210.000,-		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					539.909,-		
	[#] FGD Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)							
	Cetak Umbul-umbul/ Spanduk/ Baliho Spesifikasi : Bahan Kain		M2	6	61.360,-	368.160,-		
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	233	413,-	96.229,-		
	Buku Agenda Spesifikasi : Uk. A5, Isi 100 Lembar		Buah	2	37.760,-	75.520,-		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.750.000,-		
	[#] FGD Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)							
	Snack		Org/kali	75	20.000,-	1.500.000,-		
	Nasi Kotak		Org/kali	75	30.000,-	2.250.000,-		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					9.500.000,-		
	[#] FGD Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)							
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah		Orang / Jam	2	1.400.000,-	2.800.000,-		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		Orang / Jam	2	1.000.000,-	2.000.000,-		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		Orang / Jam	4	900.000,-	3.600.000,-		
	Honorarium Moderator		Orang /	1	700.000,-	700.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
			Kegiatan					
	Honorarium Pembawa Acara		Orang / Kegiatan	1	400.000,-	400.000,-		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					5.000.000,-		
	[#] FGD Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)							
	Sewa Kendaraan Tingkat Kabupaten		Orang/Hari	50	100.000,-	5.000.000,-		
8.01.05.2.01.0005	**Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**	**Laporan**	**3**		**9.999.128,-**		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.280.800,-		
	[-] Eselon III							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	3	430.000,-	1.290.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		OH	2	426.900,-	853.800,-		
	Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi : Makassar - Kab. Luwu		Orang/kali	2	350.000,-	700.000,-		
	[-] Golongan III							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	3	430.000,-	1.290.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan PPPK/Non ASN (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		OH	2	223.500,-	447.000,-		
	Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi : Makassar - Kab. Luwu		Orang/kali	2	350.000,-	700.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.280.800,-		
	[#] Monitoring Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Penghayat Kepercayaan							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Sulawesi Selatan		Orang / Hari	13	170.000,-	2.210.000,-		
	BBM Pertamax Spesifikasi : Sulawesi Selatan		Liter	15	16.726,-	250.890,-		
	[#] Monitoring Ketersediaan Stock dan Harga Bahan Pokok							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Sulawesi Selatan		Orang / Hari	12	170.000,-	2.040.000,-		
	BBM Pertamax Spesifikasi : Sulawesi Selatan		Liter	13	16.726,-	217.438,-		
8.01.06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah**	**%**	**100**		**654.786.892,-**		
8.01.06.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	***Jumlah kebijakan teknis untuk kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik yang disusun***	***Laporan***	***12***		***654.786.892,-***		
8.01.06.2.01.0001	**Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**	**Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun**	**Dokumen**	**1**		**500.000,-**		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat							
	[#] Penyusunan Program Kerja					500.000,-		
	Snack		Org/kali	10	20.000,-	200.000,-		
	Nasi Kotak		Org/kali	10	30.000,-	500.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
8.01.06.2.01.0004	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**	**Orang**	**100**		**44.296.270,-**		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					96.270,-		
	[#] Forum Group Discussion (FGD) Komite Intelijen Daerah (KOMINDA)							
	Block Note Spesifikasi : Uk. A5, Isi 50 Lembar		Buah	15	6.418,-	96.270,-		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.000.000,-		
	[#] Forum Group Discussion (FGD) Komite Intelijen Daerah (KOMINDA)							
	Snack @ 25 x 4		Org/kali	100	20.000,-	2.000.000,-		
	Nasi Kotak @ 25 x 4		Org/kali	100	30.000,-	3.000.000,-		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					39.200.000,-		
	[#] Forum Group Discussion (FGD) Komite Intelijen Daerah (KOMINDA)							
	Honorarium Moderator @ 1 x 4		Orang / Kegiatan	4	700.000,-	2.800.000,-		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan @ 1 x 4		Orang / Jam	4	1.000.000,-	4.000.000,-		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan @ 9 x 4		Orang / Jam	36	900.000,-	32.400.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
8.01.06.2.01.0005	**Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**	**Laporan**	**3**		**9.990.676,-**		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.280.800,-		
	[#] Monitoring evaluasi dan pelaporan kewaspadaan penanganan konflik							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	6	430.000,-	2.580.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		OH	2	426.900,-	853.800,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan PPPK/Non ASN (30%) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		OH	2	223.500,-	447.000,-		
	Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi : Makassar - Kab. Luwu		Orang/kali	4	350.000,-	1.400.000,-		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					4,709,876,-		
	[#] Monitoring evaluasi dan pelaporan pemantauan orang asing							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	6	170.000,-	3.400.000,-		
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : Pejabat Negara/ Pejabat Daerah		OH	2	125.000,-	875.000,-		
	BBM Pertamax Spesifikasi : Sulawesi Selatan		Liter	26	16.726,-	434.876,-		
8.01.06.2.01.0006	**Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**12**		**599.999.946,-**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					19.320.000,-		
	[#] RAPAT KOORDINASI FORKOPIMDA							
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Orang/ Bulan	12	1.610.000,-	19.320.000,-		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.304.118,-		
	[#] RAPAT KOORDINASI FORKOPIMDA							
	Bolpoin Spesifikasi : Gel		Buah	50	6.962,-	348.100,-		
	Cairan Koreksi Spesifikasi : Cair		Buah	8	6.136,-	49.088,-		
	Buku Agenda Spesifikasi : Uk. A5, Isi 100 Lembar		Buah	35	37.760,-	1.321.600,-		
	Lakban Bening Spesifikasi : Uk. 2 Inch		Buah	4	8.850,-	35.400,-		
	Map Batik Spesifikasi : Uk. F4 / Folio, Bahan Kertas Biasa		Buah	35	10.620,-	371.700,-		
	Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	1230	413,-	507.990,-		
	Cetak Umbul-umbul/ Spanduk/ Baliho Spesifikasi : Bahan Kain		M2	9	61.360,-	552.240,-		
	Cetak ID Card Spesifikasi : Bahan PVC, 1 Sisi		Lembar	20	5.900,-	118.000,-		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.527.156,-		
	[#] RAPAT KOORDINASI FORKOPIMDA							
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : Uk. 75 Gsm		Rim	15	76.700,-	1.150.500,-		
	Amplop Putih Besar Spesifikasi : Uk. 229-230 X 110 Mm, Isi: 100 Lembar		Dos	12	31.388,-	376.656,-		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					269.040,-		
	[#] RAPAT KOORDINASI FORKOPIMDA							
	Flashdisk Spesifikasi : Kap. 64 GB		Buah	3	89.680,-	269.040,-		
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					1.531.392,-		
	[#] RAPAT KOORDINASI FORKOPIMDA							
	Air Mineral Spesifikasi : Botol, 600 mL, Isi 24 Pcs		Dos	24	63.808,-	1.531.392,-		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					29.400.000,-		
	[#] RAPAT KOORDINASI FORKOPIMDA							
	Prasmanan @ 35 x 12		Orang / Kali	420	50.000,-	21.000.000,-		
	Snack @ 35 x 12		Orang / Kali	420	20.000,-	8.400.000,-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					516.000.000,-		
	[#] HONORARIUM TIM FORKOPIMDA							
	[-] KETUA							
	Honorarium Forkopimda Spesifikasi : Bupati @ 1 x 12		Orang/ Bulan	12	8.000.000,-	96.000.000,-		
	[-] ANGGOTA							
	Honorarium Forkopimda Spesifikasi : Ketua DPRD/Kepala Pengadilan/Kajari/Kapolres/Dandim @ 5 x 12		Orang/ Bulan	60	7.000.000,-	420.000.000,-		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					28.648.240,-		
	[-] Eselon II							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	9	430.000,-	3.870.000,-		
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II		OH	9	150.000,-	1.350.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	4	1.938.000,-	7.752.000,-		
	BBM Pertamax Spesifikasi : Sulawesi Selatan		Liter	240	16.726,-	4.014.240,-		
	[-] Golongan III							
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	9	430.000,-	3.870.000,-		
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi : Sulawesi Selatan		OH	4	1.423.000,-	5.692.000,-		
	Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi : Makassar - Kab. Luwu		Orang/kali	6	350.000,-	2.100.000,-		
				JUMLAH		**6.419.331.373,-**		

Belopa, Juli 2024

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN LUWU

H. KAMAL, S.Pd, MM
PKT : Pembina Tk.I
NIP : 196512311991031100

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kab. Luwu Tahun 2025 dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Luwu dengan mengacu RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Rencana Kerja disusun untuk menggambarkan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh aparatur Badan Kesbangpol Kab. Luwu dalam merumuskan program dan kegiatan Tahun 2025.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kab. Luwu Tahun 2025, semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.

Belopa, Juli 2024

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN LUWU

H. KAMAL, S.Pd, MM
PKT : Pembina Tk.I
NIP : 196312311993031094



RENJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH LUWU

TAHUN ANGGARAN 2025

Kolaborasi dan Ekspansi
Tingkatkan Pendapatan Daerah

- PBB-P2
- PBJT
- BPHTB
- Pajak Reklame
- PAJAK MBLB
- PAJAK AIR TANAH
- PAJAK SARANG BURUNG WALE
- OPSEN BBNKB-PKB

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Renja PD ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi setiap elemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu sebagai pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, dalam melaksanakan aktifitas, sehingga rencana penerimaan (target) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Dan merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam mewujudkan visi Kabupaten Luwu. Dengan demikian, dokumen Renja PD Tahun 2025 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang lain, seperti Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.

Usaha maksimal telah dilakukan dalam penyusunan dokumen Renja PD Tahun 2025 ini, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan- penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan-masukan positif dan konstruktif bagi penyempurnaan dokumen ini tetap diperlukan. Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.

Belopa, 04 April 2024

Kepala BAPENDA Kab. Luwu

H. SUFYAN THAMRIN, ST.,MM.,M.SP

PKT. PEMBINA TINGKAT I

NIP. 198102202 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 25

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 27

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30

BAB III 33

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 33

3.3 Program dan Kegiatan 33

BAB IV 72

4.1 Rencana Kerja 72

4.2 Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah 73

BAB V 101

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.....23

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Luwu.....29

Tabel 3. 1 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah.....33

Tabel 3. 2 Program dan kegiatan perangkat daerah Kab. Luwu 2024 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 1 Indikator Tujuan/ Sasaran Tahun 2024.....73

Tabel 4. 2 Rincian Belanja Pada setiap sub kegiatan.....99

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai suatu upaya pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah selalu menggali dan mengembangkan semua potensi yang ada, terutama penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha. Hal ini sesuai dengan otonomi daerah yang berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Serta beberapa Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan otonomi daerah tersebut, memberikan implikasi bahwa Pajak Daerah dan Retribusi merupakan salah satu sumber Penerimaan Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah untuk menuju Kabupaten Luwu lebuh Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing.Dengan kata lain bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan, tentunya kemampuan menyiapkan Anggaran/Keuangan merupakan prioritas utama yang perlu dipikirkan. Konsekuensinya bagi setiap daerah harus memacu diri untuk meningkatkan Kemandiriannya dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) guna menopang Anggaran Belanja Daerah. Maka dari itu diupayakan yang maksimal dan berkesinambungan melalui peningkatan kinerja dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;

5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Dukumen rencana Kerja Tahun 2025 Merupakan Satu Kesatuan Yang tidak Terpisahkan Dengan peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024. Sehingga, dalam melakukan perubahan berpedoman Pada Peraturan Tersebut yang sudah Melalui Proses Tahapan Perencanaan Sesuai Ketentuan yang Berlaku.

Renja Perangkat Daerah di Jadikan Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran(RKA) Perangakat Dearah Dan Kemudian Berubah Menjadi Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) Melalui Penetapan Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD/P) Kabupaten Luwu.

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 diawali dengan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukkan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati. Badan Pendapatan Daerah berperan dalam mendukung Misi ke 1 Bupati Luwu yaitu Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum Badan Pendapatan daerah kabupaten Luwu didalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya dimutahirkan dengan Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembagunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024;
12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
13. Peraturan Bupati Luwu Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024
16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana kerja ini adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024
2. Untuk menyusun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2024;

3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu tahun Sebelumnya

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Luwu disusun didalam sebuah dokumen deskriptif yang memuat data kualitatif dan kuantitatif, yang terdiri dari 4 BAB, yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L, dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan pengaanggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

2.2 Analisa Pelayanan Perangkat daerah

2.3 Isu-Isu Penting Badan Pendapatan Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah dan Kebijakan Nasional

3.2 Sasaran dan Tujuan Perangkat daerah

3.3 Program/kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

BAB VI PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut

BAB II
PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Pada Tahun 2023 Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah dimana Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yang ditandai dengan terpenuhinya 5 Indikator Kinerja Utama yang meliputi, Rasio Realisasi PAD Terhadap target PAD, Persentase Peningkatan PAD, Realisasi Persentase PAD Terhadap Pendapatan daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah.

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2023 Kabupaten Luwu

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra Perangkat Daerah) Tahun 2019 – 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Darah samapi dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Konerja Program dan Kegaitan Tahun lalu 2023 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun RX2024 (n-1)		Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkar Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5 +7 +9		11 = 10 / 4	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah		23,326,230,385		10,685,678,238	100	11,862,627,392	100	11,479,797,414	96.77%	100	8,228,547,740	100	20,351,104,117		87.25%
Perencanaan,pengangaran,dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100	960,960,160		83,320,750	100	102,803,060	100	102,059,640	99.28%	100	111,849,214	100	287,442,277		29.91%

penyusunan dokumen Perencanaan Prangkat Daerah	Jumlah dokumen Rensra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang di sususn	12	115,009,370	3	24,453,550	3	63,502,360		63,100,940	99.37%		66,355,182		153,909,672		133.82%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	16	251,192,620	4		4	11,435,000		11,314,800	98.95%		7,484,832		18,799,632		7.48%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	16	329,462,770	4	4,079,200	1	4,043,000		3,916,200	96.86%		6,412,554		14,407,954		4.37%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordonasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1	6,803,000		6,787,000	99.76%		6,756,690		13,543,690		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Laporan Caapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun													-		

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di sediakaan gaji tunjangan sesuai ketentuan	2683	7,414,610,293	2683	5,775,061,157	2683	6,647,897,210	2683	6,359,568,646	95.66%		6,457,882,980		18,592,512,783		250.76%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														-		
Pelakasanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang di verifikasi	1	912,318,000		216,920,000	12	215,729,500	12	208,632,300	96.71%		228,907,157		654,459,457		71.74%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12	6,007,700	12	5,830,900	97.06%		6,137,871		11,968,771		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang di sususn	1	96,366,340		7,116,200	1	12,963,700	1	12,853,700	99.15%		12,322,119		32,292,019		33.51%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Di kelola dan disiapkan					1	3,509,700	1	3,502,550	99.80%		3,510,937		7,013,487		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/Semesteran yang disusun	14	36,469,750		6,400,000	14	4,589,500	14	4,510,000	98.27%		4,647,598		15,557,598		42.66%

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Yang Disusun					14	3,309,700	14	3,309,700	100.00%		3,316,828		6,626,528		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik dearah pada SKPD**		**12,000,000**		**12,000,000**		**28,796,600**		**28,677,140**	99.59%		**176,608,321**	**100**	**217,285,461**		1810.71%
Rekonsiliasi dan Pemnyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi BMD yang disusun					2	11,154,800	1	11,066,900	99.21%		6,577,724		17,644,624		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah	1	12,000,000		12,000,000	7	17,641,800	16	17,610,240	99.82%		170,030,597		199,640,837		1663.67%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Cakupan penyelenggaraan adminstrasi pendapatan daerah kewenangan**	**100**	**363,080,100**		**58,492,350**		**536,938,946**		**534,002,246**	**99.45%**	**100**	**529,420,460**	**100**	**64,222,000**		**17.69%**

	perangkat daerah														
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah				2,600,000	1	534,002,246	18	534,002,246	100.00%		529,420,460		1,066,022,706	
Analisa dan pengembangan Pajak Daerah ,serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		0											-	
Penyuluhan dan Penyeberluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan/Jenis kegaitan yang dilakukan dalam rangka penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan rettribusi daerah		0		990,000									990,000	
Pendataan dan pendaftran objek retribusi daerah	dokumen objek retribusi daerah yang di mutakhirkla n		25,500,000		8,500,000									8,500,000	33.33%
Pengolahan data retribusi daerah	Jumlah data retribusi		97,200,000		24,000,000									24,000,000	24.69%

	daerah yang diolah														
Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	laporan pengelolaan retribusi daerah		240,380,100		22,402,350	1	2,936,700	1	-	0.00%		2,908,646		25,310,996		10.53%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**100**	**280,339,780**		**34,583,460**	**100**	**12,842,500**	**100**	**10,366,800**	**80.72%**	**100**	**130,000**	**100**	**42,225,400**		**15.06%**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang di fasilitasi mengikuti pendidkan dan pelatihan formal				17,000,000	1	-	24	-	0.00%		130,000		17,130,000		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingn teknis	50	280,339,780	10	17,583,460	10	12,842,500	25	10,366,800	80.72%		130,000		25,095,400		8.95%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran**	**100**	**3,150,651,264**		**862,276,190**	**100**	**933,407,920**	**100**	**900,615,184**	**96.49%**	**100**	**434,261,946**	**100**	**2,197,163,320**		**69.74%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik /penerangan bagunan	15	40,018,000	15	9,236,700	15	3,555,400	28	3,510,500	98.74%		3,543,400		16,290,600		40.71%

	kantor yang di sediakan														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang di sediakan		476,400,000		175,750,000	2	58,080,000	29	54,825,000	94.40%		1,199,690		231,774,690		48.65%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	50	124,088,822		30,061,250	12	33,779,250	30	33,777,750	100.00%		33,748,500		97,587,500		78.64%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengandaan yang di sediakan	560	816,534,800			26	267,567,000	26	242,763,711	90.73%		134,429,000		377,192,711		46.19%
Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	715	173,612,950		74,400,000	12	71,400,000	12	69,420,000	97.23%		56,400,000		200,220,000		115.33%
Penyediaan Bahan/Material	Penyedian Bahan / Material Kebutuhan Kantor yang di sediakan	128	97,310,600		69,754,240	12	33,482,470	12	33,274,999	99.38%		26,387,526		129,416,765		132.99%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan	12	68,000,000		15,000,000	30	17,000,000	30	16,315,200	95.97%		17,023,180		48,336,380		71.09%

	minum yang di sediakan															
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalan Dimas yang di sediakan	20	1,354,686,092		468,074,000	162	448,543,800	162	446,728,024	99.60%		161,530,650		1,096,332,674		80.93%
Penyedian jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyelenggara Penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan jasa**	**%**	**9,475,407,498**		**3,199,187,042**	**100**	**3,192,956,356**	**100**	**3,156,375,145**	**98.85%**	**100**	**436,160,630**	**100**	**6,791,722,817**		**71.68%**
Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang di sediakan jasa	75	70,035,000	14	16,800,000	12	3,500,000	12	3,500,000	100.00%		33,600,000		53,900,000		76.96%
Penyedian Jasa komunikasi ,Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon,air dan listrik	70	7,876,536,498	13	2,963,761,042	12	3,004,456,356	12	2,969,239,145	98.83%		216,910,630		6,149,910,817		78.08%
Penyedian Jasa Pelaratan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor		-		16,646,000	21	6,200,000	19	4,836,000	78.00%		6,850,000		28,332,000		
Penyedianan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	100	1,528,836,000		201,980,000	324	178,800,000	324	178,800,000	100.00%		178,800,000		559,580,000		36.60%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	**624,007,200**		**430,321,089**	**100**	**160,875,000**	**100**	**149,493,463**	**92.93%**	**100**	**-**	**100**	**708,652,562**		**113.56%**
Penyediaan jasa pemeliharaaan ,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraaan dinas jabatan	Jumlah mobil jabatan yang di lakukan pemeliharaan rutin/ berkala	40	444,007,200											-		0.00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil jabatan yang di lakukan pemeliharaan rutin/ berkala				140,375,500	20	160,875,000	20	149,493,463	92.93%		126,838,010		418,706,973		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas bangunan Gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan		40,000,000		40,000,000									40,000,000		100.00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau		140,000,000		249,945,589									249,945,589		178.53%

atau Bangunan Lainnya	bangungan lainya yang di peliharah/di rehabilitasi															
PROGRAM PENGELOLAH PENDAPATAN DAERAH	**Persentase Realisasi Pajak Dearah Terhadap Target yang ditetapkan**	**100**	**15,649,057,759**		**4,006,548,399**	**100**	**2,656,280,145**	**100**	**2,565,129,438**	**96.57%**	**100**		**100**	**8,136,537,687**		**51.99%**
Kegiatan Pengelolah pendapatan Daerah		**100**	**15,649,057,759**		**4,006,548,399**	**100**	**2,656,280,145**	**100**	**2,565,129,438**	**96.57%**	**100**	**1,564,859,850**	**100**	**8,136,537,687**		**51.99%**
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		133	401,820,000			100	26,051,500	100	23,665,170	90.84%		23,534,075		47,199,245		11.75%
Analisa dan pengembangan Pajak Daerah ,serta penyusunan kebijakan pajak daerah		300	450,000,000		207,260,000	100	127,188,400	100	124,950,637	98.24%		100,224,013		432,434,650		96.10%
Penyuluhan dan Penyeberluasan Kebijakan Retribusi Daerah						12	89,524,450	12	89,269,650	99.72%		63,899,916		153,169,566		
Penyediaan sarana dan Prasaran Pengelolah Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak dan Retribusi yang di layani	2000	132,490,400		16,850,000	2000	19,100,000	2000	11,575,000	60.60%		12,000,000		40,425,000		30.51%
Pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan dan	145	589,501,080		139,451,100	100	599,033,250	100	587,343,099	98.05%		33,330,819		760,125,018		128.94%

	Pendaftaran														
Pengelolah, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data pajak daerah dan retribusi	11	1,795,240,200		120,000,000	100	112,786,150	100	111,879,450	99.19%		103,066,992		334,946,442		18.66%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangungan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguanan (BPHTB	Terlaksananya Penilaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan		4,622,557,500		1,591,139,450	2000	606,805,070	2000	606,149,950	99.89%		259,569,744		2,456,859,144		53.15%
Penetapan Wajib Pajak Daerah			504,000,000		163,500,000	100	53,286,100	100	52,048,600	97.68%		50,444,025		265,992,625		52.78%
Pelayaan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak dan Retribusi yang di layani		923,416,800		98,918,470	2000	50,184,750	2000	48,443,600	96.53%		46,377,777		193,739,847		20.96%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			33,637,500		9,750,000	100	21,686,600	100	21,064,100	97.13%		34,198,562		65,012,662		193.27%
Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak daerah		2,324,428,240		425,004,100	48	361,273,150	48	361,273,150	100.00%		352,494,657		1,138,771,907		48.99%
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						100	2,660,400	100	2,015,000	75.74%		2,620,885		4,635,885		
Pengendaliaan, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah			1,058,553,459		563,376,295	100	442,558,875	100	383,189,882	86.59%		357,709,883		1,304,276,060		123.21%

Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolah Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Laporan hasil monitoring dan evaluasi		2,813,412,580		671,298,984	100	119,499,800	100	118,412,700	99.09%		88,093,137		877,804,821		31.20%
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						4	24,639,650	4	23,849,450	96.79%		37,295,365		61,144,815		

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 terlaksana dengan baik sebagaimana yang direncanakan. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, total belanja Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu sebesar **Rp. 14.518.907.537,00 dan** Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 14.044.926.852,00**,- atau mencapai **96.77** %.

Adapun realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota, alokasi anggaran sebesar Rp, 11.862.627.392.00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.479.797.414.00

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 102.803.060.00 dan terealisasi sebesar Rp. 102.059.640.00 atau sebesar 99.28 %
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 6.894.007.010.00 dan terealisasi sebesar Rp. 6598.207.796.00 atau sebesar 95.71 %
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 28.796.600.00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.300.000,- atau sebesar 94.16 %
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 536.938.946.00 dan terealisasi sebesar Rp. 534.002.246.00 atau sebesar 99.45 %
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 12.842.500.00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.366.800.00 atau sebesar 80.72 %
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 933.407.920.00 dan terealisasi sebesar Rp. 900.615.184.00 atau sebesar 96.49 %.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.192.956.356.00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.156.375.145.00 atau sebesar 98.85 %.

8. Pemeliharaan Barang Milim Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 160.875.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 149.493.463.00 atau sebesar 92.93 %.

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 2.656.280.145.00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.565.129.438.00 atau sebesar 96.57 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang cukup memadai, juga didukung dengan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan organisasi, sehingga memungkinkan pencapaian kinerja yang memuaskan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja perangkat daerah, yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing-masing, dengan format tabel T-C.30.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Realisasi PAD terhadap target PAD		IKU	-	98,20%	98,20%	90%	9,7%	98,20%	98,20%	-	
2	Persentase Peningkatan PAD		IKU	-	97,36%	97,36%	90%	5%	97,36%	97,36%	-	
3	Persentase PAD Terhadap Pendapatan daerah		IKU	-	3.80%	15,45%	90%	7,70%	980%	15,45%	-	

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022 – 2023
RASIO PENINGKATAN DAN PENDAPATAN TA, 2022 S/D 2023

1. RASIO PENINGKATAN PENDAPATAN : $\frac{\text{Realisasi Pendapatan 2023–Realisasi Pendapatan 2022}}{\text{Realiasi Pendapatan 2022}}$

$$= \frac{1.552.883.568.368.61 - 1.476.102.745.149.56}{1.476.102.745.149.56}$$

$$= \frac{76.780.823.219.05}{1.476.102.745.149.56}$$

$$= 0{,}05$$

$$\frac{\text{Realisasi PAD 2023 – Realisasi PAD 2022}}{\text{Realisasi PAD 2022}} \times 100$$

$$= \frac{199.146.225.067.64 - 163.816.263.663.56}{163.816.263.663.56} \times 100$$

$$= \frac{35.329.961.404.08}{163.816.263.663.56}$$

$$= 21.57\ \%$$

$$\text{AP PENDAPATAN} : = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{199.146.225.067.64}{1.552.883.568.368.61} \times 100\%$$

$$= 12.82\ \%$$

Capaian sasaran strategis pada tahun 2022 sampai dengan 2023 ditandai dengan tercapaianya target indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu. Dari 3 indikator yang telah ditetapkan telah terealisasi rata-rata 98 %. Secara umum Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, hal tersebut terlihat pada hasil Evaluasi Rencana Kerja, Evaluasi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah dilakukan melalui Pengukuran kinerja dan Program yang terlihat pada tabel berikut

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Tugas dan Fungsi utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu adalah Meningkatkan Pendapatan Daerah, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu memiliki pegawai yang berjumlah 131 Orang yang terdiri dari Kepala Badan 1 (satu) Orang, Sekretaris 1 (satu) Orang, Kepala Bidang 4 (empat) orang, Kepala Seksi/kepala Sub Bagian 15 Orang, Kepala UPTD 4 Orang, KTU 2 Orang, PLT 2 Orang, Staf sebanyak 31 0rang dan Tenaga Kontrak sebanyak 72 Orang. Badan pendapatan Daerah Kabupaten luwu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senantiasa berkoordinasi dengan OPD penghasil PAD lainya Seperti Dinas Perhubungan. Dinas PU & Penata Ruang, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bappeda & Litbang, Sekertariat Daerah, Rumah Sakit Umum Batara Guru, Dinas Pariwisata.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu masih menemukan hambatan-hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian, capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, berikut hambatan-hambatan yang dimaksud :

a. Masih terdapat kinerja pegawai yang kurang optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas sehingga hasil pencapaian target kinerja kurang maksimal;
b. Kurangnya sarana transportasi dan sarana komputer bila dibandingkan dengan volume kegiatan yang harus diselesaikan dengan tepat waktu.
c. Kurangnya sumber daya manusia dibandingkan dengan jenis dan jumlah tanggung jawab yang harus dilaksanakan terutama untuk mengelola data objek pajak dan pelayanan terhadap wajib pajak.
d. Masih adanya kecenderungan masyarakat untuk "menghindar" dari kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.

Selain Permasalahan Tersebut diatas juga di temui berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti :

a. Regulasi yang sering berubah-ubah
b. Kurangnya pemahaman Pegawai Tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah
c. Disiplin Pegawai Masih Kurang

Permasalahan dan hambatan yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah tentu saja akan berdampak pada capaian visi dan misi kepada daerah jika tidak segera dibenahi, adapun visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun2019-2024, serta hubungannya dengan kinerja Badan Pendapatan Daerah dapat terlihat pada uraian berikut :

Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu terpilih yang juga ditetapkan sebagai visi Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 :

KABUPATEN LUWU, MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI

Dalam rumusan visi ini ada empat pokok visi yakni maju, Sejahtera, Mandiri dan Religi. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut.

Maju, mengandung makna terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusia berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan penganggaran serta ditopang oleh transformasi birokrasi secara bertahap.

Sejahtera, mengandung makna suatu keadaan masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.

Mandiri, mengandung makna dengan kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia.

Religi, mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengalaman agamanya dalam tataran kehidupan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut telah ditetapkan 10 (sepuluh) misi pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

a) Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel
b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyakarat.
c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
d) Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.
e) Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis.
f) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religious.
g) Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
h) Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.
i) Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia, untuk mendorong partisipasi public yang dinamis dan kondusif.
j) Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan awal rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan terdapat beberapa program dan kegiatan yang mengalami kenaikan pagu dan rancangan awal RKPD, hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya masih minimnya anggaran tiap kegiatan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang berimbas pada pelayanan dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak berjalan maksimal sesuai yang direncanakan. Adapun program dan kegiatan tersebut sudah sesuai namun besaran pagu terjadi peningkatan pagu yang nantinya yang akan dipilah sesuai dengan skala prioritas dengan tiap bidang dalam mengelola program yang akan dijabarkan dan dilaksanankan.

Alasan Proses dilakukan karena tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang semakin kompleks yang dengan sendirinya menuntut kinerja dan pelayanan maksimal sehingga rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan mengalami peningkatan dari rancangan pagu sebelumnya:

yang semakin kompleks yang dengan sendirinya menuntut kinerja dan pelayanan maksimal sehingga rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan mengalami peningkatan dari rancangan pagu sebelumnya:

0

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan pada misi Bupati dan Wakil Bupati, maka Badan Pendapatan Daerah akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan misi pertama yaitu **mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel.** Dalam pencapaian visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Terpilih terdapat beberapa tantangan dan peluang yang harus diperhatikan guna pencapaian kinerja yang optimal, adapun tantangan dan peluang pelayanan Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Luwu yaitu:

a. Tantangan

1. Perkembangan teknologi yang berbasis teknologi informasi yang cepat dalam pengelolaan keuangan;
2. Adanya tuntutan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
3. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
4. Implementasi akuntansi berbasis akrual;
5. Semakin ketatnya pengawasan terhadap aktivitas Pemerintah Daerah khususnya Pendapatan Daerah;

b. Peluang

1. Adanya Lembaga Pemerintahan dan Swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kompotensi SDM;
2. Hubungan kerja dengan Instansi terkait dan Stakeholder telah terjalin dengan baik;
3. Adanya berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
4. Adanya dukungan dari Pimpinan Eksekutif maupun Legislatif;
5. Adanya dukungan anggaran secara teratur dan berkesinambungan;

Selain tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih juga terdapat isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang trategis yang menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan yang lasim disebut isu strategis. Adapun isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu adalah :

1. Laju Inflasi yang mempengaruhi fiscal daerah
2. Ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat masih sangat tinggi;
3. Ketersediaan sumber daya keuangan daerah yang terbatas;
4. Pengguna Barang Kabupaten Luwu belum sepenuhnya disiplin dalam penatausahaan aset sesuai ketentuan;
5. Tuntutan masyarakat untuk melakukan pelayanan prima.

c. Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapenda

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- **Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.**

Bapenda memilki tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Bapenda turut berperan serta dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program organisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan melalui Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi serta pelaksanaan Penatausahaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan BAPENDA yang searah dengan kebijakan umum daerah dan norma, standar, prosedur, kriteria serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.**

Badan Pendapatan Daerah Mempunyai Fungsi antara lain :

1. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
2. Penyusunan Kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan;
3. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan hasil pungutan dan penerimaan pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional dibidang pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan penyuluhan dan menerima pengaduan mengenai pendapatan daerah;
8. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Pembangunan Daerah dalam Lima Tahun kedepan harus merujuk pada Visi Pembngunan Pemerintahan Pusat yang baru. Agenda pembangunan tersebut harus menjadi acuan bagi seluruh lingkup Pemerintah Pusat maupun Daerah, Adapun 5 visi Pembangunan Pemerintah Indonesia 2019-2024 adalah :

1. Pembangunan Infrastruktur
2. Pembangunan SDM
3. Mengundang Investasi
4. Mereformasi Birokrasi
5. Menjamin penggunaan APBD yang fokus dan tepat sasaran.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Merupakan Target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Berdasarkan hal yang berpangkal kepada visi, misi yang telah digariskan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Pendapatan Daerah	Meningkatkan kualitas dan epuasan pelayanan pajak dan retribusi daerah
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan pendapatan daerah
		Terwujudnya kepatuhan serta kepatutan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak

Tabel 3. 1 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor Utama yang Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah adalah pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Berdasarkan hal tersebut diatas serta mengacu pada peraturan menteri

dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2011 tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Maka Disusunlah 2 Program yang membawahi 7 Kegiatan Untuk Tahun Anggaran 2023 dengan Uraian Sebagai Berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa
g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
h) Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

a) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
b) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5. Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah

a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan dan kantor

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

f) Penyediaan Bahan/ Material

g) Fasilitasi Kunjungan Tamu

h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

a) Perencanaan pengelolaan pajak daerah

b) Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah

c) Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah

d) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah

e) Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah

f) Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah

g) Penilaian pajak bumi dan bangunan edesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

h) Penetapan wajib pajak daerah

i) Pelayanan dan konsultasi pajak daerah

j) Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah

k) Penagihan pajak daerah

l) Penyelesasian keberatan pajak daerah

m) Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah

n) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah

o) Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah

T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Luwu

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AWAL RKPD 2025			ANALISIS KEBUTUHAN RENJA 2026			
						TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1					2	5	6	7				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		10,732,758,512				13,894,192,076	
5	2				KEUANGAN (BADAN PENDAPATAN DAERAH)		10,732,758,512				13,894,192,076	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9,065,775,192				10,659,312,603	
5	2	1	2		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	74,871,904	DAU		100%	88,102,890	DAU
5	2	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	28,554,279		Belopa	Dokumen	32,837,420.85	
5	2	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	7,513,372		Belopa	Dokumen	8,640,377.80	
5	2	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	6,467,057		Belopa	Dokumen	7,437,150.05	
5	2	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	6,733,669		Belopa	Dokumen	7,743,604.35	

5	2	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4,196,337		Belopa	Dokumen	4,828,053.05	
5	2	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,899,963		Belopa	Laporan	5,634,957.45	
5	2	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16,505,327		Belopa	Laporan	18,981,126.05	
5	**2**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**5,816,900,406**	**DAU**		**100%**	**6,689,435,467**	
5	2	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	5,566,828,924		Belopa	Orang/Bulan	6,401,853,263	
5	2	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			Belopa	Dokumen		
5	2	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	219,276,171		Belopa	Dokumen	252,167,596.65	
5	2	1	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	6,137,837		Belopa	Dokumen	7,058,478.05	
5	2	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12,158,271		Belopa	Laporan	13,982,011.65	
5	2	1	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	4,120,826		Belopa	Dokumen	4,738,949.90	

5	2	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4,369,837		Belopa	Laporan	5,025,312.55	
5	2	1	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	4,008,570		Belopa	Dokumen	4,609,855.50	
5	**2**	**1**	**2**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**80%**	**25,124,272**	**DAU**		**80%**	**21,146,600**	
5	2	1	2	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			Belopa	Dokumen		
5	2	1	2	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			Belopa	Dokumen		
5	2	1	2	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan			Belopa	Laporan		
5	2	1	2	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			Belopa	Laporan		
5	2	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6,998,547		Belopa	Laporan	6,604,800	
5	2	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	18,125,725		Belopa	Laporan	14,541,800	
5	2	1	2	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			Belopa	Dokumen		
5	**2**	**1**	**2**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan**		**382,051,351**				**439,359,065**	
5	2	1	2	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	379,144,639		Belopa	Dokumen	436,016,300	
5	2	1	2	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen			Belopa	Dokumen		

5	2	1	2	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan			Belopa	Laporan		
5	2	1	2	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah *(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)*	Dokumen			Belopa	Dokumen		
5	2	1	2	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah *(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)*	Laporan			Belopa	Laporan		
5	2	1	2	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah *(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)*	Dokumen			Belopa	Dokumen		
5	2	1	2	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2,906,752		Belopa	Laporan	3,342,764.80	
5	**2**	**1**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**150,693,000**	**DAU**		**100%**	**128,900,000**	
5	2	1	2.1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit			Belopa	Unit		
5	2	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	76,560,000		Belopa	Paket	91,700,000	
5	2	1	2.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4,088,000		Belopa	Dokumen		
5	2	1	2.1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Dokumen	8,960,000		Belopa	Dokumen		

					Kepegawaian							
5	2	1	2.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	6,960,000		Belopa	Dokumen		
5	2	1	2.1	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Orang			Belopa	Orang		
5	2	1	2.1	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan			Belopa	Laporan		
5	2	1	2.1	8	Pemindahan Tugas ASN	Orang			Belopa	Orang		
5	2	1	2.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi	Orang	130,000		Belopa	Orang	22,200,000	
5	2	1	2.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			Belopa	Orang		
5	2	1	2.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	55,995,000		Belopa	Orang	15,000,000	
5	**2**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1,204,663,953**	**DAU**		**100%**	**1,151,619,475**	
5	2	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	29,567,733		Belopa	Paket	34,002,927	
5	2	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	231,998,835		Belopa	Paket	63,780,000	
5	2	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket			Belopa	Paket		

5	2	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	88,726,855		Belopa	Paket	102,035,918	
5	2	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	299,104,000		Belopa	Paket	250,000,000	
5	2	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	62,000,000		Belopa	Dokumen	71,300,000	
5	2	1	2.1	7	Penyediaan Bahan/Material	Paket	26,387,770		Belopa	Paket	30,345,935.50	
5	2	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	30,000,604		Belopa	Laporan	34,500,695	
5	2	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	436,878,126		Belopa	Laporan	565,654,000	
5	2	1	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			Belopa	Dokumen		
5	2	1	2.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			Belopa	Dokumen		
5	**2**	**1**	**2.1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90%**		**DAU**		**90%**	**625,000,000**	
5	2	1	2.1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit			Belopa	1 Unit	400,000,000	
5	2	1	2.1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit			Belopa	1 Unit	25,000,000	
5	2	1	2.1	3	Pengadaan Alat Berat	Unit			Belopa	Unit		

5	2	1	2.1	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Unit			Belopa	Unit		
5	2	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	Unit			Belopa	10 Unit	200,000,000	
5	2	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit			Belopa	Unit		
5	2	1	2.1	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Unit			Belopa	Unit		
5	2	1	2.1	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit			Belopa	Unit		
5	2	1	2.1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit			Belopa	Unit		
5	2	1	2.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit			Belopa	Unit		
5	2	1	2.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit			Belopa	Unit		
5	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1,076,880,810**	**DAU**		**100%**	**1,246,441,932**	
5	2	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**400 Surat**			Belopa	**400 Surat**	-	
5	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	161,540,810		Belopa	Laporan	208,771,931.50	
5	2	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	22,940,000		Belopa	Laporan	34,410,000	

5	2	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	872,400,000		Belopa	Laporan	1,003,260,000	
5	**2**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**334,589,456**	**DAU**			**271,307,374**	
5	2	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit			Belopa	Unit		
5	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	235,919,456		Belopa	Unit	271,307,374.40	
5	2	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Unit			Belopa	Unit		
5	2	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Tak Bermotor	Unit			Belopa	Unit		
5	2	1	2.1	5	Pemeliharaan Mebel	Unit			Belopa	Unit		
5	2	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit			Belopa	Unit		
5	2	1	2.1	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit			Belopa	Unit		
5	2	1	2.1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Unit			Belopa	Unit		
5	2	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	3000 M2			Belopa	3000 M2		

					dan Bangunan Lainnya							
5	2	1	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	98,670,000		Belopa	Unit		
5	2	1	2.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit			Belopa	Unit		
5	2	1	2.1	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Ha			Belopa	Ha		
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		1,666,983,320				**3,234,879,474**	
5	**2**	**4**	**2**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		1,666,983,320				**3,234,879,474**	
5	2	4	2	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	39,171,319		Belopa	Dokumen	39,171,319	
5	2	4	2	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	36,036,223		Belopa	Dokumen	36,036,223	
5	2	4	2	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	28,520,934		Belopa	Laporan	32,799,074	
5	2	4	2	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	5,010,890		Belopa	Unit	5,762,524	
5	2	4	2	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Laporan	60,580,435		Belopa	Laporan	599,033,250	

5	2	4	2	6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Pajak Daerah	Laporan	111,013,141		Belopa	Laporan	127,665,112	
5	2	4	2	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan	Objek Pajak	14,228,820		Belopa	Objek Pajak	611,848,000	
5	2	4	2	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen	25,559,899		Belopa	Dokumen	29,393,642	
5	2	4	2	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	473,252,708		Belopa	Layanan	544,240,614	
5	2	4	2	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	29,179,978		Belopa	Dokumen	33,556,975	
5	2	4	2	11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	341,255,536		Belopa	Dokumen	596,723,150	
5	2	4	2	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	14,006,918		Belopa	Dokumen	16,107,956	
5	2	4	2	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	340,056,738		Belopa	Dokumen	391,065,249	
5	2	4	2	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	58,065,810		Belopa	Laporan	66,810,182	
5	2	4	2	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	91,014,091		Belopa	Laporan	104,666,205	

TABEL TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN LUWU

Unit Organisasi : 5.02.5.06.0.00.03.0000
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi :
5.02.5.06.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					BADAN PENDAPATAN DAERAH								12.658.677.130,00					12.900.043.474,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								12.658.677.130,00					12.900.043.474,00
5	02				KEUANGAN								12.658.677.130,00					12.900.043.474,00

5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10.515.302.842,00					10.824.397.264,00
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								114.188.714,00					105.273.148,00
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	3 Dokumen	100 %	67.697.182,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	67.791.988,00
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													

							Cakupan ketersediaan penunjang pelaksaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	4 Dokumen	100 %	7.504.332,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	13.018.690,00
5	0 2	0 1	2. 0 1	0 0 0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Cakupan ketersediaan penunjang pelaksaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	4 Dokumen	100 %	6.469.554,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4.326.010,00

5	0 2	0 1	2. 0 1	0 0 0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	6.818.690,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.279.210,00
5	0 2	0 1	2. 0 1	0 0 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perang	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	100 %	4 Dokumen	100 %	4.292.627,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4.593.510,00

								kat daerah yang disusun	Kel/ Desa											
5	0 2	0 1	2. 0 1	0 0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	4 Laporan	100 %	4.959.733,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.311.160,00

5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	4 Laporan	100 %	16.446.596,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.952.580,00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6.458.513.885,00					6.718.931.429,00
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan	- Kab. Luwu, Semua Kecamata	100 %	2683 Orang/bulan	8 Jenis	6.198.216.375,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2683 Orang/bulan	6.447.690.250,00

								Perangkat Daerah yang Disusun	n, Semua Kel/ Desa											
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	1 Dokumen	8 Jenis	228.964.157,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	239.221.710,00
5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan	- Kab. Luwu, Semua Kecamata	100 %	1 Dokumen	8 Jenis	6.169.871,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	6.428.239,00

								Perangkat Daerah yang Disusun	n, Semua Kel/ Desa											
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	2 Laporan	8 Jenis	13.668.119,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	13.611.885,00
5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuang	- Kab. Luwu, Semua Keca	100 %	1 Dokumen	8 Jenis	3.510.937,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	1 Dokumen	3.685.185,00

						Pemerintahan Daerah	Lanjut Pemeriksaan	an Perangka: Daerah yang Disusun	mata n, Sem ua Kel/ Desa							Lanjut Pemeriksaan		
5	0 2	0 1	2. 0 2	0 0 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu , Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	100 %	17 Laporan	8 Jenis	4.667.598,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	4.818.975,00
5	0 2	0 1	2. 0 2	0 0 0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													

						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	4 Dokumen	8 Jenis	3.316.828,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	3.475.185,00
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								23.666.321,00					22.203.930,00
5	02	01	2.03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	4 Laporan	7 Jenis	6.603.724,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.935.040,00

5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	2 Laporan	7 Jenis	17.062.597,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.268.890,00
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								537.129.106,00					550.722.710,00
5	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewen	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Sem	100 %	16 Dokumen	7 Jenis	534.220.460,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen	547.639.175,00

								angan Perangkat Daerah yang Disusun	ua Kel/ Desa										
5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	4 Dokumen	7 Jenis	2.908.646,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	3.083.535,00
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								37.307.000,00					35.042.500,00	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	1 Orang	7 Jenis	22.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	22.200.000,00
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	6 Orang	7 Jenis	15.107.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	12.842.500,00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								438.326.116,00					457.217.291,00	

5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	10 Paket	10 Jenis	3.543.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.733.170,00
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	7 Paket	10 Jenis	1.199.690,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0,00

5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	30 Paket	10 Jenis	33.748.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	35.468.213,00
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	5 Paket	10 Jenis	134.429.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	141.151.500,00

5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	12 Dokumen	10 Jenis	56.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	59.220.000,00
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	12 Paket	10 Jenis	26.387.526,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	24.707.708,00

5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	30 Laporan	10 Jenis	17.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	19.000.000,00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	162 Laporan	10 Jenis	165.568.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162 Laporan	173.936.700,00

5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.777.770.800,00					2.800.631.256,00
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Cakupan ketersedian penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	12 Laporan	4 Jenis	16.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.800.000,00
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Cakupan ketersedian penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Sem	100 %	12 Laporan	4 Jenis	2.575.320.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.598.831.256,00

								disedia kan	ua Kel/ Desa									
5	0 2	0 1	2. 0 8	0 0 0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Cakupan ketersedian penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis jasa penunj ang urusan pemeri ntahan daerah yang disedia kan	- Kab. Luwu , Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	100 %	21 Lapor an	4 Jeni s	6.850.0 00,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Lapor an	6.200.0 00,00
5	0 2	0 1	2. 0 8	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Cakupan ketersedian penunjang pelaksanaan urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis jasa penunj ang urusan	- Kab. Luwu , Sem ua	100 %	21 Lapor an	4 Jeni s	178.800 .000,00	PEND APAT AN ASLI DAER		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21 Lapor an	178.800 .000,00

						pemerintahan daerah	yang Disediakan	pemerintahan daerah yang disediakan	Kecamatan, Semua Kel/ Desa					AH (PAD)		yang Disediakan		
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								128.400.900,00					134.375.000,00
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	20 Unit	10 Unit	128.400.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	134.375.000,00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								2.143.374.288,00					2.075.646.210,00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								2.143.374.288,00					2.075.646.210,00

5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah													
						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkanPersentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkanPersentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerahPersentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	98.99 %70.63 %90 %80 %	11 Dokumen	100 %	26.015.575,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	11 Dokumen	27.354.075,00
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan Persentase ketercapaian target: penerimaan retribusi daerah Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	5 Dokumen	100 %	108.810.013,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen	107.219.070,00
5	0 2	0 4	2. 0 1	0 0 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	1 Laporan	100 %	66.324.916,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	69.283.672,00
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkanPersentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkanPersentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerahPersentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	98.99 %70.63 %90 %80 %	3 Unit	100 %	19.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	20.055.000,00
5	02	04	2.01	0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	8 Laporan	100 %	327.830.819,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	10.500.000,00
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah															

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan Persentase ketercapaian target: penerimaan retribusi daerah Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	2 Laporan	100 %	103.118.992,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	105.481.057,00
5	02	04	2.01	007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkanPersentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkanPersentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerahPersentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	98.99 %70.63 %90 %80 %	17518 Obyek Pajak	100 %	511.801.744,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	17518 Obyek Pajak	537.440.400,00
5	02	04	2.01	0008		Penetapan Wajib Pajak Daerah													

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	11 Dokumen	100 %	53.250.025,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	11 Dokumen	500.950.405,00
5	02	04	2.01	0009		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	175180 Layanan	100 %	46.377.777,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	175180 Layanan	47.968.987,00
5	02	04	2.01	0010		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah													

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkanPersentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkanPersentase ketercapaian target: penerimaan retribusi daerahPersentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	98.99 %70.63 %90 %80 %	11 Dokumen	100 %	36.296.062,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen	35.370.930,00
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah														

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan Persentase ketercapaian target: penerimaan retribusi daerah Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	11 Dokumen	100 %	355.370.657,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen	368.889.307,00
5	0 2	0 4	2. 0 1	0 0 1 2	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah															

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	2 Dokumen	100 %	2.620.885,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00
5	0 2	0 4	2. 0 1	0 0 1 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkanPersentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkanPersentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerahPersentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	98.99 %70.63 %90 %80 %	1 Dokumen	100 %	357.709.883,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	113.537.760,00
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap targe: yang ditetapkan Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan Persentase ketercapaian targe: penerimaan retribusi daerah Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	1 Laporan	100 %	91.395.575,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	88.903.290,00
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	1 Laporan	100 %	37.301.365,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	39.692.257,00
													TOTAL	**12.658.677.130,00**						**12.900.043.474,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, adapun jumlah Program yang direncanakan untuk tahun 2025 sebanyak 2 Program dengan 10 kegiatan,

Adapun program dan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi dengan kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direncanakan
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan :

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapaun isi kerangka pendanaan memuat rincian kegiatan sebagai berikut

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertera pada Bab III Rencana Kerja ini, Badan Pendapatan Daerah juga menetapkan 3 (Tiga) Indikator sasaran dan tujuan beserta targetnya sebagai tolak ukur pencapaian kinerja tahun 2024, sebagai tabel berikut :

b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa
g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
h) Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
a) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
b) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah
a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
a) Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan dan kantor
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
f) Penyediaan Bahan/ Material
g) Fasilitasi Kunjungan Tamu
h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan

b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

a) Perencanaan pengelolaan pajak daerah

b) Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah

c) Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah

d) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah

e) Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah

f) Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah

g) Penilaian pajak bumi dan bangunan edesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

h) Penetapan wajib pajak daerah

i) Pelayanan dan konsultasi pajak daerah

j) Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah

k) Penagihan pajak daerah

l) Penyelesasian keberatan pajak daerah

m) Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah

n) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah

o) Elektronifikasi Transaksi pemerintah daerah

Untuk Rincian Belanja Pada setiap sub kegiatan dapat kita lihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LUWU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**10.733.756.512,00**							**11.302.416.591,80**	
	3	**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.733.756.512,00**							**11.302.416.591,80**	
	3.02	**KEUANGAN**						**10.732.756.512,00**							**11.302.416.591,80**	
1	**3.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan*	**100 Persen**			**100 Persen**	**9.665.775.192,00**						**100 Persen**	**9.633.817.256,00**	
	3.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6Dokumen			3 Dokumen	74.671.904,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pmy menggarakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	ASN di lingkup kerja Kab. Luwu	3Dokumen	107.636.568,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			7 Dokumen Dokumen	36.934.279,00	Kab. Luwu, Kelapa, Sonsoi Kel/Desa	PAJAK DAERAH, OPSEN PKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pmy menggarakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	ASN di lingkup kerja Kab. Luwu	1 Dokumen	79.234.524,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	8 Dokumen			4 Dokumen	7.313.372,00	Kab. Luwu, Kelapa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pmy menggarakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	ASN di lingkup kerja Kab. Luwu	- Dokumen	7.911.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen			4 Dokumen	5.467.087,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	ASN di lingkup kerja Kab. Luwu	4 Dokumen	5.813.501,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen			1 Dokumen	6.735.569,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	ASN di lingkup kerja Kab. Luwu	4 Dokumen	6.716.680,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen			4 Dokumen	4.188.507,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	ASN di lingkup kerja Kab. Luwu	4 Dokumen	4.478.568,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			4 Laporan	4.999.993,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	ASN di lingkup kerja Kab. Luwu	4 Laporan	5.103.616,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Laporan			6 Laporan	16.535.527.00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pmy menggunakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	ASN di lingkup kerja Kab. Luwu	15 Laporan	17.044.526.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5366 orang/bulan			2683 orang/bulan	5.810.000.456.00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pmy menggunakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	ASN di lingkup kerja Kab. Luwu	2683orang/bulan	6.151.718.115.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5366 Orang/bulan			2683 Orang/bulan	5.566.826.924.00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - UNA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pmy menggunakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	ASN di lingkup kerja Kab. Luwu	2683 Orang/bulan	5.884.340.376.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Perutusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Perbendaharaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen			0 Dokumen	219.276.171.00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pmy menggunakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	ASN di lingkup kerja Kab. Luwu	1 Dokumen	235.832.022.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Penyusunan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	IND KATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	8.137.857,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola yang menggarasi pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	ASN di lingkup kerja Kab. Luwu	1 Dokumen	8.444.764,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			2 Laporan	12.100.271,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola yang menggarasi pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	ASN di lingkup kerja Kab. Luwu	2 Laporan	12.999.224,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen			1 Dokumen	4.126.926,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola yang menggarasi pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	ASN di lingkup kerja Kab. Luwu	1 Dokumen	3.666.483,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	54 Laporan			17 Laporan	4.389.637,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola yang menggarasi pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	ASN di lingkup kerja Kab. Luwu	17 Laporan	4.879.877,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	IND KATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen			4 Dokumen	4.958.570,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pmy elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kerja Pemerintah an Yang Optimal	ASN di lingkup kerja Kab. Luwu	1 Dokumen	5.432.809,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8Laporan			4 Laporan	25.124.272,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pmy elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kerja Pemerintah an Yang Optimal	Kab. Luwu	4 Laporan	26.648.813,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan			4 Laporan	6.966.547,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pmy elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kerja Pemerintah an Yang Optimal	Kab. Luwu	4 Laporan	7.545.286,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			2 Laporan	18.125.733,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pmy elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kerja Pemerintah an Yang Optimal	Kab. Luwu	2 Laporan	19.630.527,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER CARA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Pemungkut Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12Dokumen			16 Dokumen	992.651.261,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan Inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Kab. Luwu	14Dokumen	912.635.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	02 Dokumen			15 Dokumen	370.144.600,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan Inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Kab. Luwu	15 Dokumen	508.971.031,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0002	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen			4 Dokumen	2.906.752,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Kab. Luwu	4 Dokumen	3.514.528,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis, impas maupun penataran pendidikan lainnya	12orang			9 orang	150.033.606,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Kab. Luwu	Norang	164.436.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengelolaan Pelayan Dinas biasanya Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	254 Paket			1 Paket	76.584.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pmy elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	127 Paket	82.635.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	116 Dokumen			2 Dokumen	4.888.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pmy elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	58 Dokumen	4.242.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.20.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen			1 Dokumen	6.660.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pmy elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	1 Dokumen	7.326.566,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	2 Dokumen			1 Dokumen	6.660.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pmy elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	1 Dokumen	7.326.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdukungan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang			1 Orang	100.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pmy elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	2 Orang	100.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang			3 Orang	55.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola pmy elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	6 Orang	62.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jasa penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	60Paket			30 Paket	1.234.683.563,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pmy elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	10Paket	1.197.719.563,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket			10 Paket	29.567.782,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	OPSEN PKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pmy elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	10 Paket	136.514.470,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Penyelenggaraan Perjalanan dinas Pelanggaran Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Perakitan dan Pengelolaan Kantor yang Disediakan	14 Paket			7 Paket	231.000.835,00	Kab. Luwu, Belopa, Bellipa	OPSEN PKS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola yang elenggarakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kerja Pemerintah an Yang Optimal	Kab. Luwu	7 Paket	241.330.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			30 Paket	88.720.835,00	Kab. Luwu, Belopa, Bellipa	OPSEN PKS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola yang elenggarakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kerja Pemerintah an Yang Optimal	Kab. Luwu	1 Paket	93.130.133,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyelolaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	224 Paket			9 Paket	209.104.060,00	Kab. Luwu, Belopa, Bellipa	OPSEN PKS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola yang elenggarakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kerja Pemerintah an Yang Optimal	Kab. Luwu	112 Paket	246.404.896,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	286 Dokumen			12 Dokumen	62.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Bellipa	OPSEN PKS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola yang elenggarakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kerja Pemerintah an Yang Optimal	Kab. Luwu	143 Dokumen	65.530.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket			12 Paket	26.287.770,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	OPSEN PKD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan Inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	12 Paket	27.745.862,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan			30 Laporan	30.000.634,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	OPSEN PKD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan Inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	30 Laporan	31.518.666,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324 Laporan			162 Laporan	436.878.126,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	OPSEN PKD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	162 Laporan	355.206.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	24 Laporan			12 Jenis	1.079.885.810,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	12Laporan	1.050.810.662,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sosial Menyusul	24 Laporan			12 Laporan	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	12 Laporan	33.630.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	181.540.815,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DPSEN PKS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	12 Laporan	207.716.152,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Penataan dan Pemeliharaan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penataan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan				21 Laporan	22.540.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DPSEN PKS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu		24.212.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan			21 Laporan	372.400.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	12 Laporan	766.640.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya*	40Unit			20 Unit	334.589.456,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pmy menggunakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kerja Pemerintah an Yang Optimal	Kab. Luwu	20Unit	346.132.532,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3.02.01.2.09.0002	Penyelaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit			20 Unit	235.919.456,00	Kab. Luwu, Kelapa, Belopa	OPSEN PKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pmy menggunakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kerja Pemerintah an Yang Optimal	Kab. Luwu	40 Unit	293.132.532,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	98.670.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola pmy menggunakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kerja Pemerintah an Yang Optimal	Kab. Luwu		193.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	3.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	*Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB* *Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan* *Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan* *Persentase keberhasilan target penerimaan retribusi daerah*	91,83% 90,61% 91,39% 91,83% 90,61% 88,42% 91,39% 88,42% 88,42% 91,39% 90,61% 91,83% 91,83% 91,39% 90,61% 88,42%			90,34 % 91,21 % 91,23 % 88,02 %	1.666.563.320,00						91,83% 90,61% 91,39% 91,83% 90,61% 88,03% 91,39% 88,02% 88,02% 91,39% 90,61% 91,83% 91,83% 91,39% 90,61% 88,02%	1.666.331.335,80	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	IND KATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan,Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan,Persentase ketepatan target penerimaan pendapat daerah,Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB*	22Dokumen			11 Dokumen	1.466.963.920,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kerja Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	11Dokumen	1.666.331.235,85	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	22 Dokumen			12 Dokumen	33.171.316,00	Kab. Luwu, Belopa, Bekopa	OPSEN PKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kerja Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	11 Dokumen	41.132.958,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisi Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10 Dokumen			5 Dokumen	39.036.222,00	Kab. Luwu, Belopa, Bekopa	OPSEN PKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kerja Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	5 Dokumen	37.614.316,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan			1 Laporan	28.580.934,00	Kab. Luwu, Belopa, Bekopa	OPSEN PKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kerja pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kerja Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	1 Laporan	29.949.527,85	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit			3 Unit	5.010.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	OPSEN PKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola yang menggunakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	0 Unit	5.254.065,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	16 Laporan			8 Laporan	60.590.465,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola yang menggunakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	8 Laporan	63.622.988,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan			2 Laporan	111.013.141,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola yang menggunakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	2 Laporan	116.564.290,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Diesuaikan NJOP-nya	35.036 Objek Pajak			17518 Objek Pajak	14.038.685,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	OPSEN PKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola yang menggunakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	17518 Objek Pajak	12.407.725,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Pendataan Wajib Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER CANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	30 Dokumen			11 Dokumen	28.559.089,00	Kab. Luwu, Belopa, Bakpa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03.Peningkatan Tata Kelola pmy elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	15 Dokumen	28.871.089,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	350.360 Layanan			175160 Layanan	473.252.706,00	Kab. Luwu, Belopa, Bakpa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03.Peningkatan Tata Kelola pmy elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	175180 Layanan	920.913.493,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	30 Dokumen			11 Dokumen	29.179.676,00	Kab. Luwu, Belopa, Bakpa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03.Peningkatan Tata Kelola pmy elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	15 Dokumen	30.640.651,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	90 Dokumen			11 Dokumen	341.255.536,53	Kab. Luwu, Belopa, Bakpa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03.Peningkatan Tata Kelola pmy elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	15 Dokumen	141.642.262,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Kebenaran Pajak Daerah	4 Dokumen			2 Dokumen	14.006.916,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pelayanan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	2 Dokumen	14.720.662,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	340.634.738,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pelayanan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	1 Dokumen	358.971.075,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pemberian dan Pengelolaan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberian dan Pengelolaan Pungutan Retribusi Daerah	2 Laporan			1 Laporan	58.035.815,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pelayanan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	1 Laporan	61.011.970,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan			1 Laporan	91.014.691,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01 Peningkatan Tata Kelola pelayanan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kab. Luwu	1 Laporan	85.234.721,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		JUMLAH						70.732.758.512,00							11.302.410.591,00	

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan, kebutuhan pendanaan tahun anggaran 2025 pada Badan Pendapatan Daerah direncanakan Sebesar **Rp 10.732.758.512,00 (Sepuluh Milliyar Tujuh Ratus Tiga puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima puluh delapan Ribu Lima ratus dua belas rupiah).**

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana kerja ini dengan tujuan untuk menentukan acuan dan arahan pembangunan di bidang pendapatan Kabupaten Luwu. Penyusunan ini tidak lepas dari tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan.

Proses Penyusunan Renja ini memerlukan adanya keterlibatan dari brbagai pihak terkait, sehingga semua komponen dilingkungan Badan pendapatan Daerah Kabupapten Luwu ikut terapresiasi dan terwakili, juga ikut bertanggung jawab terhadap program kerja yang yang direncanakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan wewenang urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang di emban oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.

Semoga Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan semua pihak untuk melaksanakan Program Kegiatan dengan Sebaik-baiknya.

Belopa, 04 April 2024

Kepala BAPENDA Kab. Luwu

H. SOFYAN THAMRIN, ST.,MM.,M.SP

PKT. PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19810213 200502 1 001

RENCANA KERJA TAHUN 2025

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LUWU

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah ini dapat tersusun.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah ini disusun sebagai panduan perencanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi mulai dari awal hingga akhir penyusunan Rencana Kerja ini, baik melalui hubungan kedinasan maupun secara pribadi, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat imbalan yang jauh lebih baik di sisi Allah, S.W.T.

Belopa, Juli 2024

Kepala BKAD Kab. Luwu



Drs. ALAMSYAH, M.Si
Pkt. Pembina Utama Muda
Nip. 19690620 199003 1 009

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 43
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 44
3.3. Program dan Kegiatan 47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 64
4.1 Rencana Kerja 64
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah 64
BAB V PENUTUP 106

DAFTAR TABEL

NO	KETERANGAN	HAL
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Luwu	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu	26
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu	32
Tabel 3.1	Indikator Tujuan/Sasaran Tahun 2025	47
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	53
Tabel 4.1	Rencana Pendanaan Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu	65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja yang biasa disingkat Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun anggaran, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD dan berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjamahan dari tujuan dan sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, tahun 2025 ini merupakan tahun Pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu didalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Tujuan dari Penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026;
2. Untuk menyusun program dan kegiatan yang direncakan pada tahun anggaran 2025;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu disusun kedalam sebuah dokumen deskriptif yang memuat data kualitatif dan kuantitatif, yang terdiri dari 5 Bab, yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L, dan Renja Provinsi/Kabupaten/kota serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI R E NJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangka Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD Tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat/Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
5. Formulasi Isu-Isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam rumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Beisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan ata rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BABA V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan sekaligus kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2026, mengingat Renja tahun 2025 ini adalah tahun Pertama pelaksanaan Renstra periode Tahun 2025-2026, sehingga yang dievaluasi dalam Renja Tahun 2025 ini adalah Renja Tahun 2023. Secara umum Badan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, hal tersebut terlihat pada hasil evaluasi Rencana Kerja, Evaluasi Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan melalui Pengukuran kinerja kegiatan dan program yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Luwu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Kinerja			Keuangan				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Taerget	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**8,207,356,731**	**7,962,046,578**	97.01	100.00	100.00	100.00
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**%**	**100**	95	**100**	**100**	**100**	**102,934,200**	**100,072,100**	97.22	100.00	100.00	100.00
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	6	2	2	100	5,607,700	5,552,700	99.02	2	10	100.00
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	3	1	1	100	9,253,300	9,243,300	99.89	1	5	100.00
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	3	1	1	100	4,648,300	4,607,700	99.13	1	5	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Kinerja			Keuangan				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Taerget	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	3	1	1	100	39,334,200	38,443,700	97.74	1	5	100.00
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	3	1	1	100	3,049,600	2,166,100	71.03	1	5	100.00
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	245	147	49	49	100	1,528,600	1,528,600	100.00	49	245	100.00
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	12	4	4	100	39,512,500	38,530,000	97.51	4	20	100.00
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4,785,888,397**	**4,684,125,360**	97.87	100.00	100.00	100.00
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2940	1,764	658	658	100	4,055,572,397	3,955,308,860	97.53	588	3,010	102.38

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Kinerja			Keuangan				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Taerget	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10,000	8,215	2,500	2561	102.44	716,875,600	715,433,600	99.80	2,500	13,276	132.76
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	5	3	1	1	100	6,970,200	6,960,200	99.86	1	5	100.00
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	6	2	2	100	6,470,200	6,422,700	99.27	2	10	100.00
5	**02**	**01**	**01**	**2. 03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase penatusahaan BMD SKPD yang tertib**	**%**	**95**	90	**95**	**95**	**100**	**92,605,600**	**80,008,100**	86.40	95.00	95.00	100.00
5	02	01	01.2	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	6	2	2		92,605,600	80,008,100	86.40	2	10	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Kinerja			Keuangan				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Taerget	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**%**	**93**	90	**92**	**92**	**100**	**172,378,000**	**160,748,800**	93.25	93.00		0.00
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	1	4	4	100	138,500,000	138,500,000	100.00	2	7	140.00
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11	5	2	2	100	10,880,000	6,280,000	57.72	0	7	63.64
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	46	19	2	2	100	22,998,000	15,968,800	69.44	5	26	56.52
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi Umum**	**%**	100	100	**100**	**100**	**100**	**1,301,542,215**	**1,277,407,843**	98.15	100.00	100.00	100.00
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	3	1	1	100	7,632,000	7,632,000	100.00	1	5	100.00
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	3	1	1	100	34,875,000	34,677,800	99.43	1	5	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Kinerja			Keuangan				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Taerget	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	3	1	1	100	28,425,000	28,220,000	99.28	1	5	100.00
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1600	960	320	320	100	131,350,000	112,910,000	85.96	320	1,600	100.00
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	3	6	6	100	31,290,415	31,252,515	99.88	6	15	300.00
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	150	83	50	50	100	78,000,000	75,185,000	96.39	34	167	111.33
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	500	322	240	240	100	989,969,800	987,530,528	99.75	100	662	132.40
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**%**	94	90	**93**	**93**	**100**	**932,685,700**	**896,494,940**	96.12	94.00	93.00	98.94
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	5	1	1	100	550,000,000	545,800,000	99.24	0	6	85.71
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	70	39	39	100	382,685,700	350,694,940	91.64	16	125	125.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Kinerja			Keuangan				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Taerget	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan**	**%**	100	100	**100**	**100**	**100**	**272,399,875**	**245,567,911**	90.15	100.00	100.00	100.00
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	36	12	12	100	6,610,750	6,610,750	100.00	12	60	100.00
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	36	3	3	100	229,789,125	202,957,161	88.32	12	51	85.00
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	36	2	2	100	36,000,000	36,000,000	100.00	12	50	83.33
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**%**	94	90	**93**	**93**	**100**	**546,922,744**	**517,621,524**	94.64	94.00	93.00	98.94
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	75	44	25	25	100	235,890,200	213,718,504	90.60	25	94	125.33
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	Unit	125	93	35	35	100	22,510,000	20,710,000	92.00	37	165	132.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Kinerja			Keuangan				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Taerget	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	100	288,522,544	283,193,020	98.15	1	3	60.00
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Penyerapan APBD**	**%**	**98**	**97**	**98**	**93.67**	**95.58**	**263,205,458,846**	**262,404,229,175**	99.70	98.00	98.00	100.00
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase SKPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**99**	**100**	**100**	**100**	**1,547,102,350**	**1,512,285,148**	97.75	100.00	100.00	100.00
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	2	2	2	100	32,662,300	31,600,526	96.75	2	6	60.00
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	2	2	2	100	30,168,200	29,175,560	96.71	2	6	60.00
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	285	171	57	57	100	13,011,000	12,943,500	99.48	57	285	100.00
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	285	171	57	57	100	10,917,000	10,897,000	99.82	57	285	100.00
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	285	171	57	57	100	12,797,400	10,729,800	83.84	57	285	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Kinerja			Keuangan					
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Taerget	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	285	171	57	57	100	5,667,000	5,667,000	100.00	57	285	100.00
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	10	6	2	2	100	602,390,600	588,983,357	97.77	2	10	100.00
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	10	6	2	2	100	518,434,500	513,005,504	98.95	2	10	100.00
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	5	3	1	1	100	46,813,000	44,346,951	94.73	1	5	100.00
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	70	42	14	14	100	68,086,500	60,714,500	89.17	14	70	100.00
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	285	171	57	57	100	135,975,100	134,974,500	99.26	57	285	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Kinerja			Keuangan				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Taerget	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	228	20	114	114	100	70,179,750	69,246,950	98.67	114	248	108.77
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu**	**%**	98	90	**97**	**97**	**100**	**516,354,750**	**503,198,470**	97.45	98.00	97.00	98.98
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	285	171	57	57	100	91,362,850	88,424,300	96.78	57	285	100.00
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	2500	2,300	1150	1306	113.57	62,426,500	61,802,650	99.00	1100	4,706	188.24
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	75	45	15	15	100	151,624,100	147,618,140	97.36	15	75	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Kinerja			Keuangan				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Taerget	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	15	9	3	3	100	126,281,900	124,355,180	98.47	3	15	100.00
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	285	171	57	57	100	84,659,400	80,998,200	95.68	57	285	100.00
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu**	**%**	99	98	**99**	**99**	**100**	**669,847,500**	**656,132,350**	97.95	99.00	99.00	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Kinerja			Keuangan				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Taerget	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dokumen	285	114	57	57	100	54,442,050	54,357,050	99.84	57	228	80.00
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan_LO dan beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	285	171	57	57	100	30,956,400	30,898,900	99.81	57	285	100.00
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	25	15	5	5	100	52,448,300	52,354,050	99.82	5	25	100.00
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	25	15	5	5	100	154,322,350	154,181,350	99.91	5	25	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Kinerja			Keuangan				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Taerget	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	10	6	2	2	100	75,564,300	75,564,300	100.00	2	10	100.00
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	15	6	3	3	100	6,691,050	6,691,050	100.00	3	12	80.00
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	250	150	50	50	100	93,153,700	80,609,400	86.53	50	250	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Kinerja			Keuangan				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Taerget	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	5	2	1	1	100	83,505,600	82,768,520	99.12	1	4	80.00
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	-	1	1	100			#DIV/0!	0	1	100.00
5	02	02	2.03	11	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	570	365	114	114	100.00	118,763,750	118,707,730	99.95	114	593	104.04
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Tingkat Capaian Target Penyaluran Bantuan Keuangan**	**%**	100	100	**100**	**100**	**100**	**259,657,403,246**	**258,926,362,207**	99.72	100.00	100	100.00
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	8280	4,968	414	414	100	249,515,617,000	249,515,608,000	100.00	414	5,796	70.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Kinerja			Keuangan				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Taerget	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	75	36	18	19	105.56	4,344,208,652	4,139,871,200	95.30	10	65	86.67
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	4140	2,484	414	414	100	5,797,577,594	5,270,883,007	90.92	414	3,312	80.00
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase SKPD yang Mengimplementasikan Sistem Informasi Secara Tertib**	**%**	98	95	**96**	**96**	**100**	**814,751,000**	**806,251,000**	98.96	98.00	97.00	98.98
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	285	171	57	57	1	814,751,000	806,251,000	98.96	57	285	100.00
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat**	**%**	99	98	**99**	**99**	**100**	**1,010,585,200**	**935,668,306**	92.59	99.00	99.00	100.00
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu**	**%**	96	92	**97**	**97**	**100**	**1,010,585,200**	**935,668,306**	92.59	96.00	95.00	98.96
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	5	3	1	1	100	101,924,450	96,186,000	94.37	1	5	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Kinerja			Keuangan					
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Taerget	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	10	8	2	2	100	37,277,700	32,982,700	88.48	2	12	120.00
5	02	03	2.01		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	1	1	100	52,421,300	51,178,700	97.63	0	3	150.00
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	285	171	57	57	100	77,357,300	72,660,450	93.93	57	285	100.00
5	02	03	2.01	06	Inventariisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	285	171	57	57	100	194,695,600	181,637,200	93.29	57	285	100.00
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	300	327	60	93	155.00	81,008,900	74,849,500	92.40	60	480	160.00
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	300	1,124	40	82	205.00	160,572,600	148,239,100	92.32	60	1,266	422.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
										Kinerja			Keuangan				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Taerget	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	300	152	60	82	136.67	113,486,300	98,511,200	86.80	60	294	98.00
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	285	171	57	57	100	49,895,900	43,945,800	88.07	57	285	100.00
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	10	4	2	2	100	56,103,200	50,836,100	90.61	2	8	80.00
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	228	-	114	114	100	85,841,950	84,641,556	98.60	0	114	50.00
													272,423,400,777	**271,301,944,059**	99.59			

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya atau rendahnya pencapaian target Renja dan Renstra pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang cukup mamadai, juga didukung dengan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan organisasi, sehingga memungkinkan pencapaian kinerja yang memuaskan.

Pelaksanaan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Luwu

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan		IKU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten		IKU	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
3	Penetapan APBD		IKU	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
4	Persentase Aset Daerah yang digunakan		IKU	85%	86%	87%	87%	85%	86%	87%	87%	
5	Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Daerah		IKU	85%	86%	87%	87%	85%	86%	87%	87%	
6	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Penyerapan APBD		IKK	97%	98%	98%	98%	90,3%	93,67%	98%	98%	
8	Persentase SKPD dalam Penatausahaan BMD Secara Akurat		IKK	98%	99%	99%	99%	98%	99%	99%	99%	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan Kebutuhan		IKK	99%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	
10	Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu		IKK	95%	97%	98%	98%	95%	97%	98%	98%	
11	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu		IKK	98%	99%	99%	99%	98%	99%	99%	99%	
12	Tingkat Capaian Target Penyaluran Bantuan Keuangan		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase SKPD yang Mengimplementasikan Sistem Informasi Secara Tertib		IKK	96%	97%	98%	98%	96%	97%	98%	98%	
14	Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu		IKK	94%	95%	96%	96%	94%	95%	96%	96%	
15	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu		IKK	95%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	
16	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Persentase Penatausahaan BMD SKPD yang Tertib		IKK	90%	95%	95%	95%	90%	95%	95%	95%	
18	Persentase ASN dengan Predikat Kinerja Baik		IKK	91%	92%	93%	100%	91%	92%	93%	100%	
19	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		IKK	92%	93%	94%	94%	92%	93%	94%	94%	
21	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		IKK	92%	93%	94%	94%	92%	93%	94%	94%	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 39 Tahun 2023, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan dan aet daerah;
c. Pemantauan, evaluai dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu masih terdapat berbagai permasalahan yang sampai saat ini masih membutuhkan pembenahanan untuk pencapaian kinerja yang lebih maksimal, adapun permasalahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah pada saat ini adalah :

1. Kurang berkualitasnya penganggaran keuangan
2. Kurang berkualitasnya pelayanan perbendaharaan
3. Kurang berkualitasnya pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
4. Kurang berkualitasnya penatausahaan barang milik daerah
5. Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah
6. Kurang berkualitasnya penyelenggaraan Pelayanan Publik

Selain permasalahan tersebut di atas juga ditemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti :

1. Regulasi yang sering berubah-ubah
2. Kurangnya pemahaman Pegawai tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Disiplin Pegawai masih kurang

permasalahan dan hambatan yang terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah tentu saja akan berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran jika tidak segera dibenahi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran terdapat beberapa tantangan dan peluang yang harus diperhatikan guna pencapaian kinerja yang optimal, adapun tantangan dan peluang pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu yaitu :

a. Tantangan

1. Perkembangan teknologi yang berbasis teknologi informasi yang cepat dalam pengelolaan keuangan
2. Adanya tuntutan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
3. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat
4. Implementasi akuntansi berbasis akrual
5. Semakin ketatnya pengawasan terhadap aktivitas Pemerintah Daerah khususnya pengelolaan keuangan

b. Peluang

1. Adanya Lembaga Pemerintahan dan Swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kompotensi SDM
2. Hubungan kerja dengan Instansi terkait dan Stakeholder telah terjalin dengan baik
3. Adanya berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
4. Adanya dukungan dari Pimpinan Eksekutif maupun Legislatif
5. Adanya dukungan anggaran secara teratur dan berkesinambungan

Selain tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran juga terdapat isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang trategis yang menjadi acuan dalam perumusan program dan

kegiatan yang lasim disebut isu strategis. Adapun isu-isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu adalah :

1. Laju Inflasi yang mempengaruhi fiscal daerah
2. Ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat masih sangat tinggi
3. Ketersediaan sumber daya keuangan daerah yang terbatas
4. Pengguna Barang Kabupaten Luwu belum sepenuhnya disiplin dalam penatausahaan aset sesuai ketentuan
5. Tuntutan masyarakat untuk melakukan pelayanan prima

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD, program dan kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD semuanya diakomodir ke dalam Renja namun beberapa Sub Kegiatan tidak diakomodir mengingat keterbatasan anggaran serta terdapat besaran rupiah yang berbeda dari Rancangan Awal RKPD ke Renja, adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				**270,200,684,479**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**274,200,684,479**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**5,761,730,620**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**5,791,413,914**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**100 %**	**90,819,190**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**100 %**	**90,028,725**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,453,252	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4,505,340	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,229,477	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4,249,240	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,109,477	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3,678,250	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	38,297,477	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	38,304,540	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,285,951	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2,118,100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42 Laporan	1,399,704	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42 dokumen	1,446,375	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	36,043,852	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	35,726,880	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu**	**100 %**	**4,429,331,071**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu**	**100 %**	**4,502,553,658**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588 Orang/bulan	3,713,527,556	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588 orang	3,822,175,177	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Dokumen	704,399,284	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 dokumen	668,858,265	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5,325,773	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5,437,238	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Belopa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Belopa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6,078,458	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	6,082,978	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase penatausahaan BMD SKPD yang tertib**	**90 %**	**87,034,740**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase penatausahaan BMD SKPD yang tertib**	**90 %**	**86,746,900**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	87,034,740	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	86,746,900	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**92 %**	**79,329,199**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**92 %**	**63,563,300**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belopa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	32,550,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belopa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	38,940,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Belopa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42 Dokumen		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Belopa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42 dokumen	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilain Kinerja Pegawai	Belopa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	42 Dokumen	2,991,199	Monitoring, Evaluasi, dan Penilain Kinerja Pegawai	Belopa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	42 dokumen	2,983,300	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Kab. Luwu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	26,880,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Kab. Luwu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	4,680,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Kab. Luwu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	16,908,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Kab. Luwu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	16,960,000	
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase pemenuhan administrasi Umum**	**100 %**	**591,902,326**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase pemenuhan administrasi Umum**	**100 %**	**559,404,943**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belopa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,545,980	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belopa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,542,919	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belopa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,022,450	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belopa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	30,039,183	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belopa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18,960,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belopa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	18,529,342	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belopa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	313 Dokumen	75,300,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belopa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	313 dokumen	49,800,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Belopa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	29,346,396	Penyediaan Bahan/Material	Belopa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 paket	26,062,403	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belopa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	32,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belopa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 laporan	32,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu, Luar Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	400,727,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu, Luar Kab. Luwu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	397,431,096	
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**93 %**	**79,818,350**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**93 %**	**85,755,721**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Belopa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	25,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Belopa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	39,121,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	54,818,350	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	46,634,721	
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan**	**100 %**	**255,165,744**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan**	**100 %**	**277,474,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,845,289	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3,791,097	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	215,320,455	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	237,682,903	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36,000,000	
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**93 %**	**148,330,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**93 %**	**125,886,667**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	139,525,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	118,596,667	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	35 unit	6,805,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	35 unit	5,200,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belopa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belopa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2,090,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		**Persentase Penyerapan APBD**	**98 %**	**263,901,746,177**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**Persentase Penyerapan APBD**	**98 %**	**267,900,776,131**	
9	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**Perentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan**	**100 %**	**1,170,520,758**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**Perentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan**	**100 %**	**1,181,161,145**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Belopa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	22,724,290	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Belopa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	97 dokumen	22,714,324	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	23,447,540	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	98 dokumen	23,441,410	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Belopa	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 dokumen	16,350,473	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Belopa	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 dokumen	16,316,000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Belopa	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 dokumen	10,206,278	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Belopa	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 dokumen	10,152,600	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Belopa	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	57 dokumen	8,232,709	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Belopa	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	57 dokumen	8,228,310	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	57 dokumen	8,182,249	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	57 dokumen	8,160,460	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Belopa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	435,837,907	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Belopa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	438,551,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Belopa	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	412,260,098	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Belopa	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	411,020,252	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Belopa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 dokumen	17,622,215	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Belopa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	50 dokumen	17,920,290	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	14 dokumen	44,798,585	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	14 dokumen	44,687,706	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	57 dokumen	104,828,432	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	57 dokumen	105,981,497	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Belopa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	114 orang	66,029,982	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Belopa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	114 ASN	73,987,296	
10	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu**	**97 %**	**268,479,789**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu**	**97 %**	**316,515,113**	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	57 dokumen	48,425,866	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	57 dokumen	47,238,906	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1100 dokumen	27,388,150	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1100 dokumen	27,351,500	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	15 lapran	66,220,279	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	89 lapran	67,874,320	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Belopa	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 laporan	67,494,754	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Belopa	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 laporan	66,420,597	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	57 dokumen	48,950,740	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	57 dokumen	47,871,134	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerima dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Belopa	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	-	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerima dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Belopa	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	-	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Belopa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	114 orang	10,000,000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Belopa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	114 ASN	59,758,656	
11	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu**	**99 %**	**588,172,827**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu**	**99 %**	**588,538,068**	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Belopa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	57 dokumen	76,900,682	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Belopa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	57 dokumen	83,579,123	
	Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan_LO dan beban	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	57 dokumen	30,476,444	Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan_LO dan beban	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	57 dokumen	30,530,920	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Belopa	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5 laporan	54,666,031	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Belopa	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	0 laporan	55,390,540	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 laporan	128,929,686	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 laporan	126,798,838	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	Belopa	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	64,488,016	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	Belopa	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	97 dokumen	66,057,716	
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Belopa	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 dokumen	18,613,980	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Belopa	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 dokumen	18,826,233	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	50 dokumen	92,465,285	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	50 dokumen	90,489,652	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Belopa	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	12,919,741	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Belopa	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	12,902,932	
	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Belopa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	114 orang	104,285,537	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Belopa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	114 orang	99,539,894	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Belopa	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	2 lembaga	4,427,425	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Belopa	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	2 lembaga	4,422,220	
12	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Tingkat Capaian Target Penyaluran Bantuan Keuangan**	**100 %**	**261,243,326,253**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Tingkat Capaian Target Penyaluran Bantuan Keuangan**	**100 %**	**265,243,326,253**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Belopa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1656 Laporan	249,795,285,550	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Belopa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1656 Laporan	249,795,285,550	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Belopa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10 Laporan	6,000,000,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Belopa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10 Laporan	10,000,000,000	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Belopa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	828 Laporan	5,448,040,703	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Belopa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	828 Laporan	5,448,040,703	
13	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**		**Persentase SKPD yang Megimplementasikan Sistem Informasi secara tertib**	**97 %**	**631,246,550**	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**		**Persentase SKPD yang Megimplementasikan Sistem Informasi secara tertib**	**100 %**	**571,235,552**	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	57 Dokumen	631,246,550	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	57 Dokumen	571,235,552	
	PROGRAM PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH		**Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat**	**99 %**	**537,207,682**	**PROGRAM PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH**		**Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat**	**99 %**	**508,494,434**	
14	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu**	**95 %**	**537,207,682**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu**	**95 %**	**508,494,434**	
	Penyusunan Standar Harga	Belopa	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	58,850,668	Penyusunan Standar Harga	Belopa	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	50,442,081	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Belopa	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	-	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Belopa	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	-	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Belopa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	8,153,107	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Belopa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	94 dokumen	7,156,086	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Belopa	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	9,962,975	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Belopa	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	10,084,074	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Belopa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	57 laporan	75,739,536	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Belopa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	57 laporan	76,369,306	
	Inventariisasi Barang Milik Daerah	Belopa	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	57 Laporan	76,900,777	Inventariisasi Barang Milik Daerah	Belopa	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	57 Laporan	76,559,850	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 laporan	58,938,389	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 laporan	58,142,241	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Belopa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	50 laporan	77,563,865	Penilaian Barang Milik Daerah	Belopa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	50 laporan	75,863,832	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	50 dokumen	61,975,410	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Belopa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	50 dokumen	56,060,046	
	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Belopa	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	57 laporan	44,989,616	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Belopa	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	57 laporan	32,994,139	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Belopa	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	35,608,302	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Belopa	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	35,968,734	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Belopa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	114 orang	28,525,037	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Belopa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	114 orang	28,854,045	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pemerintahan fungsi penunjang keuangan sehingga tidak ada usulan program atau kegiatan dari masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional adalah pernyataan yang berisi prinsip-prinsip dan tindakan umum yang diadopsi oleh pemerintah nasional untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan nasional bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Kebijakan Nasional seyogyanya selaras dengan Visi Misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan selanjutnya menjadi acuan dalam Penetapan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional untuk tahun 2025 sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan sasaran yang harus dicapai pada akhir Tahun 2025 melalui kerangka ekonomi makro yaitu :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 5,3-5,6%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,5-5,0%
3. Rasio Gini : 0,379-0,382
4. Indeks Modal Manusi (IMM) : 0,56
5. Tingkat Kemiskinan : 7,8-8,0%
6. Penurunan Entensitas Emisi GRK : 38,6%.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertanahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkannilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan jkorupsi, narkotika, judi dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8 : memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah diformulasikan secara spesifik, rasional, mudah dicapai, dan dapat dilaksanakan. Dasar penetapan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah visi dan misi kepala daerah, serta permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan dan sasaran perangkat daerah harus diselaraskan dengan amanat pembangunan daerah, provinsi, dan nasional.

Pada dasarnya asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Atas dasar tersebut sehingga Badan

Keuangan dan Aset Daerah berkeinginan untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan daerah tersebut melalui penetapan tujuan organisasi, tujuan tersebut tentunya juga tidak lepas dari Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ingin mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, tranparan dan akuntabel, tujuan berisi pernyataan yang perlu dilakukan bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan akan tetapi komitmen untuk mewujudkan dan melaksanakan Misi Kepala Daerah selama lima tahun yang akan datang dengan didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Adapun Tujuan yang yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 adalah :

"Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Taat Aturan, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel"

Yang didefenisikan sebagai berikut :

a. Tertib adalah bahwa keuangan dan Aset daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. Taat Aturan adalah taat terhadap peraturan perundang-undangan, artinya bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah harus berpedoman pada praturan perundang-undangan;
c. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan keluaran dengan hasil;
d. Efesien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
e. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
f. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun indikator Tujuan yang ditetapkan adalah **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan**.

Untuk mewujudkan Tujuan tersebut di atas Badan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai gambaran dari hasil yang diharapkan dari tujuan. Adapun sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu tahun 2025-2026 adalah :

1. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**
2. **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah perwujudan kewajiban Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, diharapkan kedepan Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat meningkatkan akuntabilitas Kinerja sehingga tercipta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan suatu keinginan yang diharapkan akan tercapai pada masa yang akan datang, dimana pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan pada saat ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi sehingga diharapkan dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas pada masa yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas ditetapkan beberapa indikator, adapun indikator tujuan dan sasaran serta target yang ditetapkan untuk tahun 2025 yaitu :

Tabel 3.1

Indikator Tujuan/Sasaran Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja 2025
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Taat Aturan, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	BB
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Persentase Aset Daerah yang digunakan	87%
		Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Daerah	87%

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Berdasarkan hal tersebut di atas serta mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka disusunlah 3 program yang membawahi 14 kegiatan dan 69 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
        - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
        - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   - Penyediaan Bahan/Material
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
   a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
      - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
      - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
      - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
      - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
      - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
      - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
      - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
      - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
   b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
      - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
      - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
      - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan_LO dan beban
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

e. Pengelolaan Data dan Imlpementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan
   - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
   a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
      - Penyusunan Standar Harga
      - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
      - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
      - Penatausahaan Barang Milik Daerah
      - Inventarisasi Barang Milik Daerah
      - Pengamanan Barang Milik Daerah
      - Penilaian Barang Milik Daerah
      - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
      - Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah
      - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
      - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Berdasarkan penyebaran lokasi program dan kegiatan, hampir seluruh program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah berlokasi di Badan Keuangan dan Aset Daerah, adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan di luar Badan Keuangan dan Aset Daerah seperti Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.

Adapun total kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk tahun anggaran 2025 guna pelaksanaan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebesar **Rp 270.200.684,479,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), DBH, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Desa, Lain-Lain PAD yang Sah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Untuk lebih rinci rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5	**02**				**KEUANGAN**					**274,200,684,479**			**275,530,441,539**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**%**		**100**	**5,791,413,914**		**100**	**5,398,971,025**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**%**		**100**	**90,028,725**		**100**	**91,780,558**
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	Belopa	2	4,505,340		2	4,453,252
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	Belopa	1	4,249,240		1	4,314,066
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	Belopa	1	3,678,250		1	4,191,666
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	Belopa	1	38,304,540		1	38,297,477
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	Belopa	1	2,118,100		1	2,331,670

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	Belopa	42	1,446,375		42	1,427,698
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	Belopa	4	35,726,880		4	36,764,729
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**%**		**100**	**4,502,553,658**		**100**	**3,943,913,217**
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	Belopa	588	3,822,175,177		588	3,131,218,226
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	Belopa	2500	668,858,265		2500	718,487,269
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	Belopa	1	5,437,238		1	5,432,288
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	Belopa	2	6,082,978		2	88,775,434
5	**02**	**01**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase penatausahaan BMD SKPD yang tertib**	**%**		**95**	**86,746,900**		**95**	**88,775,434**
5	02	01	01.2	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen	Belopa	2	86,746,900		2	88,775,434

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**%**		**100**	**63,563,300**		**93**	**85,876,622**
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Belopa	2	38,940,000		2	38,500,000
5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	dokumen	Belopa	42	2,983,300		42	3,051,022
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	Luar Kab. Luwu	1	4,680,000		1	27,417,600
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN	Luar Kab. Luwu	5	16,960,000		5	16,908,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi Umum**	**%**		**100**	**559,404,943**		**100**	**683,129,419**
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	Belopa	1	5,542,919		1	5,656,899
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	Belopa	1	30,039,183		1	30,622,899
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	Belopa	1	18,529,342		1	19,339,200
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	Belopa	313	49,800,000		313	82,926,000
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	Belopa	1	26,062,403		1	29,933,323

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	Belopa	50	32,000,000		50	32,640,000
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Kab. Luwu, Luar Kab. Luwu	150	397,431,096		150	482,011,098
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**%**		**93**	**85,755,721**		**94**	**86,514,717**
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	Belopa	1	39,121,000		1	30,600,000
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Belopa	5	46,634,721		5	55,914,717
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan**	**%**		**100**	**277,474,000**		**100**	**260,269,058**
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	Belopa	12	3,791,097		12	3,922,194
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	Belopa	12	237,682,903		12	219,626,864
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	Belopa	12	36,000,000		12	36,720,000
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**%**		**94**	**125,886,667**		**94**	**158,712,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Belopa	25	118,596,667		25	148,649,700
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	unit	Belopa	35	5,200,000		35	8,022,300
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Belopa	1	2,090,000		1	2,040,000
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Penyerapan APBD**	**%**		**98**	**267,900,776,131**		**98**	**269,586,967,995**
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Perentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan**	**%**		**100**	**1,181,161,145**		**100**	**1,274,667,674**
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	dokumen	Belopa	2	22,714,324		2	24,453,775
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	dokumen	Belopa	2	23,441,410		2	23,916,490
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	Belopa	57	16,316,000		57	16,677,482
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	Belopa	57	10,152,600		57	10,206,278
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	dokumen	Belopa	57	8,228,310		57	9,432,249

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	Belopa	57	8,160,460		57	8,200,000
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	Belopa	2	438,551,000		2	468,679,705
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen	Belopa	2	411,020,252		2	444,373,299
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen	Belopa	2	17,920,290		2	25,073,859
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	dokumen	Belopa	14	44,687,706		14	52,793,756
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	dokumen	Belopa	57	105,981,497		57	113,310,200
5	2	2	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Belopa	114	73,987,296		114	77,550,581
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu**	**%**		**98**	**316,515,113**		**98**	**273,649,383**
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	Belopa	57	47,238,906		57	49,394,383
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	dokumen	Belopa	1300	27,351,500		1300	27,935,913

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen	Belopa	15	67,874,320		15	67,544,684
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	laporan	Belopa	3	66,420,597		3	68,844,649
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	dokumen	Belopa	57	47,871,134		57	49,929,754
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	Belopa	114	59,758,656		114	10,000,000
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu**	**%**		**99**	**588,538,068**		**99**	**599,936,277**
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	dokumen	Belopa	57	83,579,123		57	78,438,695

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan_LO dan beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	dokumen	Belopa	57	30,530,920		57	31,085,972
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	laporan	Belopa	5	55,390,540		5	55,759,351
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	laporan	Belopa	5	126,798,838		5	131,508,279
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dokumen	Belopa	2	66,057,716		2	65,777,776
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	Belopa	3	18,826,233		3	18,986,259
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	tertuntut	Belopa	50	90,489,652		50	94,314,590
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	dokumen	Belopa	1	12,902,932		1	13,178,135

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Belopa	114	99,539,894		114	106,371,247
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	Belopa	1	4,422,220		1	4,515,973
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Tingkat Capaian Target Penyaluran Bantuan Keuangan**	**%**		**100**	**265,243,326,253**		**100**	**266,739,231,964**
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	Belopa	1656	249,795,285,550		1656	254,791,191,261
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	Belopa	10	10,000,000,000		10	6,500,000,000
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	Belopa	828	5,448,040,703		828	5,448,040,703
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase SKPD yang Megimplementasikan Sistem Informasi secara tertib**	**%**		**97**	**571,235,552**		**98**	**699,482,697**
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	Kab. Luwu	57	571,235,552		57	699,482,697
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat**	**%**		**99**	**508,494,434**		**99**	**544,502,519**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu**	**%**		**96**	**508,494,434**		**96**	**544,502,519**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	dokumen	Belopa	1	50,442,081		1	58,850,668
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen	Belopa	2	7,156,086		2	8,153,107
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang disusun	dokumen	Belopa	1	10,084,074		1	10,000,000
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	laporan	Belopa	57	76,369,306		57	77,254,326
5	02	03	2.01	0006	Inventariisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	laporan	Belopa	57	76,559,850		57	78,438,792
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	laporan	Kab. Luwu	50	58,142,241		50	60,117,156
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	Belopa	50	75,863,832		50	79,115,142
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	dokumen	Belopa	50	56,060,046		50	61,975,410
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	Belopa	114	32,994,139		114	44,989,616
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	laporan	Belopa	2	35,968,734		2	35,608,302

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	Belopa	114	28,854,045		114	30,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, adapun jumlah program yang direncanakan untuk tahun anggaran 2023 sebanyak 3 progrm dengan 14 kegiatan dan 69 Sub kegiatan, penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan, kebutuhan pendanaan tahun anggaran 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah direncanakan sebesar **Rp 270.200.684.479,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), DBH, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Desa, Lain-Lain PAD yang Sah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, adapun rencana pendanaan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Pendanaan Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1						2	3	4	5	6	7
						Badan Pengelolaan Keuangan Daerah					**274,200,684,479**
5	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**5,791,413,914**
5	**02**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**90,028,725**
5	02	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4,505,340
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	944,500	944,500
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	446,040	446,040
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	542,800	542,800
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	990,000	990,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	1,582,000	1,582,000
5	02	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4,249,240

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	619,500	619,500
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	383,500	383,500
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	434,240	434,240
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	1,230,000	1,230,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	1,582,000	1,582,000
5	02	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3,678,250
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	722,750	722,750
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	383,500	383,500
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	990,000	990,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	1,582,000	1,582,000
5	02	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				38,304,540
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	1,486,800	1,486,800
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	383,500	383,500

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	434,240	434,240
5	1	02	02	01	0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi		1	tahun	36,000,000	36,000,000
5	02	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2,118,100
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	1,734,600	1,734,600
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	383,500	383,500
5	02	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1,446,375
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	832,775	832,775
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	613,600	613,600
5	02	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35,726,880
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	509,760	509,760

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	217,120	217,120
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	35,000,000	35,000,000
5	**02**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**				**4,502,553,658**
5	02	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3,822,175,177
5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS		1	Tahun	2,000,667,870	2,000,667,870
5	1	01	01	01	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK		1	Tahun	32,036,000	32,036,000
5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		1	Tahun	213,461,827	213,461,827
5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		1	Tahun	168,910,000	168,910,000
5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		1	Tahun	15,120,000	15,120,000
5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		1	Tahun	67,270,000	67,270,000
5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		1	Tahun	139,173,280	139,173,280
5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		1	Tahun	1,858,846	1,858,846
5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		1	Tahun	31,152	31,152
5	1	01	01	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		1	Tahun	142,659,727	142,659,727
5	1	01	01	10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		1	Tahun	4,861,619	4,861,619
5	1	01	01	11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		1	Tahun	14,584,856	14,584,856
5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS		1	Tahun	1,021,540,000	1,021,540,000

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	02	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				668,858,265
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan		1	Tahun	572,520,000	572,520,000
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	1,445,500	1,445,500
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	4,743,600	4,743,600
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	2,245,165	2,245,165
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	4,200,000	4,200,000
5	1	02	02	01	0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		1	tahun	72,000,000	72,000,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	11,704,000	11,704,000
5	02	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5,437,238
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	1,843,760	1,843,760

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	536,900	536,900
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	754,578	754,578
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	300,000	300,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	2,002,000	2,002,000
5	02	01	2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang disusun				6,082,978
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	1,835,500	1,835,500
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	536,900	536,900
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	754,578	754,578
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	450,000	450,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	2,506,000	2,506,000
5	**02**	**01**	**2.03**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					**86,746,900**
5	02	01	2.03	0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				86,746,900
5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1	Tahun	41,340,000	41,340,000
5	1	01	03	08	0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		1	Tahun	24,000,000	24,000,000

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	413,000	413,000
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	383,500	383,500
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	271,400	271,400
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	330,000	330,000
5	1	02	02	01	0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		1	tahun	18,000,000	18,000,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	2,009,000	2,009,000
5	**02**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**				**63,563,300**
5	02	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Besertya Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				38,940,000
5	1	02	01	01	0063	Belanja pakaian Dinas Harian (PDH)		1	tahun	38,940,000	38,940,000
5	02	01	2.05	0005		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun				2,983,300
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	383,500	383,500
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	542,800	542,800

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	300,000	300,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	1,757,000	1,757,000
5	02	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4,680,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	4,680,000	4,680,000
5	02	01	2.05	0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				16,960,000
5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis		1	tahun	10,000,000	10,000,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	6,960,000	6,960,000
5	**02**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi Umum**				**559,404,943**
5	02	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5,542,919
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		1	tahun	5,542,919	5,542,919
5	02	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30,039,183
5	1	02	01	01	0043	Belanja Natura dan Pakan Natura		1	tahun	30,039,183	30,039,183

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	02	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				18,529,342
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	16,296,842	16,296,842
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun	2,232,500	2,232,500
5	02	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				49,800,000
5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		1	tahun	24,000,000	24,000,000
5	1	02	02	01	0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		1	tahun	25,800,000	25,800,000
5	02	01	2.06	0007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				26,062,403
5	1	02	01	01	0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi		-	tahun		-
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	8,592,288	8,592,288
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	8,890,120	8,890,120
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1	tahun	1,548,700	1,548,700
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	7,031,295	7,031,295

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	02	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				32,000,000
5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		1	tahun	29,000,000	29,000,000
5	1	02	01	01	0043	Belanja Sewa Hotel		1	tahun	3,000,000	3,000,000
5	02	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				397,431,096
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	380,400,804	380,400,804
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	tahun	17,030,292	17,030,292
5	**02**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**%**		**85,755,721**
5	02	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					39,121,000
5	2	02	05	01	0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua		1	Unit	39,121,000	39,121,000
5	02	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	unit		46,634,721
5	2	02	05	01	0004	Belanja Modal Alat Pendingin		1	Unit	7,846,587	7,846,587
5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Komputer		2	Unit	36,426,600	36,426,600
5	2	02	10	02	0003	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer		1	Unit	2,361,534	2,361,534

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	**02**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan**				**277,474,000**
5	02	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3,791,097
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	2,405,666	2,405,666
5	1	2	1	1	25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	756,616	756,616
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	628,815	628,815
5	02	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				237,682,903
5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon		1	tahun		-
5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air		1	tahun	3,685,383	3,685,383
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik		1	tahun	179,998,820	179,998,820
5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan		1	tahun	53,998,700	53,998,700
5	02	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36,000,000
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1	tahun	36,000,000	36,000,000

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	02	01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		1	tahun		-
5	**02**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**				**125,886,667**
5	02	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				118,596,667
5	1	2	1	1	4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		1	tahun	20,046,667	20,046,667
5	1	02	01	01	0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		1	tahun	20,880,000	20,880,000
5	1	02	02	01	0033	Belanja Jasa Tenaga Supir		1	tahun	36,000,000	36,000,000
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Peizinan		1	tahun	4,900,000	4,900,000
5	1	02	03	02	0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		1	tahun	36,770,000	36,770,000
5	02	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan				5,200,000
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		1	tahun	3,050,000	3,050,000
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer		1	tahun	1,460,000	1,460,000

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer		1	tahun	690,000	690,000
5	02	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2,090,000
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		1	tahun	2,090,000	2,090,000
5	**02**	**02**				**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**					**267,900,776,131**
5	**02**	**02**	**2.01**			**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Perentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan**				**1,181,161,145**
5	02	02	2.01	0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				22,714,324
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	4,625,600	4,625,600
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	1,915,140	1,915,140
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	217,120	217,120
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	1,520,000	1,520,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	2,380,000	2,380,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	12,056,464	12,056,464

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	02	02	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				23,441,410
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	4,956,000	4,956,000
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	1,915,140	1,915,140
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	597,080	597,080
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	1,520,000	1,520,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	2,380,000	2,380,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	12,073,190	12,073,190
5	02	02	2.01	0003		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				16,316,000
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	2,407,200	2,407,200
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	2,489,800	2,489,800
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	271,400	271,400
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	2,920,000	2,920,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	2,135,000	2,135,000

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	tahun	6,092,600	6,092,600
5	02	02	2.01	0004		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				10,152,600
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	2,065,000	2,065,000
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	2,489,800	2,489,800
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	542,800	542,800
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	2,920,000	2,920,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	2,135,000	2,135,000
5	02	02	2.01	0005		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				8,228,310
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	2,424,310	2,424,310
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	2,489,800	2,489,800
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	814,200	814,200
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	2,500,000	2,500,000

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	02	02	2.01	0006		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				8,160,460
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	2,312,800	2,312,800
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	2,424,900	2,424,900
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	922,760	922,760
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	2,500,000	2,500,000
5	02	02	2.01	0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				438,551,000
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	69,357,130	69,357,130
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	4,184,280	4,184,280
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	2,062,640	2,062,640
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	5,900,000	5,900,000
5	1	02	02	01	0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		1	tahun	283,800,000	283,800,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	6,020,000	6,020,000

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	67,226,950	67,226,950
5	02	02	2.01	0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				411,020,252
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	69,600,870	69,600,870
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	3,803,612	3,803,612
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	2,171,200	2,171,200
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	5,900,000	5,900,000
5	1	02	02	01	0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		1	tahun	36,600,000	283,800,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	2,884,000	2,884,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	42,860,570	42,860,570
5	02	02	2.01	0009		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				17,920,290
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	6,608,000	6,608,000
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	702,100	702,100

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	1,357,000	1,357,000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	1,250,000	1,250,000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		1	tahun		-
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	8,003,190	8,003,190
5	02	02	2.01	0010		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				44,687,706
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	2,011,900	2,011,900
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	1,785,576	1,785,576
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	977,040	977,040
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	6,250,000	6,250,000
5	1	02	02	01	0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi		1	tahun		-
5	1	02	02	01	0008	Honor Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Tekonologi Informasi dan Pengelola Website		1	tahun	18,000,000	18,000,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	15,663,190	15,663,190

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	02	02	2.01	0011		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				105,981,497
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	3,662,877	3,662,877
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	2,043,760	2,043,760
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	868,480	868,480
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	10,000,000	10,000,000
5	1	02	02	01	0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi		1	tahun		-
5	1	02	02	01	0008	Honor Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Tekonologi Informasi dan Pengelola Website		1	tahun	72,000,000	72,000,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	17,406,380	17,406,380
5	2	2	2.01	0013		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				73,987,296
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	2,534,810	2,534,810
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	343,616	343,616

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan komputer		1	tahun	325,680	325,680
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	25,020,000	25,020,000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		1	tahun	25,100,000	25,100,000
5	1	02	02	05	0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1	tahun	5,000,000	5,000,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	15,663,190	15,663,190
5	**02**	**02**	**2.02**			**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu**				**316,515,113**
5	02	02	2.02	0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				47,238,906
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	2,729,274	2,729,274
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	1,594,652	1,594,652
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	1,085,600	1,085,600
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	990,000	990,000
5	1	02	02	01	0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi		1	tahun		-

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	02	01	0008	Honor Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Tekonologi Informasi dan Pengelola Website		1	tahun	18,000,000	18,000,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	1,953,000	1,953,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	20,886,380	20,886,380
5	02	02	2.02	0003		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				27,351,500
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	1,445,500	1,445,500
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	3,457,400	3,457,400
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	1,085,600	1,085,600
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	1,200,000	1,200,000
5	1	02	02	01	0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi		1	tahun		-
5	1	02	02	01	0008	Honor Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Tekonologi Informasi dan Pengelola Website		1	tahun	18,000,000	18,000,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	2,163,000	2,163,000

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	02	02	2.02	0005		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				67,874,320
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	8,377,150	8,377,150
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	2,336,400	2,336,400
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	1,085,600	1,085,600
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	3,400,000	3,400,000
5	1	02	02	01	0008	Belanja Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		1	tahun	18,000,000	18,000,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	4,494,000	4,494,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	30,181,170	30,181,170

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	02	02	2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				66,420,597
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	1,933,937	1,933,937
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	2,938,200	2,938,200
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	6,542,510	6,542,510
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	5,600,000	5,600,000

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	02	01	0008	Belanja Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		1	tahun	18,000,000	18,000,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	3,066,000	3,066,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	28,339,950	28,339,950
5	02	02	2.02	0009		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				47,871,134
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	2,916,814	2,916,814
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	8,382,720	8,382,720
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	2,442,600	2,442,600
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	10,900,000	10,900,000
5	1	02	02	01	0008	Belanja Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		1	tahun	18,000,000	18,000,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	5,229,000	5,229,000

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	02	02	2.02	0011		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				59,758,656
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	2,596,170	2,596,170
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	343,616	343,616
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	325,680	325,680
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	9,730,000	9,730,000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		1	tahun	21,100,000	21,100,000
5	1	02	02	05	0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung dan Tempat Pertemuan		1	tahun	10,000,000	10,000,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	15,663,190	15,663,190
5	**02**	**02**	**2.03**			**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu**				**588,538,068**
5	02	02	2.03	0001		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				83,579,123

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	2,327,532	2,327,532
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	2,464,076	2,464,076
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1	tahun	542,045	542,045
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	1,411,280	1,411,280
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	4,000,000	4,000,000
5	1	02	02	01	0008	Belanja Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		1	tahun	54,000,000	54,000,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	5,271,000	5,271,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	13,563,190	13,563,190
5	02	02	2.03	0002		Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan_LO dan beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				30,530,920
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	515,400	515,400
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	1,404,200	1,404,200
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	1,031,320	1,031,320

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	6,150,000	6,150,000
5	1	02	02	01	0008	Belanja Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		1	tahun	18,000,000	18,000,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	3,430,000	3,430,000
5	02	02	2.03	0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				55,390,540
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	33,190,360	33,190,360
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	2,171,200	2,171,200
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1	tahun	309,740	309,740
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	434,240	434,240
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	3,040,000	3,040,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	1,799,000	1,799,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	14,446,000	14,446,000
5	02	02	2.03	0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				126,798,838

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	31,559,590	31,559,590
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	2,365,428	2,365,428
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	1,574,120	1,574,120
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	11,890,000	11,890,000
5	1	02	02	01	0008	Belanja Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		1	tahun	18,000,000	18,000,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	1,547,000	1,547,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	59,862,700	59,862,700
5	02	02	2.03	0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				66,057,716
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	37,980,000	37,980,000
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	1,469,100	1,469,100

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	1,411,280	1,411,280
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	3,040,000	3,040,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	1,673,000	1,673,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	20,484,336	20,484,336
5	02	02	2.03	0006		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				18,826,233
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	1,194,785	1,194,785
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	2,171,200	2,171,200
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun	1,411,280	1,411,280
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	3,750,000	3,750,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	10,298,968	10,298,968
5	02	02	2.03	0007		Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				90,489,652

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	1,755,250	1,755,250
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	1,596,540	1,596,540
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1	tahun	588,506	588,506
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	759,920	759,920
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	10,370,000	10,370,000
5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		1	tahun	55,820,000	55,820,000
5	1	02	02	01	0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga		1	tahun	250,000	250,000
5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		1	tahun		-
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	2,975,000	2,975,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	13,489,916	13,489,916
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	tahun	2,884,520	2,884,520
5	02	02	2.03	0009		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				12,902,932

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	2,466,200	2,466,200
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	702,100	702,100
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	597,080	597,080
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	1,250,000	1,250,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	7,887,552	7,887,552
5	02	02	2.03	0011		Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				99,539,894
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	2,534,810	2,534,810
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	796,264	796,264
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	651,360	651,360
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	19,460,000	19,460,000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		1	tahun	55,100,000	55,100,000

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	02	05	0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1	tahun	5,000,000	5,000,000
5	1	02	02	05	0009	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	12,959,380	12,959,380
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	tahun	3,038,080	3,038,080
5	02	02	2.03	0012		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				4,422,220
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	510,940	510,940
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	1,411,280	1,411,280
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	2,500,000	2,500,000
5	**02**	**02**	**2.04**			**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**265,243,326,253**
5	02	02	2.04	0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				249,795,285,550
5	4	02	05	02	0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa		1	Tahun	175,704,137,000	175,704,137,000
5	4	02	05	02	0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa		1	Tahun	74,091,148,550	74,091,148,550
5	02	02	2.04	0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				10,000,000,000

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	3	01	01	01	0001	Belanja Tidak Terduga		1	Tahun	10,000,000,000	10,000,000,000
5	02	02	2.04	0010		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				5,448,040,703
5	4	01	01	03	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa		1	Tahun	4,050,246,750	4,050,246,750
5	4	01	02	01	0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa		1	Tahun	1,397,793,953	1,397,793,953
5	**02**	**02**	**2.05**			**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**				**571,235,552**
5	02	02	2.05	0002		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				571,235,552
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	4,345,000	4,345,000
5	1	02	02	01	0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi		1	tahun	558,000,000	558,000,000
5	1	02	02	05	0009	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	8,890,552	8,890,552
5	**02**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat**				**508,494,434**

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	**02**	**03**	**2.01**			**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**508,494,434**
5	02	03	2.01	0001		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				50,442,081
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	6,954,957	6,954,957
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	978,928	978,928
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1	tahun	123,896	123,896
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	1,463,200	1,463,200
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	2,980,000	2,980,000
5	1	02	02	01	0008	Belanja Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		1	tahun	18,000,000	18,000,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	1,498,000	1,498,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	11,335,980	11,335,980
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	tahun	7,107,120	7,107,120
5	02	03	2.01	0003		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				7,156,086
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	1,999,746	1,999,746

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	383,500	383,500
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	1,519,840	1,519,840
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	1,580,000	1,580,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	1,673,000	1,673,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun		-
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	tahun		-
5	02	03	2.01	0004		Penyusunan Kebijakan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				10,084,074
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	399,784	399,784
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	702,100	702,100
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	814,200	814,200
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	2,500,000	2,500,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun		-
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	5,667,990	5,667,990
5	02	03	2.01	0005		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				76,369,306
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	6,800,646	6,800,646

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	2,106,300	2,106,300
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	651,360	651,360
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	2,950,000	2,950,000
5	1	02	02	01	0004	Belanja Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		1	tahun	26,440,000	26,440,000
5	1	02	02	01	0008	Belanja Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		1	tahun	36,000,000	36,000,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	1,421,000	1,421,000
5	02	03	2.01	0006		Inventariisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				76,559,850
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	4,109,114	4,109,114
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	2,031,960	2,031,960
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1	tahun	433,636	433,636
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	1,085,600	1,085,600
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	3,400,000	3,400,000
5	1	02	02	01	0008	Belanja Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		1	tahun	36,000,000	36,000,000

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	2,086,000	2,086,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	16,209,980	16,209,980
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	tahun	11,203,560	11,203,560
5	02	03	2.01	0007		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				58,142,241
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	2,301,601	2,301,601
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	1,561,140	1,561,140
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	542,800	542,800
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	7,500,000	7,500,000
5	1	02	02	04	0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		1	tahun	14,000,000	14,000,000
5	1	02	02	04	0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		1	tahun	3,000,000	3,000,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	16,546,980	16,546,980
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	tahun	12,689,720	12,689,720
5	02	03	2.01	0008		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				75,863,832

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	6,695,212	6,695,212
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	690,300	690,300
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	922,760	922,760
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	1,860,000	1,860,000
5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		1	tahun	23,440,000	23,440,000
5	1	02	02	01	0008	Belanja Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		1	tahun	18,000,000	18,000,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	2,160,000	2,160,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	18,712,000	18,712,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	tahun	3,383,560	3,383,560
5	02	03	2.01	0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				56,060,046
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	536,900	536,900
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1	tahun	898,246	898,246

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Komputer		1	tahun	597,080	597,080
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	2,700,000	2,700,000
5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		1	tahun	23,440,000	23,440,000
5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		1	tahun		-
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	1,254,000	1,254,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	24,264,780	24,264,780
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	tahun	2,369,040	2,369,040
5	02	03	2.01	0011		Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				32,994,139
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	2,896,369	2,896,369
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	1,634,300	1,634,300
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	1,411,280	1,411,280
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	6,150,000	6,150,000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		1	tahun		-
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	2,086,000	2,086,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	18,816,190	18,816,190

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	tahun		-
5	02	03	2.01	0012		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				35,968,734
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	7,480,634	7,480,634
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	690,300	690,300
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1	tahun		-
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	1,085,600	1,085,600
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	2,800,000	2,800,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur		1	tahun	3,836,000	3,836,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	tahun	20,076,200	20,076,200
5	02	03	2.01	0013		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				28,854,045
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	4,153,593	4,153,593
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1	tahun	827,652	827,652
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	542,800	542,800
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1	tahun	9,730,000	9,730,000

KODE						Urusan/Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2025			
								Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		1	tahun	11,100,000	11,100,000
5	1	02	02	05	0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1	tahun	2,500,000	2,500,000
						JUMLAH					**274,200,684,479**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu merupakan hasil perumusan yang disesuaikan dengan kondisi berkembang saat ini serta proyeksi satu tahun mendatang (2026) dengan memperhatikan penerimaan dana dan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga selalu dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Pencapaian hasil pelaksanaan Rencana Kerja BKAD Kabupaten Luwu diharapkan dapat memberi konstribusi optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Selain itu dalam pelaksanaan Rencana kerja ini dibutuhkan peran serta dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat meliputi berbagai hal termasuk pembiayaan.

Demikian Rencana Kerja ini disajikan sebagai gambaran arah kebijakan BKAD Kabupaten Luwu TA. 2025. Diharapkan kesungguhan dari semua pihak untuk melaksanakan Rencana Kerja ini dengan sebaik – baiknya sehingga sasaran program akan dapat dicapai.

Belopa, Juli 2024

Kepala BKAD Kab. Luwu



Drs. ALAMSYAH, M.Si
Pkt. Pembina Utama Muda
Nip. 19690620 199003 1 009

2025

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN KAB. LUWU



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jalan : Andi Kambo (Komp. Perkantoran Pemda Kab. Luwu) Tlp.0471-.....Kode Pos 91994
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU
NOMOR :900/ 01/PROG-DAMKARMAT/III/2024

Tentang

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Setelah :

Menimbang :

a. Bahwa sebagai dokumen perencanaan tahunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan OPD Kabupaten Luwu;
16. Keputusan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah KabupatenLuwu;
17. Keputusan Bupati Luwu Nomor 845/XII/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Para Kepala Satuan Kerja selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Belanja Daerah tahun angaran 2024;
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Luwu merupakan dokumen perencanaan yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025, perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025.

(2) Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan bagi:

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2025;
b. Penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu.

Pasal 2

Sistematika Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu

Terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN
BAB IV : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum pada lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetaan ini.

Ditetapkan Di : Belopa
PadaTanggal : 13 Maret 2024

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu

Drs. MUHAMMAD YUSUF., M.Pd
Nip. 196808171994121010

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu
Nomor :
Tanggal : 13 Maret 2024

SUSUNAN TIM
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU

PenanggungJawab : Kepala Dinas

Ketua : Sekretaris

WakilKetua : Kasubag Program dan Keuangan

Sekertaris : Kasubag Program dan Keuangan

Anggota :
1. Kabid Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan
2. Kabid Pencegahan,Peningkatan Kapasitas SDM danSarpras
3. Kasi. Operasi Pemadaman dan Investigasi
4. Kasi. Evakuasi Penyelamatan dan Investigasi
5. Kasi.Sarana dan Prasarana
6. Kasi. Inspeksi Proteksi Kebakaran
7. Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan
8. Sub Koordinator Kesiapsiagaan dan Komunikasi

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu

Drs. MUHAMMAD YUSUF., M.Pd
Nip. 19680817 199412 1 010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2025, telah selesai disusun.

Penyelesaian Rencana Kerja (Renja) merupakan hasil kerja tim penyusun, yang dilaksanakan secara bersama-sama, untuk mendapatkan hasil rumusan rencana yang optimal yang sesuai dengan bidang tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu.

Penyusunan Rencana Kerja mendorong untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas program dan unggul serta melakukan perubahan kearah perbaikan dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingg dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu, Berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bahan pedoman dan arah pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Luwu secara signifikan

Belopa, 13 Maret 2024

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Luwu,

Drs. MUHAMMAD YUSUF., M.Pd
Nip. 19680817 199412 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar vii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud & Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capainan Renstra SKPD 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 14

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD 17

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 25

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 25

3.3 Program dan Kegiatan 26

BAB IV. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 29

BAB V. PENUTUP 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2025 merupakan bentuk implementasi pelaksana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sekaligus mempedomani RKPD Kabupaten Luwu tahun 2025 yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2020 tetang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu .

Perencanaan Tahun 2025 merupakan Perencanaan Tahun ke Enam untuk periode perencanaan pembangunan tahun 2025-2026, sehingga dasar yang diacu adalah RPD berdasarkan INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI serta Kesesuian Sasaran Pokok dan arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Luwu tahun 2025.

Renja merupakan pedoman perencanaan perangkat daerah untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan perangkat Daerah secara rinci. Renja mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari Renstra perangkat daerah selama lima tahun. Keterkaitan kedua dokumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra sesuai arahan operasional dalam RKPD
2. Renja merupakan acuan untuk menyusun Program dan kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan proiritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru dibentuk pada tahun 2017 berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Nomor 112 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemadam kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat urusan kebakaran dan tugas pembantuan.

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 ini secara khusus membahas konsep rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga akan berfungsi sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan memaduserasikan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pembangunan baik yang berskala nasional maupun berskala daerah.

Secara umum, Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu tahun 2025 memuat kerangka rencana pembangunan dan kerangka anggaran yang dirinci menurut alokasi pendanaan/ pagu indikatif yang akan digunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan ditingkat pusat dan daerah wajib menyusun dokumen perencanaan.

Pada tahun 2025 fokus dan prioritas pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masuk dalam fokus peningkatan aksebilitas sarana dan prasarana wilayah dengan prioritas pembangunan meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, oleh karenanya dalam Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 lebih menitik beratkan

pada Kebakaran yaitu penanganan ,pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum terjadinya kebakaran seperti pendidikan dan pelatihan anggota pemadam kebakaran, simulasi penanganan kebakaran,gladi dan simulasi penanggulangan Kebakaran.

Proses penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan Renja Tahun 2025 ini mengacu pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025. Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA SKPD.

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Luwu yang tertuang dalam Renstra 2025-2026 yaitu : dengan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan : Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
   - Sasaran 1.1 : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola Keuangan Daerah
   - Sasaran 1.2 : Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
   - Sasaran 1.3 : Meningkatkan kualitas layanan publik yang inklusif
2. Tujuan : Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat
   - Sasaran 2.1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
   - Sasaran 2.2 : Meningkatkan kesempatan kerja
   - Sasaran 2.3 : Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa
3. Tujuan : Meningkatnya daya saing daerah;
   - Sasaran 3.1 : Meningkatkan sektor lapangan usaha
   - Sasaran 3.2 : Meningkatkan perekonomian daerah
   - Sasaran 3.3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

4. Tujuan : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;

- Sasaran 4.1 : Meningkatkan ketangguhan dan mitigasi
- Sasaran 4.2 : Mengurangi resiko dampak perubahan iklim
- Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan

Memperhatikan Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Luwu maka Peran dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu menduduki peran yang strategis dalam pelayanana masyarakat utamanya dalam hal pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dan hal ini sangat terkait dengan **Tujuan ke-1 yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih** dan **Tujuan ke-4 yaitu Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.**

Untuk pembagian pelaksanaan tugas dan fungsi serta optimalisasi Pemadaman yang pelaksanaannya 24 jam pelaksanaan tugas dan fungsi dari siang dan malam untuk memadamkan setiap terjadinya kebakaran, dengan motto pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci yang akan dicapai pada Tahun 2025 adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 Ayat 3 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Ketentuan ini telah mengatur Standar Pelayanan Minimal sebagai ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Terkait dengan pelaksananan Urusan Wajib Trantibun Linmas Sub Urusan Kebakaran terhitung mulai tahun 2019 Standar Pelayanan Minimal Pemadam Kebakaran telah diatur secara khusus sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pada Standar Pelayanan Minimal tersebut hanya terdiri dari 1 (satu) point yaitu layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam waktu tanggap (response time).

Adapun standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Luwu yang menunjukkan tingkat capaian kinerja menurut Standar Pelayanan Minimal sebagaimana yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

1.2 LANDASAN HUKUM

Pedoman yang menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembanguan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standard Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Didaerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah bagi daerah dengan periode Rencana pembangunan jangka menengah daerah berakhir pada tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
15. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (P-RPJMD) kabupaten luwu tahun 2019-2024.
16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 175 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu;
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2019 tentang rencana strategi Perangkat Daerah Tahun 2019-2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah merupakan dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2026 dan hubungannya dengan RKPD Kabupaten Luwu. Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini, untuk mewujudkan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu dan untuk memberikan informasi tentang prioritas pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025.

sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kongkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Luwu.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana;
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tetap sasaran dan berkesinambungan;

4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yanglebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah;
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025
6. sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu disusun secara deskriptif dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembanguan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Tahun Laludan Capaian Renstra Perangkat daerah.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD

Tahun 2024 merupakan tahun peralihan dalam periode dokumen perencanaan, baik Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu, maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Luwu. Karena periode RPJMD dan Renstra perangkat daerah Tahun 2009-2014 telah berakhir, sedangkan RPJMD dan Renstra perangkat daerah tahun 2019-2024 sedang dalam proses Penyusunan. Pada tahun 2024 Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
   a. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
   b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
   e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
   a. Pencegahaan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 dan pencapaian kinerja renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu 2019-2024 dilakukan untuk mengindentifikasi jauh mana kemampuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dsan Penyelamatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kabupaten Luwu menggunakan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja.

Untuk tahun yang akan datang akan diupayakan peningkatkan kerjasama dan koordinasi yang optimal dengan instansi terkait dalam menanggulangi bahaya kebakaran. Hal tersebut tentu tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Luwu, terutama dari segi penambahan anggaran untuk memenuhi kegiatan yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu pada tahun 2023 telah melaksanakan 2 (Dua) Program yang sifatnya supporting program terhadap program utama. Terhadap masing-masing program utama. Evaluasi hasil pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 serta Pencapaian Renstra selengkapnya disajikan pada Tabel T-C. 2.1 berikut ini.

Secara Umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Tahun 2023 dapat terlaksana denga Baik sebagaimana direncanakan. Sesuai dengan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Total Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Luwu Sebesar **Rp. 5.544.502.224,-**

Realisasi Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 5.446.169.167,-** atau mencapai **98,2 %** dari anggaran belanja Tahun 2023.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Tahun 2023 melaksanakan 2 Program 6 Kegiatan dan 18 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 yang termuat dalam DPA pokok maupun DPA Perubahan dan telah dimuat dalam penetapan kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perjanjian Target Kinerka Pimpinan Satuan Kerja yang akan dicapai Tahun 2023.

2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditentukan dalam target Renstra terdapat 3 indikator yaitu (1) Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat kabupaten, (2) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten dan (3) Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Untuk tahun 2023, Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Luwu belum maksimal atau belum mencapai target 100 persen dengan rasio capaian baru mencapai rata-rata 99 persen, baik itu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota, maupun pada Indikator kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Adanya kesenjangan/gap pada pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran antara lain disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Luwu masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan luas wilayah. Saat ini WMK yang ada

masih berjumlah 4 (empat) WMK yang diharapkan dapat memproteksi 16 Wilayah Kecamatan dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu. Sehingga kedepan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal diharapkan dapat terbangun 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dapat memproteksi 4 (empat) Kecamatan yang belum terjangkau WMK.

Selain kesenjangan/ gap pada cakupan pelayanan, indicator kinerja waktu tanggap (response time) juga belum mencapai 100 persen, hal ini terutama disebabkan oleh karena jumlah sarana dan prasarana khususnya jumlah unit mobil pemadam kebakaran belum memenuhi standarisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Didaerah. Jumlah armada mobil pemadam kebakaran yang ada saat ini baru mencapai 8 (delapan) unit dari jumlah kebutuhan sebanyak 12 (dua belas) unit.

Adapun keberhasilan pencapaian realisasi kinerja pelayanan sangat dipengaruhi oleh upaya-upaya dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu. Upaya tersebut tercermin dari terbitnya Peraturan Bupati Luwu Nomor 175 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu, yang mengatur tentang pembentukan 3 (tiga) unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada 3 (tiga) WMK pada tahun 2019, selain itu dalam Kebijakan Umum APBD sejak Tahun Anggaran 2017. Untuk pengadaan unit mobil pemadam kebakaran pada setiap tahun anggaran belum dilaksanakan, hal tersebut tentu saja sangat tidak mendukung, walaupun hal tersebut belum terealisasi namun Pencapaian Kinerja Pelayanan Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten Luwu tetap terlaksana.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 dapat dilihat padaTabel T-C 2.2 berikut ini

Tabel T-C. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu

No	Indikator Kinerja	SPM	IKK	Target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	90	95	95,3	95,5	Tiap Tahun Meningkat
2	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100	100	100	100	100	97	100	100	100	Tiap Tahun Meningkat

Belopa, 13 Maret 2024

Kepala Dinas Damkar
Kabupaten Luwu

Drs. MUHAMMAD YUSUF., M.Pd
Nip.19640817 199412 1 010

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Sesuai dengan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, perlunya menetapkan permasalahan yang menjadi faktor penghambat dan pendorong terlaksananya program-program kegiatan.

Dalam Penyusunan program belum terintegrtasnya perencanaan program secara lintas sektor dan wilayah tidak terpadu, makanya diperlukannya pemahaman standar teknis dalam pelaksanaan program terssebut.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pemadam kebakaran. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian operasi pemadam dan penyelamatan urusan kebakaran;
3. Pelaksanaan teknis administrasi Dinas , monitoring dan evaluasi, serta pelaporan urusan kebakaran;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dinas Pemadam Kebakaran melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada didaerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra kebakaran dan pasca kebakaran.

Pada fungsi komando, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan penanggulangan kebakaran dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat kebakaran.

Sedangkan pada fungsi pelaksana, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan penanggulangan kebakaran secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada didaerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2. Pemasalahan

Permasalahan dicantumkan agar terjadi kesinambungan dengan rencana program/kegiatan, karena pada dasarnya program/kegiatan yang direncanakan adalah merupakan langkah dalam pemecahan masalah yang telah/sedang dan akan dihadapi dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi diakibatkan minimnya sarana dan Prasarana seperti kurangnya pos Pemadaman Kebakaran dalam wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) seperti yang diamanatkan yang ditentukan dalam standar Pelayanan Minimal (SPM), kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran, Kurangnya pelatihan tentang peningkatan kecakapan anggota/Aparatur Pemadam Kebakaran, dan Belum optimalnya koordinasi pelaksanaaan tentang proteksi bangunan gedung sehingga permasalahan yang timbul adalah pelayanan pencegahan dan pengendalian terhadap bahaya kebakaran yang belum maksilmal.

Permasalahan harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran 5 (lima) tahun Kedepan. Tantangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu yang harus dihadapi adalah:

1. manajemen penanganan masalah bahaya kebakaran, berbagai program dan kegiatan harus terencana dengan baik guna memenuhi kebutuhan ketersediaan sarana dan prasarana serta personil pemadam kebakaran yang belum maksimal
2. Pengembangan Pelayanan Kabupaten Luwu sebagai kota budaya dan pusat perdagangan merubah paradigma dalam pelayanan pencegahan bencana kebakarandan pengendaliannya, sehingga system pelayananan yang pada mulanya bertumpu pada pemadaman, berubah dengan masuknya unsur

pencegahan dan pembinaan masyarakat, meningkatnya pemakaian dan transportasi bahan yang mengandung racun dan bahaya lainnya termasuk bahan mudah meledak (*eksplosif*), bahan radio-aktif dsb, yang bisa membahayakan masyarakat maka perhatian perlu pula dicurahkan kepada penanggulangan benda/bahan berbahaya (dikenal sebagai*hazmat* atau *hazardous materials*).

3.Tingkat kesadaran masyarakat untuk proaktif dalam pencegahan kebakaran, dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dari instansi terkaitakan bahaya kebakaran sehingga peristiwa bencana kebakaran kerapter jadi pada pemukiman warga dan pembakaran lahan yang masih dilakukan secara sengaja.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu dalam dinamika perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar PadaStandar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota tentunya memberi peluang bagi Dinas Pemadam Kebakaran dalam menyediakan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
2. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Didaerah yang tentunya member peluang bagi dinas pemadam kebakaran untuk meningkatkan peralatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran,inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri.
3. Adanya Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (Retkar) ditengah-tengah masyarakat dan adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran.
4. Semakin berkembangnya teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran untuk menunjang kegiatan dibidang bencana kebakaran yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana kebakaran.

2.3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program

Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Luwu adalah merupakan salah satu Dinas dalam struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Luwu yang kondisi obyektif dalam pelayanan yang diberikan blum optimal. Banyak permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya layanan tersebut antara lain, kecakapan SDM masih sangat rendah, kurangnya sarana dan prasarana operasional dan belum menempatkan kepuasan pengguna sebagai suatu keharusan.

Sistem Manajemen kepegawaian yang menjadi salah satu kepegawaian yang menjadi salah satu kendala tidak tercapainya suatu profesionalisme. Seharusnya diadakan pembenahan secara menyeluruh yang meliputi sistem rekruitmen pegawai, pengukuran kinerja, sistem penggajian maupun penerapan reward yang konsisten dan jelas bagi segenap aparatur pemerintah.

Dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap pencapaian program, perlunya dilengkapi sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Dinas Pemadam Kebakarandan peningkatan kualitas SDM, serta perlu disetujui program-program yang telah direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 semua program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ada Dalam RKPD tersebut telah diakomodir dalam Renja 2025. Namun karena keterbatasan anggaran yang ada maka ada beberapa Kegiatan yang ada dalam Renja Tahun 2025 tidak diakomodir dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 dan Juga terdapat kemungkinan selisih rupiah dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tersebut. Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel T-C. 2.3

T.C. 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Luwu

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA 2025				
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**6,190,597,277.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7,995,224,296.00**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**6,190,597,277.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**7,995,224,296.00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Luwu**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100.00**	**5,765,597,277.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Luwu**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100.00**	**7,427,083,696.00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun**	**100%**	**10,377,404.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun**	**100%**	**29,850,750.00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	4,418,100.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	13,638,600.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1,501,526.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2,774,500.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2,956,500.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1,501,526.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2,409,900.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2,132,650.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD	Belopa	Jumlah Laporan capaian Kinerja an Ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD	Belopa	Jumlah Laporan capaian Kinerja an Ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen	4,285,300.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	5 Dokumen	2,956,252.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	5 Dokumen	1,653,300.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Luwu**	**Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu**	**100%**	**3,325,292,126.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu**	**100%**	**2,348,597,399.00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	27 ASN	3,171,932,126.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	27 ASN	2,198,612,699.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Penatausahaan Keuangan SKPD Yang Melakukan Verifikasi	5 OB	153,360,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Belopa	Jumlah Penatausahaan Keuangan SKPD Yang Melakukan Verifikasi	5 OB	129,120,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	12,626,500.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 Dokumen	8,238,200.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Luwu**	**Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun**	**100%**	**8,400,000.00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun**	**100%**	**8,400,000.00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	8,400,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belopa	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	8,400,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Luwu**	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**100%**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**100%**	**270,000,000.00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Luwu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	225 Stell	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belopa	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	225 Stell	180,000,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 ASN	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belopa	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 ASN	65,000,000.00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang Mengikuti bimbingan teknis	2 ASN	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belopa	Jumlah ASN yang Mengikuti bimbingan teknis	2 ASN	25,000,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Luwu**	**Presentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100**	**328,684,328.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**409,057,180.00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	20,549,300.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belopa	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	15,975,710.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Luwu	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang di sediakan	15 Jenis	28,645,983.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belopa	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang di sediakan	15 Jenis	95,500,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	47,301,100.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belopa	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	10,800,000.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Luwu	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	9,968,200.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belopa	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	11,372,600.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2 Jenis	5,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belopa	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2 Jenis	24,000,000.00
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Luwu	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	15 Jenis	18,205,745.00	Penyediaan Bahan/Material	Belopa	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	15 Jenis	18,219,870.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2 Jenis	37,014,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belopa	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2 Jenis	38,000,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu	Jumlah perjalanan dinas Biasa	129 OK	150,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belopa	Jumlah perjalanan dinas Biasa	129 OK	183,189,000.00
		Kab. Luwu	Jumlah perjalanan dinas dalam Kota	42 OK			Belopa	Jumlah perjalanan dinas dalam Kota	42 OK	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eloktronik pada SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 OB	12,000,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eloktronik pada SKPD	Belopa	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 OB	12,000,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Luwu**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100**	**70,467,034.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100**	**1,655,286,000.00**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	4 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	4 Unit	1,501,676,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	8 jenis	17,329,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	8 jenis	98,610,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasaranan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Perlengkapan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan	3 jenis	53,138,034.00	Pengadaan Sarana dan Prasaranan gedung kantor atau bangunan lainnya	Belopa	Jumlah Perlengkapan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan	3 jenis	55,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Luwu**	**cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	**100.00**	**1,658,603,700.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	**100.00**	**2,386,950,000.00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	600 Surat	600,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belopa	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	600 Surat	33,800,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	63,550,500.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belopa	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	82,800,000.00
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab. Luwu	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 kali	-	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Belopa	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 kali	8,950,000.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	1,594,453,200.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	2,261,400,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Luwu**	**cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100.00**	**363,772,685.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100.00**	**318,942,367.00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perirangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Luwu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	2 Unit	50,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perirangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belopa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	2 Unit	53,548,350.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10 Unit	203,486,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10 Unit	120,950,350.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	15 Jenis	86,215,400.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	15 Jenis	82,515,150.00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	25 Jenis	15,000,000.00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belopa	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	25 Jenis	31,903,039.00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	35 jenis	9,071,285.00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	**Belopa**	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	35 jenis	30,025,478.00
	PROGRAM PENCEGAHAAN, PENANGANAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Kab. Luwu**	**Cakupan Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran**	**100.00**	**425,000,000.00**	**PROGRAM PENCEGAHAAN, PENANGANAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Belopa**	**Cakupan Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran**	**100.00**	**568,140,600.00**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	BIDANG PENCEGAHAAN, PENINGKATAN KAPASITAS SDM & SARPRAS				**385,000,000.00**	**BIDANG PENCEGAHAAN, PENINGKATAN KAPASITAS SDM & SARPRAS**				**507,310,000.00**
	Pencegahaan, Pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Luwu**	**Persentase Pelayanan Penanganan bencana yang terlapor**		**200,000,000.00**	**Pencegahaan, Pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Belopa	**Persentase Pelayanan Penanganan bencana yang terlapor**	**100.00**	**265,000,000.00**
	Pencegadaan Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Luwu	jumlah dokumen NSPM pencegahaan penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	4 dokumun	50,000,000.00	Pencegadaan Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Belopa	jumlah dokumen NSPM pencegahaan penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	4 dokumun	65,000,000.00
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat pelindung diri	Kab. Luwu	Jumlah Sarana dan prasarana Pencegahaan, Penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	20 Jenis	150,000,000.00	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat pelindung diri	Belopa	Jumlah Sarana dan prasarana Pencegahaan, Penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	20 Jenis	200,000,000.00
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Kab. Luwu**	**Cakupan Penyelenggaraan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		**10,000,000.00**	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Belopa	**Cakupan Penyelenggaraan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		**12,310,000.00**
	Pendataan Sarana dan Prasarana proteksi kebakaran	Kab. Luwu	Dokumen pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	1 Dokumen	10,000,000.00	Pendataan Sarana dan Prasarana proteksi kebakaran	Belopa	Dokumen pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	1 Dokumen	12,310,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahaan Kebakaran	**Kab. Luwu**	**Persentase masyarakat yang diberdayakan dalam pencegahaan dan penanggulangan Kebakaran**		**25,000,000.00**	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahaan Kebakaran**		**Persentase masyarakat yang diberdayakan dalam pencegahaan dan penanggulangan Kebakaran**		**75,000,000.00**
	Pembentukan dan Pembinaan relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Luwu	Jumlah Pembinaan relawan pemadaman kebakaran yang mengikuti	22 Kec	25,000,000.00	Pembentukan dan Pembinaan relawan Pemadam Kebakaran	Belopa	Jumlah Pembinaan relawan pemadaman kebakaran yang mengikuti	22 Kec	75,000,000.00
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**Kab. Luwu**	**Persentase Jumlah Penyelenggaraan operasi Pencarian, pertolongan penyelamatan dan evakuasi**		**150,000,000.00**	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan twehadap Kondisi Membahayakan Manusia**		**Persentase Jumlah Penyelenggaraan operasi Pencarian, pertolongan penyelamatan dan evakuasi**		**155,000,000.00**
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Kab.Luwu	Jumlah Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	50 laporan	150,000,000.00	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Belopa	Jumlah Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	50 laporan	155,000,000.00
	BIDANG PENGENDALIAN OPERASI PEMADAMAN & PENYELAMATAN				**40,000,000.00**	**BIDANG PENGENDALIAN OPERASI PEMADAMAN & PENYELAMATAN**				**60,830,600.00**
	Pencegahaan, Pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Luwu**	**Persentase Penyelenggaraan Penanganan Bencana yang terlapor**		**-**	**Pencegahaan, Pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Belopa**	**Persentase Penyelenggaraan Penanganan Bencana yang terlapor**		**15,000,000.00**
	Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah Kejadiaan Kebakaran yang dilakukan Pemadaman dan Pengendalian	PM	-	Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota	Belopa	Jumlah Kejadiaan Kebakaran yang dilakukan Pemadaman dan Pengendalian	PM	15,000,000.00
	Investigasi Kejadiaan Kebakaran	**Kab. Luwu**	**Jumlah Kejadian Kebakaran yang telah diketahui penyebabnya dalam 1 (satu) tahun**	**1 tahun**	**15,000,000.00**	**Investigasi Kejadiaan Kebakaran**	**Belopa**	**Jumlah Kejadian Kebakaran yang telah diketahui penyebabnya dalam 1 (satu) tahun**	**1.00**	**15,830,600.00**
	Investigasi Kejadiaan kebakaran, meliputi penelitiaan dan pengujiaan penyebab kejadian Kebakaran	Kab. Luwu	Jumlah Pelaksanaan investigasi kejadiaan kebakaran	PM	15,000,000.00	Investigasi Kejadiaan kebakaran, meliputi penelitiaan dan pengujiaan penyebab kejadian Kebakaran	Belopa	Jumlah Pelaksanaan investigasi kejadiaan kebakaran	PM	15,830,600.00
	Penyelenggaraan, operasi pencarian dn pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	**Kab. Luwu**	**Persentase Jumlah Penyelenggaraan operasi Pencarian, pertolongan penyelamatan dan evakuasi**	**1 tahun**	**25,000,000.00**	**Penyelenggaraan, operasi pencarian dn pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia**	**Belopa**	**Persentase Jumlah Penyelenggaraan operasi Pencarian, pertolongan penyelamatan dan evakuasi**	**1 tahun**	**30,000,000.00**
	Penyelenggaraan Operasi pencariaan dan pertolongan pada peristiwa yang menimpah, membahayakan dan/atau mengancam	Kab.Luwu	Jumlah Penyelenggaraan Operasi pencariaan dan pertolongan pada peristiwa yang menimpah, membahayakan dan/atau mengancam Keselamatan manusia	PM	25,000,000.00	Penyelenggaraan Operasi pencariaan dan pertolongan pada peristiwa yang menimpah, membahayakan dan/atau mengancam	Belopa	Jumlah Penyelenggaraan Operasi pencariaan dan pertolongan pada peristiwa yang menimpah, membahayakan dan/atau mengancam Keselamatan manusia	PM	30,000,000.00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan hasil rumusan dan usulan dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling. Dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang insidentil dan harus segera ditangani seperti kejadian kebakaran.Usulan Program dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 disajikan pada Tabel T-C. 2.4

Tabel T-C. 2.4

Usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan

Tahun 2025 Kabupaten luwu

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Mobil Damkar	Belopa	Tersedianya Mobil Damkar	2 Buah	Tidak bisa dilaksanakan
2	Pembangunan Tandom Air Posko Damkar	Belopa Dadeko Ponrang dan walenrang	Tersedianya Tandom Air di Posko Damkar	4 Buah	Tidak bisa dilaksanakan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telahaan terhadap keselarasan kebijakan nasional maupun provinsi berkenaan dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan yang terkait dengan Tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, yang kemudian dijabarkan melalui RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas identifikasi kebijakan nasional dan provinsi Sulawesi Selatan melalui program peningkatan kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan kegiatan pelayanan pencegahan dan pengengendalian bahaya kebakaran dan kegiatan pembentukan satuan relawan kebakaran/satlakar

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*), dimana penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat urusan kebakaran.

Demi keselarasan arah pembangunan ditingkat Pemerintah Kabupaten Luwu yang dipandu oleh RPD Tahun 2025-2026 dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026, dibawah ini diuraikan sasaran hingga program utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu agar terlihat jelas kesinambungan alur

perencanaannya dalam pencapaian tujuan yaitu Peningkatan Pelayanan Sosial dan penanganan kebencanaan.

Sasaran :

- Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan daerah.
- Meningkatkan Ketangguhan dan mitigasi bencana.

Indikator Kinerja Sasaran :

- SAKIP sebesar 63,21 % (B)
- IPKD sebesar 60,2321 %
- Indeks Risiko Bencana Indonesia sebesar 186,81%

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu telah ditentukan program dan kegiatan yang dirancang melalui Tahapan Verifikasi bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Luwu, untuk dioperasionalisasikan pada tahun 2025 yang terdistribusikan pada 2 program, 10 Kegiatan dan 27 sub kegiatan, terdiri dari :

Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD

I.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu

Program ini dimaksud untuk pencapaian optimalisasi segala urusan dalam pelayanan administrasi keuangan, Kepegawaian, Umum, Pemeliharaan dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi tercapainya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD pada tahun mendatang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Penyusunan dokumen perencanaan pernagkat daerah

b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD

c. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD

d. Evaluasi Kinerja perangkat daerah

Pada Sub Kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 80.068.326 ,-

2. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi tercapainya penilaian dan evaluasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan PD serta peningkatan kinerja aparatur PD pada tahun mendatang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Penyedian Gaji dan tujangan ASN, Pada Sub Kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.3.386.613.880,-
b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, Pada Sub Kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 153.360.000,-

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi Administrasi penatausahaan barang milik daerah pada SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, Pada Sub Kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 8.400.000,-

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pencapaian optimalisasi pelayanan administrasi Umumguna penunjang urusan pemerintahan yang terpadu dan berkualitas. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
e. Penyediaan Bahan/Material
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
g. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
g. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

Pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan daba/pagu indikatif sebesar Rp. 281.410.525,-

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi segala Pengadaan Barang yang mendukung kelancaran, kenyamanan dan peningkatan kinerja aparatur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Pengandaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
b. Pengadaan peralatan dn mesin lainnya
c. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 627.429.352,-

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi segala penyediaan Jasa yang mendukung kelancaran, kenyamanan dan peningkatan kinerja aparatur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 1.582.104.416,-

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk Peningkatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehabilitasi sebagai penunjang Urusan Pemerintahan dalam kelancaraan dan kenyamanan kinerja aparatur.Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 357.462.300,-

II.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran alam daerah Kabupaten/Kota.

a. Pencegahan Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota, Pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 52.490.900,-

b. Pengadaan Sarana dan prasarana pencegahaan, penanggulan kebakaran dan alat pelindung diri, Pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 148.441.400,-

2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Kegiatan ini dimaksudkan untuk Peningkatan Penyediaan Peralatan bangunan/gedung/lingkungan di daerah Kab.luwu yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran, Pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 9.999.190,-

3. Investigasi Kejadian Kebakaran

Kegiatan ini dimaksudkan untuk Mengetahui apa penyebab kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 15.006.476,-

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Kegiatan ini dimaksudkan untuk Memberi Pengetahuan kepada masyarakat bagaimana cara pencegahan kebakaran dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Pembentukan dan Pembinaan, Relawan Pemadam Kebakaran, pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 24.999.737,-

5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Pemadam Kebakaran dalam Melakukan Operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia . Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, menbahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikantif sebesar Rp. 25.000.000,-

a. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan evakuasi, pada sub kegiatan ini terdapat kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 152.182.000,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Adapun jumlah program yang direncanakan untuk tahun 2025 sebanyak 2 program 6 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan termasuk UPT Sektor. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dapat dilihat pada tabel T-C. 3.1.

RUMUSAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KAB. LUWUTAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN						**6.914.039.602,00**							**6.914.039.602,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.914.039.602,00**							**6.914.039.602,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**6.914.039.602,00**							**6.914.039.602,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**6.485.919.899,00**						**100 %**	**6.489.039.602,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu*	100 %			100 %	80.068.326,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	100 %	10.377.404,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			2 Dokumen	38.530.034,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	4 Dokumen	4.418.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	35.581.314,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	1 Dokumen	1.501.526,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	3.001.314,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	1 Dokumen	1.501.526,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			4 Laporan	2.955.664,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	4 Laporan	2.956.252,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu*	100 %			100 %	3.539.973.880,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	100 %	3.321.244.222,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	972 Orang/bulan			80 Orang/bulan	3.386.613.880,00	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	972 Orang/bulan	3.167.884.222,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen			12 Dokumen	153.360.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	7 Dokumen	153.360.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Penyenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD*	100 %			100 %	8.400.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	100 %	8.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			12 Laporan	8.400.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	12 Laporan	8.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %			100 %	269.410.525,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	100 %	328.684.328,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			10 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	10 Paket	20.549.300,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket			15 Paket	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	15 Paket	28.645.983,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			10 Paket	47.227.094,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	12 Paket	47.301.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket			15 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	25 Paket	9.968.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			100 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	12 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket			25 Paket	30.203.844,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	25 Paket	18.205.745,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan			2 Laporan	37.008.587,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	25 Laporan	37.014.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171 Laporan			129 Laporan	149.971.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	171 Laporan	150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	12 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	627.429.352,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	100 %	797.957.263,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	554.368.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	1 Unit	727.490.229,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	19.908.252,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		17.329.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	53.153.100,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		53.138.034,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %			100 %	1.594.104.416,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	1.658.603.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan			600 Laporan	588.506,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100 Laporan	600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	63.439.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12 Laporan	63.550.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	103 Laporan			12 Laporan	1.530.076.910,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	103 Laporan	1.594.453.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Unit			100 Unit	366.533.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kendaraan dinas dan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100 Unit	363.772.685,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit			2 Unit	53.124.600,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kendaraan dinas dan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4 Unit	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			23 Unit	203.341.900,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kendaraan dinas dan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10 Unit	203.486.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	85.996.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kendaraan dinas dan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		86.215.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			25 Unit	14.999.800,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kendaraan dinas dan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Unit	15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			35 Unit	9.071.100,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Kendaraan dinas dan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Unit	9.071.285,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan ke bakaran undefined***	**100 % 70,92 %**			**100 % 70,34 % undefined undefined**	**428.119.703,00**						**100 % 70,92 %**	**425.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelayanan Penanganan Bencana yang Terlapor*	100 %			100 %	200.932.300,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Penguatan Daya Saing Daerah	Kabupaten Luwu	100 %	200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen			4 Dokumen	52.490.900,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Penguatan Daya Saing Daerah	Kabupaten Luwu	4 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit			19 Unit	148.441.400,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Penguatan Daya Saing Daerah	Kabupaten Luwu	10 Unit	150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Cakupan Penyelenggaraan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*	100 %			100 %	9.999.190,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Penguatan Daya Saing Daerah	-	100 %	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen			1 Dokumen	9.999.190,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Penguatan Daya Saing Daerah	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*Jumlah Kejadian Kebakaran yang Telah Diketahui Penyebabnya dalam 1 (Satu) Tahun*	100 %			100 %	15.006.476,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Penguatan Daya Saing Daerah	-	100 %	15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	100 Dokumen			25 Dokumen	15.006.476,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Penguatan Daya Saing Daerah	-	100 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Jumlah Masyarakat yang Diberdayakan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran*	22 Kecamatan			22 Kecamatan	24.999.737,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Penguatan Daya Saing Daerah	-	22 Kecamatan	25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	22 Desa/Kelurahan			22 Desa/Kelurahan	24.999.737,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Penguatan Daya Saing Daerah	-	22 Desa/Kelurahan	25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Persentase Jumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian, Pertolongan Penyelamatan dan Evakuasi*	100 %			100 %	177.182.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Penguatan Daya Saing Daerah	-	100 %	175.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	125 Laporan			PM Laporan	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Penguatan Daya Saing Daerah	-	125 Laporan	25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	50 Laporan			50 Laporan	152.182.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Penguatan Daya Saing Daerah	-	50 Laporan	150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	J U M L A H							**6.914.039.602,00**							**6.914.039.602,00**	

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	RINCIAN PERHITUNGAN			Sumber Dana	Lokasi
				Volume	Harga Satuan	Jumlah	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%			6,485,919,899	DAU	Dinas Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	%			80,068,326	DAU	Dinas Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah				38,530,034		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5,440,034		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan-kertas dan cover					598,260		
	- Kertas HVS F4-SIDU 70 Gram		rim	2	69,030	138,060		
	- Kertas HVS Folio F4-IDU 75 Gram		rim	6	76,700	460,200		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis kantor					2,007,534		
	- Fotocopi		Lembar	3678	413	1,519,014		
	- Jilid Dokumen		Exempler	23	21,240	488,520		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan komputer					434,240		
	- Tinta printer hitam		Botol	8	54,280	434,240		
5.1.02.01.01.0052	belanja makanan dan minuman rapat					2,400,000		
	- makanan dan minuman rapat		orang/kali	80	30,000	2,400,000		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					33,090,000		
	- Uang Lermbur PNS Golongan I/Non ASN		Orang/Jam	300	18,000	5,400,000		
	- Uang Lembur PNS Golongan II		Orang/Jam	300	24,000	7,200,000		
	- Uang Lembur PNS Golongan III/PPPK		Orang/Jam	333	30,000	9,990,000		
	- Uang Lembur PNS Golongan IV		Orang/Jam	300	35,000	10,500,000		
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD				35,581,314		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7,501,314		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan-kertas dan cover					336,300		
	- Kertas HVS F4 80 Gram		rim	5	67,260	336,300		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat./Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis kantor					947,894		
	- Fotocopy		Lembar	1438	413	593,894		
	Jilid Dokumen		exsemplar	15	23,600	354,000		
5.1.02.01.01.0029	belanja Alat/bahan untuk kegitan kantor-bahan komputer				78,000	217,120		
	- bahan komputer lainnya-tinta printer		Botol	4	54,280	217,120		
5.1.02.01.01.0052	belanja makanan dan minuman rapat					6,000,000		
	- makanan dan minuman rapat		orang/kali	200	30,000	6,000,000		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					28,080,000		
	- Uang Lermbur PNS Golongan I/Non ASN		Orang/Jam	180	18,000	3,240,000		
	- Uang Lembur PNS Golongan II		Orang/Jam	360	24,000	8,640,000		
	- Uang Lembur PNS Golongan III/PPPK		Orang/Jam	288	30,000	8,640,000		
	- Uang Lembur PNS Golongan IV		Orang/Jam	216	35,000	7,560,000		

1.05.01.2.01.04	**Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD**	**Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DKA-SKPD**				**3,001,314**		
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**3,001,314**		
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/bahan untuk kegiatan-kertas dan cover**					**336,300**		
	- Kertas HVS F4 80 Gram		rim	5	67,260	336,300		
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat./Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis kantor**					**947,894**		
	- Fotocopy		Lembar	1438	413	593,894		
	Jilid Dokumen		exsemplar	15	23,600	354,000		
5.1.02.01.01.0029	**belanja Alat/bahan untuk kegitan kantor-bahan komputer**					**217,120**		
	Tnta Printer Hitam		Botol	4	54,280	217,120		
5.1.02.01.01.0052	**belanja makanan dan minuman rapat**					**1,500,000**		
	- makanan dan minuman rapat		orang/kali	50	30,000	1,500,000		
1.05.01.2.01.07	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,955,664**		
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**2,955,664**		
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/bahan untuk kegiatan-kertas dan cover**					**483,210**		
	- Kertas HVS F4 70 Gram		rim	7	69,030	483,210		
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat./Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis kantor**					**1,983,934**		
	- Fotocopy		Lembar	2918	413	1,205,134		
	Jilid Dokumen		exsemplar	33	23,600	778,800		
5.1.02.01.01.0029	**belanja Alat/bahan untuk kegitan kantor-bahan komputer**					**488,520**		
	- bahan komputer lainnya-tinta printer		Botol	9	54,280	488,520		
1.05.01.2.02	**Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu**	**%**			**3,539,973,880**	**DAU**	**Dinas Pemadam Kebakaran**
1.05.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan**				**3,386,613,880**		
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**1,351,921,536**		
	- Belanja Gaji Pokok PNS (belanja Gaji dan tanjungan)		Tahun	1	1,351,921,536	1,351,921,536		
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**734,602,543**		
	- Belanja Gaji Pokok PPPK		tahun	1	734,602,543	734,602,543		
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**158,236,223**		
	- Belanja Tunjangan Keluarga PNS		**Tahun**	1	158,236,223	158,236,223		
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**70,000,000**		
	- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		**tahun**	1	70,000,000	70,000,000		
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**124,950,000**		
	- Belanja tunjangan Jabatan PNS		**tahun**	1	124,950,000	124,950,000		
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**15,120,000**		
	- Belanja tunjangan Fungsional PNS		**tahun**	1	15,120,000	15,120,000		
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**30,800,000**		
	- Belanja Tunjangan Fungsinal Umum PNS		**tahun**	1	30,800,000	30,800,000		
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**96,523,404**		
	- Belanja Tunjangan Beras PNS		**tahun**	1	96,523,404	96,523,404		

5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**60,000,000**		
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK		**tahun**	1	60,000,000	60,000,000		
5.1,01,01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**2,268,380**		
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		**tahun**	1	2,268,380	2,268,380		
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembuatan Gaji PNS**					**20,318**		
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS		tahun	1	20,318	20,318		
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembuatan Gaji PPPK**					**203,878**		
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK		tahun	1	203,878	203,878		
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**85,026,281**		
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)		tahun	1	85,026,281	85,026,281		
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**30,020,300**		
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		tahun	1	30,020,300	30,020,300		
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja PNS**					**2,781,096**		
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja PNS		tahun	1	2,781,096	2,781,096		
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja PPPK**					**3,929,206**		
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja PPPK		tahun	1	3,929,206	3,929,206		
5.1.01.01.11.0001	**Belanja iuran jaminan kematian PNS**					**8,343,287**		
	- Belanja iuran jaminan kematian PNS		tahun	1	8,343,287	8,343,287		
5.1.01.01.11.0001	**Belanja iuran jaminan kematian PPPK**					**11,787,428**		
	- Belanja iuran jaminan kematian PPPK		tahun	1	11,787,428	11,787,428		
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**600,080,000**		
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		tahun	1	600,080,000	600,080,000		
1.05.01.2.02.03	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) Tahun**				**153,360,000**		
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**153,360,000**		
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan**					**126,840,000**		
	- Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan - bendahara pengeluaran atau bendahara penerima/sta pengelola keuangan		OB	12 Orang/bulan	860,000	10,320,000		
	- Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan - PPTK		OB	24 Orang/bulan	2,210,000	53,040,000		
	- Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan - PPTK		OB	24	1,010,000	24,240,000		
	- Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan - PPK SKPD		OB	12 Orang/bulan	990,000	11,880,000		
	- Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan - Pengguna Anggaran		OB	12 Orang/bulan	2,280,000	27,360,000		
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa**					**26,520,000**		
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa		OB	12 orang/bulan	2,210,000	26,520,000		

1.05.1.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi barang milik daerah pada SKPD**	**%**			**8,400,000**	**DAU**	**Dinas Pemadam Kebakaran**
1.05.01.2.03.06	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Daerah**	**Jumlah Penatausahaan Mlik daerah pada SKPD**				**8,400,000**		
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					**8,400,000**		
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan					**8,400,000**		
	- Honorarium Pengurus Barang		OB	12 Orang/Bulan	700,000	8,400,000		
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan ketersediaan administrasi Umum perangkat daerah**	**%**			**281,410,525**	**DAU**	**Dinas Pemadam Kebakaran**
1.05.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Jumlah Bahan logistik yang disediakan**				**47,227,094**		
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**47,227,094**		
5.1.02.01.01.0043	**Belanja natura dan Pakan - Natura**					**47,227,094**		
	- Beras 5 Kg		Zak	91	108,784	9,899,344		
	- Beras 5 Kg		Zak	50	127,493	6,374,650		
	- Mie Instan Kuah		Dos	50	141,246	7,062,300		
	- Mie Instan Goreng-isi 40 Pcs		Dos	50	143,724	7,186,200		
	- Minyak Goreng (1 Liter)		Liter	50	44,294	2,214,700		
	- Telur Ayam Kampung-Isi 10 Butir		Pack	50	47,082	2,354,100		
	- Air Mineral (600 ml)		Dos	50	63,808	3,190,400		
	Kopi Saset-ukuran 380 Gram		perbungkus	200	42,435	8,487,000		
	- Teh Celup-Isi 20-25 Pcs		perbungkus	50	9,168	458,400		
1.05.01.2.06.06	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	**Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan**				**5,000,000**		
	Belanja Jasa Kantor					5,000,000		
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**5,000,000**		
	- Langganan jurnal/Surat kabar/Majalah (Media Lokal)		Buah	32	100,000	3,200,000		
	- Langganan jurnal/Surat kabar/Majalah (Media Provinsi)		Bulan	12	150,000	1,800,000		
1.05.01.2.06.07	**Penyediaan Bahan/Material**	**Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun**				**30,203,844**		
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**30,203,844**		
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**4,986,355**		
	- Bolpoin		Pack	5	40,120	200,600		
	- Penjepit Kertas		Pack	20	3,540	70,800		
	- Box/ Kotak File (Bahan Plastrik)		Buah	20	31,152	623,040		
	- Penjepit Kertas (No. 300, Isi 6 Pcs)		Pack	20	70,800	1,416,000		
	- Map Snelkhekter kertas		Buah	50	1,947	97,350		
	- Penggaris Besi 60 cm		Buah	10	47,200	472,000		
	- Isolasi Bening (uk.12mm, Isi 12 Pcs)		Pack	15	18,644	279,660		
	- Pelubang Kertas Uk. Besar		Buah	5	69,856	349,280		
	- Paper Clip		Dos	5	57,165	285,825		
	- Klip Kertas No. 3, Isi 100 Pcs		Pack	15	7,080	106,200		
	- Buku Folio Uk. 21Cm x 31,5 Cm, isi 100 Lembar		Buah	50	21,712	1,085,600		
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**					**12,057,067**		
	- Cetak Umbul-umbul/spanduk/baliho		M2	30	61,360	1,840,800		
	- Fotokopi (Hitam Putih)		Perhalaman	11359	413	4,691,267		
	- Jilid antero biasa-50-150 Lembar		Exsempler	50	32,500	1,625,000		
	- Jilid antero biasa-150-200 Lembar		Exsempler	50	39,000	1,950,000		
	- Jilid antero karton-300-500 Lembar		Exsempler	25	78,000	1,950,000		
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan cover**					**8,260,000**		
	- Kertas HVS A4 Uk. 75 Gsm		Rim	10	63,720	637,200		
	- Kertas HVS A4 Uk. 80 Gsm		Rim	10	82,600	826,000		

	- Kertas HVS F4 Uk. 75 Gsm		Rim	58	76,700	4,448,600		
	- Kertas NCR Uk.F4, warna putih		Rim	10	81,420	814,200		
	- Kertas NCR Uk.F4, warna Pink		Rim	10	76,700	767,000		
	- Kertas NCR Uk.F4, warna Kuning		Rim	10	76,700	767,000		
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer**					**4,900,422**		
	- Tinta Printer hitam Uk. 100ml		Botol	20	54,280	1,085,600		
	- catrtridge Printer (hitam dan Warna)		Unit	10	338,660	3,386,600		
	- Flashdisk		Unit	4	69,856	279,424		
	- Belanja Alat.Bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer		unit	1	148,798	148,798		
1.05.01.2.06.08	**Fasilitas Kunjungan Tamu**	**Jumlah Jenis jamuan makanan dan minuman yang tersedia**				**37,008,587**		
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**37,008,587**		
5.1.02.01.01.0043	**Belanja natura dan Pakan - Natura**					**9,058,587**		
	- Mie Instan Kuah		Dus	16	141,246	2,259,936		
	- Mie Instan Goreng		Dus	16	143,724	2,299,584		
	- Susu kental Manis (Uk. 370-495ml)		Kaleng	50	15,735	786,750		
	- Isi Ulang Air Galon		Galon	23	28,497	655,431		
	- Kopi Saset		Per bungkus	50	42,435	2,121,750		
	- Teh Celup (20 - 25 Pcs)		Per bungkus	102	9,168	935,136		
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**27,950,000**		
	- Snack/kudapan		orang/kali	1075	26,000	27,950,000		
1.05.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD**	**Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Perjalanan dinas luar daerah**				**149,971,000**		
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**149,971,000**		
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**							
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**29,532,000**		
	Eselon II					**29,532,000**		
	- Uang Harian		OH	13	430,000	5,590,000		
	- Uang Representasi		OH	13	150,000	1,950,000		
	- Uang Penginapan		OH	9	1,938,000	17,442,000		
	- Transportasi Darat		OH	13	350,000	4,550,000		
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**9,600,000**		
	Eselon II							
	- Uang Harian		OH	30	170,000	5,100,000		
	- Uang Representasi		OH	60	75,000	4,500,000		
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**30,610,000**		
	ESELON III/GOLONGAN IV					**30,610,000**		
	- Uang Harian		OH	21	430,000	9,030,000		
	- Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV		OH	10	1,423,000	14,230,000		
	- Biaya transportasi Darat - Makassar Kab Luwu		OH	21	350,000	7,350,000		
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**10,200,000**		
	- Uang Harian		OH	60	170,000	10,200,000		
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**34,900,000**		
	ESELON IV					**34,900,000**		
	- Biaya Penginapan perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III,II dan I - sulawesi selatan		OH	28	745,000	20,860,000		
	- Biaya Transportasi Darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama - makassar kab.lwu		OH	18	350,000	6,300,000		

	- satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota - SULAWESI SELATAN		OH	18	430,000	7,740,000		
	GOLONGAN III							
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**9,344,000**		
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III,II dan I - sulawesi selatan		OH	4	951,000	3,804,000		
	- Biaya Transportasi Darat dari ibukota Provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama - Makssar Kab. Luwu		orang/hari	6	350,000	2,100,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota		Orang/hari	8	430,000	3,440,000		
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**5,100,000**		
	- Uang Harian		OH	30	170,000	5,100,000		
	GOLONGAN II							
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**13,295,000**		
	- Uang Harian		OH	8	430,000	3,440,000		
	- Biaya Penginapan		Orang/hari	9	745,000	6,705,000		
	- Biaya transportasi Darat - Makassar Kab Luwu		Orang/hari	9	350,000	3,150,000		
	NON PNS							
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**7,390,000**		
	- Uang Harian		Orang/Hari	7	430,000	3,010,000		
	- Biaya Penginapan		OH	4	745,000	2,980,000		
	- Biaya transportasi Darat - Makassar Kab Luwu		Orang/hari	4	350,000	1,400,000		
1.05.01.2.06.011	**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD**				**12,000,000**		
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**12,000,000**		
5.1.02.02.01.0046	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/sistem Informasi**					**12,000,000**		
	- User SIPD SKPD		Orang/Bulan	12	1,000,000	12,000,000		
1.05.01.01.2.07	**Pengadaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**			**627,429,352**	**DAU**	**Dinas Pemadam Kebakaran**
1.05.01.01.2.07.02	**Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan**				**554,368,000**		
	Belanja Modal					**554,368,000**		
5.2.02.02.01.0002	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang**					**554,368,000**		
	- Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan Roda 4 Double Gardan		Unit	1	554,368,000	554,368,000		
1.05.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan**				**19,908,252**		
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**19,908,252**		
	- AC Split		Unit	4	4,977,063	19,908,252		
1.05.01.01.2.07.0010	**Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya**	**Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan**				**53,153,100**		

5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**53,153,100**		
	- Komputer/PC (Min. CPU Octacore Ram 8 GB, SSD 256 GB)		Unit	2	16,726,500	33,453,000		
	- Laptop (Min. CPU Octacore Ram 8 GB, SSD 512 GB, GPU Dedicated 4 GB)		Unit	1	19,700,100	19,700,100		
1.05.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**			**1,582,104,416**	**DAU**	**Dinas Pemadam Kebakaran**
1.05.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Ssurat Menyurat**	**Jumlah Surat masuk dan keluar yang diregister**				**588,506**		
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai habis**					**588,506**		
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**588,506**		
	- Materai - 10000		Lembar	38	15,487	588,506		
1.05.01.01.2.08.02	**Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telpon, air dan listrik**				**63,439,000**		
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**63,439,000**		
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**33,005,000**		
	- Tarif Listrik P2 Kap. Ditas 200 KVA		KWH	17500	1,886	33,005,000		
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**18,180,000**		
	- Tarif Internet Kap. 50 Mbps		perbulan	12	435,000	5,220,000		
	- Tarif Internet dan TV Kap. 30 Mbps		Bulan	12	478,000	5,736,000		
	- Tarif Internet dan TV Kap. 40 Mbps		Bulan	12	602,000	7,224,000		
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**5,364,000**		
	- Tarif Internet dan Telpon		Bulan	12	447,000	5,364,000		
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**6,890,000**		
	- Tarif Internet dan TV Kap. 100 Mbps		Bulan	10	689,000	6,890,000		
1.05.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Jumlah Jasa Operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan**	**%**			**1,518,076,910**		
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**2,489,210**		
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**2,006,000**		
	- Fotocopi		Lembar	3000	413	1,239,000		
	- Jilid Dokumen		Exemplar	26	29,500	767,000		
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**483,210**		
	- Kertas HVS F4 Uk. 70 Gsm		Rim	7	69,030	483,210		
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**1,515,587,700**		
5.1.02.02.01.0008	**Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website**					**108,000,000**		
	- Jasa Pengelola Sistem Informasi		OB	72	1,500,000	108,000,000		
5.1.02.02.01.0018	**Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**					**1,199,250,000**		
	- Petugas Pemadam Kebakaran dan supir Pemadam		OB	695	1,350,000	938,250,000		
	- Petugas Pemadam Kebakaran Wakil Komandan Regu		OB	180	1,450,000	261,000,000		
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**12,000,000**		
	- Jasa Upah Kerja Staf Penunjang Kegiatan Perkantoran _ Staf Administrasi Aspri		OB	12	1,000,000	12,000,000		
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**50,400,000**		
	- Jasa tenaga Administrasi Kantor		OB	72	700,000	50,400,000		
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator komputer**					**12,000,000**		
	- Beban jasa kantor lainnya - Operator komputer		Orang/bulan	12	1,000,000	12,000,000		
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN**					**133,937,700**		
	- Jaminan Kesehatan-Non ASN		Orang/bulan	780	171,715	133,937,700		

1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Cakupan Penyelnggaraan Barang milikndaerah penunjang urusan pemerintahan daerah				366,533,400	DAU	Dinas Pemadam Kebakaran
1.05.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan Rutin/Berkala				53,124,600		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					35,124,600		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					35,124,600		
	- Pertamax		Liter	2100	16,726	35,124,600		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					18,000,000		
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					18,000,000		
	- Honorarium Tenaga pendukung - Sopir		OB	12	1,500,000	18,000,000		
1.05.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan Rutin/Berkala				203,341,900		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					167,341,900		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					46,152,500		
	- Dexlite		liter	2500	18,461	46,152,500		
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan					121,189,400		
	- Ban Dalam Kompatibel, Uk.5.00 R 13		Buah	20	130,095	2,601,900		
	- Ban Luar Tubeless Uk. 165/80, R 13		Buah	25	619,500	15,487,500		
	- Ban Luar Roda 4 Uk.265/70R17		Pcs	15	2,100,000	31,500,000		
	- Kampas Rem Cakram Roda 4		Set	10	350,000	3,500,000		
	- Bearing Roda Depan Dalam		Pcs	10	250,000	2,500,000		
	- Shockbreaker Belakang		Pcs	20	500,000	10,000,000		
	- Shockbreaker Depan		Pcs	15	900,000	13,500,000		
	- Aki Mobil N 540		Pcs	5	1,020,000	5,100,000		
	- Ban Luar R4 750R16		Pcs	15	1,850,000	27,750,000		
	- Kampas Rem Cakram		Set	15	350,000	5,250,000		
	- Saringan Bahan Bakar Roda 4 Solar		Pcs	10	400,000	4,000,000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					36,000,000		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					36,000,000		
	- Pajak STNK Roda 4/Lebih Kategori F		Buah	24	1,500,000	36,000,000		
1.05.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Pealatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				85,996,000		
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat pendingin					15,250,000		
	- Pemeliharaan sarana kantor- AC Split		Kali	25	610,000	15,250,000		
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Oomputer Unit-Personil komputer					13,870,000		
	- Pemeliharan sarana kantor-Personal Camputer/Notebook		Unit	19	730,000	13,870,000		
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					56,876,000		
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					56,876,000		
	- Selang Pemadam 1,5 inci		Buah	4	7,139,000	28,556,000		
	- Selang Pemadam 2,5 inci		Buah	4	7,080,000	28,320,000		
1.05.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				14,999,800		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi					14,999,800		
	- Cat Kayu/besi		Kg	15	94,400	1,416,000		
	- Cat Tembok		Kg	50	129,800	6,490,000		
	- Engsel Uk. 3 Inchi		Buah	5	23,600	118,000		
	- Paku skrup uk. 20 mm		Buah	928	600	556,800		
	- Pasir Urug		M3	5	472,000	2,360,000		

	- Plamir Tembok		Kg	15	29,500	442,500		
	- Semen Isi 40 Kg		Zak	15	100,300	1,504,500		
	- Triplek		Lembar	20	105,600	2,112,000		
1.05.01.01.2.09.10	**Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya**	**Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi**				**9,071,100**		
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**9,071,100**		
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-bahan bangunan dan konstruksi**					**9,071,100**		
	- Bata Merah		Buah	1000	1,000	1,000,000		
	- Batu Kali		M3	5	355,600	1,778,000		
	- Cat Tembok		Kg	20	100,300	2,006,000		
	- Paku skrup uk. 20 mm		Buah	16	600	9,600		
	- Semen		Zak	25	100,300	2,507,500		
	- Tanah Urug		M3	5	354,000	1,770,000		
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota**	**%**			**428,119,703**	**DAU**	**Dinas Pemadam Kebakaran**
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/ Kota**	**Persentase Pelayanan Penanganan Bencana yang Terlapor**				**200,932,300**	**DAU**	**Dinas Pemadam Kebakaran**
1.05.04.2.01.01	**Pencegahaan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota**	**Jumlah pencegahaankebakaran dalam daerah kabupaten/kota**				**52,490,900**		
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**2,233,150**		
	- Cetak Umbul-umbul/spnduk/Bliho		M2	16	61,360	981,760		
	- Fotokopi		Lembar	3030	413	1,251,390		
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**7,200,000**		
	- Makan Rapat/pertemuan/lembur-Nasi kotak		Orang/kali	240	30,000	7,200,000		
5.1.02.04.01.0003	**Belanja perjalanan dinas dalam kota**					**40,565,000**		
	- Uang Representatif Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam (Eselon II)		Kali	15	75,000	1,125,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih Dari 8 Jam		orang/kali	232	170,000	39,440,000		
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**2,492,750**		
	- Kertas HVS F4 Uk. 70 Gsm		Rim	25	69,030	1,725,750		
	- Kertas HVS F4 Uk. 75 Gsm		Rim	10	76,700	767,000		
1.05.04.2.01.0017	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahaan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri**	**Jumlah Sarana dn Prasarana Pencegahaan, Penanggulangan kebakaran dn Alat pelindung diri yang disediakan**				**148,441,400**		
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					**148,441,400**		
5.2.02.05.02.0007	**Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran**					**148,441,400**		
	- **Selang Pemadam Kebakaran Size 2,5 Inchi**		Roll	3	7,080,000	21,240,000		
	- **Selang Pemadam Kebakaran Size 1,5 Inchi**		Roll	3	7,139,000	21,417,000		
	- **Baju Anti Api**		Set	5	8,260,000	41,300,000		
	- **Nozzle 2.5 inchi**		Buah	3	8,743,500	26,230,500		
	- **Nozzle 1.5 inchi**		Buah	3	9,239,500	27,718,500		
	- **Sarung Tangan**		Set	6	1,755,900	10,535,400		
1.05.04.2.02	**Inpeksi Perlatan Proteksi Kebakaran**	**Cakupan Penyelenggaraan Inpeksi Peralatan Proteksi kebakaran**				**9,999,190**	**DAU**	**Dinas Pemadam Kebakaran**

1.05.04.2.02.0001	**Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran**	**Jumlah Dokumen Pendataan Srana Prasarana Proteksi Kebakaran**				**9,999,190**		
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**8,500,000**		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih Dari 8 Jam		Orang/kali	50	170,000	8,500,000		
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1,499,190**		
	- Fotokopi		Lembar	3630	413	1,499,190		
1.05.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Jumlah Kejadian Kebakaran yang telah diketahui penyebabnya dalam 1 (satu) Tahun**				**15,006,476**	**DAU**	**Dinas Pemadam Kebakaran**
1.05.04.2.03.0001	**Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakarn**	**Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran yang dilakukan**				**15,006,476**		
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1,603,266**		
	- Bolpoin		Lusin	5	40,120	200,600		
	- Pensil		Pack	5	57,230	286,150		
	- Buku Folio		Buah	19	58,764	1,116,516		
5.1.02.04.01.0003	**Belanja perjalanan dinas dalam kota**					**12,920,000**		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih Dari 8 Jam		Orang/Kali	76	170,000	12,920,000		
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**483,210**		
	- Kertas HVS F4		Rim	7	69,030	483,210		
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahaan Kebakaran**	**Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**				**24,999,737**	**DAU**	**Dinas Pemadam Kebakaran**
1.05.04.2.04.0002	**Pembentukan dan pembinaan Relawan pemadam kebakaran**	**Jumlah Pembinaan relawan pemadam kebakaran yang mengikuti**				**24,999,737**		
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**8,404,957**		
	- Bolpoin		Lusin	5	40,120	200,600		
	- Buku folio		buah	30	40,816	1,224,480		
	- Cetak ID Card		Buah	240	5,900	1,416,000		
	- Map Lastik		Lusin	20	3,068	61,360		
	- Fotokopi		Lembar	4409	413	1,820,917		
	- Cetak Umbul-umbul/spnduk/Bliho		M2	60	61,360	3,681,600		
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**15,850,000**		
	- Snack		Kotak	320	20,000	6,400,000		
	- Nasi Kotak		Kotak	315	30,000	9,450,000		
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**744,780**		
	- Solar Industri		Liter	30	8,100	243,000		
	- BBM Pertamax		Liter	30	16,726	501,780		
1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Persentase Jumlah Penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan Penyelamatan dan**				**177,182,000**	**DAU**	**Dinas Pemadam Kebakaran**
1.05.04.2.05.0001	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia**	**Jumlah Operasi Pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia**				**25,000,000**		
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**6,000,000**		
	- Makanan dan Minuman Aktivitas Minuman		Orang	200	30,000	6,000,000		

5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**19,000,000**		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih Dari 8 Jam		Orang	100	170,000	17,000,000		
	- Uang Representatif Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih Dari 8 Jam (Pejabat Negara/Pejabat Daerah)		Orang/Hari	4	125,000	500,000		
	- Uang Representatif Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih Dari 8 Jam (Eselon II)		Orang/Hari	20	75,000	1,500,000		
1.05.04.2.05.0004	**Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi**	**Jumlah Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi**				**152,182,000**		
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**18,000,000**		
	- Makanan dan Minuman Aktivitas Minuman		Orang	600	30,000	18,000,000		
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, moderator, pembawa Acara, dan panitia**					**34,600,000**		
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Menteri/pejabat setingkat menteri/pejabat negra lainnya)		Orang/jam	5	1,700,000	8,500,000		
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Kepala Daerah/pejabat setingkat kepla daerah/pejabat daerah)		Orang/jam	3	1,400,000	4,200,000		
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II/yang disetarakan)		Orang/jam	5	1,000,000	5,000,000		
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan)		Orang/jam	5	900,000	4,500,000		
	- Honorarium pembawa acara		Orang	1	400,000	400,000		
	- Honorarium Panitia		Orang	40	300,000	12,000,000		
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**17,337,000**		
	- Cetak Umbul-umbul/spnduk/Bliho		M2	200	61,360	12,272,000		
	- Fotokopi		Lembar	5000	413	2,065,000		
	- Cetak Sertifikat		Lembar	200	15,000	3,000,000		
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung tempat Pertemuan**					**52,500,000**		
	- Sewa Gedung/tempag pertemuan (Luar Kabupten)		Hari	7	5,000,000	35,000,000		
	- Sewa Gedung/tempag pertemuan (Dalam Kabupten)		Hari	7	2,500,000	17,500,000		
5.1.02.04.01.0001	**Belanja perjalanan dinas Biasa**					**29,745,000**		
	- Uang Harian perjalanan dinas luar kota (D.K.I Jakarta)		orang/Hari	20	530,000	10,600,000		
	- Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ekonomi-Jakarta-Mkassar		Orang/PP	5	3,829,000	19,145,000		
						6,914,039,602		

BAB V
PENUTUP

Upaya mewujudkan Kabupaten Luwu Menjadi Kabupaten maju di Indonesia wajib dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Luwu. Dalam rangka mengimplementasikan seluruh kewenangan dibidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat urusan kebakaran dan tugas pembantuan, maka Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 telah disusun secara baik dengan mengikuti seluruh tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Semoga Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Luwu

Drs. MUHAMMMAD YUSUF., M.Pd
PKT. Pembina Tk.I
Nip.196808171994121010

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU

TAHUN 2025

Office
Jl. Andi Djemma No.1 (Komp. Perkantoran Pemkab Luwu)
Belopa-91994 Telp. 0471-3314003 Fax 04713314003
email. Blh_kabluwu@yahoo.co.id / blhluwu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu masih belum sempurna. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak untuk bahan perbaikan dari semua pihak yang Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2025 dapat diselesaikan. Renja ini merupakan dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 .

Maksud dari penyusunan RENJA ini adalah sebagai bahan usulan kegiatan yang akan dibahas pada forum SKPD dan pelaksanaan musrembang Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini mengakomodir pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Dewab (E-Pokir). Hasil dari Musrembang dan e-pokir dituangkan dalam Rencan Kerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu tahun 2023. Hal ini merupakan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Luwu Tahun 2020. Dengan adanya RENJA ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu agar lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa berkepentingan sangat kami harapkan.

Belopa 2024
Kepala Dinas

ALBARUDDIN , SP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 197406232005021003

DAFTAR ISI

Sampul Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 13

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dlh Kabupaten Luwu Tahun 2021 Dan Capaian Renstra Dlh Kabupaten Luwu 13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22

2.4 Review Terhadap RKPD 25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN 27

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 27

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 29

3.3 Program dan Kegiatan 31

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 53
4.1 Sasaran dan Program Kegiatan 53
4.2 Indikator Sasaran Tahun 2025 53

BAB. V PENUTUP 63
5.1 Catatan Penting 64
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 64
5.3 Rencana Tindak Lanjut 64

BAB . I
PENDAHULUAN

Alam dan ekosistem merupakan tempat hidup manusia yang perlu dimanfaatkan dan dikelola secara bijaksana tanpa mengganggu kelestariannya. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang berkualitas yang melibatkan berbagai pihak, baik Perencana, Pengambil Keputusan, Penegak Hukum, dan Pejabat Pemerintah serta dunia usaha dan masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu sebagai lembaga institusi yang membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah dengan menetapkan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan dan tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2025.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Permendagri 86/2017). Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup melalui beberapa tahapan yaitu

a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

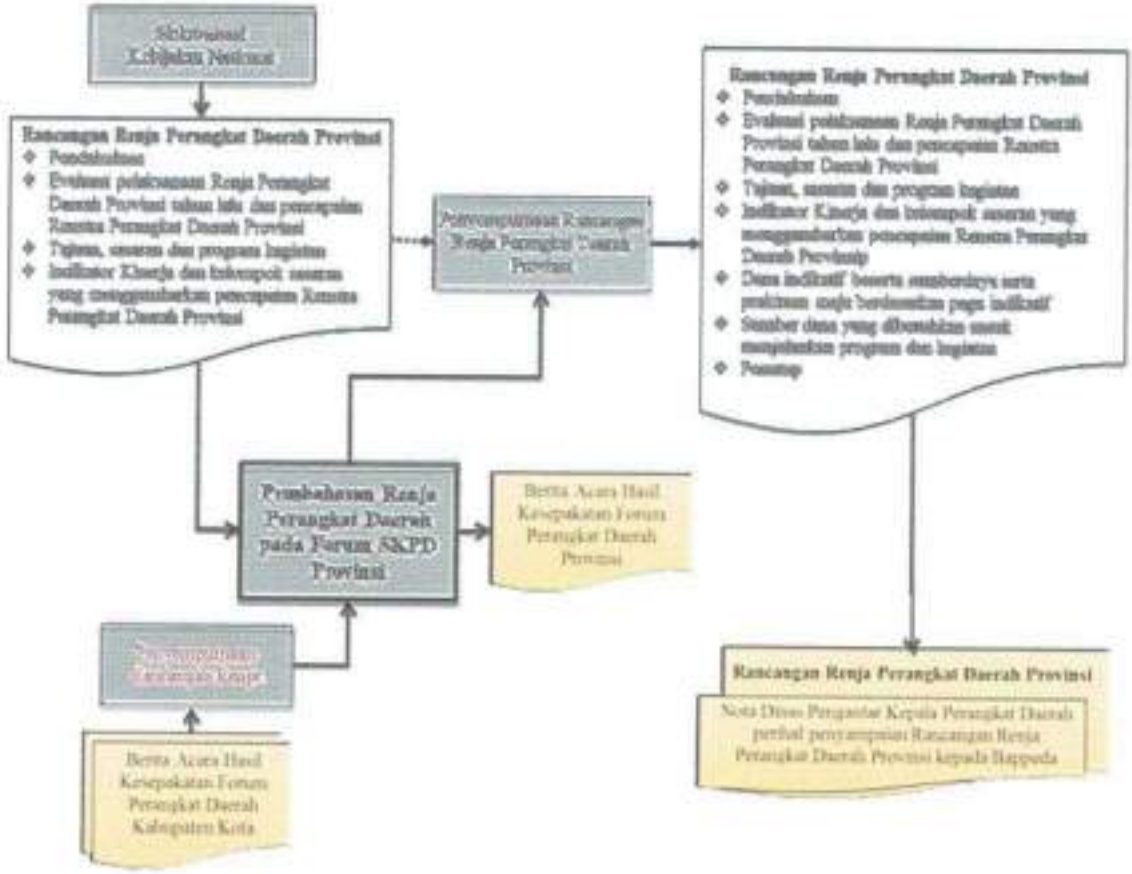
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara konsisten sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi sesuai dengan Undang- undang

Nomor 25 Tahun 2004. RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Luwu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah(PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja (Renja) PD.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 lebih diarahkan untuk mengatasi permasalahan/isu pencemaran lingkungan, Kerusakan Lingkungan dan pengelolaan persampahan. Untuk mengatasi isu pencemaran lingkungan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu lebih memfokuskan untuk menurunkan beban pencemaran yang bersumber dari industri. Adapun untuk menangani isu kerusakan lingkungan lebih diarahkan untuk meningkatkan jumlah cadangan air yang dapat diresapkan untuk air bersih. Sedangkan dalam penanganan pengelolaan sampah ini lebih dioptimalkan untuk mencapai target Kabupaten Luwu bersih dari sampah tahun 2025.

Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renja PD dapat dilihat pada bagan alir tahapan penyusunan Renja PD Kabupaten sebagai berikut:

Gambar I-1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja PD Kabupaten



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2021 berlandaskan pada dasar hukum dan peraturan berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421).
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Kajian Lingkungan Hidup strategis serta pelaksanaan program Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan LNRI Nomor 5059)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Program Menuji Indonesia Hijau.
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkunagn Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024;
21. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2023 ini disusun dengan maskud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

1) Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu ke dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2023.
2) Menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

1) Untuk mengarahkan seluruh kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu selama 1 (satu) tahun pada tahun 2024 sehingga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra.
2) Untuk dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu selama 1 (satu) tahun pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, proses penyusunan

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Luwu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan'

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.



Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/ yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2023 didasarkan pada Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya yang melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;dan
3. Kebiajakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu

Evaluasi Renja tersebut untuk mengidenfikasikan realisasi pencapaian target kinerja program/kegiatan , serta mengidenfikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023. Pada Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup melaksanan sebanyak 6 (Enam) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD sejumlah

Rp. 5.035.997.883 (Lima Milyar Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan dengan realisasi anggaran Rp.4.979.155.468,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 98,97 %.

Berikut adalah penelaahan terhadap pencapaian program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023

Realisasi Kinerja Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023

No.	Program dan Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
Misi ke-01 Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel					
Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik					
1	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**2.666.256.525**	**1.556.935.395**	**58.39**	**75.00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**19.648.400**	**19.443.000**	**98.96**	**100.00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.726.000	12.726.000	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.168.400	1.155.900	98.96	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000	750.000	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.099.200	1.894.200	90.24	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	754.200	754.200	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.045.400	1.045.400	100.00	100.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.105.200	1.105.200	100.00	100.00

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.2.89.988.768**	**2.242.213.275**	**97.92**	**100.00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.213.797.968	2.167.224.475	97.90	100.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.560.000	72.360.000	98.37	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.379.200	1.379.200	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.249.600	1.249.600	100.00	100.00
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**8.724.750**	**8.724.750**	**100.00**	**100.00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	8.724.750	8.724.750	100.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**159.655.840**	**159.617.647**	**99.97**	**100.00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangnan Kantor	722.050	722.050	100.00	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	979.450	979.450	100.00	100.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.975.400	1.975.400	100.00	100.00
	Penyediaan Bahan/Material	11.912.490	11.912.490	100.00	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.716.450	144.678.257	99.97	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**151.089.985**	**143.629.030**	**95.03**	**100.00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.105.300	12.105.300	100.00	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	62.759.689	58.848.730	93.97	100.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.425.000	2.375.000	97.98	100.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.800.00	70.300.00	95.26	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	**93.851.750**	**83.252.750**	**88.70**	**100.00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**93.851.750**	**83.252.750**	**88.70**	**100.00**
2	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**300.000.000**	**299.458.600**	**99.82**	**95.00**
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten	300.000.000	299.458.600	99.82	95.00
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	300.000.000	299.458.600	99.82	95.00
Misi ke-10 **Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana**					
Sasaran : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan					
3	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**122.148.340**	**122.148.340**	**99.95**	**100.00**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	**122.148.340**	**122.148.340**	**99.95**	**100.00**

	Hidup Kabupaten/Kota				
	Koordisasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut	68.310.100	68.278.600	99.95	100.00
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	53.638.240	53.761.240	99.85	100.00
Sasaran : Meningkatnya efektivitas pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (LB3) dan timbulan sampah					
4	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**5.106.200**	**5.060.200**	**90.10**	**100.00**
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**5.106.200**	**5.060.200**	**90.10**	**100.00**
	Koordisasi, Sinkronisasi, dan Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan	5.106.200	5.060.200	90.10	100.00
5	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**14.428.000**	**14.387.200**	**99.72**	**100.00**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Lingkungan Hidup (PPLH)	**14.428.000**	**14.387.200**	**99.72**	**100.00**
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.428.000	14.387.200	99.72	100.00
6	**Program Pengelolaan Persampahan**	**1.870.707.850**	**1.870.571.900**	**99.99**	**100.00**
	Pengelolaan Sampah	**1.870.707.850**	**1.870.571.900**	**99.99**	**100.00**
	Penyusunan Kebijakan dan Srategi Dearah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	4.752.700	4.752.700	100.00	100.00
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.865.955.150	1.865.819.200	100.00	100.00
TOTAL		**5.035.997.883**	**4.979.155.468**	**98.97**	**100.00**

Sumber : Data diolah Dinas Lingkungan Hidup 2022

Hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel dan format sebagai berikut :

Tabel. 2.1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU S/D TAHUN 2024

Kode Rekening						Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Taregat dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Tareget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (6/7)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						DINAS UNGKUNGAN HIDUP									
2	11	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah								
2	11	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu								
2	11	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra Renja yang disusun	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	6 Dok	300
2	11	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	300
2	11	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	300
2	11	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	300
2	11	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	300
2	11	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	3 Lap	300
2	11	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)/ Lkip	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	300

Kode Rekening						Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tareget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Tareget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (6/7)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	11	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu								
2	11	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2683 OB	2683 OB	2683 OB	2683 OB	100	2683 OB	8,049 OB	300
2	11	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang diverifikasi	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100	4 Dok	12 Dok	300
2	11	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	3 Lap	300
2	11	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 Lap	14 Lap	14 Lap	14 Lap	100	14 Lap	42 Lap	300
2	11	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD								
2	11	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	100	3 Lap	3 Lap	100
2	11	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran								
2	11	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100	3 Jenis	12 Jenis	243
2	11	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100	35 Jenis	23 Jenis	575
2	11	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	100	25 Jenis	75 Kali	300
2	11	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dan Dalam Daerah	50 OK	50 OK	50 OK	50 OK	100	50 OK	150 OK	300

Kode Rekening						Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tareget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (6/7)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	11	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa								
2	11	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dingestrasi	200 Surat	200 Surat	200 Surat	200 Surat	100	200 Surat	600 Surat	300
2	11	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya lagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	300
2	11	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	100	12 OB	36 OB	300
2	11	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	19 OB	19 OB	19 OB	19 OB	100	19 OB	57 OB	300
2	11	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	11	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizian	40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	100	40 Unit	120 KK	300
2	11	02				PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penyelenggaraan perencanaan lingkungan hidup								
2	11	02	2	02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten	Jumlah KLHS yang disusun								
2	11	02	2	02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	0 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	2 Dok	200

Kode Rekening						Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tareget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Tareget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (6/7)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	11	03				PENGENDALIAN PENCEMARAN DANATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKLH								
2	11	03	2	01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten								
2	11	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	2 Lap	4 Lap	400
2	11	03	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Lokus	1 Lokus	0 Lokus	0 Lokus	-	1 Lokus	2 Lokus	200
2	11	03	2	01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten	capaian data analisis	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0 Dok	-	1 Dok	2 Lap	200
2	11	05				PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase bahan berbahaya dan berasun (B3_ dan limbah B3 yang dapat dikendalikan								
2	11	05	2	02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Volume limbah B3 yang dikumpulkan								
2	11	05	2	02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin Pengumpulan Limbah B3 yang difasilitasi	0 Ijin	0 Ijin	0 Ijin	0 Ijin	-	17 Ijin	17 Lokus	0

Kode Rekening						Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tareget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (6/7)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	11	06				PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangan								
2	11	06	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten								
2	11	06	2	01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Dokumen hasil Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	300
2	11	11				PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah perkotaan yang telah dilakukan pengelolaan								
2	11	11	2	01		Pengelolaan Sampah	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan sampah								
2	11	11	2	01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah yang disusun	1 Dok	1 Dok	- Dok	- Dok	0	1 Dok	2 Dok	200
2	11	11	2	01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/TPA Kabupaten	Jumlah kecamatan yang dilakukan penanganan sampah	2 Kec	2 Kec	2 Kec	2 kec	100	2 Kec	6 Kec	300

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada dasarnya efisiensi merupakan *perbandingan antara suatu hasil (output) dengan anggaran (input) yang dibutuhkan.* Dalam konteks tersebut ada beberapa prinsip yang harus diperhatian, antara lain efisiensi harus dapat diukur, efisiensi mengacu pada pertimbangan yang rasional, efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas(mutu), efisiensi merupakan teknis pelaksanaan, dan pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan organisasi yang bersangkutan. Dari definisi diatas dapat disajikan data capaian analisis efisiensi Dinas Lingkungan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 atas capaian kinerja indikator (output) dibandingkan capaian realisasi anggaran (input) sebagai berikut

Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2024

No	Misi / Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Ket
Misi ke-01 **Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel**				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	66,67	92,08	
Misi ke-10 Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana				
	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	100	*97,66*	
	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan	69,70	*99,73*	
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (LB3) dan timbulan sampah	26,48	*99,89*	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa atas dasar ***pencapaian kinerja*** (*output/outcome*) dibandingkan dengan pencapaian ***realisasi anggaran*** (*input*) dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu pada tahun anggaran 2023 dalam pelaksanaan 2 misi dan 4 sasaran yang dijabarkan dalam 7 indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai upaya perwujudan dan pencapaian visi/misi yang ada, telah dilaksanakan dengan ***belum efisien.***

Tabel. 2-2
(Tabel T.C-30 Lampiran Permendagri No.86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
1	Indeks Kualitas Air (IKA)			56,3	56,3	56,4	56,4	50	50	56,4	56,4	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)			86,3	86,5	86,5	86,6	90	90,12	90,25	90,25	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			56,7	56,8	56,8	56,95	74,18	74,18	74,23	74,23	
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		√	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten		√	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
8	Rasio Pejabat Pengawas LH di Daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap Usaha yang Izin Lingkungan,Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota		√	16	18	19	20	-	-	-	-	
9	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten		√	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	
10	Timbulan Sampah yang ditangani		√	85,01	85,75	86,35	86,90	23,08	30,61	60,15	60,15	
11	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R		√	17,45	17,95	18,35	18,79	4,35	5,50	4,50	4,50	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu . Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Dinas menetapkan bahwa Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. Sedangkan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu adalah:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu pada Reviu RPJMD Tahun 2019-2024, isu strategis terkait lingkungan hidup yaitu Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas ruang terbuka hijau. Oleh karena itu Pengendalian pencemaran lingkungan menjadi salah satu prioritas pembangunan. Untuk mengetahui peningkatan kinerja peayanan Dinas Lingkungan Hidup terkait pengendalian pencemaran lingkungan
maka dapat diketahui bahwa pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu terkait isu strategis terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Untuk pengendalian pencemaran air dari tahun 2023 ke tahun 2023 terjadi peningkatan 1,8%. Sedangkan untuk pengendalian pencemaran udara terjadi peningkatan kinerja sebesar 2,17% dan untuk limbah B3 sebesar 11,1%.

Sedangkan untuk Persentase volume sampah yang terkelola, untuk kinerja

Dinas Lingkungan Hidup belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pada tahun sebelumnya (2019) belum ada data pembanding dikareana tidak adanya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menentukan presentase volume sampah

Dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Dinas LIngkungan Hidup ditemukan beberapa permasalahan dan hambatan sebgai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menganalisa kualitas air dan udara sesuai parameter uji untuk perhitungan IKA dan IKU
2. Belum terbitnya revisi Pedoman penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang dapat menghitung nilai IKA yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan
3. Masih kurangnya kepedulian pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan
4. Belum konsisten pelaku usaha/kegiatan dalam mengelola lingkungan
5. Belum optimalnya peran serta dan pemahaman masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
6. Belum optimalnya jumlah personil dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka penaatan hukum lingkungan

i. Belum adanya pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLH) yang resmi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap izin lingkungan

7. Belum optimalnya penanganan pelaku usaha/ kegiatan yang tidak berizin dan menghasilkan limbah
8. Kurang tersedianya sarana prasarana untuk mobilisasi pengawasan dan sampling kualitas air/udara yang digunakan sebagai alat bukti
9. Masih belum memadainya Kapasitas SDM
10. Belum optimalnya koordinasi dan membangun jejaring kerja denganinstansi terkait Perencaanaan pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah belum optimal

11. Terbatasnya lahan yang memenuhi kritera teknis, administrasi dan sosial untuk kepentingan pengelolaan sampah
12. Terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan sampah
13. Tingginya biaya operasional / pemeliharaan pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan sampah
14. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah
15. Kurang optimalnya ketersediaan dan jenis alat peraga sosialisasi
16. Belum optimalnya kapasitas SDM yang memahami teknologi pengelolaan sampah
17. Belum maksimal Partisipasi aktif peserta sosialisasi
18. Masih rendahnya peserta yang mengaplikasikan/menindaklanjuti hasil pembinaan pengelolaan sampah

Dari data permasalahan di atas, secara umum tidak berdampak langsung terhadap capaian visi dan misi Kabupaten Luwu. Namun disamping adanya permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup melakukan beberapa inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan yaitu:

1. Melakukan penguatan masyarakat terkait pengendalian pencemaran lingkungan. Pengembangan sistem pada penanganan pengaduan dilakukan dengan monitoring dan evaluasi dalam mendekteksi lebih awal terkait pencemaran lingkungan pada segmen (daerah/wilayah) yang terjadi pencemaran lingkungan
2. Melakukan pengembangan terkait pembangunan Pilot Project dengan melibatkan masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait lingkungan.
3. Optimalisasi peran serta masyarakat terkalit pengelolaan sampah

2.4. Review Terhadap RKPD

Beberapa usulan yang disampaikan masyarakat dalam Musrenbang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2023.

Urusan lingkungan merupakan isu strategis global dan banyak menjadi pertimbangan dalam menilai kualitas kehidupan/produk di suatu wilayah.

Adapun tema pembangunan dalam RKPD tahun 2023 adalah penguatan Struktur Perekonomian Daerah Yang Unggul dan Berdaya Saing. Jika dihubungkan dengan lingkungan hidup maka prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah Peningkatan Kalitas Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Pemukiman. Adapun focus pembangunan salah satunya adalah pengelolaan sampah dengan 3R.

Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi dalam pencapaian pengelolaan sampah dengan pola 3R sebesar 0,5% setiap tahunnya, dan hal ini harus didukung oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan timbulan sampah akan terus bertambah seiring dengan penambahan jumlah penduduk, sehingga untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan maka perlu dipikirkan untuk mengurangi sampah akhir.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah melalui perencanaan pembangunan daerah yaitu Musrenbang pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota , provinsi

dan Nasional. Melalui Musrenbang diharapkan dapat mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendektan *top down* dan *bottom up*.

Pada table berikut ini dapat dilihat usulan kegiatan sesuai hasil musrembang Tahun 2024

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Luwu (Musrenbang)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/Volu	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan TPA Persampahan	Kec.Walmas Kec.Larompong	Jumlah yang Tertangani	2 Unit	
2	Pengangkutan pelayanan kebersihan pengangkutan sampah	Desa Belopa Kec.Bua Kec.Larsel Kec.Larompong	• Pengadaan Motor Pengangkut Sampah • Pengadaan Tong Sampah	5 Unit 120 pcs	

Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu belum dapat memberikan bantuan tersebut dikarenakan dikarenakan keterbatasan anggaran mungkin ke depannya dapat direalisasikan. Selain dari pada itu kegiatan yang akan dilaksanakan atas pokok pikiran DPRD



3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, diperlukan telaahan terhadap kebijakan nasional terkait lingkungan hidup. Telaahan tersebut dilakukan terhadap Tujuan dan sasaran pada Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun tujuan yang ingin dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"dalammendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama Kementerian tahun 2020-2024 yang akan diusung, adalah :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setaradengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2020-2024.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),(2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi,(4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS),(5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV -High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional,(2) Nilai Ekspor HasilHutan, TSL dan 1Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutandengan Status Penetapan,(2) Luas Kawasan Hutanyang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan(3) Luas Kawasan Hutanyang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi,(6) OpiniWTP atas Laporan Keuangan KLHK,(7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian InternPemerintah) KLHK.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu merupakan pernyataan untuk mendukung tercapainya visi Bupati yaitu "LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DALAM NUANSA RELIGI" pada misi ke-1 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel dan misi ke-10 yaitu Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana.

Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu adalah :

a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif
b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Hidup

Berdasarkan tujuan di atas maka disusunlah sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu
Tahun 2019-2024

VISI : KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI			
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel			
Misi 10 : Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif dan Responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Perangkat Daerah Serta Kolaborasi Antar Perangkat Daerah	Peningkatandan pengembangan kapasitas dankualitas SDM aparatur
			Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pendayagunaan Sumber Daya Alam Melalui Pengolahan yang bernilai tambah ekonomi dan mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan	Pemetaan potensi sumber daya alam yang memiliki nilai tambah ekonomi,disertai penyusunan kebijakan pedoman pemanfaatan lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan
			Peningkatan Sarana dan Prasarana yang menunjang peningkatan pemanfaatan sumber daya alam
			Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur Bidang Pengawasan,Pengelolaan Sumber Daya Alam

	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Limbah Berbahaya dan beracun (LB3) dan Timbulan Sampah	Melaksanakan Koordinasi dan Pembinaan Kab/Kota serta perusahaan dan Stakeholder terkait dan ketersediaan peningkatan sarana dan prasarana,mendorong keterlibatan masyarakat dan kab/kota dalam rangka mengefektifkan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun timbulan sampah	Mendorong keterlibatan masyarakat dan kab/kota untuk menjaga kualitas lingkungan
			Peningkatan sarana dan prasarana LB3 dan pengelolaan persampahan
	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan	Mendorong keterlibatan masyarakat ndan stakeholder terkait dalam menjaga kualitas lingkungan melalui penerapan instrumen lingkungan	Penguatan dukungan kelembagaan dan tata kelola lingkungan dan penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan tahun 2025 merupakan bentuk Perwujudan dari visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar berikut :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

2 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah

3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah

4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

5 Pengolahan Data Retribusi Daerah

6 Penetapan Wajib Retribusi Daerah

7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

3 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

4 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

5 Pemulangan Pegawai yang Pensiun

6 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas

7 Pemindahan Tugas ASN

8 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

9 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

10 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

11 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

7 Penyediaan Bahan/Material

8 Fasilitasi Kunjungan Tamu

9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3 Pengadaan Alat Besar

4 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

5 Pengadaan Mebel

6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

8 Pengadaan Aset Tak Berwujud

9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

5 Pemeliharaan Mebel

6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten

1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten

2 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten

2 Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten

1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

3 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

3 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut;

2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten

2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

2 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar

3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi

4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten

1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

2 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

3 Pengelolaan Kebun Raya

4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

5 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

6 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

7 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati

5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

1 Penyimpanan Sementara Limbah B3

1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

2 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten

1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

2 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

3 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

7 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

1 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

1 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

8 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten

1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

2 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten

1 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

9 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten

1 Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten

1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten

2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

11 Program Pengelolaan Persampahan

1 Pengelolaan Sampah

1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten

2 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

3 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten

4 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

6 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten

2 Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta

1 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta

1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah

2 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah

3 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

a. Faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan meliputi:

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab.Luwu mengacu peraturan Kementrian Dalam Negeri yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Adanya telaahan terhadap kebijakan nasional yang mengarahkan pada Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, Pengendalian Perubahan iklim, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. Dari beberapa proram tersebut, disesuaikan dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup maka Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan menjadi program Dinas Lingkungan Hidup untuk menyelaraskan dengan kebijakan nasional.

- Untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Kabupaten Luwu terkait lingkungan hidup yaitu Indeks Kualitas Air dan Udara, Persentase sampah yang terkelola maka dirumuskan program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Pengendalian Polusi dan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Adapaun rekapitulasi rumusan rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
(Tabel T.C-33 Lampiran Permendagri No.86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Luwu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025			DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					8.081.783.057		5.092.207.136
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah	%		100	2.916.214.325	100	3.192.399.200
2 11 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		100	19.647.713	100	21.899.200
2 11 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Belopa	2	12.762.000	42	19.647.713
2 11 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Belopa	1	1.168.396	1	12.762.000
2 11 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Belopa	1	749.648	1	1.168.396
2 11 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Belopa	1	2.099.085	1	749.648

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025			DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9
2	11	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Belopa	1	754.085	1	1.000.000
2	11	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Belopa	2	1.045.318	2	5.781.800
2	11	01	2	01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Belopa	2	1.105.181	5	2.000.000
2	11	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan**			**100**	**2.600.010.538**	**100**	**2.684.000.000**
2	11	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	Belopa	276	2.511.793.057	300	2.600.000.000
2	11	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Belopa	12	85.680.000	12	80.000.000
2	11	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	Belopa	1	1.379.185	1	2.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025			DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 11 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Belopa	4	1.1249.296	4	2.000.000
2 11 01 2 03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD**			**100**	**8.724.477**	**100**	**70.265.000**
2 11 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Belopa	2	8.724.477	3	9.000.000.
2 11 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Umum**			**100**	**108.466.690**	**100**	**224.500.000**
2 11 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Belopa	12	714.788	12	1.000.000
2 11 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Belopa	7	977.077	7	1.500.000
2 11 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Belopa	12	1.988.000	12	2.000.000
2 11 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Belopa	12	11.911.506	12	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025			DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 11 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Belopa	50	92.875.317	50	200.000.000
2 11 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**		**100**	**147.150.000**	**100**	**188.000.000**
2 11 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Belopa	12	12.000.000	12	18.000.000
2 11 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	Belopa	12	54.000.000	12	65.000.000
2 11 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Belopa	12	1.950.0000	12	5.000.000
2 11 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	OB	Belopa	19	79.200.000	19	100.000.000
2 11 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**		**100**	**57.307.400**	**100**	**65.000.000**
2 11 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Belopa	15	57.307.400	15	65.000.000
2 11 02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan Hidup**	**%**		**80**	**325.677.770**	**80**	**200.000.000**
2 11 02 2 01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan**	**Dokumen**	Kab. Luwu	2	**9.474.000**	2	**50.000.000**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025			DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9
2	11	02	2	01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	Belopa	1	9.474.000	1	50.000.000
2	**11**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten**	**Jumlah KLHS yang disusun**	**Dokumen**	Kab. Luwu	**1**	**306.203.770**	**1**	**150.000.000**
2	11	02	2	01	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen	Belopa	1	7.054.000	1	125.000.000
2	11	02	2	01	05	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen KLHS Rencana tata Ruang Kabupaten Luwu/Kota yang disusun	Dokumen	Belopa	1	300.000.000	1	125.000.000
2	11	02	2	01	06	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Dokumen KLHS KRP Lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Dokumen	Belopa	1	9.149.770	1	125.000.000
2	**11**	**03**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Air**	**Status**		***B (72.36)***	**90.847.518**	***B (72.36)***	**155.000.000**
2	**11**	**03**	**2**	**01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu yang di atasi**	**Dokumen**	**Kab. Luwu**	**2**	**90.847.518**	**2**	**155.000.000**
2	11	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Laporan	Kab. Luwu	2	66.236.900	2	80.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025			DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 11 03 2 01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	Kab. Luwu	2	9.830.477	2	25.000.000
2 11 03 2 01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	capaian data analisis	Dokumen	Kab. Luwu	2	14.779.172	2	50.000.000
2 11 04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Luas area pengelolaan keragaman hayati kabupaten**	**Ha**		**25**	**8.114.000**	**25**	
2 11 04 2 01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota/Kota**	**Lokasi**	**Kab. Luwu**	**1**	**8.114.000**	**1**	
2 11 04 2 01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	Kab. Luwu	1	8.114.000	1	
2 11 05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase bahan berbahaya dan berasun (B3_ dan limbah B3 yang dapat dikendalikan**	**%**		**70**	**7.130.880**	**100**	**10.000.000**
2 11 05 2 01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Laporan hasil verifikasi Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Lokasi**	**Kab. Luwu**	**1**	**7.130.880**	**1**	**10.000.000**
2 11 05 2 01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Laporan hasil verifikasi Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah	Laporan	Kab. Luwu	1	7.130.889	1	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025			DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B3						
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangan	%		80	17.668.900	100	55.000.000
2 11 06 2 01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/Atau Kegiatan Izin Lingkungan yang di Terbitkan Oleh Pemerintah	Ijin	Kab. Luwu	137	17.668.900	100	55.000.000
2 11 06 2 01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah izin yang difasilitasi	Laporan	Kab. Luwu	12	7.952.774	12	30.000.000
2 11 06 2 01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Dokumen	Kab. Luwu	1	9.715.500	1	30.000.000
2 11 010	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang telah ditangani	%		50	7.902.800	100	25.000.000
2 11 010 2 01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten yang di selesaikan	Kasus	Kab. Luwu	10	7.902.800	1	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025			DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 11 010 2 01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Dokumen	Kec. Belopa	1	7.902.800	1	25.000.000
2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah perkotaan yang telah dilakukan pengelolaan**	**%**		**72**	**1.697.940.640**	**72**	**2.500.015.000.000**
2 11 11 2 01	**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah Dokumen Pelaporan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah**	**Dokumen**	**Kab. Luwu**	**1**	**4.689.046.551**	**1**	**4.689.046.551**
2 11 11 2 01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Luwu	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	Kab. Luwu	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000
2 11 11 2 021 08	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah yang disusun	Dokumen	Kec. Belopa Senga	1	11.487.307	1	11.487.307
2 11 11 2 01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang dilakukan penanganan sampah	Ton	Kab. Luwu, Belopa Semua Kel.Desa, Belopa Utara, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Larompong, Laerompong, Suli, Suli, Kab. Luwu Bajo, Bajo	6077..54	1.677.559.244	6077..54	1.677.559.244

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025			DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kab. Luwu Ponrang, Padang Sappa				

c. **Penjelasan rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif,** Perubahan pagu pada rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal tersebut dikarenakan adanya porses *bottom up* (Musrenbang dan epokir). Untuk mengakomodir hal tersebut maka dilakukan perubahan terhadap rancangan awal RKKD

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup Luwu pada Tahun 2025. Target kinerja mempersentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan dalam organisasi didalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

4.1. Sasaran Dan Program Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu maupun kegiatan- kegiatan spesifik Dinas sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu kepada masyarakat.

Dalam Tahun Anggaran 2025 program kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis.

4.2. Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran dan kegiatan tahunan ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan koondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat,Pemerintah Daerah atau Instansi/Lembaga lainnya dalam rangka meningkatakan pelayanan kepada masyarakat.

Ikhtisar Target Kinerja masing-masing sasaran strategis yang hendak

dicapai dalam Tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir.

Indikator Kinerja Sasaran adalah merupakan target sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2025 yang disesuaikan dengan indikator / target kegiatannya, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan target kegiatan dengan hal lain apabila kegiatan telah berhasil dicapai maka berarti sasaran juga telah dicapai.

Berikut disajikan dalam lampiran Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 di sajikan sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Proyeksi Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Proyeksi Maju Renja Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP						8.081.783.057,00							2.504.132.998.410,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.081.783.057,00							2.504.132.998.410,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						8.081.783.057,00							2.504.132.998.410,00	
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100persen			100 persen	2.941.397.818,00						100persen	3.929.277.818,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				19.647.713,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	-	19.647.713,00	
	2	11	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	12.726.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		12.726.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.168.396,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		1.168.396,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	749.648,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		749.648,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.099.085,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		2.099.085,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.01	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	754.085,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		754.085,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.045.318,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		1.045.318,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1.105.181,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		1.105.181,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				2.600.101.538,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang	-	-	3.587.981.538,00	

																berlanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal					
	2	11	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2.511.793.057,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	05.Pembangunan kualitas Englungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		3.511.793.057,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2	11	01	2.02	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
							Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	85.680.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas Englungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		73.560.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2	11	01	2.02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.379.185,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas Englungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		1.379.185,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2	11	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	1.249.296,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutanTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		1.249.296,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				8.724.477,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	-	8.724.477,00	
	2	11	01	2.03	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	8.724.477,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		8.724.477,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				108.466.690,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	-	108.466.690,00	

	2	11	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	714.788,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		714.788,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2	11	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	977.077,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		977.077,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2	11	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1.988.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		1.988.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2	11	01	2.06	00 07	Penyediaan Bahan/Material																	

							Jumlah Paket Bahan/Materi yang Disediakan				12 Paket	11.911.508,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		11.911.508,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	92.875.317,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		92.875.317,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	147.150.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	-	147.150.000,00	
	2	11	01	2.08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	54.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		54.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2	11	01	2.08	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.950.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Luwu, Belopa, Sengo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutanTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		1.950.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2	11	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	79.200.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		79.200.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	57.307.400,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	-	57.307.400,00	
	2	11	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	57.307.400,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		57.307.400,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAA N LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	325.677.770,00						-	15.677.770,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Ko ta	-	-			-	9.474.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	-	9.474.000,00	
	2	11	02	2.01	03 06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/k ota yang berisi arahan/rekomendasi RPPLH kabupaten/k ota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	9.474.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		9.474.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP

	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	316.203.770,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutanTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	-	16.203.770,00	
	2	11	02	2.02	00 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																
							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	7.054.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengk	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		7.054.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	00 05	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																
							Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	900.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengk	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	00 06	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup																
							Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup yang				1 Dokumen	9.149.770,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengk	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		9.149.770,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

							dikunci													
3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	84.845.159,00						-	84.845.159,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	84.845.159,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	-	84.845.159,00	
	2	11	03	2.01	00 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	60.235.510,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		60.235.510,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	00 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	9.830.477,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutanTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		9.830.477,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	00 25	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
							6				2.0	14.779.172,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		14.779.172,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	8.114.000,00						-	8.114.000,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	8.114.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	-	8.114.000,00	
	2	11	04	2.01	00 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														

							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha	8.114.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		8.114.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	7.130.889,00						-	7.130.889,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-			-	7.130.889,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	-	7.130.889,00	
	2	11	05	2.01	00 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3														
							Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	7.130.889,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		7.130.889,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

6	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	17.668.272,00						-	37.952.774,00		
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	100persen			-	17.668.272,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	100persen	37.952.774,00		
	2	11	06	2.01	00 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																
							0				1.0	7.952.774,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		7.952.774,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	06	2.01	00 09	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																

							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				12 Badan Usaha	9.715.499,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	7.902.598,00						-	25.000.000,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	7.902.598,00			-	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	-	25.000.000,00	
	2	11	10	2.01	08 06	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														
							Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Perkara	7.902.598,00	Kab. Luwu, Belopa, Sengi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	8.689.046.551,00						-	2.500.015.000.000,00	

	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	-	-			-	4.689.045.551,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutanTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	-	2.500.015.000.000,00	
	2	11	11	2.01	00 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPS3R/SPA Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				2 Unit	3.000.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	00 08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	11.487.307,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	00 17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														

| | | |

BAB . V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perancanaan penganggaran bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, baik melalui peran serta lingkungan hidup maupun masyarakat.

Pembangunan Sarana dan Prasarana di Bidang Lingkungan Hidup perlu dipercepat untuk mengurangi kesenjangan permintaan dan penawaran, serta pengurangan dispenitas antar kawasan dan desa, serta adanya tuntutan masyarakat untuk peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu.

Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan untuk setiap periode terbatas. Rencana Kerja ini telah memuat seluruh aspek yang diharapkan untuk dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Luwu. Oleh sebab itu pelaksanaan RENJA membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon terhadap masalah-masalah Lingkungan Hidup.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini menjadi acuan kerjasama bagi unit-unit pelaksanaan di Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu diharapkan unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja dan target.

Melalui perencanaan sebagaimana dipaparkan dalam dokumen ini, diharapkan agar pembangunan dalam bidang lingkungan hidup dapat lebih terarah, terpadu dan berbasis kinerja sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu dan menjadi acuan bagi Pemerintah dalam menyusun Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan Dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yang memuat tentang program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Luwu. Penyusunan Renja dilakukan dengan pendekan partisipatif,*Top- down* dan *Bottom-Up.* Sehingga dilakukan penyesuaian antara tugas pokok dan fungsi DLH kab Luwu, partisipasi masyarakat (musrenbang) dan pokok-pokok pikiran Dewan (e-Pokir).

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pada tahun 2023, pelaksanaan kegiatan diutamakan dalam mendukung Indikator Kinerja Utama Bupati yaitu Indek kualitas Air melalui pengendalian Penurunan Beban Pencemaran dari sumber Air limbah non domestik sumber institusi. Sedangkan untuk indikator kinerja Daerah yaitu indeks kualitas udara melalui Pengendalian Pencemaran Udara dari emisi sumber tidak bergerak, dan Persentase volume sampah yang Terkelola.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja DLH ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Luwu sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2025



RENCANA KERJA
(RENJA)

DINAS SOSIAL

Jl. Pattimura No.....(Ex Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu)
Email :dinsos2018@gmail.com Kode Pos 91994

BELOPA

PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas Petunjuk dan HidayahNya sehinggga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Luwu dapat diselesaikan. Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Luwu dan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2024-2026.

Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Dinas Sosial sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara konsisten dan optimal akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 151 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Luwu Dinas Sosial Kabupaten.

Salah satu tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah untuk meningkatkan mutu layanan di bidang sosial dan memberikan informasi sekaligus sebagai bahan evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu pada tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih disampaikan kepadasemua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian Renja ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam pelaksanakan tugas dan fungsi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Belopa, 2025

KEPALA DINAS SOSIAL

Hi. HASLIANA NURDIN, S.Pt., M.M
Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 196905121995032004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

1.1 Landasan Hukum 4

1.2 Maksud dan Tujuan 6

1.3 Sistimatika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 30

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 32

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 45

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 46

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 46

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 48

3.3 Program dan Kegiatan 56

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 59

BAB V PENUTUP 75

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2025	20
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Sosial Kab. Luwu	26
Tabel	2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	33
Tabel	2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	45
Tabel	3.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	49
Tabel	3.2	Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Unit Kerja Penanggung Jawab serta lokasi	50
Tabel	4.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Renja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Perubahan Dinas Sosial Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang dituangkan di dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 151 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Dinas Sosial merupakan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial berdasarkan asas desentralisasi, dekontralisasi dan tugas pembantuan. Dinas Sosial sebagai penyelenggara kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu

khususnya yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Renja Kerja 2025 sebagai upaya mendukung terwujudnya visi Kabupaten Luwu yaitu "**Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri, dalam Nuansa Religi**".

KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RKPD & RENJA SKPD



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja perangkat daerah antara lain adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 244)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) lembaran negara republic Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 9 Lembaga Negara Tahun 2022 Nomor 4, perubahan lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 151 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Luwu.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Daerah atas Peraturan Derah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2022 tentang RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024;
22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 67 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025 dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam kurun waktu satu tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran. Renja ini digunakan untuk menilai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya pada tahun berkenan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan substansi sajian tersebut diatas, maka naskah Renja ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

  Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial dan sistematika penulisan.

- **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

  Berisikan evaluasi pelaksanaan renja Dinas Sosial Tahun 2025 dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

  Menguraikan telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial serta memuat Program dan Kegiatan.

- **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

  Berisikan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan pendanaan indikatif renja Dinas Sosial Kab. Luwu tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026

- **BAB V PENUTUP**

  Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Pelaksanaan RENJA Dinas Sosial pada setiap tahun anggaran dilakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi dengan memperhatikan unsure ekonomis, efektif, dan efisien. Untuk Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Luwu pada TA. 2023 adalah sebesar Rp. 4.862.495.295 (Empat Miliyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), dan Realisasi sebesar Rp. 4.781.858.884 (Empat Miliyar Tuju Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu sampai dengan Tahun Aggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL S/D TAHUN 2023

PROPINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		JUMLAH DANA / DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		PPTK/PELAKSANA
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.792.972.005	78,00	3.738.882.164	98,57	97,83	76,89	76,31	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33.146.960	0,68	32.827.850	99,04	96,48	0,68	0,66	
1.06.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.411.060	0,34	16.375.990	99,79	99,79	0,34	0,34	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			16.411.060	0,34	16.375.990	99,79	99,79			
1.06.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	999.860	0,02	999.860	100	100	0,02	0,02	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			999.860	0,02	999.860	100	100			
1.06.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	999.780	0,02	999.780	100	100	0,02	0,02	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			999.780	0,02	999.780	100	100			
1.06.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.249.840	0,03	991.400	79,32	79,32	0,02	0,02	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			1.249.840	0,03	991.400	79,32	79,32			

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		JUMLAH DANA / DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		PPTK/PELAKSANA
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
1.06.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	999.740	0,02	999.740	100	100	0,02	0,02	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			999.740	0,02	999.740	100	100			
1.06.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	12.486.680	0,26	12.461.080	99,79	99,79	0,26	0,26	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi - Swakelola			12.486.680	0,26	12.461.080	99,79	99,79			
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.071.453.403	63,17	3.029.453.666	98,63	99,59	62,30	62,91	
1.06.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	2.970.080.973	61,08	2.928.281.366	98,59	98,59	60,22	60,22	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			2.970.080.973	61,08	2.928.281.366	98,59	98,59			
1.06.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan/Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan/Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	96.480.000	1,98	96.280.000	99,79	99,79	1,98	1,98	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			96.480.000	1,98	96.280.000	99,79	99,79			
1.06.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	1.184.990	0,02	1.184.860	99,99	99,99	0,02	0,02	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			1.184.990	0,02	1.184.860	99,99	99,99			

1.06.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3.707.440	0,08	3.707.440	100	100	0,08	0,08	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			3.707.440	0,08	3.707.440	100	100			
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.467.610	0,13	5.467.480	84,54	84,54	0,11	0,11	
1.06.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD	1 Laporan	6.467.610	0,13	5.467.480	84,54	84,54	0,11	0,11	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			6.467.610	0,13	5.467.480	84,54	84,54			
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			349.135.155	7,18	349.006.560	99,96	99,91	7,18	7,17	
1.06.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	3.794.700	0,08	3.794.700	100	100	0,08	0,08	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			3.794.700	0,08	3.794.700	100	100			
1.06.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	4 Paket	42.500.000	0,87	42.500.000	100	100	0,87	0,87	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Modal - Swakelola			42.500.000	0,87	42.500.000	100	100			
1.06.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan	12 Paket	10.112.825	0,21	10.110.230	99,97	99,97	0,21	0,21	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			10.112.825	0,21	10.110.230	99,97	99,97			
1.06.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	12 Paket	2.623.740	0,05	2.623.690	100	100	0,05	0,05	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			2.623.740	0,05	2.623.690	100	100			

1.06.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	14.400.000	0,3	14.300.000	99,31	99,31	0,29	0,29	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			14.400.000	0,3	14.300.000	99,31	99,31			
1.06.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	21.131.890	0,43	21.128.640	99,98	99,98	0,43	0,43	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			21.131.890	0,43	21.128.640	99,98	99,98			
1.06.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	810.000	0,02	810.000	100	100	0,02	0,02	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			810.000	0,02	810.000	100	100			
1.06.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	253.762.000	5,22	253.739.300	99,99	99,99	5,22	5,22	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			253.762.000	5,22	253.739.300	99,99	99,99			
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			261.807.133	5,38	255.675.158	97,66	97,48	5,26	5,25	
1.06.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	1400 Laporan	8.802.600	0,18	8.802.200	100	100	0,18	0,18	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			8.802.600	0,18	8.802.200	100	100			
1.06.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81.004.533	1,67	74.872.958	92,43	92,43	1,54	1,54	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			81.004.533	1,67	74.872.958	92,43	92,43			
1.06.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	172.000.000	3,54	172.000.000	100	100	3,54	3,54	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			172.000.000	3,54	172.000.000	100	100			

1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70.961.744	1,46	66.451.450	93,64	97,42	1,37	1,42	
1.06.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	59.790.600	1,23	55.291.200	92,47	92,47	1,14	1,14	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			59.790.600	1,23	55.291.200	92,47	92,47			
1.06.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	12 Unit	4.436.000	0,09	4.430.000	99,86	99,86	0,09	0,09	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			4.436.000	0,09	4.430.000	99,86	99,86			
1.06.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.735.144	0,14	6.730.250	99,93	99,93	0,14	0,14	ASRIANTI, S.Tr.Keb., MM
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			6.735.144	0,14	6.730.250	99,93	99,93			
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			41.632.100	0,86	41.475.900	99,62	99,58	0,85	0,85	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			41.632.100	0,86	41.475.900	99,62	99,58	0,85	0,85	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya	19 Orang	28.317.000	0,58	28.235.800	99,71	99,71	0,58	0,58	HELMI HALIM, SE
		Kewenangan Kabupaten/Kota									
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			28.317.000	0,58	28.235.800	99,71	99,71			
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Sertifikat	13.315.100	0,27	13.240.100	99,44	99,44	0,27	0,27	HELMI HALIM, SE

	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			13.315.100	0,27	13.240.100	99,44	99,44			
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			78.025.600	1,60	74.150.800	95,03	66,70	1,52	1,07	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			66.572.700	1,37	66.439.900	99,80	66,49	1,37	0,91	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	0	0	0	0	0	0	0	ANDI ASNAWI, S.Sos
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			0	0	0	0	0			
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	40.512.000	0,83	40.508.400	99,99	99,98	0,83	0,83	ANDI ASNAWI, S.Sos
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			40.512.000	0,83	40.508.400	99,99	99,98			
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1025 Orang	26.060.700	0,54	25.931.500	99,5	99,5	0,53	0,53	ANDI ASNAWI, S.Sos
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			26.060.700	0,54	25.931.500	99,5	99,5			
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			11.452.900	0,24	7.710.900	67,33	67,33	0,16	0,16	

1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA KewenanganKabupaten/Kota	50 Orang	11.452.900	0,24	7.710.900	67,33	67,33	0,16	0,16	ANDI ASNAWI, S.Sos
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			11.452.900	0,24	7.710.900	67,33	67,33			
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			617.574.090	12,70	610.321.420	98,83	98,14	12,55	12,46	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			617.574.090	12,70	610.321.420	98,83	98,14	12,55	12,46	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang MendapatkanPengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60000 Keluarga	53.211.700	1,09	52.136.050	97,98	97,33	1,07	1,07	IRWAN RIDWAN, ST
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			53.211.700	1,09	52.136.050	97,98	97,33			
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60000 Keluarga	564.562.390	11,61	558.185.370	98,91	98,94	11,48	11,48	IRWAN RIDWAN, ST
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			168.862.390	3,47	168.685.370	99,9	98,92			
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi - Swakelola			595.500.000	8,13	389.500.000	98,48	98,96			
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			311.186.800	6,40	295.992.400	95,11	96,97	6,09	6,21	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			49.455.800	1,02	49.299.900	99,68	99,68	1,01	1,01	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan									
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	49.455.800	1,02	49.299.900	99,68	99,68	1,01	1,01	SAIFUL, S.Sos

	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			49.455.800	1,02	49.299.900	99,68	99,68			
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			261.740.700	5,38	246.692.500	94,25	94,25	5,07	5,07	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	261.740.700	5,38	246.692.500	94,25	94,25	5,07	5,07	SAIFUL, S.Sos
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			261.740.700	5,38	246.692.500	94,25	94,25			
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			21.095.000	0,43	21.036.200	99,72	99,72	0,43	0,43	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			21.095.000	0,43	21.036.200	99,72	99,72	0,43	0,43	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	21.095.000	0,43	21.036.200	99,72	99,72	0,43	0,43	HELMI HALIM, SE
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			21.095.000	0,43	21.036.200	99,72	99,72			
JUMLAH				**4.862.495.295**	**100**	**4.781.858.884**			**98,34**	**98,34**	

Belopa, 2025
KEPALA DINAS SOSIAL

Hj. HASLIANA NURDIN, S.Pt., M.M.
Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 196905121995032004

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemerintah melalui Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai upaya pemberian bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta rehabilitasi sosial.

Selain melakukan asistensi sosial melalui pemberian bantuan bagi KSM (Keluarga Sangat Miskin) penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Lanjut Usia terlantar (ASLUT), Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Program Perlindungan Sosial Anak (PPSA), juga diberikan pelayanan social melalui pemberdayaan dan pelayanan sosial luar panti yang berbasis keluarga dan masyarakat, serta penguatan sumber daya manusia dan lembaga kesejahteraan sosial. Penguatan sumber daya manusia serta lembaga kesejahteraan sosial merupakan dua strategi yang harus sejalan, jika asistensi sosial yang dominan maka kegiatan tersebut akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kemandirian penduduk miskin dan rentan.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan berupa Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 18 Unit, pemberian peralatan kebutuhan kepada anak panti di 2 LKSA, pendapingan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 21.808 KK, melakukan pendampingan kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan sebanyak 16,526 KPM, melakukan pelayanan sosial kepada korban bencana sebanyak 159 Jiwa, melakukan penanganan terhadap penyandang gangguan jiwa sebanyak 6 orang, serta melakukan pendampingan terhadap 150 orang penyandang disabilitas berat dan lansia. Sedangkan dalam upaya pemberdayaan PMKS Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan sosial berupa bantuan modal usaha kepada Kelompok Usaha Bersama 30 Kelompok.

Tabel. 2.2

PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
1	Jumlah Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Rehab) yang terbina			8	8	8	8	8	8	9	9	
2	Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial			100	100	100	100	-	75	100	100	
3	Jumlah kejadian bencana (kali)			35	35	168	159	22	24	159	159	
4	Persentase Kejadian Bencana yang tertangani			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat			30	40	39	45	29	29	45	45	
6	Jumlah PMKS yang tertangani			40.200	40.200	40.550	40.500	40.186	40.159	40.500	40.500	
7	Jumlah PMKS yang ada			50.431	51.484	50.484	78.172	51.484	51.484	78.792	78.792	
8	Persentase PMKS yang tertangani			79,71	78,08	80,32	51,81	78,06	78,00	51,40	51,40	
9	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun			40.000	45.000	47.000	50.000	40.529	41.830	62.000	65.000	
10	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial			50.431	51.484	50.484	78.172	51.484	51.484	78.792	78.792	

No	Indikator	SPM / standar	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
11	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	80	79,32	87,41	93,10	63,96	78,72	81,25	78,69	82,50	
12	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis			500	500	459	459	300	357	200	200	
13	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis			25.216	25.742	25.242	39.086	25.742	25.742	39.396	39.396	
15	Jumlah panti sosial dalam satu tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos			8	8	8	8	8	8	9	9	
16	Jumlah panti sosial dalam satu tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos			8	8	8	8	8	8	9	9	
17	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Jumlah WKSBM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial			-	-	120	220	0	0	220	220	
19	Jumlah WKSBM yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial			-	-	120	220	0	0	220	220	
20	Persentase WKSBM menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60	60	-	-	100	100	0	0	100	100	

No	Indikator	SPM / standar	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
21	Jumlah Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			200	200	550	500	186	159	500	500	
22	Jumlah Korban Bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			200	200	550	500	186	159	500	500	
23	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	
24	Jumlah korban benjcana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat skala kabupaten			160	160	100	100	6	8	100	100	
25	Jumlah korban benjcana dalam 1 tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat skala kabupaten			200	200	200	200	186	40	200	200	
26	Persentase korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat skala kabupaten	80	80	80	80	50	50	3,23	20	50	50	
27	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun			150	2.483	2.879	3.141	150	2.483	3.141	3.141	
28	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun			228	3.749	3.889	4.076	228	3.749	4.076	4.076	

No	Indikator	SPM / standar	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
29	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	40	40	65,79	66,23	74,03	77,06	65,79	66,23	77,06	77,06	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi bisa memperbaiki iklim ekonomi kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan mampu memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang membaik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata publik.

Pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai jenis pelayanan masih dianggap belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai pengaduan maupun keluhan, baik yang disampaikan secara langsung maupun lewat media cetak dan elektronik. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, upaya-upaya peningkatan pelayanan publik terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana dan akuntabilitas. Acuan pelaksanaan pelayanan publik harus berlandaskan pada pelayanan prima dengan prinsip lebih baik (better), lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih sederhana (more simple dan actual (newer). Perlunya SPM dimaksudkan untuk:

1. Memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar khususnya di bidang sosial.
2. Menciptakan kesatuan langkah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang sosial sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
3. Memberikan perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang/jasa kebutuhan dasar yang berhak diterima oleh setiap warga negara secara minimal sedangkan mutu pelayanan dasar

adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang/jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, ada 5 Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti sosial;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota.

Pada akhirnya, dengan adanya SPM bidang sosial dapat menjadi acuan untuk mengukur kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Artinya, SPM itu juga merupakan ukuran untuk melihat kinerja dinas.

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial sesuai dengan SPM sebagian besar sudah dilaksanakan, namun dari tahun 2011 urusan sosial mengenai penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Kabupaten/Kota, yang meliputi bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota dan evakuasi korban bencana skala Kabupaten/Kota, pelayanan ini tidak sepenuhnya dilaksanakan di Dinas Sosial karena telah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pada dasarnya Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan implementasi dari Tupoksi dan kewenangan yang ada dengan mensinergikan pada Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu melalui capaian Visi dan Misi. Semua tujuan dan sasaran serta indikator Kinerja program dan kegiatan diarahkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan masyarakat Kabupten Luwu secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial saja tetapi perlu dukungan instansi lain.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tercalisasinya tujuan dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan. Dinamika masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan lingkungan kerja yang ada menuntut percepatan dalam

penyelesaian masalah yang cepat. Apabila faktor pengaruh dan permasalahan, baik internal maupun eksternal tidak teratasi akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun faktor pengaruh sekaligus permasalahan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan SDM

   Kondisi ini terjadi disebabkan kurangnya SDM yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Luwu dan kurangnya perputaran pegawai yang seharusnya dapat menjadi penyegaran dan pengalaman. Secara kuantitas juga, masih kurang memadai sehingga percepatan penyelesaian pekerjaan tertunda dari target waktu sehingga pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dapat terganggu.

2. Alokasi anggaran

   Komposisi dan struktur anggaran yang diusulkan seringkali tidak dapat terealisasi seluruhnya. Hal ini membawa konsekuensi perlunya revisi terhadap program dan kegiatan yang sudah diusulkan. Optimalisasi menjadi berkurang, disebabkan alokasi anggaran yang terbatas. Akibatnya program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang ada menjadi kurang optimal dalam mencapai indikator kinerja yang diharapkan.

3. Sarana dan prasarana

   Kenyamanan kerja dan peningkatan kinerja sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan dan kelancaran program/kegiatan. Kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan tergantung adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat menunjang secara langsung. Seringkali kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalanan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

TABEL. 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

DINAS SOSIAL KAB. LUWU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	8	9
						DINAS SOSIAL				5.091.033.097,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.091.033.097,00
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.091.033.097,00
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN KETERSEDIAAN PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100 %	4.202.866.196,00
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100%	100 %	26.335.737,00
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	13.955.292,00
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.327.160,00
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.327.160,00
	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.095.010,00
	1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.077.155,00
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	7.553.960,00
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	100%	100 %	3.348.566.621,00
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	3.190.958.297,00
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	153.960.000,00
	1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				

							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.067.494,00
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	2.580.830,00
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	100%	100 %	9.610.060,00
	1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	9.610.060,00
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							0		0 0	0,00
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100 %	250.348.105,00
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	1.256.084,00

	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8 Paket	14.310.450,00
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.502.150,00
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.751.592,00
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00
	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material				
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	22.980.721,00
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	1.250.000,00
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan	188.897.108,00
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan Jasa	100%	100 %	256.435.261,00
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1600 Laporan	1500 Laporan	14.357.520,00
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	80.077.741,00
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	278 Laporan	372 Laporan	162.000.000,00
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100 %	311.570.412,00
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	105.696.412,00
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	34 Unit	6.740.000,00
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	199.134.000,00
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial kabupaten	100 %	100 %	18.187.632,00

	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan KAT yag Memperoleh Pemberdayan Sosial dalam Lingkup Kabupaten/Kota	1Komunitas	1 Komunitas	1.045.526,00
	1	06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT				
							Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keluarga	1 Keluarga	1.045.526,00
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	2PSKS	2 PSKS	17.142.106,00
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	22 Orang	6.150.166,00
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Sertifikat	20 Sertifikat	10.991.940,00
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100 %	100 %	56.154.035,00

	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	4Layanan	4 Layanan	34.544.587,00
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	6.084.554,00
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10 Orang	2.146.423,00
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	26.313.610,00
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan				
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	10 Orang	0,00
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1Layanan	1 Layanan	21.609.448,00

	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	30 Orang	11.975.184,00
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	9.634.264,00
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	100 %	477.690.881,00
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100 %	477.690.881,00
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60000 Keluarga	60000 Keluarga	42.992.949,00
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60243 Keluarga	60000 Keluarga	434.697.932,00

5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 %	100 %	316.689.553,00
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	15Layanan	15 Layanan	44.394.073,00
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2160 Orang	2160 Orang	44.394.073,00
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1Layanan	1 Layanan	272.295.480,00
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	27 Orang	272.295.480,00
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten	100 %	100 %	19.444.800,00
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Direhabilitasi dan Terpelihara	1Unit	1 Unit	19.444.800,00

	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	19.444.800,00
									JUMLAH	5.091.033.097,00

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara top down akan tetapi juga dilakukan secara bottom up artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. Luwu tentunya perlu mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat selain program dan kegiatan yang telah di rumuskan oleh Dinas Sosial Kab. Luwu terkait rencana pencapaian target RPJMD Kab. Luwu dan Renstra Dinas Sosial Kab. Luwu tahun 2019-2024.

TABEL. 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

TAHUN 2025

DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**		**Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial**		
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		**Cakupan penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin**		
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Luwu	Jumlah mahasiswa pra sejahtera yang mendapatkan bantuan penyelesaian study	60000 Keluarga	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejateraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
b. Ketelantaran, yaitu pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidak mampuan sosial ekonomi, dan pengabdian terhadap tugas dan tanggungjawab;
c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
d. Keterpencilan, yaitu isolalsi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sukar terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;
e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidak berhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religious, rekreasi dan pendididikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mnegalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi membahayakan dirinya sehingga menyebabkan funsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi :

a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
b. Jaminan Sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
c. Pemberdayaan Sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Sosial tahun 2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif dan Responsif
2. Meningkatkan pemenuhan hak sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban Bencana Alam dan Sosial.

Sasaran yang ingin dicapai sesuai Renstra Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Pelayanan dan Pemberdayaan PMKS dan KAT
3. Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Tabel. 3.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : *KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI*			
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel **Misi 9 : Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik;** **Misi 10 : Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana**			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif dan Responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM aparatur
			Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatkan pemenuhan hak sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban Bencana Alam dan Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Pemberdayaan PMKS dan KAT	Memantapkan Kebutuhan kualitas hidup dan akses bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan public, dan jaminan kesejahteraan social serta peningkatan pemberdayaan bagi PMKS dan KAT	Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan public dan jaminan kesejahteraan sosial
			Peningkatan Pemberdayaan bagi PMKS dan KAT
	Memenuhi kebutuhan dasar korban bencana sosial	Memantapkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas dan Kualitas SDM Tagana
			Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana

Tabel. 3.2

Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab serta Lokasi

Renja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	*Definisi Operasional*	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif dan Responsif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**(jumlah unit kerja internal yang terlayani/total unit kerja) x 100**	**Sekretariat**	**Belopa**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evakuasi Kinerja**		Sub. Program	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencaan perangkat daerah**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun			Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun			Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	-		Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	-		Belopa
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Belopa
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan**		Sub. Keuangan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN			Belopa
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi			Belopa
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	Bahan tanggapan pemeriksaan			Belopa

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	*Definisi Operasional*	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Tanggapan Pemeriksaan	yang dikelola dan disiapkan			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun			Belopa
		Administrasi Barang Milik Daerah	**Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD**		Sub. Kepegawaian	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah			Belopa
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian**		Sub. Kepegawaian	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			Belopa
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi perangkat umum perangkat daerah**		Sub Kepegawaian	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah langganan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Belopa
		Penyedian Bahan/Material	Jumlah bahan material kebutuhan kantor yang disediakan			Belopa

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	*Definisi Operasional*	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan makan dan minum yang disediakan			Belopa
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah	**Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang disediakan jasa			Belopa
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik			Belopa
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor			Belopa
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dan disediakan jasa pajak dan perizinannya			Belopa
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala			Belopa
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara			Belopa
Meningkatkan pemenuhan hak Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban Bencana Alam dan Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Pemberdayaan PMKS dan KAT	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan**			
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	*Definisi Operasional*	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang menerima jasa			Kab. Luwu
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan LK3			Kab. Luwu
		Program Penaganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	**Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang telah tertangani**			
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi Kabupate/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal di Daerah Kabupaten dari Titik Debarkasi			
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di Pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya ke desa/kelurahan asal dari titik debarkasi			Kab. Luwu
		Program Rehabilitasi Sosial	**Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani**			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	Jumlah Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial			
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak terlantar, Disabilitas dan Lansia terlantar luar panti yang menerima bantuan permakanan			Kab. Luwu

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	*Definisi Operasional*	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang meneri Alat Bantu			Kab. Luwu
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia yang diReunifikasi dengan Keluarga			Kab. Luwu
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disablitas yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan spiritual			Kab. Luwu
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah penyandang disabilitas, lanjut usia telantar yang mendapatkan layanan data dan pengaduan			Kab. Luwu
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi			
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah sosialisasi NAPZA yang dilaksanakan			Kab. Luwu
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**			
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin			
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan pengelolaan data fakir miskinnya			Kab. Luwu
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan fasilitasi bantuan PKH dan			Kab. Luwu

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	*Definisi Operasional*	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
			Sembako Pangan			
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**Cakupan penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten**			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten**			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Luas TMP yang dipelihara			Kab. Luwu
	Memenuhi kebutuhan dasar korban bencana sosial	**Program Penanganan Bencana**	**Cakupan penyelenggaraan penanganan bencana lingkup kabupaten**			Kab. Luwu
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial			
		Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang disediakan kebutuhan makannya			Kab. Luwu
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana lingkup kabupaten			
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang aktif			Kab. Luwu

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Luwu Tahun 2025, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Luwu oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kab. Luwu Tahun 2025 dibagi 2 (dua) yaitu Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan Non-Urusan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
      6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
      4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD
   c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Dearah
      1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Penyediaan Bahan/Material
7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program dan Kegiatan Urusan Wajib

1. Program Pemberdayaan Sosial
a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan
a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

3. Program Rehabilitasi Sosial
a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1) Penyediaan Makanan
2) Penyediaan Alat Bantu
3) Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga
4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
5) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
   1) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
   a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
      1) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
5. Program Penaganan Bencana
   a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
      1) Penyediaan Makanan
   b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
      1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
6. Program Pengelolaann Taman Makam Pahlawan
   a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
      1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Selatan sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penger ahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Beberapa program dan kegiatan perubahan serta pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
Renja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	8	9	11	12	13	15	16
						DINAS SOSIAL			5.091.033.097,00					5.135.600.000,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.091.033.097,00					5.135.600.000,00
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5.091.033.097,00					5.135.600.000,00
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	CAKUPAN KETERSEDIAAN PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	4.202.866.196,00				100%	4.283.900.000,00
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100 %	26.335.737,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	100%	34.300.000,00
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.955.292,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	3 Dokumen	20.000.000,00
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.327.160,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang	1 Dokumen	2.000.000,00

												Optimal		
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.327.160,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1 Dokumen	1.500.000,00
	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.095.010,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1 Dokumen	1.500.000,00
	1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.077.155,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1 Dokumen	1.500.000,00
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	7.553.960,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	2 Laporan	7.800.000,00
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	100 %	3.348.566.621,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	100%	3.357.900.000,00
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/ bulan	3.190.958.297,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	336 Orang/bulan	3.200.000.000,00

	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	153.960.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	4 Dokumen	154.000.000,00
	1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	1.067.494,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	3 Dokumen	1.200.000,00
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	2.580.830,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	14 Laporan	2.700.000,00
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	100 %	9.610.060,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	100%	7.000.000,00
	1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	9.610.060,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	2 Laporan	7.000.000,00
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00		-	-	-	0,00
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

							0	0 0	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		0,00
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	250.348.105,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	100%	288.500.000,00
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1.256.084,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	9 Paket	1.500.000,00
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	14.310.450,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	5 Paket	80.000.000,00
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.502.150,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	12 Paket	6.000.000,00
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1.751.592,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	4 Paket	2.500.000,00
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	14.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	12 Dokumen	14.500.000,00

	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	22.980.721,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	6 Paket	22.500.000,00
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	1.250.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	3 Laporan	1.500.000,00
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	188.897.108,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	90 Laporan	160.000.000,00
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan Jasa	100 %	256.435.261,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	100%	276.200.000,00
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	14.357.520,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1500 Laporan	14.500.000,00
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.077.741,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	12 Laporan	80.500.000,00
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	372 Laporan	162.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	278 Laporan	681.200.000,00
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	311.570.412,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	100%	320.000.000,00
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	105.696.412,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	20 Unit	113.000.000,00
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	6.740.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	34 Unit	7.000.000,00
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.134.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1 Unit	200.000.000,00
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial kabupaten	100 %	18.187.632,00				100 %	20.700.000,00
	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan KAT yag Memperoleh Pemberdayan Sosial dalam Lingkup Kabupaten/Kota	1 Komunitas	1.045.526,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1Komunitas	1.200.000,00

	1	06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT								
							Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keluarga	1.045.526,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1 Keluarga	1.200.000,00
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	2 PSKS	17.142.106,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	2PSKS	19.500.000,00
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	6.150.166,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	22 Orang	7.000.000,00
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)								
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan	20 Sertifikat	10.991.940,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	20 Sertifikat	12.500.000,00
							Kabupaten/Kota							
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100 %	56.154.035,00				100 %	83.000.000,00

	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	4 Layanan	34.544.587,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	4Layanan	42.000.000,00
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	6.084.554,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	10 Orang	10.500.000,00
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	2.146.423,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	50 Orang	15.500.000,00
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	26.313.610,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	25 Orang	5.500.000,00
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan								
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	25 Orang	10.500.000,00

	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1 Layanan	21.609.448,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1Layanan	41.000.000,00
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA								
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	11.975.184,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	50 Orang	25.500.000,00
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	9.634.264,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	2 Dokumen	15.500.000,00
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	477.690.881,00				100 %	484.000.000,00
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	477.690.881,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	100%	484.000.000,00
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								

							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60000 Keluarga	42.992.949,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	60000 Keluarga	43.000.000,00
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga								
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60000 Keluarga	434.697.932,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	60243 Keluarga	441.000.000,00
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 %	316.689.553,00				100 %	242.500.000,00
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	15 Layanan	44.394.073,00		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	15Layanan	45.500.000,00
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2160 Orang	44.394.073,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	2160 Orang	45.500.000,00
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 Layanan	272.295.480,00		-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1Layanan	197.000.000,00
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana								

							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	272.295.480,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	27 Orang	197.000.000,00
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan taman mekam pahlawan nasional kabupaten	100 %	19.444.800,00				100 %	21.500.000,00
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Direhabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	19.444.800,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1Unit	21.500.000,00
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	19.444.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	1 Makam	21.500.000,00
								JUMLAH	**5.091.033.097,00**					**5.135.600.000,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja Dinas Sosial tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomi untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang yang tidak terlepas dari rencana strategi OPD tahun 2019 – 2024 dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tingkat kecamatan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap stakeholders (Pihak yang terkait dan berkepentingan) di Dinas Sosial. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja), maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan terkecuali jika ada kegiatan yang sifatnya mendesak dan sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan akhir organisasi.
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang dibuat.
4. Pengevaluasi, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian kinerja seluruh aparat.

Semoga Renja Dinas Sosial Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025, dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Aamiin.

Belopa, 2025
KEPALA DINAS SOSIAL

HJ. HASLIANA NURDIN, S.Pt., M.M
Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 196905121995032004

RENCANA KERJA

TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU

Kantor : Jalan. Sawerigading, Belopa Utara

Email : dishub.luwu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 beserta Sumber Dana Indikatif, Indikator dan Evaluasi Kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu serta tolak ukur dalam merealisasikan Rencana Kerja yang direncanakan. Selain itu juga dapat membuka informasi tentang Rencana Kerja Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan sekaligus menilai dan mengukur keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan pada setiap tahun anggaran.

Belopa, Agustus 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUWU

SUPRIADI, SH., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I/IVb
NIP : 19691231 199703 1 049

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29
2.3 Isu-Isu Penting Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu 33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 43
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 59

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 62
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 62
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 63
3.3 Program dan Kegiatan 64

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 65

BAB V PENUTUP 79

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 10

Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhungan Kabupaten Luwu 30

Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2025 44

Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 60

Tabel T-C. 33 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap 1 (satu) tahun.

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Luwu maka dalam pelaksanaan program- kegiatan yang telah menjadi prioritas daerah tersebut, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis. Salah satu tujuan Pembangunan Daerah Kab. Luwu sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten LuwuTahun 2025 - 2026 adalah :***"Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Permukiman".*** Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan daerah secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Pembangunan sektor transportasi merupakan bagian penting dan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi stratejik bagi pembangunan daerah Kabupaten Luwu. Tujuan diselenggarakannya pembangunan sektor transportasi adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan tujuan pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan jasa perhubungan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah (PD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RenjaPerangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Rencana StrategisPerangkat Daerah.

Keberadaan Rencana Kerja diharapkan menjadikan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu memiliki arah dan tujuan organisasi yang jelas. Hal ini mengingat bahwa Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang dijabarkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas. Perencanaan yang sistematik tersebut secara langsung akan mampu memandu antar Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu supaya dapat bertindak konsisten terhadap apa yang telah dituangkan dalam dokumen Renstranya.

Disamping itu, penyusunan dokumen ini juga tidak dapat dipisahkan dari apa yang menjadi tujuan akhir dari sistem transportasi nasional dan kewilayahan maupun keterkaitan bidang lainnya yang pada dasarnya untuk mewujudkan sistem transportasi yang handal, terpadu dan meningkatkan pelayanan prima terhadapmasyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar rujukan legalitas dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Undang-undang Nomor 30 Tahunn 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Daerah Kab. Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu; (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kab. Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7) ;
22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu; (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 146).
23. Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 25)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target dan pencapaianyang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun Anggaran;
2. Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan;
3. Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa satu tahun mendatang; dan
4. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah:

1 Menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun Anggaran;

2 Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Perhubungan antar bidang dan tingkat pemerintahan dalam pengelolaan transportasi darat, laut dan udara ;

3 Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan terhadap alokasi sumber daya dalam pembangunan transportasi darat, laut dan udara; dan

4 Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja Propinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dengan format tabel T – C.29.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisa pencapaian kinerja Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel T - C.30

2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

a. Sejauh mana kinerja pelayanan Perangkat Daerah danhal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
c. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah terhadap capaian program nasional
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
e. Formulasi isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang :

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilakukan
d. Melampirkan Tabel T – C.31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan priotitas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T – C.33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan sekaligus kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 s/d 2026. Mengingat Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah Tahun awal pelaksanaan Renstra periode Tahun 2025 s/d 2026, sehingga yang dievaluasi dalam Renja Tahun Anggaran 2025 ini adalah Renstra Periode 2019 s/d 2024. Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada hasil evaluasi rencana kerja. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan dilakukan melalui pengukuran kinerja kegiatan dan program yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Nilai SAKIP OPD	**BB**	**B**	**B**	**BB**	**B**	**BB**	**BB**	**BB**
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100**	**82**	**100**	**85**	**85**	**100**	**89**	**89**
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100

2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta perubhan Renstra dan Renja yang disusun	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	8 Dokumen	80
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	80
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	80
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	80
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Peyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	80
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4 Laporan	80
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	8 Laporan	80
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100	87	100	88	88	100	90	89

2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2.500 OB	984 OB	504 OB	497 OB	98	504 OB	1.488 OB	59
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4 Laporan	80
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	30 Laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100	6 laporan	18 laporan	60
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100	79	100	81	81	100	86	86
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 unit	13 unit	20 unit	11 unit	55	20 unit	44 unit	44
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	50 jenis	8 jenis	10 jenis	7 jenis	70	10 jenis	25 jenis	50
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu)tahun	10 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	6 jenis	60
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis/bahan Material kantor yang disediakan	80 jenis	10 jenis	16 jenis	12 jenis	75	16 jenis	48 jenis	45

2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	24	12	12	100	12	100	80
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	24	12	12	100	12	100	80
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	77	70	74	70	94	73	85	85
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	83	100	84	84	100	89	89
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyura	60 Laporan	24	12	12	100	12	100	80
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24	12	12	100	12	100	80
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24	12	12	100	12	100	80

2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	79	100	78	78	100	82	82
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	105 unit	21 unit	21 unit	15 unit	71	21 unit	57 unit	55
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	100	77	100	79	79	100	83	83
		Persentase kecamatan yang memiliki akses angkutan jalan	**77,27**	**41,23**	**65,87**	**43,64**	**65,6**	**68,18**	**45,6**	**59,01**
		Persentase pertumbuhan orang dan barang melalui terminal/dermaga/ pelabuhan udara	**10**	**2**	**5**	**2**	**40**	**5**	**2**	**60**
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Ratio konektivitas angkutan jalan	0,79	0,29	0,37	0,29	78,4	0,53	0,36	67,9
		V/C Ratio di jalan kabupaten	0,80	0,42	0,52	0,44	88	0,8	0,48	60
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di	Persentase pemasangan rambu-	23	15	20	17	85	21	17	81

	Jalan Kabupaten/Kota	rambu lalu lintas								
2.15.02.2.02.03	Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah jenis prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	27 jenis	4 jenis	7 jenis	5 jenis	72	6 jenis	15 jenis	56
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan terminal penumpang tipe C	100	0	80	0	0	80	25	25
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang dibangun	1 unit	0 unit	1 unit	0 unit	0	1 unit	1 unit	100
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100	65	80	68	85	100	78	82
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah jenis Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diadakan dan dipasang	8 jenis	1 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	5 jenis	62
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik pengawasan dan patroli keselamatan angkutan jalan	110 titik	22 titik	22 titik	22 titik	100	22 titik	66 titik	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola	1	1	1	1	100	1	1	100
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Cakupan penyelenggaraan pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan local	100	53	100	67	67	100	78	78
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan pelaksanaan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10 pelabuhan	10 pelabuhan	10 pelabuhan	10 pelabuhan	100	10 pelabuhan	10 pelabuhan	100

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang direncanakan. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA - P) Tahun 2023, total belanja Dinas Perhubungan Kab. Luwu sebesar Rp. 9.099.115.551,- yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp 5.877.510.482,-
2. Belanja Modal sebesar Rp 3.211.605.069,-

Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kab. Luwu Tahun 2023 sebesar Rp. 8.736.675.401,- atau mencapai 96,02 % dari anggaran Belanja Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 9.099.115.551,-. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari :

1. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp 5.706.413.957,- atau 99,8 % dari anggarannya sebesar Rp 5.877.510.482,-
2. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 3.030.261.444,- atau 94,4 % dari anggarannya sebesar Rp. 3.211.605.069,-

Dinas Perhubungan pada Tahun 2023 melaksanakan 3 (Tiga) Program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan serta 29 Sub Kegiatan. Adapun 3 Program tersebut yaitu : ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran.***

Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan telah dimuat dalam Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Perjanjian Target Kinerja Pimpinan Satuan Kerja yang akan dicapai Tahun 2023.

Adapun realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
ANGGARAN : Rp. 4.103.086.682,-
REALISASI : Rp. 4.048.663.107,-
SISA : Rp. 54.423.575,-

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**29.612.490,-**	**28.443.360,-**	**1.169.130,-**	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.212.300,-	7.744.020,-	468.280,-	2 dokumen perencanaan
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	3.615.000,-	3.555.000,-	60.000,-	1 dokumen RKA
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	1.950.000,-	1.925.000,-	25.000,-	1 dokumen perubahan RKA
d.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	5.732.000,-	5.616.540,-	115.460.-	1 dokumen DPA
e	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	4.720.000,-	4.515.000,-	205.000,-	1 dokumen perubahan DPA
f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.995.000,-	3.820.000,-	175.000,-	1 laporan capaian kinerja

g.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.388.190	1.267.800,-	120.390,-	2 dokumen evaluasi kinerja
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.139.267.412,-**	**3.106.015.516,-**	**33.251.896,-**	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.124.576.812,-	3.092.084.916	32.491.896,-	50 OB
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	8.825.200,-	8.110.200,-	715.000,-	1 laporan keuangan akhir tahun
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.865.400,-	5.820.400,-	45.000,-	6 laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**310.862.860,-**	**302.688.199,-**	**8.174.661,-**	
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.852.600,-	20.653.000,-	199.600,-	20 Jenis
b.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.219.400,-	17.838.590,-	380.810,-	10 Jenis
c.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000,-	4.300.000,-	380.000,-	2 Jenis
d.	Penyediaan Bahan/Material	41.526.360,-	41.115.550,-	410.810,-	16 Jenis
e.	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.042.500,-	15.008.250,-	34.250,-	3 Jenis
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.542.000,-	203.772.809,-	6.769.191,-	23 OK

4.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**458.250.720,-**	**449.382.422,-**	**8.868.298,-**	
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.500.000,-	31.500.000,-	0,-	1.500 Surat
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	70.550.720,-	64.682.422,-	5.868.298,-	12 Bulan
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	356.200.000,-	353.200.000	3.000.000,-	24 OB
5.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntah Daerah**	**165.093.200,-**	**162.133.610,-**	**2.959.590,-**	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perisinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.093.200,-	162.133.610,-	2.959.590,-	17 Unit

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
ANGGARAN : Rp.4.942.029.369,-
REALISASI : Rp. 4.636.412.294,-
SISA : Rp. 305.617.075,-

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	
1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ kota**	**1.085.790.650,-**	**1.071.776.700,-**	**14.013.950,-**	
a.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.085.790.650,-	1.071.776.700,-	14.013.950,-	4 Jenis
2	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**1.842.971.319,-**	**1.662.115.400,-**	**180.855.919,-**	
a.	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	1.842.971.319,-	1.662.115.400,-	180.855.919,-	1 Unit
3.	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**159.483.650,-**	**150.933.150,-**	**8.550.500,-**	
a.	Penyediaan Sarana dan Prasana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15.000.000,-	14.517.100,-	482.900,-	2 Unit
b.	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaran Bermotor	87.483.650,-	86.416.050,-	1.067.600,-	1400 Unit
c.	Penyediaan Bukti Lulus Uji PengujianBerkala Kendaran Bermotor	45.000.000,-	45.000.000,-	0,-	1.400 Lembar

d.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.000.000,-	5.000.000,-	7.000.000,-	2 Unit
4	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**1.853.783.750,-**	**1.751.587.044,-**	**102.196.706,-**	
a.	Pengadaan ,Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas	1.360.288.750,-	1.349.846.044,-	10.442.706,-	1 Jenis
b.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	493.495.000,-	401.741.000,-	91.754.000,-	22 Titik

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM : Pengelolaan pelayaran
ANGGARAN : Rp 53.999.500,-
REALISASI : Rp. 51.600.000,-
SISA : Rp. 2.399.500,-

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	
1	**Pembangunan. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpang Lokal**	**53.999.500,-**	**51.600.000,-**	**2.399.500,-**	
a.	Pengawasan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpang Lokal	53.999.500,-	51.600.000,-	2.399.500,-	10 Laporan pelabuhan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp 4.103.086.682,- dan terealisasi sebesar Rp 4.048.663.107,- sisa sebesar Rp 54.423.575,- atau sebesar 98,67 %.

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 29.612.490,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.443.360,- atau sebesar 96,05 %

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 8.212.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.774.020,- atau sebesar 94,30%
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.615.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.555.000,- atau sebesar 98,34 %
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.925.000,- atau sebesar 98,72 %
d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.732.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.616.540,- atau sebesar 97,99 %
e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 4.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.515.000,- atau sebesar 95,66 %
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.995.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.820.000,- atau sebesar 95,62 %
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.388190,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.267.800,- atau sebesar 91,33 %

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.139.267.412,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.106.015.516,- atau sebesar 98,94 %

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.124.576.812,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.092.084.916,- atau sebesar 98,96 %
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, alokasi anggaran sebesar Rp. 8.825.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.110.200- atau sebesar 91.90 %
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.865.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.820.400,- atau sebesar 99,23 %

3. ***Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 364.672.927,- dan terealisasi sebesar Rp. 361.993.523,- atau sebesar 99,2 %***

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 20.852.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.653.000,- atau sebesar 99,04 %

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, alokasi anggaran sebesar Rp. 18.219.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.838.590,- atau sebesar 97,91 %

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 4.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.300.000,- atau sebesar 91,88 %

d. Penyediaan Bahan/Material, alokasi anggaran sebesar Rp. 41.526.360,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.115.550,- atau sebesar 99,01 %

e. Fasilitas Kunjungan Tamu, alokasi anggaran sebesar Rp. 15.042.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.008.250,- atau sebesar 99,77 %

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 210.542.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 203.772.809,- atau sebesar 98,78 %

4. ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 458.250.720,- dan terealisasi sebesar Rp. 449.382.422,- atau sebesar 99,06 %***

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi anggaran sebesar Rp. 31.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.500.000,- atau sebesar 100 %

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi anggaran sebesar Rp 70.550.720,- dan terealisasi Rp 64.682.422,- atau sebesar 91,68 %

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 356.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 353.200.000,- atau sebesar 99,16 %

5. ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp 165.093.200,- dan terealisasi Rp 162.133.610,- atau sebesar 98,21 %***

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi anggaran sebesar Rp 165.093.200,- dan terealisasi Rp. 162.133.610,- atau sebesar 98,21%

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), alokasi anggaran sebesar Rp 4.942.029.369,- dan terealisasi Rp 4.636.412.294,- atau sebesar 93,82 % :

1. ***Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.085.790.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.071.776.700,- atau sebesar 98,71 %***

a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.085.790.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.071.776.700,- atau sebesar 98,71 %

2. ***Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.842.971.319,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.662.115.400,- atau sebesar 90,19%***

a. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.842.971.319,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.662.115.400,- atau sebesar 90,19 %

3. ***Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, alokasi anggaran sebesar Rp. 159.483.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 150.993.150,- atau sebesar 94,64 %***

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.517.100,- atau sebesar 96,78 %

b. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor, alokasi anggaran sebesar Rp. 87.483.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.416.050,- atau sebesar 98,78%

c. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, alokasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.000.000,- atau sebesar 100 %

d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar 41,67 %

4. ***Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.853.783.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.751.587.044,- atau sebesar 94,49 %***

a. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.360.288.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.349.846.044,- atau sebesar 99,23 %

b. Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 493.495.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 401.741.000,- atau sebesar 81,41 %

C. Program Pengelolaan Pelayaran, alokasi anggaran sebesar Rp. 53.999.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.600.000,- atau sebesar 95,56 %

1. Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, alokasi anggaran sebesar Rp. 53.999.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.600.000,- atau sebesar 95,56 %

a. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, alokasi anggaran sebesar Rp. 53.999.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.600.000,- atau sebesar 95,56 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran capaian pelayanan kinerja Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada setiap indikator kinerja. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu sejauh ini untuk realisasi capaian kinerja hampir keseluruhan dapat terlaksana tetapi ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Kurang matangnya pada perencanaan awal anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi seperti yang diharapkan. Untuk mengatasi hal – hal dimaksud dilakukan pembinaan dan membuat rencana aksi sekaligus time schedule dan rencana biaya tiap kegiatan.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segi retribusi belum mencapai target yang diharapakan, hal ini disebabkan belum terbitnya Peraturan Bupati tentang Pemungutan Retribusi di Tepi Jalan Umum dan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Kurangnya etos kerja dan semangat kerja dari beberapa aparatur yang menyebabkan tidak selesainya target yang diharapkan

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja perangkat daerah, yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing-masing, dengan format tabel T-C.30

Tabel T-C.30

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	13
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum, Pesawat Udara	Orang		695.000	411.055	595.000	642.000	433.908	444.755	444.765	455.874	
2	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Lembar		1.550	1.620	1.710	1.850	45	0	50	50	
3	Jumlah penduduk	Orang		400.000	420.000	440.000	450.000	364.680	365.608	378.500	395.500	
4	Rasio Ijin Trayek			0,004	0,004	0,004	0,004	0,001	0,001	0,001	0,001	2/3
5	Jumlah pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit		1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/0	1/1/0	1/1/1	1/1/1	
6	Jumlah angkutan darat	Unit		4.000	4.500	5.000	5.200	2.052	2.924	5.500	6.000	
7	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang		411.055	595.000	642.000	643.000	0	0	225.000	227.000	
8	Persentase layanan angkutan darat	%		0,156	0,11	0,101	0,101	0	0	0,002	0,002	6/7
9	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	Unit		45	48	55	57	0	0	150	165	

10	Jumlah angkutan umum	Unit		4.000	4.500	5.000	5.200	2.052	2.924	5.500	6.000	
11	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%		0,009	0,009	0,009	0,009	0	0	0,041	0,045	9/10
12	Jumlah pemasangan rambu-rambu	Unit		650	700	800	850	300	25	600	650	
13	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya ada	Unit		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
14	Pemasangan Rambu-Rambu			28	30	35	36	20	13	26	28	12/13
15	Panjang jalan	Km		3.250	3.350	3.480	3.540	2..948	2.948,24	3.312	3.444	
16	Jumlah kendaraan	Unit		64.000	64.500	65.000	68.000	76.817	81.206	95.000	96.000	
17	Ratio panjang jalan per jumlah kendaraan			0,051	0,052	0,054	0,052	0,038	0,036	0,035	0,035	15/16
18	Jumlah orang yang terangkut melalui dermaga, terminal, bandara	Orang		680.000	550,000	600,000	650,000	45.658	15.815	21.500	25.100	
19	Jumlah barang yang terangkut melalui dermaga, terminal, bandara	Ton		695	450	500	530	589	186	200	300	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Tahun 2024

Dari tabel Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Luwu berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran beserta indikatornya sebagai berikut :

1. Jumlah penumpang angkutan umum

   Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah penumpang angkutan umum tidak mencapai target yang diinginkan. Hal ini disebabkan terminal Belopa tidak berfungsi sejak tahun 2017 dan terminal bantu Karetan juga tidak dapat difungsikan sejak Bulan Juni Tahun 2019. Dimana untuk mengukur jumlah penumpang angkutan umum dilakukan di terminal
2. Ratio ijin trayek

   Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa realisasi ratio ijin trayek tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan aturan dari kementrian Perhubungan yang mengharuskan uji kalibrasi pada alat uji dan untuk mengambil ijin trayek tidak harus dilakukan di wilayah Kabupaten Luwu walaupun kendaraan tersebut terdaftar di wilayah Kabupaten Luwu.
3. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis

   Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan tidak adanya terminal penumpang di Kab. Luwu. Ke depan, perlu dibangun segera terminal penumpang yang refresentatif.
4. Jumlah angkutan darat

   Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa jumlah angkutan darat yang ada tidak mencapai target yang diharapakan. Hal ini disebabkan ekonomi masyarakat Kab. Luwu yang kurang baik ditambah harga-harga kendaraan yang semakin meningkat
5. Kepemilikan KIR angkutan umum

   Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa kepemilikan KIR angkutan umum tidak mencapai target yang diharapakan. Hal ini disebabkan aturan untuk pengujian kendaraan bermotor tidak harus di wilayah domisili.
6. Pemasangan rambu-rambu

   Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa pemasangan rambu-rambu tidak mencapai target yang diharapakan. Hal ini disebabkan luasnya daerah otonom Kabupaten Luwu dan kurangnya perhatian dari Pemerintah Pusat dalam hal rambu-rambu jalan daerah.

7. Ratio panjang jalan per jumlah kendaraan

   Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin banyak sehingga perlu alternative kendaraan massal guna menekan laju pertumbuhan kendaraan

8. Jumlah orang yang terangkut melalui dermaga, terminal, bandara

   Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa jumlah orang yang terangkut melalui dermaga, terminal, bandara tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan belum berfungsinya dermaga Taddette dan mahalnya harga tiket pesawat serta tidak adanya terminal penumpang untuk mencatat kedatangan dan keberangkatan penumpang bis.

9. Jumlah barang yang terangkut melalui dermaga, terminal, bandara

   Dari tabel T-C.30 dapat disimpulkan bahwa jumlah barang yang terangkut melalui dermaga, terminal, bandara tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan belum berfungsinya dermaga taddette dan mahalnya harga tiket pesawat serta tidak adanya terminal penumpang untuk mencatat kedatangan dan keberangkatan penumpang bis.

2.3. Isu – Isu Penting Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat pada masa yang akan datang. Ada 7 (tujuh) kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu: bersifat lintas sektor, bersifat lintas wilayah, dapat berupa fenomena atau persoalan nyata, berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan, berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda, dan potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan. Disamping itu, kondisi lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten, rencana tata ruang, rekomendasi KLHS dan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis.

Perumusan isu strategis tidak dipisahkan dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, mengingat perannya sebagai dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan

daerah, dilakukan dengan melibatkan stakeholder kabupaten/kota dan provinsi Selanjutnya, hasil identifikasi terhadap isu strategis tersebut dilakukan scoring untuk menentukan isu strategis mana yang dipilih dengan menggunakan kriteria.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis regional, dan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Luwu, rekomendasi KLHS, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang perhubungan di Kabupaten Luwu. Dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, Dinas Perhubungan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang signifikan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan
4. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Dari kriteria tersebut, dengan dihubungkan kepada permasalahan pokok layanan di bidang perhubungan di Kabupaten Luwu yaitu mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah menjadi hal yang harus diwujudkan karena menjadi salah satu tolok ukur pelayanan dan penilaian kinerja pemerintah daerah. Dari telaahan visi dan misi P-RPJMD, capaian kinerja, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW dan KLHS, diperoleh isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu sebagai berikut:

a. Kesadaran masyarakat akan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi.
b. Pertumbuhan kendaraan yang tinggi akibat semakin baiknya perekonomian masyarakat dan semakin mudahnya dalam pembiayaan untuk memiliki kendaraan bermotor
c. Ketersediaan sarana prasarana yang mesti mengikuti perkembangan teknologi.
d. Pengembangan sarana angkutan umum masal (SAUM) yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi jumah kendaraan.
e. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
f. Kuantitas, kompetensi, disiplin dan paradigma aparatur masih jauh dari profesional, inovatif dan responsif.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Uraian pada bagian ini bersumber dari hasil analisis terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW Kabupaten Luwu, dan hasil analisis terhadap KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Berdasarkan sumber tersebut dirumuskan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirumuskan tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, yaitu sebagai berikut:

a. Kabupaten Luwu belum memiliki terminal sebagai pusat pelayanan angkutan penumpang (angkutan pedesaan dan perkotaan).
b. Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keselamatan di jalan raya serta pengembangan mobilitas angkutan orang dan barang.
c. Pertumbuhan panjang jalan yang memenuhi kriteria utuk dilengkapi sarana dan prasarana penunjang dan peningkatan Lalu lintan Harian Rata-rata (LHR) belum diikuti dengan penambahan anggaran yang memadai.
d. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang pelayaran sesuai kewenangan.
e. Penyesuaian kebijakan sehubungan dengan pesatnya perkembangan teknologi.
f. Kondisi geografis Kabupaten Luwu dalam meningkatkan konektifitas antar wilayah karena secara administratif terdapat 6 kecamatan dipisahkan oleh Kota Palopo.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Luwu
2. Adanya kewenangan untuk memungut berbagai retribusi daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan yang efektif dan efisien.
4. Posisi Kabupaten Luwu yang dilintasi jalan Trans Sulawesi.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut di atas, dapat dikemukakan jenis pelayanan, aktivitas yang dilakukan, arahan lokasi serta kelompok sasaran pengembangan layanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2024 mendatang.

Rencana Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu
Tahun 2025 - 2026

No,	Jenis Pelayanan	Aktivitas Pengembangan	Lokasi Pengembangan	Penerima Manfaat
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Data dan informasi pembangunan	- Perencanaan - Pelaksanaan - Pengawasan dan Evaluasi	Kabupaten Luwu	Pimpinan Pemerintahan Daerah
2.	Peningkatan kompetensi aparatur	- Bimtek - Pelatihan - Pendampingan/ pembelajaran	Kabupaten Luwu	Aparatur (struktural dan fungsional)
3.	Angkutan umum dalam wilayah Kabupaten Luwu	- Penyusunan regulasi - Sosialisasi - Penetapan tarif	Seluruh wilayah berdasarkan zona	Masyarakat Kabupaten Luwu
4.	Pengujian Kendaraan Bermotor	- Penyediaan sarana dan prasarana - Peningkatan SDM	Belopa	Masyarakat Kabupaten Luwu
5.	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	- Penyempurnaan regulasi - Sosialisasi - Penyediaan sarana dan prasarana	Seluruh wilayah berdasarkan potensi yang ada	Masyarakat Kabupaten Luwu
6.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	- Penyempurnaan regulasi - Sosialisasi - Penyediaan sarana dan prasarana	Seluruh wilayah berdasarkan potensi yang ada	Masyarakat Kabupaten Luwu
7.	Penyediaan sarana dan prasarana jalan	- Perencanaan - Pelaksanaan - Evaluasi	Seluruh wilayah berdasarkan kebutuhan	Masyarakat Kabupaten Luwu
8.	Penerangan Jalan Umum	- Perencanaan/Regulasi - Pelaksanaan - Evaluasi	Seluruh wilayah berdasarkan kebutuhan	Masyarakat Kabupaten Luwu

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kinerja perangkat daerah belum optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah	Kapasitas dan kapabilitas perangkat daerah masih kurang maksimal	Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi
		Kompetensi dan profesionalisme aparatur masih rendah
		Sarana dan prasarana yang belum memadai
		Ketersediaan dan pengelolaan data belum maksimal
	Penerimaan PAD dari sektor yang menjadi kewenangan perangkat daerah belum maksimal	Belum optimalnya pengelolaan potensi retribusi sesuai kewenangan yang ada
		Regulasi untuk memungut retribusi di berbagai sektor belum lengkap
		Pemungutan retribusi belum menggunakan basis data yang baik
		Masih lemahnya pembinaan dan pengendalian retribusi daerah
	Jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum semakin menurun	Belum tersedianya rute angkutan orang dan barang ke seluruh wilayah kecamatan
		Masih kurangnya fasilitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah
		Sarana dan prasarana angkutan laut belum dimanfaatkan secara maksimal
	Kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih tinggi	Kurangnya sarana dan prasarana jalan
		Kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk berkendara secara tertib dan teratur
		Kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pendekatan teknokratik. Oleh karena itu, setiap rumusan yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan harus menggunakan dalil-dalil ilmiah. Terkait dengan tabel di atas, secara teknokratik dapat dijelaskan bahwa rumusanmasalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi perangkat daerah.Sedangkan rumusan masalah merupakan beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Adapun akah masalah adalah beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Dalam kerangka perencanaan, masalah pokok akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran, berbagai masalah yang dikemukakan akan dipecahkan melalui rumusan strategi, sedangkan akar masalah akan dipecahkan melalui arah kebijakan. Secara sederhana, pemetaan tersebut diatas adalah berdasarkan hasil apa yang diperoleh dan apa yang menyebabkan

perolehan tersebut, atau dengan kata lain apa yang dipicu dan apa yang memicu suatu kinerja.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masalah pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu adalah "kinerja perangkat daerah belum optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah". Masalah pokok tersebut di atas dapat dianlisis berdasarkan masalah dan akar masalah sebagai berikut:

1. Kapasitas dan kapabilitas perangkat daerah masih kurang maksimal.
   Kapasitas perangkat daerah dapat diukur berdasarkan struktur organisasi dan sarana prasarana yang tersedia. Sedangkan kapabilitas dapat diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dan anggaran yang tersedia untuk menjalankan roda organisasi. Masalah ini dipicu oleh berbagai akar masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi. Berbagai kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah kurangnya kehadiran pegawai secara tepat waktu maupun beraktivitas selama jam kerja, belum adanya ukuran kinerja harian, kurangnya pengetahuan yang mendasar tentang apa yang menjadi tugas dan apa yang merupakan fungsinya sehingga cenderung melaksanakan fungsi yang tidak termasuk tugasnya, masih kurang dilakukannya pengendalian dan pengawasan terhadap berbagai tugas dan fungsi perangkat daerah di jalan raya. Faktor penyebab dari kondisi ini adalah masih lemahnya pembinaan dan pengawasan terkait dengan kepegawaian terhadap aparatur.
   b. Kompetensi dan profesionalisme aparatur masih rendah. Berbagai kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah terbatasnya aparatur yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam perumusan konsep/kebijakan, pengolahan dan analisis data, kurangnya akuntabilitas, responsibilitas, dan disiplin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta belum tumbuhnya kebutuhan akan data dikalangan aparatur.
   c. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang masih dibawah 65%.
   d. Ketersediaan dan pengelolaan data belum maksimal. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah kurang update-nya data kinerja pada masing-masing unit kerja, aparatur belum memahami fungsi berbagai data yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, belum dilakukannya koordinasi dengan pihak eksternal secara baik dan teratur.

2. Penerimaan PAD dari sektor yang menjadi kewenangan perangkat daerah belum maksimal.

   Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk memungut retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum serta ijin tertentu. Berdasarkan data yang ada, kewenangan tersebut dirasakan belum maksimal dilaksanakan mengingat bahwa kontribusi dari pendapatan seluruh retribusi tersebut terhadap pendapatan daerah masih rendah. Masalah ini dipicu oleh beberapa akar masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

   a. Belum optimalnya pengelolaan potensi retribusi sesuai kewenangan yang ada. Berbagai kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah masih banyaknya tepi jalan umum yang memiliki potensi belum dikelola dan masih banyaknya tempat khusus parkir yang dapat dikelola selain pasar tradisional, belum maksimalnya retribusi dari pengujian kendaraan bermotor, belum dikelolanya retribusi terkait dengan berbagai ijin yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.
   b. Regulasi untuk memungut retribusi di berbagai sektor belum tersedia secara memadai. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah belum diaturnya secara lengkap pengelolaan retribusi disegala sektor yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.
   c. Pemungutan retribusi belum menggunakan basis data yang baik. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah belum optimalnya data terkait dengan potensi retribusi (parkir, PKB, ijin, tambat labuh kapal), sehingga inovasi untuk mengembangkan pengelolaan potensi retribusi belum tercipta.
   d. Masih lemahnya pembinaan dan pengendalian retribusi daerah. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah tarif retribusi yang tidak berubah sejak tahun 2011, masih banyaknya obyek retribusi yang berpotensi belum dikelola, dan masyarakat belum terlibat secara maksimal dalam pengelolaan potensi retribusi.

3. Jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum semakin menurun.

   Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat bahwa seharusnya pemerintah daerah semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan mobilisasi. Kurangnya pelayanan tersebut akan dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan kendaraan pribadi, yang mengakibatkan biaya yang lebih tinggi dalam perekonomian masyarakat. Masalah ini dipicu oleh beberapa akar masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

   a. Belum tersedianya rute angkutan orang dan barang ke seluruh wilayah kecamatan. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah angkutan kota yang dilaksanakan oleh masyarakat hanya terdapat 1 (satu) trayek, sedangkan

angkutan perintis baru melayani 2 (dua) trayek.

b. Masih kurangnya fasilitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah belum adanya terminal induk di Kabupaten Luwu.

c. Sarana dan prasarana angkutan laut belum dimanfaatkan secara maksimal. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah belum dimanfaatkan pelabuhan yang ada di Kabupaten Luwu untuk pelayaran.

4. Kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih tinggi.

Selama periode tahun 2016-2020, berdasarkan data yang tercatat pada Polres Luwu, terjadi sejumlah 1.380 kasus kecelakaan atau rata-rata sejumlah 276 kasus setiap tahun. Dari seluruh kasus kecelakaan tersebut korban meninggal dunia 257 orang atau rata-rata 51 orang pertahun, dengan ratio 0,00014. Artinya bahwa dari setiap 100.000 penduduk Kabupaten Luwu, terdapat 14 orang yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Masalah ini dipicu oleh beberapa akar masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kurangnya sarana dan prasarana jalan. Berbagai kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah masih rendahnya ketersediaan rambu, marka, traffic light diseluruh wilayah Kabupaten Luwu.

b. Kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk berkendara secara tertib dan teratur. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah kurangnya kepedulian masyarakat untuk menggunakan perlengkapan keselamatan, adanya balapan liar, dan lain-lain.

Kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan. Kelemahan yang menjadi alasan dari rumusan akar masalah ini adalah bahwa selama ini belum ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan sosialisasi keselamatan di jalan, pengawasan terhadap ketertiban di jalan secara teratur hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian (meskipun ada pihak lain hanya pada waktu-waktu tertentu).

Selanjutnya, berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan yang disajikan pada bagian sebelumnya, diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan, yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat

a. Kesadaran aparatur sebagai agen perubahan masih rendah sehingga cenderung pragmatis, kurang disiplin dan lambat dalam transformasi menuju aparatur yang profesional, inovatif dan rensponsif.

b. Pemahaman aparatur terhadap pentingnya perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang konsisten masih rendah sehingga kurang mampu merumuskan kebijakan dan kurang peka dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
c. Belum adanya *grand design* pengembangan pelayanan di bidang perhubungan.
d. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi untuk semua aktivitas.
e. Belum terlaksananya pembangunan terminal Belopa dan Walenrang.
f. Masih adanya kesulitan dalam pengembangan Pelabuhan Tadette untuk angkutan penyeberangan.

2. Faktor Pendorong
   a. Adanya dokumen Renstra Dinas Perhubungan yang disusun dengan baik dan selaras dengan RPJMD.
   b. Tingkat pendidikan sebagian besar PNS dilingkungan Dinas Perhubungan yang memenuhi syarat untuk ditingkatkan kompetensinya.
   c. Kewenangan untuk memungut retribusi daerah dapat dikembangkan secara berkelanjutan melalui inovasi dan kreativitas.
   d. Terdapat Bandara Bua dan Pelabuhan Taddette di Kabupaten Luwu yang dapat dikembangkan untuk mendukung mobilitas masyarakat.
   e. Kabupaten Luwu dilintasi jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
   f. Meningkatnya produktivitas di bidang pertanian merupakan peluang untuk pengembangan moda angkutan.

Kementrian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumen perencanaannya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat
2. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
3. Peningkatan kualitas operator/penyedia jasa di transportasi darat yang memiliki kualitas prima di dalam manajemen produksi;
4. Peningkatan daya saing pelayanan transportasi darat sehingga mampu berkompetisi dengan moda lainnya;
5. Pertumbuhan pembangunann transportasi darat yang merata dan berkelanjutan
6. Penciptaan pembangunan transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

Adapun sasaran Kementrian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu :

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan per-undang-undangan/regulatory reform) di bidang transportasi darat dalamrangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk ber-peranserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitasuntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu yaitu :

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat
2. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu. Faktor yang bisa menjadi penghambat adalah tingkat kesadaran operator kendaraan (khususnya angkutan umum) akanpentingnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan dalam dokumen perencanaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Mewujudkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur transportasi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatkan aksebilitas pengguna fasilitas transportasi bandara, pelabuhan dan terminal khususnya wanita, lanjut usia, anak-anak dan penyandang disabilitas
2. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi darat
3. Meningkatkan kualitas prasarana fasilitas keselamatan jalan
4. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi laut

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Peta Jalan (*road map*) Pembangunan Jangka Panjang baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota sudah disusun dalam dokumen perencanaan jangka panjang, dalam rangka untuk memperjelas arah pembangunan dalam kurun waktu dua puluh tahun. Pada RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 juga telah dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta jalan (*road map*) yang merupakan implemenatsi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan nasional, Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu dokumen perencanaan di atasnya. Oleh Karena itu pada penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021, juga dilakukam sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Prioritas pembangunan merupakan dasar dalam menentukan alokasi program/ kegiatan dengan kebutuhan indikatif secara umum untuk mendukung pencapaian target kinerja/sasaran tema RKPD Tahun 2021, yang selanjutnya menjadi pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021.

Rancangan Awal RKPD didasarkan pada analisis kebutuhan setiap perangkat Daerah. Namun demikian, pada tahap lebih lanjut dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap rancangan awal Perangkat Daerah melalui forum Perangkat Daerah/Forum Gabungan Perangkat Daerah dan musrembang kabupaten. Mendasar pada masukan-masukan dari berbagai pihak dan juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD. Dengan banyaknya kebutuhan akan anggaran biaya kegiatan, tidak seluruh rencana kegiatan dapat terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu dibuat skala prioritas untuk menentukan urutan program dan kegiatan.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERHUBUNGAN KAB. LUWU TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN			**11.816.907.952,00**						**16.284.160.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**11.816.907.952,00**						**16.284.160.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**11.816.907.952,00**						**16.284.160.000,00**	
1.	**2,15,01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	**4.813.814.145,00**						**5.352.160.000,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	43.805.096,00			Memperkua t Stabilitas Polhukham an Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	45.610.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	11.416.960,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.426.040,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	6.110.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	10.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian laporan administrasi keuangan secara tepat waktu*	100 %	3.670.452.063,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	4.019.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang/bulan	3.654.887.863,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.061.320,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukbank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	6 Laporan	7.502.880,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukbank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN dengan predikat kinerja baik*	100 %	28.816.560,00			Memperkua t Stabilitas Polhukbank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	6.616.560,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	22.200.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah*	100 %	373.006.255,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	517.650.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	10.965.150,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	10.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	8.017.538,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	8.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	13.028.970,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	16.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	7.960.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	15.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.000	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	43.540.597,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	54.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.500.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	281.003.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik*	70 %	24.573.087,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	24.573.087,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	512.940.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	530.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	46.297.400,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	109.372.600,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	357.270.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	375.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	160.222.084,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	168.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	142.885.684,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	142.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.310.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.026.400,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

2.	**2,15,02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***V/C Ratio di jalan kabupaten Rasio konektivitas angkutan jalan***	**0,8 undefined 0,37 Angka**	**6.950.362.457,00**						**10.882.000.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas*	40 %	4.130.811.930,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningk atan Pemb angunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata Perluasan Jangkauan dan Pemer ataan Insfra struktur Dasar	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	4.325.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan										
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	225 Unit	4.120.411.930,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Perluasan Jangkauan dan Pemer ataan Insfra struktur Dasar	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	4.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan										
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	15 Unit	10.400.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Perluasan Jangkauan dan Pemer ataan Insfra struktur Dasar	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Cakupan penyelenggaraan pengelolaan terminal penumpang Tipe C*	100 %	912.031.049,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05. Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an Perluasan Jangkauan dan Pemer ataan Insfra struktur Dasar	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.000	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang										
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	912.031.049,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	05. Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an Perluasan Jangkauan dan Pemer ataan Insfra struktur Dasar	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Cakupan penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	100 %	133.913.789,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Perluasan Jangkauan dan Pemer ataan Insfra struktur Dasar	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	245.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor										

			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1400 Unit	84.023.474,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK PENERANGAN JALAN	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Perluasan Jangkauan dan Pemer ataan Insfra struktur Dasar	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	25.005.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK PENERANGAN JALAN	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Perluasan Jangkauan dan Pemer ataan Insfra struktur Dasar	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	6 Unit	24.885.315,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK PENERANGAN JALAN	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Perluasan Jangkauan dan Pemer ataan Insfra struktur Dasar	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten*	80 %	1.759.149.739,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Perluasan Jangkauan dan Pemer ataan Insfra struktur Dasar	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	3.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.088.649.739,00	s	RETRIBUSI DAERAH	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Perluasan Jangkauan dan Pemer ataan Insfra struktur Dasar	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	1.050.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.001	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas										
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	7 Dokumen	670.500.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PAJAK DAERAH	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Perluasan Jangkauan dan Pemer ataan Insfra	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	2.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Cakupan penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota*	80 %	14.455.950,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningk atan Pemb angunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata Perluasan Jangkauan dan Pener ataan Insfra	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin											
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	14.455.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningk atan Pemb angunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata Perluasan Jangkauan dan Pener ataan Insfra	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2,15,03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola***	**1 jaringan lintas**	**52.731.350,00**						**50.000.000,00**	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Cakupan penyelenggaraan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal*	100 %	52.731.350,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningk atan Pemb angunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata Perluasan Jangkauan dan Pener ataan Insfra	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD, Daerah, Provinsi, Nasional)	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal											
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17	

			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelsbuhan Pengumpan Lokal	12 Laporan	52.731.350,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Peningk atan Pemb anguman infrastruktur yang berkualitas dan merata Perluasan Jangkauan dan Pemer ataan Insfra	Penunjang kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah (OPD), Daerah, Provinsi, Nasional)	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	JUMLAH				**11.816.907.952,00**						**16.284.160.000,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusul pemangku kepentingan, bagi dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan Kepala Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari Penelitian Lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
3. Sajian tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**				
	Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah jenis keselamatan transportasi darat yang terpasang		
	Pemasangan Warning Light	Kecamatan Bajo	Jumlah jenis keselamatan transportasi darat yang terpasang	1 Paket	Telah dimasukkan dalam Rancangan Awal 2025

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemasangan Traffic Light	Kecamatan Suli	Jumlah jenis keselamatan transportasi darat yang terpasang	1 Paket	Jalan yang diusulkan adalah jalan Negara sehingga menjadi kewenangan pusat. Telah ditindaklanjuti permohonan pemasangan tersebut ke Balai Besar Jalan dan Jembatan di Makassar
	Pemasangan Cermin Tikungan	Kecamatan Bajo Barat	Jumlah jenis keselamatan transportasi darat yang terpasang	6 Unit	Telah dimasukkan dalam Rancangan Awal Tahun 2025
	Meterisasi Kecamatan	Kecamatan Belopa Utara	Jumlah lampu penerangan jalan umum yang terpasang	7 Unit	Telah dimasukkan dalam Rancangan Awal Tahun 2025
	Meterisasi Kecamatan	Kecamatan Bua	Jumlah lampu penerangan jalan umum yang terpasang	10 Unit	Telah dimasukkan dalam Rancangan Awal Tahun 2025
	Pemeliharaan Lampu Jalan	Semua Kecamatan	Jumlah jenis pemeliharaan penerangan jalan umum yang disediakan	30 Jenis	Karena anggaran yang terbatas maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan skala prioritas

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bahwa urusan Perhubungan merupakan urusan wajib bukan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab. Luwu.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator- indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi tolak ukur keberhasilan Pembangunan Daerah selama 2 (dua) tahun

.Tujuan pertama (1) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 adalah "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih", dengan indikator "Indeks Reformasi Birokrasi". Tujuan tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan pemerintahan di bidang perhubungan ditujukan untuk menjadikan Tata Kelola Pemerintahn memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan;

yang didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel dan tujuan ke dua (2) adalah "Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan" dengan indikator "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup". Tujuan tersebut mengandung makna bahwa sejauh mana kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu. Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Berdasarkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan daerah, dengan indikator "Indeks pengelolaan keuangan daerah dan "Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten".
2. Mengurangi resiko dampak perubahan iklim, dengan indikator "Penurunan emisi gas rumah kaca".

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Rencana Kerja Tahunan ini merupakan tahapan pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kab. Luwu Tahun 2025 – 2026 yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang di tingkat Kecamatan dan di Tingkat Kabupaten serta sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten khususnya berkaitan dengan sektor pertanahan, dengan tujuan agar Rencana Kerja Tahun 2025 memberikan gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran yang akan dicapai serta perkiraan dana yang dibutuhkan dari program dan kegiatan tersebut.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Indikator Tujuan/ Sasaran Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
Mewujudkan pembangunan dan pelayanan yang inklusif untuk mendukung perekonomian dan pengembangan wilayah		Indeks kepuasan masyarakat atas layanan di bidang Perhubungan	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP PD oleh Inspektorat Kabupaten	B
		Pertumbuhan PAD dari sektor Perhubungan (%)	29,03
Mewujudkan pembangunan dan pelayanan yang inklusif untuk mendukung perekonomian dan pengembangan wilayah	Meningkatkan konektivitas wilayah	Persentase kecamatan yang memiliki akses angkutan umum (%)	68,18
		Persentase pertumbuhan orang dan barang melalui terminal/dermaga/pelabuhan udara	10,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Adapun jumlah program yang direncanakan untuk tahun 2025 sebanyak 3 (Tiga) Program dengan 13 (Tigabelas) Kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Sub Kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dana yang direncanakan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 12.673.545.094,-** dengan rincian :

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	: Rp	**45.803.096,00**
Administrasi Keuangan Daerah	: Rp	**5.366.298.646,00**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	: Rp	**30.676.560,00**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	: Rp	**367.801.927,00**
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	: Rp	**29.505.626,00**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	: Rp	**496.501.331,00**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	: Rp	**160.452.862,00**
Penyediaan Perlengkapan Jalan dijalan Kaupaten/ Kota	: Rp	**4.094.148.587,00**
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	: Rp	**988,018,761.00**
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	: Rp	**133.034.354,00**
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jala Kabupaten/ Kota	: Rp	**888.822.356,00**
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	: Rp	**19,751,950.00**
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengopersian Pelabuhan Pengumpan Lokal	: Rp	**52,729,038.00**
Jumlah kebutuhan Dana Belanja sebesar	:	**Rp 12.673.545.094,00**

1. Program Penujang Urusan Pemerintahahan Daerah Kabupaten/Kota :

Program ini merupakan program perangkat daerah yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi organisasi yang meliputui pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, penelitian, dan pengembangan.

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah

b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyusunan dokumen RKA-

c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD

d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyusunan dokumen DPA-SKPD

e. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan membiayai penyusunan perubahan dokumen DPA-SKPD

f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini dimaksudk untuk membiayai penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD

g. Evaluasi kinerja perangkat daerah

Kegiatan ini dimaksdkanudkan untuk membiayai penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai beban kerja

b. Koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan akhir tahun SKPD

c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulan/ triwulanan/ semesteran SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan penyusunan dokumen keuangan semesteran SKPD

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian

b. Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi

Kegiatan ini di maksudkan untuk memfasilitasi aparatur di lingkungan dinas perhubungan untuk mengikuti berbagai macam pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

b. Penyediaan bahan logistik kantor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyediaan bahan logistik kantor

c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiaya barang cetakan dan penggandaan

d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai surat kabar/majala, koran, leaffleat, brosour

e. Penyedian bahan/materai

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyediaan bahan/materai

f. Fasilitasi kunjungan tamu

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai kunjungan tamu di dinas perhubungan

g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi aparatur perangkat untuk mengikuti koordinasi dan konsultasai SKPD

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pengadaan peralatan dan pengadaan mesin lainnya

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai jasa upa kerja agendarais, arsiparis, aspri, caraka dan belanja perangko/ materai

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai belanja listrik, langganan internet dan pemeliharaan website kantor

c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai seluruh penyediaan jasa pelayanan aktivitas perkantoran Dinas Perhungan Kabupaten Luwu

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya, pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pemeliharaan kendaraan dinas, pembayaran pajak kendaraan dan jasa upah supir

b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya

c. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini merupakan program strategis perangkat daerah yang dimaksud untuk mewujudkan keselamatan pengguna jalan, angkutan umum dan memberikan pelayanan di jalan

2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota

a. Rehabilitas dan pemeliharaan prasarana jalan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyediaan perlengkapan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan di Kabupaten Luwu

b. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai listrik penerangan jalan umum dan pemeliharaan perlengkapan jalan

2.2. Pengololaan Terminal Penumpang Tipe C

a. Pembangunan gedung terminal

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pembangunan gedung terminal penumpang tipe c

2.3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a. Penyediaan sarana dan prasarana penguji berkala kendaraan bermotor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyediaan kelengkapan operasional alat penguji kendaraan bermotor

b. Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian laik jalan pada kendaraan penumpang dan kendaraan barang

c. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pengadaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor

d. Pemeliharaan sarana dan prasarana penguji berkala kendaraan bermotor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pemeliharaan sarana dan prasarana penguji berkala kendaraan bermotor

2.4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota

a. Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan, perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai sarana dan prasarana jalan Kabupaten Luwu seperti, traffic light, warning light, rambu rambu lalulintas, penerangan jalan, pembuatan workshop

b. Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/ kota

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai jasa upah petugas patroli, petugas pemungut retribusi dan kegiatan operasional lainnya yang berhubungan dengan bidang darat.

2.5 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi terkait hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini merupakan program untuk memberikan pelayanan kepada pengguna transfortasi laut melalui pembangunan pelabuhan pengumpan local dan pengawasan pengoprasian pelabuhan pengumpan lokal

b. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

a. Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi rasa aman, tertib, dan memantau aktivitas nelayan di laut dalam mencari ikan dengan menggunakan speed boat

Tabel 3.3.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2025

						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN TARGET PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET TAHUN 2025		PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU	
2	**15**					**URUSAN PERHUBUNGAN**				**12.673.545.094**		**16.284.160.000**	
2	**15**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100,00**	**%**	**6.497.040.048**	**100,00**	**5.352.160.000**	**Dinas Perhubungan**
2	***15***	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu***	***100,00***	**%**	**45.803.096**	***100,00***	**45.610.000**	
2	15	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	3	Dokumen	11,992,960	2	9.000.000	
2	15	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	8,426,040	1	3.615.000	
2	15	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	5,895,580	1	2.000.000	

2	15	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	7,127,260	1	5.732.000	
2	15	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	5,141,496	1	4.720.000	
2	15	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	4	Dokumen	7,219,760	2	3.000.000	
2	***15***	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu***	***100,00***	**%**	**5.366.298.646**	***100,00***	***3.222.648.897***	
2	15	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	504	OB	5,348,862,446	504	3.211.948.897	
2	15	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	Laporan	9,933,320	1	5.000.000	
2	15	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	6	Laporan	7,502,880	6	5.700.000	
2	***15***	***01***	***01***	***2.04***		***Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah***	***Persentase pendapatan dari retribusi daerah terhadap potensi retribusi yang dikelola perangkat daerah***				***90,00***	***84.519.400***	
2	15	01	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah				1	2.000.000	
2	15	01	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen kebijakan pengembangan retribusi daerah				1	11.600.000	
2	15	01	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan/jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah				5	56.554.250	

2	15	01	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi daerah yang dilakukan pendataan dan pendaftaran				2	12.365.150	
2	15	01	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Dokumen pengelolaan data retribusi daerah				1	2.000.000	
2	***15***	***01***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase ASN dengan predikat kinerja baik***	***100,00***	**%**	**30.676.560**	***100,00***	***133.700.000***	
2	15	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan				60	48.000.000	
2	15	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	Dokumen	8,476,560	1	2.000.000	
2	15	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				1	5.000.000	
2	15	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	4	orang	22,200,000	5	102.000.000	
2	***15***	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah***		**%**	**367.801.927,00**		***173.500.000***	
2	15	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang isediakan	3	Unit	10,965,150.00	8	2.500.000	
2	15	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	7	paket	8,017,538.00	12	12.000.000	
2	15	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	11	paket	7,819,270.00	10	13.000.000	

2	15	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	6	exp	7,950,000.00	6	5.000.000	
2	15	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	24	paket	43,546,969.00	12	21.000.000	
2	15	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan kunjungan tamu yang difasilitasi	12	bulan	8,500,000.00	66	10.000.000	
2	15	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	12	bulan	281,003,000.00	30	110.000.000	
2	***15***	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik***		***%***	**29,505,626**		***36.121.290***	
2	15	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	8	unit	29,505,626	4	36.121.290	
2	***15***	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		***%***	**496.501.331,00**		***535.500.000***	
2	15	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	12	Lap	28,498,731.00	60	31.500.000	
2	15	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12	Lap	109,592,600.00	12	141.000.000	
2	15	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	bulan	358,410,000.00	132	363.000.000	
2	***15***	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100,00***	%	**160.452.862,00**	***100,00***	***107.427.900***	

2	15	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	29	Unit	135,508,462.00	21	90.000.000	
2	15	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	10	unit/set	9,990,000.00	9	10.000.000	
2	15	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	1	Unit	14,954,400.00	19.500	7.427.900	
2	**15**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio konektivitas angkutan jalan**	**0,63**	**Angka**	**5.287.098.780**	**0,79**	**5.512.899.865**	**Dinas Perhubungan**
							V/C Ratio di Jalan kabupaten	**0,80**	**Angka**		**0,80**		
2	***15***	***01***	***02***	***2.01***		***Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota***						***305.000.000***	
2	15	01	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten				1	5.000.000	
2	***15***	***01***	***02***	***2.02***		***Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota***	***Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas***	***80,00***	***%***	**4.094.148.587**	***80,00***	***1.054.000.000***	
2	15	01	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah/Jenis prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	325	unit	1,077,322,001	59	129.000.000	
2	15	01	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah/Jenis perlengkapan jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	15	unit	3,016,826,586	7	910.000.000	
2	***15***	***01***	***02***	***2.03***		***Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C***	***Cakupan penyelenggaraan pengelolaan terminal penumpang Tipe C***			**988,018,761**		***1.706.683.865***	

2	15	01	02	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang dibangun	1	Unit	988,018,761			
2	***15***	***01***	***02***	***2.04***		***Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir***						***11.100.000***	
2	15	01	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten				10	11.100.000	
2	***15***	***01***	***02***	***2.05***		***Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***	***Jumlah uji kir angkutan umum***			**133.034.354,00**		***147.546.800***	
2	15	01	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan				1	25.000.000	
2	15	01	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1	50.000.000	
2	15	01	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji berkala	1.200	unit	72,623,474.00	1.200	75.550.000	
2	15	01	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	1.200	lembar	23,500,000.00	1.200	36.996.800	
2	15	01	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	5	unit	36,910,880.00	5	10.000.000	
2	***15***	***01***	***02***	***2.06***		***Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota***	***Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten***					***1.997.800.000***	

										888.822.356,00			
2	15	01	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diadakan dan dipasang	1	Unit	129,560,000.00	4	1.667.800.000	
2	15	01	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik pengawasan dan patroli keselamatan angkutan jalan	22	titik	759,262,356.00	22	330.000.000	
2	***15***	***01***	***02***	***2.07***		***Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota***				**19,751,950**		***3.569.200***	
2	15	01	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12	lapora n	19,751,950			
2	**15**	**01**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase jaringan lintas penyeberangan yang dikelola**	**80**	**%**	**52,729,038.00**	**1**	**380.930.750**	**Dinas Perhubungan**
2	***15***	***01***	***03***	***2.08***		***Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal***						***11.100.000***	
2	15	01	03	2.08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal				10	11.100.000	

2	***15***	***01***	***03***	***2.10***		***Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal***						***212.000.000***	
2	15	01	03	2.10	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan						
2	***15***	***01***	***03***	***2.12***		***Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal***				**52,729,038**		***157.830.750***	
2	15	01	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10	Pelabuhan	52,729,038	10	95.010.750	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan acuan kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program tahunan pemerintah daerah. Secara umum Renja Perangkat Daerah dapat menjawab 2 (dua) hal yang mendasar :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam 1 (satu) tahun
2. Langkah- langkah strategi yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Objektivitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi RKPD Pemerintah Kabupaten Luwu yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Dan antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu dimasa yang akan datang adalah melaksanakan Rencana Strategi Dinas Perhubungan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Sebagai upaya mewujudkan tercapainya Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu maka diperlukan adanya komitmen baik di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu maupun pihak yang terkait. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna pelaksanaan rencana kerja secara optimal.

Belopa, Agustus 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Luwu

SUPRIADI, SH,. MSi
Pangkat : Pembina Tk. I/IVb
NIP : 19691231 199703 1 049

PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN SULI BARAT

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Berkat, rahmat dan karunia-nya,sehingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suli Barat Tahun Anggaran 2024 telah dapat diselesaikan.

Renja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi Tujuan, Program Kerja, serta Kegiatan Kantor Kecamatan Suli barat. Selain itu juga, dibahas tentang cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin di capai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing-masing bidang yang membidangi tiap-tiap kegiatan.

Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangan, baik dari tata penulisan maupun muatan materinya, Namun demikian, Kami berharap, dengan Renja ini semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen, serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang tekah disepakati. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan Suli Barat dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara. Demikian Renja ini disajikan semoga bermanfaat.

Suli Barat, Agustus 2024
Camat Suli Barat

PEMERINTAH KECAMATAN SULI BARAT

SYAMSUDDING, S.Pd.,MM
Pkt : Pembina,IV/a
Nip : 19840607 200903 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Suli Barat Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Suli Barat 21

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Suli Barat 25

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 27

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 34

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 35

3.3. Program dan Kegiatan 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Indikator Kinerja 47

4.2. Dana Indikatif 49

4.3. Sumber Dana 52

BAB V PENUTUP **64**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perkiraan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Suli Barat Tahun 2024 12
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kec. Suli Barat Kab. Luwu s/d Tahun 2024 14
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Suli Barat Kabupaten Luwu 24
Tabel 2.4 Review Rancangan Awal RKPD Kab. Luwu Tahun 2025 29
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 32
Tabel 3.1 Sasaran, Tujuan dan Indikator 36
Tabel 3.2 Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kec. Suli Barat Kabupaten Luwu 42
Tabel 4.1 Dana Indikatif dan Sumber Dana Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Tahun 2025 53
Tabel 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Kec. Suli Barat Tahun 2025 55

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD 2

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses yang sitematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efesien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa failing to plan is planning to fail : gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

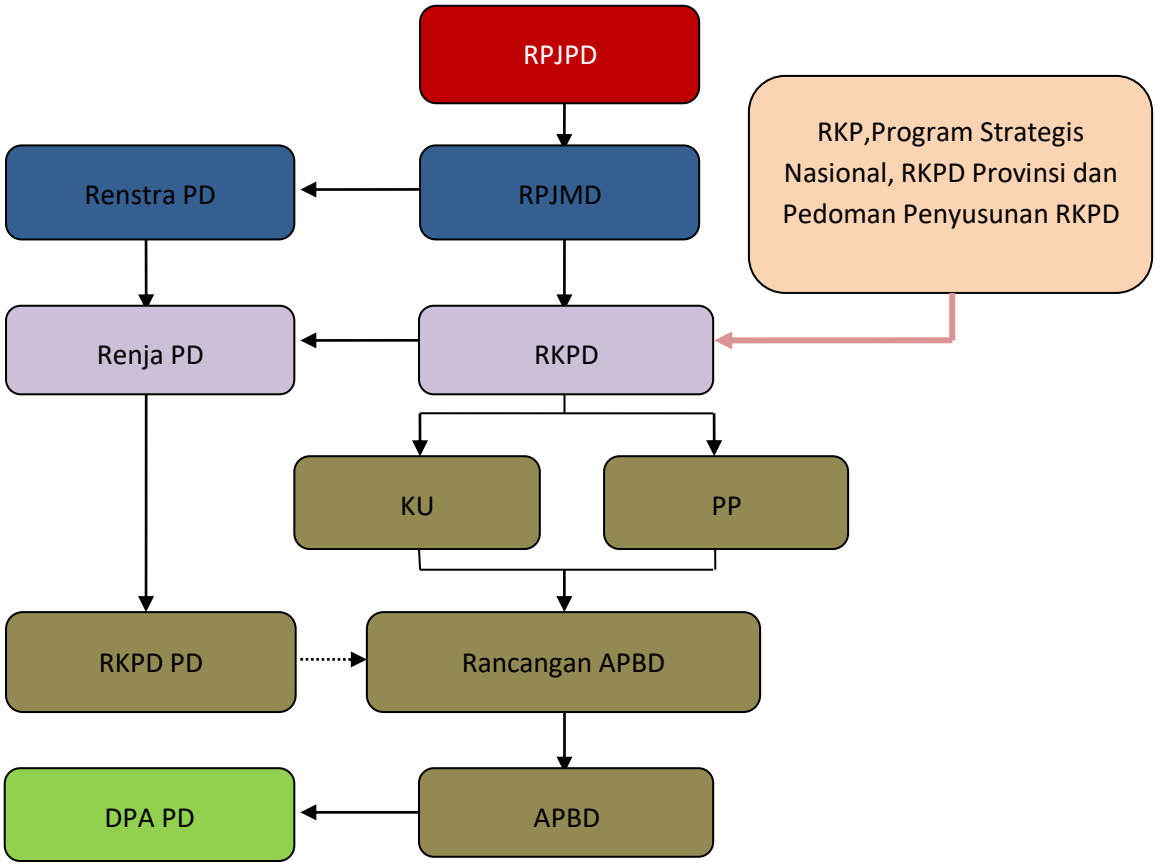
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah . Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan yakni : (1). Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, (2). Penyusunan Rancangan Awal renja

Perangkat Daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan, (3). Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Kepala tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD, (4). Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Form Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukkan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran, (5). Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD dan (6). Verfikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD di tetapkan.

Gambar 1.1 Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) Kecamatan Suli Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 57);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 155 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Luwu;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 139 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu;
21. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2024;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renja Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Tahun 2023 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Luwu di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusnan Renja Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu tahun 2025 adalah :

1. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Suli Barat dan RPJMD Kabupaten Luwu pada tahun 2025
3. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang urusan penunjang pemerintahan dan laporan kinerja.

Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Kecamatan tidak lagi sebagai wilayah administrasi sebagaimana kita kenal selama ini, akan tetapi Kecamatan mempunyai kedudukan sebagai Perangkat Daerah.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 di Kecamatan Suli Barat adalah :

a. Sebagai acuan Kecamatan Suli Barat dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Suli Barat dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu;
b. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Sulli Barat tahun 2025;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Suli Barat tahun 2025;
d. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Tahun 2024 sebagai berikut :

A. BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan rancana Renja yang terdiri dari :

1.1 *Latar Belakang,* menjelaskan secara singkat tentang penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Suli Barat Kabupeten Luwu Tahun 2025.

1.2 *Landasan Hukum,* menguraikan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dalam Negeri, Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 *Maksud dan Tujuan,* menjelaskan tentang pedoman dan acuan penyusunan Rancana Kerja Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Tahun 2025.

1.4 *Sistematika Penulisan,* adalah merupakan point-point penting dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Daerah.

B. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

Dalam bab ini memuat tentang :

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah,* merupakan review dari hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan serta dikaitan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, menjelaskan dan bagaimana menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja keberhasilan pelayanan Kecamatan Suli Barat sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Suli Barat.

2.3. *Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah,* menguraikan tentang :

1. *Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Suli Barat.*
2. *Permasalahan dan hambatan,* yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Suli Barat.
3. *Dampak,* terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian progam nasional/internasional, sepert NSPK, SPM dan SDGs.
4. *Tantangan dan peluang,* dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.
5. *Formulasi isu-isu penting,* berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. *Review terhadap Rancangan Awal RKPD,* menguraikan :

1. *Proses membandingkan,* antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. *Menjelaskan alasan*, proses membandingkan dilakukan.
3. *Menjelaskan temuan-temuan,* setelah proses-proses tersebut dan *catatan-catatan penting,* terhadap perbedaan.

2.5. *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,* menguriaikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Luwu yang berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provensi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Luwu.

C. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGAKAT DAERAH.

3.1. *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,* menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkaitdengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. *Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,* menjelaskan apa yang akan dicapai dalam jangka 1(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Luwu didasarkan pada isu-

isu dan analisis yang stratejik dengan hasil capaian yang nyata oleh instansi Pemerintahan.

3.3. Program dan Kegiatan, menjelaskan tentang :

1. *Faktor-faktor* yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. *Uraian garis besar* mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. *Penjelasan rumusan* program dan kgiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

D. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Memuat tentang :

4.1. Indikator kinerja, menjelaskan kegiatan berdasarkan kelompok-kelompok indikator serta evaluasi terhadap rencana kerja sehingga dapat digambarkan pencapaian kegiatan-kegiatannya.

4.2. Dana Indikatif, adalah besaran biaya untuk membiayai rencana program dan kegatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

4.3. *Sumber Dana*, menjelaskan tentang sumber dana penggunaan anggaran program dan kegiatan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Tahun 2025 yang akan digunakan.

E. BAB V PENUTUP.

Merupakan kesimpulan uraian penutup, berupa :

a. *Catatan penting* yang perlu mendapat perhatian penting, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. *Kaidah-kaidah pelaksanaan*, serta

c. *Rencana pelaksanaan tindakannya*.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi,review terhadap rancangan awal RKPD.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Suli Barat merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Suli Barat. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja disusun ataupun dibuat demi transparansinya pos-pos anggaran yang ada. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk pertanggunjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggunjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Adapun Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Suli Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
    - Perencanaan, Pengnggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
    - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
    - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    - Administrasi Umum Perangkat Daerah.
    - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
    - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
    - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
    - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
   - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
   - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Suli Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Suli Barat selama tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja digunakan sebagai dasar untuk melihat dan menilai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Suli Barat 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Pada Perangkat Daerah Kecamatan Suli Barat dalam pelaksanaan Renja 2023 tidak ada Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Pada Perangkat Daerah Kecamatan Suli Barat dalam pelaksanaan Renja 2023 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Suli Barat tidak ditemukan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
   a. Masih kurangnya pemahaman tentang program/kegiatan yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan.
   b. Sering terjadinya beberapa kegiatan diambl alih oleh perangkat daerah terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah kita rancang di Kecamatan/Kelurahan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah.
   c. Belum adanya penetapan program/kegiatan yang pasti, baik di Kecamatan/Kelurahan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

   Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra, Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Suli Barat adalah sebagai berikut :
   a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Suli Barat berdampak positif bagi kelancaran adminitrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Suli Barat pada umumnya.
   b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Suli Barat berdampak pada laporan realisasi keuangan Kecamatan Suli Barat.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
   a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
   b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan dan Desa.

Pada Tahun Anggaran 2023 program dan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dengan dana alokasi daerah (APBD) telah mencapai target sesuai perencanaan dengan realisasi sebesar 98.82%, dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi Tahun Anggaran 2024-2025, maka perlunya perkiraan realisasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2024, berikut tabel perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.1
PERKIRAAN REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SULI BARAT TAHUN 2024

NO.			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp..)	REALISASI ANGGARAN (Rp..)	REALISASI ANGGARAN (%)
1			2	3	4	5
1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**1,399,755,922**	**1,170,841,168**	**84**
	1		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah**	**238,000**	**238,000**	**100**
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	238,000	238,000	100
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
		4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0
		5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
	2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1,221,514,100**	**1,039,948,168**	**85**
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,180,714,100	1,016,218,168	86
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40,800,000	23,730,000	58
	3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6,120,000**	**3,500,000**	**57**
		6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,120,000	3,500,000	0
	6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**99,945,076**	**77,438,660**	**77**
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,104,000	1,104,000	100
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,050,000	22,050,000	88
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,900,000	900,000	13
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,665,760	5,788,760	67
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,923,740	1,915,340	49
		7	Penyediaan Bahan /Material	8,499,553	7,888,534	93
		8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,500,000	5,900,000	79
		9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,302,023	24,892,026	95
		11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12,000,000	7,000,000	58
	8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55,326,896**	**42,420,793**	**77**
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	4,500,000	75
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,326,896	8,420,793	68
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37,000,000	29,500,000	80
	9		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16,611,850**	**7,295,547**	**44**
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	16,611,850	7,295,547	44

NO.			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp..)	REALISASI ANGGARAN (Rp..)	REALISASI ANGGARAN (%)
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**7,500,000**	**7,500,000**	**100**
	1		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**7,500,000**	**7,500,000**	**100**
		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7,500,000	7,500,000	100
3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5,000,000**	**2,000,000**	**40**
	1		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**5,000,000**	**2,000,000**	**40**
		3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5,000,000	2,000,000	40
4			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**59,000,000**	**3,000,000**	**5**
	1		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**59,000,000**	**3,000,000**	**5**
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	59,000,000	3,000,000	5
Jumlah				**1,471,255,922**	**1,183,341,168**	**80**

NO.			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp..)	REALISASI ANGGARAN (Rp..)	REALISASI ANGGARAN (%)
1			**2**	**3**	**4**	**5**
3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**230,800,000**	**128,980,000**	**56**
	2		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**230,800,000**	**128,980,000**	**56**
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,000,000	41,780,000	42
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130,800,000	87,200,000	67
Jumlah				**230,800,000**	**128,980,000**	**56**

Tabel 2.2 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu s/d Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Taget Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		1	***XX***	***X***	***PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah***	***100%***	***88%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***75%***	***75%***
	2	***1***	***XX***	***X***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu***	***100%***	***44 %***	***100%***	***100%***	***83%***	***18%***	***67%***	***71%***
1	2	1	XX	X	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun,Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	*12*	4	2	2	100%	2	8	67%
2	2	1	XX	X	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	*5*	3	1	1	100%	0	4	80%
3	2	1	XX	X	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	*5*	3	1	1	100%	0	4	80%
4	2	1	XX	X	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	*5*	2	1	1	100%	0	3	60%
5	2	1	XX	X	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	*5*	3	1	1	100%	0	4	80%
7	2	1	XX	X	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun, Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	*25*	10	5	5	100%	0	15	60%
	2	***1***	***XX***	***X***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu***	***100%***	***30%***	***24%***	***24%***	***100%***	***100%***	***50%***	***50%***
1	2	1	XX	X	Penyediaan Gaji dan	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan	*60*	36	12	12	100%	12	60	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Taget Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Tunjangan ASN	tunjangan sesuai ketentuan								
3	2	1	XX	X	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa penatausahaan vertikal keuangan yang disediakan sesuai ketentuan	*60*	36	12	12	100%	12	60	100%
5	2	1	XX	X	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	*30*	0	0	0	0%	0	0	0%
6	2	1	XX	X	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	*30*	0	0	0	0%	0	0	0%
7	2	1	XX	X	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	*60*	0	0	0	0%	0	0	0%
	2	***1***	***XX***	***X***	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD***	***100%***	***55%***	***50%***	***50%***	***100%***	***50%***	***100%***	***100%***
5	2	1	XX	X	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan rekonsiliasi BMD yang disusun	5	0	0	0	0%	0	0	0%
6	2	1	XX	X	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Pengelolah BMD yang tidakmenghasilkan	60	36	12	12	100%	12	60	100%
	2	***1***	***XX***	***X***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase ASN dengan predikat kinerja baik***	***100%***	***0%***	***100***	***100***	***100%***	***0%***	***100%***	***100%***
1	2	1	XX	X	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	*2*	1	1	1	100%	0	2	100%
2	2	1	XX	X	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan,Jumlah pakaian Korpri yang diadakan yang diadakan	*105*	0	0	0	0%	0	0	0%
9	2	1	XX	X	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	*10*	0	0	0	0%	0	0	0%
11	2	1	XX	X	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	*10*	0	0	0	0%	0	0	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Taget Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	***1***	***XX***	***X***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah***	***100%***	***52%***	***16%***	***16%***	***100%***	***16%***	***84%***	***84%***
1	2	1	XX	X	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	*40*	24	0	0	0%	1	25	63%
2	2	1	XX	X	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	*41*	6	0	0	0%	2	8	20%
3	2	1	XX	X	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	*27*	17	0	0	0%	1	18	67%
4	2	1	XX	X	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	*50*	30	10	10	100%	10	50	100%
5	2	1	XX	X	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	*25*	16	6	6	100%	1	23	92%
6	2	1	XX	X	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	*120*	48	0	0	0%	0	48	40%
7	2	1	XX	X	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material Kebutuhan Kantor yang disediakan	*79*	46	15	15	100%	15	76	96%
8	2	1	XX	X	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	*10*	6	2	2	100%	2	10	100%
9	2	1	XX	X	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, Jumlah perjalanan dinas luar daerah	*435*	235	68	68	100%	28	331	76%
11	2	1	XX	X	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Eektronik pada SKPD	*48*	24	12	12	100%	12	48	100%
	2	***1***	***XX***	***X***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemrintahan daerah***	***100%***	***60%***	***20%***	***20%***	***100%***	***20%***	***100%***	***100%***
1	2	1	XX	X	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Kantor yang disediakan	*60*	36	12	12	100%	12	60	100%
2	2	1	XX	X	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	*60*	36	12	12	100%	12	60	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Taget Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	2	1	XX	X	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	*60*	36	12	12	100%	12	60	100%
	2	***1***	***XX***	***X***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100%***	***49%***	***5%***	***5%***	***100%***	***4%***	***58%***	***60%***
1	2	1	XX	X	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	*5*	3	1	1	100%	1	5	100%
2	2	1	XX	X	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	*20*	12	4	4	100%	4	20	100%
6	2	1	XX	X	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipeliharan	*15*	3	2	2	100%	0	5	33%
9	2	1	XX	X	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	*112*	0	0	0	0%	0	0	0%
9	2	1	XX	X	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	*112*	112	0	0	0%	0	112	100%
7	***1***	***2***			***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	***Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan***	***100%***	***25%***	***75%***	***25%***	***33%***	***25%***	***50%***	***50%***
7	***1***	***2***	***2***		***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan***	***100%***	***60%***	***20%***	***20%***	***100%***	***20%***	***100%***	***100%***
7	1	2	2	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	*5*	3	1	1	100%	1	5	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Taget Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
7	1	2	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	*60*	7	0	0	0%	0	7	12%
7	***1***	***3***			***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
7	***1***	***3***	***2***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa***	***100%***	***57%***	***18%***	***18%***	***100%***	***18%***	***100%***	***100%***
7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	*7*	3	2	2	0%	2	7	100%
7	1	3	2	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Laporan pelaksanaan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*7*	3	2	2	0%	2	7	100%
7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	*120*	72	24	24	100%	24	120	100%
7	***1***	***3***	***2***		***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	***Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan***	***100%***	***50%***	***25%***	***25%***	***100%***	***25%***	***100%***	***100%***
7	1	3	2	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	*1*	1	1	1	100%	1	1	100%
7	1	3	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	*46*	10	0	0	0%	0	10	22%
7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan	*1*	1	1	1	100%	1	1	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Taget Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						pemberdayaan masyarakat								
7	***1***	***4***			***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum***	***100%***	***33%***	***100%***	***0***	***0%***	***67%***	***67%***	***67%***
7	***1***	***4***	***2***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rupaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum***	***100%***	***78%***	***0***	***0***	***0%***	***0%***	***78%***	***78%***
7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan PPKM/pertemuan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	*56*	30	0	0	0%	0	30	54%
7	1	4	2	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	*4992*	3888	0	0	0%	0	3888	78%
7	***1***	***4***	***2***		***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada***	***Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada***	***100%***	***40%***	***0%***	***0%***	***0%***	***0%***	***40%***	***40%***
7	1	4	2	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	*5*	2	0	0	0%	0	2	40%
7	***1***	***5***			***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan***	***100%***	***34***	***33***	***33***	***100%***	***33***	***100***	***100%***
7	***1***	***5***	***2***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah***	***100%***	***34***	***33***	***33***	***100%***	***33***	***100***	***100%***

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Taget Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	5	2	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*3*	1	1	1	100%	1	3	100%
7	***1***	***6***			***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	***Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
7	***1***	***6***	***2***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
7	1	6	2	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*7*	7	7	7	100%	1	7	100%

Barat, Agustus 2024
Camat Suli

SYAMSUDDING, S.Pd.,MM
Pkt : Pembina, IV/a
Nip :19840607 200903 1 003

Berdasarkan tabel berikut diatas Sub Kegiatan yang direncanakan untuk Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik dengan besaran pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk Kecamatan Suli Barat, namun masih kurangnya program dan kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan kerana keterbatasan pagu anggaran.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Peningkatan kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja dan sasaran dilakukan melalui : penetapan indikator kinerja yaitu kuantitaf dan kualitatif yang mengambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcames), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan bersaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2016 bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat. Menurut Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2016 bahwa Camat mempunyai tugas pokok memimpin Kecamatan dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan dan Perekonomian, pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Suli Barat di Bidang Pemerintahan adalah sebagai berikut:
   a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Umum Kabupaten Luwu. Serta memfasilitasi keperluan panitia pemilihan Kepala Desa dalam pendanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

b. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak dan retribusi lainnya yang ada di wilayah Kecamatan.
c. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar Desa/Kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan.
d. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pengordinasian penataan Desa maupun Kelurahan melalui penyusunan peraturan yang ada.
e. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi aset daerah atau kekayaan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Suli Barat.
f. Memfasilitasi penyelesaian masalah sengketa tanah milik pemerintah dan daerah.

2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Suli Barat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :
   a. Memfasilitasi kerukunan hidup antar umat beragama.
   b. Melaksanakan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya.
   c. Menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah perseorangan atau kelompok.
   d. Memberikan rekomendasi izin keramaian dan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman.
   e. Memberikan rekomendasi dan pengawasan operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan.
   f. Berkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan kepolisian, tentara, pamong praja dan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama.

3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Suli Barat di Bidang Pembangunan. dan Perekonomian adalah sebagai berikut :
   a. Melakukan penyelenggaraan lomba atau penilaian Tingkat desa maupun Kelurahan di Kecamatan.
   b. Berkoordinasi penyelenggaraan pembangunan swadaya masyarakat.
   c. Memfasilitasi kegiatan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Suli Barat di Bidang Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

a. Memfasilitasi kegiatan UPTD yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
b. Pengelolaan administrasi kependudukan (KTP,Akte Kelahiran, Surat Nikah, dll).
c. Pengoordinasian dan memfasilitasi program RASTRA, bedah rumah, pengurusan Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin.
d. Pengoordinasian dan pengarahan BUMDesa Lingkup Kecamatan.

5. Kinerja Pelayanan Kecamatan Suli Barat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
   a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bidang pendidikan, generasi muda,olahraga, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.
   b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi dan masalah sosial.

Sebagai penjelasan umum pencapaian kinerja pelayanan tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Pembentukan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Luwu adalah:

1. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

2.2.1. Capaian kinerja Pelayanan

Analisis capaian kinerja pelayanan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di Tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih baik dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 2.3 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Suli Barat
Kabupaten Luwu

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP OPD			B	BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	
2	Indeks kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan			Baik	Baik	BB	BB	Baik	Baik	BB	BB	
3	Cakupan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase konflik yang tertangani di tingkat Kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai salah satu perangkat paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan merupakan perpanjang tangan dari Pemerintah Kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak Kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya peran Kecamatan belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Tugas dan fungsi Kecamatan Suli Barat dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah pelayanan terhadap masyarakat yang belum maksimal disebabkan lemahnya koordinasi antara Perangkat Desa maupun Kelurahan dengan Perangkat Kecamatan, Kurangnya alokasi anggaran untuk Kecamatan dan jumlah Aparatur yang masih kurang sehingga rendahnya kapasitas kelembagaan, jarak dan jaringan komunikasi yang belum memadai, belum terselenggaranya pengembangan inovasi di bidang pelayanan publik serta belum tersedianya SOP yang lengkap sesuai tugas dan fungsi. Untuk menjalankan tugas dan fungsi serta adanya pengalihan anggaran yang tidak diduga membuat kegiatan tidak berjalan sesuai kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah adanya paradigma baru dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, belum tersedianya sistem pengelolaan data yang dapat dihimpun secara terintegritas terukur bagi setiap jabatan, beragam sumber data dapat digunakan, belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan, pelayan publik masih belum optimal disebabkan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan Prasarana (Sarpras). Penggunaan aplikasi baru dan selalu berubah-ubah membuat tugas dan fungsi tidak dapat dipertanggunjawabkan dengan maksimal.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang.

Isu- Isu strategis di Kecamatan Suli Barat adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang menginginkan pelayanan administrasi kependudukan yang dekat dengan masyarakat, murah, mudah dan cepat. Karena jika dilaksanakan di Kabupaten jauh, biaya transportasi mahal, sangat sulit bagi mereka yang tidak memiliki sarana transportasi karena harus naik ojek yang biayanya mahal dan waktu pembuatannya yang lama. Apalagi jika jaringan internet tidak baik di Kabupaten dari Pusat mereka harus kembali lagi lain waktu, ini akan menyita waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit sementara sebenarnya untuk administrasi kependudukan sudah digratiskan oleh Pemerintah.
2. Pelayanan perbankkan dan kantor pos yang sangat diperlukan untuk membantu penyelesaian pertanggungjawaban terutama dalam bidang keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan perbankkan dalam penerimaan honor dan upah jasa, pembayaran pajak pembangunan belum bisa dirasakan mudah oleh masyarakat Kecamatan Suli Barat. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan perbankkan tersebut harus ke Kabupaten dengan ongkos yang cukup mahal. Sehingga honor yang diberikan Pemerintah untuk mensejahterakan para Guru Mengaji, Imam, Bilal dan Guru Sekolah minggu bahkan honorer, tidak dirasakan oleh masyarakat akibat biaya ojek yang mahal terutama pada daerah-daerah yang jaraknya cukup jauh seperti didaerah pergunungan yang ada di wilayah Kecamatan Suli Barat perlu rintangan dan tantangan untuk sampai ke tempat tujuan apalagi pada saat musim penghujan.
3. Jaringan telepon dan internet yang belum bisa dinikmati dengan maksimal oleh masyarakat Kecamatan Suli Barat dikarenakan jaringan masih terbatas terutama di 3 (tiga) Desa terpencil yang ada di Kecamatan Suli Barat, Selama ini masyarakat hanya mencari tempat-tempat tertentu demi mendapatkan jaringan internet. Pelayanan Pemerintah Kecamatan Suli Barat yang memerlukan jaringan telepon dan internet untuk aplikasi internet yang sekarang ini menjadi syarat mutlak bagi tiap pelaporan belum bisa dilaksanakan dengan maksimal.
4. Jalan poros untuk menuju ke Kabupaten masih terbatas kondisinya untuk beberapa Desa yang ada di Kecamatan Suli Barat yang masih berupa jalan tanah dan sebagian sudah ada yang di rabat namun terkendala pada saat musim penghujan kondisi tanah yang becek dan sebagian longsor sehingga akses jalan

itu sulit untuk dilalui. Diharapkan kiranya jalan poros tersebut dapat dibuatkan drainase yang baik dan dirabat agar transportasi antar Kecamatan dengan Kabupaten menjadi lancar. Sehingga Pelayanan Pemerintah Kecamatan Suli Barat yang memerlukan koordinasi ke Kabupaten Luwu tidak lagi terkendala akibat kondisi jalan yang tidak baik ini.

5. Adanya sarana wisata berupa air terjun dan panorama alam yang indah belum dikelola secara maksimal oleh masyarakat dan pemerintah. Sebenarnya jika ini dimanfaatkan secara maksimal akan dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat dan meningkatkan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
6. Masih adanya penambangan liar yang berupa galian C yang sewaktu-waktu dapat berdampak buruk untuk Kecamatan Suli Barat maupun Kecamatan diluar Suli Barat. Namun sampe saat ini Pemerintah Daerah belum memberikan tindakan keras untuk hal ini.

Upaya-upaya dalam meminimalisasi permasalahan, yang telah dilakukan Kecamatan Suli Barat antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM petugas layanan.
2. Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati Kepada camat.
3. Mengadakan pembinaan terhadap SDM perangkat Desa dalam peningkatan kinerja Pemerintah Desa;
4. Melaksanakan langkah-langkah koordinasi untuk keselarasan dan kesepahaman dalam pengambilan keputusan dengan Instansi Pemerintah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu tahun 2025 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2025 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2025 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kecamatan Suli Barat.

Pada rencana kerja tahun 2025 akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Luwu sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja tahun 2025. Berikut Tabel Review Terhadap Rancangan Renja Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Tabel 2.4 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Barat

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah***	**100 Persen**	**1,412,306,689**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah***	**100 Persen**	**1,685,536,602**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu*	100 persen	4,238,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu*	100 persen	8,476,700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu*	100 persen	1,238,106,690	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu*	100 persen	1,476,213,380	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi barang milik daerah secara tepat waktu*	100 persen	6,120,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi barang milik daerah secara tepat waktu*	100 persen	6,200,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal*	100 persen	66,792,522	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal*	100 persen	99,846,522	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan*	100 persen	76,299,477	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan*	100 persen	64,800,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
			kondisi baik pada Unit Kerja internal					*kondisi baik pada Unit Kerja internal*			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal*	100 persen	20,750,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal*	100 persen	30,000,000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		***Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan***	**100 Persen**	**7,500,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		***Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan***	**100 Persen**	**10,000,000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan*	100 persen	7,500,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan*	100 persen	10,000,000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	**100 Persen**	**2,500,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	**100 Persen**	**5,000,000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa*	100 Persen	2,500,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa*	100 Persen	5,000,000	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		***Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum***	**100 Persen**	**59,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		***Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum***	**100 Persen**	**60,180,000**	
	Penyelenggaraan Urusan	- Kab. Luwu, Suli	*Persentase Persentase*	100 Persen	59,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	- Kab. Luwu, Suli	*Persentase pelaksanaan*	100 Persen	60,180,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
	Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Barat, Lindajang	*penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah*			Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Barat, Lindajang	*koordinasi dalam rupaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang**	***Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Meningkatkan Akuntabilitas Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	**100 Persen**	**230,800,000.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang**	***Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Meningkatkan Akuntabilitas Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	**100 Persen**	**250,000,000.00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa*	100 Persen	230,800,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	*Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa*	100 Persen	250,000,000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan atau kajian usulan program/kegiatan masyarakat pada Perangkat Daerah Kecamatan Suli Barat yang tertuang pada musrenbang mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan Suli Barat dan Musrenbang Kabupaten Luwu oleh masyarakat melalui Pemangku Kepentingan baik Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita serta para Kepala Desa dan Kepala Sekolah juga oleh Kepala Kantor yang ada di Wilayah Kecamatan Suli Barat sesuai dengan kebutuhan yang amat mendesak. Namun semua ditujukan ke SKPD yang ada di Kabupaten Luwu. Tidak ada yang masuk dalam Program dan Kegiatan di Kecamatan Suli Barat.

Tabel 2.5 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA.2025
Kabupaten Luwu

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Pembangunan pintu pembagian air di Persawahan Saburang	Kelurahan Lindajang	Terpenuhinya pembagian air persawahan di Kel. Lindajang	1 unit	Dinas PUPR
2	Tanggul Pinggir Sungai Lingkungan Lindajang	Kelurahan Lindajang	Terpenuhinya infrastruktur pencegahan dan pengendalian aliran air sungai	400 m	Dinas PUPR
3	Pembangunan/Penigkatan Badan Jalan	Desa Kaladi Darussalalm	Tersedianya penunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	7 km	Dinas PUPR
4	Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Internet	Desa Kaladi Darussalalm	Tersedianya akses internnet	1 unit	Dinas Kominfo
5	Penguatan Tebing (talud) Dusun Salubanga	Desa Muhajirin	Terpenuhinya pencegahan longsior	500 m	Dinas PUPR
6	Rabat Beton Dusun Talla-Talla	Desa Muhajirin	Terpenuhinya kelayakan infrastruktur dan lingkungan permukiman	400 m	Dinas PUPR
7	Pembangunan Irigasi Kali Tallang	Desa Tallang	Tersedianya Pembuangan air masyarakat	1 km	Dinas PUPR
8	Pembangunan Drainase Dusun Pasang	Desa Tallang	Tersedianya Pembuangan air masyarakat	500 m	Dinas PUPR

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
9	Pengaspalan Dusun Pangi	Desa Poringan	Terehabilitasinya sarana dan prasarana Masyarakat	5 km	Dinas PUPR
10	Rabat Beton	Desa Poringan	Terpenuhinya kelayakan infrastruktur dan lingkungan permukiman	10 km	Dinas PUPR
11	Pengaspalan Jalan Poros Desa Kaili	Desa Kaili	Terpenuhinya kelayakan infrastruktur dan lingkungan permukiman	12 km	Dinas PUPR
12	Pembangunan Jembatan Beton Poros Kaili Salubua	Desa Kaili	Terehabilitasinya sarana dan prasarana Masyarakat	1 paket	Dinas PUPR
13	Pembangunan Drainase dan Paving Blok Lapangan Sepak Bola Buntu Barana	Desa Buntu Barana	Tersedianya Pembuangan air masyarakat	350 m	Dinas PUPR
14	Pembangunan Plat Dekker dan Jembatan Poros Suli Barat Dusun Lempo	Desa Buntu Barana	Terpenuhinya peningkatan kelancaran aliran air ke sungai	3 unit	Dinas PUPR
15	Pembangunan Bendungan Desa Salubua	Desa Salubua	Terpenuhinya kelayakan infrastruktur dan lingkungan permukiman	1 paket	Dinas PUPR
16	Pembangunan Drainase Dusun Mamara	Desa Salubua	Tersedianya Pembuangan air masyarakat	2 km	Dinas PUPR

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengandung penjelasan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan, sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Suli Barat guna menunjang Pembangunan Kabupaten Luwu secara Keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan Iklim usaha;
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
9. Kebudayaan;
10. Kreativitas dan inovasi;
11. Politik, hukum dan keamanan dan ketertiban;
12. Perekonomian;
13. Kesejahteraan rakyat.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Luwu sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Kecamatan Suli Barat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Luwu memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan, Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintahan Kecamatan, Kecamatan Suli Barat memiliki ruang lingkup tugas : melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-

tugas umum pemerintahan di Kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi-instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Suli Barat didalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Suli Barat yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Suli Barat telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1(satu) tahun sampai dengan 5(lima) tahunan. Tujuan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Suli Barat tahun 2025 adalah ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik dengan mengimplementasikan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu, sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa amanah transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja;
5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religius;
7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan;
9. Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia untuk mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif;
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- *Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih;*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk di capai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang di tetapkan adalah sebagai berikut:

- *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;*
- *Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Kecamatan;*

Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan, dan indikator dari tujuan dan sasaran diatas adalah:

- *Nilai Sakip;*
- *Nilai IKM atas layanan Kecamatan;*
- *Cakupan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan;*

Tabel 3.1
Tujuan,Sasaran da Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Nilai IKM atas layanan Kecamatan
	Meningkatka Kapasitas dan Kapabilitas Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang Sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, guna mencapai sasaran tertentu. Program diperlukan dalam proses menentukan jumlah Anggaran dan jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang memperhatikan azas efisiensi dan efektifitas.

Program Kecamatan Suli Barat pada Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, mewujudkan etos kerja aparatur dalam ruang lingkup Kecamatan Suli Barat, pembina aparatur tingkat Desa dalam tercapainya pelayanan prima, pembinaan aparatur tingkat Desa untuk mewujudkan keamanan serta kenyamanan wilayah Kecamatan Suli Barat.

Adapun Program-Program kerja yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Adapun kegiatan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Belanja Operasi, dan
2. Belanja Modal sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**
  a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
  d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;**
  a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

- **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;**
  a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
  b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
- **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;**
  a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;

Adapun Sub kegiatan dari Program dan Kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;**
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
   - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;**
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;**
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah;**
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   - Penyediaan Bahan/Material;
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;**
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;**
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
7. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;**
   - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
8. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;**
   - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan;
9. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;**
   - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
   - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
10. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**;
    - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

Kecamatan Suli Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Luwu sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi : i) Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; ii) Pembinaan ketentraman dan ketertiban; iii) Pembinaan pemberdayaan masyarakat; iv) Pembinaan kesejahteraan rakyat; v) Pembinaan pelayanan umum.

1. **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :**

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Suli Barat diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Suli Barat merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDGs.

Sustainable Development Goals (SDGs), Indonesia telah berhasil mengurangi kesenjagan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perluasan lapangan pekerjaan dan akses terhadap pendidikan, dan penguatan langkah-langkah pencegahan tanggap darurat dan ketahanan terhadap bencana.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan,dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Sehingga program dan kegiatan yang dirancang diarahkan untuk menciptakan kondisi dimana lebih memudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan,pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian NSBK dan SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliput penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh sebab itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Instrusi sesuai kebutuhan. Penyusunan program dan kegiatan di Kecamatan Suli Barat diarahkan untuk meningkatkan pencapaian *Norma, Standar, Prosedur , Kriteria* dan *Standar Pelayanan Minimal* yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Kantor dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah.

Kecamatan Suli Barat sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Luwu memiliki berbagai potensi ekonomi. Potensi itu terutama dibidang pertanian dan obyek wisata yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Suli Barat melalui penyusunan berbagai program dan kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- Jumlah Program, Jumlah kegiatan dan Jumlah Sub Kegiatan.

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Suli Barat Tahun 2025 adalah 4 (Empat) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan dari uraian diatas.

- Sifat Penyebaran Lokal Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Suli Barat sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Suli Barat dan melingkupi semua Desa/Kelurahan.

- Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan adalah Kecamatan sebesar ***Rp.1.481.306.689,00,-*** (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dan Kelurahan **Sebesar *Rp.230.800.000,00,-*** (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Rupiah).

Berikut Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.

Tabel 3.2 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Barat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					KECAMATAN SULI BARAT				**1,481,306,689.00**				**1,505,438,475.00**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1,481,306,689.00**				**1,505,438,475.00**
7	**1**				**KECAMATAN**				**1,481,306,689.00**				**1,505,438,475.00**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa**	**100 Persen**	**1,412,306,689.00**				**1,430,438,475.00**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa**	**2 Dokumen**	**4,238,000.00**				**8,001,000.00**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1,038,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		2 Dokumen	2,001,000.00
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	800,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1 Dokumen	1,000,000.00
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	800,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1 Dokumen	1,000,000.00
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	800,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1 Dokumen	1,000,000.00
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	800,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1 Dokumen	1,000,000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						SKPD							
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	5 Laporan	0.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		5 Laporan	2,000,000.00
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang**	**100 Persen**	**1,238,106,690.00**				**1,117,544,801.00**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	12 Orang/bulan	1,197,306,690.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang/bulan	1,076,714,801.00
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	2 Dokumen	40,800,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		2 Dokumen	40,830,000.00
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen administrasi barang milik daerah secara tepat waktu**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang**	**100 Persen**	**6,120,000.00**				**6,120,000.00**
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	1 Laporan	6,120,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1 Laporan	6,120,000.00
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang**	**100 Persen**	**66,792,522.00**				**176,709,980.00**
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	1 Paket	0.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1 Paket	7,500,000.00
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	1 Paket	7,010,020.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1 Paket	27,678,500.00
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	1 Paket	3,652,940.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1 Paket	8,040,600.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	1 Paket	7,731,562.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1 Paket	28,038,880.00
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	2 Laporan	6,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		2 Laporan	24,000,000.00
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	1 Laporan	30,398,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1 Laporan	69,452,000.00
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	6 Dokumen	12,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		6 Dokumen	12,000,000.00
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang**	**100 Persen**	**76,299,477.00**				**65,220,944.00**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	12 Laporan	6,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		12 Laporan	6,000,000.00
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12,099,477.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		12 Laporan	14,820,944.00
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	12 Laporan	58,200,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		12 Laporan	44,400,000.00
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa**	**100 persen**	**20,750,000.00**				**56,841,750.00**
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	5 Unit	20,750,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		5 Unit	56,841,750.00
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa**	**100 persen**	**7,500,000.00**				**8,000,000.00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa**	**100 persen**	**7,500,000.00**				**8,000,000.00**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7,500,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1 Laporan	8,000,000.00
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa**	**100 Persen**	**2,500,000.00**				**8,000,000.00**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa**	**100 Persen**	**2,500,000.00**				**8,000,000.00**
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	8 Laporan	2,500,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		8 Laporan	8,000,000.00
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa**	**100 Persen**	**59,000,000.00**				**59,000,000.00**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa**	**100 Persen**	**59,000,000.00**				**59,000,000.00**
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen TugasForum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan	- Kab. Luwu, Suli Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	59,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1 Dokumen	59,000,000.00
								TOTAL	**1,481,306,689.00**				**1,505,438,475.00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					KELURAHAN LINDAJANG				**230,800,000.00**				**230,000,000.00**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				**230,800,000.00**				**230,000,000.00**
7	**1**				**KECAMATAN**				**230,800,000.00**				**230,000,000.00**
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Meningkatkan Akuntabilitas Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang**	**100 Persen**	**230,800,000.00**				**230,000,000.00**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan**	**- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang**	**100 Persen**	**230,800,000.00**				**230,000,000.00**
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	1 Lembaga Kemasyarakatan	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lembaga Kemasyarakatan	100,000,000.00
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	6 Pokmas / Ormas	130,800,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Pokmas / Ormas	130,000,000.00
								TOTAL	**230,800,000.00**				**230,000,000.00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan rumusan program dan kegiatan beserta indikator kinerja, dana indikator dan sumber dana

4.1. INDIKATOR KINERJA

Kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam:

- Kelompok indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelakanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana material, aktu, teknologi dan peraturan.
- Kelompok indikator outputs (keluaran) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang data berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfunginya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Kelompok indikator benefits (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat di akses oleh pablik.
- Kelompok indikator impacts (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial,ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

Berdasarkan pengelompokkan indikator diatas dan evaluasi terhadap rencana kerja Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Dan Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021, maka dapat digambarkan pencapaian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   Tersedianya Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   Tersedianya Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
   Tersedianya Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun.

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
   Tersedianya Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun.
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
   Tersedianya Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun.
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   Terpenuhinya Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan.
7. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
   Tersedianya Jumlah Dokumen Yang Diverifikasi.
8. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
   Terialisasinya Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   Tersedianya bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun.
10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
    Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun.
11. Penyediaan Bahan/Material;
    Tersedianya bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun.
12. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
    Tersedianya Jumlah jenis jamuan makan dan minum tamu.
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
    Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
14. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
    Tersedianya Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    Tersedianya Jasa Caraka dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    Terpenuhinya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
17. Jasa Pelayanan Umum Kantor;
    Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan.

19. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;

    Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan (Musrenbang).

20. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

    Tersedianya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

21. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;

    Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.

22. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kelurahan;

    Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan.

23. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

    Tersedianya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

4.2. DANA INDIKATIF

Dana indikatif untuk membiayai rencana program dan kegiatan Kecamatan Suli Barat pada Tahun Anggaran 2025 dengan alokasi dana sebesar **Rp. 1.712.106.689,-** (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa).
2. Belanja Modal

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Adapun alokasi Dana untuk Kecamatan Suli Barat sebesar **Rp. 1.481.306.689,-** (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dan Kelurahan Lindajang sebesar **Rp.230.800.000,-** (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian Program/Kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**

Dengan anggaran sebesar **Rp.1.412.306.689,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembian Rupiah)**, dengan rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai berikut :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran **Rp.4.238.000,- (Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).**
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Rp.1.038.000,-** (Satu Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD **Rp.800.000,-** (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD **Rp.800.000,-** (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD **Rp.800.000,-** (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD **Rp.800.000,-** (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran **Rp.1.238.106.690,-** (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Enam Ribu Enam Ratus Sembian Puluh Rupiah).
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **Rp.1.197.306.690,-** (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Sembian Puluh Rupiah).
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **Rp.40.800.000,-** (Empat Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan anggaran **Rp.6.120.000,-** (Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **Rp.6.120.000,-** (Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran **Rp.66.792.522,-** (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor **Rp.7.010.020,-** (Tujuh Juta Sepuluh Ribu Dua Puluh Rupiah)

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **Rp.3.652.940,-** (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah).
- Penyediaan Bahan/Material **Rp.7.731.562,-** (Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- Fasilitasi Kunjungan Tamu **Rp.6.000.000,-** (Enam Juta Rupiah).
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **Rp.30.398.000,-** (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **Rp.12.000.000,-** (Dua Belas Juta Rupiah).

• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran **Rp.76.299.477,-** (Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat **Rp.6.000.000,-** (Enam Juta Rupiah).
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **Rp.12.099.477,-** (Dua Belas Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **Rp.58.200.000,-** (Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran **Rp.20.750.000,-** (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **Rp.20.750.000,-** (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;

Dengan anggaran sebesar **Rp.7.500.000,-** (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai berikut :

• Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan anggaran **Rp.7.500.000,-** (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait **Rp.7.500.000,-** (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;

Dengan anggaran sebesar **Rp.233.500.000,-** (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai berikut:

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan anggaran dengan anggaran **Rp.2.500.000,-** (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan **Rp.2.500.000,-** (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan anggaran **Rp. 230.800.000,-** (Dua ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
  - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah).
  - Pemberdayaan Masyarakat kelurahan **Rp. 130.800.000,-** (Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Dengan anggaran sebesar **Rp.59.000.000,-** (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), dengan rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan anggaran dengan anggaran **Rp.59.000.000,-** (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah).
  - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan **Rp.59.000.000,-** (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah).

4.3. SUMBER DANA

Seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam rencana kerja ini menggunakan Anggaran dari APBD Kabupaten Luwu yag bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Berikut Tabel Dana Indikatif, Sumber Dana Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu serta Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 :

Tabel 4.1
DANA INDIKATIF DAN SUMBER DANA KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 DAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021.

No	KETERANGAN	DANA INDIKATIF 2025 (Rp)	DANA INDIKATIF 2026 (Rp)	SUMBER DANA
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4,238,000.00**	**8,001,000.00**	**APBD**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,038,000.00	2,001,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	800,000.00	1,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	800,000.00	1,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	800,000.00	1,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	800,000.00	1,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.00	2,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1,238,106,690.00**	**1,117,544,801.00**	**APBD**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,197,306,690.00	1,076,714,801.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40,800,000.00	40,830,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6,120,000.00**	**6,120,000.00**	**APBD**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,120,000.00	6,120,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**66,792,522.00**	**176,709,980.00**	**APBD**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0.00	7,500,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,010,020.00	27,678,500.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,652,940.00	8,040,600.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Penyediaan Bahan/Material	7,731,562.00	28,038,880.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,000,000.00	24,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,398,000.00	69,452,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12,000,000.00	12,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	KETERANGAN	DANA INDIKATIF 2025 (Rp)	DANA INDIKATIF 2026 (Rp)	SUMBER DANA
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76,299,477.00**	**65,220,944.00**	**APBD**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00	6,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,099,477.00	14,820,944.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58,200,000.00	44,400,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20,750,000.00**	**56,841,750.00**	**APBD**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20,750,000.00	56,841,750.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
7	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**7,500,000.00**	**8,000,000.00**	**APBD**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7,500,000.00	8,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
8	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**2,500,000.00**	**8,000,000.00**	**APBD**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,500,000.00	8,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
9	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**59,000,000.00**	**59,000,000.00**	**APBD**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	59,000,000.00	59,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
JUMLAH		**1,481,306,689.00**	**1,505,438,475.00**	

NO	KETERANGAN	DANA INDIKATIF 2023 (Rp)	DANA INDIKATIF 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**230,800,000.00**	**230,000,000.00**	**APBD**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,000,000.00	100,000,000.00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130,800,000.00	130,000,000.00	DAU dan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
JUMLAH		**230,800,000.00**	**230,000,000.00**	

Tabel 4.2

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SULI BARAT TAHUN 2025

KODE		PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Perhitungan			JUMLAH	LOKASI	KET
				Volume	Satuan	Harga Satuan			
		KECAMATAN SULI BARAT					**1,469,523,857.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	
1	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100**	**persen**		**1,423,514,957.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	
2	**1**	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu***	**100**	**persen**		**3,184,764.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	
1	**1**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun**	**4**	**Dokumen**		**820,844.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	**Dokumen Renstra dan Renja serta Renstra-P dan Renja-P**
1	**1**	**Belanja Barang Pakai Habis**					**820,844.00**		
	4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		10	liter	16,726.00	167,260.00		
	24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	Tahun	166,144.00	166,144.00		
	25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		2	Rim	63,720.00	127,440.00		
	52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12	OK	30,000.00	360,000.00		
1	**2**	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun**	**1**	**Dokumen**		**590,980.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	**Dokumen RKA**
1	**1**	**Belanja Barang Pakai Habis**					**590,980.00**		
	4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		10	liter	16,726.00	167,260.00		
	25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1	Rim	63,720.00	63,720.00		
	52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12	OK	30,000.00	360,000.00		

KODE		PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Perhitungan			JUMLAH	LOKASI	KET
				Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	**3**	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun**	**1**	**Dokumen**		**590,980.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	**Dokumen RKA-P**
1	**1**	**Belanja Barang Pakai Habis**					**590,980.00**		
	4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		10	liter	16,726.00	167,260.00		
	25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1	Rim	63,720.00	63,720.00		
	52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12	OK	30,000.00	360,000.00		
1	**4**	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**	**Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun**	**1**	**Dokumen**		**590,980.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	**Dokumen DPA**
1	**1**	**Belanja Barang Pakai Habis**					**590,980.00**		
	4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		10	liter	16,726.00	167,260.00		
	25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1	Rim	63,720.00	63,720.00		
	52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12	OK	30,000.00	360,000.00		
1	**5**	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**	**Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun**	**1**	**Dokumen**		**590,980.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	**Dokumen DPA-P**
1	**1**	**Belanja Barang Pakai Habis**					**590,980.00**		
	4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		10	liter	16,726.00	167,260.00		
	25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1	Rim	63,720.00	63,720.00		
	52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12	OK	30,000.00	360,000.00		
2	**2**	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu***	**100**	**persen**		***1,271,433,593.00***	**Kantor Camat Suli Barat**	
2	**1**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah ASN yang disediakan gaji dan**	**1**	**Tahun**		**1,219,523,853.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	**12 ASN**

KODE		PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Perhitungan			JUMLAH	LOKASI	KET
				Volume	Satuan	Harga Satuan			
			tunjangan sesuai ketentuan						
1	**1**	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**910,903,853.00**		
	1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		1	Tahun	910,903,853.00	910,903,853.00		
2	**1**	**Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN**					**308,620,000.00**		
	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		1	Tahun	308,620,000.00	308,620,000.00		
2	**3**	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**Jumlah dokumen yang diverifikasi**	**1**	**Tahun**		**51,909,740.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	**PA, PPK,PPTK,Bendahara Pengeluaran dan Staf Keuangan**
3	**7**	**Belanja Honorarium**					**51,600,000.00**		
	1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1	Tahun	51,600,000.00	51,600,000.00		
1	**1**	**Belanja Barang Pakai Habis**					**309,740.00**		
	27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		20	Lembar	15,487.00	309,740.00		
2	**3**	***Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah***	***Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah***	**100**	**persen**		***6,309,740.00***	**Kantor Camat Suli Barat**	
3	**6**	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**laporan hasl pelaksanaan penatusahaan barang milik daerah**	**1**	**Tahun**		**6,309,740.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	**Bendaharan Barang**
3	**8**	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					**6,000,000.00**		
	2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		12	OB	500,000.00	6,000,000.00		
1	**1**	**Belanja Barang Pakai Habis**					**309,740.00**		
	27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		20	Lembar	15,487.00	309,740.00		
2	**6**	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Presentase pemenuhan administrasi perkantoran***	**100**	**persen**		***67,584,169.00***	**Kantor Camat Suli Barat**	
6	**4**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan**	**1**	**Tahun**		**5,212,600.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	**Rujab dan Kantor**
1	**1**	**Belanja Barang Pakai Habis**					**5,212,600.00**		

KODE		PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Perhitungan			JUMLAH	LOKASI	KET
				Volume	Satuan	Harga Satuan			
	10	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas		10	kg	24,000.00	240,000.00		
	43	Belanja Natura dan Pakan-Natura		1	Tahun	4,972,600.00	4,972,600.00		
6	**5**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan**	**1**	**Tahun**		**3,589,509.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	
1	**1**	**Belanja Barang Pakai Habis**					**3,589,509.00**		
	26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1	Tahun	3,589,509.00	3,589,509.00		
6	**7**	**Penyediaan Bahan/Material**	**Jumlah jenis ATK yang disediakan**	**1**	**Tahun**		**8,281,860.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	
1	**1**	**Belanja Barang Pakai Habis**					**8,281,860.00**		
	24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	Tahun	2,494,562.00	2,494,562.00		
	25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1	Tahun	1,961,160.00	1,961,160.00		
	27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1	Tahun	2,323,050.00	2,323,050.00		
	29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	Tahun	868,480.00	868,480.00		
	30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		1	Tahun	436,368.00	436,368.00		
	36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya		1	Tahun	198,240.00	198,240.00		
6	**8**	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan**	**2**	**jenis**		**7,000,000.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	
1	**1**	**Belanja Barang Pakai Habis**					**7,000,000.00**		
	53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		200	OK	35,000.00	7,000,000.00		
6	**9**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan Jumlah perjalanan dinas luar daerah**	**58**	**kali**		**31,500,200.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	
4	**1**	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**31,500,200.00**		
	1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1	Tahun	23,973,500.00	23,973,500.00		

KODE		PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Perhitungan			JUMLAH	LOKASI	KET
				Volume	Satuan	Harga Satuan			
	3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1	Tahun	7,526,700.00	7,526,700.00		
6	**11**	**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**4**	**Dokumen**		**12,000,000.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	**Penyusun Program/ Kegiatan Perencanaan**
2	**1**	**Belanja Jasa Kantor**					**12,000,000.00**		
	46	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi		12	OB	1,000,000.00	12,000,000.00		
2	**8**	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa***	**100**	**persen**		***59,261,500.00***	**Kantor Camat Suli Barat**	
8	**1**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi**	**1**	**Tahun**		**6,000,000.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	**Caraka**
2	**1**	**Belanja Jasa Kantor**					**6,000,000.00**		
	32	Belanja Jasa Tenaga Caraka		12	OB	500,000.00	6,000,000.00		
8	**2**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik**	**1**	**Tahun**		**12,461,500.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	**Listrik dan WIFI**
2	**1**	**Belanja Jasa Kantor**					**12,461,500.00**		
	61	Belanja Tagihan Listrik		3500	kwh	2,069.00	7,241,500.00		
	63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		12	Tahun	435,000.00	5,220,000.00		
8	**4**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Jumlah jasa pelayanan umum kantor**	**1**	**Tahun**		**40,800,000.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	**Operator Umum, Operator Staf Pengelola, Operator SIPD/FMIS, Agendaris, Pengadministasi dan Keamanan**
2	**1**	**Belanja Jasa Kantor**					**40,800,000.00**		
	26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		24	OB	600,000.00	14,400,000.00		
	27	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		12	OB	700,000.00	8,400,000.00		
	27	Belanja Jasa Tenaga Operator		12	OB	1,500,000.00	18,000,000.00		

KODE		PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Perhitungan			JUMLAH	LOKASI	KET
				Volume	Satuan	Harga Satuan			
		SIPD							
2	**9**	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100**	**persen**		***15,741,191.00***	**Kantor Camat Suli Barat**	
9	**2**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan**	**5**	**unit**		**15,741,191.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	**1 Unit Mobil dan 5 Unit Motor**
1	**1**	**Belanja Barang Pakai Habis**					**13,741,191.00**		
	4	Belanja Bahan-Bahan Bakar		1	Tahun	5,451,779.00	5,451,779.00		
	13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		15	Buah	552,627.47	8,289,412.00		
2	**1**	**Belanja Jasa Kantor**					**2,000,000.00**		
	67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		1	Tahun	2,000,000.00	2,000,000.00		
1	**2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**100**	**persen**		**7,500,000.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	
2	**1**	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan***	**100**	**persen**		***7,500,000.00***	**Kantor Camat Suli Barat**	
1	**1**	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan**	**1**	**kali/kegiatan**		**7,500,000.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	**Musrenbang**
1	**1**	**Belanja Barang Pakai Habis**					**7,500,000.00**		
	52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		150	OK	50,000.00	7,500,000.00		
1	**3**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100**	**persen**		**2,508,900.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	

KODE		PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Perhitungan			JUMLAH	LOKASI	KET
				Volume	Satuan	Harga Satuan			
2	**1**	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa***	**100**	**persen**		***2,508,900.00***	**Kantor Camat Suli Barat**	
1	**3**	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan**	**7**	**Desa**		**2,508,900.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	**Koordinasi Tingkat Desa**
1	**1**	**Belanja Barang Pakai Habis**					**2,508,900.00**		
	4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		150	liter	16,726.00	2,508,900.00		
1	**4**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umu**	**100**	**persen**		**36,000,000.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	
2	**1**	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	**100**	**persen**		***36,000,000.00***	**Kantor Camat Suli Barat**	
1	**2**	**Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**1**	**Tahun**		**36,000,000.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	
2	**1**	**Belanja Jasa Kantor**					**36,000,000.00**		
	4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		36	OB	1,000,000.00	36,000,000.00		

KODE		PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Perhitungan			JUMLAH	LOKASI	KET
				Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	**3**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka**	**100**	**persen**		**243,799,846.00**	**Kantor Camat Suli Barat**	

KODE		PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Perhitungan			JUMLAH	LOKASI	KET
				Volume	Satuan	Harga Satuan			
			pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan						
2	**2**	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	***Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan Kelurahan***	**100**	**persen**		***243,799,846.00***	**Kantor Lurah Lindajang**	
2	**1**	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**1**	**Kelurahan**		**112,999,846.00**	**Kantor Lurah Lindajang**	**Keurahan Lindajang**
1	**1**	**Belanja Barang Pakai Habis**					**54,102,866.00**		
	1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		1	tahun	2,596,000.00	2,596,000.00		
	4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		1	tahun	6,529,740.00	6,529,740.00		
	13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		1	tahun	4,497,570.00	4,497,570.00		
	24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1	tahun	9,055,228.00	9,055,228.00		
	25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1	tahun	6,189,100.00	6,189,100.00		
	27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1	tahun	4,646,100.00	4,646,100.00		
	29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	tahun	3,827,184.00	3,827,184.00		
	30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		1	tahun	4,701,944.00	4,701,944.00		
	43	Belanja Natura dan Pakan-Natura		100	tahun	20,600.00	2,060,000.00		
	52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		200	OK	50,000.00	10,000,000.00		
2	**1**	**Belanja Jasa Kantor**					**58,896,980.00**		
	26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12	OB	700,000.00	8,400,000.00		
	27	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		12	OB	1,000,000.00	12,000,000.00		

KODE		PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Perhitungan			JUMLAH	LOKASI	KET
				Volume	Satuan	Harga Satuan			
	61	Belanja Tagihan Listrik		1	tahun	5,006,980.00	5,006,980.00		
	67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		1	tahun	250,000.00	250,000.00		
	80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1	tahun	33,240,000.00	33,240,000.00		
2	**3**	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun**	**1**	**kelurahan**		**130,800,000.00**	**Kelurahan Lindajang**	
2	**1**	**Belanja Jasa Kantor**					**130,800,000.00**		
	14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		1	tahun	9,000,000.00	9,000,000.00		
	28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		1	tahun	121,800,000.00	121,800,000.00		

Suli Barat, Agustus 2024
Camat Suli Barat

KECAMATAN SULI BARAT

SYAMSUDDING, S.Pd.,MM
Pkt : Pembina, IV/a
Nip : 19840607 200903 1 003

BAB V
PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembuatan renja

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun Anggaran 2025, Kantor Kecamatan Suli Barat berpedoman terhadap RPJMD yang pada intinya untuk menciptakan pembangunan Kecamatan Suli Barat yang lebih maju dan meningkatkan kinerja kita sebagai aparatur negara.

Renja Perangkat Daerah ini bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas kita dapat memenuhi etos kerja yang maksimal guna untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan bekerja sesuai tupoksi masing-masing bidang.

Rencana kerja (Renja) Kantor Kecamatan Suli Barat merupakan wujud dari tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan Suli Barat yang dituangkan dalam Visi, Misi dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024-2025

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Suli Barat harus dapat melaksanakan kegiatan baik dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, yang selanjutnya akan berfungsi dalam penetapan kinerja serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan sehingga harapan dalam mencapai kinerja yang profesional dapat terwujud.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025. Pada akhirnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Suli Barat harus diwujudkan melalui tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada RPJMD dan mendukung renstra Kabupaten Luwu.

Suli Barat, Agustus 2024
Camat Suli Barat

SYAMMSUDDING, S.Pd.,MM
Pkt : Pembina, IV/a
Nip : 19840607 200903 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

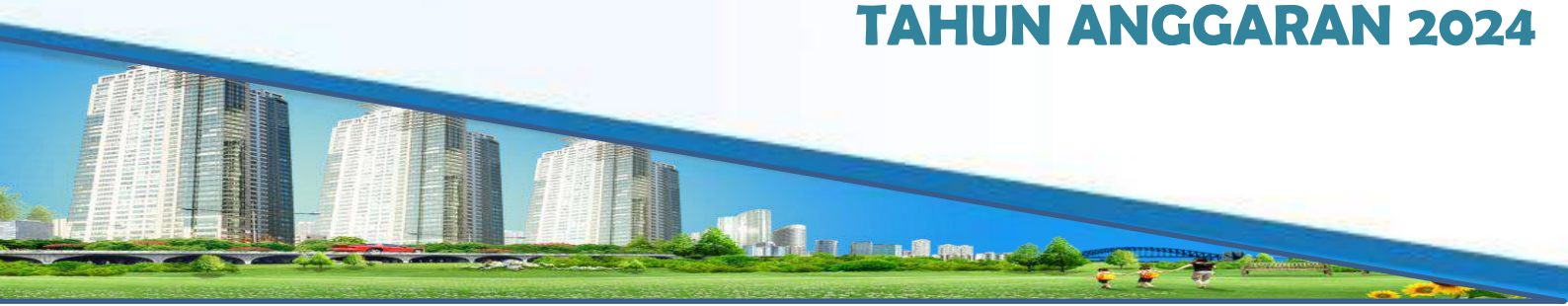




RENCANA KERJA TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan, penyusunan rencana kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan, diharapkan penyusunan rencana kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu tahun 2025. Semoga dokumen Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Belopa, Juli 2024

Kepala Bappelitbangda,

DR. Mohammad Arsal Arsyad, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19780811 199612 1 001

DAFTAR ISI

Judul

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Daftar Tabel ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum I-1

1.3. Maksud dan Tujuan I-3

1.4. Sistematika Dokumen I-4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPELITBANDA TAHUN 2023 ..... II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024 ..... II-1

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Bappelitbangda II-15

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Bappelitbangda II-17

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-21

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat II-39

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA III-1

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2. Tujuan Dan Sasaran Bappelitbangda III-2

3.3. Program Dan Kegiatan III-3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANGDA .. IV-1

BAB V PENUTUP V-1

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan V-1

5.2 Rencana Tindak Lanjut V-2

DAFTAR TABEL

2.1 Hasil evaluasi Renja Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2023 ..... II-2

2.2 Indikator Kinerja Bappelitbangda..... II-17

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025 ..... II-33

3.1 Tabel Tujuan Dan Sasaran Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 ..... III-22

4.1 Rencana Kerja Dan Kegiatan Prioritas Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2025..... IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diturunkan setiap tahunnya dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian dalam rangka mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan, seluruh kepala perangkat daerah menyusun dokumen Rencana Strategis (Rensta) untuk periode perencanaan lima (5) tahun yang disinkronisasikan dengan dokumen RPJMD.

Rencana Strategis yang telah disusun kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan perangkat daerah dengan memperhatikan dan memastikan keterpaduan dengan RKPD yang disusun. Rencana kerja (Renja) disusun melalui beberapa tahapan penting yang sejalan dengan penyusunan RKPD, yakni Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir, hingga tajapan Penetapan Renja paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

Renja perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan, indikasi pagu anggaran serta target-target indikator kinerja dan juga dipadukan dengan hasil telaah kebijakan-kebijakan strategis yang relevan dengan urusan perangkat daerah. Guna memastikan setiap perangkat daerah mendukung capaian-capaian yang direncanakan dalam RKPD maka Rencana Kerja perangkat daerah memiliki peranan penting dalam tahapan perencanaan dan penganggaran daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1011 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Maksud

   Penyusunan dokumen Rencana Kerja dimaksudkan untuk merumuskan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu untuk periode 1 (satu) tahun, tahun anggaran 2025.

2. Tujuan

   Penyusunan dokumen Rencana Kerja Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu bertujuan untuk menyediakan dokumen rencana kerja perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Kerja Bappelitbangda Tahun 2025 disajikan sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat:

1.1 Latar Belakang;

1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan;

1.4 Sistematika Penulisan.

b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat:

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan.

d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat Rancangan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

e. BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappelitbangda tahun 2023 didasarkan pada Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026 dan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2024-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappelitbangda 2024-2025

Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan atau realisasi APBD. Berdasarkan data dalam platform monitoring dan evaluasi pemerintah Kabupaten Luwu, rata-rata realisasi kinerja Bappelitbangda pada tahun 2023 termasuk dalam kategori sangat tinggi, yakni sebesar 114,94% dengan serapan anggaran sebesar 87,69% dari total anggaran dalam rencana kerja dan RKPD sebesar Rp. 7.924.180.810,- Adapun rincian data sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Renja Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Capaian Program Renstra-PD Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023						Target program dan kegiatan (Renja-PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program-Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensta (%)
2	3		4		5		6		7		8 (=7/6)		9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Indikator	Sat	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**%**	**100**	**21949769243**	**100**	**5514392553**	**100**	**5554031251**	**100**	**5406267209**	100	97.34	**100**	**100**	**100**
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan. penganggaran dan evaluasi PD yang disusun**	%	100	108793572	100	25293348	100	29967250	100	24797400	100	82.75	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Dokumen	4	25477392	2	4646610	2	5548600	2	4555500	100	82.10	2	6	150
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	4	13116719	1	1005282	1	1072850	1	981.45	100	91.48	1	3	75
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	4	9949607	1	5314659	1	5655200	1	5210450	100	92.14	1	3	75
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	4	11776787	1	3224271	1	4727200	1	3161050	100	66.87	1	3	75
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	4	10964707	1	2715342	1	3595400	1	2662100	100	74.04	1	3	75
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	Dokumen	24	37508360	6	8391387	6	9368000	6	8226850	100	87.82	6	18	75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu**	%	100	12792322642	100	2903142162	100	2905882060	100	2846217806	100	97.95	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	OB	3504	12715833011	2683	2887611132	2683	2882119210	386	2830991306	14.39	98.23	386	5752	164
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	4	26651457	1	4790022	1	6057250	1	4696100	100	77.53	1	3	75

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Capaian Program Renstra-PD Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023						Target program dan kegiatan (Renja-PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program-Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensta (%)
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	Dokumen	12	15011709										0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	Laporan	16	34826465	6	10741008	6	17705600	2	10530400	33	59.47	2	14	88
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	Orang	100	89836372	100	83682483	100	97210250	100	82041650	100	84.40	100	100	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH. PKL. Korpri. Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	stell/pasang	150	98732000	37	25627500	37	25125000	37	25125000	100	100.00	37	111	74
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	orang	8	89836372	1	58054983	1	72085250	1	56916650	100	78.96	1	3	38
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaranaan Administrasi umum Perangkat Daerah**	%	100	4328357581	100	1092555614	100	1084651360	100	1071132955	100	98.75	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	40	129614091	10	32596752	10	32050250	10	31957600	100	99.71	10	30	75
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	unit	68	730866901	12	11611068	12	12104000	12	11383400	100	94.05	12	36	53
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	60	101498412	15	50828895	15	49997550	25	49832250	166	99.67	25	55	92
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	12	59011838	3	32123472	3	31577000	3	31493600	100	99.74	3	9	75
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	jenis	12	404172316	3	99021600	3	99540000	3	97080000	100	97.53	3	9	75
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	jenis	60	162413969	26	65479186	26	66368150	26	64195280	100	96.73	26	78	130
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	jenis	12	203020050	3	23689500	3	24165000	3	23225000	100	96.11	3	9	75
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	orang	668	2030210854	162	655808329	162	643673050	159	642949342	98.15	99.89	159	483	72

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Capaian Program Renstra-PD Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023						Target program dan kegiatan (Renja-PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program-Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensta (%)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Aplikasi	4	507549151	1	121396813	1	125176360	1	119016483	100	95.08	1	3	75
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rata-rata pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah dalam konsisi baik**	%	100	826333878	80	160799571	80	164140000	80	157646638	100	96.04	80	80	80
Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	unit/set			1	25813459	1	27670000	1	25307313	100	91.46	1	3	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	unit/set	16	638401348	1	134986112	1	136470000	1	132339325	100	96.97	1	3	19
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	5	155631275										0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	380	32301255										0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang mendapat Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	%	100	2055555252	100	595279058	100	622930000	100	583606920	100	93.69	100	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	OB	48	68214737	12	8568000	12	8400000	12.00	8400000	100	100.00	12	36	75
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon. air dan listrik	Bulan	48	827202741	12	159300458	12	184230000	12.00	156176920	100	84.77	12	36	75
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	OB	1296	1160137774	324	427410600	324	430300000	321.00	419030000	99	97.38	322	970	75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	%	100	1748569946	100	653640317	100	649.250.331.00	100	640823840	100	98.70	100	300	300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	40	750405998	20	273102109	20	273071986	20	267747166	100	98.05	20	60	150
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	Unit	140	60832948	35	35708439	35	35450012	35.00	35008274	100	98.75	35	105	75

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Capaian Program Renstra-PD Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023						Target program dan kegiatan (Renja-PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program-Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensta (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	m2	1394	796562338	348	338878680	348	334281562	348	332234000	100	99.39	348	1044	75
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharan/direhabilitasi	Unit/set	100	140768662	25	5951088	25	6.446.771.00	25	5834400	100	90.50	25	75	75
PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Tingkat capaian target perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**	**%**	**100**	**3005890348**	**100**	**627594444**	**100**	**750992780**	**100**	**615288671**	100	81.93	**100**	**100**	**100**
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD**	%	100	1896409274	100	363115637	100	359014180	100	355995723	100	99.16	100	300	300
Analisis Kondisi Daerah. Permasalahan. dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan analisis kondisi daerah. permasalahan. dan isu strategis pembangunan daerah	Kegiatan	8	23968200	2	4896000	2	4800000	2	4800000	100	100.00	2	6	75
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jml. Dok. Perencanaan nasional. prov dn kab. Yg diintergrasikan dlm dokumen perencanaan pemb. Daerah	dokumen	40	745515881	10	202643074	10	199669480	10	198669680	100	99.50	10	30	75
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jml. Konsultasi publik yg akan dilaksanakan	Kegiatan	4	119341663	1	14045400	1	14170000	1	13770000	100	97.18	1	3	75
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jml. Forum PD yg dilaksanakan	SKPD	140	99856265										0	0
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jml. Musrenbang Kab. Yg dilaksanakan	Kegiatan	4	109739402	1	22895583	1	22650000	1	22446650	100	99.10	1	3	75
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jml. Kec. Yg melaksanakan Musrenbang Kab. Di Kecamatan	kecamatan	88	130053750	22	22659708	22	22405400	22	22215400	100	99.15	22	66	75
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jml. Dokumen perencanaan yg disusun	dokumen	8	667934113	3	95975873	3	95319300	3	94093993	100	98.71	3	9	113
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	**Cakupan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang**	%	100	846237834	100	136310760	100	154007200	100	133638000	100	86.77	100	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Capaian Program Renstra-PD Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023						Target program dan kegiatan (Renja-PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program-Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensta (%)
Perencanaan Pembangunan Daerah	**dilakukan analisa dan pengkajian**														
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jml. Dok. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yg dilakukan analisa dan pengkajian	dokumen	8	373160050	5	53690760	5	73007200	5	52638000	100	72.10	5	15	188
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan dan pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	SKPD	228	473077784	57	82620000	57	81000000	57	81000000	100	100.00	57	171	75
Pengendalian. Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Cakupan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**	%	100	263243240	100	128168047	100	237971400	100	125654948	100	52.80	100	100	100
Monitoring. Evaluasi. dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Dok. Evaluasi capaian prog/keg PD Dok. capaian pembangunan daerah Dok. capaian prog/keg terkait SPM	dok	20	263243240	4	74081937	4	82971400	4	72629350	100	87.54	4	12	60
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**	**%**	**100**	**3297285600**	**100**	**607807515**	**100**	**601400420**	**100**	**595889721**	**100**	**99.08**	**100**	**100**	**100**
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah**	%	100	1916654963	**100**	**283132108**	**100**	**278996070**	**100**	**277580498**	**100**	**99.49**	**100**	**100**	**100**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jml. PD Bid. pemerintahan yg dikoordinasikan dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	116	220061232	29	15454224	29	15276400	29	15151200	100	99.18	29	87	75
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jml. PD Bid. Pemerintahan yg diasistensi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	116	43236635	29	33368382	29	32886570	29	32714100	100	99.48	29	87	75

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Capaian Program Renstra-PD Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023						Target program dan kegiatan (Renja-PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program-Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensta (%)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jml. PD Bid.pemerintahan yg dimonitoring dn dievaluasi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	116	38274219										0	0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	PD	85	204320000	29	54508759	29	53494700	29	53439960	100	99.90	29	87	102
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jml. PD Bid. Pembangunan manusia yg dikoordinasikan dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	56	489771891	14	16249008	14	16076400	14	15930400	100	99.09	14	42	75
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jml. PD Bid. Pembangunan manusia yg diasistensi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	56	562655492	14	69264123	14	68109800	14	67906003	100	99.70	14	42	75
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jml. PD Bid.pembangunan manusia yg dimonitoring dn dievaluasi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	56	562655492										0	0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jml. PD Bid. pemerintahan yg dikoordinasikan dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	52	345007200	14	94287612	14	93152200	14	92438835	100	99.23	14	42	81
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah**	%	100	511583652	**100**	**91690196**	**100**	**90651400**	**100**	**89892349**	**100**	**99.16**	**100**	**100**	**100**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jml. PD Bid. perekonomian yg dikoordinasikan dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	24	249668750	6	46728699	6	45908500	18	45812450	100	99.79	18	30	125

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Capaian Program Renstra-PD Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023						Target program dan kegiatan (Renja-PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program-Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensta (%)
(RPJPD. RPJMD dan RKPD)															
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jml. PD Bid. Perekonomian yg diasistensi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	24	42087660	6	6619800	6	6740000	6	6490000	100	96.29	6	18	75
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jml. PD Bid.perekonomian yg dimonitoring dn dievaluasi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	24	100017301										0	0
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jml. PD Bid. SDA yg dikoordinasikan dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	8	119809941	2	34173110	2	33916050	2	33503049	100	98.78	2	6	75
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jml. PD Bid. SDA yg diasistensi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	32		6	4168587	6	4086850	2	4086850	100	100.00	2	14	44
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah**	%	100	869046985	**100**	**232985211**	**100**	**231752950**	**100**	**228416874**	**100**	**98.56**	**100**	**100**	**100**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jml. PD Bid. Infrastruktur yg dikoordinasikan dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	12	349638365	4	80338056	4	80147200	4	78762800	100	98.27	4	12	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jml. PD Bid. Infrastruktur yg diasistensi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	12	49940741	4	6614700	4	6600000	4	6485000	100	98.26	4	12	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jml. PD Bid. Infrastruktur yg dimonitoring dn dievaluasi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	12	49940741										0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Capaian Program Renstra-PD Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023						Target program dan kegiatan (Renja-PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program-Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensta (%)
Daerah Bidang Infrastruktur															
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	PD	12		4	67106004	4	66432000	4	65790200	100	99.03	4	12	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jml. PD Bid. Kewilayahan yg dikoordinasikan dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	12	349602912	3	29599992	3	29787050	3	29019600	100	97.42	3	9	75
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jml. PD Bid. Kewilayahan yg diasistensi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	12	34962114	3	3799500	3	3800000	3	3725000	100	98.03	3	9	75
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jml. PD Bid. Kewilayahan yg dimonitoringan dan dievaluasi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah	PD	12	34962114										0	0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	PD	8		3	45526959	3	44986700	3	44634274	100	99.22	3	9	113
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Hasil kelitbangan utama**	**Rekomendasi**	**5**	**3895454693**	**1**	**724365423**	**1**	**719764390**	**1**	**710162179**	100	98.67	**1**	**3**	**60**
	Hasil kelitbangan pendukung	**Rekomendasi**	**5**		**1**		**1**		**1**		100	98.67	**1**		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Jumlah Litbang di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersedia**	Litbang	60	3196952282	3	580906040	3	598479490	3	589562320	100	98.51	3	9	15

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Capaian Program Renstra-PD Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023						Target program dan kegiatan (Renja-PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program-Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensta (%)
Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum yang difasilitasi	litbang	4	971667664	1	270000000	1	252792250	1	252681000	100	99.96	1.00	1	25
Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang difasilitasi	litbang	4	971667664										0	0
Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang difasilitasi	litbang	4	939400000	1	150000000	1	150000000	1	149000000	100	99.33	1	3	75
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang telah dikelola	data	48	314216954	1	160906040	1	195687240	1.00	187881320	100	96.01	1	3	6
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Rekomendasi	3	80000000										0	0
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Jumlah Litbang di Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah tersedia**	Litbang	-	-			2	218358400	2	218358400	100	100		2	
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan	litbang	1											0	0
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	litbang	1				1	111709400	1	111502000	100	100		1	100
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Pekerjaan Umum	litbang	2				1	106649000	1	105649000	100	99		1	50
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah jenis inovasi dan teknologi yang telah dikembangkan oleh daerah**	Inovasi	30	229550442	1	11695545	1	121284900	1	162779640	100	99.44	1	3	10

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Capaian Program Renstra-PD Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023						Target program dan kegiatan (Renja-PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program-Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensta (%)
Penelitian. Pengembangan. dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi	36	229550442	1	11695545	1	121284900	1	162779640	100	99.44	5	7	19

Sumber:

2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Bappelitbangda Kabupaten Luwu. Indikator Kinerjanya adalah Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, dengan target program sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 7 (Tujuh) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Bappelitbangda dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan internal bidang-bidang sectoral yang ada di Bappelitbangda. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 7 (Tujuh) kegiatan ini sebesar Rp. 5.554.031.251,00 terealisasi sebesar Rp. 5.406.267.209,00 (97,34%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 7 (Tujuh) kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang disusun dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.29.967.250,00 terserap sebesar Rp. 24.797.400,00 atau sebesar 82,75%.
B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 2.905.882.060,00 terserap sebesar Rp. 2.846.217.806,00 atau sebesar 97,95%.
C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Persentase ASN dengan predikat kinerja baik yang disusun dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 97.210.250,00 terserap sebesar Rp. 82.041.650,00 atau sebesar 84,40%.
D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Persentase Penyelenggaranaan Administrasi umum Perangkat Daerah dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.084.651.360,00 terserap sebesar Rp. 1.071.132.955,00 atau sebesar 98,75%.
E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan indikator output Rata-rata pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah dalam konsisi baik yang

disusun dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 80% dengan anggaran sebesar Rp. 164.140.000,00 terserap sebesar Rp. 157.646.638,00 atau sebesar 96,04%.

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan indikator output Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang mendapat Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 622.930.000,00 terserap sebesar Rp. 583.606.920,00 atau sebesar 93,69%.

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dicapai dengan indikator output Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 649.250.331,00 terserap sebesar Rp. 640.823.840,00 atau sebesar 98,70%.

2.1.2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan indikator Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, target kinerja perangkat daerah sebesar 100% dengan realisasi program sebesar 100% dan Capaian Kinerja Program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 750.992.780,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 615.288.671,00 (81.93%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dicapai dengan indikator output Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 359.014.180,00 terserap sebesar Rp. 355.995.723,00 atau sebesar 99,16%.

B. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dicapai dengan indikator output Cakupan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilakukan analisa dan pengkajian sebesar

100% dengan anggaran sebesar Rp. 154.007.200,00 terserap sebesar Rp. 133.638.000,00 atau sebesar 86,77%.

C. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dicapai dengan indikator output Cakupan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi 155.000.000,00 terserap sebesar Rp. 53.025.598,00 atau sebesar 52,80%.

2.1.3 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan indikator Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, target kinerja perangkat daerah sebesar 100% dengan realisasi program sebesar 100% dan Capaian Kinerja Program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 601.400.420,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 595.889.721,00 (98,08%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dicapai dengan indikator output Persentase Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 278.996.070,00 terserap sebesar Rp. 277.580.498,00 atau sebesar 99,49%.

B. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dicapai dengan indikator output Persentase Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 90.651.400,00 terserap sebesar Rp. 89.892.349,00 atau sebesar 99,16%.

C. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dicapai dengan indikator output Persentase Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp

231.752.950,00 terserap sebesar Rp. 228.416.874,00 atau sebesar 98,72%.

2.1.4 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dilaksanakan dengan indikator Tingkat capaian target Hasil kelitbangan utama dan Hasil kelitbangan pendukung, target kinerja perangkat daerah adalah masing-masing 1 Rekomendasi Hasil Kelitbangan utama dan 1 Rekomendasi Hasil Pendukung dengan realisasi program sebesar 98,24% dan Capaian Kinerja Program adalah 1 Rekomendasi Hasil Kelitbangan utama dan 1 Rekomendasi Hasil Pendukung. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 719.764.390,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 710.162.179,00 (98,67%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dicapai dengan indikator output Jumlah Litbang di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersedia sejumlah 3 Litbang dengan anggaran sebesar Rp. 593.479.490,00 terserap sebesar Rp. 589.562.320,00 atau sebesar 98,51%.
B. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dicapai dengan indikator output Jumlah jenis inovasi dan teknologi yang telah dikembangkan oleh daerah sejumlah 1 Inovasi dengan anggaran sebesar Rp. 121.284.900,00 terserap sebesar Rp. 120.599.859,00 atau sebesar 99,44%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappelitbangda Kabupaten Luwu memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan urusuan perencanaan dan penelitian pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berperan penting sebagai *think tank* atau perangkat daerah yang memfasilitasi, menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan riset serta inovasi daerah.

Upaya Bappelitbangda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kabupaten Luwu oleh Bappelitbangda dengan Perangkat Daerah terkait.
6. Meningkatnya kualitas ekosistem inovasi melalui pembinaan dan fasilitasi;
7. Meningkatnya jumlah rekomendasi hasil kelitbanga yang dimanfaatkan;
8. Meningkatnya kualitas pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappelitbangda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 Bappelitbangda Kabupaten Luwu melaksanakan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappelitbangda Kabupaten Luwu terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Bappelitbangda

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2019)	Capaian			Target		Kondisi Akhir Kinerja Renstra
			2020	2021	2023	2023	2024	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	100	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	100	100	100	100
10	Penerapan SIDa	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	100	100	100	100	100	100	100
13	Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100
14	Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100
15	Hasil kelitbangan utama (Rekomendasi)	1	1	1	1	1	1	5
16	Hasil kelitbangan pendukung (Rekomendasi)	1	1	1	1	1	1	5

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Bappelitbangda selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perudangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk

itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;
2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.
5. Penguatan peran dan daya saing kelitbangan daerah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

1. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya pemahaman OPD dalam hal perencanaan kinerja maupun anggaran, serta pengakomodiran regulasi yang turundi pertengahan periode dokumen perencanaan dapat menyebabkan tidak optimalnya konsistensi perencanaan antar waktu, sehingga seringkali harus dilaksanakan perubahan pada dokumen operasionalnya.
2. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah;
5. Sinergitas pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah kurang optimal.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappelitbangda di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Konsistensi Perencanaan antar Waktu diperlukan pendampingan dan koordinasi intensif dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada seluruh Perangkat Daerah.

2. Penyediaan Data dan Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi diperlukan kesamaan pemahaman Perangkat Daerah terkait pentingnya kebutuhan data yang dilakukan secara benjenjang.
3. Dinamika Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bappelitbangda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.
4. Perkembangan daearah Kabupaten Luwu beserta seluruh permasalahannya diperlukan strategi tepat dan komitmen yang kuat dalam mengarahkan perkembangan Kabupaten Luwu beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
5. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspires dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam seiring perkembangan Kabupaten Luwu. sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran. Selain itu komunikasi yang intensif dengan seluruh stakeholder maupun instansi vertikal di Kabupaten Luwu juga mutlak dibutuhkan mengingat kondusivitas Kabupaten Luwu tidak mungkin tercipta dan terpelihara tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Sedangkan peluang bagi Bappelitbangda dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Semakin strategisnya peran Bappelitbangda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
4. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

5. Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Luwu, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. Pencapaian Visi dan Misi Bupati yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu, dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu beserta indikator dan targetnya. Bappelitbangda sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati. Oleh karena itu Bappelitbangda perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya untuk mengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati.
2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, diperlukan untuk memastikan kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan ditataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan). Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber dana, dengan melakukan identifikasi alokasi pendanaan di luar APBD Kabupaten Luwu.
3. Ketersediaan data dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi. Penyediaan data dan informasi diantaranya dapat dilakukan melalui koordinasi pengumpulan data serta pengoptimalan kajian penelitian dan pengembangan.
4. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun tingkat Kabupaten Luwu terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappelitbangda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH				**9.364.163.962,00**					**9.507.114.695,52**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**9.364.163.962,00**					**9.507.114.695,52**
5,01	**PERENCANAAN**				**8.311.652.163,10**					**8.423.027.542,67**
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah***	**100 Persen**	**100 Persen**	**6.532.456.009,60**				**100 Persen**	**6.590.455.504,65**
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun*	8 Dokumen	8 Dokumen	38.657.221,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	8 Dokumen	39.778.260,40
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	3 Dokumen	8.945.738,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	8 Dokumen	9.205.164,40
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	6.187.913,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	3 Dokumen	6.367.362,00
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.192.230,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Dokumen	4.313.805,00
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.958.815,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Dokumen	4.073.621,00
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.463.150,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Dokumen	5.621.561,00
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	9.909.375,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	4 Laporan	10.196.747,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun*	8 Jenis	8 Jenis	4.006.665.905,00			Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	8 Jenis	4.122.859.215,00
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.960.323.430,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	36 Orang/bulan	4.075.172.809,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
							ALOKASI UMUM			
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	10.950.933,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	4 Laporan	11.268.510,00
5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.879.220,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.136.717,00
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	26.512.322,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	18 Laporan	27.281.179,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun*	1 Jenis	1 Jenis	110.000.000,00			Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	1 Jenis	113.190.000,00
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25 Orang	110.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	25 Orang	113.190.000,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis Penyelenggaranaan Administrasi umum Perangkat Daerah*	10 Jenis	10 Jenis	1.365.438.874,60			Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	10 Jenis	1.273.594.894,00
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	56.621.880,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	35 Paket	58.263.915,00
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	23.726.430,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	15 Paket	24.414.496,00
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	41.555.063,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	15 Paket	42.760.160,00
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		-	6 Paket	-	28.902.269,00	-	-	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	6 Paket	29.740.435,00
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	70.356.458,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	35 Paket	72.396.795,00
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		-	24 Laporan	-	25.200.000,00	-	-	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	24 Laporan	25.930.800,00
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	35 Laporan	742.643.044,60	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	36 Laporan	632.737.987,00
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
		-	1 Dokumen	-	250.297.230,00	-	-	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	1 Dokumen	257.555.850,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan*	13 Unit	13 Unit	210.000.000,00			Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	13 Unit	216.090.000,00
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	2 Unit	51.450.000,00
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	160.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	10 Unit	164.640.000,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	4 Jenis	4 Jenis	411.599.939,00			Pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	4 Jenis	423.536.337,23
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	9.783.900,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	12 Laporan	10.067.633,10
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	209.036.039,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	12 Laporan	215.098.084,13
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	192.780.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	12 Laporan	198.370.620,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*	10 Unit	10 Unit	390.094.070,00			Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	10 Unit	401.406.798,02
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		10 Unit	222.498.528,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah		228.950.985,31
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	44.205.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	30 Unit	45.486.945,00
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	91.569.450,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	2 Unit	94.224.964,05
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	31.821.092,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	25 Unit	32.743.903,66
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah***	**100 %**	**100 %**	**1.039.322.976,50**				**100 %**	**1.070.502.665,78**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Cakupan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah*	100 Persen	100 Persen	744.888.250,50			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	100 Persen	767.529.332,73
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah									
		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2 Dokumen	209.300.800,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Dokumen	215.370.523,20
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya									
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	190.553.400,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	4 Dokumen	196.079.448,60
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	35.760.320,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Berita Acara	36.797.369,28
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	22.229.550,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Berita Acara	22.874.206,95
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	25.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Berita Acara	25.725.000,00
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan									
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1000 Usulan	1000 Usulan	36.800.988,00	Kab. Luwu, Belopa, Tanamanai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1000 Usulan	37.868.216,65
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*	4 Dokumen	4 Dokumen	225.243.192,50	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	4 Dokumen	232.814.568,05
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah kegiatan dalam rangka pengelolaan data dan informasi pemerintahan daerah*	3 Dokumen	3 Dokumen	171.565.700,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	3 Dokumen	176.541.105,30
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Dokumen	4 Dokumen	75.675.700,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	4 Dokumen	77.870.295,30
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	6 Orang	6 Orang	95.890.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	6 Orang	98.670.810,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	122.869.026,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Dokumen	126.432.227,75
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	8 Laporan	122.869.026,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	8 Laporan	126.432.227,75
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah***	**100 %**	**100 %**	**739.873.177,00**				**100 %**	**762.069.372,24**
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilakukan koordinasi perencanaan*	43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	377.047.515,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	43 perangkat daerah	388.721.766,09
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29 Dokumen	29 Dokumen	16.017.330,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah,	29 Dokumen	16.481.832,57

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
								provinsi, Nasional)		
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29 Laporan	29 Laporan	49.101.224,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	29 Laporan	50.525.159,49
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29 Laporan	29 Laporan	13.687.275,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	29 Laporan	14.084.205,97
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	29 Laporan	29 Laporan	65.971.080,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	29 Laporan	67.884.241,32
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	14 Dokumen	14 Dokumen	27.315.120,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	14 Dokumen	28.107.258,48
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14 Laporan	14 Laporan	81.057.585,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	14 Laporan	83.408.254,96
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14 Laporan	14 Laporan	13.687.275,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	14 Laporan	14.084.205,97
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	14 Laporan	14 Laporan	110.210.626,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	14 Laporan	114.146.607,33
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang dilakukan koordinasi perencanaan*	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	186.036.324,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	8 perangkat daerah	191.431.377,37
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen	47.839.943,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	6 Dokumen	49.227.301,34
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan	6.628.440,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	6 Laporan	6.820.664,76
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan	9.307.830,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	6 Laporan	9.577.757,07
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan	39.313.365,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	6 Laporan	40.453.452,58
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	41.962.673,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Dokumen	43.179.590,51
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	3.037.913,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Laporan	3.126.012,47
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	8.337.420,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Laporan	8.579.205,18
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA									
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	29.608.740,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Laporan	30.467.393,46
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilakukan koordinasi perencanaan*	7 perangkat daerah	7 perangkat daerah	176.789.338,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	7 perangkat daerah	181.916.228,78
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	79.275.103,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	4 Dokumen	81.574.080,98
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	12.200.580,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	4 Laporan	12.554.396,82
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	13.687.275,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	4 Laporan	14.084.205,97
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	12.200.580,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Laporan	12.554.396,82
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	25.488.435,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	3 Dokumen	26.227.599,61
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	3 Laporan	8.448.930,00	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	3 Laporan	8.693.948,97
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	3 Laporan	25.488.435,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	3 Laporan	26.227.599,61

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
5,05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**1.052.511.798,90**					**1.084.087.152,85**
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Jumlah Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersedia***	**2 Litbang**	**2 Litbang**	**1.052.511.798,90**				**2 Litbang**	**1.084.087.152,85**
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang laksanakan*	2 Litbang	2 Litbang	731.437.716,90			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Litbang	753.701.922,48
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan	319.919.240,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Laporan	329.196.897,96
5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	220.395.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Laporan	226.786.455,00
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan									
		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	2 Laporan	114.735.451,90	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Laporan	119.115.291,80
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomend asi	1 Rekomend asi	76.388.025,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Rekomend asi	78.603.277,72
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang laksanakan*	2 Litbang	2 Litbang	206.697.960,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Litbang	212.692.200,84
5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	127.395.660,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Dokumen	131.090.134,14
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum									
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	79.302.300,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Dokumen	81.602.066,70
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	80 Persen	80 Persen	114.376.122,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	80 Persen	117.693.029,53
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	5 Dokumen	114.376.122,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	5 Dokumen	117.693.029,53
J U M L A H					**9.364.163.962,00**					**9.507.114.695,52**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Oleh Masyarakat dan Stakeholder

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Bappelitbangda juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappelitbangda selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Luwu. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, pemerintah pusat dalam upayanya mencapai target-target pembangunan yang direncanakan menekankan beberapa aspek penting yakni, Infrastruktur Berkualitas, Sumber Daya Manusia Berkualitas serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan dengan mengusung tema "Akselerasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" adapun prioritas pembangunan dalam RKP Tahun 2025 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025



Disamping itu, Pemerintah Provinsi Selatan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 menetapkan "Peningkatan Perekonomian Daerah dan

Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing" sebagai tema pembangunan dengan menetapkan prioritas pembangunan diantaranya:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah;
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata;
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Prioritas Nasional ke-7 RKP dan Prioritas ke-1 RKPD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi hal sangat berkaitan dengan kewenangan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappelitbangda Kabupaten Luwu sehingga sangat strategis dalam implementasi pelaksanaan kegiatan organisasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2023 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2026, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda Kab. Luwu Tahun 2025

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Cap. Awal RPD	Target Kinerja Tahun			Kondisi Akhir
					2023	2024 (Perkiraan)	2025	2026	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih				Indeks Reformasi Birokrasi	46,49		67,51 (B)	67,89 (B)	67,89 (B)
	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan			Maturitas SPIP	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3
		Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	71,2		85,54	88,75	88,75
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program Antara RPJMD/RPD dengan RKPD	100%		100%	100%	100%
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan Daerah Yang Dimanfaatkan	100%		100%	100%	100%

Sumber: Rencana Strategis Bappelitbangda Kab. Luwu Tahun 2025-2026

3.3 Program Kegiatan

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun

2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomdir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Luwu Tahun 2024-2025 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan perencana, peneltian dan pengembangan.

Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Luwu pada RKPD Tahun 2024, adalah sebagaimana berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan beberapa subkegiatan, yaitu:
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan beberapa subkegiatan, yaitu:
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan beberapa subkegiatan, yaitu:
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      - Penyediaan Bahan/Material
      - Fasilitasi Kunjungan Tamu
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
   d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan beberapa subkegiatan, yaitu:
      - Pengadaan Mebel
      - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan beberapa subkegiatan, yaitu:
      - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan beberapa subkegiatan, yaitu:
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan beberapa subkegiatan, yaitu
      - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
      - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
      - Pelaksanaan Konsultasi Publik
      - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
      - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
      - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
      - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
   b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan beberapa subkegiatan, yaitu
      - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
      - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
   c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan subkegiatan, yaitu
      - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan beberapa subkegiatan, yaitu:
      - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
      - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
      - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
      - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
      - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
      - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan beberapa subkegiatan, yaitu:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan beberapa subkegiatan, yaitu:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan beberapa subkegiatan, yaitu:
- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan beberapa subkegiatan, yaitu:
   - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
   - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

c. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan subkegiatan, yaitu:
   - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappelitbangda untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Memperhatikan arah kebijakan tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Luwu yaitu mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah, Kabupaten Luwu tidak secara langsung mendukung Prioritas Kabupaten Luwu namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Kabupaten Luwu Bappelitbangda berperan dalam melaksanakn sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu Bappelitbangda juga berperan penting dalam memfasilitasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, riset dan inovasi daerah sehingga terwujud kebijkan berbasis bukti yang menunjang perencanaan pembangunan yang tepat, efektif dan efisien.

Rencana kerja dan pendanaan Bappelitbangda Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2025, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbanga tahun 2025 sebagaimana termuat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kab. Luwu Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENJA				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH				**9.494.086.836,0**					**9.872.781.227,7**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									**9.872.781.227,7**
5,01	**PERENCANAAN**				**8.425.956.642,0**					**8.423.027.542,7**
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah***	**100%**	**100%**	**6.635.245.627,0**				**100 Persen**	**6.590.455.504,7**
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun***	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**32.262.808,0**			**Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah**	**8 Dokumen**	**39.778.260,4**
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	8 Dokumen	3 Dokumen	8.940.615,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	8 Dokumen	9.205.164,4
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	3 Dokumen	1 Dokumen	6.173.443,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	3 Dokumen	6.367.362,0
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	4.192.060,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	1 Dokumen	4.313.805,0
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.946.780,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	1 Dokumen	4.073.621,0
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.445.130,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	1 Dokumen	5.621.561,0
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	3.564.780,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi	4 Laporan	10.196.747,0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENJA				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							ALOKASI UMUM	perangkat daerah		
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun***	**8 Jenis**	**8 Jenis**	**3.733.658.210,0**			**Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah**	**8 Jenis**	**4.122.859.215,0**
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.720.997.602,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	36 Orang/bulan	4.075.172.809,0
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	5.811.618,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	4 Laporan	11.268.510,0
5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.136.717,0
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	18 Laporan	18 Laporan	6.848.990,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	18 Laporan	27.281.179,0
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun***	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**101.120.000,0**			**Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah**	**1 Jenis**	**113.190.000,0**
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	60 Paket	60 Paket	21.120.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah		0,00
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	25 Orang	25 Orang	80.000.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	25 Orang	113.190.000,0
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Jumlah Jenis Penyelenggaranaan Administrasi umum Perangkat Daerah***	**10 Jenis**	**10 Jenis**	**1.092.848.180,0**			**Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah**	**10 Jenis**	**1.273.594.894,0**
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	35 Paket	35 Paket	3.895.469,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	35 Paket	58.263.915,0
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	15 Paket	15 Paket	10.131.590,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	15 Paket	24.414.496,0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENJA				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							ALOKASI UMUM			
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	15 Paket	15 Paket	24.514.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	15 Paket	42.760.160,0
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	6 Paket	0 Paket	25.633.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	6 Paket	29.740.435,0
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan*	36 Dokumen	12 Dokumen	128.500.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	36 Dokumen	129.794.456,0
5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	35 Paket	35 Paket	63.379.617,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	35 Paket	72.396.795,0
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	24 Laporan	12 Laporan	25.000.000,0	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	24 Laporan	25.930.800,0
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	36 Laporan	12 Laporan	588.206.320,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	36 Laporan	632.737.987,0
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang Disediakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	223.588.184,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	1 Dokumen	257.555.850,0
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan***	**13 Unit**	**13 Unit**	**797.006.291,0**			**Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah**	**13 Unit**	**216.090.000,0**
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	2 Unit	2 Unit	594.365.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	2 Unit	51.450.000,0
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	10 Unit	202.641.291,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	10 Unit	164.640.000,0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENJA				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan***	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**447.527.402,0**			**Pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah**	**4 Jenis**	**423.536.337,2**
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	8.618.862,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	12 Laporan	10.067.633,1
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	312.908.540,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	12 Laporan	215.098.084,1
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	126.000.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	12 Laporan	198.370.620,0
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara***	**10 Unit**	**10 Unit**	**430.822.736,0**			**Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah**	**10 Unit**	**401.406.798,0**
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	10 Unit	10 Unit	204.541.036,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah		228.950.985,3
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	30 Unit	30 Unit	44.280.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	30 Unit	45.486.945,0
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	175.285.700,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	2 Unit	94.224.964,1
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	25 Unit	25 Unit	6.716.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	25 Unit	32.743.903,7

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENJA				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah***	**100 %**	**100 %**	**1.082.934.133,0**				**100 %**	**1.070.502.665,8**
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	***Cakupan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah***	**100 Persen**	**100 Persen**	**883.554.818,0**			**Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah**	**100 Persen**	**767.529.332,7**
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)*	2 Dokumen	2 Dokumen	106.850.230,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	2 Dokumen	215.370.523,2
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	*Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	155.187.115,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	4 Dokumen	196.079.448,6
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik*	1 Berita Acara	1 Berita Acara	43.240.800,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	1 Berita Acara	36.797.369,3
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah*	1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.500.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	1 Berita Acara	22.874.207,0
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota*	2 Berita Acara	2 Berita Acara	73.268.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	2 Berita Acara	25.725.000,0
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan*	1000 Usulan	1000 Usulan	32.954.400,0	Kab. Luwu, Belopa, Tanamanai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	1000 Usulan	37.868.216,7
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan* *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*	4 Dokumen	4 Dokumen	451.554.273,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	4 Dokumen	232.814.568,1

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENJA				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	***Jumlah kegiatan dalam rangka pengelolaan data dan informasi pemerintahan daerah***	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100.779.315,0**			**Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**176.541.105,3**
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*	4 Dokumen	4 Dokumen	13.779.315,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	4 Dokumen	77.870.295,3
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi*	6 Orang	6 Orang	87.000.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	6 Orang	98.670.810,0
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	***Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang daerah***	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**98.600.000,0**			**Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah**	**1 Dokumen**	**126.432.227,8**
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*	8 Laporan	8 Laporan	98.600.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	8 Laporan	126.432.227,8
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah***	**100 %**	**100 %**	**707.776.882,0**				**100 %**	**762.069.372,2**
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	***Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilakukan koordinasi perencanaan***	**43 perangka t daerah**	**43 perangkat daerah**	**356.068.308,0**			**Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah**	**43 perangka t daerah**	**388.721.766,1**
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	29 Dokumen	29 Dokumen	85.734.860,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	29 Dokumen	16.481.832,6
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*	29 Laporan	29 Laporan	10.833.080,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	29 Laporan	50.525.159,5

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENJA				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*	29 Laporan	29 Laporan	11.770.820,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	29 Laporan	14.084.206,0
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan*	29 Laporan	29 Laporan	35.147.095,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	29 Laporan	67.884.241,3
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	14 Dokumen	14 Dokumen	9.914.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	14 Dokumen	28.107.258,5
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	14 Laporan	14 Laporan	67.829.856,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	14 Laporan	83.408.255,0
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	14 Laporan	14 Laporan	16.870.820,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	14 Laporan	14.084.206,0
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia*	14 Laporan	14 Laporan	117.967.777,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	14 Laporan	114.146.607,3
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	***Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang dilakukan koordinasi perencanaan***	**8 perangkat daerah**	**8 perangkat daerah**	**175.052.228,0**			**Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah**	**8 perangkat daerah**	**191.431.377,4**
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	6 Dokumen	6 Dokumen	45.106.956,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	6 Dokumen	49.227.301,3
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	6 Laporan	6 Laporan	1.383.520,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi	6 Laporan	6.820.664,8

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENJA				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
								perangkat daerah		
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	6 Laporan	6 Laporan	7.660.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	6 Laporan	9.577.757,1
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian*	6 Laporan	6 Laporan	38.538.910,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	6 Laporan	40.453.452,6
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	2 Dokumen	2 Dokumen	41.762.743,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	2 Dokumen	43.179.590,5
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*	2 Laporan	2 Laporan	4.869.709,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	2 Laporan	3.126.012,5
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*	2 Laporan	2 Laporan	5.650.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	2 Laporan	8.579.205,2
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA*	2 Laporan	2 Laporan	30.080.390,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	2 Laporan	30.467.393,5
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	***Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilakukan koordinasi perencanaan***	**7 perangkat daerah**	**7 perangkat daerah**	**176.656.346,0**			**Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah**	**7 perangkat daerah**	**181.916.228,8**
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	4 Dokumen	4 Dokumen	68.634.457,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	4 Dokumen	81.574.081,0
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan*	4 Laporan	4 Laporan	12.055.180,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Pemangku kepentingan sesuai tugas	4 Laporan	12.554.396,8

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENJA				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*					ALOKASI UMUM	dan fungsi perangkat daerah		
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	4 Laporan	4 Laporan	13.650.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	4 Laporan	14.084.206,0
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur*	1 Laporan	1 Laporan	22.542.499,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	1 Laporan	12.554.396,8
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	3 Dokumen	3 Dokumen	25.830.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	3 Dokumen	26.227.599,6
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*	3 Laporan	3 Laporan	8.444.210,0	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	3 Laporan	8.693.949,0
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*	3 Laporan	3 Laporan	25.500.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	3 Laporan	26.227.599,6
5,05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**1.068.130.194,0**					**1.449.753.685,0**
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan***	**100%**	**100%**	**703.353.234,0**				**100%**	**949.753.685,0**
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	***Jumlah litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang laksanakan***	**2 Litbang**	**2 Litbang**	**445.392.314,0**			**Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah**	**2 Litbang**	**609.753.685,0**
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum*	1 Laporan	1 Laporan	309.777.860,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	1 Laporan	309.753.685,0
5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi*	1 Laporan	1 Laporan	82.667.160,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi	1 Laporan	100.000.000,0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENJA				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							ALOKASI UMUM	perangkat daerah		
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik*	2 Laporan	2 Laporan	52.947.294,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	2 Laporan	200.000.000,0
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	***Jumlah litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang laksanakan***	**2 Litbang**	**2 Litbang**	**213.176.920,0**			**Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah**	**2 Litbang**	**190.000.000,0**
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan*	1 Dokumen	1 Dokumen	108.062.660,0	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah		120.000.000,0
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan*	1 Dokumen	1 Dokumen	105.114.260,0	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah		70.000.000,0
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	***Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Inovasi dan Teknologi***	**80 Persen**	**80 Persen**	**44.784.000,0**			**Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah**	**80 Persen**	**150.000.000,0**
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*	5 Dokumen	5 Dokumen	44.784.000,0	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	5 Dokumen	150.000.000,0
5.05.03	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	***Persentase Naskah Hasil Riset dan Inovasi Yang Disusun***	**100%**	**100%**	**364.776.960,0**				**-**	**500.000.000,0**
5.05.03.2.01	**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**	***Jumlah Laporan Hasil Litbang-Jirap Yang Dilaksanakan***	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**239.228.480,0**			**Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah**	**-**	**200.000.000,0**
5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	*Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset*	1 Naskah	1 Naskah	58.394.480,0	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah		50.000.000,0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENJA				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	*Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah*	12 Dokumen	12 Dokumen	180.834.000,0	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah		150.000.000,0
5.05.03.2.02	**Invensi dan Inovasi**	***Jumlah Laporan Hasil Invensi dan Inovasi Yang Dilaksanakan***	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**125.548.480,0**			**Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah**	**-**	**300.000.000,0**
5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi*	1 Laporan	1 Laporan	25.596.880,0	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah		100.000.000,0
5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi*	1 Laporan	1 Laporan	57.401.120,0	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah		100.000.000,0
5.05.03.2.02.0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	*Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi*	1 Naskah	1 Naskah	42.550.480,0	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah		100.000.000,0
J U M L A H					**9.494.086.836,0**					**9.872.781.227,7**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Luwu Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung target-target pembangunan.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

A. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappelitbangda Kabupaten Luwu secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   1. melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya
   2. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

B. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.2. Rencana Tindaklanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belopa, Juli 2024

Kepala Bappelitbangda,

Dr. Mohammad Arsal Arsyad, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19780811 199612 1 001

PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu dengan RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

Tata cara perumusan dan penyajian Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan. Oleh karena itu, disamping sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi, Renja ini juga dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi atas kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu menuju terwujudnya pemerintahan yang baik *(Good Governance).* Dengan Renja ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu mampu mendorong terwujudnya visi dan misi daerah yang ditetapkan dalam RPD.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan daerah di seluruh wilayah Kabupaten Luwu.

Belopa, Juni 2025

KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KAB. LUWU

Drs.ANDI BASO TENRIESA,M.PA,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19661231 199203 1 091

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II 7
EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD 25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 34
BAB III 36
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 36
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD 37
3.3 Program dan Kegiatan 39
BAB IV 51
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 58
BAB V 87
PENUTUP 87

DAFTAR TABEL

Tabel Evaluasi Pencapaian Renja dan Renstra perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Luwu ---------- 8

Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pencapaian Renja BPBD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023----- 13

Tabel T-C 30 Pencapaian kinerja Pelayanan BPBD Kab.Luwu provinsi Sulawesi Selatan ---------- 17

Tabel T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten ---------- 27

Tabel T-C 32 Usulan program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Luwu ---------- 29

Tabel T-C 33 Rumusan Rencana program dan Kegiatan perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Luwu ---------- 38

Tabel Tujuan dan Sasaran ---------- 38

Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2025 ----------

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah kabupaten luwu.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan Renja, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhur rencana dan penetapan Renja.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RPD bertujuan untuk menjamin kesesuain antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJD)sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 123 Tahun 2021 Tentang kedudukan susunan Organisasi, tugas dan fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar penyusunan Renja dalam melakukan aktivitas dalam penanggulangan bencana di daerah, ada beberapa landasan hukum yang mendasarinya yaitu:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, tentang Lembaran Negara RI Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagiaman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 08);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 120 Tahun 2016);
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 81 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk menempatkan program Penganggulangan Bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu, dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap upaya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan.

A. Tujuan Internal:

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan.
2. Menyediakan dokumen acuan bagi BPBD Kabupaten Luwu dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.

4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di BPBD Kabupaten Luwu dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di BPBD Kabupaten Luwu dalam melaksanakan program dan kegiatan.

B. Tujuan External:

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Luwu yang berorientasi untuk Pembangunan dalam mengurangi kerentanan terhadap bencana.
2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan bencana, baik dalam kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Daerah Luwu memiliki *concern* yang besar terhadap upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu.
4. Mensinergikan program-program dan kegiatan penanggulangan bencana dengan program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman resiko bencana, baik di SKPD lain, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran program penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.

Latar Belakang menjelaskan tentang Latar belakang disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berpedoman pada Renstra BPBD

1.2. Landasan Hukum.

Halaman ini menjelaskan mengenai referensi landasan hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kebencanaan,

1.3. Maksud dan Tujuan.

pada halaman ini memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap tujuan Internal dan External.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan berisi tentang penjelasan susunan dari Rencana Kerja.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD.

3.3 Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu tahun 2025

Bab V Penutup

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersedian anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan juga memuat kaidah pelaksanaan renja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2025

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan RENJA BPBD pada setiap tahun anggaran dilakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Untuk anggaran BPBD Kabupaten Luwu pada TA. 2023 adalah sebesar Rp. 3.196.308.438 (Tiga Miliyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dan Realisasi sebesar Rp. 3.116.884.954 (Tiga Miliyar Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu sampai dengan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		JUMLAH DANA / DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		PPTK/PELAKSANA	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.775.683.938	86,84	2.716.362.453	97,86	100,00	84,98	86,84		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.034.200	0,09	3.034.200	100,00	100,00	0,09	0,09		
1.05.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,668,000	0.05	1,668,000	100	100	0.05	0.05	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			1,668,000	0.05	1,668,000	100	100				
1.05.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	243,300	0.01	243,300	100	100	0.01	0.01	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			243,300	0.01	243,300	100	100				
1.05.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	237,300	0.01	237,300	100	100	0.01	0.01	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			237,300	0.01	237,300	100	100				
1.05.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	300,300	0.01	300,300	100	100	0.01	0.01	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			300,300	0.01	300,300	100	100				
1.05.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	240,300	0.01	240,300	100	100	0.01	0.01	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			240,300	0.01	240,300	100	100				
1.05.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	6 Laporan	345,000	0.01	345,000	100	100	0.01	0.01	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			345,000	0.01	345,000	100	100				
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.059.879.706	64,45	2.004.355.465	97,30	100,00	62,71	64,45		
1.05.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 Orang/bulan	1,966,317,106	61.52	1,910,792,865	97.18	100	59.76	61.52	NIRMAWATI, SE	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi - Swakelola			1,966,317,106	61.52	1,910,792,865	97.18	100				

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		JUMLAH DANA / DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		PPTK/PELAKSANA	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1.05.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	82,080,000	2.57	82,080,000	100	100	2.57	2.57	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			82,080,000	2.57	82,080,000	100	100				
1.05.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	488,000	0.02	488,000	100	100	0.02	0.02	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			488,000	0.02	488,000	100	100				
1.05.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10,994,600	0.34	10,994,600	100	100	0.34	0.34	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			10,994,600	0.34	10,994,600	100	100				
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6,000,000	0.19	6,000,000	100.00	100.00	0.19	0.19		
1.05.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD	2 Laporan	6,000,000	0.19	6,000,000	100	100	0.19	0.19	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			6,000,000	0.19	6,000,000	100	100				
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			380,377,040	11,90	379,462,536	99,76	100,00	11,87	11,90		
1.05.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	8 Paket	5,520,000	0.17	5,520,000	100	100	0.17	0.17	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			5,520,000	0.17	5,520,000	100	100				
1.05.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,700,000	0.18	5,700,000	100	100	0.18	0.18	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			5,700,000	0.18	5,700,000	100	100				
1.05.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	32,300,540	1.01	32,300,540	100	100	1.01	1.01	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			32,300,540	1.01	32,300,540	100	100				
1.05.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	13,577,560	0.42	12,702,500	93.56	100	0.4	0.42	NIRMAWATI, SE	

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		JUMLAH DANA / DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		PPTK/PELAKSANA	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			13,577,500	0.42	12,702,500	93.56	100				
1.05.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	323,279,000	10.11	323,239,496	99.99	100	10.11	10.11	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			323,279,000	10.11	323,239,496	99.99	100				
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			32,870,000	1,03	31,960,000	97,20	100,00	1,00	1,03		
1.05.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	10 Unit	32,870,000	1.03	31,960,000	97.2	100	1	1.03	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Modal - Pengadaan Langsung			32,870,000	1.03	31,960,000	97.2	100				
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			177,263,792	5,56	175,855,765	98,93	100,00	5,50	5,56		
1.05.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	12 Laporan	89,700,000	2.81	88,350,000	98.49	100	2.76	2.81	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			89,700,000	2.81	88,350,000	98.49	100				
1.05.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34,063,792	1.07	33,505,765	98.36	100	1.05	1.07	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			34,063,792	1.07	33,505,765	98.36	100				
1.05.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54,000,000	1.69	54,000,000	100	100	1.69	1.69	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			54,000,000	1.69	54,000,000	100	100				
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			115,759,200	3,62	115,704,487	99,95	100,00	3,62	3,62		
1.05.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	103,181,200	3.23	103,132,487	99.95	100	3.23	3.23	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			103,181,200	3.23	103,132,487	99.95	100				
1.05.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12,578,000	0.39	12,572,000	99.95	100	0.39	0.39	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			12,578,000	0.39	12,572,000	99.95	100				

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		JUMLAH DANA / DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		PPTK/PELAKSANA	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			420.624.500	13.16	400.522.500	95,22	83,33	12,53	10,97		
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			2.137.500	0,07	2.137.500	100,00	100,00	0,07	0,07		
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100 Orang	2,137,500	0.07	2,137,500	100	100	0.07	0.07	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			2.137.500	0.07	2.137.500	100	100				
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			410.500.000	12,84	390.440.000	95,11	50,00	12,22	6,42		
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	410,500,000	12.84	390,440,000	95.11	100	12.22	12.84	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			410,500,000	12.84	390,440,000	95.11	100				
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupunPetugas	10 Unit	0	0	0	0	0	0	0	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Modal - Pengadaan Langsung			0	0	0	0	0				
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			6.442.000	0,20	6.400.000	99,35	100,00	0,20	0,20		
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	10 Dokumen	511.200	0.02	500.000	97.81	100	0.02	0.02	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			511,200	0.02	500,000	97.81	100				
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	5.930.800	0.19	5.900.000	99.48	100	0.18	0.19	NIRMAWATI, SE	

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		JUMLAH DANA / DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTIMBANG %		PPTK/PELAKSANA	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			5,930,000	0.19	5,900,000	99.48	100				
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			1,545,000	0,05	1,545,000	100,00	100,00	0,05	0,05		
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1,545,000	0,05	1,545,000	100	100	0.05	0.05	NIRMAWATI, SE	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi - Swakelola			1,545,000	0.05	1,545,000	100	100				
JUMLAH				**3,196,308,438**	**100**	**3,116,884,953**			**97.52**	**100**		

Belopa, 2024

KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KAB. LUWU

Drs.ANDI BASO TENRIESA,M.PA,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19661231 199203 1 091

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Luwu

No						Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)		Kondisi Akhir Renstra 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran KegiatanTahun 2021	target dan realiasai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Ranja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) (8=7/6)		Realiasasi capaian Program dan Kegiatan Tahun2023 =5+7+9	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) (10/4)
1						2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**%**	**100**						
1	05	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	100	0	0	0	-	%	100	75%
1	05	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	dok	8	1	2	2	1	2	5	75%
1	05	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	dok	4	1	1	1	1	1	3	75%
1	05	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	dok	4	1	1	1	1	1	3	75%
1	05	02	01	2.01	04	koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	dok	4	1	1	1	1	1	3	75%
1	05	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	4	1	1	1	1	1	3	75%
1	05	02	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelakasanaan Program/Kegiatan yang disusun	dok	12	4	5	5	1	5	12	75%
1	05	02	02	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	100	-	-	-	-			

No						Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)		Kondisi Akhir Renstra 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran KegiatanTahun 2021	target dan realiasai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Ranja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) (8=7/6)		Realiasasi capaian Program dan Kegiatan Tahun2023 =5+7+9	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) (10/4)
1	05	02	02	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan Sesuai Ketentuan	OB	10732	2683	2683	2683	1	2683	8049	75%
1	05	02	02	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telepon, Air dan Listrik	Bulan	114	108	108	108	1	108	114	75%
1	05	02	02	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang di susun	laporan	4	1	1	1	1	1	3	75%
1	05	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	laporan	16	2	2	2	1	2	6	70%
1	05	02	02	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	%	100	-	-	-	-			
1	05	02	02	2.03	05	Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Laporan Rekonsialisasi BMD yang disusun	Laporan	6	0	0	0	-	0	0	0%
1	05	02	02	2.03	06	Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	Laporan Pelaksanaan Penatausaahan Barang Milik daerah	Laporan	36	2	2	2	1	2	6	16%
1	05	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	%	100	-	-	-	-			
1	05	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	4	1	1	1	1	3	4	100%
1	05	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Cetakan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	jenis	16	1	12	12	1	1	12	75%
1	05	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	jenis	223	25	25	25	1	25	75	33,7%
1	05	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan	jenis	48	3	3	3	1	3	9	18,76%

No						Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)		Kondisi Akhir Renstra 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran KegiatanTahun 2021	target dan realiasai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Ranja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) (8=7/6)		Realiasasi capaian Program dan Kegiatan Tahun2023 =5+7+9	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) (10/4)
1	05	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	ok	915	42	42	42	1	42	126	13,77%
1	05	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	%	100	-	-	-	-			
1	05	02	01	2.08	01	Penyedian Jasa Surat Menyurat	jumlah Surat Masuk dan keluar yang diregistrasi	surat	1600	400	400	400	1	400	1200	75%
1	05	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telepon, Air dan Listrik	bulan	48	12	12	12	1	12	36	75%
1	05	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	OB	384	96	96	96	1	96	288	75%
1	05	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	%	100	-	-	-	-			
1	05	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumalah Kendaraan Dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	80	20	20	20	1	20	60	75%
1	05	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit/ set	32	3	3	3	1	3	9	28,13%
1	05	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala	unit/ set	8	2	2	2	1	2	6	75%
						PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA										
1	05	02	03	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten**	**Cakupan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**	%	100	-	-	-	-			

No						Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)		Kondisi Akhir Renstra 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran KegiatanTahun 2021	target dan realiasai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Ranja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) (8=7/6)		Realiasasi capaian Program dan Kegiatan Tahun2023 =5+7+9	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) (10/4)
1	05	02	03	2.01	01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Pesrta Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	orang	844	211	211	0	-	211	422	50%
1	05	02	03	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Cakupan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**	**%**	100	-	-	-	-			
1	05	02	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPB yang disusun	dok	3	0	0	0	-	0	0	0%
1	05	02	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi	orang	600	0	0	0	-	0	0	0%
1	05	02	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesepsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ Kota	Jumlah Petugas dan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan	orang	248	0	0	0	-	62	62	25%
1	05	02	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan yang disediakan	unit	177	0	0	0	-	17	17	10%
1	05	02	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana yang dilakukan penguatan dalam pencegahaan dan kesiapsiagaan	lokasi	80	0	0	0	-	20	20	25%
1	05	02	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kejadian Bencana yang ditangani	kejadian	96	0	0	0	-	24	24	25%
1	05	02	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas TIM Reaksi Cepat (TRC)	jumah anggota TRC yang mengikuti pelatihan	orang	80	0	0	0	-	0	0	0%
1	05	02	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	dokumen rencana kontijensi	dok	3	0	0	0	-	0	0	0%
1	05	02	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Personil yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	1125	0	0	0	-	0	0	0%

No						Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)		Kondisi Akhir Renstra 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran KegiatanTahun 2021	target dan realiasai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Ranja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) (8=7/6)		Realiasasi capaian Program dan Kegiatan Tahun2023 =5+7+9	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) (10/4)
1	05	02	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang ditetapkan dgn peraturan bupati	dok	3	0	0	0	-	0	0	0%
1	05	02	03	2.03		**Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Cakupan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**	%	100	-	-	-	-			
1	05	02	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Kejadian bencana yang dilakukan respon cepat darurat bencana	kali	384	0	0	0	-	96	96	25%
1	05	02	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kejadian Bencana yang ditangani	kali	299	0	0	0	-	48	48	16%
1	05	02	03	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Cakupan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**	%	100	-	-	-	-			
1	05	02	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen yang disusun	dok	40	0	0	0	-	10	10	25%
1	05	02	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ kota	Jumlah rapat dalam rangka kerjasama antar lembaga	kali	64	0	0	0	-	16	16	25%

KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KAB. LUWU

Drs.ANDI BASO TENRIESA,M.PA,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19661231 199203 1 091

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati No 123 Tahun 2021 tentang Pembentukan, kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu, yang memiliki peran dan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pemantapan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk mengkoordinasikan seluruh upaya pengurangan resiko bencana dalam berbagai sektor pembangunan sesuai agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Luwu 2025-2026.Koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan menekankan pada integrasi dimensi pengurangan resiko bencana baik dalam pembangunan struktural maupun non-struktural sebagai bentuk investasi yang diprioritaskan pada kawasan pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki tingkat resiko bencana tinggi.

Selain itu Pemantapan koordinasi di bidang penanganan darurat bencana diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana yang cepat dan handal, disertai dengan kemampuan anggaran sejak keadaan siaga darurat sampai dengan transisi darurat.Selain itu juga diperlukan pembangunan sistem penyediaan, distribusi serta tata kelola peralatan dan logistik penanggulangan bencana yang berdasarkan pada kebutuhan dan standar minimal.

Selanjutnya Pemantapan koordinasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana diarahkan pada pengerahan sumberdaya bagi percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai amanat agenda pembangunan daerah.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Luwu adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kab. Luwu

Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	target renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks Prioritas	100%	-	-	-	-	-	-	4,13%	10%	15%	Indeks Prioritas mulai menjadi indikator BPBD pada TA. 2022
	Indeks Kapasitas	100%	-	-	-	-	-	-	0,53%	10%	15%	Indeks Kapasitas mulai menjadi indikator BPBD pada TA. 2022
	Persentase Penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah / legal	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi sesuai jenis ancaman bencana	100%	-	-	-	-	-	1,78%	0,82%	2%	2%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah / legal	100%	-	-	-	-	-	-	20%	80%	80%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	target renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi sampai dinyatakan sah / legal	100%	-	80%	80%	80%	80%	10%	20%	20%	50%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
	Persentase jumlah aparatur dan warga di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan bencana	100%	-	200 peserta	200 peserta	300 peserta	300 peserta	200 peserta	200 peserta	300 peserta	300 peserta	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
	Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana	100%	-	200 peserta	200 peserta	200 peserta	300 peserta	200 peserta	200 peserta	200 peserta	300 peserta	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
	Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mendapat layanan Pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	-	-	-	-	-	0,67%	1,27%	1,27%	1,27%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
	Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mendapat peralatan perlindungan terhadap bencana	100%	-	-	-	-	-	0,67%	1,27%	1,27%	1,27%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	target renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	-	-	-	-	-	80%	100%	60%	60%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	20%	80%	80%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi pada saat kejadian bencana	100%	-	-	-	-	-	0,67%	1,27%	1,27%	1,27%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Upaya penanggulangan bencana harus didukung dengan system yang mampu mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat bencana, sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
3. Pengurangan resiko bencana yang dipadukan dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum memadai.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terdapat beberapa faktor yang menghambat kelancaran penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Luwu, adalah sebagai berikut :

1. Belum terbentuknya desa tangguh bencana di seluruh daerah rawan bencana.
2. Belum tersedianya sistem peringatan dini / Early Warning System (EWS) yang terintegrasi.
3. Belum dimilikinya gudang pengelolaan peralatan dan logistik penanggulangan bencana yang sesuai dengan standar.
4. Belum tersedianya rencana kontinjensi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan komprehensif.
5. Belum tersedianya Posko Penanggulangan Bencana di Kec. Walenrang yang dapat melayani 6 Kecamatan antara lain, Kec. Walenrang, Kec. Walenrang Utara, Kec. Walenrang Barat, Kec. Walenrang Timur, Kec. Lamasi dan Kec. Lamasi Timur.
6. Peralatan tanggap Darurat yang dimiliki belum memadai.

7. Kurangnya SDM dalam penanggulangan bencana baik Personil dan staf teknis.
8. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Luwu.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya mewujudkan visi pembangunan untuk menjalankan penyelengaraan penanggulangan bencanatentunya sangat berpengaruh terhadap visi dan misi kepala Daerah terkait penanggulangan bencana dengan melalui misi secara umum, upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, penerapan *meritsystem* dalam pengisian jabatan, pembinaan dan pengawasan melekat, pengembangan inovasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, penguatan regulasi, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, akan terwujud penyelengaraan pemerintahan yang amanah dan transparan, yang memuaskan masyarakat dan akan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, sehingga terwujud pemerintahan yang berwibawa utamanya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Selain mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, juga mengarahkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat Luwu. yang didasarkan pada kaidah-kaidah hasil kajian lingkungan hidup, dalam hal pemanfaatan sumber daya alam harus mempedomani rencana pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk tetap menjaga keseimbangan alam guna mencegah dan meminimalisir terjadinya bencana alam.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BPBD Kab. Luwu pada penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya alokasi anggaran dari APBD untuk penanggulangan bencana;
b. Terbatasnya tenaga terampil yang profesional dibidang kebencanaan.

Untuk dapat menjawab dan mengatasi permasalahan tersebut tentunya perlu diadakan analisis lingkungan yang tepat dan aktual sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal.
   a. Analisis Kekuatan.

- Adanya motivasi dan semangat kerja dari aparatur/staf yang masih terbatas.
- Adanya Peraturan Bupati Luwu Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu,
- Adanya dukungan pejabat pemerintah Kabupaten dengan terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu.
- Adanya Relawan yang dapat membantu tugas kemanusiaan ketika terjadinya bencana.

b. Analisis Kelemahan.

- Keterbatasan jumlah tenaga terampil yang profesional dibidang kebencanaan.
- Kurangnya pendidikan dan pelatihan teknis dalam penanggulangan bencana.
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang sangat diperlukan dalam penanganan bencana yang sesuai dengan letak geografis daerah KabupatenLuwu.
- Belum memiliki gudang khusus untuk Peralatanyang sesuai standar.
- Keterbatasan Anggaran Penanggulangan Bencana.

2. Analisis Lingkungan Eksternal.

a. Analisis Peluang

- Tersedianya Dana Pos Belanja Tidak Terduga;
- Adanya Peraturan Daerah no 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu.
- Adanya Sosialisasi dan Pelatihan Penanggulangan Bencana kepada Pelajar dan masyarakat serta Organisasi Kemasyarakatan.
- Adanya bantuan dana CSR dari BUMN,BUMD, Dunia Usaha dan Dunia Industri.

b. Analisis Ancaman

- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang resiko bencana di lingkungannya, utamanya yang bermukim di daerah rawan bencana.
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penanggulangan bencana.
- Lemahnya Koordinasi lintas sektoral dalam penanggulangan bencana.

Selanjutnya isu-isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu saat ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan 2019 – 2023, menjadikan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) sebagai prioritas daerah yang dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
3. Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RPD

Review terhadap rancangan awal RPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu merupakan perbandingan rancangan awal RPD.

Telaah terhadap Rancangan awal RPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RPD Pemerintah Kab. Luwu Tahun 2025.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indicator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang di alokasikan untuk setiap

program/kegiatan Perangkat Daerah dari rancangan awal RPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah.

Review terhadap Rancangan Awal RPD dapat ditunjukkan pada Tabel berikut.

T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RPD Tahun 2025

Kabupaten Luwu

No	Rancangan Awal RPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000	Program /Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Cakupan ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah**	100%	**44,453,600**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	luwu		100%	**27.200.800**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	37,451,150	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	3	21.545.440	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	1,394,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	709.475	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	894,400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	500.910	
4	koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	1,687,800	koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	828.360	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	1,163,400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	650.357	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelakasanaan Program/Kegiatan yang disusun	5	1,862,350	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelakasanaan Program/Kegiatan yang disusun	5	558.081	
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Belopa**		**100%**	**2,003,120,100**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Belopa**		**100%**	**2.005.735.400**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan Sesuai Ketentuan	348	1,919,427,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan Sesuai Ketentuan	2683	2.494.577.474	

No	Rancangan Awal RPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000	Program /Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belopa	jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	60	80,400,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belopa	jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	60	92.040.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang di susun	1	1,597,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang di susun	1	552.240	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/semesteran SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	1,695,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/semesteran SKPD	Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	658.440	
III	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Belopa**	**Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**		**7,861,100**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Belopa**	**Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**		7. 7.768.770	
1	Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	Belopa	Laporan Pelaksanaan Penatausaahan Barang Milik daerah	12	1,861,100	Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	Belopa	Laporan Pelaksanaan Penatausaahan Barang Milik daerah	12	7.000.000	
2	Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Laporan Rekonsialisasi BMD yang disusun	Laporan	2	6,000,000	Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Laporan Rekonsialisasi BMD yang disusun	Laporan	2	768.770	
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**luwu**	**Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	303,439,440	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**luwu**	**Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**213.704.150**	
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	luwu	Jumlah Jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	5,686,400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	luwu	Jumlah Jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	3.861.609	
2	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	luwu	Jumlah jenis Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	20,200,000	Penyediaan Bahan Cetakan dan Peraturan Perundang-Undangan	luwu	Jumlah jenis Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	1.000.000	
3	Penyediaan Bahan/ Material	luwu	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	30	25,443,340	Penyediaan Bahan/ Material	luwu	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	25	21.828.821	
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	luwu	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan	3	13,305,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	luwu	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan	3	4.159.400	

No	Rancangan Awal RPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000	Program /Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	luwu-luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	218	238,804,700	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	luwu-luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	42	96.967.221	
V	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**luwu**	**Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**229,200,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**luwu**	**Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**191.217.160**	
1	Penyedian Jasa Surat Menyurat	luwu	jumlah Surat Masuk dan keluar yang diregistrasi	400	91,200,000	Penyedian Jasa Surat Menyurat	luwu	jumlah Surat Masuk dan keluar yang diregistrasi	400	48.076.700	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	luwu	Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telepon, Air dan Listrik	12	54,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	luwu	Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telepon, Air dan Listrik	12	38.001.690	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	luwu	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	96	84,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	luwu	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	96	437.200.000	
VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Belopa**	**Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**177,142,309**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Belopa**	**Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**96.637.840**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Belopa	Jumalah Kendaraan Dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20	90,059,640	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Belopa	Jumalah Kendaraan Dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20	143.517.043	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Belopa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8	5,390,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Belopa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3	3.210.000	
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belopa	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala	2	81,692,669	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belopa	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala		3.500.000	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											
VII	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten**	**Belopa**	**Persentase Jumlah orang yang terlayani dalam pemberian informasi wilayah rawan bencana**	**100%**	**371,187,290**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten**	**Belopa**	**Cakupan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**	**100%**	**7.324.800**	

No	Rancangan Awal RPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000	Program /Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/kota	Belopa	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang dilegalisasi	1	292,120,000	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/kota	Belopa	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang dilegalisasi	1	192.465.536	
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Belopa	Jumlah Pesrta Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	600	79,067,290	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Belopa	Jumlah Pesrta Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	240	17.772.690	
VIII	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**luwu**	**Persentase ketersediaan dukungan perencanaan dan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana**	100%	**4,269,377,226**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**luwu**	**Cakupan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**	100%	**666.449.400**	
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	luwu	jumlah dokumen RPB yang disusun	1	301,142,000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	luwu	jumlah dokumen RPB yang disusun			
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota	luwu	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi	300	181,850,000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota	luwu	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi			
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesepsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ Kota	luwu	Jumlah Petugas dan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan	10	589,151,126	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesepsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ Kota	luwu	Jumlah Petugas dan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan			
4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	luwu	Jumlah Peralatan yang disediakan	88	2,692,512,500	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	luwu	Jumlah Peralatan yang disediakan			
5	pengelolaan resiko bencana kabupaten/kota	luwu	jumlah dokumen analisis resiko bencana pada kegiatan pembenagunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana	1	150,000,000						
6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	luwu	Jumlah kawasan rawan bencana yang dilakukan penguatan dalam pencegahaan dan kesiapsiagaan	20	15,685,400	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	luwu	Jumlah kawasan rawan bencana yang dilakukan penguatan dalam pencegahaan dan kesiapsiagaan	10	3.401.346	

No	Rancangan Awal RPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000	Program /Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pengembangan Kapasitas TIM Reaksi Cepat (TRC)	luwu	jumah anggota TRC yang mengikuti pelatihan	40	111,450,000	Pengembangan Kapasitas TIM Reaksi Cepat (TRC)	luwu	jumah anggota TRC yang mengikuti pelatihan	40	8.826.060	
8	Penyusunan Rencana Kontijensi	luwu	dokumen rencana kontijensi	1	72,850,000	Penyusunan Rencana Kontijensi	luwu	dokumen rencana kontijensi	2	7.533.920	
9	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	luwu	Jumlah Personil yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	375	72,935,000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	luwu	Jumlah Personil yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana			
10	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	luwu	dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang ditetapkan dgn peraturan bupati	1	62,601,200	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	luwu	dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang ditetapkan dgn peraturan bupati			
11	pelatihan keluarga tanggap bencana alam	luwu	jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	200	19,200,000						
VIIII	**Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**luwu**	**Persentase ketersediaan peralatan dan logistik serta aparat tanggap**	**100%**	**162,146,900**	**Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Belopa**	**Cakupan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**	**100%**	**11.335.000**	
1	Respon Cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah sonosis prioritas	luwu	jumlah laporan koordinasi respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah prioritas	15	31,928,700						
2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	luwu	Jumlah Kejadian bencana yang dilakukan respon cepat darurat bencana	96	25,982,100	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	luwu	Jumlah Kejadian bencana yang dilakukan respon cepat darurat bencana	15	23.866.192	
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	luwu	Jumlah kejadian Bencana yang ditangani	48	22,306,700	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	luwu	Jumlah kejadian Bencana yang ditangani	20	5.453.610	
4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota	luwu	Jumlah kejadian bencana yang disediakan logistik penyelamatan dan evakuasi	2	35,245,350	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota	luwu	Jumlah kejadian bencana yang disediakan logistik penyelamatan dan evakuasi			
5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	luwu	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2	24,309,600	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	luwu	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20	5.424.144	
56	Respon Cepat Bencanan Non Alam Epidemi wabah Penyakit	luwu	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2	22,374,450	Respon Cepat Bencanan Non Alam Epidemi wabah Penyakit	luwu	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			

No	Rancangan Awal RPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000	Program /Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**luwu**	**Cakupan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**	**100%**	**523,555,150**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Belopa**	**Cakupan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**	**100%**	**212.000.000**	
1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	luwu	Jumlah dokumen yang disusun	10	25,298,550	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	luwu	Jumlah dokumen yang disusun			
2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/kota	luwu	Jumlah lembaga yang difasilitasi	10	13,234,300	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/kota	luwu	Jumlah lembaga yang difasilitasi			
3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ kota	luwu	Jumlah rapat dalam rangka kerjasama antar lembaga	3	19,704,600	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ kota	luwu	Jumlah rapat dalam rangka kerjasama antar lembaga			
4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	luwu	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5	13,456,700	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	luwu	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	luwu	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	10	13,386,700	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	luwu	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	10	2.098.150	
6	Bimbingan teknis Pascabencana Kabupaten/Kota	luwu	Jumlah aparatur BPBD Kab./Kota dan lintas perangkat daerah Kab./Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	58	9,493,200	Bimbingan teknis Pascabencana Kabupaten/Kota	luwu	Jumlah aparatur BPBD Kab./Kota dan lintas perangkat daerah Kab./Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50	10.934.080	
7	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	luwu	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	11	83,623,200	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	luwu	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	11	17.924.000	
8	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia	luwu	Jumlah keterlibatan kelompok msyarakat dan	26	16,559,550						

No	Rancangan Awal RPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000	Program /Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	usaha dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota meliputi lembaga non pemerintah antara lain; lembaga filantropi (5), lembaga swadaya masyarakat (1), organisasi kemasyarakatan(2), organisasi sosial(1), organisasi keagamaan(2), organisasi relawan(3), perguruan tinggi(4), media massa(4) dan dunia usaha(4) yang telah terdaftar dan legal								
9	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	luwu	Jumlah penyelesaian dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Renacan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	21	328,798,350	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	luwu	Jumlah penyelesaian dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Renacan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	12	5.706.090	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat sesuai hasil musrenbang kecamatan dan Forum Perangkat daerah pada umumnya adalah Rehabilitasi/pemulihan fasilitas dan infrastruktur publik akibat bencana alam seperti perbaikan/pembangunan Jembatan dan plat duekker,Pembangunan Talud, Penahan Tanah pada bahu jalan, Normalisasi dan Penguatan tebing sungai, rehabilitasi saluran irigasi, dan perbaikan gedung sekolah. Usulan tersebut telah ditampung pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Usulan program/kegiatan dari masyarakat tersebut direkapitulasi sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian diprogramkan dalam Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan skala prioritas sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 32

Tabel T-C.22

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 di Kabupaten luwu

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4		5
	Program penangggulangan bencana				
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten		**Terwujudnya Desa Tangguh Bencana**	10 Desa	
		Belopa	Pelatihan Penanggulangan Bencana	10 Kali	
		Belopa	Apel Siaga Bencana	1 Kali	
		Kab. Luwu	Simulasi evakuasi penanggulangan bencana	4 kali	
		Kab. Luwu	Pencegahan Terhadap jiwa, Sarana dan Prasarana yang	2 Jenis	Kegiatan fisik

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			terancam Bencana		
	Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu	**Terlaksananya penanganan darurat bencana**		
		Kab. Luwu	Pelatihan Kedaruratan Bencana	4 Kali	
		Belopa	Pelatihan Manajemen Logistik dan pergudangan	4 Kali	
		Kab. Luwu	Assestmen dan evakuasi awal bencana	20 kali	
		Kab. Luwu	Penanganan Tanggap darurat bencana	1 Kegiatan	
		Kab. Luwu	Peralatan penanganan tanggap darurat bencana	Paket	
	Kegiatan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Luwu	**Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana**		
		Kab. Luwu	Inventarisasi kerusakan dan kerugian pasca bencana	12 Bulan	
		Kab. Luwu	Rehab/rekonstruksi jembatan/plat duekker/talud pasca bencana	Paket	
		Kab. Luwu	Rehab/rekonstruksi Sarpras lainnya pasca bencana	Paket	
		Kab. Luwu	Normalisasi dan Penguatan Tebing sungai pasca bencana	Paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan Kerangka Kerja Sendai (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) yang telah menjadi kesepakatan dalam *World Conference for Disaster Risk Reduction* di Sendai pada tahun 2015. Prioritas dalam kerangka kerja ini adalah :

1. Pemahaman resiko dasar bencana.
2. Penguatan tata kelola resiko bencana dalam pengelolaan resiko bencana.
3. Investasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk **"Membangun Kembali Lebih Baik"** dalam masa pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Manajemen organisasi dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu yang memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Luwu juga harus menyesuaikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) ke 7, yaitu **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik** melalui fokus agenda pembangunan **Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup danPengelolaan Bencana.**

Dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan dan kemandirian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya :

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana.

2. Menumbuhkembangkan kemampuan antisipasi, adaptasi, daya proteksi, menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat.
4. Mendorong partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Pengintegrasian sistem peringatan dini dan penyebarluasan peringatan dini bencana.
6. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Periode Tahun 2025-2026 ditetapkan dengan berdasarkan hasil telaahan berbagai dokumen perencanaan lainnya serta kondisi kebencanaan 5 (lima) tahun terakhir.

Tujuan yang ditetapkan untuk periode Tahun 2025 adalah:

1. Menurunnya indeks risiko bencana di Kabupaten Luwu
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan penanggulangan bencana

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada periode Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatnya kesiapan dan kemampuan dalam upaya pengurangan risiko bencana
2. Meningkatnya efektifitas sistem penanganan kedaruratan
3. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik
4. Meningkatnya sistem pengelolaan data dan informasi kebencanaan
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan bencana

Untuk lebih jelasnya, tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2025	2026	2022	2023	2024
Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana		INDEKS KKETAHANAN DAERAH	Rendah	0,40	0,45			
	Meningkatnya ketangguhan dan mitigasi bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	20	25			
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan penanggulangan bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP	(B)	63,21	63,87			

3.3 Program dan Kegiatan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana Daeerah Kabupaten Luwu menetapkan program-programnya sesuai RPD Pemerintah Kabupaten Luwu periode 2025-2026 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Adapun Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Luwu pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaiberikut:

1. PROGRAM :

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a) Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan

(a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

(b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

(c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

(d) koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

(e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

(f) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan :

(a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

(b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

(c) Koordinasi dan pelaksanaan akuntatansi SKPD

(d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c) Kegiatan :

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan

(a) Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD

d) Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan :

(a) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(b) Penyediaan Bahan Cetakan dan Peraturan Perundang-Undangan

(c) Penyediaan Bahan/ Material

(d) Fasilitas Kunjungan Tamu

(e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e) Kegiatan :

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2) Sub Kegiatan :

(a) Penyedian Jasa Surat Menyurat

(b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

(c) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

f) Kegiatan :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3) Sub Kegiatan :
   (a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
   (b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

2. PROGRAM :

PENANGGULANGAN BENCANA

a) Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten
   1) Sub Kegiatan :
      (a) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)

b) Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   1) Sub Kegiatan :
      (a) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesepsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ Kota
      (b) Penyusunan rencana kontijensi
      (c) Gladi ksiapsigaan terhadap bencana

c) Kegiatan : Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
   1) Sub Kegiatan :
      (a) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota
      (b) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota

d) Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
   1) Sub Kegiatan :
      (a) Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota

(b) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Rumusan Rencana program dan kegiatan BPBD Kabupaten Luwu pada TA. 2025 dan Perkiraan Maju TA 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

T-C.32
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten luwu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET T2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**4.070.005.814,00**							**3.919.985.623,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.070.005.814,00**							**3.919.985.623,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KETENTERAMANDAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**4.070.005.814,00**							**3.919.985.623,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah***	**100 persen**			**100 persen**	**3.386.073.389,00**						**100 persen**	**3.292.786.218,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepatwaktu*	100 persen			100 persen	25.283.975,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	100 persen	25.372.851,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			3 Dokumen	21.545.440,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	2 Dokumen	21.633.114,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	518.669,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	1 Dokumen	519.020,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	500.910,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata KelolaPemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	1 Dokumen	501.020,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	901.638,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata KelolaPemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	1 Dokumen	901.996,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	650.357,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata KelolaPemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	1 Dokumen	650.470,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			4 Laporan	1.166.961,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata KelolaPemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	4 Laporan	1.167.231,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	14 Laporan			2 Laporan	800.040,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	14 Laporan	5.270.546,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

			n/Semesteran SKPD													
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Ketersediaan Administrasi barang milik daerah*	100 persen			100 persen	7.768.770,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	100 persen	7.769.081,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	768.770,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	2 Laporan	769.081,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD	12 Laporan			12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	12 Laporan	7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	AdministrasiUmumPerangkatDaerah	*Persentase pemenuhan administrasi Umum perangkat daerah*	100 persen			100 persen	215.000.578,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	100 persen	237.941.840,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	4 Paket			4 Paket	7.598.197,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	4 Paket	7.575.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			56 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PADYANGSAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	3 Dokumen	5.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			56 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PADYANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	3 Dokumen	5.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Materialyang Disediakan	30 Paket			61 Paket	25.451.850,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	30 Paket	25.443.340,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan			12 Laporan	10.889.850,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PADYANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	10.971.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	218 Laporan			20 Laporan	167.060.681,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PADYANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	188.351.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 persen			100 persen	732.668.380,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	576.801.533,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	400 Laporan			12 Laporan	96.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	73.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan			12 Laporan	10.889.850,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PADYANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	10.971.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	218 Laporan			20 Laporan	167.060.681,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PADYANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	188.351.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 persen			100 persen	732.668.380,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	576.801.533,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	400 Laporan			12 Laporan	96.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	73.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	54.668.380,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	12 Laporan	46.401.533,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan			12 Laporan	582.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	96 Laporan	457.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjangan urusan pemerintahan daerah*	100 persen			100 persen	61.787.767,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	100 persen	91.860.940,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	52.197.767,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU		31.320.940,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara	8 Unit			8 Unit	4.590.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	8 Unit	5.540.000,00	BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	BPBD KAB. LUWU	2 Unit	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana***	**100 %**			**100 %**	**683.932.425,00**						**100 %**	**627.199.405,00**	

	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah orang yang terlayani dalam pemberian Informasi wilayah rawan bencana*	100 persen			100 persen	366.956.809,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	100 persen	32.634.168,00	BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	500 Orang			700 Orang	67.965.703,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	500 Orang	24.844.868,00	BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam1 (satu) tahun	1 Dokumen			1 Dokumen	298.991.106,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	1 Dokumen	7.789.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase ketersediaan dukungan perencanaan danpelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana*	100 persen			100 persen	201.591.776,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	100 persen	480.228.637,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														

			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	20 Kawasan			10 Kawasan	13.602.864,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	20 Kawasan	13.438.791,00	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulanga n Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kot a yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	40 Orang			40 Orang	9.726.060,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	40 Orang	16.789.846,00	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana)sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen			2 Dokumen	178.262.852,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulanga n Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam1 (satu) tahun	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayana n Penyela matan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase ketersediaan peralatan dan logistik serta aparat tanggap darurat yang responsif*	100 persen			100 persen	61.041.601,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	100 persen	61.535.900,00	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														

			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	10 Dokumen			15 Dokumen	28.814.432,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	10 Dokumen	28.844.600,00	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2024**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang			20 Orang	19.961.595,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	50 Orang	20.061.700,00	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	10 Laporan			20 Laporan	12.265.574,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	10 Laporan	12.629.600,00	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggul angan Bencana	*Persentase jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana*	100 persen			100 persen	54.342.239,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	100 persen	52.800.700,00	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana														
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelengga raan Penanggulan gan Bencana	10 Laporan			10 Laporan	3.426.924,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	10 Laporan	3.408.650,00	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KO	URUSAN / BIDANG URUS	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

	DE	AN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN		2023		TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	58 Orang			58 Orang	12.632.100,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	58 Orang	13.867.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	11 Kegiatan			11 Kegiatan	23.886.932,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	11 Kegiatan	21.535.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														

			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencanadan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu)tahun	21 Dokumen			12 Dokumen	14.396.283,00	Kab. Luwu, Belopa, Senga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Masyarakat Kab.Luwu	21 Dokumen	13.989.350,00	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
							J U M L A H	**4.070.005.814,00**							**3.919.985.623,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan BPBD Kabupaten Luwu pada TA. 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Luwu sebesar Rp. 4.070.005.814,-(Empat Miliyar Tujuh Puluh Juta Lima Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah) dapat di lihat pada tabel berikut :

Kode Rekening									Sumber Dana	Catatan Penting
				Rincian	Satuan	Target	Harga satuan	Jumlah		
1		2	3			5	6	7		
1	**05**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU**						**4,070,005,814**		
2	**05**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**					**3,386,073,389**		
		Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja						**25,283,975**		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun**			**3**		**21,545,440**		
				Belanja ATK						
				Kertas HVS Folio F4	Rim	5	76,700	383,500		
				BelanjaCetak dan Penggandaan						
				Fotocopy	Lembar	1080	413	446,040		
				Jilid Antero Biasa 300-500	Exampler	19	29,500	560,500		
				Belanja Peralatan Komputer						

				Tinta Printer Epson	Buah	5	54,280	271,400		
				Belanja Lembur						
				Gol. IV	org/jam	54	35,000	1,890,000		
				Gol. III	org/jam	135	30,000	4,050,000		
				Non ASN	org/jam	108	18,000	1,944,000		
				Honorarium						
				User Perencanaan	org/bln	12	1,000,000	12,000,000		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun**		**Dok**	**1**		**518,669**		
				Belanja ATK						
				Kertas HVS Folio F4	Rim	2	76,700	153,400		
				Belanja Cetak dan Penggandaan						
				Fotocopy	Lembar	313	413	129,269		
				Jilid Antero Biasa 300-500	eksampler	8	29,500	236,000		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun**		**dok**	**1**		**500,910**		
				Belanja ATK						
				Kertas HVS Folio F4	rim	2	76,700	153,400		
				Belanja Cetak dan penggandaan						
				Fotocopy	lembar	270				

							413	111,510		
				Jilid Antero Biasa 300-500	exampler	8	29,500	236,000		
1	**05**	**Sub Kegiatan :Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**	**Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun**		**dok**	**1**		**901,638**		
				Belanja ATK						
				Kertas HVS A4	rim	1	76,700	76,700		
				Belanja Penggandaan						
				Jilid Antero Biasa 200-300 lembar	exampler	5	29,500	147,500		
				Fotocopy	lembar	386	413	159,418		
				Belanja Peralatan komputer						
				Tinta Printer Epson	buah	2	54,280	108,560		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**	**Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun**		**Dok**	**1**		**650,357**		
				Belanja Kertas dan Cover						
				Kertas HVS A4	Rim	2	76,700	153,400		
				Belanja Penggandaan						
				Jilid Antero Biasa 200-300 lembar	exampler	10	29,500	295,000		
				Fotocopy	Lembar	489	413	201,957		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun**		**Dok**	**4**		**1,166,961**		
				Belanja Kertas dan Cover						
				Kertas HVS Folio F4	Rim	1				

							76,700	76,700		
				Belanja Cetak dan Penggandaan						
				Fotocopy	Lembar	617	413	254,821		
				Jilid Antero Biasa 300-500	eksampler	4	29,500	118,000		
				Belanja Peralatan komputer						
				Tinta Printer Epson	buah	2	54,280	108,560		
1	05	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**					**2,343,563,919**		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan**	**Gaji dan tunjangan PNS**	**tahun**	**1**	**2,494,755, 474**	**2,255,599,339**		
1	**05**	**Sub Kegiatan:Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**jumlah dokumen yang di verifikasi**		**Dokumen**	**12**		**86,040,000**		
				Belanja Honorarium	OB					
				Pengguna Anggaran	OB	12	2,280,000	27,360,000		
				Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	OB	12	1,250,000	15,000,000		
				Honor PPTK	OB	12	2,210,000	26,520,000		
				Bendahara Pengeluaran	OB	12	860,000	10,320,000		
				Staff pengelola keuangan	OB	12	570,000	6,840,000		

1	**05**	**Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun**		**laporan**	**1**		**1,124,540**		
				ATK						
				kertas Hvs F4	Rim	1	76,700	76,700		
				Fotocopy	Lembar	400	413	165,200		
				Jilid Antero Biasa 300-500	Exampler	5	29,500	147,500		
				Tinta Printer Epson	buah	3	54,280	162,840		
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun**		**laporan**	**2**		**800,040**		
				ATK						
				kertas Hvs F4	Rim	2	76,700	153,400		
				Fotocopy	Lembar	400	413	165,200		
				Jilid biasa	Exampler	6	29,500	177,000		
				Tinta Printer Epson	buah	3	54,280	162,840		
1	**05**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**								
1	**05**	**Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah**	**Laporan Rekonsialisasi BMD yang disusun**		**Laporan**	**2**		**768,770**		

		pada SKPD								
				Belanja kertas dan cover						
				Kertas HVS Folio F4	Rim	4	76,700	306,800		
				Cetak dan Penggandaan						
				Fotocopy	eksampler	510	413	210,630		
				Jilid Antero Biasa 50-150 Lembar	Buah	3	29,500	88,500		
				Belanja Perlatan Komputer						
				Tinta Printer Epson	Buah	3	54,280	162,840		
1	**05**	**Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD**	**Laporan Pelaksanaan Penatausaahan Barang Milik daerah**		**laporan**	**12**		**7,000,000**		
				Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah						
				Pengurus Barang		12	500,000	6,000,000		
				Admin. Sirup		**2**	**500,000**	**1,000,000**		
1	05	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**215,000,578**		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah Jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan**		**paket**	**4**		**7,598,197**		
				Baliho/Spanduk	M2	9	61,360	552,240		
				Fotocopy	Lembar	4013	413	1,657,369		

1	**05**	**Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Jumlah jenis Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan**		**jenis**	**1**		**4,000,000**		
				Koran/Tabloid/Majalah	eks/bulan	10	100,000	1,000,000		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material**	**Jumlah Jenis ATK dan Bahan pembersih yang disediakan**		**jenis**	**61**		**25,451,850**		
				Belanja Barang Pakai Habis						
				Stella	botol	10	30,107	301,070		
				Porstex	botol	10	37,168	371,680		
				Sapu Lantai	Buah	6	37,665	225,990		
				Sapu Lidi	Buah	6	15,487	92,922		
				Sapu karet	Buah	2	53,896	107,792		
				Tissue	Buah	24	19,204	460,896		
				Sabun pembersih lantai	bks	10	23,417	234,170		
				kapur barus kamar mandi	bks	5	30,975	154,875		
				Belanja ATK						
				Buku Folio	Buah	15	21,712	325,680		
				Map Plastik	Buah	50	3,068	153,400		
				map kertas	pack	50	38,350	1,917,500		
				map snalhekter plastik	buah	250	4,672	1,168,000		
				tinta printer	botol	25				

							54,280	1,357,000		
				Tinta Stempel	botol	5	8,260	41,300		
				kertas HVS F4	Rim	42	76,700	3,221,400		
				kertas HVS A4	Rim	18	63,720	1,146,960		
				kertas NCR	Rim	6	81,420	488,520		
				kertas NCR pink	Rim	3	81,420	244,260		
				kertas faximile	roll	5	53,100	265,500		
				Balpoint	pack	10	38,940	389,400		
				pensil	pack	5	57,230	286,150		
				Box File	buah	25	31,152	778,800		
				spidol besar	buah	15	8,968	134,520		
				Gunting besar	buah	15	8,968	134,520		
				Gunting sedang	buah	10	11,918	119,180		
				penggaris	Buah	20	9,145	182,900		
				Hekter sedang	buah	15	46,020	690,300		
				Hekter Kecil	buah	30	20,060	601,800		
				Isi Hekter	pack	10	40,120	401,200		
				Lem Kerta	buah	20	15,045	300,900		
				kwitansi	exp	20	9,934	198,680		

				Paper Clips kecil	pack	20	8,850	177,000		
				Paper Clips sedang	pack	10	32,450	324,500		
				Materai	Lembar	151	15,487	2,338,537		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu**	**Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan**		**jenis**	**12**		**10,889,850**		
				Belanja ruang pimpinan						
				air mineral	dos	12	54,825	657,900		
				biskuit kaleng	kaleng	10	39,150	391,500		
				Minuman ringan	botol	100	6,100	610,000		
				Belanja makanan dan minuman						
				Snack Kegiatan	kotak	50	20,000	1,000,000		
				Nasi Kotak Kegiatan	kotak	50	30,000	1,500,000		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Jumlah Perjalanan dinas dalam dan luar daerah**		**kali**	**#REF!**		**167,060,681**		
				Perjalanan Dinas Biasa (Jakarta)						
				Pertalite (eselon II)	liter		2,559,078	2,559,078		
				Eselon II	kali		17,247,000	17,247,000		
				Eselon III	kali		13,984,000	13,984,000		
				Perjalanan Dinas Biasa (Makassar)						

				Pertalite (eselon II)	liter		2,074,024	2,074,024		
				Eselon II	org/hari		22,464,000	22,464,000		
				Eselon III	org/hari		14,508,000	14,508,000		
				Eselon IV/Gol.III	org/hari		3,480,000	3,480,000		
				Golongan III, II	org/hari		3,480,000	3,480,000		
				Non ASN	org/hari		5,560,000	5,560,000		
				Perjalanan Dinas Kota						
				pertalite	liter		585,410	585,410		
				Dexlite	liter		646,135	646,135		
				Eselon II	kali		980,000	980,000		
				Eselon III	kali		850,000	850,000		
				Eselon IV/Gol.III	kali		510,000	510,000		
				Golongan III, II dan non asn	kali		850,000	850,000		
1	05	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**		**jenis**	**4**		**732,668,380**		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi**		**surat**	**400**		**96,000,000**		
				jasa upah kerja				-		
				Arsiparis/agendaris/ caraka	OB	96				

							1,000,000	96,000,000		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah Bulan Peneyediaan Biaya Tagihan Telpon, Air dan Listrik**		**bulan**	**12**		**54,668,380**		
				Tagihan Listrik	kwh	25922	1,790	46,400,380		
				Tarif wifi/ Indihome	bulan	12	689,000	8,268,000		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Jumlah jasa administrasi keuangan**		**OB**	**96**		**582,000,000**		
				Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi						
				Operator SIPD	OB	36	1,500,000	54,000,000		
				Belanja upah jasa						
				Aspri Pimpinan	OB	36	1,500,000	54,000,000		
				operator komputer		36	1,000,000	36,000,000		
				Operator pusdalops		24	1,000,000	24,000,000		
				Satgas		156	1,000,000	156,000,000		
				TRC		240	1,000,000	240,000,000		
				SOPIR		12	1,500,000	18,000,000		
1	05	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**					**61,787,767**		

		Pemerintahan Daerah								
1	**05**	**Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan**		**unit**	**20**		**52,197,767**		
				BBM ESEL. II						
				pertamax	liter	739	16,726	12,360,514		
				BBM ESEL. III						
				pertamax	liter	503	16,726	8,413,178		
				BBM MOBIL RESCIUE						
				DEXLITE	liter	325	18,461	5,999,825		
				Belanja Suku Cadang						
				kampas rem	set	2	450,000	900,000		
				shockbreker	pcs	3	500,000	1,500,000		
				busi	pcs	5	45,000	225,000		
				aki mobil	pcs	1	1,080,000	1,080,000		
				kampas rem cakram	set	3	350,000	1,050,000		
				ban luar	pcs	1	745,000	745,000		
				Bahan bakar minyak						
				Oli mesin mobil	jergen	2	413,206	826,412		
				Oli gardan mobil	botol	5	86,730			

								433,650		
				oli poiwer stering mobil	botol	3	126,408	379,224		
				oli rem mobil	botol	6	117,581	705,486		
				Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan						
				pajak kendaraan roda 4	tahun	1	3,000,000	3,000,000		
				pajak kendaraan roda 4	unit	1	2,000,000	2,000,000		
				motor trail	unit	5	250,000	1,250,000		
				motor bebek	unit	5	200,000	1,000,000		
				Belanja Sewa kendaraan						
				Sewa kendaraan	unit/bulan	12	8,500,000	102,000,000		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipeliharan**		**unit/ser**	**8**		**4,590,000**		
				Belanja Pemeliharaan Komputer	unit					
				pemeliharaan Ac	unit/tahun	3	610,000	1,830,000		
				Pemeliharaan Personal Komputer PC CPU	unit/tahun	2	690,000	1,380,000		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala**		**unit/set**	**1**		**5,000,000**		
				Pemeliharaan gedung kantor	M2	500	10,000	5,000,000		

1	**05**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Cakupan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**					**684,296,927**		
1	05	**Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**					**366,956,809**		
		Penyusunan Kajian Resiko Bencana kabupaten/ Kota	**Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang dilegalisir**		**Dokumen**	**1**		**298,991,106**		
				Belanja Cetak dan penggandaan						
				Baliho/Spanduk	meter	12	61,360	736,320		
				cetak art		10	84,370	843,700		
				Fotocopy	lembar	4850	413	2,003,050		
				ATK						
				kertas HVS	rim	10	63,720	637,200		
				tinta printer	botol	12	54,280	651,360		
				bollpoin	pack	12	40,120	481,440		
				spidol besar	buah	10	10,314	103,140		
				map plastik kancing	pack	10	38,940	389,400		
				Belanja Makan Minum Rapat						
				Prasmanan		150	50,000	7,500,000		

				Nasi kotak	kotak	250	30,000	7,500,000		
				Snack	kotak	250	20,000	5,000,000		
				Belanja jasa tenaga ahli						
				Honor tenaga ahli	orang/bln	12	4,000,000	48,000,000		
				Honor tenaga ahli	orang/bln	12	2,500,000	30,000,000		
				Belanja transportasi dan sewa gedung						
				Transportasi peserta	org/keg	150	100,000	15,000,000		
				Sewa gedung		5	2,500,000	12,500,000		
				sewa hotel		75	500,000	37,500,000		
				Perjalanan dinas dalam kota						
				Eselon II	org/keg		30,420,000	30,420,000		
				Eselon III	org/keg		26,081,696	26,081,696		
				Staf Gol. III,II,I dan Non ASN	org/keg		32,956,000	32,956,000		

				Perjalanan dinas luar kota						
				Eselon II	org/keg		4,900,000	4,900,000		
				Eselon III	org/keg		11,900,000	11,900,000		
				Staff Golongan III	org/keg		18,870,000	18,870,000		
				BBM			5,017,800	5,017,800		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)**	**Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi**		**orang**	**240**		**67,965,703**		
				Belanja cetak dan Penggandaan						
				Baliho/Spanduk	meter	12	61,360	736,320		
				Fotocopy	lembar	1211	413	500,143		
				ATK				-		
				Tinta Print	botol	8	54,280	434,240		
				Bolpoin	pack	4	38,940	155,760		

				pelubang kertas	bh	3	36,580	109,740		
				gunting kertas	buah	3	18,408	55,224		
				kertas hvs folio F4	rim	4	76,700	306,800		
				Belanja Makan Minum Rapat						
				Nasi kotak	kotak	700	30,000	21,000,000		
				Snack	kotak	700	20,000	14,000,000		
				Belanja Perjalanan dinas dalam kota						
				BBM	liter		2,107,476	2,107,476		
				Eselon III	org/kali		7,140,000	7,140,000		
				Gol. III,II,I dan Non ASN	org/kali		21,420,000	21,420,000		
1	05	**Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**						**201,553,426**		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan**	**Jumlah kawasan rawan bencana yang dilakukan penguatan dalam pencegahaan dan kesiapsiagaan**		**Kawasan**	**10**		**13,602,864**		

		Kesiapsiagaan								
				Belanja Alat Tulis Kantor						
				kertas hvs folio F4	rim	4	76,700	306,800		
				Spidol	bh	5	10,314	51,570		
				cetak baliho	M2	6	61,360	368,160		
				tinta print	botol	3	54,280	162,840		
								-		
				Belanja Perjalanan dinas dalam kota				-		
				Eselon II	kali		490,000	490,000		
				Eselon III	kali		1,700,000	1,700,000		
				Golongan III/ II/I/Non ASN	kali		6,800,000	6,800,000		
				BBM	liter		1,223,494	1,223,494		
				Belanja Makanan dan Minuman				-		
				Snack	kotak	50	20,000	1,000,000		

				Nasi Kotak	kotak	50	30,000	1,500,000		
1	**05**	**Pengembangan Kapasitas TIM Reaksi Cepat (TRC)**	**jumah anggota TRC yang mengikuti pelatihan**		**orang**	**40**		**9,726,060**		
				Belanja cetak dan kertas				-		
				Spanduk/Baliho	M2	6	61,360	368,160		
				Piagam peserta		6	70,800	424,800		
				kertas	rim	3	76,700	230,100		
				Belanja Makanan dan Minuman				-		
				Air Mineral	karton	5	20,600	103,000		
				Snack	kotak	70	20,000	1,400,000		
				Nasi Kotak	kotak	70	30,000	2,100,000		
				Belanja honorarium narasumber dan moderator				-		
				Honorarium narasumber Es.II	orang/jam	1	1,000,000	1,000,000		
				Honorarium narasumber Es.III	orang/jam	2	900,000	1,800,000		
				Honorarium moderator	orang/jam	2	700,000	1,400,000		
				Honorarium panitia	orang/ja	3				

					m		300,000	900,000		
		Penyusunan rencana kontijensi	**Jumlah dokumen kontijensi**					**178,224,502**		
				Belanja ATK						
				Bolpoin	buah	2	40,120	80,240		
				map kertas		2	38,350	76,700		
				penggaris		5	9,145	45,725		
				Foto copy		3631	413	1,499,603		
				cetak baliho		6	61,360	368,160		
				kertas A4		5	63,720	318,600		
				kertas F4		5	76,700	383,500		
				tinta		8	54,280	434,240		
				Belanja Makanan dan Minuman				-		
				Snack	kotak	200	20,000	4,000,000		
				Nasi Kotak	kotak	200	30,000	6,000,000		
				Belanja Perjalanan dinas luar kota				-		
				Eselon II	kali					

							24,926,000	24,926,000		
				Eselon III	kali		59,436,000	59,436,000		
				Golongan III/ II/I/Non ASN	kali		6,960,000	6,960,000		
				BBM	liter		2,007,120	2,007,120		
				Belanja Perjalanan dinas dalam kota				-		
				Eselon III	kali		2,550,000	2,550,000		
				Golongan III/ II/I/Non ASN	kali		7,650,000	7,650,000		
				BBM	liter		1,488,614	1,488,614		
				Belanja jasa tenaga ahli						
				jasa tenaga ahli	org/bln	15	4,000,000	60,000,000		
1	05	**Kegiatan : Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**						**61,041,601**		

1	**05**	**Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota**	**SK penetapan status darurat bencana**		**dok**	**15**		**28,814,432**		
				Perjalanan dinas dalam kota				-		
				pertamax	liter	59	16,726	986,834		
				Dexilate	Liter	78	18,461	1,439,958		
				eselon II	kali		2,450,000	2,450,000		
				Eselon III/IV	kali		4,250,000	4,250,000		
				Gol.III,II dan Non asn	kali		5,100,000	5,100,000		
				Belanja ATK						
				Kertas HVS Folio F4	Rim	2	76,700	153,400		
				Belanja Peralatan Komputer						
				Tinta Printer Epson	Buah	8	54,280	434,240		
				Belanja Makan dan Minum rapat						
				nasi kotak	kotak	400	30,000	12,000,000		
				snack	kotak	100	20,000	2,000,000		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban yang berhasil ditemukan, di tolong dan di evakuasi**		**orang**	**20**		**19,961,595**		
				Belanja ATK						
				Kertas HVS Folio F4	Rim	2	76,700	153,400		
				Belanja Peralatan Komputer						

				Tinta Printer Epson	Buah	8	54,280	434,240		
				Perjalanan dinas dalam kota						
				Eselon II	kali		2,450,000	2,450,000		
				Eselon III	kali		3,400,000	3,400,000		
				Gol. III,II dan Non asn	kali		10,540,000	10,540,000		
				pertamax	liter	89	16,726	1,488,614		
				Dexlite	liter	81	18,461	1,495,341		
		Sub Kegiatan : Aktivasi Sistem Komando penanganan darurat bencana	**Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando**		**laporan**	**10**		**12,265,574**		
				Snack	Kotak	150	20,000	3,000,000		
				Nasi Kotak	kotak	150	30,000	4,500,000		
				Belanja ATK						
				Kertas HVS Folio F4	Rim	2	76,700	153,400		
				Belanja Peralatan Komputer						
				Tinta Printer Epson	Buah	4	54,280	217,120		
				Perjalanan dinas dalam kota				-		
				Eselon III	kali		1,360,000	1,360,000		
				Gol. III,II dan non asn	kali		2,550,000	2,550,000		
				pertamax	liter	29	16,726	485,054		

1	05	**Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**						**54,745,091**		
1	**05**	**Sub Kegiatan : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana**	**Jumlah Laporan hasil Binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana**		**Laporan**	**10**		**3,829,776**		
				Belanja ATK						
				Kertas HVS Folio F4	Rim	1	76,700	76,700		
				Kertas HVS Folio A4	Rim	1	63,720	63,720		
				Amplop	Buah	8	54,280	434,240		
				isi staples	buah	1	36,580	36,580		
				staples	Buah	1	20,060	20,060		
				map kertas	pack	1	38,350	38,350		
				jilid antero biasa	dok	4	45,500	182,000		
				foto copy	lembar	250	413	103,250		
				Makan dan minum rapat						
				Snack	Kotak	25	20,000	500,000		
				Nasi Kotak	kotak	25	30,000	750,000		
				Perjalanan dinas dalam kota				-		
				Eselon III	kali		170,000	170,000		
				Gol. III,II dan Non asn	kali		1,020,000	1,020,000		
				BBM pertamax	liter	26				

							16,726	434,876		
		Sub Kegiatan : Bimbingan teknis Pascabencana Kabupaten/Kota	**Jumlah aparatur BPBD Kab./Kota dan lintas perangkat daerah Kab./Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)**		**Orang**	**58**		**12,632,100**		
				Snack	Kotak	70	20,000	1,400,000		
				Nasi Kotak	kotak	35	30,000	1,050,000		
				Belanja ATK				-		
				Baliho/Spanduk	Meter	3	61,360	184,080		
				foto copy	lembar	1050	413	433,650		
				Bolpoin	lusin	3	38940	116820		
				Block Note	buah	50	9735	486750		
				cetak Id card	buah	40	5900	236000		
				Kertas HVS Folio F4	Rim	1	76,700	76,700		
				Kertas HVS Folio A4	Rim	1	63,720	63,720		
				Kertas HVS Folio F4	Rim	1	67,260	67,260		
				Tinta print	botol	4	54,280	217,120		
				Honorarium						
				Narasumber Eselon II	OJ	4	1,000,000	4,000,000		
				Narasumber Eselon III	OJ	4	900,000	3,600,000		
				Moderator	Orang	1				

							700,000	700,000		
		Sub Kegiatan : Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	**Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan**		**Kegiatan**	**11**		**23,886,932**		
				Makan dan Minum Rapat						
				Snack	Kotak	45	20,000	900,000		
				Nasi Kotak	kotak	45	30,000	1,350,000		
				ATK						
				foto copy	lembar	250	413	103,250		
				jilid antero biasa	dok	3	45,500	136,500		
				Bolpoin	pack	1	38,940	38,940		
				Kertas HVS Folio A4	Rim	2	63,720	127,440		
				Tinta print	botol	4	54,280	217,120		
				Perjalanan dinas luar kota				-		
				Eselon III	kali		4,836,000	4,836,000		
				Eselon IV/ Gol. III	kali		11,838,000	11,838,000		
				Perjalanan dina dalam kota				-		
				Eselon III	kali		510,000	510,000		
				Gol. III,II,I dan non asn	kali		2,040,000	2,040,000		
				BBM	Liter	107	16,726	16,726		

		Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	**Jumlah penyelesaian dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Renacan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun**		**Dok**	**21**		**14,396,283**		
				PENYUSUNAN JITUPASNA						
				Snack	Kotak	85	20,000	1,700,000		
				Nasi Kotak	kotak	85	30,000	2,550,000		
				Belanja ATK				-		
				Kertas HVS Folio F4	Rim	1	76,700	76,700		
				Kertas HVS A4	Rim	1	63,720	63,720		
				Jilid Antero Biasa	dokumen	12	45,500	546,000		
				Bolpoin	pack	1	38,940	38,940		
				isi staples	buah	1	36,580	36,580		
				staples	Buah	1	20,060	20,060		
				map kertas	pack	1	38,350	38,350		
				Cetak	M2	1	61,360	61,360		
				foto copy	lembar	139	413	57,407		

				Perjalanan dinas dalam kota				-		
				Eselon III	kali		1,360,000	1,360,000		
				Gol. III,II dan non asn	kali		5,100,000	5,100,000		
				BBM	liter	161	16,726	2,692,886		
								-		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 memuat visi, misi, arah kebijakan serta indikator rencana program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

Belopa, Juni 2024

KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KAB. LUWU

Drs. ANDI BASO TENRIESA, M.PA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19661231 199203 1 091

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU

TAHUN 2025

RENJA
(RENCANA KERJA)
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perikanan Luwu memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu 2025 – 2026.

Setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2025 disusun sebagai arahan pelaksanaan tupoksi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Luwu yang berisi program dan kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantudan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama di bidang perikanan di Kabupaten Luwu pada masa sekarang dan yang akan datang.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu



Ir. BAHARUDDIN
NIP. 19650903 199203 1 011

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab Luwu 19

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24

2.4 Review Terhadap Rencana Akhir RKPD 25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKATDAERAH 50

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 50

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 50

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH 56

4.1 Rencana Kerja 56

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah 56

BAB V PENUTUP 65

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel.2.1.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Luwu ……..…….....	11
Tabel.2.2.	Kewenangan Kabupaten/ kota pada Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, …….....	22
Tabel.2.3.	Tabel analisis pencapaian kinerja Pelyanan Dinas Perikanan…….....	23
Tabel.2.4	Review terhadap RKPD tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu……....	27
Tabel.2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Luwu……..	37
Tabel.3.1	Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2025…….....	51
Tabel.3.2.	Tabe1 Program Utama dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2025……..….....…..……..	52
Tabel.4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun anggaran, dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan salah satunya adalah Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perencanaan tahunan dari Organisasi Perangkat daerah yang bersangkutan.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan perencanaan tahunan dari OPD yang bersangkutan, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah,perencanaan merupakan langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan Renja adalah salah satunya. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perikanan Kabupaten Luwu sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2025. Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen rencana pembangunan

OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan didaerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2025 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Keluatan dan Perikanan Nomor 39/Permen-KP/2017 tentang Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PER-DJPT/2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Kegiatan Bantuan Premi Asuransi Nelayan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PER-DJPT/2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7);
14. Perda No.3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Perda No 8 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kab. Luwu 2025 – 2026.
15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 122);
16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu;
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2026

18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RENJA) Tahun 2025 Dinas Perikanan ini adalah :

a. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban tertulis dan gambaran mengenai perencanaan pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan pada tahun 2025.
b. Sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun.
c. Sebagai bahan acuan dalam rangka penyusunan/perencanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah pada tahun-tahun selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN,

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerjayang sudah ditentukan serta ketentuan peraturan perundangundanganyang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasidan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan hasil pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dankegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif tahun 2025.

BAB V PENUTUP,

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Luwu. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Luwu selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil(*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu pada tahun anggaran 2023 dilakukan pada 4 program, 14 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

Evaluasi Program, Kegiatan dan Sasaran Tahun 2023

Pencapaian misi strategis yang yang telah ditargetkan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Luwu. Sebagai bahan Akuntabilitas Keuangan dibawah ini disajikan Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan sasaran strategis guna mencapai tujuan, sasaran dan program sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023.

Sebagaimana yang telah dikemukakan tentang rencana Kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2023 telah menetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan Tujuan yang tercakup dalam Program pada beberapa kegiatan dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.16.549.792.030,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Rupiah) hingga berakhirnya tahun anggaran 2023 telah terealisasi sebesar Rp. Rp. 15.471.197.530 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah)

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Tahun anggaran 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu menganggarkan belanja Operasi sebesar Rp. 13.771.859.030 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 12.925.302.530 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah)

Sedangkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Tahun Anggaran 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Menganggarkan belanja Modal sebesar Rp. 2.777.933.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan Realisasi sebesar Rp. 2.545.895.000 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu beserta indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023 telah melaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Evaluasi pencapaian target kinerja perangkat daerah tahun 2023 berdasarkan Renja perangkat daerah tahun 2023 sebagaimana laporan evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan evaluasi monev tahun 2023. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran dinas perikanan kabupaten luwu telah mencapai target kinerja sebesar

93,48%. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerinTahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai 10 GT di wilayah Sungai,Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat di usahakan dalam 1 daerah Kabupaten

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- Penerbitan Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya

dalam1 (satu) daerah Kabupaten

- Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil
- Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)
- Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- UPTD BBI AIR TAWAR

4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten

Kondisi keberhasilan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu disajikan pada tabel 2.1 yang disesuaikan dengan OPD dapat terlihat pada format tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat daerah Tahun 2023

Kabupaten Luwu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMEINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*outcome*) / KEGIATAN (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Reaslisasi Capaian (2024)	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
33.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah**								
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun**	**100%**		**100%**			**100%**	**100%**	**100 %**
3.25.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMEINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*outcome*) / KEGIATAN (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Reaslisasi Capaian (2024)	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100 %
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu**	**100**	**100**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2142 OB	552 OB	56 OB	56 OB	100	56 OB	56 OB	100 %

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMEINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*outcome*) / KEGIATAN (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Reaslisasi Capaian (2024)	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1087 OB	1087 Dokumen	1087 Dokumen	100	1087 Dokumen	1087 Dokumen	100 %
3.25.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	
3.25.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100 %
3.25.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pesentase ASN dengan predikat kinerja baik**		**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	100 %
3.25.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	100	2 Orang	2 Orang	100 %
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran**		**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	100 %
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	69 Jenis	12 jenis	11 jenis	11 jenis	100	11 jenis	11 jenis	100 %

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMEINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*outcome*) / KEGIATAN (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Reaslisasi Capaian (2024)	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 Unit			0			100 %
3.25.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100 %
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100 %
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	108 surat kabar,	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	1 Jenis	100 %
3.25.01..2.06.07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah jenis / bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	48	1 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100 %
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	635 OK	400 OK	500 OK	500 OK	100	500 OK	500 OK	100 %
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**		**100%**						100 %

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMEINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*outcome*) / KEGIATAN (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Reaslisasi Capaian (2024)	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bln/4 rek. Listrk/12 bln internet,	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	864 OB	156 OB	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	100 %
3.25.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	6 Unit	100 %
3.25.03	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Total Produksi Perikanan Tangkap**	**19193,79 Ton**		**18.634,75**	**18.970,50**		**18.634,75**	**18.634,75**	100 %
3.25.03.2.01	***Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota***	***Jumlah produksi di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya***								**100 %**
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3 Paket Jaring Millenium, 1 paket pancing rawai, 3 kapal 1 GT, 4 Paket Coolbox,	52 Kelompok	66 paket	64 paket	96			100 %

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMEINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*outcome*) / KEGIATAN (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Reaslisasi Capaian (2024)	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Jumlah TPI yang dikelola**		**4 TPI**						100 %
3.25.03.2.03.02	Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penimbunan TPI Batu lotong, pembangunan plat duikker jalan TPI Murante	4 TPI	4 TPI	4 TPI	100	4 TPI	4 TPI	100 %
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya								**100 %**
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar**		**65**						**100 %**
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 paket prasarana budidaya laut (teripang) pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi 2 paket, Sumur bor air tawar untuk hatchery	6 Paket	5 Unit/Paket	5 Unit/Paket	100	5 Unit/Paket	5 Unit/Paket	100 %

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMEINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*outcome*) / KEGIATAN (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Reaslisasi Capaian (2024)	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pembangunan /rehabilitasi sarana UPR, 3 Paket sarana budidaya polikultur, 4 paket sarana budidayaikan air tawar, 1 paket sarana budidaya ikan hias air tawar, 1 paket penyediaan bibit calon induk beserta pakan	59 Kelompok	75 Unit/Paket	55 Unit/Paket	100	55 Unit/Paket	55 Unit/Paket	100 %
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah BBI yang terfasilitasi Sarana Pembudidayaan Ikan		700000 Ekor						100 %
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Jumlah Produksi Pengolahan hasil perikanan pemasara n hasil perikanan**								**100 %**
3.25.06.2.02	**Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Kegiatan Gemarikan yang Dilaksanakan**			**4 Lokasi**	**4 Lokasi**	**100**	**4 Lokasi**	**4 Lokasi**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMEINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*outcome*) / KEGIATAN (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Reaslisasi Capaian (2024)	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
3.25.06.2.02.01	pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		4 Kegiatan	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	100	4	4	100 %

TABEL 2.2

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DAN TINGKAT CAPAIANKINERJA DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Tingkat Capaian Kinerja (%)
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.25.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.471.814.030**	**4.349.797.936**	**97%**
3.25.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**71.333.700**	**70.332.300**	**99%**
3.25.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.905.000	15.576.600,00	98%
3.25.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.678.000	10.357.400,00	97%
3.25.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.696.000,00	7.636.000,00	99%
3.25.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.948.700,00	12.818.700,00	99%
3.25.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.629.000,00	11.559.000,00	99%
3.25.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.908.000,00	5.848.000,00	99%
3.25.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.569.000,00	6.536.600,00	100%

No.	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Tingkat Capaian Kinerja (%)
3.25.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.872.707.380,00**	**3.764.273.536,00**	**97%**
3.25.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.638.397.380,00	3.529.963.536,00	97%
3.25.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	234.310.000,00	234.310.000,00	100%
3.25.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**100%**
3.25.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.400.000,00	8.400.000,00	100%
3.25.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**13.220.000,00**	**10.720.000,00**	**81%**
3.25.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.220.000,00	10.720.000,00	81%
3.25.01.2.06		**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**293.104.450,00**	**286.407.300,00**	**98%**
3.25.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.423.500,00	3.413.800,00	100%
3.25.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.579.200,00	4.577.900,00	100%
3.25.01..2..06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.889.000,00	7.720.000,00	98%

No.	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Tingkat Capaian Kinerja (%)
3.25.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000,00	8.160.000,00	57%
3.25.01..2.06.07		Penyediaan Bahan Material	66.757.750,00	66.729.100,00	100%
3.25.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.055.000,00	195.806.500,00	**1,00**
3.25.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah**	**163.022.000,00**	**159.702.800,00**	**98%**
3.25.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.222.000,00	27.902.800,00	89%
3.25.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.800.000,00	131.800.000,00	100%
3.25.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.026.500,00**	**49.962.000,00**	**100%**
3.25.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.726.500,00	45.667.000,00	100%
3.25.01.2.09.02		Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000,00	4.295.000,00	100%
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**3.802.418.000,00**	**3.158.254.516,00**	**83%**
3.25.03.2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah**	**3.778.418.000,00**	**3.134.254.516,00**	**100%**

No.	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Tingkat Capaian Kinerja (%)
		Kabupaten/ Kota			
3.25.03.2.01 .02		Peyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.799.000.000,00	1.629.436.000,00	**91%**
3.25.03.2.01 .03		Penjaminan Ketersediaan Sarana UsahaPerikanan Tangkap	1.979.418.000,00	1.504.818.516,00	**76%**
3.25.03.2.03		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**100%**
3.25.03.2.03 .02		Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	24.000.000,00	24.000.000,00	**100%**
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**7.860.626.000,00**	**7.550.968.078,00**	**96%**
3.25.04.2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**7.860.626.000,00**	**7.550.968.078,00**	**96%**
3.25.04.2.04.02		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.064.350.000,00	1.933.207.800,00	94%
3. 25. 04. 2. 04. 03		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	5.796.276.000,00	5.617.760.278,00	**97%**
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**414.934.000,00**	**412.177.000,00**	**99%**
3.25.06.2.03		**Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**414.934.000,00**	**412.177.000,00**	**99%**

No.	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Tingkat Capaian Kinerja (%)
3.25.06.2.03.01		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Komsumsi dan usaha Pengolahan dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.754.000,00	99%
3.25.06.2.03.02		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Peikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	394.934.000,00	392.423.000,00	99%
		JUMLAH	**16.549.792.030**	**15.471.197.530**	**93%**

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN KAB. LUWU

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2016, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu mempunyai **Tugas Pokok** membantu Bupati dalam merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan dibidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Dinas perikanan mempunyai **Fungsi** sebagai berikut :

a. perumusan penyusunan program kegiatan Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan;
c. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
d. pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. perumusan kebijakan teknis Dinas;
g. pelaksanaan kebijakan dan administrasi dinas;
h. penyusunan rencana strategic Dinas;
i. penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
j. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan fungsional, serta staf dalam lingkup Dinas;
k. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring program/kegiatan Dinas;
l. perumusan, penyelenggaraan dan pengarahan rencana strategic dan program kerja dinas yang sesuai dengan visi misi daerah;
m. pengoordinasian perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya;
n. penyelenggaraan kebijakan dibidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah yaitu Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, dan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
o. pembinaan dan pengembangan karir pegawai serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah;
p. pelaksanaan pengawasan melekat (Waskat) terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dinas;
q. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan/atasan;
r. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;

s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

t. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

u. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang Perikanan.

Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan Dinas Perikanan dalam menjalankan fungsinya sebagai berikut :

1. Profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur dan penyuluh perikanan masih kurang.
2. Pendapatan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan masih rendah.
3. Peningkatan produksi benih ikan belum konsisten dan berkelanjutan.
4. Tempat Pelelangan Ikan belum berfungsi secara optimal.
5. Pembinaan dan pemberdayaan terhadap pembudidaya ikan dan nelayan masih rendah.
6. SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang belum mandiri dan berdaya saing.
7. Masih terbatasnya benih bermutu tinggi dikarenakan sulitnya mendapatkan indukan bermutu tingi dan tahan penyakit dan masih rendahnya perhatian pembudidaya lingkungan, karena umumnya masih menerapkan sistem tradisional dan semi intensive.
8. Sebagian besar Prasarana Pendaratan Ikan belum dapat dioperasikan disebabkan kurangnya fasilitas yang memadai untuk melayani aktivitas Nelayan dalam melaut dan mendaratkan Ikan
9. Kurangnya minat kelompok olahan perikanan untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan
10. Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan SDM pengolah dan pemasar

Perangkat Daerah pada hakekatnya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang sebagai daerah otonom. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kabupaten/kota di bidang perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Kewenangan Kabupaten/Kota pada Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014

No.	Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
2.	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kewenangan yang dilimpahkan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia di bidang kelautan dan perikanan adalah sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Uraian pada bagian ini digunakan sebagai alat untuk meng-interpretasi sekurang-kurangnya ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan, pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mempertajam analisis terhadap capaian kinerja, terlebih dahulu disajikan nomenklatur kegiatan perangkat daerah kabupaten/ kota sesuai kewenangan tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Untuk Kabupaten Luwu, tidak semua kegiatan yang ditetapkan dalam Permendagri tersebut dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Oleh karena itu, kegiatan yang disajikan adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh perangkat daerah sesuai mandatori dan memiliki potensi untuk diselenggarakan di Kabupaten Luwu, yaitu sebagai berikut.

TABEL 2.4 PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023 DINAS PERIKANAN

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI
1	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	2,8
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	3,2
2	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pertumbuhan IKM Pengolahan Hasil Perikanan	%	34
		Persentase Pertumbuhan IKM Pemasaran Hasil Olahan Perikanan	%	34

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu

Nama OPD: DINAS PERIKANAN KAB LUWU

No	Indikator Program	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Poduksi Perikanan Budidaya Sebesar 2,5% Per Tahun (Jumlah Produksi Budidaya) (Ton)		IKU	661.589,79	684.745,43	710.081,02	724.282,64	647.981,05	646.450,58	710.081,02	724.282,64	
	Target Daerah Produksi Budidaya (Ton)			661.589,79	684.745,43	710.081,02	724.282,64	647.981,05	646.450,58	710.081,02	724.282,64	
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Sebesar 1% Per Tahun (Jumlah Produksi Tangkap) (TON)		IKU	18.180,25	18.634,75	19.193,79	19.577,67	18.842,95	18.970,50	19.193,79	19.577,67	
	Target Daerah Produksi Tangkap (Ton)			18.180,25	18.634,75	19.193,79	19.577,67	18.842,95	18.970,50	19.193,79	19.577,67	
3	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan Sebesar 1% Per Tahun		IKU	153,88	156,19	159,31	162,50	205,28	251,37	159,31	162,50	
	Target Daerah Produksi Tangkap (Ton)			153,88	154	159,31	162,50	205,28	251,37	159,31	162,50	
4	Produksi Perikanan (Ribu Ton)		IKU	683,12	703,62	724,73	743,86	666,24	665,42	729,27	743,86	
5	Angka Konsumsi Ikan			55,96	56,96	57,98	59,14	54,84	55,89	57,98	59,14	
6	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan			44,08	46,28	48,60	49,57	42,25		48,60	49,57	
7	TPI yang operasional			3	3	3	3	3	3	3	3	

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU

Dalam menyusun perencanaan dibutuhkan suatu gambaran yang jelas tentang berbagai kondisi daerah. Informasi yang jelas tersebut akan memudahkan bagi organisasi untuk menganalisa factor-faktor internal apa saja yang menjadi kekuatan atau kelemahan dan factor-faktor eksternal apa saja yang menjadi peluang atau tantangan.

Pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*) difungsikan untuk melihat kompleksitas permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu sehingga strategi untuk mengatasi kelemahan dan mengantisipasi ancaman, serta untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang guna mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi dan visi Kepala Daerah Kabupaten Luwu.

1. FAKTOR _ FAKTOR INTERNAL <u>KEKUATAN (*STRENGTHS*)</u>

a. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar
b. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar dan intern organisasi serta kebersamaan staf untuk meningkatkan kinerja pemerintahan
c. Dukungan dana APBN dalam kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan
d. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang cukup memadai
e. Usaha perikanan berkembang dengan cukup baik
f. Kelompok – kelompok / lembaga masyarakat perikanan yang telah terbentuk dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan perikanan.

<u>KELEMAHAN (*WEAKNESSES*)</u>

a. Terbatasnya sarana dan prasarana umum di bidang kelautan dan perikanan
b. Terbatasnya teknologi di bidang kelautan dan perikanan
c. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat perikanan
d. Terbatasnya dana APBD untuk pembangunan perikanan
e. Kurangnya ketersediaan data dan infomasi serta akurasi data di bidang kelautan dan perikanan
f. Kurangnya permodalan usaha perikanan

2. FAKTOR – FAKTOR EKSTERNAL <u>PELUANG (*OPPORTUNITIES*)</u>

a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan
b. Keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan diPemerintah Pusat
c. Tersedianya fasilitas kredit lunak dari perbankan dan lembaga keuangan lain
d. Berkembangnya informasi dan teknologi di bidang perikanan

ANCAMAN (*THREATS*)

a. Terjadinya deplesi/penurunan stok sumberdaya ikan diperairan pantai
b. Pengusaan lahan oleh Perhutani
c. Kurangnya kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya perikanan
d. Penggunaan bahan berbahaya dalam usaha pengolahan dan budidaya ikan
e. Rendahnya daya saing produk perikanan di pasar local maupun global

2.4 REVIEW TERHADAP RKPD

Peta jalan (*road map*) pembangunan jangka panjang baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun ditingkat kabupaten/kota sudah disusun dalam dokumen perencanaan jangka panjang, dalam kerangka untuk memperjelas arah pembangunan dalam kurun waktu dua puluh tahun. Pada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2015–2026 juga telah dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta jalan (*road map*) yang merupakan implementasi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2025–2026.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan nasional. Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu dokumen perencanaan di atasnya. Oleh karena itu pada penyusunan pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2025, juga dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Prioritas pembangunan merupakan dasar dalam menentukan alokasi program/ kegiatan dengan kebutuhan indikatif secara umum untuk mendukung pencapaian target kinerja/ sasaran tema RKPD Tahun 2025, yang selanjutnya menjadi Pedoman

Penyusunan dan Anggaran yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025.

RKPD didasarkan pada analisis kebutuhan setiap Perangkat Daerah. Namun demikian, pada tahap lebih lanjut dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah melalui forum Perangkat Daerah/Forum Gabungan Perangkat Daerah dan musrenbang kabupaten. Mendasar pada masukan-masukan dari berbagai pihak dan juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD. Dengan banyaknya kebutuhan akan anggaran biaya kegiatan, tidak seluruh rencana kegiatan dapat terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu dibuat urutan skala prioritas untuk menentukan urutan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap , hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Musrenbang untuk usulan program dan kegiatan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap RKPD tahun 2025

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu

Nama OPD: Dinas Perikanan Kab.Luwu

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3 25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**15.538.483.000,00**				**15.538.483.000,00**
3 25 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.540.687.950,00**				**4.540.687.950,00**
3 25 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**74.273.700,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**74.273.700,00**
3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	45.215.550,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	45.215.550,00
3 25 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.484.452,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.484.452,00

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3 25 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.480.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.480.000,00
3 25 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.639.669,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.639.669,00
3 25 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.692.544,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.692.544,00
3 25 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.828.692,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.828.692,00
3 25 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.982.260,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.982.260,00
3 25 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.924.998.000,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.924.998.000,00**
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/bulan	3.717.008.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/bulan	3.717.008.000,00
3 25 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	714 Dokumen	129.840.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	714 Dokumen	129.840.000,00

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
		SKPD						
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
3 25 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.739.085,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.739.085,00
3 25 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**8.400.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**8.400.000,00**
3 25 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.400.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.400.000,00
3 25 01 2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**			**5.000.000,00**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**			**5.000.000,00**
3 25 01 2.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	5.000.000,00
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesentase ASN dengan predikat kinerja baik	41 pasang/stel	27.060.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesentase ASN dengan predikat kinerja baik	41 pasang/stel	27.060.000

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3 25 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**285.039.750,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**285.039.750,00**
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4.430.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4.430.000,00
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.976.500,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.976.500,00
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.969.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.969.000,00
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.800.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.800.000,00
3 25 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	56.096.670,00	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	56.096.670,00
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	98.075.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	98.075.000,00

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3 25 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**189.250.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**189.250.000,00**
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	32.380.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	32.380.000,00
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	150.000.000,00
3 25 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**53.726.500,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**53.726.500,00**
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	33.190.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	33.190.800,00
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	5.630.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	5.630.000,00
3 25 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**3.385.182.700,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**3.385.182.700,00**

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3 25 03 2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**			**3.385.182.700,00**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**			**3.385.182.700,00**
3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	19193,79 Ton	1.809.136.430,00	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	19193,79 Ton	1.809.136.430,00
			1 dokumen				1 dokumen	
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	19193,79 Ton	1.687.351.000,00	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	19193,79 Ton	1.687.351.000,00
			1 dokumen				1 dokumen	
3 25 03 2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**			**30.000.000,00**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**			**30.000.000,00**
3 25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 TPI	24.000.000,00	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 TPI	24.000.000,00

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3 25 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**7.390.713.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**7.390.713.000,00**
3 25 04 2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**			**7.390.713.000,00**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**			**7.390.713.000,00**
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57,142 %	1.883.924.373,00	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57,142 %	1.883.924.373,00
			39 Kelompok				39 Kelompok	
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57,142 %	5.292.164.599,00	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57,142 %	5.292.164.599,00
			39 Kelompok				39 Kelompok	
3 25 06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**494.934.000,00**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**494.934.000,00**
3 25 06 2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**			**100.000.000,00**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**			**100.000.000,00**

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3 25 06 2.03 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah kegiatan Gemarikan yang diilaksanakan	100 Persen	20.000.000,00	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah kegiatan Gemarikan yang diilaksanakan	100 Persen	20.000.000,00
3 25 06 2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**			**394.934.000,00**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**			**394.934.000,00**
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100 Persen	437.388.276,00	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100 Persen	437.388.276,00
				15.538.483.000,00				**15.538.483.000,00**

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam menyusun Program dan Kegiatan, Dinas Perikanan senantiasa membuka diri terhadap saran dan masukan dari para *stekholder* terkait pembangunan sektor perikanan, hal ini dipa ndang sangat penting dilakukan untuk memperoleh program dan kegiatan yang berkualitas serta tepat sasaran.

Dalam merealisasikan hal tersebut tentunya Dinas Perikanan selalu berpegangan pada peraturan yang berlaku, dalam aturan yang terdapat ada beberapa mekanisme penyerapan Usulan dan masukan Program/kegiatan diantaranya yaitu usulan langsung oleh masyarakat dengan cara berjenjang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat terendah sampai tertinggi, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mekanisme penyerapan aspirasi langsung oleh anggota DPRD (Reses DPRD) maupun usulan-usulan *Button Up* lainya seperti permohonan dan Proposal langsung oleh Kelompok Binaan.

Selain itu Dinas Perikanan juga secara aktif melakukan kordinasi kepada instansi lain terkait pembangunan sektor perikanan untuk memperoleh informasi aktual yang relevan terhadap pembangunan Perikanan Kabupaten Luwu.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini untuk Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025 berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kab.Luwu

Nama OPD : Dinas Perikanan Kab.Luwu

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		jumlah KUB yang yang terjamin sarana usaha perikanan tangkap			
		Pengadaan Kapal/Perahu < 2 GT	Desa Senga Selatan Kecamatan Belopa, Kab. Luwu	Pengadaan Kapal/Perahu < 2 GT	3	unit	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengadaan Kapal/Perahu < 3 GT	DESA CIMPU KEC.SULI, Kab. Luwu	Pengadaan Kapal/Perahu < 3 GT	1	UNIT	
		Pengadaan Mesin Perahu	Desa To'bia , Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu	Pengadaan Mesin Perahu	8	Unit	
		Pengadaan Kapal/Perahu < 3 GT	DESA CIMPU KEC. SULI, Kab. Luwu	Pengadaan Kapal/Perahu < 3 GT	1	UNIT	
		Pengadaan Kapal/Perahu < 2 GT	Kelurahan Suli , Kec. Suli, Kab. Luwu	Pengadaan Kapal/Perahu < 2 GT	1	Unit	
		Pengadaan Kapal/Perahu < 3 GT	Desa Karang-Karangan, Kec. Bua, Kab. Luwu	Pengadaan Kapal/Perahu < 3 GT	2	Unit	
		Pengadaan Mesin Perahu	Desa Karang-Karangan, Kec. Bua, Kab. Luwu	Pengadaan Mesin Perahu	3	Unit	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengadaan alat tangkap Jaring	Desa Karang-Karang, Kec. Bua, Kab. Luwu	Pengadaan alat tangkap Jaring	3	Unit	
		Pengadaan alat tangkap sero	Desa Karang-Karangan, Kec. Bua, Kab. Luwu	Pengadaan alat tangkap sero	3	Unit	
		Pengadaan alat tangkap Jaring	Desa Babang, Kab. Luwu	Pengadaan alat tangkap Jaring	1	UNIT	
		Pengadaan Kapal/Perahu < 3 GT	Desa Raja, Kec. Bua, Kab. Luwu	Pengadaan Kapal/Perahu < 3 GT	2	Unit	
		Pengadaan alat tangkap sero	Desa Tirowali, Kec. Ponrang, Kab. Luwu	Pengadaan alat tangkap sero	2	Unit	
		Pengadaan Mesin Perahu	Desa Raja, Kec. Bua, Kab. Luwu	Pengadaan Mesin Perahu	2	Unit	
		Pengadaan alat tangkap Jaring	Desa Tirowali, Kec. Ponrang, Kab. Luwu	Pengadaan alat tangkap Jaring	2	Unit	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pokdakan yang Memperoleh Bantuan Sarana Produksi Pembudidayaan Ikan			
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	Desa Rumaju, Kab. Luwu	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	100	unit	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	Desa To'balo , Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	8	Unit	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Pendekatan penyusunan Pemerintah Tahun 2025 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan ***Money Follow Program***. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan ***Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial*** dengan memperhatikan pada:

a. Pengendalian perencanaan
b. Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2025
c. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
d. Perkuatan integrasi sumber pendanaan

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Tematik berarti penekanan atau fokus pada perencanaan sampai dengan program prioritas.

Holistik pendekatan menyeluruh dan komprehensif dari hulu sampai hilir.

Integratif yang berarti integrasi dalam siapa berbuat apa dan integrasi sumber pendanaan.

Spasial keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi.

Perkuatan Money Follow Program pada RKP 2025 diarahkan kepada :

a. Menajamkan Prioritas Nasional
b. Memastikan pelaksanaan program
c. Menajamkan integrasi sumber pendanaan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 disusun untuk melakukan penyesuaian terhadap paradigma pembangunan, isu dan permasalahan nasional dan global serta tindak lanjut dari pergeseran kebijakan pemerintah pusat. Sebagaimanan diketahui bahwa rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 tahun sesuai Instruksi Presiden nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Renstra masa pejabat sementara dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman kepada RPD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024-2026 yang bersifat indikatif, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berbagai regulasi yang berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan penyesuaian terhadap indikator dan target sebagaimana tertuang dalam RPD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi. Salah satunya yaitu indikator makro ekonomi pada pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan adalah pertumbuhan produksi perikanan di saat bencana pandemik . Indikator ini diarahkan untuk mendukung kebijakan prioritas daerah dan merenspon kebijakan pembangunan nasional yaitu mendukung ketahanan pangan, stunting, kemiskinan ekstrim, perubahan iklim dan penurunan emisi karbon. Kemudian untuk mendatangkan devisa daerah maka perlu dilakukan peningkatan pelayanan, perbaikan tata kelola dan kapasitas pelabuhan perikanan, dukungan kepada sistem pelayaran dan logistik perikanan sehingga mampu menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai **Poros Maritim dan Pintu Gerbang Utama Kawasan Timur Indonesia.** Oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan dan kemaritiman, sementara pada pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan diupayakan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi yang ramah lingkungan. Belum optimalnya pencapaian tingkat produktifitas usaha perikanan memberi dampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Pembangunan usaha Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan kedepan akan menjadi usaha perikanan yang berproduktivitas dan memiliki dayasaing yang tinggi baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Upaya yang dilakukan diarahkan pada tiga ruang lingkup pengembangan yaitu hilirisasi dan optimalisasi kegiatan produksi melalui pengembangan inovasi teknologi produktif, peningkatan dayasaing dan pemasaran melalui penanganan dan penerapan teknologi pengolahan produk hasil perikanan sehingga menghasilkan produk yang kompetitif dan berkarakter,dan pengembangan mekanisme serta jaringan pemasaran yang inklusif. Dengan komitmen ini, pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan secara optimal akan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Adanya arahan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2021-2024 oleh pemerintah pusat yaitu **Berbasis Ekonomi Biru** dengan output dari penerapan blue economy dibungkus dalam regulasi dan program-program kerja yang tujuannya untuk menyeimbangkan ekologi dan ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun kebijakan tersebut yaitu :

1. Perluasan wilayah konservasi perairan.
2. Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.
3. Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal.
4. Pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil pesisir dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak.
5. Pengurangan sampah plastik di laut melalui Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

Beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan terhadap pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan, diantaranya : (1) Pembangunan Sektor Perikanan Budidaya kedepan menekankan pada peningkatan produksi melalui upaya rekayasa teknologi dan upaya perbaikan lingkungan/habitat pemeliharan; (2) Pembangunan Sektor Perikanan Tangkap diarahkan pada pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berbasis pada tiga fokus pengembangan, yaitu inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan (fishing technology), penguasaan dan pengembangan pengetahuan terhadap target tangkapan (fish target), dan peningkatan pemahaman terhadap daerah penangkapan ikan (fishingground); (3) Adanya Gerakan Peningkatan Produksi Komoditas terhadap 7 komoditi unggulan seperti udang,rumput laut, kepiting, cumi-cumi,bandeng,kakap kerapu dan tuna cakalang tongkol sebagai wujud dari Hilirisasi Perikanan dan Kelautan; (4) semakin bergairahnya masyarakat pembudidaya untuk berusaha karena lingkungan sumberdaya perikanan yang mendukung; (5) adanya trend dukungan kebutuhan akan semakin besar sehingga ada jaminan pasar. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lembaga pemerintah diberi mandat untuk mengemban tugas dan tanggungjawab pembinaan, pelayanan kepada masyarakat dimana dituntut untuk menyusun Perencanaan Strategis yang Akuntabel. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat kepada aparatur pemerintah untuk merespon atas mandat yang diberikan dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yangditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akanmengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukurdan dapat dicapai.

Dinas Perikanan sesuai dengan tugas pokoknya membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perikanan. Untuk itu berdasarkan tujuan yang selaras dengan RKPD Kabupaten Luwu 2025 serta sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2026 , maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2025

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	Target Kinerja pada Tahun	
					2025	2026
Meningkatkan lapangan usaha disektor perikanan		**Pertumbuhan pelaku usaha/pekerja disektor perikanan**	**%**	**3**	**5**	**7**
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Penilaian sakip yang diperoleh dari inspektorat	angka		80,08 (BB)	80,15 (BB)
	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Tingkat konsumsi ikan	Kg/Kapita/Th	55,89	59,14	60,32
Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan		pertumbuhan PDRB sektor perikanan	%		7,12	7,5
	Meningkatnya produktivitas sektor perikanan	persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	0,68	1,02	1,07
		persentase peningkatan produksi perikanan Budidaya	%	-0,24	0,2	0,49

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Luwu, pada dasarnya kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu adalah sebagai "*pengarah*" setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini.

Tabel 3.2

Tabel Program Utama dan Kegiatan
Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2025

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Pengolahan Data Retribusi Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		- Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan - Perundang-Undangan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan Material Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan - Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan - Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau - Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan, - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil, Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, - Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	- Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	
	Penerbitan Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) daerah Kabupaten	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	- Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Pemberian Pendampingan, Kemudahanan - Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana - Pembudidayaan Ikan dala]m 1 (satu) Daerah

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan - Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan - Ikan di Darat Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
4	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 sesuai lampiran berikut :

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2025 dan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				catatan penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	14	15	16
	DINAS PERIKANAN					**15.384.361.873,00**			**15.495.594.060,00**
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**15.384.361.873,00**			**15.495.594.060,00**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**15.384.361.873,00**			**15.495.594.060,00**
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**		**-**		**4.774.415.873,00**		**-**	**5.416.105.807,00**
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-		91.765.703,00	-	8 Dokumen	93.456.367,00
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	RETRIBUSI DAERAH	43.524.886,00	-	2 Dokumen	45.215.550,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				catatan penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	RETRIBUSI DAERAH	10.484.452,00	-	1 Dokumen	10.484.452,00
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	RETRIBUSI DAERAH	7.48 0.000,00	-	1 Dokumen	7.48 0.000,00
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	9.63 9.669,00	-	1 Dokumen	9.63 9.669,00
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	RETRIBUSI DAERAH	8.69 2.544,00	-	1 Dokumen	8.69 2.544,00
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	RETRIBUSI DAERAH	5.96 3.892,00	-	1 Laporan	5.96 3.892,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				catatan penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	RETRIBUSI DAERAH	5.980.260,00	-	1 Laporan	5.980.260,00
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3 Laporan		4.025.471.170,00	-	3 Laporan	4.025.470.440,00
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 Orang/bulan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3.730.532.085,00	-	37 Orang/bulan	3.730.531.355,00
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	PENDAPATAN BAGI HASIL	289.200.000,00	-	1 Dokumen	289.200.000,00
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	5.739.085,00	-	1 Laporan	5.739.085,00
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan		8.400.000,00	-	1 Laporan	8.400.000,00
3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	PENDAPATAN BAGI HASIL	8.400.000,00	-	2 Laporan	8.400.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				catatan penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan		30.000.000,00	-	1 Laporan	60.000.000,00
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Paket	PENDAPATAN BAGI HASIL	30.000.000,00	-	34 Paket	30.000.000,00
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	PENDAPATAN BAGI HASIL	0,00	-	2 Orang	30.000.000,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		8 Laporan		308.399.000,00	-	8 Laporan	408.399.000,00
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34 Paket	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	4.430.000,00	-	1 Paket	4.430.000,00
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	PENDAPATAN BAGI HASIL	0,00	-	5 Paket	50.000.000,00
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	PENDAPATAN BAGI HASIL	6.000.000,00	-	1 Paket	6.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				catatan penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	PENDAPATAN BAGI HASIL	6.969.000,00	-	2 Paket	6.969.000,00
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	16.000.000,00	-	1 Dokumen	16.000.000,00
3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	60.000.000,00	-	5 Paket	60.000.000,00
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	15.000.000,00	-	1 Laporan	15.000.000,00
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	200.000.000,00	-	4 Laporan	250.000.000,00
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diadakan		6 Unit		20.000.000,00	-	3 Unit	430.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				catatan penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	0,00	-	1 Unit	410.000.000,00
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	20.000.000,00	-	2 Unit	20.000.000,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan		140.380.000,00	-	1 Laporan	170.380.000,00
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	32.380.000,00	-	1 Laporan	32.380.000,00
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	108.000.000,00	-	1 Laporan	138.000.000,00
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		150.000.000,00	-	30 Unit	220.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				catatan penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	40.000.000,00	-	15 Unit	90.000.000,00
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	10.000.000,00	-	10 Unit	10.000.000,00
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	100.000.000,00	-	1 Unit	120.000.000,00
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase produksi perikanan tangkap**		**102,09 %**		**2.570.865.000,00**		**102,09 %**	**3.955.655.445,00**
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		100 Persen		2.546.865.000,00	-	100 Persen	3.825.655.445,00
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0,00	-	1 Dokumen	60.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				catatan penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0,00	-	2 Unit	1.110.213.265,00
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	2.546.865.000,00	-	26 Unit	2.655.442.180,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen		0,00	-	100 Persen	100.000.000,00
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0,00	-	50 Orang	100.000.000,00
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan kualitas Pelayanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Layanan		24.000.000,00	-	1 Layanan	30.000.000,00
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Layanan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	24.000.000,00	-	2 Layanan	30.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				catatan penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**		**-**		**7.091.043.500,00**		**-**	**5.532.176.968,00**
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-		-		0,00	-	12 Kelompo k	120.000.000,00
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kelompok	-	0,00	-	10 Kelompok	100.000.000,00
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kelompok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0,00	-	2 Kelompok	20.000.000,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen		7.091.043.500,00	-	100 Persen	5.412.176.968,00
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0,00	-	1 Dokumen	60.000.000,00
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	2.161.292.500,00	-	12 Unit	3.543.176.968,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				catatan penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	4.929.751.000,00	-	70 Unit	1.809.000.000,00
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan**		**51,20 %**		**948.037.500,00**		**51,20 %**	**591.655.840,00**
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko"		1 Dokumen		0,00	-	1 Dokumen	85.000.000,00
3.25.06.2.01.0002	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	0,00	-		50.000.000,00
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0,00	-	1 Dokumen	35.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025				catatan penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Kota yang direhabilitasi Sarana dan prasarananya		2 Unit Usaha		948.037.500,00	-	2 Unit Usaha	506.655.840,00
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Ton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30.000.000,00	-		60.000.000,00
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Pelaku Usaha	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	918.037.500,00	-	2 Pelaku Usaha	446.655.840,00
J U M L A H						**15.384.361.873,00**			**15.495.594.060,00**

BAB IV
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja Merupakan Dokumen Rencana yang memuat Program dan Kegiatan yang di perlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, Adapun Jumlah program yang di rencanakan untuk tahun Anggaran 2025 Sebanyak 4 program 16 kegiatan 27 sub kegiatan, Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan, kebutuhan pendanaan tahun anggaran 2025 pada Dinas Perikanan direncanakan sebesar Rp. 15.384.361.873 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 4.1

Rencana Pendanaan Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**15.384.361.873,00**
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-		-		**4.774.415.873,00**
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-		91.765.703,00
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Retribusi Daerah	43.524.886,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Retribusi Daerah	10.484.452,00
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Retribusi Daerah	7.480.00 0,00
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9.639.66 9,00
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Retribusi Daerah	8.692.54 4,00
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Retribusi Daerah	5.963.89 2,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Retribusi Daerah	5.980.260,00
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3 Laporan		4.025.471.170,00
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 Orang/bulan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.730.532.085,00
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Pendapatan Bagi Hasil	289.200.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.739.085,00
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		1 Laporan		8.400.000,00
3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Pendapatan Bagi Hasil	8.400.000,00
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian		1 Laporan		30.000.000,00
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Paket	Pendapatan Bagi Hasil	30.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	Pendapatan Bagi Hasil	0,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		8 Laporan		308.399.000,00
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34 Paket	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.430.000,00
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	Pendapatan Bagi Hasil	0,00
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	Pendapatan Bagi Hasil	6.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	Pendapatan Bagi Hasil	6.969.000,00
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	16.000.000,00
3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60.000.000,00
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	15.000.000,00
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	200.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diadakan		6 Unit		20.000.000,00
3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.000.000,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Laporan		140.380.000,00
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32.380.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	108.000.000,00
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		150.000.000,00
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.000.000,00
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10.000.000,00
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	100.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase produksi perikanan tangkap**		**102,09 %**		**2.570.865.000,00**
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		100 Persen		2.546.865.000,00
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0,00
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0,00
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	2.546.865.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen		0,00
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0,00
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan kualitas Pelayanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		1 Layanan		24.000.000,00
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Layanan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.000.000,00
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	-		-		**7.091.043.500,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-		-		0,00
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kelompok	-	0,00
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kelompok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen		7.091.043.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0,00
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	2.161.292.500,00
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	4.929.751.000,00
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan**		**51,20 %**		**948.037.500,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko"		1 Dokumen		0,00
3.25.06.2.01.0002	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	0,00
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0,00
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Kota yang direhabilitasi Sarana dan prasarananya		2 Unit Usaha		948.037.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Ton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.000.000,00
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Pelaku Usaha	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	918.037.500,00
					J U M L A H	**15.384.361.873,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai ke bawah (*trickle down effect*), sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perikanan didasarkan pada kondisi dan potensi sumberdaya Perikanan serta tingkat perkembangan yang ingin dicapai pada Tahun 2025. Penyusunan Renja melalui proses analisis lingkungan Dinas Perikanan baik lingkungan internal maupun eksternal menggunakan strategi analisis SWOT yaitu dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) untuk perwujudan visi dan misi Kabupaten Luwu.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perikanan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Luwu. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perikanan Kabupaten Luwu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penuangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2025.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu

Ir. BAHARUDDIN
NIP. 19650903 199203 1 011

DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU
Jalan Andi Djemma 1
Kompleks Perkantoran Pemkab luwu, Belopa 91994
Telp/Fax : 0471-331-4508
Email : KelautanperikananLuwu@gmail.com

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU



DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU
JL. SAWERIGADING, KELURAHAN SABE,KECAMATANBELOPA UTARA

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga buku " Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kab.Luwu TA.2025" dapat diterbitkan sebagai wujud partisipasi seluruh jajaran kesehatan lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.

Penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kab.Luwu, dimana Dinas Kesehatan merupakan Instansi Pemerintah Kababupaten Luwu yang melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Luwu untuk hidup sehat.

Kami menyadari bahwa kesehatan merupakan hak fundamental setiap warga Negara dan merupakan masalah yang sangat kompleks sehingga kerjasama antara Instansi Pemerintah dan masyarakat sangat diharapkan.

Mengingat bahwa suatu pekerjaan atau tugas yang bagaimanapun berat dan sulitnya, dapat dilaksanakan dan mencapai hasil yang memuaskan bila dilandasi oleh niat baik, tekad untuk maju dan selalu berbuat lebih baik dari sebelumnya secara ikhlas, maka kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga terbitnya buku Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih.

Belopa, Juni 2024

Kepala Dinas Kesehatan Kab Luwu

dr. Rosnawary, M.Tr, Adm.Kes

NIP : 198005302006042019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I. PENDAHULUAN		1
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	LANDASAN HUKUM	4
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU		7
2.1.	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	7
2.2.	ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	41
2.3.	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	74
2.4.	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	78
2.5.	PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	111
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN		115
3.1	TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	115
3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	124
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN		132
BAB V. PENUTUP		170

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2024	8
Tabel 2.2	Capaian dan target kinerja SPM Dinas Kesehatan Tahun 2022-2025 Kabupaten Luwu	63
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023	68
Tabel 2.4	Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025	80
Tabel 2.5	Usulan Progran dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025	112
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu	126
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan dan Penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	133

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yaitu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah, dalam hal ini penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun. Sedangkan Renja Perangkat Daerah adalah rencana kerja perangkat daerah periode 1 tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan tetap memperhatikan Rencana Kerja Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Renja Perangkat Daerah ini akan menjadi acuan Dinas Kesehatan Dina Kesehatan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi

Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu periode 2025 -2029. Adapun tahapan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja yang meliputi; Persiapan penyusunan rancangan keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

c. Penyusunan rancangan Renja untuk penyempurnaan rancangan awal Renja yang selanjutnya dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daera yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

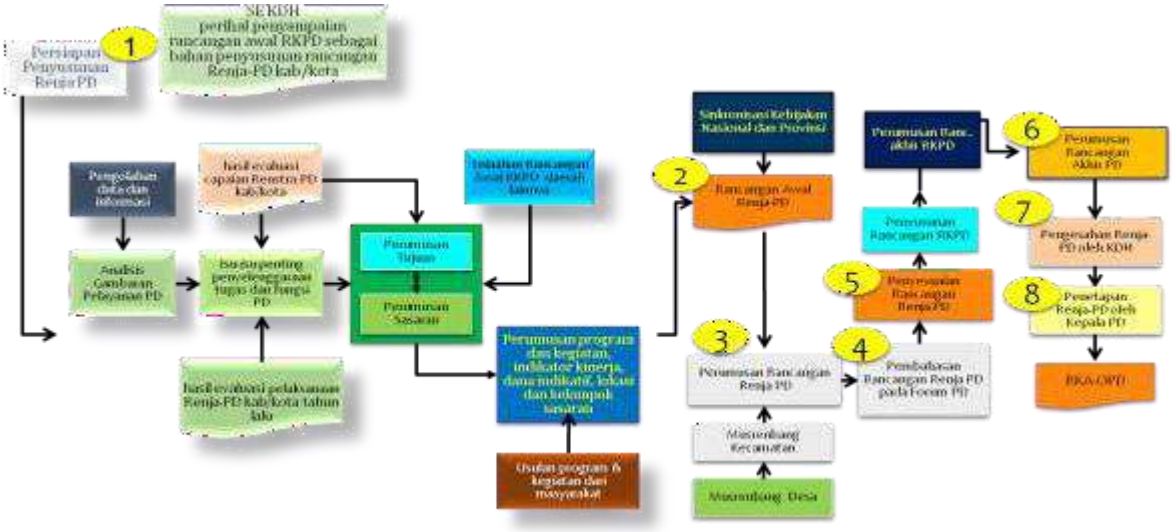
e. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana untuk penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentangRKPD

f. Penetapan Renja

Bagan alur penyusunan rencana kerja perangkat daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alur Rancangan Rencana Kerja

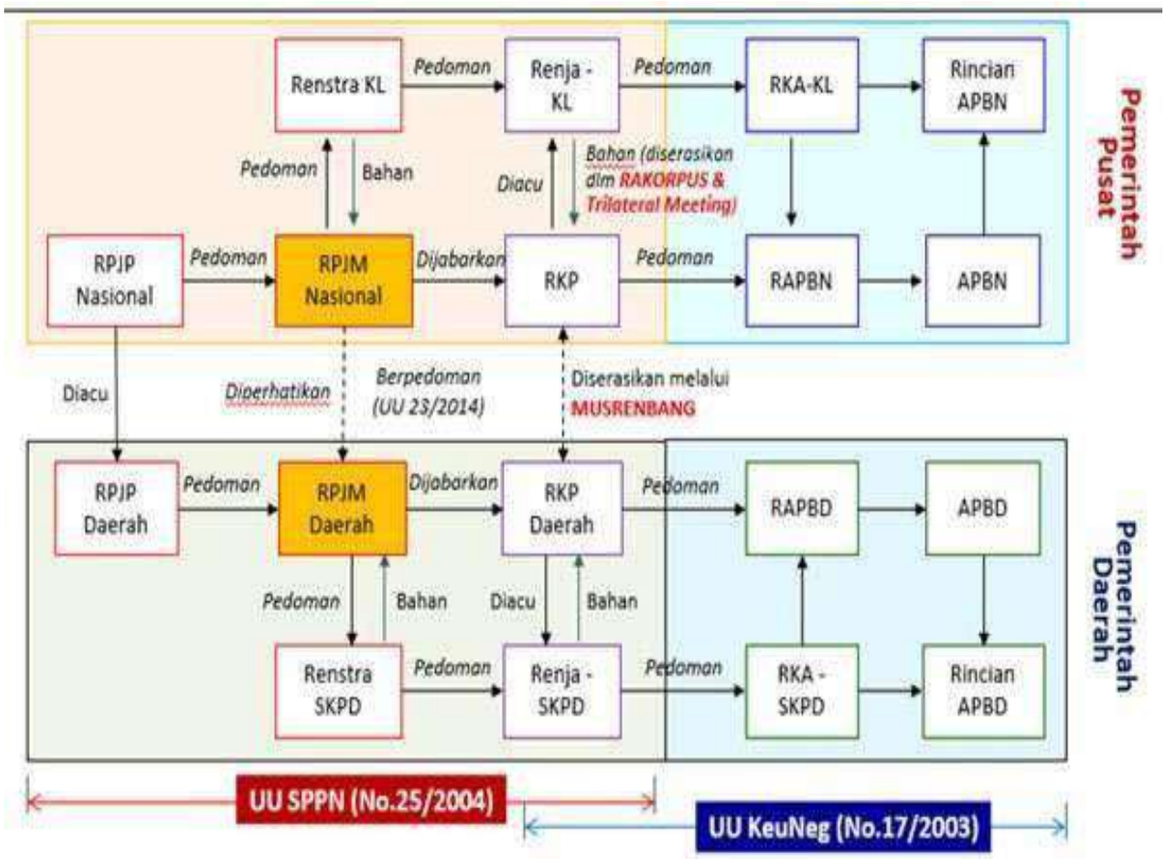


Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam rangka perencanaan yang sistematis sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja).

Rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2025 – 2026 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Adapun alur Perencanaan dan Penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu tertuang dalam gambar berikut :

Gambar 1.2
Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah



Sumber: Undang-undang No.25 Tahun 2004 dan undang-undang No. 17 Tahun 2003

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
d. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193;
e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
h. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;

i. Peraturan Meteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
j. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
k. Peraturan Meteri Kesehatan Nomor No. 4 tahun 2019 tentang Standar Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1355);
m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2025 (Berita Negarra Tahun 2020 Nomor 914);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 1781);
o. Keputusan Meteri Kesehatan No. 671/MENKES/SK/VI/2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan
p. Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7);
s. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);
t. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 122);
u. Peraturan Bupati Luwu Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 130);
v. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026;
w. Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusuna rencana kerja perangkat daerah ini adalah :

a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan.
b. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kab.Luwu
c. Memudahkan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran
d. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program – program yang telah direncanakan.

1.4 Sitematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

Bagian ini menjelaskan tentang evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Bagian ini menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu di sertai dengan sumber pendanaan dan rencana kerja tahun berikutnya

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan rencana kerja ataupunketersediaan penganggaran, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Kesehatan tahun 2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu untuk mengidentifkasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan atau realisasi APBD. Berdasarkan data dalam platform monitoring dan evaluasi pemerintah Kabupaten Luwu, rata-rata realisasi kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2023 termasuk dalam kategori sangat tinggi, yakni sebesar 97,57 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.619.725.348,00 atau 78,90 persen. Adapun rincian data sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.

Hasil Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,80 Angka	594.468.651.896	69,51 Angka	0	72,02 Angka	64.579.672.259							
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	0,00 %	594.468.651.896	0,00 %	0	0,00 %	64.579.672.259							
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah	99,00%	2.844.505.126	0,00	0	99,00%	343.007.700	100,00%	326.991.950	30,36%	326.991.950	**30,66%**	**11,50%**	
		5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	856.739.710	0	0	2	191.432.650	2	188.504.350	2	188.504.350	**25,00%**	**22,00%**	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	90.410.224	0	0	1	15.043.700	1	14.037.900	1	14.037.900	**25,00%**	**15,53%**	Tercapai
		5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4	60.214.300	0	0	1	12.767.600	1	12.579.700	1	12.579.700	**25,00%**	**20,89%**	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	93.668.784	0	0	1	9.722.700	1	8.797.600	1	8.797.600	**25,00%**	**9,39%**	Tercapai
		5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	58.656.320	0	0	1	11.999.000	1	9.070.650	1	9.070.650	**25,00%**	**15,46%**	Tercapai
		5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah (Laporan)	7	1.684.815.788	0	0	4	102.042.050	4	94.001.750	4	94.001.750	**57,14%**	**5,58%**	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00%	573.446.484.468	0,00	0	100,00%	61.821.161.087	100,00%	61.581.592.871	12,43%	61.581.592.871	**12,43%**	**10,74%**	
		5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39.696	570.294.227.528	0	0	1.500	61.360.510.487	1.500	61.135.797.271	1.500	61.135.797.271	**3,78%**	**10,72%**	Tercapai
		5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.841	3.012.480.000	0	0	1	415.920.000	1	412.320.000	1	412.320.000	**0,04%**	**13,69%**	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	43.408.240	0	0	1	4.522.400	1	4.312.400	1	4.312.400	**25,00%**	**9,93%**	Tercapai
		5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	12	19.997.900	0	0	1	2.019.000	1	2.019.000	1	2.019.000	**8,33%**	**10,10%**	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	56	76.370.800	0	0	14	38.189.200	14	27.144.200	14	27.144.200	**25,00%**	**35,54%**	Tercapai
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	99,00%	115.200.000	0,00	0	99,00%	15.600.000	100,00%	15.600.000	16,67%	15.600.000	**16,84%**	**13,54%**	
		5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD (Laporan)	6	115.200.000	0	0	1	15.600.000	1	15.600.000	1	15.600.000	**16,67%**	**13,54%**	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00%	739.821.700	0,00	0	100,00%	99.706.500	100,00%	79.948.435	18,54%	79.948.435	**18,54%**	**10,81%**	
		5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	80	619.011.000	0	0	3	74.700.000	3	56.945.000	3	56.945.000	**3,75%**	**9,20%**	Tercapai
		5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang)	150	120.810.700	0	0	50	25.006.500	50	23.003.435	50	23.003.435	**33,33%**	**19,04%**	Tercapai
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daera	100,00%	4.714.084.908	0,00	0	100,00%	841.925.020	160,72%	823.180.100	39,43%	823.180.100	**39,43%**	**17,46%**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	51	7.050.000	0	0	1	5.430.000	2	5.428.000	2	5.428.000	**3,92%**	**76,99%**	Melampaui
		5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan (Paket)	12	236.468.700	0	0	1	143.764.000	2	143.550.000	2	143.550.000	**16,58%**	**60,71%**	Melampaui
		5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan (Paket)	36	72.000.000	0	0	36	9.980.000	31	9.979.600	31	9.979.600	**86,11%**	**13,86%**	Belum Tercapai
		5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan (Paket)	48	60.000.200	0	0	1	6.999.740	2	6.999.600	2	6.999.600	**4,17%**	**11,67%**	Melampaui

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	48	250.000.000	0	0	48	30.000.000	96	29.550.000	96	29.550.000	**200,00%**	**11,82%**	Melampaui
		5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	48	177.347.820	0	0	1	15.756.900	2	15.756.900	2	15.756.900	**4,17%**	**8,88%**	Melampaui
		5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	660	170.640.000	0	0	1	30.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	**0,30%**	**7,03%**	Melampaui
		5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	648	3.740.578.188	0	0	150	599.994.380	1	599.916.000	1	599.916.000	**0,15%**	**16,04%**	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	212.000.000	0,00	0	92,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	**0,00%**	**0,00%**	
		5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	67	212.000.000	0	0	4	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Tidak Terlaksana
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	99,00%	7.170.055.838	0,00	0	100,00%	841.866.632	68,06%	789.320.469	1,17%	789.320.469	**1,17%**	**11,01%**	
		5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat (Laporan)	72	183.056.240	0	0	24	16.800.000	1	16.800.000	1	16.800.000	**1,39%**	**9,18%**	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	1.164.117.198	0	0	1	257.466.632	1	225.220.469	1	225.220.469	**2,08%**	**19,35%**	Tercapai
		5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.348	5.822.882.400	0	0	1	567.600.000	1	547.300.000	1	547.300.000	**0,03%**	**9,40%**	Tercapai
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	5.226.499.856	0,00	0	100,00%	616.405.320	100,00%	587.434.328	4,10%	587.434.328	**4,10%**	**11,24%**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	184	3.295.298.800	0	0	15	190.415.651	15	181.964.328	15	181.964.328	**8,15%**	**5,52%**	Tercapai
		5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.916	1.931.201.056	0	0	1	425.989.669	1	405.470.000	1	405.470.000	**0,05%**	**21,00%**	Tercapai
2	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan			Indeks kepuasan masyarakat atas layanan kesehatan di Kabupaten Luwu	87,29 Indeks	##############	82,46 Indeks	0	84,90 Indeks	432.846.555.896							
				Persentase indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai target	100 %		100 %		100 %								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100,00 %	1.016.591.343.835	0,00 %	0	100,00 %	105.933.798.394							
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik	80,97%	176.898.788.525	0,00	0	80,00%	21.232.841.009	112,50%	15.779.955.539	48,58%	15.779.955.539	**60,72%**	**8,92%**	
		1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana,Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	15	7.404.603.000	0	0	5	5.889.506.480	5	5.544.606.528	5	5.544.606.528	**33,33%**	**74,88%**	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatandan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	25	11.677.952.000	0	0	2	1.197.895.271	2	1.193.777.350	2	1.193.777.350	**8,00%**	**10,22%**	Tercapai
		1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	8	51.998.363.947	0	0	17	4.537.653.592	17	0	17	0	**212,50%**	**0,00%**	Tercapai
		1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung FasilitasPelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatanyang Disediakan (Unit)	38	27.210.000.000	0	0	1	300.000.026	1	281.962.439	1	281.962.439	**2,63%**	**1,04%**	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	8	36.580.156.748	0	0	5	1.851.715.100	5	1.587.424.000	5	1.587.424.000	**62,50%**	**4,34%**	Tercapai
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (Paket)	88	24.705.289.746	0	0	1	3.460.910.520	1	3.211.566.318	1	3.211.566.318	**1,14%**	**13,00%**	Tercapai
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (Paket)	15	16.404.147.102	0	0	5	3.820.160.020	10	3.786.099.154	10	3.786.099.154	**66,67%**	**23,08%**	Melampaui
		1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala AlatKesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.200	918.275.982	0	0	22	175.000.000	22	174.519.750	22	174.519.750	**1,83%**	**19,01%**	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan	100,00%	838.723.532.720	0,00	0	99,00%	84.569.708.885	0,00%	54.583.803.640	0,00%	54.583.803.640	**0,00%**	**6,51%**	
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar (Orang)	28.096	482.686.000	0	0	5.572	1.586.325.970	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	26.722	21.663.935.000	0	0	5.374	103.000.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi BaruLahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	27.920	917.725.000	0	0	5.408	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Tidak Terlaksana

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar (Orang)	117.629	350.240.360	0	0	28.106	839.448.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar (Orang)	118.071	336.410.940	0	0	58.899	821.598.800	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	222.198	0	0	0	222.198	480.664.830	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar (Orang)	110.383	310.606.004	0	0	28.540	580.154.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	70.524	0	0	0	70.524	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Tidak Terlaksana
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	6.579	0	0	0	6.579	952.092.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang denganRisiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yangMendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	28.360	320.269.650	0	0	8.672	662.896.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	4	42.786.884.648	0	0	1	4.125.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan GiziMasyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	88	6.924.581.660	0	0	22	710.446.000	0	3.456.923.640	0	3.456.923.640	**0,00%**	**49,92%**	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja danOlahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	4	308.746.320	0	0	1	221.170.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan (Dokumen)	88	1.709.873.994	0	0	22	425.102.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	16	268.290.800	0	0	4	19.989.650	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan (Dokumen)	88	926.200.000	0	0	22	304.434.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	871	0	0	0	871	259.070.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa danNAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang MendapatkanPelayanan Kesehatan (Orang)	88	534.640.000	0	0	0	239.928.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Tercapai
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Khusus (Dokumen)	1.680	843.717.500	0	0	1	1.047.181.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	88	6.194.052.200	0	0	1	4.843.475.900	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat (Dokumen)	88	522.920.319.482	0	0	1	55.998.081.774	0	51.126.880.000	0	51.126.880.000	**0,00%**	**9,78%**	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil PenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	28	5.442.760.120	0	0	7	600.000.063	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional PelayananPuskesmas (Dokumen)	88	213.503.414.312	0	0	22	13.671.133.551	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan diKabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi diKabupaten/Kota (Unit)	88	11.978.178.730	0	0	22	199.392.347	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	22,00Unit	487.917.390	0,00	0	22,00Unit	81.248.500	50,00%	0	1,56%	0	**7,10%**	**0,00%**	
		1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data danInformasi Kesehatan (Dokumen)	6	209.996.790	0	0	1	60.610.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Belum Tercapai
		1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SistemInformasi Kesehatan (Dokumen)	32	277.920.600	0	0	1	20.638.500	1	0	1	0	**3,13%**	**0,00%**	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin rumah sakit kelas C dan D yang diselesaikan proses penerbitan izinnya	99,00%	481.105.200	0,00	0	100,00%	50.000.000	50,00%	0	366,67%	0	**366,67%**	**0,00%**	
		1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	3	481.105.200	0	0	22	50.000.000	11	0	11	0	**366,67%**	**0,00%**	Belum Tercapai
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	77,27 %	1.018.229.631.305	0,00 %	0	77,27 %	108.315.510.834							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten	84,00%	1.044.265.170	0,00	0	83,00%	179.467.070	100,00%	0	25,00%	0	**30,12%**	**0,00%**	
		1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	8	1.044.265.170	0	0	2	179.467.070	2	0	2	0	**25,00%**	**0,00%**	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang telah mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	100,00%	594.022.300	0,00	0	100,00%	2.202.245.370	0,00%	2.060.441.170	0,00%	2.060.441.170	**0,00%**	**346,86%**	
		1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.440	594.022.300	0	0	50	2.202.245.370	0	2.060.441.170	0	2.060.441.170	**0,00%**	**346,86%**	Belum Tercapai
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	100,00 %	1.020.770.184.319	0,00 %	0	100,00 %	108.757.117.434							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, (UMOT) yang telah mendapat izin	65,00Angka	379.120.660	0,00	0	65,00Angka	99.496.600	100,00%	92.552.926	50,00%	92.552.926	**76,92%**	**24,41%**	
		1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT) (Dokumen)	4	379.120.660	0	0	2	99.496.600	2	92.552.926	2	92.552.926	**50,00%**	**24,41%**	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang telah diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	0,00Angka	2.161.432.354	0,00	0	0,00Angka	342.110.000	0,00%	305.833.800	0,00%	305.833.800	**0,00%**	**14,15%**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	200	2.161.432.354	0	0	60	342.110.000	0	305.833.800	0	305.833.800	**0,00%**	**14,15%**	Belum Tercapai
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS	100,00 %	1.023.113.324.015	0,00 %	0	100,00 %	109.840.129.234							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS	100,00%	2.197.129.996	0,00	0	100,00%	119.920.000	100,00%	119.710.000	1,14%	119.710.000	**1,14%**	**5,45%**	
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan PemberdayaanMasyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	88	2.197.129.996	0	0	1	119.920.000	1	119.710.000	1	119.710.000	**1,14%**	**5,45%**	Tercapai
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan UKBM	63,00%	146.009.700	0,00	0	62,00%	963.091.800	2.000,00%	473.360.120	22,73%	473.360.120	**36,66%**	**324,20%**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	88	146.009.700	0	0	1	963.091.800	20	473.360.120	20	473.360.120	**22,73%**	**324,20%**	Melampaui
Total Target (RP)									**174.419.801.493**		**137.619.725.348**						
Rata-rata capaian kinerja (%)											**97,57**	**78,90**					
Predikat kinerja											**ST**	**T**					

2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu. Indikator kinerjanya adalah cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan target program 100% dan realisasi kinerja 100%. Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Dinas Kesehatan dan bersifat rutin meliputi:

A. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dicapai dengan indikator output Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang disusun dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 343.007.700 terserap sebeaar Rp.326.991.950 atau sebesar 95,33%.
B. Administrasi keuangan perangkat daerah dicapai dengan indikator output Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 61.821.161.087 terserap Rp.61.581.592.871 atau sebesar 99,61%.
C. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dicapai dengan indikator output cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.15.600.000 terserap Rp.15.600.000 atau sebesar 100%.
D. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dicapai dengan indikator output persentase ASN dengan predikat kinerja baik dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.99.706.500 terserap sebesar Rp. 79.948.435 atau 80,18%.
E. Administrasi umum perangkat daerah dicapai dengan indikator output cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.841.925.020 terserap sebesar Rp. 823.180.100 atau 97,77%.
F. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dicapai dengan indikator output cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 841.866.632 terserap sebesar Rp. 789.320.469 atau 93,75%.
G. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dicapai

dengan indikator output cakupan penyelenggaraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengana anggaran sebesar Rp.616.405.320 terserap sebesar Rp. 587.434.328 atau 97,77%.

2.1.2. Program pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini dilaksanakan dalam mendukung kinerja standar pelayanan minimal bidang Kesehatan, hal ini diukur dengan indikator persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan yaitu 100% dengan realisasi capaian 89,73%.

a. Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dicapai dengan indikator output Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik dengan capaian indikator kinerja sebesar 48,58% dengana anggaran sebesar Rp. 21.232.841.009 terserap sebesar Rp. 15.779.955.539 atau 74,31%.
b. Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat daerah dicapai dengan indikator output Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan dengan capaian indikator kinerja sebesar 80% dengan anggaran sebesar Rp. 84.569.708.885 terserap sebesar Rp. 54.583.803.640 atau 64,54%.
c. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dicapai dengan indikator output persentase sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten yang telah mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis dengan capaian indikator kinerja sebesar 75,33% dengan anggaran sebesar Rp. 2.202.245.370 terserap sebesar Rp. 2.060.441.170 atau 93,56%.

2.1.3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini dilaksanakan dalam mendukung kinerja pelayanan Kesehatan bidang farmasi, alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan rumah tangga, hal ini diukur dengan indikator persentase pemenuhan izin sediaan farmasi yaitu 100% dengan realisasi capaian 100%.

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dicapai dengan indikator output Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, (UMOT) yang telah mendapat izin dengan capaian indikator kinerja sebesar 65 Unit dengan anggaran sebesar Rp.

99.496.600 terserap sebesar Rp. 92.552.926 atau 93,02%.

b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dicapai dengan indikator output Jumlah Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang telah diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi dengan anggaran sebesar Rp. 342.110.000 terserap sebesar Rp. 305.833.800 atau 89,39%.

2.1.4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini dilaksanakan dalam mendukung kinerja pelayanan Kesehatan bidang dalam rangak melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di suatu Kabupaten, hal ini diukur dengan indikator persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS yaitu 100% dengan realisasi capaian 100%.

a. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta Masyarakat dan lintas sektor Tingkat daerah Kabupaten/Kota dicapai dengan indikator output Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 119.920.000 terserap sebesar Rp. 100.000.000 atau 83,39%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan operasional kegiatan di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat, pengawasan dan pengendalian kesehatan serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Dengan peraturan Bupati Luwu Nomor 38 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Luwu, Dinas Kesehatan mempunyai struktur dan tugas pokok sebagai berikut :

2.2.1. **KEPALA DINAS KESEHATAN**

2.2.1.1. Kepala Dinas Kesehatan membawahi:

2.2.1.1.1. Sekretariat;

2.2.1.1.2. Bidang Kesehatan Masyarakat

2.2.1.1.3. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

2.2.1.1.4. Bidang Pelayanan Kesehatan

2.2.1.1.5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

2.2.1.1.6. Bidang Pelayanan Kesehatan

2.2.1.1.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

2.2.1.1.8. Kelompok Jabatan Fungsional

a) S E K R E T A R I A T

(1) Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Program

c. Sub Bagian Keuangan

II.1. Sub Bagian Umum

1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas Membantu Sekretaris melaksanakan urusan adminstrasi umum dan perkantoran serta kehumasan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang umum;

b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;

c. Penyusunan Analisis Jabatan Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Dinas;

d. Penatausahaan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah;

e. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta

pelaksanaan pada Sub Bagian Umum;

f. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
g. Pembagian tugas, pemberian, petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
h. Pelaksanaan adminstrasi Umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan, dan kearsipan;
i. Pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan pengahapusan sarana dan prasarana kerja;
j. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu dinas;
k. sianggaran Subbagian umum; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.2. Sub Bagian Program

1) Sub bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, menyusu laporan evaluasi pelaksanaan kinerja, penyusunan standar pelayanan, penghimpunan data-data yang berkaitan dengan peyusunan rencana kegiatan dan evaliasi kinerja.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
   a. Menghimpun dan penelangahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang program;
   b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja padaSub Bagian ;
   c. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Sub Bagian Program;
   d. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan program,

rencana Kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;

e. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
f. Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA);
g. Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
h. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
i. Pengkoordinasian dan Penyusunan Standar pelayanan Publik (SPP);
j. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bagian Program;
k. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
l. Pembagian tugas, pemerian petunjuk serta pengevaluasian hasil Kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
m. Penghimpunan dan pengdokumentasian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat dinas;
n. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM);
o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran dinas;
p. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian program.
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.3 Sub. Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, penghimpunan data-data, penatausahaan keuangan, pengurusangaji.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka

Asatu (1), Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Menghimpun dan penelangahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan keuangan;
b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja padaSub Keuangan;
c. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Sub Bagian dan Keuangan;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelolakeuangan dinas;
e. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bagian dan Keuangan;
f. Pembagian tugas, pemerian petunjuk serta pengevaluasian hasil Kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dinas;
h. Pelaksanaan Pengajuan, perubahan, pemotongan dan pendistribusian gaji pegawai;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran dinas;
j. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian program dan keuangan;
k. Penyusunan laporan keuangan dan Laporan kinerja (LKJ) dinas; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b). BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesehatan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1),

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

d. Perumusan Kebijakan teknis bidang Kesehatan Masyarakat;
e. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
g. Penyusunan perencanaan bidang Kesehatan Masyarakat;
h. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
i. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
j. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
k. pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
l. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
m. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi:

a. Sub koordinasi Kesehatan Keluarga dan Gizi

b. Sub koordinasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Sub Koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Masing-masing Sub Koordinasi dipimpin oleh seorang sub koordinator seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

III.1 Sub koordinator kesehatan keluarga dan gizi

1. Kepala Sub koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1) Kepala sub koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi :

    a. Menyiapkan bahan Perumusan kebijakan pada sub koordinasi kesehatan keluarga dan Gizi;
    b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada sub koordinasi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
    c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada sub koordinasi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
    d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada sub koordinasi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
    e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
    f. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
    g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
    h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
    i. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban

pelaksanaan program kegiatan pada sub koordinasi KesehatanKeluarga dan Gizi; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

III.2 Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Kepala Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

   mempunyai tugas membantu kepala bidan melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Kepala Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

   a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada sub koordinasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
   b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada sub koordinasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
   c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksiPromosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
   d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada sub koordinasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
   e. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
   f. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
   g. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan pada sub koordinasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III.3 Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

1. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada sub koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
   b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada sub koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
   c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada sub koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
   d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan pada sub koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
   e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
   f. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
   g. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
   h. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban

pelaksanaan program kegiatan pada seub koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c.) Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit:

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit;
2. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP)kerja Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Penyusunan perencanaan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
5. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesesehatan Jiwa;
6. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
7. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
8. Pelaksanaan tugas Pembantuan di Bidang Pencegahan Dan

Pengendalian Penyakit; dan

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BidangPencegahan Dan Pengendalian Penyakit Membawahi:

- Sub Koordinasi Surveilans dan Imunisasi
- Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Masing-masing sub koordinasi dipimpin oleh sub koordinator dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

IV.1. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi

1) Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi :
    a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada seksi Surveilans dan Imunisasi;
    b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Surveilans dan Imunisasi;
    c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Surveilans dan Imunisasi;
    d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada Sub Koordinasi Surveilans dan Imunisasi;
    e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
    f. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilansdan imunisasi;

g. Memberikan bimbingan teknis di bidang surveilans dan imunisasi;
h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang surveilans dan imunisasi;
i. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Surveilans dan Imunisasi; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

IV.2 Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

1) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
   b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
   c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
   d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
   e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
   f. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pencegahan

dan pengendalian penyakit menular;

g. Memberikan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
i. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

IV.3 Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
   b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
   c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
   d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan jiwa;
g. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
h. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan jiwa;
i. Memberikan bimbingan teknis di bidang pencegahan penyakit tidak menular;
j. Memberikan bimbingan teknis di bidang kesehatan jiwa;
k. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
l. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang kesehatan jiwa;
m. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d.) BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

10. Perumusan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Kesehatan;
11. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
12. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja

dan standar kompetensi jabatan Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Penyusunan perencanaan bidang Pelayanan Kesehatan;

13. Penyusunan perencanaan bidang Pelayanan Kesehatan;
14. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
15. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
16. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
17. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
18. Pelaksanaan tugas Pembantuan di Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya

Bidang Pelayanan Kesehatan Membawahi ;

1. Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Primer
2. Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional
3. Sub Koordinasi Fasyankes dan Peningkatan Mutu

Masing-masing Sub Koordinasi sebagaimana dimaksud ini dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

V.1 Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer

1) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan Penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan kebijakan teknis, peminaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporanserta peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan Primer.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Primer;
b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Primer;
c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Primer;
d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Primer;
e. Mengkoordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan primer;
f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan primer;
g. Melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan primer;
h. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer;
i. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang pelayanan kesehatan primer;
j. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan pada seksi Pelayanan Kesehatan Primer; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V.2 Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional

1) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan tradisional.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional;
f. Melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional;
g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional;
h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional;
i. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi PelayananKesehatan Rujukan dan Tradisional; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

V.3 Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu

Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu Penyiapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitas Pelanayan Kesehatan dan Peningkatan Mutu

1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
e. Melaksanakan kebijakan operasional bidang peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
f. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas pelayanan kesehatan;
g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang fasilitaspelayanan kesehatan;
i. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
j. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e). BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mepunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Kesehatan.

a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang Sumber Daya Kesehatan;
2. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
4. Penyusunan perencanaan bidang Sumber Daya Kesehatan;
5. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;
6. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Kesehatan;
7. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sumber Daya Kesehatan;
8. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Kesehatan;
9. Melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bidang Sumber Daya Kesehatan Membawahi ;

a. Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan

b. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan

c. Sub Koordinator Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

VI.1. Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1) Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian dan Alat Kesehatan.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan pada Sub Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
e. Memberikan bimbingan teknis dibidang pelayanan kefarmasian dan Alat Kesehatan;
f. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian kepada fasilitas dan pengolahan kefarmasian, makanan dan minuman;
g. Melaksanakan pendataan, registrasi dan perizinan pada fasilitas farmasi, industri rumah tangga dan PDAM/industri air minum;
h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian dan Alat Kesehatan;
i. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

VI.2. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan

1) Sub koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugasmembantu Kepala Bidang Penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi SumberDaya Manusia Kesehatan;

b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan pada Sub Koordinasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
g. Menyiapkan bahan Perencanaan kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
h. Pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan;
i. Memberikan bimbingan teknis serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
j. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
k. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. UPTD Puskesmas

UPTD Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan

fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dipimpin oleh seorang kepala Puskesmas,

2.2.2 Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down,* yang disebut dengan istilah dari *shopping list*ke*working plant.* Rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu tidak akan jauh dengan tahun tahun sebelumnya, karena dinas kesehatanmelakukan perencanaan berpedoman pada tugas dan fungsi yaitu melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang meliputi pelayanan kesehatan,pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bina kesehatan masyarakat serta pengembangan sumber daya kesehatan. Dalam upaya penanggulangan masalah-masalah kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu merencanakan program-program yang mengutamakan kegiatan pada upaya promotif dan preventif, yang dilaksanakan secara serasi dengan tidak mengurangi upaya kuratif dan rehabilitatif. Prioritas tinggi akan diberikan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanggulangan penyakit menular, dan perbaikan status gizi serta penanggulangan kasus gizi buruk (termasuk kegiatan surveilans dan kewaspadaan dini), promosi kesehatan, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, dan pembangunan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan. Pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

Tabel 2.2. Capaian dan target Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Tahun 2022-2025 Kabupaten Luwu

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	76.66	75.13	100	100	Tidak semua ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan sehingga standar pelayanan ANC tidak terpenuhi, akses yang sulit, SDM terbats dan tidak merata
2	Cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan ibu bersalin,	100	100	100	100	74.88	79.27	100	100	Akses pelayanan kesehatan yang sulit, terbatasnya SDM.
3	Cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	79.26	78.27	100	100	Kesulitan menjangkau akses pelayanan kesehatan seperti Puskesmas Latimojong, Bassesangtempe, Bassesangtempe Utara, Walenrang Barat

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
4	Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan balita	100	100	100	100	71.07	73.24	100	100	Akses layanan yang sulit dijangkau, pemanfaatan posyandu belum optimal, kurangnya kesadaran ibu untuk membawa anaknya ke posyandu, beberapa posyandu belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sesuai standar, pemberdayaan masyarakat yang belum optimal
5	Cakupan anak usia pendidikan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	61.56	72.53	100	100	Pada saat pemberian pelayanan kesehatan ada beberapa siswa yang tidak hadir dikarenakan sakit atau izin

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
6	Cakupan penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100	100	100	70.13	76.24	100	100	Kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, BHP medis yang tidak sesuai dengan usia roduktif, beberapa posbindu PTM belum aktif,
7	Cakupan penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100	100	49.94	77.91	100	100	Tidak semua desa mempunyai posyandu usila sehingga berpengaruh pada cakupan pelayanan usila

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
8	Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	100	100	76.66	75.13	100	100	Kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan , rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi, BHP medis yang disediakan tidak sesuai dengan usia reprokdutif
9	Cakupan penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	100	100	100	100	100	100	100	Kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan , rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi, BHP medis yang disediakan tidak sesuai dengan usia reprokdutif

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
10	Cakupan orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100	100	91.6	96,56	100	100	Masih ada masyarakat yang tidak mau memeriksakan keluarganya yang mengalami gangguan jiwa.
11	Cakupan orang terduga tubercolusis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	100	100	100	100	91.04	90,41	100	100	Masyarakat masih ada yang tidak rutin minum obat TB secara teratur
12	Cakupan orang dengan risiko HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	100	100	100	94.89	92,93	100	100	Masih adanya masyarakat yang tidak mau melakukan skrining

Dari tabel 2.2 di atas dapat disimpulkan bahwa dari 12 (dua belas) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), 11 (sebelas) indikator belum mencapai taget 100 %, dan 1 (satu) indikator yang sudah mencapai target 100%. capaian terendah ada pada pelayanan kesehatan usia lanjut yang hanya mencapai 75.13% capaian dari target 100%. Rendahnya capaian pelayanan Kesehatan penderita hipertensi disebabkan oleh banyak faktor, antara lain :

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya deteksi dini dan pengobatan hipertensi: Banyak masyarakat belum memahami risiko hipertensi dan pentingnya kontrol tekanan darah secara teratur.
2. Pencatatan dan pelaporan tidak dilakukan secara berkala dapat menjadi kendala capaian spm hipertensi
3. Terbatasnya saran dan prasarana seperti bangunan Posyandu yang belum permanen.
4. Tebatasnya jumlah Sumber daya Manusia Kesehatan (SDM) di Puskesmas.

Upaya yang dilakukan pada kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye kesehatan, edukasi dan penyuluhan. Peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, dengan menyediakan sumber daya yang memadai, pelatihan bagi tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen data.

Data pencapaian pada tabel 2.3 juga memberikan gambaran bahwa derajat Kesehatan masyarakat ditentukan oleh banyak faktor. Derajat kesehatan memberikan sumbangan yang nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi.

Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023 Kabupaten Luwu

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	**Puskesmas dan PuskesmasPembantu**					
	Jumlah Puskesmas	22	22	22	22	22
	Jumlah Puskesmas Pembantu	112	112	120	122	124
	Jumlah seluruh kecamatan	22	22	22	22	22
	Jumlah desa / kelurahan	227	227	227	227	227
	Cakupan Puskesmas	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Cakupan Puskesmas Pembantu	**49,34**	**49,34**	**52,86**	**53,74**	**54,63**
2.	**Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Bayi**					
	Jumlah kematian bayi pada 1 tahun tertentu.	57	48	53	80	83
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6273	6232	6417	6054	5410
	Angka Kematian Bayi (AKB)	**9,09**	**7,70**	**8,26**	**13,21**	**15,34**
	AKHB (1-AKB)	**0,9909**	**0,9923**	**0,9917**	**0,9868**	**0,98447**
3.	**Angka usia harapan hidup**	**70,19**	**70,34**	**70,44**	**70,75**	**71,00**
4.	**Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup**					
	Jumlah kematian balita pada 1 tahun tertentu.	61	58	62	85	88
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6273	6232	6417	6054	5410
	Rasio	**9,72**	**9,33**	**9,66**	**14,04**	**16,27**
5.	**Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup**					
	Jumlah kematian neonatal pada 1 tahun tertentu.	41	31	42	64	85
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6273	6232	6417	6054	5410
	Rasio	**6,54**	**4,97**	**6,55**	**10,57**	**15,71**
6.	**Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup**					
	Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena Hamil, bersalin dan Nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 Thn	5	10	15	11	7
	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama.	6273	6232	6417	6054	5410
	AKI	**79,71**	**160,46**	**233,75**	**181,70**	**129,39**
7.	**Jumlah Posyandu dan Balita**					
	Jumlah Posyandu	427	427	430	430	432
	Jumlah Balita	29306	29814	29831	30340	33029
	Rasio per satuan balita	**14,57**	**14,32**	**14,41**	**14,17**	**13,08**
8.	**Puskesmas, Poliklinik dan Pustu**					
	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	230	234	237	237	238
	Jumlah Penduduk	363754	365608	367454	369820	372161
	Rasio per satuan penduduk					
9.	**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk**					
	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	0	0	0	0	0

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI/Swasta	1	1	1	1	1
	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
	Jumlah seluruh Rumah Sakit	2	2	2	2	2
	Jumlah Penduduk	363754	365608	367454	369820	372161
	Rasio	**0,000055**	**0,000055**	**0,000054**	**0,000054**	**0,000054**
10.	**Dokter**					
	Jumlah Dokter	35	48	44	57	74
	Jumlah Penduduk	363754	365608	367454	369820	372161
	Rasio per satuan penduduk	**0,00010**	**0,00013**	**0,00012**	**0,00015**	**0,00020**
11.	**Tenaga Paramedis**					
	Jumlah Tenaga paramedis	352	417	441	501	594
	Jumlah penduduk	363754	365608	367454	369820	372161
	Rasio Tenaga Paramedis per satuan penduduk	**0,00097**	**0,00114**	**0,00120**	**0,00135**	**0,00160**
12.	**Komplikasi kebidanan yang ditangani**					
	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	1188	1224	1398	917	1369
	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayahkerja pada kurun waktu yang sama	1188	1224	1398	917	1369
	Cakupan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
13.	**Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**					
	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6237	6229	6410	6064	5404
	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayahkerja dalam kurun waktu yang sama	7046	7166	7166	8252	7127
	Cakupan	**88,52**	**86,92**	**89,45**	**73,49**	**75,82**
14.	**Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**					
	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	221	226	221	221	221
	Jumlah Desa/Kelurahan	227	227	227	227	227
	Cakupan	**97,36**	**99,56**	**97,36**	**97,36**	**97,36**

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
15.	**Balita Gizi Buruk mendapat perawatan**					
	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja	30	187	72	50	31
	Jumlah seluruh balita gizi buruk disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	30	187	72	50	31
	Cakupan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
16.	**Persentase balita gizi buruk**	**0,02**	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,12**
17.	**Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak**					
	Jumlah anak usia 1 Tahun yang mendapat Imunisasi Campak di suatu wilayah selama 1 Tahun	6768	6155	6533	7206	6717
	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama.	7554	6372	6693	6449	6798
	Persentase	**89,59**	**96,59**	**97,61**	**111,74**	**98,81**
18.	**Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani**					
	Jumlah penderita Pneumonia balita	158	28	20	343	548
	Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani	158	28	20	343	548
	Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di suatu wailayah kerja pada kurun waktu yang sama.	1338	1376	1376	1361	1412
	Persentase	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
19.	**Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA**					
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukandan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	336	258	594	258	416
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun waktu yang sama	603	624	624	670	684
	Cakupan	**55,72**	**41,35**	**95,19**	**38,51**	**60,82**
20.	**Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**					
	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	640	462	526	797	762
	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	363754	365608	367454	369820	372161

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase	**175,94**	**126,36**	**143,15**	**215,51**	**204,75**
21.	**Tingkat kematian karena tuberkulosis(per 100.000 penduduk)**					
	Jumlah pasien TB yang meninggal	24	26	47	54	38
	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	363754	365608	367454	369820	372161
	Persentase	**6,60**	**7,11**	**12,79**	**14,60**	**10,21**
22.	**Kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS**					
	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	640	462	526	797	762
	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	1005	1040	1040	1118	1140
	Persentase	**63,68**	**44,42**	**50,58**	**71,29**	**66,84**
23.	**Kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS**					
	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	231	119	146	209	290
	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	300	247	321	437	366
	Persentase	**77,00**	**48,18**	**45,48**	**47,83**	**79,23**
24.	**Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**					
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. kerja selama 1 Tahun	28	6	31	72	43
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	28	6	31	72	43
	Cakupan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
25.	**Anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida**					
	Banyaknya balita yang pada malam sebelum survey tidur menggunakan kelambu	0	0	0	0	0
	Jumlah balita	29306	29814	29831	30340	33029
	Persentase Anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi**					
	Jumlah pasien HIV dan AIDS disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu	16	32	22	56	44

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama	363754	365608	367454	369820	372161
	Persentase	**0,0044**	**0,0088**	**0,0060**	**0,0151**	**0,0118**
27.	**Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**					
	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	183314	134881	153476	198596	NA
	Jumlah seluruh penduduk miskin di Kabupaten	253441	199303	270868	263280	250839
	Cakupan	**72,33**	**67,68**	**56,66**	**75,43**	NA
28.	**Cakupan kunjungan bayi**					
	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standardi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6070	6150	6271	6007	5424
	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja padakurun waktu yang sama	6273	6232	6417	6054	5410
	Cakupan	**96,76**	**98,68**	**97,72**	**99,22**	**100,26**
29.	**Kunjungan Ibu hamil K4**					
	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	5978	5869	6315	6106	5258
	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	7380	7508	7508	8645	7467
	Cakupan	**81,00**	**78,17**	**84,11**	**70,63**	**70,42**
30.	**Pelayanan nifas**					
	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6273	6196	6294	5959	5361
	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	7046	7166	7166	8252	7127
	Cakupan	**89,03**	**86,46**	**87,83**	**72,21**	**75,22**
31.	**Neonatus dengan komplikasi yang ditangani**					
	Jumlah neonates dengan komplikasi yang tertangani	491	495	517	373	383
	Jumlah seluruh neonitas dengan komplikasi yang ada	491	495	517	373	383
	Cakupan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
32.	**Pelayanan anak balita**					
	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	20849	18863	20981	21931	21949
	Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	29306	29814	29831	30340	33029
	Cakupan	**71,14**	**63,27**	**70,37**	**72,28**	**66,45**
33.	**Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat**					
	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6499	6120	5356	5411	5787
	Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	7248	7058	6640	6344	6564
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	**89,67**	**86,71**	**80,66**	**85,29**	**88,16**
34.	**Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi< 24 Jam**					
	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani >24 jam dalam periode tertentu	1	0	4	3	1
	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	1	0	4	3	1
	Persentase	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan rencana pembangunan kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan dan perubahan perilaku pola hidup sehat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada masa yang akan datang, berdasarkan gambaran kondisi kesehatan daerah di Kabupaten Luwu dapat diidentifikasi permasalahan kesehatan sebagai isu –isu strategis adalah sebagai berikut:

- **Permasalahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah**

1. Terbatasnya tenaga kesehatan (rasio dokter gigi, perawat, bidan, perawat gigi, teknisi kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian, nutrisionis, keterapian fisik dan teknisi medis belum mencapai target pemenuhan HAM aspek kesehatan.
2. Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata.
3. Persentase Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan (38.1%) belum terpenuhi
4. Jumlah Puskesmas belum memenuhi standar rasio terhadap jumlah penduduk (1:56971), guna memenuhi standar rasio Puskesmas (1:30.000 penduduk), masih diperlukan lebih kurang 19 Puskesmas.
5. Jumlah tenaga non Kesehatan yang tidak mencukupi sehingga tenaga Kesehatan merangkap sebagai tenaga administrasi.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN yang berakibat pada cakupan Universal Health Coverage (UHC)
7. Kebutuhan formasi sumber daya manusia kesehatan tidak terpenuhi
8. Masih terdapatnya kematian ibu dan bayi yang seharusnyadapat dicegah dengan peningkatan layanan pada ibu hamil dan bayi baru lahir.
9. Masalah Gizi masyarakat, masih terdapat kasus stunting, wasting dan underweight di wilayah Kabupaten Luwu.
10. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 0-11 bulanbelum tercapai
11. Masih rendahnya cakupan deteksi dini kanker serviks danpayudara pada perempuan usia 30-50 tahun
12. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakanperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
13. Masih tingginya insident rate DBD

14. Masih ditemukannya kasus baru pada penyakit menular langsung (kusta) .

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu secara umum dengan memperhatikan permasalahan diatas yang mengacu pada renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2026. Maka dapatlah diidentifikasi isu-isu strategis yang akan menjadi landasan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya standar pelayanan minimal bidang kesehatan

   Standar pelayanan minimal bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah daerah harus memperhatikan tekait standar pelayanan pada kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, kesehatan pada usia pendidikan dasar, kesehatan pada usia produktif, kesehatan pada usia lanjut, kesehatan penderita hipertensi, kesehatan penderita diabetes melitus, kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, kesehatan orang terduga tuberkulosis, kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus. Hal tersebut bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif pada kesehatan masyarakat.

2. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat

   Dalam mendukung kesehatan ibu dan anak dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan kematian balita. Salah satu upaya yang dilakukan adalah optimalisasi penggunaan buku kesehatan ibu dan anak (KIA). Buku KIA memainkan peran penting sebagai alat berbasis rumah untuk memastikan kesehatan ibu dan anak yang berkelanjutan. Buku KIA merupakan panduan bagi keluarga dan penyedia layanan kesehatan untuk mengidentifikasi awal masalah kesehatan selama masa kehamilan dan masa kanak-kanak. Dengan demikian buku pegangan ini merupakan alat yang efektif untuk memantau penyediaan dan ketersediaan layanan kesehatan ibu dan anak yang esensial untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

3. Pencegahan Stunting

   Stunting merupakan ancaman terhadap kualitas hidup, produktivitas dan daya saing bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sehubungan

hal tersebut pencegahan stunting merupakan salah satu isu strategis Kabupaten Luwu. Dalam pencegahan stunting diperlukan komitmen dan dukungan yang kuat dari pimpinan di semua tingkatan pemerintahan untuk memastikan program pencegahan stunting berjalan efektif. Perlu juga dipastikan bahwa ketersediaan dan akses masyarakat terhadap makanan bergizi terutama bagi keluarga miskin dan rentan., serta memperkuat sistem pelayanan kersehatan teruma tingkat puskesmas dan posyandu untuk memberikan pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu hamil dan anak-anak.

4. Penguatan Sistem Kesehatan

   Percepatan penguatan dalam sistem kesehatan nasional dalam rangka percepatan mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat didefinisikan sebagai orang yang memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan, terlepas dari status keuangan. Akses ke layanan kesehatan berkualitas terus menjadi tantangan bagi banyak orang di negara berpenghasilan rendah dan menengah Tujuan penguatan system kesehatan ini adalah untuk memetakan strategi penguatan sistem kesehatan yang dapat digunakan untuk mencapai cakupan kesehatan universal. Langkah–langkah hasil termasuk infrastruktur fasilitas kesehatan, akses ke obat-obatan, dan sumber dukungan keuangan. Pembiayaan kesehatan dan pembangunan infrastruktur kesehatan adalah intervensi yang paling banyak dilaporkan. Hasilnya menunjukkan bahwa penguatan sistem kesehatan, yaitu melalui pembiayaan kesehatan, pengembangan, dan peningkatan infrastruktur kesehatan, dapat memainkan peran penting.

5. Pencegahan dan Pengendalian penyakit

   Peningkatan pengendalian penyakit dimana perhatian khusus dan prioritas nasional adalah pada penyakit diabetes, hipertensi, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, serta penyakit kusta. Kebijakan operasional pencegahan dan pengendalian penyakit diarahkan untuk penyelesaian persoalan kematian ibu, kematian bayi dan stunting disamping penyakit menular dan tidak menular dengan pendekatan promotif dan preventif disteiap jenjang pelaksanaan

pemerintahan. Berbagai pendekatan promotif dan preventif dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit yang menjadi prioritas nasional. Tuberkulosis, Malaria dan Imunisasi. Sedangkan untuk Penyakit Tidak Menular, pendekatan promotif dan preventif yang dilakukan antara lain Penanganan Faktor Resiko, Penyediaan fasilitas aktivitas fisik danatau olahraga dan Skrining dan penyuluhan serta Promosi Kesehatan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dan isu-isu strategis , maka dari itu terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi:

a. Dinamika kebijakan atau regulasi moratorium sehingga menuntut sumber daya aparatur dinas kesehatan agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.
b. Penugasan rangkapan tenaga fungsional kesehatan menjadi tenaga administrasi menyebabkan pencapaian kinerja tidak optimal
c. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
d. Tingkat kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS masih rendah dan gaya hidup yang tidak sehat
e. Kepesertaan masyarakat dalam penjaminan kesehatan atau BPJS belum optimal.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

a. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, provinsi, daerah dalam upaya mendukung program-program bidang kesehatan.
b. Semakin banyaknya pelayanan kesehatan swasta dan segmen pasar dalam peningkatan penyelenggaraan kesehatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
c. Kemudahan dalam komunikasi (via internet) untuk penanggulangan masalahmasalah kesehatan yang harus segera ditangani dan mempermudah koordinasi dengan lintas sektor terkait.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen rancangan awal RKPD Kabupaten Luwu serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan

target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka review terhadap rancangan awal rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Luwu

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KESEHATAN			172.474.848.961,00			172.474.848.961,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			172.474.848.961,00			172.474.848.961,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			172.474.848.961,00			172.474.848.961,00		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	68.948.941.386,00		100 %	68.948.941.386,00		Sesuai
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	408.012.328,00		100 %	408.012.328,00		Sesuai
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								Sesuai
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	191.499.793,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	2 Dokumen	191.499.793,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								Sesuai
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.028.350,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Dokumen	15.028.350,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.999.692,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.999.692,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								Sesuai
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.499.714,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Dokumen	10.499.714,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								Sesuai
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.999.785,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Dokumen	12.999.785,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								Sesuai
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	14.999.994,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Laporan	14.999.994,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Sesuai
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	149.985.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	1 Laporan	149.985.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Semua Kel/Desa			Semua Kel/Desa	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan	100 %	66.738.218.908,00		100 %	66.738.218.908,00		Sesuai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								Sesuai
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3500 Orang/bulan	66.166.537.904,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3500 Orang/bulan	66.166.537.904,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								Sesuai
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								Sesuai
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	39.999.773,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Laporan	39.999.773,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.999.746,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.999.746,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								Sesuai
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.681.485,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Laporan	29.681.485,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan admininistrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	40.600.000,00		100 %	40.600.000,00		Sesuai
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								Sesuai
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								Sesuai
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.600.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	1 Laporan	15.600.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Semua Kel/Desa			Semua Kel/Desa	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	20.240.000,00		100 %	20.240.000,00		Sesuai
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								Sesuai
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	2 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								Sesuai
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44 Orang	20.240.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Orang	20.240.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100 %	439.431.008,00		100 %	439.431.008,00		Sesuai
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Sesuai
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.981.322,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	1 Paket	4.981.322,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Semua Kel/Desa			Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								Sesuai
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.977.063,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	4.977.063,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								Sesuai
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.486.132,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	18.486.132,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								Sesuai
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.999.792,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.999.792,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								Sesuai
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Penyediaan Bahan/Material								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	13.999.348,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Paket	13.999.348,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu								Sesuai
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								Sesuai
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	349.987.351,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	349.987.351,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	58.671.844,00		-	58.671.844,00		Sesuai
	Pengadaan Mebel								Sesuai
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	13.825.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	3 Unit	13.825.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								Sesuai
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	44.846.844,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	1 Unit	44.846.844,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Semua Kel/Desa			Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	869.200.000,00		100 %	869.200.000,00		Sesuai
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								Sesuai
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	24.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								Sesuai
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	166.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	166.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								Sesuai
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	679.200.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Laporan	679.200.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 %	374.567.298,00		70 %	374.567.298,00		Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Sesuai
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	199.987.298,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	199.987.298,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								Sesuai
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	24.580.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit	24.580.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								Sesuai
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 %	101.104.617.393,00		100 %	101.104.617.393,00		Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya	85 %	40.401.329.649,00		85 %	40.401.329.649,00		Sesuai
	Pembangunan Puskesmas								Sesuai
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	8.300.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	8.300.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya								Sesuai
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6 Unit	1.772.640.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	1.772.640.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	3.145.052.300,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	3.145.052.300,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengembangan Puskesmas								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	3.836.040.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	3.836.040.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya								Sesuai
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	21 Unit	1.687.356.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Unit	1.687.356.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas								Sesuai
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	14.373.768.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	14.373.768.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya								Sesuai
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Unit	630.311.630,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	630.311.630,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	1.000.012.859,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	1.000.012.859,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	1.494.600.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.494.600.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300 Unit	77.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Unit	77.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	4.050.953.860,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	4.050.953.860,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	5 Layanan	23.095.000,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	5 Layanan	23.095.000,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan								Sesuai
		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	10.500.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.500.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan	100 %	60.647.590.088,00		100 %	60.647.590.088,00		Sesuai
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								Sesuai
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	NA Orang	24.992.575,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	NA Orang	24.992.575,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								Sesuai
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5374 Orang	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5374 Orang	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								Sesuai
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5408 Orang	41.951.710,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5408 Orang	41.951.710,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								Sesuai
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28106 Orang	87.127.656,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	28106 Orang	87.127.656,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Semua Kel/Desa			Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								Sesuai
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58889 Orang	140.839.802,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58889 Orang	140.839.802,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								Sesuai
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222198 Orang	95.774.790,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222198 Orang	95.774.790,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								Sesuai
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28540 Orang	30.120.430,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28540 Orang	30.120.430,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								Sesuai
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70524 Orang	21.396.700,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70524 Orang	21.396.700,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								Sesuai
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4432 Orang	408.676.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4432 Orang	408.676.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								Sesuai
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	871 Orang	19.408.350,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	871 Orang	19.408.350,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								Sesuai
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6579 Orang	470.008.200,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6579 Orang	470.008.200,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								Sesuai
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6579 Orang	17.610.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6579 Orang	17.610.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	68.365.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	68.365.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	17.075.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	17.075.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	21.495.360,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.495.360,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	12.138.350,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.138.350,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	674.724.010,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	674.724.010,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	14.870.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	14.870.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	99.983.670,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	99.983.670,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	na Orang	20.706.200,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	na Orang	20.706.200,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								Sesuai
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	na Orang	25.445.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	na Orang	25.445.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	986.676.930,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	986.676.930,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	52.000.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	52.000.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	NA Paket	24.962.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	NA Paket	24.962.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 Dokumen	300.001.940,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	300.001.940,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Operasional Pelayanan Puskesmas								Sesuai
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	4.249.999.619,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.249.999.619,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								Sesuai
		0	1 0	18.599.235,00	-	1 0	18.599.235,00	-	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								Sesuai
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	22 Unit	29.986.050,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	29.986.050,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	24.983.781,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	24.983.781,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	27.575.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	27.575.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								Sesuai
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								Sesuai
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA Orang	9.976.508,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	NA Orang	9.976.508,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA Orang	24.950.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	NA Orang	24.950.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								Sesuai
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	NA Orang	15.800.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	NA Orang	15.800.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok								Sesuai
		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	29.990.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Tatanan	29.990.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								Sesuai
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	13.025.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	13.025.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota								Sesuai
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dokumen	124.992.212,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	124.992.212,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			Semua Kel/Desa			Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								Sesuai
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	243.376.734,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	243.376.734,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	24.997.333,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	24.997.333,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik								Sesuai
		Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	24.999.849,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	24.999.849,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji								Sesuai
		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	9.989.094,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	9.989.094,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi kesehatan yang terintegrasi	100 %	24.997.656,00		100 %	24.997.656,00		Sesuai
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	24.997.656,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	24.997.656,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin rumah sakit kelas C dan D yang diselesaikan proses penerbitan izinnya	100 %	30.700.000,00		100 %	30.700.000,00		Sesuai
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	22 Unit	30.700.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	30.700.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan lain per satuan penduduk Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	0,021 Angka 100 % 78,91 %	1.703.120.824,00		0,021 Angka 100 % 78,91 %	1.703.120.824,00		Sesuai
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin praktek tenaga kesetahatan yang diselesaikan proses penerbitan izinnya	100 %	40.011.950,00		100 %	40.011.950,00		Sesuai
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	20.011.950,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.011.950,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKm dan UKP	100 %	202.586.445,00		100 %	202.586.445,00		Sesuai
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	202.586.445,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	202.586.445,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang telah mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi	100 %	1.460.522.429,00		100 %	1.460.522.429,00		Sesuai
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Sesuai
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1500 Orang	1.460.522.429,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1500 Orang	1.460.522.429,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	100 %	442.259.717,00		100 %	442.259.717,00		Sesuai
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, (UMOT) yang telah mendapat izin	100 %	160.989.306,00		100 %	160.989.306,00		Sesuai
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	160.989.306,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	160.989.306,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi	Jumlah Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang telah diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	230 Produk	81.545.865,00		230 Produk	81.545.865,00		Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	oleh Industri Rumah Tangga								
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	81.545.865,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	81.545.865,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan	-	-	30.730.400,00		-	30.730.400,00		Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Depot Air Minum (DAM)								
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	30.730.400,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.730.400,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	168.994.146,00		-	168.994.146,00		Sesuai
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	71 Unit	168.994.146,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71 Unit	168.994.146,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS	100 %	275.909.641,00		100 %	275.909.641,00		Sesuai
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22 Kelompok	133.984.589,00		22 Kelompok	133.984.589,00		Sesuai
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								Sesuai
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	133.984.589,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	133.984.589,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat	-	-	34.645.052,00		-	34.645.052,00		Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Kabupaten/Kota								
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	34.645.052,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	34.645.052,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan UKBM	100 %	107.280.000,00		100 %	107.280.000,00		Sesuai
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	107.280.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	107.280.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
				172.474.848.961,00			**172.474.848.961,00**		

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Salah satu tahapan proses perencananaan dan penganggaran juga memberikan ruang kepada para pemangku kepentingan, LSM, Asosiasi- Asosiasi, Perguruan Tinggi dan Ornasisasi profesi untuk mengusulkan program dan kegiatannya kepada Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan diusulkan secara elektronik melalui aplikasi Sisten Informasi Pembangunan Daerah, selanjutnya usulan tersebut di verifikasi dan divalidasi. Usulan program dan kegiatan dari Masyarakat disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/kota, Setelah usulan yang telah didapat melalui Musrenbang Kecamatan selanjutnya u dianalisa dan disesuaikan dengan juknis dan data lapangan yang ada, kemudian Dinas Kesehatan menyelenggarakan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Luwu yang dihadiri pemangku kepentingan dan hasil forum tersebut menyepakati :

1. Program dan kegiatan prioritas, dan indicator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Kabupaten
2. Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah dari 169 usulan kecamatan, Dinas Kesehatan Menerima 82 usulan,menolak 87 usulan.

Adapun usulan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Usulan Progran dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Luwu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
A	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	**100%**		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya	85%		
1	Pembangunan Puskesmas (Renovasi/penambahan ruang puskesmas)	Walenrang Barat		1 Unit		7.643.600.000,00
2	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Larompong, Padang Kalua, Pantilang, Sampano, dan Taba		5 Unit		2.289.330.000,00
3	Pembangunan Rumah Medis			1 Unit		53.587.600,00
4	Penambahan ruang puskesmas	Bua		1 Unit		2.300.045.400,00
5	Penambahan ruang puskesmas	Ponrang Selatan		1 Unit		1.449.172.300,00
6	Penataan halaman puskesmas	Larompong selatan, lamasi, ponrang, suli barat		4 Unit		944.236.654,00
7	Pembangunan pagar puskesmas	Bajo, bua, lamasi timur, larompong selatan		4 Unit		794.512.400,00
8	Penataan halaman pustu	Parekaju		1 Unit		100.700.000,00

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
9	Pembangunan pagar pustu	Tongkonan, barowa, bosso timur, bukit harapan, bululondong, puty, Kaili, Kaladi, Karang-karangan. Kendekan, Komba, Kurusumanga, pasar baru, seppong, tampumia. To'katapang, Tongkajang		17 Pustu		2.405.369.000,00
10	Rehabilitasi Puskesmas Larompong	Larompong		1 Unit		1.565.966.000,00
11	Rehabilitasi Pustu	Bonepute, Bassiang, Buntu batu, Bastem, Buntu sarek, Buntutallang, Jenne Maeja, Komba selatan, La'loa, Lamunre, Lauwa, Lempomajang, Muhajirin, Muladimeng, Padang Makbud, Palakka, Pammesakang, Radda, Raja, Salujambu, Salu Pao, Salu Paremang, Sampa, Senga Selatan, Sepon, Tanjong, Tibussan, Tirowali, Tobalo, Tobbia, Tumale, Ulusalu, Walenna, Binturu, Cakkeawo, kadong-kadong, kendekan, makalua-kadundung, malewong, pammanu, pangi, rantebelu, sinaji, dan Uraso		44 Pustu		6.628.014.640,00
12	Pengadaan alat kedokteran umum	Belopa				1.256.206.800,00
13	Pengadaan alat kesehatan kedokteran gigi	Belopa				1.496.720.000,00

Dari tabel di atas dapat di jelaskan kegiatan pada TA. 2025, Rehab/pembangunan yang dilaksanakan sesuai dari data dukung bahwa di beberapa puskesmas, pustu dan polindes yang sudah tidak layak untuk melaksanakan pelayanan maka itu perlu dilakukan rehab fisik dan pembangunan agar dapat melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top_down), dan bawah-atas (bottom-up). Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong", maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2025, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020- 2025 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 - 152 - 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2025, guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2025, menjadi misi Kementrian Kesehatan yaitu meningkatkan kesehatan reproduksi, ibu,

anak, dan remaja, perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit, pembudayaan GERMAS, serta memperkuat sistem kesehatan.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2025 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2025: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

5. Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
6. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh
7. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE).

Selanjutnya, Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan, Komitmen tersebut didasari atas Visi Presiden yaitu untuk mewujudkan

masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan, terdiri atas 6 Pilar transformasi penopang kesehatan indonesia :

1. Transformasi Layanan Primer Transformasi Layanan Primer adalah pelayanan kesehatan yang difokuskan ke arah pencegahan, Transformasi ini adanya di Puskesmas dan Posyandu , terdiri atas :
   a. Edukasi Penduduk
   b. Pencegahan Primer
   c. Pencegahan Sekunder
   d. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Layanan Primer
2. Transformasi Layanan Rujukan; Transformasi Layanan Rujukan bertujuan meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier sehingga terbitnya pemerataan pelayanan kesehatan diseluruh Indonesia, Transformasi ini dilaksanakan dalam bentuk pembungan Rumah Sakit di Kawasan Timur, Jejaring Pengampuan 6 layanan unggulan, kemitraan dengan World's top healthcare centers.
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan Transformasi Sistem Kesehatan Kesehatan bertujuan meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan (produksi hingga distribusi farmalkes yang lancar), serta memperkuat ketahanan tanggap darurat.
4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan yaitu tersedia, cukup dan berkelanjutan ; alokasi yang adil dan pemanfaatan yang efektif dan efisien sehingga dapat mempermudah dan kesetaraan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang kuirang mampu.
5. Transformasi SDM Kesehatan Trasformasi SDM Kesehatan memastikan distribusi tenaga kesehatan merata di seluruh Indonesia, dengan dilakukan penambahan kuota mahasiswa beasiswa dalam & luar negeri,
6. Transformasi teknologi kesehatan Transformasi teknologi kesehatan berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan.

Berdasarkan 6 Pilar Transformasi tersebut Kementrian Kesehatan Menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran strategis Kementrian Kesehatan seperti pada bagan berikut ini :

Gambar 3.1
`Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementrian Kesehatan



Salah satu acuan penting dalam RPJMN ialah sasaran pokok pembangunan kesehatan yang terdiri dari 17 indikator yang kemudian dimasukan ke dalam Renstra Kementerian Kesehatan sesuai pada konteks dan level indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Angka kematian ibu (per 100.000 KH)
2. Angka kematian bayi (per 1.000 KH)
3. Angka kematian neonatal (per 1.000 KH)
4. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)
5. Prevalensi stunting pada balita (%)
6. Prevalensi wasting pada balita (%)
7. Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)
8. Insidensi TB (per 100.000 penduduk)
9. Eliminasi malaria (kabupaten/kota)
10. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)
11. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18
12. Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)
13. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)
14. Persentase RS terakreditasi (%)
15. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)
16. Persentase puskesmas tanpa dokter (%)
17. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)

Pembangunan kesehatan nasional berada dalam konteks lingkungan dan isu strategis terkait dengan pemenuhan layanan dasar, dengan berbagai isu di dalamnya dari kesehatan ibu dan anak, Kesehatan lingkungan, pemenuhan gizi, sistem rujukan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Khusus terkait dengan bidang kesehatan, RPJMN 2020-2025 merumuskan arah kebijakan, yaitu “Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi Arah kebijakan kesehatan nasional tersebut di atas kemudian dirincikan menjadi lima strategi kesehatan nasional yaitu:

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi, dengan cakupan :

a. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan; peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan; perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi; penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana;
b. Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin untuk pneumonia dan diare;
c. Perbaikan gizi anak, remaja putri dan ibu hamil; Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.

2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, yang mencakup:
   a. Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan, dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
   b. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi
   c. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
   d. Peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti termasuk fortifikasi pangan;
   e. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach);
   f. Penguatan sistem surveilans gizi;
   g. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat;
   h. Respons cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

3. Peningkatan pengendalian penyakit

   Peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus padajantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, dan gangguan penglihatan. Selengkapnya strategi ini mencakup :

   a. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit utama, seperti diet tidak sehat, merokok, kurang aktivitas fisik, menggunakan tembakau dan alkohol; termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor, dan perluasan layanan berhenti merokok;
   b. Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan sistem kewaspadaan dini (early warning systems) kejadian luar biasa dan karantina kesehatan;
   c. Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan
   d. Pengendalian resistensi antimikroba;
   e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.

4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang mencakup:

   a. Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;
   b. Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik;
   c. Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, terutama terkait rokok, produk pangan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak;
   d. Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif terutama dalam pembudayaan olahraga, konsumsi gizi seimbang, anti rokok, skrining kesehatan, imunisasi, kepatuhan pengobatan, dan perilaku menjaga sanitasi

dan kebersihan lingkungan, pemberdayaan dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat;

e. Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur, dan perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan;

f. Penguatan Sistem Kesehatan

    1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, yang difokuskan pada:

        a. Penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta
        b. Optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga;
        c. Revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya;
        d. Pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan), termasuk system rujukan, pola pembiayaan, regulasi dan kelembagaan;
        e. Pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia;
        f. Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
        g. Pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (alkes) yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
        h. Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan Kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan daring termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis daring;
        i. Perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying dan sailing health care) dan gugus pulau;
        j. Pengembangan dan peningkatan kualitas RS Khusus;dan

k. Penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, yang difokuskan pada:
   a. Penguatan perencanaan kebutuhan dan pemetaan tenaga kesehatan secara integratif antara pusat dan daerah sebagai dasar untuk penyediaan dan pemenuhan sumber daya manusia
   b. Afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/pendukung termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang/pendukung, farmasi dan alkes);
   c. Afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
   d. Afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
   e. Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan;
   f. Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
   g. Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas;
   h. Penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar; dan
   i. Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alkes, yang difokuskan pada:
   a. Efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk;
   b. Penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik;

c. Peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional
d. Pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin dalam negeri bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life sciences; dan
e. Pengembangan produksi dan sertifikasi alkes untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri

4. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan, yang difokuskan pada:
   a. Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
   b. Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
   c. Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single- entry;
   d. Penguatan data rutin;
   e. Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, termasuk big data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan;
   f. Peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotive dan preventif berbasis bukti;
   g. Pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark cukai (selain tembakau dan alkohol) dan pajak, pembiayaan bersumber masyarakat, dan kerjasama pemerintah dan swasta;
   h. Peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah;
   i. Penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas inovasi intervensi, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN

3.2.1 TUJUAN

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan effort dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Tujuan yang ingin dipacapai kabupaten luwu selama periode renstra tahun 2025-2026 adalan **Meningkatnya Pelayanan Kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu**

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur. Guna mewujudkan tujuan tersebut diatas, perlu ditetapkan sasaran yang menjabarkan tujuan yang ingin dicapai berupa indikator dan targetnya. Sasaran suatu pernyataan yang mengandung unsur SMART (Spesifik, Measurable, Attributable, Reliable, dan Timely) yang memiliki tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran pada Dua tahun mendatang. Untuk itu dirumuskan sasaran pembangunan kesehatan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu adalah Meningkatnya akuntabiitas kinerja perangkat daerah dan **Meningkatnya kesehatan masyarakat**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunandan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu bersadarkan pada Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Luwu tahun 2025-2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.

Meningkatkan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan kesehatan yang mampu diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu tahun 2025-2026, Sebagai Berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	s/d 2026
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan		Indeks	0.850	0.851	0.852	0.853	0.853
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan Hidup	Usia Harapan Hidup (UHH) adalah jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang	Tahun	71,04	71.10	71.15	71.20	71.20

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja dan pendanaan pada Rencana kerja tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah maupun menunjan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan tahun 2025. Hal ini juga mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dallam pemenuhan standar pelayanan minimal maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pelayanan wajib pemerintahan bidang kesehatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan dinas kesehatan kabupaten luwu tahun 2025 adalah sebagai berikut:

:

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencakup beberapa sub kegiatan diantaranya :
   a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   d) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan nya meliputi :
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   d) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Kegiatan ini terdiri dari:
   a) Sub kegiatan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah,.
   b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
   a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
   b) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin lainnya;
   d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g) Sub Kegiatan Penyediaan bahan dan material
h) Fasilitas kunjungan tamu.
i) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
   a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   b) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   b) Penyediaan jasa surat menyurat
   c) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
   a) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pada Tahun 2025 Dinas Kesehatan mengusulkan Usuran wajib sebanyak 4 (Empat) Program wajib, 14 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

❖ PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program ini mendukung Upaya Kesehatan dalam bentuk Penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan maupun Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat secara langsung. Program ini terdiri dari empat Kegiatan dan empat puluh lima sub kegiatan seperti yang dijabarkan dibawah ini.

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota:
   a) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
   b) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
   c) Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas
   d) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
   e) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
   f) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
   g) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
   h) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
   i) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

j) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin Perencanaan obat dan perbekalan Kesehatan.
k) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai
l) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Masa Hamil
b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.
d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita.
e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.
f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.
i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
m) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
n) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
o) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upaya kesehatan kerja
p) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
q) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya.
r) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
s) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
t) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
u) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular
v) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
w) Operasional Pelayanan Puskesmas.
x) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.
a. Sub Kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;

4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari:
a. Sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

❖ ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Program ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
    a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
    a. sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
    a. Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

❖ PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia kesehatan terdiri dari tiga kegiatan dan empat sub kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota:
    a. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
    b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
    a. Sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

❖ PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Progran ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yaitu :

- Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT):
    a. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT),
    b. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga:
    a. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan

Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga .

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan tahun 2025 sebagaimana termuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan dan Penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						DINAS KESEHATAN							155.702.125.153,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							155.702.125.153,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							155.702.125.153,00
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %				100 %	69.581.200.000,00
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %				100%	165.000.000,00
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	191.499.793,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.028.350,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	0,00
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.999.692,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	0,00
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.499.714,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	0,00
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.999.785,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	0,00
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	14.999.994,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000,00
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	149.985.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	150.000.000,00
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan	100 %	66.738.218.908,00			100%	67.542.000.000,00
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3500 Orang/bulan	66.166.537.904,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3500 Orang/bulan	67.000.000.000,00
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Dokumen	500.000.000,00
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	39.999.773,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Laporan	40.000.000,00
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.999.746,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Dokumen	2.000.000,00
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.681.485,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan admininistrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	40.600.000,00			100%	40.600.000,00
	1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.600.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	15.600.000,00
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	20.240.000,00			100%	130.000.000,00
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	2 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Orang	100.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						
	1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44 Orang	20.240.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Orang	30.000.000,00
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100 %	439.431.008,00			100%	451.000.000,00
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.981.322,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Paket	5.000.000,00
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.977.063,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Paket	5.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.486.132,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	30.000.000,00
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.999.792,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		10.000.000,00
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Dokumen	12.000.000,00
	1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material							
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	13.999.348,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Paket	14.000.000,00
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Laporan	25.000.000,00
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	349.987.351,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Laporan	350.000.000,00
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	58.671.844,00			100%	60.000.000,00
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	13.825.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000,00
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	44.846.844,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	5 Unit	45.000.000,00
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	869.200.000,00			100%	752.600.000,00
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Laporan	16.800.000,00
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	166.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	185.000.000,00
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	679.200.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Laporan	550.800.000,00
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 %	374.567.298,00			75%	440.000.000,00
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	199.987.298,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	7 Unit	200.000.000,00
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	24.580.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	30 Unit	40.000.000,00
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL		200.000.000,00
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 %	101.104.617.393,00			100 %	83.533.745.240,00
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya	85 %	40.401.329.649,00			90%	24.025.000.000,00
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	8.300.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN		0,00
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6 Unit	1.772.640.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	3 Unit	1.500.000.000,00
	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	3.145.052.300,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Unit	1.000.000.000,00
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas							
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	3.836.040.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	2 Unit	5.000.000.000,00
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	21 Unit	1.687.356.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	5 Unit	0,00
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	14.373.768.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2 Unit	5.000.000.000,00
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Unit	630.311.630,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	5 Unit	2.500.000.000,00
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	1.000.012.859,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		1.500.000.000,00
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	1.494.600.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		7.000.000.000,00
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300 Unit	77.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		250.000.000,00
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	4.050.953.860,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		0,00
	1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	5 Layanan	23.095.000,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		30.000.000,00
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	10.500.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		245.000.000,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan	100 %	60.647.590.088,00			100%	59.453.745.240,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	NA Orang	24.992.575,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	5572 Orang	30.000.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5374 Orang	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	5374 Orang	104.000.000,00
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5408 Orang	41.951.710,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	5408 Orang	43.000.000,00
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28106 Orang	87.127.656,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		90.000.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58889 Orang	140.839.802,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	58899 Orang	30.000.000,00
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222198 Orang	95.774.790,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	222198 Orang	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28540 Orang	30.120.430,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	222198 Orang	30.000.000,00
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70524 Orang	21.396.700,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	70524 Orang	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4432 Orang	408.676.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	4432 Orang	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	871 Orang	19.408.350,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	871 Orang	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6579 Orang	470.008.200,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	6579 Orang	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6579 Orang	17.610.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	8672 Orang	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	68.365.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		92.000.000,00
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	17.075.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	21.495.360,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	25.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	12.138.350,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		20.000.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	674.724.010,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	1 Dokumen	230.000.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	14.870.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	1 Dokumen	35.000.000,00
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	99.983.670,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	na Orang	20.706.200,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	871 Orang	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA							
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	na Orang	25.445.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	NA Orang	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	986.676.930,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	1 Dokumen	350.000.000,00
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	52.000.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1 Dokumen	52.000.000.000,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional							
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	NA Paket	24.962.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	5 Paket	25.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 Dokumen	300.001.940,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	7 Dokumen	350.000.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	4.249.999.619,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	1 Dokumen	4.250.000.000,00
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							0	1 0	18.599.235,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		18.600.000,00
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota							
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	22 Unit	29.986.050,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	22 Unit	30.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
										Semua Kel/Desa			
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	24.983.781,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	27.575.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Unit	350.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA Orang	9.976.508,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	11303 Orang	480.000.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA Orang	24.950.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	102 Orang	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	NA Orang	15.800.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	NA Orang	37.755.240,00
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok							
							Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	29.990.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	7 Tatanan	30.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	13.025.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota							
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	124.992.212,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	125.000.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	243.376.734,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		243.390.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	24.997.333,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	25.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	02	02	2.02	0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik							
							Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	24.999.849,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	25.000.000,00
	1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji							
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	9.989.094,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	10.000.000,00
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi kesehatan yang terintegrasi	100 %	24.997.656,00			100%	25.000.000,00
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	24.997.656,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	1 Dokumen	25.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin rumah sakit kelas C dan D yang diselesaikan proses penerbitan izinnya	100 %	30.700.000,00			100%	30.000.000,00
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	22 Unit	30.700.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	22 Unit	30.000.000,00
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan lain per satuan penduduk Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	0,021 Angka 100 % 78,91 %	1.703.120.824,00			100% 79,56% 0,027Angka	1.742.644.000,00
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin praktek tenaga kesetahatan yang diselesaikan proses penerbitan izinnya	100 %	40.011.950,00			100%	40.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	20.011.950,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	20.000.000,00
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		20.000.000,00
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKm dan UKP	100 %	202.586.445,00			100%	202.644.000,00
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan	1 Dokumen	202.586.445,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY		202.644.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Sumber Daya Manusia Kesehatan			Semua Kel/Desa	A BIDANG KESEHATAN		
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang telah mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi	100 %	1.460.522.429,00			100%	1.500.000.000,00
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1500 Orang	1.460.522.429,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	150 Orang	1.500.000.000,00
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	100 %	442.259.717,00			100 %	677.220.030,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, (UMOT) yang telah mendapat izin	100 %	160.989.306,00			100%	345.000.000,00
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	160.989.306,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	1 Dokumen	345.000.000,00
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	Jumlah Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang telah diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	230 Produk	81.545.865,00			230Produk	81.549.015,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	81.545.865,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	1 Dokumen	81.549.015,00
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran	-	-	30.730.400,00			75%	81.549.015,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						dan Depot Air Minum (DAM)							
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	30.730.400,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	150 Dokumen	81.549.015,00
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	168.994.146,00			-	169.122.000,00
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	71 Unit	168.994.146,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		169.122.000,00
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS	100 %	275.909.641,00			100 %	167.315.883,00
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22 Kelompok	133.984.589,00			22Kelompok	25.000.000,00
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	133.984.589,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		25.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	34.645.052,00			100%	35.000.000,00
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	34.645.052,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	1 Dokumen	35.000.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan UKBM	100 %	107.280.000,00			100%	107.315.883,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	107.280.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	1 Dokumen	107.315.883,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			JUMLAH		**172.474.848.961,00**				**155.702.125.153,00**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas–tugas dan kegiatan kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanalan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025. Tingkatan keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta sebagi acuan dalam menyusun program/Kegiatan pembangunan dalam kerangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan:

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu tahun 2025 merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung target-target pembangunan.

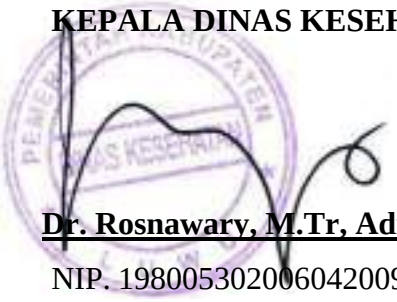
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujaun dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekertariat, bidang-bidang dan seluruh staf dinas kesehatan Kabupaten Luwu secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   - Melaksanakan renja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya
   - Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan dokumen pelaksanaan anggaran
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan renja tahun 2025.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEPALA DINAS KESEHATAN



Dr. Rosnawary, M.Tr, Adm.Kes

NIP. 198005302006042009

RENCANA KERJA
2025



DINAS KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

RENCANA KERJA DISPARBUD 2025

BASTEM
BUNTU SINAJI





KATA PENGANTAR

Segala puji yang tak teruji dan syukur yang tak terukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta Alam atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun.

Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu serta menjadi tolak ukur dalam merealisasikan Rencana Kerja yang direncanakan. Selain itu juga dapat membuka informasi tentang Rencana Kerja Kegiatan Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan sekaligus menilai dan mengukur keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan pada setiap tahun anggaran.

Renja Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 berdasarkan prioritas RKPD Tahun 2025 dan Renstra Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025-2026.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu ini disusun dengan harapan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

KEPALA DINAS KEPARIWISATAAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU

MUHAMMAD ARIF HAMKA, S.IP.,M.Si
Pkt. Pembina Tingkat I
NIP. 19831017 200502 1 001

DAFTAR ISI

Judul

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disparbud Kab. Luwu..... 27

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disparbud Kabupaten Luwu..... 33

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 39

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 50

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 56

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 56

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi..... 57

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 59

3.4 Program dan Kegiatan 62

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT..... 71

BAB V PENUTUP 86

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disparbud Kab. Luwu dan Pencapaian Renstra Disparbud Kab Luwu s/d 2024 Kab. Luwu.....	9
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Disparbud Kab. Luwu……	30
Table 3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Luwu……...	40
Tabel 4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Luwu…….	50
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disparbud Kabupaten Luwu, Tahun 2025-2026……..	60
Table 6	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kab. Luwu……	72

visi indonesia

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dareah mengamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yaitu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah dan Penyusunan Renstra(Rencana Strategis) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA PD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Dengan demikian RENJA PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Pelaksanaan RENJA PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan RENJA Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program

dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dan penelaahan kebijakan nasional bidang kepariwisataan dan Kebudayaan.

Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Luwu memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan dan Kebudayaan daerah kepada masyarakat.

Tahun anggaran 2025 adalah tahun Pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan 2025-2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuanga Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
11. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang sisterm

Informasi Pemerintahan Daerah;

13. Keputusan menteri Dalam Negri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verivikasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Luwu Tahun 2022-2025;
17. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Luwu;
18. Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kab. Luwu;
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembanguan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2026;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 1);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Tahun 2025 selaras dengan maksud dan tujuan Rencana Strategis yaitu memberikan arahan bagi seluruh tingkatan manajemen pada lingkup Dinas Kepaariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu dalam pelaksanaan program guna pencapaian visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan penyusunan merupakan penjabaran melalui misi dan merupakan arah yang akan dicapai kedepan melalui mekanisme yang terukur dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Gambaran Umum Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah agar Substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan Pengertian Ringkas Tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah Dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, Serta Tindak Lanjutnya Dengan Proses Penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besarisi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

2.2 Analisa Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – Isu Penting Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiartan

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi progaram dan kegiatan

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LUWU TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kab. Luwu Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kab. Luwu

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten

3. Program Pemasaran Pariwisata

- Pemasaran Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten di dalam dan Luar Negeri

4. Program Pengembangan Kebudayaan

- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pelestarian Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

- Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pembinaan Sejarah

- Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Kondisi keberhasilan program dan kegiatan pada Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu disajikan pada tabel 1 yang disesuaikan dengan OPD dapat terlihat pada format tabel sebagai berikut:

TABEL 1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DISPARBUD KAB. LUWU DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KAB. LUWU S/D TAHUN 2024 KABUPATEN LUWU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerinah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
							Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah	100%	8,566,112,000			100%	3.242.604.164	100%	3.098.892.117	85 %	95,5	100%	3.116.419.051	18 %	213.564.355	0,07	0,07

3.26.01..2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah yang di susun	100%	1,192,400,000			100%	12.322.600	100%	11.430.100	91%	92,8	100%	14.936.994	-	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	320,000,000			2 Dokumen	3.011.100	2 Dokumen	3.011.100	100	100	2 Dokumen	4.938.677	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	140	80,000,000			1 Dokumen	1.668.100	1 Dokumen	1.668.100	100	100	1 Dokumen	1.768.940	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	50000	290,000,000			1 Dokumen	2.068.100	1 Dokumen	2.068.100	100	100	1 Dokumen	1.491.970	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun	145	290,000,000			1 Dokumen	1.802.100	1 Dokumen	1.802.100	100	100	1 Dokumen	2.234.960	-	-	-	-

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	3	162,400,000			1 Dokumen	1.568.100	1 Dokumen	675.600	43,1	43,1	1 Dokumen	1.891.970				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang Disusun (LAKIP)	5	50,000,000			5 Dokumen	2.205.100	5 Dokumen	2.205.100	100	100	5 Dokumen	2.610.477	-	-	-	-
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah	100%	3,246,880,000			100%	2.506.123.545	100%	2.446.644.474	100%	98,4	100%	2.649.233.247	19%	211.255.150	100	100
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2683 OB	150,000,000			2683 OB	2.375.048.745	1,678 OB	2.315.573.074	48,7	97,5	2683 OB	2.528.500.460	26 OB	211.255.150	0,8	0,8

	Pelaksnaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jenis Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Jenis	150,000,000			2 Jenis	123.600.000	2 Jenis	123.600.000	100	100	2 Jenis	106.560.000	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1 Laporan	200,000,000			1 Laporan	2.205.100	1 Laporan	2.205.100	100	100	1 Laporan	6.336.506	-	-	-	-
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	280 Dokumen	2,568,130,000			3 Dokumen	2.528.000	2 Dokumen	2.524.600	99,9	99,9	3 Dokumen	2.927.275	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Smesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/semesteran yang disusun	14 Laporan	178,750,000			14 Laporan	2.741.700	2 Laporan	2.741.700	100	100	14 Laporan	4.909.006	-	-	-	-

3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah	100%	-			100%	-	-	-	78,8	78,8	100%	-	-	0	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	53 Orang	-			55 Orang	-	55 Orang	-	-	-	53 Orang	-	-	0	-	-
3.26.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah	100%	3,617,007,000			100%	258.343.582	100%	249.594.016	100	100	100%	79.613.923	-	-	0	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	10,000,000			15 Jenis	-	15 Jenis	-	100	100	15 Jenis	1.491.405	-	-	-	-

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Unit	1,404,600,000			7 Unit	-	12 Unit	-	100	100	7 Unit	7.415.000	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	10,000,000			12 Bulan	1.632.150	-	1.631.500	100	100	12 Bulan	2.629.770	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Jenis	50,000,000			4 Jenis	1.612.500	4 Jenis	592.500	36,7	36,7	4 Jenis	2.452.500	-	-		-
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 Jenis	30,000,000			2 Dokumen	3.600.000	2 Dokumen	3.240.000	90	90	2 Jenis	6.000.000	-	-		-
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis/Bahan Material kabutuhan kantor yang disediakan	6 Jenis	525,000,000			6 Paket	11.294.550	6 Paket	11.278.950	99,9	99,9	15 steel	3.125.248	-	-		-

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jamuan makan dan minum yang disediakan	3 Jenis	37,500,000			3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	7.625.000	76,3	76,3	3 Jenis	6.500.000	-	-		-
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang diselenggarakan	403 OK	1,549,907,000			540 Laporan	230.204.382	540 Laporan	225.226.066	97,8	97,8	403 OK	50.000.000	-	-	-	-
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah	100%	319,825,000			100%	92.800.000	100%	62.300.000	100	100	100%	-	-	0	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Unit	319,825,000			21 Unit	92.800.000	10 Unit	62.300.000	67,1	100	2 Unit	-	-	0	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	300.000.000			7 Unit	47.875.000	6 Unit	44.000.000	100	91,9		-		-		

3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah	100%	170,000,000			100%	301.100.000	100%	281.316.200	100	95,3	100%	301.100.000	-	2.309.205	0,05	0,05
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	25 OB	77,500,000			4 laporan	24.000.000	4 laporan	24.000.000	100	100	25 OB	30.000.000	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan telepon, air, dan listrik	12 Bulan	15,000,000			12 Bulan	46.700.000	12 Bulan	33.416.200	63,2	71,6	12 Bulan	46.700.000	2 Bulan	2.309.205	0,05	0,05
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Jasa Pelayanan umum kantor	75 OB	77,500,000			24 Laporan	230.400.000	24 Laporan	223.900.000	96,2	97,2	75 OB	224.400.000	-	-	-	-
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Darah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah	100%	20,000,000			100%	71.914.437	100%	47.607.327	79	79	100%	71.534.887	-	0	-	-

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	19 Unit	20,000,000			19 Unit	61.991.590	19 Unit	37.684.480	60,8	60,8	19 Unit	71.534.887	-	0	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	24 Unit	-			24 Unit	-	6 Unit	-	-	-	24 Unit	5010000	-	0	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	200m2	-			200 Unit	9.922.847	200 Unit	9.922.847	100	100	200m2	0	-	0	-	-
3.26.02	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi pariwisata	Jumlah Destinasi wisata yang dikembangkan secara terpadu	4 Destinasi	374,640,000			1 Destinasi	**100.000.000**	1 Destinasi	**30.209.320**	100	94,6	1 Destinasi	4.294.478		0	-	-

3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik wisata yang di kelola dengan baik		154,800,000			1 Destinasi	-	1 Destinasi	-	88,2	88,2		0		0	-	-
	Perencanaan Pengembangan Wisata Kabuapten/Kota			154,800,000			1 Destinasi	-	1 Destinasi	-	-	-		0		0	-	-
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata kabupaten yang dikembangkan						0		0						0	-	-
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota yang di kelola	75%	219,840,000			71%	100.000.000	71%	30.209.320	100	99,3	75%	4.294.478	-	0	-	-
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					1 Dokumen	25.211.000	1 Dokumen	25.209.320	100	100		-				

	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwistaa Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang dilakukan pengadaan sarana dan prasarana dan pemeliharaan destinasi pariwisata kabupaten yang diadakan	4 Destinasi	219,840,000			4 Unit	100.000.000	1 Unit	5.000.000	10	5	1 Destinasi	4.294.478	-	0	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakaan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten	3 Kelompok				3 Kelompok	-	1 kelompok	-	-	-		-		0	-	-
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat Hunia Akomodasi (Hotel)	13,216 Orang	924,685,250		-	13,216 Orang	**210.508.330**	1,678 Orang	**178.772.710**	99	99	13,216 Orang	10.713.914	-	0	-	-

3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis pariwisata	Terlaksanaanya kegiatan pameran/Promosi Kepariwisataan	100%	924,685,250		-	2 kali	210.508.330	2 Kali	178.772.710	99	99	2 kali	10.713.914	-	0	-	-
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri yang dilakukan	3 kali	23,280,000		-	3 kali	8.000.000	3 Kali	3.000.000	37,5	37,5	3 kali	8.000.000	-	0	-	-
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pameran dalam rangka pemasaran destinasi wisata yang diikuti	1 Kali	901,405,250		-	1 Kali	202.508.330	1 Kali	175.772.710	86,8	86,8	1 Kali	2.713.914	-	0	-	-

2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	90%	3.000.000.000			90%	-	-	-	-	-	90%	669.251.688	-	-	-	-
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabuapten/Kota	Cakupan Ketersediaan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	90%	1.000.000.000			90%	-	-	-	-	-	90%	110.598.329	-	-	-	-
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan	2 Objek	1.000.000.000			2 Objek	-	-	-	-	-	2 Objek	110.598.329	-	-	-	-

2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	90%	1.000.000.000			90%	-	-	-	-	-	90%	536.753.424	-	-	-	-
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	2 Objek	1.000.000.000			2 Objek	-	-	-	-	-	2 Objek	536.753.424	-	-	-	-

2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaran Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	90%	1.000.000.000			90%	-	-	-	-	-	90%	21.899.935	-	-	-	-
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Lembaga Adat yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	2 Objek	1.000.000.000			2 Objek	-	-	-	-	-	2 Objek	21.899.935	-	-	-	-
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	90%	700.000.000			90%	-	-	-	-	-	90%	233.700.000	-	-	-	-

2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Penyelenggaran Pembinaan Kesenian yang masyarakat Pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	90%	700.000.000			90%	-	-	-	-	-	90%	233.700.000	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	700.000.000			2 Lembaga	-	-	-	-	-	2 Lembaga	233.700.000	-	-	-	-
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	90%	700.000.000			90%	-	-	-	-	-	90%	14.620.000	-	-	-	-

2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	90%	700.000.000			90%	-	-	-	-	-	90%	14.620.000	-	-	-	-
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	55 Orang	700.000.000			55 Orang	-	-	-	-	-	55 Orang	14.620.000	-	-	-	-
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	90%	1.000.000.000			90%	-	-	-	-	-	90%	1.800.000.000	-	-	-	-
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota	98%	1.000.000.000			98%	-	-	-	-	-	98%	1.800.000.000	-	-	-	-

	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan	5 Objek	1.000.000.000			5 Objek	-	-	-	-	-	5 Objek	1.800.000.000	-	-	-	-

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya atau rendahnya pencapaian terget Renja dan Renstra pada Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan adalah Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan skala prioritas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kab. Luwu

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Sehubungan dengan amanat undang-undang tersebut di atas, kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepariwisataan mengemban tugas konstitusi yang amat penting. Oleh karena itu, pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pariwisata sangat erat hubungannya dengan pencapaian target untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Harapan ini dimungkinkan terealisasi, jikalau seluruh pemangku kepentingan bidang kepariwisataan memiliki semangat yang sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sasaran pembangunan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Luwu periode tahun 2019-2023 masih mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara selama periode tahun 2019-2023 mengalami penurunan dari 2.955 orang pata tahun 2019 menjadi 308 orang pada tahun 2023. Sedangkan

wisatawan mancanegara mengalami penurunan dari 5 orang pada tahun 2019 menjadi 0 orang pada tahun 2023.

Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Kunjungan Wisata Domestik	2.955	4000	1.800	800	308
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	5	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu Tahun 2023

Data kunjungan wisatawan diatas menunjukkan bahwa pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Luwu belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Penyebab utama dari rendahnya perkembangan wisata di Kabupaten Luwu adalah belum adanya destinasi unggulan yang sudah layak jual, Obyek wisata yang ada di Kabupaten Luwu belum dikembangkan secara maksimal, masih dilakukan secara parsial, dan juga belum optimalnya promosi pariwisata.

PAD yang diperoleh dari sektor pariwisata di Kabupaten Luwu pada tahun 2023 hanya menyumbang sebesar 0,001% dari total PAD Kabupaten Luwu. Hal ini tentunya menjadi perhatian mengingat pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang terus-menerus dapat dikembangkan. Dunia pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan sangat strategis untuk dikembangkan mengingat Sulawesi Selatan masih kekurangan destinasi (masih mengandalkan destinasi lama), sehingga munculnya destinasi baru akan menggairahkan sektor pariwisata di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

PAD Sektor Pariwisata Tahun 2019– 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	PAD sektor pariwisata (Juta Rp)	10.585	19.790	28.000.000	5.920.000	3.869.000
2	Total PAD (Juta Rp)	119.000.000	122.916.342.359,09	132.465.563.071,18	163.816.263.663,56	207.400.000.000,00

3	PAD Sektor Pariwisata (%)	0,14	0,2	0,02	0,004%	0,001%

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu, Tahun 2022

Tabel 2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2022-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Tahun	
		2022	2023	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Lama kunjungan Wisatawan	1	1	100	100
2	PAD sektor pariwisata (juta rupiah)	5.920	3.869	0,2	0,6
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaaan	0%	0%	0	0
4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	0,4%	0,3%	0,4	0,3
5	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	1 Destinasi	1 Destinasi	1 Destinasi	1 Destinasi

6	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	3	3	100	100
7	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	0	0	0	0
8	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	0	0	0
9	Jumlah wisatawan domestik	800	308	0,4	0,3
10	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	2	1	100	50
11	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	1	2	50	100
12	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	50 Umkm	30 Pemandu wisata	100	100
13	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0,02%	0,02%	0,02	0,02
14	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0	0	0	0

15	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0	0	0	0

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu

Kepariwisataan dan Kebudayaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan kebudayaan yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pariwisata dan Kebudyaan dapat terbentuk apabila ada pelaku wisata (demand) yang memang mempunyai motivasi untuk melakukan perjalanan wisata, ketersediaan infrastruktur pendukung, keberadaan obyek wisata dan atraksi wisata yang didukung dengan promosi dan pemasaran yang baik serta pelayanan terhadap para pelaku wisata (supply). Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 mengemukakan bahwa pariwisata adalah berbagaii macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah**.**

Berdasarkan analisis kinerja dan dokumen yang terkait dengan perumusan rencana strategis Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kab. Luwu, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kab. Luwu adalah “Belum adanya destinasi wisata unggulan yang dikelola dengan baik”. Secara garis besar, dapat dijelaskan bahwa permasalahan pokok ini didasarkan pada kenyataan bahwa meskipun Kabupaten Luwu mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu destinasi utama di Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi saat ini belum ada destinasi yang telah dikelola secara maksimal.

Permasalahan yang menyebabkan permasalahan pokok diatas adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya tata kelola dan tata laksana perangkat daerah;
b. Pengelolaan pariwisata daerah belum optimal;
c. Investasi dibidang kepariwisataan masih minim;
d. Partisipasi masyarakat kurang optimal.
e. Rendahnya Kualitas Infrastruktur Sarana Pariwisata
f. Rendahnya Pelaku Ekonomi Kreatif
g. Rendahnya Pengelolaan Cagar Budaya

h. Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap pelestarian Budaya

Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu

Permasalahan	Akar Masalah
Pengelolaan pariwisata daerah belum optimal	Implementasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) kurang maksimal
	Pengembangan destinasi kurang fokus dan berkelanjutan
Investasi di bidang kepariwisataan masih minim	Akses menuju lokasi masih terbatas
	Sektor pariwisata belum menjadi industri yang menjanjikan di Kabupaten Luwu
Sumber daya manusia di bidang pariwisata kurang tersedia	Kurangnya pembinaan terhadap pelaku pariwisata daerah
Rendahnya kapabilitas kelembagaan	Belum maksimalnya ketersediaan sumber daya perangkat daerah
Rendahnya Pengelolaan Cagar Budaya	Kurangnya perhatian lebih terhadap Cagar budaya
Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pelestarian budaya	Minimnya Muatan Pelajaran Budaya di bangku pendidikan

Rumusan akar masalah yang telah diidentifikasi selanjutnya dianalisis sebagaimana dibawah ini:

1. Terbatasnya kapasitas kelembagaan
2. Implementasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) kurang maksimal
3. Pengembangan destinasi kurang fokus dan berkelanjutan
4. Akses menuju lokasi masih terbatas
5. Sektor pariwisata belum menjadi industri yang menjanjikan di Kabupaten Luwu
6. Kurangnya pembinaan terhadap pelaku pariwisata daerah
7. Kurangnya Perhatian lebih terhadap Cagar Budaya
8. Minimnya Muatan Pelajaran Budaya di bangku pendidikan

Berbagai permasalahan diatas berpotensi menjadi penghambat pemerintahan Kab. Luwu dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi dan pembangunan daerah, jika pemerintahan ini tidak diantisipasi dengan baik akan berdampak buruk terhadap Pencapaian Organisasi yang tertuang dalam RPD tahun 2025-2026.

Dilain pihak terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengembangan pelayanan pada Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kab. Luwu dan sekaligus menjadi rujukan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

a. Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan memiliki berbagai isu global dan nasional yang dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan local yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Sulawesi Selatan antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana, pertumbuhan ekonomi, serta kesenjangan sosial. Oleh karena itulah perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politis dan kerakyatan.

Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2026, rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:
   - ➢ Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah
   - ➢ Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap Struktur Ekonomi Daerah
   - ➢ Meningkatkan pembentukan karakter yang berbasis kearifan lokal, perlindungan situs dan cagar budaya

2. Sasaran:
   - ✓ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator:
     - Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)
     - Nilai SAKIP OPD
     - % ASN Nilai SKP Kategori Baik
   - ✓ Meningkatnya Daya Tarik Wisata, dengan indikator Jumlah destinasi wisata unggulan

daerah yang dikelola dengan baik

- ✓ Meningkatnya Daya Saing, dengan indikator Presentase Pertumbuhan pelaku Ekonomi Kreatif
- ✓ Meningkatkan Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dengan indikator Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap Total Pendapatan Daerah

3. Strategi:
   - ❖ Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
   - ❖ Promosi dan Pemasaran

❖ Pengembangan destinasi
   - ❖ Peningkatan kualitas layanan pariwisata
   - ❖ Peningkatan kualitas SDM
   - ❖ Penguatan Lembaga kepariwisataan
   - ❖ Dukungan sektor kreatif kepariwisataan
   - ❖ Dukungan peningkatan fasilitas destinasi utama kab/kota terkait PAD sektor pariwisata
   - ❖ Dukungan tata kelola destinasi pariwisata

4. Arah Kebijakan :
   - ▪ Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
   - ▪ Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
   - ▪ Peningkatan perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja

b. Dalam melakasakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu di pengaruhi oleh faktor-faktor baik dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal) antara lain meliputi :

1. Faktor internal
   a. Kekuatan:
      - Tersedianya sumber daya aparatur.
      - Tersedianyanya sarana dan prasarana kerja.
      - Tersedianya anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.
      - Adanya keterpaduan program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

- Adanya potensi pariwisata yang di kembangkan.
- Tidak adanya grand pengembangan pariwisata daerah.

b. Kelemahan :

- Infrastruktur dan sarana penunjang yang kujrang mendukung pengembangan sector pariwisata.
- Belum ada destinasi wisata yang di kembangkan dan di kelolah secara profesional.
- Promosi yang kurang gencar.
- Terbatasnya SDM di bidang pariwisata.
- Kurangnya kompotensi aparatur untuk pengembangan pariwisata.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang :

- Semakin terbukanya pasar global di sector pariwisata.
- Semakin berkembangnya jaringan pemasaran pariwisata.
- Bervariasinya ragam dan jenis obyek wisata.
- Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi membverikan kemudahan bagi pengembangan pariwisata.
- Kesadaran dan motivasi masyarakat semakin tinggi terhadap pembangunan pariwisata.
- Terbukanya kerjasama yang baik antar instansi Pembina sector pariwisata.
- Pengermbangan kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah di sektor pariwisata.

b. Ancaman :

- Ego sektor yang masih kuat.
- Persaingan dengan daerah lain.
- Kerusakan lingkungan hidup akibat pengembangan pariwisata

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan serta sangat menetukan dalam proses penyusunan rencana pembanguanan daerah sekaligus sebagai kelengkapan dari seluruh tahapan-tahapan yang telah di lakukan sebelumnya. Identifikasi isu

yang tepat dan bersifat strategis akan sangat menentukan pencapaian keberhasilan proses pembanguan.

Suatu kondisi menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak di antisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilankan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan yang di hadapi serta memperhatikan hasil telahan dan analisi, maka dapat di rumuskan isu-isu strategis Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Industri Pariwisata
   Pengelolaan pariwisata erat kaitannya dengan pengembangan perekonomian daerah.Namun demikian, untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari perkembangannya kepariwisataan dunia, terhadap beberapa hal yang perlu di perhatikan, antara lain: (1) strategi bersaing; dan (4) pemanfaatan teknologi yang tepat untuk peningkatan nilai tambah.

2. Pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan
   Pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan adalah sebagai hal yang dinamis dalam skala industri secara makro melalui pendekatan strategis dalam perencanaan dan pembangunan sebuah destinasi pariwisata. Oleh karena itu, pelibatan pemangku kepentingan dalam perumusan strategis pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sangat penting di prhatikan. Hal lainnya adalah mengakomodir seluruh masukan atau pendapat dari berbagai kelompok dalam hal identifaksi masalah.

3. Pengembangan Kepariwisataan menjadi Prioritas Pembangunan Nasional
   Pesatnya pertumbuhan perekonomian di bidang pariwisata menjadikan pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas nasional. Hal ini menjadi faktor pendorong bagi pengembangan pariwisata di Kabupatern Luwu.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kepariwisataan

   Potensi yang ada harus di dukung dengan dengan ketersiadaan sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu tersedianya sumber daya manusia merupakan factor penentu dalam keberhasilan pengembangan dunia kepariwisataan.

5. Tata Kelola Kepariwisataan

   Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, koordinasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Tata kelola juga dapat diartikan sebagai rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dilaksanakan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata, serta menghindari adanya program dan kegiatan yang tidak diperlukan.

Review terhadap RKPD pada Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kab. Luwu tahun 2025, hampir tidak sejalan dengan rencana strategis dinas, hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang terakomodir untuk alokasi anggaran pembangunan atau pengembangan wisata termasuk sarana dan prasarana wisata objek belum memadai, hal ini akan berpengaruh terhadap capaian program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis dinas.

Berdasarkan hasil review maka terdapat perbedaan besar antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dimana besaran anggaran setelah dianalisa dengan kebutuhan terjadi perubahan yang disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa perbandingan antara rancangan awal RKPD dan kebutuhan disajikan dalam tabel 3

Tabel 3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Luwu

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					7.210.980.406	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				7.210.980.406	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.128.400.326	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.526.963.781	

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	14.936.994	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	39.501.876	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	100%	2.649.233.247	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	100%	2.754.678.169	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	36.300.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Cakupan Penyelengaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	79.613.923	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Cakupan Penyelengaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	779.511.248	

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Pesentase Peningkatan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Pesentase Peningkatan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	330.000.000	
6	penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa	100%	301.100.000	penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa	100%	307.200.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Presentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai ketentuan/kebutuhan	100%	83.516.162	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Presentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai ketentuan/kebutuhan	100%	279.772.488	
II	**Program Peningkatan Daya Tarik**				**1.004.294.478**	**Program Peningkatan Daya Tarik**				**1.114.862.400**	

	Destinasi Pariwisata					**Destinasi Pariwisata**					
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten	1 Destinasi	-	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten	1 Destinasi	256.862.400	
2	Pengelolaan Destinasi Pariwistaa Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten	100%	1.004.294.478	Pengelolaan Destinasi Pariwistaa Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten	100%	858.000.000	
III	**Program Pemasaran Pariwisata**				**210.713.914**	**Program Pemasaran Pariwisata**				**415.500.000**	

1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan pemasaran Daya tari, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten dalam dan luar negeri	100%	210.713.914	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan pemasaran Daya tari, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten dalam dan luar negeri	100%	415.500.000	
IV	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**		**Jumlah Lokasi Wisata Kreatif Kabupaten**	1 Lokasi	50.000.000	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**		**Jumlah Lokasi Wisata Kreatif Kabupaten**	1 Lokasi	**-**	

1	Penyediaan Prasarana (zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif kabupaten yang disediakan prasarananya	1 MOU	50.000.000	Penyediaan Prasarana (zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif kabupaten yang disediakan prasarananya	1 MOU	-	
V	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**		**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di kabupaten luwu**		**100.000.000**	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**		**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di kabupaten luwu**		**473.654.225**	
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaran Pelaksaanaan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif tingkat dasar	100 Orang	-	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaran Pelaksaanaan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif tingkat dasar	100 Orang	373.654.225	

2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pelakasaan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	100 Orang	-	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pelakasaan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	100 Orang	100.000.000	
3	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Luwu	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	100%	100.000.000	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Luwu	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	100%	-	
VI	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		Persentase Kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	90%	669.251.688	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		Persentase Kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	90%	550.000.000	
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	90%	110.598.329	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	90%	325.000.000	

2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	90%	536.753.424	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	90%	205.000.000	
3	Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	90%	21.899.935	Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	90%	20.000.000	
VI	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		Persentase Tradisional yang dikembangkan	90%	233.700.000	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		Persentase Tradisional yang dikembangkan	90%	50.000.000	

	Pembinaan Kesenian yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Kesenian yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	90%	233.700.000	Pembinaan Kesenian yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Kesenian yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	90%	50.000.000	
VII	**Program Pembinaan Sejarah**		Persentase Pembinaan Sejarah	90%	14.620.000	**Program Pembinaan Sejarah**		Persentase Pembinaan Sejarah	90%	30.000.000	
1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	90%	14.620.000	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	90%	30.000.000	
VIII	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**		Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	90%	1.800.000.000	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**		Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	90%	50.000.000	

	Pengelolaan Cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Kab. Luwu	Persentase kabupaten kota yang dilestarikan	90%	1.800.000.000	Pengelolaan Cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Kab. Luwu	Persentase kabupaten kota yang dilestarikan	90%	50.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan usulan masyarakat tingkat musrengbang di kecamatan dan usulan serta laporan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu maka terdapat usulan dan harapan yang dianggap sangat penting untuk dilaksanakan berbagai tempat yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Luwu.

Kesesuaian usulan yang dimaksud apabila dikaitkan dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan sangat erat dan saling berhubungan, Oleh karena itu maka usulans yang diajukan oleh masyarakat dan DPRD tersebut menjadi salah satu skala prioritas yang sangat sejalan dengan Rencana strategis (Renstra) pada Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan, untuk itu maka pada tahun anggaran 2025 usulan-usulan tersebut diakomodir oleh Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan untuk dilaksanakan.

Usulan program masyarakat dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diakomodir pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Luwu

Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kab.Luwu

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Output	Catatan
A	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang datang ke kabupaten	50%	
I	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten	80%	
1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten	4 Dokumen	

2	Pengembangan Daya tarik Wisata Kabupaten	Jumlah Destinasi Wisata Kabupaten yang dikembangkan	4 Destinasi	
II	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	80%	
1	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	4 Dokumen	
2	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang di kembangkan	4 Destinasi	
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten	Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana dalam Kawasan Wisata Strategis Pariwisata yang di adakan	4 Lokasi	
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	4 Kelompok	
5	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Dokumen Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	4 Dokumen	
B	Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat Hunian Akomodasi	5%	
I	Pemasaran Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten di dalam dan Luar	Cakupan Penyelenggaraan Pemasaran Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan	87%	

		Strategis Pariwisata Kabupaten		
1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri yang dilakukan	4 Dokumen	
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten	Jumlah Destinasi wisata yang difasilitasi dalam kegiatan pemasaran	4 destinasi	
		Jumlah Pameran/Event dalam rangka pemasaran Destinasi wisata yang dilaksanakan dan diikuti	4 kali	
3	Penyediaan Data dan Penyebaran Inforamasi Pariwisata Kabupaten, Baik dalam dan luar Negeri	Jumlah Media yang digunakan dalam pengelolaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten, Baik dalam dan luar Negeri yang disediakan	3 Media	
4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan luar Negeri	Jumlah Mou Kemitraan Pariwisata dalam dan luar Negeri	2 MoU	
C	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase PAD Sektor Pariwisata	5%	
I	Penyediaan Prasarana(Zona Kreatif /Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten	Jumlah zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif kabupaten yang disediakan prasarananya	1 Lokasi	

1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasrana kota kreatif	Jumlah Lokasi pengembangan prasarana kota kreatif	1 lokasi	
II	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat dasar	80%	
1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingak Dasar	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	50 Org	
2	Fasilitasi Proses, Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Kelompok Masyarakat yang difasilitasi dalam proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konsevasi ekonomi kreatif	2 kelompok	
III	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	80%	
1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Org	
2	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil dukungan Fasilitasi menghadapi Perkembangan Teknologi di dunia usaha	2 laporan	
D	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan Masyarakat yang dikembangkan	95%	
I	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarkat pelakunya	95%	

		dalam daerah kabupaten/kota		
1	Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan	2 Objek	
II	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	90%	
1	Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan	2 Objek	
III	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	90%	
1	Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang dilakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan	2 Objek	
E	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian tradisional yang dikembangkan	90%	
I	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	90%	

1	Peningkatan Pendidikan dan Pelaihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlahg Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang diberikan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan	2 Lembaga	
F	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	90%	
I	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	90%	
1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/kota yang diberdayakan	2 Kelompok	
G	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	90%	
I	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	95%	
1	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	2 Objek	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis (renstra) kementrian pariwisata merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dimana Mengacu pada Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2025 adalah "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Berdasarakan pada Tema Tersebut, maka Presiden RI merumuskan misi kedalam 8 agenda prioritas pemerintah yang disebut ASTACITA, dari agenda tersebut yang terkait dengan pariwisata adalah agenda prioritas butir ke dua yakni " Memantapkan Sistem pertahanan kemanaan negara mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru".

Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi maritime dan dengan pengembangan pariwisata serta pemasaran pariwisata maka misi kementrian pariwisata adalah :

a. Visioning rencana induk destinasi pariwisata prioritas regeneratif, koordinasi indeks pembangunan kepariwisataan indonesia, jurnal kepariwisataan dan parekraf go to dokumenter naskah rekomendasi kebijakan strategis supply demand parekraf bekelanjutan, pendampingan penyusunan peta jalan pengembangan ekonomi kreatif(ekraf) di daerah, dan penyusunan regulasi bidang parekraf.
b. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk menciptakan SDM parekraf yang profesional dan berdaya saing global.
c. Penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata, koordinasi lintas sektor, peningkata kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana.
d. Mengembangkan Produk, promosi publikasi wisata minat khusus, pelaksanaan bidding kegiatan internasional MICE (Meeting, Incentives, Conferences adn Exhibitions), promosi dan publikasi pendukungan kegiatan MICE
e. Pendukungan Pengarutamaan pengembangan tematik konten, gastrodiplomasi, dan berkelanjutan.

Visi dari presiden RI selaku pemerintah yang telah di telaah ke dalam misi kementrian pariwisata, menjadi salah satu rujukan bagi Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu dalam menjalani roda pemerintahaan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan bidang pariwisata.

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan UU NO. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, kepariwisataan didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yang bersifat multi disiplin yang mucul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta Interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Keberhasilan pembangunan kepariwisataan bergantung pada keunggulan daya Tarik wisata, kualitas sarana dan prasarana di destinasi wisata, dan kebaradaan industry pariwisata.

Berbeda dengan sector kepariwisataan, ekonomi kreatif merupakan sector baru yang di angkat oleh pemerintah untuk di Kelola hingga kementrian. Sebelumnya, sector ekonomi kreatif belum dikelola secara terkoordinasi di tingkat kementrian tetapi tersebar di 28 kementrian/ Lembaga badan serta seluruh kepala daerah baik tingkat profinsi dan kabupaten kota, hal ini sesuai dengan instruksi Presiden No. 6 tahun 2009 tentang pengembangan Ekonomi Kreatif.

Diangkatnya sector ekonomi kreatif hingga tingkat kementrian oleh Pemerintah, disebabkan oleh karena sector ekonomi kreatif memiliki nilai strategis bagi Indonesia, yaitu kontribusi ekonomi yang signifikan, penciptaan iklim bisnis yang positif, mengangkat citra identitas bangsa, menggunakan sumber daya terbarukan, mendorong terciptanya inovasi, dan memberikan dampak social yang positif.

Indonesia memiliki sejumlah permasalahan yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif. Permasalahan yang dialami sector pariwisata antara lain adalah hal infrastruktur, pengembangan destinasi, perluasan pasar wisata di dalam dan luar negeri, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Sementara permasalahan yang dialami oleh sector industry kreatif adalah iklim usaha, perluasan pasar produk kreatif, teknologi dan konten, sumberdaya baik alam maupun manusia, dan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif.

Prinsip dasar pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif nasioanal merupakan acuan dasar dalam menentukan arah, strategi, program, dan kegiatan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Prinsip dasar pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif meliputi:

1. Pro Growth, yaitu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi melalui sector- sector industry pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Pro Jobs, yaitu menciptakan dan memperluas lapangan kerja, dengan focus utama untuk menggerakan sector rill yang dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran nasional.
3. Pro Poor, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan nasional melalui peningkatan pendapatan masyarakat di sector pariwisata dan ekonomi kreatif, baik sector formal maupun non formal.
4. Pro Enviroment, yaitu mengupayakan pembangunan dengan menggunakan sumber daya terbarukan dan mengembangkan karya yang ramah lingkungan.
5. Mendukung penguatan nilai social dan budaya, yaitu mengupayakan terciptanya tradisi yang hidup di dalam masyarakat melalui pelestarian (Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) nilai social budaya.
6. Menciptakan kualitas hidup, yaitu memperkuat perbaikan ekonomi masyarakat dengan penciptaan lingkungan social budaya yang berkualitas, perbaikan Kesehatan mental, kreativitas masyarakat, rekreasi pemanfaatan waktu senggang, serta toleransi dan kepulian social secara berkelanjutan, melalui peran sector pariwisata dan ekonomi kreatif.
7. Menciptakan nilai tambah, yaitu tidak hanya meningkatkan nilai melalui peningkatan volume produk dan layanan tetapi mengutamakan penciptaan nilai yang tinggi pada produk dan layanan sector pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan kreativitas yang tidak terbatas.

Tujuan prinsip dasar pengembangan kepariwisata dan ekonomi kreatif ini merupakan satu kesatuan utuh, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian prinsip ini diartikan bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senantiasa berupaya menciptakan laju pertumbuhan ekonomi sector pariwisata dan pengurangan tingkat pengangguran, pengurangan tingkat

kemiskinan,peningkatan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, penguatan nilai social budaya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta peningkatan penciptaan nilai tambah, sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan dapat dicapai.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan jangka waktu 1 (satu) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapian hasil (outcome) program perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kab.Luwu sama dengan tujuan dan sasaran renstra Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaans Kab.Luwu hanya saja waktu yang akan dicapai oleh renja terbatas hanya untuk setahun sedangkan untuk renstra selama dua tahunan. Untuk persentase ketercapaian renja di hitung dalam persentase keberhasilan tercapainya program kegiatan dalam setahun sedangkan renstra dalam dua tahun kedepan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Luwu dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi daerah

Sedangkan **Sasaran** yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP OPD dan Pertumbuhan PDRB di sektor Pariwisata;
2. Meningkatkan Lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, dengan indikator persentase tenaga kerja yang terserap di lapangan usaha
3. Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya, dengan indikator Persentase Seni, Budaya Lokal, dan Benda/Situs Cagar Budaya yang dilestarikan
4. Meningkatkan Pelaku UKM sektor Ekonomi Kreatif, dengan Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap UKM

Tabel 5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan

Kabupaten Luwu, Tahun 2025-2026

NO	Tujuan PEMDA	Sasaran PEMDA	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Baselinie (2023)	Target	
							2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Luwu dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	B	BB	A
2	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Meningkatkan Kesempatan Kerja		meningkatkan lapangan pekerjaan di sector pariwisata	persentase tenaga kerja yang terserap dilapangan usaha	0,02%	2%	3%

	Masyarakat	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa		Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya	Persentase Seni, Budaya Lokal, dan Benda/Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	23,07%	23,50%	24%
3	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatkan Perekonomian Dareah		Meningkatkan pelaku UKM sektor ekonomi kreatif	Kontribusi Sektor ekonomi kreatif terhadap UKM	1,43%	2%	3%

3.4 Program dan Kegiatan

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kab.Luwu selama Dua tahun ke depan sejak tahun 2025 Hingga 2026 tertuang dalam Renstra Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kab.Luwu Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

I. **Belanja Operasi** yang terdiri dari :

- **Belanja Pegawai**
- **Belanja Barang dan Jasa**

II. **Belanja Modal** yang terdiri dari :

- **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**
- **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**
- **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Adapun Program dan Kegiatannya sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator Program agtau Kegiatan yaitu : Persesntase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c) Administrasi Barang/Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- Pendapatan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- Pengelolaan Data Retribusi Daerah
- Penetapan Wajib Retribusi Darah
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

e) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendapatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- Pemulangan Pegawai Pensiun
- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- Pemindahan Tugas ASN
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

f) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Alat Besar
- Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya

- Pengadaan Aset Tak Berwujud
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

i) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten

- Penetapan Daya Tarik Wista Kabupaten

- Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten
- Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten

b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

- Penatapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
- Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
- Pengembangan Kawasan strategis Pariwisata Kabupaten
- Pengadaan dan Pemeliharaan Saran dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
- Penetapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten

- Petapan Destinasi Pariwisata Kabupaten
- Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten
- Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten
- Penetapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten

3. Program Pemasaran Pariwisata

a. Pemasaran Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten di Dalam dan Luar Negeri

- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten
- Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten, Baik dalam dan Luar Negeri
- Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

4. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

a. Penyediaan Prasaran (zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten

- Pengembangan dan Revatalisasi Prasaran Kota Kreatif

5. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a. Pelaksanann Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
- Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ Siswa)
- Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
- Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif
- Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonmi Kreatif

b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
- Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia usaha
- Standarisasi Usaha dan sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif

6. **Pengembangan Kebudayaan**

a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- Pembinaan Sumber daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
- Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan

c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam daerah kabupaten/kota

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

7. Pengembangan Kesenian Tradisional

a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota

- Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Kesenian Tradisional
- Strandirisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan
- Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

8. Pembinaan Sejarah

a. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

- Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah local kabupaten/kota
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
- Peningkatan Akses Masyarakat terhadap data dan Informasi Sejarah

9. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota

- Register Cagar Budaya
- Pencegahan dan Penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
- Peningkatan Pontensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya serta pemanfaatanya
- Pendayagunaan Cagar Budaya
- Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya

b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- Register Cagar Budaya
- Pengembangan Cagar Budaya
- Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya serta Pemanfaatannya
- Pendayagunaan Cagar Budaya
- Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya

c. Penertiban izin membawa Cagar Budaya ke Luar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Register Cagar Budaya
- Pencegahan dan Penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan cagar budaya
- Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya serta Pemanfaatannya
- Pendayagunaan Cagar Budaya
- Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya

10. Pengelolaan Permuseuman

a. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

- Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara terpadu
- Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
- Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Museum
- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
- Revitalizasi Sarana dan Prasarana Museum

Bab IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja Merupakan Dokumen Rencana yang memuat Program dan Kegiatan yang di perlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, Adapun Jumlah program yang di rencanakan untuk tahun Anggaran 2025 Sebanyak 8 program 18 kegiatan 48 sub kegiatan, Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan, kebutuhan pendanaan tahun anggaran 2025 pada Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan direncanakan sebesar **Rp.7.210.980.406** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kab. Luwu pada Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Luwu

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pagu Indikatif						Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Idikatif	
					Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana				
1			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**%**	**Kab. Luwu**	**100%**	**4.526.963.781**	**DAU**		**100%**	**4.758.400.000**	**SEKRETARIAT**
	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	**Kab. Luwu**	100%	**39.501.876**			100%	45.000.000	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Dokumen	Kab. Luwu	2 dokumen	16.723.811			2 dokumen	20.000.000	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	dokumen	Kab. Luwu	1 dokumen	4.472.522			1 dokumen	5.000.000	

		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKAp-SKPD yang disusun	dokumen	Kab. Luwu	1 dokumen	4.472.522			1 dokumen	5.000.000	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	dokumen	Kab. Luwu	1 dokumen	4.472.522			1 dokumen	5.000.000	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlaj dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	dokumen	Kab. Luwu	1 dokumen	4.472.522			1 dokumen	5.000.000	
		7	Evaluasi Kinerka Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	dokumen	Kab. Luwu	4 dokumen	4.887.977			4 dokumen	5.000.000	
	2,02		Administrasi Keuangan Oerangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	%	**Kab. Luwu**	100%	**2.754.678.169**			100%	2.850.000.000	
		1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	OB	Kab. Luwu	2683 OB	2.528.500.460			2683 OB	2.600.000.000	
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jenis penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jenis	Kab. Luwu	2 Jenis	179.220.000			2 Jenis	200.000.000	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD '	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun yang disusun	laporan	Kab. Luwu	1 laporan	29.615.029			1 laporan	30.000.000	
		6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	dokumen	Kab. Luwu	3 dokumen	8.647.203			3 dokumen	10.000.000	

		7	Koordinasi dan Penyusuanan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan /semesteran yang disusun	laporan	Kab. Luwu	14 laporan	8.695.477			14 laporan	10.000.000	
	2,05		Administrasu Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Admnistrasi Kepegawaian PD	Persen	**Kab. Luwu**	100%	**36.300.000**			100%	**36.300.000**	
		2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	JumlahPakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang di adakan	Stell/Pasang	Kab. Luwu	53	36.300.000			53	36.300.000	
	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	**Kab. Luwu**	100%	**779.511.248**			100%	**810.000.000**	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	Kab. Luwu	16 jenis	7.633.600			16 jenis	10.000.000	
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	Kab. Luwu	12 unit	264.420.900			12 unit	300.000.000	
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	Jenis	Kab. Luwu	7 Jenis	17.835.600			7 Jenis	20.000.000	
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	Kab. Luwu	3 jenis	19.185.000			3 jenis	20.000.000	

		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	jenis	Kab. Luwu	3 jenis	15.600.000			3 jenis	20.000.000	
		7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis/bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	jenis	Kab. Luwu	25 jenis	26.699.970			25 jenis	20.000.000	
		8	Fasilitaisi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuam makan dan minum yang disediakan	jenis	Kab. Luwu	3 jenis	20.000.000			3 jenis	20.000.000	
		9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	OK		42 OK	408.136.178			42 OK	400.000.000	
				Jumlah perjalana dinas dalam daerah	OK	Kab. Luwu	120 OK				120 OK		
	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Peningkatan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan Peragkat Daerah dalam kondisi baik	%	**Kab. Luwu**	100%	**330.000.000**			100%	**350.000.000**	
		11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	Kab. Luwu	2 unit	330.000.000			2 unit	350.000.000	
	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa	%	**Kab. Luwu**	100%	**307.200.000**			100%	**307.100.000**	

		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	OB	Kab. Luwu	156 OB	42.000.000			156 OB	24.000.000	
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	bulan	Kab. Luwu	12 bulan	78.000.000			12 bulan	46.700.000	
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	OB	Kab. Luwu	25OB	187.200.000			25OB	236.400.000	
	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai ketentuan/kebutuhan	%	**Kab. Luwu**	100%	**279.772.488**			100%	**360.000.000**	
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	Kab. Luwu	19 unit	119.212.488			19 unit	150.000.000	
		6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	unit/set	Kab. Luwu	24 unit/set	10.560.000			24 unit/set	10.000.000	
		9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	M2	Kab. Luwu	200 M2	150.000.000			200 M2	200.000.000	
2			**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan secara terpadu**	**Destinasi**	**Kab. Luwu**	**1 Destinasi**	**1.114.862.400**			**1 Destinasi**	**3.100.000.000**	**Bidang Destinasi & Sapras**
	2,01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten	Destinasi	**Kab. Luwu**	1 Destinasi	256.862.400			1 Destinasi	**1.350.000.000**	**Bidang Sapras dan Destinasi**

		2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen Penrencanaan Daya Tarik wisata Kabupaten	Dokumen	Kab. Luwu	4 Dokumen	204.000.000			4 dokumen	1.300.000.000	
			Rippow Desa Bonglo Kec.Bastura		Dokumen	Kab. Luwu	1	102.000.000					
			Rippow Objek Wisata Desa Buntu Matabing		Dokumen	Kab. Luwu	1	102.000.000					
		4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Daya Tarik wisata Kabupaten	Laporan	Kab. Luwu	10 Laporan	52.862.400			10 Laporan	50.000.000	
	2,03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten	%	**Kab. Luwu**	100%	**858.000.000**			100%	**1.750.000.000**	**Bidang Sapras dan Destinasi**
		3	**Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupten/Kota**	**Jumlah Sarana Destinasi Pariwisata yang tersedia**	**Paket**	**Kab. Luwu**	**5 Paket**	**200.000.000**			5 Paket	700.000.000	
			Belanja Pedestrian Objek wisata Buntu Matabing		Paket	Kab. Luwu	1	200.000.000					
		4	**Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah destinasi yang dilakukan pengadaan sarana dan prasarana dan pemeliharaan destinasi pariwisata kabupaten yang**	**destinasi**	**Kab. Luwu**	**4 destinasi**	**608.000.000**			4 destinasi	1.000.000.000	

				diadakan									
			Belanja Modal Mandi Cuci Kakus (MCK)/Toilet Objek Wisata Buntu Matabing		Paket	Kab. Luwu	1	200.000.000					
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Objek Wisata		Paket	Kab. Luwu	1	350.000.000					
			Global Positioning System (GPS)		Paket	Kab. Luwu	1	8.000.000					
			Drone		Paket	Kab. Luwu	1	50.000.000					
		5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Laporan	Kab. Luwu	10 Laporan	50.000.000			10 Laporan	50.000.000	
			Pendataan Sarana dan Prasarana Objek, Rumah Makan dan Hotel		Laporan	Kab. Luwu	2	50.000.000				50.000.000	
3			**Program Pemasaran Pariwisata**	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata kabupaten	orang	**Kab. Luwu**	13,216 orang	**415.500.000**			13,216 orang	**465.000.000**	**Bidang Pemasaran**

	2,01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pemasaran daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten dalam dan luar negeri	%	**Kab. Luwu**	75%	415.500.000			75%	465.000.000	
		1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri yang dilakukan	kali	Kab. Luwu	3 kali	7.500.000			3 kali	15.000.000	
		2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi dalam kegiatan pemasaran	Kali	Kab. Luwu	1 Kali	215.000.000			1 Kali	350.000.000	
			Fashion Week		Kegiatan		1	55.000.000				100.000.000	
			Event Luar Daerah		Kegiatan		1	110.000.000				150.000.000	
			Pekan Budaya Sengerenna		Kegiatan		1	50.000.000				100.000.000	
		3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah media yang digunakan dalam pengelolaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten, baik dalam dan luar Negeri yang disediakan	Media	Kab. Luwu	1 Media	193.000.000			1 Media	100.000.000	

			Belanja Aplikasi **SIPAKATAU** (Sistem Informasi Kepariwisataan dan Kebudayaan Tanah Luwu)		Media		1	193.000.000				100.000.000	
5			**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Jumlah SDM Pariwisata yang dilatih** **Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif kabupaten luwu**	**Orang** **Orang**	**Kab. Luwu**	**150 Orang**	**473.654.225**			**150 Orang**	**610.000.000**	**Bidang Ekraf**
	2,01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	cakupan penyelenggaraan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Orang	**Kab. Luwu**	150 Orang	**373.654.225**			150 Orang	**460.000.000**	
		6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Kab. Luwu	50 Orang	150.544.800			200 Orang	200.000.000	
			Pameran UMKM Luar Daerah		Orang		20 Orang	150.544.800				200.000.000	

		9	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang		50 Orang	120.399.425				150.000.000	
			Pemilihan Duta Pariwisata Kab. Luwu		orang		50 Orang	120.399.425				150.000.000	
		1 1	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan		2	102.710.000				110.000.000	
			Pendataan Ulang Pelaku Ekonomi Kreatif		Laporan		2	102.710.000				110.000.000	
	2.0 2		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang		50 Orang	100.000.000				150.000.000	
		1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	Kab. Luwu	50 Orang	100.000.000			100 Orang	150.000.000	
			Pelatihan Andgrografi		Orang		50	100.000.000				150.000.000	

2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	%		90%	**550.000.000**			750.000.000	
		01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota**	**%**		**90%**	**325.000.000**			**400.000.000**	
		1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek		1	325.000.000			400.000.000	
			Festifal Keraton Nusantara		Kegiatan		1	225.000.000			250.000.000	
			Hari Jadi Perlawanan Rakyat Luwu (Kolaka Utara)		Kegiatan		1	100.000.000			150.000.000	
		02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/kota**	**Cakupan Penyelenggaraan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakkunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**%**		**90%**	**205.000.000**			**250.000.000**	

		1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek		2	205.000.000				250.000.000	
			Mappacekke Wanua		Kegiatan		1	50.000.000				50.000.000	
			Pekan Budaya Sengerenna Luwu		Kegiatan		1	155.000.000				200.000.000	
		03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	%		90%	20.000.000				100.000.000	
		1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek		2	20.000.000				100.000.000	
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	%		90%	**50.000.000**				100.000.000	
		01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kaupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	~~%~~		90%	50.000.000				100.000.000	

		3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga		2	50.000.000				100.000.000	
			Pelatihan dan Pembinaan Kesenian Kab.Luwu		Kegiatan		1	50.000.000				100.000.000	
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	%	**Kab. Luwu**	90%	**30.000.000**			50 Orang	**100.000.000**	
		01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%		90%	30.000.000				**100.000.000**	
		1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang		55	30.000.000				**100.000.000**	
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%		90%	**50.000.000**				**1.000.000.000**	
		02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%		98%	**50.000.000**				**1.000.000.000**	
		3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	Kab. Luwu	5 Objek	50.000.000			50 orang	1.000.000.000	
			Pengadaan Papan Nama/Reklame Situs Cagar Budaya Kab.Luwu		Objek		5 Objek	50.000.000				1.000.000.000	
Total								**7.210.980.40**					

	6				10.883.400.000	

BAB V
PENUTUP

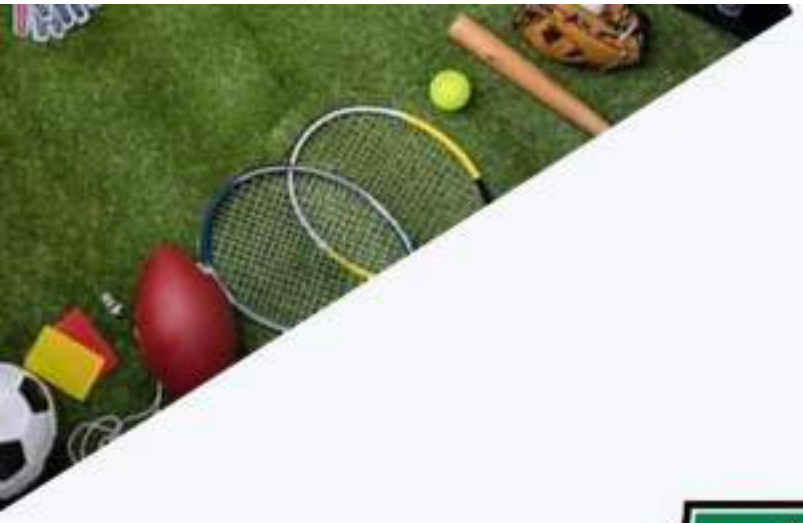
Rencana kerja Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu tahun 2025 merupakan hasil perumusan yang di sesuaikan dengan kondisi berkembang saat ini serta proyeksi satu tahun mendatang (2026). Dengan memperhatikan penerimaan dana dan program/kegiatan tahun Anggaran 2024. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga selalu dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Pencapaian hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu diharapkan dapat memberi konstribusi optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Demikan Rencana Kerja ini disajikan sebagai gambaran arah kebijakan Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu TA.2025. Di harapkan kesungguhan dari semua pihak untuk melaksanakan rencana kerja ini denga sebaik – baiknya sehingga sasaran program akan dapat dicapai.

KEPALA DINAS KEPARIWISATAAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU

MUHAMMAD AFIF HAMKA,S.IP.,M.Si
Pkt. Pembina Tingkat I
NIP. 19831017 200502 1 001



RENCANA KERJA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU

TAHUN 2025



Disusun Oleh:

SUB BAGIAN PROGRAM

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2025 dapat diselesaikan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 *(satu)* tahun ke depan.

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2025 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja ini dirumuskan dalam rangka menjamin konsistensi Perencanaan dan pemilihan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu. Dengan demikian Rencana Kerja ini diharapkan menjadi pedoman Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya, serta menjadi salah satu alat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu demi terwujudnya Pemerintahan yang Baik *(Good Governance)*.

Belopa, 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU,

KASMUDIN, S.IP.,M.Si.
Pangkat : Pembina Utama
NIP : 19711231 199202 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL			
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	3
	1.3.	Maksud dan Tujuan	7
	1.4.	Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH		9
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan IV Tahun Berkenaan	9
	2.2.	Analisis Pelayanan Perangkat Daerah	19
	2.3.	Isu-Isu Penting Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu	21
	2.4.	Tantangan dan Peluang berdasarkan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu	23
	2.5	Review terhadap Rancangan Awal SKPD	25
	2.6	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		43
	3.1.	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	43
	3.2.	Tujuan dan Sasaran	44
	3.3	Program dan Kegiatan	45
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		59
BAB V	PENUTUP		65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2023	12
Tabel 2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
Tabel 2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Luwu	27
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Luwu	38
Tabel 3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	50
Tabel 4.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Luwu Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020, maka sebagai tindak lanjut seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu harus segera menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan menjadikan RKPD tersebut sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Bahwa Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2025 terkait kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kualitas Pelayanan Publik, maka Rancangan Akhir Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju yang mendukung suksesnya pelaksanaan kewenangan tersebut.

Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025, sesuai Surat Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu Nomor : 050 /906 /BAP/ XI /2025 pada tanggal 11 November 2025 tentang Penyampaian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 diawali dengan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukkan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya melaksanakan analisis gambaran pelayanan, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPJMD dijabarkan dalam RPD sebagai dokumen perencanaan tahunan. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal RPD. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kebijakan Pemerintah Pusat/ Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Awal RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
23. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Luwu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
26. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Luwu.

27. Peraturan Bupati Luwu Nomor 134 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu.
28. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2025 disusun dengan maksud melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 1 *(satu)* tahun mengacu pada RPD Tahun 2025 – 2026.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah untuk:

a. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target pencapaian yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
b. Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan;
c. Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah dan terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa 1 (satu) tahun mendatang; dan
d. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2025 disusun melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Gambaran Umum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah agar Substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan Pengertian Ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta Tindak Lanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang Mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah serta Pedoman yang dijadikan Acuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Susunan Garis Besar Isi Dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai Triwulan IV dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisa Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan IV Tahun Berkenaan

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2023 sudah berjalan sebagian dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Sebagaimana yang direncanakan disebabkan beberapa hal yang akan dijelaskan dalam realisasi capaian keuangan dan fisik pada program dan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Penyediaan Bahan/Material
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
   - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan

Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga

d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
   - Pengembangan Organisasi Keolahragaan

e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
   - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
   - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
   - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

Secara Umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, hal tersebut terlihat pada hasil evaluasi rencana kerja. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu dilakukan melalui pengukuran kinerja program dan kegiatan pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**19**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Presentase Pemenuhan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**%**	**100**				**100**	**100**		**77,06**
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan,Penggaraan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun**	**%**	**100**				**100**	**100**		**71,50**
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang di Susun	Dokumen	20	5	2	2	100	2	9	45,00
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	100	1	4	80,00
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Dokumen*	5	2	1	1	100	1	4	80,00
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*Dokumen*	5	2	1	1	100	1	4	80,00

2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	*Dokumen*	5	2	1	1	100	1	4	80,00
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan*	25	8	4	4	100	4	16	64,00
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu***	**%**	**100**				**100**	**100**		**80,00**
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	*Bulan*	60	24	12	12	100	12	48	80,00
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pelaksanaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	*Bulan*	60	24	12	12	100	12	48	80,00
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Laporan*	25	10	5	5	100	5	20	80,00
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Laporan*	25	10	5	5	100	5	20	80,00
2	**19**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Presentase Administrasi Barang Barang Yang Di Laksanakan***	**%**	**100**				**100**	**100**		**80,00**
2	19	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD yang di Laksanakan*	*Bulan*	60	24	12	12	100	12	48	80,00
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Presentase ASN dengan Predikat Kinerja Baik***	**%**	**100**				**100**	**100**		**59,80**
2	19	01	2.06	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Paket	246	94	28	28	100	0	122	49,59
2	19	01	2.06	04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	Orang	10	3	2	2	100	2	7	70,00

2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran***	**%**	**100**				**100**	**100**		**79,43**
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	*Jenis*	32	15	8	8	100	8	31	96,88
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jenis*	20	4	2	2	100	2	8	40,00
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	*Jenis*	50	25	12	12	100	12	49	98,00
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	*Jenis*	32	12	6	6	100	6	24	75,00
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	*Jenis*	20	8	3	3	100	4	15	75,00
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jenis*	10	5	2	2	100	2	9	90,00
2	19	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang Disediakan	*Jenis*	180	72	36	36	100	36	144	80,00
2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan makan dan minum yang disediakan	*Jenis*	15	6	3	3	100	3	12	80,00
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang di Laksanakan	*Kali*	450	190	80	80	100	90	360	80,00
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	***100 %***	**100**				**100**	**100**		**84,78**
2	19	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	*Unit*	15	5	3	3	100	3	11	73,33
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*Unit*	100	45	20	20	100	20	85	85,00
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*Unit*	25	16	4	4	100	4	24	96,00
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***100 %***	**100**				**100**	**100**		**80,00**
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Bulan*	60	24	12	12	100	12	48	80,00

2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Bulan*	60	24	12	12	100	12	48	80,00
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***100 %***	**90**				**100**	**100**		**81,00**
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	*Unit*	75	30	10	10	100	20	60	80,00
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	*Unit*	75	24	12	12	100	12	48	64,00
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	*M2*	500	500	500	500	100	500	500	90,00
2	19	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Unit*	1	1	1	1	100	1	1	90,00
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan**	**90,00**	**90**				**100**	**100**		**31,46**
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader**	**Capaian Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota**	**90,00**	**90**				**100**	**100**		**42,92**
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	*Orang*	500	100	0	0	0	100	200	40,00
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	*Orang*	500	100	0	0	0	100	200	40,00

2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	*Orang*	1000	200	0	0	0	100	300	30,00
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	*Orang*	355	146	73	73	100	0	219	61,69
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Tingkat daerah Kabupaten / kota**	***%***	***90,00***				***90,00***	***90,00***		**20,00**
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	*Dokumen*	5					1	1	20,00
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Cabang Olahraga yang digemari masyarakat Kabupaten Luwu**	***%***	***90,00***				***90,00***	***90,00***		***77,00***
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten**	***%***	***90,00***				***90,00***	***90,00***		***86,67***
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	*Paket*	60	32	12	12	100	8	52	86,67
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***%***	***90,00***				***90,00***	***90,00***		***55,00***
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Dokumen*	0	0	0	0	0	0	0	0,00

2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	*Dokumen*	5	2	1	1	100	1	4	80,00
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	*Orang*	200	40	0	0	0	20	60	30,00
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Keseluruhan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi**	***%***	***90,00***				***90,00***	***90,00***		***80,00***
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	*Pelatda*	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	*Dokumen*	5	2	1	1	100	1	4	80,00
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Terlaksananya laporan pelaksanaan pengembangan organisasi keolahragaan**	***%***	***90,00***				***90,00***	***90,00***		***80,00***
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	*Dokumen*	5	2	1	1	100	1	4	80,00
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	***%***	***90,00***				***90,00***	***90,00***		***83,33***
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	*Dokumen*	5	2	1	1	100	1	4	80,00
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	*Dokumen*	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	*Paket*	60	28	14	14	100	10	52	86,67

2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	***%***	***90,00***				***90,00***	***90,00***		***70,00***
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Presentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	***%***	***90,00***				***90,00***	***90,00***		***70,00***
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	*Organisasi*	5	2	1	1	100	1	4	80,00
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	*Orang*	500	200	50	50	100	50	300	60,00
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	*Laporan*	10	5	1	1	100	1	7	70,00

2.2. Analisis Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu secara umum dapat di lihat dari permasalahan yang terdapat di Lingkungan Masyarakat kabupaten Luwu yang sangat heterogen.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu dapat di lihat dari Pencapaian Alokasi Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 2.2 di Bawah dapat kita lihat bahwa Pembinaan Kepemudaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pencapaian target berdasarkan Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berada pada rata- rata 85,00 %.

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/2016)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Jumlah Klub Olahraga/Sekolah			29	31	32	32	29	31	32	32	
2	Jumlah Gedung Olahraga			2	3	5	6	2	3	5	6	
3	Jumlah organisasi pemuda			50	55	55	57	50	55	55	57	
4	Jumlah organisasi olahraga			20	25	27	27	20	25	27	27	
5	Jumlah kegiatan kepemudaan			7	8	9	9	7	8	9	9	
6	Jumlah kegiatan olahraga			1	6	7	7	1	6	7	7	
7	Gelanggang / Balai Remaja (selain milik swasta): Keterangan : Gedung Pertemuan, Sanggar Pramuka, Kedai Pramuka, Mess Pramuka, Pondok Pemuda, Gedung KNPI,			2	2	2	3	2	2	2	3	
8	Lapangan sepak bola			23	23	26	27	23	25	26	27	
9	Lapangan bulu tangkis			15	18	20	22	15	18	20	22	
10	Lapangan volly			22	25	27	28	22	25	27	28	
11	Gedung tenis			2	5	7	7	2	5	7	7	

2.3. Isu-Isu Penting Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu

2.3.1 Kepemudaan

Pemuda adalah individu yang berada dalam rentang usia transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, yang biasanya ditandai dengan semangat, potensi besar, dan keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Secara umum, pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi tulang punggung dalam pembentukan masyarakat yang dinamis dan inovatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda didefinisikan sebagai Warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Kepemudaan merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan pemuda, baik dalam aspek sosial, budaya, pendidikan, politik, ekonomi, maupun pembangunan. Kepemudaan meliputi kegiatan, kebijakan, dan program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, kapasitas, dan kontribusi pemuda dalam berbagai sektor kehidupan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, kepemudaan didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

Adapun ciri-ciri pemuda, antara lain :

1) Dinamisme : Pemuda cenderung penuh semangat, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan bersifat inovatif.
2) Potensi Perubahan : Pemuda memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan dalam masyarakat.
3) Idealistik : Pemuda sering berorientasi pada cita-cita dan harapan masa depan yang lebih baik.
4) Periode Transisi : Masa pemuda adalah masa transisi yang penuh tantangan dari remaja menuju dewasa, baik secara fisik, emosional, maupun sosial.

Adapun peran pemuda dalam pembangunan, yakni :

1) Agen Perubahan : Pemuda menjadi penggerak utama dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya.
2) Penggerak Inovasi : Pemuda sering kali berada di garis depan

dalam pengembangan teknologi dan inovasi.

3) Penjaga Nilai-Nilai Bangsa : Pemuda berperan penting dalam melestarikan identitas dan budaya nasional.
4) Kekuatan Ekonomi : Pemuda menjadi pelopor dalam kewirausahaan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam RKPD Kabupaten Luwu, pengembangan kepemudaan menjadi prioritas utama yang sejalan dengan visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu fokus strategis dalam RKPD adalah menciptakan ekosistem yang mendukung partisipasi pemuda dalam pembangunan, termasuk melalui penyediaan pelatihan kewirausahaan, pengembangan soft skills, serta peningkatan literasi digital. Rencana ini mencerminkan upaya sinergis untuk menjawab tantangan utama di bidang kepemudaan, seperti rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan dan minimnya fasilitas yang mendukung aktivitas kreatif pemuda.

Adapun isu strategis dibidang pemuda yang memerlukan perhatian antara lain sebagai berikut :

1) Minimnya sosialisasi dan promosi program-program kepemudaan seperti pelatihan kewirausahaan, pengembangan soft skills, dan literasi digital;
2) Kurangnya aksesibilitas pemuda terhadap program kepemudaan terutama di daerah terpencil;
3) Minimnya Infrastruktur untuk Pengembangan Pemuda, Tidak adanya pusat kegiatan pemuda yang memadai untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan pengembangan diri;
4) Kurangnya Dukungan Terhadap Kewirausahaan Pemuda;
5) Minimnya Data Profil Pemuda. Tidak adanya basis data yang memadai tentang potensi, minat, dan kebutuhan pemuda untuk merancang kebijakan berbasis bukti.

2.3.2 Olahraga

Adapun isu strategis dibidang olahraga yang memerlukan perhatian antara lain sebagai berikut :

1) Minimnya Sarana dan Prasarana Olahraga. Banyak fasilitas olahraga yang rusak, tidak layak, atau terbatas, sehingga

menghambat pelatihan atlet dan partisipasi masyarakat.

2) Kurangnya Pembinaan Atlet Berkelanjutan. Pembinaan atlet sering kali bersifat sementara dan terfokus hanya pada persiapan kompetisi, tanpa adanya program pembinaan jangka panjang.
3) Keterbatasan Anggaran dan Pendanaan. Alokasi dana untuk pengembangan olahraga tidak memadai, baik untuk pembinaan atlet, penyelenggaraan event, maupun pengelolaan fasilitas olahraga.
4) Kurangnya Pelatihan bagi Pelatih dan Official. Banyak pelatih dan official yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendukung atlet dan mengelola event olahraga.
5) Minimnya Kompetisi Lokal. Kurangnya turnamen atau kompetisi tingkat lokal yang rutin untuk mengasah kemampuan atlet dan menjaring bakat baru.

2.4. Tantangan dan Peluang berdasarkan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu

2.4.1 Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu, antara lain :

1) Minimnya Sarana dan Prasarana. Banyak fasilitas olahraga dan pusat kegiatan pemuda yang belum memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga menghambat pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan.
2) Terbatasnya Anggaran dan Pendanaan. Alokasi dana untuk program kepemudaan dan olahraga masih belum mencukupi untuk merealisasikan rencana pembangunan yang berkelanjutan.
3) Kurangnya Partisipasi Pemuda dan Masyarakat. Tingkat keterlibatan pemuda dalam program kepemudaan dan masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah akibat kurangnya sosialisasi dan aksesibilitas.
4) Ketimpangan Wilayah. Terdapat ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses terhadap fasilitas dan program kepemudaan serta olahraga.

5) Kurangnya Pembinaan Berkelanjutan. Program pembinaan atlet maupun pengembangan kepemudaan sering kali tidak berkesinambungan, sehingga sulit menciptakan hasil yang optimal.
6) Tantangan Globalisasi. Pemuda menghadapi tantangan global, seperti digitalisasi dan persaingan internasional, yang memerlukan program pengembangan soft skills dan literasi digital yang lebih baik.
7) Rendahnya Kualitas SDM Pengelola. Pelatih, pembina, dan tenaga pengelola program kepemudaan dan olahraga sering kali belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas mereka.

2.4.2 Peluang

Dari uraian tantangan diatas maka peluang Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1) Dukungan Kebijakan Nasional. Adanya kebijakan nasional yang mendukung pengembangan kepemudaan dan olahraga, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, menjadi landasan untuk perencanaan strategis di tingkat daerah.
2) Potensi Pemuda yang Besar. Kabupaten Luwu memiliki jumlah pemuda yang signifikan, yang dapat dimanfaatkan sebagai agen perubahan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya.
3) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Olahraga. Tren gaya hidup sehat di masyarakat membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi dalam program olahraga, baik rekreasi maupun prestasi.
4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Peluang menjalin kerja sama dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat untuk mendukung pembiayaan dan pelaksanaan program.
5) Potensi Wisata Olahraga. Kabupaten Luwu memiliki potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata olahraga *(sports tourism)*, seperti lomba lari alam, sepeda gunung, atau olahraga air.
6) Dukungan Teknologi Digital. Pemanfaatan teknologi digital dapat

meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program, termasuk promosi kegiatan, pendaftaran program, dan pelatihan daring.

7) Event dan Kompetisi Regional. Adanya event olahraga tingkat regional dan nasional memberikan peluang bagi Kabupaten Luwu untuk menjadi tuan rumah sekaligus mempromosikan potensi daerah.

Sebagai penutup, meskipun Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kesenjangan wilayah, peluang yang tersedia memberikan optimisme besar untuk mengatasi hambatan tersebut. Dukungan kebijakan nasional, potensi pemuda yang melimpah, serta tren gaya hidup sehat masyarakat dapat menjadi modal utama dalam mengembangkan program-program yang inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, potensi wisata olahraga dan pemanfaatan teknologi digital membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan dampak yang lebih luas. Dengan komitmen yang kuat, perencanaan yang matang, dan sinergi lintas sektor, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu berpeluang besar untuk mewujudkan visi pembangunan kepemudaan dan olahraga yang inklusif, progresif, dan berdaya saing.

2.5. Review terhadap Rancangan Awal SKPD

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penting untuk melakukan review terhadap Rancangan Awal SKPD. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara rencana yang telah disusun dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan melakukan review, diharapkan dapat teridentifikasi potensi perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Review terhadap Rancangan Awal SKPD juga memberikan kesempatan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses perencanaan. Melalui partisipasi aktif, masukan dari masyarakat dapat diakomodasi, sehingga rencana yang dihasilkan lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu,

keterlibatan masyarakat dalam proses ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, hasil dari review ini akan menjadi dasar untuk penyempurnaan Rancangan Awal SKPD sebelum ditetapkan menjadi dokumen final. Dengan demikian, diharapkan SKPD dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mampu beradaptasi dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi. Proses ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas perencanaan, tetapi juga akan memperkuat komitmen SKPD dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di daerah.

Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kabupaten Luwu tahun 2024 beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2025, program indikatif di tahun 2024, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPD Kabupaten Luwu tahun 2025-2026 maka ditetapkan dalam Dokumen Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Renstra SKPD, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu mengajukan 4 program yang terdiri dari 16 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan.

Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2025 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN LUWU

SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**7.027.305.480**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**9.572.423.163**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**	**4.076.405.480**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**	**5.422.323.163**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun***	**100 %**	**85.257.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		***Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun***	**100 %**	**53.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	24.988.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	13.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	8.837.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	5.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	8.837.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	5.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belopa	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	8.837.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belopa	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	5.500.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Belopa	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	8.837.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Belopa	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	5.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belopa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan*	1 Laporan	8.837.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belopa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan*	1 Laporan	5.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	16.084.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	12.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu***	**100 %**	**3.115.002.909**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		***Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu***	**100 %**	**3.781.525.663**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	32 Orang/bulan	2.929.305.480	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	32 Orang/bulan	3.600.525.663	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belopa	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	169.315.929	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belopa	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	170.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belopa	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	8.339.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belopa	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	5.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belopa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	1 Laporan	8.042.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Belopa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	1 Laporan	5.500.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		***Presentase Administrasi Barang Barang Yang Di Laksanakan***	**100 %**	**36.420.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		***Presentase Administrasi Barang Barang Yang Di Laksanakan***	**100 %**	**35.000.000**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belopa	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	12 Laporan	36.420.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belopa	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	12 Laporan	35.000.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		***Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**100 %**	**25.050.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		***Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**100 %**	**25.000.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Belopa	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	50 Paket	25.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Belopa	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	50 Paket	25.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belopa	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan*	2 Orang	50.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belopa	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan*	2 Orang	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran***	**100 %**	**419.908.229**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		***Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran***	**100 %**	**394.900.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belopa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang*	6 Paket	5.228.250	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belopa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang*	6 Paket	2.500.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belopa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	12 Paket	5.925.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belopa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	12 Paket	3.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belopa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	7 Paket	10.459.550	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belopa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	7 Paket	8.500.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belopa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	6 Paket	9.634.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belopa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	6 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belopa	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang*	90 Dokumen	20.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belopa	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang*	90 Dokumen	8.400.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Belopa	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	35 Paket	20.585.406	Penyediaan Bahan/Material	Belopa	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	35 Paket	7.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belopa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	43.391.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belopa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belopa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*	100 Laporan	304.584.523	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belopa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*	100 Laporan	350.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah***	**90 %**	**30.150.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		***Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah***	**90 %**	**790.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	2 Unit	50.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	2 Unit	730.000.000	
	Pengadaan Mebel	Belopa	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	20 Unit	50.000	Pengadaan Mebel	Belopa	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	20 Unit	10.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	50.000.000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belopa	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	50.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belopa	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**	**270.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**	**342.897.500**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belopa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	48.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belopa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	222.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	207.600.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	15 Unit	81.412.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	15 Unit	65.347.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	20 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	20 Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belopa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	3.155.092	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belopa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	19.950.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belopa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	50.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belopa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	-	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		***Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan***	**100 % 90 %**	**150.300.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		***Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan***	**100 % 90 %**	**300.000.000**	

	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		***Capaian Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota,Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota***	**100 %**	**150.200.000**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		***Capaian Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota,Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota***	**100 %**	**300.000.000**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*	100 Orang	50.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*	100 Orang	150.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda*	1 Kegiatan	50.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda*	1 Kegiatan	-	
	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi*	100 Orang	50.000	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi*	100 Orang	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda*	30 Orang	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda*	30 Orang	150.000.000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	2 Unit	50.000	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	2 Unit	-	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		***Capaian Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**100 %**	**100.000**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		***Capaian Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**100 %**	**-**	
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	1 Organisasi	50.000	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	1 Organisasi	-	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Belopa	*Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota*	0 Orang	50.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Belopa	*Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota*	0 Orang	-	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		***Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional) Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan***	**85,76 % 90 %**	**2.500.500.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		***Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional) Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan***	**85,76 % 90 %**	**3.550.100.000**	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		***Capaian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenngan daerah kabupaten***	**90 %**	**100.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		***Capaian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenngan daerah kabupaten***	**90 %**	**1.000.000.000**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	-	*0*	1 0	25.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	-	*0*	1 0	-	
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	10 Unit	50.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	10 Unit	1.000.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Belopa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar*	1 Dokumen	25.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Belopa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar*	1 Dokumen	-	

	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		***Capaian Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**90 %**	**925.050.000**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		***Capaian Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**90 %**	**925.000.000**	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Belopa	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*	4 Kegiatan	750.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Belopa	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*	4 Kegiatan	750.000.000	
	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	-	*0*	1 0	50.000	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	-	*0*	1 0	-	
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*	55 Orang	175.000.000	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*	55 Orang	175.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		***Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi***	**90 %**	**250.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		***Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi***	**90 %**	**50.000.000**	
	Seleksi Atlet Daerah	Belopa	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi*	100 Orang	50.000	Seleksi Atlet Daerah	Belopa	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi*	100 Orang	-	
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Belopa	*Jumlah penerima Penghargaan olahraga*	30 Orang	50.000	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Belopa	*Jumlah penerima Penghargaan olahraga*	30 Orang	-	
	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Belopa	*Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)*	1 Pelatda	50.000	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Belopa	*Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)*	1 Pelatda	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan*	100 Orang	50.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan*	100 Orang	-	
	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota*	2 Dokumen	50.000	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Belopa	*Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota*	2 Dokumen	50.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		***Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga***	**90 %**	**1.050.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		***Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga***	**90 %**	**1.050.000.000**	
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Belopa	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	1.050.000.000	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Belopa	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	1.050.000.000	

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		***Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi***	**90 %**	**525.100.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		***Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi***	**90 %**	**525.100.000**	
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Belopa	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi*	1 Laporan	50.000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Belopa	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi*	1 Laporan	-	
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Belopa	*Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan*	1 Laporan	150.000.000	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Belopa	*Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan*	1 Laporan	80.000.000	
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat*	1 Dokumen	100.000.000	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat*	1 Dokumen	50.000.000	
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Belopa	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan*	1 Unit	50.000	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Belopa	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan*	1 Unit	-	
	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*	2 Lembaga	275.000.000	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*	2 Lembaga	175.000.000	
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		***Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan yang dilaksanakan***	**90,21 %**	**300.100.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		***Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan yang dilaksanakan***	**90,21 %**	**300.000.000**	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		***Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan***	**100 %**	**300.100.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		***Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan***	**100 %**	**300.000.000**	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Belopa	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	1 Organisasi	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Belopa	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	1 Organisasi	100.000.000	
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Belopa	*Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	100 Orang	100.000.000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Belopa	*Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	100 Orang	100.000.000	
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Belopa	*Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah*	1 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Belopa	*Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah*	1 Laporan	100.000.000	

	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Belopa	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan*	1 Unit	50.000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Belopa	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan*	1 Unit	-	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Belopa	*Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan*	1 Organisasi	50.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Belopa	*Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan*	1 Organisasi	-	

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelayanan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

Rencana Kerja Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan rencana kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 KABUPATEN LUWU

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Dusun Redo Desa Komba Selatan, Kab. Luwu, Larompong, Komba Selatan	Terbangunnya sarana dan prasarana olah raga		
2	Pembangunan Tribun	Dusun Redo Desa Komba Selatan, Kab. Luwu, Larompong, Komba Selatan	Terbangunnya Prasarana Olahraga		
3	Pembangunan Tribun	Dusun Mandaiso, Kab. Luwu, Larompong Riwang	Tersedianya sarana dan prasarana olah raga		
4	Pembangunan Tribun	Dusun Keppe, Kab. Luwu, Larompong, Rantebelu	Penyerpunaan bangunan tribun lapangan Keppe		
5	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	JL.G. Latimojong. Kab. Luwu. Bajo, Balla	Tergenangnya Air pada Lapangan sepak bola yang di sebabkan oleh air hujan dan tidak tersedianya trotoar di sekeliling Lapangan		
6	Pembangunan Tribun	Dusun To'Kalosi, Kab. Luwu, Lamasi, Salujambu	belum ada tribun di lapangan sepak bola desa salujambu		
7	Rehabilitas Lapangan Sepak Bola	Lingkungan Rape- Rape, Kab. Luwu, Larompong, Larompong	Tersedianya sarana dan prasarana olah raga		
8	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Dusun Buntu Raja, Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Kanna	Belam Adanya Fasilitas Olahraga Di Desa		
9	Pembangunan Lapangan Futsal	Dusun Karetan, Kab. Luwu, Walenrang, Barammamase	Lapangan futsal yg terbangun belum ada dinding pengamannya/rang pengaman		
10	Pembangunan Lapangan Volley	SMPN 5 WALENRANG, Kab. Luwu. Walenrang, Tombang	Tidak memiliki lapangan volly		
11	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Dusun tombang, Kab. Luwu, Walenrang, Tombang	Lapangan tidak rata		
12	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	lapangan tumba'' pammase di dusun tallang bulawang, Kab. Luwu, Bajo, Tallang Bulawang	lapangan sepak bolanya sudah rusak		
13	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Lingkungan Danta Rw 01, Kab. Luwu, Lamasi, Lamasi	Sering Tergenang air		
14	Pembangunan Tribun	Desa Malenggang, Kab. Luwu. Bua Ponrang, Malenggang	Kurang nya peningkatan Olah raga Masyarakat		
15	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Desa Malenggang, Kab. Luwu, Bua Ponrang, Malenggang	Peningkatan Mutu Lapangan sepak bola		
16	Pembangunan Tribun	Tribun Lapangan Sepak Bola Tandi Angga, Kab. Luwu, Larompong Selatan, Sampano	Peningkatan Dan Pengembangan Olah Raga		
17	Pembangunan Tribun	Desa Babang (905), Kab. Luwu, Larompong Selatan, Babang	sebagai sarana dan prasarana olahraga		
18	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Dusun Temboe, Kab. Luwu, Larompong Selatan, Temboe	untuk Penataan Pavin Block Seputaran lapangan sepak bola		
19	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	dusun tallang bulawang, Kab. Luwu, Bajo, Tallang Bulawang	lapangan sudah rusak dan tidak layak pakai		
20	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	desa walenrang. Kab. Luwu, Walenrang, Walenrang	untuk menumbuh kembangkan generasi muda yang berbakat dalam pesepakbolaan di lingkungan		

21	Pembangunan Lapangan Futsal	Lingk. Pabuntang, Kab. Luwu, Walenrang, Bulo	Meningkatkan Minat Generasi Muda Sadar Olah Raga		
22	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Lapangan Sepak Bola Tandi Angga, Kab. Luwu. Larompong Selatan, Sampano	Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Olah Raga guna menbangun Pemuda yang sehat dan Berkarakter.		
23	Pembangunan Lapangan Volley	Desa Padang Tuju, Kab. Luwu, Bua Ponrang, Padang Tuju	Belum adanya sarana dan prasarana olahraga desa		
24	Pembangunan Lapangan Volley	Dusun Beuma, Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	Kurangnya sarana dan prasaran olahraga untuk siswa SMP N 2 Batem		
25	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Dusun Beuma, Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	Media Masyarkat untuk menyalurkan Bakat		
26	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Dusun Mamasa, Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Ledan	Belum Adanya Fasilitas Olahraga Di Desa		
27	Pembangunan Lapangan Volley	Dusun Mamasa, Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Ledan	Belum Adanya Fasilitas Olahraga di Desa		
28	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Desa Bolu 1 rkp, Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Bolu	Tersedianya Lapangan untuk berolah raga		
29	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Dusun Malenggang, Kab. Luwu. Bua Ponrang, Padang Tuju	Kondisi Lapangan Sepakbola desa yang tidak layak, tanahnya tidak rata dan banyak rumput jenis kayu kayuan yang tumbuh.		
30	Pembangunan Lapangan Volley	Dusun Kaneka, Kab. Luwu, Basse Sangtempe, To'long	Tidak Adanya Sarana Olahraga Di desa To long		
31	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Dusun Kaneka, Kab. Luwu, Basse Sangtempe, To'long	Tidak Adanya Sarana dan Prasarana Olahraga		
32	Pembangunan Lapangan Volley	Dusun padang kanan lapangan desa malenggang, Kab. Luwu, Bua Ponrang, Malenggang	Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan		
33	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Dusun Buntu, Kab. Luwu, Suli Barat, Buntu Barana	Lapangan Tidak Merata		
34	Pembangunan Lapangan Volley	Dusun Kasiwiang, dusun tiwo dan dusun tetentanah, Kab. Luwu, Suli, Kasiwiang	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga dan untuk menjadikan karang taruna dan masyarakat desa kasiwiang sehat jasmani		
35	Pembangunan Tribun	jl. andi maradang dusun massigie, Kab. Luwu, Bua, Barowa	belum adanya tribun lapangan sepakbola		
36	Pengadaan Pagar Pembatas Lapangan Bola Voli Kecamatan Bua	Lapangan Bola Voli, Bua	Pengamanan lalu lintas kendaraan		
37	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Dusun Lempopacci, Kab. Luwu, Suli, Lempopacci	Peningkatan sarana dan prasarana jalanan		
38	Pembangunan Tribun	Lapangan Sulolipu Lamasi Pantai, Kab. Luwu, Walenrang Timur, Lamasi Pantai	Untuk meningkatkan pasiltas penunjang lapangan Sepak bola perlu dibuatkan Tribun sebagai pasiltas untuk kegitan kegitan yang berkaitan dengan pelaksan pertandingan sepak bola dan hal-hal lain		
39	Pembangunan Lapangan Volley	Jalan Tani Dusun Batu Putih, Kab. Luwu, Larompong Selatan, Batulappa	Memberikan Fasilitas bagi Karang Taruna dan Masyarakat dalam Meningkatkan Skill di Bidang Olahraga		
40	Pembangunan Lapangan Futsal	Dusun Jembatan karung, Kab. Luwu, Kamanre, Salu Paremang	agar pemuda dapat menyalurkan bakat mereka melalui olahraga futsal		
41	Pembangunan Lapangan Bola Voli Kecamatan Kamanre	Kab. Luwu, Kamanre	agar pemuda dapat menyalurkan bakat mereka melalui olahraga bola voley		
42	Pembangunan 2 Unit Lapangan Sepak Takraw Kecamatan Kamanre	Kab. Luwu, Kamanre, Salu Paremang	Belum adanya lapangan takraw		

43	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Lapangan A. Mangngile Suli Lingk. Suli Kota Kel. Suli, Kab. Luwu, Suli, Suli	Peningkatan sarana dan prasarana lapangan		
44	Pembangunan Tribun	Dusun Salubanga, Kab. Luwu, Suli Barat, Muhajirin	Perlunya Tribun Untuk Kegiatan Kegiatan Olahraga		
45	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	dusun Padang, Kab. Luwu, Bua, Puty	kondisi tanah yang tidak rata serta terjadinya genangan air		
46	Pembangunan Tribun	Dusun Liku Dengeng, Kab. Luwu, Ponrang, Mario	untuk memperindah sarana dan prasarana olahraga		
47	Pembangunan Tribun	Desa Tumale, Kab. Luwu, Ponrang, Tumale	Belum Tersediahnya pasilitas tribun yang memadai		
48	Rehabilitasi Lapangan Futsal	Lapangan Futsal Dusun Pasang Bua, Desa Tanarigella Kec.Bua Kab Luwu, Kab. Luwu, Bua, Tana Rigella	Kurangnya Minat Olah Raga Pemuda Di Akibatkan Lapangan Olah Raga Rusak		
49	Pembangunan Lapangan Futsal	DEsa Tumale, Kab. Luwu, Ponrang, Tumale	Belum tersediahnya lapangan Futsal		
50	Pembangunan Lapangan Volley	DEsa Tumale, Kab. Luwu, Ponrang, Tumale	Belum tersediahnya lapangan volly		
51	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Dusun Salu Nase, Kab. Luwu, Ponrang, Buntu Nanna	Lapangan Sepak Bola Sangat Tidak Memadai		
52	Pembangunan Lapangan Volley	Desa Tumale, Kab. Luwu, Ponrang, Tumale	Belum tersediahnya lapangan Volley		
53	Pembangunan Tribun	Lapangan sepak bola Dusun Tunas Baru, Kab. Luwu, Walenrang Timur, Kendekan	Kurangnya kenyamanan saat melaksanakan turnamen olahraga		
54	Pembangunan Tribun	Desa Pajang, Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	belum ada tribun		
55	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Dusun Parajangan Desa Pajang, Kab. Luwu, Latimojong. Pajang	lapangan masi berlumpur dan belum rata		
56	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Desa Lare-lare, Kab. Luwu, Bua, Lare-Lare	Tidak adanya Lapangan olahraga		
57	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	dusun Timarra, Kab. Luwu, Ponrang, Buntu Kamiri	agar lapangan sepakbola bisa di gunakan		
58	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	dusun pollo salu, Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Jenne Maeja	pembangunan lapangan sepakbola sangat di idamkan generasi muda untuk menyalurkan bakat mereka		
59	Pembangunan Gedung Olahraga Tenis Meja dan Sarana Pendukung	Desa To'balo Kecamatan Ponrang Selatan	Tidak adanya Lapangan olahraga		
60	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Limbong Kab. Luwu, Walenrang Utara, Limbong	mudah tergenag air		
61	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Dusun Ponrang 2. Kab. Luwu, Ponrang, Tirowali	Lokasi Tergenang oleh air/ tanah tidak rata		
62	Pembangunan Tribun	DUsun Salubua, Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Salubua	Lapangan Belum Mempuyai Tribun		
63	Pembangunan Lapangan Volley	Lingk. Pabuntang, Kab. Luwu, Walenrang, Bulo	Olah Raga yang Sangat Diminati Oleh Masyarakat dan Lokasi Sangat Memungkinkan.		
64	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Dusun Kadong-kadong, Kab. Luwu, Bajo Barat, Kadong- Kadong	Lapangan belum maksimal		
65	Pembangunan Tribun	Lapangan Desa Kadong-kadong, Kab. Luwu, Bajo Barat, Kadong-Kadong	Belum ada Tribun		

66	Pembangunan Tribun	Desa Buntu Batu, Kab. Luwu, Bua Ponrang, Buntu Batu	Tidak tersedianya tribun saat melaksakan kegiatan even di lapangan sepak bola		
67	Pembangunan Tribun	Lapangan sepak bola dusun Tunas Baru, Kab. Luwu. Walenrang Timur, Kendekan	Kurangnya kenyamanaan saat melakukan turnamen		
68	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Dusun Bolong, Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Kondisi Lapangan Sepakbola Desa Ilanbatu saat ini tidak layak digunakan		
69	Pembangunan Tribun	Dusun Bolong Kab. Luwu, Walenrang	Belum ada tribun untuk tempat pelaksanaan kegiatan pemerintahan		
70		Barat, Ilan Batu			
71	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Desa Samulang, Kab. Luwu, Bajo, Samulang	Masih Bergelombang		
72	Pembangunan Tribun	Dusun Benteng Datu, Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Belum Ada Gedung yang Tersedia		
73	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Desa Dampan, Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Dampan	Untuk kebutuhan masyarakat		
74	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Dusun Tallang, Kab. Luwu, Bajo Barat, Sampeang	Meningkatkan Kualitas Lapangan Sepak Bola		
75	Pembangunan Lapangan Futsal	Dusun Gandang Batu, Kab. Luwu, Larompong Selatan, Gandang Batu	untuk menunjang sarana dan prasarana olahraga		
76	Pembangunan Lapangan Volley	Dusun Tabaro-baro, Kab. Luwu, Larompong Selatan, Gandang Batu	Untuk menunjang Sarana dan Prasarana Olahraga		
77	Pembangunan Tribun	Dsn Ujung, Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Lampuara	Lapangan Sepakbola Dsn Ujung belum mempunyai Tribun		
78	Pembangunan Lapangan Futsal	Dusun Takkalala, Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong Selatan	kurangnya fasilitas olahraga di Desa		
79	Pembangunan Lapangan Volley	Dusun Takkalala, Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong Selatan	Kurangnya Fasilitas Olahraga di Desa		
80	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Desa To'bia, Kab. Luwu, Ponrang Selatan, To'bia	Belum ada lapangan Sepakbola sehingga anak remaja banyak sulit dalam mengembangkan bakatnya		
81	Rehabilitasi Lapangan Volley	Dusun To'bia, Kab. Luwu, Ponrang Selatan, To'bia	lantai lapangan volley sudah hancur sehingga banyak yang luka ketika terjatuh		
82	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	dusun wailempa, Kab. Luwu, Walenrang Timur, Seba-Seba	kondisi lapangan masih rendah dan permukaannya juga tidak rata		
83	Pembangunan Tribun	dusun wailempa, Kab. Luwu, Walenrang Timur, Seba-Seba	lapangan yang ada belum memili tribun		
84	Pembangunan Lapangan Volley	Dusun Kombong, Kab. Luwu, Belopa, Kurrusumanga	Belum Ada		
85	Pembangunan Lapangan Futsal	Dusun Kombong, Kab. Luwu, Belopa, Kurrusumanga	Belum Ada		
86	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Lingkungan Sapaan, Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Untuk Ditempati Muda-Mudi Mengembangkan Bakatnya Berolahraga		
87	Pembangunan Tribun	Lalong, Kab. Luwu, Walenrang, Lalong	Kurangnya tribun di lapangan desaa		
88	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Lalong, Kab. Luwu, Walenrang, Lalong	Tidak terawatnya lapangan desa		
89	Pembangunan Lapangan Futsal	Dusun Tabang, Kab. Luwu, Latimojong, Tabang	Menunjang Potensi Olahraga Dan Seni Putra Desa		
90	Pembangunan Lapangan Volley	Dusun Tabang, Kab. Luwu, Latimojong, Tabang	Menunjang Potensi Olahraga Dan Seni Putra Desa		
91	Pembangunan Lapangan Volley	Desa Paccerakang, Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Paccerakkang	Kurangnya Fasilitas Olahraga		
92	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Desa Paccerakang. Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Paccerakkang	fasilitas olahraga yang tidak memada		

93	Pembangunan Tribun	Desa Paccerakang, Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Paccerakkang	belum tersedia tribun lapangan		
94	Pembangunan Tribun	Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu, Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Olang	Dikarenakan Tribun lapangan sangatlah penting ketika melakukan suatu kegiatan Olahraga		
95	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	lapangan sepak bola Salumakarra, Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	lapangan tidak rata		
96	Pembangunan Tribun	Lapangan Sepak bola Dusun Padang, Kab. Luwu, Bajo Barat, Tettekang	Sarana dan prasaran olahraga masih kurang		
97	Pembangunan Lapangan Futsal	Dusun Salusana Desa Salusana Kecamatan Larompng Selatan Kabupaten Luwu, Kab. Luwu, Larompong Selatan, Salusana	Untuk Sarana Dan Prasarana Olahraga		
98	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Lingkungan Saparu Utara, Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong	tidak layak pakai		
99	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Lingkungan Saparu Utara, Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong	tidak ada kegiatan olahraga bagi pemuda		
100	Rehabilitasi Lapangan Futsal	Dusun cimpu, Kab. Luwu, Suli, Cimpu Utara	Membuat tubuh menjadi lebih Sehat,menguatkan tubuh, serta membantu meningkatkan kekebalan tubuh		
101	Pembangunan Lapangan Volley	Dusun cimpu, Kab. Luwu, Suli, Cimpu Utara	Membuat tubuh menjadi lebih Sehat,menguatkan tubuh, serta membantu meningkatkan kekebalan tubuh		
102	Pembangunan Lapangan Volley	Kab. Luwu, Suli, Cimpu	Membuat tubuh menjadi lebih Sehat,menguatkan tubuh, serta membantu meningkatkan kekebalan tubuh		
103	Pembangunan Lapangan Futsal	DUSUN CIMPU, Kab. Luwu, Suli, Cimpu Utara	Membuat tubuh menjadi lebih Sehat,menguatkan tubuh, serta membantu meningkatkan kekebalan tubuh		
104	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Dusun Marangka, Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo Barat	Lapangan rusak dan bergelombang		
105	Rehabilitasi Lapangan Volley	Tibussan, Kab. Luwu, Latimojong, Tibussan	untuk melancarkan aktivitas pemuda		
106	Pembangunan Lapangan Volley	dusun kumila, Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Sinaji	Belam Adanya Fasilitas Olahraga Di Desa		
107	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	dusun kumila, Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Sinaji	Belam Adanya Fasilitas Olahraga Di Desa		
108	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Dusun Bide, Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo Utara	Rusak Ringan		
109	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	dsn poringan Desa poringan, Kab. Luwu, Suli Barat, Poringan	kuranyanya pelebaran labangan bola		
110	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Dusun kalambe, Desa Maindo, Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Maindo	Tersedianya sarana tempat olahraga bagi masyarakat yang memadai.		
111	Pembangunan Tribun	desa pompengan tengah, Kab. Luwu, Lamasi Timur, Pompengan Tengah	Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Olahraga		
112	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Desa Pantilang, Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Meningkatkan Kegiatan Olahraga		
113	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Dusun Bailing, Kab. Luwu, Bajo Barat, Saronda	Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Olahraga		

114	Pembangunan Tribun	Dusun Bailing, Kab. Luwu, Bajo Barat, Saronda	Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Olahraga		
115	Pembangunan Lapangan Volley	Lapangan Desa Dusun Bailing, Kab. Luwu,	Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana		
116		Bajo Barat, Saronda	Olahraga		
117	Pembangunan Lapangan Futsal	Lapangan Desa Dusun Bailing, Kab. Luwu, Bajo Barat, Saronda	Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Olahraga		
118	Pembangunan Lapangan Volley	SMP NEGERI 3 Bajo Dusun Langkidi, Kab. Luwu, Bajo, Pangi	Untuk Meningkatkan Sarana Olahraga		
119	Rehabilitasi Lapangan Volley	Desa Pangi, Kab. Luwu, Bajo, Pangi	Untuk Meningkatkan Sarana Olahraga		
120	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Desa Pangi, Kab. Luwu, Bajo, Pangi	Untuk Meningkatkan Sarana Lapangan Sepak Bola		
121	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Lapangan Opu Daeng Mamenteng, Kab. Luwu, Larompong, Binturu	Meningkatkan prestasi olah raga		
122	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Dusun Fajar, Kab. Luwu, Walenrang Timur, Tanete	Lapangan Sepak Bola Tidak Layak Pakai		
123	Pembangunan Tribun	Desa Tanjong 1 unit, Kab. Luwu, Bua Ponrang, Tanjong	Lapangan di desa tanjong sering di fungsikan dalam kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya namun belum ada tribun		
124	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Desa Tanjong, Kab. Luwu, Bua Ponrang, Tanjong	Kondisi Lapangan kurang bagus untuk digunakan kegiatan olahraga,masih dibutuhkan penimbunan.		
125	Pembangunan lapangan Tenis	Desa Barana, Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Barana	Belum Ada Lapangan Tenis		
126	Pembangunan Lapangan Volley	Desa Barana, Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Barana	Belum Ada Lapangan Volley		
127	Pembangunan lapangan Tenis	desa maindo, Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Maindo	Kurangnya Sarana Olahraga		
128	Pembangunan Lapangan Futsal	Desa Pangalli, Kab. Luwu, Walenrang Timur, Pangalli	Untuk mendukung Bakat dan minat pemuda Desa Pangalli		
129	Rehabilitasi Lapangan Volley	Dusun Taman, Kab. Luwu, Walenrang Timur, Rantal Damai	Butuh Lapangan Volley yang layak untuk pemuda dan perempuan		
130	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Dusun Taman Desa Rantai Damai, Kab. Luwu, Walenrang Timur, Rantai Damai	Lapangan Desa Rantai Damai tidak rata, butuh penimbunan dan Pembangunan Joging Treak Lapangan		
131	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Lingkungan Tandipau, Kab. Luwu, Bua, Sakti	Untuk meningkatkan sarana olahraga bagi masyarakat		
132	Pembangunan Tribun	Lapangan Sepakbola Andi Maradang, Lingkungan Tandipau, Kab. Luwu, Bua, Sakti	Terbangunnya Tribun Lapangan Sepak bola andi Maradang		
133	Pembangunan Lapangan Volley	Dusun Kanan, Kab. Luwu, Bajo Barat, Marinding	Belum memiliki sarana dan prasarana olaraga yang memadai		
134	Pembangunan Lapangan Volley	Dusun Bailing Desa Saronda, Kab. Luwu, Bajo Barat, Saronda	Dukungan Pasilitasi Sarana dan Prasarana Kebutuhan Olahraga		
135	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Lapangan Lempopacci Kec Suli	Meningkatkan Kegiatan Olahraga		
136	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	Lapangan Bilante Kec Larompong	Kondisi Lapangan Kurang Bagus untuk digunakan kegiatan olahraga,masih dibutuhkan penimbunan.		
137	Pembangunan Tribun	Lapanga Sepak Bola Bilante Kec. Larompong	Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Olahraga		
138	Pembangunan Tribun	Lapangan Sepak Bola Desa Buntu Nanna Kec. Ponrang	Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Olahraga		
139	Pembangunan Stadion	Kab. Luwu	Tersedianya Stadion Kab. Luwu		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu menjalankan tugasnya dengan merujuk pada berbagai kebijakan nasional yang menjadi dasar strategis dalam menyusun program dan kegiatan. Telaahan terhadap kebijakan nasional ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi antara arah pembangunan daerah dan kebijakan nasional, terutama dalam upaya pengembangan pemuda dan olahraga sebagai elemen penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Beberapa kebijakan nasional yang relevan meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

   Kebijakan ini menjadi landasan hukum bagi pengembangan pemuda, dengan fokus pada peningkatan potensi, kapasitas, dan peran pemuda dalam pembangunan. UU ini juga mengamanatkan pemberdayaan pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan karakter. Implementasinya di Kabupaten Luwu dapat diarahkan pada pengembangan program kepemimpinan, kewirausahaan, dan literasi digital bagi pemuda.

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN)

   UU ini mengatur penyelenggaraan keolahragaan nasional yang mencakup olahraga prestasi, rekreasi, dan pendidikan. Dalam konteks Kabupaten Luwu, kebijakan ini menjadi panduan untuk meningkatkan pembinaan atlet, memperluas partisipasi masyarakat dalam olahraga, dan menyediakan sarana olahraga yang memadai.

3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)

   DBON menetapkan target jangka panjang untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Kabupaten Luwu dapat berperan aktif dalam pencapaian target ini melalui pembinaan atlet muda berbakat dan penyelenggaraan kompetisi lokal sebagai bagian dari ekosistem olahraga nasional.

4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024

   RPJMN mengamanatkan peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu dapat mengintegrasikan kebijakan ini ke dalam program-program peningkatan kesehatan masyarakat melalui olahraga dan penguatan kapasitas pemuda.

5) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora)

   Berbagai Permenpora, seperti kebijakan tentang pemuda pelopor dan olahraga masyarakat, memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan program di tingkat daerah.

Telaahan terhadap kebijakan nasional menunjukkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu perlu:

1) Memprioritaskan Pengembangan Pemuda: Merancang program pemberdayaan pemuda berbasis kewirausahaan, kepemimpinan, dan digitalisasi untuk meningkatkan kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah.
2) Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi: Membangun sistem pembinaan atlet berjenjang yang sejalan dengan DBON untuk mencetak atlet berprestasi di tingkat regional maupun nasional.
3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Mengembangkan kegiatan olahraga rekreasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kesehatan dan kebugaran.
4) Meningkatkan Kolaborasi dengan Pusat: Memanfaatkan program nasional seperti hibah sarana olahraga, beasiswa untuk pemuda, dan pendanaan program olahraga dari pemerintah pusat.

Dengan memadukan kebijakan nasional dalam perencanaan daerah, Kabupaten Luwu memiliki peluang besar untuk mengembangkan pemuda yang produktif dan meningkatkan prestasi olahraga, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Sebagai penjabaran dan implementasi atas Tujuan dan Sasaran RPD 2025-2026 perlu dirumuskan tujuan sebagai sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian rencana pembangunan

daerah. Tujuan berdasar pada T.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih; dan T.3 Meningkatkan Daya Saing Daerah.

3.2.2 Sasaran

Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu, seperti tertuang dalam Renstra 2025-2026 adalah:

1) Pengembangan Pemuda yang Kompeten dan Berdaya Saing;
2) Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah;
3) Peningkatan Partisipasi Olahraga di Masyarakat;
4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
5) Penguatan Kelembagaan dan SDM Pengelola.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Tujuan serta Sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu sesuai analisa kebutuhan untuk Tahun 2025. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu melaksanakan 4 program yang terdiri dari 16 Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Penyediaan Bahan/Material
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan kegiatan :

a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
   - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
   - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
   - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota
   - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
   - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota

b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
   - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota
   - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga

melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar

b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
   - Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota
   - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
   - Seleksi Atlet Daerah
   - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
   - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan *(Sport Science)*
   - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
   - Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota
d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
   - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
   - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
   - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
   - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
   - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan,

pengembangan, dan pengawasan

- Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dengan kegiatan:

a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

- Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
- Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
- Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
- Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				**7.027.305.480**				**14.364.200.000**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7.027.305.480**				**14.364.200.000**
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**7.027.305.480**				**14.364.200.000**
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah***		**100 %**	**4.076.405.480**			**100 %**	**6.028.700.000**
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun***		**100 %**	**85.257.000**			**100 %**	**88.000.000**
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Dokumen	24.988.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		2 Dokumen	25.000.000
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Dokumen	8.837.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 Dokumen	9.000.000
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Dokumen	8.837.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 Dokumen	9.000.000

2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Dokumen	8.837.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 Dokumen	9.000.000
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Dokumen	8.837.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 Dokumen	9.000.000
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Laporan	8.837.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 Laporan	9.000.000
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	16.084.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		4 Laporan	18.000.000
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu***		**100 %**	**3.115.002.909**			**100 %**	**3.190.000.000**
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	32 Orang/bulan	2.929.305.480	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang/bulan	3.000.000.000
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	12 Dokumen	169.315.929	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		12 Dokumen	170.000.000
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Laporan	8.339.500	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 Laporan	10.000.000
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Laporan	8.042.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 Laporan	10.000.000
2.19.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Presentase Administrasi Barang Barang Yang Di Laksanakan***		**100 %**	**36.420.000**			**100 %**	**37.000.000**
2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 Laporan	36.420.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		2 Laporan	37.000.000

2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		**100 %**	**25.050.000**			**100 %**	**280.000.000**
2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	50 Paket	25.000.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		50 Paket	55.000.000
2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Orang	50.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 Orang	225.000.000
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran***		**100 %**	**419.908.229**			**100 %**	**378.700.000**
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	6 Paket	5.228.250	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		6 Paket	5.500.000
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 Paket	5.925.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		13 Paket	3.700.000
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	7 Paket	10.459.550	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		7 Paket	10.500.000
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	6 Paket	9.634.500	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		4 Paket	11.000.000
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	90 Dokumen	20.100.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		90 Dokumen	21.000.000
2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	35 Paket	20.585.406	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		50 Paket	32.000.000
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 Laporan	43.391.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		12 Laporan	45.000.000
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Laporan	304.584.523	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		100 Laporan	250.000.000
2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah***		**90 %**	**30.150.000**			**90 %**	**1.250.000.000**
2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Unit	50.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 Unit	50.000.000

2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	20 Unit	50.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		10 Unit	100.000.000
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	5 Unit	30.000.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		9 Unit	100.000.000
2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Unit	50.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1.000.000.000
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**100 %**	**270.000.000**			**100 %**	**305.000.000**
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 Laporan	48.000.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		12 Laporan	55.000.000
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 Laporan	222.000.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		12 Laporan	250.000.000
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**90 %**	**94.617.342**			**90 %**	**500.000.000**
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	15 Unit	81.412.250	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		13 Unit	90.000.000
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	20 Unit	10.000.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		25 Unit	10.000.000
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Unit	3.155.092	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		2 Unit	100.000.000
2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Unit	50.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			300.000.000

2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan***		**90 % 100 %**	**150.300.000**			**90 % 100 %**	**910.000.000**
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	***Capaian Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota,Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota***		**100 %**	**150.200.000**			**100 %**	**710.000.000**
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Orang	50.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		85 Orang	100.000.000
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Kegiatan	50.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Kegiatan	10.000.000
2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Orang	50.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			100.000.000
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	30 Orang	150.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		100 Orang	200.000.000
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Unit	50.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	300.000.000

2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Capaian Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***		**100 %**	**100.000**			**100 %**	**200.000.000**
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Organisasi	50.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Organisasi	100.000.000
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	0 Orang	50.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		100 Orang	100.000.000
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional)*** ***Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan***		**85,76 %** **90 %**	**2.500.500.000**			**86 %** **90 %**	**6.750.000.000**
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	***Capaian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenngan daerah kabupaten***		**90 %**	**100.000**			**90 %**	**400.000.000**
2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	-	-	-	25.000	-		1 Unit	150.000.000
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	10 Unit	50.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Unit	150.000.000

2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Dokumen	25.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Dokumen	100.000.000
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Capaian Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***		**90 %**	**925.050.000**			**90 %**	**1.250.000.000**
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	4 Kegiatan	750.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Kegiatan	900.000.000
2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	*0*	-	1 0	50.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Kegiatan	150.000.000
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Orang	175.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		57 Orang	200.000.000
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	***Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi***		**90 %**	**250.000**			**90 %**	**1.200.000.000**
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Orang	50.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Orang	100.000.000
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	*Jumlah penerima Penghargaan olahraga*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	30 Orang	50.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		0 Orang	300.000.000
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	*Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Pelatda	50.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Pelatda	200.000.000

2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	*Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Orang	50.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		20 Orang	300.000.000
2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	*Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Dokumen	50.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	300.000.000
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	***Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga***		**90 %**	**1.050.000.000**			**90 %**	**3.000.000.000**
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Dokumen	1.050.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		2 Dokumen	3.000.000.000
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	***Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi***		**90 %**	**525.100.000**			**90 %**	**900.000.000**
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Laporan	50.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Laporan	100.000.000
2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	*Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Laporan	150.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Laporan	150.000.000
2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat*	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Dokumen	150.000.000
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Unit	50.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Unit	200.000.000

2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lembaga	275.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Lembaga	300.000.000
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan yang dilaksanakan Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan***		**90,21 % 90,21 %**	**300.100.000**			**90,36 % 90,36 %**	**675.500.000**
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	***Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan***		**100 %**	**300.100.000**			**100 %**	**675.500.000**
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Organisasi	100.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Organisasi	200.000.000
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Orang	100.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		100 Orang	150.000.000
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Laporan	100.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Laporan	100.500.000
2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Unit	50.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Unit	75.000.000
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	*Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan*	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Organisasi	50.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Organisasi	150.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2025			
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	5	6	4	7
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**	**4.076.405.480**		
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun***	**100 %**	**85.257.000**		
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	24.988.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	8.837.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	8.837.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	8.837.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	8.837.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	8.837.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	16.084.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu***	**100 %**	**3.115.002.909**		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	32 Orang/bulan	2.929.305.480	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	169.315.929	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	8.339.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	1 Laporan	8.042.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

	c.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Presentase Administrasi Barang Barang Yang Di Laksanakan***	**100 %**	**36.420.000**		
		- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	12 Laporan	36.420.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	d.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**100 %**	**25.050.000**		
		- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	50 Paket	25.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
		- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	2 Orang	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	e.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran***	**100 %**	**419.908.229**		
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	6 Paket	5.228.250	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	12 Paket	5.925.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	7 Paket	10.459.550	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	6 Paket	9.634.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	90 Dokumen	20.100.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
		- Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	35 Paket	20.585.406	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
		- Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	43.391.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	100 Laporan	304.584.523	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	f.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah***	**90 %**	**30.150.000**		
		- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	2 Unit	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
		- Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	20 Unit	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	30.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	g.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**	**270.000.000**		
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	48.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	222.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

	h.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**90 %**	**94.617.342**		
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	15 Unit	81.412.250	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	20 Unit	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	3.155.092	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
2		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan***	**90 % 100 %**	**150.300.000**		
	a.	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	***Capaian Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota,Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota***	**100 %**	**150.200.000**		
	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*	100 Orang	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda*	1 Kegiatan	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	-	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi*	100 Orang	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda*	30 Orang	150.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	-	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	2 Unit	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	b.	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Capaian Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**100 %**	**100.000**		
	-	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	1 Organisasi	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota*	0 Orang	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
3		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional)*** ***Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan***	**85,76 %** **90 %**	**2.500.500.000**		
	a.	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	***Capaian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewennngan daerah kabupaten***	**90 %**	**100.000**		
	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	-	-	25.000	-	-
	-	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	10 Unit	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar*	1 Dokumen	25.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	b.	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Capaian Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**90 %**	**925.050.000**		
	-	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*	4 Kegiatan	750.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	-	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	*0*	1 0	50.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	-	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*	55 Orang	175.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	c.	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	***Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi***	**90 %**	**250.000**		
	-	Seleksi Atlet Daerah	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi*	100 Orang	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	-	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	*Jumlah penerima Penghargaan olahraga*	30 Orang	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

		- Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	*Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)*	1 Pelatda	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		- Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	*Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan*	100 Orang	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		- Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	*Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota*	2 Dokumen	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	d.	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	***Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga***	**90 %**	**1.050.000.000**		
		- Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	1.050.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	e.	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	***Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi***	**90 %**	**525.100.000**		
		- Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi*	1 Laporan	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		- Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	*Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan*	1 Laporan	150.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		- Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat*	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		- Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan*	1 Unit	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		- Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*	2 Lembaga	275.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan yang dilaksanakan Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan***	**90,21 % 90,21 %**	**300.100.000**		
	a.	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	***Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan***	**100 %**	**300.100.000**		
		- Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	1 Organisasi	100.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

		- Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	100 Orang	100.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		- Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah*	1 Laporan	100.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		- Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan*	1 Unit	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	*Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan*	1 Organisasi	50.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

Dalam hal pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai nilai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pemerintah Daerah (RPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belopa, 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU,



KASMUDIN, S.IP.,M.Si.
Pangkat : Pembina Utama
NIP : 19711231 199202 1 003

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LUWU

TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun Tata cara perumusan dan penyajian Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026, Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, Renstra Tahun 2025-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Lalu. Oleh karena itu Renja DPMD Tahun 2025 ini diharapkan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi serta dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi atas kinerja tahunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu untuk mendorong terwujudnya arah kebijakan yang ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renja ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan daerah pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Luwu

Belopa, Agustus 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyrakan dan Desa
Kabupaten Luwu,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DPMD

KASMARUDDIN, S.Sos
Pembina
NIP. : 19710903 200901 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II HASIL ECALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAAIAN ENSTRA 8

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 19

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 24

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 24

2.5. PENELAAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....

3.1. TELAAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 32

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH 43

BAB V PENUTUP 44

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dpmd Tahun 2023 Dan Pencapaian Renstra Tahun 2024 10

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 25

Tabel 2.4. Usulan Program Dan Kegiatan Dari Masyarakat 36

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 40

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 42

Tabel 4.1. Rencana Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan 45

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yaitu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah dan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, dalam hal ini penyusunan Renstra (Rencana Strategis) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah periode 5 tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif; sedangkan Renja Perangkat Daerah adalah rencana kerja perangkat daerah periode 1 tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkap Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026, dan RKPD tahun 2025, RENSTRA DPMD tahun 2025-2026 serta mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, adapun dalam hal penganggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) guna menjaga keterkaitan dan konsistensi penyusunan rencana kerja, adapun Renja ini nantinya akan menjadi acuan Dinas

Dipindai dengan CamScanner

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Periode 2025-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mendukung dalam penyusunan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Thun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahaun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Dipindai dengan CamScanner

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hsil Verifikasi, Validsi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembngunan dan Keuangan Daerh;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 26 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 26;
21. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 1).

1.3. MAKSUD dan TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya dokumen Rencana Kerja DPMD Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini adalah untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2025 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan desa.

Dipindai dengan CamScanner

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya dokumen Rencana Kerja DPMD Kabupaten Luwu Tahun 2025 antara lain :

a. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pada tahun 2025.
b. Memberikan arah yang jelas terhadap target kinerja, realisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk jangka waktu 1 tahun.
c. Sebagai dokumen yang menyajikan pedoman dalam merumuskan kebijakan perencanaan dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L, dan Renja Provinsi/Kabupaten/kota serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum
Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang STOK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahu berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD Tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan Kajian terhadap capaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam rumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

Dalam Bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten/kota.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioriatas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan funsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Yang memuat tentang rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarkat Desa Kabupaten Luwu tahun 2024.

BAB V.

PENUTUP.

Berisikan uraian penutup, berupa :

Dipindai dengan CamScanner

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun sendainya ketersedian anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) meliputi 3 (tiga) hal, yakni realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis DPMD periode tahun 2025-2026 dan kebijakan serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Secara umum DPMD Kabupaten Luwu telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan kebijakan daerah pada urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara pimpinan beserta bawahanya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Dalam rangka mencapai Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pokok, DPMD Kabupaten Luwu pada tahun 2025 melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebgi berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Kegiatan :

   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENATAAN DESA

Dipindai dengan CamScanner

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Penataan Desa

3. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

Kegiatan :

1. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kegiatan :

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil Analisis pencapaian kinerja terhadap 5 (Lima) program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu pada tahun 2023 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum adalah sebesar 98,64 persen. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Perlaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2024, uraian tersebut dapat dilihat pada Tabel T-C. 29 berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.1.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN 2023 DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2024

Tabel. T.C 29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatn Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**								
5.01.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara Tepat Waktu***	***154,163,413.00***	***0.00***	***21,006,600.00***	***20,966,800.00***	***99.81%***	***6,656,541.00***	***27,623,341.00***	***17.92%***
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	88,096,613.00	0.00	16,894,400.00	16,890,000.00	99.97%	6,656,541.00	23,546,541.00	26.73%
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	63,105,000.00	0.00	1,142,500.00	1,115,000.00	97.59%	0.00	1,115,000.00	1.77%

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatn Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	972,900.00	0.00	974,900.00	972,900.00	99.79%	0.00	972,900.00	100.00%
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	851,400.00	39,094,200.00	852,300.00	851,400.00	99.89%	0.00	39,945,600.00	4692%
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1,137,500.00	69,336,400.00	1,142,500.00	1,137,500.00	99.56%	0.00	70,473,900.00	6196%
5.01.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Presentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu***	***21,482,127,117.00***	***7,756,179,540.00***	***3,240,984,444.00***	***3,196,818,614.00***	***98.70%***	***3,577,261,058.00***	***14,532,259,212.00***	***67.65%***
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20,897,817,859.00	7,570,899,540.00	3,083,536,944.00	3,045,363,614.00	98.76%	3,410,722,000.00	14,026,985,154.00	67.12%
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	575,280,000.00	185,280,000.00	154,560,000.00	150,600,000.00	97.44%	160,560,000.00	496,440,000.00	86.30%

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikstor Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatn Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7,629,258.00	0.00	1,462,500.00	1,455,000.00	99.49%	5,979,058.00	7,434,058.00	97.44%
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1,400,000.00	0.00	1,425,000.00	1,400,000.00	98.25%	0.00	1,400,000.00	100.00%
5.01.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Cakupan penyelanggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah***	***2,976,000.00***	***0.00***	***3,000,000.00***	***2,976,000.00***	***99.20%***	***0.00***	***2,976,000.00***	***100.00%***
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2,976,000.00	0.00	3,000,000.00	2,976,000.00	99.20%	0.00	2,976,000.00	100.00%
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**6,792,969.00**	**0.00**	**1,804,700.00**	**1,792,800.00**	**99.34%**	**1,804,588.00**	**3,597,388.00**	**52.95%**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatn Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian (Dokumen)	5,661,469.00	0.00	662,200.00	661,300.00	99.86%	1,804,588.00	*2,465,888.00*	43.56%
5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1,131,500.00	0.00	1,142,500.00	1,131,500.00	99.04%	0.00	*1,131,500.00*	100.00%
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah**	**2,318,974,041.00**	**796,354,260.00**	**292,510,617.00**	**292,265,910.00**	**99.92%**	**99,740,503.00**	***1,188,360,673.00***	**51.25%**
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan (Paket)	84,595,500.00	17,263,500.00	23,600,000.00	23,590,000.00	99.96%	21,680,000.00	*62,533,500.00*	73.92%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan (Paket)	96,440,750.00	59,169,720.00	5,000,000.00	4,994,000.00	99.88%	4,033,030.00	*68,196,750.00*	70.71%
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	105,090,000.00	35,380,000.00	4,710,000.00	4,680,000.00	99.36%	4,460,000.00	*44,520,000.00*	42.36%
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	98,530,406.00	39,079,040.00	14,791,850.00	14,776,600.00	99.90%	14,608,323.00	*68,463,963.00*	69.49%

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatn Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1,934,317,385.00	645,462,000.00	244,408,767.00	244,225,310.00	99.92%	54,959,150.00	*944,646,460.00*	48.84%
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	*0.00*	**0.00%**
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan ketersediaan jasa penujang urusan pemerintahan daerah**	**4,110,341,962.00**	**1,408,956,531.00**	**366,344,100.00**	**357,939,000.00**	**97.71%**	**364,240,100.00**	*2,131,135,631.00*	**51.85%**
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat (Laporan)	126,788,000.00	53,944,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	996,000.00	*55,240,000.00*	43.57%
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	84,919,200.00	27,905,200.00	7,000,000.00	6,840,000.00	97.71%	8,400,000.00	*43,145,200.00*	50.81%
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3,158,680,000.00	1,160,640,000.00	323,200,000.00	323,200,000.00	100.00%	328,800,000.00	*1,812,640,000.00*	57.39%

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatn Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelanggaran barang milik daerah penujang urusan pemerintahan daerah	369,977,381.00	0.00	17,922,050.00	13,799,500.00	77.00%	13,022,050.00	*26,821,550.00*	7.25%
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	369,977,381.00	166,467,331.00	17,922,050.00	13,799,500.00	77.00%	13,022,050.00	*193,288,881.00*	52.24%
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase pengentasan desa tertinggal**	**896,496,424.00**	**106,318,800.00**	**37,962,800.00**	**37,871,000.00**	**99.76%**	**37,775,378.00**	***181,965,178.00***	**20.30%**
2.13.03.2.01	*Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa*	*Jumlah Desa yang Difasilitasi Kerjasama antar Desa*	*448,248,212.00*	*0.00*	*18,981,400.00*	*18,935,500.00*	*99.76%*	*18,687,669.00*	*37,823,169.00*	*8.44%*
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalamKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalamKabupaten/Kota (Dokumen)	377,680,600.00	106,318,800.00	5,657,400.00	5,650,000.00	99.87%	5,602,677.00	*117,571,477.00*	31.11%

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatn Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PembangunanKawasan Perdesaan (Dokumen)	70,367,612.00	0.00	13,324,000.00	13,285,500.00	99.71%	13,285,012.00	26,570,512.00	37.76%
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase peningkatan status desa mandiri**	**41,140,862,542.00**	**7,614,521,854.00**	**5,936,778,400.00**	**5,788,579,432.00**	**97.50%**	**5,926,777,788.00**	***19,329,879,074.00***	**46.98%**
		Persentase peningkatan status desa maju							***0.00***	
2.13.04.2.01	*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	*Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri*	*20,570,431,271.00*	*0.00*	2,968,389,200.00	2,894,289,716.00	97.50%	2,963,388,894.00	*5,857,678,610.00*	28.48%
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan AdministrasiPemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan AdministrasiPemerintahan Desa (Dokumen)	937,970,556.00	777,443,569.00	14,188,500.00	14,164,600.00	99.83%	14,188,487.00	*805,796,656.00*	85.91%
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil PenyusunanPerencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	137,264,800.00	44,983,600.00	10,000,000.00	9,943,000.00	99.43%	7,000,000.00	*61,926,600.00*	45.11%
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	18,684,477,915.00	6,652,961,585.00	2,928,562,000.00	2,854,691,966.00	97.48%	2,927,561,845.00	*12,435,215,396.00*	66.55%

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatn Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga KerjaSama antar Desa (Dokumen)	618,980,960.00	80,569,960.00	4,764,800.00	4,747,000.00	99.63%	4,764,725.00	90.081.685.00	14.55%
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa (Dokumen)	191,737,040.00	58,563,140.00	10,873,900.00	10,743,150.00	98.80%	9,873,837.00	79.180.127.00	41.30%
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan**	**13,436,541,932.00**	**2,319,048,800.00**	**5,311,185,440.00**	**5,292,612,736.00**	**99.65%**	**2,035,860,760.00**	**9,647,522,296.00**	**71.80%**
2.13.05.2.01	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Cakupan Pemberdayaan Lembaga Desa dan Lembaga Adat Desa*	*6,718,270,966.00*	*0.00*	*2,655,592,720.00*	*2,646,306,368.00*	*99.65%*	*1,017,930,380.00*	*3,664,236,748.00*	*54.54%*

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatn Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	69,333,968.00	29,048,800.00	14,172,900.00	12,080,000.00	85.23%	14,538,000.00	55,666,800.00	80.29%
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adatyang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	41,016,498.00	0.00	13,499,320.00	13,470,920.00	99.79%	13,134,900.00	26,605,820.00	64.87%
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan KesejahteraanKeluarga (Dokumen)	6,607,920,500.00	2,290,000,000.00	2,627,920,500.00	2,620,755,448.00	99.73%	990,257,480.00	5,901,012,928.00	89.30%

Dipindai dengan CamScanner

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUWU

Bagian penting dalam proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu dalam rangka mengemban tugas dan fungsi, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2025-2026 Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dengan sasaran Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, selain tujuan dan sasaran tersebut, ketersediaan indikator kinerja juga sangat diperlukan , dimana indikator kinerja tersebut berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah, tercapainya suatu kinerja akan terlihat dari capaian masing-masing indikator dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah.

Selanjutnya untuk analisis terhadap capaian kinerja pelayanan DPMD Kabupaten Luwu berdasarkan indikator sebagaimana yang telah tertuang dalam RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 dan Renstra DPMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2026 disajikan dalam Tabel 2.2 pada analisis pencapaian Kinerja Pelayanan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Msyarakat dan Desa Kabupaten Luwu

Tabel. T-C.30

No	Indikator Kinerja Tugas Fungsi PD	Targget NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Pada Tahun Ke			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	64,22 (B)	67,25 (B)	67,51 (B)	67,89 (B)	46,49 (CC)	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilai SAKIP	-	-	-	72,02 (BB)	77,06 (BB)	78,90 (BB)	63,87 (B)	61,81 (B)	-	-	-	-	-	-	-
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-		53,24	75,32	61,46	75,32	-	-	-	-	-	-	-
4	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	100	100	100	100	57,97	-	-	-	-	-	-	-
1	Persentase Desa Mandiri	-	-	-	70,00	80,00	85,00	87,00	5,31	-	-	-	-	-	-	-
1	Indeks Desa Membangun	-	-	-	0,66	0,69	0,71	0,72	0,67	-	-	-	-	-	-	-
2	Cakupan Desa Siaga Aktif	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
3	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran	-	-	-	100	100	100	100	57,97	-	-	-	-	-	-	-

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Tugas Fungsi PD	Targget NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Pada Tahun Ke			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Pemerintahan Desa Yang Baik															
4	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
5	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	-	-	-	100	100	100	100	91,16	-	-	-	-	-	-	-
6	Persentase LSM Aktif	-	-	-	100	100	100	100	44,06	-	-	-	-	-	-	-
7	Persentase LPM Berprestasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Persentase PKK Aktif	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
9	Persentase Posyandu Aktif	-	-	-	100	100	100	100	95,14	-	-	-	-	-	-	-
10	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	-	-	-	93,94	96,28	97,01	97,45	93,94	-	-	-	-	-	-	-
11	Persentase Desa Yang Dilakukan Penataan Desa	-	-	-	73,66	73,31	74,00	74,23	73,66	-	-	-	-	-	-	-

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Tugas Fungsi PD	Targget NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Pada Tahun Ke			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
12	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	-	-	-	97,00	97,03	97,21	98,00	22,71	-	-	-	-	-	-	-
13	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-	-	-	2,45	3,21	6,23	7,25	1,32	-	-	-	-	-	-	-
14	Persentase Peningkatan Status Desa Maju	-	-	-	6,02	6,19	6,21	6,30	31,88	-	-	-	-	-	-	-
15	Persentase Desa Dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	-	-	-	51,20	52,00	56,09	57,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Jumla Desa Tertinggal	-	-	-	40	50	30	20	47	-	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Desa Mandiri	-	-	-	5	12	14	15	11	-	-	-	-	-	-	-

Dipindai dengan CamScanner

Dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yaitu Pengukuran Kinerja DPMD Kabupaten Luwu didasarkan pada pelaksanaan program dan kegiatan, dengan capaian indikator sebagaimana uraian di bawah ini :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, berisi 7 kegiatan rutin yang telah dilksanakan selama tahun 2023 mencapai 98,80 persen;
2). Program Penataan Desa, berisi 1 kegiatan yang telah dilksanakan selama tahun 2023 mencapai 0 persen;
3). Program Peningkatan Kerjasama Desa, berisi 1 kegiatan yang telah dilksanakan selama tahun 2023 mencapai 99,76 persen;
4). Program Administrasi Pemerintahan Desa, berisi 1 kegiatan yang telah dilksanakan selama tahun 2023 mencapai 87,50 persen;
5). Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, berisi 1 kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 mencapai 99,65 .persen

Dipindai dengan CamScanner

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah Kabupaten Luwu (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Luwu).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh kelembagaan yang kuat serta potensi sumber daya manusia dengan pendidikan yang cukup,

Selain pendukung pelaksanaan tugas tersebut diatas, DPMD Kabupaten Luwu juga memiliki permasalahan dari tahun-tahun sebelumnya yang pastinya secara tidak langsung bisa berdampak pada pencapaian tujuan yang ingin dicapai antara lain seperti masih terdapat program dan kegiatan yang tidak signifikan untuk mempercepat pencapaian target indikator yang berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah yang ingin dicapai..

Berdasarkan uraian pendukung pelaksanaan tupoksi tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang, peluang dan tantangan Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program dan kegiatan menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Kunci keberhasilan tersebut dilaksanakan melalui peningkatan rapat koordinasi dengan kecamatan dan desa/ kelurahan secara berkala, dalam rangka membangun sinergitas program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam RKPD Tahun 2025 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada table 2.3, pada table tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang direncanakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu sebagaimana Tabel Berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu

T-C.31

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KAB. LUWU	CAKUPAN KETERSEDIAAN PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	2.728.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KAB. LUWU	CAKUPAN KETERSEDIAAN PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	2.728.000	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100%	20.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100%	20.500	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	8.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	8.500	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Presentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu**	**100%**	**2.102.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Presentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu**	**100%**	**2.102.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah yang Menerima Gaji dan Tunjagan ASN	38 orang	2.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah yang Menerima Gaji dan Tunjagan ASN	38 orang	2.000.000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	84 Dokumen	100.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	84 Dokumen	100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Cakupan Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**26.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Cakupan Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**26.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya			75 Pasang	21.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya			75 Pasang	21.000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegwaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegwaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**141.654**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**141.654**	
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Paket	1.000	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Paket	1.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Paket	1.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Paket	1.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	10.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	10.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan	6 Paket	4.654	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan	6 Paket	4.654	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peratum Perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	10.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peratum Perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	10.000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan Material yang disediakan	34 Paket	10.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan Material yang disediakan	34 Paket	10.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	5.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	5.000	
	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	100.000	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	100.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**100%**	**70.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**70.000**	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Unit	20.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Unit	20.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan yang disediakan	10 Unit	50.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan yang disediakan	10 Unit	50.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**64 Laporan**	**328.400**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**64 Laporan**	**328.400**	
	Penyediann Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.400	Penyediann Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	20.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	20.000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
			Daya Air dan Listrik yang disediakan					Daya Air dan Listrik yang disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	40 Laporan	300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	40 Laporan	300.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**39.446**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**39.446**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	30.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	30.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang dipelihara	15 Unit	9.446	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang dipelihara	15 Unit	9.446	
	PROGRAM PENATAAN DESA					**PROGRAM PENATAAN DESA**					
	Penyelengaraan Penataan Desa			**100%**	**15.000**	**Penyelengaraan Penataan Desa**			**100%**	**15.000**	
	Fasilitasi Tata Wilyah Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	207 Desa	15.000	Fasilitasi Tata Wilyah Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	207 Desa	15.000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		**PRESENTASI PEMETASAN DESA TERTINGGAL**	**100%**	**37.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**		**PRESENTASI PEMETASAN DESA TERTINGGAL**	**100%**	**37.000**	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa		**Jumlah Desa yang difasilitasi Kerja Sama Antar Desa**	**100%**	**37.000**	**Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa**		**Jumlah Desa yang difasilitasi Kerja Sama Antar Desa**	**100%**	**37.000**	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25 Dokumen	15.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25 Dokumen	15.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10.000	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	45 Dokumen	12.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	45 Dokumen	12.000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		**PRESENTASE PENINGKATAN STATUS DESA MANDIRI**	**100%**	**64.000**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**PRESENTASE PENINGKATAN STATUS DESA MANDIRI**	**100%**	**64.000**	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		**Presentase Peningkatan Status Desa Mandiri**	**100%**	**64.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		**Presentase Peningkatan Status Desa Mandiri**	**100%**	**64.000**	
	Fasilitasi Penyelenggaraan		Jumlah Dokumen Penyelengaraan	40 Dokumen	15.000	Fasilitasi Penyelenggaraan		Jumlah Dokumen Penyelengaraan	40 Dokumen	15.000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Administrasi Pemerintahan Desa		Administrasi Pemerintahan Desa			Administrasi Pemerintahan Desa		Administrasi Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	20 Dokumen	35.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	20 Dokumen	35.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	200 Orang	1.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	200 Orang	1.000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	40 Dokumen	5.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	40 Dokumen	5.000	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan , Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	10 Laporan	1.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan , Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	10 Laporan	1.000	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa yang Tersusun	40 Dokumen	5.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa yang Tersusun	40 Dokumen	5.000	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi dalam	30 Desa	1.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan	30 Desa	1.000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
			Penetapan dan Penegasan Batas Desa					Penegasan Batas Desa			
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	20 Dokumen	1.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	20 Dokumen	1.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		**PRESENTASE DESA DENGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADATNYA MELAKSANAKAN KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN**	**100%**	**33.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**PRESENTASE DESA DENGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADATNYA MELAKSANAKAN KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN**	**100%**	**33.000**	
	Pemberdayan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Desa dan Lembaga Adat Desa**	**100%**	**33.000**	**Pemberdayan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang**		**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Desa dan Lembaga Adat Desa**	**100%**	**33.000**	

Dipindai dengan CamScanner

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
						Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Indentifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	1.000	Indentifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	1.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Dokumen	20.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Dokumen	20.000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 Laporan	1.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 Laporan	1.000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	28 Laporan	1.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	28 Laporan	1.000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	10.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	10.000	

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dapat dilihat dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan program dan kegiatan. Proses ini dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rancangan awal program dan kegiatan dengan kebutuhan program dan kegiatan. Berdasarkan review yang dilakukan, diketahui bahwa rancangan awal RKPD sudah sejalan dengan kebutuhan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing Bidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa Kabupaten Luwu. Tidak terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Dipindai dengan CamScanner

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggraan pemerintahan yang baik yakni dengan memperhatikan hasil musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kel hingga ke tingkat Kabupaten melalui pembahasan forum SKPD Hasil Forum SKPD Kabupaten dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja sebagai usulan dan bersifat masukan dan harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan direncanakan.

Pada Forum OPD usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu yang disampaikan oleh masyarakat (dalam mekanisme pelaksanaan Musrenbang). Namun usulan tersebut tidak dimasukkan ke dalam rencana kegiatan, oleh karena sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program dan kegiatan pembangunan dinas sebagaimana termaktub dalam dokumen rencana strategis dinas. Adapun usulan masyarakat tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025

Tabel T-C 32

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program peningkatan kapasitas Pengelola BUMDES				
	Bantuan permodalan pengembangan kegiatan BUMDES	Kab Luwu	Terwujudnya penguatan BUMDes yang maju dan mandiri	207 Desa/ BUM Desa	
	Bantuan dan Penguatan Modal BUMDES	Kab Luwu	Terlaksananya bantuan dan penguatan modal BUM Desa	10 desa /BUM Desa	
	Pelatihan Pengurus BUMDES	Kab Luwu	Terlaksananya pelatihan pengelola BUMDes	207 Desa/ BUM Desa	
	Program Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa				
	Pelatihan dan Pembinaan KPMD	Kab Luwu	Terlaksananya pelatihan KPMD bagi desa tertinggal	91 desa	
	Program Penataan Desa/Kecamatan				
	Penataan Desa Baru	Kab. Luwu	Terlaksanaya Penataan Desa baru	6 desa	
	Program Kerjasama Desa/Inovasi Desa				

Dipindai dengan CamScanner

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pelatihan Pengelola Objek Wisata	Kab Luwu	Terlaksananya pelatihan pengelola Obyek wisata di desa berkembang	101 Desa	
	Penyusunan RIP Program Kawasan perdesaan	Kab Luwu	Tersusunnya RIP Penataan Kawasan perdesaan	5 desa	
	Pengelolaan Program Unggulan desa	Kab Luwu	Terwujudnya program unggulan desa	10 desa	

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Mengacu pada Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2025 adalah ***"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*** yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan, Selanjutnya unuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025 pemerintah telah menetapkan prioritas nasional yakni sebagi berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM
2. Memantpkan Sistem Pertahanan Keamnan Negra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dn Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandng Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. **Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dn Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya untuk Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 yang merupakan agenda tahunan pembangunan dilaksanakan melalui tema ***"Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing"*** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
4. ***Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata***
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaranlah yang digunakan untuk mengevaluasi pilihan tersebut, oleh karena itu dalam menentukan tujuan dan sasaran yang perlu dipertimbangkan adalah arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan dan analisis issu strategis dimasa mendatang sehingga penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai kompetensi pokok yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan yang telah ditetapkan, adapun tujuan yang ditetapkan dan termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu tahun 2025-2026 yakni ***"Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat,*** berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, maka sasaran pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu adalah ***"Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dengan Indikator Indeks Desa Membangun"***.

Adapun Kinerja tujuan dan sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.1.
TUJUAN DAN SASARAN DPMD KABUPATEN LUWU

NO	TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	DATA DASAR (2023)	TARGET	
							2025	2026
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih				Indeks Reformasi Birokrasi	64,22 (B)	67,25 (B)	67,89 (B)
		Meningkatkan Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan Daerah			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	53,24	60,23	61,46
					Nilai SAKIP	72,02 (BB)	63,21 (B)	63,67 (B)
			Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Gini Ratio	0,364	0,315	0,301
				Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun	0,69	0,71	0,72
					Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	2,45	6,23	7,25
					Persentase Peningkatan Status Desa Maju	6,02	6,21	6,30

3.2.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbagan terhadap rumusan program dan kegiatan

Program dan Kegiatan yang dirumuskan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yakni dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain didsarkan pada tujuan dan sasaran yang termuat dalam dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026, adapun tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada isu strategis aktual sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023. yang akan menjadi perhatian bagi berbagai pihak, baik internasional, nasional maupun daerah.

Selanjutnya, pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) telah memasuki akhir tahun evaluasi pelaksanaan 5 tahun pertama dan perumusan perencanaan untuk lima tahun berikutnya yang akan dituangkan pada dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs. Pencapaian SDGs juga berpengaruh terhadap perumusan program dan kegiatan disebabkan terdapat perubahan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dari edisi I ke edisi II, dimana pada Metadata Edisi II sebanyak 289 indikator dari sebelumnya pada Edisi I mencakup 319 indikator atas 17 tujuan dan 169 target TPB/SDGs

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia yang menyebabkan beberapa tujuan dan indikator yang belum tercapai pada saat pelaksanaan metadata edisi I dilanjutkan untuk dicapai melalui program SDGs metadata edisi II antara lain Tujuan 10 yakni Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antarnegra. Adapun beberapa indikator yang masih perlu dicapai adalah Jumlah Daerah Tertinggal yang Terentaskan; Jumlah Desa Tertinggal; Jumlah Desa Mandiri.

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan Pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat otomatis akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan, sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut yakni ,Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal, Pembangunan Manusia, Perluasan Jangkauan dan Pemerataan Infrastrutur Dasar, Penguatan Daya Saing Daerah sehingga tema Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah "*Pengembangan Komoditas Unggulan dan Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan*" yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Luwu

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan serta sub. Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada tabel I 4.1 sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Luwu

Tabel T-C.33

KODE	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		Kab. Luwu	100%	4.305.554.022			100%	8.585.731.459
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN KETERSEDIAAN PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100%	2.728.000.800			100%	4.623.787.244
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu		100%	2.102.000.000			100%	3.633.807.244
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA								
2.13.02.2.01	Penyelengaraan Penataan Desa			100%	15.000.000			100%	20.000.000
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PRESENTASI PEMETASAN DESA TERTINGGAL		100%	37.000.000			100%	30.000.000
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Kerja Sama Antar Desa		100%	37.000.000			100%	30.000.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PRESENTASE PENINGKATAN STATUS DESA MANDIRI		100%	64.000.000			100%	3.549.535.352
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Peningkatan Status Desa Mandiri		100%	64.000.000			100%	3.549.535.352

Dipindai dengan CamScanner

KODE	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**PRESENTASE DESA DENGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADATNYA MELAKSANAKAN KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN**		**100%**	**33.000.000**			**100%**	**635.000.000**
2.13.05.2.01	Pemberdayan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Desa dan Lembaga Adat Desa**		**100%**	**33.000.000**			**100%**	**635.000.000**

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam Renja DPMD Kabupaten Luwu sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Renstra tahun 2025-2026 yang berfokus pada pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Luwu, adapun jumlah program dan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Jumlah Program Sebanyak : 04

Jumlah Kegiatan Sebanyak : 11

Pagu Indikatif APBD Sebesar : Rp. 4.305.554.022,-

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasl Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penataan Desa

   Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

   Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Desa Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

   Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

5. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat.

   Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 4.1.

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MSYRAKT DAN DESA KABUPATEN LUWU

TAHUN 2025

KODE	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**100%**	**4.305.554.022**			**100%**	**8.585.731.459**
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN KETERSEDIAAN PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**100%**	**2.728.000.800**			**100%**	**4.623.787.244**
2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu**		**100%**	**20.500.000**			**100%**	**28.500.000**
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		3 Dokumen	8.500.000			3 Dokumen	8.500.000
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2.000.000			1 Dokumen	5.500.000
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1.500.000			1 Dokumen	5.000.000
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	4.000.000			1 Dokumen	4.000.000
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	4.500.000			1 Dokumen	5.500.000

Dipindai dengan CamScanner

KODE	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu**		**100%**	**2.102.000.000**			**100%**	**3.633.807.244**
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah yang Menerima Gaji dan Tunjagan ASN		38 orang	2.000.000.000			38 orang	3.423.807.244
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD		84 Dokumen	100.000.000			84 Dokumen	200.000.000
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4 Laporan	1.000.000			4 Laporan	5.000.000
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		18 Laporan	1.000.000			18 Laporan	5.000.000
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**26.000.000**			**100%**	**31.000.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya			75 Pasang	21.000.000			75 Pasang	21.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegwaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4 Dokumen	5.000.000			4 Dokumen	10.000.000
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**141.654.022**			**100%**	**407.480.000**
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15 Paket	1.000.000			15 Paket	10.000.000
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		15 Paket	1.000.000			15 Paket	10.000.000
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		15 Paket	10.000.000			15 Paket	25.000.000
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan		6 Paket	4.654.022			6 Paket	10.000.000
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peratum Perundang-undangan yang disediakan		3 Dokumen	10.000.000			3 Dokumen	30.000.000
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan Material yang disediakan		34 Paket	10.000.000			34 Paket	12.480.000

Dipindai dengan CamScanner

KODE	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		15 Laporan	5.000.000			15 Laporan	10.000.000
2.13.01.2.06.09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		130 Laporan	100.000.000			130 Laporan	300.000.000
2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**70.000.000**			**100%**	**75.000.000**
2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		10 Unit	20.000.000			10 Unit	10.000.000
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan yang disediakan		10 Unit	50.000.000			10 Unit	65.000.000
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**64 Laporan**	**328.400.000**			**100%**	**398.000.000**
2.13.01.2.08.01	Penyediann Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	6.400.000			12 Laporan	16.800.000
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Laporan	20.000.000			12 Laporan	20.000.000
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		40 Laporan	300.000.000			40 Laporan	361.200.000
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**39.446.778**			**100%**	**50.000.000**
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20 Unit	30.000.000			20 Unit	35.000.000
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang dipelihara		15 Unit	9.446.778			15 Unit	15.000.000
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**								
2.13.02.2.01	**Penyelengaraan Penataan Desa**			**100%**	**15.000.000**			**100%**	**20.000.000**
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilyah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya		207 Desa	15.000.000			207 Desa	20.000.000
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**PRESENTASI PEMETASAN DESA TERTINGGAL**		**100%**	**37.000.000**			**100%**	**30.000.000**
2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi Kerja Sama Antar Desa**		**100%**	**37.000.000**			**100%**	**30.000.000**
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		25 Dokumen	15.000.000			25 Dokumen	10.000.000

Dipindai dengan CamScanner

KODE	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota		10 Dokumen	10.000.000			10 Dokumen	10.000.000
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		45 Dokumen	12.000.000			45 Dokumen	10.000.000
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**PRESENTASE PENINGKATAN STATUS DESA MANDIRI**		**100%**	**64.000.000**			**100%**	**3.549.535.352**
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Presentase Peningkatan Status Desa Mandiri**		**100%**	**64.000.000**			**100%**	**3.549.535.352**
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelengaraan Administrasi Pemerintahan Desa		40 Dokumen	15.000.000			40 Dokumen	15.000.000
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		20 Dokumen	35.000.000			20 Dokumen	3.464.535.352
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		200 Orang	1.000.000			200 Orang	10.000.000
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa		40 Dokumen	5.000.000			40 Dokumen	20.000.000
2.13.04.2.01.09	Penyslenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan , Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		10 Laporan	1.000.000			10 Laporan	5.000.000
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang Tersusun		40 Dokumen	5.000.000			40 Dokumen	20.000.000
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa		30 Desa	1.000.000			30 Desa	10.000.000
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan		20 Dokumen	1.000.000			20 Dokumen	10.000.000
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**PRESENTASE DESA DENGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADATNYA MELAKSANAKAN KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN**		**100%**	**33.000.000**			**100%**	**635.000.000**

Dipindai dengan CamScanner

KODE	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2.13.05.2.01	**Pemberdayan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Desa dan Lembaga Adat Desa**		**100%**	**33.000.000**			**100%**	**635.000.000**
2.13.05.2.01.01	Indentifikasi dan Inventansasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		2 Dokumen	1.000.000			2 Dokumen	20.000.000
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		10 Dokumen	20.000.000			10 Dokumen	35.000.000
2.13.05.2.01.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		6 Laporan	1.000.000			6 Laporan	50.000.000
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		28 Laporan	1.000.000			28 Laporan	30.000.000
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		12 Dokumen	10.000.000			12 Dokumen	500.000.000

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) ini, memuat sasaran program dan kegiatan yang akan dicapai selama tahun anggaran 2025 dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Rencana Kerja ini merupakan acuan DPMD Kabupaten Luwu dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan ini adalah merupakan prioritas dalam rangka mencapai tujuan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan mendukung Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025-2026..

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi diantaranya :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan Aparat serta sumber daya yang ada;
2. Membuat SOP dan KAK sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Meningkatkan Koodinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk invertarisasi dan sinkronisasi sesuai kewenangan;
4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa
5. Menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta panduan teknis dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025

Selanjutnya terkait dengan kaidah pelaksanaan, DPMD Kabupaten Luwu sebagai perangkat daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dituntu agar senantiasa menghasilkan formulasi kebijakan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku. Adapun rencana tindak lanjut dari dokumen Renja DPMD Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah dengan adanya masukan, informasi, saran dan data dari masing-

Dipindai dengan CamScanner

masing bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja yang akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat.

Belopa, ..., Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Luwu,



KASMARUDDIN, S.Sos
Pembina
NIP. : 19710903 200901 1 001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM



RENJA DPMPTSP

TAHUN 2025

RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bidang dan seksi serta usulan dari berbagai pihak. Dengan disusunnya Renja-PD maka dapat diketahui secara pasti arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu sampai dengan akhir tahun atas dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan Pemerintah kabupaten Luwu.

Belopa, 16 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU,



Drs. Muhammad Rudi, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197404111993021002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.3.1 Maksud 7

1.3.2 Tujuan 8

1.4 Sistimatika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 13

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 29

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP 34

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan 36

2.3.2 Tantangan dan Peluang 37

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 39

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat 48

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 49

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 49

3.2 Tujuan dan Sasaran 49

3.2.1 Tujuan 49

3.2.2 Sasaran 50

3.3 Program dan Kegiatan 51

3.3.1 Program 51

3.3.2 Kegiatan 52

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 60

4.1 Sasaran dan Program Kegiatan 60

4.2 Indikator Sasaran Tahun 2025 60

BAB V PENUTUP 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai tahun 2023	16
Tabel 2.2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja DPMPTSP Triwulan II Tahun 2023	25
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu	32
Tabel 2.3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	37
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Luwu	40
Tabel 3.2.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu	51
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimanan tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu (DPMPTSP) Tahun 2025 memuat program dan kegiatan Tahun 2025, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2025.

Sejalan dengan perkembangan waktu dan kebutuhan organisasi serta pelayanan bagi masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu melaksanakan evaluasi dan restrukturisasi organisasi dimana yang menjadi prinsip dalam penyusunan organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan, maka pada Pemerintah Kabupaten Luwu memandang perlu untuk melakukan perubahan susunan organisasi pelaksana pelayananan penanaman modal dan perizinan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sehingga mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Luwu ditetapkan sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu. Dengan status susunan organisasi kelembagaan yang baru ini maka penanaman

modal merupakan menjadi salah satu tugas pokok, dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu sehingga mulai saat ini pelaksanaan urusan ini melekat pada DPMPTSP Kabupaten Luwu yang salah satu tugas prioritasnya adalah percepatan iklim investasi dan iklim usaha yang diamanatkan untuk melaksanakan konsolidasi perencanaan pelaksanaan Penanaman Modal dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal. Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016, dinyatakan bahwa tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu adalah antara lain merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan terpadu, baik untuk masyarakat maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada potensi daerah.Masing-masing daerah didorong tidak saja untuk lebih mampu mengambil peran dan prakarsa dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga untuk lebih jeli mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat setempat. Dengan kemampuan itu maka Pemerintah Daerah benar-benar dapat menjadi pelaku utama pembangunan.

Dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Luwu diharapkan dapat mempercepat upaya mensejahterakan rakyat Luwu, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah melalui perluasan kesempatan dibidang usaha yang sifatnya dalam kegiatan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan guna meningkatkan Profesionalisme pegawai dan masyarakat untuk mampu bekerja sebagai wira usaha yang mandiri. Untuk mencapai harapan tersebut diperlukan suatu pelayanan yang lebih baik, cepat, mudah, transparan, tepat waktu yaitu melalui Rencana Stategis (RENSTRA) guna memberi arah kebijakan dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun kedepan. Sedangkan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu merupakan suatu penjabaran dari Tujuan, Sasaran serta Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Luwu yang telah dicanangkan untuk kurun waktu tahun 2019-2025 yang membawa visi sebagai berikut :

“ MEWUJUDKAN KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DANMANDIRI DALAM NUANSA RELIGI “

Dalam rumusan visi tersebut diatas, penjelasan masing-masing pokok visiadalah sebagai berikut.

Maju adalah gambaran tentang terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, keadaan social ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkatkemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh transformasi birokrasi secara bertahap.

Sejahtara adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Luwu yang meningkatkan pemenuhan kebutusan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.

Mandiri adalah gambaran tentang kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia.

Religi adalah gambaran tentang suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2019- 2025 adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang professional berwibawah, amanah transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan;
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan koprasi, usaha mikro kecil dan menengah melalui perluasan lapangan kerja;
5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tanggungberbasis agribisnis;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam

mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religius;

7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat pedesaan;
8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan;
9. Penegakan supermasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorongpartisipasi publik yang dinamis dan kondusif;
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu selaku Aparat pelayanan yang berfungsi melakukan pelayanan dibidang penanaman modal dan perizinan mempunyai keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi pertama dan Kedelapan Pemerintah Kabupaten Luwu yaitu **“**

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa,amanah, trasparan, dan akuntabel
2. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan”

Misi ini untuk menciptakan sinergitas pencapaian tujuan pemerintah, swasta dan masyarakat melalui kelembagaan yang menerapkan prinsip-prinsip good govenance dalam mengawal pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

LANDASAN HUKUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Repbilik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Janka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara

Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2025 (LembaranDaerah Tahun 2019 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Luwu Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu;
24. Peraturan Bupati Luwu Nomor 142 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu;
25. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Nomor 2/SOP Pengaduan-BP3M/X/2014 tentangPenetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu;
26. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2019-2025.
27. Peraturan Bupati No : 73 Tahun 2023 Tentang RKPD Kabupaten Luwu 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun maksud disusunnya RENJA adalah :

1. Untuk menyediakan acuan resmi dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025.
2. Acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan.
3. Memberikan gambaran serta acuan terhadap arah kebijakan di bidangpelayanan perizinan dan penanaman

modal sehingga dapat didukung oleh kebijakan sektor lainnya, mengingat masalah pelayanan bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA agar dapat ditetapkannya tahapan- tahapan kebijakan demi tercapainya pelayanan kepada masyarakat/pelanggan dan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. Selain tujuan diatas ada beberapa tujuan lain dalam penyusunan RENJA 2025 ini antara lain :

1. Sebagai Landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu aktual/strategis yang dihadapi.
3. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun
4. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA DPMPTSP Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB.I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra

Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dankewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikanacuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunanRenja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB.II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya; terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaiman usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas poko dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkata Daerah yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 serta sumber pendanaan program dan kegiatan pada tahun 2025.

BAB. V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana

BAB.II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Luwu menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Berdasarkan serapan anggaran, hingga triwulan II Tahun 2023 hingga Penyusunan Dokumen Rancangan Renja Tahun 2025 tingkat realisasi pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Luwu sebagaimana diuraikan dalam Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan 31 juni 2023, jumlah anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. **4.285.150.314**,- (Empat Miliyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Limapuluh Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah), terealisasi hingga Triwulan II sebesar Rp.507.686.539,- (Limaratus Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau 43,42 %
Berikut ini merupakan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pencapaian Renstra Tahun 2023 Triwulan II Juni 2023, dengan 5 program 10 kegiatan dan 29 sub kegiatan :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pearangkat Daerah
   b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
   d) Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD
   e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
   f) Koordinasi dan Penysunan Laporan Capaian Linerja dan Ikhtisar Realisasi kerja SKPD.
   g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
f) Fasilitas Kunjungan Tamu
g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

II) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1) Penetapan Pemberian fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/ Kota

a) Penetapan Kebijakan daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

III) Program Promosi Penanaman Modal

1) Penyelenggaraan dan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
   a) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota

IV) Program Pelayanan Penanaman Modal

1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
   a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegra
   b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
   c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

V) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
   a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
   b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP s/d Tahun 2023

Kabupaten Luwu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkata Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%))		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	12			Penanaman modal									
2	18	01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan**	**100%**							
2	18	01	2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	40 Dokumen	8	8	8	100	8	24	60,00
2	18	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang Disusun	10 Dokumen	2	2	2	100	2	6	60,00

2	18	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokuen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	01	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD yang disusun (LAKIP)	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	01	2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	OB					100,00			100,00
2	18	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	125	OB	25	25	25	100	25	75	60,00

2	18	01	2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	160	OB	32	32	32	100	32	96	60,00
2	18	01	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	01	2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Periksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	01	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	20	Dokumen	4	4	4	100	4	12	60,00
2	18	01	2,03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Laporan hasil pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	60	Jenis	12	12	12	100	12	36	60,00
2	18	01	2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Jenis					100,00			100,00
2	18	01	2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	100	Jenis	20	20	20	100	20	60	60,00
2	18	01	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	20	Jenis	4	4	4	100	4	12	60,00

2	18	01	2.06.05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggadaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	40	Jenis	8	8	8	100	8	24	60,00
2	18	01	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10	Jenis	2	2	2	100	2	6	60,00
2	18	01	2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	500	Porsi	100	100	100	100	100	300	60,00
2	18	15	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumalah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1265	Orang/Kegiatan	253	253	253	100	253	759	60,00
2	18	01	2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	60	Bulan	12	12	12	100	12	36	60,00
2	18	01	2.05.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah nulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	60	Bulan	12	12	12	100	12	36	60,00
2	18	01	2.05.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	60	Bulan	12	12	12	100	12	36	60,00
2	18	01	2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	50	Unit	10	10	10	100	10	30	60,00

2	18	01	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan jasa Pemeliharaan dan perizInan	50	Unit	10	10	10	100	10	30	60,00
2	18	02		**PROGRAM PERENCANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kenaikan realisasi PMDN**	Dokumen								
2	18	02	2,01	**Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**	Dokumen Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan	1	Dokumen				100,00			100,00
2	18	02	2,01	Penetapan Kebijakan daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan	1	Dokumen	0	1	0	0	1	1	100,00
2	18	02	2,01	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasiliatas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5	Laporan	0	1	0	0	0	0	0,00
2	18	02	2,01	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota**	Cakupan penyelenggaraan Peta Potensi Investasi Kabupaten	1	Dokumen							100,00
2	18	02	2,01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	1	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0,00

2	18	02	2,01	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	0	1	0	0	0	0	0,00
2	18	03		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)**	Kegiatan				100,00			100,00
2	18	03	2,01	**Penyelenggaraa Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten	5 Kegiatan	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	03	2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten	5 Kegiatan Pameran	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	04		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**	**Lama Proses Perizinan Penanaman Modal**	**Investor**				100,00			100,00
2	18	04	2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disediakan	Sistem				100,00			100,00

2	18	04	2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Disediakan	7	Sistem	1	1	1	100	2	4	57,14
2	18	04	2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan hasil pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	60	Laporan	12	12	12	100	12	36	60,00
2	18	04	2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	sistem pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elecktronik yang disediakan	10	Layanan	2	2	2	100,00	2	6	60,00
2	18	05		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100%**					100			100,00
2	18	05	2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	60	Laporan	12	12	12	100,00	12	36	60,00

2	18	05	2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanan Penanaman Modal	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	60	Laporan	12	12	12	100,00	12	36	60,00
2	18	05	2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	60	Laporan	12	12	12	100,00	12	36	60,00

Belopa, 16 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU,

Drs. Muhammad Rudi, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 197404111993021002

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra di atas, maka terdapat beberapa yang dapat dijelaskan diantaranya terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi disebabkan adanya kendala pada tahap pelaksanaan. Jadi pada dasarnya, kegiatan tersebut tetap terlaksana meskipun tidak lagi terukur dalam pencapaian target sesuai renstra yang ada.

Jika mencermati hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan renja sampai Triwulan II Tahun 2023 umumnya telah memenuhi target. Namunpun demikian beberapa program/kegiatan perlu dievaluasi terkait efektifitas pelaksanaannya sehingga dapat mencapai sasaran renstra. Karena itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya diperlukan langkah inovatif untuk mengoptimalkan pencapaian target dengan mengefektifkan sumber daya yang ada. Langkah inovatif tersebut dapat berupa pendayagunaan sumber daya dan kerjasama operasional dengan berbagai pihak. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah daerah diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Berikut adalah Tabel penelahaan terhadap pencapaian program/ kegiatan yang dilaksanakan sampai Triwulan II pada tahun 2023 :

Tabel 2.2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN LUWU

TRIWULAN II (Dua) TAHUN 2024

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA		REALISASI (%)		TERTIMBANG %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			89,24	4,201,485,028	1,871,752,259	44,55	12,41	39,76	11,08		
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,61	28,714,560	2,962,954	10,32	12,86	0,06	0,08		
2.18.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,10	4,727,856	0	0,00	0,00	0,00	0	4,727,856	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,10	4,727,856	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	0,07	3,196,420	1,714,954	53,65	45,00	0,04	0.03	1,481,466	

		Dokumen RKA-SKPD										
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,07	3,196,420	1,714,954	53,65	45,00				
2.18.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,06	2,989,480	0	0,00	0,00	0,00	0	2,989,480	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,06	2,989,480	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,07	3,196,420	1,248,000	39,04	45,00	0,03	0.03	1,948,420	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,07	3,196,420	1,248,000	39,04	45,00				
2.18.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	0,05	2,240,040	0	0,00	0,00	0,00	0	2,240,040	

		SKPD										
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,05	2,240,040	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,09	4,107,888	0	0,00	0,00	0,00	0	4,107,888	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,09	4,107,888	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,18	8,256,456	0	0,00	0,00	0,00	0	8,256,456	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,18	8,256,456	0	0,00	0,00				
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			56,71	2,669,607,817	1,661,469,253	62,24	22,20	35,29	12,59		
2.18.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	396 Orang/bulan	55,11	2,594,328,565	1,630,929,253	62,87	60,00	34,64	33.06	963,399,312	

	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			55,11	2,594,328,565	1,630,929,253	62,87	60,00				
2.18.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1,41	66,240,000	30,540,000	46,11	51,00	0,65	0.72	35,700,000	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			1,41	66,240,000	30,540,000	46,11	51,00				
2.18.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,08	3,595,108	0	0,00	0,00	0,00	0	3,595,108	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,08	3,595,108	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0,05	2,215,340	0	0,00	0,00	0,00	0	2,215,340	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,05	2,215,340	0	0,00	0,00				

2.18.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	0,07	3,228,804	0	0,00	0,00	0,00	0	3,228,804	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,07	3,228,804	0	0,00	0,00				
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0,25	11,882,932	3,000,000	25,25	35,00	0,06	0,09		
2.18.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,25	11,882,932	3,000,000	25,25	35,00	0,06	0.09	8,882,932	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,25	11,882,932	3,000,000	25,25	35,00				
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,00	47,000,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.18.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1,00	47,000,000	0	0,00	0,00	0,00	0	47,000,000	
	Pajak Restoran - Belanja Operasi			0,21	10,000,000		0,00	0,00				

	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Modal			0,79	37,000,000	0	0,00	0,00				
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			7,35	346,231,995	36,208,570	10,46	5,43	0,77	0,40		
2.18.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0,18	8,293,500	0	0,00	0,00	0,00	0	8,293,500	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,18	8,293,500	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,37	17,345,545	0	0,00	0,00	0,00	0	17,345,545	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,37	17,345,545	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	0,23	10,934,950	0	0,00	0,00	0,00	0	10,934,950	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,23	10,934,950	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,25	11,650,000	0	0,00	0,00	0,00	0	11,650,000	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,25	11,650,000	0	0,00	0,00				

2.18.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,15	7,000,000	0	0,00	0,00	0,00	0	7,000,000	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,15	7,000,000	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0,21	10,000,000	0	0,00	0,00	0,00	0	10,000,000	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,21	10,000,000	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5,97	281,008,000	36,208,570	12,89	38,00	0,77	2.27	244,799,430	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			5,97	281,008,000	36,208,570	12,89	38,00				
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,61	122,869,800	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.18.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2,38	112,050,800	0	0,00	0,00	0,00	0	112,050,800	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Modal			2,38	112,050,800	0	0,00	0,00				

2.18.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,23	10,819,000	0	0,00	0,00	0,00	0	10,819,000	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Modal			0,23	10,819,000	0	0,00	0,00				
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17,11	805,288,438	149,087,685	18,51	18,67	3,17	3,19		
2.18.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,33	15,484,558	0	0,00	0,00	0,00	0	15,484,558	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,33	15,484,558	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9,97	469,603,880	69,087,685	14,71	30,00	1,47	2.99	400,516,195	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			9,97	469,603,880	69,087,685	14,71	30,00				
2.18.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6,80	320,200,000	80,000,000	24,98	26,00	1,70	1.77	240,200,000	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			6,80	320,200,000	80,000,000	24,98	26,00				

2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,61	169,889,486	19,023,797	11,20	10,00	0,40	0,36		
2.18.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	1,69	79,330,966	19,023,797	23,98	30,00	0,40	0.51	60,307,169	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			1,69	79,330,966	19,023,797	23,98	30,00				
2.18.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	0,21	9,685,000	0	0,00	0,00	0,00	0	9,685,000	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,21	9,685,000	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,72	80,873,520	0	0,00	0,00	0,00	0	80,873,520	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			1,72	80,873,520	0	0,00	0,00				
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			1,42	66,844,000	6,906,000	10,33	20,00	0,15	0,28		

2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1,42	66,844,000	6,906,000	10,33	20,00	0,15	0,28		
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1,42	66,844,000	6,906,000	10,33	20,00	0,15	0.28	59,938,000	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			1,42	66,844,000	6,906,000	10,33	20,00				
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			0,46	21,468,000	2,744,600	12,78	15,00	0,06	0,07		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0,46	21,468,000	2,744,600	12,78	15,00	0,06	0,07		
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,46	21,468,000	2,744,600	12,78	15,00	0,06	0.07	18,723,400	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,46	21,468,000	2,744,600	12,78	15,00				
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			0,55	26,092,000	15,307,400	58,67	57,00	0,33	0,32		

2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0,55	26,092,000	15,307,400	58,67	57,00	0,33	0,32		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	0,55	26,092,000	15,307,400	58,67	57,00	0,33	0.32	10,784,600	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,55	26,092,000	15,307,400	58,67	57,00				
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			8,33	391,937,100	6,777,000	1,73	7,44	0,14	0,62		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8,33	391,937,100	6,777,000	1,73	7,44	0,14	0,62		
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	4 Kegiatan Usaha.	1,25	58,793,000	2,862,000	4,87	6,30	0,06	0.08	55,931,000	

	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Belanja Operasi			1,25	58,793,000	2,862,000	4,87	6,30				
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1000 Pelaku Usaha	4,58	215,557,100	0	0,00	0,00	0,00	0	215,557,100	
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Belanja Operasi			4,58	215,557,100	0	0,00	0,00				
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	4 Kegiatan Usaha	2,50	117,587,000	3,915,000	3,33	16,02	0,08	0.4	113,672,000	
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Belanja Operasi			2,50	117,587,000	3,915,000	3,33	16,02				
JUMLAH				**100**	**4,707,826,128**	**1,903,487,259**			**40.43**	**42.61**		

Belopa, 16 Mei 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 197404111993021002

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan dokumen perizinan dilakukan dalam satu tempat dengan besaran biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu. Adapun jenis izin yang dilimpahkan sebagai berikut :

I. Persyaratan Ruang :
   a) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
   b) Persetujuan lingkungan;dan
   c) Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat laik fungsi.

II. Perizinan Berusaha sector :
   a) Kelautan dan Perikanan
   b) Pertanian
   c) Lingkungan Hidup dan Kehutanan
   d) Perindustrian
   e) Perdagangan
   f) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :
      1. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Milik Daerah
      2. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan Daerah
   g) Pariwisata dan
   h) Ketenagakerjaan
   i) Dinas Kesehatan, Obat dan Makanan :
      1. Surat izin praktek dokter (SIPD)
      2. Surat izin praktek apoteker (SIPA)
      3. Surat izin perawat tenaga teknis kefarmasian (SIKTTK)
      4. Surat izin praktek perawat (SIPP)
      5. Surat izin praktek terapis gigi dan mulut (SIPTGM)
      6. Surat izin praktek peñata anastesi (SIPPA)
      7. Surat izin kerja fisioterapis (SIKF)

8. Surat Izin Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi (SIPPTG)
9. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)
10. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)
11. Surat Izin Kerja Analisis Kesehatan (SIKAK)
12. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)
13. Surat izin kerja analisis laboratorium (SIKAL)
14. Surat izin praktek tenaga sanitarian (SIPTS)
15. Surat izin praktek radiologi/radiografer (SIPR)
16. Surat izin kerja (SIK) rekam medic dan informasi kesehatan
17. Surat Izin Praktek Tenaga Medik Transfusi Darah (SIPTTTD)
18. Surat Izin Praktek Elektromedis (SIPE)

j). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal (PAUD, SD dan SLTP)

k). Dinas Perdagangan
1. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
2. Izin Penyelenggaraan Reklame
3. Izin toko swalayan
4.. Izin pengelolaan pasar perbelanjaan
5. Tanda daftar gudang (TDG)

k). Badan Kesatuan bangsa dan Politik
1. Izin Penelitian

III. Izin penyelenggaraan Angkutan Umum :
1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dan barang
2) Kartu pengawasan

IV. Izin usaha perikanan budi daya (IUP-BD)

V. Izin usaha budi daya sarang burung wallet

VI. Izin usaha sarana dan budi daya peternakan :
1) Izin mendirikan rumah potong hewan
2) Izin usaha peternakan
3) Izin usaha pemotongan hewan
4) Izin usaha took obat hewan dan pakan ternak

VII. Izin lingkungan

VIII. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL)

IX. Izin pendirian/operasional satuan pendidikan formal :
1) Taman kanak-kanak (TK)

2) Sekolah dasar (SD)
3) Sekolah lanjutan tingkat pertama

X. Izin pendirian/operasional satuan pendidikan non formal (PNF) :
1) L K P
2) Kelompok belajar
3) PKBM
4) Majelis taklim
5) Satuan PNF sejenis

XI. Izin sarana dan prasarana kesehatan :
1) Izin klinik (SIK)
2) Izin apotek (SIA)
3) Izin toko obat (SITO)
4) Surat izin operasional rumah sakit (SIORS)
5) Surat izin operasional puskesmas (SIOP)
6) Surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT)

XII. Izin pengelolaan usaha bidang kesehatan :
1) Sertifikat izin produksi rumah tangga (SIPRT)
2) Rekomendasi depot air minum isi ulang

XIII. Non perizinan penanaman modal :
1) Fasilitasi bea masuk atas impor mesin
2) Fasilitasi bea masuk atas impor mesin barang dan bahan
3) Usaha untuk mendapatkan fasilitasi pajak penghasilan (PPh) badan
4) Insentif daerah
5) Layanan informasi dan layanan pengaduan

Target Capaian Kinerja Perangkat Daerah dapat diukur dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi, dengan menggunakan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan indikator mandiri yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Luwu, sehingga dapat diukur capaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Luwu

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			250.000.000.000	280.000.000.000	310.000.000.000	330.000.000.000	357.626.386.640	336.613.519.168	420.000.000.000	453.000.000.000	
2	Lama Proses Perizinan			1-15 hari	1-10 hari	1-7 hari	1-2 hari	1-5 hari	1-3 hari	2 hari	1 hari	
3	Jumlah Izin yang diselesaikan berdasarkan SOP:											
1	Izin Pemanfaatan Lahan Milik Daerah			15	5	6	7	12	4	5	6	
2	Izin Usaha Kepariwisataan			70	16	17	18	48	15	16	17	
3	Izin Penyelenggaraan Reklame			5	2	3	4	3	1	2	3	
4	Izin Usaha Jasa Konstruksi IUJK			65	20	21	23	63	49	20	21	
5	Izin Penelitian			400	403	423	424	399	384	403	404	
6	Izin Usaha Toko Modern			5	0	0	0	2	0	0	0	
7	Izin Pendirian/ operasional Satuan Pendidikan Formal/Non Formal			10	21	23	23	8	20	21	22	
8	Izin Lingkungan			30	17	18	19	17	16	17	18	
10	SIUP			1000	1500	1500	1000	756	555	500	500	
12	SIUI			100	150	100	100	75	88	100	150	
14	TDG			20	30	50	10	10	-	5	10	
15	Izin Mendirikan Bangunan			600	600	650	650	533	469	500	550	
16	Izin Trayek			0	0	200	200	0	106	200	250	
17	IOK			0	4	5	6	0	3	4	5	
18	IOP			0	9	10	11	0	8	9	10	
19	SIPA			25	30	31	32	24	28	29	30	
20	SIA			23	20	25	25	23	16	17	18	
21	SITTK			0	0	0	0	0	0	0	0	
22	SIPD			95	96	106	108	91	97	101	102	

23	SIPP			150	151	158	165	145	143	150	157	
24	SIPB			100	210	221	222	100	200	210	211	
25	SIKPA			0	0	0	0	0	0	0	0	
26	SITO			2	10	4	5	2	2	3	4	
27	SPPIRT			16	52	54	55	16	49	51	52	
28	SIPTTK			29	20	21	23	29	19	20	21	
29	SIKRMIK			1	3	4	5	1	2	3	4	
30	SIKTLM			0	0	0	0	0	0	0	0	
31	SIORS			0	0	0	0	0	0	0	0	
32	SIPATLM			0	15	16	17	0	14	15	16	
33	SIPDG			0	0	0	0	0	0	0	0	
34	SIPTGM			2	6	7	8	2	5	6	7	
35	SIPPA			2	0	0	0	0	0	0	0	
36	SIPTGZ			0	17	18	19	0	4	5	6	
37	SIPPG			6	5	6	7	6	4	5	6	
38	SIDAMIU			2	0	0	0	2	0	0	0	
39	SIKTS			1	0	0	0	0	0	0	0	
40	SIPTS			16	10	11	12	16	9	10	11	
41	SIPF			5	4	5	6	5	3	4	5	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)											

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja kinerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu di tahun 2021 meliputi investasi berskala Nasional (PMA/PMDN) dengan realisasi nilai investasi Rp. 336.613.519.168,- sedang di tahun 2022 Triwulan II jumlah realisasi investasi PMA/PMDN dengan nilai investasi Rp. 720.225.545.000,-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010).

Berdasarkan pada uraian permasalahan pada Bab 2.3, maka yang menjadi isu startegis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, tahun 2019-2025 adalah :

1. *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Luwu.*

   Pemerintah Kabupaten Luwu harus memastikan perekonomian terus bertumbuh secara cepat. Posisi Kabupaten Luwu yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Sulawesi Selatan menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain, namun hal tersebut tidaklah cukup. Kemudahan dalam berinvestasi, mendapatkan izin, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi pra syarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku hal ini membuat Kabupaten Luwu tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Terkait kemudahan berbisnis,

tertinggal dari Kabupaten lain seperti Kota Palopo, Kualitas Infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian. Kabupaten Luwu memiliki luas 46.000 KM persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Kabupaten Luwu terdapat 2 Pelabuhan Laut dan 1 Bandara, namun karena kualitas yang kurang baik di daerah lain, satu- satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kecamatan Belopa, Kecamatan Bua. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Kabupaten Luwu sampai saat ini masih menjadi Kabupaten yang rawan terdampak bencana banjir.

2. *Pemerataan Perdapatan bagi warga Kabupaten Luwu.*

   Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pendapatan per kapitawarga Kabupaten Luwu saat ini memang sudah meningkat mencapai 36 juta per tahunnya , tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Kabupaten Luwu. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Kabupaten Luwu menjadi Kabupaten yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Sulawesi Selatan (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Kabupaten Luwu masih cukup tinggi sebesar 14,35 % pada tahun 2016, diatas target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Luwu pada akhir masa periode 5 RPJPD, yaitu 6%.

3. *Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.*

   Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Kabupaten Luwu, seperti Sulawesi Selatan pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Kabupaten Luwu pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dati total warga Kabupaten Luwu. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas

sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Kabupaten Luwu saat ini berada di angka 69,50 pada tahun 2018 yang

artinya Kabupaten Luwu berada diperingkat 14 dibandingkan Kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Luwu adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Kabupaten Luwu hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas.

4. *Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berlimpah.*

Kabupaten Luwu diberkahi oleh sumber daya alam yang berlimpah. Kabupaten Luwu sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan, karena sejak dulu hasil pangan dari petani kabupaten Luwu sudah berlimpah karena banyaknya sawah dan iklim yang mendukung. Kabupaten Luwu juga memiliki destinasi wisata alam yang sangat indah, seperti Sejarah, budaya, religi Gua Liang Andulan di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara, dan Walenrang Barat dan Air Terjun Sarassa di Kecamatan latimojong, dan Wisata Lapandoso di Kecamatan. Namun, sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten Luwu belum termanfaatkan dengan baik. Hasil sumber daya alam dikirim dalam kondisi tidak diolah, padahal ada potensi pengolahan yang bisa meningkatkan nilai tambah dan menambah pendapatan petani di Kabupaten Luwu. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah menjaga kelestarian alam, karena lebih dari 50% wilayah Kabupaten Luwu adalah kawasan hutan dengan berbagai peruntukan. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan sebagaimana tabel tersebut di bawah

Tabel 2.3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum terciptanya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Belum optimalnya realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Luwu 2. Belum optimalnya perusahan PMA dan PMDN dalam menyampaikan LKPM	1. Belum optimalnya promosi investasi di Kab. Luwu 2. Belum optimalnya pembinaan 3. Belum terciptanya harmonisasi antara peraturan daerah dengan regulasi/kebijakan terbaru dari pusat terkait penanamanmodal 4. Potensi dan peluang investasi di Kab. Luwu yang belum siap untuk ditawarkan 5. Belum terfasilitasinya investor yang akan berinvestasi di Kab. Luwu
Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Ketepatan waktu penerbitan perizinan yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan 2. Terbitnya PP 24 tahun 2018 terkait OSS 3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan	1. Jadwal visitasi lapangan sangat tergantung dengan jadwal tim teknis 2. Belum terbitnya semua NSPK dari K/L yang mengacu kepada OSS 3. Belum optimalnya monitoring proses penerbitan izin 4. Sarana mobilisasi untuk visitasi lapangan terbatas

2.3.2 Tantangan dan Peluang

Lingkungan Internal dan eksternal merupakan variabel yang mempengaruhi strategi lembaga dalam menghadapi tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan dicapai. Lingkungan Internal

yang berpengaruh umumnya masih dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu, sehingga dibutuhkan analisis untuk meciptakan strategi dalam mengatasi tantangan yang ada.

1. Analisa Lingkungan Eksternal

   a. Peluang (Opportunities)

      1) Adanya peluang peningkatan kemampuan SDM Aparatur secara teknis dan fungsional melalui diklat;
      2) Adanya kebijakan dan peraturan penanaman modal yang sangat mendukung peningkatan investasi;
      3) Adanya bimbingan persiapan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik;
      4) Terjalinnya kerjasama dan komitmen yg terpadu antara komponen yang terkait dengan penanaman modal;
      5) Terdapatnya potensi sumber daya daerah Kabupaten Luwu yang dapat ditawarkan kepada investor;
      6) Terdapat potensi subjek dan objek perizinan yang belum memiliki izin dalam lingkungan masyarakat;
      7) Animo masyarakat terhadap peningkatan pelayanan perizinan.

   b. Tantangan (Threats)

      1) Kurangnya pemahaman dan dukungan Instansi/Unit Kerja teknis yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan;
      2) Adanya kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung dan memberatkan perkembangan investasi;
      3) Kondisi stabilitas nasional yang tidak menentu;
      4) Masih kurangnya daya dukung infrastruktur dalam mendukunginvestasi;
      5) Keberadaan Kabupaten/Kota yang mengeluarkan kebijakan proinvestasi;

2. Analisa Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1) Tersedianya personel DPMPTSP yang mempunyai motivasi dan etos kerja yang tinggi;

2) Adanya peluang Potensi Investasi;

3) Adanya Hasil Kajian Pengembangan Investasi;

4) Adanya pelimpahan kewenangan di bidang pelayanan perizinan.

b. Kelemahan (Weakness)

1) Kurangnya jumlah personil aparatur DPMPTSP;

2) Belum maksimalnya sosialisasi dan promosi peluang potensi investasi di Kab. Luwu kepada calon investor;

3) Belum adanya kebijakan insentif dibidang penanaman modal yang menjadi daya tarik investor;

4) Belum tersedianya hasil/studi kelayakan usaha (Pra FS/FS)komoditi unggulan;

5) Luasnya wilayah kerja Kabupaten Luwu yang tidak dapat dijangkau dalam waktu relatif singkat;

6) Belum optimalnya publikasi terhadap pelayanan perizinan;

7) Belum tersedianya data potensi subjek dan objek perizinan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk program/kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal Perangkat Daerah, akan tetapi kebutuhan dana program/kegiatan akan didanai dengan APBD Kabupaten Luwu. Dapat diperlihatkan pada tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021 :

Tabel 2.4 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Luwu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**Rp 5,018,557,945**		**Rp 4,982,078,074**	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Luwu**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**Rp 4,370,646,867**	**100%**	**Rp 3,903,025,264**	
01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Kab. Luwu***	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	***100%***	***Rp 21,536,900***	***100%***	***Rp 35,498,470***	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang Disusun	2 Dokumen	Rp 2,457,050	2 Dokumen	Rp 3,999,660	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 2,599,240	1 Dokumen	Rp 3,999,180	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokuen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 2,813,500	1 Dokumen	Rp 3,999,260	

1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 3,037,700	1 Dokumen	Rp 4,499,760	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 3,442,980	1 Dokumen	Rp 4,499,760	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 3,419,540	1 Dokumen	Rp 6,000,200	
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD yang disusun (LAKIP)	4 Laporan	Rp 3,766,890	4 Laporan	Rp 8,500,650	
02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Kab. Luwu***	**Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun**	***OB***	***Rp 2,566,979,302***	***OB***	***Rp 2,636,508,100***	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	24 OB	Rp 2,466,967,352	24 OB	Rp 2,540,000,000	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	32 OB	Rp 83,400,000	32 OB	Rp 84,000,000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	Rp 2,987,390	1 Dokumen	Rp 5,500,100	
2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Periksaan	Kab. Luwu	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1 Dokumen	Rp 2,937,900	1 Dokumen	Rp 3,000,500	

2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	4 Laporan	Rp 10,686,660	4 Laporan	Rp 4,007,500	
03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Kab. Luwu***	**Laporan hasil pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah**	***12 Laporan***	***Rp 11,657,320***	***12 Laporan***	***Rp 13,500,800***	
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu	Laporan hasil pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	Rp 11,657,320	1 Laporan	Rp 13,500,800	
04.	**Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Kab. Luwu***	**Presentase ASN dengan Predikat Kinerja Baik**	***100%***	***Rp 85,500,000***	***100%***	***Rp 84,500,000***	
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Kab. Luwu	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Laporan	Rp 33,000,000	1 Laporan	Rp 32,000,000	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Luwu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Rp 52,500,000	1 Orang	Rp 52,500,000	
05.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Kab. Luwu***	**Jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	***Jenis***	***Rp 291,181,478***	***Jenis***	***Rp 206,388,500***	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Paket	Rp 7,659,898	20 Paket	Rp 4,000,000	
5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Luwu	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 32,217,565	1 Paket	Rp 2,800,000	

5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	5 Jenis	Rp 7,839,735	5 Jenis	Rp 6,588,500	
5.4	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggadaan	Kab. Luwu	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	Rp 14,214,280	1 Paket	Rp 19,500,000	
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	1 Paket	Rp 15,500,000	1 Paket	Rp 11,000,000	
5.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Luwu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	10 Kali	Rp 10,000,000	10 Kali	Rp 12,500,000	
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu	Jumalah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1 Paket	Rp 203,750,000	1 Paket	Rp 150,000,000	
06.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Kab. Luwu***	**Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik**	***100***	***Rp 261,681,233***	***100***	***Rp 82,500,000***	
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 261,681,233	1 Paket	Rp 10,000,000	
6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 Paket	Rp -	1 Paket	Rp 72,500,000	
07.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Kab. Luwu***	**Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah**	***100***	***Rp 968,505,448***	***100***	***Rp 773,650,962***	

7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	OB	Rp 11,493,854	OB	Rp 12,600,240	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	Rp 609,011,594	12 Bulan	Rp 430,550,722	
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	Rp 348,000,000	12 bulan	Rp 330,500,000	
08.	**'Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Kab. Luwu***	**'Presentase Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	***100***	***Rp 163,605,186***	***100***	***Rp 70,478,432***	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Luwu	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit	Rp 114,806,006	10 Unit	Rp 65,478,432	
8.2	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit/Set	Rp 48,799,180	Unit/Set	Rp 5,000,000	
II	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Kab. Luwu**	**Persentase Kenaiakan Nilai Realisasi PMDN**	**100%**	**Rp 84,889,134**	**100%**	**Rp 227,750,000**	
01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	100%	***Rp 84,889,134***	100%	***Rp 170,500,000***	

1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Luwu	Jumlah Perturan Daerah/Provinsi dalam pemeberian Fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	Rp 84,889,134	1 dokumen	Rp 170,500,000	
02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan Peta Potensi Investasi Kabupaten	100%	***Rp -***	100%	***Rp 57,250,000***	
2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp 57,250,000	
III	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Kab. Luwu**	**Nilai Investasi berskala nasional**	**100%**	**Rp 88,875,152**	**100%**	**Rp 128,325,670**	
01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	***Rp 88,875,152***	100%	***Rp 128,325,670***	
1.1	Penyusunan Strategi Promsi Penanaman Modal	Kab. Luwu	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp 34,966,150	
1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	1 dokumen	Rp 88,875,152	1 dokumen	Rp 93,359,520	
IV	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Kab. Luwu**	**Lama Proses Perizinan Penanaman Modal**	**100%**	**Rp 83,431,920**	**100%**	**Rp 148,529,140**	
01.	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Kab. Luwu	Proses Perizinan Penanaman Modal	100%	***Rp 83,431,920***	100%	***Rp 148,529,140***	

1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Luwu	Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disediakan	2 sistem	Rp 83,431,920	2 sistem	Rp 139,929,140	
1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Luwu	Jumlah kegiatan uasaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	100 pelaku usaha	Rp -	100 pelaku usaha	Rp 5,600,000	
1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Luwu	Jumlah Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan yang Disediakan	2 layanan	Rp -	2 layanan	Rp 3,000,000	
V	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Kab. Luwu**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100%**	**Rp 390,714,872**	**100%**	**Rp 564,448,000**	
01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	100%	***Rp 390,714,872***	100%	***Rp 564,448,000***	
1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Luwu	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1 Kegiatan Usaha	Rp 57,771,975	2 Kegiatan Usaha	Rp 20,209,900	

1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Luwu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	6 laporan	Rp 215,356,383	6 laporan	Rp 400,000,000	DAK NON FISIK
1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Luwu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	4 Kegiatan Usaha	Rp 117,586,514	4 laporan	Rp 144,238,100	DAK NON FISIK
VI	**Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Kab. Luwu**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100%**	**Rp -**	**100%**	**Rp 10,000,000**	
01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu		100%	***Rp*** -	100%	***Rp 10,000,000***	
1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi secara Elecktronik	Kab. Luwu	Sistem yang disediakan untuk Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi secara Elecktronik	4 laporan	Rp -	4 laporan	Rp 10,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Setelah pengimplementasian Sistem Informasi Perencanaan Daerah, Pemerintah di Kabupaten/Kota, anggota dewan dan masyarkat umum dapat secara langsung mengusulakan usulan program dan kegiatan untuk perangkat daerah. Hasil usulan tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota terdapat beberapa usulan langsung kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Luwu. Sebagian besar usulan terkait dukungan pembangunan terhadap pembangunan Mall Pelayanan Publik yang sementara dalam proses Pembangunan dan Re0ncana Grand Opening pada Tahun 2025.

BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai tahun keempat dari pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu yang sebelumnya bernama Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal periode 2019- 2025, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia , kondisi ini sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program atau kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, visi organisasi dan terangkum dalam uraian sebagai berikut :

- Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan;
- Peningkatan kinerja dan mutu layanan disemua aspek layanan " public service ";
- Tertib administrasi pemerintahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu berdasarkan kreteria yang mudah dipahami. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu ditetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Meningkatkan Nilai Investasi

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Renja). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai. Selanjutnya masing-masing sasaran ditetapkan kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Penjabaran singkat mengenai sasaran dan kegiatan pada masing-masing tujuan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Realisasi Investasi

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator kinerja serta target kinerja dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja pada tahun				
				2020	2021	2022	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip	CC	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	81,20%	82,12%	83,11%	83,35 %
2.	Meningkatkan Nilai investasi	Meningkatnya Realisasi investasi	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Miliar Rp)	280	310	420	453	470
			Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (Perusahaan)	357	336	720	-	-

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Program

Program pelaksanaan penanaman modal dan perizinan menyesuaikan dengan program-program untuk mencapai sasaran-sasaran pada Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas.

   Rencana program prioritas yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

   a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
   b. Program Promosi Penanaman Modal.
   c. Program Pelayanan Penanaman Modal.
   d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

2. Program Penunjang.

   Sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu untuk tahun 2025 juga didukung dengan program penunjang sebagai berikut :

   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3.3.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang memiliki dimensi waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu yang berdimensi lima tahunan. Kegiatan-kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan Skala Prioritas.
   a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan kegiatan sebagai berikut:
      1) Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal.
   b. Program Promosi Penanaman Modal dengan kegiatan sebagai berikut:
      1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota
   c. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan kegiatan sebagai berikut :
      1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman

Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan sebagai berikut :
   1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota

2. Kegiatan yang ada pada Program Penunjang.
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan sebagai berikut :
      1) Perencanaan, Penganggaran danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
      3) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
      4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
      5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai DPMPTSP tahun 2025. Target kinerja mempersentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan dalam organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

4.1. Sasaran dan Program Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kab. Luwu merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra maupun kegiatan-kegiatan spesifik Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Dalam tahun anggaran 2025 program kegiatan yang dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis.

4.2. Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran dan kegiatan tahunan ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, Pemerintah Daerah atau Instansi/ Lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut disajikan dalam lampiran rencana kerja dan pendanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu tahun 2025.

Tabel 4.1 **RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**18**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**		**100%**	**4,467,244,362**				**3,898,790,845**
2	**18**	**1**	**2**		*Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu*		*100%*	*25,860,431*				*35,308,867*
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Kab. Luwu	2 dokumen	3,436,329	DAU		2 dokumen	4,013,526
2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu	1 dokumen	3,436,329	DAU		1 dokumen	3,919,498
2	18	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Luwu	1 dokumen	3,436,329	DAU		1 dokumen	3,907,486
2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu	1 dokumen	3,432,360	DAU		1 dokumen	4,193,486
2	18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Kab. Luwu	1 dokumen	3,924,478	DAU		1 dokumen	4,306,236

2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Luwu	1 laporan	4,151,978	DAU		1 Laporan	6,279,020
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja PD	Kab. Luwu	4 laporan	4,042,628	DAU		4 laporan	8,689,615
2	**18**	**1**	**2**		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu***		***100%***	***2,866,540,009***				***2,893,492,360***
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disedikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	Kab. Luwu	25 OB	2,729,849,558	DAU		396 OB	2,789,004,900
2	18	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu	32 OB	116,760,000	DAU		112 OB	91,608,000
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	1 laporan	5,514,165	DAU		1 Laporan	5,852,110
2	18	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemerikasaan	Bahan Tanggapan dan Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	Kab. Luwu	1 laporan	3,840,780	DAU		1 Laporan	2,849,550
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Luwu	4 laporan	10,575,506	DAU		4 laporan	4,177,800
2	**18**	**1**	**2**		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase penyelesaian dokumen administrasi barang milik Daerah pada perangkat Daerah yang disediakan***		***100%***	***12,743,415***				**14,311,880**
2	18	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Administrasi barang milik Daerah pada perangkat Daerah yang disediakan	Kab. Luwu	1 laporan	12,743,415	DAU		1 kegiatan	14,311,880
2	**18**	**1**	**2.1**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase penyelesaian Pemenuhan Administrasi Perkantoran***		***100%***	***256,252,252***				**172,995,405**

2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Luwu	20 paket	4,939,811	DAU		20 paket	4,244,350
2	18	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah tangga yang disediakan	Kab. Luwu	1 paket	27,225,925	DAU		1 paket	2,733,060
2	18	1	2.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Luwu	5 jenis	8,046,366	DAU		5 jenis	6,979,225
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	Kab. Luwu	1 paket	6,304,150	DAU		1 paket	20,870,520
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Luwu	2 jenis	9,500,000	DAU		2 jenis	11,550,000
2	18	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kab. Luwu	1 laporan	5,000,000	DAU		1 Laporan	12,949,750
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Luwu	1 Paket	195,236,000	DAU		1 Laporan	113,668,500
2	**18**	**1**	**2.7**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik***		***100%***	***128,550,138***				**-**
2	18	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Luwu	1 Paket	128,550,138	DAU		1 Paket	Rp 150,000,000
2	**18**	**1**	**2.1**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah***		***100%***	***984,038,396***				**713,296,058**
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Luwu	1 laporan	9,347,189	DAU		1 Laporan	13,320,164
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Luwu	1 laporan	563,091,207	DAU		1 Laporan	343,135,894
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Luwu	12 bulan	411,600,000	DAU		12 bulan	356,840,000
2	**18**	**1**	**2.1**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Presentase Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***		**100%**	***193,259,721***	**DAU**			**69,386,275**

2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Luwu	10 unit	93,298,701	DAU		10 unit	69,386,275
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Luwu	10 unit	99,961,020	DAU		10 unit	69,386,275
2	**18**	**2**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase Kenaiakan Nilai Realisasi PMDN**		**100%**	**50,632,655**			**100%**	**160,233,700**
2	**18**	**2**	**2**		*Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten*	*Cakupan Penyelenggaraan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten*		*100%*	*50,632,655*				*160,233,700*
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perturan Daerah/Provinsi dalam pemeberian Fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kab. Luwu	1 dokumen	50,632,655	DAU		1 dokumen	160,233,700
2	**18**	**2**	**2**		*Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota*	*Cakupan penyelenggaraan Peta Potensi Investasi Kabupaten*		*50%*	-				-
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	Kab. Luwu	1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	-
2	**18**	**3**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Nilai Investasi berskala nasional**			**61,550,305**				**54,929,600**
2	**18**	**3**	**2**		*Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota*	*Cakupan penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota*		*100%*	*61,550,305*	DAU			54,929,600
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promsi Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	Kab. Luwu	1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	-
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Kab. Luwu	1 dokumen	61,550,305	DAU		1 dokumen	54,929,600
2	**18**	**4**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Lama Proses Perizinan Penanaman Modal**		**1-15 investor**	**58,553,476**				**49,394,400**
2	**18**	**4**	**2**		*Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten*	*Proses Perizinan Penanaman Modal*		*100%*	*58,553,476*	DAU			*49,394,400*

2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disediakan	Kab. Luwu	2 sistem	58,553,476	DAU		2 sistem	49,394,400
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan uasaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Luwu	100 pelaku usaha	-	DAU		100 pelaku usaha	-
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan yang Disediakan	Kab. Luwu	2 layanan	-	DAU		2 layanan	-
2	**18**	**5**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**100%**	**51,500,778**				**550,316,800**
2	**18**	**5**	**2**		*Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten*	*Cakupan penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten*		*100%*	*51,500,778*	DAU - DAK			*550,316,800*
2	18	5	2.01	1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Luwu	1 Kegiatan	0	DAU		16 laporan	10,876,800
2	18	5	2.01	2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemabinaan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Luwu	6 laporan	0	DAK		16 laporan	421,741,100
2	18	5	2.01	3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Luwu	4 Kegiatan Usaha	51,500,778	DAU		16 laporan	117,698,900
								TOTAL	**4,689,481,576**				**4,863,665,345**

BAB. V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Non Perizinan guna meningkatkan dan mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal secara cepat, mudah, transparan, tepat waktu. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam Program Kerja, kegiatan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan.

Perencanaan yang realitas dengan berdasarkan analisis yang mendalam guna mewujudkan Luwu Sejahtera melalui bukti nyata yaitu pelayanan cepat, mudah, transparan, tepat waktu, dan kepastian biaya dan waktu serta bebas KKN. Pelayanan prima yang sudah ditunggu dan sangat diharapkan oleh masyarakat harus dibuktikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak yang terkait. Dengan keyakinan yang kuat bahwa perencanaan dapat direalisasikan dengan baik, sehingga output dan dampak yang diharapkan dapat diwujudkan. Untuk itu upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan pengembangan sarana sesuai tuntutan tugas dan sesuai harapan masyarakat merupakan suatau keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda mulai sekarang, mulai dari diri sendiri dan mulai dari yang kecil. Sehingga niat baik untuk mensejahterakan masyarakat dan aparatnya diridhoi dan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang Program Rencana kerja ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya, atas perhatian dan bantuan berbagai pihak disampaikan terima kasih.

Belopa, 16 Mei 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU,

Drs. Muhammad Rudi, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197404111993021002

RENCANA KERJA
(RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LUWU
TAHUN 2025

Kata Pengantar

Segala puji yang tak teruji dan syukur yang tak terukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Tahun 2025 dapat tersusun.

Renja merupakan rencana satu tahun ke depan yang di susun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan serta analisis dari kegiatan tahun sebelumnya. Dengan disusunnya Renja Tahun 2025 ini, maka BKPSDM Kab. Luwu telah mempunyai rencana rinci yang telah dijabarkan dengan skala prioritas berdasarkan tugas dan fungsi dari BKPSDM serta sesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2025-2026.

Semoga Renja BKPSDM Kab. Luwu dapat memberi manfaat yang semaksimal mungkin dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu.Selanjutnya Renja BKPSDM Kab. Luwu diharapkan menjadi komitmen bersama dan skenario pembelajaran rencana tahunan ke depan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja BKPSDM Kab. Luwu Tahun 2025 ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu atas segala kekurangannya kami menyampaikan permohonan maaf. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerja sama dengan baik dalam penyusunan Renja ini.Semoga dapat menjadi manfaat.

Belopa, 30 September 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Luwu

H.A.MUHAMMAD AHKAM BASMIN,S.STP,MM
Pangkat : Pembina TK.I
NIP : 19870919 200602 1 001

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i-4
Daftar Isi	i-5
Daftar Tabel	i-6
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-3
1.3 Maksud dan Tujuan	1-5
1.4 Sistematika Penulisan	1-6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	2-1
2.1 Evalusasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024	2-1
2.2 Analisis kinerja Pelayanan	2-4
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	2.7
2.4 Revie terhadap Rancangan Awal RKPD	2.8
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	2.9
BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN	3-1
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	3-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kab.Luwu	3.2
3.3 Program dan Kegiatan	3.3
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	4.1
BAB V PENUTUP	5.1

Daftar Tabel

			Halaman
-	Tabel	Evaluasi renja triwulan III tahun 2024	2-3
-	Tabel	Bagan Organisasi	2-5
-	Tabel	Usulan Program dan Kegiatan pemangku Kepentingan	2-9
-	Tabel	Tujuan,Sasaran,dan Indikator Sasaran	3-2
-	Tabel	Rumusan rencana Kegiatan dan Sub.Kegiatan	4-1

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.Setiap daerah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan pembuatan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu kepada RKPD.

Renja OPD dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diartikan sebagai **"Dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat"**.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perlu menetapkan target Kinerja sehingga pada akhir tahun anggaran dapat diketahui pencapaian kinerjanya, hal ini dimaksudkan agar dapat lebih mudah mengetahui keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Rencana Kerja BKPSDM aten Luwu Tahun 2025 merupakan penggabungan antara Badan Kepegawaian dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi satu

organisasi perangkat daerah yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

Dokumen perencanaan tahunan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Luwu yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya dan dilengkapi dengan kerangka anggaran dan regulasi serta indikasi pembiayaan 2 (dua) tahun ke depan yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. BKPSDM Kabupaten Luwu sebagai OPD yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian dan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian, maka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka di bidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang sangat signifikan seperti upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bersih (*clean governance*). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan SDM. Peningkatan SDM dan profesionalisme ASN terus ditingkatkan guna mewujudkan ASN yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Straegis, yang dalam penyusunannya mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD. Rencana Kerja dan Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD. Rencana Kerja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Forum Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Sulawesi Selatan.

1. 2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tantang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaa,pengendalian,dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,rencana pembangunan jangka menengah daerah,dan rencana kerja pemerintah daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Luwu tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024(Lembaran Daerah kab.Luwu tahun 2019);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 154 tahun 2016 tentang tugas dan Fungsi BKPSDM Kab.Luwu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu.
13. Peraturan Bupati Luwu Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Kedudukan,Jabatan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

1. 3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah merupakan :

1. Pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Dasar pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah :

1. Merealisasikan tugas pokok dan fungsi yang ada pada BKPSDM sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra OPD,
3. Bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya

1. 4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan renja tahun 2025 perangkat daerah.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja tahun 2025 perangkat daerah,proses penyusunan renja tahun 2025 perangkat daerah,keterkaitan antara renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD,renstra perangkat daerah dengan renja K/L dan renja Provinsi/kabupaten/kota,serta tindak lanjut dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang,peraturan pemerintah,peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat tentang penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2025 perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Tahun 2025 perangkat daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan III Perangkat daerah Tahun 2024

2.2 Analisis Pelayanan perangkat daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Luwu

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN,SASARAN,KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN

3.1 Telaanhan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Kab.Luwu

3.3 Program dan Kegiatan

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah sampai Triwulan III Tahun 2024

Secara umum semua program dan kegiatan rutin dan urusan wajib yang telah direncanakan oleh BKPSDM Kabupaten Luwu di Tahun Anggaran 2024 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan walaupun masih ada sebagian kegiatan yang belum mencapai target yang diharapkan.Dari 3 Program dan 11 Kegiatan serta 42 Sub.Kegiatan sebagai berikut: :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. **Perencanaan,penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;**
   a. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah,
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,
   c. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD,
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian dan iktisar realisasi Kinerja SKPD
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;**
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengajuan/verifikasi Keuangan SKPD,
   c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD,
3. **Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**
   a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah;**
   a. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
   b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,

c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
d. Penyediaan bahan / material
e. Fasilitasi kunjungan tamu
f. Penyelenggraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah

a. Penyediaan jasa surat menyurat,
b. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik,
c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor,

6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas opersional atau Lapangan
b. Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya

B. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

7. Pengadaan,pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN

a. Perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN
b. Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
c. Koordinasi pelaksanaan administrasi Pemberhentian
d. Fasilitasi lembaga profesi ASN
e. Pengelolaan system informasi kepegawaian
f. Evaluasi data,informasi dan system informasi kepegawaian

8. Mutasi dan Promosi ASN

a. Pengelolaan mutasi ASN
b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

9. Pengembangan Kompetensi ASN

a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
b. Pengelolaan assessment Center
c. Pengelolaan administrasi Diklat dan sertifikasi ASN
d. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
e. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan Diklat
f. Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN

g. Penyusunan administrasi Diklat dan Setifikasi jabatan Fungsional
h. Fasilitasi Pengembangan karier dalam jabatan Fungsional

10. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

a. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
b. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN

C. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

11. Sertifikasi,kelembagaan,pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi,jabatan fungsional,kepemimpinan dan prajabatan.

Adapun Laporan Evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2024 dapat di Lihat Pada Tabel Berikut :

LAPORAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK DAN KEUANGAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2024 KEADAAN TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER)

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI (%)		TERTINGGAL %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			57,37	5.210.388.855	3.228.629.948	61,63	41,71	35,36	23,93		
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,47	134.242.937	38.883.750	28,97	32,14	0,43	0,47		
5.03.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,40	36.358.239	15.519.500	42,68	50,00	0,17	0,2	20.838.739	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,40	36.358.239	15.519.500	42,68	50,00				
5.03.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,20	18.101.690	8.087.550	44,68	50,00	0,09	0,1	10.014.140	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,20	18.101.690	8.087.550	44,68	50,00				
5.03.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,25	22.840.478	0	0,00	0,00	0,00	0	22.840.478	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,25	22.840.478		0,00	0,00				
5.03.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,20	18.056.887	2.913.250	16,13	30,00	0,03	0,06	15.143.637	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,20	18.056.887	2.913.250	16,13	30,00				
5.03.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,13	11.881.421	0	0,00	0,00	0,00	0	11.881.421	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,13	11.881.421		0,00	0,00				
5.03.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,13	12.243.624	1.480.050	12,09	30,00	0,02	0,04	10.763.574	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,13	12.243.624	1.480.050	12,09	30,00				
5.03.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,16	14.760.598	10.883.400	73,73	65,00	0,12	0,11	3.877.198	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,16	14.760.598	10.883.400	73,73	65,00				
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40,14	3.665.734.704	2.526.578.492	68,92	50,00	27,67	20,07		
5.03.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	36,87	3.366.900.110	2.433.548.592	72,28	75,00	26,65	27,65	933.351.518	

	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			36,87	3.366.900.110	2.433.548.592	72,28	75,00				
5.03.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2,95	269.460.000	90.070.000	33,43	65,00	0,99	1,92	179.390.000	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			2,95	269.460.000	90.070.000	33,43	65,00				
5.03.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	0,15	14.085.264	1.687.450	11,98	25,00	0,02	0,04	12.397.814	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,15	14.085.264	1.687.450	11,98	25,00				
5.03.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	0,17	15.289.330	1.272.450	8,32	35,00	0,01	0,06	14.016.880	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,17	15.289.330	1.272.450	8,32	35,00				
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0,09	8.400.000	2.800.000	33,33	50,00	0,03	0,05		
5.03.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,09	8.400.000	2.800.000	33,33	50,00	0,03	0,05	5.600.000	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,09	8.400.000	2.800.000	33,33	50,00				
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,27	25.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.03.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0,27	25.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0	25.000.000	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,27	25.000.000		0,00	0,00				
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			8,28	756.420.764	309.832.234	40,96	46,67	3,39	3,87		
5.03.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,09	7.995.644	1.996.000	24,96	30,00	0,02	0,03	5.999.644	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,09	7.995.644	1.996.000	24,96	30,00				
5.03.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	0,24	22.280.700	5.941.050	26,66	30,00	0,07	0,07	16.339.650	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,24	22.280.700	5.941.050	26,66	30,00				
5.03.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	43 Dokumen	3,66	334.000.000	105.765.000	31,67	60,00	1,16	2,19	228.235.000	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			3,66	334.000.000	105.765.000	31,67	60,00				
5.03.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	0,40	36.080.420	10.339.625	28,66	40,00	0,11	0,16	25.740.795	

	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,40	36.080.420	10.339.625	28,66	40,00				
5.03.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,24	22.000.000	5.400.000	24,55	35,00	0,06	0,08	16.600.000	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,24	22.000.000	5.400.000	24,55	35,00				
5.03.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	3,66	334.064.000	180.390.559	54,00	85,00	1,98	3,11	153.673.441	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			3,66	334.064.000	180.390.559	54,00	85,00				
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6,04	551.379.000	321.900.142	58,38	65,00	3,53	3,92		
5.03.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,95	86.400.000	57.600.000	66,67	75,00	0,63	0,71	28.800.000	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,95	86.400.000	57.600.000	66,67	75,00				
5.03.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,64	58.179.000	12.900.142	22,17	55,00	0,14	0,35	45.278.858	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,64	58.179.000	12.900.142	22,17	55,00				
5.03.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,45	406.800.000	251.400.000	61,80	65,00	2,75	2,9	155.400.000	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			4,45	406.800.000	251.400.000	61,80	65,00				
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,06	97.211.450	28.635.330	29,46	25,50	0,31	0,27		
5.03.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	0,87	79.826.450	28.635.330	35,87	51,00	0,31	0,45	51.191.120	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,87	79.826.450	28.635.330	35,87	51,00				
5.03.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	0,19	17.385.000	0	0,00	0,00	0,00	0	17.385.000	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,19	17.385.000		0,00	0,00				
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			39,09	3.624.394.192	1.455.408.497	40,16	60,61	15,94	24,06		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			8,77	800.496.994	239.599.017	29,93	67,50	2,62	5,92		
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1005 Dokumen	1,22	111.807.141	60.803.225	54,38	75,00	0,67	0,92	51.003.916	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			1,22	111.807.141	60.803.225	54,38	75,00				
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	12 Dokumen	3,54	323.634.647	4.459.500	1,38	65,00	0,05	2,3	319.175.147	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			3,54	323.634.647	4.459.500	1,38	65,00				

5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	150 Dokumen	0,97	88.171.373	59.839.300	67,87	75,00	0,66	0,72	28.332.073	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,97	88.171.373	59.839.300	67,87	75,00				
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	6 Lembaga	0,89	80.860.160	31.808.066	39,34	50,00	0,35	0,44	49.052.094	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,89	80.860.160	31.808.066	39,34	50,00				
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3000 Dokumen	0,97	88.178.406	34.862.897	39,54	60,00	0,38	0,58	53.315.509	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,97	88.178.406	34.862.897	39,54	60,00				
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	1,18	107.845.267	47.826.029	44,35	80,00	0,52	0,94	60.019.238	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			1,18	107.845.267	47.826.029	44,35	80,00				
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			6,12	558.490.417	267.577.690	47,91	73,00	2,93	4,46		
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 Dokumen	1,88	171.460.739	94.148.840	54,91	66,00	1,03	1,24	77.311.899	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			1,88	171.460.739	94.148.840	54,91	66,00				
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1700 Dokumen	4,24	387.029.678	173.428.850	44,81	80,00	1,90	3,39	213.600.828	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			4,24	387.029.678	173.428.850	44,81	80,00				
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			23,02	2.102.485.718	919.979.240	43,76	55,63	10,07	12,81		
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	300 Orang	1,53	139.909.774	73.462.281	52,51	75,00	0,80	1,15	66.447.493	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			1,53	139.909.774	73.462.281	52,51	75,00				
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	24 Dokumen	1,41	128.770.866	125.969.750	97,82	40,00	1,38	0,56	2.801.116	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			1,41	128.770.866	125.969.750	97,82	40,00				
5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	120 Dokumen	14,05	1.283.100.000	523.643.000	40,81	65,00	5,73	9,15	759.457.000	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			14,05	1.283.100.000	523.643.000	40,81	65,00				
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	75 Orang	0,27	24.677.469	4.406.488	17,86	30,00	0,05	0,08	20.270.981	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,27	24.677.469	4.406.488	17,86	30,00				
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	5 Dokumen	1,84	167.971.429	62.431.950	37,17	80,00	0,68	1,47	105.539.479	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			1,84	167.971.429	62.431.950	37,17	80,00				
5.03.02.2.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	40 Orang	1,23	112.449.953	63.049.876	56,07	80,00	0,69	0,99	49.400.077	

	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			1,23	112.449.953	63.049.876	56,07	80,00				
5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	100 Dokumen	1,55	141.204.405	0	0,00	0,00	0,00	0	141.204.405	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			1,55	141.204.405		0,00	0,00				
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang	1,14	104.401.822	67.015.895	64,19	75,00	0,73	0,86	37.385.927	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			1,14	104.401.822	67.015.895	64,19	75,00				
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1,78	162.921.063	28.252.550	17,34	47,50	0,31	0,85		
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	0,68	62.082.289	3.603.400	5,80	30,00	0,04	0,2	58.478.889	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,68	62.082.289	3.603.400	5,80	30,00				
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	1,10	100.838.774	24.649.150	24,44	65,00	0,27	0,72	76.189.624	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			1,10	100.838.774	24.649.150	24,44	65,00				
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			2,94	268.569.303	200.889.275	74,80	100,00	2,20	2,94		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			2,94	268.569.303	200.889.275	74,80	100,00	2,20	2,94		
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	110 Laporan	2,94	268.569.303	200.889.275	74,80	100,00	2,20	2,94	67.680.028	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			2,94	268.569.303	200.889.275	74,80	100,00				
JUMLAH				100	9.131.352.359	4.884.927.720			53,5	68,91		

Bekasi, 30 September 2021
Kepala Bidang Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

M. MUHAMMAD ARKAM BA, MDS., S.STP, M.M
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 198709192006041003

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupeten Luwu

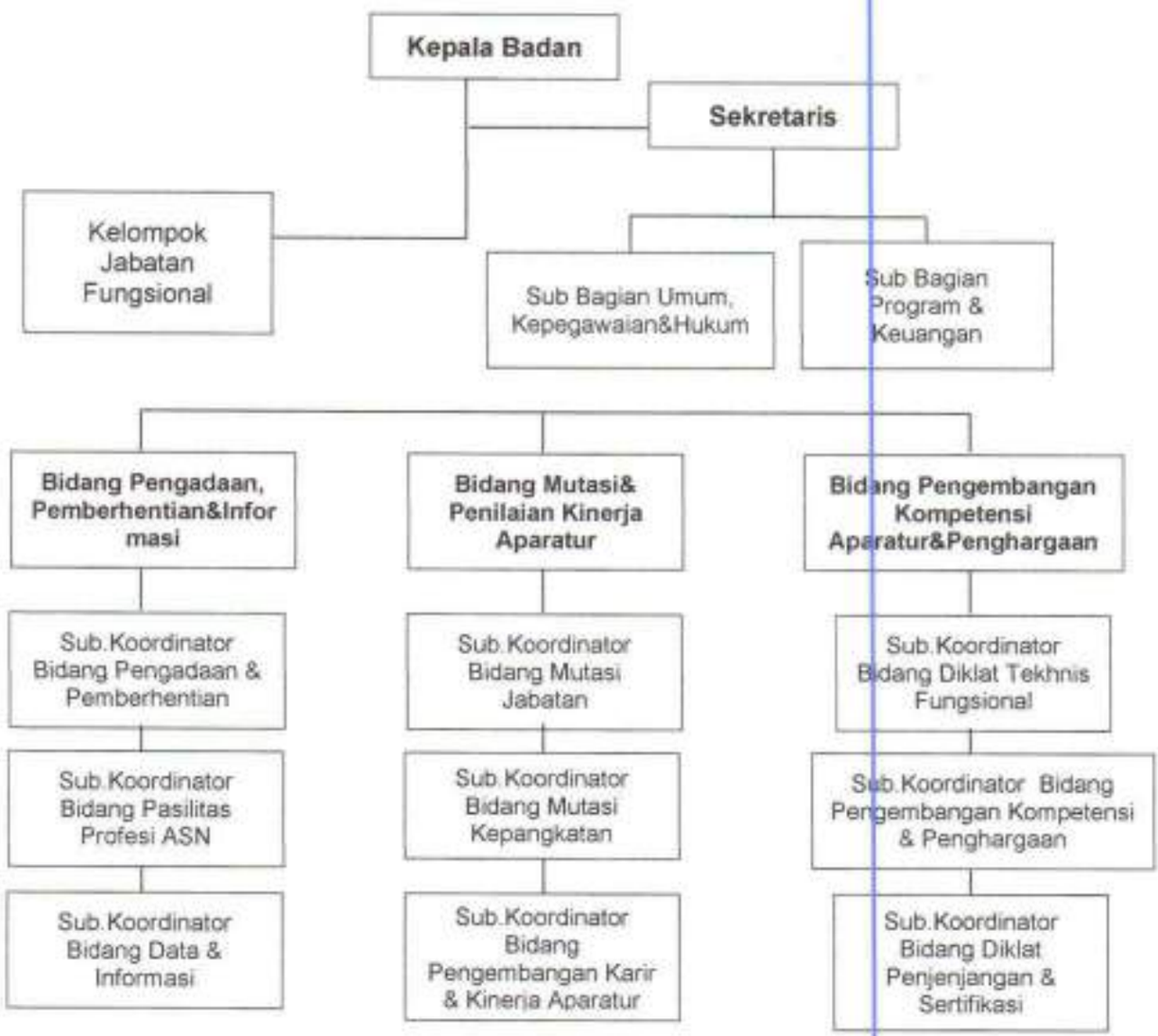
BKPSDM Kabupaten Luwu pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Kabupaten Luwu, kemudian dalam perkembangannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pada tahun 2017 BKD Kabupaten Luwu berubah nama menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu dikarenakan penggantian nomenklatur dasar, dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dengan penjabaran berupa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

BKPSDM Kabupaten Luwu merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif sekaligus menyusun konsep-konsep, gagasan-gagasan dan terobosan-terobosan di bidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok, kewenangan dan fungsi yang diberikan. Pengelolaan manajemen kepegawaian berdasarkan tupoksi harus tergambar mulai dari proses pengadaaan sampai pemberhentian pegawai agar dapat terwujud Sumber Daya Manusia Aparatur yang mampu menjadi motor penggerak sistem organisasi pemerintahan Kabupaten Luwu dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Kabupaten Luwu Yang Lebih Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing Yang Bernuansa Religius".

Dalam hal upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis dalam Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Luwu sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Organisasi BKPSDM Kabupaten Luwu



Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 154 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Luwu, BKPSDM Kabupaten Luwu mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BKPSDM Kabupaten Luwu mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Badan Kepegawaian Daerah
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Badan Kepegawaian Daerah,
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah,

d. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan daerah,
e. Perencanaan dan pembangunan kepegawaian daerah,
f. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
g. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan,
h. Penyiapan dan penetapan pensiun PNSD sesuai dengan norma standar prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan,
i. Pelaksanaan administrasi PNSD,
j. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah,
k. Penyampaian informasi kepegawaian kepada BKN, dan
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja perangkat daerah,yang di sesuaikan menurut perangkat dengan format daerah masing-masing,yang dapat di lihat pada table TC.30 sebagai berikut :

Tabel TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM

Kabupaten Luwu

Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026(thn n+1)	Tahun 2023(thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026(thn n+1)	
(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indeks Sistem Merit	-	-	300	320	193,5	320	320	
Penilaian SAKIP dari Inspektorat	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	
Persentase ASN yang Berkinerja Baik	-	-	100	100	95	100	100	

Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026(thn n+1)	Tahun 2023(thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026(thn n+1)	
(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)

2.3 Isu-isu PentingPenyelenggaraan Tugas dan Fungsi EKPSDM Kab. Luwu

Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran dibuat berdasarkan isu-isu penting yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam manajemen kepegawaian BKPSDM Kabupaten Luwu. Hal ini agar visi, misi, program dan kegiatan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu penting yang dihadapi oleh BKPSDM Kabupaten Luwu di antaranya :

1. Perubahan manajemen kepegawaian, yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebabkan implementasi pelaksanaan yang belum optimal karena merupakan produk perundang-undangan baru,
2. Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, yaitu belum adanya standar kompetensi jabatan yang menjadi acuan penempatan pejabat sehingga melahirkan pandangan masyarakat bahwa sebagian besar Pegawai Negeri Sipil belum mempunyai kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidangnya, khususnya yang terkait pelayanan publik,
3. Netralitas Pegawai Negeri Sipil, yaitu penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang belum mampu dilaksanakan dengan bebas dari campur tangan kekuatan politik.
4. Kualitas Pelayanan, yaitu kualitas pelayanan publik yang diberikan belum mampu menjawab tuntutan masyarakat akibat belum adanya standar pelayanan, standar operasional prosedur, keterbukaan informasi serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi,
5. Pendistribusian pegawai yang belum optimal karena belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan SKPD lain.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap Rancangan Awal RKPD sangat penting dilakukan agar terjadi konsistensi dan sinkronisasi terhadap tujuan dan sasaran, namun untuk perbandingan dengan dokumen rancangan awal RKPD tidak dilakukan karena dokumen rancangan awal RKPD dalam tahap penyusunan.Tetapi Rancangan awal RKPD tetap mengacu pada kegiatan-kegiatan inti di BKPSDM Kab.Luwu, reviu rancangan awal RKPD dapat di lihat pada Tabel TC.31 Sebagai Berikut :

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah : BKPSDM KAB.Luwu

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	5.068.812.011	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	4.600.867.616	
5.03.01.01.2.01	*Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*Kab.Luwu*	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi perangkat daerah kinerja secara tepat waktu*	*100*	*121.003.887*	*Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*Kab.Luwu*	*Jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja disusun*	*100*	*129.842.937*	
5.03.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab.luwu	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	36.358.239	Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah	Kab.luwu	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	36.538.239	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab.luwu	JumlahDokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.621.690	penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Kab.luwu	JumlahDokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	18.101.690	
5.03.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.luwu	JumlahDokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	16.100.478	Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	Kab.luwu	JumlahDokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	22.840.478	
5.03.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kab.luwu	JumlahDokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	15.965.287	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kab.luwu	JumlahDokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	18.056.887	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			JumlahDokumen					JumlahDokumen			
5.03.01.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.luwu	DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	10.049.421	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kab.luwu	DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	11.881.421	
5.03.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.luwu	Jumlah dokumen Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	12.243.624	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.luwu	Jumlah dokumen Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	12.243.624	
5.03.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.luwu	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	14.665.148	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.luwu	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	14.760.598	
5.03.01.01.2.02	***Administrasi keuangan perangkat Daerah***	***Kab.luwu***	***Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan secara tepat waktu***	***100%***	***3.110.140.958***	***Administrasi keuangan perangkat daerah***	***Kab.luwu***	***Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan secara tepat waktu***	***100%***	***3.119.237.265***	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5..03.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab.luwu	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangannya	30 orang	2.784.587.156	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab.luwu	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangannya	31 orang	3.366.900.110	
5..03.01.01.2.02.02	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab.luwu	Jumlah Bulan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 OB	300.060.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab.luwu	Jumlah Bulan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 OB	269.460.000	
5..03.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun	Kab.luwu	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang di susun	1 laporan	13.044.868	Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran	Kab.luwu	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang di susun	1 laporan	14.085.264	
..03.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kab.luwu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun	4 laporan	12.448.934	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab.luwu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun	4 laporan	15.289.330	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Cakupan					*Cakupan*			
5.03.01.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah***	***Kab.luwu***	***penyelenggaraan administarsi barang milik daerah pada perangkat daerah***	*100%*	***8.400.000***	***Administrasi Barang Milik Daerah***	***Kab.luwu***	***penyelenggaraan administarsi barang milik daerah pada perangkat daerah***	*100%*	***8.400.000***	
5.03.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.luwu	Jumlah bulan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 O/B	8.400.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.luwu	Jumlah Bulan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 O/B	8.400.000	
5.03.01.01.2.05	***Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Kab.luwu***	***Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100%***	***70.000.000***	***Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Kab.luwu***	***Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100%***	***25.000.000***	
5.03.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab.luwu	Jumlag ASN yang mengikuti bimtek	6 orang	70.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab.luwu	Jumlag ASN yang mengikuti bimtek	6 orang	25.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.01.01.2.06	***Administrasi umum Perangkat Daerah***	***Kab.luwu***	***Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat Daerah***	***100%***	***652.556.616***	***Administrasi umum Perangkat Daerah***	***Kab.luwu***	***Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat Daerah***	***100%***	***756.420.764***	
5.03.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Kab.luwu	Jumlah jenis komponen Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	10 jenis	7.995.644	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Kab.luwu	Jumlah Jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	10 Jenis	7.995.644	
5.03.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kab.luwu	Jumlah Bulan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	25 jenis	15.754.700	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kab.luwu	Jumlah Bulan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	25 jenis	22.280.700	
5.03.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.luwu	Jumlah Bulan bahan bacaan	12 Bulan	220.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.luwu	Jumlah bulan bahan bacaan	12 Bulan	334.000.000	
5.03.01.01.2.06.07	Penyediaan bahan/material	Kab.luwu	Jumlah Bulan Penyediaan bahan/material	12 Bulan	29.792.272	Penyediaan bahan/material	Kab.luwu	Jumlah Bulan Penyediaan bahan/material	12 Bulan	36.080.420	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
~~5.03.01.01.2.06.08~~	Fasilitasi ~~Kunjungan~~ Tamu	Luar kab.luwu	Jumlah Jenis ~~Fasilitasi Kunjungan~~ Tamu	~~3 Jenis~~	~~22.000.000~~	Fasilitasi ~~Kunjungan~~ Tamu	Luar kab.luwu	Jumlah Jenis ~~Fasilitasi~~ Kunjungan Tamu	~~3 Jenis~~	~~22.000.000~~	
5.03.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.luwu	Jumlah kali Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	270 kali	357.014.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.luwu	Jumlah kali Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	270 kali	334.064.000	
5.03.01.01.2.07	***Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kab.luwu***	***Jumah Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***1 unit***	***419.033.000***	***Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kab.luwu***	***Jumah Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			
5.03.01..2.07.0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab.luwu	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 unit	419.033.000	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab.luwu	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan			

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.01.2.08	***Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Kab.luwu***	***Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***12 Bulan***	***603.226.800***	***Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Kab.luwu***	***Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***12 Bulan***	***551.379.000***	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Luwu	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	115.200.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Luwu	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	86.400.000	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kab.Luwu	Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 bulan	52.426.800	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kab.Luwu	Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 bulan	58.179.000	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab.Luwu	Jumlah laporan Penyedisan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	435.600.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	kab.luwu	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	406.800.000	
5.03.01.2.09	***Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan***	***Kab.Luwu***	***Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya***	***50 unit***	***84.450.750***	***Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan***	***Kab.Luwu***	***Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak***	***50 unit***	***97.211.450***	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah					***Daerah***		***dan perizinannya***			
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab.Luwu	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang peliharan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 unit	67.065.750	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab.Luwu	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang peliharan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 unit	79.826.450	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Luwu	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	50 unit	17.385.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Luwu	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	50 unit	17.385.000	
~~5.03.02~~	PROGRAM ~~KEPEGAWAIA~~ N DAERAH		Cakupan penyelenggaraan pengadaan,pemberh entian,dan informasi	~~100%~~	~~5.219.606.623~~	PROGRAM ~~KEPEGAWAIA~~ N DAERAH		Cakupan penyelenggaraan ~~pengadaan,pemb~~ erhentian,dan informasi	~~100%~~	~~3.624.394.102~~	
5.03.02.2.01	***Pengadaan,pemberhentian dan informasi kepegawaian***	***Kab.luwu***	***Cakupan Pengadaan,pemberhentian dan informasi***	***100%***	***772.913.140***	***Pengadaan,pemberhentian dan informasi kepegawaian***	***Kab.luwu***	***Cakupan Pengadaan,pemberhentian dan informasi***	***100%***	***800.496.994***	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	ASN		***kepegawaian ASN***			***ASN***		***kepegawaian ASN***			
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan rencana kebutuhan,jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Kab.luwu	Jumlah dokumen Penyusunan rencana kebutuhan,jenis,dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	8000 dokumen	85.653.671	Penyusunan rencana kebutuhan,jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Kab.luwu	Jumlah dokumen Penyusunan rencana kebutuhan,jenis,dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	8000 dokumen	111.807.141	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Kab.luwu	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	3000 Dokumen	352.914.647.	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Kab.luwu	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	3000 Dokumen	323.634.647	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi dan pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab.luwu	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan administrasi pemberhentian	250 dokumen	80.904.233	Koordinasi dan pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab.luwu	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan administrasi pemberhentian	250 dokumen	88.171.373	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga profesi ASN	Kab.luwu	Jumlah Lembaga profesi ASN yang di fasilitasi	5 lembaga	80.860.160	Fasilitasi Lembaga profesi ASN	Kab.luwu	Jumlah Lembaga profesi ASN yang di fasilitasi	5 lembaga	80.860.160	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan system informasi kepegawaian	Kab.Luwu	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan system informasi kepegawaian	5 dokumen	88.178.406	Pengelolaan system informasi kepegawaian	Kab.Luwu	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan system informasi kepegawaian	5 dokumen	88.178.406	
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi data,informasi dan system informasi kepegawaian	Kab.Luwu	Jumlah dokumen hasil Evaluasi data,informasi dan system informasi kepegawaian	5632 Dokumen	84.402.023	Evaluasi data,informasi dan system informasi kepegawaian	Kab.Luwu	Jumlah dokumen hasil Evaluasi data,informasi dan system informasi kepegawaian	5632 Dokumen	107.845.267	
5.03.02.2.02	***Mutasi dan promosi ASN***	***Kab.Luwu***	***Persentase mutase dan promosi ASN***	***100%***	***541.760.813***	***Mutasi dan promosi ASN***	***Kab.Luwu***	***Persentase mutase dan promosi ASN***	***100%***	***558.490.417***	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab.luwu	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Mutasi ASN	200 dokumen	183.119.135	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab.luwu	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Mutasi ASN	200 Dokumen	171.460.739	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab.luwu	Jumlah dokumen Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	1500 dokumen	358.641.678	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab.luwu	Jumlah dokumen Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	1500 Dokumen	387.029.678	
5.03.02.2.03	***Pengembangan kompetensi ASN***	***Kab.luwu***	***Persentase Pengembangan kompetensi ASN***	***100 %***	***3.644.641.678***	***Pengembangan kompetensi ASN***	***Kab.luwu***	***Persentase Pengembangan kompetensi ASN***	***100 %***	***2.356.710.015***	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Kab.luwu	Jumlah ASN yang Meningkatan kapasitas kinerja ASN	500 orang	232.169.774	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Kab.luwu	Jumlah ASN yang Meningkatan kapasitas kinerja ASN	500 orang	139.909.774	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan assessment center	Kab.luwu	Jumlah dokumen Pengelolaan assessment center	27 Dokumen	512.354.591	Pengelolaan assessment center	Kab.luwu	Jumlah dokumen Pengelolaan assessment center	27 Dokumen	128.770.866	
5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Kab.luwu	Jumlah dokumen Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	13 Dokumen	2.350.495.592	Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Kab.luwu	Jumlah dokumen Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	13 Dokumen	1.283.100.000	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN	Kab.luwu	Jumlah ASN yang mendapatkam Pendidikan lanjutan	20 Orang	105.792.605	Pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN	Kab.luwu	Jumlah ASN yang mendapatkam Pendidikan lanjutan	20 Orang	24.677.469	
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan kerja sama Pelaksanaan Diklat	Kab.luwu	Jumlah koordinasi kerja sma lemabaga	5 lembaga	92.996.865	Koordinasi dan kerja sama Pelaksanaan Diklat	Kab.luwu	Jumlah koordinasi kerja sma lemabaga	5 lembaga	167.971.42	
5.03.02.2.03.0008	Penyusunan administarsi	Kab.luwu	Jumlah ASN yang mendapatkan	40 orang	112.449.953	Penyusunan administarsi	Kab.luwu	Jumlah ASN yang mendapatkan	40 orang	112.449.953	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	diklat dan sertifikasi jabatan fungsional		layanan diklat dan sertifikasi			diklat dan sertifikasi jabatan fungsional		layanan diklat dan sertifikasi			
5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	Kab.luwu	Jumlah dokumen hasil Sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	100 dokumen	133.624.405	Sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	Kab.luwu	Jumlah dokumen hasil Sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	100 dokumen	141.204.405	
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Kab.luwu	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan	700 orang	104.401.822	Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Kab.luwu	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan	700 orang	104.401.822	
5.03.02.2.04	***Penilaian dan Evaluasi kinerja***	***Kab.Luwu***	***Persentase Penilaian dan Evaluasi kinerja***	***100%***	***260.647.063***	***Penilaian dan Evaluasi kinerja***	***Kab.Luwu***	***Persentase Penilaian dan Evaluasi kinerja***	***100%***	***162.921.063***	
	aparatur		***aparatur***			***aparatur***		***aparatur***			
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Kab.luwu	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	350 orang	100.538.289	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Kab.luwu	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	350 orang	62.082.289	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab.luwu	Jumlah laporan hasil Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	20 laporan	160.108.774	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab.luwu	Jumlah laporan hasil Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	20 laporan	100.838.774	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**										
5.04.02	***PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***	***Kab.Luwu***	***Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan formal***	***100%***	***484.386.016***	***PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***	***Kab.Luwu***	***Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan formal***	***100%***	***484.386.016***	
~~5.04.02.2.02~~	***Sertifikasi,kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional***	***Kab.Luwu***	***Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi,kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional***	***50 orang***	***484.386.016***	***Sertifikasi,kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional***	***Kab.Luwu***	***Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi,kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional***	***50 orang***	***268.569.303***	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan	Kab.luwu	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan	111 laporan	484.386.016	Penyelenggaraan	Kab.luwu	Jumlah laporan hasil	111 laporan	268.569.303	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi,jabatan fungsional,kepemimpinan,dan prajabatan		pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi,jabatan fungsional,kepemimpinan,dan prajabatan			pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi,jabatan fungsional,kepemimpinan,dan prajabatan		Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi,jabatan fungsional,kepempinan,dan prajabatan			
JUMLAH					10.772.804.650	JUMLAH				9.131.352.350	

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN LUWU

H.A MUHAMMAD AHKAM BASMIN,S.STP,MM
Nip.19870919 200602 1 001

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dari usulan para stakeholder yang terkait langsung dengan pelayanan kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD kabupaten dari penelitian lapangan belum ada kegiatan yang merupakan usulan dari para stakeholder. Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu merupakan program dan kegiatan turunan dari pemerintah pusat yang bersifat seragam untuk semua daerah dan Juga belum ada permintaan yang resmi atau permohonan dari masyarakat berupa pemintaan melalui persuratan yang masuk ke kantor BKPSDM Kab.Luwu.Oleh karena usulan dan kegiatan masyarakat tidak dapat ditampilkan pada table TC.32 Sebagai Berikut :

Tabel TC.32

Usulan program dan kegiatan dan para pemangku kepentingan

Tahun 2025 Kabupaten Luwu.

Nama perangkat daerah : BKPSDM Kab.Luwu

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	-	-	-	-	Belumada permintaan atau permohonan resmi dari masyarakat

BAB III
TUJUAN, SASARAN, KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro Pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah adalah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana kebijakan nasional mengarah pada reformasi birokrasi secara sistemik yang mencakup perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan hingga sumber daya birokrasi yang meliputi berbagai level mulai dari struktur hingga *mindset* serta kultur birokrasi. Agenda reformasi bertujuan melaksanakan Pembangunan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan kualitas SDM ASN dan peningkatan pelayanan publik.

BKPSDM Kabupaten Luwu telah menyusun program seperti Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur untuk membantu menyukseskan agenda tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai dan kapan akan dicapai.

Pernyataan tujuan harus bersifat lebih nyata mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Pengungkapan tujuan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa BKPSDM Kabupaten Luwu telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan dengan sumber daya dan potensi yang dimiliki serta arah kebijakan yang diambil.

Tujuan strategis di BKPSDM Kabupaten Luwu merupakan implementasi dari visi dan misi BKPSDM Kabupaten Luwu yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur BKPSDM secara konsisten. Adapun tujuan dari BKPSDM Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan penataan Sistem Manajemen Kepegawaian,
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui sistem pendidikan,
3. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis sehingga harus disusun konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan.

Dengan memperhatikan tujuan, maka ditetapkan rumusan sasaran sebagai berikut :

1. Terciptanya Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas,
2. Tersedianya bantuan pendidikan dan diklat kepada aparatur dan peluang belajar seluas-luasnya bagi masyarakat miskin serta pendidikan untuk semua,
3. Terwujudnya Pelayanan Prima Kepegawaian.

Keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran BKPSDM Kabupaten Luwu untuk lebih jelasnya digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara		Indeks Sistem merit
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian SAKIP dari Inspektorat
	Meningkatkan Kapabilitas Kinerja ASN di Setiap Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Berkinerja Baik

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung kebijakan reformasi birokrasi melalui peningkatan keterampilan dan profesionalisme serta peningkatan pelayanan, maka BKPSDM Kabupaten Luwu akan melaksanakan Kegiatan dan Sub. kegiatan anggaran Tahun 2025 sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. **Perencanaan,penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;**
   a. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah,
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,
   c. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD,
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian dan iktisar realisasi Kinerja SKPD
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;**
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengajuan/verifikasi Keuangan SKPD,
   c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD,
3. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
   a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
   a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. **Administrasi Umum Perangkat Daerah;**
   g. Pengadaan Kendaraan dinas opersional atau Lapangan
   h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
k. Penyediaan bahan / material
l. Fasilitasi kunjungan tamu
m. Penyelenggraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah

d. Penyediaan jasa surat menyurat,
e. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik,
f. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor,

7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

g. Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas opersional atau Lapangan
h. Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya
i. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

B. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

8. Pengadaan,pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN

c. Penyusunan rencana kebutuhan,jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
d. Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
C. Koordinasi pelaksanaan administrasi Pemberhentian
D. Fasilitasi lembaga profesi ASN
E. Pengelolaan system informasi kepegawaian
F. Evaluasi data,informasi dan system informasi kepegawaian

9. Mutasi dan Promosi ASN

c. Pengelolaan mutasi ASN
d. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

10. Pengembangan Kompetensi ASN

i. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
j. Pengelolaan assessment Center
k. Pengelolaan administrasi Diklat dan sertifikasi ASN
l. Pengelolaan pendidikan Lanjutan ASN

m. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan Diklat
n. Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN
o. Penyusunan administrasi diklat dan sertifikasi jabatan Fungsional
p. Pengembangan karier dalam jabatan Fungsional

11. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

c. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
d. Pengelolaan penyebaran pelanggaran disiplin ASN

C. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

12. Pengembangan Kompetensi Teknis

a. Penyelenggaraan pengembangan komptensi teknis umum,inti,dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum.

13. Sertifikasi ,kelembagaan,pengembangan komptensi manajerial dan Fungsional.

a. Pelaksanaan sertifikasi komptensi di lingkungan pemerintah/kota
b. Penyelenggraan pengembangan komptensi bagi pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi,jabatan fungsional,kepemimpinan,dan prajabatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKA DAERAH

Rencana Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2025 dijelaska secara rinci tentang program dan kegiatan yang direncanakan terdapat dalam Rumusan Rencana kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2025 yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen renja ini,dapat di lihat pada table TC.33 rumusan rencana program dan kegiatan anggaran Tahun 2025 sebagai berikut :

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM (BKPSDM)
ANGGARAN TAHUN 2025

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tolak Ukur	Satuan	%	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Lokasi	Sumber Dana	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN								
1 02 5-02 5-04 0-00 02 xx x xx xx 1	BELANJA DAERAH					11.587.859.000			
1 02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN					6.922.631.000			
1 02 5-02 5-04 0-00 02 11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		dokumen			104.500.000			BKPSDM
1 02 5-02 5-04 0-00 02 01 2 01	Penyusunan, Pengelolaan, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen		1	33.714.000			
1 02 5-02 5-04 0-00 02 01 01 01	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan	dokumen		1	33.714.000			
1 02 5-02 5-04 0-00 02 01 2 01 01 5 1 2 01 01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.409.200			
1 02 5-02 5-04 0-00 02 01 2 01 01 5 1 2 01 01 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					2.457.800			
1 02 5-02 5-04 0-00 02 01 2 01 01 5 1 2 01 01 28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					3.600.000			
	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Aahan Komputer					1.473.400			
1 02 5-02 5-04 0-00 02 01 2 01 01 5 1 2 01 01 52	Belanja Jasa Konsenil Aplikasi/Sistem Informasi					18.000.000			
1 02 5-02 5-04 0-00 02 01 2 01 01 5 1 2 02 01 71	Belanja Lembur					9.770.000			
2 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen		1	10.000.000			
	Be Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.269.500			
1 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 02 5 1 2 01 01 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					1.080.000			
1 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 02 5 1 2 01 01 28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					2.061.300			
	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan Komputer					489.200			
1 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 02 5 1 2 02 01 71	Belanja Lembur					8.060.000			
3 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD	dokumen		1	10.371.600			
3 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 03 5 1 2 01 01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.200.200			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					1.484.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak					4.350.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan komputer					489.200			
	Belanja Lembur					8.060.000			
5 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	dokumen		1	10.900.000			
5 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 04 5 1 2 01 01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.269.500			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					1.980.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-cetak					2.061.300			
	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan Komputer					489.200			
5 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 04 5 1 2 01 01 25	Belanja lembur					8.060.500			
5 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	dokumen		1	10.000.000			
1 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 05 5 1 2 01 01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					535.500			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					857.800			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-cetak					900.000			
	Belanja Lembur					7.670.000			
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laku	dokumen		1	12.000.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.058.500			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					1.050.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak					1.162.500			
	Belanja Lembur					8.729.000			
2 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		1	13.000.000			
1 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 07 5 1 2 01 01 25	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.500.000			
	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					1.050.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak					1.469.700			
1 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 07 5 1 2 01 01 28	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan Komputer					300.400			
1 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 01 07 5 1 2 02 01 71	Belanja Lembur					8.400.000			
2 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 02	Administrasi Kesangpe Perangkat Daerah	Persentase administrasi kesangpe perangkat daerah		%		2.901.126.000			BKPSDM
1 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan tunjangan	orang		58	2.920.557.000			
1 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 02 01 5 1	BELANJA OPERASI					2.920.557.000			
1 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 02 01 5 1 1	Belanja Pegawai					1.908.027.000			
1 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 02 01 5 1 1 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					1.488.641.000			
1 02 5-03 5-04 0-00 02 01 2 02 01 5 1 1 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN					1.408.641.000			
	Belanja Gaji Pokok PNS					387.788.478			
	Belanja Gaji Pokok PPPK								

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rancana Tahun 2025				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tolak Ukur	Satuan	%	Target 2025	Pagu indikatif 2025	Lokasi	Sumber Dana	
	Belanja Gaji Pokok PPPK					297.798.479			
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					**159.885.830**			
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					159.885.830			
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					**17.267.467**			
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					17.267.467			
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					**102.270.000**			
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					102.270.000			
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					**68.040.000**			
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					68.040.000			
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					**42.261.000**			
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					42.261.000			
	Belanja Tunjangan Beras ASN					**89.376.000**			
	Belanja Tunjangan Beras PNS					89.376.000			
	Belanja Tunjangan Beras PPPK					**18.378.567**			
	Belanja Tunjangan Beras PPPK					18.378.567			
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					**1.144.000**			
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					1.144.000			
	Belanja Pembulatan Gaji ASN					**22.000**			
	Belanja Pembulatan Gaji PNS					22.000			
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					**0.131**			
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					0.131			
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					**89.125.000**			
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					89.125.000			
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**14.251.417**			
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					14.251.417			
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					**2.856.500**			
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					2.856.500			
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**825.730**			
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					825.730			
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					**8.994.900**			
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					8.994.900			
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					**11.088.932**			
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					11.088.932			
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					**709.102.500**			
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN					**709.102.500**			
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					709.102.500			
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan	bulan		12	**500.000.000**			
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					108.720.000			
	Belanja Honorarium Pengelolan Barang/Gaji					101.340.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		jumlah laporan keuangan akhir tahun	dokumen		1	**10.000.200**			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.201.100			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					1.102.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.811.100			
	Belanja Lainnya					5.645.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		jumlah koordinasi dan penyusunan laporan	dokumen		1	**12.492.700**			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis kantor					1.714.750			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					1.052.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.800.000			
	Belanja Lainnya					7.865.350			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Penyelenggaraan administrasi barang milik daerah				**8.400.000**			BKPSDM
Belanja jasa Pengelola BMD yang tidak menghasilkan pendapatan		Jumlah Belan jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan				**8.400.000**			
Koordinasi pengguna barang						8.400.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah				**70.000.000**			BKPSDM
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang		6	**70.000.000**			
BELANJA OPERASI						**70.000.000**			
Belanja Barang dan Jasa						**70.000.000**			
Belanja Jasa						**70.000.000**			
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan						**70.000.000**			
Belanja Bimbingan Teknis						70.000.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase administrasi umum perangkat daerah				**612.022.000**			BKPSDM

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tolak Ukur	Satuan	%	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Lokasi	Sumber Dana	
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 02	Penyediaan Kompensasi instalasi Sistrik/Penerangan bangunan Kantor	jumlah Jenis kompensasi instalasi Sistrik/penerangan yang di sediakan	jenis		10	8.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 02 5 2 2 10 02	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik					8.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 02 5 2 2 10 02 04	Belanja alat/bahan listrik								
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	jenis		4	14.991.200			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 05 5 1 2 01	BELANJA OPERASI					14.991.200			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 05 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					14.991.200			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 05 5 1 2 01	Belanja Barang					14.991.200			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 05 5 1 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					14.991.200			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 05 5 1 2 01 01 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					14.991.200			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	jenis		5	200.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 06 5 1	BELANJA OPERASI					200.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 06 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 06 5 1 2 02	Belanja Jasa					200.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 06 5 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					200.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 06 5 1 2 02 01 55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					160.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 06 5 1 2 02 01 62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					40.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis bahan / material	jenis		19	39.668.300			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 07 5 1	BELANJA OPERASI					39.668.300			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 07 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					39.668.300			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 07 5 1 2 01	Belanja Barang					39.668.300			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 07 5 1 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					39.668.300			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 07 5 1 2 01 01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					15.080.150			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 07 5 1 2 01 01 35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					8.669.550			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 07 5 1 2 01 01 36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer					3.918.600			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah jenis fasilitasi kunjungan tamu	jenis		4	22.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 08 5 1	BELANJA OPERASI					22.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 08 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					22.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 08 5 1 2 01	Belanja Barang					22.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 08 5 1 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					22.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 08 5 1 2 01 01 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					22.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kali		200	346.373.400			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 09 5 1	BELANJA OPERASI					346.373.400			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 09 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					346.373.400			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 09 5 1 2 04	Belanja Perjalanan Dinas					346.373.400			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 09 5 1 2 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					324.218.950			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 09 5 1 2 04 01 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					16.154.500			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 09 5 1 2 04 01 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan				870.156.400			BKPSDM
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Tenaga Medis/ahli	jumlah bulan jasa surat menyurat	bulan		12	180.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 01 5 1	BELANJA OPERASI					180.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 01 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					180.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 01 5 1 2 02	Belanja Jasa					180.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 01 5 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					180.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 01 5 1 2 02 01 26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					180.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi	bulan		12	48.354.400			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 02 5 1	BELANJA OPERASI					48.354.400			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 02 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					48.354.400			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 02 5 1 2 02	Belanja Jasa					48.354.400			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 02 5 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					48.354.400			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 02 5 1 2 02 01 62	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					48.354.400			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor	bulan		12	420.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 04 5 1	BELANJA OPERASI					420.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 04 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					420.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 04 5 1 2 02	Belanja Jasa					420.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 04 5 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					420.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 04 5 1 2 02 01 01	Honorarium Tim pengelola jurnal bulletin majalah pengelola teknologi informasi dan pengelola website					108.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 04 5 1 2 02 01 28	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					115.400.000			
	Belanja jasa tenaga Operator Komputer					167.400.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 04 5 1 2 02 01 30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					19.200.000			
	Belanja Jasa Tenaga Sopir					24.000.000			
5 02 5-02 5-04 5-08 02 01 2 08 04 5 1 2 02 01 40	Belanja Jasa Konsorsi Aplikasi/Sistem Informasi					51.000.000			

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Satuan	%	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Lokasi	Sumber Dana	
5 02 5.03 5.04 5.00 02 01 2 05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang di pelihara	unit		50	85.739.000			DKPDSDM
5 02 5.03 5.04 5.00 02 01 2 05 02	Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	jumlah kendaraan dinas yang di pelihara	unit		33	85.259.000			
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
5 02 5.03 5.04 5.00 02 01 2 05 02 3 1	BELANJA OPERASI					85.259.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 01 2 05 02 3 1 2	Belanja Barang dan Jasa					85.259.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 01 2 05 02 3 1 2 02	Belanja Jasa					85.259.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 01 2 05 02 3 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					85.259.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 01 2 05 02 3 1 2 02 01 06	Belanja bahan bahan bakar dan pelumas					30.000.000			
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					1.750.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 01 2 05 02 3 1 2 02 01 07	Belanja sewa lainnya					36.500.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 01 2 05 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan mesin yang di pelihara	unit		30	11.489.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 01 2 05 06 3 1	BELANJA OPERASI					11.489.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 01 2 05 06 3 1 2	Belanja Barang dan Jasa					11.489.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 01 2 05 06 3 1 2 03	Belanja Pemeliharaan					11.489.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 01 2 05 06 3 1 2 03 03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					11.489.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 01 2 05 06 3 1 2 03 03 17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga /Alat rumah tangga /Alat pendingin					7.750.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 01 2 05 06 3 1 2 03 03 21	Belanja Pemeliharaan Komputer komputer unit personal Computer					3.739.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02	Program Kepegawaian Daerah					2.629.370.750			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	persentase pengadaan,pemberhentian dan informasi kepegawaian				719.937.000			DKPDSDM
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01	Penyusunan rencana kebutuhan jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	jumlah formasi yang di rantra	orang		200	85.735.400			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1	BELANJA OPERASI					11.600.400			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					11.600.400			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1 2 01	Belanja Barang					9.843.400			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					9.843.400			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1 2 01 01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.204.600			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1 2 01 01 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					3.019.600			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1 2 01 01 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.473.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer					1.965.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1 2 01 01 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.950.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1 2 02	Belanja Jasa					76.130.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					76.130.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1 2 02 01 71	Belanja Lembur					8.910.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1 2 04 01 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					65.150.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 05	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	jumlah ASN dan PPPK yang mengikuti sosialisi	orang		3.000	354.205.500			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 05 5 1 2 01 01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.511.300			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover					2.457.900			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1 2 01 01 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					5.420.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer					1.300.200			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1 2 01 01 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					67.500.000			
	Belanja perjalan dinas biasa/rapat					15.000.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1 2 02 01 26	Honorarium narasumber atau pembahas,moderator,pembawa acara,dan peserta					37.950.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1 2 02 01 71	Belanja Lembur					20.000.000			
	Belanja sewa perahan dan mesin					12.870.000			
	Belanja sewa hotel					7.000.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 01 5 1 2 04 01 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					172.500.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembentukan	jumlah dokumen ASN yang pensiun	dokumen		120	84.403.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 06 5 1	BELANJA OPERASI					84.403.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 06 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					84.403.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 06 5 1 2 01	Belanja Barang					7.745.500			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 06 5 1 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					7.745.500			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 06 5 1 2 01 01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.878.500			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 06 5 1 2 01 01 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					2.398.900			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 06 5 1 2 01 01 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.468.500			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 06 5 1 2 01 01 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.000.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 06 5 1 2 02	Belanja Jasa					8.970.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 06 5 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					8.970.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 06 5 1 2 02 01 71	Belanja Lembur					8.970.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 06 5 1 2 04	Belanja Perjalanan Dinas					67.760.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 06 5 1 2 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					67.760.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 06 5 1 2 04 01 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					67.760.000			
5 02 5.03 5.04 5.00 02 02 2 01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	jumlah PNS yang di fasilitasi	orang		50	90.870.750			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tolak Ukur	Satuan	%	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Lokasi	Sumber Dana	
1 03 5.03 5.04 0.48 02 00 2 01 08 5 1	BELANJA OPERASI					80.878.700			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 00 2 01 08 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					80.878.700			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 00 2 01 08 5 1 2 01	Belanja Barang					9.002.700			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 00 2 01 08 5 1 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					1.362.500			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 00 2 01 08 5 1 2 01 01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.405.500			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 00 2 01 08 5 1 2 01 01 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					2.388.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 00 2 01 08 5 1 2 01 01 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.500.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer					2.172.400			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 00 2 01 08 5 1 2 01 01 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.800.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 00 2 01 08 5 1 2 02	Belanja Jasa					6.639.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 00 2 01 08 5 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					6.639.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 00 2 01 08 5 1 2 02 01 71	Belanja Lembur					6.639.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 00 2 01 08 5 1 2 04	Belanja Perjalanan Dinas					64.710.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 00 2 01 08 5 1 2 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					64.710.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 00 2 01 08 5 1 2 04 01 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					62.160.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 00 2 01 08 5 1 2 04 01 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.550.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 00 2 01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	sistem informasi	aplikasi		1	85.885.400			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 10 5 1	BELANJA OPERASI					85.568.400			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 10 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					85.568.400			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 10 5 1 2 01	Belanja Barang					8.250.400			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 10 5 1 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					8.767.400			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 10 5 1 2 01 01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.872.400			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					2.457.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 10 5 1 2 01 01 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.950.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer					910.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 10 5 1 2 01 01 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.900.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 10 5 1 2 02	Belanja Jasa					10.750.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 10 5 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					10.750.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 10 5 1 2 02 01 71	Belanja Lembur					10.750.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 10 5 1 2 04	Belanja Perjalanan Dinas					66.818.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 10 5 1 2 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					66.818.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 10 5 1 2 04 01 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					66.818.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah data yang di evaluasi	data		5.771	84.462.800			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 12 5 1	BELANJA OPERASI					84.462.800			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 12 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					84.462.800			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 12 5 1 2 01	Belanja Barang					11.201.800			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 12 5 1 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					3.264.800			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 12 5 1 2 01 01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.362.800			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 12 5 1 2 01 01 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					3.100.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 12 5 1 2 01 01 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					940.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer					1.637.800			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 12 5 1 2 01 01 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.800.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 12 5 1 2 02	Belanja Jasa					12.285.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 12 5 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					12.285.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 12 5 1 2 02 01 71	Belanja Lembur					12.285.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 12 5 1 2 04	Belanja Perjalanan Dinas					61.996.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 12 5 1 2 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					61.996.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 12 5 1 2 04 01 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					57.400.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 01 12 5 1 2 04 01 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.996.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 02	Mutasi dan Promosi ASN	persentase evaluasi dan penilaian ASN				542.211.600			BKPSDM
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	jumlah evaluasi selama 1 tahun	orang		100	103.286.200			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 02 01 5 1	BELANJA OPERASI					103.286.200			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 02 01 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					103.286.200			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 02 01 5 1 2 01	Belanja Barang					10.486.200			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 02 01 5 1 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					10.486.200			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 02 01 5 1 2 01 01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.374.900			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 02 01 5 1 2 01 01 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					6.641.800			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 02 01 5 1 2 01 01 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					6.160.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer					1.232.400			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 02 01 5 1 2 01 01 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					14.000.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 02 01 5 1 2 02	Belanja Jasa					37.820.000			
1 03 5.03 5.04 0.48 02 02 2 02 01 5 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					37.820.000			

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rancana Tahun 2025				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tolak Ukur	Satuan	%	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Lokasi	Sumber Dana	
	Honorarium narasumber atau pembahas moderator pembawa acara dan pandu					16.000.000			
	Belanja Jasa Asuransi/Retribusi, Pajak, dan Perizinan					8.000.000			
5 00 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2 02 01 71	Belanja Lembur					16.620.000			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2 06	Belanja Perjalanan Dinas					115.000.000			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2 06 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					115.000.000			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2 06 01 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					115.000.000			
5 03 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02	Pengelolaan Hasil/ari Pangkat ASN	jumlah dokumen kenaikan pangkat PNS	dokumen		1.500	358.623.460			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1	BELANJA OPERASI					358.623.460			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					343.623.460			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 01	Belanja Barang					33.340.460			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					33.340.460			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 01 01 28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.915.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					6.314.000			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 01 01 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					5.580.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer					1.232.460			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 01 01 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					20.200.000			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 02	Belanja Jasa					204.000.000			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					160.000.000			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 02 01 26	Honorarium narasumber atau pembahas moderator pembawa acara dan pandu					134.000.000			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 02 01 71	Belanja Lembur					10.000.000			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					35.000.000			
	Belanja sewa bangunan tempat pertemuan					15.000.000			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 02 05 61	Belanja Sewa Hotel					21.000.000			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 06	Belanja Perjalanan Dinas					110.000.000			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 06 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					110.000.000			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 06 01 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					110.000.000			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03	Pengembangan Kompetensi ASN	persentase pengembangan kompetensi ASN				1.000.333.000			BKPSDM
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas kinerja asn	dokumen		160	232.326.100			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1	BELANJA OPERASI					232.326.100			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					220.626.100			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2 01	Belanja Barang					99.996.100			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					68.896.100			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2 01 01 28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.439.200			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					7.168.320			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2 01 01 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					7.200.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer					1.540.400			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					41.500.000			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2 01 01 52	Belanja pakaian dinas lapangan					6.102.180			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2 02	Belanja Jasa					47.810.000			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					47.810.000			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2 02 01 26	Honorarium narasumber atau pembahas moderator pembawa acara dan pandu					31.800.000			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2 02 01 71	Belanja Lembur					15.210.000			
	Belanja sewa Gedung dan Bangunan					11.700.000			
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan					1.500.000			
	Belanja sewa hotel					6.200.000			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2 06	Belanja Perjalanan Dinas					103.826.000			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2 06 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					102.626.100			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 01 5 1 2 06 01 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					102.626.100			
5 03 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02	Pengelolaan Assessment Center	jumlah ASN yang mengikuti assessment	orang		25	465.469.450			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1	BELANJA OPERASI					465.469.450			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					465.469.450			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 01	Belanja Barang					33.773.650			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					33.773.650			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 01 01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.996.550			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					5.265.000			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 01 01 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					5.580.000			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer					1.234.000			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 01 01 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					16.200.000			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 02	Belanja Jasa					332.530.000			
5 01 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					210.530.000			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 02 01 26	Honorarium narasumber atau pembahas moderator pembawa acara dan pandu					200.800.000			
5 02 5-03 5-04 5-00 03 02 2 03 02 5 1 2 02 01 56	Belanja Jasa Asuransi/Retribusi, Pajak, dan Perizinan					9.000.000			

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tolak Ukur	Satuan	%	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Lokasi	Sumber Dana	
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 02 5 1 2 02 67 71	Belanja Lembur					10.530.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 02 5 1 2 02 65	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					10.500.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 02 5 1 2 02 65 67	Belanja Sewa Hotel					10.500.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 02 5 1 2 94	Belanja Perjalanan Dinas					79.194.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 02 5 1 2 94 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					79.194.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 02 5 1 2 94 01 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					79.194.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 5.00 03 2 03 03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti diklat dan sertifikasi ASN	orang		11	313.290.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 03 5 1	BELANJA OPERASI					313.290.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 03 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					313.290.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 03 5 1 2 02	Belanja Jasa					238.290.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 03 5 1 2 02 02	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					238.290.000			
	Belanja Diklat Kepemimpinan II					60.000.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 03 5 1 2 02 02 04	Belanja Diklat Kepemimpinan III					177.600.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 03 5 1 2 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					75.000.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 03 5 1 2 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					75.000.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 03 5 1 2 05 01 02	Belanja Honorarium					75.000.000			
5 3 5.03 5.04 5.00 02 02 03 12	Pengelolaan pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	orang		28	194.048.550			
5 3 5.03 5.04 5.00 02 02 03 12 5 1	BELANJA OPERASI					194.048.550			
5 3 5.03 5.04 5.00 02 02 03 12 5 1 2	Belanja barang dan Jasa					194.048.550			
5 3 5.03 5.04 5.00 02 02 03 12 5 1 2 3 1	Belanja barang					10.887.550			
5 3 5.03 5.04 5.00 02 02 03 12 5 1 2 3 1 1	Belanja Barang Pakai Habis					10.887.550			
5 3 5.03 5.04 5.00 02 02 03 12 5 1 2 3 1 1 01	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Alat tulis kantor					2.710.050			
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Kertas cover					702.000			
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak					2.401.500			
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer					1.674.000			
5 3 5.03 5.04 5.00 02 02 03 12 5 1 2 3 1 1 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.200.000			
5 3 5.03 5.04 5.00 02 02 03 12 5 1 2 3 1	Belanja Jasa								
5 3 5.03 5.04 5.00 02 02 03 12 5 1 2 3 1 1	Belanja jasa Kantor					9.000.000			
5 3 5.03 5.04 5.00 02 02 03 12 5 1 2 3 1 1 29	kantor					9.000.000			
5 3 5.03 5.04 5.00 02 02 03 12 5 1 2 3 1 1 9	Perjalanan dinas Kons					84.962.000			
5 3 5.03 5.04 5.00 02 02 03 12 5 1 2 3 1 43	Perjalanan dinas biasa					84.962.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah dokumen Sysfilkari	dokumen		30	38.367.300			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 14 5 1	BELANJA OPERASI					38.367.300			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 14 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					38.367.300			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 14 5 1 2 01	Belanja Barang					14.367.300			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 14 5 1 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					14.367.300			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 14 5 1 2 01 01 34	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.027.300			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 14 5 1 2 01 01 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					5.340.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 14 5 1 2 01 01 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.000.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 14 5 1 2 02	Belanja Jasa					5.000.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 14 5 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					5.000.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 14 5 1 2 02 01 71	Belanja Lembur					5.000.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 14 5 1 2 94	Belanja Perjalanan Dinas					60.000.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 14 5 1 2 94 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					60.000.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 02 2 03 14 5 1 2 94 01 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					60.000.000			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 03 2 04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur				38.746.500			SHIPSDM
5 03 5.03 5.04 5.00 02 03 2 04 05	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	jumlah dokumen penyelesaian pelanggaran disiplin ASN				38.746.500			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 03 2 04 05 5 1	BELANJA OPERASI					38.746.500			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 03 2 04 05 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					38.746.500			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 03 2 04 05 5 1 2 01	Belanja Barang					13.796.500			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 03 2 04 05 5 1 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					13.796.500			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 03 2 04 05 5 1 2 01 01 34	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.836.460			
5 03 5.03 5.04 5.00 02 03 2 04 05 5 1 2 01 01 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					6.960.040			

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rancana Tahun 2025				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tolak Ukur	Satuan	%	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Lokasi	Sumber Dana	
1 02 5-05 5-04 5-00 02 02 2 04 00 5 1 2 01 01 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.800.000			
1 02 5-05 5-04 5-00 02 02 2 04 00 5 1 2 02	Belanja Jasa					4.800.000			
1 02 5-05 5-04 5-00 02 02 2 04 00 5 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					4.800.000			
1 02 5-05 5-04 5-00 02 02 2 04 00 5 1 2 02 01 71	Belanja Lembur					4.800.000			
1 02 5-05 5-04 5-00 02 02 2 04 00 5 1 2 04	Belanja Perjalanan Dinas					40.000.000			
1 02 5-05 5-04 5-00 02 02 2 04 00 5 1 2 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					40.000.000			
1 02 5-05 5-04 5-00 02 02 2 04 00 5 1 2 04 01 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					40.000.000			
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM/ PEMERINTAHAN PENGENDALIAN DAN PELATIHAN								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					2.334.350.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	persentase sertifikasi,kelembagaan,pengembangan,kompetensi manajerial dan fungsional				2.334.350.000			BKPSDM
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 1 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis umum,inti,dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	jumlah ASN yang mengikuti Kompetensi Teknis umum,inti,dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren	orang						
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 1 3 1 1 12	Belanja bahan bahan lainnya								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 1 3 1 1 24	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 1 3 1 1 26	Belanja alat /bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 03 1 3 1 1 52	Belanja makan dan makan								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 1 3 1 1 53	Belanja makanan dan rapat/rapat jamuan tamu								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 1 3 1 1 55	Belanja jasa tenaga administrasi								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 1 3 1 1 56	Belanja jasa tenaga informasi dan teknisi								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 03 1 3 1 1 71	Belanja lembur								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 1 3 1 1 90	Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 1 3 1 1 9	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 1 3 1 1 43	Belanja sewa hotel								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 1 3 1 1 1	Belanja perjalanan dinas biasa								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 1 3 1 1 3	Belanja perjalanan dinas dalam kota								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 02 3 1 01 24	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 02 3 1 01 26	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -bahan cetak								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 02 3 1 01 52	Belanja makanan dan rapat/ rapat								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 03 02 3 1 01 53	Belanja makanan dan rapat/rapat jamuan tamu								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 02 3 1 01 55	Belanja jasa tenaga administrasi								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 02 3 1 01 56	Belanja jasa tenaga informasi dan teknisi								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 03 02 3 1 01 71	Belanja lembur								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 02 3 1 01 90	Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 02 3 1 01 9	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 02 3 1 01 43	Belanja sewa hotel								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 02 3 1 01 1	Belanja perjalanan dinas biasa								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 02 3 1 01 3	Belanja perjalanan dinas dalam kota								
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan daerah,jabatan pimpinan tinggi,jabatan fungsional,kepemimpinan,dan prajabatan		orang		178	2.334.350.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1	BELANJA OPERASI					2.334.350.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					2.334.350.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2 01	Belanja Barang					519.840.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					519.840.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2 01 01 12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					1.500.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2 01 01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					10.000.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2 01 01 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					37.900.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2 01 01 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					470.440.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2 02	Belanja Jasa					1.165.440.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2 02 01	Belanja Jasa Kantor					768.000.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2 02 01 01	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					720.000.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2 02 01 71	Belanja Lembur					96.000.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					37.300.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2 02 04 90	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					37.300.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					900.000.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2 02 05 43	Belanja Sewa Hotel					900.000.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2 04	Belanja Perjalanan Dinas					70.000.000			
1 04 5-03 5-04 5-00 02 02 2 03 07 5 1 2 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					70.000.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rancana Tahun 2025				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tolak Ukur	Satuan	%	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Lokasi	Sumber Dana	
5 04 5.05 5.04 0.00 02 03 2 02 07 1 1 2 04 01 01	Belanja Pegawai Dinas Biasa					70.000.000			

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur BKPSDM Kabupaten Luwu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Renja Tahun 2025 BKPSDM Kabupaten Luwu selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 ,juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja BKPSDM Kabupaten Luwu. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Renja Tahun 2025 juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BKPSDM Kabupaten Luwu. Renja Tahun 2025 juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf BKPSDM Kabupaten Luwu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Renja BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan BKPSDM Kabupaten Luwu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan BKPSDM Kabupaten Luwu pada tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Tahun 2025 BKPSDM Kabupaten Luwu, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi BKPSDM Kabupaten Luwu diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergitas serta berkelanjutan.

Melalui Renja Tahun 2025 ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja

keras. Akhir kata, Semoga Renja BKPSDM Kabupaten Luwu tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 30 September 2024

KEPALA BKPSDM

KABUPATEN LUWU

H. A.MUHAMMAD AHKAM BASMIN S.STP,MM
Pangkat : Pembina TK.I
NIP 19870919 200602 1 001

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025









Satpolpp Luwu Satpolpp.luwu Satpolpp_luwu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yaitu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah, dalam hal ini penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah periode 5 tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif; sedangkan Renja Perangkat Daerah adalah rencana kerja perangkat daerah periode 1 tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan tetap memperhatikan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Renja Perangkat Daerah ini menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota.

Renja Perangkat Daerah ini akan menjadi acuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupatn Luwu Periode 2024 - 2026.

.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu merupakan organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Bupati Luwu Nomor 150 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu. Untuk itu, agar pelaksanaan tugas yang diberikan berjalan efektif dan terarah maka penyusunan dan penetapan Rencana Kerja OPD menjadi mutlak sebagai pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun berjalan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), yaitu pemerintah lebih focus pada pencapaian kinerja yang lebih baik.

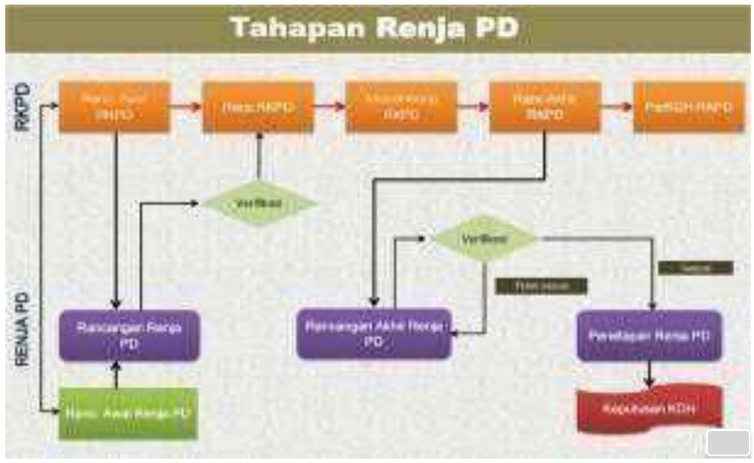
Proses penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan atau pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya tahapan penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, dan Kepala OPD menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD yang digunakan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun angaran berjalan.

Dimana prinsip penyusunan Rencana Kerja (Renja) antara lain :

1. Substansi Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD;
2. Program dan Kegiatan dirinci berdasarkan sumber dana yang diusulkan;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar : Bagan Alur Tahapan Renja PD

Adapun persiapan penyusunan Renja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja

- ➢ Pembentukan Tim Penyusun Renja;
- ➢ Orientasi mengenai Renja;
- ➢ Penyusunan Agenda Kerja Tim Kerja;
- ➢ Pengumpulan data dan informasi.

b. Pengelolah Data dan informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap perumusan Rancangan Renja

- ➢ Pengolahan data dan informasi;
- ➢ Analisis gambaran pelayanan OPD;
- ➢ Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
- ➢ Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
- ➢ Telaahan terhadap rancangan awa RKPD;
- ➢ Perumusan tujuan dan sasaran;
- ➢ Penelaaham usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- ➢ Perumusan kegiatan prioritas;
- ➢ Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
- ➢ Penyempurnaan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah;
- ➢ Pembahasan Forum Perangkat Daerah;
- ➢ Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah

sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah;

- ➢ Penyajian dan penyampaian rancangan Rencana Kerja;
- ➢ Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD;
- ➢ Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup OPD merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan dari proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan-tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan yang erta antara satu dengan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubilik Indonesia Nomor 4438);
4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 315);
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pengawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1447)
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 548);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
20) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016);
21) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketetentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2017);
22) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018 Nomor 14);
23) Peraturan Bupati Luwu Nomor 150 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu;
24) Peraturan Bupati Luwu Nomor 115 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memenuhi regulasi kebijakan yang berkembang, perencanaan yang menjadi rujukan, isu strategis dan sebagai instrument perencanaan dan penganggaran periodik berfungsi sebagai berikut:

a. Sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi

Pamong Praja untuk mengaplikasikan perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;

b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tupoksi OPD;
c. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi OPD.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu adalah :

a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu;
b. Perwujudan efisiensi dan efektifitas dalam alokasi sumber daya berdasarkan pertimbangan pagu indikatif dan skala proritas;
c. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pelaksaan progam dan kegiatan;
d. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam menilai implementasi program serta kegiatan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja (RENJA) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi tentang Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan pasal 255, 256, dan 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu antara lain peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar regulasi sebagai acuan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengaju pada

hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realsiasi APBD untuk PD yang bersangkutan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan, sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan PD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan paran pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra PD, sesuai dengan tupoksi OPD, isu-isu penting penyelenggaraan Pemda, didentifikasi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada tahun perencanaan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan/sub kegiatan.

BAB V PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut. Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Luwu untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahanya dan penguasaan di bidang tugas masing- masing pegawai dengan baik.

Plafon anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2024 sebesar Rp. 9.594.722.289,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.572.672.759,00 atau 98,46% dengan tingkat capaian kinerja 89.35%.

Berikut Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dapat diliat pada tebel berikut :

Nama Organisasi/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Jumlah Dana (Rp)	Realisasi Kinerja	
	Tolak Ukur	Target		K	(Rp)
Satuan Polisi Pamong Praja			**9.594.722.289**	**89.35 %**	**8.572.672.759**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100,00 Persen**	**4.098.090.045**	**88.76 %**	**3.638.214.662**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**100 %**	**77.328.362**	**55.81 %**	**43.157.215**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	36.129.420	68.37 %	24.701.957
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.833.763	0 %	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.959.650	34.83 %	2.722.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.947.490	7.24 %	503.052
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.548.583	89.38 %	6.746.813

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10.909.456	77.30 %	8.433.393
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu**	**100 %**	**3.405.687.186**	**90.52 %**	**3.082.686.811**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	444 Orang/Bulan	3.233.839.661	92.22 %	2.986.907.953
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	147.691.521	60.98 %	90.065.209
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.203.956	0 %	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	13.925.048	41.03 %	5.713.649
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD**	**100,00 persen**	**29.320.149**	**70.42 %**	**20.647.721**
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	2.172.428	0 %	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	27.147.721	76.06 %	20.647.721
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**100,00 persen**	**11.911.533**	**16.05 %**	**1.911.533**
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	58 Dokumen	1.911.533	100 %	1.911.533

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.00	0 %	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100 %**	**301.787.375**	**82.08 %**	**247.716.977**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.600.000	40. 00 %	1.440.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	47.748.000	91.60 %	43.735.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.171.500	35.62 %	5.047.400
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.646.400	45.94 %	1.675.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12.000.000	35.00 %	4.200.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	2.048.475	0 %	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.614.000	31.56 %	3.350.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	207.959.000	90.53 %	188.269.577
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**86,32 persen**	**85.900.000**	**99.99 %**	**85.891.260**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	85.900.000	99.99 %	85.891.260
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %	172.188.940	84.48 %	145.469.775

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	37.889.166	95.90 %	32.727.464
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.099.774	98.07 %	49.642.311
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	216 Laporan	85.200.000	100 %	85.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**14.766.500**	**72.69 %**	**10.733.370**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.000.000	91.26 %	1.825.240
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	8.846.500	100 %	8.846.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	3.920.000	0 %	0
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**	**100 %**	**5.495.832.244**	**89.79 %**	**4.934.458.097**
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**5.251.142.984**	**91.14 %**	**4.785.777.101**

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	22 Dokumen	32.583.406	65.62 %	21.381.703

	Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	27.083.706	45.02 %	12.191.972
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	142 Orang	1.698.152.400	81.56 %	1.384.990.000
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	8 Dokumen	16.175.064	89.42 %	14.463.064
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	2.422 Orang	2.918.913.601	98.61 %	2.878.249.200
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	5 Laporan	204.255.187	84.47 %	172.538.692
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	13 Laporan	7.000.000	72.86 %	5.100.000

Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 Laporan	3.745.260	87.83 %	3.289.470

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	343.234.360	85.53 %	293.573.000
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Cakupan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**100 %**	**244.689.260**	**60.76 %**	**148.680.996**
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	10 Dokumen	0	0 %	0
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	0	0 %	0
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan	22.228.000	2.88 %	640.252
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13 Laporan	199.796.494	74.10 %	148.040.744

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan) dapat diuraikan pada Tabel TC. 29 sebagai berikut :

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) Target	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2022	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(8/7)*	*10*	*11*	*12=(11/5)*
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal**	**%**	**100**				**100,00**			
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan**	**%**	**100**				**90,00**			
	Sub kegiatan : Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang di susun	Dokumen	9	1				2		
	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	4		1	1				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	4		1	1				
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	4		1	1				
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	4		1	1				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	Dokumen	20		1	1		2		
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu***	*%*	***100,00***				**90,00**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	OB	2.016	396	528	528		540		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	OB	564	84	84	84				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	4		1	1		1		

					1						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	Laporan	8		2	2		2		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD***	***%***	***100,00***				**90,00**			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil rekonsiliasi BMD ``	Laporan	6							
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	6	2	2	2		2		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase ASN dengan predikat kinerja baik***	***%***	***100,00***				**90,00**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasana disiplin yang diadakan	Unit	1							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	stell/pasang	502	265						
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	6							
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	6	5						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	orang	12							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah***	***%***	***100***				**90,00**			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit	37							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	12	32						
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	unit/set	624							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	bulan	48					8		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	bulan	48	12	12	12		12		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	bulan	48	12	12	12		12		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	OB	48	12	12	12		12		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	kali	48					3		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	OK	337		15	15				

					98				70		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik***	**%**	***86,32***							
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit	3	4						
	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	unit	77							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	17							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan \lainnya yang diadakan	unit	96							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	**%**	***100,00***				**90,00**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	OB	144	106	108	108		48		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	bulan	48	12	12	12		12		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	OB	996	156	156	156		216		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	*%*	***100,00***				**90,00**			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Unit	30	23	23	23		30		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	unit/set	57	4						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	m2	600,00							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	unit	36		1	1		36		
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**%**	**100,00**				**100,00**			
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Cakupan penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	**%**	***100,00***				**90,00**			
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah aktivitas yang dilakukan dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	aktivitas	5	3	3	3		2		

	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Perda yang diterapkan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	aktivitas	13	3	3	3		4		
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi	kali	8							
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan	6							
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Sat Linmas yang mengikuti pelatihan	orang	0	30						
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga yang dilibatkan dalam kerjasama dan kemitraan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	dokumen	2							
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disediakan dan dipelihara	Unit	24							
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang disusun	SOP	20							
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah tempat pelayanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang disediakan	tempat pelayanan	1	1	1	1		1		
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	***Cakupan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota***	***%***	***100,00***				**90,00**			
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah peserta sosialisasi	orang	350							
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang dilakukan pengawasan atas kepatuhan	lokasi	13							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016) dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 150 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;

c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;

d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan ini dilaksanakan berdasar Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang StandarPelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasarkepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraanurusan pemerintah yang bersifat wajib.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan didaerah, tidak akan pernah lepas dari persoalan K3 (Ketertiban,Ketenteraman dan Keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang, dimana potensi permasalahan yang akan timbuladalah penyalahgunaan ruang publik, seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain. Ketenteraman merupakan kondisiaman dan nyaman masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan keindahan merupakan sinergi antara

ketertiban dan ketenteraman, dimana wilayah Luwu bisa menjadi daerah yang tertata dan terkelola denganbaik.

Oleh sebab itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman danketertiban umum sertamenegakkan Perda, harus bisa memberikan pelayanan denganindikator TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (Ketertiban,Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten Luwu.

Indikator ini dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100$$

Sesuai dengan indikator diatas, maka kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan SPM dari 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023, secara umum dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari total 19 kasus pelanggaran baik yang dilaporkan masyarakat maupun yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat terselesaikan 19 kasus, sehingga capaian kinerjanya adalah :

$$\frac{19}{19} \times 100 = 100$$

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 1 Januari 2022 sampai dengan akhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemantauan gangguan trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang publik lainnya;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang cukup memadai;
3. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran K3;
4. Optimalisasi ketugasan PPNS melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan sebelum pelaksanaan tugas dilapangan;
5. Patroli / monitoring wilayah baik internal Satuan Polisi Pamong Praja maupun patroli terpadu dengan dinas/instansi terkait dan kecamatan, untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran perdayang terjadi; dan
6. Senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkesinambungan.

II. Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 150 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu, dan Berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, adalah :

1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K.3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)
3. Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)

Untuk lebih jelasnya, Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan PolisiPamong Praja disajikan dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Presentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran k3 (Ketertiban, Ketenteraman, Ketertiban)		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	94%	95%	96%	96%	94%	95%	96%	96%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 (satu) huruf e, disebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu adalah tangan dari Kepala Daerah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat.

Suasana tentram dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda perekonomian, kedua hal tersebut akan berjalan optimal apabila kondisi menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat tidak tercipta dengan baik oleh sebab itu, ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pemerintah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan cipta kondisi trantibum serta perlindungan masyarakan yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Isu strategis berkaitan dengan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 150 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu.

Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2018-2023, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2024-2026, maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu :

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS maupun pengadaan barang/jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan OPD;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;
3. Koordinasi dan kerjasama antar instansi, kabupaten/kota, masyarakat, dan stake holders masih kurang;
4. Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;
5. Wilayah perbatasan rawan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus. Dukungan anggaran dan

kerjasama dengan mitra kerja/ instansi terkait sangat diperlukan;

6. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
7. Dampak dari penanganan Extra Ordinary (Luar Biasa) akibat pandemi Covid-19 menjadi persoalan, tantangan dan ujian bersama;

Pemasalahan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat berdampak terhadap Pencapaian Rencana Kerja PD Kabupaten Luwu paradigma Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Dan Penegakan Peraturan Daerah yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Aspek regulasi, perlu meningkatkan kompetensi serta kapasitas SDM dalam setiap organisasi, diperlukan sebuah kegiatan berupa Bimtek, Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) yang berjenjang agar mendapatkan pengetahuan yang mungkin belum didapatkan atau sebagai penyegaran kembali (refreshing);
2. Aspek kebutuhan personil yang merupakan sebuah pondasi yang sangat penting dalam aktivitas sebuah organisasi. Keberhasilan kinerja dalam aktivitas juga sangat ditentukan oleh SDM, berdasarkan kualitas (kapasitas, kompetensi) dan kuantitas SDM. Permasalahan SDM Satpol PP lebih banyak dititik beratkan pada kuantitasnya. Tidak ada rekrutmen baru untuk anggota PNS. Di luar hal tersebut, SDM Satpol PP harus menerima beban pekerjaan yang semakin besar dan cenderung bersifat tidak teratur/bersifat ad hoc
3. Aspek sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan untuk kegiatan patroli sesuai dengan SOP, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari.
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kabupaten Luwu Tahun 2024

disusun dengan berpedoman pada RKPD dan RENSTRA Kabupaten Luwu. Dalam kedua dokumen tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Luwu belum menjadi kebijakan utuh Pemerintah Kabupaten Luwu karena masih menjadi bagian dalam kebijakan Kesbangpol. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu terkait penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat Dan Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Luwu sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Luwu untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 bahwa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sudah masuk dalam sub kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja masih membutuhkan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiaya program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Penyelenggaran Ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu kepada 2 (Dua) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 58 (Lima Puluh Delapan) Sub Kegiatan, Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.31.

Tabel 3.1.
Prioritas Sasaran

No	Proiritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1.	Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik	Ketaatan Masyarakat terhadap hukum meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum	Cakupan penegakan dan perlindungan hokum
				Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dan hasil penjabaran visi Kabupaten Luwu,

maka Satuan Polisi Praja Kabupaten Luwu menetapkan visi sebagai berikut :

"*Kabupaten Luwu yang Maju, Mandiri dan Bersaing Dalam Nuansa Religi*".

Sesuai dengan visi Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan, maka **tujuan yang ingin dicapai** oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif dan responsif.
2. Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Luwu.
3. Mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
4. Mewujudkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian integral dari perencanaan strategis instansi pemerintah yang terfokus pada bagaimana mengalokasikan sumber daya dalam kegiatan operasional. Kriteria dalam penentuan sasaran antara lain : spesifik, menantang namun dapat dicapai, realistis sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki dan dapat dicapai dalam kurun waktu1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **sasaran** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2023, ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator Nilai SAKIP OPD.
2. Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum, dengan indikator cakupan penegakan dan perlindungan hukum.

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja menjadi profesional dan mumpuni sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh ke depan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pemberdayaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran secara optimal, untuk bersiap menghadapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan di bidang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan terhadap pejabat, tamu-tamu penting daerah dan aset-aset daerah melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program dan kegiatan dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan.

4. Mengikutsertakan aparatur Polisi Pamong Praja sebagai peserta dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan (baik Diklat penjenjangan maupun teknis-fungsional), seminar, bimtek dan kegiatan peningkatan wawasan aparatur lainnya.
5. Meningkatkankualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur secara bertahap dan berkesinambungan.
6. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas SKPD dan stakeholder sehingga pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan terhadap pejabat, tamu-tamu penting daerah dan asset-aset daerah dapat terlaksana dengan maksimal (3E) yaitu efektif, efisien, dan ekonomis.
7. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu pada Tahun 2024 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya, dapat kita lihat dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran PD
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif, dan responsive	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B
2	Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Luwu.	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum	Cakupan penegakan dan perlindungan hukum	100%

Untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong kabupaten Luwu dirumuskan berdasarkan sasaran-sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Penyelesaian Pelanggaran	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang	90%

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
	Peraturan Daerah Meningkat	terselesaikan	
2	Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan	90%

Tabel. 3.4
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Ket
1	Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik	**Program :**Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum **Kegiatan :**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Sub Kegiatan	2.310.500.583 2.105.099.932	
		Kegiatan : Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	164.724.617	
		Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	40.676.014	

Program dan kegiatan prioritas didukung oleh program dan kegiatan pendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu yang dijabarkan seperti dalam tabel 3.5 berikut ini :

Tabel. 3.5
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2.01	**Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.428.052	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.250.276	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.671.896	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.087.190	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.707.190	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.290.100	
	Sub kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.954.466	

2.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Sub kegiatan : pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	179.472.045	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.612.466	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	8.831.163	
	Sub kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.582.686	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	8.092,232	
	Sub kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.788.880	
2.03	**Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD**		**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	896,431	
	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	908.500	
	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.294.149	
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.038.498	
2.05	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**		**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Sub kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	104.320.000	
	Sub kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.693.760	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.572.616	
	Sub kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.430.248	
2.06	**Kegiatan : Administrasin Umum Perangkat Daerah**		**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Sub kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.287.114	
	Sub kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor	13.929.531	
	Sub kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.096.420	
	Sub kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	12.000.000	
	Sub kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	10.010.000	
	Sub kegiatan : Penyediaan bahan/ material	6.351.700	
	Sub kegiatan : Fasilitas kunjungan tamu	6.224.245	
	Sub kegiatan : Penyelanggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	183.866.390	
	Sub kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	61.317.816	
2.07	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah**		**Satuan Polisi**

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Pamong Praja**
	Sub kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.305.280	
2.08	**Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat	37.133.092	
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.448.600	
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	84.000.000	
1.6	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.500.000	
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	17.650.000	
	Sub kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.550.000	
	Sub kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	113.871.100	

Tabel.3.6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026
Kabupaten Luwu

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (RP.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**05**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**		**100%**	**5.583.346.883**			**100%**	**4.199.696.284**
1	05	01	2	01		**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu***			**58.389.170**				**103.021.468**
1	05	01	2	01	01	Sub kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 dokumen	12.428.052	Pajak Daerah		91.00%	44.984.814
1	05	01	2	01	02	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	8.250.276	Pajak Daerah		91.00%	9.140.260
1	05	01	2	01	03	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	7.671.896	Pajak Daerah		91.00%	9.627.406
1	05	01	2	01	04	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	8.087.190	Pajak Daerah		91.00%	8.750.124
1	05	01	2	01	05	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	4.707.190	Pajak Daerah		91.00%	4.989.058
1	05	01	2	01	06	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	8.290.100	Pajak Daerah		91.00%	15.359.658
1	05	01	2	01	07	Sub kegiatan : Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	5 dokumen	8.954.466	Pajak Daerah		91.00%	10.170.150
1	**05**	**01**	**2**	**02**		**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu***			**4.792.577.503**				**3.506.806.051**
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	540 OB	4.590.198.031	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	3.291.866.590
1	05	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah pelaksana penatausahaan dan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	144 OB	179.472.045	Pajak Daerah		91.00%	186.255.636,

						Keuangan SKPD	pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun							
1	05	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	14 Laporan	1.612.466	Pajak Daerah		91.00%	2.511.421
1	05	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Laporan	8.831.163	Pajak Daerah		91.00%	5.351.541
1	05	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Laporan	1.582.686	Pajak Daerah		91.00%	2.793.288
1	05	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Laporan	8.092.232	Pajak Daerah		91.00%	14.910.193
1	**05**	**01**	**2**	**03**		**Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah**	***Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD***			**12.137.578**				**31.770.807**
1	05	01	2	03	01	Sub kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 laporan	896.431	Pajak Daerah		91.00%	975.080
1	05	01	2	03	02	Sub kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 laporan	908.500,	Pajak Daerah			2.310.880
1	05	01	2	03	05	Sub kegiatan : Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi BMD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 laporan	1.294.149	Pajak Daerah			994.055
1	05	01	2	03	06	Sub kegiatan : Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 laporan	9.038.498	Pajak Daerah		91.00%	27.490.792
1	**05**	**01**	**2**	**05**		**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase ASN dengan predikat kinerja baik***			**111.016.624**				**54.782.980**
1	05	01	2	05	02	Sub kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	163 stell/ pasang	104.320.000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	48.000.000
1	05	01	2	05	03	Sub kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Dokumen	1.693.760	Pajak Daerah		91.00%	2.019.969
1	05	01	2	05	04	Sub kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 orang	3.572.616	Pajak Daerah		91.00%	2.760.769
1	05	01	2	05	11	Sub kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kab. Luwu, Belopa, Senga	4 orang	1.430.248	Pajak Daerah		91.00%	2.002.242
1	**05**	**01**	**2**	**06**		**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Cakupan ketersediaan administrasi umum***			**294.073.216**				**269.145.596**

							perangkat daerah							
1	05	01	2	06	01	Sub kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	13 unit	5.287.114	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	. 6.000.000
1	05	01	2	06	02	Sub kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	3 unit		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	
1	05	01	2	06	03	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	209 unit/set		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	
1	05	01	2	06	04	Sub kegiatan : Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 bulan	13.929.531	Pajak Daerah		91.00%	14.464.513,
1	05	01	2	06	05	Sub kegiatan : Penyediaan barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 bulan	5.096.420	Pajak Daerah		91.00%	5.200.000
1	05	01	2	06	06	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 bulan	12.000.000	Pajak Daerah		91.00%	12.120.000
1	05	01	2	06	07	Sub kegiatan : Penyediaan bahan/ material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 OB	6.351.700	Pajak Daerah		91.00%	8.352.184
1	05	01	2	06	08	Sub kegiatan : Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 kali	6.224.245	Pajak Daerah		91.00%	11.008.899
1	05	01	2	06	09	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	Kab. Luwu, Belopa, Senga	75 OK	183.866.390	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	200.000.000,
1	***05***	***01***	***2***	***07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik***			**11.350.280**				
1	05	01	*2*	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	unit		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	
1	05	01	*2*	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	11 unit		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	
1	05	01	*2*	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin yang diadakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 unit	11.350.280	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	16.261.000
1	05	01	*2*	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	6 unit		Dana Transfer Umum – Dana		91.00%	3.615.000

						atau Bangunan Lainnya	lainnya yang diadakan				Alokasi Umum			
1	05	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan l\ainnya yang diadakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	unit		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	47.515.488
1	**05**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***			**171.581.692**				**292,679,180**
1	05	01	2	08	01	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	36 OB	37.133.092	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	38.268.057
1	05	01	2	08	02	Sub kegiatan :Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 bulan	50.448.600	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	49.818.460
1	05	01	2	08	04	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	156 OB	84.000.000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	98.172.000
1	**05**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**143.571.100**				**125,865,089**
1	05	01	2	09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 unit	2.500.000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	2.525.000
1	05	01	2	09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	30 Unit	17.650.000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	13.732.465
1	05	01	2	09	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	19 Unit/ Set	9.550.000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	15.392.400
1	05	01	2	09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	Kab. Luwu, Belopa, Senga	300 M2	113.871.100	Pajak Daerah		91.00%	
1	**05**	**02**				**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**			**2.310.500.563**				**2.579.406.629**
1	**05**	**02**	**2**	**01**		**Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	***Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban***			**2.105.099.932**				**2.260.240.144**

						Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	***umum dan ketentraman masyarakat***							
1	05	02	2	01	03	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Belopa, Senga	22 Dokumen	13.453.264	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	29.270.210
1	05	02	2	01	04	Sub kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Dokumen	35.661.320	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		91.00%	43.753.237
1	05	02	2	01	05	Sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Luwu, Belopa, Senga	163 Orang	64.225.095	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	1.800.000.000
1	05	02	2	01	06	Sub Kegiatan : Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	22 Dokumen	11.363.364	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum			18.601.234
1	05	02	2	01	08	Sub kegiatan : Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimuktahirkan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Dokumen	2.650.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	4.000.000
1	05	02	2	01	13	Sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyaraka	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2337 Orang	36.937.464	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	64.000.000
1	05	02	2	01	14	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas ang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Luwu, Belopa, Senga	163 Orang	22.678.308	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	14.000.000

1	05	02	2	01	15	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	24 Laporan	1.802.429.403	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	204.115.463

						Pengamanan, dan Pengawalan								
1	05	02	2	01	16	Sub Kegiatan : Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 Laporan	9.400.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	10.500.000
1	05	02	2	01	17	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Laporan	5.294.240	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	6.000.000
1	05	02	2	01	18	Sub Kegiatan :Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	Kab. Luwu, Belopa, Senga	32 Unit	. 92.631.402	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	50.000.000
1	05	02	2	01	19	Sub Kegiatan : Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pembentukan Satgas Linmas Kabupaten Kota	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Dokumen	8.375.572	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	16.000.000
1	**05**	**02**	**2**	**02**		**Kegiatan : Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan bupati / Walikota**	***Cakupan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota***			**164.724.617**				**274.465.435**
1	05	02	2	02	04	Sub kegiatan : Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelnggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	8.250.820	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	9.824.374
1	05	02	2	02	05	Sub Kegiatan : Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.189.806	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	2.995.173
1	05	02	2	02	06	Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.997.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	4.000.000

1	05	02	2	02	07	Sub Kegiatan : Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.891.52	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	3.920.665
1	05	02	2	02	08	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang dapat disidangkan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.029.396	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	5.000.000
1	05	02	2	02	09	Sub Kegiatan : Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	1.188.104	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	. 2.000.000
1	05	02	2	02	10	Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	9.507.457	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	15.609.707
1	05	02	2	02	11	Sub Kegiatan : Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	11.706.999,	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	21.755.499
1	05	02	2	02	12	Sub kegiatan : Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepal daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 lokasi	118.963.508	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	209.360.017
1	**05**	**02**	**2**	**03**		**Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota**	***Jumlah PPNS yang dibina***			**40.676.014**				**44.701.050**
1	05	02	2	03	01	Sub kegiatan : Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Laporan	5.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	5.000.000
1	05	02	2	03	03	Sub Kegiatan : Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Luwu, Belopa, Senga	5 Dokumen	. 9.632.126	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	9.701.050
1	05	02	2	03	05	Sub Kegiatan : Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Tersedianya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Kegiatan	26.043.888	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	30.000.000
									Total	**7.905.197.726**				**6.779.102.913**

Penelahaan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat sepenuhnya diusulkan dari bidang teknis dan Sekretariat dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu. Usulan-usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut selanjutnya dievaluasi berdasarkan isu-isu strategis yang terdapat dalam masyarakat dengan disinkronkan sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu.

Selanjutnya seluruh usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ada. Adapun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu pada tahun 2025 belum melaksanakan Penelaahan Usulan Program, kegiatan dan sub kegiatan kepada masyarakat yang secara langsung menjadi program kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025. serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2023.

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Sehubungan dengan hal tersebut, Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu mengacu pada mekanisme yang tercantum Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan mempertimbangkan seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024 -2026 sebagai berikut:

- ***Tujuan (1) Meningkatkan tata kelola penyelenggraan pemerintahan yang baik***
  - ***sasaran 1 : meningkatnaya akuntabilitaskinerja pemerintahan daerah***
  - ***sasaran 2 : berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik***
- ***Tujuan (2) Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah***
  - ***Sasaran 3 : Meningkatnya Aksebilitas Infrastruktur Wilayah***
- ***Tujuan (3) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata***
  - ***Sasaran 4 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah***
  - ***Sasaran 5 : Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat***
- ***Tujuan (4) Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter***
  - ***Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas danPemerataan Pendidikan***
  - ***Sasaran 7 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat***
  - ***Sasaran 8 : Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan***
  - ***Sasaran 9 : Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya***

dalam kehidupan masyarakat

- ***Tujuan (5) Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah***
  - ***Sasaran 10 : Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah***
- ***Tujuan (6) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan***
  - ***Sasaran 11 : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim***

Dari rumusan Tujuan RPD tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja , yaitu pada:

- ***Tujuan (1) Meningkatkan tata kelola penyelenggraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif***
  - ***Sasaran 1 : Meningkatnaya Tata Kelola Pemerintahan yang optimal***

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Luwu.

Adapun dalam Program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara; serta meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

a. Presentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
c. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;

d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
e. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);
f. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2025 - 2026 yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik; dan sasaran dalam pencapaian tujuan yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
2. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kabupaten Luwu merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Luwu, pada dasarnya sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Kabupaten Luwu adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang–undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Luwu. Sejalan dengan Misi Pertama ‘Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif’ dan Misi Keempat ‘Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.

Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu 2025 terdiri atas 2 (Dua) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 64 (Enam Puluh Empat) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 7.905.197.871,00. Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dapat dilihat

KEPMENDAGRI No. 050-3708 Tahun 2020

KODE					URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	DPA 2024	RENCANA KERJA 2025	BIDANG	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9,592,361,523	7,905,197,871		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,108,147,376	5,618,841,344	SEKERTARIAT	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77,328,362	60,557,176		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36,129,420	12,428,052		Dilaksanakan 2024
1	02	01	01	025	Belanja Kertas Cover		702,100		
1	02	01	01	026	Belanja Bahan Komputer		573,952		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		4,000,000		
					Belanja Makan Minum Lembur		1,800,000		
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		5,352,000		
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,833,763	8,250,276		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	025	Belanja Kertas Cover		484,036		
1	02	01	01	026	Belanja Bahan Komputer		434,240		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Lembur		900,000		
					Belanja Makan Minum Rapat		1,500,000		
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		4,932,000		
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7,959,650	7,671,896		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	025	Belanja Kertas Cover		421,260		
1	02	01	01	026	Belanja Bahan Komputer		566,636		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Lembur		900,000		
					Belanja Makan Minum Rapat		1,500,000		
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		4,284,000		
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6,947,490	8,087,190		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	024	Belanja ATK		107,970		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas Cover		230,100		
1	02	01	01	026	Belanja Bahan Komputer		217,120		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Lembur		600,000		
					Belanja Makan Minum Rapat		2,000,000		
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		4,932,000		
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		4,707,190		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	024	Belanja ATK		107,970		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas Cover		230,100		
1	02	01	01	026	Belanja Bahan Komputer		217,120		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Lembur		300,000		
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		3,852,000		
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,548,583	9,442,100		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	025	Belanja Kertas Cover		230,100		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		3,500,000		
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		5,712,000		
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,909,456	9,970,466		Dilaksanakan 2024
1	02	01	01	024	Belanja ATK		107,970		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas Cover		381,376		
1	02	01	01	026	Belanja Komputer		217,120		
1	02	01	01	071	Belanja Lembur		5,904,000		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		2,100,000		
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		1,260,000		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,415,844,517	4,793,577,503		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,248,996,992	4,590,198,031		Dilaksanakan 2024
1	05	01	2.01	01	Belanja Gaji Pokok PNS	1,693,323,340	2,205,143,668		
1	05	01	2.01	02	Belanja Gaji Pokok P3K	32,036,000	44,850,400		
1	05	01	2.02	01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	180,780,311	180,973,829		
1	05	01	2.02	02	Belanja Tunjangan Keluarga P3K	3,203,600	4,485,040		
1	05	01	2.03	01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	177,415,375	177,604,450		
1	05	01	2.04	01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	41,625,000	41,670,000		
1	05	01	2.05	01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26,150,000	125,440,000		
1	05	01	2.06	01	Belanja Tunjangan Beras PNS	111,617,325	416,632,307		
1	05	01	2.06	02	Belanja Tunjangan Beras P3K	1,303,560	2,027,760		
1	05	01	2.07	01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,764,574	1,776,447		
1	05	01	2.08	01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,826	104,527		
1	05	01	2.08	02	Belanja Pembulatan Gaji P3K	23,687	897		
1	05	01	2.09	01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	116,758,556	426,952,407		
1	05	01	2.09	02	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan P3K	1,413,462	1,695,378		
1	05	01	2.10	01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3,507,785	14,107,177		
1	05	01	2.10	02	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja P3K	76,890	92,268		

KEPMENDAGRI No. 050-3708 Tahun 2020

KODE					URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	DPA 2024	RENCANA KERJA 2025	BIDANG	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	05	01	2.11	01	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10,523,339	42,321,49		
1	05	01	2.11	02	Belanja Iuran Jaminan Kematian P3K	230,660	276,79		
					Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	847,221,702	904,043,19		
1	**05**	**01**	**2.02**	**01**	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	-			Dapat Dilaksanakan
1	**05**	**01**	**2.02**	**03**	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**147,691,52**	**179,472,04**		Dilaksanakan 2024
1	02	01	01	001	Belanja Honorarium Penanggung Jawab dan Penatausahaan Keuangan		160,920,00		
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		4,897,11		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		1,435,82		
1	02	01	01	027	Belanja Benda Pos		789,83		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		1,053,26		
1	02	01	01	052	Belanja Makan dan Minum Rapat		5,000,00		
					Belanja Makan dan Minum Lembur		1,440,00		
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		3,936,00		
1	**05**	**01**	**2.02**	**04**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	-	**1,612,46**		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		1,068,06		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		292,87		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		251,52		
1	**05**	**01**	**2.02**	**05**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**5,230,95**	**8,831,16**		Dilaksanakan 2024
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		191,75		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		764,87		
1	02	01	01	027	Belanja Benda Pos		2,338,53		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum		1,000,00		
					Belanja Makan Minum Lembur		900,00		
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		3,636,00		
1	**05**	**01**	**2.02**	**06**	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**	-	**1,582,68**		**Dilaksanakan 2024**
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		348,65		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		484,03		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum		750,00		
1	**05**	**01**	**2.02**	**07**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**13,925,04**	**9,092,23**		Dilaksanakan 2024
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		652,54		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		1,155,69		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Lembur		900,00		
1	02	01	01	071	Belanja Lembur		6,384,00		
1	**05**	**01**	**2.02**	**08**	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	-	**2,788,88**		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		1,137,52		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		651,36		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum		1,000,00		
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**29,320,149**	**12,137,578**		
1	**05**	**01**	**2.03**	**01**	**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	-	**896,43**		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		366,33		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		230,10		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		300,00		
1	**05**	**01**	**2.03**	**02**	**Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	-	**908,50**		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		908,50		
1	**05**	**01**	**2.03**	**03**	**Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**	-	-		Dapat Dilaksanakan
1	**05**	**01**	**2.03**	**04**	**Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD**	-	-		Dapat Dilaksanakan
1	**05**	**01**	**2.03**	**05**	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**2,172,428**	**1,294,14**		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		533,36		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		383,50		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		377,28		
1	**05**	**01**	**2.03**	**06**	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**27,147,72**	**9,038,49**		Dilaksanakan 2024
1	02	02	01	001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan		8,400,00		
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		80,24		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		383,50		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		174,75		
1	05	01	2.03	07	**Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD**	-			Dapat Dilaksanakan
1	**05**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**				**Tidak Dapat Dilaksanakan**

KEPMENDAGRI No. 050-3708 Tahun 2020									
KODE					URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	DPA 2024	RENCANA KERJA 2025	BIDANG	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	05	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	-			Tidak Dilaksanakan
1	05	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-			Tidak Dilaksanakan
1	05	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-			Tidak Dilaksanakan
1	05	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	-			Tidak Dilaksanakan
1	05				*(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)*	-			Tidak Dilaksanakan
1	05	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	-			Tidak Dilaksanakan
1	05				*(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)*	-			Tidak Dilaksanakan
1	05	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	-			Tidak Dilaksanakan
1	05				*(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)*	-			Tidak Dilaksanakan
1	05	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-			Tidak Dilaksanakan
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**11,911,533**	**109,896,624**		**Dapat Dilaksanakan**
1	**05**	**01**	**2.05**	**01**	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-		Dapat Dilaksanakan
1	**05**	**01**	**2.05**	**02**	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**		**103,200,000**		**Dapat Dilaksanakan**
1	02	01	01	064	Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap		103,200,000		
1	**05**	**01**	**2.05**	**03**	**Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**		**1,693,760**		**Dapat Dilaksanakan**
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		1,386,960		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		306,800		
1	**05**	**01**	**2.05**	**04**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian**		**3,572,616**		**Dapat Dilaksanakan**
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		1,494,416		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		306,800		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		271,400		
1	02	01	01	052	Makan Minum Rapat		1,500,000		
1	**05**	**01**	**2.05**	**05**	**Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**1,911,533**	**1,430,248**		**Dapat Dilaksanakan**
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		425,390		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		230,100		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		174,759		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		600,000		
1	05	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	-	-		Tidak Dilaksanakan
1	05	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	-		Tidak Dilaksanakan
1	05	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	-	-		Tidak Dilaksanakan
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-		Dapat Dilaksanakan
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-		Dapat Dilaksanakan
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000	-		Dapat Dilaksanakan
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**301,787,375**	**304,857,836**		
1	**05**	**01**	**2.06**	**01**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**3,600,000**	**5,287,114**		**Dapat Dilaksanakan**
1	02	01	01	031	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik		5,287,114		
1	**05**	**01**	**2.06**	**02**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47,748,000	-		Dilaksanakan 2024
1	**05**	**01**	**2.06**	**03**	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	-	-		**Dapat Dilaksanakan**
2	02	05	2	004	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Kulkas)		-		
1	**05**	**01**	**2.06**	**04**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**14,171,500**	**15,024,151**		**Dilaksanakan 2024**
1	02	01	01	030	Belanja Perabot Kantor		1,597,895		
1	02	01	01	043	Belanja Natura dan Pakan Natura		13,426,256		
1	**05**	**01**	**2.06**	**05**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**3,646,400**	**5,096,420**		**Dapat Dilaksanakan**
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		5,096,420		
1	**05**	**01**	**2.06**	**06**	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**12,000,000**	**12,000,000**		**Dilaksanakan 2024**
1	02	02	01	062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		12,000,000		
1	**05**	**01**	**2.06**	**07**	**Penyediaan Bahan/Material**	**2,048,475**	**6,351,700**		**Dilaksanakan 2024**

KEPMENDAGRI No. 050-3708 Tahun 2020

KODE					URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	DPA 2024	RENCANA KERJA 2025	BIDANG	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	02	01	01	001	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi		6,351,700		
1	**05**	**01**	**2.06**	**08**	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**10,614,000**	**6,224,245**		**Dilaksanakan 2024**
1	02	01	01	043	Belanja Natura dan Pakan Natura		4,224,245		
1	02	01	01	053	Belanja Makan dan Minuman Jamuan Tamu		2,000,000		
1	**05**	**01**	**2.06**	**09**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**207,959,000**	**193,556,390**		**Dilaksanakan 2024**
1	02	02	04	001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		177,620,230		
1	02	02	04	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		15,936,160		
1	**05**	**01**	**2.06**	**10**	**Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**	**-**	**-**		**Dapat Dilaksanakan**
1	**05**	**01**	**2.06**	**11**	**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**-**	**61,317,816**		**Dapat Dilaksanakan**
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		413,000		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		230,100		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		674,716		
1	02	02	01	008	Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah Teknologi Informasi dan Pengelola Website		36,000,000		
1	02	02	01	046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi		24,000,000		
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**85,900,000**	**13,156,941**		**Dapat Dilaksanakan**
1	**05**	**01**	**2.07**	**01**	**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**-**			Dapat Dilaksanakan
1	**05**	**01**	**2.07**	**02**	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**-**			Dapat Dilaksanakan
1	05	01	2.07	03	**Pengadaan Alat Besar**	**-**			Tidak Dilaksanakan
1	05	01	2.07	04	**Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor**	**-**			Tidak Dilaksanakan
1	**05**	**01**	**2.07**	**05**	**Pengadaan Mebel**	85,900,000			Dapat Dilaksanakan
1	**05**	**01**	**2.07**	**06**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**-**	13,156,941		Dapat Dilaksanakan
2	02	05	01	005	Belanja Alat Kantor Lainnya		5,600,280		
2	02	05	02	006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Kuse)		7,556,661		
1	05	01	2.07	07	**Pengadaan Aset Tetap Lainnya**	**-**			Dapat Dilaksanakan
1	05	01	2.07	08	**Pengadaan Aset Tak Berwujud**	**-**			Tidak Dilaksanakan
1	05	01	2.07	09	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**-**			Tidak Dilaksanakan
1	05	01	2.07	10	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**-**			Dapat Dilaksanakan
1	05	01	2.07	11	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**-**			Dapat Dilaksanakan
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**172,188,940**	**171,581,692**		
1	**05**	**01**	**2.08**	**01**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**37,889,166**	**37,133,092**		Dilaksanakan 2024
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		714,664		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		418,428		
1	02	02	01	026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		36,000,000		
1	**05**	**01**	**2.08**	**02**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**49,099,774**	**50,448,600**		Dilaksanakan 2024
1	02	02	01	061	Belanja Tagihan Listrik		36,000,600		
1	02	02	01	063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		14,448,000		
1	**05**	**01**	**2.08**	**03**	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**-**	**-**		Dapat Dilaksanakan
1	**05**	**01**	**2.08**	**04**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**85,200,000**	**84,000,000**		Dilaksanakan 2024
1	02	02	01	026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		36,000,000		
1	02	02	01	027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		48,000,000		
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13,866,500**	**153,076,000**		
1	**05**	**01**	**2.09**	**01**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**2,000,000**	**2,500,000**		Dapat Dilaksanakan
1	02	02	01	007	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		2,500,000		
1	**05**	**01**	**2.09**	**02**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**8,846,500**	**17,650,000**		Dilaksanakan 2024

KEPMENDAGRI No. 050-3708 Tahun 2020

KODE					URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	DPA 2024	RENCANA KERJA 2025	BIDANG	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	02	02	01	007	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		17,650,000		
1	05	01	2.09	03	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**	-			Tidak Dilaksanakan
1	05	01	2.09	04	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Tak Bermotor**	-			Tidak Dilaksanakan
1	**05**	**01**	**2.09**	**05**	**Pemeliharaan Mebel**	-			Dapat Dilaksanakan
1	**05**	**01**	**2.09**	**06**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**3,020,000**	**9,550,000**		Dilaksanakan 2024
1	02	03	02	121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		6,710,000		
1	02	03	02	405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		1,460,000		
1	02	03	02	409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		1,380,000		
1	**05**	**01**	**2.09**	**07**	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	-			Dapat Dilaksanakan
1	05	01	2.09	08	**Pemeliharaan Aset Tak Berwujud**	-			Tidak Dilaksanakan
1	**05**	**01**	**2.09**	**09**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	-			Dapat Dilaksanakan
1	**05**	**01**	**2.09**	**10**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	-	123,376,000		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tenpat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		9,504,900		
					Pekerjaan Rehabilitasi Toilet Kantor		9,504,900		
1	02	03	03	001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		113,871,100		
					Pekerjaan Rehabilitasi Toilet Kantor		76,082,500		
					Penataan Halaman Kantor		22,070,200		
					Rehabilitasi Plafound		15,718,400		
1	**05**	**01**	**2.09**	**11**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	-	-		Dapat Dilaksanakan
1	05	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	-			Tidak Dilaksanakan
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**5,484,214,147**	**2,286,356,527**		-
1	**05**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**5,240,985,653**	**2,032,829,932**		
1	**05**	**02**	**2.01**	**03**	**Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota**	**22,540,406**	**18,233,264**	**TRANTIB**	**Dilaksanakan 2024**
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		1,239,000		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		613,600		
1	02	01	01	029	Bahan Komputer		108,560		
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		16,272,104		
1	**05**	**02**	**2.01**	**04**	**Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**27,083,706**	**37,701,320**	**SATLINMAS**	Dilaksanakan 2024
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		156,940		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		230,100		
1	02	01	01	029	Bahan Komputer		54,280		
1	02	01	01	001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		16,860,000		
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		20,400,000		
1	**05**	**02**	**2.01**	**05**	**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia**	**1,698,152,400**	**72,725,095**	**SDA**	Dilaksanakan 2024
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		652,953		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		483,210		
1	02	01	01	029	Bahan Komputer		503,052		
1	02	01	01	052	Makan Minum Rapat		2,250,000		
1	02	01	01	058	Makan Minum Aktivitas Lapangan		5,100,000		
1	02	02	01	004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekertariat Tim Pelaksana Kegiatan		25,080,000		
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		38,655,880		
1	**05**	**02**	**2.01**	**06**	**Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**16,175,064**	**11,363,364**	**TRANTIB**	Dilaksanakan 2024
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		509,760		

KEPMENDAGRI No. 050-3708 Tahun 2020									
KODE					URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	DPA 2024	RENCANA KERJA 2025	BIDANG	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		864,704		
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		9,988,900		
1	**05**	**02**	**2.01**	**08**	**Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**	**-**	**2,650,500**	**TRANTIB**	Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	052	Belanja Makan dan Minum		1,500,000		
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		843,700		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		306,800		
1	**05**	**02**	**2.01**	**10**	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional dan Uji Kompotensi bagi Pejabat Fungsional	-	-		Dapat Dilaksanakan
1	**05**	**02**	**2.01**	**11**	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretaris Pengelolaan dalam Jabatan Fungsional Pol PP	-	-		Dapat Dilaksanakan
1	**05**	**02**	**2.01**	**12**	**Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompotensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan jenjang Jabatan**	**-**	**6,960,000**	**SDA**	Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		6,960,000		
1	**05**	**02**	**2.01**	**13**	**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat**	**2,918,913,601**	**50,537,464**	**SATLINMAS**	Dilaksanakan 2024
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		509,760		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		864,704		
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		49,163,000		
1	**05**	**02**	**2.01**	**14**	**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas**	**-**	**22,678,308**	**SDA**	Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		2,836,248		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		383,500		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		108,560		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Panitia		4,000,000		
					Belanja Makan Minum Peserta		8,000,000		
1	02	02	01	003	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		7,350,000		
1	**05**	**02**	**2.01**	**15**	**Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**	**204,140,856**	**1,687,479,403**	**TRANTIB**	Dilaksanakan 2024
					Aktifitas PAM TURJAWALI		*1,687,479,403*		
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		795,808		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		230,100		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		306,800		
1	02	01	01	058	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan		7,500,000		
1	02	01	01	001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		42,219,500		
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		99,780,100		
1	02	02	01	017	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		1,051,000,000		
1	02	01	01	058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		481,800,000		
1	02	01	01	043	Belanja Natura danPakan		3,847,095		
1	**05**	**02**	**2.01**	**16**	**Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**	**7,000,000**	**9,400,000**	**TRANTIB**	Dilaksanakan 2024
1	02	01	01	058	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan		6,000,000		
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3,400,000		
1	**05**	**02**	**2.01**	**17**	**Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada**	**3,745,260**	**5,294,240**	**TRANTIB**	Dilaksanakan 2024
1	02	01	01	001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi		1,059,200		
1	02	01	01	024	Belanja ATK		914,640		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		920,400		
1	02	01	01	058	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan		2,400,000		
1	**05**	**02**	**2.01**	**18**	**Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**343,234,360**	**92,631,402**	**TRANTIB**	Dilaksanakan 2024
1	02	01	01	004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas		41,328,940		
1	02	01	01	013	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan		51,302,462		
1	**05**	**02**	**2.01**	**19**	**Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota**		**15,175,572**	**SATLINMAS**	Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		1,576,244		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		446,276		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		503,052		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		750,000		
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		11,900,000		

KEPMENDAGRI No. 050-3708 Tahun 2020

KODE					URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	DPA 2024	RENCANA KERJA 2025	BIDANG	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	**05**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**243,228,494**	**208,346,617**	**PERDA**	
1	**05**	**02**	**2.02**	**04**	**Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**9,270,820**		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		1,980,000		
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		7,290,820		
1	**05**	**02**	**2.02**	**05**	**Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**3,189,806**		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	052	Belanja Makan dan Minum		1,500,000		
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		1,131,480		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		306,800		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		251,526		
1	**05**	**02**	**2.02**	**06**	**Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)**	**-**	**2,997,000**		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		2,187,148		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		306,800		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		503,052		
1	**05**	**02**	**2.02**	**07**	**Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**-**	**3,891,527**		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		56,064		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		153,400		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		125,763		
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3,556,300		
1	**05**	**02**	**2.02**	**08**	**Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah**	**-**	**5,029,396**		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		1,624,470		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		153,400		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		251,526		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		3,000,000		
1	**05**	**02**	**2.02**	**09**	**Pemberkasan Administrasi Penyidik oleh PPNS Penegakan Peraturan Daerah**	**-**	**1,188,104**		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		1,111,404		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		76,700		
1	**05**	**02**	**2.02**	**10**	**Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**21,204,000**	**11,547,457**		Dilaksanakan 2024
1	02	01	01	024	Belanja Kertas dan Cover		153,400		
1	02	01	01	025	Belanja Bahan Komputer		215,443		
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		11,178,614		
1	**05**	**02**	**2.02**	**11**	**Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota**	**22,228,000**	**11,706,999**		Dilaksanakan 2024
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		527,872		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		153,400		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		195,619		
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		10,830,108		
1	**05**	**02**	**2.02**	**12**	**Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**199,796,494**	**159,525,508**		Dilaksanakan 2024
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		722,844		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		383,500		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		162,840		
1	02	01	01	001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		103,489,724		
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		54,766,600		
1	**05**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**-**	**45,179,978**		
1	**05**	**02**	**2.03**	**02**	**Pembentukan Sekretariat PPNS**	**-**	**5,000,000**		Dapat Dilaksanakan
					Aktifitas Sinergitas Kerja antar PPNS dan OPD terkait dalam Lingkup OPD		*5,000,000*		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		5,000,000		
1	**05**	**02**	**2.03**	**03**	**Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah**	**-**	**12,096,090**		Dapat Dilaksanakan
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		12,096,090		
1	**05**	**02**	**2.03**	**04**	**Pembentukan PPNS Penegakan Peraturan Daerah**	**-**			Dapat Dilaksanakan
1	**05**	**02**	**2.03**	**05**	**Dukungan Operasional Sekretariat PPNS**	**-**	**28,083,888**		Dapat Dilaksanakan
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		999,438		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		306,800		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		217,120		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		1,000,000		
1	02	01	01	001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		13,920,000		
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dalam Kota		8,712,530		
1	02	01	01	071	Belanja Lembur		2,928,000		

KEPMENDAGRI No. 050-3708 Tahun 2020									
KODE					URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	DPA 2024	RENCANA KERJA 2025	BIDANG	STATUS
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*
1	**05**	**02**	**2.03**	**06**	Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	-			Dilaksanakan 2024
1	**05**	**02**	**3.05**		**Kegiatan Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota**	**-**			
1	**05**	**02**	**3.05**	**01**	Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota	-			Belum Tersedia
1	**05**	**02**	**3.05**	**02**	Pemberdayaan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota				Belum Tersedia

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, sehingga target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Satuan Polis Pamong Praja Tahun 2024 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2024.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut sebagai upaya dalam mendukung capaian indikator kinerja maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja 2025 dengan efektif dan efisien;
2. Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai langkah awal dalam penyusunan Anggaran Tahun 2025 dimana Rencana Kerja di jabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integritas dan efesiensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja seluruh aparatur secara berjenjang wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
4. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Demikian Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2025 disusun dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025

Luwu, 03 Oktober 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU



MUHAMMAD IQBAL HALWI, S.STP.,MM
PKT / Pembina Tk.I
NIP 19840718 200212 1 005

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Awal (Ranwal) Sekretariat Daerah Kab. Luwu Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun, dimana rencana kerja ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Luwu selama tahun 2025.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Sekretariat Daerah Kab. Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Belopa, Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU

Drs. H. SULAIMAN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19651129 198603 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah 12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35
3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional 35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 35
3.3. Program dan Kegiatan 36
BAB IV RENCANA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 51
4.2 Pendanaan Perangkat daerah 51
BAB V PenUTUP 75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 13

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Luwu 27

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kab. Luwu 31

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 serta Perkiraan Maju Anggaran 2026 42

Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kab. Luwu Tahun 2025 71

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Ranwal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara keseluruhan terdiri dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir, dan Penetapan Ranwal Renja.

Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Ranwal Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Ranwal Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Ranwal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

Adapun Ranwal Renja sendiri adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) Tahun yang bertujuan untuk merencanakan pembangunan tahunan Perangkat Daerah, memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Ranwal Renja menterjemahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hokum penyusunan Ranwal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tenntang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagiDaerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 206 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 139 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Ranwal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rensta Sekretariat Daerah Tahun 2025-2026. Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rensta Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 adalah penyediaan penyesuaian dokumen perencanaan jangka menengah daerah sebagai penjabaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan kemajuan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Maksud dari penyusunan Ranwal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu.

Sedangkan tujuan penyusunan Ranwal Renja Satpol PP Kabupaten Tegal adalah : Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu

1) Untuk menjabarkan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 dan pedoman kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025;

2) Untuk memberikan gambaran program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025;

3) Untuk memberikan gambaran tentang target kinerja yang akan dicapai tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Ranwal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu disusun kedalam sebuah dokumen deskriptif yang memuat data kualitatif dan kuantitatif, yang terdiri dari 5 Bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Ranwal Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Awal Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Awal Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Awal K/L, dan Rencana Awal Provinsi/Kabupaten/kota serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Awal Perangkat Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Awal Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 mengacu pada APBD Tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai :

1. sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
5. Formulasi Isu-Isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam rumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku.

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Akhir Kerja Sekretariat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD
c. program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan sekaligus kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2026 di Tahun 2025, mengingat Rencana Awal tahun 2025 ini adalah tahun Pertama pelaksanaan Renstra periode Tahun 2025-2026, sehingga yang dievaluasi dalam Rencana Akhir Tahun Anggaran 2025 ini adalah Hasil Pelaksanaan Renja 2023 serta Capaian terhadap Renstra periode 2025-2026. Secara umum Sekretariat Daerah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, hal tersebut terlihat pada hasil evaluasi Rencana AkhirKerja, Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah dilakukan melaluiPengukuran kinerja kegiatan dan program yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Rentrsa Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	**01**	**01**			**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**26,588,247,004**	**32,955,951,838**	**23,668,168,275**	**26,216,877,409**		**26,395,927,624**	**109,288,257,035**	
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu**	**%**	**429,527,600**	**424,517,670**	**357,263,300**	**420,750,849**		**351,888,200**	**1,197,156,719**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Dokumen	250,967,680	285,807,780	168,890,000	225,479,879	100%	217,398,250	728,685,909	100%
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	24,060,750	13,854,000	26,921,350	15,578,950	100%	14,060,750	43,493,700	100%

4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	36,764,500	7,095,490	20,642,350	19,828,450	100%	12,844,300	39,768,240	100%
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	41,718,450	22,693,000	45,995,400	63,748,890	100%	41,718,450	128,160,340	100%
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	28,478,500	27,025,900	40,318,350	45,701,380	100%	28,476,500	101,203,780	100%
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan	24,723,070	19,020,800	20,257,300	18,744,300	100%	14,573,300	52,338,400	100%
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD yang disusun (LAKIP)	Dokumen	22,816,650	49,020,700	34,238,550	31,669,000	100%	22,816,650	103,506,350	100%
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara Tepat Waktu**	**%**	**9,687,209,970**	**12,042,473,050**	**8,574,275,947**	**8,644,038,746**		**9,706,910,940**	**30,393,422,736**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan Tunjangan sesuai Ketentuan	OB	8,544,817,000	10,875,954,837	7,386,854,327	7,437,532,054	100%	8,544,817,000	26,858,303,891	100%
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diverifikasi	Dokumen	1,059,870,470	1,069,269,113	1,059,870,470	1,088,152,342	100%	1,080,020,240	3,237,441,695	100%
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	10,000,000	23,624,550	20,533,850	26,070,500	100%	9,551,200	59,246,250	100%

4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	11,922,850	8,828,700	20,179,450	24,257,500	100%	11,922,850	45,009,050	100%
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	Dokumen	22,348,400	7,055,350	33,252,650	30,509,850	100%	22,348,400	59,913,600	100%
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	Laporan	22,488,500	6,784,000	24,945,350	12,974,510	100%	22,488,500	42,247,010	100%
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Laporan	15,762,750	50,956,500	28,639,850	24,541,990	100%	15,762,750	91,261,240	100%
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD**	**%**	**168,738,750**	**93,164,852**	**139,687,200**	**135,129,960**		**168,478,750**	**396,773,562**	
4	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Laporan	109,244,050	67,152,902	105,102,050	115,426,600	100%	109,244,050	291,823,552	100%
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Baranag Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi BMD yang disusun	Laporan	9,000,000	10,200,000	10,255,000	4,973,550	100%	8,740,000	23,913,550	100%
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Branfg Milik Daerah	Laporan	50,494,700	15,811,950	24,330,150	14,729,810	100%	50,494,700	81,036,460	100%

4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik berdasarkan hasil penilaian Perjanjian Kinerja**	**%**	**259,170,000**	**35,875,000**	**23,100,000**	**23,100,000**		**159,170,000**	**218,145,000**	
4	01	01	2.05	02	Belanja Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Besera Atribut Kelengkapannya	Orang	159,170,000	13,750,000	23100000	23,100,000	100%	159,170,000	196,020,000	100%
4	01	01	2.05		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Normal	Orang	50,000,000	22,125,000	0	-	100%	-	22,125,000	100%
4	01	01	2.05		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumalh ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	50,000,000	-	0	-	100%	-	-	100%
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**%**	**2,584,926,975**	**1,982,626,631**	**1,736,655,535**	**2,104,230,738**		**2,845,985,325**	**6,932,842,694**	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	32,341,400	79,904,000	45,528,000	21,503,000	100%	32,341,400	133,748,400	100%
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	60,000,000	29,900,000	54,500,000	54,230,000	100%	16,000,000	100,130,000	100%
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan	Jenis	13,775,000	5,364,000	19,452,000	18,270,000	100%	13,775,000	37,409,000	100%
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	237,037,475	242,894,275	259,455,985	231,235,240	100%	237,037,475	711,166,990	100%

4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	jenis	48,900,000	89,902,100	48,900,000	71,976,000	100%	48,900,000	210,778,100	100%
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	Jenis	180,000,000	178,620,000	180,000,000	183,840,000	100%	180,000,000	542,460,000	100%
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan	Jenis	1,162,500,000	424,131,394	499,988,950	629,350,000	100%	1,162,500,000	2,215,981,394	100%
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	OK	591,558,650	907,563,562	596,158,650	868,036,898	100%	896,617,000	2,672,217,460	100%
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	%	258,814,450	24,347,300	32,671,950	25,789,600	100%	258,814,450	308,951,350	100%
4	**01**	**01**	**2.07**		**Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasaran Kantor**	**%**	**760,030,110**	**1,035,983,000**	**282,780,565**	**858,963,630**		**72,030,110**	**1966976740**	
4	01	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	650,000,000	73,700,000	0	0	100%	-	73,700,000	100%
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur yang diadakan	Set	70,000,000	187,220,000	133750000	322,637,555	100%	28,500,000	538,357,555	100%
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Buah/set	28,500,000	196,570,000	11530105	210,855,570	100%	43,530,110	450,955,680	100%

					Lainnya										
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Paket	11,530,110	578,493,000	137500460	325,470,505	100%	-	903,963,505	100%
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	**%**	**6,478,977,800**	**8,099,965,018**	**6,688,057,300**	**7,311,561,284**		**6,699,591,150**	**21,646,767,452**	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan Keluar yang diregistrasi	surat	-	290,450,000	206,400,000	173,900,000	100%			100%
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telepon, Air dan Listrik	Bulan	1,937,520,000	1,896,449,518	1,464,480,000	1,482,310,556	100%	1,937,520,000	5,316,280,074	100%
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Operasional Peralatan dan Perlengkapan Kanrtor yang disediakan	OB	541,457,800	649,239,500	470,365,600	608,937,500	100%	541,457,800	1,799,634,800	100%
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	OB	4,000,000,000	5,263,826,000	4,546,811,700	5,046,413,228	100%	4,220,613,350	14,530,852,578	100%
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD yang dipelihara/direhab**	**%**	**1,173,755,650**	**3,662,415,445**	**837,540,224**	**1,635,517,197**		**1,123,009,650**	**6,420,942,292**	

4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peroranagn Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabtan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Unit	83,720,000	130,917,216	175,671,300	204,836,935	100%	83,720,000	419,474,151	100%
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Unit	1,016,785,650	595,097,329	243,973,390	473,993,262	100%	1,016,785,650	2,085,876,241	100%
4	01	01	2.09		Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	M2	50,000,000	2,913,910,900	388,755,502	937,537,000	100%	14,250,000	3,865,697,900	100%
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	14,250,000	22,490,000	19,506,029	19,150,000	100%	8,254,000	49,894,000	100%
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	9,000,000	-	9,634,003	-	100%	-	-	0%
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keungan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala**	**%**	**1,491,773,377**	**1,431,016,168**	**1,523,083,244**	**1,287,282,298**		**1,491,773,377**	**4,210,071,843**	

						Daerah									
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah	Bulan	671,623,377	567,166,168	702,933,244	468,732,298	100%	671,623,377	1,707,521,843	100%
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	150,150,000	193,850,000	150,150,000	148,550,000	100%	150,150,000	492,550,000	100%
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Medical Check Up/ Pelayanan Kesehatan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	220,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000	100%	220,000,000	660,000,000	100%
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional yang dibutuhkan	Bulan	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	100%	450,000,000	1,350,000,000	100%
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan**	**%**	**2,689,273,092**	**3,298,902,800**	**2,737,249,190**	**2,705,795,000**		**2,689,273,092**	**8,693,970,892**	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bulan	1,331,316,000	1,795,260,800	1,372,540,586	1,362,294,000	100%	1,331,316,000	4,488,870,800	100%

4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wajkil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bulan	1,008,922,976	1,145,091,000	1,020,038,241	1,004,233,000	100%	1,008,922,976	3,158,246,976	100%
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kerbutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bulan	349,034,116	358,551,000	344,670,363	339,268,000	100%	349,034,116	1,046,853,116	100%
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase pelaksanaan Penataan Organisasi**	**%**	**462,261,630**	**481,358,604**	**411,036,020**	**479,044,609**		**461,294,780**	**1,421,697,993**	**5**
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PD	103,445,700	87,010,100	92,384,900	161,471,625	100%	103,445,700	351,927,425	100%
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	107,208,000	155,820,200	125,128,010	124,868,380	100%	107,208,000	387,896,580	100%
4	01	01	2.13	03	Penigkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan	63,831,930	115,723,100	69,407,430	69,215,124	100%	63,831,930	248,770,154	100%
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang di monitoring	Laporan	10,000,000	39,233,300	17,417,730	17,395,500	100%	9,033,150	65,661,950	100%
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	177,776,000	83,571,904	106,697,950	106,093,980	100%	177,776,000	367,441,884	100%

4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**%**	**402,602,050**	**367,653,600**	**357,439,750**	**611,463,098**		**626,522,250**	**1,605,638,948**	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Keprotokoleran yang difasilitasi	Kegiatan	136,035,000	186,300,000	136,035,000	136,450,000	100%	166,920,000	489,670,000	100%
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dialog/Audiensi/Koordinasi Pimpinan yang di Fasilitasi	kali	200,000,000	159,595,100	184,633,500	439,037,898	100%	343,035,200	941,668,198	100%
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pimpinan yang di dokumentasikan	kali	66,567,050	21,758,500	36,771,250	35,975,200	100%	116,567,050	174,300,750	100%
4	**01**	**02**			**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**		**3,551,780,920**	**3,143,894,967**	**4,410,572,900**	**5,396,249,395**	-	**3,551,780,720**	**12,091,925,082**	
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan**	**%**	**391,928,650**	**452,323,935**	**432,870,000**	**405,422,503**		**391,928,650**	**1,249,675,088**	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	169,867,500	195,889,645	151,058,450	151,482,690	100%	169,867,500	517,239,835	100%
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	110,271,000	155,640,528	154,053,060	131,882,721	100%	110,271,000	397,794,249	100%
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	111,790,150	100,793,762	127,758,490	122,057,092	100%	111,790,150	334,641,004	100%
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**%**	**2,313,991,430**	**1,852,032,420**	**3,191,496,750**	**3,683,516,532**		**2,313,991,430**	**7,849,540,382**	

4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Kegiatan dalam Rangka Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Kegiatan	518,320,130	1,758,882,220	473,930,550	446,242,490	100%	518,320,130	2,723,444,840	100%
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebiajakan, Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen	1,099,231,700	46,404,600	1,388,969,900	1,799,308,992	100%	1,099,231,700	2,944,945,292	100%
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	696,439,600	46,745,600	1,328,596,300	1,437,965,050	100%	696,439,600	2,181,150,250	100%
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dilaksanakan**		**796,345,940**	**817,524,962**	**721,462,270**	**878,772,281**		**796,345,940**	**2,492,643,183**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi dan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah yang difasilitasi	Produk Hukum	411,649,820	374,839,812	309,232,300	448,650,381	100%	411,649,820	1,235,140,013	100%
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kali	223,318,210	282,223,900	236,149,850	235,627,030	100%	223,318,210	741,169,140	100%
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sistem Informasi Hukum yang dikelola	Sistem	161,377,910	160,461,250	176,080,120	194,494,870	100%	161,377,910	516,334,030	100%
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama**		**49,514,900**	**22,013,650**	**64,743,880**	**428,538,079**		**49,514,700**	**500,066,429**	

4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Dalam Negeri yang difasilitasi	MoU	28,066,450	13,770,800	34,729,590	401,765,489	100%	28,066,450	443,602,739	100%
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	21,448,450	8,242,850	30,014,290	26,772,590	100%	21,448,250	56,463,690	100%
4	**01**	**03**			**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Cakupan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**		**769,603,273**	**893,573,960**	**940051090**	**1,168,727,293**		**984,677,143**	**3,046,978,396**	
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**%**	**306,060,343**	**403,350,141**	**435,517,260**	**680,869,928**		**328,814,633**	**1,413,034,702**	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD dan BLUD	Laporan	22,754,290	0	-	0	100%	22,754,290	22,754,290	100%
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	154,557,623	75,508,841	177,703,300	458,434,668	100%	154,557,623	688,501,132	100%
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasam Ekonomi Mikro Kecil	Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan	78,997,500	163,923,830	99,458,550	81,061,550	100%	78,997,500	323,982,880	100%
4	01	03	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD dan BLUD	Laporan	-	-	22,754,430	9,319,950	100%	-	9,319,950	100%

4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Laporan	72,505,220	163,917,470	135,600,980	132,053,760	100%	72,505,220	368,476,450	100%
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase ketersediaan data/informasi bidang Pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan**	**%**	**74,405,200**	**67,755,400**	**77,509,250**	**67,047,950**		**74,405,200**	**209,208,550**	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	74,405,200	67,755,400	77,509,250	67,047,950	100%	74,405,200	209,208,550	100%
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa**	**%**	**379,137,730**	**375,974,349**	**379,237,730**	**384,733,365**		**533,672,360**	**1,294,380,074**	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	139,160,810	153,035,065	139,160,810	178,237,532	100%	234,127,460	565,400,057	100%
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	146,590,000	136,924,950	146,690,000	139,088,855	100%	195,101,800	471,115,605	100%
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	93,386,920	86,014,334	93,386,920	67,406,978	100%	104,443,100	257,864,412	100%

4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase ketersediaan data/informasi Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan bagi pimpinan**	**%**	**10,000,000**	**46,494,070**	47,786,850	**36,076,050**		**47,784,950**	**130,355,070**	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Laporan	10,000,000	46,494,070	47,786,850	36,076,050	100%	47,784,950	130,355,070	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang cukup mamadai, juga didukung dengan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan organisasi, sehingga memungkinkan pencapaian kinerja yang memuaskan.

Pelaksanaan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kabupaten Luwu

Indikator	Target					Capaian					Rasio Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Na	CC (40,01)	CC (42,30)	CC (52,35)	B (59,03)	Na	CC (44,62)	CC (49,21)	CC (54,71)	B (64,22)	Na	CC (40,56)	CC (49,21)	CC (54,71)	B (64,22)
Persentase Jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	Na	Na	Na	Na	0.8	Na	Na	Na	Na	0.7	Na	Na	Na	Na	85%
Persentase jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	15.87	15.87	18.8	16.65	11.04	15.87	18.8	16.65	11.04	9.34	18%	18%	89%	66%	85%
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui penngadaan	64.59	64.59	63.93	53.72	56.47	64.59	63.93	53.72	56.47	57.88	99%	99%	84%	100%	100%
Persentase penyelesaian tapal batas antar kecamatan	70%	65%	70%	87%	95%	60%	60%	70%	90%	95%	60%	60%	70%	90%	95%
Jumlah analisa berita dan kebutuhan publik yang disampaikan kepada kepala daerah	260	260	300	350	500	250	252	288	290	504	85%	85%	88%	90%	90%
Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	12.730	18.901	19.989	20.190	15.431	12.731	19.703	20.013	21.951	15.838	78%	82%	87%	90%	90%
Persentase potensi sumber daya alam yang telah dimanfaatkan	50.80%	50%	49.9%	49.9%	50.9%	53.6%	48.50%	50.25%	50.25%	51.75%	53.6%	48.50%	50.25%	50.25%	51.75%

persentase ketersediaan sistem informasi tender	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
persentase aset sekretariat yang sudah direkonsiliasi	85%	87%	89%	90%	90%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
persentase paket tender yang diselesaikan tepat waktu	80%	85%	85%	85%	90%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
persentase besaran efisiensi nilai kontrak terhadap nilai pagu	1.80%	2.90%	3.25%	4.50%	5.67%	1.82%	3.83%	3.60%	5.96%	6.9%	1.82%	3.83%	3.60%	5.96%	6.9%
nilai LPPD	2.45	2.51	2.51	2.70	3.50	2.40	2.51	2.51	2.67	2.70	2.40	2.51	2.51	2.67	2.60
Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu yang sama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pejabat yang menyampaikan LHKPN	60%	75%	85%	85%	90%	25%	80%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%
Persentase ketersediaan analisis jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	80%	85%	90%	100%	100%	85%	90%	90%	100%	100%
Persentase UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	80%	80%	85%	87%	90%	80%	85%	85%	90%	90%	80%	85%	5%	90%	90%

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pemantauan, evaluai dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungi penunjang urusan pemerintahan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu masih terdapat berbagai permasalahan yang sampai saat ini masih membutuhkan pembenahan untuk pencapaian kinerja yang lebih maksimal, adapun permasalahan pada Sekretariat Daerah pada saat ini adalah :

1. Kurangnya Jumlah Staf Dalam rangka optimalisasi Tupoksi di Sekretariat Daerah
2. Penguasaan terhadap Tupoksi beberapa aparat masih lemah sehingga hasil koordinasi tidak maksimal
3. Belum tertatanya sistem kerja yang terpadu, efektif dan efisien pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah
4. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi pada setiap Bagian di Sekretariat Daerah ;
5. Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Sekretariat Daerah

Selain permasalahan tersebut di atas juga ditemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti :

1. Regulasi yang sering berubah-ubah
2. Disiplin Pegawai masih kurang

permasalahan dan hambatan yang terdapat Sekretariat Daerah tentu saja akan berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran Kepada Daerah jika tidak segera dibenahi, adapun tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu:

1. Tujuan
    - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
    - Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat; dan
    - Meningkatnya Daya Saing Daerah.
2. Sasaran
    - Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah;
    - Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; dan
    - Meningkatkan Perekonomian Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD, semua program dan kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD semuanya diakomodir ke dalam Renja, namun mengingat keterbatasan anggaran kemungkinan terdapat program dan kegiatan yang tidak terakomodir ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta kemungkinan terdapat besaran rupiah yang berbeda dari Renja ke RKA, adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel T-C. 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Luwu	**Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**44.251.591.067**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Luwu	**Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**26,588,247,004**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100%	530.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100%	429,527,600	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara Tepat Waktu	100%	11.159.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara Tepat Waktu	100%	9,687,209,970	

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	146.091.067	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	168,738,750	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik berdasarkan hasil penilaian Perjanjian Kinerja	100%	500.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik berdasarkan hasil penilaian Perjanjian Kinerja	100%	259,170,000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	3.860.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	2,584,926,975	
6	Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasaran Kantor	100%	8.250.000.000	Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasaran Kantor	100%	760,030,110	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100%	10.600.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100%	6,478,977,800	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Persentase BMD yang dipelihara/direhab	100%	3.435.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Persentase BMD yang dipelihara/direhab	100%	1,173,755,650	
9	Administrasi Keungan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Luwu	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	1.700.000.000	Administrasi Keungan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Luwu	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	1,491,773,377	

10	Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Luwu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan	100%	3.000.000.000	Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Luwu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan	100%	2,689,273,092	
11	Penataan Organisasi	Kab. Luwu	Persentase pelaksanaan Penataan Organisasi	100%	321.500.000	Penataan Organisasi	Kab. Luwu	Persentase pelaksanaan Penataan Organisasi	100%	462,261,630	
12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	750.000.000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	402,602,050	
2.	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Kab. Luwu**	**Cakupan Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**8.980.550.000**	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Kab. Luwu**	**Cakupan Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**3,551,780,920**	
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	850.000.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	391,928,650	
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	6.280.550.000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	2,313,991,430	
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dilaksanakan	100%	1.300.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dilaksanakan	100%	796,345,940	

4	Fasilitasi Kerja Sama	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama	100%	500.000.000	Fasilitasi Kerja Sama	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama	100%	49,514,900	
3.	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Kab. Luwu**	**Cakupan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**1.148.580.500**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Kab. Luwu**	**Cakupan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**769,603,273**	
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	650.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	306,060,343	
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Luwu	Persentase ketersediaan data/informasi bidang Pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	100%	75.003.200	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Luwu	Persentase ketersediaan data/informasi bidang Pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	100%	74,405,200	
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	100%	375.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	100%	379,137,730	
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Luwu	Persentase ketersediaan data/informasi Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan bagi pimpinan	100%	48.577.300	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Luwu	Persentase ketersediaan data/informasi Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan bagi pimpinan	100%	10,000,000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang,jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Terkait dengan kebijakan Nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional sesui dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah “Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektif dan bersih”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Akhir Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (satu) Tahunan yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah adalah pencapaian Tujuan dan Sasaran. Berdasarkan hal tersebut di atas serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka disusunlah 3 Program yang membawahi 20 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabaupaten/Kota**
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumn RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan AN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD
    - Rekonsiliasi an Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
    - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Lainnya
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Peyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Penyediaan Bahan/Material
    - Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6) Pengdaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Pengadaan Mebel
    - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Pemeliharaan Mebel
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Knator atau Bangunan Lainnya

9) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    - Penyediaan Pakaian Dina dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dn Wakil Kepala Daerah
    - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
10) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
    - Penyediaan Kebutuhan Kepala Rumah Tangga Daerah
    - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
    - Penyediaan Keutuhan Rumah Tngga Sekretariat daerah
11) Penataan Organisasi
    - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan
    - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
    - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
    - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana\
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
12) Pelaksanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
    - Fasilitasi Keprotokoleran
    - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
    - Penokumentasian Tugas Pimpinan

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1) Administrasi Tata Pemerintahan
    - Penataan Administrasi Pemerintahan
    - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
    - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
2) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
    - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual
    - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
    - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
3) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
    - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
    - Fasilitasi Bantuan Hukum
    - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4) Fasilitasi Kerjasama Daerah
    - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
    - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
    - Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
    - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
    - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
    - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
    - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD

2) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
    - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
3) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    - Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa
4) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
    - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Berdasarkan penyebaran lokasi program dan kegiatan, hampir seluruh program dan kegiatan Sekretariat Daerah berlokasi di Pemda Luwu, adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan di luar Sekretariat Daerah seperti Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Untuk lebih rinci program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C. 33

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2025 Serta Perkiraan Maju Anggaran 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2025			Catatan Penting	Rencana Awal Tahun Anggaran 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6		6	7
4	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah**			**44,251,591,067**			**56.716.326.453**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu**			**530.000,000**			**597.465.297**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Belopa	100%	300.000.000		100%	350.000.000
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Belopa	100%	30.000.000		100%	32.000.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Belopa	100%	25.000.000		100%	30.000.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Belopa	100%	60.000.000		100%	60.000.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Belopa	100%	35.000.000		100%	35.000.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Belopa	100%	25.000.000		100%	25.000.000

4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD yang disusun (LAKIP)	Belopa	100%	55.000.000		100%	65.465.297
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara Tepat Waktu**			**11.159.000.000**			**11.634.360.006**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan Tunjangan sesuai Ketentuan	Belopa	100%	9.544.000.000		100%	9.954.000.000
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diverifikasi	Belopa	100%	1.500.000.000		100%	1.550.000.000
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Belopa	100%	15.000.000		100%	16.000.000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Belopa	100%	15.000.000		100%	116.258.741
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	Belopa	100%	30.000.000		100%	33.698.752
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	Belopa	100%	30.000.000		100%	33.789.397
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Belopa	100%	25.000.000		100%	30.613.116
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD**			**146.091.067**			**152.501.150**
4	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Belopa	100%	120.000.000		100%	122.698.000
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Baranag Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi BMD yang disusun	Belopa	100%	10.130.000		100%	13.740.296
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Branfg Milik Daerah	Belopa	100%	15.961.067		100%	16.062.854

4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik berdasarkan hasil penilaian Perjanjian Kinerja**		100%	**500.000.000**		100%	**1.900.000.000**
4	01	01	2.05	02	Belanja Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Besera Atribut Kelengkapannya	Belopa	100%	400.000.000		100%	400.000.000
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumalh ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Belopa	100%	500.000.000		100%	1.500.000.000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi perkantoran**			**3.860.000.000**			**3.960.000.000**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Belopa	100%	100.000.000		100%	150.000.000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Belopa	100%	350.000.000		100%	350.000.000
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan	Belopa	100%	350.000.000		100%	350.000.000
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Belopa	100%	300.000.000		100%	350.000.000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Belopa	100%	200.000.000		100%	200.000.000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	Belopa	100%	250.000.000		100%	250.000.000
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Belopa	100 Buah	10.000.000		1000 Buah	10.000.000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan	Belopa	100%	1.500.000.000		100%	1.500.000.000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Belopa	100%	450.000.000		100%	450.000.000
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Belopa	100%	350.000.000		100%	350.000.000

4	**01**	**01**	**2.07**		**Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasaran Kantor**			**8.250.000.000**			**8.200.000.000**
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belopa	100%	4.00.000.000		100%	4.000.000.000
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Belopa	7 Unit	4.000.000.000		2 Unit	2.000.000.000
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur yang diadakan	Belopa	100%	3..000.000.000		100%	1.500.000.000
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Belopa	100%	800.000.000		100%	300.000.000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**			**6,478,977,800**			**12.575.000.000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan Keluar yang diregistrasi	Belopa	100%	100.000.000		100%	75.000.000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telepon, Air dan Listrik	Belopa	100%	2.500.000.000		100%	2.500.000.000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Operasional Peralatan dan Perlengkapan Kanrtor yang disediakan	Belopa	100%	1.000.000.000		100%	1.000.000.000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa	100%	7.000.000		100%	9.000.000.000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD yang dipelihara/direhab**			**3.435.000.000**			**3.625.000.000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peroranagn Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabtan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Belopa	100%	300.000.000		100%	400.000.000

4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Belopa	100%	1.500.000.000		100%	1.500.000.000
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Belopa	20 Unit	-		20 Unit	50.000.000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Belopa	30 Unit	-		30 Unit	75.000.000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	Belopa	100%	1.000.000.000		100%	1.000.000,000
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Belopa	100%	500.000.000		100%	500,000,000
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Belopa	100%	10.000.000		100%	100,000,000
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keungan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			**1.700.000.000**			**9.150.000.000**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah	Belopa	100%	**700.000.000**		100%	8.000,000,000
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Belopa	100%	300.000.000		100%	350.350.000
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Medical Check Up/ Pelayanan Kesehatan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Belopa	100%	250.000.000		100%	350.000.000
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional yang dibutuhkan	Belopa	100%	450,000,000		100%	450.000.000

4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan**			**3.000.000.000**			**3,600,000,000**
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Belopa	100%	1.500.000.000		100%	1.600.000.000
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wajkil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Belopa	100%	1.000.000.000		100%	1.300.000.000
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kerbutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Belopa	100%	500.000.000		100%	700.000.000
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase pelaksanaan Penataan Organisasi**			**321.500.000**			**372.000.000**
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Belopa	100%	85.500.000		100%	100.000.000
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Belopa	100%	86.000.000		100%	90.000.000
4	01	01	2.13	03	Penigkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Belopa	100%	60.000.000		100%	70,000.000
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang di monitoring	Belopa	100%	10,000,000		100%	12.000.000
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Belopa	100%	80.000.000		100%	100.000.000
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**			**750.000.000**			**950.000.000**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Keprotokoleran yang difasilitasi	Belopa	100%	200.000.000		100%	250.000.000
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dialog/Audiensi/Koordinasi Pimpinan yang di Fasilitasi	Belopa	100%	400,000,000		100%	500.000.000
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pimpinan yang di dokumentasikan	Belopa	100%	150.000.000		100%	200.000.000
4	**01**	**02**			**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**			**8.980.550.000**			**10.640.000.000**

4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan**		100%	**850.000.000**		100%	**1.050.000.000**
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan	Belopa	100%	150.000.000		100%	220.000.000
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Belopa	100%	550.000.000		100%	630.000.000
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Belopa	100%	500.000.000		100%	580.000.000
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**			**6.280.550.000**			**7.570.030.000**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Kegiatan dalam Rangka Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Belopa	100%	650.550.000		100%	750.030.000
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebiajakan, Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Belopa	100%	4.580.000.000		100%	5.300.000.000
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Belopa	100%	1.100.000.000		100%	1.520.000.000
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dilaksanakan**			**1.350.000.000**			**1.500.000.000**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi dan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah yang difasilitasi	Belopa	100%	500.000.000		100%	600.000.000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum	Belopa	100%	300.000.000		100%	450.000.000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sistem Informasi Hukum yang dikelola	Belopa	100%	550.000.000		100%	700.000.000
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama**			**500.000.000**			**520.000.000**
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Dalam Negeri yang difasilitasi	Belopa	100%	150.000.000		100%	160.000.000
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja sama Luar Negeri	Jumlah Kerjasama Luar Negeri yang difasilitasi	Belopa	100%	200.000.000			200.000.000

4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Belopa	100%	150.000.000		100%	160.000.000
4	**01**	**03**			**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Cakupan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**			**1.148.580.500**			**1.183.208.700**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**			**650.000.000**			**675.000.000**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD dan BLUD	Belopa	100%	50.000.000		100%	50.000.000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Belopa	100%	250.000.000		100%	250.000.000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasam Ekonomi Mikro Kecil	Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Belopa	100%	150.000.002		100%	275.000.000
4	01	03	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD dan BLUD	Belopa	100%	-		100%	-
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Belopa	100%	100.000.000		100%	100.000.000
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase ketersediaan data/informasi bidang Pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan**			**75.003.200**			**79.003.200**
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Belopa	100%	7475.003.200		100%	79.003.200
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa**			**375.000.000**			**380.000.000**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Belopa	100%	220.000.000		100%	225.000.000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Belopa	100%	60.000.000		100%	65.000.000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Belopa	100%	95.000.000		100%	90.000.000

4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase ketersediaan data/informasi Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan bagi pimpinan**			**48.577.300**			49.205.500
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Belopa	100%	48.477.300		100%	49.205.500

BAB IV

RENCANA AWAL KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Awal Kerja

Rencana Awal Kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, adapun jumlah program yang direncanakan untuk tahun anggaran 2025 sebanyak 3 Program, 20 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan, penyusunan Rencana Awal Kerja Sekretariat Daerah tetap mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan, kebutuhan pendanaan Tahun Anggaran 2025 pada Sekretariat Daerah direncanakan sebesar ***Rp 54.380.721.567 (Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)*** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Untuk lebih rinci Program dan Kegiatan dapat dilihat pada table berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					SEKRETARIAT DAERAH								**54.380.721.567**					**68.539.565.153**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								**54.380.721.567**					**68.539.565.153**
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**54.380.721.567**					**68.539.565.153**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**44.251.591.067**					**56.716.326.453**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**530.000.000**					**597.465.297**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	3 Dokumen	100 %	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	350.000.000

						pemerintahan daerah		Perangkat daerah yang disusun						Umum					
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	3 Dokumen	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	32.000.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1 Dokumen	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1 Dokumen	100 %	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	60.000.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1 Dokumen	100 %	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	35.000.000

						daerah	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	daerah yang disusun								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1 Laporan	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.000.000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Laporan	100 %	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	65.465.297
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**11.159.000.000**					**11.634.360.006**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	100 Orang/bulan	100 %	9.544.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	100 Orang/bulan	9.954.000.000

						pemerintahan daerah		daerah yang disusun						Umum		ASN			
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	4 Dokumen	100 %	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	1.550.000.000
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	3 Dokumen	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	16.000.000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	3 Laporan	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	16.258.741
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	3 Dokumen	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	3 Dokumen	33.698.752

																Lanjut Pemeriksaan		
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	14 Laporan	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	30,000,.789.397 7000
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	3 Dokumen	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	30.613.116
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**146.091.067**					**152.501.150**
4	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Laporan	100 %	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	2 Laporan	122.698.000

																Milik Daerah pada SKPD		
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Laporan	100 %	610.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	13.740.296
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Laporan	100 %	15.961.067	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	16.062.854
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**500.000.000**					**1.900.000.000**
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	90 Paket	100 %	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	400.000.000
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	10 Orang	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	15 Orang	1.500.000.000

						pemerintahan daerah	Perundang-Undangan	Daerah yang disusun						Umum		Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**3.860.000.000**					**3.960.000.000**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	20 Paket	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	150.000.000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	17 Paket	100 %	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	350.000.000
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Paket	100 %	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	350.000.000
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	24 Paket	100 %	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	350.000.000

4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	3 Paket	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	200.000.000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	3 Dokumen	100 %	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	250.000.000
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	-Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1000 Buah	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Bahan/Material yang disediakan	1000 Buah	10.000.000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	3 Laporan	100 %	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	1.500.000.000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	42 Laporan	100 %	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	450.000.000

4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	0	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	0 0	100 %	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 0	350.000.000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**8.250.000.000**					**8.200.000.000**
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Unit	100 %	**4.000.000.000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	**4.000.000.000**
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	7 Unit	100 %	4.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2.000.000.000
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	100 Unit	100 %	3.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	1.500.000.000

4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	40 Unit	100 %	800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	400.000.000
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	**30 Unit**	100 %	**450.000.000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**20 Unit**	**300.000.000**
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**10.600.000.000**					**12.575.000.000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diregistrasi	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2500 Lembar	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diregistrasi		75.000.000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Laporan	100 %	2.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2.500.000.000

4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Laporan	100 %	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.000.000.000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Laporan	100 %	7.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.000.000.000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah							**3.435.000.000**					**3.625.000.000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	5 Unit	100 %	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	400.000.000

4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	486 Unit	100 %	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	486 Unit	1.500.000.000
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan mebel	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Mebel yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	20 Unit	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang dipelihara	20 Unit	50.000.000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	30 unit	100 %	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	75.000.000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	3 Unit	100 %	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.000.000.000

4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Unit	100 %	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	500.000.000
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Unit	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah							**1.700.000.000**					**19.150.000.000**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Orang/ Bulan	100 %	700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	8.000.000

4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	5 Paket	100 %	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	350.000.000
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Orang	100 &	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	350.000.000
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Orang/ Bulan	100 &	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	450.000.000
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**								**3.000.000.000**					**3.600.000.000**

4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Tersedianya Penunjang Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	5 Paket	100 &	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	1.600.000.000
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Tersedianya Penunjang Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	5 Paket	100 &	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	1.300.000.000
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Tersedianya Penunjang Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	5 Paket	100 &	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 Paket	700.000.000
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**								**321.500.000**					**372.000.000**
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Cakupan penyelenggaraan Penataan Organisasi	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	5 Dokumen	100 %	85.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	100.000.000
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Cakupan penyelenggaraan Penataan Organisasi	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	7 Laporan	100 %	86.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan	7 Laporan	90.000.000

						pemerintahan daerah								Umum		Publik dan Tata Laksana		
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Cakupan penyelenggaraan Penataan Organisasi	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	5 Dokumen	100 %	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	70.000.000
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Cakupan penyelenggaraan Penataan Organisasi	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	5 Dokumen	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Dokumen	12.000.000
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Cakupan penyelenggaraan Penataan Organisasi	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	5 Dokumen	100 %	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dokumen	100.000.000
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**								**750.000.000**					**950.000.000**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan penyelenggaraan Protokol dan Komunikasi	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Laporan	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokola	2 Laporan	250.000.000

						pemerintahan daerah		Pimpinan						Umum		n			
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cakupan penyelenggaraan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Laporan	100 %	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	500.000.000
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Cakupan penyelenggaraan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1 Laporan	100 %	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	200.000.000
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**8.980.550.000**					**210.640.030.000**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**								**850.000.000**					**1.050.000.000**
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Nilai LPPD	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Cakupan penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	2885 Nilai	2 Dokumen	100 %	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	220.000.000
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Nilai LPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Cakupan penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	2885 Nilai	1 Dokumen	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	250.000.000

4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Nilai LPPD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	2885 Nilai	1 Dokumen	100 %	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	580.000.000
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**								**6.280.550.000**					**7.570.030.000**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Cakupan pelaksanaan bina mental spritual dan evaluasi kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Dokumen	100 %	650.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 Dokumen	750.030.000
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Cakupan pelaksanaan bina mental spritual dan evaluasi kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1 Dokumen	100 %	4.580.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	1 Dokumen	4.620.000.000

							Pengendalian Penduduk dan KB									Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Cakupan pelaksanaan bina mental spritual dan evaluasi kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1 Dokumen	100 %	1.100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1.520.000.000

4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**								**1.350.000.000**					**1.500.000.000**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	315 Dokumen	100 %	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	315 Dokumen	600.000.000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	20 Kasus	100 %	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	450.000.000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1 Dokumen	100 %	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen	700.000.000
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**								**500.000.000**					**520.000.000**
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Cakupan penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	25 Persen	2 Dokumen	100 %	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen	160.000.000

4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja sama Luar Negeri	Jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi	Jumlah kerja sama luar negeri yang difasilitasi	Cakupan penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	25 Persen	1 Laporan	100%	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kerja sama luar negeri yang difasilitasi	1 Laporan	200.000.000
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Cakupan penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	25 Persen	5 Laporan	100 %	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	160.000.000
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**1.148.580.500**					**1.183.208.700**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**								**650.000.000**					**675.000.000**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Cakupan penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	75 jumlah	1 Dokumen	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	50.000.000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Cakupan penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	75 jumlah	1 Laporan	100 %	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	250.000.000

4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Cakupan penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	75 jumlah	1 Dokumen	100 %	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	275.000.000
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Cakupan penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	75 jumlah	1 Dokumen	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	100.000.000
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**								**75.003.200**					**79.003.200**
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase penyelesaian tender Paket Pekerjaan Tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan administrasi pembangunan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	86 Persen	1 Laporan	100 %	75.003.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	79.003.200
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**								**375.000.000**					**380.000.000**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan Sistem SPSE beroprasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	85 Persen	1 Dokumen	100 %	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	225.000.000

4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase ketersediaan Sistem SPSE beroprasi	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cakupan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	85 Persen	1 Dokumen	100 %	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	65.000.000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan Sistem SPSE beroprasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	85 Persen	3 Orang	100 %	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang	90.000.000
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**								**48.577.300**					**49.205.500**
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang telah dilaksanakan secara maksimal	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Cakupan penyelenggaraan pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	4 Dokumen	100 %	48.577.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	49.205.500

BAB V
PENUTUP

Rencana Awal Kerja (Ranwal) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan hasil perumusan yang disesuaikan dengan kondisi berkembang saat ini serta proyeksi satu tahun mendatang (2026) dengan memperhatikan penerimaan dana dan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga selalu dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Pencapaian hasil pelaksanaan Rencana Awal Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu diharapkan dapat memberi konstribusi optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Selain itu dalam pelaksanaan Rencana Akhir ini dibutuhkan peran serta dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat meliputi berbagai hal termasuk pembiayaan.

Demikian Rencana Awal ini disajikan sebagai gambaran arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu TA. 2025. Diharapkan kesungguhan dari semua pihak untuk melaksanakan Rencana Kerja ini dengan sebaik – baiknya sehingga sasaran program akan dapat dicapai.

Belopa, Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU

Drs. H. SULAIMAN, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19651129 198603 1 011



RENCANA KERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU

TAHUN ANGGARAN

2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Belopa, 1 Mei 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LUWU



Drs. H. BUSTAN. M.Si
PKT Pembina Utama Muda
NIP. 197212171993031004

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....

DAFTAR ISI.....

BAB I..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Rencana Kerja..... 4

BAB II..... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2023..... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu..... 8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu..... 13

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 15

2.5 Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat..... 25

BAB III..... 26

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 26

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu..... 27

BAB IV..... 26

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu..... 26

BAB V..... 34

Penutup..... 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut (RENJA PD), adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disempurnakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai dokumen rencana tahunan SKPD. RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu mempunyai arti yang strategis karena memuat kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

a. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari penyempurnaan visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. RENJA PD merupakan acuan SKPD untuk perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun 2025;
c. RENJA PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

Untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1

tahun (RKPD), maka dalam pelaksanaannya setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (RENSTRA-SKPD). RENSTRA-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran RENSTRA-SKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan SKPD yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Setelah RENJA PD dibuat disusunlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tim Anggaran membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomer 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan

Regional

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024;
13. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
14. Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Angoota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan atau dasar dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewajibannya secara terarah, efisien, dan efektif, selain itu dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatan kesekretariatan dan pelayanan kedewanan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2025;
2. Sebagai rencana dalam memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan;
3. Sebagai sarana mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025;
4. Merupakan rencana dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD .

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu yaitu :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mulai dari awal perencanaan;
2. Mewujudkan pelayanan tugas dan wewenang kedewanan yang aspiratif, transparan, akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam bentuk rancangan rencana kerja;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan;
5. Dasar untuk melaksanakan program-program dan kegiatan kedewanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2023 Dan Capaian Renstra

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja dan evaluasi.

Evaluasi terhadap Recana Kerja meliputi 3 (tiga) hal yaitu, kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta monev hasil rencana program dan kegiatan.

Dalam penyusunan RENJA 2025 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2023. Evaluasi terhadap program/kegiatan, anggaran RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu tahun anggaran 2023, yaitu :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4				**Urusan Pendukung Pemerintah**									
4	**02**			**Sekretariat DPRD**									
4	**02**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	**02**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**99 %**	**98 %**	**97 %**	**100%**	**100%**	**98 %**	**98 %**	**98 %**
4	**02**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**99 %**	**99 %**	**98 %**	**100%**	**100%**	**98 %**	**98 %**	**98 %**
4	**02**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Barang Milik daerah dalam kondisi baik**	**95 %**	**100%**	**95%**	**100%**	**100 %**	**95%**	**95%**	**95%**
4	**02**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**97 %**	**96 %**	**96 %**	**100%**	**100 %**	**97 %**	**97 %**	**97 %**
4	**02**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**98 %**	**97 %**	**97 %**	**100%**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**
4	**02**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**97 %**	**96 %**	**0 %**	**0 %**	**0%**	**0 %**	**0 %**	**0 %**
4	**02**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	**98 %**	**97 %**	**96 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**	**98 %**
4	**02**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**92 %**	**90 %**	**90 %**	**100%**	**100%**	**91 %**	**91 %**	**91 %**
4	**02**	**01**	**2.15**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Cakupan penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**99 %**	**98 %**	**98 %**	**100%**	**100%**	**99 %**	**99 %**	**99 %**
4	**02**	**01**	**2.16**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Cakupan penyelenggaraan layanan administrasi**	**98 %**	**97 %**	**97 %**	**100%**	**100%**	**98 %**	**98 %**	**98 %**

					DPRD								
4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	100%
4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda/Peraturan/Kajian/Naskah Akademik yang difasilitasi pembentukannya	3	6	9	7	75 %	9	24	100%
4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	5	5	5	5	100 %	5	15	100%
4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	2	2	2	2	100 %	2	6	100%
4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kapasitas DPRD	98 %	95%	95%	90%	94%	98 %	97 %	97 %
4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	96%	95%	95%	90%	94%	97 %	97 %	97 %
4	02	02	2.06	Fasilitasi Tugas DPRD	Cakupan penyelenggaraan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	96%	94%	94%	95 %	105 %	96 %	96 %	96 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :
   a) Jumlah SDM dan tingkat pendidikan sudah memadai
   b) Aset sarana dan prasarana yang memadai;
   c) Anggaran yang memadai;
   d) Peran serta dukungan masyarakat.
2. Faktor Penghambat :
   a) Kompetensi sumber daya manusia (tenaga kerja) yang tidak sehat;
   b) Perkembangan teknologi di bidang media elektronik;

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2023

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2022	2023	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tersedianya Rencana Kerjka Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD	-	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Terseusunnya progran-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD	-	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan	-	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Cakupan Ketersediaan Pertauran Daerah	-	8	6	9	10	8	9	9	

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan RENJA tahun 2023 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu

Dalam pelaksanaan tugas, masih dijumpai adanya beberapa isu-isu kerja yang menjadi hambatan dan tantangan, yaitu :

1. Peran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah belum optimal, disebabkan belum berjalannya peran dan fungsi politik DPRD, partai politik dan ormas dalam melaksanakan peran dan fungsi politik;
2. Belum sinerginya peraturan perundangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini antara lain disebabkan oleh dinamika perubahan dalam masyarakat dan kebijakan otonomi daerah yang belum mantap, kesadaran dan penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) relatif rendah;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik yang antara lain disebabkan sarana dan prasarana, kapasitas aparat dalam pelaksanaan kepemerintahan yang amanah belum sepenuhnya dilaksanakan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Luwu, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap seperangkat peraturan tentang otonomi daerah;
5. Belum optimalnya pemanfaatan akses teknologi informasi, antara lain disebabkan oleh rendahnya pendidikan, ekonomi dan ketimpangan sarana dan prasarana terutama dipedesaan;

   Belum optimalnya kerjasama daerah antara lain disebabkan kemampuan aparatur pemerintah yang di daerah belum profesional, peraturan daerah tersebut belum sinkron dalam mendukung kerjasama daerah;

6. Belum sinerginya dan sinkronnya regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dan kadang-kadang berubah-ubah yang mengakibatkan multitafsir sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengimplementasikan dan optimalisasikan tertib administrasi keuangan daerah;
7. Belum optimalnya peningkatan pengelolaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini antara lain disebabkan belum mantapnya

   peraturan perundangan tentang kerjasama daerah, belum optimalnya usaha intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta keterbatasan sumber-sumber PAD;
8. Belum optimalnya inventarisasi aset daerah yang disebabkan oleh penggunaan dan pemanfaatan aset daerah serta masih lemahnya manajemen aset;
9. Belum optimalnya tenaga pemeriska dan aparatur pengawas yang disebabkan oleh terbatasnya aparatur pemeriksa dan aparatur pengawas, dukungan peraturan perundangan serta kesadaran hukum masyarakat.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD (yang dibagikan)					Hasil Analisis Kebutuhan (R. Kebutuhan)					Catatan Penting
No	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	**UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAH**					**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**28.758.806.012**	**FUNGSI LAINNYA**				**34,906,035,167**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**KAB. LUWU**	**CAKUPAN KETERSEDIAAN PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**22.932.258.642**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**KAB. LUWU**	**CAKUPAN KETERSEDIAAN PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**23,751,500,718**	
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**97%**	**39.703.206**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**97%**	**60,033,358**	
4.02.01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	11.336.603	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	16,519,679	
4.02.01.2.01.02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	4.660.000	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	8,118,000	
4.02.01.2.01.03	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi*	*1 Dokumen*	4.660.000	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi*	*1 Dokumen*	6,990,000	

	Rancangan Awal RKPD (yang dibagikan)					Hasil Analisis Kebutuhan (R. Kebutuhan)					Catatan Penting
No	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					*Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*			
4.02.01.2.01.04	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	4.660.000	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	9,320,000	
4.02.01.2.01.05	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	4.660.000	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*1 Dokumen*	9,320,000	
4.02.01.2.01.07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	9.726.603	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	9,765,679	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**98%**	**4.053.007.042**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**98%**	**3,929,143,768**	
4.02.01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*540 Orang/Bulan*	3.732.997.653	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*540 Orang/ Bulan*	3,620,196,689	
4.02.01.2.02.03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*12 Dokumen*	300.290.000	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*12 Dokumen*	289,130,000	
4.02.01.2.02.05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	5.066.603	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*1 Laporan*	5,105,679	

	Rancangan Awal RKPD (yang dibagikan)					Hasil Analisis Kebutuhan (R. Kebutuhan)					Catatan Penting
No	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.01.2.02.06	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*3 Dokumen*	4.926.183	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*3 Dokumen*	4,945,721	
4.02.01.2.02.07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*6 Laporan*	9.726.603	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*6 Laporan*	9,765,679	
4.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Kab. Luwu***	**Persentase Barang Milik daerah dalam kondisi baik**	**95%**	**9.266.183**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Kab. Luwu***	**Persentase Barang Milik daerah dalam kondisi baik**	**95%**	**8,685,721**	
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Kab. Luwu*	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	9.266.183	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Kab. Luwu*	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8,685,721	
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**96%**	**319.049.280**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**96%**	**460,991,500**	
4.02.01.2.05.01	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	-	0	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*1 Unit*	5,500,000	
4.02.01.2.05.02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	*46 Paket*	30.360.000	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	*47 Paket*	30,360,000	
4.02.01.2.05.03	*Pendataan dan Penglolaan Administrasi Kepegawaian*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*12 Dokumen*	2.893.400	*Pendataan dan Penglolaan Administrasi Kepegawaian*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*12 Dokumen*	4,279,000	
4.02.01.2.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan*	*3 Orang*	52.500.000	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan*	*3 Orang*	101,845,500	

	Rancangan Awal RKPD (yang dibagikan)					Hasil Analisis Kebutuhan (R. Kebutuhan)					Catatan Penting
No	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dan Pelatihan					*dan Pelatihan*			
4.02.01.2.05.11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*12 Orang*	233.295.880	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*24 Orang*	319,007,000	
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Presentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**97%**	**504.245.567**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Luwu**	**Presentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**97%**	**819,959,360**	
4.02.01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*5 Paket*	7.411.687	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*5 Paket*	7,613,500	
4.02.01.2.06.03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*6 Paket*	3.741.780	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*6 Paket*	5,726,000	
4.02.01.2.06.04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*10 Paket*	61.560.100	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*10 Paket*	60,146,040	
4.02.01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*3 Paket*	24.874.400	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*3 Paket*	24,162,500	
4.02.01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*5 Dokumen*	107.500.000	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*5 Dokumen*	213,400,000	
4.02.01.2.06.07	*Penyediaan Bahan/Material*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	*47 Paket*	118.657.760	*Penyediaan Bahan/Material*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	*47 Paket*	125,974,320	

	Rancangan Awal RKPD (yang dibagikan)					Hasil Analisis Kebutuhan (R. Kebutuhan)					Catatan Penting
No	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.01.2.06.08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	27.900.000	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	37,900,000	
4.02.01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	152.599.840	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*30 Laporan*	345,037,000	
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Luwu**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**90%**	**214.253.576**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Luwu**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**90%**	**508,925,800**	
4.02.01.2.07.01	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	-	0	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*4 Unit*	78,242,000	
4.02.01.2.07.02	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-	0	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*3 Unit*	-	
4.02.01.2.07.06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*17 Unit*	113.975.576	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*16 Unit*	144,267,800	
4.02.01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*15 Unit*	100.278.000	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*40 Unit*	286,416,000	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	**97%**	944.329.500	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	**97%**	965,793,400	

	Rancangan Awal RKPD (yang dibagikan)					Hasil Analisis Kebutuhan (R. Kebutuhan)					Catatan Penting
No	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	9.600.000	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	9,600,000	
4.02.01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	380.329.500	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	378,993,400	
4.02.01.2.08.03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	9,600,000	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	9,600,000	
4.02.01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	544.800.000	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	567,600,000	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**87%**	**418.974.792**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90%**	**349,833,147**	
4.02.01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala*	*3 Unit*	144.510.000	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala*	*3 Unit*	115,826,840	
4.02.01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala*	*32 Unit*	225.790.000	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala*	*32 Unit*	170,918,235	
4.02.01.2.09.06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipeliharan*	*177 Unit/Set*	10.544.792	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipeliharan*	*177 Unit/Set*	12,512,208	
4.02.01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kab. Luwu*	*Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi*	*15.000 M^2*	31.730.000	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kab. Luwu*	*Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi*	*5 Unit*	40,410,864	

	Rancangan Awal RKPD (yang dibagikan)					Hasil Analisis Kebutuhan (R. Kebutuhan)					Catatan Penting
No	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab. Luwu*	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala*	*7 Unit/Set*	6.400.000	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab. Luwu*	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala*	*7 Unit/Set*	10,165,000	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**98%**	**15.408.670.264**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**98%**	**15,603,185,552**	
4.02.01.2.15.01	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*	*420 Orang/Bulan*	14.991.825.264	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*	*420 Orang/Bulan*	15,283,185,552	
4.02.01.2.15.02	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	*6 Paket*	416.845.000	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	*6 Paket*	320,000,000	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan layanan administrasi DPRD**	**97%**	**1.020.759.232**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Kab. Luwu**	**Cakupan penyelenggaraan layanan administrasi DPRD**	**97%**	**1,044,949,112**	
4.02.01.2.16.02	*Fasilitasi Fraksi DPRD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Fraksi DPRD yang difasilitasi*	*10 Fraksi*	96.613.600	*Fasilitasi Fraksi DPRD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Fraksi DPRD yang difasilitasi*	*10 Fraksi*	120,845,000	
4.02.01.2.16.04	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah bulan/kali pengadaaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD*	*36 Bulan*	924.145.632	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah bulan/kali pengadaaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD*	*36 Bulan*	924,104,112	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**KAB. LUWU**	**PERSENTASE PENYELESAIAN PENYUSUNAN PERDA SESUAI PROLEGDA**	**98%**	**5.826.547.370**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**KAB. LUWU**	**PERSENTASE PENYELESAIAN PENYUSUNAN PERDA SESUAI PROLEGDA**	**98%**	**11,154,534,449**	

	Rancangan Awal RKPD (yang dibagikan)					Hasil Analisis Kebutuhan (R. Kebutuhan)					Catatan Penting
No	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Kab. Luwu**	**Jumlah Perda/Peraturan/Kajian/Naskah Akademik yang difasilitasi pembentukannya**	**1 Perda**	**694.197.540**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Kab. Luwu**	**Jumlah Perda/Peraturan/Kajian/Naskah Akademik yang difasilitasi pembentukannya**	**4 Perda**	**2,004,564,200**	
4.02.02.2.01.01	*Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*1 Dokumen*	5,500,000	*Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*1 Dokumen*	5,500,000	
4.02.02.2.01.02	*Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*3 Ranperda*	640.197.540	*Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*2 Ranperda*	1,854,564,200	
4.02.02.2.01.03	*Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan*	*3 Dokumen*	3.500.000	*Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan*	*2 Dokumen*	9,500,000	
4.02.02.2.01.04	*Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi*	*1 Naskah*	45,000,000	*Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi disusun*	*2 Naskah*	135,000,000	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Kab. Luwu**	**Jumlah dokumen kebijakan anggaran**	**5 Dokumen**	**646.749.650**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Kab. Luwu**	**Jumlah dokumen kebijakan anggaran**	**5 Dokumen**	**524,886,450**	
4.02.02.2.02.01	*Pembahasan KUA dan PPAS*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS*	*1 Dokumen*	10,500,000	*Pembahasan KUA dan PPAS*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS*	*1 Dokumen*	10,500,000	
4.02.02.2.02.02	*Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*1 Dokumen*	10,500,000	*Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*1 Dokumen*	10,500,000	
4.02.02.2.02.03	*Pembahasan APBD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*	*1 Dokumen*	218.740.650	*Pembahasan APBD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*	*1 Dokumen*	189,891,000	

	Rancangan Awal RKPD (yang dibagikan)					Hasil Analisis Kebutuhan (R. Kebutuhan)					Catatan Penting
No	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.02.2.02.04	*Pembahasan APBD Perubahan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan*	*1 Dokumen*	218.740.650	*Pembahasan APBD Perubahan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan*	*1 Dokumen*	189,891,000	
4.02.02.2.02.06	*Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*1 Dokumen*	188.268.350	*Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*1 Dokumen*	124,104,450	
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Kab. Luwu**	**Dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**	**2 Dukumen**	**238.268.350**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Kab. Luwu**	**Dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**	**2 Dukumen**	**181,618,000**	
4.02.02.2.03.07	*Pengawasan Penggunaan Anggaran*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran*	*2 Dokumen*	50.000.000	*Pengawasan Penggunaan Anggaran*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran*	*6 Kali*	55,000,000	
4.02.02.2.03.08	*Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*1 Dokumen*	188.268.350	*Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*1 Rekomendasi*	126,618,000	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Kab. Luwu**	**Jumlah pendalaman materi peraturan-undangan yang diikuti dalam rangka peningkatan kasitas Anggota DPRD**	**4 Peraturan**	**1.657.127.980**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Kab. Luwu**	**Jumlah pendalaman materi peraturan-undangan yang diikuti dalam rangka peningkatan kasitas Anggota DPRD**	**6 Peraturan**	**2,735,054,940**	
4.02.02.2.04.02	*Pendalaman Tugas DPRD*	*Kab. Luwu*	*umlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	*2 Dokumen*	1.351.332.780	*Pendalaman Tugas DPRD*	*Kab. Luwu*	*umlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	*141 Orang/Kegiatan*	2,396,497,000	
4.02.02.2.04.04	*Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli*		*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*2 Orang*	96.000.000	*Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli*		*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*2 Orang*	180,000,000	
4.02.02.2.04.05	*Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi*		*Jumlah tenaga ahli fraksi*	*20 Orang*	144.000.000	*Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi*		*Jumlah tenaga ahli fraksi*	*20 Orang*	180,000,000	

	Rancangan Awal RKPD (yang dibagikan)					Hasil Analisis Kebutuhan (R. Kebutuhan)					Catatan Penting
No	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.02.2.04.06	*Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*		*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*8 Dokumen*	22,500,000	*Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*		*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*8 Dokumen*	12,500,000	
4.02.02.2.04.07	*Penyusunan Program Kerja DPRD*		*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD*	*2 Dokumen*	10.500.000	*Penyusunan Program Kerja DPRD*		*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD*	*2 Dokumen*	33,557,940	
4.02.02.2.04.03	*Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*	*8 Dokumen*	32.795.200	*Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*	*8 Dokumen*	16,500,000	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Kab. Luwu**	**Jumlah rekomendasi dari aspirasi masyarakat yang dihimpun**	**6 Rekomendasi**	**1.204.457.960,**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Kab. Luwu**	**Jumlah rekomendasi dari aspirasi masyarakat yang dihimpun**	**6 Rekomendasi**	**1,502,953,359**	
4.02.02.2.05.01	*Kunjungan Kerja dalam Daerah*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*	*12 Laporan*	54.671.470	*Kunjungan Kerja dalam Daerah*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*	*12 Laporan*	78,935,000	
4.02.02.2.05.02	*Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun*	*2 Dokumen*	8.565.000,	*Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun*	*3 Dokumen*	9,220,679	
4.02.02.2.05.03	*Pelaksanaan Reses*	*Kab. Luwu*	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	*3 Dokumen*	1.141.221.490	*Pelaksanaan Reses*	*Kab. Luwu*	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	*3 Dokumen*	1,414,797,680	
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Kab. Luwu**	**Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi**	**35 Kegiatan**	**1.385.745.890**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Kab. Luwu**	**Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi**	**45 Kegiatan**	**4,205,457,500**	
4.02.02.2.08.01	*Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*6 Dokumen*	1.382.745.890	*Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*24 Dokumen*	4,194,207,500	
4.02.02.2.08.02	*Penyusunan Laporan Kinerja DPRD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun*	*1 Laporan*	3.000.000,	*Penyusunan Laporan Kinerja DPRD*	*Kab. Luwu*	*Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun*	*1 Laporan*	11,250,000	

2.5 Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan langsung terhadap anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi tersebut maka tidak dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD.

Tabel 2.4
Usulan Progam dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Thn 2025
Kabupaten Luwu

No	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	FUNGSI LAINNYA				
I	**Peningkatan Layanan Kedewanan**				
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional (Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020), mempedomani Recana Kerja Pemerintah (RKP), serta menjaga kesinambungan RPJMD tahun 2019-2024. RKPD yang telah disusun kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) tahun 2025. Namun demikian hasil telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu mengenai strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah :

a. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

b. Fungsi

1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten Luwu;
2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten Luwu;
3) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Kabupaten Luwu;
4) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten Luwu;
5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Sekertariat DPRD Kabupaten Luwu, adalah :

a. Meningkatkan profesionalisme aparatur dilingkungan Sekretariat DPRD;
b. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas DPRD;
c. Membangun rasa kebersamaan di dalam kelembagaan;
d. Memberikan pelayanan administrasi secara maksimal kepada DPRD;
e. Memfasilitasi dan koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif.

2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi di Kabupaten Luwu sebagai berikut:

a. Tertatanya kehidupan baik suprastruktur politik maupun insfrastruktur politik di daerah yang kapable, kredible dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepemimpinan rakyat di daerah;
b. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu adanya program penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan berdemokratis;
c. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan morallitas yang menjunjung tinggi adanya perbedaan kebenaran dan keadilan;
d. Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU

Tabel 3.1

Rumusan Progam dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAH**										
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**33,134,750,058**					**38,415,355,875**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**CAKUPAN KETERSEDIAAN PENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Luwu**	**100%**	**23.723.276.522**	**APBD**		**Luwu**	**100%**	**22,412,735,875**	**APBD**
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	Luwu	**97%**	**39.703.206**	APBD		Luwu	**99%**	**78,124,400**	APBD
4.02.01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Luwu	*2 Dokumen*	*11.336.603*	APBD		Luwu	*2 Dokumen*	*30,329,600*	APBD
4.02.01.2.01.02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Luwu	*1 Dokumen*	*4.660.000*	APBD		Luwu	*2 Dokumen*	*5,715,000*	APBD
4.02.01.2.01.03	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Luwu	*1 Dokumen*	*4.660.000*	APBD		Luwu	*2 Dokumen*	*5,715,000*	APBD
4.02.01.2.01.04	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Luwu	*1 Dokumen*	*4.660.000*	APBD		Luwu	*2 Dokumen*	*5,715,000*	APBD
4.02.01.2.01.05	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Luwu	*1 Dokumen*	*4.660.000*	APBD		Luwu	*2 Dokumen*	*5,715,000*	APBD

4.02.01.2.01.07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Luwu	*1 Laporan*	*9.726.603*	APBD		Luwu	*1 Laporan*	*24,934,800*	APBD
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**Luwu**	**97%**	**4.354.464.947**	**APBD**		**Luwu**	**99%**	**3,909,249,942**	**APBD**
4.02.01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Luwu	*540 Orang/Bulan*	*4.030.855.558*	APBD		Luwu	*540 Orang/Bulan*	*3,523,672,742*	APBD
4.02.01.2.02.03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Luwu	*12 Dokumen*	*303.890.000*	APBD		Luwu	*12 Dokumen*	*343,110,000*	APBD
4.02.01.2.02.05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Luwu	*1 Laporan*	*5.066.603*	APBD		Luwu	*1 Laporan*	*12,329,600*	APBD
4.02.01.2.02.06	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	Luwu	*3 Dokumen*	*4.926.183*	APBD		Luwu	*3 Dokumen*	*11,817,400*	APBD
4.02.01.2.02.07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Luwu	*6 Laporan*	*9.726.603*	APBD		Luwu	*6 Laporan*	*18,320,200*	APBD
4.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Barang Milik daerah dalam kondisi baik**	**Luwu**	**95%**	**8.666.183**	**APBD**		**Luwu**	**95%**	**8,400,000**	**APBD**
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan *Barang* Milik Daerah pada SKPD	Luwu	2 Laporan	8.666.183	APBD		Luwu	2 Laporan	8,400,000	APBD
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**Luwu**	**96%**	**319.049.280**	**APBD**		**Luwu**	**97%**	**370,891,000**	**APBD**
4.02.01.2.05.02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Luwu	*47 Paket*	*30.360.000*	APBD		Luwu	*47 Paket*	*30,360,000*	APBD
4.02.01.2.05.03	*Pendataan dan Penglolaan Administrasi Kepegawaian*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Luwu	*12 Dokumen*	*2.893.400*	APBD		Luwu	*12 Dokumen*	*16,900,000*	APBD
4.02.01.2.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Luwu	*3 Orang*	*52.500.000*						
4.02.01.2.05.11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Luwu	*24 Orang*	*233.295.880*	APBD		Luwu	*3 Orang*	*316,006,000*	APBD

4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**Luwu**	**98%**	**729.266.255**	**APBD**		**Luwu**	**98%**	**937,216,000**	**APBD**
4.02.01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Luwu	*5 Paket*	*7.411.687*	APBD		Luwu	**97%**	*10,685,000*	APBD
4.02.01.2.06.03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Luwu	*6 Paket*	*3.741.780*	APBD		Luwu	*5 Paket*	*12,328,000*	APBD
4.02.01.2.06.04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Luwu	*10 Paket*	*61.560.100*	APBD		Luwu	*6 Paket*	*39,582,000*	APBD
4.02.01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Luwu	*3 Paket*	*24.874.400*	APBD		Luwu	*10 Paket*	*50,191,800*	APBD
4.02.01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Luwu	*5 Dokumen*	*106.450.000*	APBD		Luwu	*3 Paket*	*236,250,000*	APBD
4.02.01.2.06.07	*Penyediaan Bahan/Material*	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	Luwu	*47 Paket*	*118.657.760*	APBD		Luwu	*5 Dokumen*	*133,183,700*	APBD
4.02.01.2.06.08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Luwu	*12 Laporan*	*27.900.000*	APBD		Luwu	*47 Paket*	*91,800,000*	APBD
4.02.01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Luwu	*30 Laporan*	*378.670.528*	APBD		Luwu	*12 Laporan*	*363,195,500*	APBD
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**Luwu**	**95%**	**3.189.446.327**	**APBD**		**Luwu**	**99%**	**792,963,000**	**APBD**
4.02.01.2.07.01	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	Luwu	*3 Unit*	*117.363.000*	APBD					
4.02.01.2.07.02	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	Luwu	*3 Unit*	*2.105.800.000*	APBD					
4.02.01.2.07.06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Luwu	*41 Unit*	*428.467.727*	APBD		Luwu	*16 Unit*	*708,491,000*	APBD
4.02.01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Luwu	*40 Unit*	*537.815.600*	APBD		Luwu	*40 Unit*	*84,472,000*	APBD
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	**Luwu**	**97%**	***943.001.202***	**APBD**		**Luwu**	**98%**	**914,974,500**	**APBD**
4.02.01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Luwu	*12 Laporan*	*9,600,000*	APBD		Luwu	*12 Laporan*	*15,225,000*	APBD

4.02.01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Luwu	*12 Laporan*	*379.001.202*	APBD		Luwu	*12 Laporan*	*321,349,500*	APBD
4.02.01.2.08.03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Luwu	*12 Laporan*	*9,600,000*	APBD		Luwu	*12 Laporan*	*24,000,000*	APBD
4.02.01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Luwu	*12 Laporan*	*544.800.000*	APBD		Luwu	*12 Laporan*	*554,400,000*	APBD
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Luwu**	**92%**	**979.404.792**	**APBD**		**Luwu**	**92%**	**598,099,455**	**APBD**
4.02.01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Luwu	*3 Unit*	*98.840.000*	APBD		Luwu	*3 Unit*	*129,898,095*	APBD
4.02.01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Luwu	*32 Unit*	*250.490.000*	APBD		Luwu	*32 Unit*	*218,714,260*	APBD
4.02.01.2.09.06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Luwu	*177 Unit/Set*	*10.544.792*	APBD		Luwu	*177 Unit/Set*	*49,700,000*	APBD
4.02.01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Luwu	*5 Unit*	*613.130.000*	APBD		Luwu	*5 Unit*	*183,056,100*	APBD
4.02.01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi*	Luwu	*5 Unit*	*6.400.000*	APBD		Luwu	*5 Unit*	*16,731,000*	APBD
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Cakupan penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Luwu**	**98%**	**15.328.962.909**	**APBD**		**Luwu**	**99%**	**13,758,827,178**	**APBD**
4.02.01.2.15.01	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD*	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*	Luwu	*420 Orang Bulan*	*15.136.572.909*	APBD		Luwu	*420 Orang Bulan*	*13,374,827,178*	APBD
4.02.01.2.15.02	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	Luwu	*6 Paket*	*192.390.000*	APBD		Luwu	*6 Paket*	*384,000,000*	APBD
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Cakupan penyelenggaraan layanan administrasi DPRD**	**Luwu**	**97%**	**1.020.757.748**	**APBD**		**Luwu**	**98%**	**1,043,990,400**	**APBD**
4.02.01.2.16.02	*Fasilitasi Fraksi DPRD*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD*	Luwu	*10 Laporan*	*96.613.600*	APBD		Luwu	*10 Laporan*	*120,000,000*	APBD

4.02.01.2.16.04	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD*	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan*	Luwu	*3 Paket*	*924.144.148*	APBD		Luwu	*3 Paket*	*923,990,400*	APBD
			Luwu			APBD		Luwu			APBD
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**PERSENTASE PENYELESAIAN PENYUSUNAN PERDA SESUAI PROLEGDA**	Luwu	**100%**	**5.545.060.381**	APBD		Luwu	**100%**	**16.002,620,000**	APBD
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Perda/Peraturan/Kajian/Naskah Akademik yang difasilitasi pembentukannya**	**Luwu**	**3 Perda**	**1.045.875.525,**	**APBD**		**Luwu**	**10 Perda**	**7,205,082,000**	**APBD**
4.02.02.2.01.01	*Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	Luwu	*1 Dokumen*	*5.500.000*	APBD		Luwu	*1 Dokumen*	*8,000,000*	APBD
4.02.02.2.01.02	*Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	Luwu	*3 Dokumen*	*901.875.525*	APBD		Luwu	*10 Dokumen*	*6,966,082,000*	APBD
4.02.02.2.01.03	*Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan*	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan*	Luwu	*3 Dokumen*	*3.500.000*	APBD		Luwu	*4 Dokumen*	*51,000,000*	APBD
4.02.02.2.01.04	*Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi*	Luwu	*3 Dokumen*	*135.000.000*	APBD		Luwu	*4 Dokumen*	*180.000.000*	APBD
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah dokumen kebijakan anggaran**	**Luwu**	**5 Dokumen**	**581.393.050**	**APBD**		**Luwu**	**5 Dokumen**	**634,916,750**	**APBD**
4.02.02.2.02.01	*Pembahasan KUA dan PPAS*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS*	Luwu	*1 Dokumen*	*10.500.000*	APBD		Luwu	*1 Dokumen*	*28,785,000*	APBD
4.02.02.2.02.02	*Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	Luwu	*1 Dokumen*	*10.500.000*	APBD		Luwu	*1 Dokumen*	*28,785,000*	APBD
4.02.02.2.02.03	*Pembahasan APBD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*	Luwu	*1 Dokumen*	*193.108.350*	APBD		Luwu	*1 Dokumen*	*206,340,250*	APBD
4.02.02.2.02.04	*Pembahasan APBD Perubahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan*	Luwu	*1 Dokumen*	*193.108.350*	APBD		Luwu	*1 Dokumen*	*206,340,250*	APBD
4.02.02.2.02.06	*Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	Luwu	*1 Dokumen*	*174.176.350*	APBD		Luwu	*1 Dokumen*	*164,666,250*	APBD
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**	**Luwu**	**2 Dokumen**	**229.176.350**	**APBD**		**Luwu**	**2 Dokumen**	**191,097,500**	**APBD**
4.02.02.2.03.07	*Pengawasan Penggunaan Anggaran*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan*	Luwu	*1 Dokumen*	*55.000.000*	APBD		Luwu	*1 Dokumen*	*54,000,000*	APBD

		Anggaran									
4.02.02.2.03.08	*Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	Luwu	*1 Rekomendasi*	*174.176.350*	APBD		Luwu	*1 Rekomendasi*	*137,097,500*	APBD
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah pendalaman materi peraturan-undangan yang diikuti dalam rangka peningkatan kasitas Anggota DPRD**	**Luwu**	**2 Peraturan**	**963.461.590**	**APBD**		**Luwu**	**6 Peraturan**	**1,902,264,800**	**APBD**
4.02.02.2.04.02	*Pendalaman Tugas DPRD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	Luwu	*4 Dokumen*	*675.666.390,00*	APBD		Luwu	*4 Dokumen*	*1,420,221,500*	APBD
4.02.02.2.04.04	*Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	Luwu	*3 Orang*	*96,000,000*	APBD		Luwu	*3 Orang*	*100,000,000*	APBD
4.02.02.2.04.05	*Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi*	*Jumlah tenaga ahli fraksi*	Luwu	*10 Orang*	*126.000.000*	APBD		Luwu	*10 Orang*	*180,000,000*	APBD
4.02.02.2.04.06	*Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	Luwu	*12 Dokumen*	*22.500.000*	APBD		Luwu	*12 Dokumen*	*60,803,750*	APBD
4.02.02.2.04.07	*Penyusunan Program Kerja DPRD*	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD*	Luwu	*1 Dokumen*	*10.500.000*	APBD		Luwu	*1 Dokumen*	*19,600,000*	APBD
4.02.02.2.04.03	*Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*	Luwu	*6 Dokumen*	*32.795.200*	APBD		Luwu	*6 Dokumen*	*121,639,550*	APBD
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah rekomendasi dari aspirasi masyarakat yang dihimpun**	**Luwu**	**5 Rekomendasi**	***825.781.230***	**APBD**		**Luwu**	**7 Rekomendasi**	**1,649,842,950**	**APBD**
4.02.02.2.05.01	*Kunjungan Kerja dalam Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*	Luwu	*12 Laporan*	*54.671.470*	APBD		Luwu	*12 Laporan*	*185,981,250*	APBD
4.02.02.2.05.02	*Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD*	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun*	Luwu	*3 Dokumen*	*8.565.000*	APBD		Luwu	*3 Dokumen*	*34,383,200*	APBD
4.02.02.2.05.03	*Pelaksanaan Reses*	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	Luwu	*3 Dokumen*	*762.544.760*	APBD		Luwu	*3 Dokumen*	*2,004,613,800*	APBD
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi**	**Luwu**	**35 Kegiatan**	**1.899.372.636**	**APBD**		**Luwu**	**40 Kegiatan**	**4,419,416,000**	**APBD**
4.02.02.2.08.01	*Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	Luwu	*35 Dokumen*	*1.896.372.636*	APBD		Luwu	*40 Dokumen*	*4,406,616,000*	APBD
4.02.02.2.08.02	*Penyusunan Laporan Kinerja DPRD*	*Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun*	Luwu	*1 Laporan*	*3,000,000*	APBD		Luwu	*1 Laporan3*	*12,800,000*	APBD

BAB V

PENUTUP

RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu dalam pelaksanaan tugas penyusunan rencana kegiatan Tahunan penyelenggaraan pelayanan kepada DPRD Kabupaten Luwu sesuai dengan tugas pokok dan fungsnya. Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan RENSTRA Tahun 2025-2026 yang berpedoman pada RPD Kabupaten Luwu. Program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu merupakan implementasi dalam mendukung dan mewujudkan kebijakan Bupati Luwu yang telah dituangkan dalam Visi dan Misi kabupaten Luwu.

Demikian RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu semoga bermanfaat.

Belopa, 1 Mei 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LUWU



Drs. H. BUSTAN. M.Si

PKT. Pembina Utama Muda

NIP. 197212171993031004

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. LUWU

RENCANA KERJA (RENJA)



TA. 2025

www.reallygreatsite.com

dinaspuprluwukab.gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penyusunan **Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Renja)** Tahun 2025 dapat diselesaikan. **Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** Tahun 2025 merupakan acuan penyelenggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bagi seluruh ASN di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuam dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. **Rencana Kerja SKPD** mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Diharapkan apa yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh staf dan berbagai pihak yang telah membantu atas tersusunnya **Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** Tahun 2025 dengan harapan dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas.

Belopa, 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN LUWU,

Ir. IKHSAN ASAAD, ST., MT, CCMS
PANGKAT : PEMBINA TK.I
NIP. 19770912 200604 1 009

DAFTAR ISI

		halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		V
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	7
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun Lalu	10
	2.1. Evaluasi Kinerja DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu TA. 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	44
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	48
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	60
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	86
BAB III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	91
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	91
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	91
	3.3. Program dan Kegiatan	95
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	104
	4.1. Dana Indikatif Beserta Sumbernya	104
	4.2. Rencana Kerja	105
	4.3. Pendanaan Perangkat Daerah	105
BAB V	Penutup	122

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
TABEL.2.1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022	11
TABEL.2.2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUWU	46
TABEL 2.3	MASALAH POKOK, MASALAH AKAR DAN AKAR MASALAH SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	49
TABEL 2.4	URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014	56
TABEL 2.5	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022	62
TABEL 2.6	URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 KABUPATEN LUWU	87
TABEL 3.1	TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2021 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUWU TAHUN 2024	94
TABEL 4.1	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	106
TABEL 3.2	PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN ANGGARAN 2024	102

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu sebagai satuan kerja perangkat

daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Luwu dibidang pembangunan dan penataan kota yang memasuki tahun ke Enam pemerintahan baru.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum dituangkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu. Penyusunan rencana kinerja ini dimulai dengan merumuskan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu yang merupakan Rencana Perangkat Daerah (RPD) TA. 2025-2026, yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana dua tahunan tersebut kedalam rencana kerja tahunan. Berdasarkan rencana kerja tahunan tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan RKA dan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis Rencana Perangkat Daerah (RPD) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Organisasi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Organisasi Perangkat Daerah menetapkan Renja Organisasi Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan. Sesuai dengan perubahan yang sudah, sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana setiap

organisasi dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan organisasi harus dapat menyusun dan membuat suatu Rencana Strategik (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Pembangunan di bidang sarana dan prasarana mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting sebab menyangkut tugas pokok dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan seperti tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional. Perumusan kebijaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana meliputi perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase, air limbah, pengembangan permukiman dan pelengkap jalan serta bangunan gedung dan penataan ruang. Dalam pembangunan di bidang sarana dan prasarana (jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase, air limbah, pengembangan permukiman dan pelengkap jalan serta bangunan gedung dan penataan ruang), strategi yang harus dipakai adalah strategi pembinaan yang menampung secara serasi dan seimbang atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Adapun pendekatan yang dipergunakan diantaranya :

- Pendekatan pelayanan yaitu tugas pembinaan yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat pengguna sarana dan prasarana (jalan, jembatan dan saluran irigasi, air limbah dan pengembangan permukiman).
- Pendekatan pengembangan wilayah yaitu mengharapkan suatu pengembangan wilayah dan pembangunan / peningkatan daerah baru dengan membuat/membangun sarana dan prasarana baru yang sebelumnya tidak ada atau belum berkembang. Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, pembangunan di bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Luwu harus selalu didukung dengan dana sehingga dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Semua itu diarahkan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
b. Rumusan pprogram/kegiatan didalam Renja Organisasi Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
c. Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian

kinerja, keluaran, biaya satuan perkeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan **Renja Organisasi Perangkat Daerah** dengan dokumen RKPD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/Prt/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tanggal 21 Juni 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negreri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Spm Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
25. Peraturan Bupati Luwu Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu
26. Peraturan Bupati Luwu Nomor 733/Xii/2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Luwu
27. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (Rpd) Kabupaten Luwu Tahun 2025 - 2026
28. Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023

Disamping Dasar Hukum yang menyertai penyusunan **Rencana Kerja** Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu juga tetap berpijak pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026, yang dilandasi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu dan fokus pada pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai setiap tahunnya, yang diwujudkan dalam dokumen perencanaan, yang disusun secara sistematis dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah tahun 2024.

Untuk melaksanakan amanat Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang harus dipedomani dalam perumusan program pembangunan daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu menyusun RKA 2025 dengan menyesuaikan arahan dan panduan berdasarkan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negreri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan Dasar Hukum ini, menjadi Dasar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja program dan kegiatan setiap tahun dengan parameter yang terukur dan dapat dilaksanakan untuk menjawab berbagai permasalahan sesuai dengan kemampuan anggaran yang diselaraskan dengan Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan **Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah** dimaksudkan :

1. Acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam pencapaian visi misi pemerintah Kabupaten Luwu yaitu " **Kabupaten Luwu yang maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi** ".
2. Pedoman dan indikator dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah.
3. Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat perencanaan strategis dan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu.

Adapun tujuan penyusunan **Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah** adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
4. Menyediakan bahan bagi penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan **Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah** adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L, dan Renja Provinsi/Kabupaten/kota serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat

BAB II HASIL EVALUASI R E NJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangka Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD Tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat/Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
5. Formulasi Isu-Isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam rumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan ata rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan pendanaan Program serta Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. EVALUASI KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG (PUPR) KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan sekaligus kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2023. Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, hal tersebut terlihat pada hasil evaluasi Rencana Kerja, Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu belum secara maksimal dilaksanakan karena belum terukur dan terinci secara akurat hal ini dapat dilihat pada Tabel Pengukuran kinerja kegiatan dan program yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

(TABEL T-C.29, LAMPIRAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU PROPINSI SULAWESI SELATAN

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(5)+(7)+(9)	(11)=(10)/(4)*100
1	03	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100	100	100	100	100	300	300
1	**03**	**01**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100 %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**300**
1	03	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	6 Dokumen	6	2	2	100,00	1	9	150,00
1	03	01	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3 Dokumen	2	1	1	100,00	0	3	100,00

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024		REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
											TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	03	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	2	1	1	100,00	0	3	100,00
1	03	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	2	1	1	100,00	0	3	100,00
1	03	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	2	1	1	100,00	0	3	100,00
1	03	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LAKIP)	4	Dokumen	3	1	1	100,00	1	5	125,00
1	**03**	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**300**
1	03	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5882	Orang/ Bulan	6179	1500	1.495	99,67	1440	9114	154,95
1	03	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	1	Dokumen	360	180	180	100,00	1	541	54100,00

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	03	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun AKPD	1 Laporan	2	2	2	100,00	1	5	500,00
1	03	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	9 Dokumen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1	03	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	34 Laporan	0	0	0	0,00	0	0	0,00
#	03	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**100 Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**300**
#	03	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD yang disusun	6 Laporan	4	2	2	100,00	1	7	116,67
#	03	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**100 Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**300**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
#	03	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus Hari-Hari Tertentu) Beserta Perlengkapannya yang diadakan	360 Steel/Psg	0	0	0	0,00	0	0	0,00
#	03	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	7 Orang	5	2	2	100,00	0	7	100,00
#	03	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	150 Orang	0	0	0	0,00	0	0	0,00
#	03	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	43 Orang	14	14	14	100,00	16,00	44	102,33
#	03	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persenntase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100 Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**300**
#	03	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penarangan bangunan kantor yang disediakan	60 Bulan	60	12	12	100,00	9	81	135,00

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
#	0 3	0 1	0 1	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	30 Unit	38	7	5	71,43	0	43	143,33
#	0 3	0 1	0 1	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	8 Unit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
#	0 3	0 1	0 1	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	60 Bulan	60	12	12	100,00	15	67	145,00
#	0 3	0 1	0 1	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	60 Bulan	60	12	12	100,00	8	80	133,33
#	0 3	0 1	0 1	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	60 Bulan	60	12	12	100,00	2	74	123,33
#	0 3	0 1	0 1	2.0 6	07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	60 Bulan	60	12	12	100,00	6	78	130,00
#	0 3	0 1	0 1	2.0 6	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	60 Bulan	60	12	12	100,00	4	76	126,67

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
#	0 3	0 1	0 1	2.0 6	09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	7	4	4	100,00	2	13	92,86
#	0 3	0 1	0 1	2.0 7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100 Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**300**
#	0 3	0 1	0 1	2.0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Dinas yang diadakan	8 Unit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
#	0 3	0 1	0 1	2.0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	8 Unit	9	3	2	0,00	0	11	137,50
#	0 3	0 1	0 1	2.0 7	03	Pengadaan Alat Besar	jumlah alat besar yang diadakan	7 Unit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
#	0 3	0 1	0 1	2.0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	27 Unit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
#	0 3	0 1	0 1	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	9 Jenis	1	0	0	0,00	0	1	11,11

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
#	0 3	0 1	0 1	2.0 8		**Penyediaan Jasa Penunjang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	**100 Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**300**
#	0 3	0 1	0 1	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	300 Org/Bulan	264	48,00	48	100,00	1	313	104,33
#	0 3	0 1	0 1	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	60 Bulan	60	12	12	100,00	3	75	125,00
#	0 3	0 1	0 1	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5360 Org/Bulan	5464	2160	2.160,00	100,00	1,00	7.625	142,26
#	0 3	0 1	0 1	2.0 9		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**300**
#	0 3	0 1	0 1	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	168 Unit	75	47,00	47	100,00	47	169	100,60

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
#	03	01	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah alat besar yang disediakan Jasa/biaya Pemeliharaan dan Perizinan	96 Unit	32	24	24,00	100,00	24	80	83,33
#	03	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	86 Unit	15	26,00	26	100,00	26	67	77,91
#	03	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	4500 m2	4.500	4.500	4.500	100,00	-	9.000	200,00
#	03	01	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi	4500 m2	0	0	0	0,00	0	0	0,00
#	**03**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase irigasi dalam kondisi baik**	**41,10 %**	**60,39**	**43,67**	**60,39**	**60,39**	**44,54**	**165,32**	**402,24**
#	03	01	02	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lokasi Sungai yang dilakukan Pengelolaan SDA**	**20 Titik/Lokasi**	**4**	**5**	**5**	**100**	**5**	**14**	**70**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
#	0 3	0 1	0 2	2.0 1	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten	Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten yang disusun	6 Dokumen	0	0	0	0,00	0	0	0,00
#	0 3	0 1	0 2	2.0 1	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Lokasi yang dilakukan pengelolaan Sumber Daya Air	20 km	24,00	0,37	0,28	75,68	6,00	30,28	151,40
#	0 3	0 1	0 2	2.0 1	46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaa n Sungai	Panjang Normalisasi/ Restorasi/Pemeliharaan Sungai yang dilaksanakan	19.000 km	25223	26,95	22,21	82,41	4,00	25.249,21	132,89
#	0 3	0 1	0 2	2.0 1	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Jumlah jaringan irigasi yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan	15 km	0	0,25	0,25	0	0	0,25	1,67
#	0 3	0 1	0 2	2.0 2		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas Lahan yang terlayani sistem irigasi primer dan sekunder yang terlayani dengan baik**	**69 D.I**	**69**	**69**	**69**	**100**	**69**	**207,00**	**300**
#	0 3	0 1	0 2	2.0 2	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen yang disusun	4 Dokumen	2	1	1	100,00	-	3,00	75,00
#	0 3	0 1	0 2	2.0 2	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	3,30 km	5,88	2,44	2,44	100,00	0,154	8,48	256,92

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
#	03	01	02	2.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah bending irigasi yang dibangun	3 Buah	2,00	1	1	100,00	-	3,00	100,00
#	03	01	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	12,53 km	7,33	5,30	5,30	100,00	4,00	16,63	132,77
#	03	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dirahbilitasi	10,01 Meter	77,18	26,53	26,53	21776,23	-	103,71	1.036,28
#	03	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhab	10 Bendung	4,00	4,00	4,00	0,00	-	8,00	80,00
#	03	01	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan	69 km	6,21	4,83	4,83	100,00	10,12	21,16	30,67
#	03	01	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan	18 Buah	-	1	4	0	-	4,00	22,22
#	03	01	03			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**	**90,56 Persen**	**81,83**	**81,47%**	**81,83**	**10044,28**	**81,97**	**245,63**	**271,24**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024		REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
											TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	**03**	**01**	**02**	**201**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan**	**53,74**	**Persen**	**69,88%**	**53,74**	**69,88%**	**1,30**	**69,98**	**71,38**	**132,82**
1	03	01	03	201	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	Dokumen	2	-	0	0,00	-	2,00	100,00
1	03	01	02	201	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang jaringan pipa yang dibangun	240.150	Meter	76.583	-	-	0,00	-	76.583,45	31,89
1	03	01	03	201	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah yang sudah terpasang meteran air	50.000	SR	-	-	-	0,00	-	-	-
1	03	01	02	201	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah yang sudah terpasang meteran air	3.182	liter/dtk	1,00	1,00	1,00	100,00	60,00	62,00	1,95
1	03	01	03	201	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah yang sudah terpasang meteran air	1.235	SR	150	150	150	0	-	300,00	24,29
#	**03**	**01**	**05**			**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik**	**8,12**	**Persen**	**76,65**	**76,00**	**76,65**	**100,86**	**77**	**230,30**	**2836,21**
1	03	01	05	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani dengan sistem air limbah domestik	79,21	Persen	-	79,14	1	1,26	5,00	6,00	7,57

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	03	01	05	201	0044	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	-	0	-	0,00	1,00	1,00	100,00
#	**03**	**01**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan**	**0,05 Persen**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**100,00**	**0**	**0,02**	**40,00**
1	03	01	04	201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten	Jumlah TPA yang dikelola melalui sistem pengelolaan persampahan	1 Buah	1	1	1	100,00	-	2,00	200,00
1	03	01	04	201	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten	Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disusun	4 Dokumen	-	0	0	0,00	-	-	-
1	03	01	04	201	02	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	7 Kecamatan	2	0	0	0,00	-	2,00	28,57
1	03	01	04	201	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	1 Kecamatan	-	0	0	0	-	-	-

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	03	01	04	201	05	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Unit Sarana Persamapahan yang disediakan	9 Unit	-	0	0	0	-	-	-
#	03	01	06			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)**	**5,70 Persen**	**1,2628**	**0,4500**	**0,4700**	**104,44**	**0,5120**	**2,24**	**39,38**
#	03	01	06	201		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jalan Utama yang telah memiliki Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai**	**1,90 Persen**	**0,67**	**0,25**	**0,28**	**112**	**0,3**	**1,25**	**65,79**
#	03	01	06	201	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	3 Dokumen	-	0	0	0	-	-	-
#	03	01	06	201	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran drainase yang Dibangun	87.967 Meter	24.310,00	9.666,0	9.666,0	100,00	6.130,00	40.106,00	45,59
#	03	01	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio kepatuhan IMB kabupaten**	**19 Angka**	**10**	**9**	**9**	**100,00**	**17**	**36**	**189,4737**
1	03	01	08	201		Penyelenggaran Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (MB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan Penyelenggaran Bangunan Gedung	19 Angka	10	9	9	100	17,00	36,00	189,47

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	03	01	06	201	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Laporan Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	42 Laporan	897	897	897	100,00	-	1.794,00	4.271,43
1	03	01	08	201	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten	Jumlah bangunan gedung yang dilakukan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan	42 Unit	16	6,00	6,00	100,00	-	22,00	52,38
1	03	01	08	201	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang direhabilitasi, renovasi dan Ubahsuai	17 Unit	7	3	3	100,00	-	10,00	58,82
#	**03**	**01**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya**	##### **Persen**	**0**	**0,00002**	**0,00002**	**100,00**	**3E-05**	**0,000046**	**242,11**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
#	03	01	09	2.01		Penyelenggaran Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaran Penataan Bangunan dan Lingkungannya	5 Angka	-	0	0	#DIV/0!	2,00	2,00	40,00
#	03	01	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten yang disusun	1 Dokumen	-	0	0	0	-	-	-
#	03	01	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Volume penataan bangunan yang dilaksanakan	9 Unit	8	5	5	100	-	13,00	144,44
#	03	01	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategi Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditata	5 Kawasan	8	5	5	0,00	1,00	14,00	280,00
1	**03**	**01**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten**	**34,95 Persen**	**31,01**	**28,88**	**28,94**	**100,21**	**28,88**	**88,83**	**254,16**
1	03	01	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	**37,94 Persen**	**35,27%**	**31,36**	**33,60**	**107,14**	**31,36**	**65,31**	**172,15**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	03	01	10	201	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah DED yang disusun	0,00	0	1	1	1,00	100,00	-	2,00	-
1	03	01	10	201	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan yang dibebaskan	0,00	0	0,05	0,06	0,05	83,33	-	0,10	-
1	03	01	10	201	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen Hasil pelaksanaan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	8	Dokumen	9,00	3,00	3,00	100,00	2,00	14,00	175,00
1	03	01	10	201	05	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	424,10	km	734,87	210,28	210,28	100,00	106,82	1.051,97	248,05
1	03	01	10	201	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang ditingkatkan dari kerikil ke aspal atau beton	68,37	km	158,83	48,40	48,40	100,00	17,86	225,09	329,25
1	03	01	10	201	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	224,89	km	106,96	44,16	44,16	100,00	64,50	215,62	95,88
1	03	01	10	201	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	108,26	km	15,79	9,26	9,26	100,00	6,10	31,15	28,77
1	03	01	10	201	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara berkala	14,67	km	127,24	-	-	0,00	1,54	128,78	877,63
1	03	01	10	201	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	24	km	16,80	1,80	1,80	100,00	20	38,60	160,83

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	03	01	10	201	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	130 Unit	130,00	10,00	10,00	100,00	3	143,00	110,00
1	03	01	10	201	18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	0 0	2,00	2,00	2,00	100,00	0	4,00	-
#	**03**	**01**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**25,25 Persen**	**49,71**	**50**	**49,71**	**99,42**	**64**	**163,420**	**647,21**
#	**03**	**01**	**11**	**201**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah dilatih**	**290 Orang**	**166**	**35,00**	**48,00**	**137,143**	**30**	**244,00**	**84,14**
1	03	01	11	201	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	150 Orang	166	35	48	137,14	30,00	244,00	162,67
1	03	01	11	201	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah masyarakat yang difasilitasi	140 Oarng	-	-	-	0,00	-	-	-
#	**03**	**01**	**#**	**202**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten yang diselenggarakan**	**8 Sistim Informasi**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2**	**2,00**	**25,00**
1	**03**	**01**	**#**	202	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah peserta Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	8 Orang	-	0	0	0	-	-	-

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	03	01	#	202	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Dokumen Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU yang disusun	8 Dokumen	-	0	0	0	-	-	-
#	**03**	**01**	**#**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Ketaatan terhadap RTRW**	**34 Persen**	**5,22**	**5,00**	**5,22**	**104,40**	**23,21**	**33,65**	**100,24**
#	**03**	**01**	**#**	**201**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan RTRW dan RRTR Kabupaten**	**16,79 Persen**	**4,34**	**11,61**	**4,34**	**37,38**	**12**	**20,68**	**123,21**
1	03	01	12	201	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten	Dokumen RTRW Kabupaten yang telah diberikan/dilakukan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi	1 Dokumen	3	1	1	100,00	-	4,00	400,00
1	03	01	12	201	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten	Dokumen RRTR Kabupaten yang telah diberikan/dilakukan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi	6 Dokumen	-	0	0	0	-	-	-

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
#	03	01	#	202		**Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten**	**Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten**	**5 Laporan**	-	**0**	**0**	**0**	**10,00**	**10,00**	**200,00**
1	03	01	12	202	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten	5 Laporan	1	0	0	0,00	-	1,00	20,00
1	03	01	12	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten	15 Laporan	-	0	0	0	-	-	-
#	03	01	#	203		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten**	**Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten**	**1 Laporan**	-	**1**	**1**	**100**	**1,00**	**2,00**	**200,00**
1	03	01	12	203	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang disediakan	27 Sistim/Buah	1	0	0	0	-	1,00	3,70
1	03	01	12	204		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang	4 Laporan	-	0	0	0	-	-	-

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020 S/D 2024	REALISASI TERGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) (n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
							Daerah Kabupaten								
#	03	01	#	2.04	02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang**	**Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang**	**2 Laporan**	-	**0**	**0**	**0**	-	-	-
1	03	01	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Laporan	-	0	0	0	-	-	-

Terkait data Tabel di atas dapat dilihat bahwa Pengganggaran Program yang kosong pada tahun 2023 dan 2024 disebabkan terbatasnya anggaran yang diberikan sehingga banyak sub kegiatan yang belum berjalan dengan baik serta adanya Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Aturan Nomor 050-5899 Tahun 2021 yang mana Peraturan tersebut berubah lagi dengan 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Satuan Indikator Kinerja serta satuannya yang berubah sehingga target yang digunakan sudah tidak sesuai lagi dengan output indicator kinerja dan satuan jadi Target Kinerja dan Satuannya tidak terukur dengan baik.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu Tahun 2023

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Adapun Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

1. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
2. Tujuan yang dikehendaki
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
4. Forum Perangkat Daerah

Selain itu terurai diatas, penyusunan Rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Tahun 2024 memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 sebagi entry point dalam penyusun perencanaan Tahun 2025, dan

2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Alokasi Anggaran yang diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu menurut Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 **Rp. 226.263.243.016,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Tiga Ribu Enam Belas Rupiah)** dari keseluruhan adalah kegiatan yang terdiri dari 9 (Sembilan) Program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dan 51 (Lima Puluh Satu) Sub Kegiatan, yang terdiri dari :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 7 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian/Verifikasi Keuangan

2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan Yaitu :

3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 2 Sub Kegiatan Yaitu :

4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4.2 Bimbingan Teknis dan Implementasi Oeraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 8 Sub Kegiatan yaitu

5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

5.6 Penyediaan Bahan Material

5.7 Fasilitas Kunjungan Tamu

5.8 Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. **Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu**
   - **6.1** Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu**
   - 7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - 7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik,
   - 7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu**
   - 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - 8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Besar
   - 8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - 8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdiri dari 2 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut:**

1. **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
   - 1.1 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
   - 1.2 Normalisasi/Restorasi Sungai
   - 1.3 Operasi dan Pemeliharaan Sungai

2. **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
   - 1.1 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
   - 1.2 Pembangunan Bendung Irigasi
   - 1.3 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
   - 1.4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
   - 1.5 Rehabilitasi Bendung Irigasi
   - 1.6 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

C. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :**

1. **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**
   - 1.1 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
   - 1.2 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

D. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :**

1. **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**
   - 1.1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

E. **Program Penataan Bangunan Gedung terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :**

1. **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Srtifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**
   - 1.1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (PABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG
   - 1.2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfataan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
     Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

F. **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :**

1. **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**
   - 1.1 Penataan Bangunan dan Lingkungannya

G. **Program Penyelenggaran Jalan terdiri dari 1 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :**

1. **Penyelenggaran Jalan Kabupaten/Kota**
   - 1.1 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaran Jalan
   - 1.2 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
   - 1.3 Pembangunan Jalan
   - 1.4 Pelebaran Jalan Menuju Standar

1.5 Rekonstruksi Jalan

1.6 Rehabilitasi Jalan

1.7 Pemeliharaan Rutin Jalan

1.8 Pembangunan Jembatan

1.9 Rehabilitasi Jembatan

H. Program Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

1.1 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

I. Program Penyelenggaran Penataan Ruang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wialayah (RTRW) dan Rencana Rinci tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu telah melaksanakan 9 Program, 17 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan, terdiri dari 1 program penunjang/pendukung dengan 8 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan untuk program utama terdiri dari 8 Program, 9 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan. Realisasi capaian target kinerja 8 program utama adalah sebagai berikut:

a. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja atau hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (84,60%)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota (71,32%)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (64,71%)
4. Program Penataan Bangunan Gedung (95,32)
5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya (97,32)
6. Program Penyelenggaraan Jalan (85,16)
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi (94,67%)
8. Program Penyelenggaran Penataan Ruang (0%)

Melihat data diatas rata-rata Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

Sedangkan realisasi capaian target kinerja>100% untuk 6 Kegiatan penunjang/ pendukung adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (79,54%)
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (97,69%)
3. Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah (83,38%)
4. Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah (76,58)
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah (71,22%)
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (89,15)
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (91,57%)

Melihat data diatas rata-rata Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu masih ada 5 Kegiatan yang belum maksimal atau dibawah 90% target untuk memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (79,54%)
2. Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah (83,38%)
3. Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah (76,58)
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah (71,22%)
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (89,15)

b. Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu

- Ada beberapa kegiatan khususnya pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Program Penyelenggaran Jalan dimana kegiatan fisik belum selesai di akhir tahun serta untuk penyelenggaran jalan dimana kegiatan yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri hal ini disebabkan karena Terkendala oleh Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), dan juga Pekerjaan Konstruksi menggunakan Kontrak Bersyarat.
- Ada beberapa pekerjaan yang fisik, perencanaan, pengawasan serta administrasi telah mencapai 100% namun belum terbayarkan sebagai akibat tidak adanya

ketersediaan dana/anggaran di Kas Daerah dan juga belum ada transfer sisa Dana dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

- Adanya keterlambatan pengelola kegiatan, keterlambatan pencairan anggaran karena dalam pelaksanaan anggaran memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk revisi anggaran dan perencanaan kegiatan.
- Masih ada pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang lamban dalam penyerahan SPJ ke Bendahara Pengeluaran sehingga terlambatnya pengajuan GU berikutnya
- Lambatnya dalam pencairan keuangan kegiatan
- Masih rendahnya Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu untuk menunjang pencapaian kinerja
- Perubahan indicator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan
- Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas
- Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait dengan pelaksanaan/kegiatan yang diselenggarakan untuk kabupaten
- Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kabupaten/kota
- Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi factor penyebab

c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khsusnya dan kepada masyarakat pada umumnya
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu berdampak pada Laporan Kinerja Realisasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA
4. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan

5. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu :

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan keinginan yang dicapai.
2. Kepala Sub Bagian Keuangan memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk mengatur kembali teknis pencairan dana sesuai aliran kas yang tersedia
3. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani kegiatan
4. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan dikabupaten/kota
5. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu Tahun 2022 dan Tahun 2023

Alokasi Anggaran yang diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu menurut Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022 **Rp. 255.946.897.443,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).** dari keseluruhan adalah kegiatan yang terdiri dari 9 (Sembilan) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub Kegiatan. Sedangkan Alokasi Anggaran 2023 yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu menurut Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 226.263.243.016,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Belas Rupiah)** yang terdiri dari **9 (Sembilan) Program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan serta 50 (Lima Puluh) Sub Kegiatan.**

Adapun rincian pelaksanaan program dan kegiatan dan realisasi dan serapan anggaran tahun 2023 akan kami uraikan, sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 7 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 37.192.100,- terealisasi sebesar Rp.27.353.700,- atau 73,55%, dengan output 3 (Tiga) Dokumen
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 12.429.400,- terealisasi sebesar Rp.12.115.800,- atau 97,48%, dengan output 1 (Satu) Dokumen

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari rencana anggaran sebesar Rp. 8.955.501.339,- terealisasi sebesar Rp. 8.744.331.150,- atau 97,64%, dengan output Volume 2664 Orang/Bulan
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian/Verifikasi Keuangan SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp.342.420.000,- terealisasi sebesar Rp. 342.400.000,- atau 99,99%, dengan output 3 Dokumen
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dari rencana anggaran sebesar Rp.12.390.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.634.835,- atau 69,69%, dengan output 3 Laporan

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan Yaitu :

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp.10.482.880,- terealisasi sebesar Rp.8.740.205,- atau 83,38%, dengan output 3 (Tiga) Laporan

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 2 Sub Kegiatan Yaitu :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dari rencana anggaran sebesar Rp.44.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.002.900,- atau 76,58%, dengan output 2 Orang ASN
- Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dari rencana anggaran sebesar Rp.101.256.000,- terealisasi sebesar Rp.100.185.100,- atau 98,94%, dengan output 14 Orang ASN mengikuti Bimtek

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 8 Sub Kegiatan yaitu

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.11.385.400- terealisasi sebesar Rp.8.108.250,- atau 71,22%, dengan output 3 (Tiga) Paket
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 124.300.000,- terealisasi sebesar Rp.62.326.700,- atau 50,14%, dengan output 14 (Empat Belas) Paket terdiri dari Peralatan Komputer, Printer, AC
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.31.721.200,- terealisasi sebesar Rp.31.703.000,- atau 99,97%, dengan output 4 (Empat) Paket
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 22.032.500,- terealisasi sebesar Rp.21.872.330,- atau 99,27%, dengan output 4 (Empat) Paket
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dari rencana anggaran sebesar Rp.82.800.000,- terealisasi sebesar Rp.69.880.000,- atau 84,40%, dengan output 4 (Empat) Paket
- Penyediaan Bahan Material, dari rencana anggaran sebesar Rp. 53.346.760,- terealisasi sebesar Rp.50.315.000,- atau 94,32%, dengan output 4 (Empat) Paket
- Fasilitas Kunjungan Tamu, dari rencana anggaran sebesar Rp. 12.965.000,- terealisasi sebesar Rp.8.706.000,- atau 67,15%, dengan output 3 (Tiga) Laporan
- Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dari rencana anggaran untuk Luar Daerah sebesar Rp.502.494.900,- terealisasi sebesar Rp.497.943.722,- atau 99,09%, dengan output 3 (Tiga) Laporan

6. **Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu**
   - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 613.088.000,- terealisasi sebesar Rp.546.560.000,- atau 89,15%, dengan output 89,15%

7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu**
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp.25.200.000,- terealisasi sebesar Rp.25.200.000,- atau 100%, dengan output 3 (Tiga) Laporan
   - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp.168.001.024,- terealisasi sebesar Rp.140.071.183,-

atau 83,38%, dengan output 3 (Tiga) Laporan)

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.849.600.000,- terealisasi sebesar Rp.782.400.000,- atau 92,09%, dengan output 13 (Tiga) Laporan

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dari rencana anggaran sebesar Rp.180.465.530,- terealisasi sebesar Rp. 101.788.499- atau 56,40%, dengan output 47 Unit
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Besar, dari rencana anggaran sebesar Rp.400.822.000,- terealisasi sebesar Rp.400.809.334,- atau 100%, dengan output 24 Unit
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp.12.965.000,- terealisasi sebesar Rp.5.855.000,- atau 100%, dengan output 1 Unit
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp.401.558.804,- terealisasi sebesar Rp. 2.385.000,- atau 68,08%, dengan output 4.500 m2

A. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdiri dari 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.311.561.500,- terealisasi sebesar Rp.891.098.000 atau 67,94%, dengan output Volume 0,28 km

1.2 Normalisasi/Restorasi Sungai, dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.007.381.000,- terealisasi sebesar Rp.2.365.124.720,- atau 78,64%, dengan output Volume 22,21 km

1.3 Operasi dan Pemeliharaan Sungai, dari rencana anggaran sebesar Rp. 56.302.400,- terealisasi sebesar Rp.56.296.000 atau 99,99%, dengan output Volume 0,25 km

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, dari rencana anggaran sebesar Rp. 79.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 79.000.000 atau 98,68%, dengan output 1 (Satu)

Dokumen

2.2 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 99.989.805,- terealisasi sebesar Rp. 99.483.000,- atau 99,49%, dengan output Volume 44,39 Meter

2.3 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.907.955.374,- terealisasi sebesar Rp. 6.130.980.063,- atau 88,75%, dengan output Volume 1.861 Meter

2.4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.77.471.642,- terealisasi sebesar Rp. 3.063.886.652,- atau 99,56%, dengan output Volume 21.776,23 Meter

2.5 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 873.641.650,- terealisasi sebesar Rp. 799.927.631,- atau 91,58%, dengan output 69 D.I

B. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dari rencana anggaran sebesar Rp.2.311.601.000,- terealisasi sebesar Rp.2.116.297.700,- atau 77,47%, dengan output Volume 1 Liter/Detik

1.2 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, dari rencana anggaran sebesar Rp.797.399.000,- terealisasi sebesar Rp.400.599.000,- atau 50,24%, dengan output Volume 494 Sambungan Rumah (SR)

C. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.774.050.710,- terealisasi sebesar Rp. 3.089.197.850,- atau 64,71%, dengan output Volume 9.666 Meter

D. Program Penataan Bangunan Gedung terdiri dari 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (PABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG, dari rencana anggaran sebesar Rp. 91.774.210,- terealisasi sebesar Rp.91.568.270,- atau 99,78%, dengan output Volume 897 Dokumen

1.2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfataan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp.4.820.157.841,- terealisasi sebesar Rp.4.626.872.585,- atau 95,15%, dengan output Volume 6 Unit Bangunan Gedung

1.3 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp.3.619.382.766,- terealisasi sebesar Rp.3.413.198.360 atau 94,30%, dengan output Volume 3 (Tiga) Unit Bangunan Gedung

E. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.371.056.850,- terealisasi sebesar Rp.5.248.535.725,- atau 97,72%, dengan output Volume 5 (Lima) Kawasan

F. Program Penyelenggaran Jalan terdiri dari 1 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaran Jalan Kabupaten/Kota

1.1 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaran Jalan, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.600.000.000,- terealisasi sebesar Rp.1.345.001.000,- atau 84,06%, dengan Output 3,97 Ha

1.2 Survey Kondisi Jalan/Jembatan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.080.914.000,- terealisasi sebesar Rp.3.024.267.700,- atau 98,16%, dengan output 3 (Tiga) Dokumen

1.3 Pembangunan Jalan , dari rencana anggaran sebesar Rp. 59.443.849.719,- terealisasi sebesar Rp.46.882.081.190,- atau 91,08%, dengan output Volume 210,80 km

1.4 Pelebaran Jalan Menuju Standar , dari rencana anggaran sebesar Rp. 32.476.485.884- terealisasi sebesar Rp. 25.265.453.693,- atau 77,80%, dengan output Volume 48,40 km

1.5 Rekonstruksi Jalan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 47.238.688.430,- terealisasi sebesar Rp.45.311.021.112 atau 95,92%, dengan output Volume

44,16 km

1.6 Rehabilitasi Jalan, dari rencana anggaran sebesar Rp.7.901.512.000,- terealisasi sebesar Rp.7.900.513.080,- atau 99,99%, dengan output Volume 9,26 km

1.7 Pemeliharaan Rutin Jalan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.555.465.082,- terealisasi sebesar Rp.1.452.666.057- atau 40,86%, dengan output Volume 1,8 km

1.8 Pembangunan Jembatan , dari rencana anggaran sebesar Rp. 8.449.164.087,- terealisasi sebesar Rp.7.796.794.970 atau 92,28%, dengan output Volume 10 Unit Jembatan.

1.9 Rehabilitasi Jembatan , dari rencana anggaran sebesar Rp. 689.741.200,- terealisasi sebesar Rp.594.565.900 atau 86,20%, dengan output Volume 2 Unit Jembatan.

G. Program Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

1.1 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 124.016.600,- terealisasi sebesar Rp. 117.410.900,- atau 94,67%, dengan output Volume 48 Orang Peserta

H. Program Penyelenggaran Penataan Ruang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wialayah (RTRW) dan Rencana Rinci tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1.1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp. 474.176.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%, dengan output Volume 1 Dokumen

1.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang masih mengacu pada Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan public, sedangkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah

Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selalu mengedepankan standar pelayanan publik yang prima. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dan harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima, yaitu :

1. Rendahnya kualitas SDM, sehingga perlu adanya upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang profesional, berdisplin melalui kinerja yang lebih baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Pemutakhiran Sistem Informasi Infrastruktur Pekerjaan Umum berupa Data Base Jalan dan Jembatan, Data Base Jasa Konstruksi, Data Base Sistem Jaringan Irigasi dan Data Base keciptakaryaan serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum terlaksana secara optimal.
3. Masih kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Alokasi anggaran untuk diklat dan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan SDM masih rendah.

Keberhasilan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu dapat dilihat dari pencapaian Indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel T.C-30 sebagai berikut:

TABEL. 2.2

(TABEL T.C-30, LAMPIRAN PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUWU

NO	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI				PROYEKSI	
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(11)	(12)
1	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	IKK	26,00%	26,35%	27,27%	31,36%	34,49%	27,04%	35,27%	35,45%	30,17%	34,59%	36,13%
2	Tingkat mobilitasi (panjang jalan per luas wilayah)	IKK	0,87 %	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	68,31%	0,87%	0,87%	0,683%	0,87%	0.715%
3	Panjang jalan yang memiliki saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik (km)	IKK	1.393 km	3,008 km	3,108 km	3,208 km	3,308 km	3,091	5,415 km	6,028 km	9,666 km	1.000 km	3,408 km
4	Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/Talud/Bonjong (km)	IKK	700 km	700 km	700 km	700 km	700 km	1,916 km	4,586 km	4,586 km	1,799 km	2,074 km	2,374 km
5	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	IKK	19,00%	19,44%	22,80%	23,37%	23,95%	19,46%	17,76%	21,66%	23,34%	24,17%	24,85%
6	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	IKK	78%	80%	85%	90%	95%	100%	80%	82%	84%	85,00%	90,00%
7	Persentase irigasi dalam kondisi baik	IKK	37,24 %	41,55%	42,01	42,99	43,67	41,55%	47,56%	53,65%	60,39%	63,54%	67.13%
8	Persentase penduduk yang berakses air minum	IKK	80,00%	80,78%	84,09%	86,19%	88,35%	80,78%	81,40%	81,47%	81,83%	82,05%	82,57%

NO	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI				PROYEKSI	
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(11)	(12)
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	IKK	40,00%	48,80%	49,90%	51,15%	52,43	47,94%	68,36%	69,56%	69,88%	69,88%	70,15%
9	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang ditata	IKK	27,00%	27,98%	28,54%	29,87%	30,55%	37,12%	46,18%	46,50%	5,29%	5,65%	6,00%
10	Persentase Penyelesaian Dokumen dan Perencanaan Evaluasi Kinerja secara tepat waktu	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara tepat Waktu	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
12	Cakupan Penyelenggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
13	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
14	Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
15	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	IKK	92,36%	94,44 %	98,26%	98,61%	100%	100%	100%	100%	100%	98,26%	98,61%
16	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
17	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%

1.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu.

Beberapa permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah:

1. Kualitas dan kuantitas SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang masih kurang memadai.
2. Infrastruktur jalan belum mengakses seluruh wilayah.
3. Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan air minum.
4. Infrastruktur jalan penghubung dan jembatan belum mantap.
5. Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan air minum.
6. Pembangunan jaringan irigasi dan pengelolaan sungai, rawa dan pantai belum optimal.
7. Belum adanya IPLT untuk mengolah lumpur tinja yang ada pada septiktanck sesuai Standar
8. Regulasi lingkup kabupaten sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masih kurang.
9. Pelayananan gedung pemerintah dan manfaat jasa konstruksi bagi masyarakat belum optimal.
10. Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi.
11. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi belum memadai.

Dari uraian tersebut di atas, permasalahan pokok beserta akar permasalahannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Bidang Sumber Daya Air		
Pembangunan jaringan irigasi dan pengelolaan sungai, rawa dan pantai belum optimal	Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah Petugas di Lapangan dan Fasilitas pendukung jaringan irigasi masih kurang
		Adanya kerusakan jaringan irigasi karena kurangnya pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan (OP) pada Jaringan Irigasi
		Terjadinya konflik masyarakat antara pemakai air, pengelola air., keterbatasan air dan pengusaha air
		Adanya pengaruh kondisi cuaca dengan curah hujan yang tinggi yg menyebabkan banjir atau terjadinya musim kemarau sehingga terjadi kekeringan
	Lemahnya perencanaan jaringan irigasi dan air baku serta penatagunaan sungai, rawa dan pantai	Terdapat kawasan irigasi yang belum tercantum dalam regulasi lingkup kabupaten
		Terjadi alih fungsi lahan milik masyarakat pada kawasan irigasi
		Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi.
		Pola permukiman penduduk di Kabupaten Luwu kebanyakan menggunakan sempadan sungai dan pantai
		Kawasan hulu sungai dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan dan kawasan pertanian
		Kurangnya sarana air minum pedesaan

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Kurangnya dukungan masyarakat
		Kurangnya tenaga terampil pengolahan air bersih di pedesaan
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan		
Infrastruktur jalan belum mengakses seluruh wilayah	Pembangunan Kondisi Jaringan Jalan	Infrastruktur jalan yang telah terbangun masih jauh dari angka jaringan jalan dalam kondisi baik terlihat dari masih banyaknya jalan perintisan berupa tanah dan kerikil yang termasuk dalam kondisi tidak baik (sedang/buruk)
	Pembangunan Jembatan	Infrastruktur jalan yang telah terbangun masih banyak yang belum terhubung dengan infrastruktur jembatan yang memadai
	Masih terdapat kampung yang belum terakses jalan dan jembatan	Pembukaan jalan terhambat oleh lahan perkebunan masyarakat, kawasan pertambangan, kawasan hutan
		Jarak antar kampung berjauhan
		Kondisi medan yang berbukit
		Struktur tanah yang relatif labil
	Badan jalan yang telah terbangun cepat mengalami kerusakan	Curah hujan yang tinggi
		Beban lalu lintas yang tidak terkontrol
		Struktur tanah yang relatif labil
		Sanitasi alami yang kurang baik

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Kualitas dan kuantitas item konstruksi jalan tidak maksimal	Keterbatasan jumlah dan kapasitas PPK, PPTK dan tenaga pengawas lapangan
		Penyedia jasa konstruksi yang berkualitas masih kurang
		Keterbatasan *raw* material yang tersedia di pasar lokal
		Konsultan Pengawas yang kompeten terbatas jumlahnya
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
		Kegiatan pelatihan bagi aparatur sangat terbatas
Bidang Cipta Karya		
Rendahnya Kesadaran Masyarakat tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Rendahnya Bangunan Dengan Izin	Rendahnya Bangunan dengan Izin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat akan Peraturan yang mengharuskan setiap warga negara indonesia untuk memiliki Izin Persetujuan Bangunan Gedung dimana kewajiban untuk melengkapi setiap pembangunan gedung dengan PBG berlaku kepada setiap orang, dan tidak ada pengecualian untuk penduduk asli sekalipun yang sudah terlanjur membangun bangunan tanpa adanya PBG dan Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Izin Persetujuan Bangunan Gedung untuk pemilik bangunan itu sendiri
		Belum ada SDM di Bidang Cipta Karya yang memiliki sertifikasi Bangunan Gedung Hijau dan sertifikasi Pengkaji Teknis Bangunan Gedung

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Perlunya ada peraturan yang mengatur tentang jasa gambar dan lisensi yang dipersyaratkan dalam pengurusan PBG
		Rendahnya Bangunan dengan Izin juga terjadinya akibat Pemanfaatan Lahan yang tidak sesuai dengan arahan Tata Ruang
Pelayananan gedung pemerintah belum maksimal	Kualitas konstruksi bangunan kurang maksimal	Keterbatasan tenaga pengawas kegiatan/lapangan
		Kontraktor kurang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan
		Konsultan Pengawas yang kompeten terbatas jumlahnya
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
		Kurangnya sarana air minum pedesaan
Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan air minum	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum	Banyaknya sarana air minum yang terbangun tetapi belum mampu menjangkau ke masyarakat dikarenakan jaringan pipa yang terbangun belum sampai ke rumah-rumah warga dan kurangnya sambungan rumah (SR)
	Kurangnya penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah pedesaan dan perkotaan.	Kurangnya koordinasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
		Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi.
		Kurangnya pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun.
		Kurangnya sarana air minum pedesaan
		Kurangnya dukungan masyarakat
		Kurangnya tenaga terampil pengolahan air bersih di pedesaan

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
		Kurangnya sarana air minum pedesaan
Bidang Jasa Konstruksi		
Manfaat jasa konstruksi bagi masyarakat belum optimal		Kurangnya pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun.
		Masih ada gedung kantor pemerintah yang belum memenuhi standar
	Tenaga kerja lokal kurang mampu bersaing dibidang jasa konstruksi	Belum pernah dilakukan pembinaan terhadapa masyarakat jasa konstruksi
		Belum tersedianya data dan informasi jasa konstruksi
		Belum ada Regulasi di bidang jasa konstruksi
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
		Masih banyak aparatur yang belum memiliki sertifikasi pengadaan barang/ jasa
		Kegiatan pelatihan bagi aparatur sangat terbatas
Bidang Tata Ruang		
Tata ruang kurang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan tata ruang belum dapat dilaksanakan	Kurangnya koordinasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
		Pelaksanaan dan pengawasan Perda RTRW kurang maksimal
		Rendahnya kualitas pengelolaan data dan

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		sistem informasi.
		Belum tersedia Perda RDTR dan Peraturan Zonasi
	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang belum optimal	Masih menggunakan aturan RTRWP Provinsi Kaltim
		Kurangnya koordinasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan
		Keterbatasan tenaga teknis pemanfaatan ruang
		Prasarana dan sarana pendukung masih terbatas
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
		Kegiatan pelatihan bagi aparatur sangat terbatas
Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan		
Infrastruktur jalan penghubung dan jembatan belum dalam kondisi mantap	Umur jalan yang dibangun tidak sesuai dengan umur rencana	Curah hujan yang tinggi
		Beban lalu lintas yang tidak terkontrol
		Penyedia jasa konstruksi yang kurang profesional
		Sanitasi alami yang kurang baik
	Penanganan preservasi jalan dan jembatan tidak maksimal	Kurang prasarana dan sarana
		Luas wilayah yang ditangani
		Database tidak tersedia
		Tidak tersedia pos anggaran untuk kegiatan

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		tanggap darurat
		Kewenangan dalam penanganan ruas jalan
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
		Kegiatan pelatihan bagi aparatur sangat terbatas

Selain permasalahan tersebut di atas, perlu juga dilihat beberapa isu atau permasalahan yang berasal dari faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke depan baik itu dari dinamika lokal/regional, dinamika nasional, dan atau bahkan dinamika internasional. Adapun isu atau permasalahan dari faktor eksternal adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan kemajuan teknologi yang diprediksi akan semakin maju lima tahun kedepan. Kondisi ini perlu disikapi dengan baik agar pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada.
2. Keterbukaan informasi publik. Salah satu asas dalam *good governance* adalah transparansi. Oleh karena itu menjadi wajib bagi Pemerintah Kabuapten Luwu untuk selalu menyampaikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan kepada publik. Apalagi sekarang sudah ada peraturan perundangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.
3. Keterbatasan pendanaan yang memberikan konsekuensi sebagian besar usulan pembangunan baik itu di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Jasa Konstruksi belum dapat terpenuhi;

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Mengemban Misinya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Luwu Tidak Hanya Dipengaruhi Oleh Faktor Internal, Tetapi Juga Oleh Faktor Eksternal. Oleh Karena Itu Perlu Di Analisis Semua Peluang Dan Ancaman Yang Dihadapi Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Yang Juga Berpotensi Menjadi Tantangan Maupun Peluang Pengembangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi.

Tantangan Yang Dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam Mengembangkan Pelayanan Perangkat Daerah Dapat Diidentifikasi Sebagai Berikut:

a. Regulasi Peraturan perundangan nasional cepat berubah sehingga perlu waktu untuk penyesuaian dan peraturan di tingkat daerah masih belum tersedia secara lengkap.
b. Jumlah penyedia jasa di bidang ke-PU-an yang mempunyai kualitas baik masih terbatas.
c. Kerangka pendanaan tahunan maupun jangka menengah sulit diprediksi sehingga menghambat penyusunan rencana kegiatan.
d. Kewenangan bidang pekerjaan umum yang sangat strategis kurang diikuti dengan peningkatan kapasitas aparatur.

adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dinas pekerjaan umum dan tata ruang dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Adanya Bantuan Pendanaan Dari Pusat Maupun Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Masuknya Penataan Ruang Dalam Organisasi Dinas Memudahkan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur.
b. Dana Transfer Yang Besar, Baik Yang Bersumber Dari Pusat Maupun Daerah Ke Setiap Kampung Membantu Pengembangan Infrastruktur Khususnya Di Wilayah Kampung.
c. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Yang Diamanatkan Dalam Uu Nomor 23 Tahun 2014, Yaitu:

Tabel 2.4
Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014

Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
	b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/ kota .
3. Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.
5. Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota.
6. Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota.
7. Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8. Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.
9. Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota
10. Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
	b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota.
	c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).
	d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11. Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Sedangkan kerangka pikir penyusunan strategi tersebut mempertimbangkan sinergisme antara tiga faktor utama pembangunan, yaitu: (1) sektor unggulan (prioritas pembangunan); (2) kondisi eksisting masing-masing wilayah pembangunan; dan (3) bidang masalah yang akan ditangani.

Berdasarkan hasil analisis, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain: struktur organisasi yang sangat memadai; cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi; kapasitas SDM baik dari jumlah, kemampuan maupun pengalaman yang dimiliki; fasiltas yang dimiliki; anggaran yang dikelola; hasil dari pembangunan infrastruktur yang telah dimanfaatkan masyarakat; serta keterpaduan/interaksi dengan *stakeholders* yang sudah semakin meningkat.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan yang baik diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM, memantapkan kelembagaan dalam mendukung program dan Kegiatan Dinas, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka kondisi yang diinginkan antara lain adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM terhadap penguasaan keahlian (*skill*) yang sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, Sumber daya air, kecipta karyaan, penataan ruang serta jasa konstruksi, dan sarana kebinamargaan ;
3. Meningkatnya pemenuhan prasarana jalan dan jembatan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan;
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
5. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sumber daya air berbasis partisipasi pemilik kepentingan;
6. Meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi kelayakan teknis dan administrasi;
7. Meningkatnya akses pelayananan sanitasi dan peningkatan kualitas sanitasi masyarakat;
8. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun dalam pembiayaannya;

9. Tersedianyan Sarana IPLT untuk menunjang penanganan air limbah dan pengembangan permukiman untuk mengolah lumpur tinja yang adan pada septiktank sesuai dengan standar
10. Meningkatnya keterpaduan penanganan drainase;
11. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
12. Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan;
13. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
14. Meningkatnya koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam konteks **Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah** Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 yang dimaksud dengan Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat *signifikan* bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Isu-isu strategis tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab untuk menjadikan Kabupaten Luwu sebagai tujuan investasi, tujuan pariwisata maupun pemodelan pembangunan wilayah yang berhasil. Ada beberapa Isu Strategis yang menjadi bahan kajian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, diantaranya adalah :

1. Ketersediaan regulasi di tingkat daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.
2. Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi pada era globalisasi.
3. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga lingkungan dalam rangka meningkatkan dan menjaga hasil pembangunan infrastruktur.
4. Meningkatnya jumlah penduduk diperkotaan yang mempengaruhi beban terhadap infrastruktur maupun lingkungan.
5. Pengelolaan data hasil pembangunan maupun rencana pembangunan.
6. Pengendalian pemanfaatan tata ruang.
7. Kondisi jalan/jembatan yang rusak berat dan belum terbuka masih tinggi terutama jalan yang menghubungkan kawasan andalan, kawasan strategis dan pusat-pusat distribusi;
8. Kebutuhan alternatif ruas jalan/jembatan baru serta pelebaran jalan/jembatan untuk mengantisipasi kawasan-kawasan yang memiliki tingkat kepadatan arus lalu lintas yang tinggi dalam rangka menunjang pergerakan arus barang dan jasa.
9. Kecenderungan penurunan kualitas dan tingkat pelayanan jalan/jembatan.
10. Perluasan jangkauan layanan irigasi pada lahan potensi pertanian serta mempertahankan tingkat pelayanan irigasi;
11. Rawan banjir/ genangan air terutama kawasan perkotaan;

12. Optimalisasi kelembagaan pengelolaan sumber daya air;
13. Belum terpenuhinya akses pelayanan air bersih bagi masyarkat perdesaan;
14. Belum adanya IPLT untuk mengolah lumpur tinja yang ada pada septiktanck sesuai standar
15. Belum optimalnya sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan.
16. Kondisi bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
17. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang menjadi peraturan Daerah yang memiliki kekuatan hukum;
18. Kurangnya data dan informasi bidang ke-PU-an dalam menunjang Pelaksanaan Program dalam bidang infrastruktur.

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk membandingkan Antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu. Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam Rancangan RKPD.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaran pemerintahan daerah. Program Pioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu.

Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD, sebesar **Rp. 131.545.249.614,- (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah)** pada Rancangan Akhir RKPD, tapi tidak semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Akhir RKPD diakomodirr ke dalam Renja, karena mengingat keterbatasan anggaran kemungkinan terdapat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak terakomodir kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta kemungkinan terdapat besaran rupiah yang berbeda dari Renja ke RKA, adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat terlihat pada tabel TC. 31 berikut ini :

Tabel 2.5

(Tabell T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kab. Luwu

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.702.200.438	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.807.717.454	
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen	51.668.998	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen	57.740.135	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	38.768.789	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	45.000.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12.900.209	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12.740.135,00	
II.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu**	**100 Persen**	**10.099.950.070,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu**	**100 Persen**	**10.298.051.667,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1296 Orang/bulan	9.748.518.468,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1296 Orang/bulan	9.942.931.917,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	338.920.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	342.420.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.511.602,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.699.750,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100 Persen	12.493.778,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100 Persen	12.699.750,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.493.778,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.699.750,00	
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100 Persen	131.821.964,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100 Persen	148.218.150,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	30.072.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	44.400.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	101.749.964,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	103.818.150,00	
V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	973.203.730,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	913.759.035,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.408.601,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.670.035,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	274.810.200,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	150.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	31.232.167,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.504.800,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	0,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	22.859.550,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	68.400.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	84.870.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	75.696.133,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	54.679.650,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.166.275,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	7.175.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.490.354,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	550.000.000,00	
VI.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	100 Persen	39.997.000,00	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	100 Persen	40.000.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	39.997.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40.000.000,00	
VII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100 Persen	1.056.481.087,00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100 Persen	984.926.025,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	24.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	16.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	4 Laporan	157.681.087,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	177.326.025,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
			Disediakan					yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	874.800.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	790.800.000,00	
VIII.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**533.943.959,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**725.825.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	108.361.400,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	102.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	24 Unit	400.022.559,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	24 Unit	410.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.110.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	13.325.000,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.450.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	200.000.000,00	
B.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Persentase irigasi dalam kondisi baik**	**11,40 Angka 68.00 %**	**17.639.097.559,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Persentase irigasi dalam kondisi baik**	**72.00 % 12.87 Angka**	**17.503.603.174,00**	
I.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Lokasi Sungai yang dilakukan Pengelolaan SDA**	**40 Titik/Lokasi**	**4.150.049.723,00**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Lokasi Sungai yang dilakukan Pengelolaan SDA**	**40 Titik/Lokasi**	**4.408.726.587,00**	
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	32,736 KM	100.001.520,00	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	32,736 KM	206.126.587,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	8,00 KM	1.950.002.640,00	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	10 KM	1.500.000.000,00	
	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0,30 KM	1.900.042.298,00	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0,5 KM	2.285.750.000,00	
	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,25 KM	200.003.265,00	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0	300.000.000,00	
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	116.850.000,00	
II.	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Luas Lahan yang terlayani sistem irigasi primer dan sekunder yang terlayani dengan baik**	**8904 Ha**	**13.489.047.836,00**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Luas Lahan yang terlayani sistem irigasi primer dan sekunder yang terlayani dengan baik**	**8904 Ha**	**13.094.876.587,00**	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,30 KM	600.042.584,00	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,50 KM	206.126.587,00	
	Pembangunan Bendung Irigasi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1 Bendung	1,00	Pembangunan Bendung Irigasi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1 Bendung	500.000.000,00	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,5 KM	6.950.023.304,00	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2,00 KM	6.918.750.000,00	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM	951.661.772,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM	768.750.000,00	
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	3 Bendung	3.948.726.995,00	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	2 Bendung	3.331.250.000,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	4,83 KM	1.038.593.180,00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	4,83 KM	970.000.000,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Bendung	0,00	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	7 Bendung	200.000.000,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	0,00	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	200.000.000,00	
C.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**	**82.05 %**	**2.085.000.001,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**	**82.05 %**	**2.732.500.000,00**	
I.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan	70.63 %	2.085.000.001,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan	71.42 %	2.732.500.000,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	0 Dokumen	0,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	150.000.000,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0,5-1 Liter/Detik	750.000.000,00	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1-1,5 Liter/Detik	684.500.000,00	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0,5-1 Liter/Detik	700.000.000,00	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0	512.500.000,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1,00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	750.000.000,00	
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500 SR	635.000.000,00	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	750 SR	635.500.000,00	
D.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**		**Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan**	**31 Persen**	**150.000.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**		**Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan**	-	**0,00**	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
I.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah TPA yang dikelola melalui sistem pengelolaan persampahan	1 BUAH	150.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah TPA yang dikelola melalui sistem pengelolaan persampahan	-	0,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	0	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2 Dokumen	150.000.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	0	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0	0,00	
E.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik**	**76,88 %**	**1.133.210.105,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik**	**76,88 %**	**400.000.000,00**	
I.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani dengan sistem air limbah domestik**	**77,15 %**	**1.133.210.105,00**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani dengan sistem air limbah domestik**	**77,03 %**	**400.000.000,00**	
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	20 M^3/Hari	933.210.105,00	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	20 M^3/Hari	400.000.000,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	0,00	
F.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		**Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)**	**0,9716 %**	**4.900.255.038,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		**Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)**	**0,9716 %**	**2.666.250.000,00**	
I.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase jalan utama yang telah memiliki sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai**	**0,9716 Persen**	**4.900.255.038,00**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase jalan utama yang telah memiliki sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai**	**1,9716 Pers en**	**2.666.250.000,00**	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	6600 M	4.400.255.038,00	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	7500 M	1.666.250.000,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	
	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2 Dokumen	-	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0	0,00	
G.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik**	**76,88 %**	**1.133.210.105,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik**	**76,88 %**	**400.000.000,00**	
I.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani dengan sistem air limbah domestik	77,15 %	1.133.210.105,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani dengan sistem air limbah domestik	77,03 %	400.000.000,00	
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	20 M^3/Hari	933.210.105,00	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	20 M^3/Hari	400.000.000,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	0,00	
G.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		**Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)**	**0,9716 %**	**4.900.255.038,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		**Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)**	**0,9716 %**	**2.666.250.000,00**	
I.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase jalan utama yang telah memiliki sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai**	**0,9716 Persen**	**4.900.255.038,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		**Persentase jalan utama yang telah memiliki sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai**	**1,9716 Pers en**	**2.666.250.000,00**	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	6600 M	4.400.255.038,00	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	7500 M	1.666.250.000,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	1 Kawasan Genangan	0,00	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	2 Kawasan Genangan	500.000.000,00	
H.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**		**Persentase luas permukiman yang dikembangkan**	**0,025 %**	**1.949.499.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**		**Persentase luas permukiman yang dikembangkan**	**0,025 %**	**717.500.000,00**	
I.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Luas Lahan Infrastruktur yang dikembangkan	0,025 Persen	1.949.499.000,00	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Luas Lahan Infrastruktur yang dikembangkan	0,034 Perse n	717.500.000,00	
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	1 Ton/hari	1.949.499.000,00	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	1 Ton/hari	717.500.000,00	
H.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		**Rasio kepatuhan IMB kabupaten**	**10,73 %**	**1.200.142.771,00**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		**Rasio kepatuhan IMB kabupaten**	**10,73 %**	**3.665.000.000,00**	
I.	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		**Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan gedung**	**809 Angka**	**1.200.142.771,00**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		**Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan gedung**	**820 Angka**	**3.665.000.000,00**	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	3 Bangunan Gedung	1.100.140.600,00	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	13 Bangunan Gedung	2.562.500.000,00	
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	1,00	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	7 Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	800 Dokumen	100.002.170,00	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	800 Dokumen	102.500.000,00	
I.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**		**Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya**	**0,00002 %**	**4.302.004.181,00**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**		**Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya**	**0,00002 %**	**922.500.000,00**	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
I.	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**2 Angka**	**4.302.004.181,00**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**3 Angka**	**922.500.000,00**	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	4.302.004.181,00	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3 Kawasan	922.500.000,00	
J.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	0	**Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten**	**700 Angka**	**83.921.528.426,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten**	**700 Angka**	**87.676.000.000,00**	
I.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	36,13 Persen	83.921.528.426,00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	37,25 Perse n	87.676.000.000,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	0	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	3 Dokumen	199.500.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	0	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen	1.750.000.000,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
	Penggantian Jembatan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Diganti	2 Jembatan	0,00	Penggantian Jembatan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Diganti	4 Jembatan	300.000.000,00	
	Pembangunan Jalan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dibangun	140 KM	22.239.086.998,00	Pembangunan Jalan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dibangun	150 KM	26.000.000.000,00	
	Rekonstruksi Jalan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5 KM	26.628.031.864,00	Rekonstruksi Jalan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	6,00 KM	28.600.000.000,00	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	10 KM	3.292.541.358,00	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	11 KM	6.500.000.000,00	
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	5 KM	1.449.997.440,00	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	6 KM	1.400.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan	0,00	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan	300.000.000,00	
	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	900.124.228,00	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	4 Jembatan	1.720.000.000,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
		Kel/Desa					Kel/Desa				
	Pembangunan Jembatan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Jembatan	19.214.656.761,00	Pembangunan Jembatan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dibangun	27 Jembatan	14.200.000.000,00	
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	2 Jembatan	200.320.890,00	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	2 Jembatan	200.000.000,00	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	300 KM	1.250.000.000,00	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	400 KM	1.250.000.000,00	
	Rehabilitasi Jalan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM	6.797.183.847,00	Rehabilitasi Jalan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	10 KM	3.600.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,00 KM	1.000.055.454,00	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2 KM	1.206.000.000,00	
	Pelebaran Jembatan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	1 Jembatan	750.029.586,00	Pelebaran Jembatan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	2 Jembatan	650.000.000,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
K.	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		**Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**29,38 angka 81,14 angka**	**432.541.891,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		**Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**100 angka**	**501.087.827,00**	
I.	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**		**Jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah dilatih**	**284 Orang**	**284.247.715,00**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**		**Jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah dilatih**	**350 Orang**	**323.263.460,00**	
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	60 Orang	284.247.715,00	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	66 Orang	323.263.460,00	
II.	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten yang diselenggarakan**	**1 Sistim Informasi**	**141.363.956,00**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten yang diselenggarakan**	**70 Sistim Informasi**	**172.824.367,00**	
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	3 Perangkat Pendukung	59.151.500,00	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	2 Perangkat Pendukung	73.082.500,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan	8,00 Dokumen	33.221.478,00	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi	10 Dokumen	50.000.000,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
	Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	Kabupaten/Kota yang Disediakan			Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan			
	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	48.990.978,00	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	49.741.867,00	
III.	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Rasio paket pekerjaan konstruksi yang mendapat pengawasan cakupan Kab./Kota**	**50 Persen**	**6.930.220,00**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**		**Rasio paket pekerjaan konstruksi yang mendapat pengawasan cakupan Kab./Kota**	**70 Persen**	**5.000.000,00**	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	10 Bangunan Konstruksi	6.930.220,00	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 Bangunan Konstruksi	5.000.000,00	
I.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**Ketaatan terhadap RTRW**	**5,33 Persen**	**932.410.056,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**Ketaatan terhadap RTRW**	**5,33 Persen**	**1.585.000.000,00**	
I.	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase ketersediaan RTRW dan RRTR Kabupaten**	**13,04 Persen**	**52.114.500,00**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**		**Persentase ketersediaan RTRW dan RRTR Kabupaten**	**17,39 Perse n**	**560.000.000,00**	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	500.000.000,00	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	52.114.500,00	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	60.000.000,00	
II.	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten**	**3 Dokumen**	**550.000.000,00**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten**	**2 Dokumen**	**700.000.000,00**	
	Penyusunan Peta Dasar	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	0,00	Penyusunan Peta Dasar	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	150.000.000,00	
	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	550.000.000,00	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	550.000.000,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.)	
III.	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten	1 Laporan	330.295.556,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten	1 Laporan	325.000.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	236.395.556,00	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	200.000.000,00	
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	93.900.000,00	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	125.000.000,00	
				JUMLAH	131.545.249.614				JUMLAH	131.550.660.763	

1.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Organisasi Perangkat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan rapat koordinasi serta pelaksanaan musrenbang di tingkat kabupaten/kota.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jarring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Hasil usulan program dan kegiatan masyarakat disajikan dalam bentuk seperti dibawah ini :

Tabel 2.6
(Tabel T-C. 32 Lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)
Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kab. Luwu

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKTOR OUTPUT	KET.
A.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Irigasi dalam kondisi baik**	**44,54 Persen**	
I.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lokasi Sungai yang dilakukan Pengelolaan SDA**	**20 Lokasi/Titik**	
1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	32,736 KM	
2	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	8,00 KM	
3	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0,30 KM	
4	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,25 KM	
II.	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas Lahan yang terlayani sistem irigasi primer dan sekunder yang terlayani dengan baik**	**69 D.I**	
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,30 KM	
2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,5 KM	
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM	
4	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	3 Bendung	
5	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	4,83 KM	
B.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**	**82.05 %**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKTOR OUTPUT	KET.
E.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase luas permukiman yang dikembangkan	0,025 %	
I.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Lahan Infrastruktur yang dikembangkan	0,025 Persen	
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	1 Ton/hari	
F.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	10,73 %	
I.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan gedung	809 Angka	
1	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	3 Bangunan Gedung	
2	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	
G.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya	0,00002 %	
I.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2 Angka	
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKTOR OUTPUT	KET.
H.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten**	**700 Angka**	
I.	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton**	**36,13 Persen**	
1	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	140 KM	
2	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5 KM	
3	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	10 KM	
4	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	5 KM	
5	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Ipelihara Secara Rutin	2 Jembatan	
6	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	
7	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Jembatan	
8	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	2 Jembatan	
9	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	300 KM	
10	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM	
11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,00 KM	
12	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	1 Jembatan	

BAB III
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan potensi dan kompetensi yang dimiliki. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya an potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga

merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan potensi dan kompetensi yang dimiliki. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencananaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 dan Daerah Otonomi Baru (DOB). Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Kabupaten Luwu yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2024 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 - 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Luwu Tahun 2025 - 2026.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Namun dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tersebut maka Renstra disusun untuk periode 2 (dua) tahun yaitu periode tahun

2025 - 2026. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program,dan kegiatan selama kurun waktu 2 (dua) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua perangkat daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk kurun waktu 2025 - 2026 Bappeda Kabupaten Luwu tidak Menyusun RPJMD, namun Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 - 2026.

Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa RPD menjadi rujukan atau pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas–tugas pembangunan prasarana dan sarana dasar yang dapat meningkatkan pelayanan bidang–bidang strategis dan sektor–sektor andalan dalam mendukung aksebilitas baik lokal antar daerah, regional maupun nasional dituntut untuk menyusun Rencana Strategis dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta diharapkan mampu menyiapkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Stakeholder.

Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2025-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu selanjutnya akan menjadi Pedoman Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata (PUTR)

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Luwu Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN RPD	SASARAN	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja TA. 2025
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan			
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Baik
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	76,8
			(BB)
	Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	32,54%
		Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	70,63%
		Rasio Jaringan Irigasi	70,63%
		Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	5,33%
Meningkatnya daya saing daerah			
Meningkatkan Sektor Lapangan Usaha	**Meningkatkan ketersediaan Lapangan Usaha**	**Indeks Daya Saing Daerah**	3,20%
		Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	10,73%
		Rasio Tenaga Terampil Konstruksi yang Bersertifikat	64,00%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **Organisasi Perangkat Daerah** yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sedangkan **Kegiatan** merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa **Organisasi Perangkat Daerah** sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa SDM, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   Program ini memiliki Indikator Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan :

   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan :

      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan

      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan ;

      - Rekonsilialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan ;

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan ;

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan ;

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan ;

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terdiri dari Sub Kegiatan ;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini memiliki Indikator Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik terdiri dari Kegiatan :

a. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan :
   - Operasi dan Pemeliharaan Sungai
   - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
   - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
   - Pembangunan Tanggul Sungai

b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan :
   - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
   - Pembangunan Bendung Irigasi
   - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
   - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
   - Rehabilitasi Bendung Irigasi
   - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum

Program ini memiliki Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kotaterdiri dari Kegiatan :

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini memiliki Indikator Persentase Wilayah Perkotaan yang telah dilayani oleh Sistem Persampahan ini terdiri dari Kegiatan

a. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah

Program ini memiliki Indikator Persentase Wilayah Perkotaan yang telah dilayani dengan Sistem Air Limbah Domestik ini terdiri dari Kegiatan

b. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Drainase

Program ini memiliki Indikator Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) terdiri dari Kegiatan :

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Pembangunan Sistim Drainase Lingkungan
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

7. Program Pengembangan Permukiman

Program ini memiliki Indikator Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten terdiri dari Kegiatan :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

8. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini memiliki Indikator Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten terdiri dari Kegiatan :

b. Kegiatan Penyelenggaran Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Stratgis Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelenggaran Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Setifikat Laik Fungsi (SLE), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
- Rehabilitasi, Renovasi, dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis untuk Daerah Kabupaten/Kota

9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini memiliki Indikator Persentase ruang public yang berubah peruntukkannya terdiri dari Kegiatan :

a. Kegiatan Penyelenggaran Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

10. Program Penyelenggaran Jalan

Program ini memiliki Indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten terdiri dari Kegiatan

a. Kegiatan Penyelenggaran Jalan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaran Jalan dan Jembatan
- Pembangunan Jalan
- Rekonstruksi Jalan
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Pelebaran Jalan Menuju Standar
- Rehabilitasi Jembatan
- Pembangunan Jembatan

- Pemeliharaan Berkala Jembatan
- Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Pelebaran Jembatan

11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini terdiri memiliki Indikator Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi terdiri dari Kegiatan :

1. Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
   - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
2. Penyelenggaran Sistim Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
   - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
   - Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
3. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfataan Jasa Konstruksi
   - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfataan Produk dan Konstruksi Kabupaten/Kota

12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini memiliki Indikator Ketaatan terhadap RTRW terdiri dari Kegiatan :

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota :

- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Peta Dasar
- Penyusunan RDTR Kabupaten/KOta

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
- Operasional Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang

Adapun Penyusunan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan beberapa hal/pertimbangan sebagai berikut :

1. Tidak bisa ditunda dan memiliki dampak besar terhadap upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat
2. Isu-Isu Strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama
4. Mendesak dan penting serta realistis untuk dilaksanakan
5. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra-Organisasi Perangkat Daerah
6. Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Pusat, Provinsi dan Daerah
7. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah
8. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra-Organisasi Perangkat Daerah.

Prioritas daerah dalam rencana program dan kegiatan sesuai tema RPD tahun 2025 yaitu Pengembangan Komoditas Unggulan dan Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa pembangunan infrastruktur dapat membuka akses terhadap kesempatan

kerja, pelayanan investasi serta dapat menjadi pendorong/siklus kegiatan ekonomi khususnya ekonomi lokal.

Tolok ukur yang ingin dicapai dalam program prioritas tersebut adalah meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan daerah. Adapun target keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan infrastruktur dalam kondisi mantap dan dapat menurunkan angka kemiskinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA

Bersifat Indikatif berarti bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Dana Indikatif beserta sumbernya sebesar ±10% berdasarkan pagu indikatif, dimana sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2025 berasal dari sumber dana Retribusi Jasa Usaha, DAU, DAU yang diperuntukan untuk PU, DAK dan Dana Hibah. Adapun sumber pendanaan lain seperti APBD Propinsi, DAK Kementerian atau Lembaga dan APBN tetap dibutuhkan, dimana kebutuhan dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah.

Alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPD, RKPD, Renstra ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Dan Renja ORGANISASI PERANGKAT DAERAH disusun berdasarkan:

1. Pendekatan Kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. Urusan Wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah.

Pendekatan Kinerja dimaksudkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran / hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dimaksudkan bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dimaksudkan bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Mengacu pada SPM dimaksudkan bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

4.2 Rencana Kerja

Rencana Kerja merupakan Dokumen Rencana yang memuat Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, adapun jumlah program yang direncanakan untuk tahun anggaran 2025 *sebanyak 12 Program dengan 24 Kegiatan serta 66 Sub Kegiatan*, Penyusunan Rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu Tahun 2025 tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4.3 Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan, kebutuhan pendanaan tahun anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu direncanakan sebesar **RP 131.545.249.614,- (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah)** yang bersumber dari Dana Retribusi Jasa Usaha, Pendapatan Hasil Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang ditentukan Penggunannya Bidang Pekerjaan Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih terinci rencana pendanaan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 tercantum pada Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Luwu.

TABEL 4.1
(TABEL TC.33-LAMPIRAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TA. 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN LUWU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**131.545.249.614,00**					**131.550.660.763,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**131.545.249.614,00**					**131.550.660.763,00**
	1,03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**131.545.249.614,00**					**131.550.660.763,00**
1	1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah***	**100 Persen**	**12.899.560.586,00**				**100 Persen**	**13.181.219.762,00**
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu*	100 Persen	51.668.998,00			Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	100 Persen	57.740.135,00
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	38.768.789,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	2 Dokumen	45.000.000,00
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12.900.209,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	1 Laporan	12.740.135,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu*	100 Persen	10.099.950.070,00			Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	100 Persen	10.298.051.667,00
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1296 Orang/bulan	9.748.518.468,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	1296 Orang/bulan	9.942.931.917,00
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	338.920.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	2 Dokumen	342.420.000,00
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.511.602,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	1 Laporan	12.699.750,00
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD*	100 Persen	12.493.778,00		RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	100 Persen	12.699.750,00
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.493.778,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	2 Laporan	12.699.750,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN dengan predikat kinerja baik*	100 Persen	131.821.964,00			Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	100 Persen	148.218.150,00
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	30.072.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	1 Orang	44.400.000,00
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	101.749.964,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	16 Orang	103.818.150,00
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah*	100 Persen	973.203.730,00			Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	100 Persen	913.759.035,00
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.408.601,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	4 Paket	11.670.035,00
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	274.810.200,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	4 Paket	150.000.000,00
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	31.232.167,00	Kab. Luwu, Belopa Utara,	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan	4 Paket	32.504.800,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
						Sabe		Perangkat Daerah		
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	4 Paket	22.859.550,00
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	68.400.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	4 Dokumen	84.870.000,00
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	75.696.133,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	4 Paket	54.679.650,00
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.166.275,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	4 Laporan	7.175.000,00
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	502.490.354,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	4 Laporan	550.000.000,00
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik*	100 Persen	39.997.000,00			-	100 Persen	40.000.000,00
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	39.997.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	40.000.000,00
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 Persen	1.056.481.087,00			Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	100 Persen	984.926.025,00
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	24.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	4 Laporan	16.800.000,00
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	157.681.087,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	4 Laporan	177.326.025,00
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	874.800.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	4 Laporan	790.800.000,00
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen	533.943.959,00			Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	100 Persen	725.825.000,00
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	108.361.400,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	47 Unit	102.500.000,00
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar								
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	24 Unit	400.022.559,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	24 Unit	410.000.000,00
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.110.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah	20 Unit	13.325.000,00
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.450.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	RETRIBUSI JASA USAHA	Aparatur dilingkungan Perangkat Daerah		200.000.000,00
2	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Persentase irigasi dalam kondisi baik***	**11.40 Angka 68.00 %**	**17.639.097.559,00**				**72.00 % 12.87 Angk a**	**17.503.603.174,00**
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lokasi Sungai yang dilakukan Pengelolaan SDA*	40 Titik/Lokasi	4.150.049.723,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	40 Titik/Loka si	4.408.726.587,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai								
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	32,736 KM	100.001.520,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	32,736 KM	206.126.587,00
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai								
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	8,00 KM	1.950.002.640,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	10 KM	1.500.000.000,00
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing								
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0,30 KM	1.900.042.298,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	0,5 KM	2.285.750.000,00
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai								
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,25 KM	200.003.265,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)		300.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	0 Dokumen	116.850.000,00
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Luas Lahan yang terlayani sistem irigasi primer dan sekunder yang terlayani dengan baik*	8904 Ha	13.489.047.836,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	8904 Ha	13.094.875.587,00
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan								
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,30 KM	600.042.584,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	0,50 KM	206.126.587,00
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1 Bendung	1,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Bendung	500.000.000,00
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan								
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,5 KM	6.950.023.304,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2,00 KM	6.918.750.000,00
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan								
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM	951.661.772,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 KM	758.750.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi								
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	3 Bendung	3.948.726.995,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Bendung	3.331.250.000,00
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan								
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	4,83 KM	1.038.593.180,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	4,83 KM	970.000.000,00
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi								
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Bendung	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	7 Bendung	200.000.000,00
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	5 Dokumen	200.000.000,00
3	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota***	**82.05 %**	**2.085.000.001,00**				**82.05 %**	**2.732.500.000,00**
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan*	70.63 %	2.085.000.001,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	71.42 %	2.732.500.000,00
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	0 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Dokumen	150.000.000,00
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0,5-1 Liter/Detik	750.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1-1,5 Liter/Detik	684.500.000,00
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0,5-1 Liter/Detik	700.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)		512.500.000,00
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	5 Unit	750.000.000,00
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500 SR	635.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	750 SR	635.500.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
4	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	***Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan***	**31 Persen**	**150.000.000,00**				-	**0,00**
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah TPA yang dikelola melalui sistem pengelolaan persampahan*	1 BUAH	150.000.000,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	-	0,00
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan								
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)		0,00
5	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik***	**76,88 %**	**1.133.210.105,00**				**76,88 %**	**400.000.000,00**
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani dengan sistem air limbah domestik*	77,15 %	1.133.210.105,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	77,03 %	400.000.000,00
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	20 M³/Hari	933.210.105,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	20 M³/Hari	400.000.000,00
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Dokumen	0,00
6	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)***	**0,9716 %**	**4.900.255.038,00**				**0,9716 %**	**2.696.250.000,00**
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jalan utama yang telah memiliki sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai*	0,9716 Persen	4.900.255.038,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1,9716 Persen	2.696.250.000,00
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan								
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	6600 M	4.400.255.038,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	7500 M	1.696.250.000,00
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Dokumen	500.000.000,00
	1.03.05.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan								
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)		0,00
5	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik***	**76,88 %**	**1.133.210.105,00**				**76,88 %**	**400.000.000,00**
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani dengan sistem air limbah domestik*	77,15 %	1.133.210.105,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	77,03 %	400.000.000,00
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	20 M³/Hari	933.210.105,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	20 M³/Hari	400.000.000,00
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Dokumen	0,00
5	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)***	**0,9716 %**	**4.900.255.038,00**				**0,9716 %**	**2.666.250.000,00**
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jalan utama yang telah memiliki sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai*	0,9716 Persen	4.900.255.038,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1,9716 Persen	2.666.250.000,00
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan								
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	6600 M	4.400.255.038,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	7500 M	1.666.250.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan								
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Dokumen	500.000.000,00
	1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan								
			Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	1 Kawasan Genangan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Kawasan Genangan	500.000.000,00
7	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	***Persentase luas permukiman yang dikembangkan***	**0,025 %**	**1.949.499.000,00**				**0,025 %**	**717.500.000,00**
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Luas Lahan Infrastruktur yang dikembangkan*	0,025 Persen	1.949.499.000,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	0,034 Perse n	717.500.000,00
	1.03.07.2.01.0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota								
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	1 Ton/hari	1.949.499.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Ton/hari	717.500.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
6	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Rasio kepatuhan IMB kabupaten***	**10,73 %**	**1.200.142.771,00**				**10,73 %**	**3.665.000.000,00**
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan gedung*	809 Angka	1.200.142.771,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	820 Angka	3.665.000.000,00
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	3 Bangunan Gedung	1.100.140.600,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	13 Bangunan Gedung	2.562.500.000,00
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	1,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	7 Bangunan Gedung	1.000.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG								
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	800 Dokumen	100.002.170,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	800 Dokumen	102.500.000,00
9	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya***	**0,00002 %**	**4.302.004.181,00**				**0,00002 %**	**922.500.000,00**
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya*	2 Angka	4.302.004.181,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	3 Angka	922.500.000,00
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya								
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	4.302.004.181,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	3 Kawasan	922.500.000,00
10	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten***	**700 Angka**	**83.921.528.426,00**				**700 Angka**	**87.676.000.000,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton*	36,13 Persen	83.921.528.426,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	37,25 Persen	87.576.000.000,00
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	3 Dokumen	199.500.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	5 Dokumen	1.750.000.000,00
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan								
			Jumlah Jembatan yang Diganti	2 Jembatan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	4 Jembatan	300.000.000,00
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Panjang Jalan yang Dibangun	140 KM	22.239.086.998,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	150 KM	26.000.000.000,00
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan								
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5 KM	26.628.031.864,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	6,00 KM	28.600.000.000,00
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	10 KM	3.292.541.358,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	11 KM	6.500.000.000,00
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar								
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	5 KM	1.449.997.440,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	6 KM	1.400.000.000,00
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	3 Jembatan	300.000.000,00
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan								
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	900.124.228,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	4 Jembatan	1.720.000.000,00
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan								
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Jembatan	19.214.656.761,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	27 Jembatan	14.200.000.000,00
	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan								
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	2 Jembatan	200.320.890,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Jembatan	200.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan								
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	300 KM	1.250.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	400 KM	1.250.000.000,00
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan								
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM	6.797.183.847,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	10 KM	3.600.000.000,00
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan								
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,00 KM	1.000.055.454,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 KM	1.206.000.000,00
	1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan								
			Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	1 Jembatan	750.029.586,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Jembatan	650.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
11	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi***	**29,38 angka 81,14 angka**	**432.541.891,00**				**100 angka**	**501.087.827,00**
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah dilatih*	284 Orang	284.247.715,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	350 Orang	323.263.460,00
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis								
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	60 Orang	284.247.715,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	66 Orang	323.263.460,00
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten yang diselenggarakan*	1 Sistim Informasi	141.363.956,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	70 Sistim Informasi	172.824.367,00
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi								
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	3 Perangkat Pendukung	59.151.500,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Perangkat Pendukung	73.082.500,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	8,00 Dokumen	33.221.478,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	10 Dokumen	50.000.000,00
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi								
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	48.990.978,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Layanan Informasi	49.741.867,00
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Rasio paket pekerjaan konstruksi yang mendapat pengawasan cakupan Kab./Kota*	50 Persen	6.930.220,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	70 Persen	5.000.000,00
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota								
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	10 Bangunan Konstruksi	6.930.220,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	20 Bangunan Konstruksi	5.000.000,00
12	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Ketaatan terhadap RTRW***	**5,33 Persen**	**932.410.056,00**				**5,33 Persen**	**1.585.000.000,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan RTRW dan RRTR Kabupaten*	13,04 Persen	52.114.500,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	17,39 Perse n	560.000.000,00
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota								
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu, Bua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Dokumen	500.000.000,00
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang								
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1 Laporan	52.114.500,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Laporan	60.000.000,00
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten*	3 Dokumen	550.000.000,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Dokumen	700.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar								
			Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	0,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Peta	150.000.000,00
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota								
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	550.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	2 Dokumen	550.000.000,00
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten*	1 Laporan	330.295.556,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Laporan	325.000.000,00
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang								
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	236.395.556,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Dokumen	200.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang								
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	93.900.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD, daerah, provinsi, Nasional)	1 Laporan	125.000.000,00
	JUMLAH				131.545.249.614,00					131.550.660.763,00

BAB V
PENUTUP

3.1 Catatan Penting

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu Tahun 2025 telah disusun dalam *Dokumen Rencana Kerja (Renja)*. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen Perencanaan ditingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu telah merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 12 Program, 24 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja OPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kabupaten Luwu.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator serta Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 yang bersandar pada RPD dan Renstra Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

Selanjutnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Luwu Tahun 2025. Keberhasilan Pelaksanakan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaanya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 , akan dilakukan penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan perangkat daerah dengan RKPD sebagi implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah perangkat daerah yang tertuang dalam Perubahan Renstra yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2025-2026. Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

   - Melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangan terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indicator perangkat daerah yang telah ditetapkan.
   - Menjaga keselarasan dan konsistensi Antara RKPD, renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Antara lain program, kegiatan, sub kegiatan, indicator dan target

b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaanya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap Renja Tahun 2025 yang pelaksanaannya dilaksanakan secara triwulan.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebiajakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Luwu Tahun 2025 untuk kemudian dituangkan dalam DPA.

Belopa, 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUWU

Ir. IKHSAN ASAAD, ST., MT.,CCMS
PANGKAT : PEMBINA TK.I
NIP. 19770912 200601 1 009

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025



KECAMATAN WALENRANG
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Walenrang Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan RENJA ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Walenrang dengan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

Disamping berfungsi sebagai dokumen pedoman kerja, RENJA diharapkan dapat menjadi acuan visi, misi dan strategi seluruh Aparat Kecamatan Walenrang dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera dalam nuansa religi.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Walenrang Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih.

Walenrang, Juli 2024

Camat Walenrang

WELBERD EKKE, S.Pi, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP.19691013 199510 1 001

DAFTAR ISI

Teks **Halaman**

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-12
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-24

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKATDAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Kecamatan Walenrang III-1
3.3 Program dan Kegiatan III-2

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
5.1 Catatan Penting …… V-1
5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan V-1
5.3 Rencana Tindak Lanjut…….. V-1

DAFTAR TABEL

Nomor tabel	Teks	Halaman
Tabel II.1	Perkiraan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024	II- 3
Tabel II.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Walenrang dan Pencapaian Renstra Kecamatan Walenrang Sampai dengan Tahun 2024……	II- 6
Tabel II.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Walenrang ……	II-13
Tabel II.4	Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	II-16
Tabel II.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	II-25
Tabel III.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	III-4
Tabel IV.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran dan dan Rencana Perhitungan Renja Kecamatan Walenrang Tahun 2025	IV-3

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban Pemerintah adalah menciptakan regulasi pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan Undang-Undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut, dibutuhkan suatu Pemerintah yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh Bangsa dan Negara yaitu norma-norma yang terkandung didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai suatu Pemerintah yang bersih dan berwibawa dibutuhkan suatu Sistim Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabilitas, Transparan dan Taat Hukum.

Pemerintahan di tingkat Kecamatan sebagai ujung tombak dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, menghadapi suatu tugas yang sangat kompleks, sehingga membutuhkan suatu langkah-langkah atau tindakan yang tepat yang diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan atau Rencana Kerja (RENJA) yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2024. Selain memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, RENJA adalah suatu dokumen yang sangat penting karena memuat beberapa hal sebagai berikut :

a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sesuai dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

b. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.

c. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Walenrang disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor, 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran BAB I - 1 Renja Tahun 2025 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1011 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025.

1.3. Maksud danTujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Kerja dimaksudkan untuk merumuskan Rencana Kerja Kecamatan Walenrang Kab. Luwu untuk periode 1 (satu) tahun, tahun anggaran 2025

1.3.2. Tujuan

Renja Kecamatan Walenrang Tahun 2025 disusun dengan tujuan :

a. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Rencana Kerja Kecamatan Walenrang Kab. Luwu bertujuan untuk menyediakan dokumen rencana kerja perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

b. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Walenrang Tahun Anggaran 2025.

1.4. SistematikaPenulisan

Renja Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BABI. PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Walenrang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bagian Pendahuluan memuat informasi tentang :

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Walenrang, Proses Penyusunan Renja Kecamatan Walenrang, keterkaitan antara Renja Kecamatan Walenrang dengan dokumen RKPD, RENSTRA, Renja Kabupaten serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Walenrang.

- **BABII. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

Bab ini menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bagian yaitu :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Walenrang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan Walenrang.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Walenrang.

2.4 Rivew terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan Rencana Kerja perangkat Kecamatan Walenrang. Bab ini terdiri dari beberapa sub bagian yaitu :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Walenrang.

3.3 Program dan Kegiatan.

- **BABIV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

- **BAB V. PENUTUP**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB. II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN WALENRANG TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Kecamatan Walenrang tahun 2023 didasarkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Walenrang Tahun 2019-2024.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Walenrang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2024

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Walenrang tahun lalu, dan realisasi Perubahan Renstra Kecamatan Walenrang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Walenrang dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Walenrang.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

     Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

     - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
     - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

     Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah :

  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Administrasi Umum Perangkat Daerah.

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan da Peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

   Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah :

   - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

     Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa adalah :

     - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

   - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

     Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

adalah :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah adalah :

  - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

- Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

  Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

  - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja pada tahun 2023, tertera pada table II.1

Tabel II. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
Kecamatan Walenrang dan Pencapaian Renstra Kecamatan Walenrang sampai dengan Tahun 2023 dan 2024
Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu, Kecamatan Walenrang

Perangkat Daerah : Kecamatan Walenrang

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) Tahun 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Kecamatan Walenrang) Tahun 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TAHUN 2023	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7						**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**									
7	**01**					**Administrasi Pemerintahan**									
7	**01**	**21**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**
7	**01**	**21**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**
7	01	21	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	8	2	2	2	100%	2	6	75%
7	01	21	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	4	1	0	0	100%	0	2	50%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) Tahun 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Kecamatan Walenrang) Tahun 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TAHUN 2023	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	21	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	4	1	0	0	100%	0	2	50%
7	01	21	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	4	1	0	0	100%	0	2	50%
7	01	21	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	4	0	0	0	100%	0	2	50%
7	01	21	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	20	4	4	4	100%	4	16	80%
7	**01**	**21**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	1752	456	420	420	100%	420	1.332	76,03%
7	01	21	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1(satu) tahun	240	60	60	60	100%	60	180	75%
7	01	21	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4	1	1	1	100%	1	3	75%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) Tahun 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Kecamatan Walenrang) Tahun 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TAHUN 2023	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	21	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	4	1	1	1	100	1	3	75%
7	**01**	**21**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	8	2	2	2	100%	2	6	75%
7	**01**	**21**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pemenuhan administrasi perkantoran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	1	1	1	100%	1	3	75%
7	01	21	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	48	12	12	12	100%	12	36	75%
7	01	21	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	48	12	12	12	100%	12	36	75%
7	01	21	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	863	107	232	195	84%	250	612	71%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) Tahun 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Kecamatan Walenrang) Tahun 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TAHUN 2023	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**21**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyedia Jasa Surat Menyurat yang disediakan	192	48	48	48	100%	48	144	75%
7	01	21	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	96	24	24	24	100%	24	72	75%
7	01	21	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	240	60	60	60	100%	60	180	75%
7	**01**	**21**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	8	8	8	8	100	8	8	100%
7	**01**	**21**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) Tahun 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Kecamatan Walenrang) Tahun 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TAHUN 2023	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**21**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	8	8	8	100	100	8	8	100%
7	**01**	**21**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	1	100	1	1	100	1	1	100%
7	01	21	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	4	1	0	0	100	0	2	50%
7	**01**	**21**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100%**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) Tahun 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Kecamatan Walenrang) Tahun 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TAHUN 2023	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**21**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rupaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100%**
7	01	21	04	2.01	01	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	1	0	0	0	0	1	100%
7	01	21	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	1656	1656	0	0	0	0	1656	100%
7	**01**	**21**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100%**
7	01	21	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	0	0	0	0	2	0	0%
7	**01**	**21**	**06**			**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100**	100	100	100	100	**100**	**100**	**100%**
7	**01**	**21**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100**	100	100	100	100	**100**	**100**	**100%**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) Tahun 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Kecamatan Walenrang) Tahun 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KEC. WALENRANG s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA KEC. WALENRANG TAHUN 2023	REALISASI RENJA KEC. WALENRANG TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	21	06	2.01	03	Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	8	8	8	100	8	8	100%

Meskipun kegiatan-kegiatan yang ditetapkan telah mencapai target sesuai dengan yang direncanakan namun ada 3 (tiga) masalah pokok yang perlu ditingkatkan agar kinerja pelayanan Aparat Kecamatan dapat lebih dimaksimalkan serta pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Masalah tersebut adalah :

- Gedung kantor serta fasilitasnya (meja, computer, motor dinas dan kursi) tidak mencukupi.
- Dana untuk peningkatan mutu aparat (pelatihan) tidak mencukupi.
- Dana operasional untuk kegiatan penguluhan serta monitoring dan evaluasi yang masih sangat rendah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2014-2019) di Kecamatan Walenrang belum disusun Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Walenrang, sehingga belum ada Indikator yang akan kita gunakan sebagai dasar didalam Analisis Kinerja Pelayanan. Untuk memudahkan analisis kinerja pelayanan Tahun Anggaran 2014-2019, maka kita menggunakan Indikator Pelayanan pada Tahun Anggaran 2019-2024. Penilaian terhadap indikator didasarkan pada hasil wawancara terhadap masyarakat yang dilayani dan ketersediaan laporan-laporan berupa adminitasi keuangan, LPPD, dan Perubahan RENSTRA. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat Daerah Kecamatan Walenrang, tertera pada tabel II.2.

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Walenrang

Kabupaten Luwu

NO.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				CAPAIAN REALISASI %		PROYEKSI %		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13
1	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	Target Terpenuhi
2	Nilai SAKIP Kecamatan Walenrang			Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
3	Nilai IKM atas Pelayanan Aparat Kecamatan			Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mencapai sinergitas didalam pelaksanaan pembangunan, maka ada 2 (dua) hal yang sangat menentukan yaitu musyawarah perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta konsistensi Pemerintah terhadap hasil keputusan bersama. Keputusan itu menjadi landasan didalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Desa.

Ada beberapa tantangan dan peluang yang kita hadapi didalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan yang nampak didalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Walenrang adalah :

- Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan.
- Rendahnya kualitas SDM Aparatur dalam menghadapi perkembangan IPTEK yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat sehari hari.
- Kurangnya tingkat kesadaran dan Disiplin Pegawai untuk menunjang Kinerja Pemerintahan.
- Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sehingga Pemerintah Kecamatan tidak mendapat informasi yang akurat tentang kegiatan tersebut sehingga menyulitkan didalam proses pengawasan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Semakin berkurangnya semangat atau budaya gotong royong Masyarakat sehingga sangat menyulitkan didalam penyelesaian suatu permasalahan di Desa/Kelurahan.

Untuk menetralisir masalah tersebut terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Peluang- peluang tersebut adalah :

- Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, merupakan peluang dalam rangka peningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.
- Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
- Perkembangan teknologi informasi yang membuka peluang bagi masyarakat Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupannya.
- Prioritas Pembangunan Nasional yang mengutamakan pembangunan daerah pinggiran atau daerah pedesaan.

Diantara beberapa tantangan dan hambatan serta peluang, ada beberapa tantangan yang harus sesegera mungkin diantisipasi (isu yang strategis) agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan atau dapat berjalan dengan baik. Isu-isu tersebut adalah :

- Sumberdaya aparatur (kualitas dan kuantitas aparatur) masih rendah, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan tugas, pengawasan pembangunan dan penguasaan teknologi.
- Belum optimalnya peran serta masyarakat didalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Pemerintah serta pembangunan swadaya yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- Masih rendahnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang hukum.

Ketiga permasalahan ini sangat membutuhkan prioritas penyelesaian agar pelayanan kepada masyarakat serta kemampuan Aparat Kecamatan Walenrang di dalam bidang perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dapat ditingkatkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil Analisis Kebutuhan pada Tahun 2025. Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2026 maka beberapa program yang ada dalam Rancangan Awal RKPD mengalami perubahan Nomenklatur. Rivew terhadap Rancangan Awal RKPD pada Tahun Anggaran 2025 tertera pada table II.3.

Tabel II.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kecamatan Walenrang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
								NASIONAL	DAERAH			
2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	KECAMATAN WALENRANG				**2.908.731.000,00**							**3.511.800.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.908.731.000,00**							**3.511.800.000,00**
7.01	**KECAMATAN**				**2.908.731.000,00**							**3.511.800.000,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**2.858.631.000,00**						**-**	**3.446.800.000,00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %	-	2.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	100 %	2.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	2 Dokumen	1.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	4 Laporan	1.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %	-	2.678.240.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	100 %	2.854.000.000,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan	476 Orang/bulan	2.633.000.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	420 Orang/bulan	2.800.000.000,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											

		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	50 Dokumen	42.240.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	-	50 Dokumen	50.000.000,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	-	1 Laporan	2.000.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/T riwulana n/Semeste	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	-	1 Laporan	2.000.000,00

		ran SKPD										
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %	-	6.000.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	-	100 %	6.000.000,00
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
		Jumlah Laporan Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	-	2 Laporan	6.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	-	87.500.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	-	100 %	245.000.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket	5.000.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	1 Paket	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
		-	10 Paket	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	10 Paket	100.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	500.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	1 Paket	49.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5 Paket	6.000.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	2 Paket	6.000.000,00
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material											

		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	25.000.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	5 Paket	25.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	250 Laporan	50.000.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	300 Laporan	60.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	-	1.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	100 %	250.000.000,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel											
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	10 Unit	500.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	4 Unit	200.000.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	4 Unit	500.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	5 Unit	50.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	-	51.800.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	100 %	54.800.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	24 Laporan	14.400.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	8 Laporan	14.400.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	17.000.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	24 Laporan	20.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36 Laporan	20.400.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	12 Laporan	20.400.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	-	32.091.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	100 %	35.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	32.091.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	8 Unit	35.000.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**4.000.000,00**						**-**	**10.000.000,00**

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	100 %	-	2.000.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	-	100 %	5.000.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
		Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamata n	8 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	-	4 Dokumen	5.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	100 %	-	2.000.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	-	100 %	5.000.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
		Jumlah Laporan Peningkat an Efektifitas Pelaksana an Pelayanan kepada Masyarak at di Wilayah	8 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	-	4 Laporan	5.000.000,00

		Kecamatan										
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**	**-**	4.500.000,00						**-**	5.000.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100 %	-	4.500.000,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an Penguatan Daya Saing Daerah	-	100 %	5.000.000,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakat an	4.500.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an Penguatan Daya Saing Daerah	-	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %									

7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakat an	240.400.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	DAU Kelurahan	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an Penguatan Daya Saing Daerah		2 Lembaga Kemasyarakatan	250.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**	**-**	**2.000.000,00**						**-**	**5.000.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	100 %	-	2.000.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	-	100 %	5.000.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	-	4 Laporan	5.000.000,00

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**	**-**	**2.000.000,00**						**-**	**5.000.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100 %	-	2.000.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	-	100 %	5.000.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamata n	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an	-	4 Dokumen	5.000.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**	**-**	**37.600.000,00**						**-**	**40.000.000,00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 %	-	37.600.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintah an Yang Optimal	-	100 %	40.000.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											

		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	37.600.000,00	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	-	4 Dokumen	40.000.000,00
J U M L A H					**3.149.131.000,00**							**3.761.800.000,00**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penetapan program-program yang akan dilaksanakan didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang dihasilkan melalui kesepakatan di dalam Musrenbang tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Penetapan kegiatan ini didasarkan pada kebutuhan pokok masyarakat dengan mempertimbangkan isu – isu strategis didalam masyarakat.

BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maka setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Pada tingkat Kabupaten perencanaan tersebut tertuang dalam bentuk Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PRPJP), Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RENSTRA dan RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD tersebut maupun yang dilakukan atas dukungan partisipasi masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan perencanaan yang diamanatkan ini maka sangat dibutuhkan tenaga atau aparat perencana yang handal serta proses perencanaan yang matang dan konsistensi yang baik didalam melaksanakan segala rencana yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan

disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang tercipta jika tujuan telah tercapai. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kecamatan Walenrang secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dalam penetapan tujuan dan sasaran kita harus mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dalam suatu organisasi.

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Luwu, dalam menuntukan Tujuan dan Sasaran, Kecamatan Walenrang merujuk pada visi Kabupaten Luwu yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yaitu ***"KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI".*** Untuk mewujudnya visi tersebut, misi Perubahan RPJMD yang diemban Kecamatan Walenrang adalah misi pertama yaitu "**Mewujudkan pemerintahan yang Profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel".**

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskanlah tujuan RENJA Kecamatan Walenrang Tahun 2023 yaitu :

- Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
- Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah :

- Meningkatkan kualitas koordinasi, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
- Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja dan pendanaan Renja Kacamatan Walenrang Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 yang

didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomdir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan perencana, peneltian dan pengembangan.

Rencana Kerja Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu pada RKPD Tahun 2024, adalah sebagaimana berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
    - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
        - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
        - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
    - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
        - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
    - Administrasi Umum Perangkat Daerah
        - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
        - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
        - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        - Penyediaan Bahan/Material
        - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        - Pengadaan Mebel
        - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
        - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
     - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
     - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
     - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
     - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
     - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
     - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
     - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

BAB. IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan jumlah pendanaan untuk setiap kegiatan di Kecamatan Walenrang pada Tahun Anggaran 2024, membutuhkan anggaran sebesar Rp. 3.120.941.898,- (Tiga milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Anggaran ini digunakan untuk membiayai 3 (tiga) Program Kerja yang terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Program kerja dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

   Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.862.273.778,- (Dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah). Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 800.000,-
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.703.818.000,-
   - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 4.800.000,-
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 72.535.578,-
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 50.157.000,-
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 30.163.200,-

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

   Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 245.918.120,- (dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh rupiah). Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

   - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Rp. 4.500.000,-
   - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebesar Rp. 241.418.120,-

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

   Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.750.000,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

   Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

   - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 12.750.000,-

Tabel : IV. 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran dan dan Rencana Perhitungan

Renja Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Tahun 2025

KODE						PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA PERHITUNGAN			JUMLAH	LOKASI	KET
								VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
7	01	21				KECAMATAN					3.360.592.145	Kantor Camat Walenrang	
7	01	21	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	%		3.041.392.148	Kantor Camat Walenrang	
7	01	21	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100	%		2.000.000	Kantor Camat Walenrang	
7	01	21	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	Dok		1.000.000	Kantor Camat Walenrang	
7	01	21	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	4	Lap		1.000.000	Kantor Camat Walenrang	
7	01	21	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen adeministrasi keuangan secara tepat waktu	100	%		2.835.758.286	Kantor Camat Walenrang	
7	01	21	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	476	OB		2.785.598.286	Kantor Camat Walenrang	
7	01	21	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50	Dok		47.160.000	Kantor Camat Walenrang	

7	**01**	**21**	**01**	**2.02**	**05**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**1**	**Lap**		**1.500.000**	**Kantor Camat Walenrang**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.02**	**07**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD**	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**1**	**Lap**		**1.500.000**	**Kantor Camat Walenrang**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD**	100	%		**4.800.000**	**Kantor Camat Walenrang**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.03**	**06**	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**2**	**Lap**		**4.800.000**	**Kantor Camat Walenrang**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100**	**%**		**90.784.122**	**Kantor Camat Walenrang**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.06**	**01**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**6**	**Paket**		**8.320.800**	**Kantor Camat Walenrang**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.06**	**07**	**Penyediaan Bahan / Material**	**Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan**	**6**	**Paket**		**38.012.322**	**Kantor Camat Walenrang**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.06**	**09**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**250**	**Lap**		**44.461.000**	**Kantor Camat Walenrang**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi Baik**	100	%		**19.700.100**	**Kantor Camat Walenrang**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.07**	**06**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**1**	**Unit**		**19.700.100**	**Kantor Camat Walenrang**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa**	**100**	**%**		**67.860.000**	**Kantor Camat Walenrang**	

7	**01**	**21**	**01**	**2.08**	**01**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**24**	**Lap**		**24.000.000**	**Kantor Camat Walenrang**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.08**	**02**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**24**	**Lap**		**19.860.000**	**Kantor Camat Walenrang**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.08**	**04**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**36**	**Lap**		**24.000.000**	**Kantor Camat Walenrang**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**		**40.179.740**	**Kantor Camat Walenrang**	
7	**01**	**21**	**01**	**2.09**	**02**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**8**	**Unit**		**40.179.740**	**Kantor Camat Walenrang**	
7	01	21	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	100	%		**249.199.997**	**Kantor Camat Walenrang**	
7	**01**	**21**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa**	**100**	**%**		**4.800.000**	**Kantor Camat**	
7	**01**	**21**	**03**	**2.01**	**03**	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**	**4**	**Lembaga**		**4.800.000**	**Kantor Camat**	
7	**01**	**21**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**100**	**%**		**244.399.997**	**Kantor Kelurahan Bulo**	
7	**01**	**21**	**03**	**2.02**	**01**	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**2**	**Lembaga**		**244.399.997**	**Kantor Kelurahan Bulo**	

7	01	21	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	100	%		45.000.000	Kantor Camat Walenrang	
7	01	21	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100	%		45.000.000	Kantor Camat Walenrang	
7	01	21	05	2.01	02	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	Dok		45.000.000	Kantor Camat Walenrang	
7	01	21	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	%		25.000.000	Kantor Camat Walenrang	
7	01	21	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	%		25.000.000	Kantor Camat Walenrang	
7	01	21	06	2.01	08	Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dok		25.000.000	Kantor Camat Walenrang	

BAB. V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan / Catatan Penting

Rencana Kerja Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Walenrang Tahun 2025-2026 dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur didalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Renstra berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan sebagai pengendali kinerja tiap tahun melalui Renja-PD dan dipertanggungjawabkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Walenrang.

Rencana Kerja Kecamatan Walenrang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada triwulan akhir Tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Walenrang.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindaklanjut program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Walenrang pada tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 menetapkan 4 program dan 11 kegiatan serta 19 Sub Kegiatan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Walenrang Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 merupakan

dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) Tahun kedepan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Walenrang Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Walenrang tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Demikian penyusunan dokumen Renja ini masih jauh dari kreterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Luwu untuk kesempurnaan Dokumen dan pelaksanaannya

Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Walenrang Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu.

Batusitanduk, Juli 2024

CAMAT WALENRANG

WELBERD EKKE, S.Pi, M.SI
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19691013 199510 1 001